Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

LKPJ Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta



2025

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2024. Secara substantif, LKPJ merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan daerah. Melalui LKPJ, akan terlihat proses pembangunan dan hasilnya serta akan terlihat pula tingkat Keberhasilannya, objektivitas, kemanfaatan. di samping itu tentu saja LKPJ juga sebagai bahan evaluasi untuk masukan dalam perencanaan selanjutnya. Oleh karenanya, LKPJ Gubernur DIY ini disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah DIY selama tahun 2025.

LKPJ Gubernur DIY Tahun 2025 sebagai dokumen yang akan menggambarkan hasil kinerja pelaksanaan APBD DIY pada Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022–2027. Efektivitas pelaksanaan pembangunan Pemda DIY dapat diukur berdasar capaian Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda, Indikator Program Pemda, dan Indikator Kinerja Utama terhadap pelaksanaan urusan. Adapun Ruang lingkup dokumen LKPJ Tahun 2025 meliputi: (1) Pendahuluan; (2) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Hasil Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah; (4) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; (5) Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY; (6) Program Strategis DIY; (7) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan (8) Penutup.

Hasil penyelenggaraan urusan pembangunan Pemda DIY Tahun 2025 selayaknya disukuri karena mendekati optimal, cukup banyak indikator-indikator kinerja yang telah melampaui target, hal ini bisa menjadi penyemangat untuk bisa meningkat lebih baik lagi ke depan. Pemda DIY dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2025, menghadapi berbagai tantangan antara lain masih adanya krisis global, konflik regional di Timur Tengah, kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada efisiensi/pengetatan anggaran daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk berupaya lebih bersinergi di tahun perencanaan berikutnya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, diharapkan laporan ini akan mendapatkan masukan dan saran perbaikan untuk rekomendasi pembangunan ke depan, terutama catatan dan rekomendasi dari DPRD DIY. Terlebih mengingat bahwa DPRD sesuai regulasi bersama Kepala Daerah merupakan sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Masukan dan saran tersebut diharapkan menjadi semangat kolaborasi dalam kebersamaan Nyawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh dalam membangun DIY. Mari kita senantiasa bersyukur dan berdoa serta berjuang berusaha bersama untuk kemajuan masyarakat DIY, yang lebih sejahtera dan bermartabat. Dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita senantiasa mendapat keberkahan-Nya, amin.

Sekian, Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, Maret 2026
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **III**

DAFTAR TABEL ..... **XXXIV**

DAFTAR GAMBAR ..... **LVIII**

BAB I PENDAHULUAN **1–1**

A. DASAR HUKUM **1–1**

B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG **1–7**

1. Visi Jangka Panjang 1–7
2. Misi Jangka Panjang 1–8

C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH **1–14**

1. Visi 1–14
2. Misi 1–18
3. Tujuan 1–19
4. Sasaran 1–20

D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RKPD 2025 ..... **1–22**

1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 – 2027 1–22
2. Program Pembangunan Daerah dan Indikator 1–29

E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 ..... **1–33**

1. Tema Pembangunan Daerah 1–33
2. Prioritas Pembangunan Daerah 1–35

F. GAMBARAN UMUM DAERAH 1–41

1. Kondisi Geografis Daerah 1–42
   1) Batas Administrasi 1–43
   2) Luas Wilayah 1–44
   3) Topografi 1–47
      a. Kemiringan Lahan 1–47
      b. Ketinggian Lahan.....1–47
      c. Satuan Fisiografis.....1–47
   4) Klimatologi.....1–50
   5) Sumber Daya Air 1–52
      a. Sumber Daya Air Permukaan 1–52
      b. Sumber Daya Air Tanah.....1–55
2. Gambaran Umum Daerah 1–60
   1) Jumlah Penduduk.....1–60
   1) Pertumbuhan Penduduk.....1–61
   2) Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan 1–62
      a. Penduduk Usia Kerja.....1–62
      a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 1–63
      b. Angkatan Kerja.....1–65
      c. Penduduk yang Bekerja.....1–65
      d. Pengangguran Terbuka 1–68
   3) Pendidikan.....1–70
   4) Kondisi Ekonomi Daerah 1–75
      a. Sektor Unggulan.....1–75
         (1) Sektor Industri Pengolahan.....1–75
         (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....1–76
      b. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1–82
         (1) Tanaman Pangan.....1–83
         (2) Kelautan dan Perikanan.....1–86
         (3) Hortikultura 1–89
         (4) Perkebunan 1–93
         (5) Peternakan 1–97
         (6) Kehutanan 1–100
      c. Pertumbuhan Ekonomi 1–104
      d. Inflasi.....1–107

3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan 1–109
1) Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY 1–109
2) Gambaran Kondisi ASN yang Dimiliki 1–112
3) Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2025.....1–114
a. Ringkasan Realisasi Pendapatan 1–114
b. Ringkasan Realisasi Belanja 1–115
c. Realisasi Pembiayaan 1–116
(1) Penerimaan Pembiayaan.....1–116
(2) Pengeluaran Pembiayaan.....1–116

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2–1

A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN..... 2–1

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH..... 2–3

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah 2–3
2. Target dan Realisasi Pendapatan..... 2–8
1) Pendapatan Asli Daerah 2–9
a. Pajak daerah 2–10
a. Retribusi Daerah.....2–11
b. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....2–12
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....2–14
2) Pendapatan Transfer 2–15
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2–16
(1) Dana Bagi Hasil (DBH) 2–16
(1) Dana Alokasi Umum (DAU) 2–16
(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2–16
(3) Dana Keistimewaan (DAIS) 2–17
(4) Insentif Fiskal (IF) 2–17
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 2–17
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2–18
3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan.....2–19

C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 2–21

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah 2–21
2. Target dan Realisasi Belanja 2–23
    1) Belanja Operasi 2–23
    2) Belanja Modal 2–24
    3) Belanja Tidak Terduga 2–26
    4) Belanja Transfer 2–26
3. Permasalahan dan Solusi 2–27

D. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 2–29

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 2–29
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 2–30

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN 2–31

1. PT Bank BPD DIY 2–31
2. PT Anindya Mitra Internasional (AMI) 2–32
3. PT Taru Martani 2–33
4. Perumda Air Bersih Tirtatama DIY 2–34
5. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) 2–36
6. PT Asuransi Bangun Askrida 2–37

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2–39

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah 2–39
    a. Dasar Hukum Pelaksanaan 2–39
    b. Tantangan dan Permasalahan 2–40
    c. Upaya-upaya yang Dilaksanakan 2–41
    d. Capaian 2–41
2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY 2–42
3. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2–43
    1) Dasar dan Tujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 2–45
    2) Penghapusan Aset Tidak Bergerak 2–46
    3) Penghapusan Aset Bergerak 2–46
    4) Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan dan Lelang 2–47

5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2–54
6) Pemusnahan Barang Milik Daerah 2–58

4. Pendayagunaan Barang Daerah 2–59

1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2–59
2) Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah....2–67

a. Asuransi Barang Milik Daerah 2–67
b. Pengamanan Fisik Bangunan Gedung 2–68

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 3–1

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMDA 3–1

1. Terwujudnya Kualitas Hidup Kehidupan Penghidupan Masyarakat - IGI (*Inclusive Growth Index*).... 3–2
2. Terwujudnya Kualitas Hidup Kehidupan Penghidupan Masyarakat - Indeks Kebahagiaan 3–5
3. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah - Indeks Williamson 3–7
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - Indeks Reformasi Birokrasi.... 3–9
5. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)....3–18

1) Latar Belakang 3–18
2) Analisis Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY Tahun 2025 3–19
3) Permasalahan dan Solusi....3–19

B. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA 3–22

1. Semakin Kecilnya Tingkat Kemiskinan - Angka Kemiskinan (%)....3–23
2. Penghidupan Ekonomi Yang Layak - Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB (%)....3–29
3. Penghidupan Ekonomi Yang Layak - Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah) 3–31

4. Penghidupan Ekonomi Yang Layak - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3–32
5. Penghidupan Ekonomi Yang Layak - Inflasi....3–36
6. Kualitas SDM Yogyakarta Yang Dapat Diandalkan - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3–38
7. Kualitas SDM Yogyakarta Yang Dapat Diandalkan - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)....3–44
8. Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Pada Kawasan Belum Maju - Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap keseluruhan PDRB DIY (%)....3–47
9. Meningkatnya *Good Governance* - Opini BPK 3–50
10. Meningkatnya *Good Governance* - SAKIP 3–51
11. Meningkatnya *Good Governance* - Indeks Demokrasi Indonesia 3–54
12. Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 3–56
13. Menurunnya Risiko Bencana - Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY (Indeks)....3–59

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA 3–69

1. Pemerataan Kesejahteraan....3–72
   1) Indeks Gini 3–72
   2) Persentase Desa Mandiri 3–78
2. Program Pengembangan Sektor Unggulan - Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum....3–80
   1) Sektor Pertanian....3–81
   2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3–83
3. Program Pengembangan Kewirausahaan - Rasio Kewirausahaan 3–89
   1) Pendukung Ketercapaian Sasaran 3–89
   2) Permasalahan dan Solusi....3–94
4. Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat - *Crime Rate* 3–94
5. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 3–98
   1) Harapan Lama Sekolah....3–98

2) Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum 3–100
3) Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum 3–102

6. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat - Angka Harapan Hidup 3–105
1) Angka Harapan Hidup 3–105
2) Prevalensi *Stunting* 3–108
3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak 3–110

7. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat 3–114
1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3–114
a. Permasalahan dan Solusi 3–117
2) *Total Fertility Rate* (TFR) 3–118

8. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda - Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi oleh Pihak Luar 3–119
9. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur 3–124
1) Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi 3–124
2) Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo) 3–126

10. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 3–128
1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3–128
2) Indeks Kematangan SPBE 3–133

11. Program Peningkatan Kualitas Demokrasi 3–136
1) Indeks Kebebasan 3–136
2) Indeks Kesetaraan 3–138

12. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup 3–139
1) Penurunan emisi GRK (ribu ton CO_2eq) 3–139

13. Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang 3–145
1) Perwujudan Pola ruang 3–145
2) Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa.....3–149
3) Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.....3–153
4) Permasalahan dan Solusi.....3–154

14. Program Peningkatan Ketahanan Daerah - Indeks Ketahanan Daerah (IKD).....3–155
1) Kondisi Umum 3–155
a. Permasalahan dan Solusi.....3–157
(1) Permasalahan 3–157
(2) Solusi.....3–158

D. PENGHARGAAN 3–160

E. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN 3–164

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 3–164
1) Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar.....3–164
a. Urusan Pendidikan 3–164
(1) Kondisi Umum 3–164
(2) Permasalahan dan Solusi.....3–170
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–171
b. Urusan Kesehatan.....3–177
(1) Kondisi Umum 3–177
(2) Permasalahan dan Solusi.....3–184
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–188
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....3–194
(1) Suburusan Pekerjaan Umum.....3–194
a) Kondisi Umum.....3–194
(a) Peningkatan aksesibilitas Jalan 3–196
(b) Penduduk Berakses Air Minum 3–197
(c) Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air 3–199
(d) Penduduk Berakses Sanitasi 3–201
(e) Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi.....3–202

b) Permasalahan dan Solusi 3–204
c) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–207
(2) Suburusan Penataan Ruang.....3–227
a) Kondisi Umum 3–227
(a) Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah 3–228
(b) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah 3–229
b) Permasalahan dan Solusi 3–230
c) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–232
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3–235
(1) Kondisi Umum 3–235
(2) Permasalahan dan Solusi 3–239
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–241
e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 3–243
(1) Suburusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas.....3–243
a) Kondisi Umum 3–243
b) Permasalahan dan Solusi 3–248
c) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025 3–249
(2) Suburusan Kesatuan Bangsa dan Politik 3–253
a) Kondisi Umum 3–253
(a) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 3–254
(b) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).....3–255
(c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 3–256
b) Capaian DIY dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).....3–256
c) Permasalahan dan Solusi 3–259
d) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–261
(3) Suburusan Penanggulangan Bencana.....3–267
a) Kondisi Umum 3–267
b) Permasalahan dan Solusi 3–269
c) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–270

f. Urusan Sosial 3–274
(1) Kondisi Umum 3–274
(2) Permasalahan dan Solusi 3–276
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–279
2) Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 3–300
a. Urusan Tenaga Kerja 3–300
(1) Kondisi Umum 3–300
(2) Permasalahan dan Solusi 3–306
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–307
b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3–315
(1) Kondisi Umum 3–315
(2) Permasalahan dan Solusi 3–318
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–319
c. Urusan Pangan 3–326
(1) Kondisi Umum 3–326
(2) Permasalahan dan Solusi 3–335
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–336
d. Urusan Pertanahan 3–340
(1) Kondisi Umum 3–340
(2) Permasalahan dan Solusi 3–344
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–346
e. Urusan Lingkungan Hidup 3–348
(1) Kondisi Umum 3–348
(2) Permasalahan dan Solusi 3–352
a) Permasalahan 3–352
b) Solusi 3–354
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–354
f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 3–357
(1) Kondisi Umum 3–357
(2) Permasalahan dan Solusi 3–363

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–366
g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3–367
(1) Kondisi Umum 3–367
(2) Permasalahan dan Solusi 3–371
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–372
h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 3–376
(1) Kondisi Umum 3–376
(2) Permasalahan dan Solusi 3–377
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–377
i. Urusan Perhubungan 3–380
(1) Kondisi Umum 3–380
(2) Permasalahan dan Solusi 3–389
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–394
j. Urusan Komunikasi dan Informatika 3–404
(1) Kondisi Umum 3–404
(2) Permasalahan dan Solusi 3–410
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–414
k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3–420
(1) Kondisi Umum 3–420
(2) Permasalahan dan Solusi 3–426
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–430
l. Urusan Penanaman Modal 3–437
(1) Kondisi Umum 3–437
(2) Permasalahan dan Solusi 3–458
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–461
m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 3–464
(1) Kondisi Umum 3–464
(2) Permasalahan dan Solusi 3–467
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–468
n. Urusan Statistik 3–472
(1) Kondisi Umum 3–472
(2) Permasalahan dan Solusi 3–475

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–476
o. Urusan Persandian 3–477
(1) Kondisi Umum 3–477
(2) Permasalahan dan Solusi 3–487
(3) Capaian Program dan SubkegiatanTahun 2025 3–489
p. Urusan Kebudayaan 3–490
(1) Kondisi Umum 3–490
(2) Permasalahan dan Solusi 3–495
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–498
q. Urusan Perpustakaan 3–507
(1) Kondisi Umum 3–507
(2) Permasalahan dan Solusi 3–512
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–514
r. Urusan Kearsipan 3–518
(1) Kondisi Umum 3–518
(2) Permasalahan dan Solusi 3–522
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–523
2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3–525
1) Urusan Kelautan dan Perikanan 3–525
a. Kondisi Umum 3–525
b. Permasalahan dan Solusi 3–532
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–534
2) Urusan Pariwisata 3–541
a. Kondisi Umum 3–541
(1) Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah 3–543
(2) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah 3–544
b. Permasalahan dan Solusi 3–545
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–547

3) Urusan Pertanian.....3–554
a. Kondisi Umum.....3–554
b. Permasalahan dan Solusi.....3–565
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–566
4) Urusan Kehutanan.....3–576
a. Kondisi Umum.....3–576
b. Permasalahan dan Solusi.....3–581
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–582
5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....3–587
a. Kondisi Umum.....3–587
b. Permasalahan dan Solusi.....3–598
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–602
6) Urusan Perdagangan.....3–607
a. Kondisi Umum.....3–607
b. Permasalahan dan Solusi.....3–609
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–611
7) Urusan Perindustrian.....3–613
a. Kondisi Umum.....3–613
b. Permasalahan dan Solusi.....3–615
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–617
8) Urusan Ketransmigrasian.....3–624
a. Kondisi Umum.....3–624
b. Permasalahan dan Solusi.....3–627
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025.....3–627
3. PENUNJANG URUSAN.....3–629
1) Perencanaan Pembangunan.....3–629
a. Kondisi Umum.....3–629
b. Permasalahan dan Solusi.....3–630
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025.....3–631

2) Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan 3–637
a. Kondisi Umum 3–637
(1) Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan 3–639
(2) Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik 3–645
(3) Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah....3–652
b. Permasalahan dan Solusi....3–653
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–654
3) Administrasi Keuangan Daerah 3–659
a. Kondisi Umum 3–659
b. Permasalahan dan Solusi....3–662
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–664
4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan....3–672
a. Kepegawaian....3–672
(1) Kondisi Umum 3–672
(2) Permasalahan dan Solusi....3–677
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–677
b. Pendidikan dan Pelatihan....3–687
(1) Kondisi Umum 3–687
(2) Permasalahan dan Solusi....3–691
(3) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 3–692
5) Sekretariat Daerah 3–699
a. Tata Pemerintahan 3–699
(1) Kondisi Umum 3–699
(2) Permasalahan dan Solusi....3–709
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–710
b. Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum 3–716
(1) Kondisi Umum 3–716
(2) Permasalahan dan Solusi....3–725
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–726

c. Fasilitasi Perekonomian dan SDA 3–731
(1) Kondisi Umum 3–731
(2) Permasalahan dan Solusi 3–742
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–745
d. Fasilitasi Kesra 3–752
(1) Kondisi Umum 3–752
(2) Permasalahan dan Solusi 3–757
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025 3–758
e. Kelembagaan dan Tata Laksana 3–761
(1) Kondisi Umum 3–761
(2) Permasalahan dan Solusi 3–764
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–769
f. Fasilitasi Administrasi Pembangunan 3–777
(1) Kondisi Umum 3–777
a) Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur dengan bahan kebijakannya yang telah dihasilkan:.....3–779
b) Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan bahan kebijakannya yang telah dihasilkan : 3–780
c) Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang.....3–781
d) Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda 3–781
e) Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 3–782
(2) Permasalahan dan Solusi 3–782
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–782
g. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.....3–788
(1) Kondisi Umum 3–788
(2) Permasalahan dan Solusi 3–790
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–791
a) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 3–792

b) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.....3–792
h. Fasilitasi Umum dan Protokol 3–796
(1) Kondisi Umum 3–796
(2) Permasalahan dan Solusi 3–799
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–800
i. Fasilitasi Pemerintahan 3–803
(1) Kondisi Umum 3–803
(2) Permasalahan dan Solusi 3–807
(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–808
6) Pengawasan.....3–812
a. Kondisi Umum 3–812
(1) Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY 3–813
(2) Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).....3–816
(3) Pemeriksaan Inspektorat DIY 3–817
b. Permasalahan dan Solusi.....3–822
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2024 3–824
7) Penelitian dan Pengembangan.....3–831
a. Kondisi Umum 3–831
b. Permasalahan dan Solusi.....3–834
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–835
8) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY 3–836
a. Kondisi Umum 3–836
b. Permasalahan dan Solusi.....3–840
c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025 3–841
F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....3–848
G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025.....3–861

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 4–1

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 4–1

B. DASAR HUKUM 4–2

C. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN 4–4

D. OPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN 4–4

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY 4–4
   1) Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY..... 4–4
   2) Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY..... 4–5
      a. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:..... 4–5
      b. Bidang Bina Marga, meliputi:..... 4–6
   3) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY..... 4–7
      a. Pengelolaan Sumber Daya Air..... 4–7
      b. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan.....4–12
   4) Permasalahan dan Kendala 4–16
   5) Saran dan Tindak Lanjut.....4–16

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....4–16
   1) Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049087/Tanaman Pangan) 4–17
   2) Satker Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049090/ Peternakan dan Kesehatan Hewan).....4–17
   3) Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049094/Sarana dan Sarana Pertanian) 4–18
   4) Permasalahan dan Solusi.....4–18

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....4–19
   1) Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (694554/Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi).....4–20
   2) Permasalahan dan Solusi.....4–20

4. Dinas Kelautan dan Perikanan 4–21
1) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (6910111) 4–22
2) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (049097) 4–22
3) Permasalahan dan Solusi....4–22
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 4–23
1) Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (690746)....4–23
2) Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (691120)....4–24
3) Permasalahan dan Solusi....4–24

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY 5–1

A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 5–3

1. Kondisi Umum.... 5–3
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.... 5–3

B. URUSAN KELEMBAGAAN.... 5–3

1. Kondisi Umum.... 5–3
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.... 5–4
1) Inovasi Pelayanan Publik....5–38
a. Mini Teater Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara–Dinas Sosial DIY....5–39
b. SIKELING (Servis Keliling)–Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG–Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY....5–40
c. SIBUKIN (Sistem Informasi Buku Induk)–Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP)–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY....5–43
d. Showroom SLBN Pembina GAPURA (Gerakan Aktif Produktif Unggul Relasi Asli)–SLB Negeri Pembina Yogyakarta....5–44

e. PENTAMARTO (Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Bagi Masyarakat Ngayogyakarto) dan Penyediaan AED di Area Publik di Lokasi Strategis Kota Yogyakarta–Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 5–46
f. GELAS BERLIAN SINURI (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri)–UPT Puskesmas Semanu II Kabupaten Gunungkidul 5–49
g. LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka)–Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul 5–51
h. SI PERI MANIS KAPANEWON (Sistem Perizinan yang Mendekat dan Terintegrasi Secara Elektronik Sampai Kapanewon)–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 5–52
i. Halo Bangga (Hamemayu Aplikasi Layanan Online Puskesmas Banguntapan III)–Puskesmas Banguntapan III Kabupaten Bantul 5–54
j. GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 5–55
k. ASN MEMAYU–Badan Kepegawaian Daerah DIY 5–57
l. Digital Literacy Center (DLC) Corner–Dinas Pepustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sleman 5–59
m. MATA HATI (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa)–Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 5–60
n. Posbindu Disabilitas “SENTOSA” (Semua Penyandang Disabilitas Mendapatkan Pelayanan Terpadu, Holistik, Sehat, dan Aman)–UPT Puskesmas Sentolo I, Kabupaten Kulon Progo.....5–61
o. Posbindu Disabilitas ”CAHAYA DIFA”–UPT Puskesmas Sentolo II, Kabupaten Kulon Progo.....5–63
p. Posbindu Disabilitas “ESTU MANDIRI”–Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo–Puskesmas Girimulyo I 5–64

q. Posbindu Disabilitas “SINERGI BERDAYA”–Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo–Puskesmas Temon I 5–67
r. Posbindu Disabilitas “CERIA”–Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo–Puskesmas Temon II 5–69
2) Database Sosial Ekonomi....5–70
a. SIPEDET CANTIK–Dinas Sosial Kabupaten Bantul....5–70
b. SIPEDET CANTIK–Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 5–71
3) Reformasi Kalurahan....5–72
3. Permasalahan dan Solusi 5–75
C. URUSAN KEBUDAYAAN 5–76
1. Kondisi Umum....5–76
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025....5–77
1) Jogja Heritage Track (JHT)....5–109
2) SiBakul Jogja....5–112
3) Pemberian Beasiswa Kartu Cerdas, Beasiswa Retrieval, dan Beasiswa Inklusi 5–114
a. Beasiswa Kartu Cerdas 5–115
(1) Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMA 5–115
(2) Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMK 5–116
b. Beasiswa Retrieval....5–117
(1) Beasiswa Retrieval Jenjang SMA 5–118
(2) Beasiswa Retrieval Jenjang SMK 5–119
(3) Beasiswa Inklusi 5–120
3. Permasalahan dan Solusi 5–121
D. URUSAN PERTANAHAN 5–122
1. Kondisi Umum....5–122
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025....5–122
1) Penatausahaan Pertanahan 5–130
a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta....5–130
b. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 5–131
c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta 5–131

d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 5–132
e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 5–132
f. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul 5–132
g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman 5–132

2) BKK Kalurahan Urusan Pertanahan 5–134

a. BKK Kalurahan Melikan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul 5–134
b. BKK Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul 5–136
c. BKK Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman 5–137

2. Permasalahan dan Solusi 5–138

E. URUSAN TATA RUANG 5–139

1. Kondisi Umum 5–139
2. Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 5–139

1) Aksesibilitas 5–148

a. Peningkatan Jalan dan Jembatan Tegalsari–Klepu 5–148
b. Pembangunan Jalan Ruas Jalan Prambanan–Gayamharjo (Segmen B4 dan B5) 5–149
c. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tegalsari–Kebonharjo 5–150

2) Pelayanan Publik 5–151

a. Pembangunan Gedung Psikiatri Terpadu, Gedung Rehabilitasi Medik dan Gedung Farmasi Rumah Sakit Jiwa Grhasia 5–151
b. Pemindahan Lahan Parkir Abu Bakar Ali (ABA) ke Tempat Khusus Parkir (TKP) Ketandan 5–152

3) Prioritas Nasional Terkait Dengan Dokumen Tata Ruang 5–154

a. Pendampingan Percepatan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Terintegrasi OSS–Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 5–154

(1) RDTR Kabupaten Kulon Progo 5–156
(2) RDTR Kabupaten Sleman 5–157
(3) RDTR Kabupaten Gunungkidul.....5–157
4) BKK Kalurahan Kawasan Terpadu.....5–158
a. Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo 5–159
b. Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.....5–159
c. Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.....5–160
d. Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman 5–161
e. Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul 5–161
f. Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul 5–162
g. Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman.....5–163
h. Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.....5–163
i. Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.....5–164
j. Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.....5–164
k. Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul 5–165
3. Permasalahan dan Solusi 5–166

BAB VI PROGRAM STRATEGIS DIY 6–1

A. PEMBANGUNAN JALAN TEMON- KABUPATEN KULON PROGO BOROBUDUR 6–1

1. Kondisi Umum..... 6–1
2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2025 6–1
3. Permasalahan dan Solusi 6–2
4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan 6–2

B. PEMBANGUNAN JALAN PRAMBANAN- GADING 6–3

1. Kondisi Umum..... 6–3
2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2025 6–4
3. Permasalahan dan Solusi 6–4
4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan 6–5

C. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TPA REGIONAL PIYUNGAN 6–6

1. Kondisi Umum 6–6
2. Progres Sampai Dengan Tahun 2025 6–6
3. Permasalahan dan Solusi 6–6
4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan 6–7

D. PENATAAN KAWASAN KARATON 6–7

1. Kondisi Umum 6–7
2. Permasalahan dan Solusi 6–9
3. Dokumentasi 6–10

E. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI 6–12

1. Kondisi Umum 6–12
2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2025 6–13
   1) Pengembangan Infrastruktur 6–13
      a. Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) Jogja Planning Gallery 6–13
      b. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Pembangunan Jogja Planning Gallery 6–14
      c. Pengelolaan Toilet Titik Nol 6–14
   2) Bidang Perhubungan/Transportasi 6–15
      a. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 6–15
      b. Penerapan Semi Pedestrian di Jalan Malioboro 6–16
      c. Penegakan hukum lalu lintas di Kawasan Strategis. 6–17
      d. Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis 6–18
      e. Penyediaan dan Pengaturan Moda Transportasi Tradisional di Kawasan Strategis 6–19
      f. Perwujudan Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 6–20
3. Bidang Kebudayaan 6–22
4. Permasalahan dan Solusi 6–23
5. Foto-foto Hasil Pelaksanaan 6–26

F. PENATAAN KAWASAN PURO PAKUALAMAN 6–28

1. Kondisi Umum.....6–28
2. Progres Penataan dan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Tahun 2025.....6–29
   1) Kegiatan Rutin Utama 6–29
      a. Hadĕging Kadipaten Pakualaman 6–29
      b. Tingalan Wiyosan Dalĕm.....6–30
      c. Pembuatan Kue Apem.....6–30
      d. Kuthamara.....6–30
      e. Garebeg Syawal.....6–31
      f. Garebeg Besar.....6–31
      g. Malam 1 Sura 6–31
      h. Labuhan 6–32
      i. Siraman atau Jamasan Pusaka 6–32
      j. Garebeg Mulud.....6–32
      k. Kegiatan budaya bertepatan dengan *Wiyosan Sĕlapanan* K.G.P.A.A. Paku Alam X 6–32
      l. Gladhen Macapat 6–33
      m. Gladhen Bĕksa.....6–33
      n. Pawiyatan Abdi Dalĕm.....6–33
      o. Pawiyatan-Pawiyatan di Kadipaten Pakualaman : 6–34
      p. Pemberdayaan Perpustakaan “Widyapustaka” Pura Pakualaman.....6–34
      q. Kegiatan Virtual Budaya 6–34
      r. Peringatan Hari Keistimewaan DIY.....6–34
   2) Kegiatan Rutin Pendukung 6–35
      a. Kapanitran (Kegiatan Operasional dan kesekretariatan):.....6–35
      b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Asset Budaya serta Pengadaan Fasilitas Kadipaten Pakualaman: 6–35
      c. Pengelola Warisan Budaya Kadipaten Pakualaman: 6–35
      d. Pemeliharaan Bangunan-Bangunan Asset Kadipaten Pakualaman :.....6–35
3. Permasalahan dan Solusi 6–36
4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan 6–36

G. PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA 6–38

1. Kondisi Umum 6–38
2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2025 6–41
   1) Kepariwisataan 6–41
   2) Kawasan Perkotaan 6–42
      a. Pembangunan *Jogjakarta Outer RingRoad* (JORR) 6–42
      b. Penanganan Jalan Provinsi 6–43
      c. Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan 6–43
3. Permasalahan dan Solusi 6–44
4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan 6–46

H. PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI SELATAN DIY 6–50

1. Kondisi Umum 6–50
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–54
   1) Pengembangan Jaringan Jalan 6–54
   2) Penataan Ruang 6–57
      a. SRS Pantai Selatan Gunungkidul 6–57
         (1) Struktur Ruang 6–57
         (2) Keterwujudan Pola Ruang 6–58
      b. SRS Pantai Samas-Prangtritis 6–60
         (1) Struktur Ruang 6–60
         (2) Keterwujudan Pola Ruang 6–61
      c. SRS Pantai Selatan Kulon Progo 6–63
         (1) Struktur Ruang 6–63
         (2) Keterwujudan Pola Ruang 6–65
   3) Pengembangan Desa Maritim 6–66
   4) Kepariwisataan 6–70
   5) Lingkungan Hidup 6–70
3. Permasalahan dan Solusi 6–71
4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan 6–76

I. PENGEMBANGAN KAWASAN PERBUKITAN MENOREH 6–77

1. Kondisi Umum 6–77
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–79
   1) Kepariwisataan 6–79
   2) Agro Wisata 6–80
3. Permasalahan dan Solusi 6–81
4. Foto-Foto Hasil Pelaksanaan 6–83

J. PENGEMBANGAN KAWASAN AEROTROPOLIS DI KULON PROGO 6–85

1. Kondisi Umum 6–85
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–85
3. Permasalahan dan Solusi 6–90

K. PENGEMBANGAN KAWASAN STASIUN TUGU 6–91

1. Kondisi Umum 6–91
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–92
3. Permasalahan dan Solusi 6–93
4. Foto Pelaksanaan 6–94

L. JOGJA SMART PROVINCE 6–94

1. Kondisi Umum 6–94
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–96
3. Permasalahan dan Solusi 6–97
4. Foto Hasil Pelaksanaan 6–99

M. PENGEMBANGAN JOGJAKARTA AGRO PARK (JAP) 6–99

1. Kondisi Umum 6–99
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–100
3. Permasalahan dan Solusi 6–101
4. Foto Hasil Pelaksanaan 6–102

N. REFORMASI BIROKRASI 6–103

1. Kondisi Umum 6–103
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–105
3. Permasalahan dan Solusi 6–108

O. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY 6–109

1. Kondisi Umum 6–109
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–110
   1) Taman Budaya Yogyakarta (TBY) 6–110
   2) Taman Budaya Gunungkidul (TBG) 6–110
   3) Taman Budaya Kulon Progo (TBKP) 6–111
   4) Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG - Kota Yogyakarta) 6–112
   5) Taman Budaya Sleman (TBS) dan Taman Budaya Bantul (TBB) 6–112
3. Permasalahan dan Solusi 6–113

P. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6–115

1. Kondisi Umum 6–115
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–119
3. Permasalahan dan Solusi 6–124
4. Foto-Foto Hasil Pelaksanaan 6–127

Q. REFORMASI KALURAHAN 6–129

1. Kondisi Umum 6–129
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025 6–132
   1) Capaian Kinerja Reformasi Kalurahan 6–132
      a. Jumlah Kalurahan Mandiri 6–132
      b. Jumlah Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (DMB) 6–133
      c. Jumlah Desa/Kalurahan Swasembada 6–133
      d. AKIP Kalurahan Predikat Baik 6–135
      e. Kualitas Belanja Kalurahan Kategori Baik 6–135
      f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6–135
   2) Capaian Reformasi Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Kalurahan 6–136
      a. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan 6–136
      b. Penurunan Penduduk Miskin 6–137
      c. Penurunan Stunting 6–137
      d. BUMKal Kategori Maju 6–137
      e. Indikator IDM (Ekonomi dan Lingkungan) 6–137
      f. Kalurahan yang belum memiliki BUMKal : 6–138

3. Permasalahan dan Solusi 6–138
4. Foto-Foto Hasil Pelaksanaan 6–144

R. PEMBINAAN KAWASAN PERBATASAN 6–145

1. Kondisi Umum.....6–145
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025.....6–146
   1) Urusan Pendidikan 6–146
   2) Urusan Kesehatan.....6–159
   3) Urusan Pekerjaan Umum 6–165
   4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat.....6–167
3. Permasalahan dan Solusi 6–168
4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan 6–170

S. LAPORAN PENGARUS UTAMAAN GENDER (PUG) 6–172

1. Kondisi Umum.....6–172
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025.....6–173
3. Permasalahan dan Solusi 6–176

T. PENANGANAN SAMPAH 6–177

1. Kondisi Umum.....6–177
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025.....6–177
   1) Inovasi dan Langkah Strategis.....6–178
   2) Tantangan dan Keberlanjutan 6–178
   3) Tindak lanjut yang akan dilakukan: 6–178
   4) Dukungan Anggaran dan Pembangunan Infrastruktur TPST 6–179
   5) Sebaran Pembangunan Infrastruktur Strategis 6–179
   6) Catatan Penting dalam LKPJ:.....6–180
   7) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 6–180
   8) Kesimpulan.....6–180

BAB VII PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 7–1

A. KERJA SAMA ANTARDAERAH 7–1

1. Kerja Sama Antardaerah 7–2
   1) Bidang Ketahanan Pangan..... 7–7
   2) Bidang Penanggulangan Bencana 7–7

3) Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) 7–8
4) Bidang Pariwisata 7–8
5) Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 7–8

2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 7–9
3. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat 7–13
4. Permasalahan dan Solusi 7–17

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 7–18

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 7–18
2. Tim Terpadu / Kelompok Kerja 7–20
3. Permasalahan dan Solusi 7–21
   1) Forkopimda 7–21
   2) Kelompok/Tim Kerja 7–22

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH 7–22

1. Gambaran Umum 7–22
2. Program Kegiatan 7–24
   1) Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan 7–24
   2) Pembinaan dan Pengawasan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan; 7–25
   3) Laporan Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY 7–26
3. Permasalahan dan Solusi 7–27

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 7–29

1. Gambaran Umum 7–29
   1) Banjir 7–30
   2) Epidemi dan Wabah Penyakit 7–31
   3) Gelombang Ekstrim dan Abrasi 7–31
   4) Gempa Bumi 7–31
   5) Tsunami 7–32
   6) Kegagalan Teknologi 7–32
   7) Kekeringan 7–33
   8) Letusan Gunung Api 7–33
   9) Cuaca ekstrim 7–33

10) Tanah Longsor 7–34
11) Kebakaran Hutan dan Lahan 7–34
12) Konflik Sosial 7–34
13) Banjir Bandang 7–35
14) Likuifaksi 7–35

2. Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2025 7–35
3. Permasalahan dan Solusi 7–37

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7–38

1. Gambaran Umum 7–38
2. Permasalahan dan Solusi 7–41

F. TUGAS – TUGAS UMUM PEMERINTAH LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH 7–42

1. Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) 7–42
   1) Narasi Umum 7–42
   2) Permasalahan dan Solusi 7–46
      a. Perdagangan 7–46
      b. Lingkungan 7–47
      c. Properti 7–47
      d. Keuangan 7–48
      e. Pendidikan 7–48
   3) Rekomendasi 7–49
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 7–50
   1) Narasi Umum 7–50
   2) Permasalahan dan Solusi 7–51
3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY 7–52
   1) Narasi Umum 7–52
   2) Permasalahan dan Solusi 7–53
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 7–54
   1) Narasi Umum 7–54
   2) Permasalahan dan Solusi 7–56
5. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) 7–56
   1) Narasi Umum 7–56
   2) Permasalahan dan Solusi 7–58

6. Palang Merah Indonesia (PMI) 7–59
1) Narasi Umum 7–59
2) Permasalahan dan Solusi 7–60
7. Kinerja Tim Penggerak PKK 7–61
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY 7–62
1) Narasi Umum 7–62
a. Capaian program dan kegiatan Tahun 2025 7–63
b. Pengawasan dan Pemantauan Isi Siaran 7–63
c. Penanganan Aduan Masyarakat 7–64
2) Permasalahan dan Solusi 7–64
9. Komisi informasi Daerah (KID) 7–66
1) Narasi Umum 7–66
a. Penyelesaian Sengketa Informasi 7–66
b. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 7–67
2) Permasalahan dan Solusi 7–70
10. Trans Jogja 7–71
1) Narasi Umum 7–71
2) Capaian Kinerja Tahun 2025 7–72
3) Permasalahan dan solusi 7–74
8. BAB VIII PENUTUP 8–1

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Sasaran Utama Visi RPJPD Tahun 2025–2045 1–8

Tabel 1.2. Misi, Sasaran Pokok beserta Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025-2045 1–11

Tabel 1.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022–2027 1–20

Tabel 1.3. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022 – 2027 1–21

Tabel 1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022–2027 1–23

Tabel 1.5. Arah Kebijakan Transformasi Tahap Perkuatan Fondasi Pembangunan (2025-2029) pada RPJPD DIY Tahun 2025-2045 1–27

Tabel 1.6. Program Pembangunan Daerah Tahun 2022–2027 dan Indikator Kinerjanya 1–31

Tabel 1.7. Keselarasan Prioritas Pembangunan DIY dengan Prioritas Pembangunan Nasional 1–36

Tabel 1.8. Satuan Wilayah Administrasi DIY menurut Kabupaten/Kota 1–44

Tabel 1.9. Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota 1–45

Tabel 1.10. Potensi Ketersediaan Air pada 4 DAS yang Ada di Wilayah DIY Tahun 2021–2025 (juta m^3) 1–53

Tabel 1.11. Rerata Debit Sungai di DIY Tahun 2020-2024(m^3/detik) 1–54

Tabel 1.12. Kapasitas Sungai Bawah Tanah yang ada di WS POS 1–55

Tabel 1.13. Luasan Kawasan Resapan Air di DIY 1–56

Tabel 1.14. Rerata Penurunan Muka Air Tanah per Kabupaten/Kota 1–58

Tabel 1.15. Neraca Air Tanah Pengusahaan per Kabupaten/kota di DIY Tahun 2024 1–60
Tabel 1.16. Jumlah Penduduk (Ribu) DIY, 2021–2025 1–60
Tabel 1.17. Laju Pertumbuhan Penduduk DIY per Tahun, 2021–2025 1–61
Tabel 1.18. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2020-2025 1–63
Tabel 1.19. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2025 1–71
Tabel 1.20. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2025 1–71
Tabel 1.21. Jumlah Pendidik di DIY Tahun 2025 1–72
Tabel 1.22. Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2021–2025 1–76
Tabel 1.23. Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2019-2025 1–77
Tabel 1.24. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi dan Penginapan pada Tahun 2022–2025 1–78
Tabel 1.25. Sepuluh Besar Kunjungan Wisatawan di Destinasi Wisata DIY Tahun 2025 1–80
Tabel 1.26. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara menurut Kebangsaan Tahun 2024-2025 1–82
Tabel 1.27. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2024-2025* 1–90
Tabel 1.28. Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2024 –2025 1–95
Tabel 1.29. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2024–2025 1–100
Tabel 1.30. Nilai PDRB Subsektor Kehutanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (dalam miliar rupiah) 1–101
Tabel 1.31. Nilai Produksi Kehutanan Tahun 2023–2025 1–101

Tabel 1.32. Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021–TW 3 2025 (%) 1–105

Tabel 1.33. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2021–Triwulan III 2025 (%) 1–107

Tabel 1.34. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2024-2025 1–108

Tabel 1.35. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 1–115

Tabel 1.36. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 1–115

Tabel 1.37. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 1–117

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 2–9

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2025 (*Unaudited*) 2–10

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2025 (*Unaudited*) 2–12

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2025 (*Unaudited*) 2–13

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2025 (*Unaudited*) 2–14

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 2–15

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 2–23

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 2–25

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 2–26

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) 2–27

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*).....2–29

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*).....2–31

Tabel 2.13. Realisasi Dividen PT Bank BPD DIY TA 2018–2025 2–31

Tabel 2.14. Realisasi Pembagian Dividen kepada Pemda DIY oleh PT Anindya Mitra Internasional (AMI) TA 2018–2025.....2–33

Tabel 2.15. Realisasi PT Taru Martani TA 2018–2025 2–34

Tabel 2.16. Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2018–2025.....2–37

Tabel 2.17. Realisasi Dividen PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2018-2025.....2–38

Tabel 2.18. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2025 (*Unaudited*).....2–41

Tabel 2.19. Daftar Obyek Tanah yang Disertifikatkan 2–42

Tabel 2.20. Hasil Penjualan dan Lelang BMD TA 2025.....2–52

Tabel 2.21. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa.....2–60

Tabel 2.22. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....2–63

Tabel 2.23. Barang Milik Daerah yang Dioptimalkan Melalui Pinjam Pakai.....2–65

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2024..... 3–1

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2024 serta Capaian 2025 3–4

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kebahagiaan Tahun 2025 3–6

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Indeks Williamson Tahun 2024-2025 3–8

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Indeks RB Tahun dengan Target 2025 dan Target Akhir RPJMD 2027 3–11

Tabel 3.6. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 3–12

Tabel 3.7. Perbandingan Hasil Evaluasi RB Pemda DIY Tahun 2024 dan 2025 3–13

Tabel 3.8. Penjabaran Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2025 3–14

Tabel 3.9. Perhitungan IKLH DIY Tahun 2025 3–19

Tabel 3.10. Kategori IKLH 3–19

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2025.....3–22

Tabel 3.12. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021–2025 (%) 3–27

Tabel 3.13. Target dan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kemiskinan Tahun 2025.....3–27

Tabel 3.14. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 Triwulan III (*C-to-C*).....3–29

Tabel 3.15. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita di DIY Tahun 2024–2025.....3–32

Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 3–33

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun 2024-2025 3–36

Tabel 3.18. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025.....3–40
Tabel 3.19. IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021–2025 3–43
Tabel 3.20. IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2025.....3–43
Tabel 3.21. Target Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 3–45
Tabel 3.22. Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019–2024.....3–45
Tabel 3.23. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2024-2025.....3–49
Tabel 3.24. PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2025.....3–49
Tabel 3.25. Capaian Opini BPK Pemda DIY Tahun 2025.....3–51
Tabel 3.26. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya *Good Governance*.....3–51
Tabel 3.27. Rincian Hasil Evaluasi, Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 3–52
Tabel 3.28. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY.....3–55
Tabel 3.29. Target dan Capaian Sasaran Pemerintah Daerah Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025.....3–57
Tabel 3.30. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Indikator Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 3–61
Tabel 3.31. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2025.....3–69
Tabel 3.32. Target dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Gini Tahun 2025.....3–75
Tabel 3.33. Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY, Maret 2024–Maret 2025 (%) 3–75

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Tahun 2025 3–79

Tabel 3.35. Target dan Capaian Indikator Program Pertumbuhan Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi dan Makan Minum Dalam PDRB DIY Tahun 2024 3–81

Tabel 3.36. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2024-2025.....3–83

Tabel 3.37. PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Jumlah Wisatawan Tahun 2024 3–88

Tabel 3.38. *Crime Rate* DIY Tahun 2022-2025 3–95

Tabel 3.39. Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 3–98

Tabel 3.40. Capaian Kompetensi Literasi Tahun 2025.....3–101

Tabel 3.41. Target dan Capaian Indikator Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum tahun 2025.....3–102

Tabel 3.42. Capaian Kompetensi Numerasi Tahun 2025 3–103

Tabel 3.43. Target dan Capaian Indikator Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum tahun 2025 3–104

Tabel 3.44. Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2025 3–105

Tabel 3.45. Target dan Capaian Indikator Prevalinsi *Stunting* Tahun 2025.....3–108

Tabel 3.46. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak Tahun 2025 3–111

Tabel 3.47. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi 3–112

Tabel 3.48. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 3–113

Tabel 3.49. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2025 3–114
Tabel 3.50. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY 3–115
Tabel 3.51. IDG Nasional dan DIY Tahun 2020-2024 3–115
Tabel 3.52. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen .. 3–116
Tabel 3.53. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan . 3–116
Tabel 3.54. Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional 3–117
Tabel 3.55. *Total Fertility Rate* (TFR) di DIY pada Tahun 2021–2025 3–118
Tabel 3.56. Target dan Capaian Indikator Program *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2024 3–118
Tabel 3.57. Target dan Realisasi Indikator Program Budaya benda dan Tak Benda yang diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (regional, nasional, dan internasional) Tahun 2025. 3–120
Tabel 3.58. Budaya benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) Tahun 2007 - 2024 3–120
Tabel 3.59. Budaya Tak Benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) 3–121
Tabel 3.60. Rincian Budaya Tak Benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) Tahun 2025 3–122
Tabel 3.61. Target dan Realisasi Indikator Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi 3–125
Tabel 3.62. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten yang belum maju (Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul) Tahun 2024 3–127
Tabel 3.63. Hasil Asesmen SPBE oleh Kemenpan RB Tahun 2024 dan Asesmen Mandiri Tahun 2025 3–134

Tabel 3.64. Capaian Aspek Kebebasan dan Indikator Penyusunnya 3–136
Tabel 3.65. Capaian Aspek Kesetaraan dan Indikator Penyusunnya 3–138
Tabel 3.66. Target dan Capaian Penurunan Emisi GRK Tahun 2025 3–142
Tabel 3.67. Indikator Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang Tahun 2025..... 3–145
Tabel 3.68. Perwujudan Pola Ruang 3–146
Tabel 3.69. Target dan Capaian Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang Tahun 2025..... 3–149
Tabel 3.70. Perhitungan Capaian Indikator Program Pemda Urusan Pertanahan Tahun 2025 3–150
Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Suburusan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 3–155
Tabel 3.72. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Capaian 2025 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)..... 3–165
Tabel 3.73. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2025 3–172
Tabel 3.74. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)..... 3–182
Tabel 3.75. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2025..... 3–188
Tabel 3.76. Target dan Realisasi Kinerja Suburusan Pekerjaan Umum Tahun 2024–2025..... 3–195
Tabel 3.77. Sambungan Rumah SPALD-T Sewon s.d. Akhir Tahun 2025..... 3–201
Tabel 3.78. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Suburusan Pekerjaan Umum Tahun 2025..... 3–209

Tabel 3.79. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Terhadap Target Akhir RPJMD DIY (2027) 3–228

Tabel 3.80. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Suburusan Penataan Ruang Tahun 2025 3–232

Tabel 3.81. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025..... 3–236

Tabel 3.82. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025 3–241

Tabel 3.83. Target dan Realisasi Kinerja Suburusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 3–245

Tabel 3.84. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025..... 3–250

Tabel 3.85. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Suburusan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025 3–257

Tabel 3.86. Detail Indeks Demokrasi Indonesia DIY..... 3–258

Tabel 3.87. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Suburusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 3–261

Tabel 3.88. Target dan Realisasi Kinerja Suburusan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 3–268

Tabel 3.89. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Suburusan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 3–271

Tabel 3.90. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Wajib Bidang Sosial Tahun 2025 serta Capaiannya..... 3–275

Tabel 3.91. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Sosial Tahun 2025..... 3–279

Tabel 3.92. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 3–302
Tabel 3.93. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 3–307
Tabel 3.94. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 3–316
Tabel 3.95. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 3–319
Tabel 3.96. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Pangan Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) 3–327
Tabel 3.97. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pangan Tahun 2025 3–337
Tabel 3.98. Target dan Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Terhadap Target Akhir RPJMD DIY (2027) 3–340
Tabel 3.99. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 3–346
Tabel 3.100. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Capaian 2025 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) 3–349
Tabel 3.101. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Lingkungan Hidup 3–355
Tabel 3.102. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 serta Capaian 2025 3–361
Tabel 3.103. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 3–366
Tabel 3.104. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 3–368

Tabel 3.105. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 3–373
Tabel 3.106. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DP3AP2 DIY Tahun 2025 3–376
Tabel 3.107. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 3–378
Tabel 3.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2022–2027 serta Capaian 2025 3–382
Tabel 3.109. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2025 3–394
Tabel 3.110. Tabel Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 3–410
Tabel 3.111. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 serta Capaiannya 3–415
Tabel 3.112. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 3–415
Tabel 3.113. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2021-2025 3–420
Tabel 3.114. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2021-2025 3–422
Tabel 3.115. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 3–424
Tabel 3.116. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 3–430
Tabel 3.117. Perkembangan Investasi Kumulatif di DIY Tahun 2021-2025 3–439
Tabel 3.118. Perkembangan Investasi Total PMA+PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2021 – 2025 (dalam rupiah) 3–444

Tabel 3.119. Perkembangan Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2024 – 2025 (dalam rupiah) 3–446

Tabel 3.120. Target dan Realisasi Investasi s.d Tahun 2025 3–452

Tabel 3.121. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025 3–453

Tabel 3.122. Target dan Realisasi Kinerja Reformasi Birokrasi Penanaman Modal Tahun 2025 3–454

Tabel 3.123. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 3–461

Tabel 3.124. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian 2025 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027).....3–465

Tabel 3.125. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ...3–469

Tabel 3.126. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 3–475

Tabel 3.127. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Statistik Tahun 2025 3–476

Tabel 3.128. Sertifikasi Yang Dilaksanakan 3–478

Tabel 3.129. Nilai Assessment Keamanan Informasi dan Persandian oleh BSSN tahun 2018-2025.....3–480

Tabel 3.130. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Persandian Tahun 2025.....3–489

Tabel 3.131. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2025.....3–491

Tabel 3.132. Jumlah Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum Tahun 2025.....3–492

Tabel 3.133. Penyelenggaraan *Event* Budaya tahun 2025 3–494

Tabel 3.134. Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya DIY tahun 2025.....3–495

Tabel 3.135. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2025 3–498
Tabel 3.136. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Terhadap Akhir RPJMD 3–508
Tabel 3.137. Capaian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025 3–514
Tabel 3.138. Tingkat Ketersediaan Arsip 2025 3–518
Tabel 3.139. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Terhadap Akhir RPJMD 3–519
Tabel 3.140. Capaian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025 3–523
Tabel 3.141. Capaian Kinerja Tahun 2025 3–527
Tabel 3.142. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2025 Capaian Tahun 2025 3–529
Tabel 3.143. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 3–534
Tabel 3.144. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2025 serta Terhadap Target Akhir RPJMD DIY (2027) 3–543
Tabel 3.145. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2025 3–547
Tabel 3.146. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022–2027) 3–555
Tabel 3.147. Capaian Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Dalam PDRB (ADHK) 3–556
Tabel 3.148. Capaian Produksi Subsektor Tahun 2024 dan 2025** 3–559
Tabel 3.149. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2024-2025** 3–559

Tabel 3.150. Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2024-2025* 3–560
Tabel 3.151. Populasi Ternak di DIY Tahun 2024-2025 3–562
Tabel 3.152. Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2024-2025**.....3–564
Tabel 3.153. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pertanian Tahun 2025 3–566
Tabel 3.154. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Capaian 2025 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027).....3–576
Tabel 3.155. Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2025 3–580
Tabel 3.156. Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2023 - 2025.....3–581
Tabel 3.157. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2024.....3–582
Tabel 3.158. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 3–588
Tabel 3.159. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 3–602
Tabel 3.160. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2021-2025 (dalam US$ Juta).....3–608
Tabel 3.161. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 3–608
Tabel 3.162. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2025 3–611
Tabel 3.163. Perkembangan PDRB Industri Pengolahan 2021-2025 3–613
Tabel 3.164. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 3–614
Tabel 3.165. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2025.....3–617

Tabel 3.166. Jumlah Alokasi dan Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY Tahun 2021-2025 3–624

Tabel 3.167. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 terhadap Akhir RPJMD 2022–2027 3–625

Tabel 3.168. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2025 3–628

Tabel 3.169. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 3–629

Tabel 3.170. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 3–631

Tabel 3.171. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) 3–639

Tabel 3.172. Pengukuran Indikator Tujuan Strategis Paniradya Kaistimewan 2025 3–640

Tabel 3.173. Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2025 3–640

Tabel 3.174. Pengukuran Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Keistimewaan Tahun 2025 3–644

Tabel 3.175. Pengukuran skor indeks kepuasan Parampara Praja 3–645

Tabel 3.176. Realisasi Fisik Lembaga Pengampu Keistimewaan Tahun 2025 3–646

Tabel 3.177. Pengukuran Indikator “Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik” 3–652

Tabel 3.178. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Keuangan Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 3–660

Tabel 3.179. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2025 3–664

Tabel 3.180. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2027) 3–675

Tabel 3.181. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Kepegawaian Tahun 2025 3–679

Tabel 3.182. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023-2024 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) 3–689

Tabel 3.183. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 3–694

Tabel 3.184. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2022–2027 serta Capaian 2025 3–704

Tabel 3.185. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Hasil Pemilihan Tahun 2024 3–705

Tabel 3.186. Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 Yang Ditetapkan Pemberhentiannya 3–707

Tabel 3.187. Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota Yang Ditetapkan Pemberhentiannya 3–707

Tabel 3.188. Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY Tahun 2025 3–708

Tabel 3.189. Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2025 3–708

Tabel 3.190. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2025 3–710

Tabel 3.191. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2025) 3–717

Tabel 3.192. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh Pemda DIY pada Tahun 2025 3–718

Tabel 3.193. Rekapitulasi Jumlah Penanganan Perkara TA 2025 3–721

Tabel 3.194. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2025 3–727

Tabel 3.195. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2025) 3–735

Tabel 3.196. Rincian Anggaran Urusan Fasilitasi Perekonomian dan SDA Tahun 2025 3–746

Tabel 3.197. Capaian Kinerja Program dan subkegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Perekonomian dan SDA Tahun 2025..... 3-747

Tabel 3.198. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2025 3–756

Tabel 3.199. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2025 3–757

Tabel 3.200. Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 3–759

Tabel 3.201. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2023-2027 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027).....3–763

Tabel 3.202. Capaian Kinerja Program dan subkegiatan Penunjang Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2025.....3–769

Tabel 3.203. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2024–2025 serta capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD (2027).....3–777

Tabel 3.204. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2025..... 3-784

Tabel 3.205. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2025 3–788

Tabel 3.206. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2025 3–793

Tabel 3.207. Rata-rata Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Biro Umum dan Protokol Setda DIY tahun 2025.....3–797

Tabel 3.208. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum dan Protokol Tahun 2025 serta Capaian 2025 Terhadap RPJMD 3–798

Tabel 3.209. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum dan Protokol Tahun 2025.....3–800

Tabel 3.210. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025.....3–806

Tabel 3.211. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2025 3–808

Tabel 3.212. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2025 pada Pemda DIY 3–814

Tabel 3.213. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Itjen kemendagri Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2025 pada Pemda DIY 3–817

Tabel 3.214. Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY 3–818

Tabel 3.215. Pengukuran Capaian Sasaran 3–819

Tabel 3.216. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) 3–819

Tabel 3.217. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2025 3–825

Tabel 3.218. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 serta Capaian 2025 3–832

Tabel 3.219. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 3–835

Tabel 3.220. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Sekretaris DPRD Tahun 2024–2025 serta Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD DIY 2022–2027 3–839

Tabel 3.221. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2025 3–842

Tabel 3.222. Kebijakan Strategis Pemda DIY 3–848

Tabel 4.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2025 4–5

Tabel 4.2. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2025 4–10
Tabel 4.3. Lokasi Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2025 4–12
Tabel 4.4. Lokasi Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) di DIY Tahun 2025 4–12
Tabel 4.5. Lokasi Kegiatan Preservasi Jembatan di DIY Tahun 2025 4–12
Tabel 4.6. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2025 4–12
Tabel 4.7. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga Tahun 2025 4–13
Tabel 4.8. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2025 4–14
Tabel 4.9. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2025 4–14
Tabel 4.10. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2025 4–17
Tabel 4.11. Rekapitulasi Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2025 4–19
Tabel 4.12. Rekapitulasi Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2025 4–21
Tabel 4.13. Rekapitulasi Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2025 4–23
Tabel 5.1. Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2025 Menurut Urusan 5–2

Tabel 5.2. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kelembagaan TA 2025..... 5–4

Tabel 5.1. Rekapitulasi Pencacahan SIPEDET CANTIK DIY TA 2025 5–70

Tabel 5.3. Target Indikator Reformasi Kalurahan Tahun 2023-2027 5–72

Tabel 5.4. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kebudayaan TA 2025.....5–77

Tabel 5.5. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2025.....5–123

Tabel 5.6. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025.....5–140

Tabel 6.1. Nilai Perwujudan SRS Pantai Selatan Gunungkidul 6–57

Tabel 6.2. Persentase Pola Ruang 6–59

Tabel 6.3. Hasil PenilaianPerwujudan 6–60

Tabel 6.4. Persentase Perwujudan Pola Ruang 6–62

Tabel 6.5. Penilaian Perwujudan Ruang SRS Pansela Kulon Progo.....6–63

Tabel 6.6. Persentase Perwujudan Pola Ruang SRS Pansela Kulon Progo 6–66

Tabel 6.7. Unit Kerja Predikat WBK/WBBM di Pemerintah Daerah DIY.....6–108

Tabel 6.8. Rekapitulasi Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan dan Realisasi Anggaran Triwulan IV 2025.....6–122

Tabel 6.9. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Yang Dilakukan OPD DIY Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.....6–123

Tabel 6.10. Capaian Kinerja Reformasi Kalurahan Tahun 2025 6–132

Tabel 6.11. Rincian Desa/Kalurahan Mandiri.....6–134

Tabel 6.12. Rincian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (DMB)...6–134
Tabel 6.13. Rincian Desa/Kalurahan Swasembada.....6–134
Tabel 6.14. Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Kalurahan.....6–134
Tabel 6.15. Rincian Kinerja RB Kalurahan.....6–136
Tabel 6.16. Capaian Reformasi Pemberdayaan masyarakat Kalurahan Tahun 2025.....6–136
Tabel 6.17. Rincian Kinerja RPM Kalurahan.....6–138
Tabel 6.18. Pemeringkatan BUMKal Tahun 2025 6–138
Tabel 6.23. Capaian SPM Pendidikan di Wilayah Perbatasan DIY Tahun 2025 6–147
Tabel 6.24. Daftar Rumah Sakit di Wilayah Perbatasan 6–159
Tabel 6.25. Daftar Fasyankes di Wilayah Perbatasan 6–160
Tabel 6.26. Daftar Penyakit Berpotensi KLB di Puskesmas Wilayah Perbatasan Tahun 2025 Berdasarkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)....6–162
Tabel 6.27. Penanganan Ruas Jalan di Wilayah Perbatasan pada tahun 2025.....6–165
Tabel 6.28. Kondisi Jalan Eksisting di Wilayah Perbatasan DIY Tahun 2025 6–166
Tabel 6.29. Data dan Statistik Pengelolaan (Simulasi) 6–178
Tabel 6.30. Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah (Simulasi).....6–179
Tabel 7.1. Data Jumlah Naskah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Yang Masih Berlaku 2016-2025..... 7–2
Tabel 7.2. Daftar Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2025..... 7–3
Tabel 7.3. Daftar Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2025..... 7–3
Tabel 7.4. Daftar Kesepakatan Bersama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2025.....7–10

Tabel 7.5. Daftar Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2025 7–11

Tabel 7.6. Sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2025 7–13

Tabel 7.7. Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2025 7–15

Tabel 7.8. Capaian Pendetailan Garis Batas Daerah DIY – Jateng Tahun 2025 7–23

Tabel 7.9. Penegasan batas Kalurahan/Kelurahan Tahun 2025 7–26

Tabel 7.10. Penerimaan Laporan Dan Konsultasi di LO DIY. 7–44

Tabel 7.11. Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2025 7–67

Tabel 7.12. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 7–69

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY 1–45

Gambar 1.2. Peta Wilayah Administratif DIY 1–46

Gambar 1.3. Peta Morfologi DIY.....1–49

Gambar 1.4. Peta Kemiringan Lereng DIY 1–50

Gambar 1.5. Peta Akumulasi Curah Hujan DIY 1–51

Gambar 1.6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY 1–53

Gambar 1.7. Peta Ketersediaan Air Tanah DIY.....1–57

Gambar 1.8. Peta Cekungan Air Tanah DIY 1–58

Gambar 1.9. Struktur ketenagakerjaan DIY 1–62

Gambar 1.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2021–2025.....1–64

Gambar 1.11. Angkatan Kerja Tahun 2021–2025 1–65

Gambar 1.12. Penduduk Yang Bekerja Tahun 2021–2025 1–66

Gambar 1.13. Distribusi dan Perubahan Penduduk Yang Bekerja (PYB) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama DIY 1–67

Gambar 1.1. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2021–2025 1–69

Gambar 1.14. TPT Nasional dan DIY Tahun 2021 -2025.....1–70

Gambar 1.15. Capaian APK dan APM DIY Tahun 2025.....1–73

Gambar 1.16. Pencapaian Rapor Pendidikan DIY Tahun 2025 1–74

Gambar 1.17. Data Wisatawan di DIY yang Menginap di Hotel Bintang dan Non Bintang Tahun 2024–2025.....1–79

Gambar 1.18. Persentase TPK Hotel Bintang di DIY Tahun 2024 –2025 1–79

Gambar 1.19. Persentase Moda Transportasi yang Digunakan Wisatawan Nusantara Selama di DIY Tahun 2025 1–81
Gambar 1.20. Jumlah PNS Pemda DIY Tahun 2021–2025..... 1–112
Gambar 1.21. Jumlah ASN Pemda DIY Tahun 2025..... 1–113
Gambar 1.22. Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Golongan .. 1–113
Gambar 1.23. Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Pendidikan..... 1–114
Gambar 3.1. Perkembangan *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2021–2025 3–3
Gambar 3.2. Indeks Kebahagiaan DIY Tahun 2014-2021 3–6
Gambar 3.3. Indeks Williamson DIY Tahun 2020–2025 3–7
Gambar 3.4. Capaian indeks RB Pemda DIY Tahun 2022 –2025 3–11
Gambar 3.5. Tingkat Kemiskinan DIY Maret 2025–September 2025 3–25
Gambar 3.6. Grafik persentase Kemiskinan 2013 dan 2025 DIY dan Nasional..... 3–26
Gambar 3.7. Pendapatan per Kapita DIY Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah) 3–32
Gambar 3.8. Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2021 - 2025 3–34
Gambar 3.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2021–2025 3–40
Gambar 3.10. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) DIY Tahun 2021–2025 3–41
Gambar 3.11. Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2021–2025 3–42
Gambar 3.12. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2021–2025..... 3–42
Gambar 3.13. Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2025..... 3–52

Gambar 3.14. Perkembangan Indeks Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan Maret 2021 – Maret 2025 3–73
Gambar 3.15. Rata-rata Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB DIY tahun 2020 - 2024 3–80
Gambar 3.16. Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2021–2025.....3–82
Gambar 3.17. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di DIY 2020-2025 3–84
Gambar 3.18. Data Wisatawan Menginap di Akomodasi per bulan Tahun 2025 3–85
Gambar 3.19. Struktur Belanja Wisatawan Mancanegara di DIY Tahun 2025.....3–85
Gambar 3.20. Persentase jenis Akomodasi yang Digunakan Wisatawan Mancanegara ke DIY Tahun 2025.....3–86
Gambar 3.21. Struktur Belanja Wisatawan Nusantara di DIY Tahun 2025.....3–87
Gambar 3.22. Persentase jenis Akomodasi yang Digunakan Wisatawan Nusantara ke DIY Tahun 2025.....3–87
Gambar 3.23. PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2020–2025 (Harga Berlaku–Juta Rupiah) 3–88
Gambar 3.24. Perkembangan WUB Tahun 2021–2025.....3–91
Gambar 3.25. Capaian Angka HLS Kabupaten/Kota dan DIY Tahun 2025 (Dalam Satuan Tahun).....3–99
Gambar 3.26. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Nasional Tahun 2021–2025 (dalam Satuan Tahun) 3–100
Gambar 3.27. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2020–2025 (Tahun) 3–106

Gambar 3.28. Perbandingan Perkembangan IDG DIY Dengan Tingkat Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 3–116
Gambar 3.29. Nilai IKM Pemda DIY Tahun 2021–2025 3–129
Gambar 3.30. Tingkat Emisi GRK per Sektor di DIY Tahun 2022–2024 3–141
Gambar 3.31. Para Penerima Penghargaan Kompetisi Bidang Pendidikan dalam Anugerah Prestasi Tahun 2025 .3–171
Gambar 3.32. Pelaksanaan pembangunan jalan Kretek – Girijati Tahun anggaran 2025 3–197
Gambar 3.33. Pembangunan jembatan Kretek 2 (kiri) dan Jembatan Pandansimo (Jembatan Kabanaran) (kanan) 3–197
Gambar 3.34. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPAM Kamijoro Kabupaten Kulonprogo 3–198
Gambar 3.35. Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake di Kalurahan Kebon Agung 3–198
Gambar 3.36. Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi 41 di Gali Waled dan Babak Semak 3–199
Gambar 3.37. Pembersihaan Sedimen dan Semak Sampah Embung/Telaga 3–200
Gambar 3.38. Pembangunan Sumur Bor Kab. Kulon Progo 3–200
Gambar 3.39. Operasional dan Pemeliharaan SPALD-T Regional Sewon 3–202
Gambar 3.40. Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli tahun 2025. 3–203
Gambar 3.41. Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi melalui Klinik Konstruksi di Kalurahan Panggungharjo (Bantul), Kalurahan Banjaroyo (Kulon Progo) 3–204

Gambar 3.42. Proses pengujian bahan bangunan, tanah dan bantuan, dan pengujian rancangan yang dilaksanakan oleh laboratorium konstruksi Balai PALPJK. 3–204
Gambar 3.43. *Cut Off Point* Indeks Ketahanan Pangan.....3–328
Gambar 3.44. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2021–2025.....3–329
Gambar 3.45. Perbandingan Realisasi Investasi berdasar PSN dan Non PSN (Murni) di DIY tahun 2025 3–439
Gambar 3.46. Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi DIY Tahun 2021–2025 3–441
Gambar 3.47. Grafik Realisasi Investasi Tahun 2025 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp) 3–448
Gambar 3.48. Persentase Realisasi Investasi Tahun 2025 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota 3–449
Gambar 3.49. Perolehan Medali Emas Cabang Olahraga Pencak Silat pada POPNAS XVII.....3–468
Gambar 3.50. Penilaian Indeks KAMI Tahun 2025 3–482
Gambar 3.51. Tingkat Kematangan Keamanan Siber.....3–483
Gambar 3.52. Tampilan Website Balai Layanan Perpustakaan 3–511
Gambar 3.53. Tampilan Aplikasi iJogja 3–511
Gambar 3.53. Tampilan Jogja Library For All 3–512
Gambar 3.53. Pameran Kearsipan Tahun 2025.....3–521
Gambar 3.53. Sertifikat Memori Kolektif Bangsa 3–522
Gambar 3.54. Grafik Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2021–2025 (dalam ton) 3–527
Gambar 3.55. Minat Wisatawan Nusantara Mengunjungi DIY Tahun 2024 dan 2025 3–541
Gambar 3.56. Minat Wisatawan Mancanegara Mengunjungi DIY Tahun 2025.....3–542

Gambar 3.57. Seremoni Penyerahan Bantuan Akses Listrik Masyarakat melalui Gerakan URUPKE.....3–590

Gambar 3.58. Sosialisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2025 tentang Cetak Biru Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan 3–593

Gambar 3.59. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 3–594

Gambar 3.60. Penegakan Hukum terhadap PETI di Sungai Progo Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.....3–595

Gambar 3.61. Pemasangan Papan Larangan Penambangan Tanpa Izin di Lokasi potensi dilakukan penambangan.....3–595

Gambar 3.62. Monitoring Penurunan Muka Air Tanah pada Sumur Pantau Wirobrajan, Yogyakartal 3–596

Gambar 3.63. Pengawasan air tanah belum berizin di Bantul (Kiri) dan Pemantauan pengusahaan air tanah tidak berizin oleh Tim Terpadu (Kanan).....3–598

Gambar 3.64. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Lembaga/Instansi 3–642

Gambar 3.65. Jumlah Responden Berdasarkan Media Informasi yang Diakses 3–643

Gambar 3.66. Penerimaan Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3–700

Gambar 3.67. Penerimaan SPM Award 2025 3–704

Gambar 3.68. Pelantikan Kepala Daerah di Halaman Istana Merdeka Jakarta 3–706

Gambar 3.69. Beberapa Dokumen Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2025.....3–753

Gambar 3.70. Festival Keagamaan STQ Daerah dan Nasional....3–755
Gambar 3.71. Festival Keagamaan Pesparani Daerah dan Pelatihan Pesparawi Nasional 3–755
Gambar 3.72. Perayaan Nyepi dan Perayaan Waisak Paskah.....3–755
Gambar 3.73. Perayaan Paskah dan Perayaan Natal 3–755
Gambar 3.75. Perayaan Hari Santri.....3–756
Gambar 4.1. Operasi Jaringan Irigasi 4–8
Gambar 4.1. Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi..... 4–8
Gambar 4.1. Pemeliharaan Berkala..... 4–9
Gambar 4.1. Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Jalan Tempel - Pakem(Sleman).....4–15
Gambar 4.2. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Pulowatu.....4–15
Gambar 4.3. Pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan (Padat Karya) 4–15
Gambar 5.1. Rehab Gedung TMPN Kusumanegara.....5–40
Gambar 5.2. Peralatan Penunjang Mini Teater TMPN Kusumanegara 5–40
Gambar 5.3. Layanan SiKeling Untuk Pelaku IKM.....5–42
Gambar 5.4. Kolaborasi dengan UGM dan Koperasi UPI Minabahari terkait Pengotimalan *Autoclave* 5–42
Gambar 5.5. Tampilan *Website* SIBUKIN 5–44
Gambar 5.6. Pelatihan *e-Training Batch* 1–4 Tahun Anggaran 2025 5–44
Gambar 5.7. Ruang *Showroom* SLB Negeri Pembina Yogyakarta.....5–45
Gambar 5.8. Proporsi Peserta Pelatihan Pentamarto 5–47
Gambar 5.9. Kegiatan Pelatihan Pertolongan Kegawatdaruratan Henti Jantung.....5–47

Gambar 5.10. Pemasangan AED di Lokasi Taman Pintar dan Teras Malioboro II 5–48
Gambar 5.11. Kegiatan Penduduk Usia Lanjut dalam Gelas Berlian Sinuri 5–50
Gambar 5.12. Pelaksanaan Kegiatan Layanan Lajang Cakap bagi Siswa/Siswi Tahun 2025.....5–51
Gambar 5.13. Sosialisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....5–53
Gambar 5.14. Fasilitasi Pendamping Pembuatan NIB Bagi Pelaku Usaha Program Inovasi GAMPIL 5–56
Gambar 5.15. *Screenshot* Tampilan Fitur Aplikasi ASN Memayu....5–58
Gambar 5.16. Penerimaan DLC di Beberapa Komunitas Baca di Kabupaten Sleman 5–59
Gambar 5.17. Tampilan *Website* DLC di Kabupaten Sleman.....5–60
Gambar 5.18. Kegiatan Pendampingan Psikologi di Sekolah-Sekolah di Wilayah Kab.Sleman 5–61
Gambar 5.19. Penambahan kelengkapan Dapur Mucuna Chip Posbindu di Kalurahan Kaliagung 5–63
Gambar 5.20. Bantuan Kambing dan Kandang bagi Penyandang Disabilitas di Kalurahan Sukoreno 5–63
Gambar 5.21. Pelatihan Pembuatan Kripik Tempe Sagu bagi Penyandang Disabilitas di Kalurahan Tuksono 5–64
Gambar 5.22. Kegiatan-Kegiatan yang Dilaksanakan di Posbindu Estu Mandiri.....5–66
Gambar 5.23. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pelatihan Kader.....5–68
Gambar 5.24. Budidaya Lele dan Pengelolaan Bank Sampah 5–68
Gambar 5.25. Kegiatan Pemeriksaaan Kesehatan dan Pelatihan Membatik.....5–69
Gambar 5.26. Rapat Koordinasi dan Sosialisaasi SIPEDET CANTIK 5–71

Gambar 5.27. Sticker Pendataan SIPEDET CANTIK dan Pendukung Pendataan 5–71

Gambar 5.28. Forum Komunikasi Reformasi Kalurahan Tingkat DIY 5–75

Gambar 5.29. Monev BKK Reformasi Kalurahan TA 2025.....5–75

Gambar 5.30. Trip Pelayanan *Jogja Heritage Track* 5–111

Gambar 5.31. Persentase Jenis Produk UMKM SiBakul Lolos Kurasi Markethub 2025.....5–113

Gambar 5.32. Jumlah UMKM yang Memanfaatkan Program *Markethub Free* Ongkir Tahun 2025.....5–113

Gambar 5.33. Sosialisasi dan Penyerahan Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMA.....5–116

Gambar 5.34. Kegaitan Sosialisasi dan Kartu Cerdas Jenjang SMK.....5–117

Gambar 5.35. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Beasiswa Retrieval SMA.....5–118

Gambar 5.36. Kegiatan Sosialisasi Retrieval dan Pendataan Beasiswa Retrieval SMK.....5–119

Gambar 5.37. Penyerahan Bantuan Beasiswa Inklusi pada Siswa SD 5–121

Gambar 5.38. Foto kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan Kegiatan Sinkronisasi Kesepakatan Batas Wilayah DIY–Jawa Tengah.....5–134

Gambar 5.39. Pengadaan Sarana dan Prasarana Ternak Kambing 5–136

Gambar 5.40. Sarana dan Prasarana Pertanian *Greenhouse* Budidaya Melon 5–137

Gambar 5.41. Penanaman Bibit Cabai dan Hasil Panen Cabai di Kalurahan Harjobinangun 5–138

Gambar 5.42. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari–Klepu, Kulon Progo. 5–149

Gambar 5.43. Pembangunan Jalan Prambanan–Gayamharjo segmen (B4 & B5) 5–150
Gambar 5.44. Peningkatan Ruas Jalan Tegalsari–Kebonharjo 5–151
Gambar 5.45. Pembangunan Gedung Psikiatri Terpadu, Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medik dan Pembangunan Gedung Farmasi. 5–152
Gambar 5.46. Lokasi Pembangunan TKP Ketandan 5–153
Gambar 5.47. Tempat Parkir Khusus (TKP) Ketandan 5–154
Gambar 5.48. Status RDTR di DIY Awal Pendampingan 2025 5–155
Gambar 5.49. *Event* Pasar Tiban 5–159
Gambar 5.50. Alat-Alat Gamelan dan Genset 5–159
Gambar 5.51. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Hargorejo.....5–160
Gambar 5.52. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Pagerharjo.....5–161
Gambar 5.53. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Lumbungrejo.....5–161
Gambar 5.54. *Masterplan* dan *Detail Engineering design* (DED) Pekerjaan Jalan Kawasan Manjung.....5–162
Gambar 5.56. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Pucung 5–163
Gambar 5.57. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Sambirejo 5–163
Gambar 5.58. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Sumberagung 5–164
Gambar 5.60. Sarana Prasarana Pendukung Wisata Embung Bembem 5–165
Gambar 6.1. Foto Dokumentasi 0% (kiri) dan 100% (kanan) pada sta 0+500..... 6–3
Gambar 6.2. Foto Dokumentasi 0% (kiri) dan 100% (kanan) pada sta 1+400..... 6–3

Gambar 6.3. Rencana Program Pembangunan Ruas Prambanan–Gayamharjo 6–4
Gambar 6.4. Foto Dokumentasi 100% pada 8+025 (kiri) dan 8+400 (kanan) 6–5
Gambar 6.5. Dokumentasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Prambanan–Gading yang telah dilakukan sampai tahun 2025..... 6–5
Gambar 6.6. Pekerjaan Penanganan Runoff TPA Piyungan 6–7
Gambar 6.7. Rehabilitasi Beteng Margahinggil.....6–10
Gambar 6.8. Rehabilitasi beteng Margahinggil 6–10
Gambar 6.9. Penguatan Lereng Bukit Merak.....6–11
Gambar 6.10. Penguatan Lereng Bukit Merak.....6–11
Gambar 6.11. Peningkatan SDM Abdi Dalem 6–11
Gambar 6.12. Forum Konsultasi Publik dan Dokumen Heritage Impact Assessment (HIA) Jogja Planning Gallery 6–13
Gambar 6.13. Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Pembangunan Jogja Planning Gallery 6–14
Gambar 6.14. Gambar Pengelolaan Toilet Titik Nol 6–15
Gambar 6.15. Jumlah Penumpang Bus Listrik Tahun 2025 6–22
Gambar 6.16. Koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan RI....6–26
Gambar 6.17. Koordinasi dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO.....6–26
Gambar 6.18. Pelatihan HUL.....6–26
Gambar 6.20. Jogja World Heritage Festival 2025 6–27
Gambar 6.21. Peringatan Hari Warisan Dunia 2025.....6–27
Gambar 6.22. Event Selasa Wagen 2025.....6–27
Gambar 6.23. Pengelolaan Media Sosial 2025.....6–28
Gambar 6.24. Tingalan Wiyosan Dalem Tumbuk Ageng.....6–36
Gambar 6.25. Garebeg Syawal 6–37

Gambar 6.26. Labuhan....6–37
Gambar 6.27. Garebeg Mulud....6–37
Gambar 6.28. Hadeging Kadipaten Pakualaman Tahun Jawa....6–37
Gambar 6.29. Ruas Jalan JORR....6–42
Gambar 6.30. Pekan Budaya Tionghoa 2025....6–46
Gambar 6.31. Bapak Gubernur dalam kegiatan Pekan Budaya Tionghoa 2025....6–47
Gambar 6.32. Bergodo Jogo Malioboro....6–47
Gambar 6.33. Paskribaka Jogja Fashion Carnival 2025....6–47
Gambar 6.34. Color Of Indonesia by Rumah Quinsa Jogja Fashion Carnival 2025....6–48
Gambar 6.35. Foto Dokumentasi 0% (kiri) dan 100% (kanan) pada sta 2+800....6–48
Gambar 6.36. Foto Dokumentasi 100% pada sta 0+750 (kiri) dan 0+900 (kanan)....6–48
Gambar 6.37. Foto Dokumentasi 100% pada sta 0+350 (kiri) dan 0+500 (kanan)....6–49
Gambar 6.38. Jaringan Jalan JJLS....6–54
Gambar 6.39. Dokumentasi Pemeliharaan PLTH Pantai Baru....6–55
Gambar 6.40. Dokumentasi PLTH Pantai Baru dan pemanfaatan listriknya untuk PJU....6–56
Gambar 6.41. Sebaran Kalurahan Penerima BKK Kalurahan Maritim Tahun 2021–2025....6–68
Gambar 6.42. Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan JJLS s.d. Tahun 2025....6–76
Gambar 6.43. Foto 100% Pembangunan Segmen Planjan–Tepus....6–76
Gambar 6.44. Foto 100% pembangunan Jembatan Kretek 2 (Kiri) dan Jembatan Pandansimo (Kanan)....6–77
Gambar 6.45. Layang-layang Kategori Train dalam Kegiatan Festival Layang-layang Internasional 2025....6–77

Gambar 6.46. Pengecekan Irigasi Tetes di Sekitar Benih Kelapa Kopyor 6–83
Gambar 6.47. Pembuatan Pestisida Alami 6–83
Gambar 6.48. Penyemprotan Pestisida Alami 6–83
Gambar 6.49. Pemindahan embrio kelapa kopyor yang dilakukan oleh tenaga teknis laboratorium 6–83
Gambar 6.50. Pengamatan Embrio Kelapa Kopyor pada Bulan Desember 2025 6–83
Gambar 6.51. Talkshow Jelajah Ruang Menoreh 2025.....6–84
Gambar 6.52. Jelajah Ruang Menoreh Geo Heritage Fun Run & Walk 2025.....6–84
Gambar 6.53. Geo Heritage Harmony Festival di Jelajah Ruang Menoreh 2025.....6–84
Gambar 6.54. Pengembangan *Smart Agriculture* di Kawasan Aerotropolis 6–88
Gambar 6.55. Pembangunan penanda (signage) di destinasi wisata Pantai Glagah dan Pantai Trisik (*Smart Tourism–Ocean Side*) 6–89
Gambar 6.56. Pembongkaran Kios dan Bangunan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali 6–94
Gambar 6.57. Kondisi lahan eks Menara Kopi di Kotabaru sebagai lokasi relokasi sementara 6–94
Gambar 6.58. Tampilan Dashboard Masterplan Jogja Smart Province.....6–99
Gambar 6.59. Foto-Foto Sarana dan Prasarana.....6–103
Gambar 6.60. Indeks RB Pemda DIY Tahun 2021-2025.....6–106
Gambar 6.61. Jogja Culture Show Setiap Jumat dan Sabtu di Taman Budaya Embung Giwangan.....6–114
Gambar 6.62. Agenda Budaya Taman Budaya Kulon Progo 6–115
Gambar 6.63. Program Lele Gacor Sebagai Instrumen Strategis Dalam Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat 6–127

Gambar 6.64. Pelaksanaan Penyaluran Bansos JSLU di Kalurahan Karangsewu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo 6–128
Gambar 6.65. Pelatihan Desa Preneur di Kalurahan Sidoharjo 6–128
Gambar 6.66. Presentasi Kepengurusan Desa Preneur di Ngargosari Kapanewon Samigaluh 6–129
Gambar 6.67. Pemaparan Konsep Produk Unggulan 6–129
Tabel 6.19. Sosialisasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan 6–144
Tabel 6.20. Sosialisasi Reformasi Kalurahan..... 6–144
Tabel 6.21. Forum Komunikasi Pemutakhiran Data Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2025 6–145
Tabel 6.22. Asistensi Indeks Desa DIY yang Berstatus Maju 6–145
Gambar 6.68. Kondisi Jalan Provinsi di DIY di wilayah perbatasan..... 6–166
Gambar 6.69. Pembangunan Ruang Praktik Siswa di SMKN 1 Kokap melalui Program Revitalisasi SMK 2025 6–170
Gambar 6.70. Pemeriksaan Masyarakat lintas batas Kulonprogo Purworejo - Puskesmas Kokap II 6–170
Gambar 6.71. Survei Jentik Malaria - Puskesmas Kokap II 6–170
Gambar 6.72. Penanganan Ruas Jalan Prambanan - Gayamharjo 6–171
Gambar 6.73. Penanganan Ruas Jalan Prambanan - Gayamharjo 6–171
Gambar 6.74. Penanganan Ruas Jalan Hargamulyo - Watugajah..... 6–171
Gambar 6.75. Penanganan Ruas Jalan Hargamulyo - Watugajah..... 6–171
Gambar 6.76. Peningkatan Jalan Klangon - Tempel 6–171

Gambar 6.77. Rapat Koordinasi POKJA PUG dipimpin oleh Wakil Gubernur DIY 6–176
Gambar 7.1. Infografis Kebencanaan Tahun 2025.....7–36
Gambar 7.2. Pertandingan Bulutangkis Putri pada PORDA XVII.....7–52
Gambar 7.3. Pesta Siaga 2025 di Bumi Perkemahan Babarsari 7–54
Gambar 7.4. Penanganan Aduan dengan klarifikasi produk kesehatan 7–64
Gambar 7.5. Jumlah Penumpang Trans Jogja 5 Tahun Terakhir.....7–74



LKPJ Gubernur DIY 2025

jogja istimewa

Pendahuluan

Bab I

Pendahuluan

A. DASAR HUKUM

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan konsekuensi dari keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 di mana Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia (RI).

Berdasarkan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa diakui sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat ukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki era pemerintahan baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-undang ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin *ke-*

bhinneka-tunggal-ika-an, serta melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, *ke-bhinneka-tunggal-ika-an*, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memiliki 2 kewenangan yaitu kewenangan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Urusan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja terhadap kewenangan yang diberikan, Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Dasar hukum penyusunan LKPJ Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022–2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 5);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 18).
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 25);

B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

1. Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan jangka panjang merupakan visi pembangunan 20 tahun kedepan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024. Visi jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwujudkan pada tahun 2045 yaitu: **"Terwujudnya *Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan*".**

Perumusan Visi Pembangunan DIY 2045 berlandaskan pada dasar filosofi pembangunan DIY *"Hamemayu Hayuning Bawana"* sebagai suatu cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkelanjutan dan sebagai perwujudan dari nilai-nilai budaya luhur Yogyakarta. Keistimewaan DIY sebagai suatu warna dan identitas Daerah Istimewa Yogyakarta yang lahir dari kearifan lokal untuk mewujudkan Trilogi Filosofi *"Hamemayu Hayuning Bawana", Sangkan Paraning Dumadi"*, dan *Manunggaling Kawula Gusti".*

Daerah Istimewa Yogyakarta Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan pada Tahun 2045 dapat dimaknai Kondisi DIY yang berdaya, modern, tangguh, adil, dan memiliki daya saing di setiap tingkatan dibarengi dengan kehidupan masyarakat DIY yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya baik spiritual dan material dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan antarwilayah, antar sektor, dan antar aktor dengan terus menerapkan prinsip dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Kebudayaan luhur yang tercipta dari perwujudan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat menjadi landasan pembangunan sekaligus tekad dalam meningkatkan kualitas hidup, penghidupan, dan kehidupan masyarakat jogja. Keistimewaan DIY melandasi harmoni dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan sejarah, filosofi, dan tujuan pembangunan keistimewaan.

Tolak ukur keberhasilan dari Visi jangka panjang diukur melalui capaian dari target sasaran utama Visi daerah yang telah disinkronkan dengan sasaran utama Visi nasional. Sasaran utama Visi jangka panjang daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Sasaran Utama Visi RPJPD Tahun 2025–2045

No	Sasaran Utama Visi	*Baseline* 2025	Sasaran 2045
1	**Peningkatan Pendapatan Per Kapita**		
	a. PDRB per Kapita (Rp Juta)	53,19-53,56	262,61-313,03
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	10,11	39,05
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,89 - 12,00	13,47 - 13,82
2	**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	10,00-10,50	0,41-0,91
	a. Rasio Gini (Indeks)	0,443-0,447	0,381-0,404
	b. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,88	0,74
	c. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30-5,80	4,52-5,56
3	**Kepercayaan Dunia Internasional**		
	Indeks Daya Saing Daerah	3,89-3,95	4,79-5,00
4	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**		
	Indeks Modal Manusia	0,71	0,88
5	**Penurunan Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission***		
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	62,14	95,82
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,49	77,64

Sumber: RPJPD DIY 2025–2045

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari tahapan lima tahunan pertama dari pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045. Penekanan tahapan lima tahun pertama (2025-2029) merupakan tahapan fondasi pembangunan ”

2. Misi Jangka Panjang

Proses perumusan Misi Jangka Panjang dilakukan dengan memastikan keterwujudan Visi dapat dijabarkan melalui pelaksanaan program-program kedepan. Perumusan misi juga memperhatikan Misi Nasional, Isu Strategis, dan Permasalahan Pembangunan. Berdasarkan proses perumusan tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan.
3. Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Trasformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil.
4. Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan.
6. Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah.
7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
8. Menciptakan Kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan.

Misi ke-1, 2, dan 3 merupakan fokus utama dalam pembangunan jangka panjang DIY 2025-2045 yang sejalan dan selaras dengan pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan transformasi ini diharapkan mampu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih kompetitif didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 4 dan 5 merupakan landasan dalam pelaksanaan transformasi pembangunan. Transformasi dapat berjalan baik apabila ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas keamanan, kondisi demokrasi yang kondusif serta stabilitas makro ekonomi daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketahanan sosial budaya dan ekologi serta pengelolaan lingkungan yang baik dan berkualitas diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat sekaligus pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ketika Misi 4 dan 5 terlaksana dengan stabil maka daerah akan memiliki pondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi ke-6, 7, dan 8 merupakan kerangka implementasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan secara merata, berkeadilan, berkualitas dan ramah lingkungan dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan. Kerangka implementasi yang kuat diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Kesinambungan pembangunan diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi sasaran pokok beserta indikator pembangunan jangka panjang serta menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Sasaran pokok yang disusun merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan jangka panjang sesuai Visi yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran pokok diselaraskan dengan dengan arah tujuan pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJPN 2025-2045 beserta indikator dan target yang ditetapkan. Indikator-

indikator Sasaran Pokok ini merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah yang merespresentasikan Visi Jangka Panjang Daerah. Selanjutnya Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Misi, Sasaran Pokok beserta Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025-2045

No	Misi/Sasaran Pokok/ Indikator Utama Pembangunan	*Baseline* 2025	Target 2045
Misi 1	**Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial**		
IE1	**Terwujudnya Kesehatan untuk Masyarakat**		
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,59	81,25
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	30	10
	b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,1	5,2
3	Penanganan Tuberkulosis:		
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	71	95
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88,4	98
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5
IE2	**Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata**		
5	Hasil pembelajaran		
	a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	i) Literasi Membaca	80,00–80,00	100–100
	ii) Numerasi	40,00–80,00	80,00–100
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	i) Literasi Membaca	79,35–81,35	91,05–93,05
	ii) Numerasi	62,68–64,68	85,47–87,47
	c. Rata–Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,49–10,51	13,32–13,44
	d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,97–15,99	17,69–17,83
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	16,5	16,50–18,54
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,24	80

No	Misi/Sasaran Pokok/ Indikator Utama Pembangunan	*Baseline* 2025	Target 2045
IE3	**Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif**		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	10,00–10,50	0,41–0,91
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	37,5	91,2
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	26	60
Misi 2	**Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan.**		
IE4	**Meningkatnya Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi**		
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,89–12,00	13,47–13,82
12	Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) *	10,37	15,3
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) *	237,59	760,29
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,94	0,72
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	4,5	7,68
	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,77	8
	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,63	5,32
	d. *Return on Aset* (ROA) BUMD (%) *	1,9	5,6
15	Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Baik		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12–3,51	2,41–3,42
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67	84,6
17	Tingkat penguasaan IPTEK		
	Skor Indeks Inovasi Daerah	50,34	65,5
IE5	**Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau**		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	58,33	77,62
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	8,94	34,51
IE6	**Meningkatnya Peran Transformasi Digital**		
19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	7,4	8
IE7	**Menurunnya Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**		
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	5,65	4,08
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,36	25,78
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7	12,66
IE8	**Meningkatnya Peran Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**		
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a. Kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul terhadap PDRB DIY	40,13	48,62

No	Misi/Sasaran Pokok/ Indikator Utama Pembangunan	*Baseline* 2025	Target 2045
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	90,1	100
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	45,92	57,65
Misi 3	**Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Trasformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil.**		
IE9	**Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif**		
24	Indeks Reformasi Hukum	96,64	100
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,3	5,0
26	Indeks Pelayanan Publik	4,64	5,0
27	Indeks Integritas Nasional	81,37	98,02
Misi 4	**Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur.**		
IE10	**Terwujudnya Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**		
28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	90
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	74,87	92,25
30	Indeks Demokrasi Indonesia (level DIY)	Tinggi	Tinggi
IE11	**Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**		
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,77	4,3
32	Tingkat Inflasi (%)	3,1–3,7	1–3,1
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	46,09	99,08
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,67	7,84
	c. Total Kredit/PDRB (%)	28,8	79,3
34	Inklusi Keuangan (%)	88,46	98,5
IE12	**Terciptanya Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan**		
35	Jumlah Kerja Sama Provinsi dengan daerah lain di luar negeri (*sister province*)	6	10
36	*Crime Rate*	120,5	110
Misi 5	**Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan.**		
IE13	**Terciptanya Keragaman Agama yang ber–Maslahat dan Pemajuan Budaya**		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	69,4–69,63	80,99–83,03
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,31–80,37	87,78–88,39
IE14	**Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	76,17–76,17	81,62–81,65
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,135–0,130	0,064–0,009
IE15	**Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas**		

No	Misi/Sasaran Pokok/ Indikator Utama Pembangunan	*Baseline* 2025	Target 2045
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,616	0,673
42	Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	70,49	77,64
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	16,23	85
	c. Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19	90
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40	100
IE16	**Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**		
43	Ketahanan energi, air, dan pangan		
	a. Ketahanan Energi		
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) *	1.045	2.645
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	9,06	0,63
	c. Ketahanan Air		
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik) *	2,4	4,53
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	17,88	100
IE17	**Terciptanya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**		
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,89	78,25–66,55
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a. Kumulatif	4,06	24,23
	b. Tahunan	12,49	71,98

C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Visi

Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022–2027 disusun melalui proses pengintegrasian pokok-pokok arahan Gubernur dengan mempertimbangkan secara cermat kondisi obyektif masyarakat DIY, baik dari sisi permasalahan maupun potensi yang dimiliki. Proses tersebut juga memperhatikan dinamika tantangan dan peluang eksternal yang berkembang serta diproyeksikan akan memengaruhi pembangunan daerah di masa mendatang. RPJMD 2022–2027 diposisikan sebagai tahap transisi penting dalam menyiapkan fondasi menuju pencapaian visi

pembangunan DIY jangka panjang dari RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJPD DIY Tahun 2025-2045. Dalam perspektif jangka panjang, pembangunan DIY dipahami sebagai suatu proses berkelanjutan yang mengaitkan dimensi budaya dengan perubahan hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat. Kesinambungan arah pembangunan dijaga selain dengan tetap merujuk pada capaian RPJPD periode sebelumnya dan rencana RPJPD periode setelahnya juga dengan memperhatikan visi pembangunan jangka menengah periode sebelumnya, yaitu “Among Tani Dagang Layar” (2012–2017) dan “Menyongsong Abad Samudera” (2017–2022). Kelima dokumen perencanaan tersebut secara konsisten berlandaskan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana sebagai dasar pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara manusia, masyarakat, budaya, ekonomi, dan lingkungan alam lintas generasi.

Sejalan dengan kesinambungan antara RPJPD DIY Tahun 2005–2025, RPJMD Tahun 2012–2017, dan RPJMD Tahun 2017–2022, serta dalam rangka menyiapkan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD DIY Tahun 2025–2045, tema besar “Menyongsong Abad Samudera Hindia” kembali digunakan sebagai kerangka berpikir pembangunan DIY Tahun 2022–2027. Tema ini dipandang masih relevan sebagai pengantar sekaligus fondasi awal pembangunan jangka panjang DIY dalam konteks kawasan Indo-Pasifik, mengingat meningkatnya peran kawasan Samudera Hindia dalam dinamika ekonomi, geopolitik, dan tata kelola global. Isu-isu strategis seperti pengembangan ekonomi biru, penguatan kerja sama lintas kawasan, serta konektivitas maritim global merupakan agenda jangka panjang yang direspons secara bertahap dan berkelanjutan melalui tahapan RPJMD sebagai bagian dari pencapaian RPJPD DIY Tahun 2025–2045.

Dalam konteks global, pergeseran pusat pertumbuhan dunia menuju kawasan Indo-Pasifik menempatkan Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, pada posisi strategis dalam arsitektur pembangunan masa depan. Kesadaran nasional atas dinamika tersebut diwujudkan melalui arah pembangunan nasional

sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025–2045, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta penguatan daya saing bangsa dalam konteks global. Sejalan dengan arah tersebut, visi pembangunan DIY tidak hanya relevan dalam konteks regional dan nasional, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian dari kontribusi pembangunan jangka panjang daerah terhadap dinamika kawasan Indo-Pasifik, sebagaimana diarahkan dalam RPJPD DIY Tahun 2025–2045.

Selain dinamika geopolitik dan ekonomi global, isu perubahan iklim menjadi tantangan lintas generasi yang memerlukan respons pembangunan jangka panjang. Berlandaskan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, DIY diarahkan untuk membangun ketahanan lingkungan dan sosial melalui praktik pembangunan berkelanjutan yang dimulai dari skala lokal. Dalam perspektif RPJPD, upaya-upaya ini diharapkan membentuk karakter pembangunan DIY yang berwawasan lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu menjadi teladan dalam tata kelola kehidupan yang harmonis.

Dalam lingkup nasional, arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 menjadi rujukan utama dalam penyusunan RPJPD DIY Tahun 2025–2045. Sasaran pembangunan nasional tersebut, yang meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan, menjadi kerangka besar yang dijabarkan secara bertahap melalui RPJMD, termasuk RPJMD DIY Tahun 2022–2027 sebagai fase awal menuju transformasi jangka panjang.

Untuk menjaga konsistensi antara arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, Visi Gubernur DIY Tahun 2022–2027 menekankan pada penguatan fondasi pembangunan yang akan menopang pencapaian visi RPJPD DIY Tahun 2025–2045. Fokus diarahkan pada penyempurnaan capaian periode sebelumnya serta penyiapan basis kelembagaan, kewilayahan, dan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan jangka panjang. Visi

tersebut dirumuskan dalam konsep Pancamulia sebagai tujuan pembangunan antara yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Visi Gubernur DIY Tahun 2022–2027, yaitu “Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi,” diposisikan sebagai bagian dari tahapan pembangunan menuju masyarakat DIY yang unggul, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagaimana ditargetkan dalam RPJPD 2025–2045.

Pancamulia yang kembali ditegaskan sebagai visi dasar RPJMD 2022–2027 memiliki relevansi substansial dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam perspektif jangka panjang, pencapaian Pancamulia diarahkan untuk membangun fondasi kesejahteraan, pemerataan, dan tata kelola yang baik, yang tercermin melalui penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan kualitas lingkungan hidup, penguatan ekonomi masyarakat, pengurangan ketimpangan sosial dan wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Pemberdayaan Kawasan Selatan ditempatkan sebagai strategi pembangunan kewilayahan dalam RPJMD 2022–2027 yang berfungsi sebagai pengungkit transformasi jangka panjang. Kekhususan teritorial Kawasan Selatan, baik dari aspek bentang alam, budaya, maupun kearifan lokal, dikembangkan sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya menjadi model pengembangan kawasan lain di DIY. Dengan pendekatan ini, pembangunan DIY diarahkan berlangsung secara utuh dan seimbang antar kawasan dalam jangka panjang.

Reformasi Kalurahan diposisikan sebagai strategi penguatan kelembagaan dasar masyarakat dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan jangka panjang. Kalurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat menjadi simpul utama dalam pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan

penguatan ketahanan sosial. Dalam kerangka RPJPD, Reformasi Kalurahan menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk mendukung transformasi kewilayahan dan kelembagaan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup penguatan infrastruktur digital, pengembangan sistem informasi kalurahan menuju Kalurahan Cerdas, peningkatan kualitas tata kelola sumber daya, serta penguatan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap risiko sosial dan lingkungan, sebagai bagian dari penyiapan DIY menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang hingga Tahun 2045.

2. Misi

Berpedoman pada Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Misi dirumuskan sebagai arah kebijakan dan fokus upaya strategis yang menjadi dasar penetapan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Perumusan Visi dan Misi disusun berdasarkan data dan hasil analisis yang objektif dan terukur, serta dilengkapi dengan pertimbangan kualitatif untuk memastikan keterpaduan antara pendekatan kuantitatif dan konseptual. Dengan demikian, misi menjadi kerangka operasional yang menjembatani visi pembangunan dengan perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada level selanjutnya.

Sejalan dengan Visi *"Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi"*, dirumuskan empat misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;

2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

3. Tujuan

Tujuan pembangunan dirumuskan sebagai pernyataan arah hasil yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, dengan menjawab isu-isu strategis serta permasalahan utama pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perumusan tujuan merupakan penjabaran yang lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah, dengan tetap berpedoman pada visi yang telah ditetapkan.

Selain berlandaskan visi dan misi, penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 juga mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang, meliputi:

1. Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Perdesaan
2. Pengembangan Kawasan Selatan DIY
3. Perkembangan Teknologi Informasi
4. Respon peluang transnasional
5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6. Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris
7. Penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19
8. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
9. Upaya Pemajuan Kebudayaan
10. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
11. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
12. Kualitas Lingkungan Hidup

Memperhatikan hal tersebut, rumusan tujuan pembangunan tahun 2022–2027 beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022–2027

No	Tujuan	Indikator Tujuan	*Baseline*	Target					Target Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif/ IGI (*Inclusive Growth Index*)	6,24	6,32	6,42	6,52	6,62	6,72	6,72
		Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84	73,41	73,98	74,55	75,12	75,12
2	Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	0,450	0,444	0,441	0,438	0,435	0,432	0,432
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A	A	A	A	A
4	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027

4. Sasaran

Perumusan kinerja pembangunan DIY berpedoman pada prinsip SMART-C, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Kinerja sasaran sebagai penjabaran kinerja tujuan dirumuskan melalui indikator yang jelas dan terukur untuk mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus, sehingga pengerahan dan pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi lintas sektor yang mendorong pertumbuhan wilayah, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai diupayakan dapat dinikmati secara merata melalui pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, kebudayaan

ditempatkan sebagai arus utama pembangunan untuk menjaga jati diri masyarakat di tengah dinamika perubahan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, dirumuskan sasaran pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 beserta indikator dan target kinerja sebagai dasar pengukuran capaian pembangunan.

Tabel 1.3. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022 – 2027

Sasaran	Indikator Sasaran	*Baseline* 2022	Target					Kondisi Akhir 2027
			2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66	8,66
1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2	5,7-6,2
	Pendapatan Per Kapita (Rp Juta)	28,07	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41	34,41
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8	3,26-3,56	3,01-3,31	2,76-3,06	2,76-3,06
	Inflasi	6,49	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23	82,23
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,38
2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09	40,13	40,18	40,24	40,24
3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62	83,74	84,86	85,98	85,98
4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	99,88

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027

D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RKPD 2025

1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 – 2027

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 di DIY dilaksanakan secara terarah dan terukur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027 serta dijabarkan secara operasional melalui RKPD DIY Tahun 2025. Dalam kerangka tersebut, strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berada dalam satu koridor pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan daerah, strategi dimaknai sebagai langkah-langkah komprehensif yang memuat program-program indikatif pilihan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dengan mengintegrasikan arahan Gubernur terhadap realitas potensi serta tantangan wilayah. Strategi pembangunan merupakan cara atau pendekatan yang ditempuh Pemda dalam mengerahkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi berfungsi sebagai jembatan antara kondisi eksisting dengan kondisi yang diharapkan, sehingga menekankan pada pilihan-pilihan prioritas yang efektif dan efisien. Dalam dokumen RPJMD DIY 2022–2027, strategi dipahami sebagai pengerahan sumber daya untuk mengatasi permasalahan agar memberikan nilai tambah terhadap pencapaian pembangunan, yang kemudian diturunkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata pencapaian tujuan pembangunan. Strategi ini kemudian dipertajam oleh arah kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman atau koridor untuk mengarahkan strategi tersebut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan agar target kinerja dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan dalam RKPD Tahun 2025 memiliki

koherensi yang sangat kuat dengan dokumen RPJMD DIY 2022–2027, mengingat RKPD 2025 secara substansial merupakan penjabaran operasional tahun ketiga dari rencana jangka menengah tersebut. Internalisasi RPJMD ke dalam RKPD 2025 terlihat pada fokus pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural, terutama pada wilayah-wilayah yang belum maju, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus ini mencerminkan konsistensi antara strategi jangka menengah dengan arah kebijakan tahunan yang diarahkan pada pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan

Keselarasan ini juga ditunjukkan melalui konsistensi penetapan target indikator kinerja makro dan sektoral, di mana setiap kebijakan pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis RPJMD, khususnya dalam penguatan sektor unggulan daerah yang kreatif dan inovatif serta sinkronisasi penanganan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan yang dijalankan tetap berada dalam jalur transformasi pembangunan yang telah direncanakan, sekaligus memastikan bahwa setiap intervensi program tahunan berkontribusi langsung pada pencapaian visi jangka menengah DIY.

Tabel 1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022–2027

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan 2. Penghidupan ekonomi yang layak 3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasiskan sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan public	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
	Meningkatkan tata kelola kalurahan	1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kalurahan 2. Peningkatan tata kelola keuangan 3. Optimalisasi penggunaan TIK
	Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
	Pengembangan sumber-sumber PAD	1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 2. Meningkatkan pendapatan melalui potensi non pajak
Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan 3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia 5. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal
	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 3. Memperkuat ketahanan keluarga
	Meningkatkan penawaran Investment *Project Ready to Offer* di wilayah selatan	Meningkatkan kerjasama pendanaan (investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berdasarkan pemetaan potensi kerjasama
	Meningkatkan kapasitas ketangguhan *(resiliency)* dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan ketangguhan (*resiliency*) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan 3. Memanfaatkan teknologi untuk penanganan bencana
	Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Meningkatnya *Good Governance*	Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan pemenuhan SPM	1. Memperkuat manajemen ASN 2. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi
	Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktivitas pemerintah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
	Meningkatkan kemandirian fiscal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda
	Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	1. Meningkatkan rasa toleransi 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 3. Meningkatkan literasi TIK masyarakat
1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Menurunnya risiko bencana	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon
	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa
	Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022–2027

Strategi pembangunan tahun 2025 difokuskan pada penguatan daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di berbagai lini pelayanan publik. Strategi ini diterjemahkan ke dalam arah kebijakan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif. Selain itu,

sejalan dengan mandat RPJMD, strategi pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, khususnya melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan yang didukung oleh arah kebijakan peningkatan infrastruktur strategis dan konektivitas wilayah. Dengan sinergi antara strategi penguatan ekonomi kerakyatan dan arah kebijakan penyediaan perlindungan sosial yang tepat sasaran, Pemda DIY memastikan bahwa pelaksanaan RKPD 2025 tetap berada dalam jalur transformasi pembangunan yang inklusif. Konsistensi ini menjamin bahwa setiap intervensi program tahunan tidak hanya menjawab tantangan kontemporer, tetapi secara nyata berkontribusi pada pencapaian visi besar DIY dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keistimewaan.

Lebih lanjut, Tahun 2025 juga memiliki makna strategis sebagai tahun awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 tidak hanya diposisikan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD 2022–2027, tetapi sekaligus sebagai fondasi awal bagi pencapaian visi pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD DIY 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode 2025–2045, yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Tabel 1.5. Arah Kebijakan Transformasi Tahap Perkuatan Fondasi Pembangunan (2025-2029) pada RPJPD DIY Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan
Terwujudnya DIY yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui **Transformasi Sosial** untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial	Penuntasan layanan dasar bidang kesehatan dan perlindungan sosial, dan pemantapan kualitas layanan pendidikan

Visi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan
	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui **Transformasi Ekonomi** dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan	Optimalisasi Produktivitas Ekonomi pada sektor strategis (Pertanian, Perikanan, Kelautan, Industri Pengolahan dan UMKM, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
	Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui **Trasformasi Tata Kelola** untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil.	Penguatan kelembagaan pemerintahan yang adaptif, perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, serta penguatan demokrasi
	Menciptakan Kondisi **Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro** yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur	Peletakan fondasi supremasi hukum, demokrasi yang sehat dan stabilitas ekonomi
	Meningkatkan **Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan** yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembentukan karakter
		Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	Menciptakan **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** yang Berorientasi Pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah	Memastikan investasi pembangunan yang berkeadilan di Kawasan Selatan
	Melaksanakan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**	Investasi sarana dan prasarana dasar sesuai standar kelayakan dan kebutuhan
	Menciptakan Kondisi **Pembangunan yang Berkesinambungan** untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan	Memperkuat komitmen untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

Sumber: RPJPD DIY Tahun 2025-2045

Dalam kerangka tersebut, perencanaan pembangunan Tahun 2025 mulai diarahkan untuk meletakkan dasar transformasi pembangunan daerah melalui penguatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada capaian jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan struktur ekonomi yang berdaya saing, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Tahun 2025 dengan demikian menjadi titik awal konsolidasi arah pembangunan jangka panjang yang menekankan kesinambungan, integrasi lintas sektor, dan keberlanjutan pembangunan.

Sebagai tahun transisi menuju kerangka pembangunan jangka panjang baru, kebijakan pembangunan Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan periode sebelumnya sehingga strategi yang dijalankan bersifat berkelanjutan dan saling memperkuat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan pada Tahun 2025 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari tahapan pencapaian sasaran pokok RPJPD 2025–2045. Dengan demikian, sejak Tahun 2025 pelaksanaan pembangunan DIY telah ditempatkan secara sistematis dalam jalur transformasi jangka panjang menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Program Pembangunan Daerah dan Indikator

Program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam konteks DIY, program pembangunan tidak sekadar kumpulan aktivitas birokrasi, melainkan penjabaran riil dari visi, misi, dan strategi kepala daerah yang disusun secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan daerah menjadi jembatan antara dokumen perencanaan strategis jangka menengah dan implementasi

tahunan, sehingga memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Tahun 2025 memiliki makna strategis sebagai tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027 sekaligus menjadi tahap awal bagi pencapaian target jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2025-2045. Keselarasan program pembangunan pada tahun 2025 dijaga secara ketat melalui sistem perencanaan yang berjenjang. Program-program yang dijalankan dalam RKPD DIY Tahun 2025 merupakan derivasi langsung dari visi pembangunan DIY 2022–2027, yaitu:

"Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi". RKPD Tahun 2025 sebagai penjabaran tahunan RPJMD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan penganggaran. Dengan demikian, program pembangunan daerah Tahun 2025 tidak disusun secara parsial, melainkan merupakan bagian dari orkestrasi pembangunan lima tahunan yang telah dirancang sejak awal periode RPJMD.

Secara substantif, program pembangunan daerah Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, kualitas layanan publik, serta pelestarian nilai-nilai keistimewaan DIY. Keselarasan tersebut tercermin dari keterkaitan langsung antara program-program prioritas dengan tujuan pembangunan daerah, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi daerah, pemerataan pembangunan kewilayahan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan.

Indikator program pembangunan daerah Tahun 2025 disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator tersebut mencakup indikator hasil (*outcome*) yang merepresentasikan dampak pembangunan terhadap masyarakat, serta indikator keluaran (*output*) yang menggambarkan capaian langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan. Perumusan indikator ini mengacu pada indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga menjaga kesinambungan pengukuran kinerja antara periode tahunan dan menengah.

Tabel 1.6. Program Pembangunan Daerah Tahun 2022–2027 dan Indikator Kinerjanya

Program Pembangunan Daerah	Indikator Program Pemda	*Baseline*	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Program Pemerataan Kesejahteraan	a)Indeks Gini	0,459	0,423	0,419	0,415	0,411	0,407	0,407
	b)Persentase Desa Mandiri	46,94	54,59	62,24	69,9	77,55	85,2	85,2
Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	6,1	2,9	3,1	3,4	3,6	3,8	3,8
Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4
Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	*Crime rate* (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,1	128,9	124,7	120,5	116,3	112,1	112,1
Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	a)Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,65	15,72	15,74	15,76	15,77	15,78	15,78
	b)Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	74,4	75,4	76,39	77,38	78,37	79,37	79,37
	c)Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen	57,54	58,53	59,52	60,52	61,51	62,5	62,5

Program Pembangunan Daerah	Indikator Program Pemda	*Baseline*	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	numerasi memenuhi kompetensi minimum							
Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a) Angka Harapan Hidup (AHH)	75,08	75,15	75,18	75,21	75,24	75,27	75,27
	b) Prevalensi *Stunting*	16,4	15,1	14	12,9	11,8	10,7	10,7
	c) Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	97,004	97,603	98,203	98,802	99,401	100	100
Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	a) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,77	77,07	77,37	77,67	77,97	78,27	78,27
	b) *Total Fertility Rate* (TFR)	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2
Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	337	343	349	355	361	367	367
Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	a) Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	NA	59,91	67,03	76,7	86,3	96,04	96,04
	b) Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, GK, KP)	5,1	5,35	5,57	5,76	5,95	6,00	6,00
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	86,75	87,76	88,77	89,78	90,79	90,79
	b) Indeks Kematangan SPBE	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	3,27	3,27
Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	a) Indeks Kebebasan	74,46	74,61	74,76	74,91	75,06	75,21	75,21
	b) Indeks Kesetaraan	87,44	87,59	87,74	87,89	88,04	88,19	88,19
Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ribu ton CO2eq)	2.635	2.637	2.639	2.641	2.643	2.645	2.645

Program Pembangunan Daerah	Indikator Program Pemda	*Baseline*	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	a) Perwujudan pola ruang (%)	90,7	91,96	93,22	94,48	95,74	97	97
	b) Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	17,66	20,94	24,23	27,51	30,79	34,07	34,07
Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,63	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,85

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022–2027

E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

1. Tema Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 merupakan bagian dari kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang dan terpadu antara dokumen jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. RKPD DIY Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun keempat RPJMD DIY Tahun 2022–2027 sekaligus menjadi tahun awal pelaksanaan RPJPD DIY 2025–2045, memiliki posisi strategis dalam menjaga konsistensi arah pembangunan sekaligus meletakkan fondasi transformasi jangka panjang daerah.

Perumusan tema pembangunan Tahun 2025 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran RPJMD DIY Tahun 2022–2027, mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahapan pembangunan jangka panjang daerah, memperhatikan arah kebijakan nasional dalam RKP 2025, serta mempertimbangkan dinamika isu strategis aktual di DIY. Dengan demikian, tema pembangunan tidak berdiri sebagai slogan normatif, melainkan sebagai kerangka operasional yang mengarahkan penetapan sasaran, prioritas, program, dan

kegiatan pembangunan daerah secara terukur dan konsisten. Tema pembangunan DIY Tahun 2025 yang ditetapkan adalah:

“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”

Tema tersebut mencerminkan orientasi pembangunan yang menempatkan penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan sebagai pengungkit utama pertumbuhan, dengan tetap menekankan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Pengembangan sektor unggulan dimaknai sebagai upaya sistematis untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di DIY, khususnya pariwisata, pertanian, serta koperasi dan UMKM. Sektor-sektor tersebut diarahkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mendorong pengembangan kawasan selatan sebagai wilayah prioritas pertumbuhan. Pendekatan ini selaras dengan strategi pembangunan kewilayahan dalam RPJMD yang menekankan pengurangan ketimpangan antarwilayah melalui pemberdayaan kawasan belum maju.

Penekanan pada aspek **kreatif dan inovatif** menunjukkan bahwa pembangunan daerah diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui gagasan, metode, produk, dan model layanan baru. Kreativitas dan inovasi menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi, penguatan daya saing daerah, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan pengetahuan.

Sementara itu, **pertumbuhan ekonomi inklusif** menegaskan komitmen bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka makro ekonomi, tetapi juga harus diikuti dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi dan layanan dasar.

Melalui tema tersebut, Pemda DIY menegaskan komitmen untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat daya saing daerah, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan demikian, tema pembangunan Tahun 2025 menjadi pijakan penting dalam mengarahkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk bergerak dalam satu koridor pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat DIY yang lebih merata dan berkelanjutan.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan mendasarkan pada Tema Pembangunan Tahun 2025, sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas ekonomi wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sasaran-sasaran ini merupakan penjabaran langsung dari tujuan pembangunan dalam RPJMD DIY Tahun 2022–2027 dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan tahunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang meliputi:

1) Penurunan tingkat kemiskinan;
2) Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3) Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta;
4) Penurunan ketimpangan antar kelas sosial dan antarwilayah;
5) Penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan; serta
6) Penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tenteram.

Keenam prioritas tersebut telah diselaraskan dengan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2022–2027 sehingga menjaga kesinambungan antara agenda tahunan dan capaian jangka menengah.

Secara eksplisit, prioritas pembangunan DIY Tahun 2025 dirumuskan tidak hanya sebagai penjabaran RPJMD DIY 2022–2027 saja tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan Prioritas Nasional dalam RKP 2025. Keselarasan dengan Prioritas Nasional dilakukan melalui pemetaan langsung antara prioritas daerah dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rancangan RKP 2025. Prioritas nasional terkait penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM direspon oleh DIY melalui prioritas penguatan good governance pada berbagai tingkatan, dengan indikator antara lain Indeks Demokrasi Indonesia. Prioritas nasional mengenai ketahanan dan kemandirian bangsa dalam aspek pangan, energi, air, dan lingkungan diterjemahkan di tingkat daerah melalui prioritas penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tenteram, termasuk pengendalian risiko bencana dan peningkatan kualitas lingkungan. Selanjutnya, prioritas nasional terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan kewirausahaan diselaraskan dengan prioritas pengembangan kehidupan ekonomi yang layak di DIY, yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan pengendalian inflasi. Prioritas nasional dalam peningkatan kualitas SDM, kesehatan, dan penguasaan IPTEK direspon melalui prioritas peningkatan kualitas SDM Yogyakarta, dengan indikator seperti IPM, kesehatan ibu dan anak, serta penurunan *stunting*. Sementara itu, agenda nasional pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan selaras dengan prioritas penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan antarwilayah di DIY, khususnya melalui penguatan kawasan belum maju dan peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Tabel 1.7. Keselarasan Prioritas Pembangunan DIY dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	Indeks Demokrasi Indonesia	PD 5 Penguatan *good-governance*	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
				pada berbagai tingkatan	
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	1	*Asia Power Index (Military Capability)*	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		2	*Asia Power Index Diplomatic Influence)*		
		3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya		
		4	Prevelensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)		
		5	Indeks Ketahanan Energi		
		6	Kapasitas tampungan air (m^3/kapita)		
		7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan(%)		
		8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
		9	Indeks Daya Saing Global		
		10	Indeks Ekonomi Hijau		
		11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
		12	Timbulan Sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah (%)		
		13	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
		14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		15	Persentase Penurunan Emisi GRK -Tahunan (%) - Kumulatif (%)		
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan	1	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan	Pendapatan Perkapita (Rp juta)

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	2	Rasio Kewirausahaan (%)	ekonomi yang layak	
		3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		
		4	Rasio PDB Pariwisata (%)		
		5	Devisa Pariwisata (milliar USD)		
		6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
		7	Aset Perbankan/PDB (%)		
		8	Aset Dana Pensiun /PDB (%)		
		9	Aset Asuransi/PDB (%)		
		10	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
		11	Total Kredit/PDB (%)		
		12	Inklusi Keuangan (%)		
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Hasil Pembelajaran	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
			a.Rata-rata nilai PISA i.Membaca ii.Matematika iii Sains		
			b.Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)		
			c. Harapan lama sekolah (tahun)		
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
		3	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
		4	Tingkat Penguasaan Iptek:		
			a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
			b. Peringkat Indeks Inovasi Global		
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
		7	Usia Harapan Hidup (tahun)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
		8	Kesehatan Ibu dan Anak		
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
			b. Prevelensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
		9	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)		
		10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		
		11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		
		12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
		2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)		
		3	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)		
		4	Biaya Logistik (%PDB)		
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
		2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		
		3	Persentase panyandang disabilitas		

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
			yang bekerja di sektor formal (%)		
		4	Proporsi kontribusi PDRB wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antarwilayah)	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
		5	Persentase desa mandiri (%)		
		6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)		
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	*Return on Asset (*ROA) BUMN (%)	PD 5 Penguatan *good-governance* pada berbagai tingkatan	Opini BPK
		2	Indeks Integritas Nasional		
		3	Indeks Materi Hukum		
		4	Indeks Pelayanan Publik		
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		SAKIP
		6	Indeks Persepsi Korupsi		
		7	Indeks Pembangunan Hukum		
		8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		
		9	Tingkat Inflasi (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Inflasi
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
		3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Sumber: RKPD DIY Tahun 2025

Hubungan antara prioritas daerah dan prioritas nasional bersifat komplementer dan saling menguatkan. Penyelarasan memastikan bahwa pembangunan DIY tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian integral dari pencapaian target pembangunan nasional. Pemda DIY berupaya menjamin bahwa setiap intervensi pembangunan daerah berkontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus tetap responsif terhadap karakteristik, kebutuhan, dan keistimewaan DIY.

F. GAMBARAN UMUM DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2012, DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa DIY mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintah daerah di DIY merupakan keberlanjutan dari pemerintahan nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dan sekaligus berproses menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Terdapat dimensi kesinambungan dan penyesuaian (*continuity and adaptivity*) secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Bentuk dan susunan pemerintahan DIY yang istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan

dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam konsideran huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya suatu NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Penetapan substansi Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-*bhinneka-Tunggal-Ika*-an. Penetapan substansi Keistimewaan DIY juga bertujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab. Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Penetapan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Substansi kewenangan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, wilayah DIY terletak di zona selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan bentuk wilayah yang menyerupai geometri segitiga. Puncak segitiga wilayah DIY merupakan titik batas paling utara yang terletak pada Puncak Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 2.911 m di atas permukaan air laut. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif, diantara 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Bagian alas segitiga wilayah DIY merupakan batas di sisi selatan berupa garis pantai yang menghadap Samudera Hindia memanjang dari timur ke barat sepanjang kurang

lebih 113 km. Wilayah DIY umumnya tergolong subur dan berpotensi untuk ditanami berbagai komoditas pertanian dengan karakteristik potensi sumber daya alam yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Kondisi alam yang indah dan unik juga berpotensi menjadi destinasi pariwisata.

Bentang alam DIY terdiri dari empat fisiografi utama; Satuan fisiografi solusional Pegunungan Selatan, Satuan fisiografi vulkanik Gunung Berapi Merapi, Satuan fisiografi Pegunungan denudasional Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan. Uraian dan penjelasan rinci terkait Kondisi Geografis adalah sebagai berikut.

1) Batas Administrasi

Secara astronomis wilayah DIY terletak pada posisi 7.33'–8.12' Lintang Selatan dan 110.00'–110.50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, pada zona bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/kota dan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dilakukan penyelarasan nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerah. Penyelarasan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan Kemantren

untuk sebutan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta. 2) Kalurahan untuk sebutan Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk sebutan desa di wilayah Kota Yogyakarta.

Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/kelurahan. Sedangkan untuk jumlah pedukuhan dan kampung adalah 4.508 dan 169 dengan 6.893 Rukun Warga dan 27.291 Rukun Tetangga di dalamnya.

Tabel 1.8. Satuan Wilayah Administrasi DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan/ Kelurahan	Padukuhan/ Kampung	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	87/1	934/-	1.851	4.474
Bantul	Bantul	17	75/-	933/-	-	5.905
Gunungkidul	Wonosari	18	144/-	1.429/-	1.492	6.822
Sleman	Sleman	17	86/-	1.212/-	2.934	7.556
Yogyakarta	Yogyakarta	14	-/45	-/169	616	2.534
DIY		78	39.2/46	4.508/169	6.893	27.291

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

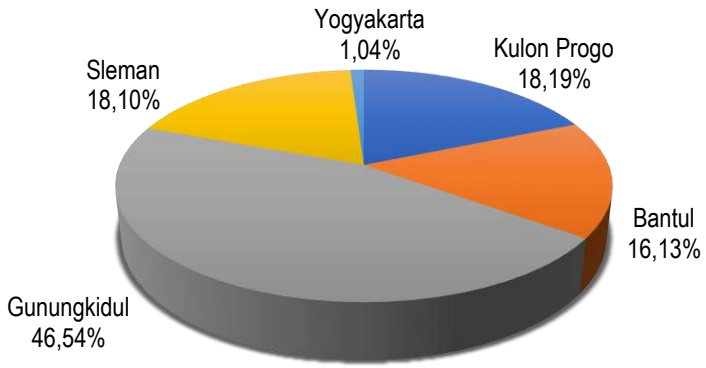
2) Luas Wilayah

Luas daratan seluruh wilayah DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2 -2l38 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau adalah seluas 3.170,363 Km^2 atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.410,091 Km^2). DIY merupakan provinsi dengan luasan terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 46,54% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,03% dari luas DIY.

Tabel 1.9. Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

No	Kode	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km^2)	%	Keterangan
1	34.01	Kab. Kulon Progo	576,803	18,19	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Nomor B-16.10/DIGD-BIG/IGD.04.04/12 /2024. Tanggal 16 Desember 2024
2	34.02	Kab. Bantul	511,527	16,13	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Nomor B-16.10/DIGD-BIG/IGD.04.04/12 /2024. Tanggal 16 Desember 2024
3	34.03	Kab. Gunungkidul	1.475,465	46,54	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Nomor B-16.10/DIGD-BIG/IGD.04.04/12 /2024. Tanggal 16 Desember 2024
4	34.04	Kab. Sleman	573,749	18,10	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Nomor B-16.10/DIGD-BIG/IGD.04.04/12 /2024. Tanggal 16 Desember 2024
5	34.71	Kota Yogyakarta	32,819	1,04	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Nomor B-16.10/DIGD-BIG/IGD.04.04/12 /2024. Tanggal 16 Desember 2024
		DIY	**3.170,363**	**100**	

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2025

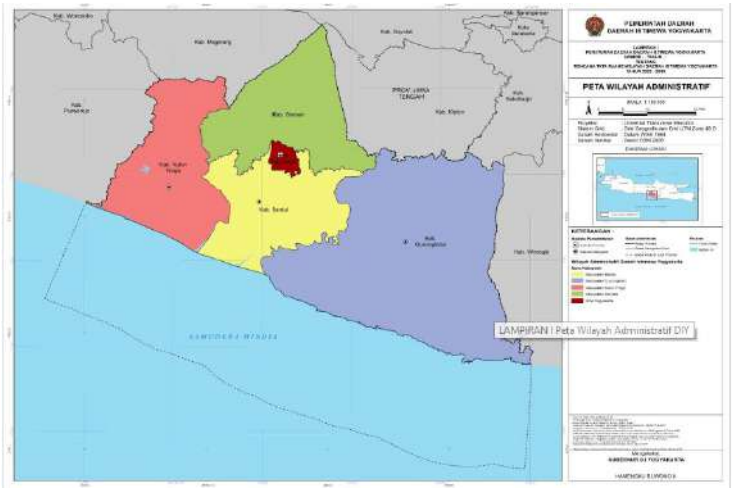


Gambar 1.1. Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2026, data diolah

Selain luas daratan, DIY juga memiliki luas kewenangan wilayah di laut yaitu meliputi batasan 12 mil laut diukur dari garis pantai. Merujuk pada Dokumen Fakta dan Analisis RTRW DIY, yang dirilis DPTR DIY pada tahun 2022, luas total wilayah kewenangan laut DIY adalah 2.329,52 km^2. Dokumen Fakta dan Analisis RTRW DIY rilis tahun 2022 ini digunakan sebagai rujukan mengenai data data karakteristik fisik wilayah DIY yang bersifat statis, misalnya; topografi, morfologi, geologi, jenis tanah, dan beberapa data lain. Dokumen Fakta dan Analisis memiliki periode updating mengikuti masa review RTRW DIY, yaitu setiap 5 tahun sekali. Dokumen Fakta dan Analisis RTRW DIY Tahun 2022 merupakan dokumen yang memuat data karakteristik fisik wilayah paling mutakhir saat ini.

Luas kewenangan wilayah laut ini menjadi penting karena menyimpan potensi sumber daya alam meliputi produksi perikanan tangkap, produksi garam, potensi budidaya perikanan jenis tertentu, juga potensi destinasi pariwisata di wilayah pesisir yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat DIY. Gambaran tentang luasan kewenangan wilayah laut DIY seperti pada Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi DIY.



Gambar 1.2. Peta Wilayah Administratif DIY

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

3) Topografi

Topografi dideskripsikan secara kualitatif sebagai bentuk permukaan lahan, dan secara kuantitatif dinyatakan dalam ukuran satuan besaran sudut lereng (% atau derajat), arah hadap lereng, panjang lereng, bentuk lereng dan posisi ketinggian suatu tempat di atas permukaan laut. Topografi DIY dipresentasikan dalam kemiringan lahan, ketinggian lahan dan unit fisiografi dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Kemiringan Lahan

Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada Buku Fakta Analisis RTRW DIY tahun 2022, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 Km^2, lahan dengan kemiringan 2-8% seluas 522,73 Km^2, lahan dengan kemiringan 8-15% seluas 302,80 Km^2, lahan dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 Km^2, lahan dengan kemiringan 25-40% seluas 332,83 $Km^{2,}$ lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 367,03 Km^2.

b. Ketinggian Lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100-499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

c. Satuan Fisiografis

Merujuk pada Buku Fakta Analisis RTRW DIY tahun 2022, di Wilayah DIY terdapat empat satuan fisiografi utama yaitu; fisiografi karst pegunungan selatan, fisiografi vulkanik Gunung Merapi, fisiografi dataran aluvial (dataran rendah graben Bantul dan dataran aluvial pantai), dan fisiografi perbukitan denudasional Kulon Progo. di selatan DIY terletak Samudera Hindia yang juga kaya akan potensi sumber daya

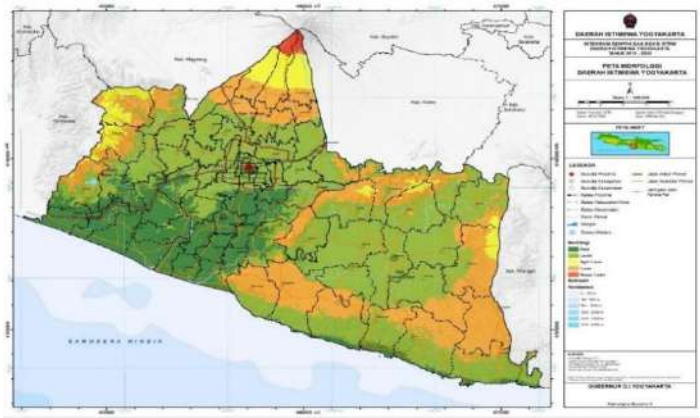
alam laut dan terdapat wilayah kewenangan DIY di dalamnya sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY sebagai berikut:

(1) Satuan fisiografi karst pegunungan selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul bagian selatan dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Bantul bagian timur. Kawasan ini merupakan kawasan geomorfologi karst perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air permukaan. Wilayah karst merupakan bentang alam dengan batuan induk bersifat larut air (solusional). Karakteristik fisiografi ini berupa bahan batuan induk batu gamping, dan lapisan tanah dangkal, serta vegetasi penutup yang relatif jarang. di bagian tengah wilayah Kabupaten Gunungkidul berupa Zona Ledok Wonosari yang didominasi batuan kapur gamping berlapis dan tanah Mediteran/Grumosol, serta air tanah sangat dalam. Bagian utara kabupaten gunungkidul merupakan zona geologi Batur Agung yang didominasi perbukitan dengan batuan vulkanik dan sedimen tufan, memiliki tanah Latosol, ketinggian 200-700 mdpl, air tanah relatif dangkal (6-12 m), dan merupakan lokasi material batuan candi kuno (tuf, breksi) dari letusan Kaldera Semilir.
(2) Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80 – 2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul. Satuan fisiografi ini merupakan bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
(3) Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial

yang didominasi oleh dataran Aluvial. Membentang di bagian selatan DIY di Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur.

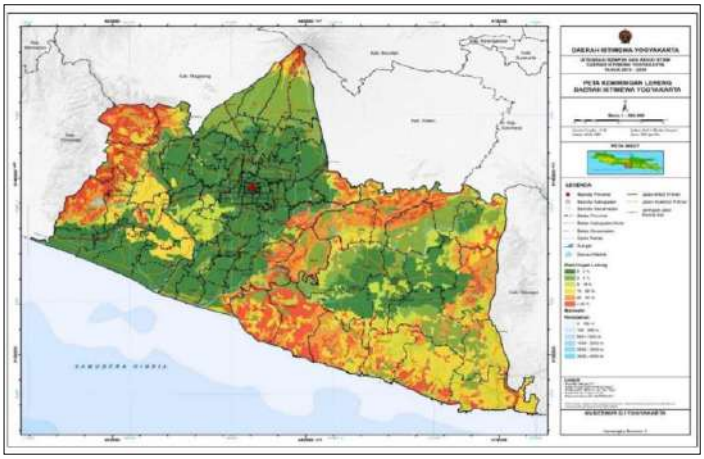
(4) Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Selain empat fisiografi utama di atas, di wilayah DIY juga terdapat Bentang alam minor yang pemanfaatannya belum optimal yaitu bentang alam *marine* dan *aeolin* yang merupakan satuan fisiografis kawasan pantai. Kawasan ini terbentang sejajar garis pantai dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir tipe *barchan* yang merupakan fenomena langka di dunia; Secara visual kondisi topografis DIY dipresentasikan dalam Peta Morfologi dan Peta Kemiringan lereng berikut



Gambar 1.3. Peta Morfologi DIY

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

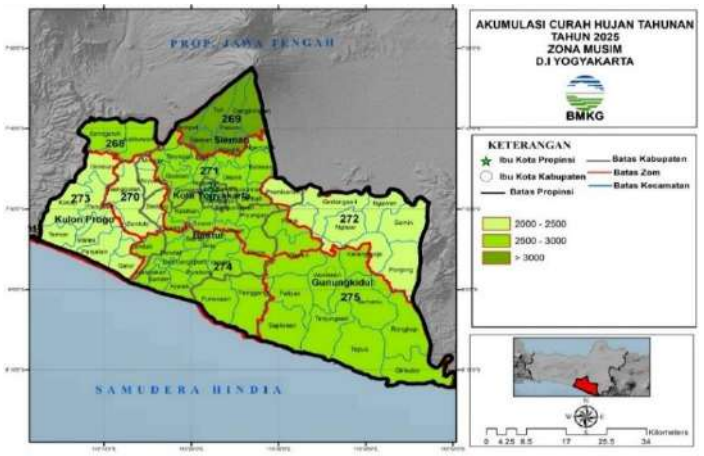


Gambar 1.4. Peta Kemiringan Lereng DIY

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Pengolahan Data DEMNAS dan Citra ASTER, 2022

4) Klimatologi

Kondisi iklim sangat mempengaruhi wilayah, baik dari segi potensi sumber daya alam maupun potensi bencana alam. DIY terletak di wilayah yang dipengaruhi oleh tiga tipe iklim: musiman, tropis dan maritim. Iklim musiman sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah pada waktu tertentu. Periode pergantian angin normal adalah 6 bulan. Dari Oktober hingga April, bertiup angin monsun barat daya yang dominan membawa hujan. Angin monsun timur laut bertiup dari bulan April sampai Oktober, dengan karakter kering sehingga menjadi musim kemarau. Sebagai bagian dari daerah beriklim tropis, kondisi iklim DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis, dengan suhu tinggi dan curah hujan yang tinggi. Posisi DIY yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, memberi pengaruh akibat tinggi nya massa uap air hasil penguapan air laut, yaitu kelembaban tinggi dan curah hujan yang tinggi pula. Sebaran akumulasi curah hujan tahunan di wilayah DIY tahun 2025 digambarkan pada Peta Curah Hujan Tahunan menurut zona musim yang dirilis Stasiun BMKG DIY awal tahun 2026 sebagai berikut.



Gambar 1.5. Peta Akumulasi Curah Hujan DIY

Sumber: BMKG DIY, 2026

Parameter iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban dan arah angin memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dianggap sebagai potensi cagar alam dan potensi alam yang berkelanjutan. Berikut adalah catatan kondisi iklim DIY untuk tahun 2025:

a. Suhu minimum 22,00°C di bulan Juli dan suhu maksimum 32,30°C di bulan April
b. Curah hujan bulanan tertinggi pada bulan Maret terjadi di Kabupaten Bantul sebesar 659,8 mm^3 dan terendah sebesar 1,00 mm^3 pada bulan Juli di Kabupaten Gunungkidul.
c. Jumlah hari hujan bulanan tertinggi 24 hari pada bulan Januari di Kota Yogyakarta dan hari hujan bulanan terendah 1 hari pada bulan Juli di Kabupaten Gunungkidul
d. Kelembaban rata-rata bulanan Minimum 81,00 pada bulan Juli dan Maksimum 87,00 pada bulan Mei dan bulan November
e. Tekanan udara berkisar antara 989,00 mb di bulan Januari dan bulan Maret hingga 993,0 mb di bulan September;
f. Kecepatan angin rata-rata bulanan minimum 2 knot di bulan Maret hingga bulan Agustus, sedangkan kecepatan angin rata-rata bulanan maksimum 3 knot di bulan September hingga bulan Desember.

5) Sumber Daya Air

Sumber daya air di DIY meliputi sumber daya air permukaan dan air tanah. Sumber daya air permukaan merujuk pada tubuh air permukaan berupa sungai dan danau baik danau alami maupun danau buatan. Sumber daya air tanah merujuk pada perlapisan batuan dasar yang menyimpan air sebagai akuifer

a. Sumber Daya Air Permukaan

Sumber Daya Air Permukaan berupa sungai memiliki batasan wilayah berupa Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa igir perbukitan di mana air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. DAS menerima dan menyimpan air hujan yang jatuh kemudian mengalirkannya menuju ke muara (laut/ danau).

Wilayah DIY dilewati beberapa DAS yang semuanya bermuara di Samudra Hindia. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS, terdapat empat DAS utama, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bribin. Selain empat DAS utama tersebut terdapat juga beberapa DAS mikro yang bersifat subsurface DAS yang kawasannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada sisi utara di sekitar perbatasan wilayah DIY juga merupakan bagian daerah tangkapan air DAS Bengawan Solo Hulu. Peta kawasan DAS di DIY dapat dilihat pada Gambar Peta Daerah Aliran Sungai di bawah ini.



Gambar 1.6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2024, data diolah

DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha. Ketersediaan air pada 4 DAS yang ada di wilayah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10. Potensi Ketersediaan Air pada 4 DAS yang Ada di Wilayah DIY Tahun 2021–2025 (juta m^3)

NAMA DAS	Tahun					Satuan
	2021	2022	2023	2024	2025	
DAS Serang	234,00	240,00	309,73	320.65	320,65*	Juta m^3
DAS Progo	5.652,00	4.770,00	3.240,00	2.925,60	2.925,60*	Juta m^3
DAS Opak	858,00	1.565,00	770,87	820,40	820,40*	Juta m^3
DAS Oyo	529,00	681,00	483,68	525,36	525,36*	Juta m^3

Sumber: Aplikasi Jogja Dataku Bapperida DIY, 2025

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Debit masing-masing sungai tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.11. Rerata Debit Sungai di DIY Tahun 2020-2024(m^3/detik)

SubElemen	Tahun									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Sungai Progo (Duwet)	0,20	345,41	18,60	310,00	1,40	340,28	0,30	428,00	0,51 *	390,00 *
Sungai Bedog (Guwosari)	1,84	28,90	0,01	23,20	0,01	40,11	0,95	32,30	2,05 *	14,30 *
Sungai Code (Kaloran)	0,18	8,55	0,01	9,45	0,01	8,88	0,20	12,40	1,20 *	10,70 *
Sungai Winongo (Padokan)	0,01	16,30	0,16	13,60	0,16	12,37	0,19	11,46	0,19 *	11,46 *
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,49	5,68	0,49	4,74	0,49	4,74	0,48	2,10	0,48 *	2,10 *
Sungai Opak (Pulo)	0,12	4,91	0,08	8,02	0,08	8,02	0,08	8,02	0,07 *	5,30 *

Sumber: Aplikasi Jogja Dataku Bapperida DIY, 2025

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Wilayah sungai bawah tanah yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup areal seluas 924,27 Km^2. Debit rerata SBT Bribin 0,95 m^3/detik, SBT Ngobaran 0,70 m^3/detik dan SBT Baron debit rerata 0,10 m^3/detik. Data ini merujuk pada Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai Progo Opak Serang Periode 2015-2035 yang dirilis BBWSSOP pada tahun 2016. Dokumen ini memiliki masa berlaku 20 tahun, seperti hal nya RPJPD dan RTRW. Untuk saat ini RPSDA 2015 adalah dokumen paling mutakhir yang bisa digunakan sebagai rujukan dari BBWS SOP.

Tabel 1.12. Kapasitas Sungai Bawah Tanah yang ada di WS POS

Sungai	Kapasitas (Liter/Detik)
Bribin	956
Ngobaran	700
Baron	800

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

b. Sumber Daya Air Tanah

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi *aquifer* yang ada. *Aquifer* di DIY diklasifikasikan menjadi 4 *aquifer*, yaitu:

(1) *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah mayor *aquifer* adalah Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
(2) *Minor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah minor aquifer adalah Formasi Wates, Gumuk pasir.
(3) *Poor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesit tua.
(4) *Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. Sedangkan dari

hasil identifikasi yang dilakukan Dinas PUPESDM DIY, sebaran CAT di Wilayah DIY meliputi:

(1) CAT Yogyakarta - Sleman;
(2) CAT Wates;
(3) CAT Wonosari;
(4) CAT Menoreh (belum ditetapkan);
(5) CAT Oyo (belum ditetapkan).

Tabel 1.13. Luasan Kawasan Resapan Air di DIY

No	CAT	Kabupaten	Luas Kawasan Resapan Air (ha)
1	Imbuhan Yogya-Sleman	Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul	23.999,65
2	Imbuhan Wates	Kulon Progo	4.966,25
3	Imbuhan Wonosari	Gunungkidul	5.466,52
4	Imbuhan Menoreh	Kulon Progo	6.718,26
5	Imbuhan Oyo	Gunungkidul	6.977,70

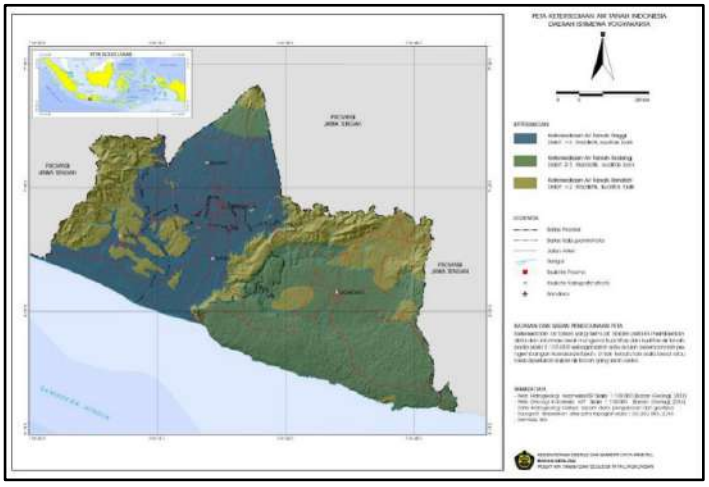
Sumber: DPUP ESDM DIY, 2022

CAT Yogyakarta–Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas total cekungan kurang lebih 911,2 km^2, dengan rincian luas daerah imbuhan 45,20 km^2 atau 5% dari luas total cekungan, dan luas daerah transisi sekitar 198,80 km^2 atau sekitar 22% dari luas total cekungan dan luas daerah lepasan air tanah sebesar 667,20 km^2 atau 73% luas total cekungan meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

CAT Wates terletak di sisi selatan Kabupaten Kulon Progo. Pola aliran air tanah yang berkembang pada CAT Wates relatif berarah utara ke selatan menuju ke arah Samudera Hindia. Namun pada bagian gumuk pasir, pola aliran yang berkembang pada daerah tersebut cenderung berlawanan yaitu mengikuti morfologi dari gumuk pasir. CAT Wates

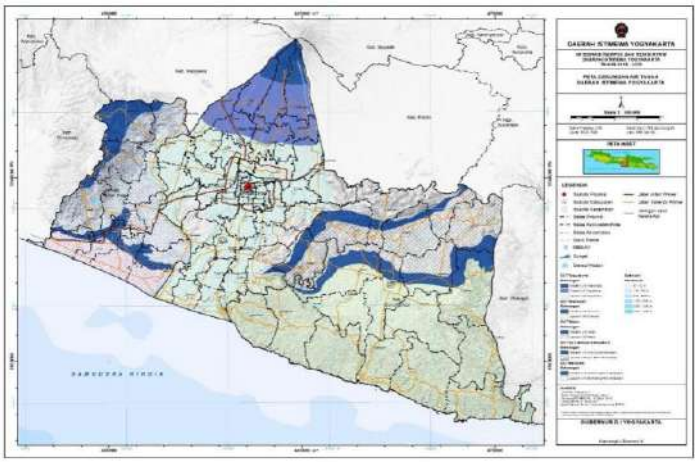
memiliki luasan total 174,55 km^2 dengan rincian daerah imbuhan seluas 71,71 km^2 dan daerah lepasan seluas 103,84 km^2. CAT Wates berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo.

CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul. Luas total CAT Wonosari yang berada di Kabupaten Gunungkidul adalah 975,7 km^2, dengan rincian luas daerah imbuhan 933,1 km^2 atau 95,7% dari luas total wilayah yang terbagi menjadi dua daerah imbuhan, yaitu daerah imbuhan primer seluas 280,6 km^2 (28,8%) dan daerah imbuhan sekunder seluas 653,2 km^2 (66,9%) dan luas daerah lepasan air tanah sekitar 41,9 km^2 atau 4,3% luas total. CAT Wonosari berada di Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul. Pada CAT Wonosari daerah imbuhan air tanah primer terletak pada perkotaan Wonosari. Daerah air tanah sekunder sebagian besar merupakan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang ditetapkan sebagai kawasan dengan pemanfaatan terbatas. Kawasan ini telah ditetapkan oleh Badan Geologi sebagai kawasan lindung karst. Ketersediaan air tanah dan sebaran CAT di DIY seperti gambar di bawah ini



Gambar 1.7. Peta Ketersediaan Air Tanah DIY

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022



Gambar 1.8. Peta Cekungan Air Tanah DIY

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

Penurunan muka air tanah Rerata Penurunan Muka Air Tanah di DIY per Kabupaten/Kota dipresentasikan dengan tabel berikut.

Tabel 1.14. Rerata Penurunan Muka Air Tanah per Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Tahun										Satuan
	2021		2022		2023		2024		2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kemarau	Hujan	Kemarau	Hujan	Kemarau	Hujan	Kemarau	Hujan	Kemarau	Hujan	
Kulon Progo	2,76	2,45	3,46	2,51	2,08	1,11	1,67	1,36	1,63	1,35	%
Bantul	4,53	3,32	4,59	3,69	4,14	3,43	4,32	3,24	4,43	3,34	%
Gunungkidul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
Sleman	7,27	5,56	7,07	5,62	7,28	4,88	7,49	5,25	7,06	5,56	%
Kota Yogyakarta	9,92	8,07	9,54	8,24	10,81	7,87	11,04	9,51	10,06	8,95	%

Sumber: Aplikasi Jogja Dataku, Bapperida DIY, 2025

Faktor-faktor Utama Penyebab Turunnya Muka Air Tanah:

Turunnya muka air tanah di DIY secara umum disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang lebih besar daripada masukan imbuhan air tanah pada area resapan. Peningkatan kebutuhan air bersih bisa didorong oleh pertambahan jumlah penduduk, dan laju pembangunan (misal hotel, industri). Dinamika iklim dan curah hujan seperti *el nino* yang menyebabkan kemarau panjang serta perubahan aliran

sungai (pelurusan sungai/talud) bisa mempercepat aliran air ke hilir sehingga mengurangi kapasitas peresapan air.

(1) Pertumbuhan Penduduk dan Permukiman: Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan permukiman meningkatkan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan domestik dan sanitasi lingkungan
(2) Peningkatan Kebutuhan Air akibat kegiatan perekonomian dan pembangunan: Industri, perkantoran (hotel, mal), dan pariwisata membutuhkan air yang sangat besar, yang sebagian besar dipenuhi dari pengambilan air tanah secara masif.
(3) Penurunan luasan Area Resapan dengan terjadinya alih fungsi lahan dari area terbuka menjadi lahan terbangun dan pengerasan permukaan lahan mengalirkan air permukaan ke saluran drainasi dan mencegah air meresap ke dalam akifer.
(4) Pelurusan sungai dan pembangunan talud membuat aliran air sungai menjadi lebih cepat ke hilir dan mengurangi waktu air untuk meresap ke tanah.

Gambaran tentang perimbangan sumber daya air tanah prinsipnya melibatkan masukan imbuhan air tanah dan keluaran pemanfaatan air tanah. Volume Cadangan Dinamis Air Tanah dan Akumulasi Volume Pengusahaan Air Tanah per kabupaten/kota di DIY disajikan pada tabel Neraca Air Tanah Pengusahaan berikut. Tabel Neraca Air Tanah Pengusahaan menggambarkan besaran pemanfaatan air tanah untuk kepentingan usaha saja, mengesampingkan pemanfaatan untuk kebutuhan domestik rumah tangga dan pertanian.

Tabel 1.15. Neraca Air Tanah Pengusahaan per Kabupaten/kota di DIY Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Volume Cadangan Dinamis Air Tanah	Akumulasi Volume Pengusahaan Air Tanah Tahun 2024	Rasio Vol Pengusahaan ÷ Vol. Cad. Dinamis	Tingkat Pengusahaan Air Tanah
		(m3)	*(m3)*		
1	Yogyakarta	393,583,092.77	972,646.48	0.25%	Rendah
2	Sleman	2,572,646,652.96	5,149,269.70	0.20%	Rendah
3	Bantul	1,127,086,278.51	1,073,107.84	0.10%	Rendah
4	Gunungkidul	105,820,131.00	1,287,262.13	1.22%	Rendah
5	Kulon Progo	91,539,886.00	39,471.60	0.04%	Rendah
Total DIY		**4,290,676,041.23**	**5,817,037.46**	**0.14%**	**Rendah**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY 2025

2. Gambaran Umum Daerah

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk DIY pada Tahun 2025 tercatat sebesar 3.781,6 ribu jiwa, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang berjumlah 3.759,5 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh dinamika kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk, terutama pada wilayah dengan fungsi perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemda DIY secara berkelanjutan memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan guna mendukung pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.

Tabel 1.16. Jumlah Penduduk (Ribu) DIY, 2021–2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kulon Progo	443.283	451.345	443,1	445,3	447,5
Bantul	998.647	1.013.170	1.009,4	1.017,8	1.025,8
Gunung Kidul	758.168	770.883	751,0	752,2	753,2
Sleman	1.136.474	1.147.562	1.157,3	1.168,5	1.179,4
Kota Yogyakarta	376.324	378.913	375,7	375,8	375,8

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)				
	2021	2022	2023	2024	2025
DI Yogyakarta	3.712.896	3.761.870	3.736,5	3.759,5	3.781,6

Sumber: BPS Provinsi DIY (Hasil Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2020), 2026

1) Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk DIY menunjukkan kecenderungan melambat dan relatif terkendali. Pada tingkat kabupaten/kota, laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2021 berada pada kisaran 1,27% hingga 2,11% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, sementara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat. Pada Tahun 2022–2025, laju pertumbuhan penduduk di seluruh kabupaten/kota cenderung menurun, dengan kisaran pertumbuhan berada di bawah 1,10% per tahun, bahkan di beberapa wilayah berada di bawah 0,50% per tahun. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk serta dinamika migrasi dan struktur demografi daerah.

Tabel 1.17. Laju Pertumbuhan Penduduk DIY per Tahun, 2021–2025

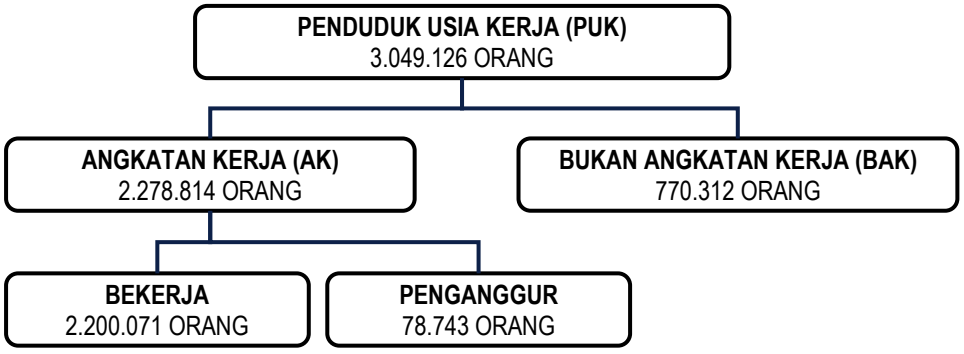
Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kulon Progo	2,11	1,94	0,55	0,54	0,53
Bantul	1,75	1,58	0,87	0,86	0,84
Gunung Kidul	1,97	1,80	0,19	0,18	0,17
Sleman	1,27	1,10	1,01	1,00	0,98
Kota Yogyakarta	0,98	0,81	0,21	0,16	0,12
DI Yogyakarta	1,61	1,44	0,67	0,65	0,64

Sumber: BPS Provinsi DIY (Hasil Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2020), 2026

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk ini menjadi dasar penting dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan penyediaan pelayanan dasar, serta upaya pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemda DIY terus memanfaatkan data pertumbuhan penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2) Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY pada tahun 2025 mengalami perbaikan pada hampir semua aspek, mulai dari penurunan jumlah penganggur, peningkatan angka partisipasi angkatan kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan lapangan pekerjaan serta peningkatan jumlah penduduk bekerja pada sektor formal. Struktur penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, selama tahun 2020 - 2025 jumlah angkatan kerja fluktuatif. di DIY, jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 3.049.126 orang. Sebagian besar dari mereka tergolong sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 2.278.814 orang (74,74%). Sisanya, sebanyak 770.312 orang (25,26%), termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja, yang meliputi pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta mereka yang tidak aktif mencari pekerjaan. Komposisi angkatan kerja pada periode tersebut terdiri dari 2.200.071 orang yang bekerja dan 78.743 orang pengangguran.



Gambar 1.9. Struktur ketenagakerjaan DIY

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

a. Penduduk Usia Kerja

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2020–2025, cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, PUK DIY pada bulan Agustus tahun 2021 adalah sebesar

3.175.789 orang dan pada bulan Agutus tahun 2025 berkurang hingga mencapai 3.049.126 orang. Berkurangnya penduduk usia kerja juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk fokus pada upaya peningkatan kualitas pencari kerja.

Tabel 1.18. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2020-2025

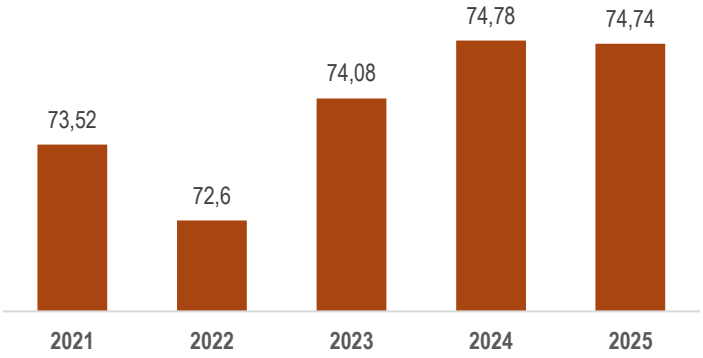
Kegiatan	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angkatan kerja	**2.228.162**	**2.334.955**	**2.336.076**	**2.221.694**	**2.261.436**	**2.278.814**
Bekerja	2.126.316	2.228.523	2.241.131	2.139.710	2.182.769	2.200.071
Penganggur	101.846	106.432	94.945	81.984	78.667	78.743
Bukan angkatan kerja	**904.592**	**840.832**	**881.798**	**777.234**	**762.623**	**770.312**
Penduduk usia kerja	**3.132.754**	**3.175.787**	**3.217.874**	**2.998.928**	**3.024.059**	**3.049.126**
TPAK (%)	**71,12**	**73,52**	**72,6**	**74,08**	**74,78**	**74,74**
TPT (%)	**4,57**	**4,56**	**4,06**	**3,69**	**3,48**	**3,30**
TKK (%)	**95,43**	**95,44**	**95.94**	**96,31**	**96,52**	**96,54**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Kondisi penduduk usia kerja (PUK) yang fluktuatif tersebut dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk serta pengaruh migrasi Penduduk Usia kerja di DIY. Untuk itu perlu disiapkan agar penduduk usia kerja tersebut memiliki kualitas unggul sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja baik di dalam dan luar DIY yang berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan ketenagakerjaan DIY.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan untuk mengukur komposisi pasokan tenaga kerja di dalam perekonomian, yaitu dengan membandingkan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.



Gambar 1.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2021–2025

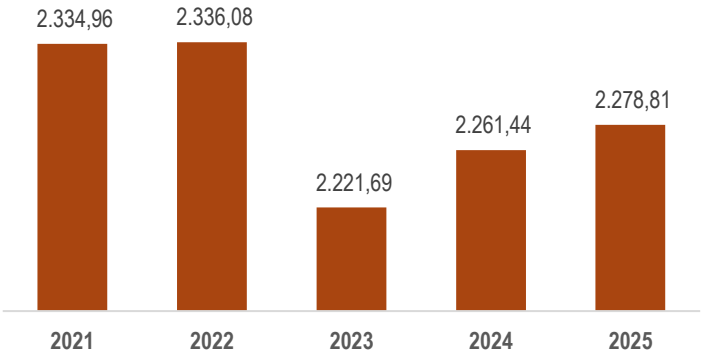
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

TPAK di DIY selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, terendah pada tahun 2022 sebesar 72,60% dan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 74,78%. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian, dengan demikian pasokan tenaga kerja DIY cukup memadai. TPAK juga merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK DIY pada Agustus 2025 sebesar 74,74%, mengalami penurunan sebesar 0,04% poin jika dibandingkan kondisi Agustus 2024.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki di DIY pada Agustus 2025 sebesar 83,90% sedangkan TPAK perempuan sebesar 65,91%. TPAK laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya dimana tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya oleh laki-laki sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2024, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,63%, sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,68% poin.

b. Angkatan Kerja

Komponen angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja dari tahun 2021–2025 mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan adanya tambahan angkatan kerja yang baru lulus sekolah dan pergeseran dari kelompok bukan angkatan kerja masuk kembali ke angkatan kerja. Pergeseran ini dikarenakan adanya peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan masyarakat. Gambar berikut menunjukkan kondisi angkatan kerja di DIY tahun 2021–2025.



Gambar 1.11. Angkatan Kerja Tahun 2021–2025

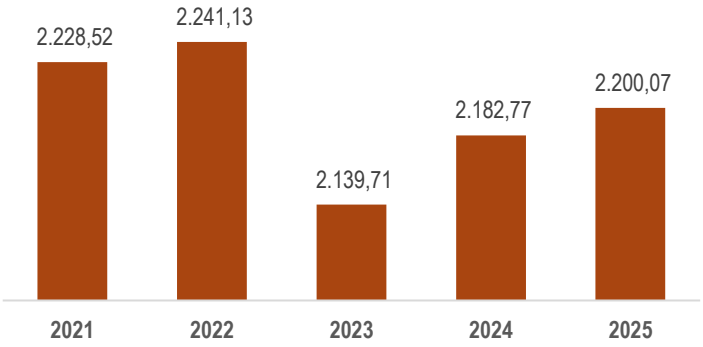
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan pola yang sama dalam beberapa tahun. Secara umum, struktur angkatan kerja di D.I. Yogyakarta paling banyak berpendidikan SLTA terbanyak kedua adalah berpendidikan SD ke bawah. Sedangkan angkatan kerja dengan kontribusi paling kecil pada dua tahun terakhir adalah berpendidikan perguruan tinggi dan tingkat pendidikan SLTP.

c. Penduduk yang Bekerja

Pertumbuhan angkatan kerja harus diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun

informal, sehingga mendorong peningkatan penduduk yang bekerja. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 penduduk yang berkerja sebesar 2.182,77 ribu orang dan berlanjut meningkat pada Tahun 2025 penduduk yang berkerja sebesar 2.182,77 ribu orang hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di DIY.



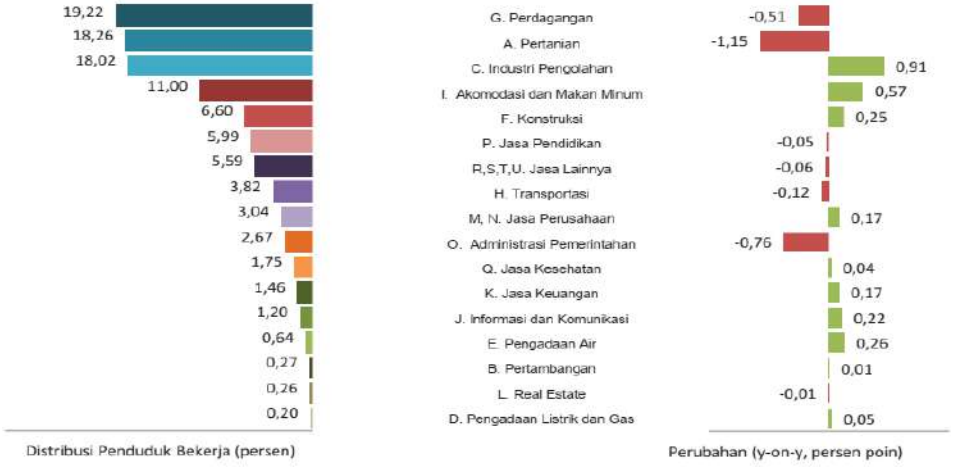
Gambar 1.12. Penduduk Yang Bekerja Tahun 2021–2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Bekerja merupakan kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2023-Agustus 2025 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pada Agustus 2025 penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,22%; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,26%; dan sektor Industri Pengolahan sebesar 18,02%.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan dalam kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan

buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya masuk dalam kategori kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1.012,70 ribu orang atau 46,03%, sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1.187,37 ribu orang atau 53,97%. Jika dibandingkan Agustus 2024, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,85% poin. Sedangkan jika dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,19% poin.



Gambar 1.13. Distribusi dan Perubahan Penduduk Yang Bekerja (PYB) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama DIY

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Penyerapan tenaga kerja di DIY pada Agustus 2025 didominasi oleh penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebanyak 564,74 ribu orang (25,67%), diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 541,63 ribu orang (24,62%). Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 17,62%, yang mencakup 305,84

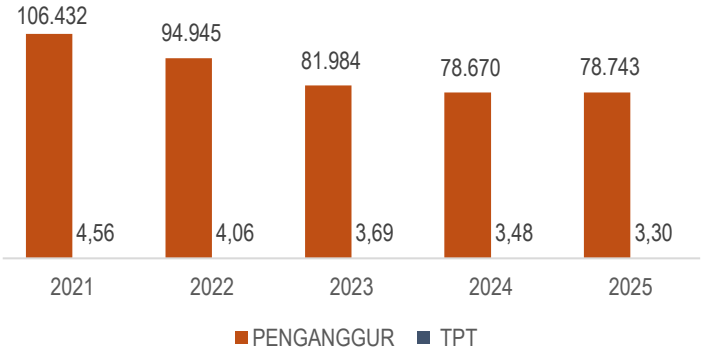
ribu orang (13,90%) dengan tingkat pendidikan Universitas dan 81,79 ribu orang (3,72%) dengan tingkat pendidikan Diploma. Struktur penduduk bekerja di DIY yang masih didominasi tingkat pendidikan sekolah menengah ke bawah ini perlu mendapatkan perhatian dengan memprioritaskan perbaikan kualitas penduduk bekerja. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang cenderung memiliki keahlian dan produktivitas yang tinggi dalam bekerja sehingga lebih siap dan mampu bersaing dalam dunia kerja, terlebih dalam era digitalisasi saat ini.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja di DIY terjadi karena pertumbuhan nilai output ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja, seiring dengan pergeseran struktur ekonomi dan peningkatan kualitas lapangan kerja. Perkembangan sektor-sektor produktif seperti pariwisata, jasa, dan UMKM, didukung oleh peningkatan keterampilan melalui pelatihan, pengalaman kerja, serta pemanfaatan teknologi, mendorong kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB secara lebih efisien. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan komposisi tingkat pendidikan tenaga kerja, peningkatan produktivitas secara agregat tetap dapat tercapai karena dipengaruhi oleh berbagai faktor selain pendidikan formal.

d. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah sebuah kondisi dimana angkatan kerja tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka juga dipicu adanya penurunan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja dan ketidakcocokan

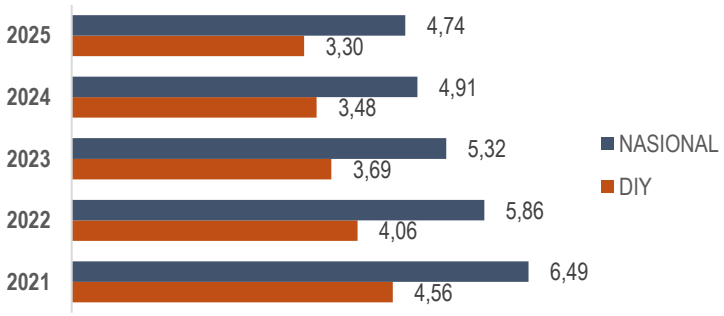
antara kesempatan kerja dengan kompetensi pencari kerja. TPT dalam 4 tahun terakhir menunjukan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka 4,56% atau sejumlah 106.432 orang menjadi 3,30% atau sejumlah 78.743 orang pada tahun 2025.



Gambar 1.14. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2021–2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Selama lima tahun terakhir TPT DIY masih di bawah rata-rata TPT nasional, dengan capaian tertinggi 4,56% terjadi pada tahun 2020 dan di tahun yang sama capaian TPT nasional sebesar 6,49%. Selanjutnya capaian TPT terus menurun menjadi 3,30% Pada Tahun 2025 dan masih di bawah capaian TPT nasional sebesar 4,85%. Capaian TPT digunakan sebagai acuan untuk perluasan kesempatan kerja dan perkembangan TPT ini dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Capaian indikator TPT juga digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Sehingga untuk menekan dan menurunkan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multi sektor.



Gambar 1.15. TPT Nasional dan DIY Tahun 2021 -2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Karakteristik penganggur terbuka di DIY adalah angkatan kerja usia muda dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi (SMA/SMK, Diploma dan Sarjana). Pengangguran di DIY lebih dipicu oleh adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. selain faktor pendidikan juga kesiapan mereka dalam memasuki pasar kerja perlu didukung keterampilan dan karakter yang baik. Kurangnya ketrampilan dan kompetensi sesuai permintaan pasar kerja perlu dijembatani dengan pelatihan, pemagangan dan uji kompetensi sehingga pencari kerja dapat terhubung dengan dunia industri/usaha. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan perlu didorong untuk mewujudkan *Link and Match* berbasis *market driven*.

3) Pendidikan

Penyediaan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh penduduk usia sekolah merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang wajib dilaksanakan tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, dan kelompok ekonomi-sosial-budaya guna menghasilkan generasi yang berkualitas. Pada tahun 2025, pelayanan pendidikan di DIY diberikan kepada 629.895 atau 16,79% penduduk DIY yang masih berusia 7–18 tahun sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.19. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Penduduk Menurut Usia Sekolah									Total Penduduk Usia Sekolah
			7 - 12			13 - 15			16 - 18			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Bantul	982.327	41.577	39.397	80.974	22.286	21.168	43.454	22.808	21.496	44.304	168.732
2	Gunungkidul	779.050	29.303	27.515	56.818	15.968	14.884	30.852	16.525	15.407	31.932	119.602
3	Kulon Progo	445.267	18.130	16.891	35.021	9.793	9.256	19.049	10.049	9.446	19.495	73.565
4	Sleman	1.129.730	48.577	46.203	94.780	26.004	24.936	50.940	25.784	24.594	50.378	196.098
5	Yogyakarta	415.771	17.507	16.468	33.975	9.380	9.271	18.651	9.737	9.535	19.272	71.898
DIY		**3.752.145**	**157.051**	**155.094**	**146.474**	**301.568**	**83.431**	**79.515**	**162.946**	**84.903**	**80.478**	**629.895**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri (Semester 1 Tahun 2025), diolah oleh Dinas Pemberayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

Layanan pendidikan di DIY didukung oleh penyediaan lembaga pendidikan negeri maupun swasta mulai dari jenjang pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan khusus yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.20. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2025

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Lembaga	
		Negeri	Swasta
1	TK/RA	63	2.327
2	SD/ MI	1.436	606
3	SMP/ MTs	248	360
4	SMA/ MA	84	177
5	SMK	49	156
6	SLB	9	72

Sumber: Disdikpora DIY, 2025

di samping lembaga pendidikan formal, pada tahun 2025 di DIY terdapat lembaga pendidikan nonformal atau kesetaraan seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan jumlah total 5 lembaga dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan jumlah 96 lembaga.

Sarana prasarana pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan jenjang menengah dan khusus di DIY seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, perpustakaan, ruang praktik siswa, laboratorium, UKS, dan toilet umumnya berada dalam kondisi baik namun memerlukan

pemeliharaan ringan berkala. Pemda DIY terus mengupayakan untuk memperkuat koneksi internet pada sekolah di wilayah Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul yang belum mendapatkan penguatan melalui jaringan fiber optik dan melakukan pemeliharaan jaringan listrik guna mendukung digitalisasi pembelajaran di sekolah.

Pemenuhan tenaga pendidik juga merupakan salah satu faktor pendukung penyelenggaraan layanan pendidikan. Sebaran tenaga pendidik di DIY dirincikan sebagai berikut.

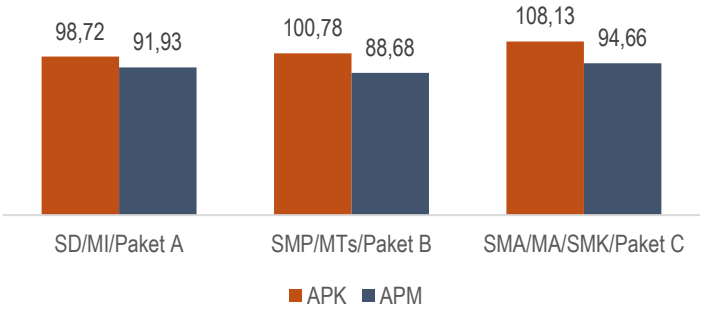
Tabel 1.21. Jumlah Pendidik di DIY Tahun 2025

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	TK/RA	217	6.461	6.678
2	SD/ MI	5.815	15.239	21.054
3	SMP/ MTs	4.099	7.004	11.103
4	SMA/ MA	2.564	3.601	6.165
5	SMK	2.645	3.414	6.059
6	SLB	287	807	1.094

Sumber: Disdikpora DIY, 2025

Berdasarkan data di atas, pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 pada jenjang SMA/MA adalah sebanyak 95,09%, pada jenjang SMK 96,93%, pada jenjang SMP/MTs 95,80%, pada jenjang SD/MI 94,98%, dan pada jenjang SLB sebesar 94,88%. Pemda DIY terus mendorong para pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1 untuk menempuh studi lanjutan sehingga para pendidik tersebut dapat memenuhi persyaratan minimum kelayakan mengajar.

Gambaran terkait partisipasi pendidikan salah satunya adalah melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK merupakan proporsi penduduk bersekolah pada jenjang tertentu dalam kelompok usia sesuai ketentuan jenjang pendidikan tersebut, sedangkan APM merupakan proporsi penduduk bersekolah pada suatu kelompok usia tertentu dalam jenjang sesuai kelompok usianya. Capaian APK dan APM DIY tahun 2025 adalah sebagai berikut.



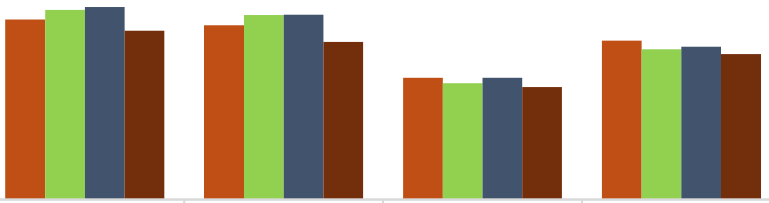
Gambar 1.16. Capaian APK dan APM DIY Tahun 2025

Sumber: Disdikpora DIY, 2025

Berdasarkan grafik di atas, partisipasi pada jenjang menengah menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan dasar. Capaian APK jenjang SMPMTs dan SMA/MA/SMK yang melampaui 100% menunjukkan adanya penduduk usia sekolah dari luar DIY yang juga bersekolah di DIY ataupun siswa dengan usia di luar kategori jenjang SMPMTs dan SMA/MA/SMK yang bersekolah di jenjang tersebut.

Partisipasi pendidikan di DIY masih mengalami hambatan dengan adanya anak-anak putus sekolah. Pada tahun 2025, masih terdapat 0,01% anak putus sekolah di jenjang SD/MI, 0,06% anak putus sekolah di jenjang SMP/MTs, dan 0,25% anak putus sekolah di jenjang SMA/MA/SMK. Berdasarkan hasil pendataan, latar belakang putus sekolah cukup beragam dan tidak hanya terkait faktor ekonomi, namun juga faktor sosial psikologis. Pemda DIY telah berupaya memberikan dukungan beasiswa untuk menekan peningkatan angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah serta memberikan alternatif pendidikan nonformal bagi anak-anak usia sekolah yang menghendaki fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Bagi anak-anak putus sekolah yang memiliki kendala sosial psikologis, Pemda DIY mengupayakan adanya pendekatan personal terhadap anak putus sekolah agar mereka bersedia kembali ke bangku sekolah guna menamatkan pendidikan hingga jenjang menengah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pengukuran kualitas pendidikan mengacu pada hasil Rapor Pendidikan. Terdapat beberapa indikator utama dalam Rapor Pendidikan yang menjadi tolok ukur utama kualitas pendidikan antara lain kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, dan iklim keamanan sekolah. Gambaran pencapaian Rapor Pendidikan DIY Pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.



	Kemampuan Literasi	Kemampuan Numerasi	Karakter	Iklim Keamanan Sekolah
SD	88,26	85,32	59,7	77,84
SMP	92,93	90,37	56,96	73,67
SMA	94,31	90,59	59,61	74,87
SMK	82,73	77,21	55,14	71,25

Gambar 1.17. Pencapaian Rapor Pendidikan DIY Tahun 2025

Sumber: Disdikpora DIY, 2025

Secara keseluruhan, terdapat peningkatan capaian kemampuan literasi dan kemampuan numerasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Pada Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 walaupun terdapat penurunan pada capaian karakter. Hal ini menunjukkan masih perlunya dorongan pada seluruh warga sekolah untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, integritas, empati, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri serta lingkungan sekitar guna menghasilkan generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi Pemda DIY dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan antara lain optimalisasi pendidikan vokasi, penguatan digitalisasi pendidikan, dan perubahan sistem penilaian pendidikan. Pemda DIY telah mendorong optimalisasi pendidikan vokasi sebagai langkah awal penyelarasan kurikulum pendidikan menengah kejuruan dengan industri guna mempersiapkan lulusan pendidikan menengah kejuruan memasuki pasar kerja, salah satunya melalui pembukaan kelas-kelas industri di SMK. Pemda DIY juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran rutin guna meningkatkan kemampuan koding serta pembelajaran terkait kecerdasan artifisial di sekolah. Terkait perubahan sistem penilaian, Pemda DIY telah berupaya mendorong satuan pendidikan melaksanakan persiapan seoptimal mungkin dalam menghadapi Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik yang akan menjadi dasar pemetaan capaian hasil belajar serta landasan dalam perbaikan pembelajaran dan layanan penyelenggaraan pendidikan.

4) Kondisi Ekonomi Daerah

a. Sektor Unggulan

(1) Sektor Industri Pengolahan

Sebagai kontributor utama PDRB DIY, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 12,14%*) pada tahun 2025. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 14,66%*) dibandingkan tahun sebelumnya. di DIY, industri pengolahan didominasi oleh industri makanan dan minuman, yang menyumbang PDRB sebesar Rp8,8 triliun. Diikuti oleh industri tekstil dan pakaian jadi dengan PDRB sekitar Rp1,87 triliun*), serta industri barang logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik yang mencapai Rp1,1 triliun*).

Tabel 1.22. Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2021–2025

Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025*)
Industri Makanan dan Minuman	6.966,04	7.052,86	7.392,38	7.740,44	8.875,19
Industri Pengolahan Tembakau	631,43	645,79	686,35	685,62	786,13
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.494,40	1.521,63	1.573,95	1.631,76	1.870,98
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	257,09	273,19	284,21	290,53	333,12
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	187,17	198,56	199,67	204,83	234,86
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	283,78	286,49	311,91	317,81	364,40
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	175,13	174,78	166,88	163,06	186,96
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	268,04	263,00	258,70	252,45	289,46
Industri Barang Galian bukan Logam	332,93	347,62	367,35	381,69	437,65
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	806,19	824,26	887,28	941,60	1.079,64
Industri Mesin dan Perlengkapan	411,90	407,29	410,04	399,98	458,62
Industri Alat Angkutan	2,43	2,36	2,40	2,40	2,75
Industri Furnitur	584,49	609,41	615,89	622,95	714,27
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	269,44	283,13	285,25	294,45	337,62
Jumlah	**12.670,46**	**12.890,39**	**13.442,25**	**13.929,58**	**15.971,66**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 **) Angka Sementara*

(2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2025 sektor pariwisata di DIY mengalami dinamika yang cukup berarti. Terdapat beberapa hal yang cukup mempengaruhi kondisi kepariwisataan DIY pada tahun 2025 yaitu: (1) Pelarangan *study tour* untuk siswa sekolah yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yang berimplikasi terhadap berkurangnya kunjungan wisata yang berasal dari Jawa Barat terutama dari kegiatan studi tour; (2) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang berimplikasi kepada berkurangnya perjalanan dinas dan kegiatan MICE yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga berakibat pada menurunnya jumlah kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Hotel-hotel/akomodasi di DIY; (3) Melemahnya daya beli masyarakat terjadi pada Triwulan I-2025, yang ditandai dengan deflasi signifikan sebesar 0,76% (*month to month*) dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4.89% (*y-o-y*) di bawah 5%. Kondisi ini mulai menguat pada akhir September dan memasuki triwulan IV-2025 seiring dengan meningkatnya kembali optimisme konsumen. Sektor Pariwisata DIY pada tahun 2025 mengalami peningkatan berdasarkan data jumlah wisatawan yang menggunakan akomodasi/penginapan. Capaian wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi/pengnipan pada tahun 2025 mencapai 8.148.595 wisatawan, meningkat dari tahun 2024 yang mencapai 8.090.876 wisatawan.

Tabel 1.23. Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2019-2025

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus		Wisman	Wisnus
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1,95	1,65
2021	14.740	4.279.985	4.294.725	2,24	1,41
2022	47.080	6.427.035	6.474.115	2,40	1,44
2023	149.414	7.591.275	7.740.680	2,36	1,45
2024	236.464	7.854.412	8.090.876	2,18	1,50
2025	264.343	7.884.252	8.148.595	2,17	1,55

Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dispar DIY, 2026 (data diolah)

Berbagai dinamika yang terjadi pada tahun 2025 cukup memberikan implikasi terhadap pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang menggunakan jasa

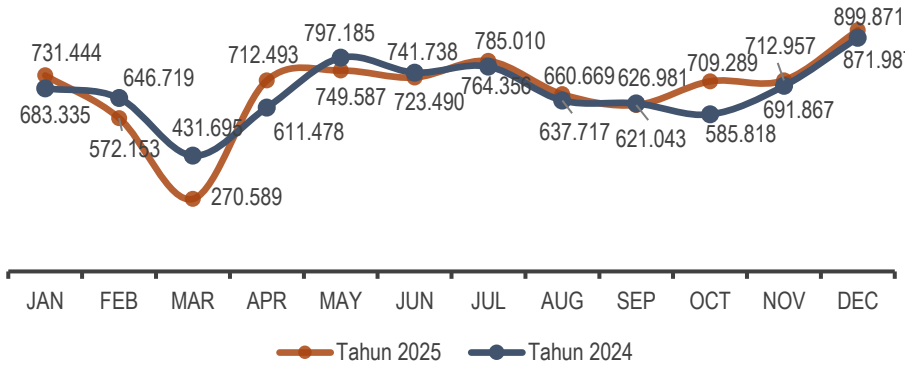
akomodasi/penginapan, yang hanya mencapai 0,38% bila dibandingkan dengan capaian pertumbuhan wisatawan nusantara tahun 2024.

Tabel 1.24. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi dan Penginapan pada Tahun 2022–2025

Tahun	Pertumbuhan Wisman	Pertumbuhan Wisnus
2025	11.8%	0.38%
2024	58.3%	3.47%
2023	217.4%	18.11%
2022	219.4%	50.16%

Sumber: BRS BPS Provinsi DIY, 2022–2025 (data diolah)

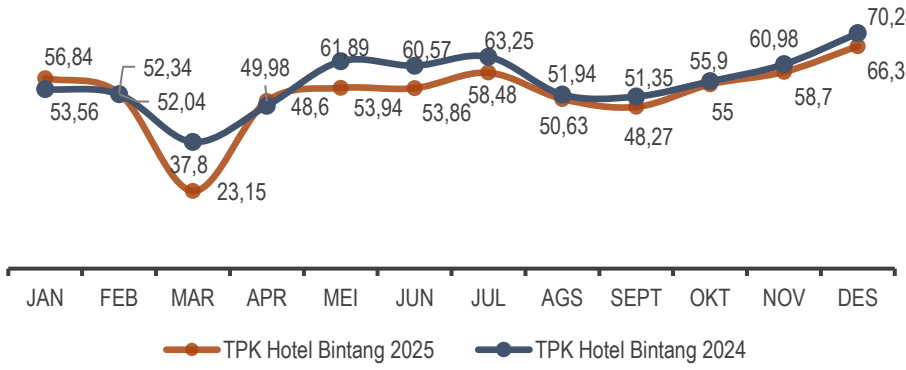
Wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi (menginap di hotel bintang dan non bintang) pada tahun 2025 mengalami titik terendah pada triwulan pertama yaitu sebanyak 1.574.186 wisatawan, lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan pertama 2024 yang mencapai 1.761.749 wisatawan (*y-o-y*). Pada semester pertama tahun 2025, jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi mencapai 3.759.756 wisatawan, lebih rendah bila dibandingkan pada semester pertama tahun 2024 yang mencapai 3.912.150 wisatawan. Pada semester kedua jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan mengalami pertumbuhan positif yaitu mencapai 4.388.839 wisatawan. Rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi pada semester kedua hingga bulan Desember bertumbuh hingga 5% (*y-o-y*) dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4.178.726 wisatawan.



Gambar 1.18. Data Wisatawan di DIY yang Menginap di Hotel Bintang dan Non Bintang Tahun 2024–2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 dan 2026

Tingkat penghunian kamar (TPK) Hotel Bintang pada tahun 2025 juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 secara rata-rata perolehan TPK hotel bintang hingga bulan Desember mencapai 55,68%, sedangkan pada Tahun 2025 hingga pada bulan Desember mencapai 52,30%. Pelarangan *Study Tour* hingga pembatasan kegiatan pemerintah di usaha akomodasi turut menyumbang penurunan TPK hotel di DIY pada Tahun 2025.



Gambar 1.19. Persentase TPK Hotel Bintang di DIY Tahun 2024 –2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025–2026

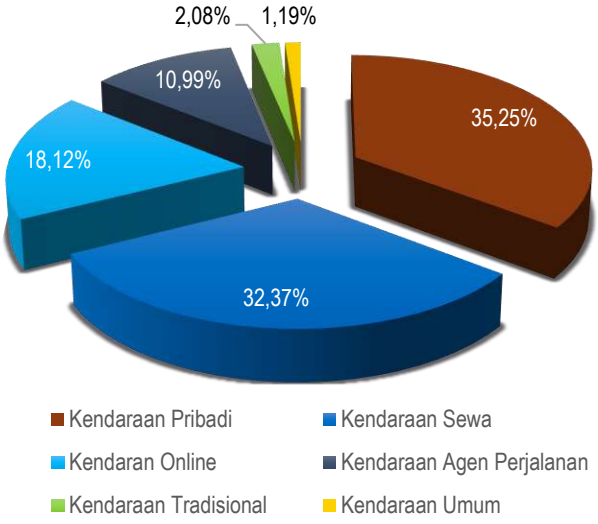
Untuk sepuluh posisi teratas dari destinasi yang mendapatkan kunjungan wisatawan terbanyak pada tahun 2025, Candi Prambanan menempati kunjungan wisatawan terbanyak pada tahun 2025, dengan mencapai 2.327.292 wisatawan, dan di posisi kedua diperoleh Pantai Parangtritis yang mencapai 1.621.231 wisatawan. Gembira Loka Zoo berada di urutan ketiga serta pada urutan keempat diperoleh Kraton (Kedhaton) Yogyakarta.

Tabel 1.25. Sepuluh Besar Kunjungan Wisatawan di Destinasi Wisata DIY Tahun 2025

No.	Obyek Wisata	Kabupaten/Kota	Jumlah (Wisatawan)
1	Candi Prambanan	Sleman	2,327,292
2	Pantai Parangtritis	Bantul	1,621,231
3	Gembira Loka Zoo	Kota Yogyakarta	985,282
4	Kraton (Kedhaton) Yogyakarta	Kota Yogyakarta	905,588
5	Kawasan Baron - Watulawang	Gunungkidul	825,381
6	Kawasan Watugupit	Gunungkidul	727,182
7	Taman Pintar	Kota Yogyakarta	694,551
8	Ibarbo Park	Sleman	577,277
9	Pantai Glagah	Kulon Progo	535,860
10	Tlogo Putri	Sleman	529,584

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota se-DIY, 2025

Moda transportasi yang dipilih oleh sebagian besar wisatawan selama berlibur di DIY adalah kendaraan pribadi dan kendaraan sewa serta layanan serupa seperti kendaraan *online*. Penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan sewa yang tinggi dipilih oleh sebagian besar wisatawan karena fleksibilitas waktu dan tujuan yang dipilih oleh masing-masing wisatawan. Kendaraan umum belum menjadi moda transportasi andalan wisatawan, dikarenakan rute yang tersedia hanya di beberapa destinasi saja, belum mencakup sebagian besar destinasi di DIY, sehingga belum dapat menjangkau lokasi-lokasi pilihan wisatawan tanpa ketergantungan kendaraan pribadi.



Gambar 1.20. Persentase Moda Transportasi yang Digunakan Wisatawan Nusantara Selama di DIY Tahun 2025

Sumber: Kajian Anakisa Belanja Wisatawan. Dinas Pariwisata, 2025

Wisatawan mancanegara yang datang ke DIY pada tahun 2025 hingga pada bulan Desember mencapai 102.817 wisatawan. Komposisi wisatawan mancanegara dengan kunjungan terbanyak masih diperoleh wisatawan asal Malaysia, Singapura dan Tiongkok. Kedatangan wisatawan mancanegara pada tahun 2025 memiliki pola yang berbeda. Wisatawan Malaysia titik tertinggi kedatangan terjadi pada bulan Agustus dan September dengan titik terendah ada di bulan Maret, sedangkan wisatawan asal Singapura kedatangan tertinggi terjadi di bulan Mei dan Juni. Wisatawan asal Tiongkok puncak kedatangan terjadi pada bulan Juli, sedangkan wisatawan yang berasal dari benua Eropa (Perancis, Belanda, Jerman, Italia dan Inggris) periode kedatangannya mengikuti liburan musim panas yang terjadi pada periode bulan Mei hingga September. Kedatangan wisatawan mancanegara masih dipengaruhi oleh ketersediaan

penerbangan langsung, seperti Malaysia dan Singapura menempati posisi pertama dan kedua kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak karena memiliki penerbangan langsung.

Tabel 1.26. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara menurut Kebangsaan Tahun 2024-2025

Negara	2024	2025
Malaysia	43.586	42.355
Singapura	12.322	12.479
Jepang	2.262	2.710
Tiongkok	5.778	3.900
Amerika Serikat	2.674	2.736
India	1.900	1.916
Inggris	1.997	2.240
Belanda	2.494	2.510
Australia	1,214	1.332
Tailand	1,287	1.120
Lainnya	28.283	29.528
Jumlah	**103.797**	**102.817**

Sumber:BRS BPS Provinsi DIY, 2026

b. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di DIY serta menjadi bagian integral dalam dinamika pembangunan wilayah. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak semata-mata diukur melalui capaian pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga tercermin dari perubahan struktur ekonomi yang menunjukkan adanya pergeseran dan diversifikasi peran antar sektor. Dalam kerangka tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dipandang sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan merata.

Dalam struktur ekonomi DIY, sektor pertanian tetap berperan sebagai salah satu pilar utama dan secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai penyumbang signifikan

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keberadaan sektor ini yang selalu berada pada empat besar kontributor PDRB menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penopang pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi lokal yang memberikan efek berganda terhadap sektor-sektor lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY hingga Triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati peringkat ketiga dengan kontribusi sebesar 10,18% terhadap PDRB DIY, sekaligus memberikan andil yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja positif sektor pertanian tersebut didorong oleh berbagai upaya peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah pada komoditas unggulan daerah. Upaya tersebut meliputi pengembangan tanaman pangan yang produktif, diversifikasi produksi hortikultura, optimalisasi potensi subsektor perkebunan, serta perbaikan sistem budidaya dan manajemen produksi pada subsektor peternakan. Pendekatan yang komprehensif ini tidak hanya berdampak pada peningkatan output sektor pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, serta memperkokoh peran sektor pertanian dalam menghadapi dinamika ekonomi regional maupun global.

(1) Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian di DIY sebagai penopang ketahanan pangan, penggerak perekonomian perdesaan, dan sarana peningkatan kesejahteraan petani, yang salah satunya tercermin melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Pada tahun 2025, NTP tanaman pangan di DIY berada pada kondisi relatif stabil dengan rata-rata sebesar 103,12, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 103,42.

Berbeda dengan pola tahun 2024 yang ditandai lonjakan NTP cukup tinggi pada awal tahun akibat keterbatasan pasokan pasca *El Niño* 2023, perkembangan NTP pada tahun 2025 cenderung lebih merata sepanjang tahun. Fluktuasi yang terjadi terutama dipengaruhi faktor musiman, seperti meningkatnya pengeluaran rumah tangga petani pada periode Idul Fitri. Namun secara umum, NTP tetap berada di atas angka 100 hampir sepanjang tahun dengan puncak sebesar 106,48 pada bulan September, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan yang relatif stabil.

Komoditas utama subsektor tanaman pangan di DIY meliputi padi, jagung, dan ubi kayu, yang berperan penting sebagai penyedia sumber karbohidrat bagi masyarakat, terutama padi sebagai pangan pokok. Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pasokan, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi melalui berbagai upaya, antara lain penggunaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida, penguatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), mitigasi Dampak Perubahan Iklim (DPI), serta perbaikan pengolahan dan pemasaran hasil. Perkembangan luas panen, produktivitas, dan produksi tanaman pangan unggulan tahun 2024–2025. Produksi padi dan jagung mengalami peningkatan, baik dari sisi luas panen maupun total produksi, sementara produksi ubi kayu mengalami penurunan, dijelaksan sebagai berikut.

Tabel 1.17. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2024-2025

No	Komoditas	LuasPanen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2024	2025**	2024	2025**	2024	2025**
1	Padi	96.976	107.541	46,55	51,38	452.832	550.505
2	Jagung	64.062	65.899	58,45	58,45	374.470	385.865

No	Komoditas	LuasPanen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2024	2025**	2024	2025**	2024	2025**
3	Ubi Kayu	44.881	43.219	169,49	169,49	760.682	741.064

*Keterangan: **) Angka sangat sementara*
Sumber: DPKP DIY, 2026

Peningkatan produksi padi dan jagung mencerminkan respons positif petani terhadap kondisi iklim yang relatif lebih mendukung, adanya penguatan program pemerintah melalui pengawalan Luas Tambah Tanam (LTT), serta peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas. di sisi lain, penurunan produksi ubi kayu menunjukkan adanya penyesuaian pola tanam dan pilihan komoditas akibat dinamika iklim dan perubahan penggunaan lahan. Data Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa Luas Baku Sawah (LBS) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 156 hektare dibandingkan tahun 2024, dengan LBS parsial tercatat seluas 66.871 hektare. Meskipun demikian, penurunan LBS tersebut tidak secara langsung menurunkan produksi padi dan jagung karena diimbangi oleh peningkatan intensitas tanam dan produktivitas.

Dalam mendukung ketersediaan perbenihan subsektor tanaman pangan, telah dilakukan kegiatan produksi dan sertifikasi benih dengan total benih siap salur sebesar 1.802,96 ton, yang terdiri atas benih padi sebanyak 1.778,81 ton, benih jagung 22,895 ton, benih kedelai 1,14 ton, dan benih ubi jalar 0,115 ton. Selain itu, dalam rangka pengawasan perbenihan tanaman pangan, telah diterbitkan 404 sertifikat benih dan 30 rekomendasi produsen. Keberlanjutan produksi tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, terutama curah hujan dan kelembaban, yang semakin sulit diprediksi dan berpotensi meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Oleh karena itu, upaya antisipatif melalui penerapan budidaya tanaman yang baik serta

pemantauan kondisi tanaman secara berkelanjutan, disertai dengan penguatan kapasitas petani dan petugas lapangan dalam pengelolaan risiko perubahan iklim.

Sejalan dengan upaya tersebut, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DIY berperan dalam mendukung subsektor tanaman pangan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, khususnya penyuluh pertanian ASN. Pada tahun 2025, dukungan ini berupa pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta kegiatan diseminasi inovasi dan edukasi di *Jogja Agro Park* (JAP) sebagai media pembelajaran dan percontohan. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi bekal bagi penyuluh dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani padi, jagung, dan ubi kayu, sehingga berkontribusi pada stabilisasi produksi, peningkatan produktivitas, dan penguatan ketahanan pangan di DIY.

(2) Kelautan dan Perikanan

Pembangunan daerah merupakan instrumen fundamental yang bermuara pada perwujudan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam kerangka pembangunan DIY, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ditetapkan sebagai sektor prioritas strategis karena perannya yang krusial dalam menopang ketahanan ekonomi serta penyediaan lapangan kerja. Meskipun secara administratif DIY memiliki cakupan wilayah daratan yang relatif kecil, namun posisi geografisnya menawarkan keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya kelautan yang signifikan. Sumber daya ini mencakup aset hayati terbarukan yaitu perikanan tangkap, ekosistem terumbu karang, padang lamun, garam, mangrove, hingga komoditas rumput laut, yang seluruhnya merupakan modalitas utama dalam struktur ekonomi pesisir.

Selain kekayaan hayati, diversifikasi potensi di wilayah pesisir DIY juga mencakup optimalisasi jasa lingkungan melalui pengembangan pariwisata bahari yang terintegrasi dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Namun, tantangan ke depan terletak pada penguatan riset dan eksplorasi terhadap mikro flora-fauna kelautan yang hingga kini belum tergarap secara optimal sebagai alternatif pangan fungsional masa depan. Seiring dengan dinamika tersebut, sektor budidaya juga terus menunjukkan tren eskalasi yang positif, baik melalui pengembangan tambak intensif untuk komoditas udang vanamei, maupun melalui penguatan budidaya air tawar seperti ikan nila, lele, gurami, dan mas.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan yang komprehensif untuk mengelola seluruh potensi modal dasar tersebut secara optimal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi. Melalui tata kelola yang tepat, sektor kelautan dan perikanan diharapkan tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah DIY.

Produksi perikanan di DIY pada tahun 2025 berasal dari dua subsektor utama, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kedua subsektor tersebut saling melengkapi dalam mendukung penyediaan pangan berbasis ikan, peningkatan pendapatan masyarakat perikanan, serta kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.

Produksi perikanan tangkap di DIY tercatat sebesar 1.976,091 ton dengan nilai produksi mencapai Rp56,03 miliar. Produksi tersebut didominasi oleh perikanan tangkap laut, dengan komoditas utama berupa ikan

tongkol, layur, manyung, layang benggol, kembung, cakalang, tuna, belanak, dan ikan lidah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total produksi.

Keterbatasan wilayah perairan laut di DIY tidak mengurangi peran penting subsektor perikanan tangkap laut sebagai tulang punggung produksi, yang didukung oleh keberagaman jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. di sisi lain, perairan daratan seperti sungai, waduk, embung, dan genangan air lainnya tetap berkontribusi melalui produksi ikan air tawar, meskipun volumenya relatif lebih kecil. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa perikanan tangkap laut masih menjadi penggerak utama subsektor perikanan tangkap di DIY, dengan dukungan potensi perairan daratan yang berfungsi sebagai pelengkap produksi.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya mencapai 98.569,40 ton. Capaian ini telah melampaui target produksi yang ditetapkan sebesar 97.813,00 ton, dengan tingkat pencapaian sebesar 100,77%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa subsektor perikanan budidaya masih menjadi tulang punggung utama produksi perikanan di DIY, baik dari sisi volume produksi maupun keberlanjutan usaha.

Komoditas perikanan budidaya di DIY didominasi oleh ikan air tawar. Ikan lele menjadi komoditas utama dengan produksi sebesar 48.002,22 ton, diikuti oleh ikan nila sebesar 34.387,52 ton. Kedua komoditas ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap total produksi perikanan budidaya karena didukung oleh teknologi budidaya yang relatif mudah diterapkan, siklus produksi yang singkat, serta permintaan pasar yang tinggi dan stabil. Selain itu, komoditas yang memberikan kontribusi cukup signifikan antara lain gurame sebesar

6.238,81 ton, bawal air tawar sebesar 4.531,18 ton, udang galah sebesar 3.697,51 ton, dan udang vaname sebesar 579,88 ton. Komoditas ikan mas, patin, tawes, dan gabus juga tetap dibudidayakan meskipun dengan volume produksi yang relatif lebih kecil.

Secara keseluruhan, struktur produksi perikanan DIY pada tahun 2025 menunjukkan bahwa subsektor perikanan budidaya masih mendominasi total produksi perikanan daerah, sementara perikanan tangkap, khususnya dari perairan daratan, berperan sebagai pendukung dan sumber diversifikasi komoditas. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan, disertai dengan upaya pelestarian sumber daya perairan daratan agar tetap produktif. Sinergi antara pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan berbasis ikan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan, serta daya saing sektor perikanan di DIY.

(3) Hortikultura

Subsektor hortikultura memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian di DIY karena kontribusinya terhadap penyediaan pangan serta peningkatan kesehatan dan kualitas gizi masyarakat. Pada tahun 2025, produksi komoditas hortikultura di DIY menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh anomali cuaca dan perubahan pola tanam petani. Secara umum, total produksi hortikultura mengalami penurunan sebesar 4,46% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung, sehingga mendorong sebagian petani untuk beralih menanam komoditas lain yang dinilai lebih adaptif atau menguntungkan.

Meskipun demikian, beberapa komoditas hortikultura unggulan justru mengalami peningkatan produksi, yaitu cabai besar, cabai keriting, pisang, durian, kelengkeng, dan alpukat. Peningkatan produksi cabai besar dan cabai keriting didorong oleh kondisi harga pasar yang relatif stabil dan prospektif, sehingga memotivasi petani untuk mempertahankan bahkan meningkatkan intensitas budidaya. Sementara itu, peningkatan produksi pisang, durian, kelengkeng, dan alpukat dipengaruhi oleh mulai berproduksinya tanaman hasil pengembangan kawasan, yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi hortikultura. Sebaliknya, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi, antara lain cabai rawit, bawang merah, dan salak. Penurunan tersebut secara umum dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola dan intensitas curah hujan, pergeseran waktu tanam, meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta berkurangnya luas tanam akibat peralihan petani ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Perkembangan produksi komoditas hortikultura unggulan DIY pada tahun 2024–2025 secara rinci disajikan pada Tabel 1.18.

Tabel 1.27. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2024-2025*

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Peningkatan/Penurunan
		2024	2025*	
1	Cabai besar	2.999	5.565	85,56
2	Cabai rawit	29.084	26.127	-10,17
3	Cabai keriting	45.398	45.605	0,46
4	Bawang merah	33.312	21.913	-34,22
5	Pisang	100.780	101.224	0,44
6	Durian	10.169	15.206	49,53
7	Kelengkeng	2.613	3.110	19,02
8	Salak	45.920	45.540	-0,83
9	Alpukat	15.235	16.238	6,58

*Keterangan: *) Angka sementara*
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Dalam mendukung ketersediaan perbenihan subsektor hortikultura di DIY, telah dilakukan kegiatan produksi dan sertifikasi benih dengan capaian benih hortikultura siap salur sebesar 334,30 kg untuk tanaman semusim dan 209.600 batang untuk tanaman tahunan. Selain itu, sebagai pengawasan perbenihan hortikultura, telah diterbitkan 35 sertifikat benih dan 14 rekomendasi produsen benih. Upaya ini menjadi pondasi penting dalam menjamin mutu dan ketersediaan benih sebagai faktor penentu keberhasilan produksi hortikultura.

Sejalan itu, upaya perlindungan tanaman memiliki peran yang semakin penting dalam menjaga keberlanjutan produksi hortikultura. Perubahan pola curah hujan dan anomali iklim sepanjang tahun turut mempengaruhi pola tanam petani serta meningkatkan potensi gangguan hama dan penyakit tanaman. Karenanya, penguatan kegiatan pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan menjadi bagian strategis dalam mendukung penyusunan langkah-langkah pengelolaan yang tepat, guna menekan potensi kehilangan hasil, menjaga stabilitas produksi, serta mendukung pengembangan hortikultura yang berkelanjutan di DIY.

Selain aspek teknis produksi, dukungan terhadap subsektor hortikultura juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Dalam hal ini, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) DIY berperan melalui penguatan kompetensi penyuluh pertanian ASN. Pada tahun 2025, dukungan tersebut diwujudkan melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi penyuluh pertanian ASN, serta kegiatan diseminasi inovasi dan edukasi di *Jogja Agro Park* (JAP) sebagai media pembelajaran dan percontohan bersama kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan

gapoktan. Peningkatan kapasitas penyuluh ini menjadi bekal dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani, khususnya terkait peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, penanganan dampak iklim ekstrim, serta pengembangan usaha hortikultura dan agribisnis, sehingga secara tidak langsung mendukung peningkatan, stabilisasi, dan keberlanjutan produksi komoditas hortikultura unggulan di DIY.

Dalam mendukung ketersediaan perbenihan subsektor hortikultura di DIY, telah dilakukan produksi dan proses sertifikasi dengan hasil benih hortikultura siap salur di DIY sejumlah 334,30 kg untuk hortikultura tanaman semusim dan 209.600 batang tanaman tahunan. Selain melalui aktivitas penyediaan benih dalam mendukung subsektor hortikultura balai juga telah menerbitkan 35 sertifikat benih dan 14 rekomendasi produsen dalam rangka pengawasan perbenihan tanaman hortikultura.

Sejalan dengan dinamika produksi hortikultura tersebut, upaya perlindungan tanaman memiliki peran yang semakin penting dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perubahan pola curah hujan dan anomali iklim sepanjang tahun turut mempengaruhi pola tanam petani serta meningkatkan potensi gangguan hama dan penyakit pada sejumlah komoditas hortikultura. Kondisi ini menuntut adanya pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan tanaman dan lingkungan tumbuhnya. Oleh karena itu, penguatan kegiatan pengamatan dan pengendalian gangguan tanaman menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan langkah-langkah pengelolaan yang tepat. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan potensi kehilangan hasil, menjaga stabilitas produksi hortikultura, serta mendukung pengembangan komoditas hortikultura yang berkelanjutan di DIY.

Dalam rangka mendukung kinerja urusan pertanian pada subsektor hortikultura di DIY, BPSDMP DIY berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui penguatan kompetensi penyuluh pertanian ASN. Pada tahun 2025, dukungan tersebut diwujudkan melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi penyuluh pertanian ASN guna meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan risiko produksi hortikultura yang sensitif terhadap kondisi iklim, serta melalui kegiatan diseminasi inovasi dan edukasi di JAP sebagai media pembelajaran dan percontohan bersama kelompok tani, KWT, dan gapoktan. Peningkatan kapasitas ini menjadi bekal bagi penyuluh dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani, khususnya terkait peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, penanganan dampak iklim ekstrim, serta pengembangan usaha hortikultura dan agribisnis, sehingga secara tidak langsung mendukung peningkatan, stabilisasi, dan keberlanjutan produksi komoditas hortikultura unggulan di DIY.

(4) Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu komponen strategis dalam pembangunan pertanian karena berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat. DIY memiliki luas wilayah sekitar 318.580 hektare, dengan areal perkebunan rakyat pada tahun 2024 tercatat seluas 58.080,88 hektare atau sekitar 18,23% dari total wilayah DIY. Terdapat kurang lebih 24 komoditas perkebunan yang dibudidayakan oleh petani dan tersebar di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur ekonomi wilayah dan mata pencaharian masyarakat perdesaan.

Penyelenggaraan pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penerimaan dan devisa negara, serta menyediakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar komoditas perkebunan. Selain itu, pembangunan perkebunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, melindungi pelaku usaha dan masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memanfaatkan jasa lingkungan perkebunan. Sejalan dengan misi peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas perkebunan secara berkelanjutan, operasionalisasi kegiatan pembangunan diharapkan mampu mendorong penguatan pengembangan di sektor hulu sekaligus memperkokoh aktivitas di sektor hilir.

Produksi komoditas perkebunan unggulan DIY pada tahun 2024–2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.19, menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Pada tahun 2025, peningkatan produksi tercatat pada komoditas kopi, jambu mete, dan kakao. Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga komoditas yang relatif tinggi, sehingga mendorong petani untuk meningkatkan intensitas pemeliharaan tanaman di lahan. Sebaliknya, penurunan produksi terjadi pada komoditas tebu dan kelapa. Anomali cuaca yang ditandai dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun 2025 menyebabkan tanaman perkebunan tidak dapat berproduksi secara optimal dan meningkatkan risiko serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Tabel 1.28. Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2024 –2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2024	2025**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	50.076,77	50.050,30	-0,05	Kopra
2	Tebu	3.224,34	3.221,73	-0,08	gula hablur
3	Kakao	2.025,93	2.027,64	0,084	biji kering
4	Kopi	1.877,19	1.886,32	0,48	biji kering
5	Jambu Mete	496,01	498,10	0,42	biji kering

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Sebagai upaya peningkatan produksi komoditas perkebunan unggulan di DIY pada tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengembangan dan intensifikasi tanaman. Untuk komoditas kopi, dilakukan intensifikasi seluas 50 hektare di Kabupaten Sleman melalui pendanaan APBD, serta perluasan seluas 50 hektare di Kabupaten Kulon Progo melalui pembiayaan APBN ABT 2025. Pada komoditas kelapa, kegiatan pengembangan tanaman dari APBN ABT 2025 dilaksanakan seluas 100 hektare di Kabupaten Sleman, 123 hektare di Kabupaten Bantul, dan 127 hektare di Kabupaten Kulon Progo, serta pengembangan tambahan dari APBN reguler seluas 100 hektare di Kabupaten Kulon Progo dan 100 hektare di Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, komoditas kakao memperoleh dukungan pembiayaan APBN ABT 2025 melalui kegiatan pengembangan masing-masing seluas 50 hektare di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Pada komoditas tebu, dilakukan kegiatan bongkar ratoon seluas 46 hektare yang tersebar di Kabupaten Sleman (25 hektare) dan Kabupaten Bantul (21 hektare), serta perluasan areal tebu seluas 21,9 hektare di Kabupaten Gunungkidul (7 hektare) dan Kabupaten Bantul (14,9 hektare)

Dalam mendukung ketersediaan benih subsektor perkebunan di DIY, telah dilaksanakan kegiatan produksi dan sertifikasi benih dengan capaian benih siap salur berupa benih kelapa sebanyak 16.406 batang, kakao 91.282 batang, dan kopi 163.715 batang. Selain itu, sejak tahun 2024 telah dibangun kebun induk kelapa seluas 2 hektare yang terdiri atas calon kebun induk kelapa genjah kopyor seluas 1 hektare dan calon kebun induk kelapa pandan manis seluas 1 hektare. Pemeliharaan kebun induk tanaman kakao seluas 0,8 hektare juga dilakukan sebagai kebun penghasil calon benih kakao di DIY. Upaya ini menjadi pondasi penting dalam menjamin ketersediaan benih unggul dan berkelanjutan bagi pengembangan subsektor perkebunan.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim dan gangguan organisme tanaman semakin berpengaruh terhadap kinerja produksi perkebunan di DIY. Curah hujan yang tinggi dan pola iklim yang tidak menentu sepanjang tahun 2025 berdampak pada terganggunya proses pertumbuhan dan pembungaan tanaman, sekaligus meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pemantauan kondisi tanaman dan iklim, serta penerapan langkah-langkah pengendalian yang responsif dan adaptif terhadap dinamika lapangan, guna menjaga stabilitas produksi dan keberlanjutan usaha perkebunan.

Selain aspek teknis produksi, dukungan terhadap subsektor perkebunan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Dalam hal ini, BPSDMP DIY berperan melalui penguatan kompetensi penyuluh pertanian ASN. Pada tahun 2025, dukungan tersebut diwujudkan melalui pelatihan mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim serta kegiatan diseminasi inovasi dan edukasi di JAP sebagai media pembelajaran dan percontohan bagi kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan gapoktan. Peningkatan kapasitas penyuluh ini diharapkan dapat memperkuat peran pendampingan kepada petani dalam penerapan praktik budidaya, peremajaan tanaman, dan pengelolaan agribisnis perkebunan yang adaptif dan berkelanjutan, sehingga mendukung stabilisasi dan peningkatan produksi komoditas perkebunan unggulan di DIY.

(5) Peternakan

Subsektor peternakan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Potensi peternakan di DIY sangat mendukung ekonomi melalui penyediaan protein hewani (daging, telur, susu), ketahanan pangan, pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan, serta integrasi dengan pertanian (pertanian terpadu). Level peternakan di DIY meliputi ternak besar (sapi potong/perah, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba, babi), dan unggas (ayam, itik, puyuh). Pengembangan ternak lokal seperti sapi Peranakan Ongole (PO), kambing Peranakan Ettawa (PE), kambing Bligon, domba dan ayam Jawa Super, menciptakan sirkuler ekonomi desa, dan peningkatan kesejahteraan peternak

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan produksi peternakan yang ramah lingkungan serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. DIY dengan kekayaan alam dan keragaman budaya memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan, meskipun menghadapi berbagai tantangan yang perlu di atasi.

Sebagian besar peternakan di DIY masih berskala kecil dan menengah serta dikelola oleh peternak keluarga yang mengandalkan pengalaman turun-temurun. Peternakan di DIY mencakup berbagai jenis ternak, seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan itik yang tersebar di berbagai wilayah dengan sistem pengelolaan yang bervariasi. Kondisi eksisting saat ini seperti meningkatnya alih fungsi lahan, meningkatnya kasus wabah penyakit, kurangnya manajemen (pakan, bibit), regenerasi peternak dan kendala perizinan usaha masih sementara peternakan skala kecil/menengah masih berjuang dan masalah lingkungan (bau, limbah). Hal ini diimbangi upaya Pemda DIY mendukung perkembangan peternakan, seperti peningkatan kewaspadaan terhadap wabah penyakit, edukasi biosekuriti, program pelatihan, pendampingan, serta penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil peternakan.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak unggulan di DIY pada tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas strategis peternakan yang mengalami peningkatan populasi meliputi sapi potong, sapi perah, kuda, babi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik. Peningkatan tersebut mencerminkan respons subsektor peternakan terhadap kebutuhan dan permintaan pasar yang terus berkembang.

Populasi kerbau pada tahun 2025 relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnya regenerasi peternak akibat rendahnya tingkat pendapatan, keterbatasan lahan untuk kubangan, permasalahan reproduksi seperti jarak beranak yang panjang dan kawin sedarah, serta berkurangnya lahan penggembalaan. Peran kerbau

dalam sistem pertanian masih tetap ada, namun faktor ekonomi berupa kebutuhan investasi yang relatif besar dan imbal hasil yang kurang sebanding menjadi hambatan utama dalam pengembangannya. Penurunan populasi ayam ras petelur terjadi sebagai dampak dari proses afkir, yaitu penggantian ayam petelur yang sudah tidak produktif dengan ayam muda sesuai siklus usaha ternak. Populasi ayam ras pedaging justru menunjukkan peningkatan seiring dengan tingginya permintaan daging ayam dan kondisi pasar yang relatif stabil.

Peningkatan populasi ternak secara umum dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan kebutuhan pasar serta didukung oleh kinerja sektor kesehatan hewan. Hal tersebut tercermin dari penurunan angka temuan kasus Penyakit Menular Hewan Strategis (PMHS) yang mencapai 0,61%. Penurunan kasus penyakit tersebut berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan semangat peternak dalam menjalankan serta mengembangkan usaha peternakan.

Strategi peningkatan produksi peternakan melalui pendekatan kesehatan hewan diarahkan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit secara komprehensif. Langkah-langkah utama meliputi pelaksanaan vaksinasi, peningkatan sanitasi kandang, manajemen reproduksi melalui inseminasi buatan (IB) dan penanganan gangguan reproduksi, penyediaan pakan berkualitas, pengendalian parasit, serta peningkatan kapasitas peternak melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan juga terus dilakukan guna menekan angka kejadian penyakit. Pada tahun 2025 terdapat fasilitasi vaksin rabies sebanyak 650 dosis dan telah diaplikasikan secara penuh (100%).

Tabel 1.29. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2024–2025

No	Jenis Ternak	Jumlah (*Animal Unit*)	
		2024	2025*
1	Sapi Potong	217.206	217.423
2	Sapi Perah	2.210	2.214
3	Kambing	48.197	48.303
4	Domba	20.503	20.709
5	Ayam Buras	71.907	71.992
6	Itik	13.146	12.760
7	Ayam Ras Pedaging	1.102.659	1.146.996
8	Ayam Ras Petelur	156421.76	152.232

*Keterangan: *) Angka sementara*
Sumber: DPKP DIY, 2026

Upaya pengembangan subsektor peternakan juga diarahkan pada peningkatan ketersediaan bibit dan benih ternak berkualitas, khususnya pada komoditas strategis seperti sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba. Pada tahun 2025, distribusi ternak layak bibit mencapai 73 ekor, sedangkan benih ternak bersertifikat dalam bentuk semen beku mencapai 39.349 dosis. Kegiatan pemantauan dan surveilans melalui pengujian produk asal hewan dan penyakit turut dilaksanakan dengan pengujian sebanyak 30.458 sampel. Rangkaian upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan asal hewan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di DIY.

(6) Kehutanan

Ringkasan Kinerja Umum

Sub sektor kehutanan merupakan bagian dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Karakteristik kehutanan DIY berbeda dengan provinsi penghasil kayu besar di Indonesia, karena didominasi oleh hutan rakyat dan bukan hutan produksi skala industri. Meskipun secara kontribusi nominal terhadap

PDRB total relatif kecil dibanding sektor yang lain, fungsi ekologis dan penyediaan bahan baku industri kayu lokal telah menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi perdesaan, pengurangan kemiskinan, konservasi lingkungan, dan penopang industri kecil berbasis kayu.

Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan data BPS dan hasil analisis PDRB Subsektor Kehutanan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.30. Nilai PDRB Subsektor Kehutanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (dalam miliar rupiah)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*
1.	Nilai PDRB Subsektor Kehutanan (ADHK)	594,60	584,39	487,41	473,38	449,97

** Angka Sementara*
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025, diolah

Berdasarkan data PDRB ADHK, nilai PDRB Subsektor Kehutanan di DIY menunjukkan penurunan yang konsisten dalam periode 2020–2024. Penurunan yang tajam terjadi pada tahun 2022 dan tren kontraksi berlanjut hingga tahun 2024. Secara kumulatif, dalam kurun waktu 2020–2024, PDRB subsektor kehutanan telah mengalami penurunan sekitar 24,3%.

Tabel 1.31. Nilai Produksi Kehutanan Tahun 2023–2025

No.	SubElemen	Tahun		
		2023	2024	2025
1	**Hasil Hutan Kayu**			
1.1	Kayu Bulat (m^3)	2.215,00	664,60	175,00
1.2	Kayu Gergajian (m^3)	3.429,79	3.563,96	2631,12
1.3	Kayu Olahan (m^3)	9.302,31	6.956,85	5.120,34
1.4	Kayu Hutan Rakyat (m^3)	103.169,52	102.325,92	79.149,75
2	**Hasil Hutan Bukan Kayu**			
2.1	Kayu Putih			
2.1.1	Jumlah Produksi Daun (ton)	2.216,5	2.168,75	2.136,42
2.2.2	Jumlah Produksi Minyak (L)	19.529	19.609,00	20.008,00
2.2.3	Jumlah PAD (Rp)	44.000.000,00	2.915.955.166,00	143.801.450,00

Sumber: DLHK DIY, 2026, diolah

Berdasarkan data kinerja subsektor kehutanan, khususnya pada komponen hasil hutan kayu, selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan kecenderungan penurunan volume produksi komoditas, khususnya pada kayu bulat, kayu gergajian, kayu olahan, dan kayu hutan rakyat. Penurunan kinerja komoditas kayu tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karena permintaan pasar yang menurun, keterbatasan bahan baku akibat siklus tebang hutan rakyat, alih fungsi lahan, dan peningkatan biaya produksi sehingga terdapat beberapa industri pengolahan kayu yang menurunkan aktivitas produksinya. Pelemahan pasar ekspor produk kehutanan secara tidak langsung turut memengaruhi penurunan produksi kayu DIY. Penurunan permintaan ekspor, disertai pengetatan standar lingkungan di negara tujuan, berdampak pada berkurangnya serapan bahan baku oleh industri pengolahan kayu. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan harga dan kepastian pasar di tingkat produsen, sehingga mendorong pelaku usaha dan hutan rakyat menunda kegiatan penebangan, yang pada akhirnya tercermin pada penurunan volume produksi kayu di daerah.

di sisi lain, komoditas minyak kayu putih juga mengalami penurunan. Penurunan kinerja komoditas minyak kayu putih tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya persaingan dengan produk minyak atsiri impor, khususnya minyak *Eucalyptus*, yang memiliki harga lebih kompetitif dan pasokan yang lebih stabil di pasar sehingga lebih diminati. Selain itu, keterbatasan efisiensi proses produksi dan masih dominannya pola pengolahan tradisional turut memengaruhi daya saing produk minyak kayu putih lokal. Atas kondisi tersebut telah dilakukan beberapa hal antara lain koordinasi dengan KLHK RI, Perhutani dan Kemendag untuk melakukan pembatasan

impor minyak *Eucalyptus* dan pengenaan pajak atas minyak tersebut, serta dilakukan perjanjian jual beli dengan perorangan untuk minyak kayu putih.

Permasalahan dan Solusi Tindak Lanjut

a) Kondisi tegakan hutan di DIY yang merupakan hasil gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001–2003 telah cukup memiliki nilai ekonomis sehingga berpotensi rawan pencurian kayu;
b) Penurunan produksi kayu olahan yang lebih tajam dibanding kayu bulat, menandakan adanya pergeseran preferensi industri dan permintaan pasar. Kegiatan olahan seperti kayu gergajian, *veneer*, atau *plywood* mengalami kontraksi volume produksi, yang menunjukkan bahwa hilirisasi produk kayu dan industri pengelolaan kayu di DIY belum berkembang optimal, sehingga penurunan pada segmen olahan turut menekan total produksi kayu
c) Fluktuasi harga kayu di tingkat petani

Solusi dan tindak lanjut yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH).
b) Mendorong digitalisasi pemasaran hasil hutan melalui platform *e-commerce* lokal.
c) Pendampingan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi pemilik hutan rakyat, untuk meningkatkan daya saing produk kayu DIY

Kontribusi Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Subsektor kehutanan merupakan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Penjualan kayu sering kali menjadi "tabungan hidup" (asuransi alami) bagi warga DIY, yang penjualannya meningkat pada

saat pergantian tahun ajaran sekolah atau kebutuhan mendesak lainnya, sehingga menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

Capaian Subsektor Kehutanan tahun ini menegaskan peran strategis sektor primer dalam menjaga stabilitas ekonomi DIY di tengah ketidakpastian global. Penguatan pada aspek legalitas kayu (SVLK) dan diversifikasi produk non-kayu menjadi kunci utama dalam mempertahankan tren positif nilai tambah kehutanan di masa depan.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian DIY menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan berkelanjutan, mencerminkan daya tahan ekonomi di tengah dinamika kondisi nasional dan global. Menurut data BPS Provinsi DIY, pada tahun 2024 perekonomian DIY yang diukur berdasarkan PDRB ADHK 2010 mencapai nilai Rp124,59 triliun, sedangkan atas dasar harga berlaku mencapai Rp193,51 triliun. Pertumbuhan ekonomi tahun tersebut tercatat sebesar 5,03% (*y-on-y*), meskipun sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 5,07%, namun tetap menunjukkan performa yang solid dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Struktur ekonomi DIY tahun 2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta pertanian, kehutanan dan perikanan, sementara sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB DIY.

Memasuki tahun 2025, perekonomian DIY terus mempertahankan pertumbuhan positif. Pada Triwulan I-2025, ekonomi tercatat tumbuh 5,11% (*y-on-y*) yang didorong oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama

pengeluaran. Selanjutnya, menurut BPS, pada Triwulan III-2025, perekonomian DIY tetap mencatat pertumbuhan positif 5,40% (*y-on-y*) dengan struktur sektor yang stabil, yaitu industri pengolahan dan konstruksi turut memberikan kontribusi penting terhadap ekspansi ekonomi. Secara kuartal ke kuartal (q-to-q), ekonomi juga tumbuh 0,23% yang menunjukkan kesinambungan aktivitas produksi dan permintaan di dalam daerah.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi DIY berada pada kisaran 5,0-5,5% selama periode 2024 hingga Triwulan III-2025. Pertumbuhan yang konsisten ini mencerminkan resiliennya struktur ekonomi DIY yang didukung oleh diversifikasi sektor produksi dan permintaan domestik yang kuat, serta kontribusi permintaan masyarakat yang tetap tinggi. Faktor-faktor tersebut memperkuat basis perekonomian regional meskipun terdapat tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan ekonomi dunia.

Tabel 1.32. Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021–TW 3 2025 (%)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	TW 3 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,61	5,12	1,14	0,08	6,76
Pertambangan dan Penggalian	-3,11	1,72	3,25	7,55	8,76
Industri Pengolahan	0,37	1,76	4,26	3,63	4,75
Pengadaan Listrik, Gas	2,40	6,82	7,32	10,67	4,12
Pengadaan Air	6,82	3,29	3,43	0,89	-1,25
Konstruksi	10,82	4,81	4,81	8,44	7,82
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,51	4,82	4,29	3,94	5,12
Transportasi dan Pergudangan	1,93	18,26	10,27	6,13	5,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,55	12,40	8,72	8,46	5,90
Informasi dan Komunikasi	16,69	3,54	4,68	4,17	3,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	5,24	10,29	6,52	0,96
Real Estate	0,57	2,82	3,70	4,07	3,41
Jasa Perusahaan	8,09	7,16	8,28	5,35	3,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,39	2,95	2,44	6,63	5,97
Jasa Pendidikan	5,00	0,98	4,38	4,69	6,07

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	TW 3 2025
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,47	3,99	6,32	5,32	6,50
Jasa lainnya	21,53	15,04	6,97	3,31	6,43
PDRB	5,53	5,15	5,07	5,03	5,34

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026

Berdasarkan tabel di atas, perekonomian DIY hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif terjaga dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,34%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi DIY masih ditopang oleh sektor jasa dan konstruksi, seiring dengan berlanjutnya aktivitas ekonomi masyarakat serta pemulihan sektor-sektor utama pascapandemi.

Secara sektoral, Pertambangan dan Penggalian mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,76%, diikuti oleh Konstruksi sebesar 7,82% dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh signifikan sebesar 6,76%, meningkat tajam dibandingkan tahun 2024. Sektor jasa seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Pendidikan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun beberapa sektor mengalami perlambatan, seperti Jasa Keuangan dan Asuransi serta Pengadaan Air yang mencatatkan kontraksi. Kondisi ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi DIY yang relatif stabil namun masih memerlukan penguatan pada sektor-sektor tertentu guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan ke depan.

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, perekonomian DIY hingga Triwulan III Tahun 2025 tumbuh sebesar 5,34%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03%, dengan pertumbuhan terutama ditopang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 7,84% serta Konsumsi Rumah Tangga yang tetap stabil sebesar 4,51%. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPRT masing-masing tumbuh 1,55% dan 3,25%,

menunjukkan moderasi dibandingkan tahun sebelumnya, seiring penyesuaian belanja dan aktivitas kelembagaan. Dari sisi eksternal, Ekspor Luar Negeri tumbuh 2,17% dan Impor Luar Negeri 0,86%, mencerminkan aktivitas perdagangan yang masih terbatas, sehingga secara keseluruhan struktur pengeluaran PDRB DIY hingga Triwulan III 2025 tetap bertumpu pada konsumsi dan investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.33. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2021–Triwulan III 2025 (%)

Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	Triwulan III 2025
Konsumsi Rumah Tangga	1.77	2.64	4,92	4,64	4,51
Konsumsi LNPRT	0.39	5.58	8,75	11,06	3,25
Konsumsi Pemerintah	0.26	0.52	2,35	6,09	1,55
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.2	5.86	6,5	7,90	7,84
Perubahan Inventori	8.63	-	-	-	-
Ekspor Luar Negeri	21.68	8.33	1,96	3,63	2,17
Impor Luar Negeri	7.3	0.19	1,51	5,46	0,86
Net Ekspor antarDaerah	-148.78	-	-	-	-
P D R B	5.53	5.15	5,07	5,03	5,34

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026

d. Inflasi

Stabilitas harga di DIY tahun 2025 relatif terjaga, tercermin dari tingkat inflasi yang masih berada dalam rentang terkendali. Tingkat inflasi *(y-on-y)* Provinsi DIY tahun 2025 sebesar 3,11% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,93. Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi *(y-on-y)* sebesar 2,93% dengan IHK sebesar 108,94, sedangkan Kota Yogyakarta mengalami inflasi *(y-on-y)* sebesar 3,33% dengan IHK sebesar 111,13. Perbedaan tingkat inflasi antarwilayah tersebut mencerminkan variasi dinamika permintaan, struktur konsumsi, serta intensitas aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan.

Capaian inflasi tersebut terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,39%, dipicu kenaikan harga pangan strategis dan rokok. Kelompok pendorong berikutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,92%, terutama akibat kenaikan harga emas perhiasan. Inflasi juga dipengaruhi oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,19%, kelompok transportasi sebesar 0,16%, serta kelompok pendidikan dan penyediaan makanan dan minuman/restoran yang masing-masing memberikan andil 0,14%. Sementara itu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan cenderung stabil sehingga turut menahan laju inflasi DIY agar tetap berada di rentang yang terkendali.

Tabel 1.34. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2024-2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2024	IHK Desember 2025	Tingkat Inflasi (*y-on-y*) Desember 2025* (%)	Andil Inflasi (*y-on-y*) Desember 2025
Umum	**106,61**	**109,93**	**3,11**	**3,11**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,22	115,73	5,00	1,39
Pakaian dan Alas Kaki	104,18	106,59	2,31	0,10
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,94	103,05	1,09	0,19
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,00	103,96	0,93	0,04
Kesehatan	106,17	106,64	0,44	0,01
Transportasi	110,10	111,44	1,22	0,16
Informasi, Komunikasi, dam Jasa Keuangan	99,66	99,66	~0	~0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,98	105,18	1,15	0,02
Pendidikan	104,43	106,81	2,28	0,14
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	105,68	107,28	1,51	0,14
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114,58	131,18	14,49	0,92

*Ket.: *) Persentase perubahan IHK Desember 2025 terhadap bulan Desember 2024*
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026

3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY

Pada tahun 2025 Pemda DIY masih melanjutkan Kebijakan Strategis tahun 2024 dengan menyusun Peraturan Daerah Istimewa DIY No 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemda DIY dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemda DIY, pada tahun 2024 ditetapkan Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais No 1 Tahun 2024, yaitu:

a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah;

n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Energi Sumber Daya mineral;
r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas *Kebudayaan (Kundha Kabudayan);*
u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

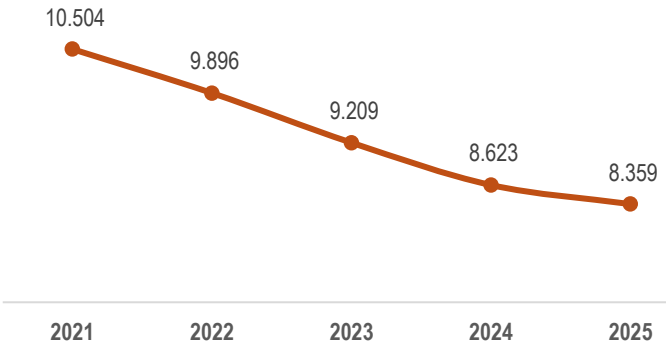
Adapun tindak lanjut Pada Tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2) Gambaran Kondisi ASN yang Dimiliki

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan mesin utama penggerak birokrasi, sehingga perlu dilakukan manajemen yang terukur dan terarah. Oleh karenanya, Pemda DIY melalui BKD DIY menjalankan fungsi manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana amanat dalam undang-undang ASN tersebut, pada tahun 2025 Pemda DIY telah menyelesaikan pengangkatan ASN, dalam hal ini PPPK, sejumlah total 2.541 orang yang terbagi dalam dua tahap.

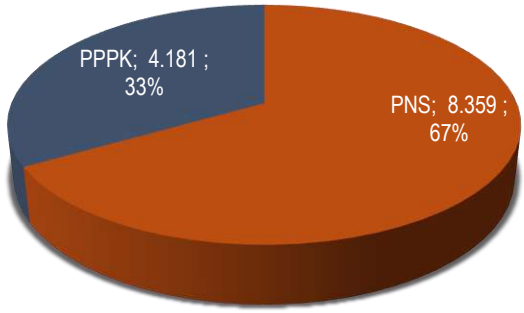
Adapun kondisi ASN Pemda DIY sebagai berikut:



Gambar 1.21. Jumlah PNS Pemda DIY Tahun 2021–2025

Sumber: BKD DIY, 2025

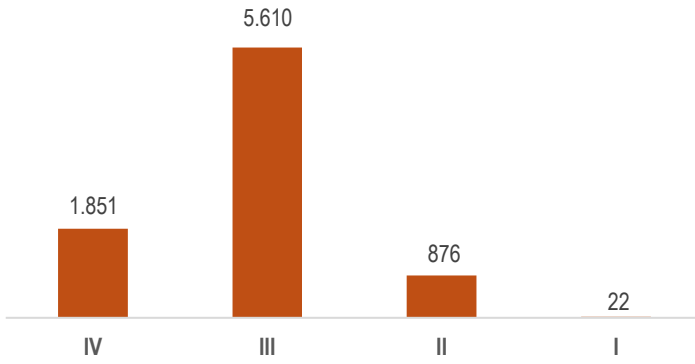
Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah PNS Pemda DIY berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai pensiun lebih besar daripada jumlah pegawai masuk (*minus growth*).



Gambar 1.22. Jumlah ASN Pemda DIY Tahun 2025

Sumber: BKD DIY, 2025

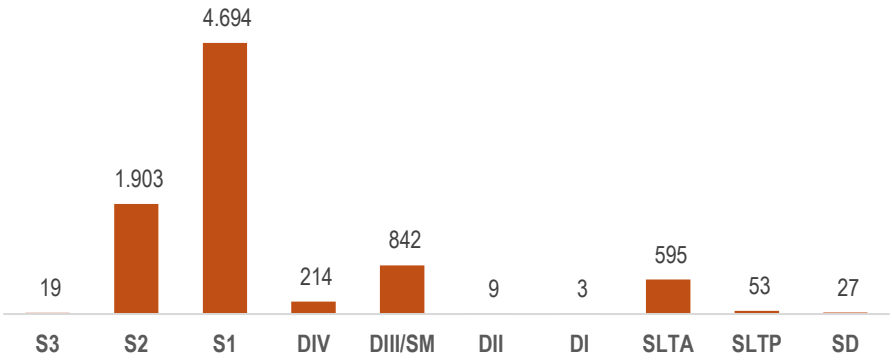
Diagram di atas menunjukkan total ASN Pemda DIY Tahun 2025 sejumlah 12.540 orang, terdiri dari PNS sejumlah 8.359 orang dan PPPK sejumlah 4.181 orang. Jumlah PPPK 33% dari total ASN, merupakan jumlah yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa Pemda DIY mempunyai sumber daya aparatur yang cukup banyak. Hal ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan *minus growth* PNS yang dialami oleh Pemda DIY.



Gambar 1.23. Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Golongan

Sumber: BKD DIY, 2025

Komposisi golongan PNS Pemda DIY paling banyak terdapat pada golongan III. Hal ini salah satunya dikarenakan sebagian besar rekrutmen CPNS mempersyaratkan latar belakang Pendidikan Strata 1/DIV, sehingga masuk di golongan III. Masa tunggu dalam golongan III ini juga tergolong lama. Kenaikan golongan dari golongan III ke IV bersifat terbatas (selektif pada jabatan, angka kredit, dan masa kerja). Rekrutmen untuk latar belakang Pendidikan DIII dan SMA berkurang sehingga menyebabkan jumlah PNS golongan II sedikit.



Gambar 1.24. Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Pendidikan

Sumber: BKD DIY, 2025

Data di atas menunjukkan jenjang pendidikan PNS Pemda DIY dari SD s.d. S3. Komposisi pendidikan PNS didominasi oleh PNS berpendidikan S1. Hal ini salah satunya karena syarat pada saat proses rekrutmen CPNS. Jumlah PNS berpendidikan S2 menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sedangkan PNS berpendidikan S3 jumlahnya masih tergolong kecil. Secara keseluruhan struktur Pendidikan PNS Pemda DIY relatif tinggi, yaitu didominasi oleh S1 dan S2.

3) Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2025

a. Ringkasan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.835.587.382.957,00 dan direalisasikan

sebesar Rp4.869.450.568.324,59 atau 100,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.35. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.835.587.382.957,00**	**4.869.450.568.324,59**	**100,70**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.793.594.279.035,00**	**1.839.847.607.163,59**	**102,58**
4.1.01	Pajak Daerah	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	101,34
4.1.02	Retribusi Daerah	72.579.914.151,00	79.022.419.102,85	108,88
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	126.006.483.045,00	127.241.046.476,91	100,98
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.741.857.353,00	91.910.665.258,58	124,64
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.034.387.603.922,00**	**3.022.299.662.161,00**	**99,60**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	99,60
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631,00	980.926.631,00	100
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.605.500.000,00**	**7.303.299.000,00**	**96,03**
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	96,03
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.835.587.382.957,00**	**4.869.450.568.324,59**	**100,70**

Sumber: BPKA DIY, 2025

b. Ringkasan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.112.741.612.241,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.730.506.066.437,52 atau 92,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.36. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5	**BELANJA DAERAH**	**5.112.741.612.241,00**	**4.730.606.122.785,52**	**92,53**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.455.048.853.310,00**	**3.257.370.556.718,18**	**94,28**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.759.709.437.784,00	1.647.593.991.609,00	93,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.729.944.545,00	1.078.988.412.794,18	92,96
5.1.04	Belanja Subsidi	96.029.746.301,00	95.355.621.534,00	99,30
5.1.05	Belanja Hibah	407.608.018.680,00	405.156.875.823,00	99,40
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.971.706.000,00	30.275.654.958,00	97,75
5.2	**BELANJA MODAL**	**727.828.251.159,00**	**606.066.257.104,00**	**83,27**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	122.858.100	61,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.596.510.665,00	165.720.594.811,00	92,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305.299.668.188,00	198.928.668.595,00	65,16
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.565.348.183,00	232.553.303.352,00	99,14

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.886.724.123,00	8.463.832.246,00	95,24
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	280.000.000,00	277.000.000,00	98,93
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**39.476.792.633,00**	**3.405.377.000,00**	**8,63**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**890.387.715.139,00**	**863.763.931.963,34**	**97,01**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	547.966.592.107,00	541.272.131.059,00	98,78
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	342.421.123.032,00	322.491.800.904,34	94,18
	JUMLAH BELANJA	**5.112.741.612.241,00**	**4.730.606.122.785,52**	**92,53**

Sumber: BPKA DIY, 2025

c. Realisasi Pembiayaan

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp437.696.229.284,00 dengan realisasi Rp437.767.729.284,44 atau 100,02%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp437.696.229.284,00 dengan realisasi sebesar Rp437.696.229.284,44 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp71.500.000,00 yang berasal dari pengembalian dana bergulir.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp160.542.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp157.500.000.000,00 atau 98,11%. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp155.000.000.000,00, dan pemberian pinjaman daerah dalam bentuk dana bergulir kepada Masyarakat melalui Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) sebesar Rp2.500.000.000,00.

Berikut ini anggaran dan realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2025:

Tabel 1.37. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**277.154.229.284,00**	**280.267.729.284,44**	**101,12**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**437.696.229.284,00**	**437.767.729.284,44**	**100,02**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.696.229.284,00	437.696.229.284,44	100
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	71.500.000,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**160.542.000.000,00**	**157.500.000.000,00**	**98,11**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	155.542.000.000,00	155.000.000.000,00	99,65
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	50,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**277.154.229.284,00**	**280.267.729.284,44**	**101,12**

Sumber: BPKA DIY, 2025



LKPJ Gubernur DIY 2025

jogja istimewa

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bab II

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, KUA dan PPAS tersebut dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun 2025, yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun berjalan.

Dalam pelaksanaannya, Tahun Anggaran (TA) 2025 menghadapi berbagai dinamika perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan nasional, serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dinamika tersebut memerlukan penyesuaian agar pelaksanaan pembangunan tetap sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa perubahan dokumen perencanaan tahunan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain didasarkan pada hasil evaluasi tahun berjalan, penyusunan Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 juga dilakukan dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025). Penyelarasan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan agar pemerintah daerah menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Dalam surat tersebut juga diamanatkan adanya langkah-langkah percepatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Penyelarasan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029 tersebut juga tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana dalam butir kedelapan DIY diminta untuk memastikan keselarasan RPJMD DIY Tahun 2027 dengan muatan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Proses penyelarasan tersebut diwadahi dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 karena tahun 2025 menjadi awal dari pelaksanaan kedua dokumen perencanaan tersebut.

Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan beberapa hal, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama tahun 2025;

2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada Penyusunan APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Penyesuaian tersebut mencakup penyesuaian rencana program/kegiatan dan/atau subkegiatan yang bersumber dari DAK; penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer baik Dana Alokasi Khusus maupun Dana Keistimewaan DIY; pergeseran antar-objek belanja, rincian objek sampai dengan subrincian objek; penyesuaian belanja pegawai dan tunjangan, pemenuhan belanja yang bersifat wajib mengikat, serta pelaksanaan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Penyesuaian yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dibahas bersama DPRD. Dokumen ini kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama Pemda DIY secara resmi memberlakukan kebijakan opsen pajak sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Opsen pajak didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase

tertentu, yang memiliki tujuan diantaranya untuk menciptakan percepatan penerimaan bagian pajak bagi kab/kota, penguatan *local taxing power* serta meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota. Meski memiliki maksud dan tujuan yang baik, penerapan opsen pajak sebagai pengganti mekanisme bagi hasil pajak menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda DIY karena setelah penerapan opsen pajak, penerimaan pajak daerah dari PKB dan BBNKB mengalami penurunan. Pengenaan tarif pajak baru sebagai dasar penghitungan tidak menambah beban wajib pajak di DIY sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang.

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber daya utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup empat komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b. Pendapatan Transfer dikelompokkan menjadi dua, yaitu Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal, dan Dana Keistimewaan. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota. Penghitungan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah daerah penghasil, daerah pengolah, dan daerah non-penghasil terdampak

eksternalitas negatif. Pemerintah dalam menentukan pagu Dana Alokasi Umum mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta berbasis *unit cost* yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, dan karakteristik wilayah. Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD diredesain dengan basis kinerja.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan optimalisasi PAD guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Profil kemampuan keuangan Pemerintah Daerah akan tercermin dari PAD yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil dan kemandirian fiskal daerah akan semakin kuat. Dengan demikian, optimalisasi PAD menjadi prioritas yang harus diupayakan sebagai salah satu modal dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah. Upaya optimalisasi PAD tersebut antara lain dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta terus melakukan penggalian potensi yang ada. Optimalisasi pendapatan dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan target penerimaan PAD adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan regulasi penyesuaian nilai jual kendaraan bermotor yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025;
b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI pada tataran kebijakan, dengan Kepolisian Daerah DIY dan kabupaten/kota di DIY termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah;
c. Berkoordinasi lintas intansi terkait solusi atas jumlah kendaraan non-AB yang terus meningkat agar dapat memberikan kontribusi PAD, dimana keberadaannya mengakibatkan kepadatan lalu lintas serta kerusakan jalan, dengan menerbitan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen (STBPPN) yang dapat digunakan untuk pengurusan administrasi perpajakan Kendaraan Bermotor;
d. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI terkait dengan regulasi penyesuaian tarif sebagai dasar pemungutan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
e. Melaksanakan kolaborasi kegiatan guna optimalisasi penerimaan PKB, BBNKB dan Opsen Pajak MBLB yang diwujudkan dalam bentuk sinergi pendanaan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
f. Melakukan koordinasi dengan OPD yang memiliki pendapatan dalam rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan PAD;
g. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
h. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang adaptif terhadap perkembangan tekhnologi guna mempermudah pelayanan bagi wajib pajak dengan cara:
    1) Menyediakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tanpa tatap muka melalui anjungan E-POSTI QRISTIMEWA, Qris, GoPay, dan *e-banking;*

2) Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-commerce;*
3) Layanan pengingat jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor melalui *Whatsapp Blast;*
4) Layanan cek pajak.

i. Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi daerah berbasis teknologi dengan melakukan optimalisasi pembayaran retribusi melalui kanal-kanal digital termasuk melalui *e-ticketing* di Museum Sonobudoyo dan Balai Layanan Perpustakaan.
j. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling, layanan malam serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah, pembayaran pajak lima tahunan melalui Bus Samsat Keliling dan purna ditempat;
k. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak, dan media elektronik;
l. Melaksanakan optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset serta meningkatkan fasilitas serta sarana terkait pendapatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran demi peningkatan PAD;
m. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta
n. Optimalisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

di samping upaya-upaya peningkatan PAD, pemerintah juga perlu menempuh upaya peningkatan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola secara optimal, meskipun besaran realisasinya relatif sulit untuk diperkirakan karena sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan melalui perumusan dan

pengajuan program-program prioritas atau unggulan yang memenuhi kriteria pembiayaan DAK. Sementara itu, optimalisasi pendapatan dari Dana Bagi Hasil pajak pusat dapat dilakukan melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Dana Bagi Hasil memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika perekonomian daerah, dimana peningkatan aktivitas ekonomi akan sejalan dengan bertambahnya penerimaan dari skema bagi hasil. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong pertumbuhan dan penguatan aktivitas ekonomi wilayah. Adapun strategi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah;
b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian TKD;
c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu; dan Pelaporan penggunaan TKD secara tepat waktu.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Pemda DIY pada APBD DIY Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp4.835.587.382.957,00 yang kemudian terealisasi sebesar Rp4.869.450.568.324,59 atau 100,70%. Dengan demikian, realisasi pendapatan mampu melampaui target yang ditetapkan dengan selisih lebih sebesar Rp33.863.185.367,59. Pendapatan Daerah terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah sebesar 37,78%, Pendapatan Transfer sebesar 62,07%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,15%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah per jenis pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.835.587.382.957,00**	**4.869.450.568.324,59**	**100,70**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.793.594.279.035,00**	**1.839.847.607.163,59**	**102,58**
4.1.01	Pajak Daerah	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	101,34
4.1.02	Retribusi Daerah	72.579.914.151,00	79.022.419.102,85	108,88
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	126.006.483.045,00	127.241.046.476,91	100,98
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.741.857.353,00	91.910.665.258,58	124,64
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.034.387.603.922,00**	**3.022.299.662.161,00**	**99,60**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	99,60
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631,00	980.926.631,00	100
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.605.500.000,00**	**7.303.299.000,00**	**96,03**
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	96,03
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.835.587.382.957,00**	**4.869.450.568.324,59**	**100,70**

Sumber: BPKA DIY, 2025

Berikut penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun Anggaran 2025:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah serta pembiayaan pembangunan, dimana semakin tinggi capaian pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan kemampuan fiskal daerah menjadi semakin kuat.

PAD tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.793.594.279.035,00 dan realisasi sebesar Rp1.839.847.607.163,59 atau 102,58%. PAD Tahun 2025 masih didominasi penerimaan Pajak Daerah (83,79%), diikuti oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah (6,92%), Lain-Lain PAD yang sah (5%), dan Retribusi Daerah (4,30%).

a. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, serta Opsen MBLB.

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.521.266.024.486,00 dan realisasi sebesar Rp1.541.673.476.325,25 atau 101,34%, sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp20.407.451.839,25. Anggaran dan realisasi Pajak Daerah menurut objek pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.1.01	Pajak Daerah	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	101,34
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	653.605.528.300,00	666.057.670.000,00	101,91
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	183.794.999.400,00	201.880.407.600,00	109,84
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	377.603.830.093,00	377.603.830.093,00	100
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	887.041.634,00	922.269.636,00	103,97
4.1.01.05	Pajak Rokok	303.605.728.809,00	294.042.213.023,00	96,85
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	30.000.000,00	58.256.600,00	194,19
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.738.896.250,00	1.108.829.373,25	63,77

Sumber: BPKA DIY, 2025

Terlihat dari uraian tabel di atas, bahwa realisasi Pajak Daerah yang belum sesuai target adalah Pajak Rokok dengan realisasi sebesar 96,85% dan Opsen MBLB dengan realisasi sebesar 63,77% dari target yang telah ditetapkan.

a. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, definisi retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Obyek Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemda DIY terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kebersihan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, Retribusi penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila, Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan, Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi penggunaan tenaga kerja asing dan Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp72.579.914.151,00 dan realisasi sebesar Rp79.022.419.102,85 atau 108,88% sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp6.442.504.951,85 Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah per rincian obyek pendapatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.1.02	Retribusi Daerah	72.579.914.151,00	79.022.419.102,85	108,88
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	40.063.926.016,00	45.722.829.575,25	114,12
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	32.263.988.135,00	33.144.969.527,60	102,73
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	252.000.000,00	154.620.000,00	61,36

Sumber: BPKA DIY, 2025

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target adalah Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp252.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp154.620.000,00 atau 61,36%. Retribusi Perijinan Tertentu yang berasal dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak tercapai karena target ditetapkan berdasarkan data pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, terdapat beberapa TKA yang bekerja pada lokasi lintas kabupaten. Tetapi saat masa berlaku di tahun 2025 akan segera habis, TKA tersebut terpantau tidak melakukan pembayaran kembali untuk proses perpanjangan izin. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa TKA yang dimaksud tidak melanjutkan perpanjangan izin atau berpindah lokasi kerja. TKA yang sudah tidak bekerja pada lokasi lintas kabupaten, melainkan hanya pada satu kabupaten/kota, tidak lagi menjadi kewenangan provinsi, melainkan kabupaten/kota.

b. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp126.006.483.045,00 dan direalisasikan sebesar Rp127.241.046.476.,91 atau 100,98%, sehingga realisasi lebih dari target anggaran sebesar Rp1.234.563.431,91.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yaitu:

a) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMN (PT. Asuransi Bangun Askrida)
b) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) (BUKP dan PT. Bank BPD DIY)
c) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) (PT. AMI dan PT. Taru Martani)

Anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per obyek tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**126.006.483.045,00**	**127.241.046.476,91**	**100,98**
4.1.03.01	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN**	**213.286.482,00**	**0,00**	**0,00**
	- PT Asuransi Bangun Askrida	213.286.482,00	0,00	0,00
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**123.074.128.133,00**	**124.521.978.046,91**	**101,18**
	- BUKP	2.000.000.000,00	3.447.849.913,91	172,39
	- PT Bank BPD DIY	121.074.128.133,00	121.074.128.133,00	100
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**	**2.719.068.430,00**	**2.719.068.430,00**	**100**
	- PT AMI	2.719.068.430,00	2.719.068.430,00	100
	- PT Taru Martani *- Perumda Air Bersih Tirtatama*	0		

Sumber: BPKA DIY, 2025

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp73.741.857.353,00 dan realisasi sebesar Rp91.910.665.258,58 atau 124,64%, sehingga terdapat realisasi lebih dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18.168.807.905,58. Anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2025 per obyek pendapatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.741.857.353,00	91.910.665.258,58	124,64
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.624.425.625,00	2.719.973.024,00	167,44
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.454.687.611,00	13.488.621.540,00	108,30
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	8.735.556.250,00	8.544.569.375,00	97,81
4.1.04.05	Jasa Giro	8.000.000.000,00	4.875.380.592,00	60,94
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.800.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.000.000.000,00	17.267.339.787,00	172,67
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	83.588.308,99	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	311.808.099,00	597.284.704,39	191,56
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	24.422.124.500,00	28.938.474.579,00	118,49
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	45.374.513,00	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	348.191.800,00	696,38
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	3.618.243.529,65	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	8.095.077.268,00	10.872.674.505,55	134,31
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	24.453.000,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	48.178.000,00	480.696.000,00	997,75

Sumber: BPKA DIY, 2025

2) Pendapatan Transfer

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal, dan Dana Keistimewaan. Transfer antar daerah terdiri dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.034.387.603.922,00 dan realisasi sebesar Rp3.022.299.662.161,00 atau 99,60%, sehingga terdapat kekurangan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.087.941.761,00. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer per obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.034.387.603.922,00**	**3.022.299.662.161,00**	**99,60**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	99,60
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	976.134.243.366,00	976.134.243.366,00	100
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	113.776.675.000,00	104.458.851.600,00	91,81
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.346.039.895.000,00	1.345.942.438.538,00	99,99
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	589.003.470.925,00	586.330.809.026,00	99,55
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**2.048.820.040.925,00**	**2.036.732.099.164,00**	**99,41**
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.452.393.000,00	8.452.393.000,00	100
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**8.452.393.000,00**	**8.452.393.000,00**	**100**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631,00	980.926.631,00	100
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	980.926.631,00	980.926.631,00	100
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**980.926.631,00**	**980.926.631,00**	**100**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**3.034.387.603.922,00**	**3.022.299.662.161,00**	**99,60**

Sumber: BPKA DIY, 2025

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp113.776.675.000,00 dengan realisasi sebesar Rp104.458.851.600,00 atau 91,81% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp9.317.823.400,00.

(1) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.346.039.895.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.345.942.438.538,00 atau 99,99%. DAU dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 221 Tahun 2024 (lampiran V) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. DAU dirinci menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaanya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

(2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas DAK Fisik dan

DAK Non Fisik. Penyaluran DAK Fisik didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

(3) Dana Keistimewaan (DAIS)

Dana Keistimewaan (DAIS) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp976.134.243.366,00 dengan realisasi sebesar Rp976.134.243.366,00 atau 100%.

(4) Insentif Fiskal (IF)

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. Alokasi IF Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp8.452.393.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.452.393.000,00 atau 100%.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ini merupakan sharing pembiayaan atas instalasi pengelolaan air limbah terpusat dimana pendapatan yang kita peroleh diperuntukan sepenuhnya untuk pengelolaan instalasi air limbah terpusat pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sesuai dengan Perjanjian

Kerjasama antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor B/100.3.7.1/929/BR.1 dan Nomor 30/PK/Bt/2025 dan Nomor 61/PK.KDH/A/2025 dan Nomor 3/PKS.YK/WND.11/APR/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sesuai berita acara kontribusi (Sharing) biaya pengelolaan air limbah (IPAL) terpusat Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Transfer Antardaerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp980.926.631,00 dengan realisasi sebesar Rp980.926.631,00 atau sebesar 100%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 berasal dari Pendapatan Hibah dengan anggaran Rp7.605.500.000,00 dan realisasi Rp7.303.299.000,00 atau 96,03%. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Komponen Pendapatan Hibah pada Pemda DIY Tahun Anggaran 2025 diperoleh dari Dealer Otomotif yang dianggarkan sebesar Rp3.332.252.000,00, realisasi sebesar Rp3.033.651.000,00 atau 91,04%, Main Dealer dianggarkan sebesar Rp25.500.000,00, realisasi sebesar

Rp21.900.000,00 atau 85,88%, dan Jasa Raharja dianggarkan sebesar Rp4.247.748.000 realisasi sebesar Rp4.247.748.000 atau 100%. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) diprioritaskan untuk:

(1) Operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan SAMSAT dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan
(2) Kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ yang mencakup:
    a. Gelar operasi bersama;
    b. Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan;
    c. Pengembangan SAMSAT unggulan;
    d. Pelaksanaan SAMSAT keliling;
    e. Pengembangan *single data*;
    f. Pemberian apresiasi kepada wajib pajak;
    g. Kebutuhan operasional tim pembina SAMSAT tingkat provinsi.

3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan

1) Permasalahan

Pengelolaan Pendapatan Daerah selama tahun 2025 telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang muncul, baik dari sisi perencanaan, penatausahaan, maupun dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahannya, antara lain:

a. Penyusunan regulasi terkait dengan perubahan tarif baik Retribusi Daerah maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah membutuhkan waktu yang relatif lama dan birokrasi yang lebih panjang sehingga berpengaruh terhadap perencanaan

pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah;

b. Kenaikan harga kendaraan bermotor baru, khususnya roda empat yang melebihi daya beli masyarakat, mengakibatkan masyarakat lebih memilih kendaraan bermotor roda dua dibandingkan roda empat, serta peminat kendaraan listrik yang bertambah sehingga berpengaruh pada penerimaan bea balik nama kendaraan;
c. Banyaknya kendaraan non-AB (luar daerah) di wilayah DIY memberikan dampak kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan namun tidak memberikan kontribusi terhadap PAD.
d. Kurangnya publikasi atas jasa layanan pemda yang berpotensi untuk meningkatkan retribusi daerah.

2) Solusi

Kendala-kendala tersebut di atas telah ditindaklanjuti dan diperoleh solusinya. Beberapa upaya yang dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu:

a. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan instansi terkait;
b. Menyelenggarakan kerjasama dengan dealer otomotif roda empat dalam kegiatan Pemda DIY, kerjasama tersebut berbentuk pameran otomotif roda empat dan pemberian insentif fiskal dan pembebasan sanksi administrasi untuk periode tertentu.
c. Kolaborasi dengan kepolisian dan dinas terkait dalam membuat regulasi dengan mengeluarkan Surat Edaran penerbitan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen (STBPPN) yang hanya dapat digunakan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor di DIY.
d. Meningkatkan publikasi atas layanan pendapatan daerah yang diberikan termasuk mengoptimalkan publikasi melalui media sosial.

C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2025 menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Penyesuaian tersebut meliputi pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*), penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan, serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengikuti petunjuk teknis dari kementerian/lembaga terkait, sedangkan penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diprioritaskan untuk bidang kesehatan guna mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan pemulihan ekonomi daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja.

Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemda DIY, yaitu:

1) Penyesuaian belanja pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari pemerintah pusat, meliputi:

    a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
    b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
    c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan;

d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
i. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-24/PK/PK.2/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan DBH TA 2025 yang Telah Ditentukan Penggunaannya.

2) Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai.
3) Pergeseran anggaran antarorganisasi, unit, program, kegiatan, subkegiatan, dan jenis belanja.

4) Penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota sesuai target penerimaan pajak daerah dan kelebihan penerimaan tahun sebelumnya.
5) Adanya penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja daerah dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.112.741.612.241,00 dengan realisasi sebesar Rp4.730.606.122.785,52 atau 92,53%. Rincian alokasi dan realisasi belanja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Dianggarkan sebesar Rp3.455.048.853.310,00 dengan realisasi sebesar Rp3.257.370.556.718,18 atau 94,28%. Belanja Operasi dapat dirinci menjadi:

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.455.048.853.310,00**	**3.257.370.556.718,18**	**94,27**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.759.709.437.784,00	1.647.593.991.609,00	93,62
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	958.694.914.290,00	849.832.901.716,00	88,64
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	740.747.567.538,00	738.318.613.137,00	99,67
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	44.925.399.860,00	44.200.930.070,00	98,38
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	242.589.771,00	238.353.685,00	98,25

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.959.685.000,00	2.959.685.000,00	100
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.139.281.325,00	12.043.508.001,00	99,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.729.944.545,00	1.078.988.412.794,18	92,95
5.1.02.01	Belanja Barang	180.165.696.976,00	168.307.195.519,00	93,41
5.1.02.02	Belanja Jasa	575.094.998.529,00	542.943.253.009,00	94,40
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	85.897.724.443,00	80.985.270.793,05	94,28
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.693.889.180,00	48.798.859.976,00	81,74
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	79.483.150.000,00	78.982.020.000,00	99,36
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	114.156.524.705,00	113.235.204.572,00	99,19
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.237.960.712,00	45.736.608.925,13	69,04
5.1.04	Belanja Subsidi	96.029.746.301,00	95.355.621.534,00	99,29
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	96.029.746.301,00	95.355.621.534,00	99,29
5.1.05	Belanja Hibah	407.608.018.680,00	405.156.875.823,00	99,39
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	286.258.363.680,00	284.963.848.943,00	99,54
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.810.025.000,00	10.810.025.000,00	100
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	110.539.630.000,00	109.383.001.880,00	98,95
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.971.706.000,00	30.275.654.958,00	97,75
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.110.200.000,00	2.103.054.765,00	99,66
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	28.800.000.000,00	28.111.500.000,00	97,60
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	61.506.000,00	61.100.193,00	99,34

Sumber: BPKA DIY, 2025

2) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp727.828.251.159,00 dengan realisasi sebesar Rp606.066.257.104,00 atau 83,27%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.2	**BELANJA MODAL**	**727.828.251.159,00**	**606.066.257.104,00**	**83,27**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	122.858.100	61,43
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	122.858.100	61,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.596.510.665,00	165.720.594.811,00	92,79
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.706.480.000,00	6.492.163.689,00	96,80
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.437.160.000,00	2.321.608.640,00	67,54
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	74.339.000,00	72.931.462,00	98,11
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	150.960.000,00	146.471.940,00	97,03
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.533.137.698,00	20.805.800.044,00	84,81
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.815.578.397,00	4.489.878.531,00	93,24
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.421.157.800,00	9.661.927.588,00	77,79
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	42.865.181.510,00	41.706.051.598,00	97,30
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	28.706.486.149,00	28.073.303.152,00	97,79
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	77.931.000,00	76.287.000,00	97,89
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	91.100.000,00	90.356.900,00	99,18
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	44.270.000,00	44.160.000,00	99,75
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.042.768.450,00	3.032.373.904,00	99,66
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	79.890.800,00	77.607.169,00	97,14
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	44.436.616.583,00	44.417.022.742,00	99,96
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.113.453.278,00	4.212.650.452,00	59,22
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305.299.668.188,00	198.928.668.595,00	65,16
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	300.616.717.380,00	194.982.419.620,00	64,86
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	208.165.000,00	206.886.100	99,39
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.371.890.808,00	2.337.625.006,00	98,56
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.102.895.000,00	1.401.737.869,00	66,66
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.565.348.183,00	232.553.303.352,00	99,14
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	222.172.242.844,00	220.481.273.807,00	99,24
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.014.474.250,00	8.791.407.670,00	97,53
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	77.868.000,00	75.865.100	97,43
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.300.763.089,00	3.204.756.775,00	97,09
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.886.724.123,00	8.463.832.246,00	95,24
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	348.989.948,00	311.824.390,00	89,35
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.794.435.000,00	1.750.680.606,00	97,56

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.743.299.175,00	6.401.327.250,00	94,93
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	280.000.000,00	277.000.000,00	98,93
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	97.500.000,00	97,50
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	180.000.000,00	179.500.000,00	99,72

Sumber: BPKA DIY, 2025

3) Belanja Tidak Terduga

Dianggarkan sebesar Rp39.476.792.633,00 dengan realiasi sebesar Rp3.405.377.000,00 atau 8,63%.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**39.476.792.633,00**	**3.405.377.000,00**	**8,63**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63

Sumber: BPKA DIY, 2025

4) Belanja Transfer

Dianggarkan sebesar Rp890.387.715.139,00 dengan realisasi sebesar Rp863.763.931.963,34 atau 97,01%. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
b. Belanja Bantuan Keuangan
c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota
d. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Anggaran dan realiasi Belanja Transfer per obyek dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**890.387.715.139,00**	**863.763.931.963,34**	**97,01**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	547.966.592.107,00	541.272.131.059,00	98,78
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	547.966.592.107,00	541.272.131.059,00	98,78
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	342.421.123.032,00	322.491.800.904,34	94,18
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar-Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	197.905.896.382,00	180.781.170.273,84	91,35
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	141.515.226.650,00	138.710.630.630,50	98,02

Sumber: BPKA DIY, 2025

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Keterlambatan proses lelang mengakibatkan tidak tercapainya target serapan anggaran dan output.
b. Kriteria kesiapan *(readiness criteria)* yang belum terpenuhi menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan.
c. Perubahan kebijakan pemerintah selama pelaksanaan APBD menjadi kendala percepatan realisasi.
d. Perubahan prioritas dalam masa pelaksanaan APBD yang belum dapat diantisipasi dalam proses perencanaan berakibat perlu dilakukan penyesuaian belanja dalam proses pelaksanaan anggaran.
e. Keadaan dimana SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian belanja.
f. Kebijakan efisiensi pemerintah pusat memicu adanya penurunan Dana TKD. Hal ini mengakibatkan penundaan atau dihentikan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan.

2) Solusi

a. Kesadaran perlunya lelang dini dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul pada saat proses pengadaan barang dan jasa sehingga resiko tidak tercapainya target serapan anggaran dan pencapaian output dapat diminimalkan.
b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang terintegrasi.
c. Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan APBD diperkuat melalui penerapan sistem aplikasi SIPD-RI untuk penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan selaras.
d. Optimalisasi belanja dilakukan melalui pemanfaatan e-katalog, toko daring, dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna mempercepat proses transaksi secara transparan dan akuntabel.
e. Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan secara bertahap sesuai progres fisik pekerjaan untuk mencegah penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran.
f. Penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sistem digital seperti SIPD-RI agar pelaksanaan anggaran lebih efektif.
g. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilaksanakan secara berkala, disertai penerapan *reward and punishment* bagi perangkat daerah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
h. Pengawasan internal oleh APIP dan pendampingan hukum dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

i. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kinerja penyerapan anggaran agar memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan atas realisasi APBD yang tepat waktu.

D. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pada TA 2025, Penerimaan Pembiayaan Pemda DIY dianggarkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Rincian masing-masing pos penerimaan pembiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**437.696.229.284,00**	**437.767.729.284,44**	**100,02**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.696.229.284,00	437.696.229.284,44	100
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	142.955.873.464,00	142.955.873.464,00	100
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	2.733.888.090,00	2.733.888.090,00	100
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	227.913.000,00	227.913.000,00	100
6.1.01.05	Penghematan Belanja	291.778.554.730,00	291.778.554.730,44	100
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	71.500.000,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	71.500.000,00	0,00

Sumber: BPKA DIY, 2025

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.500.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp155.000.000.000,00 dan dana bergulir melalui Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) DIY sebesar Rp2.500.000.000,00. Tujuan dari penyertaan modal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan yang didasarkan atas Perda DIY Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Dalam peraturan daerah tersebut, disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi kepemilikan modal dasar 51% dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (Delapan triliun rupiah), maka Pemda DIY mempunyai kewajiban penyertaan modal ke PT Bank BPD DIY sebesar Rp4.080.000.000.000,00 (Empat triliun delapan puluh miliar rupiah). Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman kepada Masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga keuangan non-bank yakni Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP).

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan DIY Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**160.542.000.000,00**	**157.500.000.000,00**	**98,11**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	155.542.000.000,00	155.000.000.000,00	99,65
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	542.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	155.000.000.000,00	155.000.000.000,00	100
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	50,00
6.2.04.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	2.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100

Sumber: BPKA DIY, 2025

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN

1. PT Bank BPD DIY

Berdasarkan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, modal dasar PT Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.000,00. Nilai penyertaan modal oleh Pemda DIY paling sedikit sebesar 51% atau Rp4.080.000.000.000,00 dan sisanya 49% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY. Penambahan setoran modal dari Pemda DIY pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp155.000.000.000,00, sehingga jumlah modal yang telah disetor dari Pemda DIY sampai dengan tahun 2025 adalah Rp1.736.175.000.000,00. Setoran deviden PT Bank BPD DIY kepada Pemda DIY tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.13. Realisasi Dividen PT Bank BPD DIY TA 2018–2025

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	79.201.315.077,80	79.201.315.077,80
2	2019	78.265.128.516,59	78.265.128.516,59
3	2020	94.001.713.614,26	94.001.713.614,26
4	2021	84.955.839.874,00	84.955.839.874,22
5	2022	95.761.065.417,00	95.761.065.417,29

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
6	2023	99.223.198.838,00	99.223.198.838,00
7	2024	111.028.716.629,00	111.028.716.629,00
8	2025	121.074.128.133,00	121.074.128.133,00
Jumlah		**928.588.669.809,16**	**928.588.669.809,16**

Sumber: BPKA DIY, 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, PT Bank BPD DIY menyetorkan bagian laba kepada Pemda DIY sebesar Rp121.074.128.133,00 meningkat sebesar Rp10.045.411.504,00 atau 9,05% dibandingkan dengan dividen yang disetor tahun anggaran 2024. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian pada tahun buku 2024 sudah membaik dan mendorong kinerja perbankan turut meningkat.

2. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

PT Anindya Mitra Internasional (AMI) berdiri berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT). PT AMI memiliki beberapa unit usaha yaitu Unit Percetakan, Unit Pertambangan, Unit Pariwisata, Unit Realty, Unit Air Minum dan Unit Transportasi. Modal dasar PT AMI sebesar Rp50.000.000.000,00 ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. Sampai dengan akhir tahun 2023 nilai penyertaan modal Pemda DIY yang telah disetorkan pada PT Anindya Mitra Internasional sebesar Rp31.144.910.000,00, dan belum ada penambahan modal dari Pemda DIY sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran penyertaan modal sebesar Rp18.854.090.000,00.

Pembagian laba yang diberikan kepada Pemda DIY tahun anggaran 2018-2025 diinformasikan berikut:

Tabel 2.14. Realisasi Pembagian Dividen kepada Pemda DIY oleh PT Anindya Mitra Internasional (AMI) TA 2018–2025

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	1.089.717.200,00	1.089.717.200,00
2	2019	1.218.479.000.00	1.218.478.750,00
3	2020	1.185.651.326,00	1.185.651.326,00
4	2021	1.044.171.700,00	1.044.717.700,00
5	2022	1.229.058.069,00	1.229.058.000,00
6	2023	751.612.284,00	724.770.494,00
7	2024	857.255.892,00	857.255.892,00
8	2025	2.719.068.430,00	2.719.068.430,00
Jumlah		**9.528.717.861,00**	**9.528.717.861,00**

Sumber: BPKA DIY, 2025

Dividen PT AMI yang diberikan kepada Pemda DIY Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.719.068.430,00, sesuai dengan hasil RUPS pada pengesahan laporan keuangan PT AMI tahun buku 2024. Dibandingkan dengan dividen pada tahun anggaran 2024, deviden pada Tahun Anggaran 2025 terdapat peningkatan sesuai target yang telah ditetapkan.

3. PT Taru Martani

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penyertaan modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, PT Taru Martani diberikan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah). Sebesar Rp49.999.500.000,00 sudah dipenuhi oleh Pemda DIY. PT Taru Martani bergerak di bidang usaha cerutu dan tembakau, serta telah melaksanakan diversifikasi usaha di bidang usaha kafe dan restoran. PT Taru Martani juga melaksanakan penugasan di bidang penggudangan cadangan pangan beras.

Kinerja dari PT Taru Martani yang ditunjukkan dengan pembagian dividen kepada Pemda DIY tahun anggaran 2018-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Realisasi PT Taru Martani TA 2018–2025

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	800.000.000,00	-
2	2019	925.083.150,00	925.083.150,00
3	2020	148.697.623,00	148.697.632,00
4	2021	3.837.562.289,00	3.837.562.289,00
5	2022	5.439.572.184,00	5.439.572.184,00
6	2023	5.635.909.023,00	5.635.909.016,00
7	2024	5.442.700.037,00	4.469.464.798,00
8	2025	0	0
Jumlah		**22.229.524.306,00**	**22.229.524.306,00**

Sumber: BPKA DIY, 2025

Pada Tahun 2025 PT Taru Martani belum dapat memberikan deviden pada Pemda DIY atas kinerja Tahun Buku 2024 karena pada tahun tersebut PT Taru Martani mengalami kerugian. Hal tersebut disebabkan permasalahan investasi yang tidak sesuai prosedur. Atas kejadian tersebut PT Taru Martani membentuk cadangan penurunan nilai terkait dengan piutang non usaha. Pada Tahun 2024 PT Taru Martani mencatat beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp17,43 miliar dan melakukan koreksi terhadap pendapatan di luar usaha tahun sebelumnya sebesar Rp1,26 miliar.

4. Perumda Air Bersih Tirtatama DIY

Perumda Air Bersih Tirtatama merupakan BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY. Modal dasar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Bersih Tirtatama adalah sebesar Rp469.028.716.201,00 yang terdiri dari uang dan barang. Modal dasar yang telah disetorkan oleh Pemda DIY adalah berupa uang sebesar Rp12.500.000.000,00 dan aset sebesar Rp163.896.691.000,00.

Perumda Air Bersih Tirtatama beroperasi sejak Januari 2021 dan sampai dengan Tahun 2025 masih mengalami defisit operasional. Defisit operasional Perumda Air Bersih Tirtatama disebabkan antara lain:

1) Tahun 2021 merupakan tahun pertama peralihan pengelolaan SPAM dari UPT Balai Pialam ke Perumda Air Bersih Tirtatama. Total pendapatan retribusi dari penyediaan air bersih pada UPT Balai Pialan kurang lebih sebesar 5 miliar rupiah per tahun dan total belanjanya kurang lebih 12 miliar rupiah per tahun. Sehingga ketika beralih menjadi BUMD, pada tahun 2021 masih menggunakan pola anggaran dan pendapatan sebagaimana pada saat di kelola sebagai UPT;
2) Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, target penyerapan produksi air curah oleh PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Bantul menunjukkan tren meningkat namun belum dapat menyerap 100% dari kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh Perumda Air Bersih Tirtatama;
3) Pada tahun 2023, SPAM Sistem Kebonagung diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda DIY kemudian diserahkan kepada Perumda Air Bersih Tirtatama. Adanya penyerahan tersebut menambah beban operasional bertambah dikarenakan penambahan biaya beban Listrik, biaya SDM dan biaya pemeliharaan.
4) Kondisi keuangan yang masih dalam posisi rugi tersebut dikarenakan beberapa hal pokok yaitu antara lain sebagai berikut:
    a. Penyerapan air baku oleh PDAM kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta belum optimal sesuai kapasitas produksi.
    b. Kapasitas produksi dari jaringan SPAM sistem Bantar dan Kebon Agung total adalah 700 lps, sedangkan pada tahun 2024 penyerapan air oleh PDAM Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta masih sebesar kurang lebih 40%. Jumlah penyerapan ini mengalami tren kenaikan sejak tahun 2021, namun penyerapan yang belum mencapai optimal tersebut masih belum dapat menutup biaya pengoperasian SPAM. Namun dari sisi efisiensi, manajemen berupaya mengelola produksi secara efektif dan efisien sehingga penyerapan dapat mencapai 95% dari jumlah yang

diproduksi. Permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya serapan dari PDAM adalah antara lain jaringan sambungan rumah yang belum sepenuhnya terlayani dan PDAM kabupaten/kota masih memiliki sumber air dari sumur dalam.

c. Tarif air baku pada Perumda Air Bersih Tirtatama sebesar Rp2.250,00 per lt/dtk yang merupakan *single tariff*, masih berada di bawah harga pokok produksi air baku per lt/dtk.

d. Terdapat banyak permasalahan pada instalasi Kebon Agung. Instalasi Kebon Agung hanya bisa mensuplai air sebesar 30lt/detik atau hanya sebesar 10% dari kapasitas maksimal. Hal ini disebabkan karena jauhnya jarak dari intake ke instalasi pengolahan air. Semakin panjang pipa yang membawa air kotor, semakin tinggi kemungkinan pipa tersumbat.

5. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

Berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan, Pemda DIY mendirikan lembaga keuangan non bank yang disebut sebagai Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) di setiap kecamatan di DIY. Pendirian di masing-masing kecamatan kemudian dilaksanakan secara bertahap dengan Keputusan gubernur. BUKP merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemda DIY dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan melalui prosedur sederhana, cepat, dan murah. Pada saat ini terdapat sebanyak 75 BUKP yang berkedudukan di Kapanewon se-DIY. Modal dasar BUKP dari Pemda DIY adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah) dan telah disetorkan sepenuhnya. Kinerja BUKP yang ditunjukkan dengan dividen mulai tahun anggaran 2018-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16. Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2018–2025

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	4.591.887.256,86	4.591.840.188,57
2	2019	5.340.468.682,70	5.303.393.448,55
3	2020	6.025.001.568,23	6.025.404.256,62
4	2021	3.975.033.928,00	6.390.209.397,32
5	2022	3.500.000.000,00	5.630.738.202,58
6	2023	3.250.000.000,00	3.997.304.683,56
7	2024	4.420.837.680,00	4.580.240.352,93
8	2025	2.000.000.000,00	3.447.849.913,91
	Jumlah	**33.103.229.115,79**	**39.966.980.444,04**

Sumber: BPKA DIY, 2025

Bagian laba dari BUKP DIY Tahun Anggaran 2025 menurun dibandingkan tahun anggaran 2024 karena banyak BUKP pada tahun buku 2024 yang mengalami kerugian.

Sejak tahun 2022, Pemda DIY telah melaksanakan persiapan dalam rangka transformasi kelembagaan BUKP yaitu berupa kajian terhadap transformasi BUKP yang diikuti dengan kajian kebutuhan dan kelayakan usaha perubahan BUKP menjadi LKM. Pada tahun 2024, Pemda DIY menyusun Naskah Akademis pembentukan PT LKM BUKP yang akan diawali dengan mentransformasi BUKP di wilayah Gunungkidul menjadi LKM dengan berbadan hukum perseroan daerah. Penyusunan Naskah akademik tersebut menjadi salah satu langkah transformasi BUKP menjadi LKM. Pada tahun 2025, dilakukan kajian penyertaan modal pada PT LKM BUKP.

6. PT Asuransi Bangun Askrida

PT Asuransi Bangun Askrida (ASKRIDA) bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan, asuransi kredit nasabah, asuransi bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pemerintah lainnya. ASKRIDA didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai perwujudan aspirasi dan kebersamaan BPD di seluruh Indonesia. Kepemilikan ASKRIDA diperluas pada tahun 1996 dengan masuknya 27 pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, sehingga membuat

profil ASKRIDA menjadi lebih luas dalam berpartisipasi di industri asuransi. Berdasarkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, Pemda DIY melaksanakan penyertaan modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah). Sampai dengan tahun 2025, modal yang telah disetorkan adalah sebesar Rp1.190.000.000,00. Kinerja PT Asuransi Bangun Askrida yang ditunjukkan dengan dividen mulai tahun anggaran 2018-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17. Realisasi Dividen PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2018-2025

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	214.865.140.00	214,865,140.00
2	2019	248,740,331.00	248,740,331.00
3	2020	99.318.011,00	99,318,011.00
4	2021	110.733.653,00	110,733,653.00
5	2022	179.079.443,00	179,079,443.00
6	2023	209.497.429,00	209,497,429.00
7	2024	0,00	0,00
8	2025	0,00	0,00
	Jumlah	**1.062.234.007,00**	**1.062.234.007,00**

Sumber: BPKA DIY, 2025

Pada TA tahun 2025, PT Asuransi Bangun Askrida tidak menyetorkan dividen kepada seluruh pemegang saham dikarenakan terdapat permasalahan internal sehingga RUPS memutuskan untuk laporan keuangan PT Asuransi Bangun askrida dimintakan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan saat ini, rencana perbaikan kinerja PT Asuransi Bangun Askrida tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak diijinkan untuk membagi laba kepada pemegang saham.

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Sebagai alat bantu dalam Penatausahaan barang milik daerah, Aplikasi SIM Aset digunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset lainnya, sedangkan aplikasi e-Persediaan digunakan untuk penatausahaan persediaan. Pengkodefikasian barang pada kedua aplikasi tersebut telah mengadopsi pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, dan Pergub Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka implementasi penatausahaan barang milik pada Pemda DIY juga harus menyesuaikan dengan aturan tersebut.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan;
11) Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
12) Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemda;
13) Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
14) Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang MIlik Daerah;
15) Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2023 tentang Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.

b. Tantangan dan Permasalahan

Pemahaman sumber daya manusia mengenai penatausahaan barang milik daerah masih menjadi tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah, di samping itu pentingnya dukungan sistem informasi manajemen aset yang handal. Dengan aplikasi yang handal akan sangat membantu sumber daya manusia dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah, sehingga proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel.

c. Upaya-upaya yang Dilaksanakan

Bimbingan Teknis dan pelatihan telah dilaksanakan dalam rangka pengoperasian aplikasi, dengan kegiatan ini dapat membantu peningkatan pemahaman sumber daya manusia dalam penatausahaan barang milik daerah. Aplikasi SIM Aset sudah terintergrasi dengan aplikasi keuangan dalam data pencairan keuangan sehingga pencapaian ini sangat membantu dalam pengendalian pengentrian data barang milik daerah.

d. Capaian

Pada tahun 2025 Pemda DIY telah mencatat BMD, baik berupa aset tetap maupun aset lainnya sebanyak 3.727.494 register senilai Rp17.500.591.554.521,70. Aset tersebut berada di seluruh OPD di lingkungan Pemda DIY. BMD tertuang dalam Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2025 (*Unaudited*)

No	OPD	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.026.798	2.983.186.880.517,80
2	Dinas Kesehatan	24.467	528.832.210.347,06
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	13.020	7.855.305.036.408,33
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.220	124.039.830.337,41
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.237	6.427.606.129,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.760	25.900.636.221,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.590	51.586.585.045,09
8	Dinas Sosial	16.837	157.638.588.404,67
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.378	90.118.574.698,98
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.739	38.243.961.705,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.694	361.196.387.366,34
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	650	50.809.538.962,50
13	Dinas Perhubungan	17.489	346.966.087.582,17
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.332	160.597.906.338,02
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.687	487.862.795.442,92
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.277	11.611.772.381,95

No	OPD	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
17	Dinas Kebudayaan	21.835	587.511.301.508,78
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	435.627	234.346.001.818,32
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.283	404.270.237.545,38
20	Dinas Pariwisata	1.606	90.638.794.660,01
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.957	322.517.464.932,16
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.461	135.532.845.965,50
23	Sekretariat Daerah	16.494	320.499.701.616,62
24	Badan Penghubung Daerah	3.950	34.175.684.371,00
25	Sekretariat DPRD	4.396	714.211.722.295,28
26	Inspektorat	2.737	43.189.996.407,90
27	Paniradya Kaistimewan	2.165	21.815.428.904,63
28	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	5.340	25.855.632.432,30
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	30.787	1.144.380.007.221,24
30	Badan Kepegawaian Daerah	4.320	96.334.762.302,00
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17.361	44.987.574.652,40
	JUMLAH	3.727.494	17.500.591.554.521,80

Sumber: BPKA DIY, 2025

2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY

Pemda DIY dalam rangka pengamanan hukum aset tanah, telah melaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah dan balik nama sertifikat tanah atas nama Pemda DIY. Untuk pengadaan tanah yang dilakukan oleh OPD teknis, proses pengadaan tanah sampai dengan pensertifikatannya dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. Untuk aset tanah yang sudah tercatat dalam buku inventaris Pemda DIY namun belum ada dokumen sertifikat dan sudah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemda DIY maka proses pensertifikatan dan baliknama sertifikat dilakukan oleh pengelola barang. Pada Tahun Anggaran 2025, dilakukan pensertifikatan dan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemda DIY, dengan obyek sebagai berikut:

Tabel 2.19. Daftar Obyek Tanah yang Disertifikatkan

No	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan
1	Tanah SMA N 1 Sewon	27.943	Nomor NIB 13.01.000035855.0 , Tanggal Terbit 24 Desember 2025
2	Tanah SMA N 1 Bantul	7.220	Nomor NIB 13.01.000030728.0 , Tanggal Terbit 17 November 2025

No	Lokasi	Luas (m²)	Keterangan
3	Tanah SMA N 3 Bantul	975	Nomor NIB 13.01.000034734.0 , Tanggal Terbit 24 Desember 2025
4	Tanah SMA N 3 Bantul	3.937	Nomor NIB 13.01.000034720.0 , Tanggal Terbit 24 Desember 2025
5	Tanah SMA N 1 Bambanglipuro	8.000	Nomor NIB 13.01.000030727.0 , Tanggal Terbit 17 November 2025
6	Tanah SMA N 1 Pundong	8.000	Nomor NIB 13.01.000034284.0 , Tanggal Terbit 18 Desember 2025
7	Tanah SMK N 1 Pandak		Nomor NIB
8	Tanah SMA N 1 Imogiri	11.068	Nomor NIB 13.01.000031861.0 , Tanggal Terbit 18 Desember 2025
9	Tanah SMA N 1 Kretek	4.053	Nomor NIB 13.01.000030510.0 , Tanggal Terbit 17 November 2025
10	Tanah SMA N 1 Dlingo	9.000	Nomor NIB 13.01.000031166.0 , Tanggal Terbit 09 Desember 2025
11	Tanah SMK N 1 Sedayu	5.079	Nomor NIB 13.01.000030724.0 , Tanggal Terbit 17 November 2025
12	Tanah SMA N 2 Ngaglik	23.984	Nomor NIB 13.04.000034538.0 , Tanggal Terbit 08 Desember 2025
13	Tanah SMA N 2 Ngaglik	7.818	Nomor NIB 13.04.000042509.0 , Tanggal Terbit 19 November 2025
14	Tanah di SMA N 1 Kasihan	9.767	Nomor NIB 13.01.000023953.0 , Tanggal Terbit 25 Agustus 2025
15	Tanah di SMA N 1 Kasihan	1.342	Nomor NIB 13.01.000023954.0 , Tanggal Terbit 25 Oktober 2025
16	Tanah di Balai KPH, Bibal	1.760	Nomor NIB 13.02.000021934.0 , Tanggal Terbit 23 Mei 2025
17	Tanah SMA N 1 Sanden	180	Belum Terbit Sertipikat
18	Tanah SMA N 1 Sanden	546	Belum Terbit Sertipikat
19	Tanah SMA N 1 Sanden	10.566	Belum Terbit Sertipikat
20	Tanah SMA N 1 Piyungan	8.000	Belum Terbit Sertipikat
21	Tanah SMA N 1 Patuk	530	Belum Terbit Sertipikat

Sumber: BPKA DIY, 2025

3. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Secara definisi Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi:
   a. penjualan;
   b. tukar menukar;
   c. hibah, dan
   d. penyertaan modal pemerintah daerah.
2) Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
3) Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Untuk menjamin bahwa proses pemindahtangan BMD di Pemda DIY dapat berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan, telah disusun Pergub DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Siklus pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2024, pemindahtanganan terpisah dari penghapusan. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa pemindahtanganan dan pemusnahan merupakan kegiatan sebelum proses penghapusan. Dengan demikian, penghapusan merupakan *ending point* dari semua siklus pengelolaan BMD yang membebaskan Pengguna Barang dan Pengelola Barang dari kewajiban untuk mengadministrasikan dan mengelola BMD. Artinya proses pemindahtanganan dan penghapusan ini memberikan dukungan terhadap proses pengelolaan BMD secara keseluruhan.

Dengan melaksanakan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah, harapannya dapat terwujud pengelolaan barang milik daerah pada OPD Pengguna Barang maupun Pengelola Barang secara optimal, khususnya terhadap barang milik daerah yang dalam kondisi rusak berat, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, serta tidak lagi digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Sehingga secara ekonomis akan lebih menguntungkan bagi Daerah, serta lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran/biaya pemeliharaan.

1) Dasar dan Tujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal dalam penyelenggaraan tugas fungsi pemerintah daerah dapat dilakukan penghapusan. Sebab, secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Menurut Permendagri Nomor 7 tahun 2024 penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna;
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan. Adapun pelaksanaan penghapusan wajib dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan. Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

2) Penghapusan Aset Tidak Bergerak

Penghapusan aset tidak bergerak yang dilakukan terhadap bangunan dan peralatan dan mesin yang dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
b. Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
c. Terkena planologi kota;
d. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
f. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

3) Penghapusan Aset Bergerak

Penghapusan aset bergerak dilakukan atas dasar pertimbangan/alasan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Teknis, antara lain:
   (1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.

(2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
(3) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kedaluwarsa.
(4) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
(5) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.

b. Pertimbangan Ekonomis, antara lain:
(1) Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau *idle*.
(2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
(3) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
a) Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang, di luar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
b) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
c) Karena kecelakaan, bencana, atau alasan lainnya yang sifatnya tidak terduga (*force majeure*)

4) Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan dan Lelang

Pemindahtanganan BMD merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan BMD, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses pemindahtanganan barang milik daerah melalui tahapan penting yaitu penilaian. Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemda, pemanfaatan atau

pemindahtanganan. Penilaian dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah (dalam hal ini lelang/penjualan) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, sebagai dasar penetapan harga limit penjualan.

Penilaian barang milik daerah berupa bangunan gedung dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Syarat Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Adapun penilaian barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai atau penaksir dari instansi teknis. Pada Tahun Anggaran 2024, Pemda DIY membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah subkegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 49/TIM/2024 tanggal 17 Januari 2024.

Sebelum masuk pada tahap pelaksanaan, proses pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemda DIY melalui beberapa tahapan persiapan, sebagai berikut:

a. Verifikasi Usulan BMD yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi atau Berita Acara Pengecekan dan Penelitian;
b. Penilaian BMD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian atau Penaksiran Harga; dan
c. Persetujuan Pemindahtanganan BMD oleh Gubernur.

Setelah mendapatkan persetujuan pemindahtanganan oleh Gubernur, Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah subkegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melaksanakan proses pemindahtanganan dengan cara lelang maupun penjualan.

Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan proses pemindahtanganan dengan cara penjualan dan lelang sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, sebagai berikut:

a. Penjualan BMD berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY berdasarkan KepGub DIY Nomor 481/KEP/2024 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY.
b. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 6 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Sisa Bongkaran Material Bangunan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan serta Jaringan di Lingkungan Pemda DIY.
c. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada OPD, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 67 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada OPD, SMS, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025.
d. Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan JJLS pada Segmen Garongan-Congot, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 72 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan pada Segmen Garongan-Congot di Kabupaten Kulon Progo.
e. Penjualan BMD berupa Jembatan Srandakan I (Jembatan Srandakan Lama), yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 98 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Jembatan dalam Kondisi Rusak Berat pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

f. Penjualan BMD berupa Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemda DIY kepada Mantan Pimpinan DPRD DIY, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 105 Tahun 2025 tentang Persetujuan dan Penetapan Penjualan Tanpa Melalui Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemda DIY kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Periode 2019-2024.
g. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, yang berlokasi di Gudang BPKA DIY d/a Jl. Abu Bakar Ali No. 2, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 135 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025.
h. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada OPD, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 225 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD pada OPD, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY.
i. Penjualan BMD berupa 17 ekor Hewan Ternak Kambing/Domba pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP DIY, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 235 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP TA 2025.
j. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 237 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025.

k. Penjualan BMD berupa 9 (Sembilan) ekor Hewan Ternak Sapi pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP DIY, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 235 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP TA 2025.

l. Penjualan BMD berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 237 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025.

m. Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 dan roda 2 , yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 209 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025.

n. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 299 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, serta Balai Pengelolaaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY TA 2025.

o. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 299 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, serta Balai Pengelolaaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY TA 2025.

p. Pemusnahan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan berdasarkan KepGub DIY Nomor 299 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Dinas Perhubungan, serta Balai Pengelolaaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY TA 2025.

q. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 320 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Peralatan dan Mesin.

r. Penjualan BMD berupa Hasil Penebangan Pohon, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 321 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Hasil Penebangan Pohon pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro Kabupaten Kulon Progo.

s. Pemusnahan dan Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan KepGub DIY Nomor 266 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.20. Hasil Penjualan dan Lelang BMD TA 2025

No	Uraian Kegiatan Penjualan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)
1.	Penjualan BMD berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY	31/12/2024	370.000.000
2.	Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan	16/01/2025	58.200.000
3.	Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada OPD, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY	21/2/2025	200.000.0000
4.	Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan JJLS pada Segmen Garongan-Congot	26/2/2025	35.000.000
5.	Penjualan BMD berupa Jembatan Srandakan I (Jembatan Srandakan Lama)	21/3/2025	625.625.625

No	Uraian Kegiatan Penjualan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)
6.	Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemda DIY kepada Mantan Pimpinan DPRD DIY		110.600.000
7.	Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, yang berlokasi di Gudang BPKA DIY d/a Jl. Abu Bakar Ali No. 2, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta	2/5/2025	22.750.000
8.	Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada OPD, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY	4/7/2025	204.600.000
9.	Penjualan BMD berupa 17 ekor Hewan Ternak Kambing/Domba pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP DIY	11/7/2025	15.200.000
10.	Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan	15/7/2025	20.500.000
11.	Penjualan BMD berupa 9 (Sembilan) ekor Hewan Ternak Sapi pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP DIY	21/7/2025	197.999.999
12.	Penjualan berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material	28/7/2025	21.000.000
13.	Penjualan BMD berupa 2 Unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 dan 8 (Delapan) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2 (Paket C)	13/8/2025	99.354.200
14.	Penjualan BMD berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 dan 7 (Tujuh) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasioanl Roda 2 (Paket A)	20/8/2025	208.914.200
15.	Penjualan BMD berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 dan 5 unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2 (Paket B)	20/8/2025	59.176.400
16.	Penjualan BMD berupa 9 (Unit) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2. (Paket D)	22/8/2025	32.464.100
17.	Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan	4/9/2025	163.100.000
18.	Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan	19/9/2025	160.000.000
19.	Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan	23/9/2025	15.000.000
20.	Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin	29/9/2025	50.000.000
21.	Penjualan BMD berupa Hasil Penebangan Pohon	29/9/2025	7.125.000
22.	Pemusnahan dan Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran Tahun Anggaran 2025		43.363.500
TOTAL HASIL PENJUALAN			**2.719.973.024**

Sumber: BPKA DIY, 2025

5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Untuk penghapusan BMD, pada prinsipnya adalah penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna dan atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, serta dari Daftar BMD. Dasar hukum untuk melakukan penghapusan adalah surat keputusan penghapusan BMD dari pejabat yang berwenang.

Salah satu alasan dilakukannya penghapusan BMD karena kondisinya sudah rusak berat, serta tidak bisa dimanfaatkan, jika dilakukan perbaikan maka biaya pembetulannya lebih mahal jika dibandingkan beli baru, sehingga lebih tepat jika dihapuskan. Penghapusan BMN juga dilakukan ketika terjadi pemindahtanganan, meliputi: dijual, dihibahkan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah.

Pelaksanaan penatausahaan penghapusan BMD secara ringkas meliputi:

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
c. Penghapusan dari Daftar BMD.

Proses penghapusan BMD yang telah dilaksanakan Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan sebagai berikut:

a. KepGub DIY Nomor 118 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tidak Berwujud dalam Bentuk Software/Aplikasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dari Daftar BMD.
b. KepGub DIY Nomor 308 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025.

c. KepGub DIY Nomor 352 Tahun 2025 tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengelola BMD.
d. KepGub DIY Nomor 402 Tahun 2025 tentang Penghapusan BMD yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari Daftar Barang Milik Daerah.
e. KepSekda DIY Nomor 16/SEKDA/II/2025 tentang Penghapusan BMD berupa Aset Tidak Berwujud dalam Bentuk Software/Aplikasi dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
f. KepSekda DIY Nomor 20/SEKDA/III/2025 tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY.
g. KepSekda DIY Nomor 21/SEKDA/III/2025 tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada OPD, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025.
h. KepSekda DIY Nomor 22/SEKDA/III/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kursi Rapat dari Daftar Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
i. KepSekda DIY Nomor 32/SEKDA/V/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan serta Jaringan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY dari Daftar BMD.
j. KepSekda DIY Nomor 35/SEKDA/VII/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY dari Daftar Barang Milik Daerah.
k. KepSekda DIY Nomor 36/SEKDA/VII/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107/SEKDA/XII/2024 tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Taman Hutan Raya

DLHK DIY di Komplek Taman Hutan Raya Bunder, Playen, Gunungkidul.

l. KepSekda DIY Nomor 38/SEKDA/VII/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemda DIY yang Telah Dilakukan Penjualan tanpa Melalui Lelang kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Perode 2019-2024.

m. KepSekda DIY Nomor 42/SEKDA/VII/2025 tentang Penghapusan BMD pada OPD, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY TA 2025.

n. KepSekda DIY Nomor 46/SEKDA/VIII/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dari Daftar Barang Milik Daerah.

o. KepSekda DIY Nomor 50/SEKDA/IX/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran Tahun Anggaran 2025.

p. KepSekda DIY Nomor 51/SEKDA/IX/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Alat Pengering Padi dan Kotak Penyimpanan Padi dari Daftar BMD pada Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

q. KepSekda DIY Nomor 54/SEKDA/X/2025 tentang Penghapusan BMD berupa Jembatan pada DPUP ESDM DIY dari Daftar BMD.

r. KepSekda DIY Nomor 55/SEKDA/X/2025 tentang Penghapusan BMD berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP TA 2025 dari Daftar BMD.

s. KepSekda DIY Nomor 57/SEKDA/X/2025 tentang Penghapusan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas

Operasional dari Daftar Barang Penggunan dan/atau Kuasa Penggunan Barang Tahun Anggaran 2025.

t. KepSekda DIY Nomor 59/SEKDA/X/2025 tentang Penghapusan BMD pada Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2025 dari Daftar BMD.
u. KepSekda DIY Nomor 60/SEKDA/X/2025 tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025.
v. KepSekda DIY Nomor 69/SEKDA/XI/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Terkena Dampak Bencana Alam pada Balai Perbenihan Kehutanan dan Balai Taman Hutan Raya Bunder DLHK DIY dari Daftar BMD.
w. KepSekda DIY Nomor 70/SEKDA/XI/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Usaha Desain Grafis dan Pengolahan Makanan pada Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dari Daftar BMD.
x. KepSekda DIY Nomor 71/SEKDA/XI/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TA 2025.
y. KepSekda DIY Nomor 73/SEKDA/XII/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY dari Daftar BMD
z. KepSekda DIY Nomor 78/SEKDA/XII/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanaman pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY dari Daftar Barang Milik Daerah.
aa. KepSekda DIY Nomor 79/SEKDA/XII/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dari Daftar BMD.

bb. KepSekda DIY Nomor 80/SEKDA/XII/2025 tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin Yang Hilang Akibat Kecurian dan Bencana Alam pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.
cc. KepSekda DIY Nomor 81/SEKDA/XII/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Yang Hilang Akibat Kecurian pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

6) Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pemusnahan BMD adalah tindakan untuk memusnahkan fisik dan/atau menghilangkan fungsi suatu BMD. Pemusnahan BMD dilakukan apabila BMD dimaksud memenuhi unsur tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak memiliki nilai ekonomis, atau tidak dapat dipindahtangankan, serta karena alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, pemusnahan BMD dilakukan setelah barang tersebut diusulkan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, diteliti secara administratif dan teknis oleh Pengelola Barang, serta memperoleh persetujuan Kepala Daerah. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang sesuai kewenangannya, dengan cara antara lain dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain yang sesuai ketentuan, serta dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan. Selanjutnya, hasil pemusnahan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan penghapusan dari daftar BMD**,** sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan kegiatan pemusnahan, sebagai berikut:

a. Pemusnahan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 266 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran Tahun Anggaran 2025.
b. Pemusnahan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Kondisi Rusak Berat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 378 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Kondisi Rusak Berat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Atas kegiatan pemusnahan dimaksud, telah terbit Keputusan Penghapusan BMD sebagai berikut:

a. KepSekda DIY Nomor 150/SEKDA/IX/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran Tahun Anggaran 2025.
b. KepSekda DIY Nomor 79/SEKDA/XII/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dari Daftar BMD.

4. Pendayagunaan Barang Daerah

1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dalam siklus pengelolaan BMD, kegiatan pemanfaatan BMD menjadi kegiatan yang strategis dan penting untuk dilaksanakan.

Pemanfaatan BMD bermakna sebagai pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMD merupakan upaya agar barang milik daerah mampu memberikan dampak untuk sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Mekanisme dalam pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui 5 bentuk pemanfaatan, yakni: 1) Sewa; 2) Pinjam Pakai; 3) Kerja sama Pemanfaatan; 4) Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Pemda DIY telah melaksanakan 3 bentuk pemanfaatan barang milik daerah yakni (1) Sewa, (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan (3) Pinjam Pakai. Selain bentuk pemanfaatan tersebut di atas, Barang Milik Daerah juga dioptimalkan melalui mekanisme retribusi pemakaian kekayaan daerah. Rincian pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, meliputi:

a. BMD berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa sebanyak 31 obyek sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.21. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2025 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	137.000.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 5 th sekaligus (2022-2027)
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2024-2026)
4	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	-	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2024-2027)
5	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 5 th sekaligus (2021-2026)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2025 (Rp)	Keterangan
6	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	18.480.000	-
7	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2023 utk 5 th sekaligus (2023-2028)
8	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	7.332.000	-
9	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirto Manunggal	-	Pembayaran dilakukan utk 5 tahun sekaligus (2024 - 2029)
10	Gedung Jogja Expo Center	PT. Surya Abhinaya Sentosa	3.847.500.000	-
11	Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Pemerintah Kalurahan Widodomartani	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 5 th sekaligus (2021-2026)
12	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	PT. Daya Armada Nusantara	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 5 tahun sekaligus (2022-2027)
13	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Aris Purnomo	6.300.000	Pembayaran dilakukan pada tahun 2025 utk 3 tahun sekaligus (2025-2028)
		Sumartiningsih	12.600.000	Pembayaran dilakukan pada tahun 2025 utk 3 tahun sekaligus (2025-2028)
		Roos Ani	8.190.000	Pembayaran dilakukan pada tahun 2025 utk 3 tahun sekaligus (2025-2028)
		Hermawan	3.500.000	-
14	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Adimas Nugroho	4.750.000	-
		PT. Avo Innovation Technology	16.150.000	-
15	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Bambang Priambodo	-	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2024 & 2025)
16	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 5 th sekaligus (2022-2027)
17	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	-	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2024 & 2025)
18	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	-	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2024 - 2028)
		Widodo Mulyo	8.000.000	Pembayaran dilakukan pada tahun 2025 utk 5 th sekaligus (2025 - 2030)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2025 (Rp)	Keterangan
19	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	*Early Childhood Care and Development Resource Center* (ECCD-RC)	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 5 th sekaligus (2021-2026)
20	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2024 utk 3 th sekaligus (2024-2027)
21	Tanah dan bangunan di Jl. Kusumanegara No. 168E Yogyakarta	LP2Desaku	18.150.000	Pembayaran dilakukan pada tahun 2025 utk 2 th sekaligus (2025-2027)
22	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (±67 Bidang Tanah)	96 Penyewa	324.901.530	Pembayaran untuk retribusi eks TKD Wates 2025-2026
23	Tanah dan Bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ringroad Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	67.704.000	-
24	Tanah dan Bangunan EKS PPK Kulon Progo Jalan Wates-Purworejo Km.10 Seworan, Triharjo, Wates	Koperasi Angkasa Pura I Avia	-	Pembayaran dilakukan untuk 2 th sekaligus (2023-2025)
25	Tanah di Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Depri Priatna	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 untuk 5 th sekaligus (2022-2027)
		Yani Suryani	5.500.000	-
		Juju	4.500.000	-
		Zuljasrifon	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 untuk 5 th sekaligus (2021-2026)
26	Tanah di Sumberagung, Moyudan, Sleman	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 untuk 5 th sekaligus (2022-2027)
27	Tanah di Hargobinangun, Pakem, Sleman	PT. Anindya Mitra Internasional	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2023 untuk 5 th sekaligus (2023-2028)
28	Tanah di Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	22 Penyewa	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2024 untuk 5 th sekaligus (2024-2029)
		2 Penyewa	5.455.000	-
29	Tanah dan Bangunan di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala Darma Saputra	23.600.000	-
30	Tanah di Jalan Taman Siswa Nomor 103 Yogyakarta	PT. Yudhistira Mahadana Sampurna	193.000.000	-
31	Tanah dan Bangunan di Jalan DI Panjaitan Nomor 74 Yogyakarta	Agung Udayana, BE	7.918.000	-

Sumber: BPKA DIY, 2025

b. BMD berupa tanah dan bangunan Mal dan Hotel beserta fasilitas yang dimanfaatkan melalui Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana tersaji sebagai berikut:

Barang Milik Daerah berupa Tanah, Bangunan Mal dan Hotel beserta seluruh fasilitasnya di Jalan Malioboro Nomor 52 - 58 Yogyakarta telah dikerjasamakan dengan PT Setia Mataram Tritunggal selama jangka waktu 30 tahun dengan hasil berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan berdasarkan Perjanjian Nomor 4/PERJ/GUB/IX/2024 dan Nomor 021/LGL/PS/SMT-PEMDADIY/IX/2024 tanggal 9 September 2024 dengan Kontribusi Tetap untuk tahun kedua telah dibayarkan sebesar Rp6.379.739.151 dan Pembagian Keuntungan tahun 2024 telah dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp627.345.960.

c. BMD berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel 2.22. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2025 (Rp)	Ket
1	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Asep S	4.060.000	-
2	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.521.600	-
3	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	BAIS Kemenhan	-	-
4	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
5	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Michelle Rizky Yuditha SP	698.100	-
6	Jl. Sriti Nomor 20 B Demangan, Yogyakarta	Ny. Dra. Sulistyaningsih	3.396.000	-
7	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	5.494.000	-
8	Jl. Sriti Nomor 20 E Demangan, Yogyakarta	Yudhi Astuti Kusuma	1.464.000	
9	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Eko Fajar Laksana	3.142.930	-
10	Jl. Bima Nomor 25 A Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Maria Kristina Budi	2.904.820	-
11	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Adjie Mardana	780.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2025 (Rp)	Ket
12	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	M. Ridwan S	1.878.000	-
13	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	8.797.600	-
14	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Monika Irene Donatirin	4.148.790	-
15	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Heni Purnawati	2.023.800	-
16	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Wahyu Muharomdoni, STP	2.286.000	-
17	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Arum Iswandari	630.000	-
18	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Bambang Asmorojati	3.505.200	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Dwi Nugroho	2.367.600	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.340.000	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S.Hut, MP	2.286.000	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Nitis Mito	2.286.000	-
23	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
24	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Lembaga Advokasi Konsumsen (Sewa)	2.994.000	-
25	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Kosong (Rusak)	-	-
26	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	2.994.000	-
27	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)	Ririn Herini Evilistyani	2.994.000	-
28	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	2.292.010	-
29	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Purwiyani Dewi Admadja	3.160.800	-
30	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	6.306.600	-
31	Jl. Podang No. 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	Anastasia Sri Winarsi	2.415.600	-

Sumber: BPKA DIY, 2025

d. BMD yang dioptimalkan melalui pinjam pakai tertuang dalam 27 perjanjian pinjam pakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.23. Barang Milik Daerah yang Dioptimalkan Melalui Pinjam Pakai

NO	OBYEK PINJAM PAKAI	BERDASARKAN		PEMINJAM
		Izin Gubernur Nomor Tanggal	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Tanggal	
1	2	3	4	5
1.	Barang Milik daerah Pemda DIY berupa 23 bidang tanah dan 2 unit bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Kulon Progo	539/KEP/2024 31 Desember 2024	7/PERJ/SEKDA/II/2025 5 Februari 2025	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
2.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah dan 1 unit kendaraan dinas operasional.	125/KEP/2021 19 Mei 2021	16/PERJ/GUB/V/2021 20/05/2021	Kanwil BPN DIY
3.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 12 bidang tanah dan 2 unit bangunan yang terletak di Kabupaten Bantul	162/KEP/2024 22 April 2024	44/PERJ/SEKDA/V/2024 28 Mei 2024	Pemerintah Kabupaten Bantul
4.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah yang terletak di Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta.	93 Tahun 2025 25 Februari 2025	B/00.10.7/3715/B2 11 April 2025	BPS RI.
5.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 18 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul.	40/KEP/2021 23 Februari 2021	5/PERJ/SEKDA/III/2021 01 Maret 2021	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
6.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 6 bidang tanah dan 3 unit bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta.	B/00.10.7/4344/B2 29 April 2025	B/00.10.7/4675/B2 8 Mei 2025	Pemerintah Kota Yogyakarta
7.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian bangunan/gedung yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta dan 1 unit kendaraan dinas operasional.	356/KEP/2024 23 September 2024	62/PERJ/SEKDA/XI/2024 6 November 2024	Sekber Kartamantul
8.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta.	469/KEP/2024 3 Desember 2024	71/PERJ/SEKDA/XII/2024 16 Desember 2024	ISI Yogyakarta
9.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 9 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman.	B/00.10.7/4345/B2 29 April 2025	B/00.10.7/4561/B2 6 Mei 2025	Pemerintah Kabupaten Sleman
10.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 3 bidang tanah dan 52 unit peralatan dan mesin.	94 Tahun 2025 25 Februari 2025	B/00.10.7/2750/B2 11 Maret 2025	KPU DIY
11.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah yang terletak di Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta.	B/00.10.7/8358/B2 13 Agustus 2025	B/00.10.7/9118/B2 3 September 2025	BNNP DIY
12.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 unit kendaraan dinas operasional.	284/KEP/2023 20 September 2023	21/PERJ/SEKDA/X/2023 2 Oktober 2023	Lanal Yogyakarta

NO	OBYEK PINJAM PAKAI	BERDASARKAN		PEMINJAM
		Izin Gubernur Nomor Tanggal	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Tanggal	
1	2	3	4	5
13.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Bantul dan 1 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman.	135/KEP/2024 22 Maret 2024	17/PERJ/SEKDA/IV/2024 5 April 2024	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
14.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 bidang tanah dan 1 unit bangunan yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta.	B/00.10.7/3576/B2 9 April 2025	B/00.10.7/5081/B2 20 Mei 2025	BSSN
15.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 bidang tanah yang terletak di Komplek Colombo No 57 Caturtunggal, Depok, Sleman.	B/00.2.3.2/6063/B2 19 Juni 2025	32/00.10.7/7861/B2 1 Agustus 2025	BPS RI
16.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 bidang tanah dan 1 unit bangunan kantor yang terletak di Jalan DI Panjaitan No 49, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta.	363/KEP/2023 3 November 2023	26/PERJ/SEKDA/XI/2023 16 November 2023	Bawaslu DIY
17.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 3 unit kendaraan dinas operasional.	266/KEP/2024 10 Juli 2024	48/PERJ/SEKDA/VIII/2024 12 Agustus 2024	Korem 072/Pamungkas
18.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 2 unit kendaraan operasional dinas.	99/KEP/2024 29 Februari 2024	12/PERJ/SEKDA/III/2024 21 Maret 2024	Pangkalan TNI AU Adisutjipto.
19.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 unit kendaraan dinas oprasional.	332/KEP/2022 23 Agustus 2024	50/PERJ/SEKDA/IX/2024 5 September 2024	Kejati DIY
20.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 unit kendaraan dinas oprasional.	387/KEP/2024 8 Oktober 2024	59/PERJ/SEKDA/X/2024 24 Oktober 2024	Polda DIY
21.	Barang Milik Daerah DIY berupa 1 bidang tanah dan 1 unit bangunan rumah dinas.	218/KEP/2024 4 Juni 2024	46/PERJ/SEKDA/VII/2024 9 Juli 2024	BAIS TNI
22.	Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa 1 bidang tanah, 2 unit bangunan dan 1 jaringan listrik yang terletak di Jl. TRM No 1 Yogyakarta.	72/KEP/2021 31 Maret 2021 diubah 97/KEP/2021 27 April 2021	9/PERJ/SEKDA/IV/2021 9 April 2021 diubah 14/PERJ/SEKDA/IV/2021 27 April 2021	KPPU
23.	Barang milik daerah berupa 1 bidang tanah dan 1 unit bangunan di Komplek Gedung Serbaguna Pemkab Sleman.	265/KEP/2022 13 September 2022	66/PERJ/SEKDA/XII/2022 20 Desember 2022	Polda DIY
24.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah dan 2 unit bangunan yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C,	534/KEP/2024 31 Desember 2024	1/PERJ/SEKDA/I/2025 16 Januari 2025	BKSDA Yogyakarta

NO	OBYEK PINJAM PAKAI	BERDASARKAN		PEMINJAM
		Izin Gubernur Nomor Tanggal	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Tanggal	
1	2	3	4	5
	Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta.			
25.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 bidang tanah lapangan sepak bola.	B/00.10.7/9550/B2 15 September 2025	B/00.10.7/9827/B2 22 September 2025	Pemerintah Kota Yogyakarta
26.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 2 (dua) bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul.	B/00.10.7/4343/B2 29 April 2025	B/00.10.7/4628/B2 7 Mei 2025	Lanal Yogyakarta
27.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 1 bidang tanah dan 1 unit bangunan kantor, terletak di Jalan Sisingamangaraja No 21 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.	540/KEP/2024 31 Desember 2024	6/PERJ/SEKDA/II/2025 5 Februari 2025	BIN

Sumber: BPKA DIY, 2025

2) Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

a. Asuransi Barang Milik Daerah

Asuransi BMD bertujuan untuk mengalihkan resiko atau ketidakpastian atas BMD bila terjadi sesuatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Asuransi barang milik daerah dilaksanakan untuk: (1). Kendaraan dinas operasional roda empat ke atas dan (2). Bangunan gedung. Pemilihan penyedia asuransi dilaksanakan dengan dengan metode ePurchasing katalog elektronik.

Masa pertanggungan asuransi adalah 21 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2026. Pada APBD tahun 2024 tersedia anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Pelaksanaan asuransi barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut:

(1) Asuransi Kendaraan dinas operasional roda empat ke atas milik Pemda DIY, dengan penyedia jasa PT Asuransi Sinar Mas. Pagu Anggaran untuk asuransi kendaraan dinas operasional adalah Rp210.000.000,00 dengan nilai kontrak asuransi kendaraan sebesar Rp200.270.000,00 Total kendaraan yang disuransikan

sebanyak 71 unit kendaraan, dengan pertanggungan komprehensif.

(2) Asuransi bangunan gedung dilaksanakan dalam bentuk pertanggungan kebakaran (Flexas) dan pertanggungan gempa bumi. Penyedia jasa PT Asuransi Sinar Mas. Pagu Anggaran untuk asuransi bangunan gedung adalah Rp290.000.000,00 dengan nilai kontrak sebesar Rp289.755.509,00. Terdapat 32 unit bangunan yang di asuransikan dengan rincian sebagai berikut:
   a) Asuransi kebakaran (Flexas) dan asuransi gempa bumi dengan perluasan RSMDCC (*Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotions*) sebanyak 2 unit bangunan (Komplek Kepatihan dan DPRD DIY);
   b) Asuransi Kebakaran (Flexas) dengan perluasan RSMDCC sebanyak 30 unit bangunan.

b. Pengamanan Fisik Bangunan Gedung

Pengamanan fisik bangunan gedung dilaksanakan dengan menyediakan satuan pengamanan (tenaga keamanan) pada 6 lokasi barang milik daerah, yakni:

(1) Tanah dan bangunan di Jalan Jenggotan, Jetis, Kota Yogyakarta;
(2) Tanah dan bangunan di Jalan Cik di Tiro, Yogyakarta;
(3) Tanah dan bangunan di Jalan Tunjung Baru, Yogyakarta;
(4) Tanah dan bangunan gudang di Jalan Abu Bakar Ali, Yogyakarta;
(5) Tanah dan bangunan gudang di Wates, Kulon Progo;
(6) Eks Hotel Mutiara 2, Jl Malioboro 2 Yogyakarta.

Pengamanan dilaksanakan oleh 2 tenaga keamanan pada masing-masing lokasi, khusus untuk eks Hotel Mutiara 2 dilaksanakan oleh 12 orang tenaga keamanan. Pengamanan fisik bertujuan untuk memastikan terjaminnya keamanan, kebersihan dan ketertiban pada objek pengamanan.



LKPJ Gubernur DIY 2025

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMDA

Indikator Tujuan Pemda DIY yang termuat dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022–2027 meliputi 4 tujuan Pemda dengan 5 indikator kinerja tujuan Pemda. Tingkat ketercapaiannya dalam Tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2024

No	Tujuan Pemda	Indikator Kinerja Tujuan Pemda	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2027)	Keterangan
1	Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (*Inclusive Growth Index*)	Angka Indeks	5,90*	6,52	5,90*	90,49*	6,72	Tidak Tercapai
2		Indeks Kebahagiaan	Angka Indeks	71,70 (Angka Rilis BPS Tahun 2021)	73,98	71,70 (Angka Rilis Terakhir BPS Tahun 2021)	96,92	75,12	Tidak Tercapai
3	Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,459	0,438	0,4606	94,84	0,432	Tidak Tercapai
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Angka Indeks)	A- (89,90)	A (83,78)	A- (97,44) (Hasil Penilaian Sementara Indeks Reformasi	116,30	A	Tercapai

No	Tujuan Pemda	Indikator Kinerja Tujuan Pemda	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2027)	Keterangan
						Birokrasi Pemda DIY Tahun 2025 oleh KemenPANRB)			
5	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks	68,44	70,49	76,45	108,45	Sedang	Tercapai

*Sumber: Bapperida DIY, 2025 (data diolah) (*angka proyeksi)*

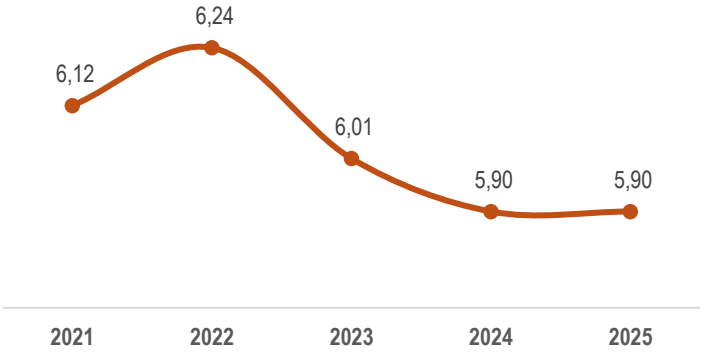
Dari tabel di atas, dari 5 indikator kinerja tujuan Pemda terdapat 3 indikator kinerja tujuan yang belum memenuhi target yang ditetapkan atau capaian masih di bawah 100%, diantaranya: Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (*Inclusive Growth Index*), Indeks Kebahagiaan, Indeks Williamson.

1. Terwujudnya Kualitas Hidup Kehidupan Penghidupan Masyarakat - IGI (*Inclusive Growth Index*)

Inclusive Growth Index (IGI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara komprehensif, tidak hanya dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan masyarakat. Indeks ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus bersifat inklusif, yakni mampu mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil dan merata kepada seluruh kelompok masyarakat. IGI tidak semata-mata berorientasi pada capaian pertumbuhan ekonomi agregat, melainkan juga pada sejauh mana hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati dan diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Sejalan dengan kerangka yang dikembangkan oleh Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), dan United Nations Development Programme (UNDP), IGI dibangun atas tiga pilar utama, yaitu: (1) pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien, dan berkelanjutan; (2) pilar inklusivitas sosial, yang mencakup pemerataan pendapatan dan penurunan

tingkat kemiskinan; serta (3) pilar jaring pengaman sosial, yang berfokus pada perluasan akses dan kesempatan bagi masyarakat. Konsep pertumbuhan ekonomi inklusif menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, baik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan maupun untuk memperoleh manfaat pembangunan secara proporsional dan berkeadilan.

Secara metodologis, nilai IGI berada pada rentang skala 1 hingga 10, dengan kategori penilaian sebagai berikut: nilai indeks pada rentang 1–3 mencerminkan kondisi kurang memuaskan, rentang 4–7 menunjukkan kinerja memuaskan, sedangkan rentang 8–10 mengindikasikan kinerja sangat memuaskan. Perkembangan capaian IGI DIY selama periode 2021–2025 disajikan pada grafik berikut sebagai gambaran dinamika kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 3.1. Perkembangan *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2021–2025

Keterangan: Angka tahun 2020-2022 (BPS); Angka tahun 2023-2025 adalah Proyeksi
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Perkembangan nilai IGI DIY selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai IGI DIY tercatat sebesar 6,12, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 6,24. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai IGI mengalami koreksi dan menurun menjadi 6,01, yang kemudian berlanjut pada tahun 2024 dan 2025 dengan capaian yang sama, yaitu sebesar 5,90.

Tren penurunan nilai IGI sejak tahun 2022 hingga 2025 sejalan dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama. Meskipun demikian, penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh memburuknya seluruh indikator sosial ekonomi. Pada periode tersebut, sejumlah indikator strategis seperti tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta laju inflasi menunjukkan kecenderungan menurun/membaik, sementara pendapatan per kapita dan IPM justru mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program Pemda DIY dalam mendorong inklusivitas pembangunan melalui perbaikan indikator kesejahteraan sosial dan kualitas sumber daya manusia telah berjalan relatif sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Namun demikian, capaian tersebut masih memerlukan penguatan intervensi kebijakan, khususnya melalui identifikasi dan perbaikan terhadap indikator-indikator pembentuk IGI yang kinerjanya belum optimal, guna mendukung pencapaian target indeks secara lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian nilai IGI DIY sebesar 5,90 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pembangunan ekonomi inklusif di DIY berada pada kategori memuaskan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kinerja inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2024 serta Capaian 2025

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
IGI *(Inclusive Growth Index)*	Angka Indeks	5,90*	6,52	5,90*	90,49*

*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah) (*angka proyeksi)*

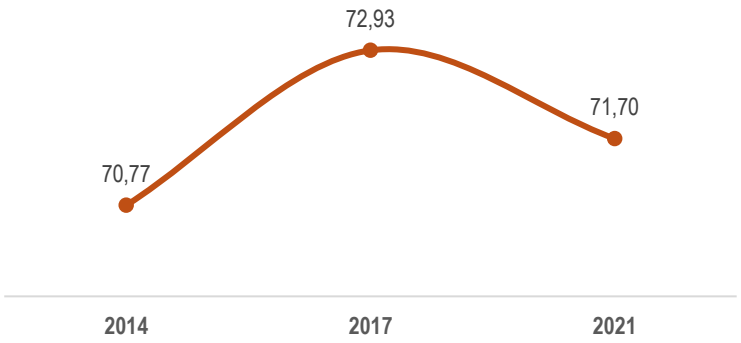
Capaian IGI DIY pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,90 dari target yang ditetapkan sebesar 6,52, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 90,49%. Angka tersebut masih bersifat proyeksi, mengingat data final penyusun IGI belum sepenuhnya tersedia pada saat pelaporan. Belum tercapainya target IGI terutama dipengaruhi oleh kinerja pada dimensi pemerataan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan yang masih memerlukan penguatan. Berdasarkan rilis

BPS Maret 2025, rasio gini DIY adalah 0,426, lebih tinggi dibandingkan dengan rerata nasional sebesar 0,375. Selain itu, tingkat kemiskinan DIY pada periode yang sama mencapai 10,23%, juga masih berada di atas angka Nasional sebesar 8,47%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan struktural terkait ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi faktor pembatas dalam peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meskipun demikian, kinerja indikator pemerataan pendapatan dan kemiskinan pada tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rasio gini pada tahun 2024 sebesar 0,428 dan tingkat kemiskinan sebesar 10,40%. Tren penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya Pemda DIY, antara lain melalui kebijakan pengendalian inflasi, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta implementasi berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pendapatan, yang secara bertahap mulai memberikan dampak positif terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

2. Terwujudnya Kualitas Hidup Kehidupan Penghidupan Masyarakat - Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan merupakan metrik statistik yang digunakan untuk mengukur taraf kesejahteraan subjektif serta tingkat kepuasan hidup masyarakat dalam menjalani rutinitas harian. Nilai ini diperoleh melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai indikator, mulai dari kondisi emosional dan kualitas hidup, hingga aspek keberlanjutan lingkungan.

Tingkat kebahagiaan masyarakat diukur melalui berbagai dimensi kehidupan, mulai dari kualitas kesehatan dan pendidikan, kemapanan ekonomi seperti pekerjaan dan pendapatan, hingga aspek personal seperti keharmonisan keluarga dan waktu luang. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan rasa aman dari kriminalitas juga menjadi penentu utama. di Indonesia, BPS telah memetakan kondisi ini melalui survei berkala yang dilaksanakan pada tahun 2014, 2017, dan 2021.



Gambar 3.2. Indeks Kebahagiaan DIY Tahun 2014-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kebahagiaan Tahun 2025

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024*	2025		
			Target	Realisasi*	% Realisasi
Indeks Kebahagiaan	Angka Indeks	71,70	73,98	71,70	96,92

*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 *) Angka Rilis 2021*

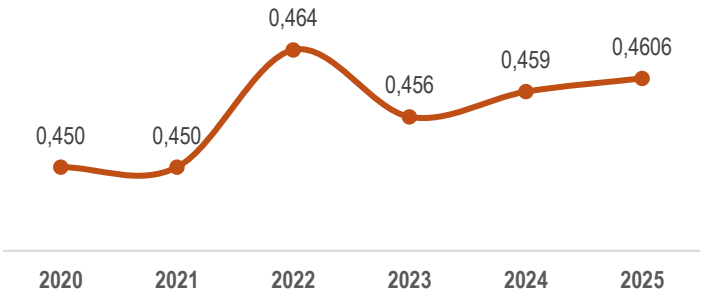
Mengingat absennya rilis data Indeks Kebahagiaan tahun 2025, angka realisasi saat ini masih mengacu pada data tahun 2021, yaitu 71,70. Capaian tersebut mencatatkan persentase realisasi sebesar 96,92% dari target yang ditetapkan (73,98). Kendati target belum sepenuhnya terpenuhi, angka ini menunjukkan tren positif pada kualitas hidup masyarakat DIY. Bahkan, capaian DIY tercatat melampaui rata-rata nasional (71,49) dan memposisikan DIY di peringkat ke-23 secara nasional.

Pengukuran Indeks Kebahagiaan DIY melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) mencakup dimensi kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Namun, perbandingan antara tahun 2017 dan 2021 menunjukkan adanya penurunan pada dimensi perasaan (*affect*), yang dipicu oleh tekanan di sektor ekonomi, kesehatan, serta pembatasan interaksi sosial. di sisi lain, meski kepuasan hidup secara umum masih stabil, muncul tantangan nyata pada kesejahteraan personal akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap aspek pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan kualitas hunian.

Pemda DIY berkomitmen memperkuat fondasi kebahagiaan masyarakat melalui pendekatan holistik. Upaya ini mencakup penguatan sektor keamanan, perluasan jaring pengamanan sosial, serta pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok desa. Selain itu, optimalisasi akses pendidikan, program peningkatan pendapatan, dan manajemen lingkungan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama guna mendongkrak skor Indeks Kebahagiaan DIY di masa depan.

3. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah - Indeks Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antarwilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indeks Williamson (dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun ke tahun.



Gambar 3.3. Indeks Williamson DIY Tahun 2020–2025

Sumber: Bapperida DIY, 2025 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antarwilayah di DIY masih berada di atas 0,400. Artinya, kesenjangan ekonomi antarwilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2020 sampai 2022 yaitu dari Indeks Williamson 0,450 (2020) menjadi 0,464 (2022). Setelah itu, ketimpangan mengalami penurunan menjadi 0,456 di tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0.459. Pada tahun 2025 ketimpangan mengalami peningkatan menjadi 0,4606 tentunya hasil ini belum final dan masih akan berubah setelah terbitnya pembaruan hasil pengukuran. Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022–2027 sebesar 0,438 maka capaian tersebut akan diperoleh persentase capaian sebesar 94,84%. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Indeks Williamson Tahun 2024-2025

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi*	% Realisasi*
Indeks Williamson	Angka Indeks	0,459	0,438	0,4606	94,84

Sumber: BPSDM Bapperida DIY, 2025 (data diolah)

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan ukuran resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia untuk kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah. Indeks ini mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, sekaligus menegaskan terbangunnya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional yang diarahkan untuk menjawab isu Tata Kelola Pemerintahan yang berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional. Selain sebagai tolok ukur, Indeks ini juga menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak 2023 dilaksanakan melalui *double track* berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan dua jalur (*double track*) dimaksudkan agar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi dengan dua jalur (*double track*) tersebut yaitu:

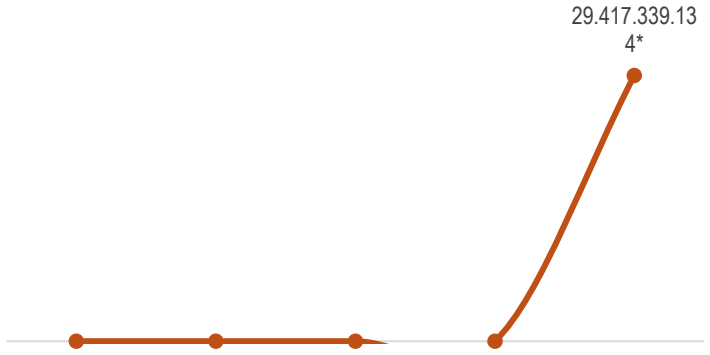
a. Reformasi Birokrasi General yang merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hulu;
b. Reformasi Birokrasi Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat

hilir atau target pembangunan nasional dan daerah. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) sehingga dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Terdapat 5 Tematik Pembangunan yang dirumuskan dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu: Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi, Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (*Stunting*).

Mekanisme dan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 masih mengacu pada mekanisme dan intrumen evaluasi yang digunakan pada evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024. Selain itu penilaian atas indikator evaluasi RB dapat menggunakan nilai terbaru yang dievaluasi di tahun 2025 atau dapat menggunakan nilai tahun sebelumnya. Hal tersebut mengingat pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi secara nasional di Tahun 2025 mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Evaluasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik. Evaluasi RB General meliputi evaluasi terhadap capaian strategi pelaksanaan, capaian implementasi kebijakan RB General, dan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi General. Sedangkan evaluasi RB Tematik meliputi evaluasi terhadap strategi pembangunan dan capaian dampak RB Tematik. Adapun indikator capaian dampak dari evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah terdiri dari angka kemiskinan, realisasi investasi, prevalensi stunting, tingkat penggunaan produk dalam negeri dan tingkat inflasi.

Capaian Indeks RB Pemerintah Daerah DIY selama periode 2021–2025 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.4. Capaian indeks RB Pemda DIY Tahun 2022–2025

*Keterangan: *) Hasil penilaian sementara tahun 2025*
Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, dan Biro Organisasi 2025 (data diolah)

Dari gambar tersebut terlihat bahwa pemda DIY terus menunjukkan peningkatan indeks RB dari tahun ke tahun. Adapun untuk indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025, Kementerian PAN dan RB RI belum merilis Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, sehingga data realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan hasil sementara evaluasi terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2025 yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB RI melalui Portal RB Nasional (portalrb.id) pada tanggal 27 Februari 2026. Berdasarkan hasil evaluasi RB yang disampaikan melalui Portal RB Nasional, nilai Indeks RB Pemerintah Daerah DIY tahun 2025 adalah 97,44 dengan kategori A- (memuaskan dengan catatan). Perbandingan realisasi Indeks RB dan targetnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Indeks RB Tahun dengan Target 2025 dan Target Akhir RPJMD 2027

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi*
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Angka Indeks)	A- (89,90)	A (83,78)	A- (97,44*)	116,30

*Sumber: Kementerian PAN dan RB RI,2026 (*hasil sementara evaluasi RB 2025 yang disampaikan melalui Portal RB Nasional oleh Kementerian PAN dan RB RI pada tanggal 27 februari 2026)*

Pada tahun 2025, nilai Indeks RB Pemda DIY masih menggunakan nilai hasil sementara evaluasi RB di tahun 2025 dan menunjukkan capaian sebesar 97,44 kategori A- (memuaskan dengan catatan). Bila dibandingkan dengan target Indeks RB Pemerintah Daerah DIY di tahun 2025 sebesar 83,78 (Kategori A), maka target indikator tujuan telah tercapai. Dari hasil tersebut kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY diinterpretasikan telah menunjukkan pemenuhan terhadap sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Namun sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan *double track* yaitu RB General dan RB Tematik berdampak pada Kategori/Klasifikasi Hasil Indeks Reformasi Birokrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 -100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
				budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	> 60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	> 50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, 2023 (dalam PERMENPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi)

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, Indeks RB Pemda DIY tahun 2025 menunjukkan peningkatan dari tahun 2024, dari nilai 89,90 menjadi 97,44 dengan kategori dan predikat yang sama. Komponen RB General mengalami peningkatan dari 80,54 menjadi 85,60 dan RB Tematik dari 9,36 menjadi 11,84. Perbandingan nilai hasil evaluasi RB Pemda DIY tahun 2024 dan 2025 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Hasil Evaluasi RB Pemda DIY Tahun 2024 dan 2025

No	Penilaian	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025*	Gap
1	RB General	100	80,54	85,60	5,06
2	RB Tematik	20	9,36	11,84	2,48
3	Indeks RB	120	89,90	97,44	7,54
4	Predikat		A-	A-	

Sumber: Kementerian PAN RB RI dan Biro Organisasi Setda DIY 2026 (data diolah)
*(*hasil penilaian sementara tahun 2025)*

Evaluasi Reformasi Birokrasi di tahun 2025 mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 sehingga masih mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Hasil Evaluasi tiap Komponen, Sub Komponen dan Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi Pemda DIY tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8. Penjabaran Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2025

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,75	2,75
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	7,00
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	3,00	1,80
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,08	2,46
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	1,50	1,29
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	92,70	3,71
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	86,04	2,15
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3,00	1,20
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	97,08	2,43
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	5,00	2,50
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2	82,65	1,65
12	RB	Capaian Pelaksanaan	Indeks Reformasi Hukum	2	99,22	1,98

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
	General	Kebijakan Reformasi Birokrasi				
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2	3,34	1,34
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	86,95	2,17
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	349,00	3,40
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2	4,69	1,88
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	97,22	1,94
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	4,53	8,16
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3,00	5,00
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	93,40	3,74
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	72,54	2,90
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	79,41	7,94
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	86,50	6,92
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	4	93,00	3,72
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6	100	5,57
Capaian RB General				**100**		**85,60**
26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,92	0,92
27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,9	0,9
28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,58	0,58
29	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	1,00	1,00

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
30	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0,88	0,88
31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0,94	0,94
32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	3,00	3,00
33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,38	0,38
34	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,96	2,96
35	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0,28	0,28
Capaian RB Tematik				**20**		**11,84**
36	RB General	Koefisien	Koefisien	10	0	0
Indeks RB						**97,44**

Sumber: Kementerian PAN dan RB RI,2026 (hasil sementara evaluasi RB 2025 yang disampaikan melalui Portal RB Nasional oleh Kementerian PAN dan RB RI pada tanggal 27 februari 2026)

Perbandingan dengan Capaian Nasional

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI pada acara *kick off meeting* evaluasi RB, SAKIP, dan ZI tahun 2025, Indeks RB nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tahun 2014 telah menggambarkan trend yang positif. Indeks RB di level provinsi terus mengalami kenaikan dan di tahun 2024 menunjukkan rata-rata sebesar 74,63. Apabila dibandingkan dengan capaian nilai Indeks RB Pemda DIY di tahun 2025 yaitu sebesar 97,44 dengan kategori A- (memuaskan dengan catatan), maka Indeks RB Pemda DIY telah menunjukkan nilai jauh di atas rata-rata nasional.

1) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah DIY antara lain:

a. Permasalahan

(1) Perlunya penguatan peran perangkat daerah koordinator RB, agar fungsi koordinasi tidak hanya dipandang sebagai proses pengumpulan data

administratif, tetapi sebagai motor penggerak strategi bersama yang diakui oleh seluruh OPD pendukung;

(2) Perlunya pemetaan lebih teknis terhadap kontribusi perangkat daerah dalam memberikan dampak pembangunan yang selanjutnya dapat dirumuskan menjadi indikator kinerja yang terkawal;

(3) Pembangunan Zona Integritas belum merata di seluruh unit kerja strategis;

(4) Implementasi RB masih lebih fokus pada perbaikan tata kelola internal, belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata terhadap hasil pembangunan.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemda DIY perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

(1) Penguatan Forum Komunikasi Lintas *Stakeholder*: Mengaktifkan mekanisme *joint planning* (perencanaan bersama) di bawah pengawasan dan pendampingan Bapperida DIY untuk memastikan tidak ada duplikasi program dan setiap anggaran diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal tersebut juga dimaksudkan agar perangkat daerah koordinator RB dapat duduk bersama OPD mitra untuk menyinkronkan program sejak tahap perencanaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan di lapangan;

(2) Mengoptimalkan capaian indikator-indikator evaluasi RB yang masih belum maksimal dengan menyusun rencana aksi tindaklanjut, pemetaan lebih teknis terhadap kontribusi masing-masing perangkat daerah dan memperbaiki kualitas implementasi agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak terhadap capaian pembangunan;

(3) Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui pembinaan unit layanan dan pelaksanaan survei mandiri secara berkala;
(4) Mengoptimalkan capaian indikator-indikator evaluasi RB yang masih lemah dengan memperbaiki kualitas kebijakan, mempercepat digitalisasi, serta meningkatkan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, SPI (Survey Penilaian Integritas).
(5) Perlunya apresiasi atas capaian kolaboratif, sebagai bentuk motivasi bagi perangkat daerah agar semakin terdorong untuk berinovasi melalui kerja sama tim agar tidak bekerja secara terisolasi/parsial.

5. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

1) Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan sebagai nilai komposit yang merepresentasikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode tertentu. Bagi Pemda DIY, IKLH memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY, sekaligus instrumen evaluasi dalam pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah.

IKLH merupakan hasil agregasi dari empat indikator utama dengan formulasi perhitungan berdasarkan koefisien bobot yang ditetapkan oleh Kementerian LHK, yaitu:

$$IKLH = (0{,}340 \times IKA) + (0{,}428 \times IKU) + (0{,}133 \times IKL) + (0{,}099 \times IKAL)$$

Keterangan:
IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA: Indeks Kualitas Air
IKU: Indeks Kualitas Udara

IKL: Indeks Kualitas Lahan
IKAL: Indeks Kualitas Air Laut

2) Analisis Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY Tahun 2025

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY pada tahun 2025 tercatat sebesar 76,45. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni sebesar 70,49 (kategori Sedang). Perhitungan tahun ini telah mengacu pada formulasi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.

Tabel 3.9. Perhitungan IKLH DIY Tahun 2025

Komponen	Formula	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Air	$\frac{\sum \text{(setiap kategori status mutu)}}{\sum \text{(status mutu air)}} * 100$	72.92	74,67
Indeks Kualitas Udara	100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]	70.98	81,04
Indeks Kualitas Lahan	IKL = 100 – ((84,3 – (TL x 100)) x 50/54,3)	54.79	57,58
Indeks Kualitas Air Laut	WQI = ∑ QiWi	81.11	87,79
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY	(0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)	70.49	76,45

Sumber: Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Tahun 2025

Tabel 3.10. Kategori IKLH

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 \leq x \leq 100$
2.	Sedang	$60 \leq x \leq 85$
3.	Kurang	$0 \leq x \leq 60$

Sumber: PermenLHK Nomor 14 Tahun 2025

3) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Hasil pemantauan kualitas air di 10 sungai yang melintasi wilayah DIY menunjukkan beberapa parameter lingkungan telah melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional.

2) Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 81,04 menunjukkan kondisi kualitas udara relatif baik, konsentrasi PM2,5 menunjukkan pola yang relatif homogen antar lokasi dan periode, mengindikasikan pengaruh sumber regional dengan kontribusi latar belakang yang merata. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun kualitas udara secara keseluruhan tergolong baik, pengendalian emisi dari sektor transportasi, industri, dan permukiman tetap perlu diperkuat, terutama untuk menekan paparan PM2,5 yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan dalam jangka panjang.
3) Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul adalah kawasan perkotaan dan peri-urban Yogyakarta, dengan tingkat pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pembangunan fisik yang tinggi. Tekanan pemanfaatan ruang yang intensif menyebabkan fungsi ekologis lahan mengalami penurunan yang tercermin pada rendahnya nilai IKL. Rendahnya nilai IKL tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan dampak kumulatif dari urbanisasi, konversi lahan, dan keterbatasan daya dukung lahan. Kota Yogyakarta mengalami tekanan struktural akibat keterbatasan ruang, Sleman menghadapi tekanan ekspansi perkotaan dan kerentanan wilayah, sementara Bantul berada pada posisi transisi dengan tekanan ganda dari pembangunan dan kondisi fisik alam.

b. Solusi

1) Telah dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan perangkat kelurahan tentang kegiatan pemetaan sungai tercemar di 3 Sungai (Code, Winongo, dan Gajahwong) di wilayah Bantul dan kegiatan pengelolaan sampah

mandiri yang lokasinya berdekatan dengan lokasi titik pemantauan sungai, secara umum mungkin berpengaruh terhadap perbaikan mutu air sungai.

2) Penerapan uji emisi kendaraan bermotor di DIY merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pengendalian pencemaran udara, khususnya untuk menekan paparan polutan hasil pembakaran bahan bakar fosil dari sektor transportasi. Selain itu, pengawasan ketaatan izin lingkungan terhadap pelaku usaha dan kegiatan di DIY berkontribusi langsung dalam upaya menekan polusi udara dengan memastikan bahwa sumber emisi tidak bergerak dikelola sesuai ketentuan. Efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kualitas data pemantauan, serta sinergi antara pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum, salah satunya dengan mulai berlakunya denda administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan pada sektor tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran.
3) Tipologi permasalahan lahan di wilayah Kartamantul yang berbeda tentu memerlukan solusi dengan pendekatan yang berbeda. Mulai dari optimalisasi ruang terbuka dan rehabilitasi lahan perkotaan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga penguatan konservasi tanah dan pengelolaan kawasan rawan degradasi.

B. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA

Pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2022–2027 terdapat 4 sasaran Pemda dengan 10 indikator kinerja sasaran Pemda dengan capaian indikator yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2025

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2027)	Keterangan
1	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,40	9,66	10,08	95,65	8,66	Tidak Tercapai terhadap Target RPJMD; Tercapai terhadap Target RKPD (10-10,5)
2	Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	%	5,03	5,3-5,8	5,49	100	5,7-6,2	Tercapai
3		Pendapatan Per Kapita (Rp Juta)	Juta rupiah	33,14	31,51	34,76	110,31	34,41	Tercapai
4		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,48	3,56	3,30	107,87	2,76-3,06	Tercapai
5		Inflasi	%	1,28	2,00 – 4,00	3,11	100	2-4	Tercapai
6	Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	81,62	81,68	82,48	100,97	82,23	Tercapai
7		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka Indeks	71,04	74,98	71,04 (capaian tahun 2024)	94,74	75,38	Capaian Tahun 2025 belum rilis (Capaian Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2025 Tidak Tercapai)

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2027)	Keterangan
8	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	%	40,10	40,13	39,91	99,45	40,24	Tidak Tercapai
9	Meningkatnya	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	WTP	Tercapai
10	*Good Governance*	Nilai SAKIP	Predikat	AA (92,65)	AA (92,80)	AA (92,70)	99,89	AA	Tercapai terhadap Target RPJMD (AA); Tidak tercapai terhadap Target RKPD
11		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka Indeks	83,88	Tinggi	89,25	100	Tinggi	Tercapai
12	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	82,83	83,74	86,59	103,40	85,98	Tercapai
13	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Angka Indeks	102,83	108,7	102,83	109,99	99,88	Tercapai

Sumber: Bapperida DIY, 2026 (data diolah)

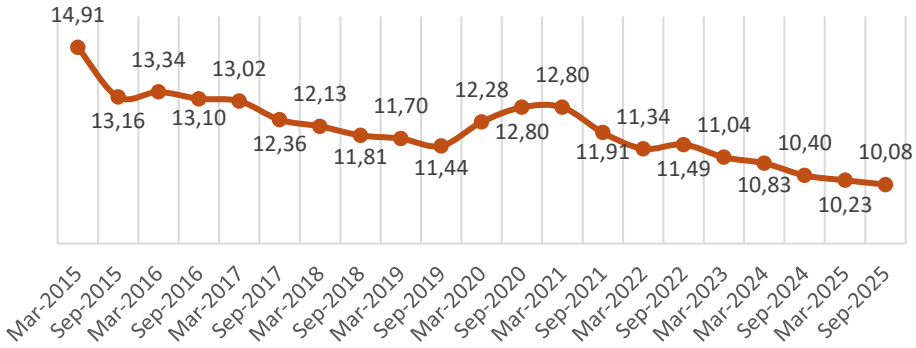
Dari tabel di atas terlihat bahwa, ada 13 indikator kinerja sasaran Pemda, 2 (dua) indikator di antaranya belum memenuhi target yang ditetapkan atau capaian masih di bawah 100%, yaitu: Angka Kemiskinan dan Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY, sedangkan Indeks Pembangunan Kebudayaan capaiannya masih menunggu rilis dari Kementerian Kebudayaan. Namun apabila melihat capaian tahun sebelumnya dibandingkan dengan target Tahun 2025 belum tercapai.

1. Semakin Kecilnya Tingkat Kemiskinan - Angka Kemiskinan (%)

Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu agenda strategis pembangunan DIY yang menjadi perhatian utama Pemda dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Komitmen tersebut tercermin dalam penetapan sasaran “Semakin

Kecilnya Tingkat Kemiskinan" sebagai bagian dari tujuan pembangunan daerah, yang pelaksanaannya dipantau melalui berbagai indikator kinerja dan capaian statistik resmi. Untuk menilai efektivitas kebijakan dan dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap perkembangan kemiskinan DIY dari waktu ke waktu, baik dalam perspektif tren jangka panjang, perbandingan dengan capaian nasional, maupun variasi antarwilayah kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang masih perlu ditangani.

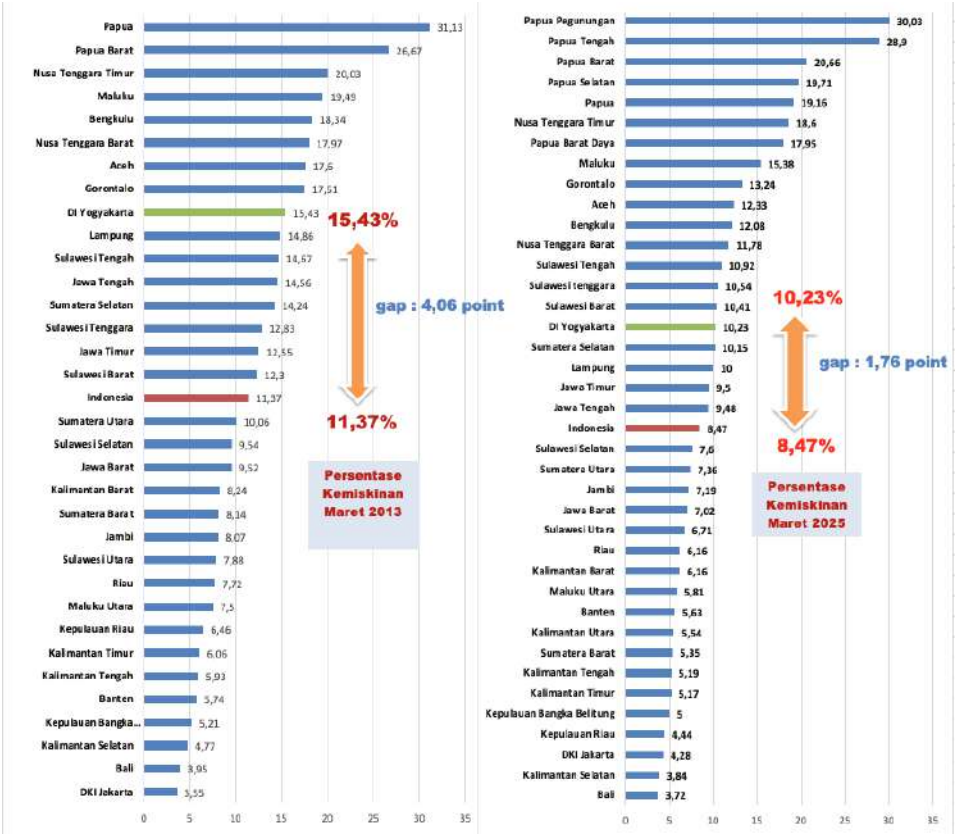
Persentase Penduduk Miskin DIY periode Maret 2015–September 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di DIY menunjukkan tren menurun dalam jangka panjang, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa periode. Pada Maret 2015, persentase penduduk miskin berada pada 14,91%, kemudian secara bertahap menurun hingga mencapai 11,31% pada Maret 2019. Pada periode 2020–2021 terjadi kenaikan kembali tingkat kemiskinan, dengan puncaknya 12,80%, yang mencerminkan dampak tekanan ekonomi, terutama akibat pandemi Covid-19. Setelah periode tersebut, angka kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 11,91% pada Maret 2022 menjadi 10,08% pada September 2025. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun DIY menghadapi gangguan ekonomi yang bersifat sementara, upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah–panjang tetap menunjukkan hasil yang positif dengan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.



Gambar 3.5. Tingkat Kemiskinan DIY Maret 2025–September 2025

Sumber: BPS, 2025 (data diolah)

Dalam upaya memahami dinamika kemiskinan di DIY dalam konteks nasional penting untuk melihat perkembangan capaian penurunan kemiskinan DIY dibandingkan dengan rata-rata nasional. Menurut data per September 2025 posisi DIY pada 10,08% masih berada di atas Nasional sebesar 8,25%, akan tetapi jika dilihat tren 2013-2025, selama 12 tahun terakhir, gap persentase kemiskinan DIY dan nasional semakin menyempit dari 4,06 poin (2013) menjadi 1,83 poin (2025). Penyempitan *gap* tersebut mencerminkan laju penurunan kemiskinan DIY lebih cepat dari nasional, dan secara bertahap mendekati tingkat kemiskinan nasional. Artinya intervensi penanggulangan kemiskinan di DIY memberikan dampak positif secara berkelanjutan, meskipun masih terdapat tantangan struktural yang memerlukan penanganan lebih lanjut.



Gambar 3.6. Grafik persentase Kemiskinan 2013 dan 2025 DIY dan Nasional

Sumber: BPS tahun 2013 dan 2025, (data diolah)

Jika dilihat dari aspek kewilayahan, data BPS Provinsi DIY selama lima tahun kebelakang menunjukkan tingkat kemiskinan di DIY mengalami tren menurun secara konsisten di seluruh kabupaten/kota, meskipun dengan variasi capaian antarwilayah. Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul masih menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, walaupun keduanya mengalami penurunan yang relatif signifikan dibandingkan tahun 2021. Kabupaten Bantul berada pada posisi menengah dengan tren penurunan yang lebih moderat, sementara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan terendah di DIY. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan pengentasan kemiskinan sudah berada pada jalur yang

tepat, namun masih diperlukan penguatan intervensi yang lebih terfokus secara spasial dan kelompok sasaran, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan struktural yang relatif tinggi.

Tabel 3.12. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021–2025 (%)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kulon Progo	18,38	16,39	15,64	15,62	14,53
Bantul	14,04	12,27	11,95	11,66	11,54
Gunungkidul	17,69	15,86	15,60	15,18	14,15
Sleman	8,64	7,74	7,52	7,46	6,71
Kota Yogyakarta	7,69	6,62	6,49	6,26	6,14

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026

Secara umum target dan realisasi penurunan kemiskinan di DIY pada tahun 2025 dituangkan dalam tabel berikut

Tabel 3.13. Target dan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kemiskinan Tahun 2025

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi	Keterangan
1	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,40	9,66	10,08	95,65	Tidak Tercapai

Sumber: Bapperida DIY, 2026 (data diolah)

Target penurunan kemiskinan tahun 2025 tidak tercapai, terlihat dari capaiannya masih di angka 10,08% atau persentase realisasi 95,65% dari target tahun 2025 sebesar 9,66%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, upaya penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penguatan kebijakan dan program secara berkelanjutan.

Selama tahun 2025, Pemda DIY tidak hanya melanjutkan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetapi juga melakukan penguatan dan penajaman strategi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis wilayah. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan efektivitas intervensi dengan

memperkuat konvergensi program lintas perangkat daerah, sinkronisasi dengan kebijakan kabupaten/kota, serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial dan data sektoral untuk memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, dilakukan penguatan kualitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil, perluasan akses pembiayaan yang adaptif terhadap kondisi lokal, serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan berkelanjutan. Pemda DIY juga memperluas cakupan dan kualitas perlindungan sosial dengan penekanan pada kelompok miskin rentan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, disertai penguatan monitoring dan evaluasi program agar dampak kebijakan lebih terukur dan berkelanjutan.

1) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(1) Kemiskinan di DIY cenderung bersifat persisten dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu, khususnya di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, dengan karakteristik keterbatasan akses ekonomi, infrastruktur dasar, dan layanan publik.
(2) Sebagian besar penduduk miskin bergantung pada sektor dengan produktivitas rendah, keterbatasan keterampilan, serta akses permodalan dan pasar yang terbatas.
(3) Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan koordinasi lintas perangkat daerah dan ketepatan sasaran, sehingga dampaknya belum optimal.

b. Solusi

(1) Optimalisasi pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah melalui integrasi program lintas sektor, afirmasi pada wilayah kantong kemiskinan, serta

percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan layanan sosial yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat

(2) Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bantuan sosial responsif, disertai kebijakan stabilisasi harga dan penguatan daya beli masyarakat miskin serta hampir miskin.

(3) Penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui konvergensi program lintas OPD, meningkatkan partisipasi dunia usaha dan akademisi, pemanfaatan data terpadu dan data spasial secara konsisten, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis dampak.

2. Penghidupan Ekonomi Yang Layak - Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB (%)

Perekonomian DIY secara kumulatif hingga Triwulan III Tahun 2025, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,49% (*C-to-C*). Berdasarkan pendekatan produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,76%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat sebagai komponen dengan pertumbuhan paling tinggi, yakni sebesar 7,84%.

Capaian indikator Sasaran angka pertumbuhan ekonomi/PDRB tahun 2025 sampai triwulan IV menurut BPS Provinsi DIY sebesar 5,49% atau tarcapai sebesar 100% dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3-5,8%.

Tabel 3.14. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 Triwulan III (*C-to-C*)

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	%	5,03	5,3-5,8	5,49*	100

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026 **): Capaian Triwulan IV 2025*

Angka pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 sampai dengan triwulan IV tumbuh 5,49%. Capaian tahun 2025 ini menunjukan terjadi percepatan dibanding capaian tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,03% (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 7,90%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,24%.

Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang terkontraksi sebesar 0,56%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Konstruksi sebesar 7,90%; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,23%; serta Jasa Lainnya sebesar 7,22%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,37%. Sedangkan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 6,34% dan 6,36%. Struktur PDRB DIY menurut lapangan usaha ADHB tahun 2025 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 11,80%; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,91%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,13%; Konstruksi sebesar 9,81%; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,64%. Peranan ke-5 lapangan usaha tersebut dalam perekonomian DIY mencapai 52,29%.

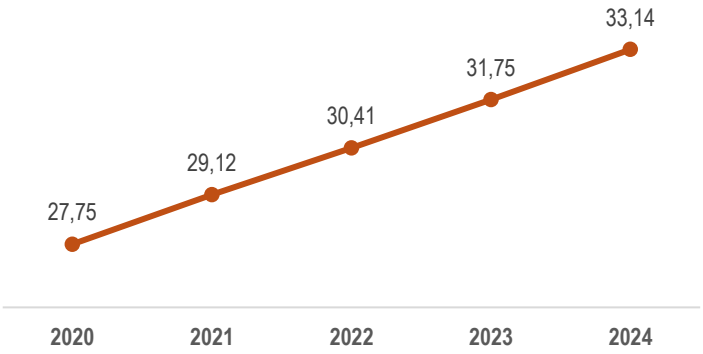
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 5,49% mencerminkan perekonomian DIY sepanjang tahun 2025 cukup kondusif. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,24%; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,85%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,60%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,53%; serta Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,65%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (sebagai faktor pengurang dalam PDRB

menurut pengeluaran) mengalami kontraksi sebesar 0,52%. Struktur PDRB DIY menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian DIY masih didominasi oleh Komponen PK-RT dengan kontribusi sebesar 61,63%. Dilihat dari sumber pertumbuhannya, PK-RT memberikan andil pertumbuhan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2025, dengan andil sebesar 2,46%, diikuti andil PMTB sebesar 2,26%. Komponen lainnya juga memberikan andil positif terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 meskipun di bawah 1%.

Pertumbuhan ekonomi DIY pada Triwulan IV-2025 dan sepanjang 2025 menunjukkan akselerasi yang kuat dan stabil, dengan struktur ekonomi yang didukung oleh konsumsi domestik serta sektor jasa dan manufaktur. Kondisi ini mencerminkan bahwa DIY mampu memanfaatkan momentum permintaan domestik dan kondisi pemulihan ekonomi nasional untuk mempercepat pertumbuhan regional secara berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural yang telah lama menjadi karakteristik ekonomi DIY, khususnya tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dibanding rata-rata nasional, dan ketimpangan antarwilayah maupun ketimpangan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum sepenuhnya inklusif.

3. Penghidupan Ekonomi Yang Layak - Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)

Proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Kesejahteraan ekonomi masyarakat DIY terus menunjukkan tren positif, yang tercermin dari kenaikan pendapatan per kapita secara konsisten dalam kurun waktu 2020–2024. Menggunakan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, indikator ini membuktikan keberhasilan proses pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan pendapatan per kapita di DIY dari tahun ke tahun.



Gambar 3.7. Pendapatan per Kapita DIY Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi DIY, data tahun 2025 diolah

Pada tahun 2025, pendapatan per kapita DIY tercatat mencapai Rp34,76 juta. Angka ini melampaui target RPJMD 2022–2027 yang pada tahun 2025 dipatok sebesar Rp31,51 juta, atau mencatatkan persentase capaian signifikan sebesar 110,31%. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang terjaga positif sejak tahun 2020 serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025.

Tabel 3.15. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita di DIY Tahun 2024–2025

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	33,14	31,51	34,76*	110,31

Sumber: BPS Provinsi DIY Tahun 2025 (data diolah)
*Keterangan: *) data capaian Tahun 2024 karena data capaian Tahun 2025 belum rilis*

4. Penghidupan Ekonomi Yang Layak - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh

pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan berdampak pada tingginya angka TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Atau dengan pengertian lain, TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, semakin tinggi angkanya menunjukan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur.

Jumlah penduduk usia kerja DIY pada November 2025 sebanyak 3,06 juta orang, naik sebanyak 6,54 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut merupakan angkatan kerja yaitu 2,28 juta orang (74,48%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 779,82 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada November 2025 terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 2,20 juta orang dan penduduk yang menganggur sebanyak 75,03 ribu orang. Jika dibandingkan Agustus 2025, jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 2,98 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 0,74 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 3,72 ribu orang.

Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025

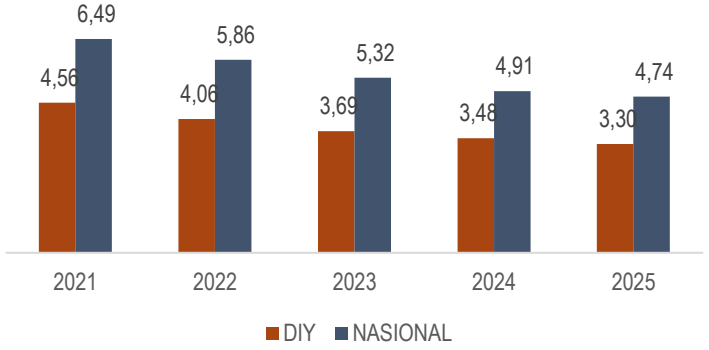
Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025			Target akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,48	3,56	3,30	107,87	3,06	92,16

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

TPT DIY hasil Sakernas November 2025 sebesar 3,30%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Pada November 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,16% poin jika dibandingkan dengan Agustus

2025. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD DIY pada tahun 2027, pada tahun 2025 ini TPT DIY mencapai kinerja 92,72%. Meskipun target TPT tahun 2025 telah terlampaui (107,87%) namun untuk menuju akhir tahun 2027 masih diperlukan berbagai strategi kebijakan agar mencapai angka TPT yang semakin rendah sebagaimana diharapkan.

Secara series, TPT DIY pada Agustus 2021 tercatat sebesar 4,56% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 tercatat sebesar 3,30%. Dibandingkan dengan TPT nasional TPT DIY selama lima tahun juga berada dibawah angka TPT nasional. Kondisi ini tentu berkaitan dengan tumbuhnya perekonomian DIY khususnya beberapa sektor yang penyerapan tenaga kerjanya cukup signifikan.



Gambar 3.8. Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2021 - 2025

Keterangan: 2025: Data November
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Penurunan TPT DIY disebabkan oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang tumbuh, sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian regional, sehingga lebih banyak angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan dibandingkan periode sebelumnya. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja terutama pada Pertanian, Kehutanan & Perikanan (1,44% poin); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (0,59% poin), serta Pendidikan (0,35% poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Industri Pengolahan (1,61% poin); Perdagangan Besar &

Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor (0,67% poin); dan Pengangkutan & Pergudangan (0,42% poin).

Pada November 2025, TPT laki-laki sebesar 3,53%, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 3,02%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,35% poin dibandingkan Agustus 2025. Sedangkan TPT perempuan mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,08% poin dibandingkan Agustus 2025. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan pada November 2025 sebesar 3,66%, sedangkan TPT di daerah perdesaan sebesar 2,15%. Dibandingkan Agustus 2025, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,27% poin. Sedangkan TPT perdesaan mengalami kenaikan 0,16% poin dibandingkan Agustus 2025.

TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Hal ini terjadi karena di wilayah perkotaan memiliki sektor formal yang lebih banyak dibandingkan perdesaan. Seperti diketahui bahwa sektor formal lebih sulit dimasuki oleh para angkatan kerja untuk bekerja, karena menggunakan keahlian atau syarat-syarat tertentu dibandingkan sektor informal. Selain itu disebabkan juga bahwa penduduk di wilayah perdesaan biasanya t idak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga akan melakukan kegiatan apa saja walaupun berstatus sebagai pekerja keluarga maupun pekerja bebas pertanian. Disamping itu, sebagian masih bertahan di daerah perdesaan yang berusaha mencari pekerjaan dengan melaju (commuter/pulang pergi/ulang alik) ke perkotaan. Apalagi didukung dengan kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor dan akses transportasi, serta semakin membaiknya kondisi infrastruktur jalan.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada November 2025, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya yakni sebesar 5,39%. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,67% diikuti Diploma ke atas sebesar 2,46%. Sementara TPT paling rendah adalah pada jenjang SMP ke bawah sebesar 1,92%. Hal ini masih terjadi permasalahan titik temu antara

penawaran tenaga kerja terutama pada pendidikan tinggi atau SMA sederajat ke atas, sementara untuk pendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja.

Penurunan angka TPT merupakan salah satu keberhasilan pembangunan namun tetap diperlukan langkah-langkah kebijakan untuk meminimalisir angka TPT di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi, pemagangan, serta sertifikasi kompetensi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan/ kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Diperlukan pula upaya penciptaan kesempatan kerja melalui memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih baik.

5. Penghidupan Ekonomi Yang Layak - Inflasi

Sepanjang Tahun 2025, Pemda DIY berhasil menjaga stabilitas harga pada tingkat yang terkendali. Inflasi DIY pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,11% (*y-o-y*), mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan inflasi tahun 2024 sebesar 1,28%. Kenaikan tersebut mencerminkan normalisasi permintaan masyarakat, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta adanya penyesuaian harga pada beberapa komoditas utama, khususnya pangan (beras dan aneka cabai) serta emas perhiasan. Meskipun demikian, inflasi DIY pada tahun 2025 tetap terjaga pada level moderat, sehingga tetap mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun 2024-2025

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Inflasi	%	1,28	2,00 – 4,00	3,11	100

Sumber: BPS Provinsi DIY Tahun 2026 (data diolah)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi DIY, inflasi DIY tahun 2025 tercatat sebesar 3,11% *(y-o-y),* berada dalam rentang target inflasi daerah tahun 2025 sebesar 2,00-4,00% dengan capaian 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2025 berjalan efektif di tengah dinamika ekonomi dan tekanan harga pada komoditas strategis. Terkendalinya inflasi DIY dalam rentang target sasaran tidak terlepas dari peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Sepanjang tahun 2025, TPID DIY melaksanakan berbagai langkah strategis melalui empat pilar utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif kepada masyarakat. Berbagai upaya juga telah dilakukan di antaranya pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah, penguatan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjaga pasokan komoditas strategis, optimalisasi peran BUMD sebagai *offtaker* pangan, serta pemanfaatan digitalisasi dan sistem informasi spasial untuk meningkatkan ketepatan intervensi pengendalian inflasi. Selain upaya-upaya itu, didukung pula oleh pengelolaan ekspektasi inflasi yang lebih solid antarinstansi, permintaan yang relatif terkendali, masifnya *social movement* (gerakan masyarakat) dalam rangka pengendalian harga, pelaksanaan komunikasi melalui berbagai media, termasuk melakukan pemantauan sentimen pemberitaan, serta melakukan komunikasi dan diskusi secara intensif dengan para petani, pedagang dan pelaku usaha terkait serta masyarakat untuk menjaga dan mengelola ekspektasi, baik dari sisi kepastian produksi, distribusi hingga pola konsumsi.

Berbagai upaya sinergi kebijakan tersebut berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas inflasi DIY untuk tetap berada dalam rentang target sasaran yang ditetapkan. Pada tahun 2025, Laporan Kinerja TPID DIY Tahun 2024 dengan judul MRANTASI (Masyarakat lan Pemerintah Tanggap Inflasi) mendapatkan apresiasi “Juara 2 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali” pada *TPID Awards*

Tahun 2025 karena kinerja optimal TPID DIY dan Pemda DIY dalam pengendalian inflasi.

Namun demikian, meskipun capaian inflasi tahun 2025 tercapai dalam rentang target sasaran, pengendalian inflasi DIY Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya ketergantungan inflasi terhadap komoditas pangan strategis terutama beras dan cabai, volatilitas harga akibat faktor musiman dan cuaca, serta kenaikan harga emas perhiasan sebagai penyumbang inflasi non-pangan. Selain itu, pelaksanaan operasi pasar di beberapa wilayah masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya selaras dengan momentum kenaikan harga, serta optimalisasi kerja sama antardaerah, dan pemanfaatan data neraca pangan yang masih perlu diperkuat sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengendalian pasokan.

Pemda DIY melalui TPID DIY terus berkomitmen untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan melalui peningkatan produksi lokal, pengamanan pasokan komoditas strategis, serta antisipasi musim tanam dan panen; peningkatan kualitas perencanaan operasi pasar agar tepat waktu, komoditas, volume, lokasi, dan sasaran; serta penguatan peran BUMD dan kerja sama antar daerah (KAD) sebagai upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan; disertai dengan pemanfaatan digitalisasi dalam pemantauan harga dan kelancaran distribusi. Strategi komunikasi publik melalui edukasi kepada pelaku pasar dan masyarakat juga hendaknya ditingkatkan sehingga informasi mengenai perkembangan harga dan kebijakan pengendalian inflasi dapat dipahami dengan baik serta mendukung terbentuknya ekspektasi inflasi yang lebih stabil dan terkendali.

6. Kualitas SDM Yogyakarta Yang Dapat Diandalkan - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

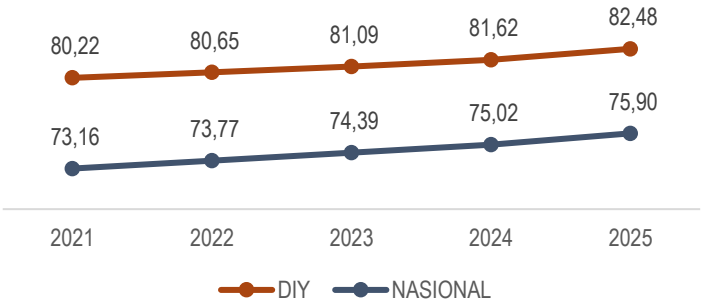
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh. IPM disusun dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar

hidup layak. Ketiga dimensi tersebut direpresentasikan melalui indikator umur harapan hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta pengeluaran atau pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan daya beli.

Nilai IPM memberikan gambaran tentang tingkat kemampu penduduk mengakses hasil-hasil pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik, peningkatan derajat kesehatan, maupun kemampuan ekonomi yang lebih memadai. Sebaliknya, stagnasi atau penurunan IPM mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, IPM berfungsi sebagai indikator strategis untuk menilai efektivitas kebijakan lintas sektor. Upaya peningkatan IPM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, penguatan pembangunan manusia melalui peningkatan IPM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Angka IPM DIY mengalami tren meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Angka IPM DIY pada tahun 2021 mencapai angka 80,22. Sejak tahun tersebut, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi” dengan angka 80,22. Peningkatan IPM DIY 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.



Gambar 3.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2021–2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

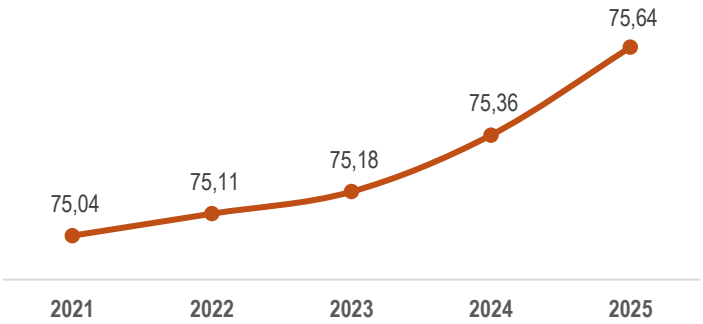
Bila dibandingkan dengan IPM nasional, capaian pembangunan manusia DIY berada pada kualitas yang lebih baik. Perkembangan IPM DIY dari tahun 2021–2025 selalu berada di atas IPM Nasional. Pada tahun 2021 IPM nasional 73,16 sedangkan IPM DIY telah mencapai 80,22. Pada tahun 2025, IPM Nasional menunjukkan angka 75,9, sementara DIY telah mencapai 82,48. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

Tabel 3.18. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	81,62	81,68	82,48	100,97

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Kenaikan IPM DIY pada tahun 2025 ditopang oleh kontribusi seluruh komponen pembentuknya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, setiap indikator menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan meningkat sebesar 3,22%, diikuti oleh pertumbuhan RLS sebesar 2,82% dan HLS sebesar 0,51%. Sementara itu, indikator kesehatan yang tercermin melalui Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir juga mengalami peningkatan, meskipun dengan laju yang relatif lebih moderat, yaitu sebesar 0,37%.



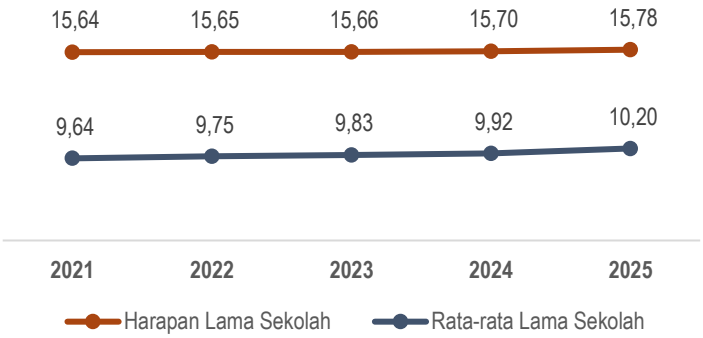
Gambar 3.10. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) DIY Tahun 2021–2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Secara rinci, pendekatan 3 dimensi dasar dalam pengukuran IPM sebagai berikut:

Pertama, dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan UHH, menunjukkan bahwa kualitas kesehatan mengalami peningkatan. Bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,64 tahun meningkat 0,28 tahun dibanding mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

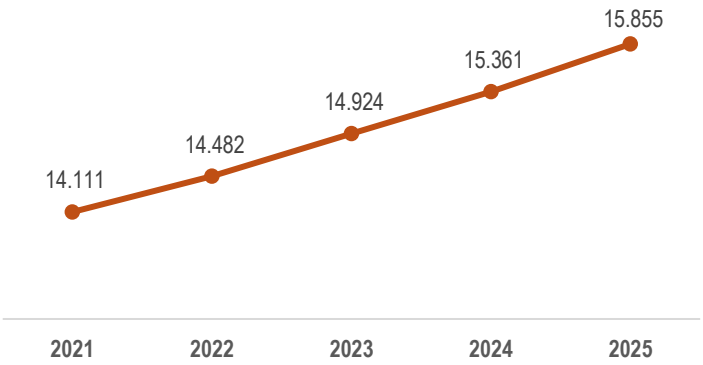
Kedua, aspek pendidikan yang dalam penghitungan IPM direpresentasikan melalui dua ukuran utama, yakni HLS bagi penduduk berusia tujuh tahun ke atas serta capaian aktual RLS yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua ukuran tersebut menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari waktu ke waktu. Dalam periode 2021–2025, peningkatan indikator HLS tercatat berlangsung secara bertahap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,24% per tahun, sedangkan capaian RLS mengalami akselerasi yang lebih kuat dengan rata-rata kenaikan tahunan sebesar 1,33%. Pada tahun 2025, kenaikan HLS mencapai tambahan 0,08 tahun atau tumbuh 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui laju pertumbuhan rata-rata periode 2020–2024 yang berada di angka 0,18%. Sejalan dengan itu, RLS juga mencatat peningkatan signifikan sebesar 0,28 tahun atau 2,82% dibandingkan 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan pada periode 2020–2024 yang hanya mencapai 0,95%.



Gambar 3.11. Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2021–2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa dimensi pendidikan dalam IPM di DIY mengalami kemajuan yang semakin kuat, terutama pada tahun 2025. Baik HLS maupun RLS tidak hanya meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, tetapi juga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, data tersebut bermakna bahwa kualitas sumber daya manusia DIY dari sisi pendidikan sedang mengalami penguatan, baik dari sisi prospek pendidikan generasi muda maupun dari capaian pendidikan penduduk dewasa. Kondisi ini menjadi modal penting bagi peningkatan daya saing daerah, produktivitas tenaga kerja, serta keberlanjutan pembangunan manusia dalam jangka menengah dan panjang.



Gambar 3.12. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2021–2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Standar hidup layak, sebagai dimensi ketiga dalam pengukuran pembangunan manusia, diukur melalui nilai pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (berdasarkan harga konstan 2012). Kualitas hidup masyarakat DIY terus menunjukkan tren positif,. terlihat dari pengeluaran riil per kapita tahun 2025 yang mencapai 15,86 juta rupiah per tahun.Terjadi kenaikan signifikan sebesar 494 ribu rupiah (3,22%) dari tahun 2024. Pertumbuhan ini melampaui tren historis periode 2020–2024 yang rata-rata 2,32% per tahun.

Tabel 3.19. IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021–2025

Kabupaten/Kota	IPM				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bantul	80,63	81,04	81,74	82,05	83,03
Kabupaten Sleman	84,08	84,40	84,86	85,71	86,35
Kabupaten Gunungkidul	70,37	71,18	71,46	72,14	73,13
Kabupaten Kulon Progo	74,73	75,48	75,82	76,18	76,97
Kota Yogyakarta	87,50	88,00	88,61	89,10	89,53
DIY	**80,22**	**80,66**	**81,09**	**81,62**	**82,48**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Potret pembangunan manusia di DIY selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang variatif antarwilayah. Meski seluruh kabupaten/kota telah berhasil menembus kategori 'Tinggi' dan 'Sangat Tinggi', kesenjangan antardaerah masih menjadi catatan penting. Kota Yogyakarta mengukuhkan posisinya dengan IPM tertinggi (89,53), disusul oleh Sleman (86,35) dan Bantul (83,03) yang ketiganya konsisten di level 'Sangat Tinggi'. di sisi lain, Kulon Progo dan Gunungkidul berada pada level 'Tinggi'. Menariknya, meskipun Gunungkidul mencatatkan angka IPM terendah (73,13), wilayah ini justru menunjukkan akselerasi pembangunan paling progresif dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 1,37%, berbanding terbalik dengan Kota Yogyakarta yang mulai melambat di angka 0,48%.

Tabel 3.20. IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2025

Komponen	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo	75,71	14,55	9,33	11.499
Kabupaten Bantul	75,04	15,91	10,11	17.240
Kabupaten Gunungkidul	75,12	13,56	7,64	11.006
Kabupaten Sleman	75,81	16,80	11,42	18.231

Komponen	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kota Yogyakarta	76,05	17,67	12,13	21.104
DIY	**75,64**	**15,78**	**10,20**	**15.855**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Kesenjangan antarwilayah masih mewarnai potret indikator penyusun IPM di Kabupaten/Kota DIY pada tahun 2025. Dari sisi kesehatan, Kota Yogyakarta unggul dengan UHH mencapai 76,05 tahun, sementara Bantul mencatatkan angka terendah dengan capaian 75,04 tahun. di sektor pendidikan, didominasi Kota Yogyakarta dan Sleman; HLS di kedua wilayah ini melampaui rata-rata provinsi yang sebesar 15,78 tahun. Sebaliknya, Gunungkidul masih menghadapi tantangan besar pada dimensi pengetahuan dan ekonomi, dengan RLS sebesar 7,64 tahun serta pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan berada di level terendah, yakni Rp11.006 ribu per tahun.

7. Kualitas SDM Yogyakarta Yang Dapat Diandalkan - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Dinamika sosial sering kali membawa gelombang perubahan cepat yang berisiko mengikis jati diri bangsa. Menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah pencegahan yang tidak hanya bersifat *defensif* dalam melindungi, tetapi juga proaktif dalam mengembangkan.

di tengah pusaran statusnya sebagai Kota Pelajar dan destinasi wisata dunia, DIY berdiri di garis depan menghadapi asimilasi budaya yang kian akseleratif. Sebagai jawaban, Pemda DIY mengambil langkah strategis yang visioner yakni menempatkan kebudayaan bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai arus utama pembangunan *(mainstreaming culture)* yang menjiwai setiap sendi kehidupan masyarakat.

Pengukuran keberhasilan atas kinerja kebudayaan Pemda DIY tercermin secara nyata melalui capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Keberhasilan DIY menempati posisi puncak secara nasional melampaui capaian provinsi Bali yang sebelumnya berada di peringkat pertama menegaskan efektivitas kebijakan yang

dijalankan. Melalui IPK, Pemda DIY dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangunan yang membutuhkan intervensi lebih kuat.

Tabel 3.21. Target Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka Indeks	71,04	74,98	71,04 (capaian tahun 2024)	94,74

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 Pemda DIY mencatatkan capaian IPK Sebesar 71,04 poin (capaian tahun 2024, karena capaian tahun 2025 belum rilis). Meskipun secara nominal belum mencapai target 74,98 namun dengan tingkat realisasi sebesar 94,74%, pencapaian ini mencerminkan progresivitas yang stabil dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (90,80%). Capaian ini juga merupakan peringkat tertinggi IPK di tingkat nasional. Hal tersebut membuktikan komitmen kuat Pemda DIY dalam menempatkan Kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan daerah telah memberikan hasil kinerja yang sangat baik.

Kesenjangan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik eksternal maupun internal. Tantangan utama terletak pada optimalisasi dimensi yang bersifat partisipatif, dimana pelibatan masyarakat luas dalam ekspresi budaya dan literasi budaya masih memerlukan intervensi yang lebih intensif. Perkembangan setiap dimensi dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019–2024

No	Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekonomi Budaya	71,51	64,79	56,79	67,32	59,1	37,06
2	Pendidikan	78,17	79,99	80,68	80,88	80,09	86
3	Ketahanan Sosial Budaya	85,2	85,04	76,5	77,79	78,78	80,85
4	Warisan Budaya	68,61	61,11	56,57	58,2	63,29	74,45
5	Ekspresi Budaya	62,31	57,15	41,11	45,06	50,63	44,64
6	Budaya Literasi	78,04	80,34	56,2	57,72	60,51	77,08
7	Gender	59,39	64,53	64,61	64,05	65,53	63,57
IPK DIY		**73,98**	**71,74**	**64,22**	**66,52**	**67,90**	**71,04**

No	Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IPK NASIONAL		55,91	54,65	51,90	55,13	57,13	59,98

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

Dimensi tertinggi terletak pada Dimensi Pendidikan, Hal ini mengukuhkan posisi DIY sebagai pusat pendidikan nasional yang berhasil mengintegrasikan nilai budaya dalam sistem pendidikan. Namun demikian, Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Ekspresi Budaya mengalami penurunan yang tajam dibandingkan tahun sebelumnya meskipun infrastruktur budaya telah tersedia. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terkait penyerapan tenaga kerja di sektor budaya dan kesejahteraan pelaku seni pasca-pandemi, serta perlunya dorongan ekstra terhadap partisipatif aktif masyarakat dalam aktivitas seni budaya secara mandiri.

Beberapa langkah yang dapat diambil Pemda DIY dalam meningkatkan capaian dimensi ekonomi budaya antara lain melalui penataan ulang kebijakan yang berfokus pada penyediaan lapangan kerja budaya yang layak. Langkah konkret yang ditempuh meliputi stimulasi partisipasi mandiri yakni dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aktivitas seni budaya secara mandiri guna mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah dan meningkatkan nilai ekonomi ekspresi budaya.

Pemda DIY menegaskan bahwa arus utama kebudayaan (*mainstreaming culture*) bukan sekedar konsep teoritis, melainkan fondasi nyata bagi kemajuan bangsa. Pada Tahun 2025, visi ini dipertajam dengan menghubungkan pelestarian jadi diri dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja seni yang konkret. Kebudayaan diposisikan sebagai fondasi utama pembangunan yang menjamin bahwa: Kebijakan arus utama kebudayaan harus berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pengakuan pihak luar terhadap warisan budaya benda dan tak benda DIY (yang sebelumnya 399 buah menjadi 460 buah) menjadi instrumen legal untuk perlindungan, dan; Integrasi nilai budaya dalam sistem pendidikan dan ekonomi memastikan bahwa kualitas SDM Yogyakarta tetap unggul dan tidak terkikis oleh dinamika global.

8. Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Pada Kawasan Belum Maju - Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap keseluruhan PDRB DIY (%)

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah adalah ketimpangan antarwilayah yang berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dari disparitas pendapatan, tetapi juga dari ketidakseimbangan kapasitas ekonomi, akses infrastruktur, serta peluang kerja antarwilayah. Oleh karena itu, upaya pengurangan ketimpangan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan dan tujuan ke-8 terkait pertumbuhan ekonomi inklusif.

di DIY, isu ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antarwilayah masih menjadi isu strategis sebagaimana diidentifikasi dalam RPJMD DIY Tahun 2022–2027. Ketimpangan tersebut terutama disebabkan oleh terkonsentrasinya aktivitas perekonomian di wilayah utara DIY, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, yang memiliki keunggulan relatif dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, serta keberadaan pusat-pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa. Sebaliknya, wilayah selatan DIY meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo memiliki karakteristik struktur ekonomi yang relatif berbeda. Ketiga wilayah ini secara umum masih didominasi oleh sektor-sektor primer dan kegiatan ekonomi berskala kecil-menengah dengan tingkat produktivitas dan nilai tambah yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah utara. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten/kota di DIY.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemda DIY terus mendorong kebijakan pemerataan pembangunan antarwilayah. Sesuai amanat RPJMD DIY 2022–2027, strategi pemerataan pembangunan diarahkan dengan menempatkan kawasan selatan sebagai subjek

prioritas pembangunan, didukung melalui (1) Penguatan reformasi kalurahan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi lokal; (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi; serta (3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang relatif tertinggal secara terpadu lintas sektor. Upaya tersebut juga diperkuat melalui kemitraan investasi, pelibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta berbagai bentuk kerja sama pembangunan lainnya guna menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal di kawasan belum maju.

Indikator Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY digunakan untuk mengukur sejauh mana peningkatan kapasitas ekonomi wilayah yang relatif tertinggal, khususnya Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo, dalam struktur perekonomian DIY. Pada tahun 2024, capaian indikator ini tercatat sebesar 40,10%, yang menunjukkan bahwa kawasan belum maju telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total PDRB DIY. Pada Tahun 2025, berdasarkan hasil realisasi sementara, kontribusi PDRB kawasan belum maju tercatat sebesar 39,98%, atau mencapai 99,62% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun terindikasi bahwa struktur perekonomian DIY pada tahun 2025 masih relatif terkonsentrasi di wilayah utara, capaian tersebut tetap mencerminkan bahwa upaya penguatan ekonomi kawasan belum maju berada pada jalur yang tepat, serta menunjukkan ketahanan kinerja ekonomi wilayah selatan di tengah dinamika perekonomian regional dan nasional. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan nilai tambah sektor unggulan lokal, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan konektivitas dan investasi di kawasan Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, guna memastikan peningkatan kontribusi PDRB kawasan belum maju secara berkelanjutan.

Tabel 3.23. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2024-2025

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	%	40,10	40,13	39,98	99,45

*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026 (*angka proyeksi)*

Berdasarkan data kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut, Kabupaten Sleman masih menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 33,38% diikuti Kota Yogyakarta sebesar 26,42%. Sementara itu, kontribusi kawasan belum maju secara agregat berasal dari Kabupaten Bantul (18,38%), Kabupaten Gunungkidul (13,46%), dan Kabupaten Kulon Progo (8,35%). Secara gabungan kontribusi PDRB ADHK Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mencapai 60,02% dari total PDRB DIY. Adapun tiga wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan belum maju, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul, dengan cakupan wilayah sekitar 80% dari total luas DIY, menyumbang sekitar 39,91% dari keseluruhan PDRB DIY pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023, di mana kontribusi kawasan belum maju tercatat sebesar 40,20%. Namun demikian, capaian ini belum bersifat final karena belum memuat kinerja triwulan IV tahun 2025.

Tabel 3.24. PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2025

Kab/Kota	PDRB ADHK (Rp Milliar) Tahun 2024	PDRB ADHK (Rp Milliar) Tahun 2025*	Pangsa PDRB ADHK terhadap DIY Tahun 2025 (%) *
Kulon Progo	10.426,23	8.065,25	8,28
Bantul	22.964,66	17.787,73	18,24
Gunungkidul	16.506,43	13.124,20	13,46
Sleman	41.559,54	32.959,40	33,81
Yogyakarta	32.964,34	25.553,01	26,21

*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026 (*angka sementara hingga TW III Tahun 2025)*

9. Meningkatnya *Good Governance* - Opini BPK

Good governance pemerintah daerah adalah tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah terjadi ketika keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Institusi yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan laporan pemeriksaan yang memuat opini. Beberapa opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Pernyataan menolak memberikan opini *(disclaimer of opinion)* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pemda DIY hingga tahun 2025 telah memperoleh opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut. di dalam RPJMD DIY tahun 2022–2027, opini BPK merupakan salah satu sasaran/ indikator kinerja dengan target yaitu tercapainya opini WTP.

Tabel 3.25. Capaian Opini BPK Pemda DIY Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100

Sumber: BPK RI, 2026 (data diolah)

10. Meningkatnya *Good Governance* - SAKIP

Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis, dengan adanya Reformasi birokrasi akan mewujudkan *good governance*. Dilakukan penataan terhadap sistem penyelengggaraan pemerintah yang efektif dan efisien melalui Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai media untuk mempercepat Reformasi Birokrasi karena dalam sistem akuntabilitas, makna kinerja harus jelas termasuk ukuran kinerjanya. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran, serta perumusan kebijakan publik yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel.

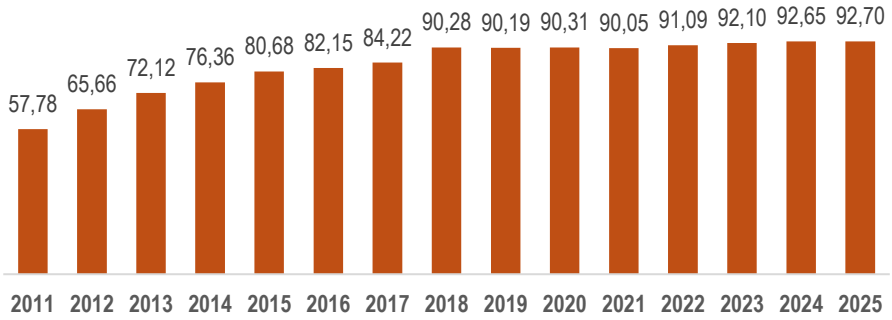
Tabel 3.26. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya *Good Governance*

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satu-an	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi	Target RPJMD
1	Meningkatnya *Good Governance*	Nilai SAKIP	Nilai	92,65 (AA)	92,80 (AA)	92,70 (AA)	99,89	AA

Sumber: KemenPAN RB, 2026

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2025 secara resmi telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/454/AA.05/2025) tertanggal 30 Desember 2025**.** Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemda DIY memperoleh nilai sebesar 92,70 dengan predikat “AA”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada level “Sangat

Memuaskan", yaitu: 1) Telah terwujud *Good Governance*. 2) Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. 3) Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Serta 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.



Gambar 3.13. Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2025

Sumber: KemenPanRB RI, 2026

Rincian hasil evaluasi tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.27. Rincian Hasil Evaluasi, Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025

Komponen yang Dinilai	Bobot	2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	28,32	28,27
b. Pengukuran Kinerja	30	26,91	27,14
c. Pelaporan Kinerja	15	14,14	13,66
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,28	23,63
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**92,65**	**92,70**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**AA**	**AA**

Sumber: KemenPAN RB RI

Dari Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025, telah masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama sampai tahun kelima telah melebihi target (A). Selanjutnya pada periode RPD 2023-2026, yaitu tahun 2023, telah mencapai target (AA). Selanjutnya pada tahun pertama dan kedua pelaksanaan RPJMD 2022–2027, Tahun 2024 dan 2025, realisasi juga telah sesuai target yang ditetapkan yaitu pada predikat AA, namun jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2025, persentase capaian masih sebesar 99,89%.

Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2024, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 0,05 poin. Kenaikan tersebut pada komponen: Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,23 poin; dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,35 poin. Sedangkan pada komponen Perencanaan Kinerja ada penurunan 0,05 poin dan Pelaporan Kinerja sebesar 0,48 poin.

Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2025, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Beberapa Rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP yang telah ditindaklanjuti oleh Pemda DIY yaitu:

Pada Perencanaan Kinerja:

1) Telah melakukan reviu dan perbaikan pada Pohon Kinerja yang telah disusun agar lebih sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Telah melakukan reviu dan perbaikan pada perjanjian kinerja agar tujuan/ sasaran berorientasi pada hasil dan menggambarkan kinerja yang seharusnya dicapai serta menetapkan kembali indikator pada Perangkat Daerah agar sesuai dengan kondisi kinerja;
3) Telah menetapkan kembali target pada Perangkat Daerah dengan memanfaatkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya;
4) Telah merumuskan rencana aksi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan, pada level subkegiatan telah disusun Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan.

Pada Pengukuran Kinerja:

Telah melakukan reviu dan perbaikan pada manual IKU (Indikator Kinerja Utama) di Perangkat Daerah yang belum lengkap dalam menjabarkan metode penilaian indikator, dengan menambahkan penjelasan meta indikator pada setiap IKU.

Pada Pelaporan Kinerja:

1) Telah memanfaatkan informasi kinerja untuk penentuan target kinerja. Pada tahun 2025 ada Perjanjian Kinerja Perubahan pada semua Perangkat Daerah untuk level Tujuan dan Sasaran dengan melihat capaian kinerja tahun sebelumnya; serta
2) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan analisis yang memadahi dan substansial.

Pada Evaluasi Internal:

1) Telah meningkatkan kapasitas evaluator internal sehingga dapat meningkatkan kualitas evaluasi internal di DIY, dengan diikutsertakan dalam Diklat AKIP; serta
2) Melakukan monitoring secara berkala sehingga tindak lanjut Perangkat Daerah dapat diselesaikan secara tuntas.

11. Meningkatnya *Good Governance* - Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator strategis yang menggambarkan perkembangan kualitas demokrasi di tingkat nasional maupun daerah. IDI disusun sebagai indeks komposit yang mengukur capaian demokrasi melalui berbagai aspek, indikator, dan variabel yang mencerminkan kondisi kebebasan sipil, kesetaraan politik, serta kapasitas lembaga demokrasi. Sejak tahun 2023, penghitungan IDI menggunakan metode baru dengan tiga aspek utama, yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

DIY selama beberapa tahun terakhir secara konsisten menunjukkan capaian IDI pada kategori tinggi, yang menempatkan DIY sebagai salah satu provinsi dengan kualitas demokrasi terbaik secara nasional. Berdasarkan rilis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2025, capaian IDI Tahun 2024 menempatkan DIY pada peringkat pertama secara nasional. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam

menjaga stabilitas politik, memperkuat kelembagaan demokrasi, serta mendorong pemenuhan hak-hak politik masyarakat.

Memasuki tahun 2024 hingga 2025, dinamika demokrasi di DIY dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain meningkatnya polarisasi politik pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak, potensi menurunnya partisipasi politik masyarakat, serta menguatnya politik identitas yang berimplikasi terhadap kohesi sosial dan persatuan bangsa. Selain itu, meningkatnya kebutuhan akan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan inklusif menuntut penguatan koordinasi lintas sektor.

Dalam konteks tersebut, Pemda DIY bersama para pemangku kepentingan terus berupaya memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan literasi politik masyarakat, penguatan peran lembaga demokrasi, penjaminan kebebasan sipil yang bertanggung jawab, serta pengarusutamaan prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas dan meningkatkan capaian IDI DIY hingga tahun 2025, sekaligus memperkuat posisi DIY sebagai daerah dengan praktik demokrasi yang matang dan berkelanjutan. Adapun hasil capaian dari masing–masing aspek dan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	Kategori
	ASPEK KEBEBASAN	**74,31**	**87,35**	**77,76**	**88,74**	**TINGGI**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79	93,02	79,24	79,43	
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30	100	82,7	82,86	
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33	88,36	65,4	100	
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100	100	
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	70,39	70,39	70,39	98,66	

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	Kategori
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83	76,06	71,03	78,4	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75	78,86	74,56	77,71	
	ASPEK KESETARAAN	**87,29**	**88,76**	**89,21**	**90,58**	**TINGGI**
8	Kesetaraan Gender	100	100	100	98,44	
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100	100	
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17	75	76,5	74,17	
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	91,09	93,07	91,73	94,22	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antarwilayah	95,44	95,94	96,31	96,52	
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39	78	81,37	90,72	
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03	85,56	85,04	86,67	
	ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	**80,74**	**80,17**	**83,51**	**88,16**	**TINGGI**
15	Kinerja Lembaga Legislatif	55,56	30,77	50	69,23	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,94	86,79	87,25	86,67	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	75,00	75	75	100	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	66,67	100	100	83,33	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	65,66	65,96	66,29	68,44	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	85,71	100	100	
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	91,60	92,2	92	92,4	
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	94,00	100	94	100	
	NILAI IDI KOMPOSIT	**81,21**	**85,62**	**83,88**	**89,25**	**TINGGI**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

12. Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY 2022–2027 bahwa salah satu sasaran pemda, yaitu Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator berupa Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Adapun arah kebijakan yang dilakukan melalui (a) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; (b) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (c) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan.

Tahun 2025 kinerja indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didukung oleh aspek Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang yang dapat dirinci antara lain:

1) Perwujudan kesesuaian pola ruang dilakukan melalui perwujudan terhadap kawasan peruntukan/ zona lindung dan kawasan peruntukan/ zona budi daya dibanding dengan keseluruhan luas kawasan;
2) Perwujudan kesesuaian struktur ruang dilakukan melalui (1) evaluasi kesesuaian program, lokasi dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan; (2) Penempatan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian KKPR Kewilayahan ke dalam peta rencana struktur ruang; (3) penghitungan tingkat perwujudan jaringan prasarana berdasarkan persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana

Tabel 3.29. Target dan Capaian Sasaran Pemerintah Daerah Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	82,62	83,74	86,59	103,40

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2026

Data di atas menunjukkan bahwa target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2025 sebesar 83,74 dengan realisasi sebesar 86,59 (103,40%). Perhitungan tersebut didapatkan dari dua indikator, yaitu (a) keterwujudan pola ruang; dan (b) Kesesuaian struktur ruang.

Sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS-700 PR.O1.O1/XI/2023 tentang Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang bahwa tingkat perwujudan rencana pola ruang pada RTRW DIY Pada Tahun 2025 terbagi menjadi 2 yaitu tingkat perwujudan kawasan lindung dan tingkat perwujudan kawasan budi daya. Dalam mencari tingkat perwujudan kawasan lindung perlu diketahui luas kawasan lindung pada rencana pola ruang dan luas kegiatan yang

tidak mendukung fungsi lindung. Berikut ini merupakan rumus dalam menghitung tingkat perwujudan kawasan lindung. Berdasarkan hasil analisis penilaian perwujudan RTRW tahun 2025 untuk kawasan lindung, bahwa sebagian besar kawasan telah terwujud sesuai rencana meskipun masih terdapat beberapa pemanfaatan yang menyimpang. Kawasan badan air memiliki nilai perwujudan sebesar 99,98% dan terdapat 0,09 ha tidak sesuai pemanfaatannya. Kawasan konservasi memiliki nilai keterwujudan sebesar 98,73% dan sebesar 47,48 ha yang tidak sesuai pemanfaatannya. Kawasan lindung geologi memiliki nilai perwujudan sebesar 53,14% atau termasuk kedalam klasifikasi belum terwujud, dengan 212,74 ha yang tidak sesuai pemanfaatannya. Secara keseluruhan kawasan lindung memiliki nilai perwujudan sebesar 97,85% dengan 260,30 ha yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Sementara untuk aspek penilaian perwujudan kawasan budidaya RTRW DIY maka dapat diketahui bahwa nilai keterwujudan sebesar 91,55% yaitu termasuk dalam kategori terwujud. Namun untuk pemanfaatan ruang kawasan permukiman hanya memiliki nilai perwujudan sebesar 64,20% dan kawasan peruntukan industri sebesar 39,84%. Sehingga perwujudan kawasan permukiman dan kawasan peruntukan industri masuk kedalam kategori belum terwujud. Selanjutnya untuk penilaian keterwujudan pola ruang didapatkan dari komulatif persentase kawasan lindung (bobot 60%) ditambah dengan persentase kawasan budidaya (bobot 40%), sehingga didapatkan hasil persentase sebesar 95,33%.

Penilaian perwujudan struktur ruang diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program pemanfaatan ruang pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama Rencana Tata Ruang (RTR) serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana. Berdasarkan hasil penilaian keterwujudan struktur ruang menunjukkan bahwa perwujudan sistem jaringan telekomunikasi memiliki nilai paling tinggi yaitu 100% (terwujud). Kemudian perwujudan sistem jaringan energi berada di urutan kedua dengan nilai 91,94% (terwujud). Posisi ketiga

yaitu perwujudan sistem jaringan sumber daya air dengan nilai 88,03% (terwujud). Sementara untuk sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan prasarana lainnya memiliki nilai terendah yaitu 62,20% (belum terwujud) dan 61,67% (belum terwujud).

Berdasarkan dua indikator kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut yang kemudian didapatkan persentase perhitungan akumulatif (a) persentase keterwujudan pola ruang (bobot 40%) dan (b) persentase keterwujudan struktur ruang (60%). Sehingga didapatkan hasil persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 86,59%.

Hasil dari penilaian perwujudan dengan kategori kesesuaian pemanfaatan ruang dalam perwujudan rencana pola ruang untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai maka perlu dilakukan upaya pengendalian dengan mempertimbangkan produktivitas lahan pada pemanfaatan ruang eksisting. Sementara untuk rencana perwujudan struktur ruang apabila terdapat program yang tidak terlaksana yang merupakan program berkelanjutan, maka perlu mempertimbangkan hasil penilaian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) tahunan atau jangka pendek untuk dapat diusulkan pada program pembangunan OPD n+2. Sementara untuk program yang tidak terlaksana dan merupakan program prioritas serta bukan merupakan program berkelanjutan dapat diusulkan dalam musrenbang. Perwujudan program yang tidak terlaksana dengan melibatkan BUMN, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antara program pusat dan daerah dalam pelaksanaan perwujudannya.

13. Menurunnya Risiko Bencana - Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY (Indeks)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan rangkaian upaya terpadu yang dilakukan untuk menekan dampak bencana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memulihkan kondisi setelah bencana terjadi. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup tahap pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan

pascabencana. Oleh karena itu, penanggulangan bencana menjadi bagian dari Suburusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantib Linmas) yang termasuk dalam enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan penanggulangan bencana bertujuan untuk mewujudkan ketangguhan daerah serta mengelola dan menurunkan tingkat risiko bencana. Untuk mengukur capaian tujuan tersebut, digunakan indikator yang telah disepakati, yaitu Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana, atau dikenal sebagai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dihitung berdasarkan formula dasar Risiko = (Ancaman × Kerentanan) / Kapasitas. Dalam perhitungan IRBI yang selama ini dikoordinasikan oleh BNPB, variabel ancaman dan kerentanan diperlakukan sebagai faktor yang relatif tetap, sedangkan variabel kapasitas dinilai sebagai faktor yang bersifat dinamis.

Penilaian Indeks Ketangguhan Daerah (IKD) bagi kabupaten/kota se-DIY merupakan upaya bersama untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh wilayah DIY. Secara agregat, hasil penilaian ini akan digunakan untuk menilai perkembangan laju pengurangan risiko bencana di DIY dari waktu ke waktu. Selain itu, penilaian ini juga menjadi bentuk akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, pengkajian risiko bencana merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Proses ini bertujuan untuk memahami peluang terjadinya bencana, besarnya dampak yang ditimbulkan, serta strategi pengelolaan atau pengurangan risiko yang dapat dilakukan. Pengkajian risiko bencana menjadi fondasi penting dalam perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Tabel 3.30. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Indikator Indeks Risiko Bencana Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasii
Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	102,83	108,7	102,83	109,99

Sumber: Penyampaian Hasil IKD dan IRBI tahun 2025 (Surat BNPB Nomor: B-06.14/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025)

IRBI dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x kerentanan)/kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2023 adalah 102,83, angka tersebut merupakan rata-rata nilai IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu pada cascade RPJMD 2022–2027, target IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target penurunan Indeks Risiko Bencana 1,5%–2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca ekstrim, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan Lahan, 7) Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrim dan abrasi. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek kapasitas terpenuhi. Efektivitas dan pencegahan mitigasi bencana dan kolaborasi multi-aktor (*Penta Helix*) masih belum optimal. Jika melihat lebih detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten Kulon Progo 159,65; 2) Kabupaten Bantul 129,50; 3) Kabupaten Gunungkidul 94,43; 4) Kabupaten Sleman 73,35; dan 5) Kota Yogyakarta 64,22.

Faktor yang mempengaruhi capaian

1) Ancaman kawasan;

   Kesiapsiagaan bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Upaya ini dapat dilaksanakan oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Penanganan keadaan darurat bencana perlu terus ditingkatkan dengan pendekatan yang menitikberatkan pada peningkatan peluang keselamatan

korban serta penurunan jumlah korban jiwa. Siklus penanggulangan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat, melainkan berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan prinsip *build back better* and *safer* bagi masyarakat dan kawasan rawan bencana, sehingga hasil akhirnya berupa penurunan risiko bencana.

Tingkat ancaman di wilayah DIY semakin meningkat karena tercatat telah terjadi tiga bencana besar, yaitu gempa bumi tahun 2006, erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, serta banjir, tanah longsor, dan angin kencang akibat siklon Cempaka pada tahun 2017. Selain itu, wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2020 juga turut memengaruhi tingkat risiko bencana.

2) Kerentanan kawasan yang terancam;

Kerentanan wilayah yang terpapar ancaman bencana menunjukkan tingkat kesiapan serta kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dampak bencana. Wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi cenderung mengalami kerusakan yang lebih parah, meningkatnya jumlah korban jiwa, serta gangguan terhadap kondisi sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi. Tingkat kerentanan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut.

Suatu wilayah dikategorikan memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi apabila memiliki potensi bahaya yang besar—ditinjau dari parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, ketersediaan air tanah, kedekatan dengan sesar aktif, dan faktor lainnya—serta didukung oleh kapasitas atau ketahanan masyarakat yang rendah dalam menghadapi bencana. Sebagai contoh, pada daerah yang rawan gempa bumi, pembangunan seharusnya menerapkan standar bangunan tahan gempa hingga tingkat Skala Richter tertentu. Ketentuan tersebut kemudian

dapat dijadikan acuan dalam pemberian izin kegiatan maupun penetapan peruntukan lahan di wilayah tersebut.

Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka kapasitas daerah dalam mengurangi dampak potensi bencana akan meningkat. Secara geografis, ancaman bencana fisik tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat dikelola melalui upaya manajemen risiko untuk meminimalkan dampaknya. Selain itu, kondisi demografis masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang tidak terelakkan, percepatan perubahan penggunaan lahan, serta degradasi lingkungan perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini menunjukkan bahwa indeks risiko bencana bukanlah nilai yang bersifat linier, melainkan dapat berubah seiring dengan efektivitas penerapan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam upaya pengurangan risiko bencana.

3) Kapasitas kawasan yang terancam.

   Kapasitas kawasan yang terancam bencana merujuk pada kemampuan suatu kawasan untuk mengelola, mengurangi risiko, dan bertahan terhadap dampak bencana. Kapasitas ini melibatkan sumber daya, infrastruktur, sistem, dan mekanisme yang dimiliki suatu wilayah untuk menghadapi ancaman bencana.

Upaya Meningkatkan Kapasitas Kawasan:

1) Mitigasi: Membuat dan menerapkan kebijakan yang mengurangi risiko, seperti membangun dinding penahan banjir atau merelokasi penduduk dari kawasan rawan.
2) Pendidikan: Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana.
3) Peningkatan Infrastruktur: Membangun fasilitas tahan bencana dan memastikan keberadaan jalur evakuasi yang memadai.
4) Penguatan Sistem Peringatan Dini: Menggunakan teknologi untuk mendeteksi potensi bencana lebih awal.
5) Kolaborasi Antar Pihak: Melibatkan pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam pengurangan risiko bencana

Kapasitas kawasan yang baik adalah kunci untuk meminimalkan kerusakan dan korban jiwa ketika bencana terjadi. Rekomendasi tindakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari analisis kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Rekomendasi tindakan tersebut dinilai dari kondisi daerah berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang difokuskan untuk pemerintah daerah. Indikator tersebut hanya melingkupi 8 jenis bahaya yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bahaya tersebut yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan banjir bandang. Sementara itu, kajian kesiapsiagaan difokuskan terhadap masyarakat dengan 19 indikator pencapaian. Lingkup bahaya dalam kajian ini adalah selain dari 8 jenis bahaya pada 71 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Peningkatan efektivitas upaya pencegahan dan mitigasi bencana memerlukan penetapan prioritas yang terstruktur, terencana, dan terkoordinasi. Adapun prioritas utama yang perlu dilaksanakan guna menurunkan risiko serta dampak bencana secara signifikan adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Kebijakan dan Regulasi
    a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
    b. Melakukan harmonisasi regulasi di tingkat nasional, regional, dan daerah terkait penataan ruang berbasis risiko bencana.
    c. Menjamin penegakan hukum terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah rawan bencana.
2) Peningkatan Sistem Peringatan Dini
    a. Penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung deteksi dini berbagai potensi ancaman bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.
    b. Integrasi sistem peringatan dini dengan saluran komunikasi masyarakat secara real-time.

c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami serta merespons peringatan dini secara cepat dan tepat.

3) Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
   a. Pelaksanaan program edukasi kebencanaan di lingkungan pendidikan, komunitas, dan tempat kerja.
   b. Pembentukan dan penguatan komunitas siaga bencana yang mampu bertindak cepat pada kondisi darurat.
   c. Pelaksanaan simulasi dan latihan evakuasi secara berkala guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
4) Penguatan Infrastruktur Tahan Bencana
   a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik, seperti jembatan, rumah sakit, dan sekolah, agar memenuhi standar ketahanan bencana.
   b. Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan sumber daya air untuk mengurangi potensi banjir.
   c. Penyediaan jalur evakuasi yang aman, mudah diakses, dan memadai.
5) Pemulihan dan Rehabilitasi Berbasis Mitigasi
   a. Perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi wilayah terdampak dengan menerapkan prinsip Build Back Better.
   b. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
   c. Pemulihan ekosistem secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan jangka panjang.
6) Pengelolaan Data dan Informasi Risiko Bencana
   a. Penyusunan peta risiko bencana secara komprehensif sebagai dasar perencanaan wilayah.
   b. Integrasi data dan informasi risiko bencana ke dalam sistem pengambilan keputusan.
   c. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk Sistem Informasi Geografis (GIS), untuk pemantauan wilayah rawan bencana.
7) Penguatan Kolaborasi Multipihak
   a. Peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat.

b. Penguatan kemitraan dengan lembaga penelitian dan akademisi guna mendorong inovasi di bidang mitigasi bencana.
c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

8) Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
a. Pengendalian aktivitas manusia yang berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti deforestasi dan penambangan ilegal.
b. Pendorongan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mitigasi dampak perubahan iklim

Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana di DIY di antaranya sebagai berikut :

1) Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan dan simulasi.
2) Menguatkan Tim Tanggap Darurat di tingkat desa/kelurahan, Kapanewon/Kemantren, hingga kabupaten/kota.
3) Penguatan kapasitas tata kelola dan sumber daya untuk penanganan darurat bencana gempa bumi berdasarkan rencana kontijensi.
4) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi.
5) Memastikan sistem peringatan dini berfungsi efektif dan menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.
6) Menambah jumlah sensor EWS untuk memperluas cakupan hingga seluruh Kapanewon/Kemantren
7) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi.
8) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi.
9) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah.

10) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui Perencanaan Kontijensi.
11) Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunung Api.
12) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi.

1) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(1) Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selama ini kalau ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani agar dampaknya tidak semakin besar;
(2) Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada;
(3) Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana;
(4) Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana dan belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana;
(5) Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya;
(6) Belum optimalnya pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY;
(7) Belum tersedianya Sistem Data dan informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi/terpadu;

(8) Masih kurangnya kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat serta relawan);
(9) Sarana dan prasarana PB belum semua memenuhi standar;
(10) Logistik bencana belum memenuhi kebutuhan PB sesuai standar;
(11) Penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan perlu disinergikan;
(12) Belum adanya Rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan;
(13) Belum adanya SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

b. Solusi

(1) Dibuat regulasi berupa Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
(2) Dibuat roadmap pembentukan dan pengembangan SPAB serta memastikan implementasinya dengan melibatkan seluruh stakeholder;
(3) Mengembangkan kapasitas Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk sebelumnya;
(4) Pengelolaan Sistem Peringatan Dini yang komprehensif baik yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana. Selain itu, mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana;
(5) Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di DIY;
(6) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan strategis keistimewaan dari potensi bencana;
(7) Menyediakan Sistem Data dan Informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi;

(8) Melakukan peningkatan kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat serta relawan);
(9) Memastikan Sarana Prasarana PB memenuhi standar;
(10) Memastikan logistik bencana memenuhi kebutuhan PB dan sesuai standar;
(11) Melakukan pelatihan dan latihan penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan;
(12) Membuat Rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan;
(13) Memenuhi SDM dan sarana prasarana penanganan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA

Indikator kinerja sasaran Pemda dalam RPJMD 2022–2027, pencapaiannya didukung oleh beberapa program Pemda. Evaluasi capaian indikator kinerja program Pemda DIY sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.31. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2025

No	Program Pemda	Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2024	Target 2025	Reali-sasi 2025	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2027	Kete-rangan
1	Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	Angka Indeks	0,428	0,415	0,426	97,35	0,407	Tidak tercapai
		Persentase Desa Mandiri	Desa	(90.56)	83,16	98	117,79	85,2	Tercapai
2	Program Pengembangan Sektor Unggulan - Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum		%	4,71	3,1	4,06	130,97	3,8	Tercapai
3	Program Pengembangan Kewirausahaan Rasio Kewirausahaan		%	3,49	3,80	3,51	92,37	4	Tidak tercapai
4	Program Stabilitas Lingkungan Sosial		Indeks	312	120,5	313	60,58	112,1	Tidak tercapai

No	Program Pemda	Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2024	Target 2025	Reali-sasi 2025	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2027	Kete-rangan
	Ekonomi Masyarakat - Crime Rate								
5	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	a. Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,70	15,76	15,78	100,13	15,78	Tercapai
		b. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	91,82	77,38	95,30	123,16	79,37	Tercapai
		c. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	91,82	60,52	94,78	156,61	62,50	Tercapai
6	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a.Angka Harapan Hidup	Tahun	75,36	75,21	75,64	100,57	75,27	Tercapai
		b.Prevalensi *Stunting*	%	17,40	12,90	17,40* (capaian tahun 2024, capaian 2025 belum rilis)	65,12	10,7	Capaian Tahun 2025 belum rilis (Capaian Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2025 Tidak Tercapai)
		c.Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak	%	96,83	98,802	97,20	98,38	100	Tidak tercapai
7	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	a.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,65	77,67	74,65 (Capaian Tahun 2024)	96,11	78,27	Tahun 2025 belum rilis, Tahun 2024 capaian 74,65% trend positif, di atas rata-rata nasional sebesar 76,90%

No	Program Pemda	Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2024	Target 2025	Reali-sasi 2025	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2027	Kete-rangan
		b.Total Fertility Rate (TFR)	angka	1,83	1,81-2,2	1,82	100	1,8-2,2	Tercapai
8	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (Regional, Nasional, Internasional)		buah	399	355	460	129,57	367	Tercapai
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	a.Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung	%	73,48	76,70	79,27	103,35	96,04	Tercapai
		b.Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	%	4,87	5,76	4,99	86,63	6	Tidak tercapai
10	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	a.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka Indeks	87,03	88,77	87,82	98,93	90,79	Tidak Tercapai
		b.Indeks Kematangan SPBE	skor	4,53	3,17	4,97	156,78	3,27	Tercapai
11	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	a.Indeks Kebebasan	Angka Indeks	88,74	74,91	88,74 (Capaian tahun 2024)	118,46	75,21	Tahun 2025 belum rilis, capaian tahun 2024 kategori Tinggi
		b.Indeks Kesetaraan	Angka Indeks	90,58	87,89	90,58 (Capaian tahun 2024)	103,06	88,19	Tahun 2025 belum rilis, capaian tahun 2024 kategori Tinggi
12	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup – Penurunan emisi GRK (ribu ton CO2eq)		Gg CO2eq	3.269	2.641	3.322,79	125,82	2.645	Tercapai
13	Program Keterpaduan	a.Perwujudan Pola Ruang	%	93,26	94,48	95,33	100,90	97	Tercapai

No	Program Pemda	Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2024	Target 2025	Reali-sasi 2025	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2027	Kete-rangan
	Perwujudan Pola Ruang								
		b.Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	%	29,60	27,50	33,26	120,95	34,07	Tercapai
14	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IDK)	Angka Indeks	0,72	0,76	0,76	100	0,85	Tercapai

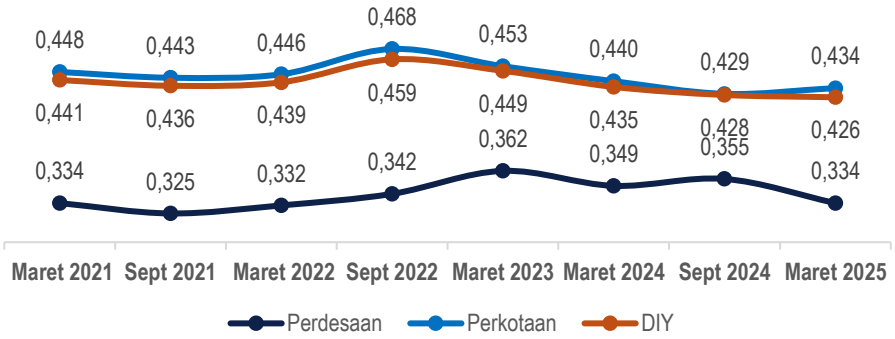
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator program pemda tahun 2025. Dari 24 indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja yang tidak memenuhi target atau realisasi di bawah 100%. Selanjutnya, terdapat 14 indikator kinerja yang capaiannya telah sesuai target, bahkan kinerja capaiannya telah melebihi 100%, kemudian 4 indikator masih menunggu rilis.

1. Pemerataan Kesejahteraan

1) Indeks Gini

Derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah dapat diukur melalui Indeks Gini atau Rasio Gini (Gini Ratio). Indikator ini menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk secara agregat dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai Indeks Gini atau semakin mendekati angka 1, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi semakin tinggi. Sebaliknya, kondisi pemerataan pendapatan yang sempurna, dengan seluruh penduduk memiliki tingkat pendapatan yang sama, tercermin dari nilai Indeks Gini sebesar 0. Sementara itu, ketimpangan yang sempurna, yaitu kondisi ketika seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu individu dan penduduk lainnya tidak memiliki

pendapatan, ditunjukkan oleh nilai Indeks Gini sebesar 1. Oleh karena itu, pencapaian nilai Indeks Gini yang mendekati 0 menjadi tujuan dalam upaya mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan antarpenduduk.



Gambar 3.14. Perkembangan Indeks Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan Maret 2021 – Maret 2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Berdasarkan perkembangan Indeks Gini periode Maret 2021 hingga Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY diukur dengan menggunakan indikator gini rasio sebesar 0,426. Angka ini turun 0,002 poin jika dibandingkan September 2024 yang besarnya 0,428. Angka gini rasio Maret 2025 turun sebesar 0,009 poin dibandingkan Maret 2024 (0,435). Secara umum, Indeks Gini DIY berada pada kisaran 0,426–0,459, yang mencerminkan tingkat ketimpangan menengah ke tinggi.

Pada awal periode pengamatan (Maret 2021–September 2022), Indeks Gini DIY mengalami peningkatan, dengan puncak ketimpangan terjadi pada September 2022 sebesar 0,459. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya Indeks Gini di wilayah perkotaan, yang mencapai 0,468, menunjukkan bahwa ketimpangan di DIY pada periode tersebut terutama didorong oleh dinamika distribusi pengeluaran di kawasan perkotaan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya dinikmati secara merata, khususnya di kelompok pendapatan bawah.

Selanjutnya, pada periode Maret 2023 hingga Maret 2025, Indeks Gini DIY menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten, dari 0,449 pada Maret 2023 menjadi 0,426 pada Maret 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk. Perbaikan tersebut terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, meskipun tingkat ketimpangan di perkotaan masih secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Indeks Gini wilayah perkotaan sepanjang periode pengamatan berada pada kisaran 0,429–0,468, dan selalu lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Gini Rasio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,434 atau naik dibanding gini rasio September 2024 yang sebesar 0,429. Jika dibandingkan gini rasio Maret 2024 yang sebesar 0,440, terjadi penurunan sebesar 0,006 poin. Hal ini mencerminkan masih lebarnya kesenjangan pengeluaran antar kelompok penduduk di kawasan perkotaan, yang umumnya dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap kesempatan kerja, tingkat pendapatan, serta konsentrasi aktivitas ekonomi. Sementara itu, gini rasio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,334. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan gini rasio September 2024 yang besarnya 0,355 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan gini rasio Maret 2024 yang sebesar 0,349.

Secara keseluruhan, perkembangan rasio Gini DIY menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan pengeluaran masih menjadi isu struktural, arah perubahannya dalam dua tahun terakhir cenderung positif. Ke depan, upaya pengendalian ketimpangan perlu difokuskan pada penguatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi perkotaan serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan agar penurunan Rasio Gini dapat berkelanjutan dan lebih merata.

Tabel 3.32. Target dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Gini Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Gini	Angka Indeks	0,428	0,415	0,426	97,35%

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Selain Indeks Gini, pengukuran ketimpangan distribusi pengeluaran juga dapat dilakukan melalui pendekatan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah sebagaimana digunakan oleh Bank Dunia. Berdasarkan indikator tersebut, tingkat ketimpangan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu ketimpangan tinggi apabila persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah berada di bawah 12%, ketimpangan sedang apabila berada pada kisaran 12 hingga 17%, serta ketimpangan rendah apabila persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah berada di atas 17%. Distribusi persentase pengeluaran penduduk DIY pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.33. Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY, Maret 2024–Maret 2025 (%)

Daerah	Periode	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas
Perkotaan	Maret 2024	15,77	32,26	51,97
	September 2024	16,46	32,03	51,51
	Maret 2025	15,80	33,46	50,74
Perdesaan	Maret 2024	20,06	35,50	44,44
	September 2024	19,84	35,66	44,50
	Maret 2025	20,64	36,59	42,77
Perkotaan dan Perdesaan	Maret 2024	16,05	32,62	51,33
	September 2024	16,48	32,44	51,08
	Maret 2025	16,34	33,53	50,13

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Indeks Gini nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375. Indeks Gini DIY tercatat lebih tinggi sebesar 0,051 poin dibandingkan Indeks Gini nasional. Tingginya Indeks Gini di DIY mengindikasikan belum meratanya distribusi pendapatan antarkelompok penduduk. Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor-sektor dengan tingkat produktivitas dan upah yang beragam, sehingga menciptakan kesenjangan pendapatan yang relatif lebar. Selain itu, konsentrasi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja formal bernilai tambah tinggi masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara sebagian wilayah lainnya didominasi oleh sektor informal dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Dominasi kelompok ekonomi atas dalam struktur pengeluaran masyarakat juga mencerminkan ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi di daerah.

Faktor keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, keterampilan kerja, serta kesempatan kerja yang layak turut memperkuat ketimpangan antar kelompok penduduk. Sejalan dengan pandangan Bank Dunia, tingginya ketimpangan juga dipengaruhi oleh rendahnya mobilitas ekonomi, tingginya konsentrasi kekayaan, serta ketahanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah yang masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, upaya penurunan ketimpangan di DIY perlu diarahkan pada penguatan pemerataan akses pendidikan dan keterampilan, perluasan kesempatan kerja produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata antarwilayah.

(2) Solusi

Sebagai upaya menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di DIY, kebijakan pembangunan perlu diarahkan secara lebih inklusif dan berkeadilan. Strategi yang ditempuh antara lain melalui peningkatan pemerataan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan angkatan kerja muda. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang produktif dan berpenghasilan layak.

Selain itu, penguatan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu terus didorong, terutama di wilayah perdesaan dan kawasan pinggiran. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, sekaligus memperluas distribusi aktivitas ekonomi.

Dari sisi perlindungan sosial, optimalisasi program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran serta penguatan ketahanan ekonomi kelompok rentan perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak guncangan ekonomi. di samping itu, peningkatan efektivitas kebijakan fiskal daerah melalui belanja yang lebih berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah, serta sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, menjadi kunci dalam mendorong penurunan ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan di DIY.

2) Persentase Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan, yang dirancang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga dimensi tersebut berfungsi sebagai pilar yang saling mendukung dalam menjaga dan mengoptimalkan potensi serta kapasitas desa guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada pemerataan dan keadilan dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi dasar dalam mendorong proses dan pencapaian tujuan pembangunan desa.

IDM digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan dan kemandirian desa berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang didukung oleh pemanfaatan Dana Desa serta peran Pendamping Desa. IDM juga berfungsi sebagai instrumen penentuan ketepatan intervensi kebijakan pembangunan pemerintah agar selaras dengan tingkat partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah desa, termasuk tipologi desa dan modal sosial.

Selain itu, status kemajuan dan kemandirian desa dimanfaatkan sebagai instrumen koordinasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, serta sebagai dasar pemetaan tipologi desa dan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan data nasional yang bersumber dari idm.kemendesa.go.id, tahun 2025 capaian Indeks Desa DIY secara nasional menempati peringkat pertama dari 37 provinsi

dengan skor sebesar 0,8622 dan berstatus Desa Mandiri, dibandingkan tahun sebelumnya yang menempati posisi kedua dengan skor 0,8567 di bawah Provinsi Bali.

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Desa Mandiri	Desa	(90.56%)	83,16%	98%	117,79%

Sumber: DPMKKPS DIY, 2025

Pada Tahun 2025, Pemda DIY menetapkan target persentase Desa Mandiri sebesar 83,16%. Berdasarkan hasil capaian kinerja, persentase Desa Mandiri pada Tahun 2025 mencapai 98% atau sebanyak 384 desa, sehingga realisasi kinerja melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 117,79%. Meskipun demikian, masih terdapat 8 desa yang berada pada kategori Desa Maju.

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- Masih terdapat 8 Kalurahan dengan kategori maju

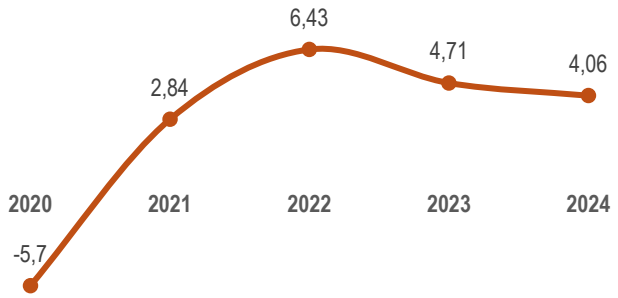
(2) Solusi

a) Penguatan proses verifikasi dan validasi data secara berjenjang. Pemda DIY mendorong koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah kalurahan guna memastikan ketepatan penginputan indikator IDM sesuai kondisi riil di lapangan.
b) Peningkatan kapasitas aparatur kalurahan dan pendamping desa dalam pengelolaan serta pemutakhiran data IDM terus dilakukan, disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala, agar capaian status desa dapat terdokumentasi secara

akurat dan faktual untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan desa yang tepat sasaran.

2. Program Pengembangan Sektor Unggulan - Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum

Tiga sektor atau lapangan usaha penyumbang pangsa terbesar secara relatif dalam PDRB DIY selama beberapa tahun terakhir adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada periode 2020–2024, pertumbuhan tiga sektor atau lapangan usaha tersebut mengalami dinamika dengan pertumbuhan rata-rata terendah di tahun 2020 yaitu -5,70% terdampak Pandemi Covid-19, namun kemudian meningkat sampai tahun 2022 menjadi 6,43%. Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhannya menurun menjadi 4,71% dan kemudian menurun kembali di tahun 2024 menjadi 4,06%. Adapun pertumbuhan masing-masing lapangan usaha adalah 0,08% (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), 3,63% (Industri Pengolahan) dan 8,46% (Akomodasi dan Makan Minum).



Gambar 3.15. Rata-rata Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB DIY tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

Tabel 3.35. Target dan Capaian Indikator Program Pertumbuhan Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi dan Makan Minum Dalam PDRB DIY Tahun 2024

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2023	2024		
			Target	Reali-sasi	% Realisasi
Pertumbuhan Sektor Pertanian, industri pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum	%	4,71%	3,1%	4,06%	130,97

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

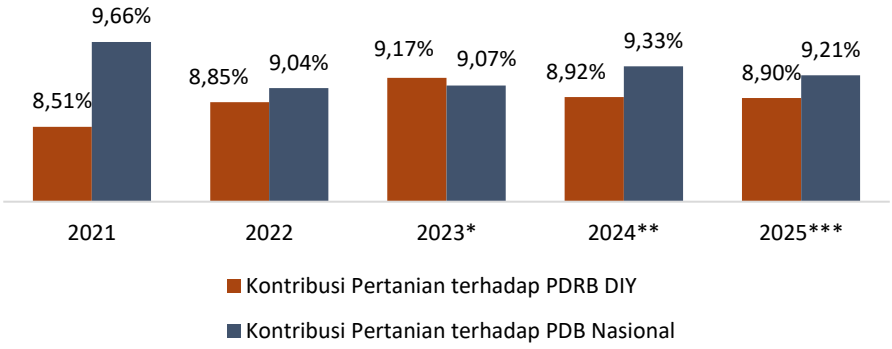
Capaian pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum di tahun 2024 adalah 4,06% yang mencapai sekitar 130,97% dari target sebesar 3,1%. Ketercapaian yang melebihi target tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum yang cukup tinggi yaitu sekitar 8,46% yang meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,72%. Penurunan pertumbuhan juga terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan dengan penurunan sebesar 0,63 poin. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga menurun signifikan dari 1,18% di tahun 2023 menjadi hanya 0,08% di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh kendala cuaca yang menyebabkan masa tanam terganggu. Keadaan-keadaan tersebut mendorong capaian pertumbuhan tiga sektor dominan tersebut di tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

1) Sektor Pertanian

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha mencerminkan struktur perekonomian daerah serta menunjukkan besarnya peranan masing-masing kategori ekonomi dalam membentuk kinerja ekonomi suatu wilayah. Kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi relatif besar terhadap PDRB dapat diidentifikasi sebagai basis perekonomian daerah, karena berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta stabilitas ekonomi wilayah.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2025 kembali mencatatkan kontribusi dua digit dan masuk dalam lima besar kontributor utama PDRB DIY. Secara lebih rinci, subkategori pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan memberikan kontribusi sebesar 8,90% terhadap PDRB pada tahun 2025. Capaian ini menegaskan bahwa sektor pertanian tetap memiliki peran penting dalam struktur perekonomian daerah.

Selain kontribusinya yang tetap stabil terhadap PDRB DIY dan PDB nasional dalam lima tahun terakhir (2021–2025), sektor pertanian terus membuktikan ketangguhan dan daya adaptasinya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk pascapandemi Covid-19. Ketika banyak sektor lain sempat mengalami kontraksi dan penurunan penyerapan tenaga kerja, pertanian tidak hanya bertahan, tetapi juga berperan sebagai penyangga sosial ekonomi yang menyerap limpahan tenaga kerja terdampak PHK. Konsistensi kontribusinya yang terjaga di atas 8,5% terhadap PDRB DIY dan sekitar 9% terhadap PDB nasional menunjukkan bahwa pertanian bukan hanya sektor andalan saat krisis, tetapi juga pilar keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.



Gambar 3.16. Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2021–2025

*Ket.: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Sangat Sangat Sementara/Angka Prediksi*
Sumber: BPS dan BPS Provinsi DIY, 2025

Pada gambar di atas terlihat bahwa kontribusi subkategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan terhadap PDRB DIY lebih rendah daripada kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Hal ini tidak mengurangkan peran vital sektor pertanian bagi perekonomian DIY, yang tetap menjadi pilar ketahanan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

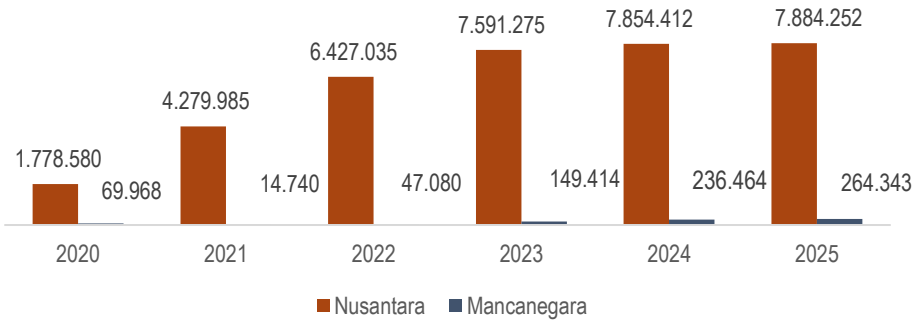
Jumlah akomodasi pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari jumlah hotel bintang dan hotel non bintang atau akomodasi lainnya. Untuk hotel bintang, pada tahun 2024 terdapat 207 hotel bintang dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 217 hotel bintang, bertambah sebanyak 10 hotel bintang. Peningkatan jumlah hotel bintang terjadi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah hotel non bintang atau akomodasi lainnya juga terjadi peningkatan, pada tahun 2024 jumlah hotel non bintang atau akomodasi lainnya sebesar 1.793 hotel, sedangkan Pada Tahun 2025 mencapai 1.853 hotel, bertambah 60 hotel non bintang atau akomodasi lainnya. Pertambahan hotel non bintang atau akomodasi lainnya terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di DIY, untuk penambahan yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Sleman dengan penambahan 30 hotel non bintang atau akomodasi lainnya.

Tabel 3.36. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2024-2025

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang/Akom Lainnya		Jumlah Total	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Kulon Progo	6	6	59	60	65	66
Bantul	3	3	382	400	385	403
Gunungkidul	4	5	152	167	156	172
Sleman	78	82	610	640	688	722
Yogyakarta	116	121	590	586	706	707
Jumlah	**207**	**217**	**1.793**	**1.853**	**2.000**	**2.070**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 dan 2025

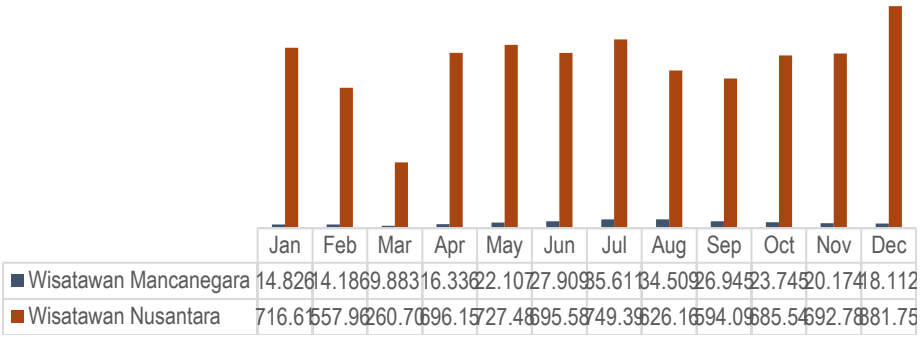
Pada tahun 2025, wisatawan mancanegara yang menginap di jasa akomodasi seperti hotel dan penginapan lainnya mencapai 264.343 wisatawan, meningkat sebesar 11,8% dari tahun 2024. Sedangkan untuk wisatawan nusantara yang menggunakan jasa akomodasi pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2024.



Gambar 3.17. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di DIY 2020-2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2025 memiliki titik tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah kunjungan mencapai 889.871 wisatawan. Selain di bulan Desember, kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami kenaikan pada periode bulan April hingga bulan Juli yang mencapai 2.868.617 wisatawan dari keseluruhan kunjungan wisatawan nusantara di sepanjang tahun 2025. Kunjungan wisatawan nusantara sangat kuat dipengaruhi oleh liburan sekolah maupun libur cuti bersama yang sering terjadi pada periode bulan Mei hingga Juli tahun 2025. Puncak kunjungan wisatawan mancanegara terjadi pada liburan musim panas di periode bulan Mei hingga bulan September, dengan total kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 170.826 wisatawan.

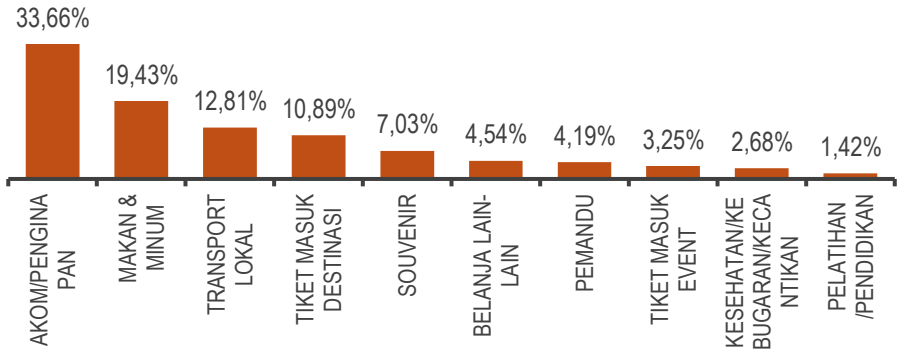


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Wisatawan Mancanegara	14.826	14.186	9.883	16.336	22.107	27.909	35.611	34.509	26.945	23.745	20.174	18.112
Wisatawan Nusantara	716.61	557.96	260.70	696.15	727.48	695.58	749.39	626.16	594.09	685.54	692.78	881.75

Gambar 3.18. Data Wisatawan Menginap di Akomodasi per bulan Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Rata-rata belanja wisatawan mancanegara pada tahun 2025 yang berkunjung ke DIY mencapai USD$ 597,10 per kunjungan. Struktur belanja wisatawan mancanegara yang tertinggi dicapai oleh belanja akomodasi/penginapan sebesar 33,66% dan tertinggi kedua dicapai oleh belanja makan dan minum sebesar 19,43%, sedangkan belanja transportasi lokal mencapai 12,81%.

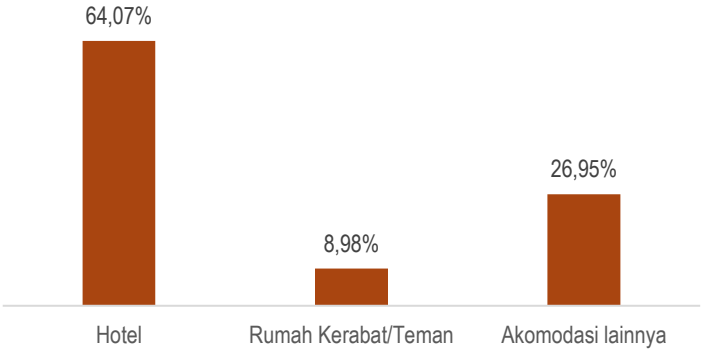


Gambar 3.19. Struktur Belanja Wisatawan Mancanegara di DIY Tahun 2025

Sumber: Kajian Analisis Belanja Wisatawan 2024, Dinas Pariwisata DIY, 2025

Pilihan utama dari wisatawan mancanegara dalam memilih akomodasi/penginapan di DIY menunjukkan bahwa hotel menjadi pilihan utama dengan proporsi 64,07%. Dominasi ini mencerminkan preferensi wisatawan internasional terhadap

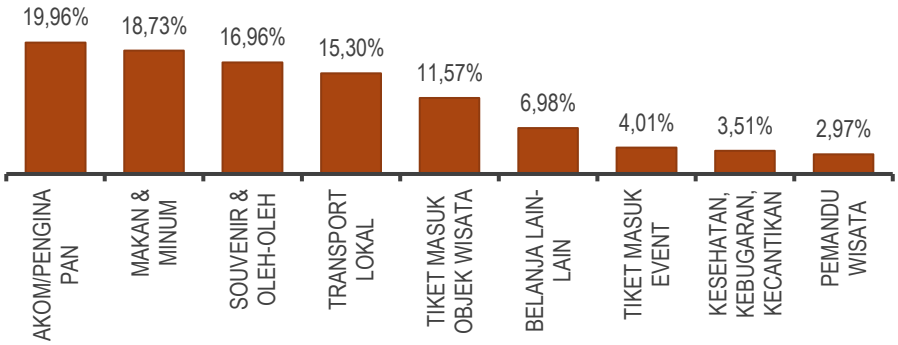
kenyamanan, fasilitas yang lengkap, dan pelayanan profesional yang biasanya ditawarkan oleh hotel berbintang. Akomodasi lainnya mencatatkan 26,95%, menandakan adanya segmen wisatawan yang lebih memilih penginapan dengan biaya lebih rendah namun tetap menawarkan kenyamanan yang memadai.



Gambar 3.20. Persentase jenis Akomodasi yang Digunakan Wisatawan Mancanegara ke DIY Tahun 2025

Sumber: Kajian Analisis Belanja Wisatawan 2025, Dinas Pariwisata DIY, 2025

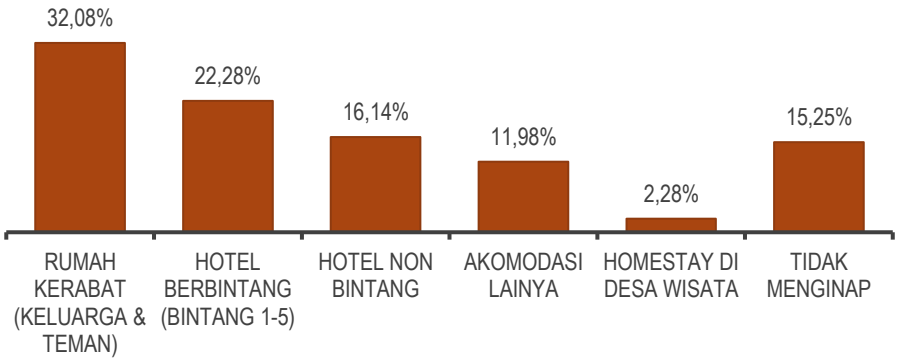
Rata-rata belanja wisatawan nusantara pada tahun 2025 yang berkunjung ke DIY mencapai Rp2.500.334,90 per kunjungan. Struktur belanja wisatawan nusantara tertinggi dicapai oleh belanja akomodasi/penginapan sebesar 19,96% dan tertinggi kedua dicapai oleh belanja makanan dan minuman sebesar 18,73%, sedangkan belanja oleh-oleh/souvenir mencapai 16,96%. Terdapat perbedaan dengan besaran persentase per komposisi belanja pada tahun 2024, perbedaan terbesar yaitu pada belanja akomodasi/penginapan pada tahun 2024 mencapai 32,64% sedangkan pada tahun 2025 belanja akomodasi/penginapan menurun menjadi 19,96%, namun komposisi untuk belanja yang lain menjadi meningkat.



Gambar 3.21. Struktur Belanja Wisatawan Nusantara di DIY Tahun 2025

Sumber: Kajian Analisis Belanja Wisatawan 2024, Dinas Pariwisata DIY, 2025

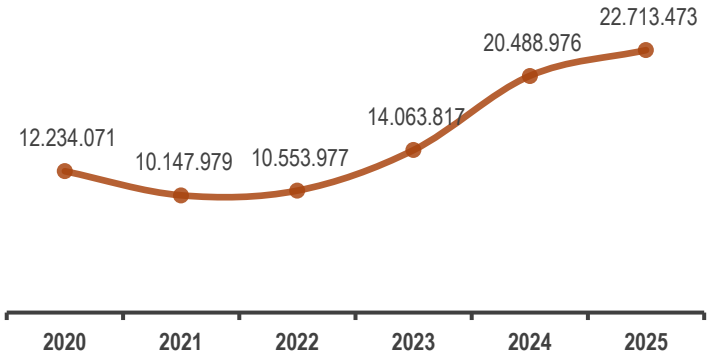
Perubahan komposisi belanja wisatawan nusantara pada tahun 2025 juga mempengaruhi pola wisatawan nusantara di dalam menentukan tempat untuk menginap. Pada tahun 2025 wisatawan nusantara yang menginap lebih banyak pada di rumah kerabat (keluarga dan teman), sedangkan menginap di hotel bintang berada pada posisi kedua dengan perolehan 22,28%, menurun jika dibandingkan dengan posisi 2024 yang mencapai 47,06%. Secara keseluruhan wisatawan nusantara lebih memilih menginap di akomodasi/penginapan (hotel bintang, hotel non bintang, akomodasi lainnya dan *homestay*) yang tersebar di DIY dengan perolehan sebesar 52,68%.



Gambar 3.22. Persentase jenis Akomodasi yang Digunakan Wisatawan Nusantara ke DIY Tahun 2025

Sumber: Kajian Analisis Belanja Wisatawan 2025, Dinas Pariwisata DIY, 2025

PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2025 (harga berlaku) mencapai Rp22.713.473 (juta rupiah), meningkat dari tahun 2024 yang mencapai Rp20.488.976 (juta rupiah) atau meningkat sebesar Rp2.224.497 (juta rupiah). Capaian PDRB sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2025 adalah capaian tertinggi dalam kurun waktu 2020–2025.



Gambar 3.23. PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2020–2025 (Harga Berlaku–Juta Rupiah)

*Keterangan**: Data sementara*
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Perkembangan PDRB tertinggi untuk lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 dicapai pada triwulan keempat yang mencapai Rp6.440.635 (juta rupiah). Peningkatan PDRB di triwulan keempat didorong oleh liburan Natal dan Tahun Baru. Titik tertinggi kedua dicapai pada triwulan kedua terutama pada saat aktivitas libur Idul Fitri yang dapat meningkatkan aktivitas pariwisata Pada Tahun 2025.

Tabel 3.37. PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Jumlah Wisatawan Tahun 2024

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	5.425.119	5.589.511	5.258.208	6.440.635	**22.713.473**

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Akomodasi/Penginapan	1.574.186	2.185.570	2.066.722	2.322.117	**8.148.595**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

3. Program Pengembangan Kewirausahaan - Rasio Kewirausahaan

1) Pendukung Ketercapaian Sasaran

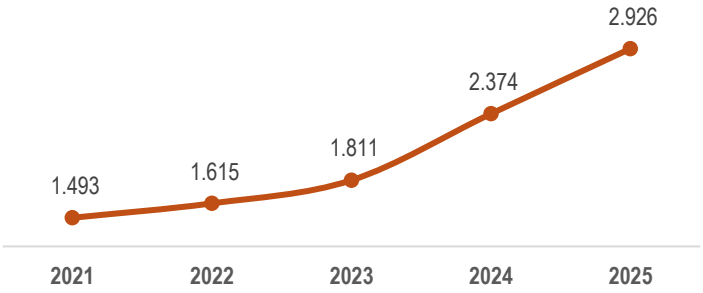
Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Pemda DIY terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha daerah. Rasio Kewirausahaan diukur dengan membandingkan populasi penduduk yang melakukan kegiatan berusaha (dengan bantuan buruh tetap/dibayar) terhadap total angkatan kerja berdasarkan data SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional). Pendekatan ini menekankan pentingnya peran angkatan kerja sebagai motor penggerak ekonomi. Mengingat struktur demografi DIY yang didominasi oleh usia produktif, peningkatan jumlah wirausaha menjadi kunci untuk menyerap tenaga kerja secara mandiri dan berkelanjutan untuk berperan dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2025, indikator Rasio Kewirausahaan terealisasi 3,51% dari target yang ditetapkan 3,80%, atau dengan persentase 92,37%. Capaian angka Rasio Kewirausahaan pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,8%. Salah satu penyebab ketidaktercapaian target ini adalah penambahan jumlah wirausaha baru di DIY belum mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan lulusan baru dari jenjang SMA, SMK, maupun Perguruan Tinggi; pada semester II tahun 2025. Fenomena *wait-and-see* ditengarai masih mendominasi persepsi lulusan SMA/SMK/Perguruan Tinggi, dimana mayoritas lulusan masih berorientasi mencari lapangan kerja (*job seeker*) dibandingkan menciptakan lapangan kerja (*job creator*) atau merintis sebagai wirausaha.

Tabel 3.43. Target dan Realisasi Indikator Rasio Kewirausahaan

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Rasio Kewirausahaan	%	3,49	3,80	3,51	92,37

Sumber: BPS Provinsi DIY

Berdasarkan tabel indikator kinerja, Rasio Kewirausahaan di DIY menunjukkan adanya peningkatan realisasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 0,02%, dari 3,49% menjadi 3,51%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan upaya Pemda DIY dalam mendorong semangat kewirausahaan secara berkelanjutan. Meskipun realisasi Rasio Kewirausahaan tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, capaian ini tetap menunjukkan tren positif dan menegaskan bahwa upaya Pemda DIY dalam mendorong kewirausahaan telah dilakukan secara maksimal dan konsisten dengan mengoptimalkan potensi spirit *entrepreneurship* melalui berbagai program dan fasilitasi yang merangsang pengembangan ekosistem kewirausahaan. Rangsangan itu, antara lain adalah: mendukung pelaksanaan inkubasi bisnis, penumbuhan Desa Preneur, pengembangan Saka Wirausaha, promosi produk wirausaha, serta pemberian dukungan pemasaran berupa bantuan bebas ongkos kirim (*free ongkir*) melalui Markethub SiBakul. Seluruh inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan penumbuhan wirausaha baru di DIY. Pada tahun 2025 ini ketercapaian peningkatan/penambahan jumlah wirausaha baru terealisasi 552 orang dari target yang ditetapkan 550 orang, atau dengan persentase 100,36%.



Gambar 3.24. Perkembangan WUB Tahun 2021–2025

Sumber: Diskop UKM DIY, 2025

Pendukung Ketercapaian Sasaran

Aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian penumbuhan kewirausahaan.

1) Penumbuhan ekosistem Wirausaha Baru Multi Sektor

Penguatan ekosistem kewirausahaan Pada Tahun 2025 diarahkan pada integrasi lintas sektor yang berbasis inovasi dan keberlanjutan, guna menciptakan wirausaha baru yang tidak hanya produktif tetapi juga tangguh menghadapi dinamika pasar. Sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata dengan menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru pelaku bisnis pariwisata; Sektor Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menumbuhkan *mindset* wirausaha pemula bagi siswa SMA maupun SMK; Sektor Perindustrian yang dikoordinir melalui Disperindag DIY dalam rangka mengembangkan inkubasi bagi IKM berbasis fashion; Kementerian Kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan yang penuh dukungan dalam pembinaan bagi wirausaha pelaku seni budaya dari hulu hingga hilir; Kementerian UKM dan Dinas Koperasi UKM dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, inkubasi (*e-hub*) dan pendampingan dalam menumbuhkan semangat berwirausaha dan memastikan

wirausaha pemula memiliki pondasi manajerial yang kuat. Melalui kolaborasi multisektor ini, Pemda DIY berkomitmen menciptakan lingkungan ekonomi inklusif yang mendukung penguatan ekosistem berwirausaha melalui kolaborasi dalam tata kelola bisnis wirausaha dan percepatan transformasi digital, sehingga wirausaha baru yang dilahirkan memiliki daya saing dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata, termasuk didalamnya dalam pengembangan kawasan secara merata. Penguatan dari aspek kolaboratif lintas sektor dan kewenangan inilah, yang mengungkit capaian rasio kewirausahaan DIY pada tahun 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

2) Pengembangan Desa Preneur

Pembinaan Desa Preneur dilakukan melalui mekanisme pendampingan bagi kelompok usaha warga desa untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya. Kegiatan pembinaan ini terwujud dalam bentuk pendidikan, pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan yang berfokus pada peningkatan *soft skill* para pelaku usaha di perdesaan. Tujuan dari pembinaan dan pengembangan Desa Preneur selain meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pengembangan potensi usaha ekonomi, penguatan produk unggulan, penguatan branding produk, dan melatih ketahanan bisnis.

Pada tahun 2025, Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Budaya dilakukan di 14 Desa diantaranya :

a. Sambirejo, Prambanan, Sleman
b. Guwosari, Pajangan, Bantul
c. Terong, Dlingo, Bantul
d. Girisuko, Panggang, Gunungkidul
e. Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo

f. Purwobinangun, Pakem, Sleman
g. Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul
h. Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul
i. Melikan, Rongkop, Gunungkidul
j. Semugih, Rongkop, Gunungkidul
k. Sidoluhur, Godean, Sleman
l. Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo
m. Kelor, Karangmojo, Gunungkidul
n. Argomulyo, Cangkringan, Sleman

Selain itu, pembinaan Desa Preneur juga diarahkan untuk meningkatkan semangat kewirausahaan serta kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM di perdesaan wilayah DIY.

3) Inkubasi Bisnis

Pemda DIY, melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY, secara konsisten menjalankan program inkubasi bisnis sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini dan memperkuat ekonomi lokal. Program ini mencakup berbagai kelompok sasaran, seperti:

a. Wirausaha muda kreatif melalui Inkubator Bisnis dengan peserta terpilih melalui inkubasi sebanyak 10 Wira Usaha Baru (WUB).
b. Calon wirausaha dalam rentang kelompok usia muda SMA/SMK melalui Inkubasi Wirausaha Usia SMA / SMK Berbasis Pengentasan Kemiskinan dengan peserta 35 WUB.
c. Calon Wirausaha untuk Pramuka usia Pandega melalui Inkubasi BISNIS SAKA Wirausaha dengan peserta 30 WUB.
d. Menyasar pada pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengelolaan bisnis koperasi yang modern dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rangkaian inkubasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk tangguh menjadi wirausaha, menumbuhkan produk ekonomi lokal kreatif unggulan, memberikan nilai tambah pada produk lokal, menguatkan pemasaran, mengoptimalkan kemitraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mempersempit jurang ketimpangan ekonomi di DIY.

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(1) Pola pikir berbisnis/wirausaha masih dimaknai secara beragam, dan beberapa menjadi alternatif terakhir dalam mencari pekerjaan sehingga hal itu berdampak pada penumbuhan wirausaha baru belum optimal
(2) Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di wilayah DIY, terutama di area perdesaan. Potensi sumber daya ekonomi desa belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal

b. Solusi

(1) Upaya memberikan pembinaan dalam membangun mindset berwirausaha bagi wirausaha pemula secara terpadu dan berkelanjutan, melalui inkubasi yang terarah dan berkelanjutan.
(2) Pendidikan dan pelatihan berjenjang untuk pengembangan desa, melalui Desa Preneur.
(3) Pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha mapan berdasarkan kurikulum SiBakul secara terpadu dan berkelanjutan.

4. Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat - *Crime Rate*

Kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di DIY secara umum berada dalam kondisi relatif kondusif. Berdasarkan data *crime*

rate, pada periode 2022–2025 terjadi dinamika tingkat kriminalitas yang menunjukkan adanya tantangan sekaligus hasil dari upaya pengendalian keamanan di wilayah DIY.

Pada tahun 2022, *crime rate* DIY tercatat sebesar 133,10, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 325,00. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas pelaporan kasus kriminal, termasuk kejahatan konvensional dan penyalahgunaan narkoba, serta mobilitas penduduk yang tinggi sebagai dampak pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi pasca pandemi. Selanjutnya, pada tahun 2024 *crime rate* menurun menjadi 312,00, dan pada tahun 2025 relatif stabil di angka 313,00.

Stabilisasi *crime rate* pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai langkah penguatan stabilitas keamanan mulai memberikan dampak positif, antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat berkontribusi dalam menciptakan rasa aman yang mendukung keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat DIY.

Tabel 3.38. *Crime Rate* DIY Tahun 2022-2025

No.	Wilayah	2022	2023	2024	2025
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	133,10	325,00	312,00	**313,00**

Sumber: Dataku, 2025

1) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(1) Terdapat perbedaan karakteristik dan tingkat kriminalitas di masing-masing kabupaten/kota, sehingga penanganan belum sepenuhnya merata.
(2) DIY sebagai kota pelajar dan tujuan wisata meningkatkan potensi terjadinya tindak kriminal, khususnya di kawasan padat aktivitas.

(3) Meningkatnya jumlah gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan ODGJ di ruang publik menunjukkan masih perlunya penguatan pelaksanaan perda dan koordinasi lintas perangkat daerah. Keberadaan kelompok rentan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman, menurunkan kenyamanan masyarakat, serta berdampak pada citra daerah sebagai destinasi pendidikan dan pariwisata.

(4) Fenomena kejahatan jalanan dan kenakalan remaja di DIY berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat dan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan urusan ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, khususnya pada waktu dan wilayah rawan gangguan keamanan..

(5) Masih ditemukannya peredaran rokok non-cukai di wilayah DIY mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada ketertiban umum dan potensi kerugian daerah.

(6) Pelanggaran perizinan reklame, termasuk pemasangan tanpa izin, tidak sesuai lokasi, ukuran, atau masa berlaku, masih menjadi masalah yang mengganggu ketertiban dan tata ruang di DIY. Pelanggaran ini dapat membahayakan keselamatan publik, mengganggu estetika kota, serta melanggar kawasan strategis dan cagar budaya.

(7) Krisis tata kelola sampah di DIY menimbulkan dampak langsung pada ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Penumpukan sampah di depo dan ruang publik menimbulkan bau, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta keresahan warga, terutama di permukiman dan kawasan wisata.

b. Solusi

(1) Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait dalam pencegahan dan penanganan tindak kriminal.
(2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan, edukasi hukum, dan program pencegahan berbasis komunitas.
(3) Pemda DIY melakukan penanganan gelandangan dan pengemis dan ODGJ dilakuakan penertiban terpadu secara berkala oleh Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dalam mengantisipasi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, Satpol PP melakukan pengamanan lokasi strategis dan fasilitas umum dari aktivitas yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
(4) Pemda DIY melalui Satpol PP berperan dalam mendukung pengendalian gangguan ketertiban umum melalui patroli dengan sinergitas antarinstansi dengan Kepolisian, TNI, dan perangkat daerah lain, pengawasan jam malam, serta kegiatan pencegahan di ruang publik. Satpol PP melakukan giat patroli malam pada pukul 23.00 WIB s/d 04.00 WIB untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan/*klithih* dan kenakalan remaja di DIY.
(5) Pemda DIY dalam meminimalisir perendaran rokok non cukai, melalui Satpol PP Berpartisipasi aktif dalam operasi bersama Bea Cukai dan kepolisian untuk penindakan rokok non cukai.
(6) Pemda DIY melakukan pengawasan rutin, penertiban reklame ilegal, dan penerapan sanksi administratif sesuai peraturan daerah melaui Satpol PP. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha agar memahami ketentuan reklame dan menaati tata ruang, sehingga estetika, keselamatan, dan ketertiban wilayah terjaga.

(7) Pemda DIY dalam pengawasan dan penegakan perda melalui peran Satpol PP terkait ketertiban dan kebersihan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Penanganan sampah dilakukan melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, edukasi masyarakat, penguatan pengelolaan berbasis komunitas, serta inovasi pengolahan sampah untuk jangka menengah dan panjang.

5. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

1) Harapan Lama Sekolah

Terpenuhinya pelaksanaan Wajib Belajar di Indonesia salah satunya diukur menggunakan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka HLS sesuai definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lamanya sekolah dalam perhitungan tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dihitung dengan basis data penduduk berusia 7 tahun ke atas sehingga akan menunjukkan peluang anak berusia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal.

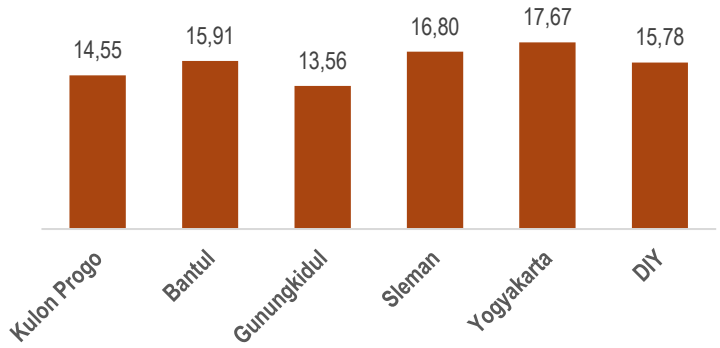
Capaian Angka HLS DIY pada tahun 2025 adalah 15,78 tahun. Capaian ini mengalami kenaikan dari capaian tahun 2024 yaitu 15,70 tahun. Berikut adalah target dan capaian indikator Angka HLS.

Tabel 3.39. Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,70	15,76	15,78	100,13	15,78	100

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Capaian Angka HLS DIY Pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 15,76 tahun. Capaian tahun 2025 juga telah sesuai dengan target akhir RPJMD 2027 yaitu 15,78 tahun. Meski demikian capaian Angka HLS dalam DIY masih relatif bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lain dengan Kota Yogyakarta memiliki capaian HLS tertinggi dan Kabupaten Gunungkidul memiliki capaian HLS terendah sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.

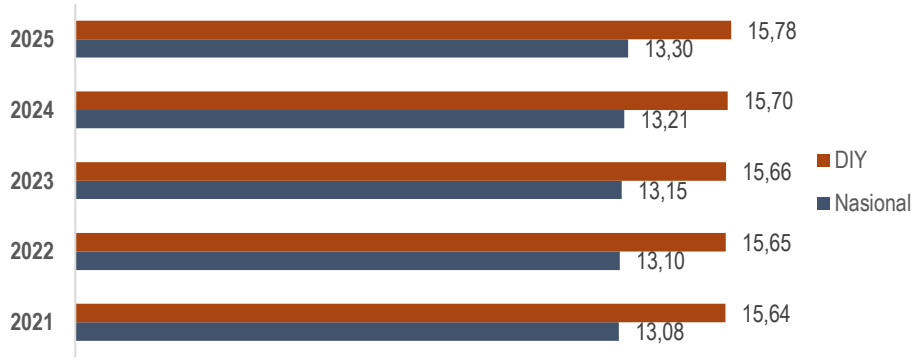


Gambar 3.25. Capaian Angka HLS Kabupaten/Kota dan DIY Tahun 2025 (Dalam Satuan Tahun)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Walaupun capaian Angka HLS di dalam DIY bervariasi, namun capaian seluruh kabupaten/kota di DIY telah melampaui capaian Angka HLS nasional tahun 2025 sebesar 13,30 tahun. Secara umum hal ini menunjukkan adanya dukungan besar untuk partisipasi pendidikan di DIY hingga anak dapat menuntaskan jenjang pendidikan menengah.

Secara nasional, capaian Angka HLS DIY pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2025 berada di atas rata-rata nasional sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.26. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Nasional Tahun 2021–2025 (dalam Satuan Tahun)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Dukungan terhadap pencapaian Angka HLS DIY telah diupayakan oleh Pemda melalui penyaluran bantuan operasional sekolah kepada satuan pendidikan jenjang menengah negeri dan swasta yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi sarana prasarana pembelajaran guna mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa juga diberikan kepada siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu guna mengurangi risiko terjadinya putus sekolah. Bagi anak-anak putus sekolah, Pemda DIY memberikan bantuan pendidikan guna memastikan para anak putus sekolah bisa kembali ke bangku sekolah dan menuntaskan pendidikan menengah.

2) Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional, pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemetaan mutu pendidikan salah satunya dilakukan melalui Asesmen Nasional, yaitu evaluasi sistem pendidikan pada jenjang pendidikan dasar,

menengah, dan khusus. Asesmen Nasional bertujuan mengukur hasil belajar siswa, baik secara kognitif, nonkognitif, sekaligus mengukur kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Salah satu unsur pengukuran hasil belajar kognitif adalah pengukuran pada kompetensi literasi peserta didik. Pengukuran kompetensi literasi disebut dengan Asesmen Kompetensi Minimum Literasi. Melalui pengukuran kompetensi literasi, diharapkan bisa diketahui kemampuan peserta didik untuk menggunakan, memahami, merefleksi, dan berinteraksi dengan teks tulis agar mampu meraih tujuan personal, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, serta berpartisipasi secara optimal sebagai warga masyarakat.

Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Minimum Literasi berlaku bagi seluruh satuan pendidikan jenjang menengah di DIY dan hasilnya dirincikan dalam Rapor Pendidikan. Rincian Rapor Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.40. Capaian Kompetensi Literasi Tahun 2025

Capaian Kompetensi Literasi	SMA	SMK	Total
Baik	158	156	**314**
Sedang	10	41	**51**
Kurang	4	7	**11**
Tidak Tersedia	4	3	**7**
Jumlah	**176**	**207**	**383**

Sumber: Rapor Pendidikan DIY, Kemendikdasmen RI, 2025

Pemenuhan kompetensi minimum ditunjukkan dengan kategori “Baik” dan “Sedang”. Satuan pendidikan yang mencapai kompetensi literasi dengan kategori “Baik” dan “Sedang” adalah satuan pendidikan yang telah memenuhi kompetensi minimum literasi. Berdasarkan Tabel 1, perhitungan capaian indikator Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum tahun 2025 adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah SMA dan SMK berstatus “Baik” dan “Sedang”}}{\text{Jumlah total SMA dan SMK}} \text{ x100\%}$$

$$\text{Persentase} = \frac{314+51}{383} \text{ x100\%=95,30}$$

Tabel 3.41. Target dan Capaian Indikator Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	tahun	91,82	77,38	95,30	123,16	79,37	120,07

Sumber: Rapor Pendidikan DIY, Kemendikdasmen RI, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum, terdapat 95,30% satuan pendidikan jenjang menengah di DIY yang telah memenuhi kompetensi minimum dalam nilai asesmen literasi. Capaian persentase ini melampaui target tahun 2025 sebesar 77,38% dan target RPJMD 2027 sebesar 79,37%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target tahun 2025 antara lain dukungan terhadap penyediaan bahan bacaan bermutu di sekolah baik fiksi maupun nonfiksi serta penyelenggaraan berbagai kegiatan literasi di sekolah dalam bentuk proyek literasi maupun pembiasaan rutin membaca setiap harinya bagi peserta didik. Penguatan kompetensi pendidik pun telah dilaksanakan agar para pendidik mampu memperkaya bahan ajar literasi dan meningkatkan kompetensi peserta didik dalam memahami dan menginterpretasikan teks bacaan.

3) Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum

Pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu tujuan utama pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional. Asesmen Nasional sebagai bentuk pemetaan mutu dan evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan khusus. Asesmen Nasional ditujukan untuk mengukur hasil belajar kognitif, nonkognitif, dan kualitas lingkungan belajar satuan pendidikan. Salah satu unsur pengukuran hasil belajar kognitif adalah kompetensi numerasi peserta didik. Pengukuran kompetensi numerasi dikenal dengan Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi.

Berdasarkan definisi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang merupakan penyelenggara *Programme for International Student Assessment* (PISA), numerasi atau literasi matematika adalah kemampuan individu untuk bernalar secara matematis serta merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam beragam konteks dunia nyata. OECD menggambarkan bahwa penalaran tersebut berkaitan dengan tiga proses pada literasi matematika, yaitu merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan.

Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi ditujukan bagi seluruh satuan pendidikan jenjang menengah di DIY dan hasilnya dicantumkan dalam Rapor Pendidikan. Rincian jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah beserta capaian kompetensi hasil asesmen pada setiap satuan pendidikan sesuai Rapor Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.42. Capaian Kompetensi Numerasi Tahun 2025

Capaian Kompetensi Numerasi	SMA	SMK	Total
Baik	142	141	**283**
Sedang	24	56	**80**
Kurang	6	7	**13**
Tidak Tersedia	4	3	**7**

Capaian Kompetensi Numerasi	SMA	SMK	Total
Jumlah	176	207	383

Sumber: Rapor Pendidikan DIY, Kemendikdasmen RI, 2025

Pemenuhan kompetensi minimum ditunjukkan dengan kategori "Baik" dan "Sedang". Satuan pendidikan yang mencapai kompetensi numerasi dengan kategori "Baik" dan "Sedang" adalah satuan pendidikan yang telah memenuhi kompetensi minimum numerasi. Berdasarkan Tabel 4, perhitungan capaian indikator Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum tahun 2025 adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah SMA dan SMK berstatus "Baik" dan "Sedang"}}{\text{Jumlah total SMA dan SMK}} \text{ x100\%}$$

$$\text{Persentase} = \frac{283+80}{383} \text{ x100\%} = 94{,}78\%$$

Tabel 3.43. Target dan Capaian Indikator Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum	tahun	91,82	60,52	94,78	156,61	62,50	151,65

Sumber: Rapor Pendidikan DIY, Kemendikdasmen RI, 2025

Berdasarkan perhitungan capaian indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum, terdapat 94,78% satuan pendidikan jenjang menengah di DIY yang telah memenuhi kompetensi minimum dalam nilai asesmen numerasi. Capaian ini telah melampaui target tahun 2025 sebesar 60,52% dan target RPJMD 2027 sebesar 62,50%. Ketercapaian target Pada Tahun 2025 antara lain dipengaruhi penerapan proyek dalam pembelajaran numerasi sehingga para peserta didik dapat

memahami penerapan pembelajaran numerasi secara langsung dan peningkatan kompetensi pendidik dalam metode penerapan pembelajaran numerasi yang efektif di kelas.

6. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat - Angka Harapan Hidup

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan gambaran rata-rata lama hidup yang dapat dicapai seseorang sejak lahir dan mencerminkan kondisi kesehatan suatu masyarakat. AHH sangat berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan, status gizi, pola hidup, serta kondisi lingkungan dan sanitasi. Masyarakat dengan akses kesehatan yang baik, lingkungan yang bersih, dan kesadaran hidup sehat cenderung memiliki AHH yang lebih tinggi. Oleh karena itu, AHH sering digunakan sebagai indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

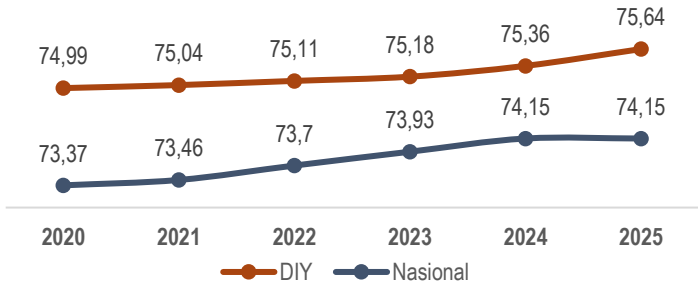
Tabel 3.44. Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025			Target akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,36	75,21	75,64	100,57	75,27	100,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
**Angka masih menggunakan realisasi tahun 2024*

AHH penduduk DIY merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat setiap tahunnya. AHH penduduk DIY konsisten berada di atas capaian nasional. Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 75,21 dan tercapai sebesar 75,64 atau 100,57%. Faktor pendukung tercapainya tercapainya target AHH di DIY didukung oleh berbagai upaya berkelanjutan di bidang kesehatan dan pembangunan sosial. Pemda DIY secara konsisten meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, serta perluasan jaminan kesehatan melalui *Universal*

Health Coverage (UHC). Tingginya tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran terhadap pola hidup sehat, serta dukungan lingkungan dan sanitasi yang relatif baik, turut berperan dalam menekan angka kesakitan dan kematian. Sinergi antara Pemerintah, Fasilitas Kesehatan, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga dan meningkatkan AHH di DIY.



Gambar 3.27. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2020–2025 (Tahun)

Sumber: BPS Indonesia, 2024
**Angka realisasi 2025 masih menggunakan realisasi tahun 2024*

Pemda DIY terus melaksanakan berbagai upaya strategis dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melalui penguatan pelayanan kesehatan maternal secara terintegrasi. Upaya tersebut meliputi peningkatan mutu pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, penguatan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh cakupan *Universal Health Coverage* (UHC). Selain itu, Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan deteksi dini risiko kehamilan, pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader, serta peningkatan edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya penurunan angka kematian ibu secara berkelanjutan.

Namun demikian, pada Tahun 2025 jumlah kasus kematian ibu di DIY mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024, dengan total 28 kasus. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas, yang antara lain meliputi penyakit penyerta atau non-obstetri seperti penyakit jantung, gangguan hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia/eklampsia), serta perdarahan.

Pada Tahun 2025, jumlah kematian bayi mengalami penurunan menjadi 227 kasus. Penyebab utama kematian bayi didominasi oleh komplikasi pada masa neonatal, antara lain asfiksia neonatorum, bayi dengan berat badan lahir rendah, kelainan bawaan, prematuritas, serta infeksi neonatal. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka kematian bayi, antara lain melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi lengkap, promosi ASI eksklusif, serta penguatan dukungan gizi. Keberhasilan upaya tersebut juga didukung oleh sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

Prevalensi beberapa penyakit tidak menular di DIY pada Tahun 2025 masih cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, khususnya penyakit jantung yang tercatat sebesar 1,67% di DIY dibandingkan 0,85% secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes melitus, dan hipertensi, masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di DIY.

Sebagai langkah pencegahan, Pemda meningkatkan upaya deteksi dini faktor risiko melalui penguatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), pelaksanaan kegiatan skrining, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap gaya hidup sehat dan pengendalian faktor risiko, antara lain tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Upaya preventif lainnya meliputi promosi perilaku hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik, pengendalian konsumsi rokok, perbaikan pola makan, serta penguatan peran

kader kesehatan di tingkat komunitas guna mendukung pengendalian penyakit tidak menular secara berkelanjutan.

Cakupan jaminan pembiayaan kesehatan atau *Universal Health Coverage* (UHC) bagi penduduk DIY menunjukan capaian yang tinggi. Data per Desember 2025 memperlihatkan bahwa lebih dari 3,7 juta jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mencapai sekitar 99,21% dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta cukup tinggi. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Pemda DIY dalam memperluas akses layanan kesehatan yang terjangkau dan inklusif, sehingga lebih banyak warga dapat mengakses layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tanpa mengalami beban biaya yang berat.

2) Prevalensi *Stunting*

Permasalahan *stunting* pada balita di DIY masih memerlukan perhatian serius sejalan dengan amanat RPJMN 2020–2024 dan RPJMD DIY 2022–2027. Meskipun hingga beberapa waktu terakhir berbagai upaya penurunan prevalensi *stunting* belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada, pada Tahun 2025 prevalensi *stunting* di DIY mulai menunjukkan kecenderungan penurunan yang semakin baik sebagai hasil dari penguatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilaksanakan secara terintegrasi. Pemerintah Daerah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan *stunting* serta menjamin terpenuhinya tumbuh kembang anak secara optimal di seluruh wilayah DIY.

Tabel 3.45. Target dan Capaian Indikator Prevalinsi *Stunting* Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Prevalensi *Stunting*	%	17,40	12,90	17,40* (capaian tahun 2024, capaian 2025 belum rilis)	65,12

Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Angka Prevalensi *Stunting* menggunakan data aplikasi gizi, sedangkan capaian 2024 menggunakan angka SKI 2023.

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat di DIY terhadap *stunting* masih relatif rendah. Berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, sekitar 30% penduduk belum memahami secara tepat pengertian *stunting*, faktor penyebab, serta upaya pencegahannya.
b) Cakupan balita yang memperoleh Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sesuai standar, meskipun masih memenuhi target, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk cakupan balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara rutin setiap bulan.
c) Persentase anemia bumil meningkat dari 12,3% (2024) menjadi 14,6% (data sementara 2025). Hal ini berkontribusi pada masih tingginya angka bayi lahir dengan panjang badan rendah sebesar 17%.
d) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Pemberian Makanan Tambahan baru dapat direalisasikan pada bulan April, sehingga pada awal tahun sasaran balita dan ibu hamil dengan masalah gizi belum dapat memperoleh intervensi PMT Lokal secara optimal.

(2) Solusi

a) Pengembangan inovasi *Fastanting* (Fasilitasi Literasi Pencegahan *Stunting*) sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat melalui penyampaian pesan kunci yang mudah diingat serta

metode komunikasi antarpribadi yang lebih menarik dan menyenangkan.

b) Sejalan dengan permasalahan MP ASI dan Pemantauan Pertumbuhan, Pesan dalam Fastanting adalah cegah *Stunting* dengan ABCDE, dimana C nya adalah 'Cukupi Protein Hewani' dan D adalah 'Datang ke Posyandu setiap bulan'. Harapannya dapat meningkatkan pemahaman dan menuju perubahan perilaku untuk pola asuh yang lebih sesuai dengan rekomendasi WHO dan Kemenkes.

c) Peningkatan upaya pemahaman dan konsumsi *Multiple Micronutrient Supplementation* (MMS) melalui inovasi Edukasi MMS Digital bekerjasama dengan Kemenkes dan Vitamin Angels serta Penguatan Kelas Ibu hamil.

d) Komunikasi dan advokasi sumber anggaran lain baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung peningkatan cakupan sasaran pemberian PMT Lokal sejak awal tahun.

3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak

Salah satu indikator kinerja Program Pemda Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat adalah Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak yang mencakup penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, penyediaan akses air minum layak dan aman, serta penyediaan akses sanitasi layak dan aman. Pada tahun 2025, realisasi indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.46. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak	%	96,83	98,802	97,20	98,38

Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa persentase capaian indikator Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak adalah 97,20%. Persentase capaian indikator Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak yang belum memenuhi 100% disebabkan beberapa faktor diantaranya jumlah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah pusat menurun, lambatnya laju penyambungan Sambungan Rumah air limbah domestik regional yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dan jumlah penambahan pelanggan PDAM masih rendah dikarenakan rendahnya investasi hilir Kabupaten/Kota.

Realisasi indikator Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak sebesar 97,20% diperoleh dari rerata persentase penduduk yang menempati rumah layak huni, sanitasi layak dan air minum layak sebagai berikut:

a. Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni

RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan paling sedikit 7,2 m^2/jiwa, dan kesehatan penghuni. Kondisi ini mencakup kerusakan struktur (atap, dinding, lantai), minimnya sanitasi dan air bersih, serta kurangnya ventilasi dan pencahayaan. Dalam upaya penanganannya, terdapat dua skema utama yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH) melalui perbaikan atau rehabilitasi fisik dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni (PB RLH)

sebagai upaya penyediaan rumah layak huni berupa pembangunan baru rumah. Melalui kedua skema tersebut, realisasi indikator persentase rumah tangga yang menempati hunian layak di DIY hingga akhir tahun 2025 tercapai 96,11%. Perhitungan capaian ini didasarkan pada total jumlah rumah tangga di DIY sebanyak 1.287.207 unit (Sumber: DATAKU), dikurangi jumlah RTLH yang belum tertangani sebesar 54.991 unit ditambah pelaksanaan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.134 unit dan Pada Tahun 2025 sebanyak 1.823 unit. Jumlah penanganan tersebut merupakan hasil sinergi lintas pendanaan dan kolaborasi antarsektor.

b. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi

Peningkatan penduduk berakses sanitasi dilakukan dengan penanganan air limbah terpusat melalui Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon. Selain penyelenggaraan IPAL Regional Sewon, dalam rangka peningkatan akses sanitasi di DIY, adanya pendanaan dari APBD untuk melaksanakan pembangunan IPAL Komunal di masing-masing Kabupaten. Sampai dengan akhir tahun 2025 Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.727.004 jiwa atau setara dengan 98,55% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 3.781.700 jiwa.

Tabel 3.47. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk	BABS	Akses Aman	Akses Layak
1	Kulon Progo	447.500	-	37.366	444.994
2	Bantul	1.025.800	-	155.716	989.487
3	Gunungkidul	753.200	-	138.288	747.702
4	Sleman	1.179.400	-	359.245	1.169.021
5	Yogyakarta	375.800	-	162.684	375.800
Total DIY		**3.781.700**	**0**	**853.299**	**3.727.004**
			0%	**22,56%**	**98,55%**

Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

c. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pencapaian Indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY. Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan penyediaan air minum di DIY. Hingga dengan akhir tahun 2025 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 96,93% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.665.539 jiwa dari jumlah penduduk total sebesar 3.781.700 jiwa.

Tabel 3.48. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Akses Aman	Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan	Akses Layak
1	Kulonprogo	447.500	135.100	214.576	225.674	440.251
2	Bantul	1.025.800	142.689	212.238	720.317	932.555
3	Gunungkidul	753.200	188.300	369.445	368.089	737.533
4	Sleman	1.179.400	162.993	292.727	886.673	1.179.400
5	Yogyakarta	375.800	89.682	89.682	286.118	375.800
Total DIY		**3.781.700**	**718.764**	**1.178.668**	**2.486.871**	**3.665.539**
			19,01	**31,17%**	**65,76%**	**96,93%**

Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Terdapat beberapa calon penerima bantuan yang tidak lolos verifikasi atau mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya, KK tunggal, dan konflik sengketa tanah sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penanganan rumah tidak layak huni kepada yang bersangkutan.

b) Penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR belum optimal.

c) Kabupaten/kota masih terbatas dalam penganggaran penambahan sambungan rumah IPAL Sewon.

(2) Solusi

a) Meningkatkan kualitas verifikasi calon penerima bantuan sosial serta berkoordinasi dengan kalurahan untuk mediasi dengan calon penerima bantuan.
b) Penyerapan air curah SPAM Regional Kartamantul sesuai dengan PKS yang telah disepakati oleh Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan.
c) Peningkatan koordinasi untuk pencapaian sanitasi aman melalui penambahan infrastruktur di masing-masing kabupaten/kota.

7. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

Tabel 3.49. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,65	77,67	74,65*	96,11

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025
**) Untuk capaian realisasi IDG Tahun 2025 belum rilis dari BPS.*

BPS Provinsi DIY belum merilis data IDG tahun 2025. IDG DIY pada tahun 2024 tercatat 74,65, turun 3,81 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 78,46, serta menjadi capaian terendah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 Kabupaten Sleman

mempunyai IDG tertinggi sebesar 81,49 dan Kabupaten Kulonprogo mempunyai IDG terendah sebesar 70,60. Tiga Kabupaten mengalami kenaikan IDG yakni Kabupaten Bantul dari 70,35 menjadi 75,97, Kabupaten Gunungkidul dari 77,30 menjadi 79,41 dan Kabupaten Sleman dari 79,94 menjadi 81,49. Dua Kabupaten/Kota mengalami penurunan IDG yakni Kabupaten Kulonprogo dari 71,68 menjadi 70,60 dan Kota Yogyakarta dari 75,70 menjadi 71,86. Yang perlu mendapat perhatian adalah IDG Kota Yogyakarta berada di bawah Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Bantul.

Tabel 3.50. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY

Kabupaten/Kota	[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
DIY	**74,73**	**76,57**	**76,87**	**78,46**	**74,65**
Kulonprogo	71,45	71,41	72,27	71,68	70,60
Bantul	64,78	65,27	65,03	70,35	75,97
Gunungkidul	75,53	76,70	77,93	77,30	79,41
Sleman	81,25	81,31	81,65	79,94	81,49
Kota Yogyakarta	71,05	73,18	75,50	75,70	71,86

Sumber: BPS, 2024

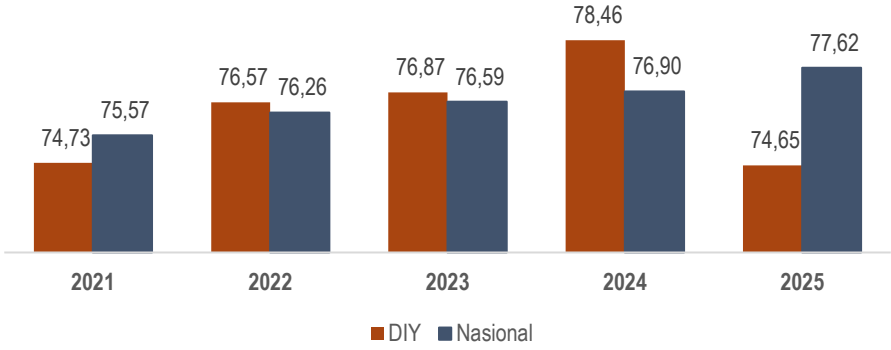
Perbandingan dengan capaian nasional

IDG DIY pada tahun 2024 sebesar 74,65 berada di bawah angka nasional sebesar 77,62, setelah selama 3 tahun berturut - turut sejak tahun 2021 berada di atas angka nasional.

Tabel 3.51. IDG Nasional dan DIY Tahun 2020-2024

NASIONAL/DIY	[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
DIY	74,73	76,57	76,87	78,46	74,65
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber: BPS, 2025



Gambar 3.28. Perbandingan Perkembangan IDG DIY Dengan Tingkat Nasional Tahun 2020 s.d. 2024

Sumber: BPS, 2025

Berikut rincian nilai indikator-indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY:

a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen di DIY

Tabel 3.52. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Kabupaten/Kota	[IDG] Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
DIY	18,18	20,00	20,00	21,82	16,36
Kulonprogo	20,00	20,00	20,00	20,00	17,50
Bantul	8,89	8,89	8,89	13,33	20,00
Gunungkidul	22,22	24,44	24,44	24,44	26,67
Sleman	28,00	28,00	28,00	26,00	26,00
Kota Yogyakarta	12,82	15,00	17,50	17,50	12,50

Sumber: BPS, 2024

b. Sumbangan Pendapatan Perempuan di DIY

Tabel 3.53. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan

Kabupaten/Kota	[IDG] Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
DIY	40,82	41,26	41,37	41,13	42,28
Kulonprogo	34,09	34,27	34,50	34,49	35,35
Bantul	38,75	39,28	38,89	38,09	38,51
Gunungkidul	39,90	39,52	39,32	39,30	39,35
Sleman	38,46	38,92	39,8	38,50	39,62
Kota Yogyakarta	44,65	44,72	43,78	44,15	45,32

Sumber: BPS, 2024

c. Perempuan sebagai Tenaga Profesional di DIY

Tabel 3.54. Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Kabupaten/Kota	[IDG] Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
DIY	53,69	52,18	53,09	53,40	53,40
Kulonprogo	52,13	52,57	50,25	55,57	55,57
Bantul	55,37	56,03	57,58	52,23	52,23
Gunungkidul	46,13	44,59	46,04	46,92	46,92
Sleman	52,12	51,66	52,98	57,25	57,25
Kota Yogyakarta	53,67	52,51	50,78	48,32	48,32

Sumber: BPS, 2024

Dari data 3 indikator penyusun IDG menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan di DIY semakin baik setiap tahunnya.

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Terjadi penurunan indeks Keterlibatan Perempuan di parlemen di DIY pada tahun 2024 hal ini selaras dengan penurunan perempuan yang menjadi anggota legislatif di 5 kabupaten/kota dan DIY hasil pemilu 2024 sebanyak 55 orang turun dari sebelumnya 59 orang hasil pemilu 2019.
b) Rendahnya peran perempuan dalam UMKM
c) Kompetensi perempuan masih rendah dibanding laki-laki dalam dunia kerja

(2) Solusi

a) Peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan dan pendidikan pemilih agar memilih perempuan dalam pemilu legislatif
b) Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui KEP (Kelompok Ekonomi Produktif) Desa Prima meliputi bantuan permodalan, pendampingan, bantuan rumah produksi, kios, *showroom*, pelatihan dll.

c) Meningkatkan rata rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah bagi perempuan

2) *Total Fertility Rate* (TFR)

Angka kelahiran Total /*Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15–49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. TFR idealnya adalah sekitar 2,1 untuk menjaga populasi stabil (*replacement level*). TFR lebih rendah berarti penurunan penduduk, sementara jika lebih tinggi berarti pertumbuhan penduduk.

Tabel 3.55. *Total Fertility Rate* (TFR) di DIY pada Tahun 2021–2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
DIY	1 ,91	1,93	1,81	1,83	1,82

Sumber: BKKBN, 2025

TFR DIY selama 5 tahun terakhir berfluktuasi, namun TFR DIY masih dalam *range* ideal TFR yakni di angka 1,81–2,2.

Tabel 3.56. Target dan Capaian Indikator Program *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2024

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Total Fertility Rate	Angka Indeks	1,83	1,81-2,2	1,82	100%

Sumber: BKKBN, 2024

Pada RPJMD DIY 2022–2027 target yang ditetapkan sebesar 1,8-2,2 telah tercapai sebesar 1,82 atau pada target yang ditetapkan. Tujuan pembangunan KB dan Kependudukan salah satunya adalah mempertahankan penduduk tumbuh seimbang.

a. **Permasalahan dan Solusi**

(1) Permasalahan

(1) Perkawinan anak masih terjadi, sehingga meningkatkan resiko melahirkan dan berakibat pada peningkatan TFR
(2) Pasangan Usia Subur masih rendah menjadi peserta KB

(2) Solusi

(1) Upaya pencegahan perkawinan anak melalui Informasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi yang menyasar anak SMP dan SMA melalu program Sekolah Ramah Anak.
(2) Penyadaran mengikuti program KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) pasca melahirkan.

8. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda - Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi oleh Pihak Luar

Kebudayaan bukanlah sekadar peninggalan masa lalu, melainkan jantung peradaban dan kompas masa depan. Kekayaan Budaya Benda *(tangible)* dan Budaya Tak Benda *(intangible)* Indonesia khususnya di DIY, adalah warisan luhur yang telah diakui sebagai bagian dari peradaban dunia. Melalui mandat Undang-Undang Keistimewaan, Pemda DIY mengimplementasikan berbagai program inovatif yang menyelaraskan pelestarian jati diri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dari pengakuan berkelanjutan oleh komunitas global terhadap ketangguhan budaya Yogyakarta.

Tolok ukur Pemda DIY dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya menggunakan indikator Peningkatan budaya benda dan tak benda yang diakui atau diapresiasi pihak luar. Indikator ini mencerminkan bahwa pelestarian budaya di DIY tidak hanya

dipandang sebagai upaya konservasi internal yang bersifat pasif, melainkan telah bertransformasi menjadi diplomasi kebudayaan aktif.

Tabel 3.57. Target dan Realisasi Indikator Program Budaya benda dan Tak Benda yang diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (regional, nasional, dan internasional) Tahun 2025.

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Reali-sasi	% Realisasi
Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	buah	399	355	460	129,57%

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

Tahun 2025, realisasi tercapai sebesar 460 buah dari target 355 buah atau terdapat peningkatan sebesar 129,57%, serta pertumbuhan sebesar 15,28% jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2024. Lonjakan realisasi hingga mencapai 460 buah apresiasi pada tahun 2025 menegaskan komitmen masif Pemda DIY dalam melakukan inventarisasi dan standardisasi kualitas warisan budaya agar layak mendapatkan pengakuan di level yang lebih tinggi.

Penambahan signifikan yang bersumber dari 33 Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Nasional dan 28 Cagar Budaya Nasional baru merupakan bukti nyata meningkatnya kepercayaan otoritas pusat maupun internasional terhadap integritas pelestarian budaya yogyakarta. Hal ini menjamin perlindungan hukum konstitusional atas kekayaan intelektual dan fisik masyarakat sekaligus menjadi fondasi strategis bagi pengembangan ekonomi berbasis budaya dan pariwisata berkelanjutan.

Tabel 3.58. Budaya benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) Tahun 2007 - 2024

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2007	28	-	28
2	2010	12	-	12
3	2011	95	-	95
4	2013	1	-	1
5	2014	1	-	1
6	2016	1	-	1

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
7	2018	2	-	2
8	2019	6	-	6
9	2020	16	-	16
10	2021	-	-	-
11	2022	16	-	16
12	2023	4	-	4
13	2024	4	-	4
14	2025	28	-	28
Jumlah		**214**	**-**	**214**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

Melihat tabel di atas, akumulasi budaya benda (cagar budaya) yang mendapat apresiasi pihak luar mencapai total 214 objek, Fluktuasi angka penetapan setiap tahunnya menunjukkan bahwa proses legalitas budaya sangat bergantung pada ketatnya kurasi dan verifikasi dari lembaga yang menaungi. Pada Tahun 2025 terdapat 28 Cagar Budaya Nasional baru yang terdiri dari 18 Benda Cagar Budaya, 7 Bangunan Cagar Budaya dan 2 Situs Cagar Budaya.

Tabel 3.59. Budaya Tak Benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2013	1	-	1
2	2014	5	-	5
3	2015	4	-	4
4	2016	9	-	9
5	2017	18	-	18
6	2018	27	-	27
7	2019	30	-	30
8	2020	14	-	14
9	2021	26	-	26
10	2022	21	-	21
11	2023	25	1	26
12	2024	32	-	32
13	2025	33	-	33
Jumlah		**245**	**1**	**246**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) DIY di tingkat Nasional hingga tahun 2025 telah mencapai 245 buah. Penambahan ini berasal dari 33 WBTb dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.60. Rincian Budaya Tak Benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) Tahun 2025

No	Nama Karya Budaya	Nomor Penghargaan	Domain
1	Dolanan Soyang	058/WB/KB.00.01/2025	Tradisi dan Ekspresi Lisan
2	Dolanan Lepetan	059/WB/KB.00.01/2025	Tradisi dan Ekspresi Lisan
3	Dolanan Ingkling	060/WB/KB.00.01/2025	Tradisi dan Ekspresi Lisan
4	Dolanan Dingklik Oglak Aglik Yogyakarta	061/WB/KB.00.01/2025	Tradisi dan Ekspresi Lisan
5	Sesorah Gaya Yogyakarta	062/WB/KB.00.01/2025	Tradisi dan Ekspresi Lisan
6	Jethungan Yogyakarta	063/WB/KB.00.01/2025	Tradisi dan Ekspresi Lisan
7	Gamparan Yogyakarta	064/WB/KB.00.01/2025	Tradisi dan Ekspresi Lisan
8	Bahu Danyang Yogyakarta	065/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
9	Rewang Yogyakarta	066/WB/KB.00.01/2025	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
10	Tenong Yogyakarta	067/WB/KB.00.0/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
11	Nyumbang Yogyakarta	068/WB/KB.00.01/2025	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
12	Ancak - Ancak Alis	069/WB/KB.00.01/2025	Tradisi dan Ekspresi Lisan
13	Beksan Tugu Wasesa	070/WB/KB.00.01/2025	Seni Pertunjukan
14	Bedhaya Gandha Kusuma	071/WB/KB.00.01/2025	Seni Pertunjukan
15	Sruntul	072/WB/KB.00.01/2025	Seni Pertunjukan
16	Reog Keprajuritan	073/WB/KB.00.01/2025	Seni Pertunjukan
17	Srimpi Layu - Layu	074/WB/KB.00.01/2025	Seni Pertunjukan
18	Srimpi Dhendang Sumbawa	075/WB/KB.00.01/2025	Seni Pertunjukan
19	Malam Selikuran Yogyakarta	076/WB/KB.00.01/2025	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
20	Jodhangan Goa Cerme	077/WB/KB.00.01/2025	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
21	Upacara adat Sendang Angin- Angin	078/WB/KB.00.01/2025	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
22	Labuhan Bekti Jalanidhi	079/WB/KB.00.01/2025	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
23	Larakan Kiai Depok	080/WB/KB.00.01/2025	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
24	Ledekan Clapar	081/WB/KB.00.01/2025	Adat Istiadat, Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
25	Serabi Kocor Yogyakarta	082/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
26	Ukel Yogyakarta	083/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
27	Mie Des	084/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
28	Apem Conthong	085/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

No	Nama Karya Budaya	Nomor Penghargaan	Domain
29	Bakmi Jawa Gunungkidul	086/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
30	Kolombeng Kulon Progo	087/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
31	Pande Besi Klopo Sepuh	088/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
32	Sega Tiplek	089/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
33	Bebek Bacem Nglengis	090/WB/KB.00.01/2025	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

Capaian Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY memperkuat DIY sebagai penjaga warisan budaya Indonesia. Penetapan Budaya Benda dan Tak Benda menjadi indikator bahwa kekayaan intelektual dan fisik masyarakat DIY terlindungi secara konstitusional.

1) Permasalahan dan Solusi Pelestarian Budaya

a. Permasalahan:

(1) Kesenjangan pengakuan dan kesejahteraan: Lonjakan apresiasi eksternal sebanyak 460 buah (129,57% dari target 355) belum berdampak signifikan terhadap Dimensi Ekonomi Budaya yang turun tajam ke angka 37,06. Legalitas budaya yang tinggi terbukti belum mampu membendung pergeseran pilihan kerja masyarakat dari sektor budaya ke sektor lainnya.

(2) Konflik Standar Konservasi: Terdapat tantangan dalam menyelaraskan standar kurasi dan verifikasi ketat untuk legalitas budaya benda/tak benda dengan dinamika pembangunan serta aktivitas ekonomi produktif masyarakat lokal.

b. Solusi:

(1) Optimalisasi Perlindungan Budaya: Memastikan legalitas dan perlindungan hukum atas 214 cagar budaya dan 246 WBTb tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi menjadi instrumen untuk membuka peluang ekonomi berbasis budaya yang layak bagi para pelaku seni.

(2) Integrasi Perencanaan Partisipatif: Mengadopsi pola pengelolaan Sumbu Filosofi melalui sinkronisasi rencana pengelolaan dan pelibatan masyarakat (Kelompok Kerja Teknis) agar setiap objek budaya yang telah diapresiasi pihak luar dapat menjadi aset pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga.

(3) Diplomasi Kebudayaan Aktif: Mentransformasi upaya konservasi pasif menjadi diplomasi aktif yang mendorong keterlibatan masyarakat mandiri dalam aktivitas seni budaya guna meningkatkan skor ekonomi dan ekspresi budaya DIY di masa depan.

9. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur

1) Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur merupakan jantung dan penumbuhakan perkonomian masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang memadahi, menjadi salah satu aspek penting dan vital dalam mempercepat pembangunan dan pemerataaan ekonomi antarwilayah. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam mengukur persentase penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, digunakan meta indikator

yaitu a) persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air; b) persentase pembangunan jaringan jalan; c) persentase capaian jalan berkeselamatan berbasis angkutan umum; dan, d) persentase capaian pengelolaan sektor transportasi di kawasan strategis dalam mendukung pelestarian lingkungan.

Tabel 3.61. Target dan Realisasi Indikator Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Reali-sasi	% Realisasi
Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung	%	73,48	76,70	79,27	103,35

Sumber: Laporan Program Pemda Th. 2025, Biro PIWP2 Setda DIY

Berdasarkan perolehan data dalam laporan kinerja program pemda Pada Tahun 2025 Triwulan IV, capaian indikator Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi sebesar 79,27% dari target sebesar 76,70% pada Tahun 2025 (realisasi dibandingkan target sebesar 103,35%). Berdasarkan kedalaman capaian indikator penyusun didapatkan data sebagai berikut, a) Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar 96,43%; b) Persentase Pembangunan Jaringan Jalan sebesar 99,7%; c) Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum sebesar 59,43%; dan, d) Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan sebesar 61,51%. Berdasarkan data diketahui bahwa potensi peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung pusat pertumbuhan ekonomi dari sektor pembangunan jalan dan transportasi masih cukup besar.

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Kondisi yang dihadapi dalam upaya penyediaan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah adanya kebijakan pemerintah yang

mengalihkan konsentrasi penggunaan fiskal daerah untuk kepentingan yang lebih prioritas. Dalam hal ini kemudian menyebabkan perubahan perencanaan pembangunan penyediaan infrastruktur di beberapa sektor untuk dapat dilaksanakan di tahun mendatang.

(2) Solusi

Merujuk pada perubahan kebijakan penggunaan fiskal pemerintah yang dinamis, maka perlu kemudian menjadi penting bagi sektor pembangunan yang berupa penyediaan infrastruktur fisik didorong melalui sumber-sumber pendanaan alternatif pemerintah.

2) Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)

Ketimpangan kesejahteraan di DIY masih terjadi baik ketimpangan pendapatan antar individu maupun antara wilayah (kabupaten/kota). Ketimpangan antarwilayah yang berbentuk ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota menjadi salah satu tantangan karena penurunan ketimpangan wilayah menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo menunjukkan dinamika yang relatif lebih lambat dibandingkan wilayah perkotaan dan pusat kegiatan utama di DIY. Kondisi ini mencerminkan struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional, seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata berbasis sumber daya lokal, yang memiliki produktivitas dan nilai tambah relatif terbatas. Ketergantungan pada sektor-sektor tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten lebih rentan terhadap faktor eksternal, seperti fluktuasi cuaca, perubahan permintaan pasar, serta perlambatan ekonomi secara umum.

Tabel 3.62. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten yang belum maju (Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul) Tahun 2024

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Reali-sasi	% Realisasi
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul)	%	4,87	5,76	4,99	86,63

Sumber: Laporan Program Pemda Th. 2025, Biro PIWP2 DIY

Menurut data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) DIY per Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar Rp32.685,45 M (Data BPS Provinsi DIY, TW III 2025). Persentase PDRB di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih dominan (60,21%) dibandingkan dengan wilayah di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo (39,79%). Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antarwilayah yang berbentuk kesenjangan pertumbuhan perekonomian di DIY.

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas wilayah, kualitas sumber daya manusia, serta keterhubungan dengan pusat-pusat ekonomi utama menjadi faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Meskipun demikian, masing-masing kabupaten memiliki potensi unggulan, seperti pengembangan kawasan bandara dan industri di Kulon Progo, pariwisata alam dan ekonomi kreatif di Gunungkidul, serta sektor UMKM dan pariwisata di Bantul, yang masih memerlukan penguatan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

(2) Solusi:

Perlunya intervensi pembangunan yang terarah melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru, peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur, serta penguatan sektor-sektor ekonomi potensial berbasis karakteristik wilayah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekonomi Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo secara bertahap, sekaligus memperkecil kesenjangan pertumbuhan antarwilayah di DIY.

10. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

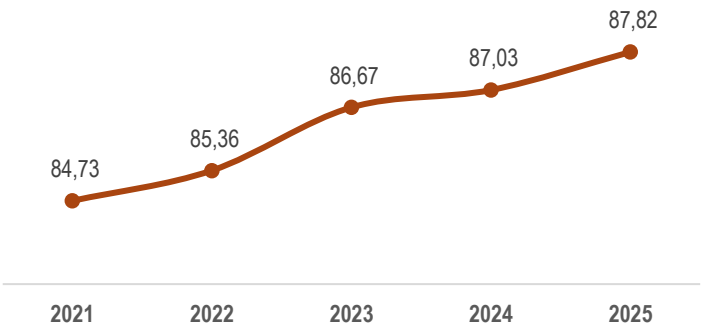
Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan amanat Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik dan Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, pelaksanaan SKM juga berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, umpan bagi penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur pelayanan yang disurvei dalam SKM meliputi:

a. Persyaratan
b. Prosedur
c. Waktu Penyelesaian
d. Biaya/Tarif
e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
f. Kompetensi Pelaksana
g. Perilaku Pelaksana
h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
i. Sarana dan prasarana

Analisis capaian dengan memperbandingkan realisasi dan target Tahun 2024, serta terhadap capaian tahun sebelumnya, penyebab ketidaktercapaian jika realisasi di bawah target.



Gambar 3.29. Nilai IKM Pemda DIY Tahun 2021–2025

Sumber: Biro Organisasi, Tahun 2026

Gambar di atas menunjukkan adanya konsistensi peningkatan nilai SKM atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemda DIY. Meskipun demikian, capaian nilai IKM tahun 2025 sebesar 87,82 belum memenuhi target capaian IKM sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022–2027 yaitu sebesar 88,77.

Merujuk pada hasil dari SKM pada tahun 2025, unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah waktu pelayanan, produk layanan, dan prosedur, maka ketidaktercapaian target tersebut terkait

dengan proses pemberian pelayanan yang masih dipersepsikan kurang efektif oleh masyarakat baik dari segi waktu, prosedur dan produk layanan. Inovasi pelayanan publik diperlukan bagi peningkatan kualitas pelayanan dalam ketiga unsur tersebut. Inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan oleh unit pelayanan diharapkan bisa memangkas waktu dan prosedur layanan serta meningkatkan kualitas produk layanan.

a. Permasalahan

(1) Belum semua unit layanan memiliki dan mengimplementasikan Inovasi Pelayanan Publik.

Adanya kesenjangan kapasitas inovasi antar unit layanan, baik dari sisi kepemimpinan, SDM, budaya organisasi, maupun dukungan sistem. Inovasi yang telah ada belum terdorong untuk direplikasi karena belum adanya mekanisme institusional yang memastikan inovasi menjadi bagian dari siklus peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Akibatnya, praktik baik bersifat sporadis dan tidak memberikan dampak yang sistematik.

(2) Pelaksanaan SKM masih menggunakan sistem manual dan tidak *Real Time.*

Pelaksanaan SKM yang dilakukan secara mandiri, manual, dan periodik menyebabkan keterbatasan akurasi, kecepatan, dan daya guna data. Hasil SKM belum mampu berfungsi sebagai instrumen *early warning system* untuk mendeteksi penurunan kualitas pelayanan. Hal ini berdampak pada lambatnya respons kebijakan dan perbaikan layanan.

(3) Kualitas pelayanan publik masih memerlukan peningkatan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemda DIY belum sepenuhnya berjalan dalam satu siklus kebijakan pelayanan yang utuh. Keterbukaan informasi, inovasi pelayanan, dan standar pelayanan masih diperlukan sebatas sebagai kewajiban administratif, belum sebagai instrumen strategis untuk merespons dinamika ekspektasi masyarakat. Selain itu, mekanisme monitoring dan pendampingan belum cukup kuat untuk memastikan standar pelayanan selalu relevan dan adaptif.

(4) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan bagi Masyarakat Rentan.

Masih tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat. Keterbatasan fasilitas bagi masyarakat rentan mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Penyediaan sarana dan prasarana sering kali belum mengacu secara konsisten pada standar minimal yang diatur, serta belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan publik.

b. Solusi

Permasalahan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemda DIY belum sepenuhnya berjalan dalam satu siklus kebijakan pelayanan yang utuh. Keterbukaan informasi, inovasi pelayanan, dan standar pelayanan masih diperlakukan sebagai kewajiban administratif, belum sebagai instrumen strategis untuk merespons dinamika ekspektasi masyarakat. Selain itu, perlu peningkatan mekanisme monitoring dan

pendampingan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu relevan dan adaptif.

di samping itu, keterbatasan fasilitas bagi masyarakat rentan mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Penyediaan sarana prasarana sering kali belum mengacu secara konsisten pada standar minimal yang diatur, serta belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan publik. Beberapa solusi yang perlu dilakukan antara lain:

(1) Melanjutkan pendampingan serta monitoring pelaksanaan pelayanan secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan kekuatan masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang telah dilakukan sejak tahun 2023. Indikator dalam PEKPPP Mandiri yang meliputi pemantauan dalam kebijakan pelayanan (penyusunan Standar Pelayanan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat), pembinaan profesionalisme SDM, ketersediaan sistem informasi pendukung pelayanan publik, ketersediaan sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, pelayanan inklusif, serta inovasi pelayanan publik;
(2) Mendorong implementasi kebijakan inovasi daerah, yang berdampak pada peningkatan budaya inovatif di masing-masing unit penyelenggara pelayanan, termasuk dengan melanjutkan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik daerah, penguatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan pelaksanaan kegiatan *coaching clinic* ide inovasi;
(3) Melanjutkan upaya pemenuhan sarana prasarana dan sikap petugas untuk mendukung pelayanan inklusif, melalui pelaksanaan bimtek pelayanan prima untuk

masyarakat rentan, *benchmarking* pelayanan inklusif melalui kegiatan *sharing session*, serta advokasi penguatan anggaran untuk penyediaan pelayanan inklusif.

(4) Memulai implementasi SKM *online* menggunakan portal skm.go.id yang diinisiasi oleh Kementerian PAN dan RB RI, akan dimulai uji coba pada tahun 2026 dan akan diimplementasikan secara menyeluruh di tahun 2027

2) Indeks Kematangan SPBE

Pemda DIY terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi ini bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan indikator utama dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil evaluasi nasional tahun 2024, Pemda DIY berhasil meraih skor indeks 4,53 dari skala 5,00 dengan predikat "Sangat Baik". Angka ini mencerminkan keberhasilan DIY dalam mengimplementasikan pemerintahan berbasis digital guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Memasuki tahun 2025, Pemda DIY menargetkan peningkatan kematangan SPBE yang lebih tinggi melalui kegiatan pendampingan intensif. Berdasarkan hasil asesmen mandiri tahun 2025, nilai Indeks SPBE Pemda DIY mencapai 4,97. Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Secara arsitektural, SPBE di DIY dikelola melalui 4 domain utama yang mencakup Kebijakan Internal, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE, yang kemudian dijabarkan ke dalam 8 aspek dan 47 indikator penilaian. Adapun perbandingan hasil asesmen oleh Kemenpan RB tahun 2024 dan asesmen mandiri Pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.63. Hasil Asesmen SPBE oleh Kemenpan RB Tahun 2024 dan Asesmen Mandiri Tahun 2025

ASPEK	NAMA ASPEK	ASESMEN KEMENPAN 2024	ASESMEN MANDIRI 2025
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00	5,00
Aspek 2	Perencanaan Strategi SPBE	4,50	5,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,00	5,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00	5,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	3,88	5,00
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	3,00	4,33
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30	5,00
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	5,00	5,00
Indeks SPBE		**4,53**	**4,97**

Sumber:diskominfo DIY, 2026

Dari sisi regulasi, pelaksanaan SPBE di DIY berpijak pada landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan diperkuat melalui Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 serta Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Visi ini telah selaras dengan Visi Indonesia Digital 2045, yang bertujuan menciptakan konektivitas merata dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) digital untuk membawa Indonesia keluar dari *middle-income trap*.

Hingga tahun 2025, Pemda DIY telah mengoptimalkan 14 layanan utama yang mencakup layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Beberapa aspek seperti Kebijakan Internal, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Layanan Publik bahkan telah mencapai nilai sempurna 5,00. Kesuksesan ini didukung oleh peran Tim Koordinasi SPBE yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala untuk memastikan setiap inovasi teknologi memberikan dampak langsung bagi masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian, kondisi umum SPBE DIY saat ini berada pada fase pemantapan menuju *Smart Government* yang responsif dan inovatif.

a. Permasalahan dan Solusi

Meskipun mencatatkan hasil indeks evaluasi mandiri yang sangat baik, masih terdapat beberapa tantangan struktural dan teknis yang dihadapi yaitu rendahnya nilai kematangan Domain Manajemen. Apabila dibandingkan dengan domain lainnya, Domain Manajemen SPBE masih menunjukkan ruang perbaikan dengan nilai 4,82 karena audit Aplikasi SPBE yang belum mencapai nilai optimal. Hambatan yang dihadapi pada aspek audit karena belum tersedianya lembaga audit eksternal tersertifikasi yang beroperasi di wilayah DIY, sehingga menjadi hambatan struktural yang di luar kendali instansi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi dan informatika DIY telah melakukan penjadwalan untuk melaksanakan Audit Aplikasi Eksternal melalui lembaga audit tersertifikasi pada tahun 2026 setelah mendapatkan konfirmasi dari BRIN bahwa pada tahun 2026 telah tersedia lembaga audit yang beroperasi di wilayah DIY.

(1) Permasalahan

Meskipun hasil indeks evaluasi mandiri menunjukkan capaian yang sangat baik, masih terdapat tantangan struktural dan teknis, khususnya pada Domain Manajemen SPBE yang memiliki tingkat kematangan relatif lebih rendah dibandingkan domain lainnya dengan nilai 4,82. Kondisi ini disebabkan oleh audit Aplikasi SPBE yang belum mencapai nilai optimal. Hambatan utama dalam pelaksanaan audit tersebut adalah belum tersedianya lembaga audit eksternal tersertifikasi yang beroperasi di wilayah DIY, sehingga menjadi kendala struktural yang berada di luar kendali instansi.

(2) Solusi

Sebagai langkah penyelesaian, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah melakukan penjadwalan

pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE secara eksternal melalui lembaga audit tersertifikasi pada tahun 2026. Penjadwalan ini dilakukan setelah memperoleh konfirmasi dari BRIN bahwa pada tahun tersebut telah tersedia lembaga audit eksternal yang beroperasi di wilayah DIY.

11. Program Peningkatan Kualitas Demokrasi

1) Indeks Kebebasan

Dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), aspek kebebasan menunjukkan sejauh mana berbagai kelompok dan sektor masyarakat yang beragam memiliki ruang dan kapasitas untuk bertindak secara independen serta mengelola kepentingannya secara otonom dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Aspek ini merupakan elemen fundamental dalam demokrasi karena mencerminkan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara serta terbukanya ruang partisipasi yang setara. Penilaian terhadap aspek kebebasan dilakukan melalui tujuh indikator yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Berikut capaian aspek kebebasan beserta indikator-indikator yang menjadi dasar pengukuran dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Tabel 3.64. Capaian Aspek Kebebasan dan Indikator Penyusunnya

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	Kategori
	ASPEK KEBEBASAN	**74,31**	**87,35**	**77,76**	**88,74**	**TINGGI**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79	93,02	79,24	79,43	
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30	100	82,7	82,86	
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33	88,36	65,4	100	
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100	100	
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	70,39	70,39	70,39	98,66	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83	76,06	71,03	78,4	

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	Kategori
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75	78,86	74,56	77,71	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Masih terdapat tantangan dalam penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik, khususnya terkait pengelolaan unjuk rasa dan forum penyampaian pendapat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Kondisi ini dapat memunculkan persepsi pembatasan kebebasan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi, fasilitasi, dan pendekatan dialogis yang memadai.
b) Aktivitas organisasi kemasyarakatan atau kelompok dengan latar belakang ideologi, politik, dan kepentingan tertentu terkadang menimbulkan resistensi sosial. Apabila tidak dikelola secara inklusif, kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang kebebasan berserikat serta memicu gesekan horizontal di masyarakat.

(2) Solusi

a) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme dialog, audiensi, dan forum komunikasi yang terstruktur, serta memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan guna menjamin kebebasan berpendapat tetap berjalan seiring dengan terpeliharanya ketertiban umum.
b) Melakukan pembinaan dan pemetaan organisasi kemasyarakatan secara berkelanjutan, disertai penguatan pendekatan persuasif, dialog antar

kelompok, dan deteksi dini potensi konflik sosial guna mencegah terjadinya gesekan horizontal yang dapat membatasi ruang kebebasan berserikat.

2) Indeks Kesetaraan

Dalam kerangka IDI, aspek kesetaraan menggambarkan sejauh mana kelompok masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses serta memanfaatkan berbagai sumber daya di berbagai sektor pembangunan. Aspek ini menekankan prinsip perlakuan yang setara dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan kekuasaan, baik dalam ranah kebijakan, pengelolaan anggaran, pengisian jabatan, maupun pelayanan publik. Sumber daya tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak dasar, yang secara keseluruhan berperan dalam memperkuat keberdayaan kelompok minoritas. Pemenuhan aspek kesetaraan menjadi elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Berikut capaian aspek kesetaraan dan indikator yang ada dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Tabel 3.65. Capaian Aspek Kesetaraan dan Indikator Penyusunnya

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	Kategori
	ASPEK KESETARAAN	**87,29**	**88,76**	**89,21**	**90,58**	**TINGGI**
1	Kesetaraan Gender	100	100	100	98,44	
2	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100	100	
3	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17	75	76,5	74,17	
4	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	91,09	93,07	91,73	94,22	
5	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antarwilayah	95,44	95,94	96,31	96,52	
6	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39	78	81,37	90,72	
7	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03	85,56	85,04	86,67	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Kelompok rentan dan minoritas belum sepenuhnya memiliki akses yang setara terhadap kebijakan, pelayanan publik, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta peluang dalam pengisian jabatan atau peran strategis di masyarakat. Kondisi ini memengaruhi capaian indikator kesetaraan dalam IDI.

(2) Solusi

Mendorong kebijakan daerah yang responsif dan inklusif terhadap kelompok rentan dan minoritas, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan pelayanan publik, agar seluruh warga negara memperoleh perlakuan yang setara dan berkeadilan.

12. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup

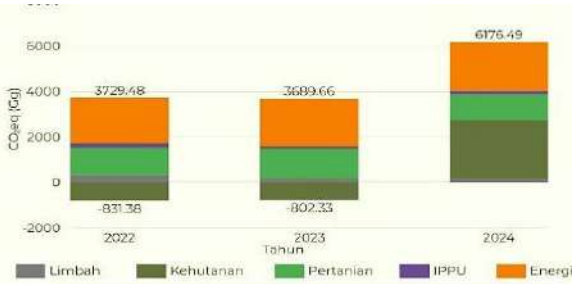
1) Penurunan emisi GRK (ribu ton CO_2eq)

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di DIY dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim dan pengendalian perubahan iklim, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Kebijakan tersebut, sejalan dengan sasaran utama dalam Visi RPJPN 2025-2045, yang kemudian diturunkan ke dalam RPJMN 2025-2029 serta selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah DIY yang tercantum dalam Perda DIY Nomor 10

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045 yang dijabarkan dalam Perda 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022–2027, khususnya pada Program Pemda berupa Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dengan Indikator Program Pemda yaitu Penurunan Emisi GRK (ribu Ton CO2eq) serta dukungan untuk pencapaian target *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional terhadap skenario BAU pada tahun 2030.

Pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi GRK di DIY dilaksanakan secara terintegrasi lintas sektor yang meliputi subbidang energi, transportasi, air limbah, persampahan, pertanian, kehutanan, industri dan *blue carbon*, melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung penurunan emisi GRK, antara lain efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah berwawasan lingkungan, praktik pertanian berkelanjutan, serta perlindungan dan restorasi ekosistem.

Pemda DIY menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi untuk perencanaan dan pelaporan penurunan emisi GRK. Pelaporan penurunan emisi GRK melalui Inventarisasi GRK (IGRK) bersifat *ex-post,* berfungsi sebagai sistem inventarisasi data emisi aktual atau serapan GRK untuk memonitor profil emisi dan pencapaian target NDC berdasarkan data kegiatan yang telah terealisasi pada tahun sebelumnya (tahun 2024) untuk dilaporkan pada tahun berjalan (tahun 2025) melalui SIGN-SMART KLH. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KLH pada tahun n+1. Adapun tingkat Emisi GRK per Sektor di DIY Tahun 2022-2024 sebagai berikut:



Sektor Emisi	Tahun		
	2022	2023	2024
Limbah	311.08	170.65	148.49
Kehutanan	-831.38	-802.33	2,575.94
Pertanian	1,202.12	1,305.36	1,147.19
IPPU	199.2	94.8	157.84
Energi	2,017.08	2,118.85	2,147.03
Total Tiap Tahun	**2,898.10**	**2,887.33**	**6,176.49**

Gambar 3.30. Tingkat Emisi GRK per Sektor di DIY Tahun 2022–2024

Sumber: Laporan Inventarisasi GRK DIY, DLHK DIY, 2025

Berdasarkan data IGRK, pada tahun 2024 terjadi peningkatan emisi GRK yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 3.289,16 Gg CO_2eq atau 113,92%, sehingga total emisi tahun 2024 mencapai 6.176,49 Gg CO_2eq. Peningkatan emisi tersebut terutama dipengaruhi oleh Sektor Kehutanan, yang pada tahun 2023 berperan sebagai penyerap karbon seiring rendahnya tingkat konversi lahan, namun pada tahun 2024 beralih menjadi penghasil emisi sebesar 2.575,94 Gg CO_2eq sebagai akibat meningkatnya konversi lahan terutama perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Selanjutnya, Sektor Energi menjadi penyumbang emisi terbesar kedua dengan kontribusi emisi sebesar 2.147,03 Gg CO_2eq.

Instrumen perencanaan untuk menghitung potensi penurunan emisi GRK dari aksi mitigasi GRK yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaporkan melalui *https://pprk.bappenas.go.id/aksara* yang bersifat *ex-ante.* Realisasi penurunan emisi GRK Tahun 2025 dihitung berdasarkan data aksi mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) tahun n-1 (tahun 2024) yang diukur melalui aplikasi AKSARA dan telah diverifikasi secara final oleh Sekretariat PRK BAPPENAS. Target dan Capaian Penurunan Emisi GRK Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.66. Target dan Capaian Penurunan Emisi GRK Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Penurunan Emisi GRK	Ribu Ton CO_2 eq	3.269	2.641	3.322,79	125,82%

Sumber: bapperida.jogjaprov.go.id/dataku, 2025

Realisasi penurunan emisi GRK Tahun 2025 mencapai sebesar 3.322,79 ribu Ton CO_2 eq melampaui target yang ditetapkan sebesar 2.641 ribu Ton CO_2 eq, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 125,82%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian tersebut menunjukkan peningkatan penurunan emisi GRK sebesar 53,79 ribu Ton CO_2 eq atau mencapai 101,65% dibandingkan capaian tahun 2023.

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Regulasi penurunan emisi GRK bersifat sangat dinamis dan belum sepenuhnya diturunkan ke dalam pedoman teknis operasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penyusunan kebijakan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya keselarasan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD GRK) dengan perkembangan regulasi termutakhir.
b) Daerah masih menghadapi kendala dalam melakukan analisis data penurunan emisi GRK secara komprehensif akibat belum terintegrasinya sistem AKSARA dan SIGNSMART secara otomatis. Pelaporan yang masih dilakukan secara terpisah berdampak pada belum optimalnya evaluasi kinerja penurunan emisi GRK tahunan dan meningkatkan beban kerja administratif serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data
c) Kontribusi emisi GRK dari Sektor Transportasi masih relatif tinggi seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. di sisi lain, percepatan

transisi menuju moda transportasi rendah emisi belum berjalan optimal, sehingga masih menjadi tantangan berkelanjutan dalam upaya pengendalian emisi di DIY.

d) Masih terdapat tekanan alih fungsi lahan yang belum sepenuhnya terkendali, sehingga menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan dan berimplikasi pada menurunnya daya dukung dan daya serap lingkungan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan pembangunan daerah.

e) Koordinasi lintas sektor, penyediaan dan peningkatan kualitas data pada sistem inventarisasi GRK sebagai instrument pengukuran dan pelaporan kinerja penurunan emisi GRK untuk pencapaian target penurunan emisi GRK belum berjalan secara optimal.

(2) Solusi

a) Pemda DIY melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan untuk memastikan pemutakhiran regulasi penurunan emisi GRK melalui penyusunan pedoman teknis operasional, antara lain Kajian Pembangunan Randah Karbon Tahun 2024 dan Kajian Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2025 yang disusun oleh DLHK DIY sebagai acuan pelaksanaan di daerah dan pemutakhiran regulasi RAD GRK. Selanjutnya, kedua kajian tersebut akan diintegrasikan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

b) Dorongan ke pemerintah pusat untuk mengintegrasikan kedua aplikasi yaitu SIGNSMART dan AKSARA, sehingga antara perencanaan dan pelaporan akan tercipta sinergitas dan sejalan dengan komitmen penurunan emisi

GRK di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini masih dalam proses pengintegrasian kedua sistem tersebut.

c) Pemda DIY mendorong emisi Sektor Transportasi melalui penguatan kebijakan transportasi berkelanjutan, antara lain dengan pengembangan dan optimalisasi angkutan umum massal, penyediaan transportasi berkelanjutan dan rendah emisi seperti bus listrik dan becak listrik dan transisi budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan pribadi menuju angkutan umum serta peningkatan integrasi sistem transportasi. Upaya tersebut juga didukung dengan penguatan regulasi sebagaimana tercantum dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Transportasi DIY Tahun 2025-2045, dan kolaborasi lintas sektor untuk menekan laju pertumbuhan emisi GRK secara berkelanjutan.

d) Upaya pengendalian alih fungsi lahan telah dilakukan melalui konsistensi integrasi dan implementasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang secara berkelanjutan sesuai ketentuan tata ruang, pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dan implementasi perlindungan lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), termasuk pengendalian izin konversi lahan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

e) Pemda DIY telah memperkuat tata kelola penurunan emisi GRK melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan data inventarisasi GRK. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas, keterpaduan

dan pemutakhiran data pada sistem inventarisasi GRK yang didukung penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian target penurunan emisi GRK.

13. Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang

1) Perwujudan Pola ruang

Implementasi pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan melalui proses perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tujuan untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bentuk penilaian terkait dengan perwujudan rencanan tata ruang dilakukan dengan upaya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Hasil penilaian perwujudan pola ruang merupakan perwujudan luas aktual kawasan. Adapun hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.67. Indikator Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang Tahun 2025

No	Program Pemda	Indikator Kinerja program pemda	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi	Keterangan
1	Keterpaduan perwujudan pola ruang	Perwujudan pola ruang	%	93,26	94,48	95,33	100,9	Tercapai

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian terhadap program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang dengan indikator Perwujudan Pola Ruang telah melampui dari target yang ditetapkan sebesar 94,48% telah tercapai sebesar 95,33% dengan persentase 100,90%. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY

Tahun 2023–2043, bahwa luas keseluruhan meliputi wilayah darat termasuk pulau pulau kecil, wilayah laut, dan wilayah udara yang ada di DIY sejumlah 550.008 ha. Dalam proses perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang didapatkan dari perhitungan perbandingan dua aspek, yaitu:

a) Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Pada Tahun 2025 sebesar 11.863,28 ha dari luas keseluruhan Kawasan lindung sebesar 12.123,58 ha sehingga persentase kesesuaian Kawasan lindung sebesar (97,85%);
b) Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pada Tahun 2025 sebesar 492.412,81 ha dari luas keseluruhan Kawasan budidaya sebesar 537.884,86 ha sehingga persentase kesesuaian Kawasan budidaya sebesar (91,55%).

Tabel 3.68. Perwujudan Pola Ruang

No	Peruntukan Pola Ruang	Sesuai		Luas Total
		Luas (ha)	Persentase	
A	**Kawasan Lindung**	**11.863,28**	**97,85**	**12.123,58**
1	Badan Air	495,24	99,98	495,33
2	Kawasan Cagar Budaya	9,20	100	9,20
3	Kawasan Konservasi	3.682,14	98,73	3.729,62
4	Kawasan Lindung Geologi	241,21	53,14	453,95
5	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	5.138,16	100	5.138,16
6	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya	2.297,32	100	2.297,32
B	**Kawasan Budidaya**	**492.412,81**	**91,55**	**537.884,86**
1	Kawasan Hutan Produksi	13.474,23	99,71	13.515,31
2	Kawasan Pariwisata	2.382,16	99,54	2.394,76
3	Kawasan Perikanan	226.102,86	100	226.102,86
4	Kawasan Permukiman	68.447,73	64,20	106.615,84
5	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	584,60	100	584,60
6	Kawasan Pertanian	178.769,01	97,79	182.803,91
7	Kawasan Peruntukan Industri	2.008,51	39,84	5.242,62
8	Kawasan Transportasi	562,10	89,66	626,96

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2025

Hasil dari penilaian tersebut didasarkan pada rerata perwujudan kawasan lindung (60%) ditambah dengan perwujudan Kawasan budidaya (40%). Sehingga berdasarkan data di atas maka tingkat perwujudan pola ruang adalah sebesar

a) Kawasan Lindung = 97,85 x 60% = 58,71
b) Kawasan Budidaya = 91,55 x 40% = 36,62

Sehingga secara kumulatif tingkat perwujudan pola ruang adalah sebesar 95,33

Tingkat perwujudan rencana pola ruang pada RTRW Pada Tahun 2025 terbagi menjadi 2 yaitu tingkat perwujudan kawasan lindung dan tingkat perwujudan Kawasan budi daya sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS-700 PR.O1.O1/XI/2023 tentang Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. Berdasarkan analisis yang ada menunjukkan bahwa Kawasan lindung yang paling tinggi tingkat perwujudannya adalah kawasan cagar budaya, kawasan pencadangan konservasi di laut, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebesar 100%. Sedangkan kawasan lindung yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan lindung geologi sebesar 53,14%. Sementara untuk Kawasan budi daya yang paling tinggi tingkat perwujudannya adalah kawasan perikanan sebesar 100%. Sedangkan kawasan budi daya yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan peruntukkan industri sebesar 39,84%.

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam pencapaian program pemda di urusan tata ruang, antara lain:

a) Terdapat beberapa rencana pola ruang yang belum terwujud antara lain: Kawasan lindung geologi, kawasan permukiman, dan kawasan peruntukan industri.
b) Berdasarkan capaian hingga tahun 2025, penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih terbatas, dimana dari 22 RDTR yang direncanakan, sebanyak 11 RDTR belum ditetapkan.
c) Data dan informasi pertanahan dan tata ruang belum terintegrasi secara optimal sehingga proses berbagi pakai data antar stakeholder belum maksimal.
d) Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Solusi

Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dalam program pemda tersebut antara lain:

a) Melakukan pengendalian dengan mendorong dan melakukan pemantauan secara intensif terhadap penggunaan lahan khususnya tegalan/ladang pada kawasan lindung geologi dengan memperhatikan agar kegiatan yang ada tidak mengubah bentang alam pada ekosistem karst yang berpotensi mengganggu fungsi imbuhan air tanah dan fungsi lindung geologi. Sedangkan pada kawasan rencana pola ruang permukiman dan industri dilakukan adanya identifikasi dan sinkronisasi rencana pola ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan agar arah kebijakan spasial dan ekonomi saling mendukung dan memperkuat.

b) Percepatan dalam penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan integrasi OSS melalui pendampingan terhadap kabupaten/kota;
c) Integrasi data dan informasi pertanahan melalui sistem informasi data *spasial Command Center* Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Yang dibuktikan dengan jumlah metadata yang terintegrasi meningkat dari 173 di tahun 2024 menjadi 228 pada tahun 2025 dan produsen data dari 30 OPD produsen menjadi 32 OPD produsen pada tahun 2025.
d) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk lebih dioptimalkan.

2) Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan keistimewaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen RPJMD DIY Tahun 2027-2027 mengatur bahwa target indikator program pembangunan daerah khususnya urusan pertanahan (asimetris keistimewaan), sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.69. Target dan Capaian Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang Tahun 2025

No	Program Pemda	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Reali-sasi	Keterangan
1	Keterpaduan perwujudan pola ruang	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan,	%	29,60	27,50	33,26	120,95	Tercapai

No	Program Pemda	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Reali-sasi	Keterangan
		Kadipaten, dan Tanah Desa						

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2026

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa capaian terhadap program keterpaduan perwujudan pola ruang dengan indikator capaian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan bidang tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Desa telah melampui dari target yang ditetapkan sebesar 27,50% telah tercapai sebesar 33,26% dengan persentase 120,95%. Indikator program pemda tersebut berupa capaian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.70. Perhitungan Capaian Indikator Program Pemda Urusan Pertanahan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Keluaran	Capaian Kinerja Tahun 2025	Sumber Data
10	Pertanahan	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa *Rerata (Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa) + (Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa)*	1. Persentase pendaftaran sertipikat bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa a. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 14.396 bidang. b. Pendaftaran Penyesuaian Sertipikat Tanah Kalurahan sejumlah 10.446 bidang. c. Pendaftaran sertipikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 5.204 bidang. Jadi persentasenya (14.396 + 10.446 + 5.204) = 30.046 bidang 30.046 / 64.323 = 46,71% 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG dan Tanah Desa a. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah SG/ PAG sampai dengan triwulan IV sebanyak 2.424	Dispertaru DIY

No	Urusan Pemerintahan	Keluaran	Capaian Kinerja Tahun 2025	Sumber Data
			rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2025 sebanyak 224 rekomendasi terbit) b. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah desa sampai dengan triwulan IV sebanyak 536 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2025 sampai dengan Desember sebanyak 213 rekomendasi terbit) c. Akumulasi rekomendasi pembaruan HGB sampai dengan akhir triwulan IV sebanyak 1.528 rekomendasi (tahun 2025 sampai dengan Desember 2025 sebanyak 284 surat rekomendasi terbit) Jadi persentasenya (2.424 + 536 + 1.528) /22.661= 19,80% Jadi secara rerata terhadap persentase pendaftaran sertipikat bidang Tanah Kasutanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa dan Persentase kesesuaian pendaftaran tanah SG, PAG dan TD, antara lain (46,71% + 19,80%) /2 = 33,26%	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2026

Berdasarkan data hasil capain di atas maka dapat terlihat bahwa Indikator Kinerja Keluaran Kunci (IKK) Asimetris urusan Pertanahan didukung oleh dua indikator, yaitu:

a. Pendaftaran Sertipikat bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

   Pada pendaftaran sertipikat bidang yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Sebagaimana hasil identifikasi jumlah Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dilakukan pada tahun 2015 bahwa jumlah keseluruhan tanah tersebut sejumlah 64.323 bidang. Rincian dari jumlah bidang tanah tersebut terdiri dari

(1) Tanah Kasultanan sejumlah 13.688 bidang;
(2) Tanah Kadipaten sejumlah 356 bidang;
(3) Tanah Desa sejumlah 50.279 bidang.

Tahun 2025 yang merupakan tahun ke-3 dari RPJMD DIY Tahun 2022–2027 menunjukkan bahwa capaian dari jumlah bidang tanah yang sudah dilakukan proses pendaftaran secara rinci dapat terlihat dalam rincian di bawah ini, antara lain:

b. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 14.396 (bertambah 281 bidang dari realisasi tahun 2024) bidang dengan rincian antara lain :

(1) Kota Yogyakarta sejumlah 898 bidang
(2) Kab. Bantul sejumlah 3.846 bidang
(3) Kab. Kulon Progo sejumlah 2.470 bidang
(4) Kab. Gunungkidul sejumlah 4.046 bidang
(5) Kab. Sleman sejumlah 3.136 bidang

c. Pendaftaran Penyesuaian Sertipikat Tanah Kalurahan sejumlah 10.446 (bertambah 742 bidang dari realisasi tahun 2024) dengan rincian antara lain:

(1) Kab. Bantul sejumlah 1.813 bidang
(2) Kab. Kulon Progo sejumlah 2.923 bidang
(3) Kab. Gunungkidul sejumlah 2.947 bidang
(4) Kab. Sleman sejumlah 2.763 bidang

d. Pendaftaran sertipikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 5.204 bidang (bertambah 1.629 bidang dari realisasi tahun 2024) dengan rincian antara lain:

(1) Kab. Bantul sejumlah 1.891 bidang
(2) Kab. Kulon Progo sejumlah 296 bidang
(3) Kab. Gunungkidul sejumlah 2.058 bidang
(4) Kab. Sleman sejumlah 959 bidang

3) Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Dengan terealisasikannya legalitas tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat maka harus dilakukan pemantauan khususnya terhadap kesesuaian pemanfaatan baik tata ruang maupun jenis penggunaannya sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada tahun 2025 didapatkan hasil antara lain :

a. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah SG/ PAG sampai dengan triwulan IV sebanyak 2.424 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2025 sebanyak 224 rekomendasi terbit);
b. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah desa sampai dengan triwulan IV sebanyak 536 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2025 sebanyak 213 rekomendasi terbit);
c. Akumulasi rekomendasi pembaruan HGB sampai dengan akhir triwulan IV sebanyak 1.528 rekomendasi (tahun 2025 sampai dengan Desember 2025 sebanyak 284 surat rekomendasi terbit).

Rekomendasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada pihak Kasultanan dan Kadipaten untuk dilakukan proses selanjutnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan. Hasil dari kesesuaian ini juga untuk memastikan bahwa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa bisa bermanfaat untuk kemakmuran masyarakat khususnya kategori miskin.

4) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(1) Terdapat kendala akibat ketergantungan pada faktor eksternal, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, terkait penyesuaian kuota pendaftaran. Pada tahun 2025, fokus kegiatan masih pada penyelesaian tunggakan target penerbitan sertipikat SPS yang telah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya.

(2) Belum adanya rumusan yang lebih konkrit kaitannya dengan terhadap status keberadaan tanah *wedi kengser*, sehingga bidang tanah tersebut belum bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya.

(3) Terbatasnya ketersediaan peta bidang tanah dari Kantor Pertanahan sehingga belum bisa secara optimal dilakukan proses pendaftaran.

b. Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas antara lain :

(1) Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Kanwil ATR/BPN DIY dan Kantah Kabupaten/Kota terkait komitmen penyelesaian tunggakan sertipikasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan.

(2) Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTR) pada tanggal 27 November 2025 telah dilaksanakan pembahasan kaitannya dengan pengelolaan tanah timbul (*Aanslibbing*). Adapun hasil dari GTRA tersebut yaitu perlu untuk dilakukan proses konsolidasi kembali kaitannya dengan keberadaan status tanah tersebut, karena masih terdapat perbedaan persepsi ataupun pemahaman terkait objek tersebut karena tidak hanya

mendasarkan pada regulasi hukum saja namun juga dengan melihat dari faktor sosial dan sejarahnya.

(3) Optimalisasi pelaksanaan kerjasama antara Pemda DIY dengan Kementerian ATR/BPN dalam hal berbagi data sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani dengan Nomor 119/13806 dan Nomor: 10/SKB-34.HP/XII/2023 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Pembangunan di Bidang Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang. Salah satu bentuk implementasi yang sudah dilaksanakan adalah berbagi pakai data foto udara di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul.

14. Program Peningkatan Ketahanan Daerah - Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

1) Kondisi Umum

Sepanjang tahun 2025 tercatat berbagai peristiwa bencana alam. Dalam kurun waktu tahun tersebut, tiga jenis bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) DIY, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.275 kejadian bencana, baik bencana alam maupun nonalam, yang terjadi di wilayah DIY.

Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Suburusan Penanggulangan Bencana Tahun 2025

No.	Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Tahun 2025		
			Target	Capaian	Persentase
1	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana			

No.	Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Tahun 2025		
			Target	Capaian	Persentase
	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,76	0.76	100%

Sumber: Penyampaian Hasil IKD dan IRBI tahun 2025 (Surat BNPB Nomor: B-43/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

Untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah yang terarah, Pemda DIY melakukan pengembangan dan penguatan faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Capaian target tersebut merupakan angka konversi dari hasil perhitungan BNPB yang sebesar 0,76 dari target 0,76 atau dengan persentase capaian 100%. Capaian target tahun 2025 tercapai terutama karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan capaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian Pemda DIY ke depan, antara lain:

a. Tingkat kerentanan bencana di DIY cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan, serta dampak perubahan iklim; dan
b. Kapasitas penanggulangan bencana di DIY belum merata dan masih memerlukan penguatan secara menyeluruh pada seluruh aspek kapasitas.

Ketercapaian Kinerja Sasaran Didukung oleh Program-Program Berikut:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan strategis yang mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah, sebagai landasan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana.

b. Penerapan sistem peringatan dini yang berfungsi aktif di wilayah rawan bencana. Saat ini, BPBD DIY telah memasang beberapa sensor *Early Warning System* (EWS) tanah longsor di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Namun demikian, penambahan sensor EWS masih diperlukan agar cakupan sistem peringatan dini dapat menjangkau seluruh wilayah DIY.
c. Pelaksanaan pembentukan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana dilakukan sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Program ini merupakan salah satu program prioritas BNPB yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Pada tahun 2024, kegiatan pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan di lima kalurahan/kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di DIY.
d. BPBD DIY menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
e. Pelatihan bagi masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana, dikemas dalam bentuk penyampaian materi/paparan serta diskusi interaktif, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mitigasi bencana.

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap sistem penanggulangan bencana di DIY, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan penguatan ke depan, yaitu:

a) Kajian Risiko Bencana Wilayah DIY Tahun 2022–2026 belum mencakup tingkat Kapanewon/Kemantren, sehingga data risiko di tingkat lokal belum tersedia secara rinci.

b) Pemda DIY belum menetapkan kebijakan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
c) Pemda DIY belum sepenuhnya memiliki kebijakan atau SOP yang mengatur pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini (*Early Warning System* / EWS).
d) Pemda DIY belum menyusun kebijakan atau SOP terkait mekanisme pendataan dan distribusi bantuan bagi korban bencana.

b. Solusi

a) Perubahan Kajian Risiko Bencana Wilayah DIY Tahun 2022–2026

Diusulkan penambahan analisis hingga tingkat Kapanewon/Kemantren.

Manfaat**:** Penyempurnaan cakupan kajian risiko hingga tingkat lokal akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai wilayah rawan bencana, sehingga strategi mitigasi dapat direncanakan dan dilaksanakan secara lebih terarah.

b) Penyusunan SOP Pelatihan dan Pendidikan Penanggulangan Bencana

Disusun berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB.

Manfaat**:** SOP ini memastikan pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai standar nasional, sehingga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat terkait.

c) Penyusunan dan Penetapan SOP Pengorganisasian dan Pemasangan EWS

SOP ini mencakup prosedur pemasangan, pengoperasian, dan pengujian sistem *Early Warning System* (EWS).

Manfaat**:** Menjamin bahwa sistem peringatan dini berfungsi optimal, diuji secara berkala, dan dapat memberikan informasi peringatan yang efektif kepada masyarakat saat terjadi potensi bencana.

d) Percepatan Penyelesaian Keputusan Gubernur DIY terkait Kluster Pengungsian dan Perlindungan

Regulasi ini mengatur mekanisme pengelolaan tempat pengungsian dan perlindungan pengungsi selama tanggap darurat.

Manfaat**:** Dengan adanya regulasi resmi, pengelolaan pengungsian menjadi lebih terorganisir dan hak-hak pengungsi dapat terjamin, meningkatkan efektivitas respons bencana.

e) Penyusunan Kebijakan/SOP Mekanisme Pendataan Bantuan Korban Bencana

SOP ini mengatur prosedur pengumpulan, verifikasi, dan pencatatan data korban bencana.

Manfaat**:** Memastikan pendataan korban dilakukan secara sistematis, sehingga distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

D. PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Pemda DIY memperoleh beberapa penghargaan sebagai apresiasi atas keberhasilan dalam melaksanakan kinerja urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, antara lain:

1. Penghargaan Peringkat Terbaik 3 Tingkat Nasional Kategori DPRD Provinsi dari Kementerian Hukum RI di Jakarta Kepada Sekretariat DPRD DIY Pada Tahun 2025 Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dari Kementerian Hukum RI.
2. Penghargaan Terbaik 3 tingkat Nasional *Indonesia's SDGs Action Awards* 2025 Kategori Pemda Terbaik terkait inovasi terobosan di bidang ketahanan pangan melalui metode budidaya lele *gacor* (Lele Generasi Air Kocor) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas RI).
3. Penghargaan peringkat Terbaik 1 (satu) tingkat Nasional dalam penghargaan pemerintah daerah inklusi disabilitas tahun 2025 pada ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2025 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas RI).
4. Penghargaan Reformasi Kalurahan Inklusif tingkat Nasional pada Apresiasi BRIDA/Bapperida OPTIMAL Kategori Optimalisasi Potensi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional RI.
5. Penghargaan peringkat 3 Kinerja Tinggi tingkat Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2025 dengan Skor 3,6645 dan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024 yang diberikan Menteri Dalam Negeri RI.
6. Penghargaan SPM *Awards* Nasional peringkat ke-1 (satu) Penerapan SPM regional Jawa dengan nilai 98,66. DIY masuk dalam kategori 10 Provinsi Terbaik yang diberikan Menteri Dalam Negeri RI.
7. Penghargaan Terbaik I (satu) Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi pada Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) memperoleh penilaian 99.22 dengan predikat AA (ISTIMEWA) atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.

8. Penghargaan sebagai juara 1 (satu) capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 Skala Nasional yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI.
9. Penghargaan sebagai juara 2 Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dalam Penghargaan *Harmony Awards* Tahun 2025 skala nasional yang diberikan Kementerian Agama RI.
10. Penghargaan Keberhasilan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tingkat Nasional Tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI.
11. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2025 Terbaik.
12. Penghargaan juara 2 tingkat Nasional sebagai Provinsi Capaian Terbaik Layanan KJSU-KIA dari Kementerian Kesehatan RI.
13. Penghargaan juara 3 tingkat Nasional sebagai Dinas Kesehatan Provinsi Terbaik dalam Pelaporan SATUSEHAT Simona untuk Pelayanan Kefarmasian dan Ketersediaan Obat untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan RI.
14. Penghargaan juara 1 (satu) Atas Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) *Domain* Pendidikan Tertinggi Tingkat Nasional tahun 2025 yang diberikan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
15. Penghargaan kepada DIY capaian Terbaik Tingkat Nasional sebagai Provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah tahun 2025 yang diberikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
16. Penghargaan kepada DIY sebagai Pemerintah Provinsi dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik Tingkat Nasional yang diberikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
17. Penghargaan Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai juara 2 Tingkat Nasional dengan kategori AA “Sangat Memuaskan” berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2024 yang diberikan Arsip Nasional RI.
18. Piagam Penghargaan Anugerah dengan Kategori Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa menjadi salah satu pemerintah Provinsi yang dinilai sebagai provinsi yang paling konsisten dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan RI.

19. Sertifikat Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) dan Cagar Budaya Indonesia 2025 kepada Pemerintah Daerah DIY sebanyak 33 Sertifikat WBTb dan 28 Sertifikat Cagar Budaya Nasional, serta memperoleh penghargaan sebagai Daerah dengan Jumlah Penetapan Cagar Budaya Nasional Terbanyak Tahun 2025 dari Kementerian Kebudayaan RI.
20. Piagam Penghargaan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai Provinsi Layak Anak Tahun 2025, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
21. Piagam Penghargaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kategori Kualitas Data Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2025, dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.
22. Penghargaan Pemda DIY sebagai Juara 1 (satu) Pemenang Kategori Provinsi pada Mandaya *Awards* dalam koordinasi dan integrasi program pemberdayaan masyarakat secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI.
23. Penghargaan Pemda DIY sebagai Juara 1 (satu) Kategori Program Inkubasi Usaha Syariah pada Anugerah Adinata Syariah 2025.
24. Penghargaan Pemda DIY sebagai Juara 1 (satu) Kategori Sekolah Pelopor dalam Ekonomi Syariah pada Anugerah Adinata Syariah 2025.
25. Penghargaan Pemda DIY Juara 2 Kategori Keuangan Mikro Syariah pada Anugerah Adinata Syariah 2025 yang diberikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
26. Penghargaan Pemda DIY sebagai Juara 3 Kategori Inovasi di Sektor Ekonomi Syariah pada Anugerah Adinata Syariah 2025 yang diberikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
27. Penghargaan Pemda DIY sebagai Juara 3 Kategori Keuangan Sosial Syariah pada Anugerah Adinata Syariah 2025 yang diberikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
28. Penghargaan Pemda DIY memperoleh Kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa-Bali pada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award Tahun 2025.
29. Penghargaan Pemda DIY sebagai Juara 2 TPID Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali Tahun 2025.

30. Penghargaan atas Penetapan *Geopark* Jogja sebagai *Geopark* Nasional Skala Nasional dengan Nomor Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 171.K.GL.01/MEM.G/2025 pada tanggal 7 Mei 2025 yang diberikan Kementerian ESDM RI.
31. Penghargaan kategori terbaik *Merit Prize in Stone Category* - Indonesia *Handicraft INACRAFT 2025 Award* skala nasional yang diberikan oleh *Indonesia Handicraft INACRAFT* dan ditandatangani oleh *World Craft Council Asia Pacific Region* dan ASEPHI Pusat tanggal 7 Februari 2025.
32. Penghargaan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X pada *25 Years of INACRAFT* (1999–2025) Tingkat Nasional yang diterbitkan secara resmi oleh ASEPHI Pusat.
33. Penghargaan juara 1 (satu) Tingkat Nasional Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Berkinerja Unggul Tahun 2025 dari Kementerian Perdagangan RI.
34. Penghargaan sebagai juara 1 (satu) Apresiasi Capaian Skor Pola Pangan Harapan kategori provinsi Tingkat Nasional terkait Pola Pangan Harapan dari Badan Pangan Nasional RI.
35. Penghargaan tingkat nasional kepada Provinsi DIY sebagai Provinsi dengan Validasi Data 100% untuk seluruh bidang Kelautan Perikanan (KP) dalam Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan semester II Tahun 2024 yang diberikan pada 28 Mei 2025 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
36. Penghargaan tingkat nasional dengan nama penghargaan Sebagai Pembina Produktivitas kepada Gubernur DIY dalam acara *Naker Inspiration and Leadership Award 2025* tanggal 8 Desember 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
37. Penghargaan Pemda DIY sebagai Peringkat Proper Biru Periode 2023-2024, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI pada tahun 2025.
38. Penghargaan atas keberhasilan mempertahankan predikat sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” (Kategori A) Tingkat Nasional berdasarkan Penilaian dan Evaluasi

Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

39. Penghargaan Anugerah HUMAS Indonesia (AHI) Tingkat Nasional kategori Institusi Terpopuler di Media Sosial 2025 sub kategori Pemerintah Provinsi dari Humas Indonesia.
40. Penghargaan sebagai juara umum Tingkat Nasional Anugerah Media Humas (AMH) 2025 dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
41. Penghargaan sebagai juara terbaik 1 (satu) Tingkat Nasional Anugerah Media Humas (AMH) 2025 kategori *website* Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
42. Penghargaan sebagai juara terbaik 2 Tingkat Nasional Anugerah Media Humas (AMH) 2025 kategori Media *Audiovisual* Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
43. Penghargaan sebagai juara terbaik 3 Tingkat Nasional Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 kategori Ketersediaan Layanan Sinyal/jaringan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
44. Penghargaan Provinsi DIY Peringkat 1 Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2025 diberikan oleh Kementarian Kesehatan RI.

E. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

1) Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

(1) Kondisi Umum

Salah satu misi pembangunan Indonesia adalah transformasi sosial, yaitu upaya membangun manusia

yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang merata, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan adaptif dengan kualitas dan relevansi pendidikan yang terus meningkat sesuai tuntutan global dan zaman. Dukungan terhadap pencapaian transformasi sosial melalui pendidikan Pada Tahun 2025 diawali dengan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas serta digitalisasi pembelajaran.

Revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan akses layanan pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman. Sedangkan strategi digitalisasi pembelajaran diarahkan pada penguatan ekosistem pembelajaran digital yang mencakup peningkatan literasi digital, integrasi layanan pendidikan berbasis teknologi, serta pengembangan inovasi pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan guru, peserta didik dan satuan pendidikan melalui partisipasi semesta dalam menghadapi tantangan masa depan. Dukungan Pemda DIY dalam bidang pendidikan digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.72. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Capaian 2025 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satu-an	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyela-rasan 2027	Capaian s.d. 2025 terhadap Target RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan Tujuan: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga									
1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,92	9,8	10,2	104,08	9,72	9,94	102,62
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan	%	71,77	76,13	80,48	105,71	21,99	82.71	97,30

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satu-an	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyela-rasan 2027	Capaian s.d. 2025 terhadap Target RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
	kemampuan literasi Mahir jenjang SMA								
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	%	75,66	78,49	81,32	103,61	19,01	81,92	99,27
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	%	38,81	51,35	52,35	101,95	14,01	54,15	96,68
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	%	51,14	57,69	57,69	100	11,21	58,29	98,97
Indikator Kinerja Sasaran Sasaran: Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	%	90,36	90,00	93,03	103,37	90,03	90,61	102,67
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	%	93,21	93,76	94,31	100,59	50,76	94,81	99,47
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	%	88,06	89,33	90,59	101,41	30,89	91,09	99,45
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	%	80,28	81,51	82,73	101,50	51,99	83,23	99,40
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	%	73,14	75,18	77,21	102,70	30,42	77,71	99,36
6	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	92,11	91,20	91,40	100,22	36,67	91,90	99,46
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	%	75,34	71,00	75,34	106,11	51,38	73,30	102,78

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Disdikpora DIY, 2025

Dalam tujuan kinerja urusan pendidikan terdapat lima indikator. Pada indikator Rata-rata lama sekolah, capaian Rata-Rata Lama Sekolah untuk tahun 2025 di DIY berdasarkan data BPS adalah 10,2 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk DIY yang berusia 15 tahun ke atas menempuh pendidikan selama 10,2 tahun atau telah mencapai jenjang pendidikan menengah. Capaian ini telah melampaui target tahun 2025 sebesar 9,8 tahun maupun target penyelarasan tahun 2027 sebesar 9,94 tahun.

Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih menjadi salah satu tolok ukur kualitas satuan pendidikan. Kompetensi literasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks, baik yang berbentuk teks informasional maupun teks fiksi. Kompetensi numerasi merupakan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Pada indikator proporsi kemampuan literasi dan numerasi, berdasarkan hasil rapor pendidikan DIY yang dirilis pada tahun 2025 capaian proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir jenjang SMA adalah sebesar 80,48%. Capaian proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mahir jenjang SMA adalah sebesar 81,32%. Capaian proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir jenjang SMK adalah sebesar 52,35% dan capaian proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mahir jenjang SMK adalah sebesar 57,69%. Berdasarkan capaian ini, rata-rata siswa SMA di DIY telah memiliki penguasaan kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Sedangkan untuk kemampuan literasi dan numerasi siswa SMK di DIY masih

memerlukan peningkatan untuk mencapai tingkatan mahir. Seluruh capaian proporsi literasi dan numerasi telah melampaui target tahun 2025 namun masih berada di bawah target penyelarasan tahun 2027.

Dalam sasaran kinerja urusan pendidikan, terdapat tujuh indikator pengukuran. Indikator capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun di DIY tahun 2025 sesuai data BPS adalah sebesar 93,03%. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16–18 tahun dihitung berdasarkan perbandingan jumlah anak sekolah pada usia jenjang pendidikan menengah dengan jumlah anak pada kelompok usia 16–18 tahun di DIY. Berdasarkan capaian APS tersebut, 93,03% dari anak berusia 16-18 tahun di DIY telah menempuh pendidikan. Capaian APS DIY tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan Pada Tahun 2025 maupun target penyelarasan tahun 2027.

Pengukuran kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih diukur melalui indikator kinerja sasaran bidang pendidikan, yaitu proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA, proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA, proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK, dan capaian untuk proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA adalah 94,31%. Capaian untuk proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA adalah 90,59%. Capaian untuk Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK adalah 82,73. Capaian untuk Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK adalah sebesar 77,21%.

Seluruh capaian ini telah melampaui target pada tahun 2025 dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 walaupun masih berada di bawah target penyelarasan tahun 2027. Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMA dan SMK di DIY telah cukup menguasai kemampuan literasi maupun numerasi pada tingkatan penalaran konsep.

Pengukuran Tingkat Penyerapan Lulusan SMK merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja bidang pendidikan yang mampu menggambarkan keberlanjutan para siswa setelah menamatkan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Pada tahun 2025, capaian indikator Tingkat Penyerapan Lulusan SMK sebesar 91,40% dan telah melampaui target Pada Tahun 2025 walaupun masih berada di bawah target penyelarasan tahun 2027. Capaian ini menunjukkan bahwa 91,40% lulusan SMK di DIY telah terserap pada pasar kerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pengukuran Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4–18 tahun disabilitas menunjukkan salah satu bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi oleh Pemda DIY. Pada Tahun 2025, hasil pengukuran Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4–18 tahun disabilitas berdasarkan Rapor Pendidikan DIY mencapai 75,34% dari target 71,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa 75,34% dari anak-anak berkebutuhan khusus usia 4–18 tahun di DIY telah mendapatkan layanan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan khusus.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Pada tahun 2025, capaian Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun di DIY adalah 93,03%, dengan demikian sesuai perhitungan masih terdapat penduduk usia 16–18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan menengah, salah satunya ditunjukkan melalui Angka Putus Sekolah SMA/SMK DIY yang mencapai 0,24% Pada Tahun 2025.

b) Solusi

Upaya penurunan angka putus sekolah SMA/SMK di DIY antara lain:

(a) Pemberian bantuan berupa beasiswa bagi para anak putus sekolah yang memiliki kendala secara ekonomi agar dapat kembali ke bangku sekolah dan menuntaskan pendidikan di jenjang menengah;
(b) Pemberian pendampingan khusus dan dorongan untuk meningkatkan motivasi bersekolah bagi anak-anak putus sekolah karena alasan sosial psikologis. Pemberian alternatif pendidikan nonformal juga dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yang mengalami kesulitan penyesuaian diri di lembaga pendidikan formal.



Gambar 3.31. Para Penerima Penghargaan Kompetisi Bidang Pendidikan dalam Anugerah Prestasi Tahun 2025

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 anggaran Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp1.626.555.100.121,00 yang dibagi dalam 6 program, 16 kegiatan, dan 82 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp1.552.018.110.912,00 (95,42%) sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebesar 99,62%. Adanya deviasi pada realisasi fisik disebabkan tidak tercapainya target penyaluran BOSDA jenjang pendidikan menengah swasta dan beasiswa inklusi serta tidak tercapainya target jumlah mahasiswa untuk Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Tidak tercapainya target jumlah penerima BOSDA jenjang pendidikan menengah swasta dan beasiswa inklusi disebabkan adanya penyesuaian jumlah siswa calon penerima pada saat proses verifikasi beasiswa. Tidak tercapainya target jumlah mahasiswa baru di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta karena terdapat beberapa calon mahasiswa yang mengundurkan diri saat pendaftaran ulang.

Tabel 3.73. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Induk)	nilai	86,71	89,8
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLPT)	nilai	86,71	91,57
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BTKP)	nilai	86,71	91,52
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kota Yogyakarta)	nilai	86,71	91,94
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Bantul)	nilai	86,71	91,13
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Gunungkidul)	nilai	86,71	92,5
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kulon Progo)	nilai	86,71	90,48
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Sleman)	nilai	86,71	92,3
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	14
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	8238	8238
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	23
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	25
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	Orang	40	40
			Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	%	55	51,79
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,19	0,24
			Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	%	100	110,4
			Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	%	77,52	96,94
			Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	%	86,15	94,15
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	80,5	82,35
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	%	58,62	91,43

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	%	49,46	78,31
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	%	46,98	82,61
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	%	41,47	82.61
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	%	46,83	84,55
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4	4
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	28443	26930
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	2020	2023
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	326	302
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	69	69
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	170	170
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5	5
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	45	45
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	40	40
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	118	118
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	25	25
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	37284	35560
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	1110	1106
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	518	492
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	49	49
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	204	204
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	55	55
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	40	40
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1000	1000
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3	3
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	5164	5164
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	720	728
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	586	547
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	225	225
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	81	81
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	3	3
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	1	1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	4
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	9	9
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	246	246
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	%	96,21	96,8
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	1	1
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	2	2
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
			Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	Dokumen	10	23
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	%	56,33	76,96
			Pembinaan Muatan Lokal			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan	17	17
			Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa Memberantas Kemiskinan (MOMENKU SIAP BERKEMAS)	kelompok	40	40
			Kartu Cerdas	siswa	15200	15200

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Beasiswa Inklusi Pendidikan Khusus	Peserta didik	785	785
			Gladi Kawruh dan Ngudar Kawruh Tembang	episode	18	18
			Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah	sekolah	110	110
			Olimpiade Bahasa dan Aksara Jawa	kegiatan	1	1
			Penilaian Buku Pendidikan dengan Muatan Lokal	Buku	8	17
			Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan (JKP) SMA	siswa	200	300
			Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan (JKP) SMK	siswa	400	800
			Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa	mahasiswa	100	100
			Beasiswa Pendidikan Khusus	siswa	5054	4923
			Beasiswa Inklusi Pendidikan Khusus	peserta didik	785	785
			Beasiswa Retrieval SMA	siswa	100	100
			Beasiswa Retrieval SMK	siswa	125	125
			Pendidikan Khas Kejogjaan	kegiatan	1	1
			Pengembangan Model PAUD	kegiatan	2	2
			Beasiswa SEGERA BERPUSAKA	siswa	25	14
			Festival Keistimewaan	event	1	1
			Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit	2	2
			Pengadaan gamelan	paket	2	2
			Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit	2	2
			Pengadaan Gamelan Perunggu	Paket	2	2
			Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta			
			Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang	98	84
			Penyelenggaraan Operasional Akademi Komunitas Seni dan Budaya	bulan	12	12
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	50	50
			Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	1	1
			Inovasi Pelayanan Publik Showroom SLBN Pembina	inovasi	1	1

Sumber: Disdikpora DIY, 2025

b. Urusan Kesehatan

(1) Kondisi Umum

Pada Tahun Anggaran 2025, urusan kesehatan di DIY merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah guna meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Secara umum, kondisi kesehatan masyarakat berada pada tingkat yang relatif stabil, didukung oleh ketersediaan dan akses layanan kesehatan yang cukup memadai, baik pada pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. Pemda DIY secara konsisten mendorong penguatan sistem kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif, dengan tetap memperhatikan kesinambungan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.

Namun demikian, penyelenggaraan urusan kesehatan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian antara lain penurunan angka *stunting* yang belum merata antarwilayah, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus, tingginya proporsi penduduk lanjut usia beserta risiko kesehatan yang menyertainya, serta masih adanya ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan di wilayah tertentu. di samping itu, perubahan pola penyakit dan gaya hidup masyarakat menuntut kebijakan serta program kesehatan yang lebih adaptif dan responsif.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemda DIY melaksanakan kebijakan dan program kesehatan secara terintegrasi sesuai dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2025, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, serta dukungan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya yang dilakukan meliputi penguatan layanan kesehatan primer melalui puskesmas, peningkatan intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan *stunting*, pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui edukasi dan

skrining kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan lanjut usia.

Pada penerapan SPM Bidang Kesehatan, terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemda DIY, yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Berkaitan dengan implementasi SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemda DIY melakukan upaya pencegahan timbulnya KLB di tingkat provinsi melalui penguatan sinergi data dan informasi dengan kabupaten/kota, pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian, penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon cepat, serta pemenuhan reagen dan peralatan pendukung kegiatan surveilans dan epidemiologi..

Pada Tahun 2025 tidak terdapat kejadian krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di DIY. Meskipun demikian, mengingat wilayah DIY memiliki potensi bencana yang cukup besar, kegiatan pra-krisis tetap dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespons dan memitigasi risiko, sehingga dapat meminimalkan terjadinya krisis kesehatan.

Selain itu, Pemda DIY terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan, termasuk melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan,

guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan berkeadilan.

Pada Tahun Anggaran 2025, urusan kesehatan di DIY merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Secara umum, kondisi kesehatan masyarakat berada pada tingkat yang relatif stabil, didukung oleh ketersediaan dan akses layanan kesehatan yang cukup memadai, baik pada pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. Pemda DIY secara konsisten mendorong penguatan sistem kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif, dengan tetap memperhatikan kesinambungan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.

Namun demikian, penyelenggaraan urusan kesehatan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian antara lain penurunan angka *stunting* yang belum merata antarwilayah, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus, tingginya proporsi penduduk lanjut usia beserta risiko kesehatan yang menyertainya, serta masih adanya ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan di wilayah tertentu. di samping itu, perubahan pola penyakit dan gaya hidup masyarakat menuntut kebijakan serta program kesehatan yang lebih adaptif dan responsif.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemda DIY melaksanakan kebijakan dan program kesehatan secara terintegrasi sesuai dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2025, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, serta dukungan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN). Upaya yang dilakukan meliputi penguatan layanan kesehatan primer melalui puskesmas, peningkatan intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan *stunting*, pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui edukasi dan skrining kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan lanjut usia.

Pada penerapan SPM Bidang Kesehatan, terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemda DIY, yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Berkaitan dengan implementasi SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemda DIY melakukan upaya pencegahan timbulnya KLB di tingkat provinsi melalui penguatan sinergi data dan informasi dengan kabupaten/kota, pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian, penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon cepat, serta pemenuhan reagen dan peralatan pendukung kegiatan surveilans dan epidemiologi..

Pada Tahun 2025 tidak terdapat kejadian krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di DIY. Meskipun demikian, mengingat wilayah DIY memiliki potensi bencana yang cukup besar, kegiatan pra-krisis tetap dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespons dan memitigasi risiko, sehingga dapat meminimalkan terjadinya krisis kesehatan.

Selain itu, Pemda DIY terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan, termasuk melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan, guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan berkeadilan.

Tabel 3.74. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target*)	Realisasi	Realisasi (%)			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	%	10,76	10,70	10,29	103,98%	11,2	10,60	103,01%
2	Kasus Kematian Ibu	Kasus	-	30	28	107,14%	-	24	85,71%
3	Indeks Keluarga Sehat	%	0,396	0,400	0,400	100	0,45	0,46	86,95%
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori	97,47 (A)	97,48 (A)	100,53 (AA)	103,13	93,00 (A)	97,50 (A)	103,11

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemda DIY, berbagai program dan kegiatan bidang kesehatan dilaksanakan dengan sasaran utama terwujudnya keluarga sehat, yang diukur melalui Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS merupakan instrumen untuk menilai tingkat kesehatan keluarga berdasarkan ketercapaian sejumlah indikator kesehatan yang telah ditetapkan. IKS dihitung dari tingkat pemenuhan 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan, yaitu:

1. Keluarga mengikuti program KB;
2. Persalinan Ibu di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif;
5. Pertumbuhan Balita dipantau;
6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar;
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur;
8. Penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN;
11. Keluarga memiliki akses sarana air bersih;
12. Keluarga memiliki akses jamban keluarga.

Arah pembangunan bidang kesehatan diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan melalui 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Salah satu Program Prioritas Presiden di bidang kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan cakupan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat bagi masyarakat.

Program Hasil Terbaik Cepat merupakan program prioritas pemerintah, terutama di bidang kesehatan, yang ditujukan untuk menurunkan angka penyakit prioritas seperti tuberkulosis, menyediakan layanan Cek Kesehatan Gratis, serta membangun rumah sakit berkualitas di tingkat kabupaten.

Selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD DIY 2022–2027, pembangunan bidang kesehatan Tahun 2025 diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan prioritas, antara lain beban ganda penyakit yang meliputi penyakit tidak menular

degeneratif, penyakit menular infeksi, serta penyakit infeksi baru dan berulang, permasalahan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta permasalahan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan mutu layanan, ketersediaan sumber daya manusia, dan pembiayaan kesehatan. Pembangunan juga ditujukan untuk memenuhi amanat Standar Pelayanan Minimal, khususnya dalam penanganan kedaruratan kesehatan, potensi bencana, dan potensi kejadian luar biasa.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi beberapa penyakit tidak menular di DIY lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, antara lain diabetes melitus sebesar 2,9% (Nasional 1,7%), hipertensi berdasarkan hasil pengukuran sebesar 30,4% (Nasional 29,2%), serta kanker sebesar 3,6% (Nasional 1,2%). Selain itu, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (*re-emerging and new emerging disease*) serta potensi kejadian luar biasa masih menjadi permasalahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

(b) Prevalensi *stunting* masih memerlukan perhatian khusus. Pada Tahun 2024, angka *stunting* di DIY menurun sebesar 0,6% menjadi 17,4% (Survei Status Gizi Indonesia, 2025). Angka ini masih perlu diturunkan sesuai target nasional Tahun 2025 sebesar 18,8% dan Tahun 2029 sebesar 14,2%.

(c) Angka kematian ibu masih relatif tinggi. Pada Tahun 2025 tercatat 28 kasus kematian ibu,

yang disebabkan oleh perdarahan (5 kasus), gangguan hipertensi (6 kasus), infeksi (5 kasus), komplikasi obstetrik (3 kasus), dan komplikasi non obstetrik (9 kasus). Angka kematian bayi juga masih berfluktuasi. Pada Tahun 2022 tercatat 303 kasus, Tahun 2023 sebanyak 272 kasus, dan Tahun 2024 meningkat menjadi 330 kasus.

(d) Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2023 prevalensi gizi kurang sebesar 0,16% dan meningkat menjadi 0,17% pada Tahun 2024.

(e) Belum optimalnya perencanaan dan pengumpulan data pada struktur pendataaan dan sistem manajemen data yang belum konsisten sehingga menimbulkan perbedaan dalam menetapkan sasaran.

(f) Ketersediaan tenaga kesehatan secara umum sudah memadai, namun persebarannya belum merata antar kabupaten/kota, terutama di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

b) Solusi

(a) Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat. Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu: a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan

paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. Secara umum, strategi pengendalian penyakit menular yang dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillans berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.

(b) Pencegahan dan penanganan permasalahan *stunting* dilakukan melaui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung *stunting* seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat, serta melalui penguatan pelayanan kesehatan anak terpadu.

(c) Upaya menekan angka kematian ibu dan bayi lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas Kesehatan, serta pemenuhan standar mutu dipelayanan fasilitas kesehatan

(d) Pemantauan pertumbuhan balita dilaksanakan melalui Gerakan Penimbangan dan intervensi serentak. Sehingga dapat dilakukan deteksi dini sekaligus intervensi segera bagi sasaran yang

memiliki masalah gizi. Serta memberikan edukasi pencegahan *stunting*, meningkatkan cakupan kunjungan sasaran ke Posyandu, juga sekaligus untuk pemantauan tumbuh kembang balita serta pemeriksaan kesehatan anak terpadu.

(e) Upaya yang perlu dilakukan dalam perencanaan dan pengumpulan data pada struktur pendataaan dan sistem Manajemen data yang belum konsisten sehingga menimbulkan perbedaan dalam menetapkan sasaran dengan melakukan standardisasi data melalui penyamaan definisi, indikator, dan variabel yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menetapkan sasaran. Selain itu, diperlukan perbaikan dan integrasi sistem manajemen data agar tersedia satu sumber data yang valid, mutakhir, dan mudah diakses. Perencanaan pendataan harus disusun secara terpadu dengan penetapan sasaran yang jelas sejak awal serta didukung oleh instrumen pengumpulan data yang seragam. Peningkatan kapasitas petugas pendata melalui pelatihan dan pengawasan kualitas data juga menjadi hal penting untuk menjamin keakuratan data. Selanjutnya, koordinasi lintas unit dan evaluasi data secara berkala perlu dilakukan guna memastikan konsistensi data sehingga penetapan sasaran program dapat dilakukan secara tepat dan akuntabel.

(f) Upaya yang perlu dilakukan yaitu pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layananan dan penguatan layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan dan wilayah perbatasan

seperti di daerah selatan DIY dan jalur perbukitan menoreh sebagai antisipasi terjadinya permasalahan-permasalahn kesehatan di daerah tersebut.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui 5 Program dan 54 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp309.900.975.793,00. Secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar Rp269.941.556.722,13 (87,10%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.75. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2025

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan DIY	1. Fokus pada pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)bencana dan KLB dengan penekanan pre-hospital emergency dan penguatan SPGDT serta dukungan pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan 2. Fokus pada pencapaian transformasi sistem kesehatan dengan peningatan kualitas SDM, penguatan pembiayaan jamkes, penguatan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	%	100	100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	%	100	100

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
		layanan kesehatan primer, penguatan layanan rujukan, dan pengembangan RS Respira menjadi RS unggulan paru di DIY dan Jateng wilayah selatan 3. Fokus pada intervvensi penurunan *stunting* dengan pencapaian indeks Keluarga Sehat dan penguatan GERMAS 4. Fokus pada *bridging system*/integrasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan 5. Fokus mendukung budaya dan kesesuaian tata ruang dengan upaya pengembangan kesehatan tradisional serta mengembangkan RS Grhasia menjadi penyangga layanan kesehatan di kawasan rawan bencana Merapi 6. Fokus pada pengarusutamaan gender dalam - pelaksanaan pembangunan	Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	%	100	100
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	%	100	100
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	100	100
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	100	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	100
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%	100	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	100
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	100	100

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
		kesehatan masyarakat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	100	100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	%	100	100
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	%	100	100
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	%	100	100

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	100	100
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	%	100	100
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	100	100
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	%	100	100
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	%	100	100
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	%	100	100

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	%	100	100
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	%	100	100
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	%	100	100
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100	100
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	%	100	100
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	%	100	100
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi	%	100	100

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
			(PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	%	100	100
			Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	100	100
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	%	100	100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	100	100
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	%	100	100

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
			Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	%	100	100
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	%	100	100
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	%	100	100
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	%	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Suburusan Pekerjaan Umum

a) Kondisi Umum

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY. Khusus urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar tersebut meliputi pelayanan di Suburusan Sumber Daya Air, Suburusan Jalan, Suburusan

Keciptakaryaan (Sanitasi dan Air Minum), dan Suburusan Jasa Kontruksi.

Sasaran Pembangunan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2022 – 2027 meliputi: 1) Peningkatan Aksesibilitas Jalan; 2) Penduduk Berakses Air Minum; 3) Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air; 4) Penduduk Berakses Sanitasi; 5) Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi; dan 6) Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang diukur menggunakan lima indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.76. Target dan Realisasi Kinerja Suburusan Pekerjaan Umum Tahun 2024–2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Tar-Get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	%	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	%	99,292	99,66	99,67	100,01	100	100	99,67
2	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	96,41	96,41	96,93	100,54	96,72	96,72	100,22
3	Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	99,22	96,43	96,43	100	100	100	96,43

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Tar-Get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
4	Persentase warga negara yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	%	98,11	98,4	98,55	100,15	98,05	99,05	100,51
5	Peningkatan persentase Pembinaan Kinerja jasa konstruksi	%	95,74	95,74	96,76	101,07	100	100	96,76
6	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	A (95,88)	A (95,89)	A (98,83)	103,07	A (95,89)	A (95,91)	103,07

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

(a) Peningkatan aksesibilitas Jalan

Sampai dengan akhir tahun 2025, terdapat peningkatan jalan baru, baik jalan nasional maupun jalan provinsi di DIY sepanjang 9,88 km.

Peningkatan jalan baru tersebut meliputi, Pembangunan Jalan dan Jembatan Prambanan–Gayamharjo Segmen A2 dan A3 sepanjang 1,93 km dan Segmen B4 dan B5 sepanjang 1,05 km. Pembangunan jalan Kretek-Girijati sepanjang 4,85 dari 5,35 km, serta pembangunan Jembatan Pandansimo (Jembatan Kabanaran) sepanjang 2,05 km, sehingga total panjang jalan terbangun sebesar 9,88 km.

Kebutuhan panjang jalan yang direncanakan diperoleh dari penjumlahan total panjang SK Jalan Provinsi terbangun (662,68 km), total panjang SK Jalan Nasional di DIY terbangun (307,23 km) dan total panjang jalan baru yang

direncanakan terbangun sampai akhir tahun anggaran 2027 (RPJMD 2022–2027). Akumulasi total panjang jalan yang tersedia sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai 1024,01 km dari total rencana 1027,44 km. Dengan demikian, Capaian panjang jalan baru yang terbangun telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2022–2027 sebesar 99,67% dari target 99,66%, bila dipersentasekan terhadap target capaian tersebut berada pada angka 100,01%.



Gambar 3.32. Pelaksanaan pembangunan jalan Kretek – Girijati Tahun anggaran 2025



Gambar 3.33. Pembangunan jembatan Kretek 2 (kiri) dan Jembatan Pandansimo (Jembatan Kabanaran) (kanan)

(b) Penduduk Berakses Air Minum

Capaian akses air minum layak di DIY terus mengalami peningkatan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan penyediaan air minum di DIY. Sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai

96,93% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.665.539 jiwa dari jumlah penduduk total sebesar 3.781.700 jiwa. Persentase ini diperoleh dari perbandingan dari membandingkan jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan infrastruktur air minum yaitu Pembangunan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah SPAM Kamijoro Kabupaten Kulon Progo dengan target pembangunan sebesar 2.302 SR.



Gambar 3.34. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPAM Kamijoro Kabupaten Kulonprogo



Gambar 3.35. Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake di Kalurahan Kebon Agung

(c) Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air merupakan pilar utama dalam pengelolaan sumber daya air yang berfokus pada pemanfaatan berkelanjutan. Prioritas tertinggi dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan irigasi pertanian rakyat. Apabila ketersediaan air masih mencukupi, penggunaan selanjutnya diarahkan untuk kebutuhan non-usaha maupun kegiatan usaha. Keberhasilan penyediaan air baku ini didukung oleh berbagai infrastruktur fisik seperti bendung, embung, *long storage*, dan sumur bor air tanah dalam.

Capaian indikator kinerja persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air sampai dengan tahun 2025 adalah 96,43%. Capaian ini didukung melalui APBD DIY dan APBN dengan rincian terdapat 135 infrastruktur sumber daya air terbangun yang terdiri dari irigasi, embung, maupun sumur bor terhadap target 140 infrastruktur sumber daya air pada tahun 2027.



Gambar 3.36. Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi 41 di Gali Waled dan Babak Semak



Gambar 3.37. Pembersihaan Sedimen dan Semak Sampah Embung/Telaga



Gambar 3.38. Pembangunan Sumur Bor Kab. Kulon Progo

Indikator kinerja persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air didukung melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator yaitu: (1) Meningkatnya Ketersediaan Air melalui Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Pokok Sehari-hari, yaitu: sampai dengan tahun 2025 telah tercapai 25.427,02 liter/detik atau sebesar 100,12% dari target 25.395,58 liter/detik. (2). Meningkatnya Persentase Pengem-bangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY, yaitu sampai dengan tahun 2025 telah tercapai 48,53% (persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum > 77,50% terhadap luas total daerah irigasi Kewenangan DIY) atau sekitar 120,7% dari target 40,19%.

(d) Penduduk Berakses Sanitasi

Indikator kinerja jumlah penduduk berakses sanitasi didukung melalui Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY.

Sampai dengan akhir tahun 2025 Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.727.004 jiwa atau setara dengan 98,55% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 3.781.700 jiwa, sehingga persentase capaian penduduk berakses sanitasi adalah 100,15% dari target sebesar 98,4%.

Pekerjaan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

- Pemeliharaan rutin dan berkala jaringan air limbah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta untuk mengoptimalkan pelayanan air limbah domestik regional SPALD-T Sewon. Adapun sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Sewon sampai akhir tahun 2025 mencapai 29.000 SR.

Tabel 3.77. Sambungan Rumah SPALD-T Sewon s.d. Akhir Tahun 2025

Wilayah KPY	Akhir 2024	Penambahan 2025	Akhir 2025
Kab. Bantul	4.294	64	4.358
Kab. Sleman	3.918	277	4.195
Kota Yogyakarta	20.181	265	20.447

Wilayah KPY	Akhir 2024	Penambahan 2025	Akhir 2025
Jumlah	**24.099**	**607**	**29.000**

Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

(i) Penanganan air limbah berbasis masyarakat dengan jumlah total IPAL Komunal sebanyak 574 unit.
(ii) Penanganan *Runoff* TPA Piyungan seluas 5,7 Ha
(iii) Pemeliharaan saluran drainase di kawasan MM UGM dan wilayah Ngestiharjo



Gambar 3.39. Operasional dan Pemeliharaan SPALD-T Regional Sewon

(e) Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi

Sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dengan indikator kinerja Peningkatan persentase Pembinaan Kinerja jasa konstruksi dirumuskan ke dalam indikator persentase capaian program, yang dihitung menggunakan 3 sub-capaian kinerja yang meliputi Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi dengan bobot 40%, Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan dengan bobot 30%, dan Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara dengan bobot dengan bobot 30%.

Pada tahun 2025 telah diberikan layanan sertifikasi tenaga ahli kepada 50 orang dan jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi hingga akhir tahun 2025 juga sebanyak 50 orang. Adapun layanan sistem informasi jasa konstruksi telah diakses sejumlah 1.557.713 orang dari target 824.220 orang melalui *website* Klinik Konstruksi berikut media sosial terkait lainnya; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI cakupan DIY yang mencapai 50%.

Sedangkan pada tahun 2025 layanan jasa pengujian yang dilakukan melalui penerbitan sertifikat/ Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1.252 dokumen LHU yang terdiri dari 1.236 LHU dari pelayanan umum dan 16 LHU dari uji aspiratif.

Kegiatan penyusunan rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara merupakan penerapan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi. Kegiatan tersebut berupa layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan yang sampai akhir tahun 2025 telah terlayani 100%.



Gambar 3.40. Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli tahun 2025.



Gambar 3.41. Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi melalui Klinik Konstruksi di Kalurahan Panggungharjo (Bantul), Kalurahan Banjaroyo (Kulon Progo)



Gambar 3.42. Proses pengujian bahan bangunan, tanah dan bantuan, dan pengujian rancangan yang dilaksanakan oleh laboratorium konstruksi Balai PALPJK.

b) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

(i) Tingginya curah hujan selama Tahun 2025 menyebabkan kelongsoran dan meningkatkan potensi kerusakan perkerasan pada ruas jalan provinsi.

(ii) Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang melintasi ruas jalan provinsi mempercepat terjadinya kerusakan jalan

(iii) Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan masih terkendala oleh keterbatasan ketersediaan lahan penyimpanan material serta lokasi pembuangan (*disposal area*).

(iv) Terdapat urgensi dalam penanganan kerusakan bangunan irigasi, khususnya gorong-gorong melintang pada badan jalan provinsi.
(v) Penempatan pipa PDAM yang berada pada kedalaman kurang dari 1,5 meter serta terjadinya kebocoran pada pipa-pipa eksisting di badan jalan menjadi tantangan teknis yang memengaruhi daya dukung jalan.
(vi) Keberadaan utilitas tiang listrik (PLN) dan kabel telekomunikasi di sepanjang Ruang Milik Jalan (Rumija) masih memerlukan koordinasi relokasi yang intensif karena berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan progres fisik di lapangan.
(vii) Penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR belum optimal.
(viii) Pengembangan jaringan air limbah dan penyambungan SR air limbah domestik regional masih terbatas disebabkan oleh kebijakan anggaran pemerintah kabupaten yang lebih memprioritaskan untuk menambah SR di IPAL skala Kawasan.
(ix) Pada pembangunan sumur bor air tanah, faktor kondisi geologi bawah tanah yang tidak mudah diprediksi melalui pengukuran geofisika dengan alat geolistrik untuk mengetahui keberadaan akuifer lapisan tanah yang mengandung air kurang/tidak tepat sehingga dimungkinkan berpindah lokasi setelah dilaksanakan pengeboran.

(b) Solusi

(i) Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens baik secara internal dan eksternal dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penanganan bencana dan pasca bencana.
(ii) Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang dan pemasangan rambu peringatan jalan berlubang di ruas jalan provinsi
(iii) Membangun koordinasi kewilayahan dengan pemerintah setempat dalam penyediaan dan pengelolaan lokasi pembuangan (*disposal area*) material galian.
(iv) Memperkuat sinkronisasi program dengan pengelola infrastruktur Sumber Daya Air untuk memastikan keterpaduan pembangunan sistem drainase jalan dan bangunan irigasi yang melintang, guna menjaga stabilitas badan jalan.
(v) Melakukan koordinasi teknis dengan PDAM terkait skema mitigasi kebocoran.
(vi) Mendorong komitmen bersama dengan para pemilik utilitas (PLN dan Provider Telekomunikasi) untuk melakukan penataan fasilitas guna meminimalisir hambatan pada pelaksanaan kegiatan fisik jalan.
(vii) Peningkatan koordinasi dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyerapan sesuai dengan PKS yang telah disepakati.

(viii) Koordinasi yang lebih intens untuk komitmen dalam pengembangan jaringan air limbah dan penyambungan SR air limbah domestik regional di masing-masing kabupaten. Selain itu diperlukan alternatif sumber pendanaan selain ABPD, seperti Hibah Air Limbah dari APBN, dan lainnya.

(ix) Meningkatkan akurasi survei awal dengan mengombinasikan metode geofisika (geolistrik) dengan data hidrogeologi eksisting serta informasi sumur warga di sekitar lokasi.

(x) Menyusun rencana lokasi alternatif (backup location) pada tahap perencanaan untuk mengantisipasi kegagalan pengeboran di titik awal.

c) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Tahun 2025 jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan Suburusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp373.580.223.961,00. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh Dinas PUPESDM DIY melalui 8 program dengan 46 subkegiatan bersumber APBD serta 2 Program 7 Subkegiatan yang didanai melalui Dana Keistimewaan. Selain itu dana alokasi tersebut juga dilaksanakan oleh Bala PALPJK melalui 3 Program 18 subkegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp351.523.958.617,00 atau 94,10% dan realisasi fisik sebesar 97,68% dikarena izin pemanfaatan lahan untuk Sekolah Rakyat belum terbit. Usulan lokasi Sekolah Rakyat Moyudan disetujui oleh Sekjen Kementerian Sosial melalui Surat Nomor 5190/1/PR.01.04/12/2025 pada tanggal 8 Desember 2025. Tanah Sekolah Rakyat berlokasi di

Moyudan adalah Tanah Kas Kelurahan Sumbersari, Moyudan yang berdasarkan fungsinya berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang perlu dialih fungsikan dalam rangka menunjang program Prasarana Strategis Nasional berupa Sekolah Rakyat. Permohonan perubahan fungsi lahan yang diajukan perlu mendapat rekomendasi dari Bupati Sleman dilengkapi rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Kementerian ATR dengan nomor PF.01/416-200.11/XII/2025 yang diperoleh tanggal 11 Desember 2025. Selanjutnya persyaratan pemanfaatan lahan tersebut diajukan kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk selanjutnya memperoleh Perizinan Pemanfaatan Lahan Tanah Kas Kelurahan oleh Gubernur DIY. Pekerjaan konstruksi atau kegiatan lain tidak diperkenankan untuk dilakukan selama izin pemanfaatan lahan belum dikeluarkan. Sedangkan untuk Pekerjaan Pembayaran Tanam Tumbuh Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Baru Kretek–Girijati telah selesai dilaksanakan dengan total bidang terbayar sejumlah 3 bidang dari 4 bidang yang telah terdaftar pada daftar nominatif hasil appraisal. Target 8 bidang berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah–DIY. Namun saat kunjungan lapangan bersama, hanya 4 bidang yang dapat teridentifikasi. Saat pembayaran ganti kerugian tanam tumbuh, satu bidang menolak untuk dibayarkan karena masih merasa keberatan untuk melepas bidang garapannya. Proses mediasi juga sudah dilakukan oleh Dinas PUPESDM DIY tetapi hasilnya tetap tidak mau menerima ganti kerugian yang dibayarkan hingga pihak pemilik tanam

tumbuh membuat surat pernyataan di atas materai. Berikut tabel capaian program dan kegiatan:

Tabel 3.78. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Suburusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90	91,94
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD)	Dokumen	3	3
			2. Perubahan Renja tahun 2025	Dokumen	1	1
			3. Renja SKPD Th 2026	Dokumen	1	1
			4. ROPK	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	4	4
			2. RKA	Dokumen	1	1
			3. RKA-P	Dokumen	1	1
			4. DPA	Dokumen	1	1
			5. DPA-P	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD)	Laporan	4	4
			2. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM TH 2024	Laporan	1	1
			3. Tersusunnya LKJIP TH 2024	Laporan	1	1
			4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	Laporan	1	1
			5. Publikasi	Laporan	1	1
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD)	orang/bulan	413	413
			2. Gaji dan Tunjangan PNS	orang/bulan	233	233
			3. Gaji dan Tunjangan PPPK	orang/bulan	180	180

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	12	12
			2. Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD)	Laporan	3	3
			2. Laporan Aset dan Persediaan Tahunan	Laporan	1	1
			3. Laporan Keuangan Audited	Laporan	1	1
			4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD)	Laporan	22	22
			2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	Laporan	4	4
			3. Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	12	12
			4. Laporan Keuangan Semester	Laporan	1	1
			5. Laporan Keuangan Triwulan	Laporan	4	4
			6. Laporan Persediaan Semesteran	Laporan	1	1
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			2. PBB Wisma PU Kaliurang	Tahun	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD)	Laporan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			2. Jasa Pengelola Barang	Laporan	12	12
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	1	1
			2. Alat Listri Dinas PUPESDM DIY	Jenis	12	12
			3. Alat Listrik BP3ESDM DIY	Jenis	7	7
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	1	1
			2. Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY	Jenis	47	47
			3. Alat Tulis Kantor UPT ESDM	Jenis	22	22
			4. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip	Jenis	11	11
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	3	3
			2. Solar Operasional Genset	Liter	674	674
			3. Belanja Pengisian Tabung Pemadam	Unit	8	8
			4. Pengisian Tabung Gas Elpiji	Kali	6	6
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	2	2
			2. Barang Cetakan	Jenis	6	6
			3. Penggandaan	Lembar	61757	61757
			4. Penggandaan BP3ESDM	Lembar	13971	13971
			5. Penggandaan Penataan Arsip	Lembar	13877	13877
			6. Belanja Kertas dan Cover	Jenis	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			2. Surat Kabar / Majalah	SKH	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD)	Laporan	261	261
			2. Belanja Makan Minum Rapat BP3ESDM	Tahun	1	1
			3. Makan Minum Rapat Dinas	Tahun	1	1
			4. Biaya Rapat Penataan Arsip	Tahun	1	1
			5. SPPD Dalam Daerah	Tahun	1	1
			6. SPPD Luar Daerah Dalam Jawa	Tahun	1	1
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD)	Unit	1	1
			2. Printer	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			2. Cek	Buku	5	4
			3. Materai	Buah	230	230
			4. Perangko	Buah	35	35
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD)	Laporan	4	4
			2. Belanja Tagihan Telepon	Tahun	1	1
			3. Belanja Tagihan Air	Tahun	1	1
			4. Belanja Tagihan Listrik	Tahun	1	1
			5. Zoom Meeting	Tahun	1	1
			6. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	Paket	2	2
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Laporan	8	8
			2. Jasa Tenaga Kearsipan	OH	1320	1185
			3. Jasa Kebersihan Kantor	Tahun	1	1
			4. Jasa Keamanan Kantor	Tahun	1	1
			5. Belanja Jasa Laundry	Tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			6. Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	Tahun	1	1
			7. Retribusi Pajak Daerah	Tahun	1	1
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD)	Unit	87	87
			2. Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	87	87
			3. Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	87	87
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	147	147
			2. Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jenis	4	4
			3. Pemeliharaan peralatan Kantor	Jenis	5	5
			4. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jenis	1	1
			5. Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	Jenis	4	4
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (DPA SIPD)	Unit	3	3
			2. Pemeliharaan BPPESDM Pingit	Paket	1	1
			3. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY	Paket	1	1
			4. Rehabilitasi Wisma PU Kaliurang	Paket	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari	**Liter/detik**	**25395,58**	**25427.02**
			Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	**%**	**40,19**	**48,53**

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			
			1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1
			2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY	Dokumen	1	1
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi			
			1. Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	2	2
			2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY	Lembaga	1	1
			3. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi	Lembaga	1	1
			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			
			1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2
			2. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi	Dokumen	1	1
			3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA	Dokumen	1	1
			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			
			1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	25	25
			2. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga	Unit	25	25

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			3. Pengamanan dan Pengendalian Embung/ Telaga	Unit	25	25
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	1	1.012
			2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Glendongan(DAK)	km	1 km	1.012
			3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY	Laporan	1	1
			4. Perjalanan Dinas dalam Kab/Kota/Provinsi	Laporan	1	1
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	511.7	511.7
			2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY	km	511.7	511.7
			3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY	km	511.7	511.7
			4. Pengamanan dan Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY	km	511.7	511.7
			5. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY	km	0.25	0.25
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			
			1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung	41	41
			2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY	Bendung	41	41
			3. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY	Bendung	41	41
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Indikator SIPD)			
			2. Updating Database ePAKSI	Laporan	1	1
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi			
			1. Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	D.I	41	41
			2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY	D.I	41	41
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	%	22,9	51,32
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	2
			2. Kajian pengembangan (SPAM)dari bendung Bener	Dokumen	1	1
			3. Kajian Perhitungan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-DIY	Dokumen	1	1
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	1	1
			2. Subsidi operasi SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Paket	1	1
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	1	1
			2. Optimalisasi subsidi Perumda Tirtatama DIY untuk operasional lintas Kabupaten/Kota	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			3. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Kebon Agung	Paket	1	1
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan	%	85.81	94,6
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA			
			1. Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	Unit	1	1
			2. Kajian Pemanfaatan Tanah TPA Piyungan 5,7 Ha	Dokumen	1	1
			3. Penanganan Runoff di Kawasan Tanah TPA Piyungan 5,7 Ha	Paket	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	%	36,71	38,67
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			
			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi	Unit	1	1
			2. Pembuatan Barrier Gate Full System	Paket	1	1
			3. Penambahan titik CCTV	Paket	1	1
			4. Penambahan titik PJU	Unit	3	3
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Pengurangan luasan genangan	Ha	6,29	7,4
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			
			1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	2	2
			2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Sistem Drainase Perkotaan	2	2
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	%	100	100
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			
			1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kabupaten/Kota	5	5
			2. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara	Kabupaten/Kota	5	5
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
			1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	4	4
			2. Penyusunan UKL dan UPL Gedung Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Dokumen	1	1
			3. Perencanaan DED Gedung Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Dokumen	1	1
			4. Appraisal Kantor BPPESDM	Dokumen	1	1
			5. Penyusunan Dokumen Andalalin Gedung Balai	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruks			
			6. Pematangan Lahan Sekolah Rakyat	Paket	1	0
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase Kemantapan Jalan	%	62,2	69,78
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi			
			Pemeliharaan Rutin Jembatan			
			1. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD)	Jembatan	264	264
			2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul	Jembatan	59	59
			3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul	Jembatan	74	74
			4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo	Jembatan	74	74
			5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman	Jembatan	57	57
			Rehabilitasi Jalan			
			1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi (DPA SIPD)	km	6.2	6.2
			2. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan	km	0.025	0.025
			3. Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel	km	0.65	0.65
			4. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu	km	2	2
			5. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu	Dokumen	1	1
			6. Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu	Dokumen	1	1
			7. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi	Dokumen	1	1
			8. Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Klangon-Tempel	Dokumen	1	1
			9. Peningkatan Jalan Ruas Klangon-Tempel	km	1	1
			10. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pakem	km	1	1
			11. Rehabilitasi Jalan Ruas Karangmojo-Semin	km	1	1
			12. Rehabilitasi Jalan Ruas Prambanan-Piyungan	km	0.525	0.525
			Rekonstruksi Jalan			
			1. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (DPA SIPD)	km	2.575	2.575

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			2. Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot	km	1.7	1.7
			3. Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo	km	0.875	0.875
			Pemeliharaan Rutin Jalan			
			1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (DPA SIPD)	km	674.585	674.585
			2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul	km	152.68	152.68
			3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul	km	244.9	244.9
			4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo	km	154.44	154.44
			5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman	km	122.55	122.55
			6. Operasional Underpass Kulur	Tahun	1	1
			Pelebaran Jalan Menuju Standar			
			1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	km	4.5	4.5
			2. Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1	km	4.5	4.5
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	51	51
			2. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Dokumen	50	50
			3. Jasa Konsultansi Pengukuran Leger Jalan Ruas Denggung-Wonorejo	Dokumen	1	1
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Dokumen	3	3
			2. Survei Kondisi Jalan	Dokumen	1	1
			3. Survei Kondisi Jembatan	Dokumen	1	1
			4. Survei Khusus Jembatan Karangsemut :	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Meningkatnya Ketersediaan Air baku	liter/detik	27,01	52,39
			Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	%	56	99,97
			Presentase Terselenggaranya Bangunan Gedung Negara Strategis Provinsi	%	25,07	25,07
			Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi	%	100	0
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			
			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	2	2
			2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol	Tahun	1	1
			3. Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) Jogja Planning Gallery	Dokumen	1	1
			4. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Pembangunan Jogja Planning Gallery tahun 2025	Dokumen	1	1
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan			
			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	1	1
			2. Pembayaran Tanam Tumbuh Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati	Bidang	8	7
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu			
			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	4	4
			2. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Gunungkidul	Titik	1	1
			3. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Bantul	Titik	2	2
			4. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			5. DED Ruas Jalan Gading - Karangtengah	Dokumen	1	1
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh			
			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	2	2
			2. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Kulon Progo	Titik	2	2
			3. Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu	km	4	4
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo			
			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatn Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	2	2
			2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B4 dan B5	km	0.95	0.95
			3. Review DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Prambanan - Gayamharjo Segmen B	Dokumen	1	1
			Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates			
			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Dokumen	1	1
			2. DED Ruas Jalan Milir - Dayakan	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	%	88,69	89,29
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
			Pengembangan Lumbung Mataraman			
			1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	laporan	1	1
			2. Peningkatan Saluran Irigasi Tersier	lokasi	40	40

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
		BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90	91,94
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Indikator SIPD)	dokumen	12	12
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Indikator SIPD)	laporan	12	12
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD)	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD)	paket	3	3
			2. Alat Tulis Kantor	Jenis	43	43
			3. Kertas dan Cover	Jenis	8	8
			4. Bahan Komputer	Jenis	14	14
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Indikator SIPD)	paket	3	3
			2. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Tabung	23	23
			3. Belanja Pengisian Tabung Gas	Tabung	31	31
			4. Belanja Perabot kantor	Jenis	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Indikator SIPD)	paket	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			2. Barang Cetakan	Jenis	9	9
			3. Penggandaan	Lembar	48397	48397
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Indikator SIPD)	dokumen	24	24
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Indikator SIPD)	Laporan	88	88
			2. Laporan Rapat Internal	Laporan	60	60
			3. Laporan Perjalanan Dinas Biasa	Laporan	28	28
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Indikator SIPD)	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Indikator SIPD)	Laporan	4	4
			2. Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi (Telepon dan Internet)	Laporan	2	2
			3. Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	Laporan	1	1
			4. Laporan Penyediaan Jasa Listrik	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD)	laporan	4	4
			2. Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Sarana dan Prasarana	Laporan	1	1
			3. Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan	Laporan	1	1
			4. Laporan Penyediaan Jasa Keamanan	Laporan	1	1
			5. Jasa Pengolahan Sampah	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Indikator SIPD)	unit	16	16
			2. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Unit	16	16
			3. Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	Unit	16	16
			4. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Unit	16	16
			5. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	Unit	10	10
			6. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	4	4
			7. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Unit	2	2
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Indikator SIPD)	unit	91	91
			2. Pemeliharaan Genset	Unit	1	1
			3. Pemeliharaan Pompa Air	Unit	3	3
			4. Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya (CCTV dan LCD Projector)	Unit	9	9
			5. Pemeliharaan AC	Unit	36	36
			6. Pemeliharaan Laptop/ Computer	Unit	41	41
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Indikator SIPD)	unit	2	2
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	**%**	**36,71**	**38,67**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara (Indikator SIPD)	Unit	2	2
			2. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	Tahun	1	1
			3. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	Tahun	1	1
			4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	Tahun	1	1
			5. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	Tahun	1	1
			6. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Tahun	1	1
			7. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge	Tahun	1	1
			8. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck Tangki	Tahun	1	1
			9. Pemantauan dan pengendalian kualitas Udara	Tahun	1	1
			10. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Unit	70	70
			11. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Tahun	1	1
			12. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon	Tahun	1	1
			13. Pemeliharaan Jaringan Air Limbah	km	324	324
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	**%**	88,34	95,87
			Sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) yang Diterbitkan	**%**	84,59	94,70
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			
			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (indikator SIPD)	Lembaga/LHU	800	1252
			2. Operasional Layanan Pengujian Konstruksi	Tahun	1	1
			3. Akreditasi Laboratorium	Tahun	1	1
			4. Kalibrasi Alat Laboratorium	Jenis	27	27

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			5. Pemeliharaan Alat Laboratorium	Tahun	1	1
			6. Perlengkapan Operasional Laboratorium	Jenis	100	100
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			
			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Indikator SIPD)	Orang	50	50
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			
			1. Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Indikator SIPD)	dokumen	1	1

Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

(2) Suburusan Penataan Ruang

a) Kondisi Umum

Pelaksanaan penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan kondisi Wilayah DIY. Disamping itu juga dilakukan penilaian terhadao kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek keistimewaan.

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY salah satu keistimewaannya adalah terkait dengan urusan tata ruang. Implementasi terkait dengan keistimewaan tata ruang terbagi dalam 18 Satuan Ruang Strategis sebagai instrumen dalam

pengembangan wilayah sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023–2043.

Penilaian kinerja sasaran Suburusan Penataan Ruang pada tahun 2025 diukur menggunakan indikator persentase capaian kinerja penataan ruang. Adapun Target dan realisasi kinerja untuk tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.79. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Terhadap Target Akhir RPJMD DIY (2027)

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD DIY 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agrarian di daerah	%	63,92	71,42	77,42	108,40	74,69	74,69	103,66
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	82,27	83,91	88,22	105,13	90,74	90,74	95,49

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2026

(a) Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan: Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang dan Pertanahan berkualitas

Berdasarkan tabel di atas maka dapat terlihat bahwa persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah dari target hasil penyelarasan yang ditetapkan sebesar 71,42% pada tahun 2025 teralisasi

sejumlah 77,42% (108,40%). Capaian ini didukung oleh rerata dari perhitungan dua sasaran perangkat daerah yaitu (a) terwujudnya penyelenggaraa penataan ruang bernilai baik; (b) terwujudnya penyelenggaraan penataan agraria di daerah sesuai ketentuan.

(b) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Bernilai Baik

Perhitungan indikator kinerja sasaran tercapaianya kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun aspek yang dilakukan penilaian kinerja yaitu pada (1) pengaturan penataan ruang; (2) pembinaan penataan ruang; (3) perencanaan tata ruang; (4) pemanfaatan ruang; (5) pengendalian dan pemanfaatan ruang ditambahkan dengan pada aspek keistimewaan DIY, yaitu (1) Aspek Dokumen Rencana Rinci; (2) Aspek Dokumen Rencana Induk, (3) Aspek Dokumen RTBL, dan (4) Aspek Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang SRS.

Realisasi indikator sasaran Persentase penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2025 sebesar 88,22% dari target sebesar 83,91% atau dengan persentase capaian 105,13%. Kinerja tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY Tahun 2022–2027 dengan didukung (1) aspek pengaturan penataan ruang sebesar 79,16%;

(2) aspek pembinaan penataan ruang sebesar 98,21%; (3) aspek perencanaan tata ruang sebesar 100%; (4) aspek pemanfaatan ruang sebesar 100% dan (5) aspek pengendalian pemanfaatan ruang sebesar 91,67%. Sementara untuk aspek Keistimewaan yang didukung oleh (1) Aspek Dokumen Rencana Rinci (100%); (2) Aspek Dokumen Rencana Induk (88,89%); (3) Aspek Penyusunan Dokumen RTBL (44,44%); (4) Hasil Perwujudan Pola Ruang (91,57%). Hasil dari realisasi rerata persentase penyelenggaraan penataan ruang tersebut sebesar 88,22%. Penilaian berdasarkan pada kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang menunjukkan pada predikat efektif dan efisien.

b) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan kaitannya dengan pelaksanaan penataan ruang antara lain:

(i) Implementasi pengenaan sanksi hasil dari audit tata ruang belum optimal karena masih menunggu pelaksanaan audit tata ruang serta penetapan juknis pemberian insentif dan disinsentif sebagai pelaksanaan Pergub DIY Nomor 77 Tahun 2023;
(ii) Masih terdapat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang belum ditetapkan;
(iii) Pemanfaatan Data dan informasi pertanahan dan tata ruang belum terintegrasi dengan optimal;

(iv) Dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(b) Solusi

Alternatif solusi dalam menjawab permasalahan di atas antara lain:

(i) Pengenaan sanksi yang telah dilakukan pada tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari audit yang telah dilakukan pada tahun 2024 dan juga perlu adanya tambahan aturan khusus kaitannya dengan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
(ii) Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang melalui pendampingan terhadap kabupaten/ kota dan juga percepatan integrasi ke dalam OSS (*Online Single Submission*);
(iii) Integrasi data dan informasi pertanahan melalui sistem informasi data spasial Command Center Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Yang dibuktikan dengan jumlah metadata yang terintegrasi meningkat dari 173 di tahun 2024 menjadi 228 pada tahun 2025 dan produsen data dari 30 OPD produsen menjadi 32 OPD produsen pada tahun 2025;
(iv) Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan ruang.

c) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan urusan penataan ruang tahun 2025 telah berjalan dengan baik pada semua aspek antara lain: aspek pengaturan tata ruang, aspek pembinaan tata ruang, aspek perencanaan tata ruang, aspek pemanfaatan tata ruang, dan aspek pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pada tahun 2025 program, kegiatan dan subkegiatan Suburusan Penataan Ruang didukung dengan anggaran sejumlah 14.566.131.179,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp14.017.686.398,00 atau 96,23%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.80. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Suburusan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Nilai Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	95,39	92,76
1.			**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			
a.			Forum PD	Laporan Berita Acara	1	1
b.			Renja PD 2026 dan Renja Perubahan PD 2025	Dokumen	2	2
2.			**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**			
a.			Penyusunan DPA 2026	Dokumen	1	1
b.			Penyusunan RKA-P 2025	Dokumen	1	1
c.			Penyusunan DPA-P 2025	Dokumen	1	1
d.			Penyusunan RKA 2026	Dokumen	1	1
3.			**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
a.			Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	Dokumen	1	1
b.			Penyusunan bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Laporan	1	1
c.			Penyusunan LKJiP SKPD	nilai LKJIP BB	1	1
4			**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			
a.			Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jenis	10	10
5			**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
a.			Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	17	17
			Alat Tulis Kantor untuk Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	bulan	12	12
6			**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**			
a.			Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	jenis	12	12
7.			**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			
a.			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis	20	20
b.			Penggandaan untuk Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	bulan	12	12
8.			**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**			
a.			Penyediaan Surat kabar	bulan	12	12
9.			**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			
a.			Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam daerah	bulan	10	10
b.			Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar daerah	bulan	12	12
c.			Penyediaan makanan dan minuman rapat	OS	720	720
10.			**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD**			
a.			Pengelola Keuangan	bulan	12	12
11			**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			
a.			Terbayarkannya gaji pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tahun	1	1
12.			**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			
a			Penyusunan laporan keuangan tahunan gabungan	Laporan	1	1
13.			**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**			
a.			Penyusunan laporan keuangan bulanan	laporan	12	12
b.			Penyusunan laporan keuangan semester	laporan	2	2
c.			Penyusunan laporan keuangan triwulan	laporan	4	4
14.			**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**			
a.			Pengelola barang / pengurus barang pengguna	bulan	12	12
15			**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			
a.			Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Orang	5	5
16.			**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			
a.			Penyediaan Jasa surat menyurat Pengiriman dokumen	Tahun	1	1
b.			Penyediaan Jasa surat menyurat surat keluar	Tahun	1	1
c.			Penyediaan Jasa surat menyurat surat masuk	Tahun	1	1
17.			**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			
a.			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tahun	1	1
b.			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana*) DIY	Tahun	1	1
18.			**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**			
a.			Pembayaran tagihan rekening air	bulan	12	12
b.			Pembayaran tagihan rekening listrik	bulan	12	12
c.			Pembayaran tagihan rekening telepon	bulan	12	12
d.			Langganan akun Video Conference	bulan	12	12
19.			**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**			
a.			Pembayaran pajak/STNK kendaraan	14 unit	14	14
b.			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	6	6

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
c.			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	8 unit	8	8
20.			**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
a.			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	10 Jenis	10	10
21.			**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			
a.			Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan pemeliharaan taman	1600 m2	1600	1600
B.			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			
			Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	%	80,36	88,69
			Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	%	90,00	97,22
1			**Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang**			
a.			Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui FPRD DIY	dokumen	2	2
b.			Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang oleh FPRD DIY	%	100	100
C.			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	57,04	70,37
			Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	83,81	89,08
1.			**Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**			
a.			Meteri Teknis Rencana Induk SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede, SRS Kerto-Pleret, SRS Makam Raja-Raja Mataram Imogiri	Dokumen	1	1
b.			Rapergub rencana Induk SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede, SRS Kerto-Pleret, SRS Makam Raja-raja Mataram Imogiri	Dokumen	1	1
c.			Materi Teknis Rencana Induk SRS Masjid Pathok Nagoro (Pathok Babadan, Pathok Dongkelan, Pathok Mlangi, Pathok Plosokuning)	Dokumen	1	1
d.			Rapergub Rencana Induk SRS Masjid Pathok Nagoro (Pathok Babadan, Pathok Dongkelan, Pathok Mlangi, Pathok Plosokuning)	Dokumen	1	1
2.			**Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang**			
a.			Pendampingan percepatan penetapan RDTR Terintegrasi OSS	dokumen	1	1
b.			Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2025, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2026, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2027 Urusan Tata Ruang	Dokumen	4	4
c.			Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III	dokumen	3	3
d.			Evaluasi Kinerja pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	Dokumen	1	1
e.			Penyusunan Materi Teknis Pemanfaatan Kawasan Resapan Air	Dokumen	1	1
f.			Penetapan Rapergub Pemanfaatan Kawasan Resapan Air	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
g.			Penyusunan Pedoman Teknis Pembangunan Fisik di Kawasan Penyangga Sumbu Filosofi	Dokumen	1	1
h.			Monev BKK Kalurahan Kawasan terpadu	Dokumen	1	1
i.			Dokumen Verifikasi Penilaian Kelayakan BKK Kawasan terpadu	Dokumen	1	1
			Sosialisasi penilaian kelayakan BKK Kawasan Terpadu	Dokumen	1	1
			Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia	Kegiatan	1	1
3.			**Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang**			
a.			Kajian Identifikasi Citra Kawasan	SRS	2	2
b.			Lomba Desain Visual Signage	Kali	1	1
c.			Pembuatan Visual Signage	SRS	1	1
d.			Sosialisasi Dokumen Rencana Tata Ruang berupa RTRW DIY dan Peraturan Gubernur DIY tentang Strategi Pengembangan Wilayah	Kali	6	6
e.			Peringatan Hari Pertanahan dan Tata Ruang	Event	1	1
f.			Publikasi Penyelenggaraan Keistimewaan Urusuan Tata Ruang	Paket	1	1
g.			Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis	Kali	60	60
4.			**Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang**			
a.			Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	dokumen	1	1
b.			Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penilaian Perwujudan SPW SRS	dokumen	2	2
c.			Penyusunan Dokumen Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis	dokumen	1	1
d.			Dokumen Audit Tata Ruang	dokumen	1	1
e.			Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	dokumen	1	1

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

(1) Kondisi Umum

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY. Khusus dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tersebut mencakup penanganan RTLH, Penanganan PSU layak di permukiman, dan penanganan Kawasan pemukiman kumuh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022–2027 bahwa kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur menggunakan indikator Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni.

Tabel 3.81. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Tar-Get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	%	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	%	95,97	95,98	96,11	100,14	96,3	96,3	99,80

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan yaitu paling sedikit 7,2 m^2/jiwa, dan kesehatan penghuni. Kondisi ini mencakup kerusakan struktur (atap, dinding, lantai), minimnya sanitasi dan air bersih, serta kurangnya ventilasi dan pencahayaan.

Penanganan RTLH yang dilaksanakan terdiri dari 2 jenis: Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH) dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni (PB RLH).

Peningkatan Kualitas RTLH adalah upaya perbaikan atau rehabilitasi fisik rumah agar memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas, dan kesehatan penghuni. Sedangkan, Pembangunan Baru

RLH adalah upaya penyediaan rumah layak huni berupa pembangunan baru rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas, dan kesehatan penghuni.

Hingga akhir tahun 2025, realisasi indikator persentase rumah tangga yang menempati hunian layak di DIY sebesar 96,11%. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 95,98% atau setara dengan 100,14%. Perhitungan capaian ini didasarkan pada total jumlah rumah tangga di DIY sebanyak 1.287.207 unit, dikurangi jumlah RTLH yang belum tertangani sebesar 54.991 unit ditambah pelaksanaan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.134 unit dan Pada Tahun 2025 sebanyak 1.823 unit. Penanganan Pada Tahun 2025 tersebut merupakan hasil sinergi lintas pendanaan dan kolaborasi antarsektor dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Keistimewaan: Melalui BKK Kalurahan sebanyak 280 unit dan PB RLH Integrasi sebanyak 6 unit;
b) APBD Kabupaten/Kota: Kabupaten Sleman (604 unit), Kabupaten Gunungkidul (265 unit), Kabupaten Kulon Progo (176 unit), Kabupaten Bantul (110 unit), dan Kota Yogyakarta (63 unit);
c) Bantuan Pemerintah Pusat (BSPS): Kabupaten Gunungkidul (66 unit) dan Kabupaten Kulon Progo (39 unit);
d) Sektor Non-Pemerintah dan CSR: CSR BPD DIY (3 unit), CSR Kulon Progo (98 unit), CSR Kota Yogyakarta (59 unit), serta dukungan Baznas Sleman (54 unit).

Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan di Plampang III, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo

0% **50%** **100%**





0% **50%** **100%**





Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta (RTLH) Kelurahan Guwosari, Pajangan, Bantul

0% **50%** **100%**





Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul (Bid. PKP DPUP-ESDM DIY)

0% 50% 100%





0%



50%



100%



Konstruksi PSU untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo (Bid. PKP DPUP-ESDM DIY)

0%



50%



100%



(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Penyediaan hunian vertikal di kawasan perkotaan bagi kelompok MBR dan masyarakat miskin mengalami stagnasi akibat eskalasi harga tanah yang tidak terkendali serta minimnya pengesahan dan penerapan instrumen regulasi (RP3KP) terkait skema insentif bagi pengembang.

(b) Penanganan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan sinergis antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya pendataan yang akurat dan valid sehingga berdampak pada potensi tumpang tindih data maupun tumpang tindih penanganan.

(c) Penanganan pada suatu lokasi yang tidak tuntas diakibatkan oleh tidak terintegrasinya peningkatan kualitas pada setiap Kriteria Kawasan Kumuh di Kabupaten/Kota.

Munculnya kawasan kumuh baru dengan luasan yang baru serta kurangnya data penanganan kawasan kumuh dari Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota yang terupdate dan terintegrasi, sehingga berdampak pada penanganannya. Selain itu pada tahun 2024 telah dilakukan pemetaan kawasan kumuh semua kewenangan oleh Pusat, sehingga dihasilkan deliniasi ulang kawasan kumuh. Luas kawasan kumuh berkurang, namun bukan merupakan penanganan.

b) Solusi

(a) Mekanisme, Penjelasan: 1) *Land Banking* Pemerintah melalui Bank Tanah membeli lahan di lokasi strategis sebelum harganya melambung, khusus untuk cadangan hunian publik. 2) *Mixed-Income Housing and Development*. Mewajibkan pengembang membangun hunian dengan komposisi campuran (misal: 1 unit mewah subsidi silang untuk 3 unit MBR) dalam satu kawasan. Atau pencampuran zonasi tata ruang dari *single use* menjadi *multi use* (misal: permukiman boleh bercampur dengan perdagangan). 3) Pemanfaatan Aset BUMN/D Menggunakan lahan tidur milik instansi pemerintah atau PT KAI (*Transit Oriented Development*) untuk rusunawa/rusunami. 4) *Public–Private Partnership* (KPBU) Pemerintah menyediakan lahan, swasta yang membangun dan mengelola dengan skema konsesi tertentu.

(b) Koordinasi dan sinkronisasi data penanganan RTLH di Kab/Kota dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan rencana penanganan RTLH.

(c) Mengintegrasikan program/kegiatan dan ditangani oleh satu unit kerja serta melakukan koordinasi terkait updating data capaian penanganan kawasan-kawasan kumuh yang menjadi kewenangan masing-masing Kabupaten/Kota dengan Pusat (BPBPK DIY) dan Provinsi.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun 2025 dengan APBD DIY dilaksanakan melalui 3 program dan 4 subkegiatan, serta Dana Keistimewaan melalui 1 program dan 1 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp7.839.330.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.751.903.396,00 atau 98,88%. Sementara, realisasi fisik yang dicapai sebesar 99,88%, disebabkan terdapat 1 unit rumah BKK Kalurahan di Kalurahan Imogiri yang gagal dibangun karena calon penerima mengundurkan diri karena tidak dapat menunjukkan bukti alas hak tanah yang legal. Berikut capaian kinerja program dan subkegiatan telah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.82. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	%	100	100
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	1	1
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi			
			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Lokasi	178	12
			Penanganan PSU layak di permukiman			
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			
			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (DPA SIPD)	Dokumen	9	9
			2. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Bantul	Dokumen	2	2
			3. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Gunungkidul	Dokumen	3	3
			4. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta	Dokumen	1	1
			5. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Kulon Progo	Dokumen	1	1
			6. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sleman	Dokumen	2	2
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			
			1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (DPA SIPD)	Lokasi	12	12
			2. Bantuan PSU Kab. Bantul	Lokasi	5	5
			3. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul	Lokasi	2	2
			4. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo	Lokasi	2	2
			5. Bantuan PSU Kab. Sleman	Lokasi	3	3
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP	Unit	300	286
			Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
			1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Indikator SIPD)	unit	282	281
			2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah	kalurahan	1	1
			3. BKK Arsitektur Khas Yogyakarta (RTLH)	unit	281	280
			4. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta	Dokumen	1	1

Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

(1) Suburusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas

a) Kondisi Umum

DIY merupakan wilayah dengan tingkat keberagaman masyarakat yang sangat tinggi, sehingga dikenal sebagai salah satu daerah paling majemuk di Indonesia. Statusnya sebagai pusat pendidikan, tujuan wisata, serta sentra kebudayaan menjadikan DIY magnet bagi pendatang dari berbagai latar belakang daerah. Kedatangan masyarakat dengan tujuan belajar, bekerja, maupun menetap ini membawa perbedaan budaya, bahasa, agama, serta tradisi, yang memperkaya dinamika kehidupan sosial di Yogyakarta. di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan tantangan dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan rasa aman di tengah masyarakat.

Dalam lingkungan sosial yang heterogen, potensi munculnya konflik tidak dapat dihindari. Perbedaan sudut pandang, kepentingan, maupun penafsiran terhadap nilai-nilai sosial dan budaya kerap menjadi pemicu terjadinya gesekan. Apabila konflik semacam ini tidak ditangani secara tepat, maka dapat berkembang menjadi gangguan sosial yang berdampak pada terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Situasi tersebut tentu akan membawa konsekuensi negatif bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Oleh karena itu, upaya menjaga kondisi yang aman dan kondusif menjadi hal yang sangat penting. Pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila suasana masyarakat berada dalam keadaan tertib dan tenteram. Daerah yang dicap tidak aman cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya minat investor untuk menanamkan modal. Selain itu, terganggunya ketertiban juga dapat merusak hubungan sosial dan memicu ketegangan antarkelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, Pemda DIY melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peranan strategis dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk penegakan hukum, baik secara non-yustisial maupun melalui operasi yustisi.

Penertiban non-yustisial merupakan langkah yang ditempuh tanpa melibatkan proses peradilan. Bentuk tindakan ini umumnya bersifat pencegahan, pembinaan, serta pemberian teguran kepada pihak yang melanggar Perda atau Perkada. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan mencegah terjadinya pelanggaran lanjutan tanpa harus membawa perkara ke ranah hukum.

Sementara itu, operasi yustisi dilakukan terhadap pelanggaran yang dinilai lebih berat dan mengandung unsur pidana. Dalam kondisi ini, Satpol PP mengambil langkah penindakan hukum yang lebih tegas dengan melibatkan aparat

penegak hukum lainnya, sehingga kasus pelanggaran dapat diproses sesuai mekanisme hukum hingga ke pengadilan.

Sepanjang tahun 2025, Satpol PP DIY tercatat telah menangani sebanyak 110 kasus pelanggaran Perda dan Perkada melalui kedua mekanisme penertiban tersebut. Langkah penegakan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan hukum mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan efektif, diharapkan kondisi ketertiban dan ketentraman di DIY dapat terus terjaga, sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial budaya secara berkelanjutan.

Tabel 3.83. Target dan Realisasi Kinerja Suburusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penye-larasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Reali-sasi	Reali-sasi (%)			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Tewujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	%	70	75	75	100%	100%	100%	75
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	85,15	75	86,15	114,87%	85%	88,15	101,35

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja DIY, 2025

Pemda DIY, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, telah melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai target 75% tersebut, antara lain:

(a) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dilaksanakan melalui kegiatan penertiban yang bersifat yustisial maupun non-yustisial terhadap individu, aparatur, maupun badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 110 pelanggaran Perda dan Perkada, jumlah ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 36,78% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 174 kasus. Dari pelaksanaan penertiban tersebut, hingga akhir Desember 2024 berhasil dihimpun denda pelanggaran dengan nilai total sebesar Rp34.696.000. Selain itu, dalam rangka menertibkan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tidak berizin, dibentuk Satuan Tugas Tanah Kas Desa (TKD). Satgas ini melaksanakan 150 kegiatan penertiban non-yustisial serta 75 kegiatan operasi yustisi, termasuk penyegelan dan penghentian aktivitas yang terbukti melanggar Perda maupun Peraturan Gubernur terkait Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa.
(b) Pemda DIY juga berfokus pada penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat. Upaya ini mencakup pengamanan kegiatan unjuk rasa, serta pengawalan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas kedinasan. Satpol PP DIY bekerja sama dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda

DIY untuk menjaga keamanan aset daerah dan objek vital lainnya. Selain itu, guna menekan meningkatnya tindak kejahatan jalanan, dilakukan langkah-langkah preventif melalui patroli rutin wilayah, termasuk patroli di kawasan Sumbu Filosofi serta patroli khusus penanggulangan kejahatan jalanan (*klithih*).

(c) Pelaksanaan perlindungan masyarakat diperkuat melalui pembinaan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Satuan Perlindungan Masyarakat, Kelompok Jaga Warga, Omah Jaga Warga, dan Satlinmas *Rescue* Istimewa (SRI). Pada tahun 2025, pembentukan Kelompok Jaga Warga telah mencapai 100% dengan total 4.677 kelompok yang tersebar di seluruh padukuhan di DIY dan melibatkan 106.192 anggota. Dukungan fasilitas juga diberikan berupa 8.000 unit rompi bagi Kelompok Jaga Warga untuk mendukung operasional Omah Jaga Warga. Sementara itu, Satlinmas *Rescue* Istimewa yang diperkuat oleh 328 personel terus meningkatkan kemampuan dan sarana operasional guna melaksanakan tugas pertolongan pertama dan pencarian korban kecelakaan maupun bencana, khususnya di kawasan wisata. Keberadaan Kelompok Jaga Warga dan SRI merupakan wujud kearifan lokal yang pengembangannya didukung melalui Dana Keistimewaan.

(d) Peningkatan profesionalisme anggota Satpol PP DIY dilakukan melalui pembinaan fisik secara berkelanjutan guna menjaga kebugaran dan keterampilan personel. di samping itu, penguatan kelembagaan serta perluasan

jejaring kemitraan terus dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan warga secara optimal.

b) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

(i) Maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak terdaftar atau tidak membayar cukai menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara dan menurunnya pendapatan daerah. Selain itu, peredaran minuman beralkohol yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha.

(ii) DIY yang memiliki keragaman sosial dan budaya tinggi, termasuk kedatangan penduduk non-tetap, berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang bisa berujung pada konflik. Ketidakcocokan antar kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang sosial-budaya bisa memicu kerusuhan atau gangguan ketertiban.

(iii) Pelanggaran terkait pemanfaatan tanah kas desa. Pemanfaatan tanah kas desa yang belum mempunyai izin ataupun yang dipergunakan tidak sesuai dengan Pergub No. 24 Tahun 2024

(iv) Penambangan liar yang ada di wilayah DIY terutama pada daerah aliran sungai, pegunungan dan wilayah perbatasan.

(b) Solusi

(i) Peningkatan Pengawasan dengan memperkuat patroli dengan memperkuat kordinasi dengan instansi atau lembaga yang mempunyai wewenang menangani kasus peredaran rokok non cukai dan minuman beralkohol yang tidak berizin.

(ii) Mengerahkan Jagawarga untuk meningkatkan komunikasi atau dialog kepada kelompok masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pihak terkait lainnya untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan membangun rasa saling pengertian.

(iii) Melakukan inventarisasi Tanah Kas Desa dengan berkerjasama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY atau Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang berada di kabupaten/kota di DIY.

(iv) Memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi dan mencegah penambangan liar, terutama di daerah yang rentan.

c) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas terdiri atas 4 Program dan 26 Subkegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp28.523.332.225,00 dengan realisasi sebesar Rp26.929.056.354,00 atau 94,41%. Selanjutnya untuk kinerja fisik sudah terealisasi 100% sesuai dengan target.

Tabel 3.84. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	87,27	91.87
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
			Renja 2026	Dokumen	1	1
			Renstra Perubahan 2022–2027	Dokumen	1	1
			Perjanjian Kinerja 2025	Dokumen	1	1
			ROPK	Dokumen	1	1
			Renja Perubahan 2026	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			DPA	Dokumen	1	1
			RKA 2026	Dokumen	1	1
			DPA Perubahan	Dokumen	1	1
			RKA 2026 Perubahan	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
			LPPD	Dokumen	1	1
			LKJiP	Dokumen	1	1
			LKPJ	Dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (TUK DPA)	Orang	73	73
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan	12	9
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	Bulan	12	9
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Honorarium Petugas Keuangan	Bulan	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	14	14
			Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	12	12
			Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	2
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
			Honorarium Pengurus Barang	Bulan	12	12
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	57	57
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	44
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Presentase gangguan trantibum yang tertangani	%	100	100
			Presentase pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	100	100
			Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif	%	60	62,78
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	199	199
			Patroli Trantibum Perbatasan	Laporan	1	1
			Operasi Trantibum Perbatasan	Laporan	1	1
			Pengamanan Unjuk Rasa	Laporan	10	10
			Honor Pengendali Ditpamobvit Polda DIY	Bulan	12	12
			Deteksi Dini	Laporan	4	4
			Patroli Trantibum Provinsi DIY	Laporan	22	22
			Pemantauan Aset Pemda DIY	Laporan	24	24
			Pengamanan dan Pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Tamu Daerah	Laporan	16	16

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pemantauan Aset Pemda DIY	Laporan	18	18
			Satpol PP Goes To School	Laporan	2	2
			Operasi Pengendalian Tibumtranmas	Laporan	13	13
			Sosialisasi Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017	Kali	100	100
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	300	300
			Pembinaan Satlinmas	Kali	3	3
			MAJELIS KODE ETIK	Kali	2	2
			Pelaksanaan Bimbingan Teknis	Kali	3	3
			Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Kali	10	10
			Pembinaan Korps Musik Pemda DIY	laporan	3	3
			PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	Kali	2	2
			Rakor	Kali	1	1
			Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	5	5
			Kerjasama Antara Satuan Polisi Pamong Praja DIY dengan Polda DIY dan Stakeholder Terkait	Dokumen	1	1
			Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja DIY dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atau Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Dokumen	1	1
			Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap Gangguan Tibumtranmas dan Pelindungan Masyarakat	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur DIY dengan Anggota Mitra Praja Utama	Dokumen	1	1
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	12	12
			Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal	Laporan	10	10
			Sosialisasi Tatap Muka Ketentuan di Bidang Cukai	Laporan	3	3
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3	3
			Sosialisasi Media Cetak ILM	Laporan	4	4
			Sosialisasi Media Cetak melalui Stiker	Laporan	1	1
			Press Release Barang Hasil Penindakan BKC	Laporan	1	1
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	110	110
			Operasi Non Yustisi	Kali	10	10
			Operasi Yustisi	Kali	8	8
			Pengumpulan Informasi Cukai Rokok Ilegal	Kali	36	36

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal	Kali	1	1
			Pemberantasan cukai rokok ilegal di wilayah perbatasan	Kali	6	6
			Operasi Cukai Rokok Ilegal di Wilayah Perbatasan	Kali	7	7
			Pemberantasan cukai rokok ilegal (operasi pasar)	Kali	42	42
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen	1	1
			Inventarisasi Pelanggaran Perda / Pergub Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Kali	75	75
			Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda/Pergub Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan	Lokasi	150	150
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Operasi Yustisi Pelanggaran Perda/Pergub Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan	Lokasi	75	75
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
			Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	%	80	81,96
			Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa	%	100	100
			Pembinaan Jagawarga			
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang	2214	2214
			Pembinaan Kelompok Jaga Warga	Kali	23	23
			Hibah Barang Bagi Kelompok Jaga Warga	Buah	8000	8000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD)	Unit	44	44
			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (DPA SIPD)	Dokumen	12	12
			Pengamanan Kawasan Laut Selatan, Gunung Merapi dan Waduk Sermo oleh Satlinmas Rescue Istimewa	Laporan	12	12

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja DIY, 2025

(2) Suburusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Kondisi Umum

DIY merupakan wilayah dengan karakter sosial yang khas dan majemuk. Statusnya sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, pariwisata, serta sejarah perjuangan bangsa menjadikan DIY sebagai ruang hidup yang terbuka dan dinamis. Kondisi tersebut mendorong arus mobilitas penduduk yang tinggi,

sehingga DIY dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, etnis, bahasa, serta kepentingan sosial yang beragam.

Keberagaman ini tumbuh dalam iklim sosial yang relatif inklusif. Nilai toleransi yang mengakar di tengah masyarakat membuka ruang dialog dan ekspresi identitas, baik dalam praktik sosial-budaya maupun kehidupan beragama. Namun, dinamika tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri. Pada beberapa situasi, muncul kelompok-kelompok dengan pandangan keagamaan yang cenderung eksklusif dan menolak tradisi lokal atas dasar pemurnian ajaran. Sikap semacam ini berpotensi memicu resistensi sosial dan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap harmoni kehidupan masyarakat yang selama ini terjaga.

Berangkat dari kondisi tersebut, penguatan peran forum-forum kemitraan menjadi kebutuhan strategis. Forum-forum ini diharapkan mampu menjadi ruang kolaborasi dan mediasi melalui berbagai kegiatan fasilitatif, guna mencegah potensi konflik serta memastikan terjaganya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di DIY.Penguatan Koordinasi dengan Forum-forum Kemitraan antara lain:

(a) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Dalam upaya mendukung terciptanya stabilitas dan iklim sosial yang kondusif di DIY, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan aktif membangun sinergi lintas pemangku kepentingan. Bersama Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, FPK turut mendorong percepatan proses pembauran

kebangsaan melalui pengembangan program pembekalan bagi mahasiswa baru asal luar DIY. Selain itu, FPK juga berkontribusi dalam merumuskan gagasan konsolidasi antar pemerintah daerah sebagai langkah strategis dalam pengelolaan asrama mahasiswa di wilayah DIY, guna memperkuat integrasi sosial dan kohesi kebangsaan.

(b) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dalam rangka memperkuat langkah deteksi dini dan pencegahan konflik sosial-budaya, Badan Kesbangpol DIY secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB menjadi simpul strategis dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama, baik di internal masing-masing umat maupun dalam relasi antarumat beragama, sehingga berkontribusi nyata terhadap terciptanya stabilitas dan kondisi sosial yang kondusif di DIY.

Peran FKUB semakin signifikan dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, termasuk persoalan pendirian rumah ibadah serta potensi konflik yang berlatar belakang agama dan SARA. Melalui pendekatan dialogis dan komunikasi yang inklusif, FKUB berfungsi sebagai ruang mediasi dan kerja sama lintas agama dalam mengelola keberagaman secara konstruktif serta merawat nilai-nilai kerukunan di tingkat daerah.

(c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan elemen strategis dalam sistem kewaspadaan dini di DIY. Forum ini berfungsi sebagai kanal partisipatif masyarakat dalam menghimpun dan mengelola informasi terkait potensi gangguan keamanan, indikasi kerawanan, maupun kejadian yang berpotensi berkembang menjadi ancaman. Informasi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dan disampaikan secara terstruktur sebagai dasar langkah pencegahan dan penanganan sejak dini.

Selain itu, FKDM memiliki peran advisory dengan menyusun rekomendasi yang bersifat strategis sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penguatan kewaspadaan dini masyarakat.

b) Capaian DIY dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen pengukuran komprehensif yang digunakan untuk memotret dinamika dan capaian kualitas demokrasi di Indonesia. IDI tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi rujukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

IDI DIY telah ditetapkan sebagai bagian dari Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur, dengan salah satu aspeknya menjadi indikator tujuan dan sasaran kinerja Badan Kesbangpol DIY. Konsekuensinya,

capaian IDI DIY menjadi perhatian kolektif yang melibatkan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah DIY. Dalam rangka menjaga konsistensi dan kualitas pengukuran, Badan Kesbangpol DIY bersinergi dengan BPS Provinsi DIY melalui pelaksanaan rapat kerja dan *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkala bersama Kelompok Kerja IDI DIY.

Penguatan peran dan fungsi Kelompok Kerja IDI DIY diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas demokrasi daerah secara berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan penyempurnaan pembangunan politik dan demokrasi di DIY. Adapun target dan realisasi capaian kinerja Badan Kesbangpol DIY tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.85. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Suburusan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penye-larasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target*)	Reali-sasi	Reali-sasi (%)			
Indikator Kinerja Tujuan									
Terwujudnya Kebebasan dalam Kehidupan Demokrasi di DIY yang berkualitas									
1	Capaian Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY	Angka	77,76	77,76	88,74	114,12%	74,36	77,78	114,09%
Indikator Kinerja Sasaran									
Meningkatnya kualitas kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu									
1	Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	79,55	79,55	92,19	115,89%	73,59	79,57	115,86%
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah									
2	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (91,37)	A (91,37)	A (93,97)	102,84%	A (86)	A (91,39)	102,82%

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Bakesbangpol DIY, 2025

Capaian kinerja Terwujudnya Kebebasan dalam Kehidupan Demokrasi di DIY yang berkualitas pada tahun 2025 terealisasi sebesar 88,74 dari target 77,76 atau setara dengan 114,12%. Adapun hasil capaian dari masing–masing aspek dan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.86. Detail Indeks Demokrasi Indonesia DIY

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	Kategori
	ASPEK KEBEBASAN	**74,31**	**87,35**	**77,76**	**88,74**	**TINGGI**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79	93,02	79,24	79,43	
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30	100	82,7	82,86	
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33	88,36	65,4	100	
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100	100	
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	70,39	70,39	70,39	98,66	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83	76,06	71,03	78,4	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75	78,86	74,56	77,71	
	ASPEK KESETARAAN	87,29	**88,76**	**89,21**	**90,58**	**TINGGI**
8	Kesetaraan Gender	100	100	100	98,44	
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100	100	
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17	75	76,5	74,17	
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	91,09	93,07	91,73	94,22	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antarwilayah	95,44	95,94	96,31	96,52	
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39	78	81,37	90,72	
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03	85,56	85,04	86,67	
	ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	80,74	**80,17**	**83,51**	**88,16**	**TINGGI**
15	Kinerja Lembaga Legislatif	55,56	30,77	50	69,23	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,94	86,79	87,25	86,67	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	75,00	75	75	100	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	66,67	100	100	83,33	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	65,66	65,96	66,29	68,44	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	85,71	100	100	
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	91,60	92,2	92	92,4	
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	94,00	100	94	100	
	NILAI IDI KOMPOSIT	**81,21**	**85,62**	**83,88**	**89,25**	**TINGGI**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, DIY secara konsisten menunjukkan capaian IDI pada kategori tinggi, yang menempatkan DIY sebagai provinsi dengan kualitas demokrasi terbaik secara nasional. Berdasarkan rilis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2025, capaian IDI Tahun 2024 menempatkan DIY pada peringkat pertama secara nasional. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat kelembagaan demokrasi, serta mendorong pemenuhan hak-hak politik masyarakat.

c) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

(i) Masih terdapat tantangan dalam penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik, khususnya terkait pengelolaan unjuk rasa dan forum penyampaian pendapat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Kondisi ini dapat memunculkan persepsi pembatasan kebebasan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi, fasilitasi, dan pendekatan dialogis yang memadai.

(ii) Aktivitas organisasi kemasyarakatan atau kelompok dengan latar belakang ideologi, politik, dan kepentingan tertentu terkadang menimbulkan resistensi sosial. Apabila tidak dikelola secara inklusif, kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang kebebasan berserikat serta memicu gesekan horizontal di masyarakat.

(iii) Pemahaman sebagian masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk batasan kebebasan yang bertanggung jawab, masih perlu ditingkatkan. Rendahnya literasi demokrasi berpotensi memicu konflik sosial dan menurunkan kualitas partisipasi publik.

(b) Solusi

(i) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme dialog, audiensi, dan forum komunikasi yang terstruktur, serta memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan guna menjamin kebebasan berpendapat tetap berjalan seiring dengan terpeliharanya ketertiban umum.

(ii) Melakukan pembinaan dan pemetaan organisasi kemasyarakatan secara berkelanjutan, disertai penguatan pendekatan persuasif, dialog antar kelompok, dan deteksi dini potensi konflik sosial guna mencegah terjadinya gesekan horizontal yang dapat membatasi ruang kebebasan berserikat.

(iii) Mengembangkan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat secara berkelanjutan, dengan menekankan pemahaman hak dan kewajiban warga negara, etika berdemokrasi, serta penggunaan kebebasan secara bertanggung jawab.

d) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Suburusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan melalui 7 program, 13 kegiatan dan 37 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.069.221.488. Capaian kinerja fisik subkegiatan sebesar 100% sesuai target, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp26.671.570.661. atau 95,02%. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.87. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Suburusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					
			Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan	Lembaga	3	3		
			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya					
			Jumlah dokumen pembangunan ketahanan sosial budaya (DPA SIPD)	Dokumen	3	3		
			Pelatihan Kader Pembauran Budaya	Kali	1	1		
			Sosialisasi Pancasila bagi Masyarakat	Kali	78	78		
			Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika	Kali	76	76		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	30.03	82.86		
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Laporan	2	2		

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (DPA SIPD)					
			Laporan Sosialisasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) DIY	laporan	1	1		
			Laporan FGD Pembinaan Ideologi Pancasila	Laporan	1	1		
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (DPA SIPD)	Orang	38	38		
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka					
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (DPA SIPD)	Dokumen	2	2		
			Laporan Penguatan Kapasitas Paskibraka DIY	Dokumen	1	1		
			Laporan Workshop Pembinaan Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka DIY	Dokumen	1	1		
			Pelaksanaan tugas Paskibraka					
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (DPA SIPD)	Dokumen	1	1		
			Laporan Pelaksanaan HUT RI di Istana Kepresidenan DIY	Laporan	1	1		
			Laporan Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila	Laporan	1	1		
			Pembentukan Paskibraka					
			Jumlah Paskibraka (DPA SIPD)	Orang	38	38		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	Angka	70.42	98.66		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,					

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (DPA SIPD)	Orang	400	400		
			Pendidikan Politik untuk Pemilih Difabel	Orang	50	50		
			Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula	Orang	150	150		
			Pendidikan Politik untuk Pemilih Perempuan	Orang	100	100		
			Workshop Bantuan Keuangan Partai Politik	Orang	100	100		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (DPA SIPD)	Laporan	2	2		
			Laporan FGD Indeks Demokrasi Indonesia	Laporan	1	1		
			Laporan FGD Perkembangan Politik di Daerah	Laporan	1	1		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat,	Angka	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI					
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (DPA SIPD)	Dokumen	1	1		
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (DPA SIPD)	Orang	90	90		
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (DPA SIPD)	Laporan	1	1		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	88.36	100		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (DPA SIPD)	Dokumen	1	1		
			Dokumen Tatakelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi	Dokumen	1	1		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (DPA SIPD)	Orang	150	150		
			Sosialisasi P4GN	Orang	150	150		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (DPA SIPD)	Laporan	4	4		
			Laporan Workshop Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Laporan	1	1		
			Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gerakan	Laporan	1	1		

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Nasional Revolusi Mental (GNRM)					
			Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi	Laporan	1	1		
			Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Laporan	1	1		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	79.03	79.43		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (DPA SIPD)	Dokumen	1	1		
			Dokumen FGD Renaksi PKS	Dokumen	1	1		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Laporan	9	9		

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (DPA SIPD)					
			Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)	Laporan	1	1		
			Laporan Pemantauan Orang Asing (POA) di DIY	Laporan	1	1		
			Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	Laporan	1	1		
			Rekomendasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di DIY	Rekomendasi	3	3		
			Laporan Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY	Laporan	2	2		
			Laporan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di DIY	Laporan	1	1		
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (DPA SIPD)	Dokumen	2	2		

Sumber: Bakesbangpol DIY, 2025

(3) Suburusan Penanggulangan Bencana

a) Kondisi Umum

DIY tergolong wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi akibat karakteristik geografisnya yang beragam. Ancaman bencana yang dihadapi meliputi bencana geologis seperti gempa bumi dan erupsi gunung api, serta bencana

hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Tingginya frekuensi kejadian bencana di DIY tercermin dari data kejadian bencana selama lima tahun terakhir, yakni pada periode 2020 hingga akhir 2025.

Sepanjang tahun 2025 tercatat berbagai peristiwa bencana alam. Dalam kurun waktu tahun tersebut, tiga jenis bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) DIY, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.275 kejadian bencana, baik bencana alam maupun nonalam, yang terjadi di wilayah DIY.

Tabel 3.88. Target dan Realisasi Kinerja Suburusan Penanggulangan Bencana Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penye-larasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Tar-get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Nilai	102.83	101.3	101.8	100.49	101.2	102,2	100.49
Indikator Kinerja Sasaran									
1.	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Nilai	0,.2	0.75	0.76	101.32	0.86	0,86	101.32
2.	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	A	A 87.26	A 89.34	102.38	A 90	A 90	100.38

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: BPBD DIY, 2025

Kinerja Urusan Trantibumlinmas Suburusan Penanggulangan Bencana telah tercapai sebagaimana target yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penyelarasan terkait dokumen RPJMD ditujukkan

dalam tabel tersebut di atas. Keberhasilan capaian indikator didukung dengan kerja sama lintas sektor dan inovasi yang dikembangkan.

b) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

(i) Perlunya penambahan pemasangan Sensor *Early Warning System* Tanah Longsor pada Kawasan Rawan Bencana yang ada di DIY

(ii) Meskipun ada mekanisme darurat, masih terdapat kebutuhan regulasi yang lebih fleksibel khusus untuk tahap transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi, agar pemulihan fungsi pelayanan publik tidak terhambat administrasi n-1.

(iii) Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di DIY.

(iv) Dalam rangka pengurangan risiko bencana diperlukan peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana).

(b) Solusi

(i) Dibuat kajian mengenai kawasan Rawan bencana Tanah Longsor yang bekerjasama dengan BPPTKG dan Akademisi.

(ii) Dibuat aturan atau Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

(iii) Pemda DIY menerapkan strategi berkelanjutan dalam menghadapi risiko kekeringan melalui pengembangan infrastruktur pemanenan air hujan,

konservasi lahan dan sumber daya air, pemberdayaan serta edukasi masyarakat, mitigasi kekeringan di sektor pertanian, serta dukungan kebijakan dan teknologi pemerintah, yang meliputi pembangunan embung dan sumur resapan, penghijauan dan perlindungan hutan, penerapan pola tanam dan irigasi hemat air, optimalisasi jaringan irigasi, teknologi modifikasi cuaca, serta perencanaan tata ruang berbasis risiko guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air.

(iv) Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk dikembangkan kapasitasnya.

c) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Suburusan Penanggulangan Bencana mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp18.982.338.665,00 dengan mengampu 4 program dan 27 subkegiatan. Sedangkan dari Dana Keistimewaan sebesar Rp469.445.700,00 dengan mengampu 1 program dan 1 subkegiatan. Untuk kinerja fisik, realisasi tahun 2025 tercapai sebesar 100%, dan realisasi keuangan 85,98%. Deviasi keuangan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu penyesuaian kebutuhan belanja, penyesuaian gaji, bahan bakar kendaraan, penyesuaian belanja yang bersifat tagihan atau sesuai dengan kebutuhan, dan juga efisiensi anggaran.

Tabel 3.89. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Suburusan Penanggulangan Bencana Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			1. Renstra	Dokumen	1	1
			2. Renstra Perubahan	Dokumen	1	1
			3. Renja	Dokumen	1	1
			4. Renja Perubahan	Dokumen	1	1
			5. ROPK	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			1. Konsep/ Bahan LPPD	Dokumen	1	1
			2. Konsep/ Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
			3. Dokumen LKjIP	Nilai AKIP A (80)	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			1. RKA	Dokumen	1	1
			2. RKA Perubahan	Dokumen	1	1
			3. DPA	Dokumen	1	1
			4. DPA Perubahan	Dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang	110	110
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester-an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	70
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	4
			Program Penanggulangan Bencana			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	2
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	1
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	25	25
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
			Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	orang	31	31
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	746	746
			Penanganan Pasca Bencana Provinsi			
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	2	2
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan,	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**			
			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	4	4

Sumber: BPBD DIY, 2025

f. Urusan Sosial

(1) Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam undang-undang ini, negara memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penetapan urusan sosial sebagai urusan wajib menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Termuat dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa urusan wajib bidang sosial merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang

penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepala daerah. Pemenuhan hak dan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah provinsi dan Kabupaten/kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Urusan Wajib Bidang Sosial terwujud dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, serta sinergi lintas sektor juga mendorong berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai Mitra Bidang Sosial dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.90. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Wajib Bidang Sosial Tahun 2025 serta Capaiannya

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Tar-Get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan	%	138.64	28.50	36.98	129.75	28.44	29.50	130.03

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Tar-Get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
	kejuangan dan kesetiakawanan sosial								
Indikator Kinerja Sasaran									
1.	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	173.75	22.00	33.74	153.76	21.57	23.00	156.42
2.	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	%	100.5	26.26	26.72	101.75	26.43	26.43	101.09
3.	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	%	100	61.80	61.80	100	61.36	61.85	100.71
4.	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		A	A 95.27	A 100.46	105.45	A	A 95.29	100

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber Data: Dinas Sosial DIY, 2026

Kinerja Urusan Wajib Bidang Sosial telah tercapai sebagaimana target yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penyelarasan terkait dokumen RPJMD ditujukkan dalam tabel tersebut di atas. Keberhasilan capaian indikator didukung dengan kerja sama lintas sektor dan inovasi yang dikembangkan.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Anak dari keluarga miskin, rentan sosial, dan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) masih menghadapi risiko tidak dapat melanjutkan pendidikan formal secara berkesinambungan. Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, minimnya dukungan dan pendampingan dari orang tua, serta berbagai faktor sosial lainnya berdampak pada terjadinya putus sekolah, ketertinggalan capaian pembelajaran, maupun terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Apabila tidak ditangani secara terpadu, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan lintas generasi;

(b) Permasalahan kerentanan pada anak, meliputi kerentanan sosial ekonomi keluarga tempat tinggalnya, permasalahan pengasuhan, serta risiko kekerasan dan penelantaran anak. Penanganan kasus anak dan keluarga memerlukan pendekatan lintas layanan yang terintegrasi, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam kesinambungan pendampingan dan keterpaduan intervensi antar pemangku kepentingan;

(c) DIY merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu aktivitas sosial ekonomi, serta menimbulkan kerugian materiil maupun nonmateriil apabila tidak diantisipasi secara memadai.

b) Solusi

(a) Sebagai upaya pencegahan putus sekolah dan membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, rentan sosial, dan PPKS, Pemda DIY pada tahun 2025 berkontribusi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dikembangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. Sekolah Rakyat sebagai layanan pendidikan alternatif yang inklusif dan adaptif, dilaksanakan dengan pendekatan terpadu yang mengombinasikan layanan pendidikan, pendampingan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak, sehingga mampu menjangkau anak-anak yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal dan mendorong keberlanjutan proses belajar sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

(b) Sebagai upaya penanganan yang komprehensif terhadap permasalahan anak, Pemda DIY melalui Dinas Sosial DIY mengembangkan Program Penanganan Terpadu Permasalahan Anak dan Keluarga (Pandu Persada) untu menguatkan mekanisme layanan terpadu yang mengintegrasikan pendampingan sosial, dukungan psikososial, serta koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini bertujuan memastikan penanganan kasus anak dan keluarga dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan fungsi keluarga.

(c) Upaya penanganan kerawanan bencana di DIY dilaksanakan melalui kegiatan mitigasi pada wilayah rawan bencana serta peningkatan

kesiapsiagaan masyarakat, yang diwujudkan melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai bagian dari penguatan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Urusan Wajib Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY dan UPTD sebanyak enam Balai, yaitu Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, dan Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha. Anggaran dalam melaksanakan urusan wajib bidang sosial sebesar Rp115.246.481.035,00 dengan realisasi sebesar Rp108.226.622.842,00 atau sebesar 93,91% untuk capaian keuangan dan 100% untuk capaian fisik.

Tabel 3.91. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Sosial Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	414	414

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Doku-men	1	1
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD			
				Jumlah Doku-men hasil koordinasi dan Pelaksanaan AKuntansi SKPD	Doku-men	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor-an	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Lapor-an	1	1
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Analisis Anggaran	Doku-men	1	1
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Doku-men	6	6
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				***Monitoring*, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			
				Jumlah Dokumen *Monitoring*, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Doku-men	1	1
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Doku-men	3	3
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
				Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor-an	12	12
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku-men	2	2
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				Pengadaan Mebel			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	4
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor-an	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor-an	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor-an	12	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53	53
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	116	116
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	5
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	55	55
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	%	22.02	25.54
				Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan provinsi	orang	2.050	2.050
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			
				Jumlah Tenaga Kesejah-teraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	orang	78	78
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			
				Jumlah Lembaga Kesejah-teraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lem-baga	4	4
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan	%	1.07	1.07
				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal			
				Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1	1
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	22.58	41.54
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar-di Dalam Panti			
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	orang	70	70
				Kewenangan Provinsi			
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	70	70
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	50	50
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	70	70
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	50	50
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	50	50
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	50	50
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar			
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	doku-men	8	8
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar-di dalam Panti			
				Penyediaan Makanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	orang	28	78
				Kewenangan Provinsi			
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	orang	28	78
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	13	63
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	28	78
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	13	63
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	13	63
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	13	63
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	7	7
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	3	3
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar-di Dalam Panti			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah doku-men hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar-di dalam panti	doku-men	10	10
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar-di Dalam Panti			
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	8.000	9.885
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	4	4
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	2	2
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	10	10
				Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/ AIDS dan Napza di Dalam Panti			
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	orang	110	348
				Kewenangan Provinsi			
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	orang	110	348
				Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	110	348
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	110	348
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	110	348
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	110	348
				Pemulangan ke Daerah Asal			
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	orang	110	348

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/ AIDS dan Napza di Dalam Panti			
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/ AIDS dan Napza	Doku-men	2	2
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
				Persentase anak balita terlantar-dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	%	3.67	6.62
				Pengangkatan Anak antar-WNI			
				Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/ Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	orang	20	57
				Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
				Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	orang	1	1
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluar-ga	1.832	1.822
				Kewenangan Provinsi			
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluar-ga	20	20
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
				Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan	%	61.03	61.03
				pemenuhan kebutuhan dasar			
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	10.250	10.250
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan PascaBencana Kewenangan Provinsi	orang	50	50
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
				Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	unit	50	50
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	orang	287	287
				Pelayanan Dukungan Psikososial			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	orang	300	300
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
				Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakwanan sosial dalam masyarakat	%	34.66	35.26
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
				Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Ma-kam	23	23
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Dinas Sosial		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
				Persentase penyelenggaraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	%	8.18	8.71
				Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Doku-men	7	7
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dinas Sosial		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**			
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100	100
				Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemda DIY	Doku-men	1	1
4	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokume n	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	4
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokume n	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	4
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	4
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	43	43
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	9
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	%	22.58	41.54
				Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial			
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	115	152
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	115	152
				Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	115	152

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Penyediaan Alat Bantu			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	4	4
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	115	152
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	115	152
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	50	50
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	orang	1	1
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	14	14
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1	1
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	1	1
4	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	90,28	92.17
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	4	4
				Pemeliharaan Mebel			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	6	6
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	20	20
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	22.58	41.54
				Penyediaan Permakanan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	50	101
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	50	101
				Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	50	101
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	50	101
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	50	101
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	50	101
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	50	79
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			
				Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	orang	2	13
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	3	101
				Pemulangan ke Daerah Asal			
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di	orang	2	45

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	dokumen	2	2
3	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90,28	92.17
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	2	2
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	2
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	2
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD)	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	3
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	10
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	22.58	41.54
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	180	212
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	180	212
				Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	180	212
				Penyediaan Alat Bantu			
				Jumlah Orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Provinsi	orang	1	15
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	180	212
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	180	212
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	180	212
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			
				Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	orang	12	20
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	180	212
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	25	43
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	25	48
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	6	6
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	30	43
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	30	43
				Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	30	43
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	30	43
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	30	43
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	30	43
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar	orang	30	43
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis	orang	2	2
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	30	43
				Pemulangan ke Daerah Asal			
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asalKeluarga Kewenangan Provinsi	orang	4	13
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	2	2
Ik6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Balai Perlindungan dan		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90,28	92.17

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
		Rehabilitasi Sosial Remaja		**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD**			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	2
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	22.58	41.54
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan	Orang	60	185

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Provinsi			
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Provinsi	Orang	60	185
				Penyediaan Asrama/ Wisma yang Mudah Diakses			
				Jumlah orang yang terkases asrama/ wisma layak huni kewenangan Provinsi	Orang	60	185
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam Panti kewenangan Provinsi	Orang	60	185
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan Provinsi	Orang	60	185
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan Provinsi	Orang	60	185
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
				Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan Provinsi	Orang	60	185
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Provinsi	Orang	60	185
7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90,28	92.17
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	3
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3
				Penyediaan alat listrik dan elektronik			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	4
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10
3				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			
				Presentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	22.58	41.54
				Pengasuhan			
				Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	orang	70	94
				Penyediaan Makanan			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	70	94
				Penyediaan Sandang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	70	94
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	70	94
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	70	94
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	65	71
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari			
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi	orang	65	71
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak			
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	orang	4	4
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	70	94
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	3	3
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	6	6
				Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti			
				Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	orang	3	3
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	dokumen	**1**	**1**

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
8	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Laporan	12	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			
				Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	2	2
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	3
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	12	12
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali -sasi
				Persentase anak bermasalah social,penyandang disabilitas, gelandangan,pengemis,lanjut usia terlantar,Wanita bermasalah social dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/dapat berfungsi sosial	%	22.58	41.54
				Penyediaan Permakanan			
				Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	orang	200	230
				Penyediaan Sandang			
				Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	orang	200	230
				Penyediaan Asrama yang mudah Diakses			
				Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	orang	200	230
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			
				Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Orang	200	230
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Jumlah peserta bimbingan fisik,mental,spiritual dan social kewenangan provinsi	orang	200	230
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi	Orang	200	230
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi	orang	180	180
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi	Orang	6	6
				Pemulasaraan			
				Jumlah pemulasaraan kewenangan provinsi	orang	16	16

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

2) Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

(1) Kondisi Umum

Kondisi ketenagakerjaan di DIY pada tahun 2025 menunjukkan tren yang semakin positif di berbagai indikator. Perbaikan terlihat dari menurunnya tingkat

pengangguran, bertambahnya jumlah penduduk bekerja, meluasnya kesempatan kerja, serta terciptanya iklim hubungan industrial yang lebih kondusif. Capaian ini sejalan dengan pemulihan perekonomian DIY yang berlangsung secara bertahap, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Berdasarkan data BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 78.743 orang, relatif stabil jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 78.667 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 mencapai 3,46% turun 0,02 poin dibandingkan Agustus 2024 yang berada pada angka 3,48%. Jumlah penduduk bekerja mencapai 2.200.071 orang atau sekitar 96,54% dari total angkatan kerja yang berjumlah 2.278.814 orang. Sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,22%; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,26%; dan sektor Industri Pengolahan sebesar 18,02%. Sementara itu, TPAK D.I. Yogyakarta pada Agustus 2025 sebesar 74,74%, mengalami penurunan sebesar 0,04% poin jika dibandingkan kondisi Agustus 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya meningkatnya penduduk usia kerja yang signifikan dengan peningkatan angkatan kerja di DIY.

Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1.012,70 ribu orang atau 46,03%, sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1.187,37 ribu orang atau 53,97%. Jika dibandingkan Agustus 2024, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami

penurunan sebesar 0,85% poin dibarengi kenaikan sektor informal dengan kenaikan poin yang sama. Kenaikan sektor informal ini didukung oleh tumbuhnya aktivitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum, transportasi, serta sektor informal lainnya.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan juga dievaluasi melalui pencapaian sasaran dan indikator kinerja daerah. Selanjutnya keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan sesuai sasaran dan indikator kinerja daerah tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.92. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target*)	Reali-sasi**)	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
	Terwujudnya peningkatan produktivitas Tenaga Kerja	**Rp Juta /tenaga kerja**	**57,08**	**57,51**	**59,66**	**103,74**	**61,19**	**62,45**	**95,53**
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	68	70	71	101,43	80	80	88,75
2	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan.	%	75	75	75,31	100,41	75	75	100,41
3	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	87	70	73	104,29	75	75	97,33
4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagaker-jaan)	Perusa-haan	2.630	2.639	2.644	100,19	2.659	2659	99,43
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan	Perusa-haan	2.750	2.768	2.770	100,07	2.808	2.808	98,65

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target*)	Realisasi**)	% Realisasi			
	Norma Kerja dan Norma K3								
6	Kategori RB Perangkat Daerah	indeks	A	A	A	100	A	A	A

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025; **) berdasarkan data proyeksi PDRB*
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

Indikator Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2025 tercapai 103,74%. Capaian kinerja diperhitungkan dari Proyeksi PDRB (atas dasar harga konstan) dibagi penduduk yang bekerja = 131.254.819/2.200.071 = 59,66 juta/tenaga kerja. PDRB tahun berjalan berdasar data Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi yaitu 5,40, penduduk yang bekerja berdasar data Sakernas BPS Agustus 2025. Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah tersedianya penduduk usia kerja yang mendominasi di DIY sebesar 74,74% dan bertumbuhnya perekonomian DIY. Sedangkan faktor penghambat antara lain masih terdapat *mismatch* antara kompetensi tenaga kerja dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Capaian indikator persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik merupakan keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja. Indikator persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik tercapai 71%. Dari 45 perusahaan yang mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas dan pengukuran produktivitas, terdapat 32 perusahaan dengan hasil produktivitas baik. Kriteri produktivitas baik yaitu perusahaan memiliki perencanaan strategis; fokus pada pengembangan dan manajenen SDM; data, informasi dan analisis; manajemen proses dan; kinerja

hasil usaha. Keberhasilan indikator ini didukung oleh kesadaran dan kerja sama dari perusahaan-perusahaan tentang pentingnya pengukuran produktivitas.

Capaian indikator Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan merupakan keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja. Indikator persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan tercapai 75,31% atau sesuai target. Pengukuran dihitung dari sejumlah peserta pelatihan yang ditempatkan sebanyak 264 orang (dari sertifikasi uji kompetensi 121 orang, pemagangan 32 orang, dan berwirausaha 111 orang) dibandingkan jumlah peserta pelatihan sebanyak 351 orang. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin meningkatnya kompetensi pencari kerja sehingga daya saing tenaga kerja meningkat.

Capaian indikator persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja merupakan keberhasilan sasaran Terwujudnya Kesempatan Kerja. Indikator persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, tercapai 73% atau melebihi target. Pengukuran dihitung dari persentase penempatan 44,53% (dari data IPK ada 9.929 penempatan dari 22.287 pencari kerja) ditambah persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja sebesar 102,07% (dari tenaga kerja terlibat padat karya 4.675 orang dari 4.580 orang yang diusulkan/direncanakan) dibagi 2 komponen subindikator. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja di sektor formal maupun informal serta adanya kegiatan peningkatan kesempatan kerja (Padat Karya Infrastruktur).

Capaian indikator jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak merupakan keberhasilan

sasaran Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan. Indikator jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dimaknai bahwa perusahaan mempunyai Peraturan Perusahaan/PKB, Struktur Skala Upah dan pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Realisasi capaian sebesar 2.644 perusahaan dari target 2.639 perusahaan. Keberhasilan indikator ini didukung oleh kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak.

Capaian indikator jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3 merupakan keberhasilan sasaran Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan. Indikator jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3 tercapai 2.770 melebih dari target 2.768 perusahaan. Bentuk layanan ketenagakerjaan selain sarana hubungan industrial juga berupa layanan perlindungan norma kerja dan norma K3, baik layanan yang diberikan secara langsung, layanan melalui pengaduan online maupun layanan di perusahaan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin mudahnya fasilitas yang diberikan dalam menyampaikan/pengaduan permasalahan ketenagakerjaan, kualitas pelayanan dan SDM mediator yang menangani.

Capaian indikator Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah merupakan keberhasilan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah. Capaian indikator Kategori RB Perangkat Daerah tercapai angka 2 (kategori A nilai 96,57) sesuai target (target nilai 93,94), dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100%. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi dengan semakin meningkatnya komitmen bersama

untuk menciptakan birokrasi perangkat daerah yang lebih profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN serta mempermudah pelayanan publik.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal sehingga banyak pencari kerja yang tertahan tidak bisa masuk pasar kerja
(b) Perubahan yang sangat cepat dari pola kerja akibat revolusi industri 4.0 berdampak pada kurangnya kompetensi bagi pencari kerja.
(c) Kurang memadainya penerapan perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

b) Solusi

(a) Melakukan perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja melalui program/kegiatan pemberdayaan dan pelatihan berbasis masyarakat untuk menumbuhkan wirausaha baru dan optimalisasi perantaraan kerja melalui mekanisme Antarkerja Lokal, antar Kerja Antardaerah dan Antarkerja Antarnegara.
(b) Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan, pemagangan, standardisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas serta pembangunan karakter serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan (PBJ) serta perantaraan kerja;
(c) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pembinaan dan deteksi dini Hubungan Industrial, Implementasi Struktur Upah dan Skala Upah serta pembinaan dan

pengawasan terhadap kepatuhan norma kerja dan norma K3.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD dan Dana Keistimewaan sebesar Rp44.136.964.202,00 dengan mengampu 8 program 19 kegiatan dan 49 subkegiatan untuk Urusan Ketenagakerjaan. Realisasi keuangan sebesar Rp38.605.175.558,00 atau 87,47% dikarenakan adanya efisiensi dan sisa pengadaan, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

Tabel 3.93. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			
				Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam penyusunan RTK	Kabupaten/ kota	5	5
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
				Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	%	80	96,87
				Persentase peserta pelatihan yang terampil	%	96	98,07
				Persentase peserta magang yang ditempatkan	%	60	82,86
				Persentase SDM K3 yang dilatih tersertifikasi	%	100	100
				Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya di atas standar	%	90	92,67
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	156	156
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BLKPP)			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun 2025	Orang	156	156

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Pengadaan sarana Prasarana Pelatihan Kerja			
				Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja	Unit	6	6
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BK3)			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun 2025	Orang	250	193
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
				Jumlah LPK yang terakreditasi	LPK	2	2
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLKPP)			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	5	5
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
				Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja	%	100	100
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	%	80	96,87
				Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	%	100	100
				Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan	%	32	40
				Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja di kawasan selatan	%	70	70,67
				Persentase penumbuhan calon wirausaha baru	%	75	180
				Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			
				Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	7	7
				Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa			
				Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan	2	2
				Pengembangan Kewirausahaan Desa			
				Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Dokumen	1	1
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIME WAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAK SANAAN			
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	80	92,67
				Implementasi Budaya Pemerintahan DIY (BLKPP)			
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	1	1
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Terwujudnya kesempatan kerja	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik	%	50	51
				Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	%	90	100
				Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	%	90	100
				Pelayanan Antar Kerjapersen			
				Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	25	25
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja			
				Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Orang	90	90
				Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	73	73
				Perluasan Kesempatan Kerja			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	10	10
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			
				Jumlah Data dan Informai yang Dihasilkan Aplikasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	540	540
				Job Fair/Bursa Kerja			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Indikator SIPD)	Orang	100	154
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran			
				Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	180	180
			Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			
				Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	%	98	100
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	191	191
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	10	10
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi			
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1
				Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi			
				Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	40	40
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			
				Jumlah Penetapan UMP	Keputusan	1	1
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	200	200
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
				Presentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan	%	70	71,11
				Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	%	95	97,5
				Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja	%	89	90
				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	940	996
				Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (BK3)			
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	15	15
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANtataG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	89	91,58
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	169	169

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BLKPP)			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BK3)			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	6
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwu-lanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BLKPP)			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BK3)			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6	6
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (BLKPP)			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (BK3)			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(BLKPP)			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BK3)			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BLKPP)			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BK3)			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BLKPP)			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BK3)			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (BLKPP)			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (BK3)			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BLKPP)			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BK3)			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BK3)			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BK3)			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BLKPP)			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BK3)			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLKPP)			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BK3)			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BLKPP)			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BK3)			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	37
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BLKPP)			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BK3)			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar kan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15
				Pemeliharaan Mebel			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	11	11
				Pemeliharaan Mebel (BLKPP)			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	34	34
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	28
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLKPP)			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	16	16
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BK3)			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan /Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	5
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BLKPP)			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BK3)			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	46	46
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKPP)			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeli hara/ Direhabilitasi	Paket	16	16
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BK3)			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeli hara/ Direhabilitasi	Unit	5	5

Sumber: Disnakertrans DIY, 2025

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(1) Kondisi Umum

Kondisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DIY lebih baik dari provinsi lainnya di Indonesia, terbukti dari Anugerah DIY sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari KPPA pada tahun 2022 dan Provinsi Layak Anak sejak tahun 2018 sampai 2025, serta Penerima Penghargaan Parahita Ekapraya sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak betujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain yang diukur dengan indikator rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan metadata jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) dan perempuan korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) dan jumlah penduduk perempuan x 1000.

Tabel 3.94. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satu An	Reali-sasi 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penye-larasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Tar-get (%) *)	Reali-sasi (%)	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat	%	0,45	0,62	0,49	120,77	0,63	0,60	122,45
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/ walikota dan Bamuskal)	%	19	19	19,86	104,53	19,00	19,00	104,53
2	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	%	100	95,5	97,78	100	1001	100	100
3	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	angka	4	5	6	120	6	6	100

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Sengguh.jogjaprov 2025

Capaian indikator Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat sebesar 0,49% pada tahun 2025 lebih rendah dari target yakni 0,62.

Pelaksanaan pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DIY memiliki tiga sasaran yakni

a) Sasaran I: meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
b) Sasaran II: meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
c) Sasaran III: Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

Sasaran I: meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan diukur dengan persentase keterwakilan perempuan dalam politik. Capaian sasaran tersebut pada tahun 2025 sebesar 19,86% naik dari tahun 2024 sebesar 19% dan melebihi target sebesar 19%.

Keberhasilan ini didorong oleh komitmen partai politik untuk menempatkan wakilnya dalam parlemen, serta pendidikan pemilih yang baik untuk memilih wakil perempuan di parlemen.

Sasaran II: meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dengan indikator persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY. Target pada tahun 2025 sebesar 95,5% dengan capaian sebesar 97,78%.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh rehabilitasi BPPA dan Rumah Perlindungan Sementara dan pengadaan peralatan dan perlengkapan berstandar yang merupakan layanan utama bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran III: Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dengan indikator jumlah Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) yang tersedia di DIY dan 5 Kabupaten/Kota se-DIY

Pada tahun 2025 telah terbentuk 1 Puspaga di DIY dan 5 Kabupaten/Kota se DIY, yakni:

a) PUSPAGA Prima di DIY
b) PUSPAGA Kesengsem Kab Sleman
c) PUSPAGA Kenari Kota Yogyakarta
d) PUSPAGA Projotamansari Kabupaten Bantul
e) PUSPAGA Handayani Kabupaten Gunungkidul
f) PUSPAGA Binangun Kabupaten Kulon Progo

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Jumlah perempuan di parlemen masih jauh dari target ideal 30%
(b) Semakin meningkatnya jumlah penyintas kekerasan yang mengakses layanan pemerintah
(c) Masih terus terjadi kasus kekerasan di Satuan Pendidikan

b) Solusi

(a) Jumlah perempuan di parlemen perlu di tingkatkan dengan mendorong apabila ada PAW maka peggantinya adalah perempuan
(b) Semakin meningkatnya jumlah penyintas kekerasan yang mengakses layanan pemerintah, maka perlu diiringi dengan

peningkatkan jumlah dan kualitas SDM pemberi layanan kekerasan di DIY

(c) Perlu pendampingan Puspaga ke Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk pencegahan kasus kekerasan di Satuan Pendidikan

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 7 Program dan 21 SubSelanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.95. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun	20 laporan	20 laporan
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	79 Orang/ Bulan	79 Orang/ Bulan
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	18 Laporan	18 Laporan
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan
2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen
2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	1 Dokumen
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	5 laporan	5 laporan
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	2 Laporan
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor	1 laporan	1 laporan
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	3 Unit
2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor	3 laporan	3 laporan
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	2 Laporan	2 Laporan
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	4 laporan	4 laporan
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	19 Unit	19 Unit
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	212 Unit	212 Unit
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit
2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	113 Unit	113 Unit
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95%	38,95%
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	37 OPD	37 OPD

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	6 laporan	6 laporan
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	42 lembaga	42 lembaga
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi	16%	16%
2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapsitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik atau hukum atau sosial	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	250 orang	250 orang
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA	3 organisasi	3 organisasi
2.08.02.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga	3 Lembaga
2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	60 Orang	60 Orang
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%
		Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100%	100%
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen
2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 kegiatan	5 kegiatan
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat	131 orang	131 orang
2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 orang	1 orang
2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	3 orang
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi	3 organisasi	3 organisasi
2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	30 Orang	30 Orang
2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	4 Dokumen	4 Dokumen
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 dokumen	2 dokumen
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak	97,8%	97,8%
2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga	5 kegiatan	5 kegiatan

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Lintas Kabupaten/Kota	Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
2.08.04.1.01.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga	4 lembaga	4 lembaga
2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	6 Lembaga	6 Lembaga
2.08.04.1.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	25 lembaga	25 lembaga
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi	1 lembaga	1 lembaga
2.08.04.1.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	100%	100%
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak	2 dokumen	2 dokumen
2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provins	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100%	100%
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	5 kab/kota	5 kab/kota
2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang	45 orang	45 orang

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provins	mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	25 Lembaga	25 Lembaga
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak	42 lembaga	42 lembaga
2.08.06.1.02.0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	1 lembaga
2.08.06.1.02.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provins	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100%	100%
		Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi yang diimplementasikan dengan baik	100%	100%
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1dokumen	1dokumen
2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima manfaat	48 orang	48 orang
2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang	41 Orang	41 Orang

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54 orang	54 orang
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen
2.08.07.1.03.0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provin	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	1 lembaga
2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	30 orang	30 orang

Sumber: Sengguh.jogjaprov.go.id, 2025

c. Urusan Pangan

(1) Kondisi Umum

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan pangan di DIY ada 2 , yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU). Sedangkan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategisnya digunakan indikator berupa skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100

kkal/kapita/hari dan persentase daerah rentan rawan pangan.

Tabel 3.96. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Pangan Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Penyelarasan RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor	84,15	77,44	77,44	100	83,07	77,67	99,70
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	9,05	9,06	8,41	107,17	12,48	8,97	106,24
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/har	Skor	96,3	96,4	96,90	100,52	96,70	96,70	100,21
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,85	3,85	1,28	166,70	3,85	3,85	166,70

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Indikator tujuan pertama adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP), merupakan suatu sistem penilaian yang digunakan untuk tujuan mengevaluasi capaian ketahanan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Pada tahun 2025 dilakukan pemutakhiran metodologi penyusunan IKP. Pemutakhiran dilakukan dengan mempertimbangkan perlunya modernisasi indikator untuk memotret kondisi ketahanan pangan berkelanjutan sesuai perkembangan global dan mencerminkan realitas yang faktual, mengacu konsep dan standar pengukuran ketahanan pangan internasional, memperkuat perencanaan multisektoral berbasis bukti, serta mempertimbangkan ketersediaan data dan dilaksanakan melalui proses inklusif.

Pasca pemuthakiran metodologi, terdapat 12 (dua belas) indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP. Indikator-indikator ini berasal dari tiga dimensi pokok ketahanan pangan, yakni aspek ketersediaan, aksesibilitas atau keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan yang efektif. Indeks Ketahanan Pangan memiliki peran krusial dalam menilai kemajuan program ketahanan pangan di tingkat wilayah, mengevaluasi efektivitas pemerintahan daerah dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional, menjadi instrumen penting untuk menetapkan agenda pembangunan berkelanjutan dan menargetkan intervensi program secara tepat sasaran.

Capaian IKP untuk setiap wilayah dikategorikan menjadi enam skala prioritas penanganan berdasarkan nilai ambang batas (*cut off point*) IKP yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Daerah yang tergolong dalam prioritas 1 menunjukkan kerentanan pangan yang lebih parah dibandingkan tingkatan prioritas selanjutnya, sementara prioritas 6 mewakili wilayah dengan ketahanan pangan terkuat. Oleh karena itu, wilayah di prioritas 1 hingga 3 menjadi fokus penanganan melalui berbagai program intervensi yang dibutuhkan.

PRIORITAS	*CUT OFF*	KETERANGAN
1	<45,59	Sangat rentan
2	45,60 – 53,42	Rentan
3	53,43 – 61,47	Agak rentan
4	61,48 – 69,52	Agak tahan
5	69,53 – 77,35	Tahan
6	>77,35	Sangat tahan

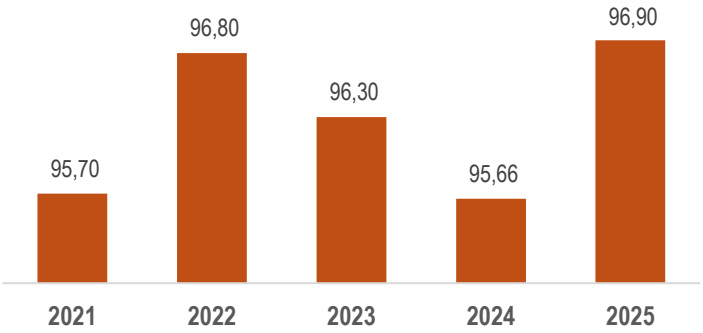
Gambar 3.43. *Cut Off Point* Indeks Ketahanan Pangan

Sumber data: Bapanas, 2025

Capaian IKP DIY tahun 2025 sebesar 77,44 dengan rincian untuk aspek ketersediaan pangan memiliki skor 69,21; aspek keterjangkauan pangan memiliki skor

80,59; dan aspek pemanfaatan memiliki skor 82,57. Persentase capaian 100% dibanding target 2025 dan 99,70% dibanding target akhir RPJMD 2027. Adapun Skor IKP DIY berada di skala prioritas 6, dengan kategori tahan pangan. Apabila dibandingkan dengan capaian IKP tahun 2024 yang dihitung menggunakan metodologi lama, IKP DIY memang lebih rendah, namun IKP tahun 2025 sudah melebihi IKP Nasional sebesar 73,00 dan berada di peringkat delapan provinsi paling tahan pangan se-Indonesia. Kolaborasi lintas sektor dan sinergitas program merupakan kunci utama keberhasilan ini.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berfungsi sebagai alat ukur kualitas gizi dan variasi pola makan masyarakat di berbagai tingkatan wilayah, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Indikator ini menggambarkan seberapa dekat konsumsi pangan masyarakat dengan standar ideal yang direkomendasikan oleh ahli gizi. Peningkatan skor PPH mendekati angka ideal 100 secara langsung mencerminkan keragaman dan kualitas gizi yang lebih baik, yang pada akhirnya menunjukkan kemajuan dalam kesejahteraan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.



Gambar 3.44. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2021–2025

Sumber data: BPS Provinsi DIY diolah oleh Bapanas dan DPKP DIY, 2025

Perhitungan Skor PPH didasarkan pada data SUSENAS dari BPS. Pada tahun 2025, capaian PPH sebesar 96,90, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 95,66 seperti terlihat pada gambar di atas. Perkembangan ini didorong oleh perubahan pola konsumsi yang lebih seimbang, seperti penurunan konsumsi beras dari 55,79% menjadi 48,10% (mendekati target 50%), peningkatan konsumsi umbi-umbian dari 2,29% menjadi 2,8%, serta kenaikan konsumsi kacang-kacangan dari 3,23% menjadi 4,70%. Perubahan ini selaras dengan kebijakan nasional untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan mendorong konsumsi pangan lokal.

Skor PPH nasional saat ini berada di angka 95,1, yang berarti Skor PPH DIY telah melampaui rata-rata nasional. Prestasi ini didukung oleh penghargaan sebagai provinsi dengan PPH tertinggi se-Indonesia dari 2018 hingga 2024. Tahun 2025, DIY menempati posisi kedua PPH terbaik nasional untuk tingkat provinsi setelah Jawa Tengah. Upaya ini didukung oleh program penganekaragaman pangan B2SA melalui kampanye, gerakan, edukasi, promosi, dan sosialisasi. Ke depannya masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi beberapa golongan pangan yang masih belum mencapai angka ideal, antara lain dengan mendorong konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan, serta mempertahankan konsumsi padi-padian, protein hewani, dan sayur buah.

Indikator tujuan kedua adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan indikator indikator utama yang digunakan oleh FAO untuk mengukur tingkat ketidakcukupan gizi di tingkat populasi.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan didefinisikan sebagai persentase penduduk suatu wilayah yang mengonsumsi kalori harian di bawah ambang batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi dasar, biasanya sekitar 1.800-2.100 kkal/kapita/hari, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Indikator ini menjadi bagian integral dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-2: *Zero Hunger*, dimana targetnya adalah mengurangi setidaknya separuh proporsi penduduk yang mengalami kelaparan pada tahun 2030. Semakin rendah nilai PoU di suatu wilayah, berarti semakin tinggi tingkat kecukupan konsumsi pangan masyarakatnya, begitupun sebaliknya. Semakin kecil angka capaiannya, semakin bagus kinerjanya.

Capaian PoU DIY tahun 2025 sebesar 8,41%, lebih baik dibanding capaian tahun 2024 sebesar 9,05%. Persentase capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 107,17% dan terhadap target akhir Renstra 2027 sebesar 106,24%. Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Sleman memiliki capaian PoU terbaik sebesar 6,81%, diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul 7,36%, Kota Yogyakarta 9,52%, Kabupaten Bantul 9,58%, dan Kabupaten Kulon Progo 10,01%. Namun demikian, capaian PoU DIY masih di bawah PoU Nasional yang memiliki skor 7,89%. Untuk mengejar ketertinggalan ini, DIY masih perlu meningkatkan konsumsi kalori terutama di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil dari analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*–FSVA), tahun 2025 sudah tidak ada Kapanewon/Kemantren yang masuk kategori sangat rentan rawan pangan (Prioritas 1), namun masih ada 1

Kapanewon di DIY yaitu Kapanewon Kokap, Kulon Progo yang masuk dalam daerah rentan rawan pangan (Prioritas 2), sehingga capaian persentase daerah rentan rawan pangan tahun 2025 adalah 1,28% dengan tingkat capaian terhadap target 2025 maupun target akhir Renstra 2027 sebesar 166,70%. Disamping itu, masih terdapat 3 Kapanewon/Kemantren yang masuk dalam kategori agak rentan (Prioritas 3), yaitu Kapanewon Tepus, Gunungkidul, Kapanewon Pajangan, Bantul, dan Kemantren Ngampilan, Yogyakarta. Ketiganya juga memerlukan perhatian khusus agar tidak turun menjadi daerah rentan pangan. Penanganan dan pencegahan kerawanan pangan memerlukan dukungan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dari semua *stakeholders* di wilayah DIY. Intervensi dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan spesifik di masing-masing wilayah yang menjadi target sasaran.

Ketahanan pangan DIY didukung oleh tiga pilar utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang optimal. Ketersediaan pangan di DIY telah terjamin melalui kolaborasi antar berbagai pihak terkait. Pada tahun 2025, tingkat ketersediaan energi mencapai 2.798 kkal/kapita/hari, sementara tingkat konsumsi energi mencapai 2.065,93 kkal/kapita/hari. Cadangan pangan dari pemerintah dan masyarakat terus dijaga, bahkan ditingkatkan setiap tahun melalui pengadaan atau pemberian hibah pengisian lumbung pangan. Cadangan ini sangat vital untuk menghadapi situasi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, dan kondisi darurat lainnya. Hingga 31 Desember 2025, cadangan pangan pemerintah berupa beras mencapai 302,874 ton, seluruhnya dikelola oleh PT Taru Martani. Selama tahun 2025, terdapat penyaluran cadangan pangan Pemda

DIY sebesar 2.425 kg yang diperuntukkan bagi para mahasiswa aktif dan berdomisili di DIY yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan rutin setiap bulan. sepanjang 2025 menunjukkan di bulan Januari Kota Yogyakarta mengalami kondisi rentan pangan yang disebabkan oleh aspek keterjangkauan harga beras yang kondisinya lebih fluktuatif dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya kondisi rentan pangan juga terjadi di bulan September yaitu di Kabupaten Kulon Progo, penyebabnya juga berasal dari aspek keterjangkauan terhadap harga beras yang fluktuatif sehingga masyarakat menjadi sulit mengakses pangan ditambah dengan kondisi masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten tersebut. Laporan terhadap kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pemda baik di tingkat DIY maupun Kabupaten/Kota untuk segera melakukan intervensi terkait dengan stabilisasi harga. Strategi utama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antara lain melalui Gelar Pangan Murah (GPM), Kios Pangan, bazar, dan operasi pasar yang memungkinkan masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Selain itu, dukungan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan penting dalam menjaga ketersediaan dan harga pangan di wilayah DIY. Bahkan Pada Tahun 2025 ini, Pemda DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan keberhasilannya meraih Juara 2 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa–Bali pada ajang bergengsi TPID *Award* 2025.

Keamanan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam aspek pemanfaatan pangan. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY memiliki peran penting dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan, khususnya untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sepanjang tahun 2025 dilakukan pengawasan keamanan pangan dan pengujian *post-market* oleh OKKP-D DIY terhadap 160 produk PSAT (buah, sayur, dan beras curah) yang beredar di 5 kabupaten/kota di DIY. Hasilnya, 93,75% PSAT yang menjadi sampel pengujian tersebut aman untuk dikonsumsi. Sementara pengawasan *pre-market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor PSAT. Pada Tahun 2025 ini OKKP-D DIY telah menerbitkan 30 izin edar Produk Domestik (PD) PSAT, 1 izin Rumah Pengemasan, dan 13 Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (SPPB) PSAT. Selain itu dilakukan pula *surveillance* kepada beberapa pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan sertifikat/register dengan hasil 7 pelaku usaha dinyatakan masih konsisten dalam pemenuhan standar keamanan pangan.

Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan pangan dicerminkan dengan angka *sampling* Pangan Segar di peredaran (*post market*) dan jumlah registrasi yang diterbitkan (*pre market*) atau dengan kata lain capaian total indikator Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan Pangan merupakan penjumlahan dari capaian tertimbang pengawasan di peredaran (*post market*) dan capaian tertimbang registrasi dan Sertifikasi (*pre market*). Jika dihitung menggunakan panduan perhitungan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), capaian DIY sebesar 100,23%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 80,84%, maka tingkat

capaiannya sebesar 124,91%. Agar keamanan pangan di wilayah DIY selalu terjaga dengan baik, diperlukan penguatan berkelanjutan terhadap OKKP-D di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi yang intensif dan efektif, peningkatan kompetensi pengawas keamanan pangan, peningkatan fasilitas pengujian, dan yang tidak kalah penting adalah sosialisasi regulasi dan edukasi bagi masyarakat maupun bagi para pelaku usaha PSAT.

Pemda DIY juga memanfaatkan Dana Keistimewaan untuk mendukung ketahanan pangan, melalui Urusan Kebudayaan. Salah satu upaya menumbuhkan kemandirian pangan di tingkat kelompok, sejak tahun 2017 dilaksanakan Lumbung Mataraman. Pada tahun 2025, Lumbung Mataraman yang dikembangkan telah berhasil menghantarkan 12 kelompok ke tahap kemandirian. Selain intervensi melalui kelompok, Pemda DIY juga menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Mandiri Pangan Lumbung Mataraman agar dapat menggunakan Tanah Kas Desa (TKD) untuk mendukung tercapainya ketahanan dan/atau kemandirian pangan melalui penerapan *integrated farming* di tingkat Kalurahan. Sejak tahun 2022 sampai dengan 2025, total yang difasilitasi melalui BKK Lumbung Mataraman sebanyak 16 Kalurahan.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Data pasokan dan ekspor impor bahan pangan yang digunakan untuk menghitung Proyeksi Neraca Pangan belum tersedia secara lengkap dan tepat waktu.

(b) Upaya peningkatan konsumsi golongan umbi-umbian dan kacang-kacangan sebagai alternatif sumber karbohidrat belum sepenuhnya berhasil.

b) Solusi

Melibatkan para pihak terkait yang memiliki data sesuai ketugasan yang diampu untuk mendukung penyediaan data pasokan dan data ekspor impor bahan pangan.Penggunaan strategi terpadu melalui promosi serta edukasi konsumsi pangan lokal khususnya umbi-umbian dan kacang-kacangan; penguatan produksi; meningkatkan kolaborasi riset, teknologi pengolahan, inovasi, dan hilirisasi produk pangan lokal; standardisasi mutu dan sertifikasi; dan penguatan regulasi pangan lokal guna mendorong substitusi karbohidrat yang lebih beragam dan berkelanjutan.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Urusan Pangan terdiri dari 3 Program Reguler dan 1 Program Dana Keistimewaan. Program Reguler yaitu: 1).Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan pagu Rp422.450.000,00 2).Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan pagu Rp22.630.000,00 dan 3).Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan pagu Rp227.866.300,00 Jumlah total pagu Program reguler Rp672.946.300,00 serta realisasi Program reguler keseluruhan mencapai Rp672.134.899,00 atau 99,88%. Program Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dengan pagu anggaran Rp1.901.831.000 dapat terealisasi Rp1.830.956.936,00 atau 96,27%. Jika digabungkan rata-rata realisasi Program reguler dan Dana Keistimewaan mencapai 97,22%. Realisasi kinerja fisik

baik Program reguler maupun Dana Keistimewaan mencapai 100%, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,78%. Rincian capaian kinerja program dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.97. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pangan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor; 2. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah); 3. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal; 4. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan; 5. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilitasasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan; 6. Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			
				Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap /hari	Kkal/kap /hari	3734	2798
				Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap /hari	Kkal/kap /hari	2141	2065.93
				Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
				Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Lapor -an	3	3
				Subkegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi			
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Lapor -an	2	2
				Subkegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Doku-men	1	1
				Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			
				Subkegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
				Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Doku-men	2	2
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Lapo-ran	1	1
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
				Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	%	95,45	95,45
				Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Lapor-an	2	2
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
				Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	80,24	100,23
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Subkegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			
				Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifi-kat	5	5
				Subkegiatan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Doku-men	3	3
				Subkegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			
				Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Doku-men	1	1
				Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			
				Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Doku-men	1	1
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	%	27.4	34.29
				Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
				Subkegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman			

Sumber: DPKP DIY, 2025

d. Urusan Pertanahan

(1) Kondisi Umum

Amanat dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten berwenang dalam mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Sasaran dari pengelolaan dan pemanfaatan tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Aspek Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sementara aspek Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari perlindungan, penggunaan, dan pelepasan.

Realisasi kinerja urusan pertanahan ditentukan dengan satu indikator kinerja sasaran, yaitu Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan.

Tabel 3.98. Target dan Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Terhadap Target Akhir RPJMD DIY (2027)

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satu-an	Capaian (2023)	2024			Target akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang dan Pertanahan berkualitas									
1	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agrarian di daerah	%	63,92	71,42	77,42	108,40	74,69	74,69	103,66
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase penyelenggaraan	%	59,66	58,92	66,63	113,09	58,64	59,11	112,72

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satu-an	Capaian (2023)	2024			Target akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi			
	Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan								

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2026

Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan: Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang dan Pertanahan berkualitas

Berdasarkan tabel di atas maka dapat terlihat bahwa persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah dari target hasil penyelarasan yang ditetapkan sebesar 71,42% pada tahun 2025 teralisasi sejumlah 77,42% (108,40%). Capaian ini didukung oleh rerata dari perhitungan dua sasaran perangkat daerah yaitu (a) terwujudnya penyelenggaraa penataan ruang bernilai baik; (b) terwujudnya penyelenggaraan penataan agraria di daerah sesuai ketentuan.

a) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan

Kinerja urusan pertanahan dengan indikator kinerja sasaran berupa Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah sesuai ketentuan, hasil capai pada tahun 2025 telah melampaui target, yaitu dari target hasil penyelarasan sebesar 58,92% sudah tercapai sebesar 66,63% (113,09%) dengan perhitungan sebagai berikut:

[(Rerata Persentase penyelenggaraan penataan agraria yang ditindakalnjuti)] x 50% + [Rerata (Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah SG/PAG/TD) + (Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG/TD)] x 50%

=[(100% + 100%)/2 x 50%] + [(46,71% +19,80%)/2] x 50%] = 66,63%

Capaian sampai dengan akhir tahun 2025 didapatkan dari realisasi pendaftaran sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten sebanyak 14.396 bidang ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 15.650 bidang, jadi jumlahnya 30.046 bidang dibagi dengan jumlah keseluruhan target akhir RPJMD DIY Tahun 2022–2027, yaitu 64.323 bidang tanah kasultanan dan kadipaten dan tanah desa, dengan rincian antara lain:

(a) Persentase pendaftaran sertipikat bidang Tanah SG/PAG/TD sebesar 46,71% dari perhitungan jumlah pendaftaran sebesar 30.046 bidang terhadap 64.323 bidang yang terdiri dari :

    (i) Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 14.396 bidang (bertambah 281 bidang dari realisasi tahun 2024);
    (ii) Pendaftaran Penyesuaian Sertipikat Tanah Kalurahan sejumlah 10.446 bidang (bertambah 742 bidang dari realisasi tahun 2024);
    (iii) Pendaftaran sertipikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 5.204 bidang (bertambah 1.629 bidang dari realisasi tahun 2024).

(b) Persentase kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sebesar 19,80% dari perhitungan jumlah rekomendasi yang masuk sebesar 4.488 rekomendasi terhadap keseluruhan bidang tanah yang sudah bersertifikat 22.661 bidang yang terdiri dari

(i) Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah SG/ PAG sampai dengan triwulan IV sebanyak 2.424 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2025 sebanyak 224 rekomendasi terbit);
(ii) Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah desa sampai dengan triwulan IV sebanyak 536 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2025 sampai dengan Desember sebanyak 213 rekomendasi terbit);
(iii) Akumulasi rekomendasi pembaruan HGB sampai dengan akhir triwulan IV sebanyak 1.528 rekomendasi (tahun 2025 sampai dengan Desember 2025 sebanyak 284 surat rekomendasi terbit).

(c) Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi sebesar 100% dari dua permohonan layanan pertanahan yang masuk terhadap keseluruhan permohonan yang telah ditindalanjuti, yaitu

(i) Koordinasi tahapan persiapan penambahan lahan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi 1 dan seksi 2 terkait data penambahan di Kalurahan Trihanggo dan kalurahan Maguwoharjo

(ii) Koordinasi identifikasi ulang terkait pihak yang berhak yang belum menandatangani Berita Acara Konsultasi publik
(iii) Konsultasi publik penambahan lahan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi 1 dan seksi 2 di Kalurahan Trihanggo, Sleman
(iv) Koordinasi kegiatan pemberitahuan tidak langsung dan penyerahan penetapan lokasi pengadaan tanah penambahan lahan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi 1 dan seksi 2.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait dengan sasaran terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah, antara lain:

(a) Terdapat kendala yang disebabkan karena ketergantungan pada faktor eksternal dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota karena menyesuaikan dengan jumlah kuota dalam proses pendaftaran. Pada tahun 2025 masih menyelesaikan tunggakan target penerbitan sertipikat terhadap SPS yang sudah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya.
(b) Belum adanya rumusan yang lebih konkrit kaitannya dengan terhadap status keberadaan tanah wedi kengser, sehingga bidang tanah tersebut belum bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya;
(c) Terbatasnya ketersediaan peta bidang tanah dari Kantor Pertanahan sehingga belum bisa secara optimal dilakukan proses pendaftaran

b) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas antara lain :

(a) Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY telah melakukan rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil ATR/BPN DIY dan Kepala Kantah Kabupaten/ Kota kaitannya dengan komitmen dalam penyelesaian tunggakan sertipikasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan.

(b) Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTR) pada tanggal 27 November 2025 telah dilaksanakan pembahasan kaitannya dengan pengelolaan tanah timbul (*Aanslibbing*). Adapun hasil dari GTRA tersebut yaitu perlu untuk dilakukan proses konsolidasi kembali kaitannya dengan keberadaan status tanah tersebut, karena masih terdapat perbedaan persepsi ataupun pemahaman terkait objek tersebut karena tidak hanya mendasarkan pada regulasi hukum saja namun juga dengan melihat dari faktor sosial dan sejarahnya.

(c) Optimalisasi pelaksanaan kerjasama antara Pemda DIY dengan Kementerian ATR/BPN dalam hal berbagi data sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani dengan Nomor 119/13806 dan Nomor: 10/SKB-34.HP/XII/2023 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Pembangunan di Bidang Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang. Salah satu

bentuk implementasi yang sudah dilaksanakan adalah berbagi pakai data foto udara di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.876.522.400,00 yang dibagi ke dalam 3 Program, 5 kegiatan, dan 11 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp10.768.400.437,00 (99,01%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.99. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**			
			Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	**%**	100	100
1			**Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**			
a.			Bahan Penerbitan Penetapan lokasi Pembangunan untuk Kepentingan umum	dokumen	1	1
B.			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			
			Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti	objek	2	4
1			**Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota**			
a.			Bahan Rekomendasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1
C.			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**			
			Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	%	54,26	46,71
			Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	%	14,68	19,80
1.			**Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**			
a.			Dokumen Evaluasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dokumen	4	4
b.			Berita Acara Verifikasi	bidang	3325	3325

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
c.			Dokumen Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah	keputusan	500	500
d.			Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa	Sertifikat	346	346
e.			Penyerahan Sertifikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Event	1	1
f.			Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Kalurahan	2	2
g.			Dukungan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pendaftaran tanah Kasulanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang	4044	4044
2.			**Pemeliharaan Dokumen Pertanahan**			
a.			Hasil Inventarisasi Dokumen Pertanahan untuk Pemeliharaan Dokumen	dokumen	1	1
3.			**Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa**			
a.			Supervisi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di DIY	Dokumen	1	1
b.			Tindaklanjut Hasil Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di DIY	lokasi	90	90
c.			Penindakan non Yustisi terhadap pelanggaran Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan	surat	10	10
4.			**Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan**			
a.			Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2025, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2026, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2027 Urusan Pertanahan	dokumen	4	4
5.			**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan**			
a.			Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan Tahap I, II, dan III Tahun Anggaran 2025	Dokumen	3	3
6.			**Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan**			
a.			Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertifikat	Sertipikat	1200	1200
b.			Pengelolaan Pusat Informasi Data Pertanahan Terpusat Command Center	sistem	1	1
c.			Maintenance Sistem Informasi Pertanahan	Paket	1	1
d.			Penyediaan Foto Udara dan Peta Dasar 1:1000	Kabupaten	1	1
7.			**Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten**			
a.			Rekomendasi kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan tanggapan permohonan perpanjangan/pembaruan hgb/hp	Rekomendasi	150	150
b.			Penyebarluasan Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1) Publikasi surat kabar			2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
			2) Film/Video Pendek 3) Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 4) Publikasi Urusan Keistimewaan Pertanahan	kali terbit Film Lokasi paket	2 1 60 1	1 60 1
c.			Penyusunan rekomendasi izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan kepada Kasultanan/ Kadipaten	rekomendasi	120	120
d.			Fasilitasi Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan pada BKK Kalurahan	Kalurahan	40	40
e.			Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan Perkal Pemanfaatan Tanah Kalurahan	dokumen	1	1
8			**Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa**			
a.			Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Pertanahan	%	100	100
b.			Verifikasi Permohonan Penyelesaian Tukar menukar (1 dokumen 10 Berkas)	Dokumen	1	1
c.			Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan	Dokumen	1	1
9			**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan**			
a.			Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan	unit	3	3

Sumber: DPTR DIY, 2025

e. Urusan Lingkungan Hidup

(1) Kondisi Umum

Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan menjadi hal yang esensial guna menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Pemda DIY berupaya melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai upaya yang terukur melalui beberapa indikator kinerja dengan target dan capaian sebagai berikut

Tabel 3.100. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Capaian 2025 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satu-an	Capaian 2024	2025			Target akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Tar-Get*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan: Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari									
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	%	85,91	92,76	94,71	102,10	100	100	94,71
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	%	27,14	25,34	28,08	110,81	26,58	26,58	105, 64
2.	Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota pada tahun n	Indeks	5,49	6,03	5,92	101,82	5,86	5,86	98,99

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: DLHK DIY, 2025

Sasaran kinerja urusan lingkungan hidup sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2022–2027 adalah Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator sasaran pertama yaitu Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi. Indikator tersebut diperoleh dari Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan yang dilakukan Pada Tahun 2025. Realisasi tahun 2025 sebesar 28,08%. Jika dibandingkan dengan angka tahun lalu, terjadi peningkatan capaian kinerja karena jumlah perusahaan yang tidak taat semakin menurun

Dasar pelaksanaan pengambilan sampel uji adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Sungai dan sejenisnya). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, semakin kecil nilai indeks pencemaran maka semakin baik baku mutu airnya. Nilai indeks pencemaran dikategorikan dalam 4 kelas yaitu:

a) Baik (Memenuhi Baku Mutu): $0 \leq IP \leq 1,0$
b) Tercemar Ringan: $1,0 \leq IP \leq 5,0$
c) Tercemar Sedang: $5,0 \leq IP \leq 10,0$
d) Tercemar Berat: $IP \geq 10,0$

Nilai Indeks Pencemar (IP) di DIY adalah sebesar 5,92. Nilai ini merupakan rerata dari nilai IP periode I (5,69) dan IP periode II (6,15). Perhitungan Indeks Pencemar dilaksanakan di 11 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik pantau dengan menggunakan perhitungan status mutu air berupa metode Indeks Pencemar sesuai pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, parameter yang diuji sebanyak 8 parameter meliputi TSS, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat, pH, DO, dan Fecal Coli. Hasil analisis kualitas air sungai dengan status mutu cemar berat di DIY menggunakan metode Indeks Pencemaran:) Periode I, Indeks Pencemaran pada periode I adalah 5,69 dengan rincian hasil perhitungan status mutu sebagai berikut: a. Memenuhi = -- b. Cemar Ringan = 22 titik c. Cemar Sedang = 28 titik d. Cemar Berat = -- Dominasi parameter pencemar yang melebihi baku mutu yang mempengaruhi adalah parameter COD (6%), TSS (8%), BOD (20%), Total Phospat (76%) dan Fecal Coliform (100%).) Periode II, Indeks Pencemaran pada periode I adalah 6,16 dengan rincian hasil perhitungan

status mutu sebagai berikut: a. Memenuhi = -- b. Cemar Ringan = 18 titik c. Cemar Sedang = 27 titik d. Cemar Berat = 5 titik Dominasi parameter pencemar yang melebihi baku mutu yang mempengaruhi adalah parameter BOD (1%), Total Phospat (34%) dan Fecal Coliform (100%). Lokasi pemantauan dengan status mutu cemar berat adalah pada: 1. Sungai Belik 1 pada lokasi Jembatan Klebengan (Wisdompark) parameter yang melebihi baku mutu adalah Fecal Coli. 2. Sungai Belik 2 pada lokasi Jembatan Jalan Tegalturi (Nitikan) parameter yang melebihi baku mutu adalah Fecal Coli. 3. Sungai Belik 3 pada lokasi Jembatan Wonokromo parameter yang melebihi baku mutu adalah Fecal Coli. 4. Sungai Code 5 pada lokasi Jembatan Abang Ngoto, Sewon, Bantul. parameter yang melebihi baku mutu Adalah Total Fosfat dan Fecal Coli. 5. Sungai Code 6 pada lokasi Jembatan Pacar Wonokromo, Pleret, Bantul. parameter yang melebihi baku mutu Adalah Total Fosfat dan Fecal Coli. Berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan kualitas air Sungai dengan metode Indeks Pencemar (IP) dapat dianalisis sebagai berikut: a. Indeks Pencemar (IP) periode I sebesar 5,69 dan periode II sebesar 6,16, terjadi peningkatan Indeks Pencemar (IP). b. Peningkatan IP (penurunan kualitas air) pada periode II terjadi karena peningkatan nilai parameter Fecal Coli dengan hasil > 240.000 apabila dibandingkan dengan hasil pemantauan kualitas air periode I sehingga terjadi kondisi status mutu cemar berat. c. Parameter dominan yang masih melebihi baku mutu adalah parameter Total Phospat dan Fecal Coli. d. Apabila dilihat dari debit Sungai periode I dan II, berdasarkan data dan informasi pemantauan iklim BMKG tahun 2024/2025, terjadinya musim hujan (bulan Oktober 2024–April 2025) dan musim kemarau (Mei 2025–September 2025). Sesuai tabel di atas bahwa debit air Sungai pada periode I lebih besar apabila

dibandingkan periode II yang dipengaruhi musim penghujan pada periode 1, sehingga terjadi pengenceran air sungai dan adanya limpasan – limpasan polutan sumber pencemar dari drainase, pertanian, domestik rumah tangga, peternakan yang masuk ke Sungai (terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu namun kondisi IP masih lebih baik dibadingkan dengan kondisi mutu air pada periode 2). e. Secara visual langsung dilapangan pada periode I dan II timbulan sampah disungai berkurang. f. Telah dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan perangkat kelurahan tentang kegaiatan pemetaan sungai tercemar di 3 Sungai (Code, Winongo, dan Gajahwong) di wilayah Bantul dan kegiatan pengelolaan sampah mandiri yang lokasinya berdekatan dengan lokasi titik pemantauan sungai, secara umum mungkin berpengaruh terhadap perbaikan mutu air sungai. g. Hasil Pemantauan kualitas air di 11 sungai yang melintasi wilayah Yogyakarta menunjukkan beberapa parameter lingkungan telah melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Pelaku usaha dan/atau kegiatan belum seluruhnya memahami dan melaksanakan kewajiban, persyaratan, dan larangan sesuai dengan yang diamanatkan di dokumen lingkungan, perizinan dan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Tren tingkat ketaatan yang ada didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar

yang sudah mapan. Sedangkan perusahaan yang masih berkembang cenderung masih abai terhadap pengelolaan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. Hal ini dikarenakan belum adanya personil khusus di perusahaan yang menangani terkait pengelolaan lingkungan.

(b) Masih rendahnya tingkat pemenuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan pengendalian pencemaran air dan baku mutu kualitas air

(c) Pengelolaan limbah domestik masih menjadi tantangan krusial yang mengancam kelestarian ekosistem di DIY, khususnya terkait limbah cair rumah tangga yang dibuang langsung tanpa pengolahan memadai. Kondisi ini terlihat jelas di sepanjang bantaran sungai-sungai utama seperti Code, Winongo, dan Gajah Wong, di mana penurunan kualitas air terus terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat yang masih abai terhadap dampak pencemaran lingkungan. Kurangnya pemahaman mengenai sistem pembuangan yang terintegrasi, ditambah dengan keterbatasan lahan untuk drainase yang sehat di kawasan padat penduduk

(d) Belum optimalnya pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air sehingga menyebabkan nilai indeks pencemaran sungai menjadi tinggi. Limbah domestik rumah tangga dan limbah non *point source* (limbah dari drainase, ternak, pertanian,dll) langsung masuk ke dalam aliran sungai tanpa melalui proses pengolahan

b) Solusi

(a) Untuk meningkatkan komitmen dan kepatuhanpelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Pemda DIY mengupayakan adanya akses yang mudah dan cepat terhadap informasi terkait izin lingkungan, tersedianya akses terhadap pelatihan serta asistensi yang memadai,dan jaminan kepastian (*assurance*) serta transparansi dalam proses perizinan.

(b) Adanya ekspos hasil pengawasan yang dilakukan dengan menghadirkan pimpinan tertinggi perusahaan cukup signifikan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan. Perusahaan menjadi lebih cepat untuk menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil ekspos

(c) Dalam rangka menurunkan indeks pencemaran (IP) sungai di tahun 2024, Pemda DIY menjalin kerja sama lintas sektor masyarakat pemerhati sungai, swasta, Perguruan Tinggi, dan LSM melakukan kegiatan di antaranya Merti Kali, Merti Tuk, dan restorasi mata air.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 anggaran Urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp57.834.530.762,00 yang dialokasikan ke dalam 8 program, 15 kegiatan, dan 36 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp53.788.991.420,00 (93,00%) dengan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.101. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**			
3.1	**Penyusunan RPPLH Provinsi**			
3.1.1	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	dokumen	1	1
3.1.2	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RPPLH DIY	dokumen	1	1
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			
4.1	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**			
4.1.1	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Indikator SIPD)	dokumen	3	3
4.1.2	Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai di 10 Sungai	dokumen	1	1
4.1.3	Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien di 20 Titik Pantau	dokumen	1	1
4.1.4	Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Laut di 10 Titik Pantau	dokumen	1	1
4.2	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**			
4.2.1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Indikator SIPD)	dokumen	2	2
4.2.2	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	dokumen	1	1
4.2.3	IKPLHD	dokumen	1	1
4.3	**Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi**			
4.3.1	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Indikator SIPD)	dokumen	2	2
4.3.2	Pelayanan Jasa Pengujian	Parameter Uji	17800	17800
4.3.3	Updating dokumen akreditasi laboratorium	dokumen	4	4
4.3.4	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	Unit	21	21
4.3.5	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	unit	70	70
4.4	**Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**			
4.4.1	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Indikator SIPD)	titik	50	50
4.4.2	Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Pengelolaan Sampah	kab/ kota	5	5
4.4.3	Pemetaan Penanganan Sungai Tercemar	dokumen	1	1
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			
5.1	**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
5.1.1	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Indikator SIPD)	dokumen	1	1
5.1.2	Koordinasi Pengelolaan Limbah B3	kab/ kota	5	5
5.1.3	Terlaksananya Fasilitasi Dokumen Pertek Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	%	100	100
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			
6.1	**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**			
6.1.1	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Indikator SIPD)	dokumen	1	1
6.1.2	Terlaksananya Penilaian / Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	bulan	12	12
6.2	**Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**			
6.2.1	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Indikator SIPD)	badan usaha	140	140
6.2.2	Terawasinya usaha dan atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dan SLO diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	badan usaha	146	146
6.2.3	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaporan melalui SIMPEL	badan usaha	50	50
6.2.4	Terlaksananya pengawasan insidentil karena adanya pelanggaran LH dan pengaduan masyarakat	bulan	12	12
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			
7.1	**Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat**			
7.1.1	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Indikator SIPD)	lembaga	45	45
7.1.2	Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri	entitas	10	10
7.1.3	Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara terhadap Kabupaten/Kota	kab/ kota	5	5
7.1.4	Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan	badan usaha	30	30
7.1.5	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri	entitas	10	10
8	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
8.1	**Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**			
8.1.1	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Indikator SIPD)	entitas	30	30
8.1.2	Pembinaan dan Peningkaatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup (Bimtek Adiwiyata, Kalpataru, Proklim)	entitas	39	39
8.1.3	Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Proklim, Adipura)	entitas	30	30
8.1.4	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	kali	10	10
9	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			
9.1	**Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional**			
9.1.1	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (Indikator SIPD)	unit	10	10
9.1.2	Pemeliharaan Lereng dan Akses Jalan Zona Transisi	paket	1	1
9.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Lindi	paket	1	1
9.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Peralatan TPA	unit	6	6
9.1.5	Koordinasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah	bulan	12	12
9.1.6	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Pemantauan Lingkungan TPA	paket	1	1
9.1.7	Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Sekitar TPA	kali	2	2
9.1.8	Operasi dan Pemeliharaan Pipa Gas dan Rumah Blower	paket	1	1
9.1.9	Pemeliharaan Vegetasi	paket	1	1
9.1.10	Penataan Landfill Zona Transisi	paket	1	1
9.2	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**			
9.2.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Indikator SIPD)	unit	7	7
9.2.2	DED Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lindi	dokumen	1	1
9.2.3	Penyediaan APAR	paket	1	1
9.2.4	Pengadaan Pompa	unit	1	1

Sumber: DLHK DIY, 2025

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

(1) Kondisi Umum

Pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (adminduk capil) di DIY berfokus pada jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yaitu agar daerah semakin meningkatkan cakupan aktivasi IKD mengingat saat ini beberapa layanan admindukcapil sudah dapat diakses melalui aplikasi tersebut. Terlebih lagi IKD akan diproyeksikan menjadi aplikasi utama dalam berbagai layanan publik yang diselenggarakan secara digital. Jemput bola yang dimaksud dilaksanakan dengan menyasar pegawai yang bekerja pada OPD DIY, instansi vertikal, dan BUMD. Tidak hanya itu, pembukaan booth aktivasi IKD juga diselenggarakan pada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak agar dapat menjaring lebih banyak masyarakat yang belum mengaktivasi IKD. Event yang dimaksud di antaranya: Hari Jadi DIY, Hakordia, Jogja Pandu Peradaban Nusantara, Peringatan dan Hari Keistimewaan. Sejauh ini capaian aktivasi IKD di DIY pada tahun 2025 mencapai 14,57% atau sekitar 427.138 penduduk dari 2.931.648 penduduk di DIY yang telah melakukan perekaman biometrik. Tidak hanya itu, ditetapkan pula Surat Edaran Gubernur yang mengimbau lembaga/instansi di DIY agar dapat menggunakan IKD sebagai pengganti KTP-el fisik sebagai persyaratan pelayanan.

Pada bidang pencatatan sipil, dilaksanakan 3 kegiatan utama yaitu forum komunikasi Dinas Dukcapil se-DIY, pelayanan terpadu admindukcapil, serta penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pemberian insentif Kartu Identitas Anak (KIA). Forum komunikasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap triwulan sekali untuk membahas isu strategis yang muncul di lapangan dan perlu untuk dijadikan perhatian bersama. Pelaksanaan forum komunikasi diselenggarakan di lima kabupaten/kota secara bergiliran. Adapun pelayanan terpadu dilaksanakan sebanyak lima kali di Kabupaten Kulon

Progo dan Gunungkidul serta Kota Yogyakarta dengan menggandeng Dinas Dukcapil yang berada di lokasi sesuai dengan lokasi pelayanan terpadu. Pelayanan yang dibuka berupa perekaman biometric, aktivasi IKD serta perubahan data kependudukan. Kemudian dalam hal PKS KIA, pada tahun ini telah ditandatangani sebanyak 26 PKS dengan berbagai lembaga unit usaha yang bergerak di berbagai macam bidang di antaranya: kursus, kuliner, ritel, wisata, hiburan, dan lain-lain. Salah satu bentuk umpan balik yang akan diterima oleh lembaga yang telah bekerja sama berupa penyebarluasan informasi insentif baik melalui media cetak berupa leaflet yang didistribusikan ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota maupun media sosial Pemda DIY. Adapun capaian dokumen catatan sipil di DIY pada tahun 2025, yaitu: 99,59% untuk kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–18 tahun; 100% kepemilikan akta kematian untuk peristiwa kematian yang dilaporkan; 89,88% untuk penduduk berstatus Kawin Tercatat dari penduduk berstatus Kawin; dan 87,12% untuk kepemilikan akta perceraian dari penduduk berstatus Cerai.

Untuk penyajian data kependudukan dan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, per akhir Desember 2025 penyajian data kependudukan telah dilaksanakan dua kali, yakni di bulan Februari untuk data semester 2 tahun 2024 dan di bulan Juli untuk data semester 1 tahun 2025. Data yang dirilis yaitu jumlah penduduk berdasarkan di antaranya: jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan terakhir, agama, dan golongan pekerjaan. Data tersebut diunggah ke situs web instansi agar dapat diakses oleh masyarakat. Selain dapat mengakses secara publik, masyarakat atau lembaga/instansi juga dapat mengajukan permohonan jumlah data penduduk dengan kriteria tertentu. Untuk

data kependudukan semester 2 tahun 2025 akan dipublikasi pasca rilis Data Konsolidasi Bersih (DKB) oleh Ditjen Dukcapil pada akhir bulan Januari 2026. Pada aspek kerja sama pemanfaatan data kependudukan Pada Tahun 2025 terdapat dua perangkat daerah yang telah mengajukan kerja sama dan telah mendapatkan hak akses pemanfaatan, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dan Paniradya Kaistimewan. Terdapat tiga perangkat daerah yang mulai tertarik untuk melakukan kerja sama, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset verifikasi dan validasi pelayanan pajak kendaraan bermotor, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM untuk verifikasi dan validasi kepemilikan RTLH serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk verifikasi dan validasi anggota perpustakaan berbasis NIK. Sedangkan untuk jumlah perangkat daerah yang berpotensi untuk menggunakan pemanfaatan data kependudukan berjumlah 25 OPD. Dengan demikian capaian PKS pemanfaatan data kependudukan Pada Tahun 2025 sebesar 84% atau 21 OPD dari 25 OPD potensial.

Terkait dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah dikembangkan dua sistem informasi kependudukan, yaitu sistem informasi pendukung Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK dan situs web kependudukan. Sistem informasi pendukung SPMB digunakan untuk verifikasi dan validasi domisili dan kartu keluarga (KK) calon siswa sedangkan situs web kependudukan digunakan untuk penyajian data agregat kependudukan yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil setiap semester. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem informasi tersebut diselenggarakan pula bimbingan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

di bidang pendaftaran penduduk telah diselenggarakan fasilitasi perekaman biometrik serta penerbitan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk penyandang disabilitas yang berada di SLB baik negeri maupun swasta di lima kabupaten/kota. Penyandang disabilitas termasuk ke dalam penduduk rentan adminduk yang perlu diberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik melalui kepemilikan dokumen kependudukan. Pada tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 412 dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk dengan rincian: 57 KTP-el dan 355 KIA. Selain itu juga dilakukan penyusunan kebijakan terkait penduduk non-permanen di DIY untuk keperluan pelayanan pendaftaran pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh penduduk luar DIY serta pelayanan balik nama bagi penduduk luar DIY yang melakukan pembelian kendaraan bermotor. Hasil dari penyusunan kebijakan tersebut berupa Surat Edaran Gubernur Nomor B/400.12.4.4/4273/D19 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Nonpermanen. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan, yaitu: sosialisasi tertib adminduk yang dilaksanakan di kalurahan/kelurahan di lima kabupaten/kota di DIY dan rapat kerja pendaftaran penduduk yang mengundang Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dengan mengangkat berbagai macam topik atau isu mengenai pendaftaran penduduk.

Tabel 3.102. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 serta Capaian 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
1	Nilai Kinerja Administrasi Kependudukan Pemda DIY	Nilai	86,25	87,50	90,00	102,86	N/A	88,50	101,69
Indikator Kinerja Sasaran									
1.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	96,89	97,20	97,35	100,15	97,40	97,40	99,94
2.	Persentase kepemilikan dokumen status perkawinan	%	87,74	88,19	88,52	100,37	N/A	89,09	99,36

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber Data: DPMKKPS DIY

Nilai kinerja administrasi kependudukan merupakan hasil penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DIY pada Semester I Tahun 2025, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Indikator kinerja ini ditetapkan sebagai bentuk pengukuran dampak dari pembentukan kelembagaan baru urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemda DIY. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 800.1.4.4-3101 DUKCAPIL Tahun 2024, nilai kinerja administrasi kependudukan pada Semester I Tahun 2024 tercatat sebesar 86,25. Pada Semester I Tahun 2025, nilai tersebut mengalami peningkatan menjadi 90,00 sebagaimana tercantum dalam Kepmendagri Nomor 800.1.4.4-2651 DUKCAPIL Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di tingkat provinsi.

Dalam indikator kinerja sasaran, capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan dihitung berdasarkan empat komponen utama, yaitu persentase perekaman KTP-el, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), persentase kepemilikan akta

kelahiran anak usia 0–18 tahun, serta persentase penerbitan akta kematian berdasarkan peristiwa kematian yang dilaporkan. Keempat komponen tersebut dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya untuk memperoleh capaian indikator. Pada Semester I Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 97,40%, dengan rincian: 99,43% penduduk wajib KTP-el telah melakukan perekaman; 90,60% anak usia 0–16 tahun telah memiliki KIA; 99,59% anak usia 0–18 tahun telah memiliki akta kelahiran; serta 100% peristiwa kematian yang dilaporkan telah diterbitkan akta kematiannya.

Selain indikator tersebut, pada tahun berjalan juga ditetapkan indikator sasaran baru, yaitu persentase kepemilikan dokumen status perkawinan. Indikator ini terealisasi sebesar 88,52%, yang diperoleh dari rata-rata dua subindikator, yaitu persentase penduduk berstatus Kawin Tercatat dan dibuktikan dengan kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah sebesar 89,88%, serta persentase penduduk berstatus Cerai Hidup yang telah memiliki akta perceraian sebesar 87,17%. Penetapan indikator ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi kependudukan, khususnya dalam pencatatan status perkawinan penduduk.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Minat masyarakat untuk secara mandiri melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Dukcapil masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan implementasi IKD yang manfaat nyatanya belum dirasakan secara luas di berbagai lembaga pelayanan publik, sehingga masyarakat belum melihat urgensi untuk segera beralih dari dokumen fisik.

(b) Ketertarikan lembaga pemberi insentif KIA untuk menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) masih terbatas. Penawaran skema imbal balik yang dinilai kurang menguntungkan dari sisi bisnis menyebabkan sebagian mitra memilih untuk tidak melanjutkan atau memperpanjang kerja sama yang telah ada.

(c) Pasca penerapan basis data kependudukan secara terpusat, Dinas Dukcapil di daerah tidak lagi menyimpan data BNBA penduduk. Namun demikian, masih terdapat beberapa instansi yang mengajukan permohonan permintaan data BNBA, yang menunjukkan belum meratanya pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan data kependudukan terkini.

(d) Sertifikasi ISO masih menjadi salah satu kendala dalam pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan. Persyaratan sertifikasi tersebut membuat beberapa perangkat daerah belum bersedia mengajukan permohonan kerja sama pemanfaatan data. Selain itu, tahapan proses verifikasi di lingkungan Ditjen Dukcapil yang semakin panjang turut memperlambat proses persetujuan pemberian hak akses.

(e) Dalam rangka pelaksanaan audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil, masih banyak Dinas Dukcapil baik di tingkat provinsi DIY maupun kabupaten/kota yang belum dapat mengoptimalkan standar keamanan informasi. Kondisi ini terutama disebabkan keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat pendukung keamanan sistem.

b) Solusi

(a) Melaksanakan layanan aktivasi IKD secara proaktif melalui pendekatan jemput bola pada berbagai kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, seperti Hari Jadi Kalurahan, Hari Jadi DIY, dan kegiatan serupa lainnya serta melakukan jemput bola aktivasi IKD ke lembaga/instansi vertikal dan BUMD di DIY.

(b) Menyusun dan menerbitkan kebijakan berupa Surat Edaran Gubernur Nomor B/400.12.2.1/775/GUB tentang Optimalisasi Penggunaan IKD di DIY, sehingga instansi di lingkungan wilayah DIY dapat menjadikan IKD sebagai pengganti KTP-el fisik dengan legalitas yang setara.

(c) Menambah dan memperluas kanal publikasi bagi lembaga yang memberikan insentif KIA melalui berbagai media informasi yang dikelola oleh Pemda DIY, guna meningkatkan daya tarik dan eksposur bagi mitra kerja sama.

(d) Mengarahkan instansi yang membutuhkan data BNBA untuk mengajukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan secara resmi, sehingga memperoleh hak akses yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(e) Melakukan sosialisasi secara aktif kepada perangkat daerah mengenai manfaat sertifikasi ISO 27001, khususnya dalam upaya meningkatkan keamanan sistem informasi dan melindungi data kependudukan dari berbagai potensi kerentanan.

(f) Melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten/kota terkait hasil audit internal yang telah dilakukan

oleh pemerintah provinsi, agar isu keamanan informasi menjadi perhatian bersama dan dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan di lingkungan Dinas Dukcapil.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp278.401.300,00 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang digunakan untuk membiayai 4 program, 6 Kegiatan dan 8 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasikan sebesar Rp267.846.935,00 atau 96,21% dari pagu awal dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel 3.103. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
1.1	**Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi**			
1.1.1	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (DPA SIPD)	Dokumen	80	346
1.1.2	Dokumen Hasil Fasilitasi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP-El, Akta Kelahiran)	Dokumen	79	345
1.1.3	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen	Dokumen	1	1
1.2	**Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk**			
1.2.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD)	Laporan	1	1
1.2.2	Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1
1.3	**Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk**			
1.3.1	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD)	Laporan	1	1
1.3.2	Laporan Hasil Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1
2	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			
2.1	**Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota**			
2.1.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (DPA SIPD)	Laporan	4	11
2.1.2	Laporan Kegiatan Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1
2.1.3	Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif KIA	Laporan	3	11
2.2	**Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil**			
2.2.1	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (DPA SIPD)	Laporan	1	1
2.2.2	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1

No.	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
3	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			
3.1	**Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			
3.1.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (DPA SIPD)	Laporan	1	1
3.1.2	Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Perawatan Operasional SIAK	Laporan	1	1
3.2	**Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan**			
3.2.1	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (DPA SIPD)	Dokumen	2	3
3.2.2	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data	Laporan	1	1
3.2.3	Dokumen Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Acara Pemanfaatan Data Kependudukan)	Dokumen	1	2
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			
4.1	**Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain**			
4.1.1	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
4.1.2	Dokumen Buku Profil Kependudukan Tahun 2024	Dokumen	1	1

Sumber: DPMKKPS DIY, 2025

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Kondisi Umum

Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat, penerapan pola pembangunan yang partisipatif, penguatan nilai-nilai sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta peningkatan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada periode tahun 2025 diukur dengan 4 indikator kinerja yaitu Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/ kelurahan, Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Desa, Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa, dan Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Tabel 3.104. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penye-larasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Real-isasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai Indeks Desa	Nilai	0,85	0,86	0,86	100	N/A	0,88	97,72
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/ kelurahan	Lembaga	4	4	4	100	4	4	100
2	Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Desa	Nilai		133,4	133,4	100	100	-	133,4
3	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa	Satuan		70,6	70,6	100	100	-	70,6
4	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori		88,7	95,11	107,28708	88,75	90	105,67

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: DPMKKPS DIY, 2025

Indikator yang pertama adalah “Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan”. Indikator ini muncul sebagai wujud komitmen dalam penyelenggaraan upaya penguatan kelembagaan, penguatan potensi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat oleh Pemda DIY. Dari target 4 lembaga kemasyarakatan, pada tahun 2025 dapat terlaksana pembinaan terhadap seluruh lembaga kemasyarakatan yang ditargetkan, yaitu Tim Penggerak PKK; Posyandu; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan LPMD/K. Rincian pembinaan adalah sebagai berikut:

a) Fasilitasi terhadap TP PKK DIY serta DPD LPM melalui pemberian hibah dan pendampingan. Dampak nyata yang telah terwujud dari fasilitasi dan pendampingan tersebut yaitu semakin aktifnya TP PKK DIY dalam berkolaborasi bersama berbagai OPD Pemda DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta telah terselenggaranya Kegiatan LPM DIY.
b) Pembinaan terhadap posyandu melalui penguatan pokjanal posyandu. Dilaksanakan Pembentukan Tim Pembina Posyandu DIY sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Melaksanakan Sosialisasi Posyandu 6 SPM, Pendampingan Pelaksanaan Hari Buka Posyandu 6 SPM, Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional 2025, Rapat Kerja TP Pembina Posyandu DIY, dan Workshop Posyandu DIY.
c) Pembinaan Bumkal dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola BUMKal dengan pelatihan Penguatan Kelembagaan, Manajemen, Akuntabilitas dan Pengelolaan Usaha BUMKal. Terdapat 12 (dua belas) lokasi sasaran pembinaan BUMKal Pada Tahun 2025 dengan perincian 8 Bumkal di Kabupaten Gunungkidul dan 4 Bumkal di Kabupaten Kulon Progo.
d) Pembinaan LPMD/K dilaksanakan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di bidang fisik maupun non fisik. Kegiatan ini melibatkan unsur Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, TNI, dan masyarakat baik dari segi sumber daya maupun anggaran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini meliputi 20 lokasi yang tersebar di lima Kabupaten/Kota di DIY.

e) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Dilaksanakan Rapat Koordinasi/Konsolidasi P3PD. Hasil dari koordinasi tersebut adalah seluruh OPD di lingkungan Pemda DIY memberikan dukungan terhadap pelaksanaan P3PD di DIY. Untuk menjamin pelaksanaannya berjalan optimal, diperlukan sinergi yang kuat antar OPD di lingkungan Pemda DIY dan kabupaten/kota se-DIY, serta dengan RMC dan TAPM. Selain itu, kesamaan pemahaman antar anggota Sekretariat Bersama menjadi hal penting dalam menghadapi pelaksanaan P3PD ke depan. Pelaksanaan P3PD tahun 2024 juga memerlukan strategi yang matang agar menghasilkan keluaran kegiatan yang berkualitas, disertai pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, sinergi yang selaras antara komponen 1, 2, dan 3 pelaksana P3PD diperlukan agar seluruh kegiatan dapat berjalan optimal tanpa saling tumpang tindih.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Global Gotong Royong (G2R) dan Gerakan *Paseduluran Segoro Amarto* untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan dengan meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip kesetaraan – partisipasi – berkelanjutan - kemandirian dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan G2R *TetraPreneur* melaksanakan Rapat Koordinasi, Sosialisasi G2R, *Training of Trainer* (ToT) G2R, FGD Pemetaan Desain Produk Unggulan, FGD Prototype Produk Unggulan, Ekspose Produk Unggulan, FGD Jaringan Kualitas *Offline Online*, FGD Penjualan Mitra, FGD Persiapan Akses Global dan Evaluasi. Pembinaan

G2R *TetraPreneur* DIY Tahun 2025 dilakukan di Kalurahan sebagai berikut:

a) Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
b) Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Kulon Progo;
c) Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo;
d) Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;

Kegiatan *Segoro Amarto* merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kota Yogyakarta. Beberapa anggota keluarga dikumpulkan untuk bersama-sama merumuskan kegiatan yang akan dilakukan bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Setelah itu dilakukan pelatihan dan praktek yang langsung didampingi oleh para ahli yang berkompeten pada bidang yang telah disepakati oleh masyarakat. Adapun kegiatan *Segoro Amarto* telah dilaksanakan di:

a) Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo;
b) Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis;
c) Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman
d) Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton
e) Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman
f) Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Komitmen yang kurang dari pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengelolaan BUMKal sehingga menghambat kemajuan BUMKal.

Dalam kegiatan Pembinaan terhadap posyandu melalui penguatan pokjanal posyandu terdapat Perbedaan implementasi dalam Pelaksanaan Posyandu 6 SPM antar kabupaten/kota, belum tersedianya format pencatatan resmi dari Kementerian Dalam Negeri, keterbatasan anggaran untuk penyediaan seragam dan narasumber, kendala pemberian insentif akibat bertambahnya jumlah kader, serta perbedaan kebijakan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan terkait jumlah kader kesehatan.

b) Solusi

Mendorong pemerintah kalurahan dan masyarakat untuk saling bersinergi membangkitkan perekonomian di kalurahan dengan menghadirkan *best practise* dari BUMKal yang sudah maju dan memiliki potensi yang serupa dan konsultan BUMKal.

Kebijakan Posyandu mencakup pengaturan keterlibatan unsur masyarakat tanpa hak insentif, penetapan setiap Posyandu melalui SK Lurah dengan satu nomor per Posyandu, penyesuaian jumlah kader tiap bidang SPM sesuai kebijakan kabupaten/kota, penggunaan format pencatatan hari buka Posyandu yang disepakati di tingkat DIY, serta upaya penyediaan seragam melalui skema CSR dan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 secara keseluruhan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui program kegiatan dengan alokasi anggaran Rp18.759.617.589 Pengalokasian anggaran tersebut

dibagi dalam 4 program. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp18.128.552.471 (96,63%) dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.105. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
1.1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6
1.1.2	Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Dokumen	1	1
1.1.3	Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Dokumen	1	1
1.1.4	Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1	1
1.1.5	Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Perubahan	Dokumen	1	1
1.1.6	Perjanjian Kinerja tahun 2025	Dokumen	1	1
1.1.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	Dokumen	1	1
1.2	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**			
1.2.1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
1.2.2	RKA dan DPA SKPD Tahun 2026	Dokumen	1	1
1.2.3	RKA dan DPA Perubahan 2025	Dokumen	1	1
1.3	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			
1.3.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60	Orang	52	52
1.4	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**			
1.4.1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA_SIPD)	Dokumen	12	12
1.4.2	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 bulan	Dokumen	12	12
1.5	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**			
1.5.1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14
1.5.2	Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	12	12
1.5.3	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	1	1
1.5.4	Laporan Keuangan Tahunan	Laporan	1	1
1.6	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**			
1.6.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6
1.6.2	Rencana Kebutuhan Barang 2026	Dokumen	1	1
1.6.3	Rencana Kebutuhan Barang 2025 Perubahan	Dokumen	1	1
1.6.4	Laporan aset	Laporan	1	1
1.6.5	Laporan Persediaan	Laporan	1	1
1.6.6	Laporan SIRUP	Laporan	1	1
1.6.7	Laporan P3DN	Laporan	1	1
1.7	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			
1.7.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
1.7.2	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.8	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			
1.8.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9
1.9	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**			
1.9.1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4
1.10	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**			
1.10.1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2
1.11	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			
1.11.1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
1.11.2	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
1.12	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
1.12.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26	26
1.13	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			
1.13.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12
1.14	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**			
1.14.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
1.14.2	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
1.15	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			
1.15.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
1.15.2	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
1.16	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			
1.16.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
1.16.2	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
1.17	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**			
1.17.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8
1.17.2	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4	Unit	6	6
1.17.3	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Roda 2	Unit	2	2
1.18	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
1.18.1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15
1.19	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			
1.19.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
1.19.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
1.20	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			
1.20.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12
1.20.2	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (ac)	Unit	12	12
2	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			
2.1	**Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa**			
2.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1
2.1.2	Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Laporan	1	1
3	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**			
3.1	**Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
3.1.2	Dokumen Fasilitasi Segoro Amarto	Dokumen	1	1
3.2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja**			
3.2.1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	7	7
3.2.2	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1
3.2.3	Pembinaan BUMKAL	Dokumen	1	1
3.2.4	Penguatan Pokjanal Posyandu	Dokumen	1	1
3.2.5	Program penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1
3.2.6	Bantuan Kelembagaan DPD LPM	Dokumen	1	1
3.2.7	Bantuan Kelembagaan TP-PKK DIY	Dokumen	1	1
3.2.8	Bantuan Kelembagaan LPMK pada Lokasi TMMD	Dokumen	1	1
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**			
4.1	**Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan**			
4.1.1	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	Dokumen	13	13
4.1.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Dokumen	1	1
4.1.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan	Dokumen	1	1
4.1.4	Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Dokumen	1	1
4.1.5	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (Integrasi dengan Sistem Keuangan Desa)	Dokumen	1	1
4.1.6	Laporan Penguatan Peran Pemerintah Kalurahan / Kelurahan	Dokumen	1	1
4.1.7	Laporan Hasil pemutakhiran Indeks Desa	Dokumen	1	1
4.1.8	Laporan Hasil pemutakhiran Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1
4.1.9	Pembinaan dan Revitalisasi Rekayasa Sosial 4 lokasi	Dokumen	1	1
4.1.10	Perencanaan Pembangunan Gedung Layanan Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1
4.1.11	BKK Reformasi Kalurahan	Dokumen	1	1
4.1.12	BKK Kalurahan Karangkopek	Dokumen	1	1
4.1.13	Fasilitasi Layanan Reformasi Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat DPMKKPS DIY	Dokumen	1	1
4.1.14	Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan (aspek perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset dan SDM) pada 392 Kalurahan	Laporan	1	1

Sumber: DPMKKPS DIY, 2025

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

(1) Kondisi Umum

Pembangunan Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun kondisi di DIY memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk DIY semakin lambat dan semakin menua serta permasalahan keluarga kompleks. Pertumbuhan semakin lambat terlihat dengan besaran rata rata jumlah anak yang semakin menurun dari tahun ketahun. Penduduk DIY semakin menua terlihat dari Angka Harapan Hidup semakin naik dari tahun ke tahun. Permasalah keluarga semakin kompleks terlihat dari Angka Perceraian yang selalu naik dari tahun ke tahun.

Tujuan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah terwujudnya keluarga yang tangguh dan mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai satu sasaran utama yaitu Mempertahankan rata-rata usia kawin pertama ideal bagi perempuan dengan indikator “Jumlah Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan.

Tabel 3.106. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DP3AP2 DIY Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027
				Target*)	Reali-Sasi	Persen-tase (%)			
Indikator Kinerja Tujuan Terwujudnya keluarga yang tangguh dan mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera									
1	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	%	0,67	1,14	0,64	143,86	1,14	1,14	178,13
Indikator Kinerja Sasaran									

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027
				Target*)	Reali-Sasi	Persen-tase (%)			
1	Mempertahankan rata-rata usia kawin pertama ideal bagi perempuan	%	23,5	23	23,2	100,87	23	23	100,86

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: DPMKKPS DIY, 2025

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2025 sebesar 0,64 melebihi target sebesar 1,14 dan lebih rendah dari tahun 2024 sebesar 0,67. MUKP DIY pada tahun 2025 di angka 23,2 tahun di atas, angka ideal 21 tahun dan turun dari tahun 2024 di angka 23,5 tahun.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Makin enggannya keluarga untuk memiliki anak
(b) Angka perceraian semakin tinggi

b) Solusi

(a) Peningkatan KIE ketahanan keluarga
(b) Pendampingan dan pelatihan bagi calon pengantin melalui PUSPAGA

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 Program dan 4 kegiatan. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.107. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	Rata-rata jumlah anak per-keluarga		
		MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)		
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**	Persentase Masyarakat Yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK / Bangga Kencana (Advokasi dan Kie)	77%	77%
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi	1 forum	1 forum
2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyaraka	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen
2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provins	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	56,4%	56,4%
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun	3 paket	3 paket

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	4 daerah	4 daerah
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	3 kali	3 kali
2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	5 Organisasi
2.14.04	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,44%	0,44%
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	5 jenis	5 jenis
2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 daerah	1 daerah
2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana	1 dokumen	1 dokumen

Rekening	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Lainnya yang Dibutuhkan	Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan		
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	5 kelompok	5 kelompok
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	5 kelompok	5 kelompok

Sumber: sengguh.jogjaprov.go.id, 2025

i. Urusan Perhubungan

(1) Kondisi Umum

Dalam perspektif penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah mengoptimalkan fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan tata kelola perhubungan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui intervensi strategis pada pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan moda transportasi yang terintegrasi. Sektor perhubungan, sebagai instrumen konektivitas wilayah, memegang peranan vital dalam mengakselerasi arus distribusi komoditas dan mobilitas penduduk guna mereduksi disparitas antarwilayah (intra dan inter-regional). Efektivitas sistem ini bertumpu pada interoperabilitas layanan yang mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, keandalan, kenyamanan, responsif terhadap kebutuhan pengguna, serta senantiasa berorientasi pada prinsip-prinsip transpotasi dan mobilitas berkelanjutan.

Selaras dengan mandat Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD Tahun 2022–2027, penyelenggaraan Urusan Perhubungan diorientasikan sebagai instrumen pendukung pencapaian visi Pancamulia. Strategi sektoral diakomodasi melalui penguatan 4 pilar strategis, yakni Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, Pengembangan Budaya Inovasi, serta Akselerasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam kerangka tersebut, arah kebijakan Urusan Perhubungan difokuskan pada pencapaian target strategis berupa Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan, guna menjamin konektivitas yang inklusif dan efisien di seluruh wilayah DIY.

Tujuan strategis berupa Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY diukur melalui 2 indikator sasaran yakni Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum serta Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan.

Kedua indikator sasaran tersebut merupakan parameter kunci dalam mentransformasi mobilitas di DIY, yang diimplementasikan melalui peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum serta optimasi menajemen kebutuhan transportasi melalui penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang prima. Upaya sistemik tersebut juga disertai dengan penguatan penanganan daerah rawan kecelakaan guna meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Pengembangan kawasan ramah lingkungan, serta pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran yang memadai juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mencipkatakn ekosistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Adapun capaian Kinerja Urusan Perhubungan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2022–2027 serta Capaian 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penye-larasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY	%	47,71	60,24	60,99	101,24	76,61	76,61	79,61
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	%	48,36	59,19	59,45	100,45	76,54	76,54	77,67
2	Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	%	47,05	61,29	62,52	102,01	76,67	76,67	81,54

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Dishub DIY, 2025

Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja sasaran pertama yakni Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, telah mencapai 59,45% dari target yang dicanangkan sebesar 59,19% atau dengan persentase realisasi capaian sebesar 100,45%.

Pada capaian indikator kinerja sasaran kedua yakni Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan, telah mencapai 62,52% dari target yang dicanangkan sebesar 61,29% atau dengan persentase realisasi capaian sebesar 102,01%.

Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum pada tahun 2025 diperoleh dari hasil Rerata Intervensi Perwujudan Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dimana Rerata Intervensi

tersebut diperoleh dari rerata capaian 8 (delapan) indikator kinerja program sebagai berikut.

a) Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY.

   Dari target sebesar 61,27%, realisasi capaian sebesar 65,21%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Capaian SPM Trans Jogja ditambah Persentase Trayek AKDP yang Terlayani ditambah Persentase Ketersediaan Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek yang Berizin ditambah Persentase Pengendalian Operasional Angkutan Umum.

b) Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi.

   Dari target sebesar 44,24%, realisasi capaian sebesar 41,93%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Jumlah Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dibagi Jumlah Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan ditambah Persentase Mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan. Pada tahun 2025 realisasi penyediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagai berikut:

   (a) Realisasi penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Tenaga Listrik sebesar 31,19%
   (b) Realisasi penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Tenaga Surya sebesar 10,25%
   (c) Realisasi penyediaan *Warning Light* sebesar 33,51%
   (d) Realisasi penyediaan Rambu Lalu Lintas sebesar 76,87%
   (e) Realisasi penyediaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebesar 61,49%

(f) Realisasi penyediaan Cermin Tikungan sebesar 59,32%
(g) Realisasi penyediaan *Guardrail* sebesar 29,61%
(h) Realisasi penyediaan *Deliniator* sebesar 47,44%
(i) Realisasi Persentase mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan sebesar 27,67%. Realisasi tersebut berupa penyediaan suku cadang fasilitas keselamatan jalan, penyediaan petugas teknisi serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan.

c) Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS (*Intelligent Transportation System*).

Dari target sebesar 46,77%, realisasi capaian sebesar 46,55%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Tahapan Penerapan Teknologi Berbasis ITS (*Intelligent Transportation System*) Tiap Tahun. Pada tahun 2025 realisasi tahapan Penerapan Teknologi Berbasis ITS sebagai berikut:

(a) Tahapan capaian perwujudan ATMS (*Advanced Traffic Management Systems*) sebesar 0,00% dari target yang dicanangkan yakni 0,22%;
(b) Tahapan capaian perwujudan PTIS (*Public Transport Information System*) sebesar 0,03% telah tercapai sesuai target yang dicanangkan yakni 0,03%;
(c) Tahapan capaian perwujudan APMS (*Advance Parking Management System*) sebesar 0,75% telah tercapai sesuai target yang dicanangkan yakni 0,75%;

(d) Tahapan capaian perwujudan EMS (*Emergency Management System*) sebesar 0,60% telah tercapai sesuai target yang dicanangkan yakni 0,60%;
(e) Tahapan capaian Pemeliharaan ATCS (*Area Traffic Control System*) sebesar 0,78% dari target yang dicanangkan sebesar 0,78%;
(f) Tahapan capaian Pemeliharaan VMS (*Variable Message Signs*) sebesar 1,00% dari target yang dicanangkan sebesar 1,00%;
(g) Tahapan capaian Operasional Operator ATCS sebesar 7,00% dari target yang dicanangkan sebesar 7,00%;
(h) Capaian yang telah terealisasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 36,39%, capaian tersebut akan diakumulasikan dengan capaian pada akhir tahun 2025.

d) Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B, dari target sebesar 78,38%, realisasi capaian sebesar 78,38%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Pemenuhan SPM Terminal Jombor ditambah Persentase Pemenuhan SPM Terminal Wates. Pada tahun 2025 Pemenuhan SPM Terminal Jombor telah tercapai 83,78%, sedangkan Pemenuhan SPM Terminal Wates telah tercapai 72,97%.
e) Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP), dari target sebesar 82,46%, realisasi capaian sebesar 82,46%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Bandara Adisutjipto ditambah Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Beskalan ditambah Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat

Khusus Parkir (TKP) di TKP Ketandan. Pada tahun 2025 Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Bandara Adisutjipto sebesar 82,41%. Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Beskalan sebesar 89,47%. Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Ketandan sebesar 73,68%.

f) Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan, dari target sebesar 49,00%, realisasi capaian sebesar 49,00%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Tahapan Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan Tiap Tahun. Enam kawasan tersebut meliputi *Exit* dan *Ramp On-Off* Jalan Tol, Patuk - Terong – Dlingo, Mulo - Tepus – Kanigoro, Prambanan – Gading, Segmen Baron – Pulangsawal, Sentolo - Nanggulan – Tegalsari.

g) Persentase Ketertiban LLAJ, dari target sebesar 81,40%, realisasi capaian sebesar 82,10%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Peningkatan Ketertiban LLAJ di Jalan Provinsi dan Kawasan Tertentu.

h) Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan, dari target sebesar 30,00%, realisasi capaian sebesar 30,00%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase dari Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang Ditangani dibagi Total Daerah Rawan Kecelakaan (DRK). Terdapat 10 (sepuluh) Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang akan ditangani berdasarkan hasil Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi Tahun 2021) yang meliputi:

   (a) Jalan Yogyakarta – Barongan;
   (b) Jalan Bantul - Srandakan 1;
   (c) Jalan Bantul - Srandakan 2;

(d) Jalan Bantul - Srandakan 3;
(e) Jalan Yogyakarta - Bakulan 1;
(f) Jalan Palbapang – Samas;
(g) Jalan Bantul - Srandakan 4;
(h) Jalan Yogyakarta – Barongan;
(i) Jalan Yogyakarta – Kebonagung;
(j) Jalan Yogyakarta - Bakulan 2;

Pada tahun 2025 telah dilakukan intervensi penanganan pada 2 lokasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) dari target 10 (sepuluh) DRK yang akan ditangani. Penanganan DRK tersebut terletak di Jalan Bantul – Srandakan dan Jalan Palbapang – Samas. Penanganan DRK tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum lalu lintas serta kampanye keselamatan lalu lintas yang berlokasi di Jalan Bantul – Srandakan, serta penyediaan fasilitas keselamatan jalan berupa penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Pintas Bernuansa Budaya sebanyak 10 unit yang berlokasi di Jalan Palbapang – Samas.

Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan pada tahun 2025 diperoleh dari hasil Rerata Intervensi Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan. Rerata intervensi tersebut diperoleh dari rerata capaian 5 indikator kinerja program sebagai berikut:

a) Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis.

Dari target sebesar 41,00%, realisasi capaian sebesar 35,50%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan

Dalam Perwujudan Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis Tiap Tahun.

b) Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis.

Dari target sebesar 28,70%, realisasi capaian sebesar 28,70%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Intervensi Penyediaan Prasarana LLAJ Pada Kawasan Strategis Yang Ditentukan. Kawasan strategis tersebut merupakan 18 SRS (Satuan Ruang Strategis) Keistimewaan. Pada tahun 2025 telah dilakukan intervensi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada 16 (Satuan Ruang Strategis) Keistimewaan di DIY.

c) Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis.

Dari target sebesar 68,13%, realisasi capaian sebesar 80,73%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Tahapan Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis Tiap Tahun.

d) Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis.

Dari target sebesar 100%, realisasi capaian sebesar 100%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Pemenuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) di Tempat Khusus Parkir (TKP) Ketandan dan Tempat Khusus Parkir (TKP) Beskalan.

e) Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis.

Dari target sebesar 68,64%, realisasi capaian sebesar 67,69%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Peningkatan Ketertiban Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis. Kawasan Strategis tersebut tedapat pada Kawasan Sumbu Filosofi yang terbagi dalam 3 Segmen yang meliputi:

(a) Segmen 1 (Tugu - km 0);
(b) Segmen 2 (Njeron Beteng);
(c) Segmen 3 (Plengkung Gading-Panggung Krapyak);

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Kepadatan lalu lintas di pusat Kota Yogyakarta dan jalur wisata merupakan dampak dari tingginya aktivitas pergerakan masyarakat yang belum mampu terakomodasi secara optimal oleh sistem transportasi publik saat ini. Transportasi publik belum sepenuhnya menjadi pilihan utama akibat keterbatasan integrasi antar moda, ketidakpastian waktu tunggu, serta kemudahan sistem pembayaran yang belum optimal. Selain itu, berakhirnya operasional Teman Bus dengan skema *Buy The Service* (BTS) pada tahun 2025 menimbulkan potensi kekosongan layanan pada trayek eks Teman Bus;
(b) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas merepresentasikan belum optimalnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa

pengarusutamaan budaya keselamatan berlalu lintas belum terinternalisasi secara komprehensif dalam pola perilaku masyarakat sehari-hari;

(c) Masih ditemukannya ketidakpatuhan operator Trans Jogja terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku, berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan kontrak kerjasama yang telah disepakati;

(d) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pada simpul transportasi, khususnya Tempat Khusus Parkir (TKP) dan Terminal Tipe B belum sepenuhnya merealisasikan indikator yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian standar operasional layanan yang dipersyaratkan;

(e) Masifnya pertumbuhan populasi Becak Motor (Bentor) memberikan tekanan terhadap eksistensi becak kayuh di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Hal ini tercermin dari adanya pergeseran preferensi pengguna jasa yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan volume operasional moda transportasi tradisional;

(f) Keterbatasan mandat konstitusional dalam pemberian sanksi administratif secara langsung menjadi faktor determinan yang membatasi ruang gerak Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum lalu lintas. Akibatnya, efektivitas pengawasan masih bertumpu pada

pendekatan non-yustisial dan sosialisasi kepada pengguna jalan;

(g) Upaya pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan menghadapi kendala signifikan akibat adanya faktor eksternal berupa tindakan anarkis dan pencurian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut mengakibatkan inefisiensi anggaran akibat diperlukannya alokasi perbaikan untuk memulihkan fungsi fasilitas yang rusak atau hilang.

b) Solusi

(a) Pelayanan pada trayek eks Teman Bus ditindaklanjuti melalui pengoperasian angkutan perkotaan Trans Jogja untuk menjaga kesinambungan layanan. Berbagai inovasi terus dikembangkan, antara lain integrasi kartu pelajar, penataan ulang trayek angkutan umum, serta pembaruan sistem dan fitur baru Trans Jogja yakni *Jogja Travel Pass* (JTP) sebagai sarana integrasi pembelian tiket. Selain itu, telah dilaksanakan rerouting trayek Trans Jogja pada jalur eks Teman Bus, yaitu jalur 1A, 2A, dan 12, guna memastikan keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Dinas Perhubungan DIY juga melakukan sosialisasi penggunaan angkutan umum kepada masyarakat pada tahun 2025 serta menyusun dan menyebarluaskan konten media sosial yang berisi ajakan untuk menggunakan transportasi publik. Pemerintah Daerah selanjutnya mendorong kabupaten dan kota untuk menyediakan angkutan umum yang terintegrasi;

(b) Akselerasi program edukasi dan sosialisasi keselamatan transportasi yang difokuskan pada Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) menjadi instrumen strategis dalam menekan angka fatalitas di jalan raya. Upaya ini diarahkan untuk menumbuhkan budaya tertib lalu lintas secara masif guna menjamin keberlanjutan keamanan dan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan;

(c) Penyempurnaan sistem verifikasi klaim Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Trans Jogja dilakukan melalui proses validasi yang terukur untuk memastikan kesesuaian operasional dengan regulasi SPM yang ditetapkan. Pemberlakuan sanksi dan denda pelanggaran menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan performa operator sekaligus meningkatkan kualitas *value for money* dalam pengelolaan Subsidi BOK Angkutan Perkotaan Trans Jogja;

(d) Melakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas penunjang pada simpul transportasi Terminal Tipe B serta lokasi Tempat Khusus Parkir (TKP) diarahkan pada simplifikasi proses transaksi tiket dan peningkatan kualitas layanan Terminal dan Tempat Khusus Parkir (TKP). Strategi tersebut didukung dengan perluasan jangkauan sosialisasi berbasis media sosial guna mengonversi kebiasaan masyarakat agar beralih menggunakan Tempat Khusus Parkir (TKP) yang tersedia;

(e) Meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan infrastruktur pendukung transportasi ramah lingkungan, seperti becak kayuh bertenaga alternatif (listrik) dan bus listrik. Serta

melakukan evaluasi berkelanjutan secara mandiri terhadap operasional becak kayuh bertenaga alternatif terus dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan standar kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jasa. Sehingga secara bertahap minat pengguna jasa akan bergeser dari semula menggunakan becak motor (bentor) berpindah menjadi menggunakan becak kayuh bertenaga alternatif (Listrik);

(f) Penguatan sinergisitas antar-pemangku kepentingan guna mendukung pengembangan infrastruktur transportasi ramah lingkungan, khususnya pada operasional bus listrik dan becak kayuh bertenaga alternatif. Upaya ini juga didukung dengan evaluasi kinerja transportasi ramah lingkungan secara periodik dan mandiri guna menjamin standar keamanan serta kenyamanan. Selain itu perlu dibangun kerangka kerjasama multisektoral yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam memfasilitasi ekosistem infrastruktur transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik dan becak kayuh bertenaga alternatif. Sebagai contoh penguatan kerangka Kerjasama multisektoral, yakni pada tahun 2025 terdapat penambahan unit becak yang dihibahkan kepada masyarakat dengan total sebanyak 257unit becak. Penambahan unit becak yang dihibahkan tersebut bersumber dari PTKAI sebanyak 50 Unit, Universitas Ahmad Dahlan sebanyak 7 Unit serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI sebanyak 200 unit;

(g) Optimalisasi tata kelola lalu lintas di kawasan strategis ditempuh melalui penguatan

kolaborasi antar-lembaga dengan mengedepankan prinsip kerja sama integratif. Melalui jalinan komunikasi aktif bersama unsur Kepolisian, TNI, dan Satpol PP, dilakukan pengawasan wilayah secara komprehensif untuk memitigasi potensi gangguan keamanan dan pelanggaran ketertiban lalu lintas di titik-titik krusial;

(h) Melaksanakan sosialisasi secara masif dan komprehensif guna menumbuhkan kesadaran publik terhadap urgensi pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa fasilitas keselamatan jalan. Program edukasi ini diprioritaskan bagi masyarakat di kawasan rawan gangguan keamanan guna memitigasi risiko pencurian, pengrusakan, serta aksi vandalisme yang dapat menghambat fungsi teknis keselamatan transportasi.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Urusan Perhubungan dilaksanakan melalui 3 Program, 13 Kegiatan dan 43 Subkegiatan dengan alokasi anggaran1 sebesar Rp136.337.313.834,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp133.346.473.969,00 atau 97,81%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.109. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Umum dan Penataan Ruang		Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	%	41	35,5
			Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	%	28,7	28,7
			Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	%	68,13	80,73
			Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis	%	100	100
			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis	%	68,64	67,69
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			
			Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis	Orang	89	89
			Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis	Tahun	1	1
			Penyediaan dan Pengaturan Moda Transportasi Tradisional	Kegiatan	1	1
			Perwujudan Angkutan Umum Ramah Lingkungan	Kegiatan	1	1
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu			
			Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya	Unit	25	25
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh			
			Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya	Unit	15	15
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo			
			Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya	Unit	10	10
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru			
			Belanja Sewa Tanah Parkir	Bulan	4	4
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi			
			Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya	Unit	10	10
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis			
			Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya	Unit	10	10
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret			

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya	Unit	10	10
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman			
			Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya	Unit	15	15
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo			
			Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya	Unit	5	5
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Dinas Perhubungan**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**			
			Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY	%	61,27	65,21
			Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi	%	44,24	41,93
			Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS	%	46,77	46,55
			Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B	%	78,38	78,38
			Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	%	82,46	82,46
			Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	%	49	49
			Persentase Ketertiban LLAJ	%	81,4	82,10
			Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	%	30	30
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			
			Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di DIY	Dokumen	1	1
			Kampanye Keselamatan LLAJ	Kali	14	14
			Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kali	7	7
			Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum	Kali	14	14
			Sosialisasi Pengamanan Aset Perlengkapan Jalan	Kali	9	9
			Sosialisasi Pemanfaatan Terminal dan Tempat Khusus Parkir	Kali	10	10
			Jasa Tenaga Ahli Pengelolaan Media Sosial	Bulan	11	11
			Podcast Hari Perhubungan Nasional	Kali	1	1
			Podcast Persiapan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kali	2	2

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Podcast Pengembangan Angkutan Wisata	Kali	1	1
			Podcast Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kali	1	1
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			
			Jasa Kebersihan Halte TransJogja	Bulan	12	12
			Pemeliharaan Halte TransJogja	Halte	113	113
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
			Suku Cadang APJ Listrik	Paket	1	1
			Suku Cadang APJ Tenaga Surya	Paket	1	1
			Suku Cadang Rambu Bersuar Warning Light dan Pelican Crossing	Paket	1	1
			Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Bulan	12	12
			Konversi APJ Tenaga Surya ke Tenaga Listrik	Unit	9	9
			Pengadaan Suku Cadang Rambu Tidak Bersuar	Paket	1	1
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
			Pemeliharaan APILL dan ATCS	Bulan	12	12
			Ketersediaan Operator ATCS	Bulan	12	12
			Pengadaan Water Barier	Unit	50	50
			Sewa Lahan Untuk Menara Radiolink ATCS	Lokasi	1	1
			Penyediaan Software Video Analisis Counting Kendaraan	Paket	1	1
			Pengadaan dan Pemasangan Rambu Bus Stop Trans Jogja	Unit	13	13
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
			Pemantauan Penyelenggaraan Hari Hari Besar	Kali	28	28
			Penegakan Hukum Lalu Lintas	Kali	10	10
			Penegakan Hukum Angkutan Jalan	Kali	40	40
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			
			Forum lalu lintas	Bulan	12	12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			
			Layanan Persetujuan Teknis analisis dampak Lalu lintas lintas	Bulan	12	12
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Subsidi Operasional Trans Jogja	Bulan	12	12
			Appraisal Bus Trans Jogja Tahun 2025	Dokumen	1	1
			Penghitungan BOK Trans Jogja Tahun 2026	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Evaluasi Kinerja Pelayanan Trans Jogja	Dokumen	1	1
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			
			Pemantauan dan Pengawasan CCTV TransJogja	Bulan	12	12
			Olah Data Penumpang TransJogja	Bulan	12	12
			Suku Cadang CCTV TransJogja	Paket	1	1
			Quota Data	Bulan	12	12
			Fasilitasi Perizinan Angkutan	Dokumen	1	1
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
			Talk Show Angkutan Umum	Kali	1	1
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			
			Pembuatan Naskah Akademik dan Draft Raperda RIT	Dokumen	1	1
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			
			Talk Show / Dialog Tentang Pengembangan Angkutan Wisata	Kali	1	1
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
			Tersedianya Jasa pemeliharaan sarana dan prasana (Pemeliharaan Jaringan listrik, cctv, dan Gate Access)	Paket	1	1
			Terlaksananya Belanja pemeliharaan jalan	Paket	1	1
			Terlaksananya Penyediaan Access Card	Buah	539	539
			Terlaksananya Penyediaan Kertas Thermal	Kali	830	830
			Terlaksananya Jasa audit uji emisi	Kali	2	2
			Tersedianya Jasa Pengeolaan Sampah	Tahun	1	1
			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
			Tersedianya Prasarana Penunjang Pemenuhan SPM di Terminal Tipe B	Paket	1	1
			Tersedianya Prasarana Penunjang Pemenuhan SPM di TKP dan Park And Ride	Paket	1	1
3	**Urusan Penunjang Pemerintah Daerah**	**Dinas Perhubungan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	94,49	92,12

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Penyusunan ROPK Fisik dan Keuangan	Dokumen	1	1
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	Dokumen	1	1
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan	Dokumen	1	1
			Penyusunan Dokumen Renstra	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025	Dokumen	1	1
			Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026	Dokumen	1	1
			Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025	Dokumen	1	1
			Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Dokumen	1	1
			Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD urusan Perhubungan Tahun 2024	Dokumen	1	1
			Tersusunnya LKJIP Tahun 2024	Dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Pengelola Administrasi Keuangan	Bulan	12	12
			Pengelola BMD	Bulan	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Dokumen	1	1
			Laporan Keuangan Audited	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen	12	12
			Laporan Keuangan Triwulan	Dokumen	4	4
			Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Laporan aset dan laporan persediaan triwulanan	Dokumen	4	4

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan aset dan laporan persediaan semesteran	Dokumen	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	7	7
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Tersedianya ATK	Jenis	10	10
			Tersedianya bahan kertas dan cover	Jenis	2	2
			Tersedianya bahan komputer	Jenis	2	2
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	4	4
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Tersedianya Barang Cetakan	Jenis	9	9
			Tersedianya barang penggandaan	Jenis	1	1
			Tersedianya kertas dan cover	Jenis	4	4
			Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	4	4
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Rapat Koordinasi	OS	4320	4320
			Konsultasi	OP	163	163
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Terlaksananya pengadaan pompa air	Unit	1	1
			Pengadaan Mobil Crane (Skylift)	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Tersedianya materai	Buah	500	500
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Terlaksananya pembayaran Telpon kantor	Bulan	12	12
			Terlaksananya Pembayaran Listrik kantor	Bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Terlaksananya kebersihan kantor	Bulan	12	12
			Tersedianya Jasa Keamanan kantor/tempat kerja	Bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Terpeliharanya Kendaraan Roda 4	Unit	16	16
			Terpeliharanya Kendaraan Roda 2	Unit	10	10
			Penyediaan BBM Genset	Tahun	1	1
			Pemelihaaraan Crane Hidrolis	Unit	1	1
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	Jenis	3	3
			Terpeliharanya Genset	Unit	1	1
			Terpeliharanya reapeater	Unit	1	1
			Pemeliharaan Alat Uji Emisi	Unit	1	1
			Pemeliharaan timbangan portable	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jasa Pemeliharaan Kantor Induk	Bulan	12	12
			Jasa Pemeliharaan Taman	Bulan	12	12
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis	5	5
			Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY	%	61,27	65,21
			Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi	%	44,24	41,93
			Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS	%	46,77	46,55
			Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B	%	78,38	78,38
			Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	%	82,46	82,46
			Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	%	49	49
			Persentase Ketertiban LLAJ	%	81,4	82,10
			Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	%	30	30
			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
			Tersedianya Prasarana Penunjang SPM di Terminal Tipe B	Paket	1	1
			Tersedianya Prasarana Penunjang Pemenuhan SPM di TKP dan Park and Ride	Paket	1	1
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
			Tersedianya Penunjang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Pemenuhan Kebutuhan Access Card)	Buah	430	430

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersedianya Alat/Bahan Kegiatan Kantor (Pemenuhan Kertas Thermal)	Roll	544	544
			Terselenggaranya Audit Uji Emisi	Kali	2	2
			Terlaksananya Jasa Pengelolaan Sampah	Bulan	12	12
			Tersedianya Penunjang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Pemeliharaan Jalan)	Paket	1	1
			Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Terminal, Park and Ride, dan Tempat Khusus Parkir	Paket	2	2
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Tersedianya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Bulan	12	12
			Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Bulan	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Tersusunya Laporan Keuangan tahunan	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Tersusunnya laporan keuangan bulanan	Laporan	12	12
			Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Laporan	2	2
			Tersusunnya laporan Keuangan Triwulanan	Laporan	4	4
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Tersusunnya Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan	Laporan	1	1
			Tersusunnya Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	Laporan	4	4
			Tersusunnya Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semester	Laporan	2	2
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	11	11
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Jenis	26	26

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersedianya bahan/material/peralatan/ perlengkapan	Jenis	7	7
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	10	10
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Tersedianya barang cetak	Jenis	15	15
			Tersedianya barang penggandaan	Jenis	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Tersedianya hidangan rapat	Orang / Kali	840	840
			Tersusunnya Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	OP	14	14
			Tersusunnya Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah	OP	8	8
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Buah	500	500
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Tersedianya Jasa Komunikasi	Bulan	12	12
			Tersedianya Jasa Sumber Daya Air	Bulan	12	12
			Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik	Bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Tersedianya Peralatan kantor	Jenis	2	2
			Tersedianya Perlengkapan kantor	Buah	4	4
			Terlaksananya Pemeliharaan LAN	Paket	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Tersedianya Jasa Keamanan	Bulan	12	12
			Tersedianya Jasa Kebersihan	Bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua (Pemenuhan Bahan Bakar Minyak)	Jenis	1	1
			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat (Pemenuhan Bahan Bakar Minyak)	Jenis	2	2
			Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	6	6
			Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Unit	3	3

No	Urusan Pemerintah	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			dinas/operasional kendaraan roda 4			
			Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional roda 2	Unit	3	3
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Terlaksananya Pemeliharaan Electric Generating Set	Jenis	2	2
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jenis	5	5
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Terlaksananya pembayaran Sewa Lahan Jombor	Tahun	1	1
			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Bangunan Kerja	Tahun	1	1

Sumber: Dishub DIY, 2024

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

(1) Kondisi Umum

Pada masa transparansi informasi saat ini, publik memiliki hak penuh untuk mengakses semua aktivitas lembaga pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) menyajikan data rutin mengenai program kerja, capaian kinerja, serta laporan anggaran. Khususnya di DIY, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 menugaskan PPID Utama Pemda DIY untuk menyebarkan informasi tersebut secara periodik melalui platform digital demi jangkauan yang lebih luas.

Pemda DIY memaksimalkan ekosistem digital melalui akun media sosial seperti WhatsApp, Instagram (@kominfodiy), X/Twitter (@kominfodiy), YouTube (Kominfo DIY), serta Facebook (Kominfo DIY), ditambah situs ppid.jogjaprov.go.id dan jogjaprov.go.id. Platform mobile "Jogja Istimewa" pun menawarkan konten komprehensif seputar wisata, budaya, layanan

masyarakat, makanan khas, mobilitas, dan agenda kegiatan, lengkap dengan pembelian tiket digital Museum Sonobudoyo plus monitoring live CCTV wisata di mam.jogjaprov.go.id. Untuk kelompok masyarakat dengan akses teknologi terbatas, strategi seni tradisional dimanfaatkan sebagai media komunikasi, disuplementasi oleh situs resmi yang menjadi pusat utama berita dan layanan publik terkini.

Keberhasilan strategi ini dibuktikan lewat evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Melalui Keputusan KIP RI Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025, PPID Pemda DIY berhasil memperoleh kembali status "Informatif" dengan nilai 96,47, mencerminkan praktik pengelolaan data publik yang superior sesuai standar UU No. 14/2008. Berdasarkan Keputusan Ketua KID DIY Nomor: 002/XI/KIDDIY-KEP/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bdan Publik di DIY Tahun 2025, jumlah OPD DIY yang masuk pada kategori informatif sebanyak 17 OPD dari 38 OPD.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemda DIY merupakan wujud nyata transformasi digital yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui visi Harmonisasi Manusia dan Teknologi. Sebagai salah satu pilar utama dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, implementasi SPBE di DIY telah berkembang dari sekadar penyediaan aplikasi menjadi sebuah ekosistem digital yang matang. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks SPBE sebesar 4,97 pada tahun 2025 berdasarkan hasil

asesmen mandiri. hasil ini mencerminkan komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dalam mengadopsi kerangka Pancamulia, yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya luhur Yogyakarta dengan inovasi teknologi informasi untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.

Secara struktural, keberhasilan implementasi SPBE di DIY ditopang oleh pengelolaan empat domain utama, yaitu Kebijakan Internal, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE, yang dijabarkan ke dalam 47 indikator penilaian sesuai dengan regulasi nasional. Pada domain Kebijakan Internal dan Tata Kelola, Pemda DIY telah menetapkan landasan hukum yang komprehensif melalui Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur arsitektur serta peta rencana SPBE secara berjenjang (*cascading*) agar selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Keterpaduan kebijakan ini memastikan seluruh inovasi teknologi, mulai dari pengembangan sistem informasi hingga pengelolaan situs web resmi, mampu mendukung proses bisnis yang terintegrasi secara horizontal antar perangkat daerah maupun secara vertikal dengan pemerintah pusat.

Fokus implementasi SPBE di DIY diarahkan pada optimalisasi 14 layanan utama yang mencakup administrasi pemerintahan dan layanan publik. Pada aspek-aspek strategis seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Penyelenggara SPBE, serta Layanan Publik, tingkat kematangan telah mencapai level 5 atau skala ideal. Infrastruktur pendukung, meliputi Pusat Data (*Data Center*), Jaringan Intra Pemerintah (JIP), dan Sistem Penghubung Layanan (SPL), dikelola dengan standar keamanan informasi yang ketat melalui pelaksanaan audit internal menggunakan perangkat dari

BRIN serta upaya pemenuhan sertifikasi ISO 27001. Selain itu, Pemda DIY secara berkelanjutan memperkuat kapasitas sumber daya manusia digital melalui program pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi masa depan, seperti Kecerdasan Buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *Blockchain*, sejalan dengan *Milestone* Visi Indonesia Digital 2045.

Meskipun masih menghadapi hambatan struktural terkait keterbatasan ketersediaan lembaga audit eksternal tersertifikasi di wilayah DIY yang berdampak pada nilai *domain* Manajemen SPBE, Pemda DIY tetap menunjukkan sikap proaktif melalui pelaksanaan evaluasi mandiri serta pemutakhiran standar operasional prosedur (SOP) secara sistematis untuk memitigasi risiko keamanan dan kegagalan sistem. Strategi peningkatan Indeks SPBE tahun 2025 juga mencakup penguatan sinkronisasi data melalui portal Jogja Dataku yang terintegrasi secara nasional, pemanfaatan aplikasi kearsipan SRIKANDI, serta integrasi layanan kepegawaian ASN Memayu dengan sistem SIASN BKN. Seluruh upaya tersebut bermuara pada peningkatan efisiensi birokrasi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

Dengan mengedepankan pendekatan *Data Driven Government*, setiap kebijakan pembangunan di DIY didorong untuk berbasis pada analisis data yang akurat guna memastikan ketepatan sasaran program. Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Tim Koordinasi SPBE, akademisi, dan praktisi, Pemda DIY optimis bahwa transformasi digital yang dijalankan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan posisi Indonesia dalam peringkat *Electronic Government Development Index* (EGDI), tetapi juga mewujudkan pemerintahan cerdas

(*Smart Government*) yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjaga kearifan lokal di tengah arus disrupsi teknologi global. Keselarasan antara rencana pembangunan jangka panjang dan adopsi teknologi inovatif ini pada akhirnya memposisikan DIY sebagai model provinsi cerdas yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan kesejahteraan sosial secara harmonis dan berkelanjutan.

Akselerasi transformasi digital Pemda DIY terus diupayakan melalui pengelolaan Pusat Layanan Transformasi Digital (PLTD) yang bekerja dalam lingkup mendukung perkembangan TIK baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2025 PLTD mengerjakan beberapa projek untuk mendukung kinerja OPD, yaitu pembangunan aplikasi JDIH, manunggal Raharja, aplikasi pendukung perkantoran Mandala Praja, pengelolaan Portal Layanan Publik *website* maupun *mobile*, migrasi *website* OPD, E-Lapor dan WBS, Jogja Digdaya, Peladen, serta Infrastruktur pendukung lainnya seperti Sistem Penghubung Layanan dan Pengolahan *Big Data* melalui Jogja Center dan IDMC. PLTD juga memberikan dukungan dalam bentuk layanan Konsultasi, *Troubleshooting* dan Pelatihan kepada OPD yang membutuhkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai akselerator pembangunan akan terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai lalu lintas data tersedia secara memadai. Melalui program Aksesibilitas Jaringan Internet untuk Kemanfaatan dan Keberdayaan Masyarakat Jogja (Aji Mandaya), Pemda DIY berupaya menyediakan akses internet bagi seluruh lapisan masyarakat guna memastikan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aspek sosial dan ekonomi. Pada tahun 2025, pembangunan

infrastruktur TIK di DIY menunjukkan kemajuan signifikan dengan terhubungnya 308 titik jaringan intranet pemerintah daerah yang mayoritas menggunakan koneksi fiber optik, serta penyediaan WiFi gratis di berbagai ruang publik seperti Malioboro, sentra industri dan UMKM, pasar, kampung wisata, hingga kawasan budaya. Upaya ini diharapkan dapat mendukung digital marketing UMKM, meningkatkan penjualan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Penyediaan jaringan wifi UMKM di 41 lokasi merupakan salah satu capaian strategis Dinas Kominfo DIY dalam memperluas akses teknologi informasi bagi pelaku usaha kecil di seluruh wilayah Yogyakarta. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari program "Aji Mandaya", yang memiliki visi utama untuk menyediakan akses internet bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya dirasakan oleh instansi pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya bagi pelaku UMKM

Perluasan jangkauan infrastruktur TIK juga menyasar wilayah-wilayah strategis, khususnya kawasan selatan DIY, melalui pembangunan jaringan di BRSBKL Purwomartani, Kalurahan Purwosari, UKBAT Sendangsari, hingga kawasan SAR Pantai Baron, Pantai Sepanjang, dan Pantai Drini. Pembangunan ini didukung oleh Dana Keistimewaan melalui penyediaan jaringan fiber optik dan VPN yang menjadi tulang punggung konektivitas antar-lembaga dan layanan publik. Selain itu, seluruh SMA/SMK Negeri di DIY telah terkoneksi dengan jaringan Pemda DIY untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga

pembangunan infrastruktur TIK tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi digital dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 3.110. Tabel Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi*			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY	Predikat	Baik	Baik	Baik	100%	Baik	4,5 – 4,97	100%
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Indeks Kematangan Manajemen SPBE (Asesmen Mandiri)	Indeks	4,82	1,97	4.82	245%	2,07	4,4 – 4,82	100%
2	Persentase Jumlah Badan Publik kategori Informatif	%	40,54	35,14	44.74	127%	51,35	51,35%	87,12%
3	Kategori RB Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	100%	A	A (99,5)	100%

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Diskominfo DIY, 2025

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Kolaborasi dan Komitmen Pemimpin. Kolaborasi antar pimpinan perangkat daerah masih perlu diperkuat untuk mewujudkan layanan internal pemerintahan dan layanan publik yang terpadu, saling bersinergi, dan berkelanjutan. Selain itu, penunjukan DIY

sebagai *Pilot Project* Nasional Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 557/2584 menuntut konsistensi tinggi dalam pengelolaan teknologi serta pengembangan layanan publik berbasis digital agar target nasional dapat tercapai.

(b) Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi. Proses transformasi digital dalam keterbukaan informasi publik masih menghadapi tantangan, terutama perlunya pendampingan yang berkelanjutan bagi seluruh PPID Pembantu agar penyediaan informasi publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008. di sisi lain, integrasi sistem informasi dan aplikasi antar OPD belum optimal sehingga data belum dapat diakses secara terpusat. Kondisi ini diperkuat oleh kebutuhan kolaborasi yang lebih erat antara OPD, akademisi, dan pegiat keterbukaan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

(c) Inovasi Layanan Informasi Publik. Inovasi layanan informasi publik berbasis digital belum sepenuhnya berjalan optimal karena kolaborasi antar OPD masih perlu ditingkatkan, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun keberlanjutan layanan. Selain itu, pemutakhiran informasi publik pada portal dan aplikasi layanan masih belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

(d) Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknologi. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana masih menjadi kendala dalam mendorong inovasi digital di lingkungan pemerintahan. di samping itu, pemerataan infrastruktur TIK belum sepenuhnya tercapai,

ditandai dengan masih adanya titik jaringan intranet pemerintah yang belum terhubung secara optimal.

(e) Perubahan Metode Pengukuran SPBE menjadi PEMDI. Perubahan metode penilaian dari SPBE menjadi PEMDI memerlukan persiapan yang lebih matang, mengingat adanya perubahan mekanisme penilaian serta peningkatan jumlah dan kompleksitas indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

b) Solusi

(a) Penguatan Kolaborasi dan Komitmen Pemimpin. Meningkatkan komitmen dan sinergi antar pimpinan perangkat daerah melalui penguatan peran pimpinan sebagai digital leader dalam mendorong integrasi layanan internal pemerintah dan layanan publik. Penetapan kebijakan lintas sektor serta forum koordinasi rutin perlu dioptimalkan guna memastikan keberlanjutan pengelolaan teknologi dan layanan publik, sejalan dengan penugasan DIY sebagai *Pilot Project* Nasional Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas.

(b) Percepatan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh PPID Pembantu untuk meningkatkan kualitas penyediaan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, perlu dilakukan penguatan integrasi sistem informasi dan aplikasi antar OPD melalui pengembangan data hub atau platform terpadu agar data dapat diakses secara terpusat, akurat, dan mudah

dimanfaatkan. Kolaborasi dengan akademisi dan pegiat keterbukaan informasi juga perlu diperluas untuk mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik.

(c) Penguatan Inovasi Layanan Informasi Publik. Mendorong kolaborasi antar OPD dalam pengembangan inovasi layanan informasi publik berbasis digital dengan menyusun peta jalan (roadmap) inovasi yang jelas, mencakup tahapan implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan layanan. Pemutakhiran konten informasi publik pada portal dan aplikasi layanan perlu dilakukan secara berkala dengan penetapan standar kualitas dan mekanisme monitoring yang terukur.

(d) Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemerataan Infrastruktur TIK. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan teknis di bidang TIK dan transformasi digital. di sisi infrastruktur, perlu dilakukan percepatan pemerataan jaringan TIK dengan prioritas pada titik-titik intranet pemerintah yang belum terhubung, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia untuk mendukung layanan pemerintahan dan publik secara berkelanjutan.

(e) Kesiapan Menghadapi Perubahan Pengukuran SPBE menjadi PEMDI. Menyusun langkah persiapan yang komprehensif dalam menghadapi perubahan penilaian dari SPBE menjadi PEMDI melalui pemetaan indikator, penyesuaian dokumen pendukung, serta penguatan koordinasi antar OPD. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perlu dilaksanakan secara intensif agar seluruh

perangkat daerah memahami mekanisme penilaian baru dan mampu memenuhi indikator yang ditetapkan secara optimal.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi Rp40.941.779.182,00. Anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp15.989.974.257,00 untuk membiayai Urusan Komunikasi dan Informatika dengan 3 program, 7 kegiatan dan 24 subkegiatan. Anggaran bersumber pada dana keistimewaan sebesar Rp24.172.399.025,00 untuk membiayai 1 program, 2 kegiatan dan 2 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp39.991.167.412,00 atau 97,68%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp950.611.770,00 atau 2,32% antara lain dari sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas dan efisiensi honor narasumber. Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika dapat direalisasikan sebanyak Rp15.140.113.305,00 atau 94,69%, dengan pencapaian fisik sebesar 100% sedangkan dari dana keistimewaan dapat direalisasikan sebanyak Rp24.079.526.377,00 atau 99,62% dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya target dan realisasi kinerja urusan komunikasi dan informatika beserta rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.111. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 serta Capaiannya

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Akhir Penyelaras-an	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Tar-Get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
	Indikator Kinerja Tujuan								
1	Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY (Asesmen Mandiri)	Predikat	Baik (3.17)	Baik (4.3 – 4.97)	4,97	156.78	Baik (3,27)	4.5 – 4,97	100
	Indikator Kinerja Sasaran								
1.	Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif	%	29.73	41	44.74	109,12	35.14	51,35	87.13
2.	Indeks Kematangan Manajemen SPBE (Assesmen Mandiri)	Indeks	1.92	4.2	4.82	114,76	1.97	4.4	109.55
3.	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	2	A(99.48)	100.42	100.94	A(95.0)	99.5	100.92

*Ket *) Target Penyelarasan Berita Acara Penyelarasan*
Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Tabel 3.112. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	2	3	5	6	7	8
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5
			Dokumen Perjanjian Kinerja	dokumen	2	2
			Dokumen Renja	dokumen	1	1
			Dokumen Renstra	dokumen	1	1
			Dokumen ROPK	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	4
			Dokumen DPA	dokumen	1	1
			Dokumen DPPA	dokumen	1	1
			Dokumen RKA	dokumen	1	1
			Dokumen RKA Perubahan	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	2	3	5	6	7	8
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3
			Laporan LPPD	laporan	1	1
			Laporan LKPJ	laporan	1	1
			Laporan LKjIP	laporan	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	76	76
			Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
			Gaji dan Tunjangan PPPK	bulan	12	12
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12
			Pengelola Keuangan	bulan	12	12
			Pengelola BMD	bulan	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	14	14
			Laporan Keuangan Bulanan	laporan	12	12
			Laporan Keuangan Semesteran	laporan	2	2
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	4
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12
			Penyelenggaraan Konsultasi SKPD	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Listrik	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12
			Jasa Tenaga Kebersihan	bulan	12	12
			Jasa Tenaga Keamanan	bulan	12	12
			Retribusi Sampah	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	16
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1
			DED Electrical Gedung Kantor	paket	1	1
			Pemeliharaan Kantor	bulan	12	12
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	%	70	70
			Pengawasan konten siaran (HIBAH KPID)	kegiatan	1	1
			Pembinaan Lembaga Penyiaran (HIBAH KPID)	kegiatan	1	1
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	2	3	5	6	7	8
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	laporan	1	1
			Penganugerahan Keterbukaan Informasi KID	kali	1	1
			Sosialisasi Basis Kalurahan/Kelurahan	kali	5	5
			Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	kali	4	4
			Sekolah Keterbukaan Informasi	kali	20	20
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	rekomendasi	1	1
			Bimtek Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	kali	1	1
			Rakor HUB Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	kali	2	2
			Sosialisasi Kanal Pengaduan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	kali	2	2
			Sosialisasi Kanal Pengaduan Pelayanan Publik kepada GESI	kali	1	1
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	1	1
			Pengelolaan Dokumentasi Hubungan Masyarakat	dokumen	1	1
			Bimtek Pengelolaan Website dan Medsos	kali	1	1
			Sosialisasi Implementasi PPID Sekolah	kali	15	15
			Raker Uji Konsekuensi dan Pleno Penetapan DIK	kali	1	1
			Forkom Persiapan Monev Keterbukaan Informasi	kali	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			
			Jumlah Laporan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	laporan	1	1
			Pendampingan Penilaian SPBE	kegiatan	1	1
			Monev Arsitektur SPBE	kegiatan	1	1
			Audit Aplikasi SPBE	paket	0	0
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	5	6	7	8
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	38	38
			Audit Infrastruktur SPBE	paket	1	1
			Pengelolaan Jaringan Pemda DIY	bulan	12	12
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	1	1
			Audit Keamanan SPBE	paket	0	0
			Pendampingan Implementasi dan Audit SMKI	paket	1	1
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	38	38
			Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi	bulan	12	12
			Pemeliharaan Data Center	bulan	12	12
			Pengelolaan Pusat Data	paket	2	2
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital			
			Langganan Bandwidth Internet Publik	bulan	12	12
			CCTV dan Peralatan Wifi Access Point terpelihara	alat	35	35
			Peralatan Studio Jogja Istimewa TV, Ruang Command Center IDMC dan Jogjacenter terpelihara	ruang	3	3
			Jaringan Intranet Pemda DIY berfungsi optimal	lokasi	308	308
			Konten paket tayangan Pemda DIY	konten	420	420
			Langganan Bandwidth dan Colocation Server DRC	bulan	12	12
			Pengembangan Kapasitas Data Center	unit	2	2
			Pengelolaan Jogja Smart Province	dokumen	1	1
			Pengelolaan SPBE	dokumen	1	1
			Pemeliharaan Portal Layanan Publik	aplikasi	1	1
			Pengelolaan Konten Media Sosial	bulan	12	12
			Pelatihan e-Business	kali	63	63
			Wifi untuk UMKM	paket	41	41
			Publikasi Seni dan Budaya Daerah			
			Jumpa Pers	kali	0	0
			Publikasi Media Cetak	jenis	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	5	6	7	8
			Publikasi media sosial	media	1	1
			Publikasi media elektronik	kali	1	1

Sumber:Dinas Kominfo DIY, 2025

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(1) Kondisi Umum

Pada tahun 2025, Pemda DIY mengakselerasi pembinaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing global dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Pengembangan dilakukan melalui penguatan enam aspek pembinaan di SiBakul: Sumber Daya Manusia, Produksi, Pemasaran, Kelembagaan, Keuangan, dan Digitalisasi**.** Fokus tahun ini diarahkan pada transformasi usaha yang lebih modern, tangguh, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Seluruh kebijakan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM ini tetap diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat guna menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di DIY. Perkembangan koperasi di DIY, baik koperasi yang berbadan hukum provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.113. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Koperasi Aktif	1.717	1.698	1.734	1.672	2.260
2	Koperasi Pasif	271	310	352	402	333
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	1.630.287	1.587.752	2.020.705	2.011.159	1.710.922,78
4	Modal Luar (Rp Juta)	2.372.549	3.132.602	3.363.762	4.078.110	3.122.001,46
5	Volume Usaha (Rp Juta)	4.272.359	4.404.185	4.867.928	5.585.240	4.118.772,77
6	Koperasi Primer	1.950	1.972	2.049	2.036	2.139
7	Koperasi Sekunder	28	36	37	38	35

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2025

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyebutkan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan RAT dua kali berturut-turut direncanakan akan dilakukan pembubaran. Koperasi yang tidak aktif adalah koperasi yang tidak melakukan RAT sebanyak 2 kali berturut-turut.

Dinamika kelembagaan koperasi di DIY menunjukkan tren yang signifikan. Jumlah Koperasi Aktif mengalami kenaikan drastis sebesar 35,17% pada tahun 2025, meningkat dari 1.672 unit di tahun 2024 menjadi 2.260 unit. Peningkatan tajam jumlah koperasi aktif pada tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh kebijakan strategis percepatan pembentukan KDKMP (Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. Terdapat penurunan jumlah Koperasi Pasif pada tahun 2025 menjadi 333 unit dari sebelumnya 402 unit di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan keberhasilan upaya reaktivasi dan pengawasan ketat. Koperasi Primer tetap menjadi tulang punggung dengan jumlah 2.139 unit pada tahun 2025, sementara Koperasi Sekunder cenderung stabil di angka 35 unit. Volume usaha mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp5.585.240 juta, namun mengalami penurunan menjadi Rp4.118.772,77 juta pada tahun 2025 dikarenakan beberapa dinamika pergeseran badan hukum koperasi semula badan hukum provinsi menjadi badan hukum nasional. Modal Luar tercatat menurun signifikan dari Rp4.078.110 juta (2024) menjadi Rp3.122.001,46 juta (2025). Demikian pula dengan Modal Sendiri yang terkoreksi menjadi Rp1.710.922,78 juta. Penurunan nilai finansial di tengah lonjakan jumlah koperasi aktif mengindikasikan bahwa koperasi-koperasi

baru yang terbentuk (seperti KDKMP) masih berada pada tahap inisiasi organisasi dan belum memberikan kontribusi volume usaha secara maksimal terhadap agregat provinsi. Fokus saat ini bergeser dari sekadar penambahan kuantitas menuju peningkatan kualitas melalui digitalisasi manajemen dan penguatan peran koperasi sebagai penyangga pangan daerah melalui skema KDKMP.

Tabel 3.114. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2021-2025

No	Skala Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Usaha Mikro	311.540	324.745	324.408	327.774	329.487
2	Usaha Kecil	16.064	16.069	16.069	16.076	16.126
3	Usaha Menengah	2.110	2.110	2.109	2.130	2.131
	Jumlah	**329.719**	**342.924**	**342.586**	**345.980**	**347.744**

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2025

Data pada sektor UMKM sangat dinamis karena komitmen pelaku usaha sering dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan data usaha yang dinamis masih menjadi tantangan pendataan UMKM. di tahun 2024 dan 2025 terdapat peningkatan jumlah UMKM didukung dengan berbagai program pembinaan dan pengembangan usaha yang difasilitasi oleh Dinas terkait. Penumbuhan Desa Preneur, inkubasi bisnis, fasilitasi sertifikasi produk, fasilitasi promosi dan pemasaran, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM maupun usaha berkontribusi pada peningkatan tersebut. Bahkan dari yang sebelumnya tidak memiliki usaha, bisa berkembang menumbuhkan usaha mikro baru karena terdapat fasilitasi pendampingan pasca inkubasi. Jumlah usaha menengah dan usaha kecil cenderung stabil dengan perubahan jumlah sangat sedikit, hal ini disebabkan oleh aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha.

Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyebutkan bahwa klasifikasi usaha kecil adalah yang nilai penjualan sebesar Rp2 miliar s.d. Rp15 miliar per tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa usaha kecil memiliki nilai penjualan Rp300 Juta sd Rp2,5 M per tahun, sehingga klasifikasi skala usaha mengalami penyesuaian termasuk dalam pendataan di Aplikasi *SiBakul* Jogja. Dalam konteks peningkatan kapasitas usaha di DIY pada tahun 2025, implementasi kebijakan strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak signifikan. UMKM lokal khususnya di sektor pengolahan makanan (kuliner), mendapatkan akses pasar yang pasti sebagai penyedia bahan baku maupun penyedia makanan jadi untuk program MBG. Keterlibatan dalam rantai pasok MBG mendorong usaha mikro untuk meningkatkan standar higienitas, sertifikasi P-IRT, sertifikasi halal, sertifikasi MD, dan manajemen kualitas lainnya guna memenuhi kriteria pengadaan pemerintah. Dana yang berputar melalui program ini di tingkat kalurahan memperkuat likuiditas UMKM, yang berkontribusi pada tren positif jumlah usaha aktif di wilayah DIY.

Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan pendataan UMKM sejak tahun 2020 mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY. Dalam peraturan tersebut terdapat 18 sektor usaha untuk pendataan UMKM. Saat ini Aplikasi SiBakul Jogja masih dalam proses integrasi penyesuaian data sesuai dengan pembaruan acuan pendataan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY yang mengubah klasifikasi data UMKM sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI) Tahun 2020. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Kinerja dan Sasaran strategis Urusan Koperasi dan UKM tahun 2025 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.115. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Target *)	Realisasi	Realisasi (%)			
Indikator Kinerja tujuan									
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha koperasi dan UMKM	Triliun Rupiah	18,88	18,913	19,102	100,51	18,491	20,470	103,30
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Jumlah koperasi modern	Koperasi	8	9	9	100	13	13	69,23
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)	UMKM	1.610	1.730	1.881	108,73	1.650	1.970	114
3	Jumlah Wirausaha Baru/ Pemula	Angka	6.118	8.365	8.372	100,08	12.865	12.865	65,08
4	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	Angka	275	130	134	103,08	130	130	103,08

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2025

Indikator pertama adalah jumlah koperasi modern dengan target capaian indikator 9 Koperasi. Capaian sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 9 Koperasi (100%). Capaian ini didukung oleh kesadaran koperasi dan kemampuan finansial untuk menerapkan aspek koperasi modern yang meliputi akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, serta restrukturisasi kelembagaan melalui amalgamasi. Salah satu yang sudah diterapkan yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pengembangan pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Adapun 9 koperasi modern berbadan hukum DIY yaitu Koperasi Konsumen Abdi Darma (Kokama) Panti Rapih, KSPPS BMT Bina Sejahtera, KSP CU Lestari Dharma Prima Kita, KSPPS BMT Brillian, Koperasi Jasa Syariah Bangun Rakyat Sejahtera, KSPPS Projo Artha Sejahtera, KSPPS Niten, KSP CU Bangun Sejahtera, dan KSPPS Agritama Mandiri.

Indikator kedua adalah jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n) dengan target capaian indikator semula 1.550 menjadi 1.730 UMKM namun ada penyelarasan di bulan Oktober 2025 mengingat capaian sudah melebihi target. Capaian sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 1.881 (108,73% dari target 2025) atau 104,85%. Capaian ini didukung oleh antusiasme dan partisipasi pelaku UKM yang pada tahun 2025 dalam mengikuti kegiatan pelatihan literasi keuangan, sosialisasi perpajakan, bimtek pengemasan, bimtek CPPOB, sosialisasi kemudahan berusaha, bimtek kemasan dan desain produk, bimtek P-IRT, bimtek fasilitasi sertifikasi halal, bimtek SNI bina UMK, fasilitasi promosi pemasaran melalui gelar produk di Pasar Kotagede Yogyakarta *International Airport* (PKG YIA), ekspose usaha mikro, pameran gebyar hari

UMKM, pameran INACRAFT, pameran produk halal SiBakul, serta fasilitas lainnya yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM DIY terhadap pelaku UMKM di DIY.

Indikator ketiga adalah jumlah wirausaha baru/pemula dengan target capaian indikator 8.365. Capaian sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 8.372 (100,08% dari target 2025) atau 65,07%. Capaian ini didukung oleh antusiasme wirausaha pemula dalam mengakses fasilitasi dan dukungan yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY serta kerja sama yang baik antar *stakeholder* untuk berkolaborasi dalam memberikan fasilitasi kepada wirausaha pemula. Dukungan fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY menjadikan wirausaha baru memiliki semangat dan optimisme dalam membuka maupun mengembangkan skala usaha dan diversifikasi produk.

Indikator keempat adalah Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi) di lokus kemiskinan dengan target capaian indikator 130. Capaian sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 130 (103,08% dari target 2025) atau 103,08%. Capaian ini didukung oleh fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan legalitas usaha dalam skema pembinaan Desa Preneur di wilayah kapanewon miskin dapat dilaksanakan dengan baik atas dukungan komitmen peserta pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Belum semua Koperasi melakukan transformasi digital terutama digitalisasi manajemen koperasi karena benturan biaya

tinggi dan sulitnya adaptasi digital SDM pengurus koperasi;

(b) Pengembangan Koperasi sektor riil masih terbatas karena kurangnya inovasi untuk menyelaraskan dengan kondisi pasar;

(c) Tingkat kesadaran anggota sebagai pemilik koperasi masih tergolong rendah menyebabkan tidak lancarnya pembayaran angsuran, yang berdampak pada penurunan rasio likuiditas;

(d) Belum semua Koperasi melakukan kaderisasi kepengurusan pada anggota koperasi sehingga regenerasi dan restrukturisasi pengurus koperasi belum dapat dilakukan secara optimal;

(e) Belum optimalnya penyerapan akses pembiayaan ke LKB/LKBB terhadap Koperasi;

(f) Banyak instansi maupun asosiasi memberikan fasilitasi pembinaan UMKM, namun pelaku usaha banyak yang tidak fokus dan berkomitmen dalam mengakses fasilitasi;

(g) Program inisiasi wirausaha baru sudah baik namun terkendala permodalan usaha karena masih banyak yang belum memenuhi aspek kelayakan usaha;

(h) Masih rendahnya komitmen dan integritas pelaku usaha kecil dalam mengelola usahanya;

(i) Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran dalam mengurus legalitas, standardisasi, maupun sertifikasi usaha;

(j) Belum semua pelaku bersedia beradaptasi, berubah, dan berinovasi untuk menyelaraskan dengan kondisi pasar;

(k) Perkembangan fitur pada masing-masing *platform marketplace* sangat cepat berubah yang membutuhkan kemampuan penguasaan teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatannya;

(l) Produk UMKM terkurasi dan terstandardisasi masih banyak yang belum terdistribusi di toko retail lokal.
(m) Belum optimalnya kesiapan kelembagaan dan infrastruktur Koperasi Desa Kalurahan Merah Putih (KDKMP) dalam menjalankan peran sebagai penyerap (off-taker) potensi komoditas desa secara massif;
(n) Adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan produk KUMKM untuk memenuhi kriteria penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

b) Solusi

(a) Mendorong perbaikan tata kelola melalui peningkatan kapasitas SDM Koperasi serta penerapan digitalisasi koperasi melalui pendampingan digitalisasi dimulai dengan perubahan sederhana;
(b) Budaya pengembangan inovasi pada pengembangan usaha koperasi;
(c) *Rebranding* koperasi pada anggota koperasi maupun masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan pengawasan;
(d) Pendidikan anggota, sosialisasi perkoperasian pada anggota, peningkatan pemahaman dan sejenisnya yang dapat menyadarkan anggota sebagai pemilik koperasi;
(e) Perbaikan tata kelola kelembagaan, usaha dan pencatatan serta pelaporan keuangan Koperasi
(f) Kolaborasi antar-instansi/lembaga baik dalam pembinaan maupun pendampingan Koperasi dan UMKM;

(g) Mengadakan sosialisasi kewirausahaan, inkubasi bisnis, pelatihan *business canvas,* pendampingan usaha baru, konsultasi usaha;
(h) Memperkuat skema pembinaan enam aspek yaitu sumber daya manusia, produksi, pemasaran, kelembagaan, keuangan, dan pemasaran *online* (digitalisasi) melalui program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM DIY;
(i) Memberikan fasilitasi pengurusan legalitas, standardisasi mutu, sertifikasi UMKM untuk memperluas pasar, seperti fasilitasi sertifikat halal, MD dan PIRT;
(j) Pengembangan aplikasi Jogja sebagai aplikasi tata kelola pembinaan UMKM melalui semua aspek pembinaan dan semua fasilitas yang diberikan pada koperasi dan UMKM;
(k) Pemerintah Daerah perlu terlibat dalam pengawasan pemanfaatan *platform marketplace* agar pelaku KUMKM tidak terjebak dalam kejahatan *cyber;*
(l) Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur batasan terkait bantuan pemasaran dan promosi produk UMKM di toko retail lokal
(m) Mengakselerasi pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Kalurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai sentra pengumpul produk pertanian dan potensi desa untuk meningkatkan daya tawar ekonomi kalurahan.
(n) Memposisikan KUMKM dan KDKMP sebagai mitra strategis (penyedia bahan baku lokal) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendampingan standar mutu pangan dan manajemen logistik yang terintegrasi.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Urusan Koperasi dan UKM dicapai melalui pelaksanaan 10 program, 19 kegiatan dan 38 subkegiatan, dengan alokasi anggaran Reguler Rp10.980,941.109,00, Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Rp385.392.000,00 dan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Rp36.714.985.963,00 total anggaran Rp48.081.319.072,00. Realisasi tahun 2025 Rp45.066.162.445,00 atau sebesar 93,73% dari total pagu, efisiensi sebesar Rp3.015.156.627,00 diantaranya adalah penyediaan gaji dan tunjangan disesuaikan kebutuhan (adanya mutasi keluar dan pensiun), sisa/efisiensi untuk tagihan listrik dan air di operasional Teras Malioboro, sisa lelang Pembangunan akses Teras Malioboro (Rumah Slamet), Efisiensi Belanja paket/pengiriman untuk kegiatan fasilitasi free ongkir dan berupa sisa/efisiensi pameran sebanyak 17 kali pameran (Pameran Produk Unggulan Desa Preneur dan Pameran di Destinasi Wisata). Adapun realisasi fisik telah mencapai 100%,

Tabel 3.116. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah	OPD	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN UMUM	DINAS KOPERASI DAN UKM DIY	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (DPA SIPD)	Dokumen	4	4
			Operasional Factory Sharing Susu	Bulan	8	8
			DED Pembangunan Gedung Pendukung Factory Sharing Susu	Dokumen	1	1
			Kajian Teknis Kawasan Pengelolaan Produk Susu	Paket	1	1
			Pengadaan Alat Penunjang *Factory Sharing* Susu	Paket	0	0
			Perlengkapan Perkantoran *Factory Sharing* Susu	Jenis	4	4
			Kajian teknis kelayakan peralatan RPB Susu	Dokumen	0	0
2			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintah	OPD	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Renja 2025	Dokumen	1	1
			Renja Perubahan 2024	Dokumen	1	1
			ROPK	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			DPA Tahun 2025	Dokumen	1	1
			DPPA Tahun 2024	Dokumen	1	1
			RKA Perubahan Tahun 2024	Dokumen	1	1
			RKA Tahun 2025	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Konsep/Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
			Laporan LKjIP	Dokumen	1	1
			Konsep/Bahan LPPD	Dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD)	Orang/Bulan	53	53
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD)	Laporan	13	13
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	Laporan	12	12
			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Laporan	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD)	Laporan	4	4
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

No	Urusan Pemerintah	OPD	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	2	2
			ATK untuk Kantor Induk	Paket	1	1
			ATK untuk Kantor UPT	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	2	2
			Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas	Paket	1	1
			Barang Cetakan dan Penggandaan UPT	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD)	Laporan	12	12
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD)	Unit	1	1
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD)	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD)	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD)	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD)	Unit	17	17
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD)	Unit	2	2

No	Urusan Pemerintah	OPD	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (DPA SIPD)	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	719	719
3			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			
			Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (DPA SIPD)	Unit Usaha	1	1
4			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			
			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (DPA SIPD)	Unit Usaha	3	3
5			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			
			Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (DPA SIPD)	Unit Usaha	35	35
6			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DPA SIPD)	Orang	216	250
			Rangkaian DIklat Sertifikasi Berbasis Digital - Sertifikasi Digital Marketing	Orang	50	50
			Rangkaian DIklat Sertifikasi Perkoperasian - Sertifikasi Manajer Usaha Simpan Pinjam Koperasi syariah	Orang	50	50
			Rangkaian DIklat Sertifikasi Perkoperasian - Sertifikasi Pengendalian Intern Koperasi Konvensional	Orang	50	50
			Rangkaian DIklat Sertifikasi Perkoperasian - Sertifikasi Pengurus Koperasi Konvensional	Orang	50	50
			Rangkaian DIklat Sertifikasi Perkoperasian - Sertifikasi Pengurus Koperasi Syariah	Orang	50	50
7			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha (DPA SIPD)	Unit Usaha	3	3

No	Urusan Pemerintah	OPD	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
8			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha (DPA SIPD)	Unit Usaha	5	5
			Bimtek Literasi Keuangan Bagi UMKM (Pencataatan, Pembayaran, Pembiayaaan)	Angkatan	4	4
			Konsultasi Bisnis	Kali	40	40
			Uji Kompetensi Sosial Media Marketing (SKKNI)	Orang	40	40
			Gelar Produk Wirausaha Lokal	Kegiatan	16	16
			Tenaga Pendamping PLUT	Tahun	1	1
			Pameran Produk Unggulan Daerah	Kali	16	16
			Podcast Pembinaan UMKM	Paket	8	8
			Publikasi Media Cetak Pengembangan Kewirausahaan	Kali	10	10
			Bimtek dan Sertifikasi Kewirausahaan (SKKNI)	Kali	1	1
			Sosialisasi Kewirausahaan	Kali	2	2
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (DPA SIPD)	Orang	3304	3304
			Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha bagi WUB	Kali	88	88
			Inkubasi	Paket	1	1
			Pelatihan Keterampilan Teknis Barista	Orang	50	50
			Pelatihan Keterampilan Teknis Cukur	Orang	50	50
			Pelatihan Keterampilan Teknis Jasa	Orang	50	50
			Pelatihan Keterampilan Teknis Menjahit	Orang	25	25
			Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan	Orang	50	50
			Pelatihan Keterampilan Teknis Pijat	Orang	50	50
			Pelatihan Manajerial	Orang	100	100
			Pelatihan Akses Pasar	Orang	75	75
			Pelatihan SKKNI Bagi Pendamping	Orang	25	25
			Pelatihan SKKNI UMK	Orang	150	150
			Honor Tenaga Pendamping UMKM	Bulan	12	12
			Penunjang Pendampingan DAK UMK	Bulan	12	12
9			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SertaDesain dan Teknologi (DPA SIPD)	Unit Usaha	25	280

No	Urusan Pemerintah	OPD	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Peningkatan Produktivitas UKM Ramah Lingkungan (Eco Friendly)	Angkatan	4	4
			Bimtek CPPOB	Angkatan	0	0
			Fasilitasi CPPOB dan Pendaftaran MD	Angkatan	4	4
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana PLUT	Paket	0	0
			Pameran Produk UKM Ramah Lingkungan (Eco Friendly) di Ambarukmo Plaza	Event	0	0
			Pameran Produk UKM Ramah Lingkungan (Eco Friendly) di Malioboro	Event	1	1
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM			
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (DPA SIPD)	Orang	360	360
			Penyuluhan Literasi Hukum	Orang	220	220
			Konsultasi Hukum	Orang	70	70
			Penyusunan Dokumen Hukum	Orang	70	70
			Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil			
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	30	30
10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi (DPA SIPD)	Objek	1	1
			Pengelolaan Layanan Bisnis UMKM	Bulan	12	12
			Layanan Usaha Terpadu	Bulan	12	12
			Promosi dan Pemasaran Teras Malioboro 1	Bulan	12	12
			Peningkatan Kapasitas Tenant	Kali	16	16
			Festival Teras Malioboro 1	Kali	1	1
			Peresmian Galeri UMKM	Kali	1	1
			Pengamanan dan Pemeliharaan Ex Hotel Mutiara 1	Bulan	12	12
			Kajian Sosiologis TM 2	Dokumen	1	1
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD)	Unit	14	14
			Pendukung Layanan Konsultasi Bisnis KUKM	Jenis	3	3
			Pembangunan Kawasan PKL Ketandan (Rumah Slamet dan Makmur Jaya)	Paket	1	1
			Pembangunan Konstruksi Perluasan Teras Malioboro 1	Paket	1	1
			Pengadaan Sarana Prasarana Eks Hotel Mutiara 1	Jenis	5	5
			Pendukung Operasional Galeri PKG YIA	Paket	1	1
			Pendukung Layanan Pembuatan Perizinan Usaha	Jenis	3	3
			Pengadaan Interior Eks Mutiara 1	Paket	1	1
			Pembangunan Kawasan PKL Ketandan (Ketandan Utama)	Paket	1	1
			Pengadaan tanah Perluasan Teras Malioboro 1	Lokasi	1	1
			Rehabilitasi II Eks Hotel Mutiara 1	Paket	1	1
			Pengadaan sarana prasarana Teras Malioboro 1	Jenis	6	6

No	Urusan Pemerintah	OPD	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyusunan AMDAL Perluasan Teras Malioboro 1	Dokumen	1	1
			Pengadaan Akses Lahan Teras Malioboro (Lahan Slamet)	Lokasi	1	1
			Review DED Perluasan TM 1	Dokumen	1	1
			Pengadaan Lahan Beskalan (Lahan Sri Widarsih)	Lokasi	1	1
			Appraisal Pengadaan Lahan Beskalan dan Ketandan	Dokumen	1	1
			Pengembangan Industri Kreatif			
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (DPA SIPD)	Unit	3450	3450
			Fasilitasi Promosi dan Pemasaran	UMKM	550	550
			Gebyar Hari UKM	Event	1	1
			Semarak SiBakul KUMKM	Event	1	1
			SiBakul Jelajah Benua	Lokasi	1	1
			SiBakul Jelajah Nusantara	Kali	2	2
			Buletin SiBakul	Eksemplar	500	500
			Sertifikasi Halal	UMKM	550	1100
			Bimtek dan Fasilitasi Sertifikasi PIRT	Kali	28	28
			Bursa Pembiayaan SiBakul	event	1	1
			Ekspose Produk Usaha Mikro	Kali	15	15
			Pasar Tiban	Lokasi	10	10
			Gebyar Koperasi Istimewa	Event	2	2
			Pameran Gerai Produk UMKM DIY	UMKM	80	80
			Sosialisasi Fasilitasi P-IRT bagi UMKM DIY	Kali	2	2
			Fasilitasi pengiriman Produk UMKM keluar Negeri	kg	600	600
			Publikasi Media Cetak	Kali	4	4
			Klinik Koperasi	Pengurus Koperasi	82	82
			Penguatan Produk Lokal Istimewa	Produk	60	60
			Sosialisasi Perkoperasian	Kali	5	5
			Pemeliharaan Aplikasi SiBakul	Aplikasi	1	1
			SiBakul Halal Fest	Event	1	1
			Bimtek CPPOB dan Fasilitasi MD	Angkatan	2	2
			Peningkatan Produktivitas UKM Ramah Lingkungan (Eco Friendly)	Kali	16	16
			Video Profil Layanan SiBakul dan Layanan Klinik Koperasi	Video	2	2
			Gelar Produk Wirausaha Kreatif	Kali	2	2
			Pengembangan Kewirausahaan Desa			
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa (DPA SIPD)	Laporan	32	32
			Pelatihan Kemasan dan Branding Produk untuk Produk Unggulan Agrobisnis	Kali	1	1
			Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Pengembangan)	Desa	17	17
			Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan)	Desa	19	19
			Fasilitasi Ongkos Kirim	Kali	75000	75111

No	Urusan Pemerintah	OPD	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Inkubasi Bisnis SAKA Wirausaha dan Wirausaha Pemula berbasis Tematik	orang	90	90
			Inkubator Bisnis	WUB	10	10
			Obrolan Program Pembiayaan untuk UKM Naik Kelas	kali	3	3
			Pameran Produk UMKM di Destinasi Wisata	Event	5	5
			Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign	UKM	25	25
			Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Maju)	Desa	10	10
			FORDASI	Event	1	1
			Sarasehan UMKM	Kali	76	76
			Pemberdayaan Lembaga Ekonomi KUMKM	Paket	1	1
			Gelar Pameran Wirausaha Baru	Kali	2	2
			Pameran Produk Unggulan Desa Preneur	Kali	1	1
			SiBakul Sport Fest 2024	Kali	1	1
			Sumbang Swara Radio Blusuk Kampung Jajah Desa Milang Kori	Paket	27	27
			Film Dokumenter (Video Promosi /Iklan Layanan Masyarakat)	Video	1	1
			Rembug Desa Usaha Gotong Royong	Paket	5	5
			Dokumen Masterplan Desa Mandiri Budaya	Dokumen	0	0
			BKK Kelurahan Mandiri Budaya	Kalurahan	8	8
			BKK Rintisan Kelurahan Mandiri Budaya	Kalurahan	8	8
			Wiji Unggul (Wirausaha Junior Unggulan)	UMKM	50	50
			Peningkatan Kapasitas UMKM di Kawasan Perkotaan Tahap Maju	Kalurahan	3	3
			Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya	Dokumen	0	0
			Festival wirausaha Premium (JCW dan RBPKS)	Kegiatan	2	2
			Pelatihan Socio Commerce	Event	1	1
			Pelatihan Kewirausahaan bagi Disabilitas	Event	3	3
			Festival Inovasi Wirausaha Pemuda Karang Taruna	Event	1	1
			Kajian NA Perda SiBakul	Dokumen	1	1
			Kajian Gastronomi	Dokumen	1	1
			Pelatihan Kurator UMKM	Orang	30	30
			Video Branding	Video	2	2
			Festival Produk Wirausaha Kreatif	Event	2	2

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2025

I. Urusan Penanaman Modal

(1) Kondisi Umum

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di DIY merupakan instrumen strategis guna memperkokoh struktur ekonomi wilayah melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan daerah, penanaman modal tidak sekadar dipandang sebagai aktivitas akumulasi modal finansial, melainkan sebagai penggerak kesejahteraan yang berkontribusi nyata pada peningkatan taraf hidup masyarakat serta upaya reduksi kemiskinan secara sistemik. Guna meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mewujudkan iklim investasi yang adaptif dan kompetitif, dengan tetap berpijak pada faktor-faktor fundamental seperti produktivitas tenaga kerja, penguatan infrastruktur, stabilitas kondisi sosial politik, serta kredibilitas institusi. Sebagai wujud tanggung jawab daerah, mengupayakan optimalisasi penggalian potensi daerah serta menyelaraskannya dengan ekspektasi para investor melalui kepastian regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna mewujudkan titik temu yang harmonis antara kepentingan investasi dengan visi pembangunan daerah.

Implementasi strategi tersebut tercermin pada capaian realisasi investasi tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif, dengan nilai mencapai Rp8,43 triliun, atau tumbuh sebesar 18,2% dari akumulasi tahun sebelumnya. Capaian ini didukung oleh komposisi permodalan yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp6,77 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,66 triliun. Secara struktural, realisasi investasi tahun 2025 ditopang oleh Investasi Genuine DIY sebesar 63% dengan kontribusi sektor unggulan pada bidang telekomunikasi, serta dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 37% melalui akselerasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen. Meskipun porsi PSN secara persentase lebih kecil dibandingkan investasi *genuine*, sinergi keduanya membuktikan

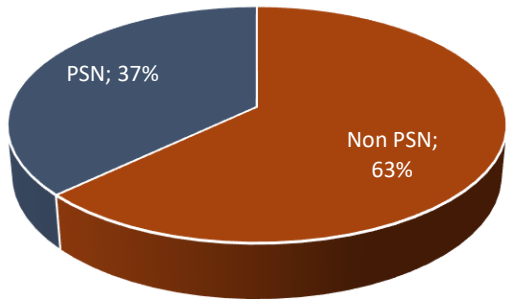
bahwa keberadaan proyek nasional dapat dioptimalkan sebagai stimulan bagi pertumbuhan wilayah. Kondisi ini merefleksikan upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga kemandirian ekonomi daerah sekaligus menangkap peluang strategis dari pembangunan infrastruktur nasional untuk sebesar-besarnya kemanfaatan publik.

Secara lebih rinci, perkembangan realisasi investasi di DIY periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.117. Perkembangan Investasi Kumulatif di DIY Tahun 2021-2025

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	*Growth* (Rp000)	*Investment Growth*
s.d 2021	22.692.647.593	9.803.584.510	32.496.232.103	3.078.892.969	10,46%
s.d 2022	24.967.647.193	11.437.953.245	36.405.600.439	3.909.367.815	12%
s.d 2023	29.983.131.093	12.118.877.347	42.102.008.440	5.696.408.001	16%
s.d 2024	33.613.380.215	12.650.518.313	46.263.898.528	4.161.890.088	10%
s.d 2025	40.384.043.536	14.317.571.345	54.701.614.881	8.437.716.353	18,2%

Sumber: DPMPTSP DIY, 2026



Gambar 3.45. Perbandingan Realisasi Investasi berdasar PSN dan Non PSN (Murni) di DIY tahun 2025

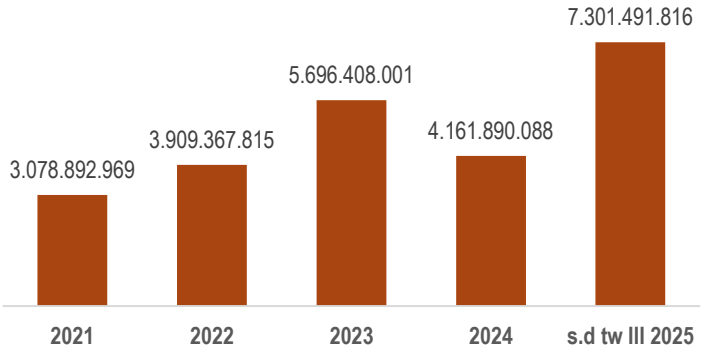
Sumber: DPMPTSP DIY, 2026

Selaras dengan capaian tersebut, aktivitas investasi di DIY tahun 2025 memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 22.691 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penyerapan tenaga kerja tersebut secara dominan berasal dari sektor Industri Tekstil sebesar 32,52%, sektor Jasa Lainnya sebesar 21,08%, serta sektor Perdagangan dan Reparasi sebesar 12,22%. Besarnya proporsi sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja ini menegaskan bahwa kebijakan investasi yang ditempuh senantiasa berorientasi pada pemberdayaan sumber daya lokal dan penguatan sektor padat karya sebagai katalisator utama dalam upaya menurunkan angka pengangguran di DIY.

Terlepas dari capaian realisasi investasi yang cukup tinggi, Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP DIY senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas kajian Peta Potensi Investasi dan dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO). Langkah ini merupakan upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi, khususnya pada sektor industri padat karya dan industri kecil di Kawasan Selatan guna mengikis ketimpangan antarwilayah. Pada tahun 2025, telah diterbitkan Peta Potensi Investasi yang memetakan sektor unggulan baru, yakni potensi perikanan tangkap berupa Ikan Pelagis Besar di Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari penguatan poros maritim, serta industri peternakan Kambing Perah di Kabupaten Sleman. Pengembangan potensi ini tentu memerlukan kerja kolaborasi dan dukungan infrastruktur yang mumpuni, agar ke depan sektor-sektor ini dapat berkembang secara optimal dalam meningkatkan struktur perekonomian daerah.

Tahun 2025 juga menjadi momentum positif bagi efektivitas dokumen IPRO, di mana investasi pada lokus Agrowisata Pantai Baron di Kabupaten Gunungkidul telah terealisasi dengan nilai sebesar Rp4,5 miliar. Kehadiran investasi ini diproyeksikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan per kapita, serta pembukaan simpul ekonomi baru di sektor pariwisata. Selain itu, kualitas penyusunan dokumen investasi yang dilakukan oleh DPMPTSP DIY juga mendapatkan pengakuan di tingkat nasional melalui penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, dengan terpilihnya Kajian Agrowisata Hargomulyo sebagai salah satu dari sepuluh dokumen terbaik (*Top 10*) yang masuk ke dalam Peta Potensi Investasi Regional se-Indonesia. Melalui capaian ini, DIY diharapkan mendapatkan eksposur yang lebih luas di mata calon investor, sehingga iklim investasi dan ketahanan ekonomi daerah dapat terus tumbuh secara positif dan inklusif.

Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan realisasi investasi DIY baik PMA maupun PMDN, selama lima (5) tahun dari 2021 hingga 2025:



Gambar 3.46. Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi DIY Tahun 2021–2025

Sumber: DPMPTSP DIY, 2026

Dalam perspektif capaian rencana pembangunan daerah, dinamika investasi di DIY menunjukkan ketahanan yang kuat sejak awal periode perencanaan 2022–2027. Pada fase awal pasca-pandemi, realisasi investasi di DIY secara konsisten berada pada jalur pemulihan dengan rata-rata capaian di atas angka Rp3 triliun per tahun. Memasuki tahun 2024, meskipun terdapat dinamika realisasi secara nominal, Pemerintah Daerah tetap mampu memenuhi amanat target yang ditetapkan, yakni sebesar 138% dari target, yang didorong oleh pertumbuhan investasi *genuine* sebesar Rp121 miliar di luar porsi Proyek Strategis Nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa fundamen investasi daerah tetap terjaga dan adaptif terhadap transisi ekonomi.

Memasuki tahun anggaran 2025, akselerasi pembangunan jalan tol telah memberikan dampak turunan (*multiplier effect*) yang signifikan bagi struktur ekonomi wilayah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian DIY tahun 2025 tumbuh sebesar 5,49%, meningkat dari capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03%. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 7,90% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 8,24%, di mana peningkatan realisasi investasi menjadi salah satu faktor pendorong utamanya. Hal ini merefleksikan upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan konektivitas infrastruktur strategis menjadi pengungkit bagi sektor-sektor produktif di daerah.

Pada triwulan IV-2025, ekonomi DIY mencatatkan pertumbuhan 5,94% (*y-on-y*), yang didukung oleh performa sektor Jasa Lainnya serta sektor Akomodasi

dan Makan Minum yang menguat 15,32% (*q-to-q*). Capaian tersebut menegaskan bahwa struktur ekonomi DIY masih bertumpu pada Industri Pengolahan, Pariwisata, dan Pertanian sebagai sektor unggulan. Konsistensi dalam menjaga stabilitas investasi sepanjang periode perencanaan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan struktur ekonomi makro dan daya serap tenaga kerja. Pemerintah Daerah terus berkomitmen memastikan bahwa stimulasi dari infrastruktur strategis dapat dikonversi secara aktif menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan bagi masyarakat DIY.

Persebaran Investasi DIY

Persebaran investasi di DIY menunjukkan dinamika yang secara konsisten dipengaruhi oleh pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan akselerasi PSN. Menilik perkembangan dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2022-2025), realisasi investasi pada tiga kawasan Selatan DIY, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul, tercatat masih menunjukkan *gap* yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Kabupaten Sleman secara konsisten menempati posisi pertama dalam sebaran realisasi investasi di DIY, yang didorong oleh posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama. Namun demikian, Pemerintah Daerah menyadari bahwa dominasi realisasi investasi di Kabupaten Sleman pada beberapa tahun terakhir ini mayoritas didukung oleh aktivitas pembangunan infrastruktur jalan tol sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. di sisi lain, Kota Yogyakarta yang menempati peringkat kedua realisasi investasi tertinggi, mulai menghadapi tantangan berupa potensi stagnansi

investasi seiring dengan keterbatasan ketersediaan lahan dan kepadatan kawasan yang membatasi ruang ekspansi bagi investasi baru.

Menyikapi fenomena tersebut, Pemda berkomitmen untuk senantiasa mengelola potensi investasi di masing-masing wilayah secara lebih optimal dan proporsional. Fokus kebijakan ke depan diarahkan pada penguatan daya saing kawasan selatan melalui penggalian potensi alam dan buatan yang lebih kompetitif. Upaya ini merupakan langkah strategis guna memastikan agar persebaran modal di DIY tidak terkonsentrasi di wilayah utara semata, melainkan bergerak secara lebih seimbang guna mewujudkan keadilan ruang dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Kabupaten/Kota di DIY.

Berikut ini merupakan data progres realisasi investasi yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di DIY:

Tabel 3.118. Perkembangan Investasi Total PMA+PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2021 – 2025 (dalam rupiah)

KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
KAB.BANTUL	112.673.164.558	486.378.803.066	687.291.289.577	727.123.007.671	754.866.711.055
KAB.GUNUNG-KIDUL	290.612.425.936	133.825.419.907	192.264.077.359	83.614.379.933	157.247.320.860
KAB.KULON PROGO	506.615.067.362	339.287.363.441	242.386.898.531	192.017.314.638	527.160.044.629
KAB.SLEMAN	1.920.518.963.401	1.346.689.123.430	3.647.986.885.097	2.291.437.554.489	4.807.950.295.325
KOTA YOGYAKARTA	248.473.347.912	1.603.187.105.210	926.478.850.857	867.697.831.146	2.190.491.981.313
TOTAL	**3.078.892.969.169**	**3.909.367.815.056**	**5.696.408.001.422**	**4.161.890.087.878**	**8.437.716.353.182**

Sumber: DPMPTSP DIY, 2026

Dinamika investasi di DIY dalam kurun waktu periode perencanaan 2022–2027 mencerminkan resiliensi ekonomi yang tangguh di tengah berbagai tantangan global. Sejak awal implementasi rencana pembangunan jangka menengah, Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP DIY telah mengambil langkah proaktif melalui

kebijakan strategis penguatan ekosistem investasi. Berbagai terobosan teknis telah diimplementasikan, antara lain penyusunan kajian IPRO, intensifikasi komunikasi dengan pemangku kepentingan secara daring, serta digitalisasi promosi potensi investasi daerah.

Kebijakan strategis tersebut menunjukkan performa yang signifikan pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai Rp5,6 triliun, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp2,82 triliun. Memasuki tahun 2024, Pemda melalui DPMPTSP DIY konsisten menjaga kualitas investasi melalui strategi *branding* media sosial yang masif serta optimalisasi aksesibilitas wilayah. Meskipun secara angka kumulatif tahun 2024 menunjukkan penyesuaian—seiring dengan progres fisik PSN yang telah berjalan—namun investasi sektor *genuine* DIY, khususnya pada sektor hotel dan restoran, tetap konsisten sebagai kontributor utama. Kondisi ini menegaskan bahwa DIY berhasil menjaga kualitas investasi yang mendukung sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Pada TA 2025 kebijakan, penanaman modal menunjukkan capaian yang sangat positif. Target realisasi investasi tahun 2025 berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2022–2027 telah tercapai sebesar 245%. Keberhasilan melampaui target ini merupakan bukti nyata atas efektivitas kebijakan investasi yang adaptif serta komitmen DPMPTSP DIY dalam menghadirkan kualitas pelayanan perizinan yang kondusif. Keberlanjutan tren positif ini diharapkan terus menjadi fundamen bagi penguatan struktur ekonomi DIY di masa depan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Tabel 3.119. Perkembangan Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2024 – 2025 (dalam rupiah)

LOKASI	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	PMDN	PMA	TOTAL	PMDN	PMA	Total
BANTUL	605.014.658.243	122.108.349.428	727.123.007.671	463.595.546.893	291.271.164.162	754.866.711.055
GUNUNG-KIDUL	58.758.477.649	24.855.902.284	83.614.379.933	143.367.417.472	13.879.903.388	157.247.320.860
KULON PROGO	170.018.604.948	21.998.709.690	192.017.314.638	511.454.855.826	15.705.188.803	527.160.044.629
SLEMAN	2.030.198.815.502	261.238.738.987	2.291.437.554.489	4.271.894.933.153	536.055.362.172	4.807.950.295.325
YOGYA-KARTA	766.258.565.457	101.439.265.689	867.697.831.146	1.380.350.567.789	810.141.413.524	2.190.491.981.313
TOTAL	**3.630.249.121.799**	**531.640.966.078**	**4.161.890.087.878**	**6.770.663.321.133**	**1.667.053.032.049**	**8.437.716.353.182**

Sumber: DPMPTSP DIY, 2026

Berdasarkan peta sebaran investasi tahun 2025, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih menjadi kontributor utama dalam capaian realisasi modal di DIY. Dominasi Kabupaten Sleman didorong secara signifikan oleh akselerasi PSN) pada sektor transportasi, khususnya pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen dan Tol Yogya–Solo. Keberadaan infrastruktur strategis ini memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang nyata terhadap pertumbuhan investasi pada sektor-sektor penunjang, seperti perumahan, perkantoran, perdagangan, serta sektor hotel dan restoran.

di sisi lain, konsistensi Kota Yogyakarta dalam menempati peringkat kedua realisasi investasi tertinggi merupakan hasil dari kebijakan promosi pariwisata dan budaya yang dilakukan secara intensif. Capaian ini secara dominan didukung oleh performa sektor hotel dan restoran, yang membuktikan bahwa daya tarik investasi berbasis budaya dan jasa tetap menjadi fondasi kuat bagi perekonomian perkotaan di DIY.

Pemda menyadari bahwa realisasi investasi di tiga kawasan Selatan—Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul—saat ini masih lebih rendah dibandingkan wilayah Utara. Namun

demikian, berdasarkan analisis progres pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), terdapat aspek positif berupa tren kenaikan realisasi investasi di ketiga kabupaten tersebut.

Bukti nyata dari dinamika positif ini tercermin pada tahun 2025 melalui kepeminatan investasi di kawasan selatan, salah satunya pada lokus Agrowisata Pantai Baron di Kabupaten Gunungkidul dengan nilai investasi mencapai Rp4,5 miliar. Capaian ini merupakan wujud nyata atas komitmen pengakselerasian pembangunan kawasan selatan guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di DIY. Meskipun demikian, realisasi di kawasan selatan ini dipandang sebagai langkah awal yang menunjukkan validasi atas potensi wilayah tersebut, yang selanjutnya akan terus diperkuat melalui penyediaan dokumen perencanaan investasi (IPRO) yang lebih komprehensif.

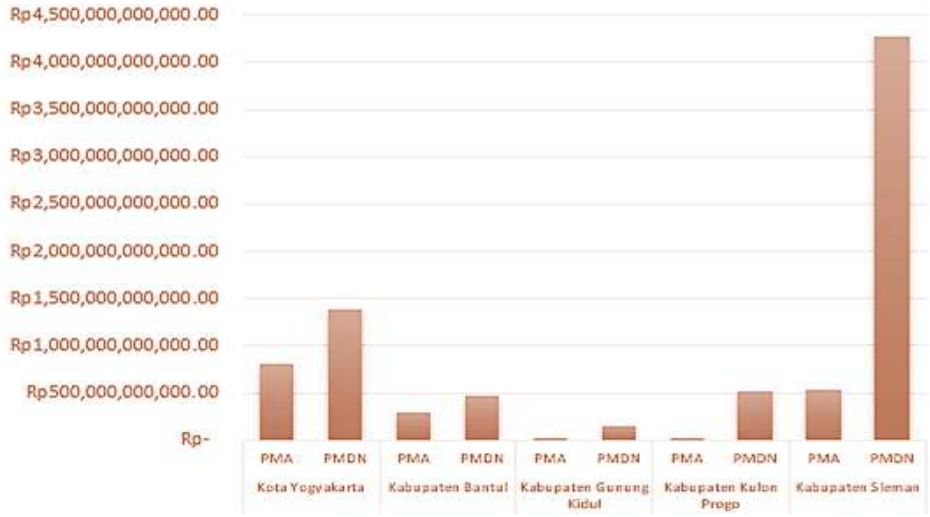
Secara akumulatif, performa investasi sepanjang tahun 2025 merupakan manifestasi dari efektivitas kebijakan Pemda DIY dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sinergi antara pembangunan infrastruktur nasional dengan penggalian potensi lokal diharapkan dapat terus mempersempit kesenjangan ekonomi wilayah dan memperkokoh ketahanan ekonomi DIY secara menyeluruh dan inklusif.

Capaian realisasi investasi di DIY yang bersumber dari PMDN dan PMA mencerminkan karakteristik ekonomi yang bertumpu pada kekuatan domestik. Berdasarkan data statistik tahun 2025 yang dihimpun oleh DPMPTSP DIY, realisasi PMDN menunjukkan dominasi yang signifikan dibandingkan dengan PMA di seluruh Kabupaten/Kota. Fenomena ini mengindikasikan bahwa minat serta kepercayaan investor domestik terhadap

stabilitas dan prospek ekonomi di DIY tetap terjaga dengan kuat.

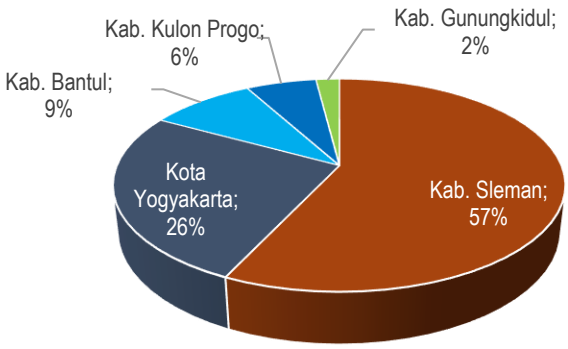
Pemda memandang dominasi PMDN ini sebagai modalitas utama dalam memperkokoh kemandirian ekonomi daerah. Tingginya partisipasi investor lokal memungkinkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih adaptif dan kolaboratif, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal. Dengan demikian, penguatan investasi domestik menjadi pilar bagi kedaulatan ekonomi wilayah yang lebih resilien dalam menghadapi dinamika global.

Adapun komposisi persentase sebaran realisasi investasi tahun 2025 di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.47. Grafik Realisasi Investasi Tahun 2025 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)

Sumber: DPMPTSP DIY, 2026



Gambar 3.48. Persentase Realisasi Investasi Tahun 2025 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: DPMPTSP DIY, 2026

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Sleman masih menempati porsi terbesar dalam realisasi investasi di DIY dengan persentase sebesar 57%, diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar 26%. Sementara itu, kontribusi dari wilayah lainnya tercatat pada Kabupaten Bantul sebesar 9%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 6%, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2%.

Meskipun struktur persebaran secara spasial masih menunjukkan konsentrasi di wilayah utara, kenaikan proporsi investasi di Kabupaten Bantul menjadi 9% memberikan sinyalemen positif atas upaya Pemda melalui DPMPTSP DIY dalam mendorong diversifikasi lokasi investasi. Kondisi ini menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan potensi di seluruh wilayah kabupaten/kota, guna memastikan bahwa aktivitas penanaman modal dapat berkontribusi secara lebih merata terhadap penguatan struktur ekonomi di seluruh pelosok DIY.

Realisasi investasi merupakan indikator fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan salah satu tolok ukur daya saing DIY. Dalam dokumen perencanaan, indikator Nilai Realisasi Investasi ditetapkan untuk mendukung

tujuan strategis, yaitu: "Terwujudnya investasi pada sektor unggulan dan wilayah yang belum berkembang." Target akhir realisasi investasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027 semula ditetapkan sebesar Rp3,62 triliun, yang dihitung dengan mempertimbangkan analisis data investasi *genuine* serta proyeksi dampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan guna menjaga relevansi perencanaan, Pemerintah Daerah telah melakukan penyelarasan target melalui Berita Acara Penyelarasan Target Nomor B/00.8.6.3/1626/BR.6 tanggal 24 September 2025. Penyelarasan ini dilakukan agar target yang ditetapkan tetap realistis dengan kondisi di lapangan serta selaras dengan arah kebijakan nasional. Penyesuaian ini secara khusus didasarkan pada jumlah realisasi investasi riil di luar cakupan PSN, guna mendapatkan gambaran kekuatan ekonomi daerah secara lebih akurat.

Adapun dinamika penyelarasan target dan capaian realisasi investasi disajikan sebagai berikut:

a) Evaluasi Tahun 2024. Dengan target sebesar Rp3,02 triliun, telah tercapai realisasi sebesar Rp4,16 triliun.
b) Capaian Tahun 2025. Berdasarkan hasil penyelarasan, target tahun 2025 disesuaikan menjadi sebesar Rp3,45 triliun. Melalui efektivitas kebijakan dan terjaganya kondusivitas iklim usaha, realisasi investasi pada tahun berjalan mencatatkan angka Rp8,43 triliun, yang merepresentasikan pemenuhan target tahunan sebesar 245%.

c) Pencapaian Target Akhir RPJMD. Dengan capaian realisasi tahun 2025 tersebut, secara kumulatif target akhir RPJMD telah dapat terpenuhi sebesar 233%.

Capaian yang melampaui target ini merupakan hasil dari sinergi antara perencanaan yang terukur dengan eksekusi kebijakan yang adaptif. Hal ini juga didukung oleh komitmen Pemda melalui DPMPTSP DIY dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut difokuskan pada pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui prosedur pelayanan yang lebih ringkas, transparan, dan akuntabel.

Kondisi positif ini akan terus dijaga dan dioptimalkan pada masa mendatang melalui kebijakan investasi berbasis data (*evidence-based policy*) serta kepekaan terhadap dinamika ekonomi global, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat DIY.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPMPTSP DIY yang berisikan mandat pengelolaan urusan Penanaman Modal di DIY, berikut ini merupakan keberhasilan dalam penyelenggaraan ketugasan fungsi tersebut :

Tabel 3.120. Target dan Realisasi Investasi s.d Tahun 2025

Indikator	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
		Target *)	Realisasi	%			
Nilai Realisasi Investasi di DIY	4.161.890.087.878	3.450.000.000.000*	8.437.716.353.182	245	3.620.000.000.000	3.620.000.000.000	233

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*

Sumber: BKPM RI; KemenpanRB; DPMPTSP DIY; Biro Organisasi DIY (2026)

Dalam kerangka penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan publik, Pemerintah Daerah senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima. Transformasi pelayanan perizinan secara terpadu diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, menyederhanakan birokrasi, serta menciptakan ekosistem perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan mandat Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2022, DPMPTSP DIY mengelola kewenangan pada 12 sektor strategis yang mencakup tata kelola 64 jenis perizinan non-berusaha serta 1.349 jenis perizinan berusaha. Implementasi pendelegasian wewenang tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan digitalisasi pelayanan dan kepastian standar waktu guna menghadirkan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Keberhasilan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pelayanan ini telah mendapatkan pengakuan nasional melalui perolehan Predikat Pelayanan Prima.

Efektivitas tata kelola pelayanan tersebut selaras dengan capaian realisasi investasi tahun 2025 yang telah melampaui target tahunan maupun target akhir RPJMD 2022–2027. Meskipun pencapaian tersebut masih didukung oleh keberadaan PSN, namun realisasi investasi *non-PSN* atau investasi *genuine* masih mendominasi total realisasi di DIY.

Kondisi ini merefleksikan bahwa investasi *genuine* di DIY memiliki fundamental yang kuat dan prospek masa depan yang cerah. Pemerintah Daerah menyadari bahwa momentum positif ini perlu senantiasa dibarengi dengan kebijakan investasi yang seimbang, yakni kebijakan yang pro-masyarakat, pro-investor, dan pro-lingkungan. Komitmen ini menjadi landasan untuk terus menjaga kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan dan capaian kualitas kinerja ini secara rinci tercermin dalam perolehan predikat pelayanan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.121. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima	Skor	A (4,6)	A (4,61)	A (4,61)	100	A	A (4,61)	100

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: KemenpanRB dan Biro Organisasi DIY, 2025

Upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga integritas dan profesionalitas pelayanan perizinan pada tahun 2025 membuahkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari capaian DPMPTSP DIY yang berhasil meraih Skor 4,61 dengan Predikat A (Pelayanan Prima). Pencapaian tersebut merupakan manifestasi dari konsistensi dalam mempertahankan standar pelayanan publik yang sangat baik di tingkat nasional melalui tiga pilar strategis: optimalisasi digitalisasi layanan, penyederhanaan alur birokrasi, serta penguatan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

Capaian tersebut secara langsung telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD 2022–2027, sekaligus mengukuhkan posisi DIY sebagai daerah dengan iklim investasi dan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) yang sangat baik di tingkat nasional. Kualitas pelayanan yang prima ini menjadi instrumen penting dalam memelihara kepercayaan investor serta masyarakat, guna mendukung sektor penanaman modal sebagai salah satu penggerak kesejahteraan di wilayah DIY.

Pemda akan terus menjaga capaian ini dengan senantiasa mengedepankan inovasi pelayanan yang transparan dan akuntabel. Dengan kualitas tata kelola yang terjaga, diharapkan daya saing ekonomi daerah dapat terus tumbuh secara stabil dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di DIY.

Tabel 3.122. Target dan Realisasi Kinerja Reformasi Birokrasi Penanaman Modal Tahun 2025

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Skor	A (92,61)	A (92,63)*	A (96,5)	104,18	A	104,18

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Biro Organisasi DIY, 2025

Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada urusan penanaman modal tahun 2025 mencapai skor 96,5 dengan kategori A. Capaian ini mencakup pemenuhan indikator pada dua dimensi utama, yaitu RB General yang berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan, serta RB Tematik yang diarahkan pada akselerasi investasi sebagai penggerak ekonomi daerah.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari integrasi antara komitmen aparatur dengan strategi hulu-hilir yang mencakup perluasan publikasi potensi investasi, penguatan kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, serta penguatan aspek teknis melalui standardisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan.

Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dan *Si Cantik Cloud*. Guna memastikan pelayanan yang inklusif, Pemda melalui DPMPTSP DIY juga menyediakan fasilitas pendukung berupa *Call Center* serta penyediaan *Co-Working Space* untuk layanan konsultasi. Sinergi antara sistem informasi dengan layanan konsultasi tatap muka ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus memfasilitasi pelaku usaha dalam merealisasikan investasi di DIY.

Berdasarkan mandat Peraturan Gubernur DIY Nomor 108 Tahun 2022, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Kerja Sama Luar Negeri sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi DIY di kancah internasional. Hingga tahun 2025, DIY secara konsisten memelihara hubungan aktif dengan 6 (enam) *Sister Province* (Provinsi Kembar), yaitu: Prefektur Kyoto dan Prefektur Yamanashi (Jepang), Provinsi Gyeongsangbuk-do dan Provinsi Gangwon (Korea Selatan), Negara Bagian Victoria (Australia), serta Munisipalitas Shanghai (RRT).

Implementasi kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Pada TA 2025, perkembangan kerja sama tersebut mencatatkan beberapa poin sebagai berikut:

a) Kemitraan DIY - Gyeongsangbuk-do (Korea Selatan): Memasuki usia 20 tahun, kemitraan ini berhasil mentransformasi semangat *Saemaul Undong* menjadi pertumbuhan ekonomi riil. di Kalurahan Wijimulyo (Kulon Progo), unit usaha *Saemaul Jamur Center* (SJC) mencatatkan kenaikan produksi yang signifikan dari 22.547 kg (2024) menjadi 34.526 kg pada tahun 2025 dengan nilai ekonomi mencapai Rp452.642.000,00. Transformasi operasional terus diperkuat melalui pengadaan mesin baglog mandiri dan perluasan kapasitas lumbung hingga 50.000 baglog. Selain itu, aspek SDM diperkuat melalui *Korean Language Training Program* bagi ASN dan perayaan "*Korean Day*" pada 4 Mei 2025 di Kompleks Kepatihan.
b) Kemitraan DIY - Victoria (Australia): Kerja sama menunjukkan progres administratif yang kuat dengan finalisasi naskah MoU yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri RI (Surat Nomor 100.4.7.2/4286/SJ). Selain itu, pengembangan sumber daya manusia terus berlanjut melalui *Youth Music Camp* bersama *Melbourne Symphony Orchestra*, yang telah membina musisi orkestra profesional asal DIY.
c) Kemitraan DIY - Kyoto (Jepang): Menandai 40 tahun kerja sama, fokus tetap ditekankan pada pelestarian nilai budaya. Program pertukaran seni dan lomba lukis anak internasional pada 24 Juli 2025 menjadi instrumen strategis untuk menjamin regenerasi seniman muda DIY di forum global.
d) Resiliensi Diplomasi dan Tata Kelola: di tengah kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, diplomasi tetap berjalan produktif melalui metode *hybrid* dan penerimaan delegasi asing seperti *Thailand Board of Investment* (BOI) dan *Korea University ASEAN Center*. Pemerintah

Daerah juga telah menyusun Video Promosi Investasi DIY 2025 sebagai alat diplomasi ekonomi digital untuk menarik minat investor secara lebih luas. Selain itu, telah dilaksanakan Rapat Kerja Teknis (I dan II) untuk memperkuat tata kelola hibah luar negeri.

Penyelenggaraan urusan penanaman modal pada tahun anggaran 2025 didukung oleh 6 program utama dan 1 program penunjang, mencakup Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran tahun 2025 mengalami dinamika penyesuaian sebagai bentuk respons terhadap kebijakan nasional dan optimasi pemanfaatan dana daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pagu Anggaran Murni: Dialokasikan sebesar Rp13.165.059.615,00 yang bersumber dari PAD dan Dana Keistimewaan.
b) Pagu Anggaran Perubahan (November 2025): Ditetapkan sebesar Rp12.081.190.581,00. Penyesuaian ini merupakan hasil akumulasi kebijakan strategis sepanjang tahun berjalan, meliputi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja perjalanan dinas, serta kebijakan Redesign Dana Keistimewaan Tahap I dan II. Selain itu, dilakukan pula optimasi melalui pengurangan pada pos belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

Berdasarkan pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran belanja hingga akhir tahun mencapai Rp11.211.786.538,00 atau sebesar 92,8%. Realisasi keuangan ini mencerminkan prinsip efisiensi yang akuntabel, di mana realisasi fisik program tetap mampu diselesaikan sebesar 100%. Meskipun terdapat penyesuaian anggaran di tengah tahun berjalan, DPMPTSP DIY tetap mampu menjaga performa kinerja, yang ditunjukkan dengan capaian realisasi investasi sebesar 245% dari target tahunan serta bertahannya standar Pelayanan Prima.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Ketimpangan wilayah dan akselerasi pusat ekonomi baru: Persistensi ketimpangan investasi di mana aglomerasi ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah utara (Sleman dan Kota Yogyakarta) akibat mahalnya *entry cost* (harga tanah) dan fenomena gentrifikasi, sementara infrastruktur pendukung di wilayah lain belum merata.

(b) Kompleksitas persyaratan dasar dan inovasi skema kawasan: Pelaku usaha terbebani tingginya biaya penyusunan dokumen dasar (AMDAL, SLF, PBG) karena ketergantungan pada jasa konsultan tanpa standar tarif baku (*ceiling price*), serta hambatan administratif dalam legalitas pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD).

(c) Kendala sistemik regulasi dan optimalisasi advokasi: Ketidaksiapan struktural dalam implementasi PP No. 28 Tahun 2025 dan Perka BKPM No. 5 Tahun 2025, yang diperparah oleh belum stabilnya interoperabilitas sistem OSS

RBA dengan sistem kementerian teknis seperti Gistaru, SIMBG, dan Amdalnet.

(d) Kesenjangan SDM dan transformasi layanan digital: Keterbatasan kuantitas SDM penyelenggara perizinan yang hanya tersedia 50 orang dari kebutuhan ideal 149 orang, serta keterbatasan sarana prasarana pengawasan lapangan yang belum memenuhi standar minimal nasional.

(e) Diversifikasi investasi dan strategi promosi terarah: Investasi masih didominasi sektor tersier (jasa/pariwisata massal) yang belum terintegrasi dengan IKM, serta masih minimnya dokumen peluang investasi (IPRO) yang mengusung konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan.

b) Solusi

(a) Akselerasi pusat ekonomi baru dan pemberdayaan IKM: Mengarahkan investasi ke wilayah selatan (Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul) melalui penyiapan infrastruktur strategis yang sinergis. Langkah ini bertujuan menumbuhkan pusat ekonomi baru sekaligus mendorong pertumbuhan IKM agar mampu terintegrasi ke dalam rantai pasok industri besar, guna mengatasi ketimpangan wilayah dan mahalnya biaya investasi di wilayah aglomerasi utara.

(b) Inovasi skema kawasan dan efisiensi biaya persyaratan dasar: Mendorong penyusunan AMDAL Kawasan sebagai solusi integratif untuk memangkas biaya dan durasi pengurusan dokumen lingkungan bagi investor secara kolektif. Selain itu, dilakukan telaah

komprehensif terhadap regulasi pemanfaatan TKD melalui skema sewa jangka panjang yang lebih adaptif untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses lahan bagi dunia usaha.

(c) Penguatan advokasi dan mitigasi kendala sistemik regulasi: Membentuk Klinik Pendampingan Khusus untuk membantu pelaku usaha dalam pemenuhan izin kompleks serta menyusun *Priority Issue List* sebagai instrumen advokasi kepada pemerintah pusat. Upaya ini difokuskan pada penyelesaian kendala interoperabilitas sistem OSS RBA dengan kementerian teknis guna memastikan kelancaran implementasi regulasi terbaru (PP No. 28/2025 dan Perka BKPM No. 5/2025).

(d) Transformasi layanan digital dan optimalisasi SDM: Memperkuat tata kelola melalui *Integrated Call Center* berbasis sistem *omnichannel* serta penyediaan *Co-working Space* konsultasi perizinan. Inovasi layanan digital ini menjadi strategi kunci untuk mengatasi kesenjangan jumlah SDM layanan (50 orang dari ideal 149 orang) serta memastikan pengawasan dan layanan pendampingan tetap berjalan optimal sesuai standar nasional.

(e) Strategi promosi terarah dan diversifikasi investasi hijau: Melakukan penajaman promosi melalui penyusunan dokumen IPRO yang berfokus pada sektor primer, industri padat karya, serta investasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Strategi ini dirancang untuk mendiversifikasi modalitas ekonomi DIY agar tidak hanya bertumpu pada pariwisata massal,

tetapi juga pada sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masif.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Tabel 3.123. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINDU DIY	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**skor**	**88,35**	**90,05**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	52	68
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500	500
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	94	94
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	67	67
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1	1
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Kepeminatan Investasi	**Kepeminatan**	**14**	**15**
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	1	1
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**skor**	**86,75**	**88,48**
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	300	1.631
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	600	719
			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	10	12
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	**Kegiatan Usaha**	**1036**	**15.072**
			Pengawasan Penanaman Modal			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	43	44
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	8	8
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha	20	180

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan	**%**	**90**	**90**
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5	5
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif	**Mitra**	**3**	**3**
			Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	Laporan	5	5

Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

(1) Kondisi Umum

Sektor kepemudaan dan keolahragaan merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa, mengingat peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan dan olahraga sebagai instrumen pembentukan karakter serta peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas dan daya saing pemuda perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas kognitif dan psikologis, kesehatan fisik dan mental, ketahanan terhadap perilaku berisiko, kesiapan kerja, kewirausahaan, serta penguasaan keterampilan di masa depan. Sedangkan kemajuan di sektor olahraga dapat diwujudkan melalui pengembangan budaya olahraga bagi seluruh masyarakat, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga. Dukungan Pemda DIY bagi kemajuan pembangunan

sektor kepemudaan dan keolahragaan diwujudkan melalui beberapa indikator kinerja dengan target dan capaian sebagai berikut.

Tabel 3.124. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian 2025 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyelarasan 2027	Capaian s/d 2025 terhadap target RPJMD 2027 (%)
				Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	66,15	66,15	65,10	98,41	65,67	66,65	97,67
2	Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS	Peringkat	4 Pra-POPNAS	8 besar (POPNAS)	7 POPNAS	112,5	8 besar (POPNAS)	8 besar (POPNAS)	112,5
3	Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	Peringkat	9 besar	6 besar	17	83,33	6 besar	6 besar	83,33
Indikator Kinerja Sasaran: Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan									
1	Persentase pemuda bekerja	%	72,17	72,17	75,46	104,56	67,84	72,67	103,84
Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional									
1	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	medali	38	24	62	258,33	28	28	221,43

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Disdikpora DIY, 2025

Sesuai data Statistik Pemuda Indonesia tahun 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda DIY tahun 2025 adalah sebesar 65,10%. Terdapat penurunan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 66,15%. Capaian ini relatif dekat dengan target tahun 2025 maupun target penyelarasan tahun 2027 sebesar 66,65%. TPAK pemuda merupakan perbandingan antara pemuda angkatan kerja (jumlah penduduk usia 16–30 tahun yang bekerja dan pemuda yang menganggur) terhadap jumlah seluruh pemuda (penduduk usia 16–30 tahun). Dengan capaian TPAK DIY sebesar 65,10%, diperkirakan sekitar 65 dari 100 pemuda di DIY telah siap memasuki pasar kerja.

Pada indikator Peringkat yang Diraih dalam POPNAS, DIY meraih peringkat 7 pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 1 s.d 10 November 2025. Pada kejuaraan ini, kontingen DIY meraih 11 medali emas, 8 medali perak, dan 26 medali perunggu. Capaian ini telah melampaui target tahun 2025 maupun target akhir RPJMD yaitu peringkat 8 besar POPNAS.

Pada indikator Peringkat yang diraih dalam Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS), kontingen DIY meraih peringkat 17 pada kejuaraan PEPARPENAS XI Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta tanggal 1 s.d. 10 November 2025. Kontingen DIY meraih 1 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Hasil ini menunjukkan bahwa target tahun 2025 maupun target akhir RPJMD yaitu peringkat 6 besar belum dapat tercapai.

Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2025, persentase pemuda bekerja di DIY adalah sebesar 75,46%. Capaian ini diperoleh dari perhitungan persentase jumlah pemuda yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dibandingkan dengan dengan jumlah pemuda di DIY. Pada tahun 2025 persentase pemuda bekerja didapatkan dengan memperhitungkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda dan persentase pemuda *Not in Education, Employment, and Training* (NEET). Capaian pada tahun 2025 telah melampaui target tahun 2025 maupun target akhir RPJMD sebesar 72,67%.

Pada indikator Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent, capaian medali kontingen DIY pada tahun 2025 adalah sebanyak 62 medali dengan rincian 17 medali dari kejuaraan PEPARPENAS XI dan 45 medali

dari kejuaraan POPNAS XVII. Capaian medali ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir RPJMD.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) TPAK DIY Pada Tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki pada lapangan kerja dan kecenderungan sebagian besar pemuda untuk melanjutkan pendidikan lebih dahulu sebelum memasuki lapangan kerja.

(b) Belum tercapainya target prestasi pada pengiriman kontingen PEPARPENAS tahun 2025. Tidak tercapainya target peringkat antara lain disebabkan masih kurangnya fasilitas dan pembinaan untuk atlet disabilitas di sekolah. Disamping itu, belum ada sentra pembinaan khusus atlet disabilitas di DIY dan masih kurangnya *try out* bagi atlet disabilitas.

b) Solusi

(a) Mendorong penerapan pembelajaran kewirausahaan sebagai upaya penanaman keterampilan kerja dan memupuk persiapan kerja, dimulai pada jenjang pendidikan menengah.

(b) Mengoptimalkan kerja sama dengan *National Paralympic Committee of* Indonesia (NPCI) DIY, Sekolah Luar Biasa, dan sekolah inklusif untuk mengoptimalkan fasilitas yang tersedia bagi pembinaan para

atlet disabilitas serta memungkinkan penyelenggaraan *try out* bagi para atlet disabilitas guna mengukur kemampuan mereka berkompetisi.



Gambar 3.49. Perolehan Medali Emas Cabang Olahraga Pencak Silat pada POPNAS XVII

Sumber:Disdikpora DIY, 2025

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 anggaran Urusan Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp79.669.997.500,00 yang dialokasikan ke dalam 4 program, 12 kegiatan, dan 26 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp77.830.377.248,00 (97,69%) dengan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebesar 99,65%. Ketidaktercapaian target fisik dan keuangan urusan kepemudaan dan keolahragaan disebabkan peralihan penyelenggaraan Pemuda Pelopor yang semula diampu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga dilaksanakan oleh Balai Pemuda dan Olahraga DIY di daerah, pada tahun 2025 diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan nama Pemuda Pelopor Desa dan penyelenggaraan di daerah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY.

Tabel 3.125. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPO)	nilai	86,71	84,3
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3
			Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2
			Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	100
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
			Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
			Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	100
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7
			Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	%	50	50
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	%	100	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	%	100	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9
			Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	%	100	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8
			Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	%	100	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	9
			Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	%	100	100
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	%	9,09	84,62
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150	150
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	25	25
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	13	13
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi	1	1
			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang	347	488
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi			
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan	1	1
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	325	325
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi			
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	275	275
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi			
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dokumen	4	4
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	1

Sumber: Disdikpora DIY, 2025

n. Urusan Statistik

(1) Kondisi Umum

Urusan statistik pada tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi statistik sektoral yang mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah di DIY.

Pelaksanaan urusan statistik difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola data statistik sektoral melalui penguatan kelembagaan, standardisasi data, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kebijakan Satu Data Indonesia di DIY ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY, dan telah diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia DIY. Untuk mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, maka penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yaitu:

a) Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi

ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI;

b) Data harus memiliki metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
c) Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, adalah kemampuan data untuk berbagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
d) Data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk, adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kode Referensi dan /atau data induk dibahas dan sepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah memiliki tool dalam pengelolaan data berupa aplikasi Jogja Dataku (https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/). Aplikasi ini telah disepakati menjadi portal Satu Data Indonesia DIY yang merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah yang dikelola oleh Bapperida DIY selaku walidata dan dapat diakses melalui pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Indonesia DIY, merupakan wujud upaya memperbaiki tata kelola data, manajemen data dan kualitas data dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

Capaian dan langkah strategis yang dilakukan Bapperida sebagai unit pelaksana urusan statistik:

a) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia DIY melalui Keputusan Gubernur;
b) Penyusunan dan Pembaruan SOP Penyelenggara dan Penyelenggaraan SDI melalui Keputusan Gubernur;
c) Penyusunan Daftar Data SDI Tahun 2026 sebagai dasar perencanaan;
d) Pengembangan fitur aplikasi Jogja Dataku agar lebih *user-friendly;*
e) Kerja sama dengan BPS Provinsi DIY dalam Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Produsen Data.

Tingkat pencapaian urusan statistik sebagai urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar tercermin dari meningkatnya persentase perangkat daerah yang berperan sebagai produsen data dan telah menerapkan prinsip SDI. Selain itu, ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi dan mutakhir semakin baik, sehingga mampu mendukung kebutuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan dalam aspek koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah serta dengan Badan Pusat Statistik DIY. Upaya ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan konsistensi data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan laporan kinerja pemerintah daerah

Berdasar RPJMD 2022–2027, kinerja Urusan Statistik Tahun 2024 diukur dengan indikator Persentase data statistik sektoral sesuai menuju prinsip Satu Data

Pembangunan Daerah. Target dan realisasi kinerja Urusan Statistik secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.126. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025

Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyelaras-an 2027	Capaian s/d 2025 terhadap target RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Persentase data statistik sektoral menuju Prinsip Satu Data Pembangunan Daerah	%	76,20	75	77,83	103,77	85	85	91,56

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: Bapperida DIY, 2025

Prinsip SDI yang dapat dihitung sesuai kewenangan daerah adalah ketersediaan metadata. Sehingga pada indikator persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip SDI dihitung berdasarkan ketersediaan metadata. Capaian dari indikator tersebut Pada Tahun 2025 telah melebihi target yakni sebesar 77,83% (9.454 telah tersedia metadata dari total 12.147 elemen data).

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Belum optimalnya standardisasi data di daerah yaitu adanya perbedaan definisi operasional variabel antar perangkat daerah dan metadata yang merupakan penjelasan tentang sumber, metode dan arti data seringkali tidak tercatat dengan baik;
(b) Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data statistik di perangkat daerah masih bervariasi, baik dari aspek

pemahaman statistik dasar, pengelolaan data, maupun pemanfaatan sistem informasi statistik.

b) Solusi

(a) Melakukan penguatan penerapan standar statistik melalui penyusunan dan penyempurnaan metadata, pembinaan produsen data secara berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik;
(b) Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan teknis di bidang statistik sektoral dan Satu Data Indonesia. Selain itu, mendorong penunjukan dan penguatan peran wali data dan produsen data di setiap perangkat daerah.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Program yang dilaksanakan dalam urusan statistik pada tahun 2025 adalah program penyelenggaraan statistik sektoral dengan 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi dan subkegiatan penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Alokasi anggaran sebesar Rp222.096.250,00 dapat direalisasikan sebanyak Rp220.332.892,00 atau 99,21%. Berikut rincian capaian program dan subkegiatan urusan statistik.

Tabel 3.127. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Statistik Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
1	STATISTIK	BADAN PERENCANAAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
		PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			
			Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	%	75	77,83
			Dokumen Analisis Makro Ekonomi sebagai bahan Penyusunan RKPD 2026	dokumen	1	1
			Dokumen Fasilitasi Satu Data Indonesia	dokumen	1	1
			Pengumpulan dan Penyajian Data	dokumen	1	1
			Dokumen Penyediaan Data Perencanaan dan Pengendalian	dokumen	1	1
			Update Aplikasi Jogja Dataku	aplikasi	1	1
			Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi	%	100	100

Sumber: Bapperida DIY, 2025

o. Urusan Persandian

(1) Kondisi Umum

Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Provinsi DIY diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2021. Diskominfo DIY memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Sejak 2019, urusan keamanan informasi dikelola oleh Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, yang sebelumnya bernama Bidang Manajemen Informasi. Dalam pengelolaan keamanan informasi dan Persandian, Diskominfo DIY berkoordinasi secara vertikal dengan Badan Siber dan

Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi Digital. Diskominfo DIY juga mengelola *data center* tersertifikasi SNI/ISO IEC 27001. Sertifikasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.128. Sertifikasi Yang Dilaksanakan

No	Tahun	Sertifikasi	Status
1	2016	SNI/ISO IEC 2700:2013	Sertifikasi
2	2017	SNI/ISO IEC 2700:2013	Surveillance I
3	2018	SNI/ISO IEC 2700:2013	Surveillance II
4	2019	SNI/ISO IEC 2700:2013	Resertifikasi
5	2020	SNI/ISO IEC 2700:2013	Surveillance I
6	2021	SNI/ISO IEC 2700:2013	Surveillance II
7	2022	SNI/ISO IEC 2700:2022	Resertifikasi; Upgrade Versi
8	2023	SNI/ISO IEC 2700:2022	Surveillance I
9	2024	SNI/ISO IEC 2700:2022	Surveillance II
10	2025	SNI/ISO IEC 2700:2022	Resertifikasi


CERTIFICATE

Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah Istimewa Yogyakarta

ISO/IEC 27001 : 2022

Sumber: Dinas Kominfo DIY 2025

Pada Tahun 2025, dalam rangka meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlu menerapkan standar ISO 27001:2022 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara konsisten dan berkesinambungan terhadap seluruh prosedur kegiatan Pengelolaan Pusat Data dan Jaringan

Intra Pemda DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Kegiatan ini memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka mengimplementasikan konsep-konsep keamanan informasi serta memastikan tata kelola keamanan informasi untuk layanan konektivitas berbasis Internet Protokol telah sesuai dengan standar keamanan internasional. Maka pada Bulan November 2025 telah dilaksanakan Re-Sertifikasi ISO 27001:2022 dengan mengambil ruang lingkup: ”*Data Center and Intra-Government Networks for the Special Region of Yogyakarta*.” dan didapatkan hasil memenuhi persyaratan.

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mempertegas bahwa persandian, yang berada di bawah pembinaan BSSN, memiliki peran penting dalam pengamanan SPBE. Selain itu, ekosistem *Jogja Smart Province* yang mengutamakan pemanfaatan teknologi harus didukung oleh sistem keamanan informasi yang andal. Pengamanan informasi perlu terus mengikuti perkembangan teknologi informasi agar dapat mendukung inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Persandian berperan penting dalam melindungi, mengamankan, dan menjamin keaslian dokumen atau berita pemerintah, terutama di era digital. Modernisasi pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-government*) mencakup berbagai aspek, seperti administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgeting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Namun, penggunaan teknologi informasi juga menghadirkan risiko seperti penyadapan,

peretasan, dan ancaman lainnya, sehingga pengelolaan persandian menjadi sangat vital.

Pemda DIY telah melaksanakan berbagai upaya pengamanan informasi, termasuk penyusunan kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi. Kegiatan pengamanan meliputi pengamanan sinyal dalam acara strategis pimpinan, sterilisasi ruang kerja dan rapat, pengamanan komunikasi VIP (Gubernur dan Wakil Gubernur), serta penilaian kerentanan aplikasi. Pemda DIY juga melakukan pemantauan dan respons terhadap insiden siber, pengamanan fisik dan logis pusat data, serta penilaian indeks keamanan informasi dan tingkat kematangan keamanan siber, bekerja sama dengan BSSN. Hasil assessment keamanan informasi dan persandian oleh BSSN tahun 2018–2025 didapatkan penilaian sebagi berikut:

Tabel 3.129. Nilai Assessment Keamanan Informasi dan Persandian oleh BSSN tahun 2018-2025

No	Tahun	Nilai Assesment
1.	2018	Indeks Kemanan Informasi dengan skor 547 dari maksimum skor 645
2.	2019	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 2,18 pada Level Kematangan Tingkat III (Establishing) dari V
3.	2020	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4,39 pada Level Kematangan Tingkat IV (Managed) dari V
4.	2021	626 (Baik) dari maksimum skor 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis
		Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4,4 pada level Kematangan tingkat IV (Managed) dari V
5.	2022	627 (Baik) dari maksimum skor 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis
		Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4.52 masuk kategori dikelola optimal
6.	2023	632 (Baik) dari maksimum skor 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis
		Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4.54 pada Level Kematangan Tingkat V (Optimized) dari V
7.	2024	643(Baik) dari maksimum skor 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis
		Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4.67 pada Level Kematangan Tingkat V (Optimized) dari V
8.	2025	863(Baik) dari maksimum skor 918

Sumber: BSSN, 2025

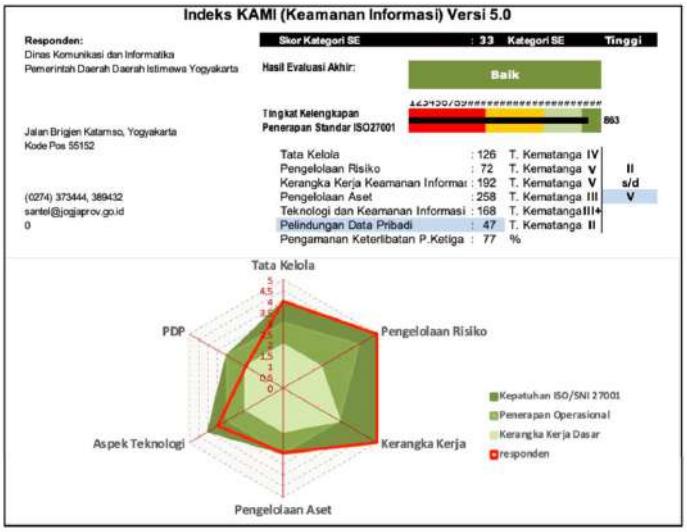
Pada tahun 2025 Urusan Persandian di Pemda DIY dilaksanakan melalui program Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Adapun pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Pada tahun 2025, urusan persandian dilaksanakan melalui program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
b) Terkait penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku pengelola *Data Center* dan Jaringan Intra Pemerintah telah melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup *The Provision of Information Security Management Systems for Data Center and Intra Government and Informatics Network for the Yogyakarta Special Region*. Selain itu, juga telah dilaksanakan verifikasi pengukuran Indeks Keamanan Informasi dan Tingkat Maturitas Keamanan Siber oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan hasil penilaian sebagai berikut:
c) Terkait penerapan dan audit keamanan informasi, Dinas Kominfo DIY berkoordinasi dengan BSSN melakukan audit-audit berikut :

    (a) Penilaian Indeks Keamanan Informasi (2025)

        Ruang Lingkup: Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Perlindungan Data Pribadi

Hasil Penilaian: Tata Kelola 126; Pengelolaan Risiko 72; Kerangka Kerja 192; Pengelolaan Aset 258; Teknologi 168 dan Perlindungan Data Pribadi 47 (Total score 863 dari maksimum score 918).

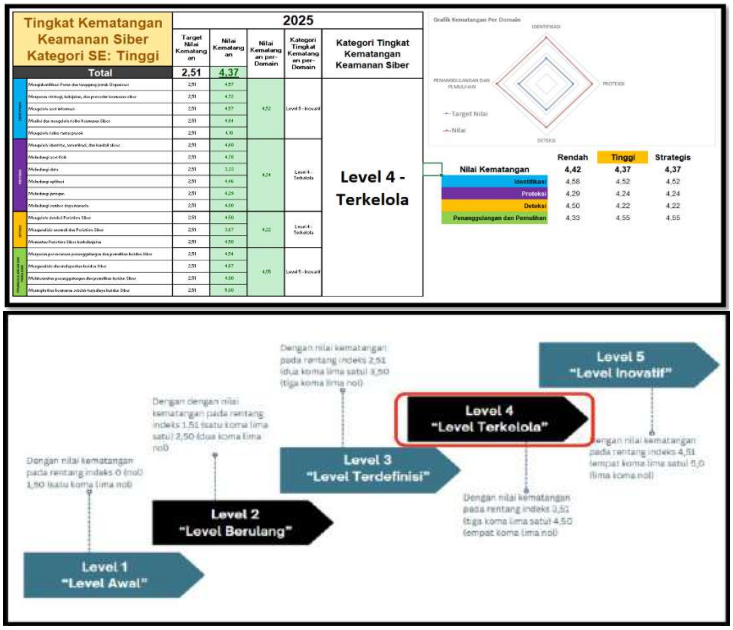


Total Skor Setelah Verifikasi: 863 (ref. File Indeks KAMI versi 5.0 Tahun 2025)

Gambar 3.50. Penilaian Indeks KAMI Tahun 2025

(b) Assesment IKASANDI Kematangan Keamanan Siber (2025)

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemetaan domain pada kerangka kerja Domain Identifikasi; Domain Proteksi; Domain Deteksi dan Domain Penanggulangan dan Pemulihan (Gulih). Berdasarkan Berdasarkan hasil IKASANDI untuk Tingkat Kematangan Keamanan Siber, pada tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut Total Skor Indeks Kematangan Keamanan Siber: 4,37 dengan level kematangan 4 (terkelola)



Gambar 3.51. Tingkat Kematangan Keamanan Siber

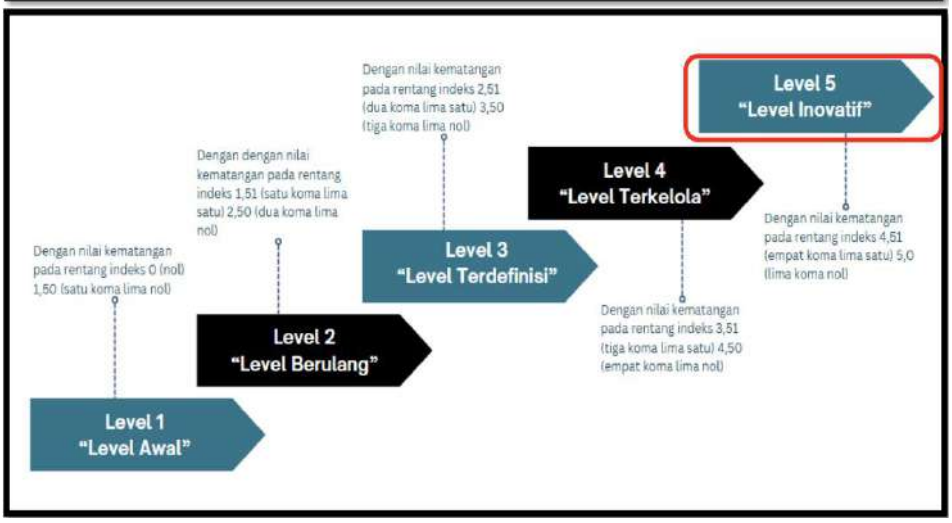
Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

(c) Assesment IKASANDI Kematangan Persandian (2025)

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi area penilaian dan ruang lingkup meliputi: Kebijakan Pengamanan Informasi, Pengelolaan Sumber Daya, Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik, Layanan Keamanan Informasi, dan Pola Hubungan Komunikasi Sandi. Berdasarkan hasil IKASANDI yang dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk Tingkat Kematangan Persandian, diperoleh hasil Total Skor Indeks Kematangan Persandian: 4,71 dan Level kematangan 5 menunjukkan bahwa persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY telah terorganisir dengan baik dan telah dilakukan proses otomatisasi, bersifat formal, dilakukan secara berulang dan konsisten serta telah terintegrasi.



Tingkat Kematangan Persandian	2025		
	Target Nilai Kematangan	Nilai Kematangan	Kategori Tingkat Kematangan Persandian
Total	2,51	4,71	
Kebijakan Pengamanan Informasi	2,51	5,00	Level 5 - Inovatif
Pengelolaan Sumber Daya	2,51	4,64	
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi non Elektronik	2,51	4,94	
Layanan Keamanan Informasi	2,51	5,00	
Pola Hubungan Komunikasi Sandi	2,51	4,00	



Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

d) Untuk melakukan pemantauan, penanganan dan pelaporan insiden, dibentuk Tim JOGJAPROVCSIRT berdasarkan SK Gubernur Nomor 46/TIM/2025 tentang Pembentukan *Jogjaprov Computer Security Incident Response Team* Tahun 2024 yang melibatkan unsur Dinas Kominfo Kab/Kota di wilayah DIY, Polda DIY, Korem 072/Pamungkas, dan Kejati DIY. Setiap insiden siber yang terjadi dicatat dan ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pelaporan. Sepanjang tahun 2025 tercatat terjadi 292 insiden yang didominasi oleh *web defacement, email spamming, cross site scripting, injection*, dll

e) di bidang pengelolaan infrastruktur dan layanan *Data Center*, hingga akhir tahun 2025 tercatat ada 238 subdomain aktif yang dikelola di *Data Center* Pemda DIY. Dalam penerapan keamanan informasi, Data Center Pemda DIY telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 sejak tahun 2016, pada Tahun 2025 juga dilakukan sertifikasi ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup *Data Center and Intra-Government Networks for the Special Region of Yogyakarta*" dan didapatkan hasil memenuhi persyaratan. Untuk mendukung proses keberlanjutan bisnis, Diskominfo DIY juga menggunakan fasilitas *Disaster Recovery Center* (DRC) ditempatkan di Jakarta yang berfungsi menjamin operasi tetap berjalan saat bencana (alam/siber) dengan mengambil alih sistem dari lokasi cadangan, mencegah kehilangan data krusial, meminimalkan *downtime* dan kerugian finansial, melindungi reputasi, serta memenuhi kepatuhan regulasi, sehingga bisnis bisa pulih cepat dan tetap melayani pelanggan;

f) Untuk melaksanakan layanan keamanan informasi dan persandian, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

   (a) Layanan *Countersurveillance* (kontra penginderaan) yaitu layanan pengamanan ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY, Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY serta OPD di lingkungan Pemda DIY dalam rangka meminimalisir adanya kebocoran informasi dari ruang kerja atau ruang rapat pimpinan. Pada tahun 2025 dilakukan kontra penginderaan untuk 41 (Empat puluh satu) lokasi;

(b) Layanan Pengamanan Sinyal (Signal Jamming) pada pelaksanaan event tertentu di Pemda DIY dan di Kabupaten / Kota se-DIY. Pada tahun 2025 terdapat 5 agenda yang dilakukan pengamanan sinyal dengan rincian: 2 event yang dilakukan pengamanan sinyal dan 3 fasilitasi peralatan untuk Detasemen Komunikasi Elektronik Pasukan Pengamanan Presiden;

(c) Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT);

(d) Fasilitasi layanan *encrypted* email atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan;

(e) Layanan Sertifikat Elektronik termasuk instalasi *Secure Socket Layer* (SSL) pada *website* dan aplikasi yang dikelola Pemda DIY dan penerbitan 1.429 Sertifikat Elektronik untuk keperluan Tanda Tangan Elektronik bagi ASN di lingkungan Pemda DIY;

g) Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan literasi keamanan informasi dan persandian dilaksanakan melalui melalui pengiriman personil dalam bimbingan teknis, *workshop* dan sosialisasi terkait keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara), Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dan Lembaga lainnya. Selain itu, literasi juga dilaksanakan melalui media sosial dan kanal-kanal informasi digital lainnya yang dikelola oleh Diskominfo DIY.

h) Untuk pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program, setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan

kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Setiap tahun disusun laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian Pemda DIY, laporan evaluasi penyelenggaraan Jogjaprovcsirt dan laporan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemda DIY yang dilaporkan kepada Gubernur DIY dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Masih kurangnya kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi;
(b) Kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber oleh aparatur pemerintah daerah dan masyarakat;
(c) Keterbatasan sarana prasarana yang digunakan untuk operasional kegiatan pengamanan informasi dan persandian;
(d) Kurangnya dukungan perangkat keamanan sistem informasi dan infrastruktur pendukung;
(e) Belum adanya personil yang menjabat sebagai Manggala Informatika selaku JF yang khusus menangani Keamanan Siber;
(f) Mahalnya harga lisensi, perangkat keras dan perangkat lunak keamanan informasi dan persandian;
(g) Peraturan yang mengatur tentang keamanan informasi belum sepenuhnya mengatur keamanan informasi dan persandian di Pemerintah Daerah dan perlindungan data pribadi;
(h) Kurangnya jumlah personil keamanan informasi dan persandian.

b) Solusi

(a) Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun dengan pelatihan internal serta berkoordinasi dengan pihak terkait pemenuhan kebutuhan perangkat keamanan sistem beserta pendukungnya untuk diajukan dalam penganggaran Tahun 2026;
(b) Memberikan sosialisasi kepada aparatur pemerintah daerah dan masyarakat pentingnya keamanan siber yang berkaitan dengan perlindungan dan privasi data terutama data pribadi di dunia maya;
(c) Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan melaksanakan literasi maupun sosialisasi keamanan informasi khususnya bagi Aparatur Sipil Negara di Pemda DIY;
(d) Optimalisasi perangkat yang ada dan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang bersifat open source;
(e) Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian maupun dengan pelatihan internal serta bekerjasama dengan komunitas/lembaga;
(f) Menyusun analisis kebutuhan jabatan fungsional Manggala Informatika untuk disampaikan kepada BSSN, BKD, Biro Organisasi dan pihak terkait;

(g) Menyusun dokumen telaah tentang pentingnya dukungan terkait pembelian lisensi, perangkat keras dan perangkat lunak keamanan informasi untuk mendukung keberlangsungan bisnis organisasi, serta meminta dukungan dari Pemerintah Pusat (BSSN dan Komdigi);

(h) Melakukan review terhadap peraturan yang ada dengan instansi terkait dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Capaian Program dan SubkegiatanTahun 2025

Pada tahun 2025 Urusan Persandian memiliki 1 program, 1 kegiatan dan 2 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp779.405.900,00. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp771.527.730,00 atau 98,99%, dengan capaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.130. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Persandian Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			
			Persentase Kecepatan Informasi Sandi Kepada Pimpinan dan Informasi Persuratan di Lingkungan Pemda DIY	%	100	100
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	5	6	7	8
			Audit Keamanan SPBE	paket	0	0
			Pendampingan Implementasi dan Audit SMKI	paket	1	1
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	38	38
			Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi	bulan	12	12
			Pemeliharaan Data Center	bulan	12	12
			Pengelolaan Pusat Data	paket	2	2

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

p. Urusan Kebudayaan

(1) Kondisi Umum

Kemajuan peradaban DIY sangat bergantung pada pengelolaan aset kebudayaan sebagai payung pembangunan segala bidang. Visi Pemda DIY dalam RPJPD adalah menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan budaya terkemuka di Asia Tenggara. Komitmen ini diperkuat melalui status Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO yang menuntut pelestarian nilai *Outstanding Universal Values* (OUV).

Pengukuran keberhasilan kinerja kebudayaan tahun 2025 tercermin pada capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang kembali menempati posisi pertama nasional dengan nilai sebesar 71,04 poin. Meskipun secara nominal belum mencapai target 74,98, tingkat realisasi mencapai 94,74% yang menunjukkan progresivitas stabil. Dimensi tertinggi terletak pada Pendidikan (86 poin), namun terdapat penurunan tajam pada dimensi Ekonomi Budaya (37,06) dan Ekspresi

Budaya (44,64) yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut guna meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya.

Tabel 3.131. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Targetakhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD
				Target *)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola	Angka	432	434	434	100	436	438	99,54
2	Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola	Sarana dan Prasarana	280	282	282	100	284	286	99,29
3	Jumlah Agenda Budaya Pendukung Keistimewaan Yang Terkelola	Angka	248	250	250	100	252	254	99,20
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	4,85	6,09	6,89	100	8,28	8,28	83,21
2	Peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional.	Event	15	16	16	100	17	17	94,11
3	Peningkatan Kinerja pengembangan seni budaya DIY.	Lembaga	385	395	398	100.75	405	410	98,27

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*

Sumber: www.sengguh.jogjaprov.go.id

Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan Urusan Kebudayaan pada tahun 2025 dihitung melalui 3 indikator capaian sasaran sebagai berikut:

a) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum

Kinerja Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum tahun 2025 berhasil melampaui target. Realisasi tercatat sebesar 6,89% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 6,09%.

Capaian ini didorong oleh dua kegiatan utama yakni kegiatan sejarah, Bahasa, sastra dan Permuseuman serta Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya. Keberhasilan capaian ini didukung dengan perolehan apresiasi 28 Cagar Budaya tingkat nasional dan 33 Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Perolehan ini merupakan penghargaan terbanyak nasional Pada Tahun 2025.

Tabel 3.132. Jumlah Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum	918
2	Penetapan Cagar Budaya	802
3	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	245
	Jumlah	1965

Sumber: Disbud DIY, 2026

b) Peningkatan Penyelenggaraan Event Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional

Kinerja indikator Penyelenggaraan event Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional digunakan untuk melihat capaian kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan event budaya dengan tujuan menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan.

Dari target 16 event yang ditetapkan, seluruhnya berhasil terealisasi atau tercapai 100%. Capaian 16 event tersebut terbagi kedalam tiga tingkatan skala sebagai berikut:

Tingkat Provinsi:

(a) Festival Museum
(b) Festival Upacara Adat
(c) Pasar Kangen TBY
(d) Jogja Joget
(e) Yogya Gamelan Festival
(f) Festival Kebudayaan Yogyakarta
(g) Gelar Budaya Catur Sagatra
(h) Festival Karawitan Anak
(i) Festival Kethoprak
(j) Festival Sendratari
(k) Serenade Bunga Bangsa
(l) Perayaan WBTB di DIY

Tingkat Nasional:

(a) SO 1 Maret

Tingkat Internasional:

(a) Art Jog
(b) Melbourne Symphony Orchestra
(c) Pameran Lomba Lukis DIY- Kyoto

Keberhasilan capaian target ini menunjukkan efektivitas penyelenggaraan event budaya dalam menjaga keberlangsungan ekosistem budaya, baik sebagai ruang ekspresi seniman maupun sebagai daya tarik wisata budaya di tingkat regional hingga internasional.

Tabel 3.133. Penyelenggaraan *Event* Budaya tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	*Event* Budaya Tingkat Regional	12
2	*Event* Budaya Tingkat Nasional	1
3	*Event* Budaya Tingkat Internasional	3
Jumlah		**16**

Sumber: Disbud DIY, 2026

c) Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY

Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY telah berhasil melampaui target pengembangan seni budaya DIY pada tahun 2025. Dengan realisasi sebesar 398 lembaga dari target 395, kinerja tahun ini mencapai angka sebesar 100,76%.

Capaian kinerja ini didorong melalui beberapa cara antara lain Fasilitasi event yakni pemberian ruang ekspresi bagi lembaga penggiat seni, Pelestarian Tradisi yaitu pemberian dukungan secara penuh terhadap upacara adat dan upacara tradisi, dan Hibah Prasarana berupa bantuan sarana dan prasarana fisik terhadap kelompok seni yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok seni. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan terhadap 398 lembaga yang terdiri dari Pembinaan terhadap upacara adat dan upacara tradisi, pembinaan terhadap sanggar seni, pembinaan kelompok seni melalui fasilitasi kegiatan, pembinaan kelompok seni melalui hibah, pembinaan terhadap kelompok penghayat kepercayaan, dan pembinaan kelompok seni melalui Festival Kebudayaan Yogyakarta. Capain ini menjadi bukti bahwa komitmen Pemda DIY dalam pembinaan pengembangan seni budaya telah dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

Tabel 3.134. Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya DIY tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah kegiatan Fasilitasi Upacara Adat dan Tradisi	14
2	Jumlah Pembinaan Sanggar	50
3	Jumlah Pembinaan Kelompok Seni melalui Fasilitas Kegiatan Seni	233
4	Jumlah Pembinaan Kelompok Seni melalui Pemberian hibah sarana dan prasarana seni	19
5	Jumlah Pembinaan terhadap kelompok penghayat kepercayaan	27
6	Jumlah Pembinaan kelompok seni melalui Festival Kebudayaan Yogyakarta	55
Jumlah		395

Sumber: Disbud DIY, 2025

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Kesenjangan Kesejahteraan dan Dampak Ekonomi Sektor Budaya Meskipun DIY berhasil menempatkan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan, terdapat kontradiksi signifikan pada capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Dimensi Ekonomi Budaya mengalami penurunan tajam ke angka 37,06, yang mengindikasikan adanya pergeseran orientasi lapangan kerja di masyarakat. Infrastruktur budaya yang tersedia secara masif belum sepenuhnya mampu melakukan penyerapan tenaga kerja sektor kreatif secara optimal pasca-pandemi, sehingga kesejahteraan ekonomi para pelaku seni dan budaya masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih fundamental.

(b) Degradasi Fisik Aset Budaya dan Penurunan Umur Ekonomis Fasilitas Seiring dengan tingginya intensitas pemanfaatan ruang ekspresi, Pemerintah Provinsi menghadapi tantangan besar terkait penurunan kualitas fisik bangunan cagar budaya dan sarana pertunjukan. Banyak fasilitas utama, seperti

sistem elektrikal, mekanik panggung (hidrolik dan tirai), serta sistem pendingin ruangan, telah memasuki masa akhir umur ekonomis material. Kerusakan pada struktur atap dan plafon di gedung-gedung pertunjukan strategis, seperti *Concert Hall*, berisiko menurunkan standar pelayanan publik dan kenyamanan bagi seniman maupun pengunjung.

(c) Tantangan Sinkronisasi Standar Internasional UNESCO dengan Ekonomi Lokal Pasca penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia, muncul tantangan dalam menyelaraskan standar konservasi internasional yang ketat (menjaga *Outstanding Universal Values*) dengan dinamika pembangunan perkotaan dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat lokal. Terdapat risiko terjadinya hambatan administratif dalam pengembangan usaha masyarakat di kawasan cagar budaya jika instrumen pengendalian tidak dibarengi dengan panduan pembangunan yang adaptif.

(d) Kesenjangan Literasi Budaya dan Erosi Nilai pada Generasi Muda Meskipun Dimensi Pendidikan dalam IPK DIY mencapai angka tertinggi (86 poin), keterlibatan aktif generasi muda dalam ekspresi budaya dan literasi naskah kuno masih memerlukan dorongan ekstra. Arus modernisasi yang akseleratif menimbulkan risiko "kepunahan budaya" non-fisik, di mana pemahaman terhadap nilai filosofis, bahasa, dan sastra Jawa kian memudar di kalangan remaja akibat terbatasnya akses digital terhadap arsip-arsip sejarah.

b) Solusi

(a) Reorientasi Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Pemda DIY melakukan mitigasi penurunan ekonomi budaya melalui penyediaan ruang interaksi ekonomi-budaya yang masif, seperti Pasar Kangen yang melibatkan ratusan *tenant* UMKM kuliner dan kerajinan tradisional. Selain itu, status Warisan Dunia UNESCO didorong menjadi aset ekonomi melalui pengelolaan event tematik yang melibatkan Kelompok Kerja Teknis masyarakat, sehingga tercipta ekosistem pariwisata yang memberikan keuntungan finansial langsung bagi warga lokal.

(b) Implementasi Manajemen Pemeliharaan Terpadu dan Kemandirian Energi Guna mengatasi degradasi fisik, dilakukan rehabilitasi arsitektur secara bertahap serta pembaruan sistem mekanikal elektrikal pada gedung-gedung vital. Langkah strategis juga diambil melalui penambahan daya listrik signifikan (seperti di kawasan TBY) untuk memastikan kemandirian energi dari PLN dan efisiensi biaya operasional dengan mengurangi ketergantungan pada mesin genset. Audit struktur secara berkala dan penggunaan material restorasi berdaya tahan tinggi menjadi standar dalam menjaga integritas fisik bangunan.

(c) Pemberdayaan Partisipatif melalui Instrumen Pembangunan Adaptif Sebagai respon atas standar UNESCO, Pemerintah Provinsi mengimplementasikan instrumen *Heritage Impact Assessment* (HIA) dan *Historic Urban Landscape* (HUL). Instrumen ini tidak hanya

berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi sebagai panduan bagi masyarakat dan investor untuk melakukan pembangunan adaptif. Dengan pendampingan tenaga ahli, renovasi fisik di kawasan strategis tetap dapat dilakukan selama selaras dengan nilai-nilai OUV,

(d) sehingga ekonomi lokal tetap tumbuh tanpa merusak integritas warisan dunia.

(e) Akselerasi Digitalisasi Warisan Budaya dan Pendidikan Karakter Untuk menjembatani kesenjangan literasi, dilakukan program bimbingan seni berkelanjutan bagi anak-anak (*Art for Children*) dan penguatan Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ). Secara teknis, dilakukan transformasi arsip analog (seperti pita VHS) ke format digital (MP4) serta penggunaan teknologi Kode QR pada buku-buku seni budaya untuk memudahkan akses riset bagi generasi muda yang terbiasa dengan platform digital.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Urusan Kebudayaan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 program dan 56 subkegiatan terdiri dari belanja APBD, Dana Keistimewaan urusan kebudayaan dan Dana Alokasi Khusus dengan total nilai Pagu sebesar Rp317.171.579.835,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp312.783.193.053,00 (sebesar 98,61%) dengan realisasi fisik mencapai 100%

Tabel 3.135. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2025

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Kebudayaan DIY	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
BIDANG KEBUDAYAAN		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	2964	2964
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	12
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	5

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan			
		Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	19
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	objek	1	1
		Lomba dan Pameran Fotografi Seni Budaya	event	1	1
		Inventarisasi Karya Budaya	event	1	1
		Digitalisasi Arsip dan Dokumentasi Seni Budaya	event	1	1

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan			
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	orang	40	40
		Pameran Seni Rupa Difabel	event	1	1
		Ekspresi Seni Kontemporer Lintas Generasi	event	1	1
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	unit	1	1
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	unit	1	1
		Kajian Koleksi	Kegiatan	2	2
		Konservasi Koleksi	Kegiatan	3	3
		Registrasi, Dokumentasi dan Inventarisasi atau Re-inventarisasi Koleksi	Kegiatan	2	2
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	unit	1	1
		Pameran Temporer	kali	1	1
		Publikasi Museum	kali	1	1
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	unit	1	1
		Pemeliharaan Sanitasi	paket	1	1
		Pemeliharaan Taman	paket	1	1
		Pengecatan Museum	paket	1	1
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	2	2
		Peringatan Peristiwa Bersejarah	event	2	2
		Internalisasi Kesejarahan	event	1	1
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Laporan	7	7

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Even Kesusastraan	event	2	2
		Kompetisi Bahasa dan Sastra	Kali	7	7
		Pawiyatan Jawa	Kali	43	43
		Promosi dan Publikasi Bahasa Sastra	cetak	5	5
		Tindak lanjut Kongres Kebudayaan Jawa III	Kali	1	1
		Temu Karya Sastra	event	2	2
		Penyusunan Buku 100 Tahun Sapto Hudoyo	Buku	1	1
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman			
		Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Museum	3	3
		Wajib Kunjung Museum	peserta	2088	2088
		Lomba Cerdas Cermat Museum	Even	1	1
		Festival Museum	Even	1	1
		Pengembangan Museum	Museum	3	3
		Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
		Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek	15	15
		Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB	Objek	25	25
		Pengkajian WBCB	Dokumen	2	2
		Naskah usulan Penetapan CB	Obyek	10	10
		Penyelamatan WBCB	KCB/Situs	1	1
		Perawatan WBCB	Objek	8	8
		Pendampingan Pemugaran	Kegiatan	1	1
		Pencatatan, inventarisasi, dan penetapan WBTB	Dokumen	1	1
		Festival Jogja Tempo Doeloe	event	1	1
		Perayaan WBTB di Jakarta	event	1	1
		Pemeliharaan WBTB melalui pentas wayang klasik di omah wayang	kali	6	6
		Internalisasi nilai budaya melalui Pentas representasi pembinaan pedalangan	Kab/Kota	5	5
		Festival wayang Wong Gagrak Yogyakarta	Kab/Kota	5	5
		Festival dalang anak dan remaja tingkat DIY dan Pengiriman tingkat nasional	Kab/Kota	5	5
		BKK WBTB	Kalurahan	1	1
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
		Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	11	11
		Rekomendasi Pelestarian WBCB	Dokumen	60	60
		Publikasi Pelestarian WBCB	Kali	3	3
		Pemanfaatan Pengelolaan WBCB	KCB	3	3
		Penelitian WBCB	dokumen	3	3
		Pengawasan dan Pengendalian WBCB	Kawasan/situs CB	5	5

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Jogja Heritage Track	Trip	1160	1160
		Penataan Fasad Malioboro	Unit	5	5
		Penguatan Dewan Kebudayaan	Bulan	12	12
		Pentas Pengembangan Dalang muda	Kali	6	6
		Sosialisasi Tata Nilai Budaya DIY	Kali	0	0
		Perayaan WBTB DIY	Kali	1	1
		JIHF (Jogja International Heritage Festival)	even	1	1
		Perayaan Hari Keris Nasional	even	1	1
		Pameran Keris di Grha Keris dan Workshop Keris	Kali	10	10
		Workshop Wayang	Kali	6	6
		sarasehan pedalangan	Kab/Kota	0	0
		Pencak Silat	even	1	1
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
		Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	1
		Publikasi dan Promosi Nominasi Warisan Budaya Dunia	Kali	8	8
		Pengelolaan Warisan Budaya Dunia	Kegiatan	3	3
		Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia	Dokumen	1	1
		Konsultasi dan Studi Pengelolaan Warisan Budaya Dunia	Event	4	3
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	12	12
		Pemeliharaan	unit	3	3
		Sarpras Perkantoran	unit	4	4
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	19	19
		Gamelan besi	Set	10	11
		Pakaian Seni	Set	4	4
		Peralatan Seni	Set	4	4
		Kajian kemanfaatan hibah sarana dan Prasarana kepada lembaga budaya	Kajian	1	1
		Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen	4	4
		***Monitoring* dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan**			
		Jumlah Laporan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	Laporan	4	4

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Dokumen Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TW I, II, III dan IV	Dokumen	4	4
		Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya			
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen	12	12
		Melbourne Symphony Orchestra	Event	1	1
		Kemitraan	Lembaga	2	2
		Penguatan Dewan Kebudayaan	Bulan	12	12
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya			
		Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	Desa	100	100
		Pendampingan Desa Budaya	Bulan	11	11
		Gelar Potensi Desa Budaya	Hari	4	4
		Pentas Seni Desa Budaya di Bandara YIA	Kalurahan	20	20
		Buletin Kalurahan Budaya	Edisi	1	1
		Kalender Upacara adat kalurahan Budaya	Kali	1	1
		BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya	Kalurahan	4	4
		BKK Desa Mandiri Budaya	Kelurahan	7	7
		BKK Balai Budaya	Kelurahan	2	2
		Pentas Seni Desa Budaya Selasa Wagen	Kali	5	5
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni			
		Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga	7	7
		ARTJOG	Even	1	1
		JAFF, FFD, FFPJ	Even	3	3
		Moekti	Sekolah	2	2
		Pekan Seni Grafis Yogyakarta	Event	1	1
		Pembuatan Film	Film	3	3
		Lomba dan Pameran Lukis DIY-Kyoto	Event	2	2
		Workshop, Lomba dan Pameran Komik	Event	3	3
		Yogyakarta Gamelan Festival	Even	1	1
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	2	2
		Terlaksananya Pengiriman Tim Kesenian DIY	Destinasi	1	1
		Penghargaan Seniman dan Budayawan			
		Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang	41	41

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Gelar Karya Penerima Penghargaan Seniman dan Budayawan	Event	0	0
		Jumlah Penerima Penghargaan seniman dan budayawan	Orang	28	28
		Penerima Penghargaan (apresiasi seni dan budaya anak)	Orang	13	13
		Festival Kebudayaan Yogyakarta			
		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	1	1
		Pawai	Even	1	1
		Pentas	Even	1	1
		Pameran	Even	1	1
		Pasar Seni	Even	1	1
		Kompetisi	Kompetisi	1	1
		Gelar Budaya Yogyakarta			
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	9	9
		Gelar Budaya Catur Sagatra	Event	1	1
		Festival Berjenjang DIY	Event	3	3
		Pekan Budaya Difabel	Event	1	1
		Aubade	Event	1	1
		GSBY	Event	1	1
		Kajian Dampak Penyelenggaraan Festival Berjenjang	Dokumen	1	1
		GBN	Event	1	1
		Jogja Joget	Event	1	1
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah			
		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	5	5
		Pemutakhiran data kebudayaan	Dokumen	1	1
		Publikasi Melalui Pentas Ketoprak	event	4	4
		Publikasi Melalui Dialog Budaya	Kali	4	4
		Publikasi Media Cetak	Tayang	9	9
		Publikasi melalui media elektronik	Tayang	1	1
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi			
		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang	272	272
		Sarasehan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	kali	1	1
		Festival Upacara Adat	event	1	1
		Fasilitasi Penghayat Kepercayaan	Kali	1	1
		Fasilitasi Adat dan Tradisi	kali	5	5
		Cetak Buletin Wening	Kali	1	1
		Penyuluh Penghayat Kepercayaan	Bulan	8	8
		Kajian Partisipasi Masyarakat dalam upacara adat	Dokumen	0	0
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	4	4

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Adat Suran di Kepatihan	Kali	1	1
		Daur Hidup	Kali	1	1
		Lomba Permainan Tradisional	event	1	1
		Festival Bregada	Kali	1	1
		Selendang Sutera			
		Jumlah Laporan Selendang Sutera	Laporan	1	1
		Dialog Budaya	Kali	2	2
		Workshop Seni Budaya	Kali	1	1
		Pentas Seni Budaya Nusantara	Kali	0	0
		Penyelenggaraan Even Penggiat Seni			
		Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	2	2
		Pentas Seni Budaya	Kelompok	233	233
		Pembinaan Sanggar	Kelompok	51	51
		Kajian Dampak Fasilitasi Seni	Dokumen	0	0
		Penguatan Lembaga Pelestari Budaya			
		Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan	2	2
		Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA	Lembaga	2	2
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi			
		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	4	4
		Dukungan prosesi labuhan	Event	2	2
		Penerimaan Gunungan Garebeg	Kali	3	3
		Mubeng Benteng	Kali	1	1
		Dukungan Pembantu Pelestari Lembaga Warisan Budaya	Bulan	11	11
		Penguatan Museum Sobudoyo			
		Pengelolaan Museum Sonobudoyo			
		Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikelola	unit	1	1
		Atraksi Pendukung Koleksi museum	kali	365	365
		Pameran Temporer eksternal museum	kali	0	0
		Pelayanan Museum unit 1	kali	1	1
		Kajian Potensi Ekonomi pertunjukan rutin museum sonobudoyo	dokumen	0	0
		Pengembangan Museum Sonobudoyo			
		Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikembangkan	unit	1	1
		Pemeliharaan sarana dan Prasarana koleksi	jenis	7	7
		Pemeliharaan sarana dan prasarana museum	jenis	8	8
		Promosi dan Pengelolaan koleksi	kegiatan	2	2
		rehab museum sonobudoyo unit II	bangunan	1	1
		Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung museum	Jenis	3	3
		Pengelolaan Taman Budaya			

Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta			
		Pelayanan Penggunaan gedung	event	171	171
		Temu Karya Taman Budaya	event	1	1
		Publikasi Kegiatan Taman Budaya	Kali	21	21
		Bimbingan Seni Anak (AFC)	Kali	28	28
		Pameran Seni Rupa	event	2	2
		Pasar TBY	event	1	1
		Dokumentasi Kegiatan Taman Budaya	Dokumen	30	30
		Pentas Seni	event	4	4
		Sarasehan Seni Budaya	Kali	10	10
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jenis	15	15
		Revitalisasi Seni	event	0	0
		Majalah Seni Mata jendela	edisi	2	2
		Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jenis	3	3
		Buku Seni Budaya	Eksemplar	150	150
		Eksperimentasi Seni	event	0	0
		Rehabilitasi Gedung Concert Hall	Bangunan	1	1
		Kajian Pengelolaan Taman Budaya	Dokumen	0	0

Sumber: Disbud DIY, 2025

q. Urusan Perpustakaan

(1) Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan diselenggarakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan keterukuran dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Sementara itu, pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada urusan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY memiliki sasaran strategis yang tercantum di dalam Renstra 2022–2027, yakni meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan.

Kinerja sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan indikator persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan. Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

Tabel 3.136. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Terhadap Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian s/d 2025 terhadap target RPJMD 2027 (%)
			Target *)	Realisasi	Realisasi (%)			
Indikator Tujuan: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan								
1.	Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip	44.14%	44.15	58.57	132.66	25%	44.25	132,36 (58.57/44.25x100)
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	86.39	86	86.39	100.45	n/a	86.4	99.98 (86.39/86.4x100)
Indikator Sasaran: Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan								
1.	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	59,23	59.24	63.02	106.38	53	59.26	106.34 (63.02/59.26 x100)

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: DPAD, 2026

Indikator Kinerja Tujuan dengan target Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan memiliki dua indikator pendukung, yang pertama adalah Persentase Pemanfaatan Koleksi Pustaka dan Arsip, dan yang kedua Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Realisasi indikator pertama, Persentase Pemanfaatan Koleksi Pustaka dan Arsip tahun 2025 sebesar 58.57% dengan rincian urusan perpustakaan terealisasi sebesar 41.71% dan urusan arsip terealisasi sebesar 16.85%, sedangkan untuk indikator kedua Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat untuk tahun 2025 nilainya belum diumumkan secara resmi oleh Perpusnas dikarenakan adanya perubahan pengukuran sehingga nilai realisasi yang digunakan merupakan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024.

Sasaran pada urusan perpustakaan yaitu Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan dengan indikator Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat. Sumber data untuk mendapatkan realisasi dari indikator sasaran diolah dari statistik pengunjung yang direkap dari hasil pengunjung perpustakaan selama tahun 2025. Menurut data dari Balai Layanan Perpustakaan total kunjungan perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebesar 2.383.252 pemustaka. Sedangkan Total Penduduk DIY menurut Aplikasi Dataku dengan produsen data BPS DIY per 31 Desember 2025 adalah sebesar 3.781.550 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2025 didapat dengan menjumlah kunjungan pemustaka wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi jumlah penduduk pada tahun n dikali 100%, angka realisasi yang diperoleh adalah 63,02%.

Perpustakaan DIY memiliki peran penting dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, DPAD DIY berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat melalui layanan perpustakaan yang inovatif. Layanan fisik dan virtual di DPAD DIY dirancang untuk meningkatkan literasi informasi dan kualitas hidup masyarakat, antara lain:

a) Layanan menetap Unit GTP dan Penggunaan Tempat;
b) Layanan menetap Unit JLC;
c) Layanan menetap Unit RBM;
d) Layanan Pojok Baca;
e) Layanan Perpustakaan Keliling;
f) Layanan Paket Buku;
g) Kunjungan Virtual (*Website* DPAD DIY, Jogja *Library for All*, *Center of Excellence*, Si Yokca, dan Media Sosial);
h) Aplikasi iJogja;
i) Kunjungan pemustaka di perpustakaan Kabupaten/kota di DIY.

Berikut beberapa instrumen pendukung capaian kinerja :

a) Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY menghadirkan akses mudah dan luas ke sumber pengetahuan untuk mendukung literasi, pembelajaran, dan penelitian di era digital. *Website balaiyanpus.jogjaprov.go.id* adalah portal resmi Balai Layanan Perpustakaan (Balai Yanpus) DIY, sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah DPAD DIY, berfungsi sebagai media informasi, promosi, dan layanan untuk masyarakat terkait koleksi, kegiatan, serta fasilitas perpustakaan modern di Grhatama Pustaka, termasuk layanan aduan dan literasi informas.



Gambar 3.52. Tampilan Website Balai Layanan Perpustakaan

Sumber: DPAD DIY, 2026

b) iJogja merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY (DPAD DIY), memungkinkan pengguna meminjam dan membaca ribuan koleksi *ebook* dan *audiobook* secara *online* maupun *offline*, lengkap dengan fitur sosial untuk berinteraksi seperti merekomendasikan buku dan memberi ulasan. iJogja diciptakan sebagai platform literasi digital untuk masyarakat DIY dan sekitarnya yang ingin membaca lebih mudah dan menyenangkan.



Gambar 3.53. Tampilan Aplikasi iJogja

Sumber: DPAD DIY, 2026

c) *Jogja Library For All* merupakan jaringan berbagai perpustakaan di DIY untuk menyediakan akses informasi koleksi perpustakaan secara online bagi masyarakat. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi mobile, maka *Jogja Library for All* saat ini telah mengembangkan *JLA Mobile* yang semakin memudahkan akses bagi masyarakat di manapun dan kapanpun.



Gambar 3.54. Tampilan Jogja Library For All

Sumber: DPAD DIY, 2026

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menyimpan koleksi digital. DPAD DIY menghadapi tantangan dalam mengelola koleksi digital hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Undang-undang mewajibkan penerbit untuk menyerahkan hasil karyanya ke Perpustakaan, namun banyak penerbit yang mulai beralih ke publikasi digital.

(b) Kurangnya ruang simpan karya cetak dan karya rekam. Koleksi deposit yang terus meningkat membuat ruang simpan karya cetak dan karya rekam semakin sempit, banyak koleksi buku tidak berada di rak buku yang seharusnya. Pada tahun 2025, DPAD DIY menerima sekitar

9.080 eksemplar koleksi baru dari penerbit, sebagai implementasi Undang-Undang SSKCKR. Namun, luas ruangan yang tersedia sangat terbatas, sehingga membuat pengelolaan koleksi deposit menjadi masalah besar.

(c) Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan dan tenaga bantu layanan di Perpustakaan. Balai layanan perpustakaan mempunyai banyak layanan perpustakaan diantaranya; Layanan Digital, Layanan Bermain Anak, Ruang Musik Anak, Ruang Koleksi Langka, Ruang Koleksi Referensi dan masih banyak lagi, namun karena keterbatasan tenaga pengelola perpustakaan dan tenaga bantu layanan perpustakaan, layanan yang ada tidak bisa dibuka sepenuhnya. Beberapa layanan hanya dibuka dari Senin sampai Sabtu, beberapa lainnya hanya buka sampai Jumat, dan ada layanan yang tutup setiap hari seperti Layanan *Drive Thru* dan Layanan *Delivery Order*.

(d) Kurangnya jangkauan bahan bacaan dan literasi membaca pada kelompok rentan.

b) Solusi

(a) Tersedianya sarana dan prasarana berbasis TIK yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mendayagunakan bahan pustaka berbentuk digital. Dengan adanya infrastruktur digital yang baik, Perpustakaan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

(b) Perpustakaan deposit memiliki Gedung sendiri, yang digunakan untuk menyimpan koleksi deposit. Gedung Perpustakaan Deposit DIY

memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi "Rumah Pengetahuan" masyarakat DIY. Sebagai tempat penyimpanan koleksi deposit, gedung ini menyimpan catatan kemajuan peradaban masyarakat DIY melalui terbitan-terbitan buku yang ada di wilayah ini.

(c) DPAD DIY melalui Balai Layanan Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai universitas dengan merekrut mahasiswa magang, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan layanan di perpustakaan Ghratama Pustaka, *Jogja Library Center* dan Rumah Belajar Modern.

(d) Memperluas akses bacaan, menyediakan bacaan relevan dan beragam (termasuk digital/audio), menciptakan lingkungan suportif, memanfaatkan teknologi, serta mengadakan kegiatan literasi kreatif yang melibatkan komunitas dan teladan, agar membaca terasa menyenangkan, mudah dijangkau, dan bermakna bagi mereka.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Tabel 3.137. Capaian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Target	Satuan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
			Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten			
			Subkegiatan Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya			
			Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya (DPA SIPD)	18500	Unit	32894
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Target	Satuan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya (DPA SIPD)	1	perpustakaan	1
			Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi			
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan (DPA SIPD)	100	Eksemplar	100
			Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (DPA SIPD)	8	perpustakaan	8
			Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (DPA SIPD)	50	orang	50
			Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit			
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan (DPA SIPD)	1	perpustakaan	1
			Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (DPA SIPD)	400	eksemplar	884
			Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi			
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi	5	Perpustakaan	5

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Target	Satuan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan (DPA SIPD)			
			Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (DPA SIPD)	6	lokus	6
			Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (DPA SIPD)	9	orang	9
			Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (DPA SIPD)	8	perpustakaan	8
			Subkegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (DPA SIPD)	1	Layanan	1
			Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (DPA SIPD)	1	Perpustakaan	1
			Subkegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (DPA SIPD)	1	Perpustakaan	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Target	Satuan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (DPA SIPD)	500	eksemplar	8.019
			Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			
			Subkegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah			
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	500	Entry	17311
			Subkegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah			
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1	Naskah	1
			Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (DPA SIPD)	50	Orang	50
			Subkegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (DPA SIPD)	10	Eksemplar	10
			Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	4	eksemplar	36

Sumber:DPAD DIY, 2025

r. Urusan Kearsipan

(1) Kondisi Umum

Kearsipan merupakan aspek penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. DPAD DIY bertanggung jawab atas pengelolaan arsip di wilayah DIY. Tujuan utama kearsipan adalah untuk menyimpan, memelihara, dan menyediakan akses ke arsip yang bernilai guna.

DPAD DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, antara lain:

a) Pengembangan sistem manajemen arsip digital;
b) Pelatihan dan sosialisasi kearsipan bagi OPD/BUMD;
c) Pemeliharaan dan perawatan arsip secara teratur.

Tujuan kinerja DPAD DIY yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan dengan indikator pertamanya adalah Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip, dan indikator kedua Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan. Sasaran kinerja pada urusan kearsipan yaitu Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dengan indikatornya yaitu Tingkat ketersediaan arsip. Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY angka tingkat ketersediaan arsip menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sistem manajemen arsip yang efektif telah membantu meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan arsip bagi masyarakat. Tingkat ketersediaan arsip bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.138. Tingkat Ketersediaan Arsip 2025

No	Uraian	Rumus Perhitungan		Jumlah		Persentase
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a)	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Arsip aktif	x100%	5068 5068	x100%	100%

No	Uraian	Rumus Perhitungan		Jumlah		Persentase
2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i)	Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip / Arsip Inaktif	x100%	2820 / 3326	x100%	84,78%
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)	Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik / Arsip Statis	x100%	5431 / 11249	x100%	48,27%
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN / Arsip Dinamis dan arsip Statis	x100%	44990 / 85679	x100%	52,50%
JUMLAH		**T = (a+i+s+j)/4**		**285,55%**		**71,39%**

Sumber: DPAD DIY, 2026

Tabel 3.139. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Terhadap Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Akhir Penyelarasan	Capaian s/d 2025 terhadap target RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Realisasi	Realisasi (%)			
Indikator Tujuan: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan								
1.	Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip	44.14%	44.15	58.57	132.66	25%	44.25	132,36 (58.57/44.25x100)
2.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	86.39	86	86.39	100.45	n/a	86.4	99.98 (86.39/86.4x100)
Indikator Sasaran: Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi								
1.	Tingkat ketersediaan arsip	70.01	70.03	71.39	101.94	53	70.07	101.88 (71.39/70.07 x100)

**) Target Penyelarasan Kinerja 2025*
Sumber: DPAD, 2026

Tolok ukur ketercapaian sasaran urusan kearsipan diukur dengan satu indikator yaitu Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi, dengan rincian sebagai berikut:

a) Ketercapaian indikator tujuan yang pertama, Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip pada tahun 2025 terealisasi sebesar 132,66% terhadap target. Indikator kedua merupakan indikator yang ditambah saat penyelarasan target kinerja OPD, pada urusan kearsipan ditambahkan

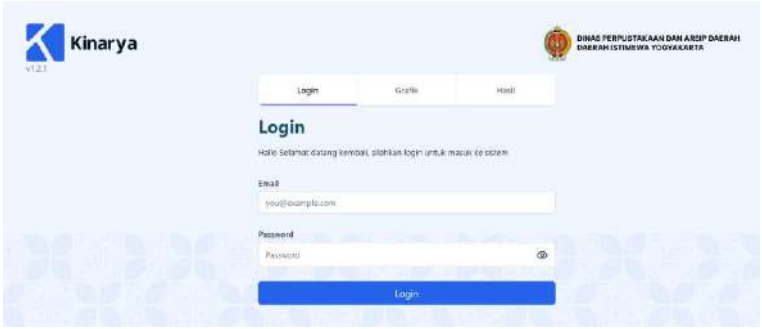
Nilai Hasil Pengawasan Arsip, yang mana pada tahun 2025 DIY mendapatkan nilai 86,39 dari ANRI, sehingga persentase terhadap target penyelerasan sebesar 100,45%.

b) Capaian indikator sasaran tahun 2025 sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 71,39% dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 101,94% (terlampaui).

Berikut beberapa instrumen pendukung capaian kinerja:

a) DPAD DIY DPAD DIY telah mengembangkan aplikasi Kinarya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan di wilayah DIY. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses pembinaan kearsipan di OPD dan UPTD pemda DIY, serta memenuhi amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

   Kinarya telah mengintegrasikan instrumen pembinaan dari ANRI dan membantu pengolahan data, penilaian pengelolaan kearsipan, serta validasi data. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kearsipan instansi, serta menghasilkan profil pemeringkatan nilai pelaksanaan pengelolaan kearsipan yang lebih akurat.



b) DPAD DIY juga sudah melaksanakan Pameran Arsip. Pameran Kearsipan telah mulai dilaksanakan bulan Agustus dan November. Terdapat 2 tema pameran, yakni Karyaku Hartaku dan Yogyakarta Menyambut Dunia: Konferensi Colombo Plan XI Tahun 1959. Publikasi terkait kegiatan pameran kearsipan ini dilakukan secara *offline* maupun *online*. Secara *offline* antara lain melalui spanduk dan *booklet* sedangkan secara *online* dengan memanfaatkan media-media sosial.



Gambar 3.55. Pameran Kearsipan Tahun 2025

Sumber: DPAD DIY, 2026

c) Pada tahun 2025 ini, DPAD DIY juga mengajukan Arsip Arsip Konferensi Colombo Plan XI Tahun 1959 di Yogyakarta dan Arsip Kawasan Kotabaru Yogyakarta 1925–2025 sebagai Memori Kolektif Bangsa. Memori kolektif bangsa adalah warisan budaya dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencakup pengalaman, nilai, dan pengetahuan yang membentuk identitas suatu bangsa. Memori kolektif ini dapat berupa tradisi, bahasa, seni, sejarah, dan dokumen-dokumen penting yang menjadi bagian dari identitas bangsa.



Gambar 3.56. Sertifikat Memori Kolektif Bangsa

Sumber: DPAD DIY, 2026

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Perlunya perbaikan Ruang Depo Arsip. Untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perka ANRI Nomor 31 Tahun 2015, ruang depo arsip di DPAD DIY masih perlu perbaikan dan penyesuaian sarana-prasarana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arsip yang tersimpan dapat terjaga keutuhannya dan aman dari kerusakan.

(b) Kurangnya bahan baku dan tenaga pengolah arsip. DPAD DIY menghadapi tantangan dalam mengelola arsip bersejarah. Banyak arsip yang belum terolah, baik yang disimpan di DPAD DIY maupun yang berada di bawah kewenangan DPAD DIY, seperti Kraton dan Puro. Jika arsip tidak diolah dalam waktu lama, maka kertas dokumen akan cepat menguning dan rusak, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat hilang.

(c) Belum mempunyai alat alih media untuk arsip film lama/bersejarah. DPAD DIY memiliki koleksi arsip yang beragam, tidak hanya berupa dokumen/foto, tetapi juga pita magnetik film roll

yang berisi rekaman sejarah penting. Namun, karena belum memiliki alat untuk mengalihmediakan film di dalam pita magnetik tersebut, arsip film belum bisa dilayankan. Hal ini berarti bahwa isi rekaman tersebut berisiko hilang atau rusak jika tidak diolah dan dialihmediakan ke format yang lebih modern dan tahan lama.

(d) Kurangnya sarana penyimpanan arsip digital. Karena banyaknya arsip yang diolah dan dialihmediakan membuat sarana penyimpanan penuh, sehingga memerlukan lebih banyak lagi wadah untuk penyimpanan arsip.

b) Solusi

(a) Perlunya *epoxy* lantai ruang penyimpanan arsip dan pemenuhan sarana *dehumidifier*. Menurut Perka ANRI Nomor 31 Tahun 2015, lantai ruang penyimanan arsip harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak berpori, ruangan harus terjaga suhu dan kelembapannya.

(b) Pemenuhan bahan baku dan sumber daya manusia untuk melakukan preservasi arsip agar arsip terolah dan terawat dengan baik.

(c) Meminta bantuan dengan mengirimkan arsip pita *magnetik film roll* ke Kemendikbud yang mempunyai alat untuk alih media arsip film.

(d) Penyediaan *harddisk* eksternal yang memadai setiap tahunnya agar proses alih media berjalan dengan baik.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Tabel 3.140. Capaian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	UraianProgram/ Kegiatan/ Indikator	Target	Satuan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
			Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten			
			Subkegiatan Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten			
			Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten (DPA SIP)	17000	Dokumen	33482
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			
			Subkegiatan Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi			
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (DPA SIPD)	37	Lembaga	41
			Subkegiatan Penyusutan Arsip Dinamis			
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (DPA SIPD)	4.000	arsip	4.194
			Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Akuisisi Arsip Statis			
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (DPA SIPD)	20.000	arsip	34.390
			Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			
			Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (DPA SIPD)	750	pengguna	125.251
			Subkegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (DPA SIPD)	2	Laporan	2

Sumber: DPAD DIY, 2025

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Kondisi Umum

Produksi perikanan di DIY pada tahun 2025 berasal dari dua kegiatan utama, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kedua kegiatan ini memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan berbasis protein ikan, penguatan ekonomi masyarakat perikanan, serta kontribusinya terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

Pada tahun 2025, berdasarkan data Produksi Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2025, produksi perikanan tangkap di DIY mencapai 1.976,09 ton dengan nilai produksi sebesar Rp56.030.720.796. Hasil perikanan tangkap tersebut sebagian besar diperoleh dari perairan daratan seperti sungai, waduk, embung, dan berbagai genangan air lainnya. Keterbatasan wilayah perairan laut menjadikan perairan daratan sebagai salah satu sumber produksi yang penting dalam menopang subsektor perikanan tangkap di DIY.

Ditinjau dari jenis komoditasnya, produksi perikanan tangkap perairan daratan menunjukkan variasi yang cukup beragam. Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi produksi relatif besar antara lain ikan tongkol dengan produksi sebesar 932,34 ton, ikan layur sebesar 806,42 ton, ikan manyung sebesar 480,43 ton, ikan layang benggol sebesar 437,54 ton, ikan kembung sebesar 346,16 ton, serta ikan cakalang sebesar 326,49 ton. Terdapat juga ikan lidah dengan produksi sebesar 264,60 ton ikan belanak sebesar 139,75 ton dan tuna sebesar 137,71 ton. Adapun terdapat ikan jenis lainnya sebesar 1.809,87 ton. Selain komoditas tersebut, masih terdapat berbagai jenis ikan air tawar lainnya seperti tawes, nila, sidat, keting, mas, lele, gabus, jelawat, mujair dan

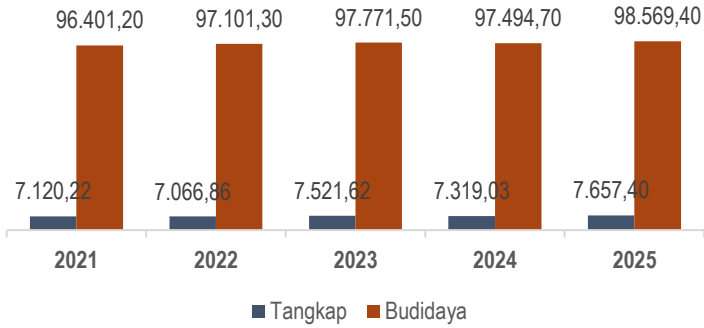
jenis ikan lokal lainnya yang turut menyumbang terhadap total produksi perikanan tangkap, meskipun dengan volume yang lebih terbatas. Kondisi ini menggambarkan potensi sumber daya perairan daratan yang masih cukup beragam dan berperan penting dalam kegiatan perikanan tangkap di DIY.

Sementara itu, subsektor perikanan budidaya tetap menjadi kontributor utama produksi perikanan di DIY pada tahun 2025. Total produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 98.569,40 ton, yang telah melampaui target produksi sebesar 97.813,00 ton. Dengan capaian tersebut, tingkat realisasi produksi perikanan budidaya mencapai 100,77%, menunjukkan kinerja subsektor budidaya yang cukup optimal.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 masih didominasi oleh komoditas ikan air tawar. Ikan lele menjadi komoditas dengan produksi tertinggi, yaitu sebesar 48.002,22 ton, diikuti oleh ikan nila dengan produksi mencapai 34.387,52 ton. Tingginya produksi kedua komoditas tersebut didukung oleh kemudahan teknologi budidaya, waktu pemeliharaan yang relatif singkat, serta permintaan pasar yang cenderung stabil. Selain itu, komoditas lain seperti gurame dengan produksi sebesar 6.238,81 ton, bawal air tawar sebesar 4.531,18 ton, udang galah sebesar 3.697,51 ton, serta udang vaname sebesar 579,88 ton juga memberikan kontribusi yang cukup berarti. di samping itu, ikan mas, patin, tawes, dan gabus tetap dibudidayakan oleh masyarakat meskipun volume produksinya relatif lebih kecil.

Secara umum, struktur produksi perikanan di DIY pada tahun 2025 menunjukkan dominasi subsektor perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan daerah, sedangkan perikanan tangkap, khususnya yang bersumber dari perairan daratan, berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penyedia

keragaman komoditas. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, diiringi dengan pengelolaan perairan daratan yang lestari agar tetap mampu mendukung kegiatan perikanan tangkap. Melalui penguatan kedua subsektor tersebut secara seimbang, diharapkan sektor perikanan dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan perekonomian DIY.



Gambar 3.57. Grafik Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2021–2025 (dalam ton)

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2026

Tabel 3.141. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Baseline 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor perikanan yang berkelanjutan	Indikator: Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) Meta Indikator: Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) dari BPS	Juta Rupiah	349.603	368.122	371.350	371.350	100	Sangat Baik	378.714
a	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Indikator: Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap Meta Indikator: Nilai produksi perikanan budidaya	Juta Rupiah	2.715.387	2.745.013	2.421.104	2.735.686	112,99	Sangat Baik	2.329.580

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Baseline 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan tangkap dalam juta rupiah merupakan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap dikalikan dengan harga ikan								
b	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Indikator: Kategori reformasi birokrasi OPD Meta Indikator: Kategori reformasi birokrasi OPD (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Predikat	A	A	A	A	100	Sangat Baik	A
2.	Terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan	Indikator: Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor) Meta Indikator: Nilai akhir evaluasi pada kriteria input, proses, output dan outcome Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor)	skor	32,6	58,76	46,39	61,62	132,83	Sangat Baik	51,27
a.	Meningkatnya status pengelolaan kawasan konservasi perairan	Indikator: Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha) Meta Indikator: Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (%): 1. Kabupaten Bantul: 695,90 Ha 2. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul: 5.670,87 Ha 3. Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo: 5.822,92 Ha	ha	695,9	5.670,87	5.822,92	5.822,92	100	Sangat Baik	5.822,92
3.	Meningkatnya aktivitas perekonomian perikanan budidaya di lokasi prioritas	Indikator: Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin (juta rupiah/tahun) Meta Indikator:	Juta Rupiah/ Tahun	n/a	39,6	37	38,6	104,32	Sangat Baik	36

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Baseline 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	penanggulangan kemiskinan	Jumlah pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin dalam 1 tahun								
a.	Meningkatnya nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin	Indikator: Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (dalam juta rupiah/tahun) Meta Indikator: Total produksi perikanan budidaya kelompok miskin dikalikan harga jual	Juta Rupiah/ Tahun	n/a	198	186	193	103,76	Sangat Baik	180

Sumber: Dislautkan DIY, 2026

Tabel 3.142. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2025 Capaian Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Target Penyelarasan Tahun 2027	Persentase Capaian Tahun 2025 terhadap Akhir RPJMD (2027)
				Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor perikanan yang berkelanjutan									
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	Juta Rupiah	368.122	371.350	371.350	100%	378.714	378.714	98,05
2	Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor)	skor	58,76	46,39	61,62	132,83	51,27	51,27	90,48
3	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin (juta rupiah/tahun)	Juta Rupiah	39,6	37	38,6	104,32	36	39	102,77
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap	Juta Rupiah	.745.013	.421.104	.735.686	112,99	.329.580	2.669.267	103,92

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Target Penyelarasan Tahun 2027	Persentase Capaian Tahun 2025 terhadap Akhir RPJMD (2027)
				Target*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
2	Kategori reformasi birokrasi OPD	Predikat	A	A	A	100%	A	A	100%
3	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (ha)	ha	5.670,87	5.822,92	5.822,92	100%	5.822,92	5.822,92	100%
4	Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (dalam juta rupiah/tahun)	Juta Rupiah	198	186	193	03,76%	180	188	103,33

**) Target penyelarasan kinerja Tahun 2025*
Sumber: Dislautkan DIY, 2026

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di DIY pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY berdasarkan harga konstan yang terealisasi sebesar 371.350 juta rupiah, mencapai target 100% dari yang telah ditetapkan. Capaian positif ini selaras dengan nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap yang menyentuh angka 2.735.686 juta rupiah, atau melampaui target tahunan sebesar 112,99%. Keberhasilan ini didorong oleh tingginya antusiasme nelayan dan pembudidaya, dukungan fasilitasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, serta penerapan inovasi budidaya lele sistem kocor yang terbukti mampu mendongkrak volume produksi dan omzet. Selain itu, stabilitas harga yang terjaga akibat permintaan pasar yang konsisten serta keberhasilan pengendalian hama penyakit menjadi faktor kunci dalam menjaga tren positif tersebut. di sisi manajerial, tata kelola pemerintahan juga menunjukkan kualitas yang sangat baik dengan raihan Predikat A pada evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah.

Dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah DIY secara konsisten melakukan intervensi strategis melalui pemberian hibah sarana dan prasarana perikanan bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Program ini telah membuahkan hasil nyata, di mana nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin pada tahun 2025 terealisasi sebesar 193 juta rupiah dari target 186 juta rupiah. Dampak langsung dari kegiatan ini adalah meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin menjadi 38,6 juta rupiah per tahun, atau mencapai 104,32% dari target. Keberhasilan program yang dilaksanakan di berbagai titik lokasi prioritas seperti Bantul dan Gunungkidul ini tidak lepas dari minat masyarakat yang tinggi, ketersediaan input produksi yang berkualitas, serta pembinaan dan pendampingan intensif yang dilakukan oleh dinas terkait beserta pemangku kepentingan lainnya.

Pada aspek kelestarian lingkungan, upaya perlindungan ekosistem perairan menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan sesuai regulasi RZWP3K mencapai 5.822,92 hektare. Luas ini mencakup wilayah perairan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, yang telah memenuhi target akhir periode RPJMD secara penuh. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut juga mencatatkan skor yang melampaui ekspektasi, yakni sebesar 61,62 atau 132,83% dari target. Faktor-faktor seperti kesiapan data, kompetensi sumber daya manusia pengelola, komitmen pimpinan, serta dukungan anggaran yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pilar utama keberhasilan ini. Selain itu, tumbuhnya kesadaran masyarakat pesisir dalam melindungi alam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan di DIY dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025, terdapat beberapa kendala strategis yang menjadi perhatian utama, antara lain:

a) Belum optimalnya operasionalisasi pelabuhan perikanan akibat keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang tersedia.
b) Tingginya biaya produksi pada sektor budidaya yang dipicu oleh kenaikan harga pakan pabrikan.
c) Ketersediaan lahan budidaya yang semakin terbatas sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan populasi dan alih fungsi lahan.
d) Kendala dalam penyerapan hasil panen di pasar domestik, khususnya bagi para pelaku usaha perikanan pemula atau baru.
e) Rendahnya laju regenerasi sumber daya manusia pada sektor perikanan tangkap serta kurangnya partisipasi generasi muda sebagai penggiat konservasi.
f) Ancaman terhadap ekosistem perairan darat akibat maraknya peredaran jenis ikan invasif yang mengakibatkan penurunan populasi ikan lokal secara signifikan.Rendahnya tingkat konsumsi ikan yang dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat serta masih terbatasnya edukasi mengenai manfaat ikan sebagai sumber protein dan gizi.
g) Beredarnya ikan invasif yang dilarang di perairan darat DIY yang menyebabkan populasi ikan lokal menurun;

(2) Solusi

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan langkah-langkah solutif sebagai berikut:

a) Mengintensifkan koordinasi dan advokasi dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat skema pendanaan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
b) Mengalokasikan anggaran strategis untuk program pelatihan pembuatan pakan mandiri serta sosialisasi teknologi budidaya yang mampu menciptakan efisiensi penggunaan pakan pabrikan bagi para pembudidaya.
c) Mengembangkan dan mengupayakan penerapan teknologi budidaya tepat guna yang lebih efektif dan efisien, terutama untuk pemanfaatan lahan sempit atau terbatas melalui Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya.
d) Membangun dan memperluas jejaring pemasaran dengan mengintegrasikan pedagang besar di wilayah DIY guna menjamin kepastian penyerapan hasil panen serta memotong rantai distribusi agar lebih dekat dengan konsumen akhir.
e) Melaksanakan program kaderisasi nelayan dan penggiat konservasi secara sistematis bagi masyarakat pesisir selatan guna menjamin keberlanjutan sektor kelautan di masa depan.
f) Memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan hukum melalui kolaborasi antara Pengawas Perikanan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) wilayah Yogyakarta, serta Balai Karantina Indonesia terhadap kepemilikan dan perdagangan ikan invasif.

Langkah ini dibarengi dengan sosialisasi masif mengenai dampak ekologis dari introduksi spesies asing di perairan lokal.Peningkatan konsumsi ikan dilakukan melalui penguatan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) yang terintegrasi dengan pelatihan pengolahan hasil perikanan, termasuk pemanfaatan hati ikan, sebagai upaya diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Tabel 3.143. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi perikanan tangkap	7.341 ton	7.657,4 ton	104,3
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan	82	82	100
	1.1. PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT				
	1.1.1. Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran di atas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)	10 Rekomen-dasi	10 Rekomen-dasi	100
	1.2. PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT				
	1.2.1. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan	1 Rekomen-dasi	1 Rekomen-dasi	100

Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	(BKP) yang Diterbitkan			
	1.3. PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI				
	1.3.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	9 Unit	9 Unit	100
	1.3.2. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	11 Layanan	11 Layanan	100
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan budidaya	97.813 ton	98.569,4 ton	100,77
		produksi perikanan budidaya di kelompok miskin	9 ton	9,65 ton	107,2
		Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	35,02%	36,1%	102,56
	2.1. PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
	2.1.1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 rekomen-dasi	2 rekomen-dasi	100
	2.2. PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT				
	2.2.2. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan	1 unit	1 unit	100

Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	2.2.1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 unit	7 unit	100
	2.3. PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT				
	2.3.1. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase desa maritim dalam tahap mandiri	35%	38,24%	109,25
		Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100
		Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	60%	61,14%	101,9
		Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	48%	51,11%	106,48

Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	3.1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				
	3.1.1. Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	4 objek	4 objek	100
	3.2. SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN				
	3.2.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	4 unit	4 unit	100
4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Tingkat konsumsi ikan masyarakat	34,87 kg/kap /tahun	36,03 kg/kap /tahun	103,336
	4.1. PENERBITAN IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
	4.1.1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Rekomen-dasi	2 Rekomen-dasi	100
	4.2. PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR				
	4.2.1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantaun, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		pemberdayan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko			
	4.2.2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
	4.3. PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
	4.3.1. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	100
5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA		Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya	76,00%	91,65%	121,917

Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
KELAUTAN DAN PERIKANAN		Kelautan dan Perikanan			
	5.1. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL				
	5.1.1 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100
	5.1.2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3 Kelompok	3 Kelompok	100
	5.1.3 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5.2. PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
	5.2.1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	100

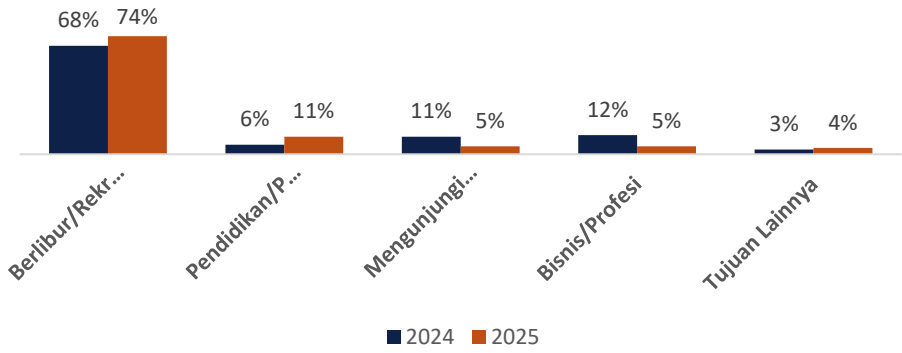
Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		sesuai kewenangan provinsi			
	5.2.2. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola	76,00%	88,46%	116,39%
	6.1. PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI				
	6.1.1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	5.822,92 Ha	5.822,92 H	100
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan	70%	70%	100
	7.1. PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN				
	7.1.1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2025

2) Urusan Pariwisata

a. Kondisi Umum

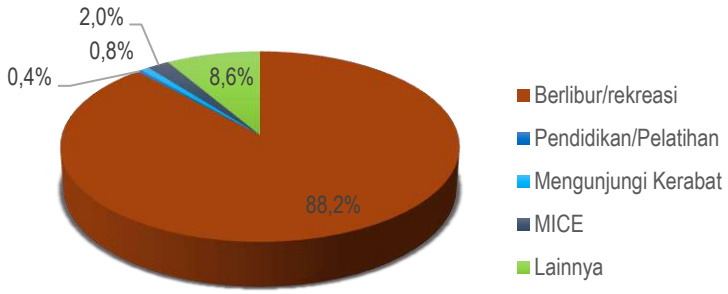
Pada tahun 2025 wisatawan nusantara yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan di DIY sebesar 7.884.252 wisatawan. Berdasarkan survei yang dilakukan pada Kanjian Analisis Belanja Wisatawan Tahun 2025, sebagian besar wisatawan nusantara mengunjungi DIY bertujuan untuk berlibur/rekreasi sebesar 74%. Aktivitas wisatawan nusantara untuk mengunjungi DIY pada tahun 2025 memiliki perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Sebagian besar wisatawan nusantara yang datang ke DIY bertujuan untuk berlibur/rekreasi sebesar 74% meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 68%. Kunjungan untuk pendidikan/pelatihan juga meningkat signifikan pada tahun 2025 yang mencapai 11%. Wisatawan dengan tujuan pekerjaan atau bisnis mengalami penurunan pada tahun 2025 yang hanya mencapai 5%, sedangkan di tahun 2024 mencapai 12%. Kondisi tersebut juga menjelaskan implikasi dari pengurangan kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan MICE di akomodasi DIY yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah.



Gambar 3.58. Minat Wisatawan Nusantara Mengunjungi DIY Tahun 2024 dan 2025

Sumber: Kajian Analisis Belanja Wisatawan 2024 dan 2025, Dinas Pariwisata DIY, 2024 dan 2025

Jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di akomodasi/penginapan pada tahun 2025 mencapai 264.343 wisatawan. Wisatawan mancanegara datang ke DIY juga bertujuan untuk berlibur/rekreasi. Sebanyak 88% responden wisatawan mancanegara memilih DIY untuk tujuan liburan dan rekreasi, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun 2024.



Gambar 3.59. Minat Wisatawan Mancanegara Mengunjungi DIY Tahun 2025

Sumber: Kajian Analisis Belanja Wisatawan 2025, Dinas Pariwisata DIY, 2025

Minat wisatawan mancanegara mengunjungi DIY pada tahun 2025 juga tidak berbeda dengan minat wisatawan nusantara mengunjungi DIY. Minat wisatawan mancanegara mengunjungi DIY tertinggi adalah untuk berlibur/rekreasi sebesar 88%. Tiga destinasi utama yang menjadi preferensi wisatawan mancanegara adalah Candi Borobudur, Candi Borobudur dan Kawasan Kraton Yogyakarta–Malioboro (*Sumber: Analisis Belanja Wisatawan 2025–Dinas Pariwisata DIY*). Selain tiga destinasi tersebut, wisatawan mancanegara juga juga memilih aktivitas wisata alam yang ada di pantai selatan DIY dan kawasan gunung Merapi.

Indikator kinerja Urusan Pariwisata di Pemda DIY dibagi menjadi lima sasaran yaitu, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara, rata-rata belanja wisatawan nusantara, rata-rata belanja

wisatawan mancanegara dan kategori reformasi birokrasi OPD. Kelima indikator tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di DIY. Berikut ini capaian kinerja Urusan Pariwisata Pada Tahun 2025.

Tabel 3.144. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2025 serta Terhadap Target Akhir RPJMD DIY (2027)

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2027)	Target Penyela-rasan 2027	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027(%)
			Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Tujuan								
1	Manfaat ekonomi (Total Yield) dari sektor pariwisata	19.031.132 .368.860	20.000.000 .000.000	22.120.840 .909.300	110,60	31 T	31 T	71,4
Indikator Sasaran								
1	Rata-rata Lama tinggal wisatawan mancanegara	2,18	2,52	2,17	86,11	2,60	2,60	83,46
2	Rata-rata Lama tinggal wisatawan nusantara	1,50	1,57	1,55	98,73	1,76	1,76	88,07
3	Rata-rata belanja wisatawan mancanegara	$558	$600	$595,1	99,18	$700	$700	85,01
4	Rata-rata belanja wisatawan mancanegara	2.372.334	2.500.000	2.500.335	100,01	2.800.000	2.800.000	89,30

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2026

(1) Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan: Tercapainya peningkatan manfaat ekonomi *(Total Yield)* terhadap peningkatan perekonomian daerah

Indikator kinerja tujuan Dinas Pariwisata DIY diukur dengan indikator manfaat ekonomi (*Total Yield*) pariwisata yang berasal dari wisatawan nusantara dan mancanegara. Capaian indaikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 sasaran, yakni: Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan, Meningkatnya Jumlah Belanja Wisatawan, dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; Target capaian indikator tujuan manfaat

ekonomi (*Total Yield*) pariwisata tahun 2025 sebesar Rp20.000.000.000.000 capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar Rp22.120.840.909.300, dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) sebesar 110,60%.

(2) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran:

a) Meningkatnya Rata-rata Lama tinggal wisatawan
b) Meningkatnya jumlah belanja wisatawan

Target capaian indikator sasaran rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2025 sebesar 2,52 hari capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 2,17 hari, dengan demikian capaian ini tidak melampaui target. Persentase realisasi terhadap target sebesar 86,11%. Target capaian indikator sasaran rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara tahun 2025 sebesar 1,57 hari capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 1,55 hari, dengan demikian capaian ini tidak melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) sebesar 98,73%.

Target capaian indikator sasaran rata-rata belanja wisatawan mancanegara tahun 2025 sebesar $600. Capaian tahun 2024 sebesar $595,1. Berdasarkan hasil tersebut, tercapai 99,18% dari yang ditargetkan. Target capaian indikator sasaran rata-rata belanja wisatawan mancanegara tahun 2025 sebesar Rp2.500.000. Capaian tahun 2025 sebesar Rp2.500.353. Berdasarkan hasil tersebut telah tercapai 100,01% dari yang ditargetkan.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Berdasarkan hasil kajian Analisis Belanja Wisatawan, dihasilkan kritik dan saran dari wisatawan nusantara dan mancanegara pada kajian tersebut. Sebagian besar kritik dan saran dari wisatawan nusantara dan mancanegara terhadap aktivitas pariwisata di DIY yaitu mengenai kebersihan dan mengenai sampah. Sebanyak 59,1% responden dari wisatawan nusantara dan 63,8% responden dari wisatawan mancanegara memberikan kritik dan saran terhadap persoalan kebersihan lingkungan di destinasi wisata maupun di lokasi sekitar mereka menginap. Permasalahan sampah, bau tidak sedap hingga kebersihan fasilitas menjadi perhatian khusus bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Kondisi kebersihan juga akan menjadi kendala terhadap peningkatan lama tinggal wisatawan, karena kenyamanan wisatawan juga turut mempengaruhi lama tinggal wisatawan yang datang ke DIY.

(2) Solusi

a) Pada tahun 2025 Dinas Pariwisata DIY telah melakukan upaya meskipun untuk masalah kebersihan dibutuhkan waktu serta sumber daya dan upaya yang cukup besar di masa depan, di antaranya yaitu:
   (a) Melakukan sosialisasi CHSE di desa wisata sebanyak 46 lokasi. Kegiatan ini juga menekankan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penerapan CHSE (kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan). Materi sosialisasi juga dijelaskan mengenai penerapan kebersihan

seperti penyediaan kebersihan seperti tempat cuci tangan, pembersihan fasilitas secara teratur, kebersihan toilet, penyediaan tempat sampah pilah, pengelolaan sampah dan limbah cair yang aman dan ramah lingkungan, serta penggunaan perlengkapan yang ramah lingkungan (non plastik).

(b) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha jasa pariwisata, sebanyak 50 lokasi. Kegiatan ini bertujuan agara pelaku wisata dapat menerapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Peraturan tersebut juga memperhatikan aspek kebersihan di dalam pengelolaan usaha pariwisata yang menjadi materi pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pariwisata di DIY.

(c) Melakukan penyusunan inventarisasi destinasi wisata. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui sarana prasarana dan infrastruktur pendukung yang tersedia di destinasi wisata. Jumlah obyek wisata yang telah terinventarisir sebanyak 405 lokasi, dengan rincian wisata alam 215 lokasi, wisata sejarah 86 lokasi, taman rekreasi 79 lokasi, dan wisata budaya 25 lokasi. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah melihat dan mendata destinasi termasuk mengenai sarana pendukung kebersihan dan persampahan. Ketersediaan tempat sampah dan sarana pengelolaan sampah juga dilakukan pendataan pada kegiatan ini.

(d) Menyusun perencanaan program/kegiatan tahun 2026 untuk menyelesaikan masalah kebersihan lingkungan di destinasi wisata yaitu dengan Sosialisasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Pelatihan Pengelolaan sampah di DTW, Bimtek *Food dan Beverage* Tradisional dan bersih, Pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Pariwisata dan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Destinasi Wisata

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 7 Program dan 19 kegiatan, serta terdiri dari 44 Subkegiatan dengan total anggaran Rp25.883.976.784,00. Alokasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp25.142.224.784,00 dan Belanja Modal sebesar Rp741.752.000,00. Secara keseluruhan Realisasi Keuangan 2025 sebesar Rp24.943.796.426,00 (96,37%), yang terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp24.226.718.646,00 (96,36%) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp717.077.780,00 (96,37%). Realisasi fisik tahun 2025 adalah 100%.

Tabel 3.145. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2025

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PARIWISATA DIY	1. Pengembangan dan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata 2. Peningkatan Daya Saing Industri Pariwisata 3. Pelaksanaan atraksi wisata budaya sebagai ragam daya tarik pariwisata, meningkatkan pelayanan bagi usaha ekonomi kreatif dan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (DPA SIPD)	dokumen	1	1
			Jelajah Ruang Menoreh	dokumen laporan	1	1
URUSAN PEMERINTAHAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		meningkatkan kapasitas lembaga wisata budaya dalam mendukung kegiatan keparwisataan serta mendukung pengembangan Satuan Ruang Strategis DIY 4. Pengembangan Pasar dan Citra Pariwisata (*tourism brand development*) Pengembangan Pasar dan Citra Pariwisata (tourism brand development) 5. Pengembangan produk dan pelaku ekonomi kreatif DIY 6. Penguatan Kelembagaan kepariwisataan dan Daya Saing SDM Pariwisata 7. Terwujudnya reformasi birokrasi menuju birokrasi yang profesional	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi (DPA SIPD)	objek	1	1
			Pengelolaan Hotel Mutiara Bagian Selatan	bulan	5	5
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD)	unit	1	1
			Penyediaan Ruang Kreatif/Pusat Kreatif bagi Pelaku Ekraf	unit	1	1
			Pengembangan Atraksi Wisata Budaya			
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	objek	169	169
			Pekan budaya Tionghoa	event	1	1
			Festival layang layang International	event	1	1
			Kroncong Plesiran	event	1	1
			Bergodo Jogo Malioboro	kali	30	30
			Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis	kali	23	23
			Atraksi Wisata Budaya Full Paket	kali	89	89
			Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pura PA	kali	7	7
			Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya	kalurahan	15	15
			Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup	event	1	1
			Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubuwono Cup	event	1	1
			Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cup	event	1	1
			Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubuwono Cup	event	1	1
			Jogja Ekraf Week	event	1	1
			Pentas Kesenian di TIC Bandara	kali	37	37
			Launching Calendar of Event	event	1	1
			Steering Commitee Eatof	kali	1	1
			Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam	event	1	1
			Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubuwono	event	1	1
			Pemilihan Dimas Diajeng 2025	event	1	1
			Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025	event	1	1
			Icon Inacraft	event	1	1

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan Layanan Masyarakat	kali	1	1
			Journey to Wonderful Jogja	kali	1	1
			Kejuaraan Bulutangkis Piala Raja Hamengku Buwono X	event	1	1
			Talkshow Bincang Wisata	kali	5	5
			Pengembangan Industri Kreatif			
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	unit	60	60
			Fasilitasi HKI	usaha	60	60
			Peningkatan Lembaga Wisata Budaya			
			Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan (DPA SIPD)	lembaga	9	9
			Klasifikasi Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata	Desa/kampung wisata	18	18
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata	pokdarwis	60	60
			Fasilitasi Dimas Diajeng	kali	4	2
			Updating Management event	kali	1	1
			Publikasi dan Promosi Pariwisata	Jenis	3	3
			Fasilitasi Saka Pariwisata	lembaga	1	1
			Sosialisasi CHSE Desa Wisata	kali	46	46
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD)	dokumen	3	3
			Penyusunan Dokumen Renja	dokumen	1	1
			Penyusunan ROPK dan PK	dokumen	1	1
			Penyusunan Dokumen Renja Perubahan	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD)	dokumen	2	2
			Penyusunan DPA SKPD	dokumen	1	1
			Penyusunan DPPA SKPD	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD)	dokumen	4	4
			LKjIP	dokumen	1	1
			LKPJ	dokumen	1	1
			LPPD	dokumen	1	1
			Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD)	orang/bulan	79	72

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			Gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	53	51
			Gaji dan tunjangan P3K	orang/bulan	26	21
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD -DPA SIPD(Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD)	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD)	laporan	18	18
			Laporan Bulanan	laporan	12	12
			Laporan Triwulanan	laporan	4	4
			Laporan Semesteran	laporan	2	2
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD)	dokumen	1	1
			Pembayaran PBB kantor Jl HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta	dokumen	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD)	laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD)	paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD)	paket	2	2

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA DIPD)	dokumen	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD)	laporan	2	2
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (DPA SIPD)	dokumen	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD)	unit	2	2
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD)	unit	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD)	laporan	2	2
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	5
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	laporan	2	2
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD)	unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD)	unit	12	12
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (DPA SIPD)	unit	42	42
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD)	unit	22	22
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD)	unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD)	unit	58	58
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPA SIPD)	dokumen	1	1
			Penyusunan Raperda Ripparda	dokumen	1	1
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provins	laporan	1	1
			Inventarisasi Destinasi Wisata di DIY	laporan	1	1
			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)			
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)---DPA SIPD	unit usaha	50	50
			Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	laporan	1	1
			Expose Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	laporan	1	1
			Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata			
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (DPA SIPD)	laporan	1	1
			Fasilitasi Sertifikasi Standardisasi Usaha Subsektor kuliner	laporan	1	1
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (SIPD)	dokumen	6	6
			Statistik Kepariwisataan	dokumen	1	1
			Analisis Belanja Wisatawan	dokumen	1	1
			Forum Komunikasi Lintas Sektor	dokumen	1	1
			Promosi Pariwisata Melalui Media Elektronik	dokumen	1	1
			Pengelolaan TIC	dokumen	1	1
			Studi Penguatan Kemitraan Pariwisata DIY untuk Mendukung Kelayakan Direct Flight Internasional ke YIA	dokumen	1	1
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	laporan	1	1
			Temu Bisnis Ekonomi Kreatif	laporan	1	1
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (SIPD)	dokumen	1	1
			Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah			
			Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	dokumen	2	2
			Penyusunan Kebijakan tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY	dokumen	1	1
			Penyusunan Database Ekonomi Kreatif Subsektor Berbasis Digital di DIY	dokumen	1	1
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	laporan	1	1
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	2453	2453
			Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif	orang	90	90
			Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif	orang	21	21
			Sosialisasi Kekayaan Intelektual	orang	378	378
			Sosialisasi Perda DIY No 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan	orang	378	378
			Sosialisasi Pergub DIY No 40 Th 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata	orang	378	378
			Bimtek Pengelolaan Destinasi	orang	180	180
			Bimtek Tata cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual	orang	360	360
			Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif DIY	orang	270	270
			Sertifikasi SDM Ekraf	orang	20	20

Sumber:Dispar DIY, 2025

3) Urusan Pertanian

a. Kondisi Umum

Pada tahun 2025, sektor pertanian di DIY tetap memegang peran strategis sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Sektor ini tidak hanya berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan regional, tetapi juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja serta penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Pertanian masih menjadi basis penghidupan bagi sebagian besar rumah tangga perdesaan dan memiliki fungsi sosial ekonomi yang signifikan. Namun demikian, kinerja sektor pertanian DIY pada tahun 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan dinamis yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan, antara lain.

1) Alih fungsi lahan pertanian yang semakin masif ke penggunaan non-pertanian, menggerus kapasitas produksi jangka panjang.

2) Kerentanan iklim dan ketersediaan air, yang ditandai dengan perubahan pola hujan yang tidak menentu, terganggunya musim tanam, meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman, serta ancaman kelangkaan air irigasi yang mengganggu produktivitas dan stabilitas hasil pertanian.
3) Transisi generasi petani yang belum berjalan optimal, dengan penurunan minat generasi muda untuk terlibat di sektor *on-farm*, serta keterbatasan regenerasi usaha tani.
4) Tekanan pasar dan dominasi rantai pasok panjang yang menyebabkan margin keuntungan petani semakin tipis, serta minimnya posisi tawar petani skala kecil.
5) Wabah penyakit hewan ternak yang masih menjadi ancaman terhadap produktivitas dan keberlanjutan subsektor peternakan.
6) Keterbatasan lahan hijauan pakan ternak yang menghambat pengembangan peternakan skala kecil dan menengah.
7) Digitalisasi dan akses teknologi yang belum merata, menciptakan kesenjangan produktivitas antara petani yang melek teknologi dengan yang masih menggunakan cara konvensional.

Tabel 3.146. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022–2027)

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan RPJMD 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Penyelarasan RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan								
Nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Juta Rupiah	8.207.475 **	8.242.042	8.347.788 ***	101,28	8.366.137	8.366.137	99,78

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan RPJMD 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Penyelarasan RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	%	2,42	1,98	1,98	100	1,98	1,98	100
Indikator Kinerja Sasaran								
Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	%	0,96	0,25	0,95	380,00	0,21	0,27	351,85
Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	%	2,46	3,99	4,45	111,53	7,94	7,94	56,05

)Target Penyelarasan kinerja Tahun 2025 **) Angka Sangat Sementara *) Angka Prediksi*
Sumber: BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Indikator kinerja Tujuan Urusan Pertanian ada 2, yaitu “nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)” dan “peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian ruang”. Indikator “nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)” terealisasi 8.347.788 juta rupiah dengan persentase capaian 101,28% dari target 2025. Dibandingkan dengan target penyelarasan RPJMD 2027 tercapai 99,78%. Indikator “peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang” terealisasi 1,98% dengan persentase capaian 100% terhadap target 2025 maupun terhadap target akhir Renstra 2027.

Tabel 3.147. Capaian Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Dalam PDRB (ADHK)

No	Subsektor	Realisasi 2024** (Juta Rupiah)	Realisasi 2025*** (Juta Rupiah)	Persentase Pertumbuhan (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d-c)/c x 100
1.	Tanaman pangan	3.090.849	3.113.465	0,73%
2.	Hortikultura	2.696.229	2.741.312	1,67%
3.	Perkebunan	250.974	256.589	2,24%
4.	Peternakan	2.169.423	2.236.422	3,09%
	Total	**8.207.475**	**8.347.788**	**1,71%**

*Ket.: **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Prediksi*
Sumber: BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Berdasarkan data prediksi tahun 2025, total nilai PDRB subsektor pertanian DIY diperkirakan mencapai 8.347.788 juta rupiah, tumbuh 1,71% dari tahun 2024, seperti terlihat pada Tabel 3.2. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh subsektor peternakan yang tumbuh paling tinggi sebesar 3,09%, diikuti oleh perkebunan (2,24%) dan Hortikultura (1,67%). Meski demikian, dari sisi nilai kontribusi, Tanaman Pangan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 3.113.465 juta rupiah, meski pertumbuhannya paling rendah (0,73%). Hal ini menunjukkan bahwa struktur pertanian DIY masih bertumpu pada tanaman pangan sebagai penopang utama, sementara peternakan muncul sebagai penggerak pertumbuhan baru yang paling dinamis. Peningkatan nilai PDRB semua subsektor pertanian didukung oleh peningkatan produksi/populasi komoditas-komoditas strategis yang memiliki nilai tambah cukup tinggi.

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang secara terpadu sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah.

Sebagai daerah dengan status keistimewaan, DIY memiliki Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten yang berjumlah 18 (delapan belas) satuan, terdiri atas 14 (empat belas) SRS Kasultanan dan 4 SRS Kadipaten. Dalam rangka memenuhi target kinerja Urusan Pertanian, ketersediaan lahan menjadi salah satu input utama dalam proses produksi. Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya berperan penting dalam mempertahankan luasan lahan pertanian, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta menjamin kecukupan pangan bagi masyarakat di DIY.

Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang merupakan salah satu strategi untuk menjaga kelestarian lahan pertanian, memastikan ketersediaan pangan secara berkelanjutan, dan mendukung pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik budidaya yang ramah lingkungan. Pada tahun 2025, Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang di SRS Kasultanan dan Kadipaten tercatat sebesar 1,98%, yang berasal dari pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian di SRS Karst Gunung Sewu sebesar 0,06%, SRS Perbukitan Menoreh sebesar 0,47%, SRS Merapi sebesar 3,41%, dan SRS Strategis Sumbu Filosofi sebesar 0,50%.

Indikator kinerja “rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)” terealisasi 0,95%, dengan persentase capaian 380,00% dibanding target 2025 dan sebesar 351,85% dari target akhir RPJMD 2027. Indikator “persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang” terealisasi 4,45% dengan persentase capaian 111,53% dari target 2025 atau tercapai sebesar 56,05% dibanding target akhir RPJMD 2027.

Tabel 3.148. Capaian Produksi Subsektor Tahun 2024 dan 2025**

No	Capaian Produksi Subsektor	Realisasi 2024	Realisasi 2025**	Persentase Pertumbuhan (%)**
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d-c)/c x 100%
1.	Tanaman pangan (ton)	1,648,163.00	1,740,709.00	5.48%
2.	Hortikultura (ton)	315,777.00	301,706.00	-4.46%
3.	Perkebunan (ton)	59,393.03	59,378.57	-0.02%
4.	Peternakan (Animal Unit)	1,636,798.00	1,677,181.00	2.47%
Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)				**0,90%**

*Ket.: **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Pencapaian hasil indikator kinerja “Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan (%)” diperoleh dari penghitungan rata-rata persentase peningkatan produksi empat subsektor sebagai berikut:

Tabel 3.149. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2024-2025**

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2024	2025**
1	Padi	452.832	547.510
2	Jagung	374.470	385.865
3	Kedelai	4.309	3.938
4	Kacang Tanah	51.803	63.045
5	Kacang Hijau	182	588
6	Ubi Kayu	760.682	741.064
7	Ubi Jalar	3.765	2.071
8	Sorghum	120	81
	Jumlah	**1.648.163**	**1.744.163**

*Ket.: **) Angka sangat sementara*
Sumber: DPKP DIY, 2026

Pada tabel tersebut terlihat bahwa produksi tanaman pangan DIY tahun 2025 mencapai 1,74 juta ton, meningkat 96 ribu ton atau sekitar 5,82% dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,65 juta ton. Peningkatan produksi terutama didorong oleh komoditas padi, yang mencatat kenaikan tertinggi secara absolut, yaitu sebesar 94,68 ribu ton (20,91%), sehingga menjadi penyumbang produksi terbesar dengan total 547,51 ribu ton pada tahun 2025. Selain padi, peningkatan produksi

juga terjadi pada kacang hijau yang secara persentase mengalami kenaikan tertinggi, yakni 223,11%, meskipun kontribusi volumenya relatif kecil, serta kacang tanah yang meningkat 21,7% dan jagung yang naik 3,04%. di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi, antara lain ubi kayu yang turun 2,58% namun tetap menjadi kontributor produksi terbesar kedua dengan 741,06 ribu ton, serta ubi jalar, kedelai, dan sorgum yang mengalami penurunan cukup signifikan. Secara umum, struktur produksi tanaman pangan DIY masih didominasi oleh ubi kayu, padi, dan jagung, yang bersama-sama menjadi penopang utama peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2025.

Tabel 3.150. Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2024-2025*

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2024	2025*
1	Cabai besar	Ton	2.999	5.565
2	Cabai rawit	Ton	29.084	26.127
3	Cabai keriting	Ton	45.398	45.605
4	Bawang merah	Ton	33.312	21.913
5	Pisang	Ton	100.780	101.224
6	Durian	Ton	10.169	15.206
7	Kelengkeng	Ton	2.613	3.110
8	Salak	Ton	45.920	45.540
9	Alpukat	Ton	15.235	16.238
10	Semangka	Ton	8.245	4.417
11.	Melon	Ton	10.318	6.732
12.	Jahe	Ton	4.959	4.955
13.	Kencur	Ton	2.699	2.098
14.	Kunyit	Ton	4.046	2.976

*Ket.: *) Angka sementara*
Sumber: DPKP DIY, 2026

Subsektor hortikultura memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian di DIY, terutama dalam mendukung penyediaan pangan serta peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2025, kinerja produksi komoditas hortikultura di DIY menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh anomali cuaca dan perubahan pola tanam petani. Secara agregat, total produksi hortikultura tercatat

sebesar 301.706 ton, mengalami penurunan sebesar 4,46% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 315.778 ton. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung, sehingga mendorong sebagian petani untuk beralih menanam komoditas lain yang dinilai lebih adaptif atau menguntungkan.

di tengah tren penurunan tersebut, beberapa komoditas hortikultura justru mengalami peningkatan produksi, antara lain cabai besar, cabai keriting, pisang, durian, kelengkeng, dan alpukat. Peningkatan produksi cabai besar dan cabai keriting didorong oleh kondisi harga pasar yang relatif stabil dan prospektif, sehingga memotivasi petani untuk mempertahankan bahkan meningkatkan intensitas budidaya. Sementara itu, peningkatan produksi pisang, durian, kelengkeng, dan alpukat dipengaruhi oleh mulai berproduksinya tanaman hasil pengembangan kawasan, yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap peningkatan output hortikultura.

Sebaliknya, sejumlah komoditas mengalami penurunan produksi, meliputi cabai rawit, bawang merah, salak, semangka, melon, jahe, kencur, dan kunyit. Penurunan produksi tersebut secara umum dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola dan intensitas curah hujan, sehingga terjadi pergeseran waktu tanam. Selain itu, meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta berkurangnya luas tanam akibat peralihan petani ke komoditas lain yang lebih menguntungkan turut memperkuat tren penurunan produksi hortikultura pada tahun 2025.

Pertumbuhan komoditas peternakan di DIY berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Komoditas peternakan memberikan kontribusi penting dalam penyediaan sumber protein hewani, seperti daging, susu,

dan telur, yang menjadi komponen utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan. Dampak dari upaya tersebut tercermin pada peningkatan populasi ternak pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 44.766 Animal Unit (AU). Peningkatan ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan penguatan industri peternakan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Adapun rincian populasi peternakan tahun 2024 dan 2025 di DIY disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.151. Populasi Ternak di DIY Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2024 (ekor)	2024 (AU)	2025 (ekor)**	2025 (AU)**
1	Sapi Potong	285.797	217.206	286.083	217.423
2	Sapi Perah	2.908	2.210	2.913	2.214
3	Kuda	1.400	966	1.402	967
4	Kerbau	350	319	350	319
5	Babi	8.586	3.263	8.595	3.266
6	Kambing	438.159	48.197	439.122	48.303
7	Domba	157.718	20.503	159.302	20.709
8	Ayam Buras	3.595.345	71.907	3.599.607	71.992
9	Ayam Ras Petelur	7.821.088	156.422	7.611.612	152.232
10	Ayam Ras Pedaging	55.132.945	1.102.659	57.349.790	1.146.996
11	Itik	438.212	13.146	425.347	12.760
	TOTAL	**67.882.508**	**1.636.798**	**69.884.123**	**1.677.182**

*Ket.: **) Angka sangat sementara*
Sumber: DPKP DIY, 2026

Sebagian besar komoditas unggulan subsektor peternakan di DIY menunjukkan peningkatan populasi pada tahun 2025. Peningkatan tersebut meliputi sapi potong sebesar 0,10%, sapi perah 0,18%, kuda 0,10%, babi 0,09%, kambing 0,22%, domba 1,00%, ayam buras 0,12%, serta ayam ras pedaging yang mengalami peningkatan tertinggi sebesar 4,02%. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai upaya percepatan peningkatan populasi ternak, antara lain melalui

pembangunan sistem pengendalian penyakit ternak yang lebih efektif, optimalisasi pemanfaatan sumber daya peternakan, serta penerapan paradigma baru dalam sistem kemitraan usaha peternakan. Sejalan dengan upaya tersebut, angka temuan kasus Penyakit Menular Hewan Strategis (PMHS) tercatat menurun sebesar 0,61%. Perbaikan manajemen kesehatan ternak ini berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas, sehingga ternak dapat berproduksi secara optimal dan mampu memenuhi permintaan pasar.

di sisi lain, komoditas kerbau menunjukkan kondisi populasi yang relatif tetap atau stabil pada tahun 2025. Stabilitas ini dipengaruhi oleh minimnya regenerasi peternak akibat rendahnya tingkat pendapatan, keterbatasan lahan untuk kubangan, permasalahan reproduksi ternak seperti jarak beranak yang panjang dan praktik kawin sedarah, serta berkurangnya lahan penggembalaan. Meskipun demikian, peran kerbau dalam sistem pertanian masih tetap dipertahankan.

Sementara itu, populasi ayam ras petelur mengalami penurunan sebesar 2,68% dan itik sebesar 2,94%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh proses afkir, yaitu pengeluaran unggas yang telah melewati masa produktif (umumnya berusia di atas 72–80 minggu) untuk digantikan dengan unggas muda. Proses afkir merupakan bagian dari siklus usaha peternakan yang bersifat alami dan reguler, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah unggas produktif. Berbeda dengan kedua komoditas tersebut, populasi ayam ras pedaging cenderung meningkat sebesar 4,02%, yang didorong oleh tingginya permintaan daging ayam serta kondisi pasar yang relatif lebih stabil.

Tabel 3.152. Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2024-2025**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2024	2025**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	50.076,77	50.050,30	-0,05	kopra
2	Tebu	3.224,34	3.221,73	-0,08	gula hablur
3	Kakao	2.025,93	2.027,64	0,084	biji kering
4	Cengkeh	855,96	860,45	0,53	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	606,37	605,44	-0,15	daun kering
6	Kopi	1.877,19	1.886,32	0,48	biji kering
7	Jambu Mete	496,01	498,10	0,42	biji kering
8	The	230,46	228,59	-0,81	daun kering

*Ket.: **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: DPKP DIY, 2026

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2025, produksi berbagai komoditas subsektor perkebunan menunjukkan dinamika yang ditandai oleh adanya peningkatan dan penurunan produksi. Peningkatan produksi tercatat pada komoditas kopi, cengkeh, jambu mete, dan kakao. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas yang relatif tinggi sepanjang tahun 2025, sehingga mendorong petani untuk meningkatkan intensitas pemeliharaan tanaman di lahan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan produksi.

Sebaliknya, penurunan produksi terjadi pada komoditas tebu, kelapa, teh, dan tembakau. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh anomali cuaca yang berlangsung sepanjang tahun 2025, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan tanaman perkebunan tidak dapat berproduksi secara optimal dan, pada beberapa komoditas, memicu meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

(1) Alih fungsi lahan pertanian;
(2) Regenerasi SDM yang terhambat, banyak petani yang berusia lanjut kurang produktif.
(3) Tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif
(4) Terbatasnya lahan untuk hijauan pakan ternak;
(5) Kesulitan dalam mengakses modal dan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk peternak kecil dan menengah;
(6) Anomali cuaca dengan curah hujan tinggi meningkatkan risiko serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sehingga berdampak pada penurunan produksi pada komoditas hortikultura.
(7) Dampak perubahan iklim yang menyebabkan pola dan intensitas hujan mengalami pergeseran.

(2) Solusi

(1) Intensifikasi komoditas pertanian;
(2) Perintisan petani-petani milenial, yang bergerak dari hulu ke hilir.
(3) Peremajaan tanaman perkebunan
(4) Mendorong peternak untuk menggunakan pakan alternatif, seperti limbah pertanian (jerami, daun, dll), atau teknologi pakan yang lebih efisien, misalnya bank pakan sehingga membuat pakan saat bahan baku melimpah di musim hujan dan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama;
(5) Bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman atau kredit dengan bunga rendah khusus untuk subsektor peternakan;

(6) Menggunakan varietas yang adaptif dan tahan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman hortikultura
(7) Meningkatkan kapasitas petani dalam rangka mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Urusan Pertanian pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran Rp11.897.556.964,00 yang terdiri dari anggaran reguler sebesar Rp10.730.777.964,00 dan Dana Keistimewaan sebesar Rp1.166.779.000,00. Dana Keistimewaan melalui Urusan Tata Ruang terdiri dari 1 program, 1 kegiatan, dan 4 subkegiatan, dan reguler terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, 19 subkegiatan. Realisasi anggaran terealisasi Rp11.322.313.528,00 atau 95,17% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp575.243.436,00 atau 4,83% yang bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa lewat *e-purchasing* (Mbiz dan e-katalog), efisiensi belanja perjalanan dinas dan efisiensi honor narasumber. Rincian capaian kinerja program dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.153. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Pertanian Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Peningkatahan dan pengamanan produksi, peningkatan mutu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan unggulan daerah berbasis sumber daya lokal secara ramah lingkungan dan berkelanjutan; 2. Penguatan kelembagaan petani dan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	%	98,5	98,61
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan	%	100	101,5

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani; 3. Peningkatan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat; 4. Pengembangan potensi ternak lokal; 5. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan; 6. Pembangunan sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 7. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 8. Pengembangan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan *Good Agriculture Practices (GAP)/S=tandard Operating Procedure* (SOP); 9. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian; 10. Penyediaan sarana prasarana (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan); 11. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan *Good Handling Practices* (GHP), *Good*	peternakan di lokasi prioritas kemiskinan			
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	%	2,36	5,16
				Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	%	93,5	95,62
				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			
				Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	9	9
				Pelatihan Budidaya Tembakau	kelompok	3	3
				Pelatihan Pascapanen	kelompok	5	5
				Pengembangan Pola Kemitraan	kegiatan	1	1
				Bantuan Pupuk	paket	3	3
				Pengadaan Alat Perajang dan Alat Pendukungnya	paket	3	3
				Pengadaan Cultivator	paket	2	2
				Pengadaan Hand Sprayer	paket	1	1
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Jemur	paket	5	5
				Pengadaan Pompa Air dan Sarana Pendukungnya	paket	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	dokumen	9	9
				Sosialisasi Pupuk Bersubsidi	kab/kota	5	5
				Pengembangan Tanaman Pangan	kelompok	4	4

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Manufacturing Practices (GMP), *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Marketing/Retail Practices* (GRP); 12. Peningkatan promosi dan pemasaran produk pertanian di pasar domestik maupun internasional; 13. Perlindungan petani melalui regulasi subsidi harga produk; 14. Perlindungan petani saat terjadi gagal panen/produksi (Asuransi Usaha Tani); 15. Pemberian fasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); 16. Penumbuhkembangan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda; 17. Pengembangan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (*suply chain management*);	(Budidaya Tanaman Ubi Kayu)			
				Registrasi kebun komoditas hortikultura	kelompok	5	5
				Pengembangan dan Pelestarian Anggrek	paket	1	1
				Sosialisasi pemanfataan lahan pekarangan untuk budidaya hortikultura	paket	18	18
				Bimtek pembuatan dan pemanfaatan organik	paket	18	18
				Publikasi Media Cetak	paket	4	4
				Publikasi Media Elektronik	paket	3	3
				Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
				Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	dokumen	3	3
				Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak	orang	40	40
				Bimbingan Teknis Pakan Ternak	orang	20	20
				Pengembangan Ternak Unggas	kelompok	2	2
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			
				Jumlah Sertifikat Benih	sertifikat	141	146
				Jumlah Sertifikat Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang diterbitkan	sertifikat	141	146
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			
				Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman	laporan	4	4

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga			
				Pengawasan Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura	laporan	1	1
				Pengawasan produsen dan pengedar benih tanaman pangan	laporan	1	1
				Pengawasan produsen dan pengedar benih Perkebunan	laporan	1	1
				Publikasi Surat Kabar	laporan	1	1
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			
				Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	batang	35000	35000
				Perbanyakan Benih Cabai	kg	35	35
				Perbanyakan Benih Tomat	kg	35	35
				Benih Jamur Edible	botol	5500	5500
				Perbanyakan Benih Tanaman Buah	batang	8000	8000
				Perbanyakan Benih Tanaman Hias	batang	27000	27000
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	ton	75,5	69
				Perbanyakan Benih Padi	kg	68800	62710
				Perbanyakan Benih Jagung	kg	4000	3915

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Perbanyakan Benih Kedelai	kg	2000	1740
				Perbanyakan Benih Kac. Hijau	kg	700	700
				Operasional Jogja Benih	tahun	1	1
				Optimalisasi Lahan Kering Unit Gading	hektare	1	1
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	batang	10800	10800
				Perbanyakan Benih Kakao	batang	7000	7000
				Perbanyakan Benih Kelapa	batang	3800	3800
				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
				Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	3	3
				Produksi bibit ternak bersertifikat Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB	ekor	70	73
				Produksi HMT pertahun untuk ternak di UPTD	kg	1034843	1150289
				Produksi semen beku yang bersertifikat LSPro/SNI	dosis	39900	73183
				Publikasi Media Cetak	paket	1	1
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
				Persentase peningkatan prasarana pertanian	%	10	14,29

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				yang dibangun dan digunakan			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	dokumen	1	1
				Fasilitasi Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	kelompok	1	1
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	dokumen	1	1
				Koordinasi Sinkronisasi RJIT	kabupaten	4	4
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	6,22	0,61
				Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			
				Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang T erkendali	laporan	3	3
				Fasilitasi obat dan Vaksin	botol	330	330
				Publikasi Media Cetak	paket	1	1
				Publikasi Media Elektronik	paket	1	1
				Pengawasan Peredaran Produk Hewan			
				Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terjaminnya daging Hewan Qurban yang ASUH	wilayah	5	5
				Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			
				Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	laporan	1	1
				Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	lokasi	7	7
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			
				Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	sertifikat	2	2
				Jumlah Sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan	sertifikat	2	2
				Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan	sertifikat	2	2
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
				Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	dokumen	3	3
				Hasil Uji Penyakit Hewan	sampel	23643	29624
				Hasil Uji Sampel Produk Hewan	sampel	200	834

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terpeliharanya Status Akreditasi Laboratorium	ruang lingkup	5	5
				Operasional Pengujian Penyakit Hewan	paket	1	1
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
				Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditanggulangi	%	58,4	90,72
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	hektare	100	100
				Layanan Laboratorium Pengujian Mutu Produk Pertanian (LPMPP)	tahun	1	1
				Layanan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)	tahun	1	1
				Penanganan DPI	tahun	1	1
				Data dan Informasi OPT dan DPI Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	tahun	1	1
				Surveillance ISO/IEC 17025:2017	sertifikat	1	1
				Bimtek Pencegahan dan Penanganan	paket	18	18

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)			
				Publikasi Media Cetak	paket	1	1
				Gerdal OPT	lokasi	10	10
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
				Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya	%	64	66,85
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			
				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	40	40
				Pelatihan Mitigasi dan Perubahan Iklim (Penyuluh ASN)	orang	30	30
				Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	orang	10	10
				Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			
				Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	dokumen	2	2
				Operasional Jogja Agro Park	tahun	1	1
				Kajian Pengembangan Potensi Jogja Agro Park (JAP)	paket	1	1
				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			
				Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	kelompok	45	45
				Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	kelompok	1	1
				Sosialisasi Peraturan terkait Pertanian dan Pangan	paket	18	18
				Publikasi Media Cetak	paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Publikasi Media Elektronik	paket	1	1
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
				Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha)	ha	329	339
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu			
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	1	1
				Festival Cokelat	kali	1	1
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh			
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	2	2
				Pemeliharaan Calon Kebun Induk Kelapa	ha	1	1
				Pengembangan Metode Perbanyakan Kultur Embrio	dokumen	1	1
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi			
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	dokumen	1	1
				Intensifikasi Tanaman Kopi	ha	50	50
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	dokumen	1	1
				Identifikasi Sumberdaya Genetik	ha	5	5

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tanaman Khas Yogyakarta			

Sumber: DPKP DIY, 2025

4) Urusan Kehutanan

a. Kondisi Umum

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. DIY memiliki luas total hutan 97.534,22 Ha yang terdiri dari 19.133,95 Ha hutan negara dan 78.400,27 Ha hutan rakyat, dimana luas hutan tersebut sebesar 30,61% dari luas wilayah DIY. Disekitar kawasan hutan ada kurang lebih 17.462 KK dimana 18.38% merupakan keluarga pra sejahtera sehingga hutan harus memberikan kontribusi untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai Perda 7 tahun 2015 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.

Tabel 3.154. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Capaian 2025 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Akhir RPJMD Penyelarasan (2027)*	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya	%	85,91	92,76	94,71	102,10	100	100	94,71

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Akhir RPJMD Penyelarasan (2027)*	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Realisasi	% Realisasi			
	pengelolaan hutan lestari								
Indikator Kinerja Sasaran									
1.	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	%	5	10	440,15	4401,5	10	10	4401,5
2.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	%	3,15	4.61	8.12	176.14	4,61	4,61	176.14

**) Target Penyelarasan kinerja Tahun 2025*
Sumber: DLHK DIY, 2026,

Pada tahun 2025 Target dan Realisasi urusan Kehutanan memiliki 2 indikator kinerja sasaran, yaitu Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan dan Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY. Dari tabel di atas semua sudah melebihi capaian 100%.

Seiring dengan perubahan RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027, salah satu indikator kinerja urusan kehutanan adalah meningkatnya jumlah produksi kehutanan. Perhitungan nilai produksi ini berasal dari Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) pada setiap Kelompok Tani Hutan. Produksi dapat berupa hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) berdasarkan potensinya masing-masing. Adapun rekapitulasi hasil produksi sektor kehutanan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Pada tahun 2025, Realisasi produksi kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE): Produksi ini menggunakan nilai traksaksi yang dilakukan oleh KTH yang menjadi binaan. Total produksinya adalah sebesar Rp11.195.764.292,00 sepanjang tahun 2025. Komoditas yang paling berkontribusi berasal dari wisata alam dengan nilai RpRp2.747.305.992,00. 2. Kelompok Usaha

Perhutanan Sosial (KUPS): Nilai produksi ini merupan nilai transaksi yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial yang ada di DIY. Berdasarkan hasil pendataan, nilai produksinya sebesar Rp3.926.783.970,00 pada tahun 2025. Komoditas yang berkontribusi paling banyak adalah Hijauan Makanan Ternak (HMT, dan produksi dari agroforestri berupa jagung. 3. Hasil kerjasama: Hasil kerjasama dimaksud adalah pengelolaan kawasan hutan yang dikerjasamakan dengan masyarakat melalui wadah koperasi. Sepanjang tahun 2025 nilai rupiah dari hasil kerjasama ini adalah sebesar Rp4.949.736.250,00. Kerjasama yang berkontribusi terbesar adalah dengan Koperasi Notowono yang mengelola wilayah hutan sekitar mangunan dengan nilai mencapai Rp4.947.134.500,00. 4. Hasil Hutan Kayu: Hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan pada tahun 2025 adalah sebanyak 124 m^3 dengan nilau rupiah sebesar Rp111.780.069,00 (Rp903.000,00/m^3), sedangkan produksi kayu bulat yang berasal dari luar kawasan sebanyak 68538,18 m^3 dengan nilai rupiah sebesar Rp132.291.641.116 (Rp1.930.189,00/m^3). 5. Penjualan Minyak Kayu Putih: Sepanjang 2025 terdapat penjualan minyak kayu putih sebesar Rp618.804.560,00 Secara total, maka produksi kehutanan sepanjang tahun 2025 adalah sebesar Rp153.094.510.257,00.Realisasi ini meningkat siginifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (Rp28.342.896.021,00). Hal ini terjadi salah satunya karena jangkauan pendataan terhadap Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang semakin luas. Jangkauan menjadi semakin luas karena SDM yang mendata juga semakin bertambah setelah pelibatan Penyuluh Kehutanan Swadaya (PKSM). Realisasi: = (153.094.510.257-28.342.896.021)/ 28.342.896.021 * 100% = 440,15% Terdapat penyesuaian target pada indikator ini dari yang semula 5% menjadi 10% di TW IV. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Penyelarasan Kinerja Perangkat Daerah Nomor B/00.8.6.3/1630/BR.6 tanggal 25 September 2025.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/ DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, bahwa dari luas lahan kritis secara Nasional yakni 12.744.925 ha, luas indikatif lahan kritis di wilayah DIY sebesar 72.294 ha atau 0,567%. Sampai dengan akhir periode dokumen perencanaan (2027), terdapat 35902,62 ha yang akan menjadi prioritas penanganan rehabilitasi hutan dan lahan. Realisasi RHL sampai tahun 2024 yang lalu adalah sebesar 1.614,42 ha atau sekitar 4,48%. Realisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilakukan sepanjang tahun 2025 dengan total sebesar 1.301,63 ha:

1. Pembuatan Gully Plug (APBD)
2. Penanaman Hutan Rakyat (APBD)
3. Penanaman Sumber Mata Air (APBD)
4. Kebun Bibit Rakyat (APBD)
5. Kebun Bibit Rakyat (APBN)
6. Penanaman Hutan Rakyat (APBN)
7. Program Bibit Produktif (APBN)
8. Penanaman Hutan Rakyat (Dana RBP)

Dengan demikian, Realisasi 2025 = jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun N/jumlah sasaran lahan kritis*100%
= (1614,42+15+9+21+200+915.63+101+40)/35902,62x 100%
= 2.916,05/35902,62 x 100%'= 8,12%

Urusan Kehutanan mengelola anggaran sebesar Rp1.892.251.702,00 dengan program dan kegiatan tahun 2025 terdiri dari 3 program, 20 Subkegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp1.833.957.536,00 atau 96,92%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Berikut merupakan program dan kegiatan urusan kehutanan di DIY Tahun 2025.

Tabel 3.155. Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2025

	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.383.108.202	1.339.750.934	96,86	100	100
1.1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	24.483.500	24.355.960	99,48	100	100
1.2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	334.881.000	319.759.144	95,48	100	100
1.3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	143.068.750	136.027.350	95,08	100	100
1.4	Pembangunan gully plug	97.954.852	93.276.100	95,22	100	100
1.5	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	396.020.550	382.688.690	96,63	100	100
1.6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	13.088.850	12.770.650	97,57	100	100
1.7	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	67.494.600	67.095.921	99,41	100	100
1.8	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	32.021.600	31.771.349	99,22	100	100
1.9	Sertifikasi Sumber Benih	16.317.300	15.939.459	97,68	100	100
1.10	Sertifikasi Mutu Benih	15.279.000	14.815.718	96,97	100	100
1.11	Sertifikasi Mutu Bibit	11.887.000	11.510.855	96,84	100	100
1.12	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	11.193.000	10.820.982	96,68	100	100
1.13	Pengelolaan Sumber Benih	219.418.200	218.918.756	99,77	100	100
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	722.149.650	706.684.751	97,86	100	100
2.1	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	66.699.900	66.691.591	99,99	100	100
2.2	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	98.234.700	98.112.935	99,88	100	100
2.3	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	92.862.800	91.949.221	99,02	100	100
2.4	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	63.943.750	63.477.700	99,27	100	100
2.5	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	400.408.500	386.453.304	6,51	100	100
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	157.098.000	155.956.824	99,27	100	100
3.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	48.363.000	48.203.526	99,67	100	100
3.2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	108.735.000	107.753.298	99,10	100	100

	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
JUMLAH URUSAN KEHUTANAN		1.892.251.702	1.833.957.536	96,92	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2026

Tabel 3.156. Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2023 - 2025

No	SubElemen	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Hasil Hutan Kayu*			
1.1	Kayu Bulat (m^3)	2.215,00	664,60	175,00
1.2	Kayu Gergajian (m^3)	3.429,79	3.563,96	2631,12
1.3	Kayu Olahan (m^3)	9.302,31	6.956,85	4519,24
1.4	Kayu Hutan Rakyat (m^3)	60.553,97	27.744,76	95.714,17
2	Hasil Hutan Bukan Kayu			
2.1	Kayu Putih			
2.1.1	Jumlah Produksi Daun (ton)	2.216,5	2.168,75	2.136,42
2.2.2	Jumlah Produksi Minyak (L)	19.529	19.609,00	20.008,00
2.2.3	Jumlah PAD (Rp)	44.000.000,00	2.915.955.166,00	143.801.450,00
3	Luas Lahan Reboisasi			
3.1	Realisasi (ha)	30,00	414,00	200,00
4	Luas Lahan Penghijauan			
4.1	Pembuatan Baru (ha)	406,00	267,00	29,00
4.2	Pemeliharaan (ha)	n/a	243,00	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2026

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan tingginya alih fungsi lahan. Eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan permukiman;

b) Penurunan PAD Tahun 2025 ini disebabkan karenan penjualan minyak kayu putih mengalami penurunan. Hal ini salah satu penyebabmya adalah perdagangan minyak atsiri saat ini didominasi oleh minyak atsiri impor yaitu minyak *Eucalyptus,* sehingga atas kondisi tersebut dilakukan beberapa hal yaitu koordinasi dengan KLHK RI, Perhutani dan Kemendag untuk melakukan pembatasan impor

minyak *Eucalyptus* dan pengenaan pajak atas minyak tersebut, serta dilakukan perjanjian jual beli dengan perorangan untuk minyak kayu putih.

(2) Solusi

a) Optimalisasi upaya penanganan degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk penanganan lahan kritis dan lahan potensial kritis serta menjalin kerja sama dengan Kelompok Tani Hutan dalam pemberdayaan hutan rakyat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi
b) Penguatan akses pasar dan kepastian penjualan melalui perluasan skema perjanjian jual beli, tidak hanya dengan pelaku industri tetapi juga perorangan yang membutuhkan bahan baku minyak atsiri.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2024 anggaran Urusan Kehutanan adalah sebesar Rp7.042.307.460,00 yang dialokasikan ke dalam 6 program, 14 kegiatan, dan 29 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp6.852.403.311,00 (97,30%) dengan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.157. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	dokumen	1	1
			Masterplan RTH Sumbu Filosofi	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	1	1
			Pencanangan Rehabilitasi Lahan di Kawasan Penyangga Gunung Merapi	ha	10	10
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram			
			Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	objek	2	2
			Desain tapak Tahura Bunder	dokumen	1	1
			Penandaan tanda batas dalam kawasan di Tahura	pal	165	165
			Pengendalian populasi tanaman invasif di Tahura	ha	19	19
			Penambahan koleksi tanaman di Tahura	jenis	10	10
			Inspirasi Hijau "Publikasi Potensi hutan Istimewa DIY"	kali	1	1
			Sosialisasi KTH (Kelompok Tani Hutan)	kali	10	10
			Pembuatan Kandang Rusa	Kandang	1	1
			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	1	1
			Monitoring Evaluasi BKK Demplot Jogja Hijau	Kalurahan	3	3
			Roadmap Jogja Smart Environment	dokumen	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi			
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	Paket	1	1
			Penyediaan Jalan produksi	Meter	2000	2000
			Produksi Hasil Hutan Kayu	ha	15	15
			Produksi Hasil Hutan Minyak Kayu Putih	Liter	20000	20003
			Pengembangan Wana Tematik	ha	10	10
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi			
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	36	36
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung			
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	9	9
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	15581	15581
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)			
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	dokumen	1	1
			Fasilitasi Forum DAS DIY	dokumen	1	1
			Dokumen RTnRL 2025	dokumen	1	1
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	200	200
			Pembangunan KBR	unit	2	2
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			
			Konservasi Sumber Mata Air Ngepring, Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman	ha	5	5
			Penghijauan Lingkungan	ha	1	1
			Kajian penanganan kera ekor panjang di DIY	paket	1	1
			Podcast konservasi alam	kali	8	8
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan			
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	unit	5	5
			Pembangunan Gully Plug	unit	5	5
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	15581	15581
			Pemeliharaan batas kawasan hutan	km	22	22

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan	bulan	12	12
			Fasiitasi pembentukan dan pembinaan masyarakat mitra polhut	angkatan	1	1
			Pencegahan, penanggulangan, dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan	lokasi	6	6
			Pembinaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan pada 5 BDH di wilayah DIY	angkatan	5	5
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	laporan	1	1
			Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api	angkatan	1	1
			Pelaksanaan patroli/sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	angkatan	1	1
			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi			
			Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	unit mana-gemen	18	18
			Jumlah Pemegang perizinan yang tertib dalam usahanya	unit	18	18
			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
			Pembinaan Pengendalian dan pegawasan Usaha Kehutanan	unit	60	60
			Sertifikasi Sumber Benih			
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	sertifiikat	1	1
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	sertifiikat	1	1
			Sertifikasi Mutu Benih			
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	sertifiikat	1	1
			Jumlah sertifikat Mutu Benih yang diterbitkan	sertifiikat	1	1
			Sertifikasi Mutu Bibit			
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	sertifiikat	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	sertifiikat	1	1
			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit			
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	laporan	1	1
			Jumlah data (Asal usul,Jenis mutu) Benih dan atau Bibit yang beredar	laporan	1	1
			Pembangunan Sumber Benih			
			Luas Sumber Benih yang Dibangun	ha	5	5
			Pembuatan bibit nangka dan petai 5.625 batang dan petai 625 batang	batang	6250	6250
			Pembuatan bibit: Nangka 6.000 batang; Sersat 11.000 batang; Munggur 16.000 batang dan Sengon 17.000 batang	batang	50000	50000
			Pemeliharaan sumber benih unggul kayu putih seluas	ha	5	5
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi			
			Operasi kegiatan pengamanan kawasan Tahura Provinsi	Operasi	1	1
			Pembersihan lahan bawah tegakan	ha	2	2
			Pembuatan sekat bakar	ha	2	2
			Pemeliharaan tegakan rawan bencana	Pohon	10	10
			Pengamanan kawasan	ha	771.32	771.32
			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi			
			Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	ha	6	6
			Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi	bulan	12	12
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi			
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	desa	5	5
			Pembinaan dan Pendampingan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan KPHK Tahura	desa	5	5
			Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	dokumen	1	1
			Penyusunan rencana kegiatan perlindungan KEE Lahan Basah di DIY	dokumen	1	1
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	orang	40	40
			Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	orang	40	40
			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	10	10
			Pembinaan dan Bimtek KTH	KTH	10	10
			Peningkatan Kelas KTH	KTH	10	10

Sumber: DLHK DIY, 2024

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Kondisi Umum

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Urusan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan energi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, kebijakan dan pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral difokuskan pada upaya penguatan ketahanan dan keamanan energi, peningkatan akses energi bagi masyarakat, serta dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, penataan dan pelayanan perizinan, fasilitasi infrastruktur, serta pengawasan dan pengendalian pada suburusan geologi dan air tanah, pertambangan mineral dan batuan, energi baru terbarukan, serta ketenagalistrikan.

Sebagai dasar pengukuran kinerja, indikator dan target capaian Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027. Indikator tersebut digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan serta menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.158. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capai-an 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Tar-Get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	%	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99	99,99	99,99	100	99,99	99,99	100	99,99
2	Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9,23	9,28	9,29	100,11	9,38	9,38	99,04	9,23
3	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	< 20	< 20	< 20	100	< 20	< 20	100	< 20

**) Target Penyelarasan kinerja Tahun 2025*
Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

Persentase Rumah Tangga berakses listrik atau rasio elektrifikasi digunakan sebagai indikator kinerja utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suburusan ketenagalistrikan, khususnya dalam pemenuhan akses listrik bagi masyarakat. Pada tahun 2025, rasio elektrifikasi DIY tercatat mencapai 99,99% berdasarkan data Sistem Informasi Listrik dan Manajemen (SILM) PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Capaian tersebut mencerminkan kinerja Pemda Daerah DIY yang

secara konsisten meningkatkan akses listrik khususnya bagi masyarakat tidak mampu baik secara kuantitas maupun kualitas (keamanan), meskipun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik karena kondisi dan pertimbangan tertentu, antara lain keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta pilihan sadar sebagian rumah tangga yang menolak penyediaan listrik.

Sejalan dengan target RPJMD DIY Tahun 2022–2027, Pemerintah Daerah terus melakukan upaya peningkatan kualitas akses listrik, tidak hanya dari sisi keterjangkauan tetapi juga aspek keselamatan ketenagalistrikan. Permasalahan rumah tangga miskin yang masih memperoleh akses listrik secara tidak langsung atau menyalur (gantol) dan belum memenuhi standar Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda DIY telah melaksanakan kolaborasi dengan Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Melalui Gerakan URUPKE (Urgensi Rasio Elektrifikasi untuk Pengentasan Kemiskinan), sebuah gerakan yang diinisiasi sebagai ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan salah satunya badan usaha melalui program Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Resposibility (CSR), dalam menghadirkan bantuan sambungan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu.



Gambar 3.60. Seremoni Penyerahan Bantuan Akses Listrik Masyarakat melalui Gerakan URUPKE

Selain peningkatan akses listrik bagi rumah tangga, Pemda DIY juga melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan ketenagalistrikan guna menjamin penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini selaras dengan indikator kinerja urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan inventarisasi, pembinaan, serta sosialisasi kepada pelaku pengusahaan atau penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang belum berizin, serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin untuk memastikan pemenuhan kewajiban perizinan dan standar Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).

Selain pelaksanaan suburusan ketenagalistrikan yang berfokus pada pemerataan akses listrik yang aman bagi masyarakat, Pemda DIY juga berperan aktif dalam mendukung transisi energi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan pemanfaatan energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan bersumber dari energi terbarukan, baik sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik maupun sebagai bahan bakar.

Meskipun potensi energi terbarukan di DIY relatif terbatas, pemanfaatannya menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020. Hal tersebut tercermin dari peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer DIY, yaitu sebesar 6,08% pada tahun 2020, meningkat menjadi 6,91% pada tahun 2023, dan mencapai 7,65% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer diperkirakan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pendukung.

Pemanfaatan energi terbarukan sebagai bahan bakar di DIY antara lain dilakukan melalui penggunaan biodiesel (B40) dan pemanfaatan biogas dari limbah ternak. Sementara itu, pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber tenaga listrik dilaksanakan melalui pengembangan dan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, baik PLTS atap maupun non-atap, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), serta Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid berbasis bayu dan surya, yang dikelola oleh pihak swasta, masyarakat, maupun Pemerintah Daerah.

Pembangkit listrik energi terbarukan milik Pemda DIY telah dioperasikan dan dikelola secara berkelanjutan. Pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan pembangkit – pembangkit tersebut untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekitar dalam rintisan Desa Mandiri Energi serta sebagai sarana edukasi pengembangan energi terbarukan.

Indikator persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang dijabarkan melalui perbandingan antara luasan izin pengusahaan pertambangan dengan luasan kawasan peruntukan pertambangan yang telah ditetapkan dalam pola ruang. Pada tahun 2025, luasan izin pengusahaan pertambangan tercatat seluas 3990,49 hektare, sedangkan luasan kawasan

peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang adalah 42.944 hektare. Dengan demikian, capaian persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang pada tahun 2025 adalah sebesar 9,29%. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengusahaan pertambangan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya mineral, kesesuaian tata ruang, konservasi sumber daya mineral, serta aspek lingkungan dan sosial, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan. Pengaturan dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan. Selain itu, pengaturan juga diwujudkan melalui penerbitan izin pengusahaan pertambangan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral agar tidak terjadi pengambilan yang melampaui batas, serta tetap menyesuaikan dengan luas wilayah, kondisi demografi DIY, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penerbitan izin tersebut didasarkan pada rekomendasi teknis atau persetujuan dari perangkat daerah terkait, yaitu:

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
(2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
(3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
(4) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Kementerian Pekerjaan Umum (apabila permohonan berada di alur sungai)

Kegiatan pembinaan pengusahaan pertambangan dilaksanakan terhadap aktivitas penambangan baik yang belum memiliki izin maupun yang telah berizin. Pembinaan terhadap penambangan tanpa izin ditujukan untuk mendorong para pelaku usaha agar menempuh mekanisme perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan secara legal dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pembinaan terhadap penambangan yang telah berizin dimaksudkan untuk mendorong para pemegang izin mematuhi seluruh ketentuan dalam perizinan, sehingga pelaksanaan usaha pertambangan dapat berjalan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik.



Gambar 3.61. Sosialisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2025 tentang Cetak Biru Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

Dalam rangka pelaksanaan usaha pertambangan yang berjalan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, pembinaan kepada kegiatan penambangan yang telah berizin juga disertai dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian. Sasaran pengawasan dan pengendalian adalah pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan. Selanjutnya, Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pertambangan secara komprehensif, Gubernur membentuk Tim Terpadu

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan. Pada Tahun 2025, Tim Terpadu dibentuk melalui Keputusan Gubernur DIY No. 42/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan. Tim Terpadu beranggotakan unsur pengawas, unsur penerbit perizinan, unsur penerbit rekomendasi teknis/persetujuan, unsur polisi pamong praja dan unsur aparat penegak hukum.

Dari hasil pengawasan dan pengendalian, pemegang izin pengusahaan pertambangan yang belum memenuhi ketentuan perizinan dan kaidah pertambangan yang baik dikenakan Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Peraturan Gubernur Nomor 84 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu.



Gambar 3.62. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Selain pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penambangan yang telah berizin, kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) juga menjadi perhatian Pemda DIY dikarenakan adanya PETI dikhawatirkan dapat merusak Lingkungan Hidup dan mengganggu tatanan sosial kehidupan bermasyarakat. Dalam penanganan PETI, Pemda DIY hanya memiliki kewenangan dalam inventarisasi kegiatan PETI yang dilaksanakan melalui kegiatan

pengawasan rutin dan pengawasan dalam rangka menindaklanjuti aduan dan/atau informasi dari masyarakat maupun berbagai pihak. Inventarisasi kegiatan PETI dibarengi dengan upaya pembinaan kepada pemrakarsa PETI untuk menghentikan kegiatan dan mengurus perizinan terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis melalui Surat Himbauan, dimana Surat Himbauan tersebut ditembuskan kepada Aparat penegak Hukum (APH) untuk dilakukan penegakan hukum apabila Himbauan tersebut tidak diindahkan oleh pemrakarsa PETI.



Gambar 3.63. Penegakan Hukum terhadap PETI di Sungai Progo Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo

Sebagai upaya untuk meminimalisir kegiatan PETI, Pemda DIY juga melakukan tindakan preventif cdengan memasang papan larangan “Dilarang Melakukan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin” di lokasi yang berpotensi munculnya kegiatan PETI.



Gambar 3.64. Pemasangan Papan Larangan Penambangan Tanpa Izin di Lokasi potensi dilakukan penambangan

Pada sub-urusan Kegeologian dan Sumber Daya Air Tanah, terlaksananya upaya konservasi sumber daya air tanah memiliki indikator Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, Pemda DIY melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketinggian muka air tanah pada sumur pantau baik yang dimiliki oleh Pemda DIY, Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemerintah Desa, maupun yang dimiliki oleh pemegang izin pengusahaan air tanah. Total sumur pantau yang diawasi pada tahun 2025 adalah sejumlah 47 sumur pantau yang tersebar di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, rerata ketinggian muka air tanah di seluruh kabupaten/kota masih berada dalam kategori aman (<20%), sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.



Gambar 3.65. Monitoring Penurunan Muka Air Tanah pada Sumur Pantau Wirobrajan, Yogyakartal

Selain melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketinggian muka air tanah, upaya Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman dilaksanakan dengan cara Pembatasan terhadap ekstraksi air tanah baik melalui instrumen perizinan (Pengendalian dan Pengawasan) dan instrumen evaluasi (Penetapan Nilai

Perolehan Air Tanah). Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah berizin dilaksanakan secara *on site*. Pemerintah Daerah DIY secara aktif mendorong pengguna air tanah untuk usaha di DIY untuk mengikuti penataan izin melalui pelaksanaan pendampingan pengajuan penataan izin air tanah. Selain itu, Pemda DIY memantau pemanfaatan air tanah (dalam rangka konservasi air tanah) sesuai dengan volume yang diizinkan dalam dokumen perizinan, menghimbau untuk mengoptimalkan pemakaian air PDAM atau sumber air lainnya, memastikan keberfungsian meteran air, serta menyarankan kepada pemanfaat air tanah untuk memperhatikan masa berlaku izin agar dapat mengurus perpanjangan izinnya melalui OSS. Sampai dengan akhir tahun 2025, data pengusahaan air tanah di DIY sejumlah 2191 titik, dengan total izin sejumlah 295.

Terhadap pemanfaat air tanah tidak berizin, Pemda DIY melakukan inventarisasi dan menghimbau kepada pemanfaat untuk memasang meteran air agar volume pengambilan air tanah dapat dihitung secara akurat. Pelaksanaan Pemantauan Pengusahaan Air Tanah baik berizin maupun tidak berizin juga dilakukan secara terintegrasi bersama dengan Tim Terpadu sesuai Keputusan Gubernur DIY No. 61/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah. Sosialisasi terkait perizinan air tanah dan pemanfaatan air tanah dilaksanakan melalui kunjungan langsung pada objek pemanfaat air tanah. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial Dinas PUPESDM DIY.



Gambar 3.66. Pengawasan air tanah belum berizin di Bantul (Kiri) dan Pemantauan pengusahaan air tanah tidak berizin oleh Tim Terpadu (Kanan)

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Masih terdapat aktivitas penambangan yang belum berizin yang menimbulkan persaingan harga komoditas yang tidak sehat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya minat para pelaku usaha untuk mengajukan maupun menindaklanjuti proses perizinan secara resmi. Selain itu, praktik penambangan tanpa izin juga tidak sesuai dengan tata laksana kaidah pertambangan yang baik serta menyulitkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

b) Wilayah Pertambangan yang menjadi dasar penerbitan perizinan tidak termasuk ke dalam pola ruang RTRW sehingga terdapat peruntukan lain yang berada di atas Wilayah Pertambangan, yang memungkinkan aturan peruntukan di atas Wilayah Pertambangan tersebut tidak memperbolehkan adanya kegiatan pertambangan.

c) Masih terdapat pelaku usaha pertambangan yang kurang memperhatikan kewajiban perizinan. Padahal, perizinan merupakan instrumen penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan, melindungi

lingkungan, serta menjaga keberlangsungan sarana prasarana dan objek vital.

d) Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, kebutuhan terhadap material mineral dan batuan juga mengalami peningkatan. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, maka berpotensi menimbulkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.
e) Persentase penerbitan izin pengusahaan air tanah pada sumur produksi untuk usaha di DIY masih relatif rendah.
f) Dalam proses pengawasan air tanah, jumlah sumur pantau yang berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi ketinggian muka air tanah di DIY masih belum merata. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa terdapat kewenangan Gubernur dimana izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah (usaha skala mikro, baik wilayah sungai lintas provinsi maupun kabupaten) menjadi kewenangan Gubernur. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah masih menunggu NSPK yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM.
g) Pemenuhan akses listrik bagi rumah tangga dengan kondisi khusus memerlukan pendekatan dan solusi alternatif yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran, termasuk rumah tangga dengan ODGJ serta rumah tangga yang secara sadar memilih untuk tidak menggunakan layanan listrik karena pertimbangan tertentu.
h) Masih terdapat rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang

listrik/sambungan listrik terakhir. Sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik.

i) Keterbatasan pendanaan dalam memberikan akses listrik kepada rumah tangga miskin belum ber akses listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan.

j) Potensi energi terbarukan dan sumber pembiayaan yang terbatas dalam rangka akselerasi peningkatan porsi EBT dalam Bauran energi primer.

(2) Solusi

a) Mengintensifkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan pertambangan disertai penindakan hukum bagi kegiatan PETI dengan berkoordinasi lebih intensif dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Optimalisasi pengawasan dan pengendalian secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang ditunjuk melalui Keputusan Gubernur DIY No. 42/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan.

b) Menyesuaikan Wilayah Pertambangan dengan ketentuan RTRW dan status pertanahan yang berlaku di DIY sehingga Wilayah Pertambangan dapat langsung menjadi acuan pengajuan permohonan perizinan pengusahaan pertambangan

c) Sosialisasi dan pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku usaha pertambangan agar melakukan penambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik

d) Penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan permasalahan pertambangan perlu untuk terus dilaksanakan. Fokus utama diarahkan pada penertiban kegiatan pertambangan

tanpa izin (PETI) serta penyusunan regulasi perizinan yang aplikatif dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.

e) Pelaksanaan pembinaan penggunaan air tanah, monitoring *on-site* bersama tim terpadu, dan pelaksanaan pendampingan pengajuan penataan izin air tanah kepada pengguna air tanah untuk usaha yang belum berizin.
f) Koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk dapat mengakses/berbagi data sumur pantau yang dimiliki Badan Geologi di wilayah DIY. Koordinasi dengan Badan Geologi juga terkait kewenangan Gubernur dalam rangka pengawasan pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah.
g) Pemenuhan akses listrik bagi rumah tangga dengan kondisi khusus dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan peran Perangkat Desa dan keluarga terdekat, serta memanfaatkan teknologi energi terbarukan yang sesuai dengan potensi setempat, antara lain tenaga surya sebagai sumber listrik minimal untuk kebutuhan penerangan.
h) Melaksanakan survei dan pengusulan pengembangan jaringan listrik perdesaan untuk rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang listrik/sambungan listrik terakhir.
i) Membangun kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, swasta dan BUMN/BUMD dalam penyediaan program bantuan akses listrik gratis melalui mekanisme Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL APBN) dan Cooperate Social Responsibility (CSR). Sebagai inisiasi awal adalah melalui Gerakan URUPKE.

j) Membentuk forum energi daerah, melakukan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk ambil bagian dalam pengembangan pemanfaatan energi terbarukan di DIY.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui 4 program dan 8 subkegiatan dengan alokasi anggaran Rp972.746.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp898.632.822,00 atau 92,38% dan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.159. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**			
			Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	**%**	**Kurang dari atau sama dengan 10**	**Kurang dari atau sama dengan 10**
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			
			1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Indikator SIPD)	laporan	3	3
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 1. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Indikator SIPD)	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			
			1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1
			2. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Laporan	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	Hektare	3.988	3990,49
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
			1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	2	2
			2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY	Laporan	1	1
			3. Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin	Laporan	1	1
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
			1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Indikator SIPD)	dokumen	3	3
			2. Rekomendasi Teknis/persetujuan izin Usaha Pertambangan	laporan	1	1
			3. Penyiapan bahan rekomtek/persetujuan perizinan usaha pertambangan	laporan	1	1
			4. Penyusunan Raperda Pengelolaan Pertambangan	laporan	1	1
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
			1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk	Laporan	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
			2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai Kaidah Pertambangan yang Baik	Laporan	1	1
			3. Pengawasan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Laporan	1	1
			Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
			Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
			1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Indikator SIPD)	dokumen	5	5
			2. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan	laporan	1	1
			3. Pembinaan usaha pertambangan dalam rangka optimalisasi perpajakan	laporan	1	1
			4. Penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang Wilayah Pertambangan Rakyat di Gunungkidul	dokumen	1	1
			5. Penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang Wilayah Pertambangan Rakyat di Bantul dan Kulon Progo	dokumen	1	1
			6. Evaluasi Pasca Operasi Produksi Izin Peertambangan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Rakyat dalam Rangka Reklamasi dan Pascatambang di Wilayah Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul			
			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			
			1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	1	1
			2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Laporan	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
			Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	TOE	56.030	83.407.38
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			
			Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah			
			1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	1	1
			2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan	Laporan	1	1
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT			
			1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit	1	1
			2. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan	unit	1	1
			3. Rehabilitasi Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
			Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	Rumah Tangga	15.223	20.917
			Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan	Izin	120	120
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
			Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
			1. Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan	dokumen	1	1
			2. Rekomendasi teknis Ijin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	laporan	1	1
			3. Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	laporan	1	1
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
			1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1
			2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	Laporan	1	1

Sumber: DPUPESDM DIY, 2025

6) Urusan Perdagangan

a. Kondisi Umum

Pada tahun 2025, Perekonomian DIY menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tercermin dari capaian PDRB sektor perdagangan yang mencapai Rp10,02 triliun. Angka

ini mencerminkan peningkatan sebesar 5,27% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sektor perdagangan menyumbang sebesar 8,05% terhadap total PDRB DIY. Salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ini adalah aktivitas ekspor, yang pada tahun tersebut mencapai nilai USD 558,72 juta. Komoditas utama yang diekspor dari DIY meliputi pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan, barang dari kulit, perabot dan penerangan rumah, jerami dan bahan anyaman, serta kertas dan karton. Negara-negara tujuan utama ekspor DIY meliputi Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Australia, dan Belanda. Data berikut ini menyajikan perkembangan ekspor DIY dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.160. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2021-2025 (dalam US$ Juta)

No	Komoditi	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	185,2	213,5	176,9	197,76	197,97
2	Perabot, Penerangan Rumah	76,4	68,1	56,8	59,92	53,43
3	Barang-barang Rajutan	50,9	62,7	51	66,37	78,51
4	Barang-barang dari Kulit	48,6	64,4	36,9	57,20	63,29
5	Jerami / Bahan Anyaman	45	38	25,5	27,67	26,41
6	Kayu, Barang dari Kayu	24,8	27,8	20,5	19,11	20,23
8	Kertas / Karton	14,8	16,1	13,8	32,74	24,88
10	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian	11,8	15,2	10,5	19,61	20,45
11	Lainnya	99,5	77,5	80,4	66,63	73,55
	Total Ekspor	557	583,3	472,3	547,01	558,72

Sumber: BPS DIY, Desember 2025

Terkait dengan kinerja Urusan Perdagangan pada tahun 2025, berikut target dan realisasi kinerja Urusan Perdagangan:

Tabel 3.161. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
			Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan								
Kontribusi	%	8,07	8,44	8,05	95,38	8.54	8.54	94,26

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
			Target *)	Realisasi	% Realisasi			
perdagangan terhadap PDRB DIY								
Indikator Kinerja Sasaran								
Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	%	3,96	5,38	5,27	97,96	5.49	5.49	95,99

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: BPS DIY, Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, kinerja sektor perdagangan pada tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Laju pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun 2025 mencapai 5,27%. Capaian ini juga menunjukkan bahwa perangkat daerah berhasil mencapai 97,96% dari target yang ditetapkan, dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB DIY tahun 2025 sebesar 8,05%. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai faktor eksternal, antara lain pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi seperti bazar, pasar murah, dan operasi pasar, yang turut meningkatkan distribusi barang kebutuhan pokok oleh berbagai instansi. Selain itu, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY turut memberikan dorongan positif terhadap sektor pariwisata dan perdagangan. Pertumbuhan ekspor juga banyak dipengaruhi oleh pembukaan pasar ekspor ke India, khususnya untuk produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan tangan. Selain itu, adanya peningkatan perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara mitra seperti Chili, Uni Emirat Arab, Mozambik, Australia, dan Hong Kong turut berkontribusi terhadap perkembangan ekspor DIY.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Sektor perdagangan dihadapkan pada berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah

kendala pada ekspor produk kayu ke negara tujuan utama, terutama di Uni Eropa, yang disebabkan oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (*European Union Deforestation Regulation*/EUDR). Selain itu, situasi global yang kurang kondusif turut memperburuk kondisi pasar ekspor, sehingga kegiatan ekspor menjadi cukup lesu. Hal ini meningkatkan tantangan dalam hal persaingan kualitas produk, inovasi, teknologi, dan standardisasi, yang menjadi lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utama adalah konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel, yang menyebabkan peningkatan biaya logistik ekspor-impor. di samping itu, krisis ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor DIY, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, turut menekan permintaan terhadap komoditas utama ekspor DIY, yaitu pakaian jadi dan tekstil, yang mengalami penurunan signifikan. Tidak kalah penting, menurunnya daya beli masyarakat baik di dalam negeri maupun di negara tujuan ekspor turut menjadi faktor penghambat. Selain itu, maraknya impor ilegal yang semakin meningkat juga menjadi pesaing serius bagi produk lokal, sehingga menambah tantangan yang harus dihadapi sektor perdagangan.

(2) Solusi

Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor perdagangan, berbagai langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pemerintah didorong untuk memperluas pasar ekspor dengan menargetkan negara-negara baru seperti Timur Tengah, India, Australia, Jepang, dan Afrika, sekaligus meningkatkan promosi dan pemasaran produk secara domestik.

Selain itu, perlu adanya upaya dari pemerintah pusat untuk mencegah dan mengurangi impor ilegal serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar global. Pembinaan kepada pelaku usaha di DIY juga sangat penting, terutama dalam rangka memanfaatkan aplikasi daring sebagai media pemasaran. Optimalisasi penggunaan berbagai platform digital ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan tren konsumen yang semakin beralih ke belanja online. di sisi lain, jaminan ketersediaan stok komoditas pokok penting serta penetapan harga yang tidak melebihi harga eceran tertinggi harus menjadi perhatian utama. Penyediaan data harga terkini dan informasi stok barang pokok penting menjadi bagian dari upaya peningkatan sistem peringatan dini (*early warning system*). Selain itu, pelaksanaan operasi pasar, bazar, dan pasar murah secara rutin di berbagai tempat, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, sangat penting untuk memastikan ketersediaan stok dalam negeri dan menjaga stabilitas harga.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 program dan 6 subkegiatan pada tahun 2025, dengan target pencapaian realisasi fisik sebesar 100%. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.951.107.200, sementara realisasi yang telah dicapai adalah Rp1.935.347.757, atau sekitar 99,25%. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.162. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN	DINAS PERINDUSTRIAN	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			
			Jumlah Perusahaan Ekspor	Perusahaan	575	575

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	BIDANG PERDAGANGAN	DAN PERDAGANGAN	**Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA**			
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	27500	27500
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	90	100
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	1	1
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	1
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	%	20	20
			Pameran Dagang Internasional/Nasional			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	119	119
			Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	8	8
			Peningkatan Citra Produk Ekspor			
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	20	20
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Jumlah Barang Jasa yang Sesuai dengan Standar	%	96,6	99,94
			Persentase penanganan sengketa konsumen	%	97	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	25	25
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	1
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (Rpmiliar)	Rpmiliar	2,64	3,19
			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	5	5

Sumber:Dinas Perindag DIY, 2025

7) Urusan Perindustrian

a. Kondisi Umum

Sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama PDRB DIY dengan kontribusi sebesar 11,80%. Laju pertumbuhan sektor ini mencapai 4,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Subsektor utama yang mendukung sektor industri pengolahan adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik.

Tabel 3.163. Perkembangan PDRB Industri Pengolahan 2021-2025

Subsektor	2021 (Rp Miliar)	2022 (Rp Miliar)	2023 (Rp Miliar)	2024 (Rp Miliar)	2025 *) (Rp Miliar)
Industri Makanan dan Minuman	6.966,04	7.052,86	7.392,38	7.740,44	8.078,70
Industri Pengolahan Tembakau	631,43	645,79	686,35	685,62	715,58
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.494,40	1.521,63	1.573,95	1.631,76	1.703,07

Subsektor	2021 (Rp Miliar)	2022 (Rp Miliar)	2023 (Rp Miliar)	2024 (Rp Miliar)	2025 *) (Rp Miliar)
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	257,09	273,19	284,21	290,53	303,23
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	187,17	198,56	199,67	204,83	213,78
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	283,78	286,49	311,91	317,81	331,70
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	175,13	174,78	166,88	163,06	170,19
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	268,04	263,00	258,70	252,45	263,48
Industri Barang Galian bukan Logam	332,93	347,62	367,35	381,69	398,37
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	806,19	824,26	887,28	941,60	982,75
Industri Mesin dan Perlengkapan	411,90	407,29	410,04	399,98	417,46
Industri Alat Angkutan	2,43	2,36	2,40	2,40	2,50
Industri Furnitur	584,49	609,41	615,89	622,95	650,17
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	269,44	283,13	285,25	294,45	307,32

**) Angka Sementara*
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Berikut ini capaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan target yang telah disusun

Tabel 3.164. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
			Target*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan								
Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY	%	11,85	11.89	11,80	99,24	12,30	12,06-12,30	95,93
Indikator Kinerja Sasaran								
Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	%	3,79	3.7	4,37	118,11	4	4,1	109,25

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: BPS DIY, 2025

Selama tahun 2025, kinerja sektor industri pengolahan di DIY menunjukkan capaian yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan apabila dilihat dari indiktor Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB dengan capaian sebesar 118,11%. Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,94% pada tahun 2024 menjadi 4,37% Pada Tahun 2025. Peningkatan kinerja sektor ini didukung oleh meningkatnya permintaan terhadap produk ekspor dari industri pengolahan DIY, terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan, serta adanya program pemerintah pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri, seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri serta Program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gratis. di samping itu, pemanfaatan teknologi produksi yang semakin meningkat, yang ditandai dengan bertambahnya impor barang modal dan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY, turut berkontribusi secara langsung terhadap permintaan produk dari industri pendukung sektor pariwisata, seperti industri makanan dan minuman, kerajinan, serta pakaian jadi.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Perkembangan impor produk, baik yang legal maupun ilegal, semakin meningkat dan menjadi pesaing serius yang dapat mematikan keberadaan industri lokal, termasuk di DIY. Selain itu, tingginya harga bahan baku impor menjadi kendala utama bagi pelaku usaha industri yang bergantung pada bahan tersebut. Kondisi ini diperparah oleh ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, yang menyebabkan kenaikan harga energi dan minyak dunia serta meningkatnya biaya pengiriman antar negara. di sisi lain, penurunan

permintaan terhadap produk industri pengolahan DIY dari negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa, terjadi akibat adanya resesi di negara-negara tersebut. Dampak dari penurunan permintaan ini cukup signifikan terhadap kinerja industri DIY. Selain faktor-faktor tersebut, pemanfaatan teknologi produksi di sektor Industri Kecil Menengah (IKM) masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri tersebut secara optimal.

(2) Solusi

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri lokal, berbagai langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, peningkatan kualitas produk industri lokal harus dilakukan melalui diversifikasi, inovasi produk, standardisasi, dan sertifikasi agar mampu bersaing dengan produk pesaing di pasar. Untuk mendukung hal tersebut, kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam memanfaatkan teknologi perlu didorong melalui program hibah peralatan khusus bagi IKM. Selanjutnya, penyediaan dan penggunaan bahan baku lokal perlu didorong, sekaligus memperkuat kemitraan dengan penyedia bahan baku dari provinsi lain guna memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, peluang ekspor ke negara tujuan baru seperti Afrika, Jepang, Australia, dan Timur Tengah harus dibuka seluas-luasnya, didukung dengan peningkatan pemasaran domestik melalui optimalisasi penjualan daring yang efektif dan efisien. Terakhir, peningkatan kapasitas IKM dalam pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standardisasi dan sertifikasi produk harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing industri lokal secara keseluruhan.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Kinerja Urusan Perindustrian didukung oleh tujuh program, yaitu: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta dalam Urusan Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta dalam Urusan Kebudayaan, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Penyelenggaraan Keistimewaan dalam Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Realisasi fisik untuk program-program tersebut mencapai 100%, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp33.140.998.167, dan terealisasi sebesar Rp30.984.265.633, atau 93,49%.

Tabel 3.165. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			
			Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	Sentra	1	1
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Doku-men	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Triliun rupiah	13,38	14,87
			Pengadaan Sarana Prasarana			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	2	2
			Pengembangan Industri Kreatif			
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	IKM	6300	6300
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	413.500	373.480
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Doku-men	1	1
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Doku-men	1	1
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	Perusaha-an	16.543	23.852
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan provinsi			
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah	Doku-men	1	1
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian			
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Doku-men	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	Perusaha-an	600	2552
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Doku-men	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian			
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Doku-men	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik (BPTTG)	%	60	60
			Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Doku-men	1	1
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	100	90,32
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku-men	4	4
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	129	129
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku-men	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	13
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17	17
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21	21
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doku-men	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	Doku-men	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	13
			Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	18
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	30
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	19
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	100	90,20
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku-men	12	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doku-men	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	413.500	373.480
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Doku-men	1	1

Sumber:Dinas Perindag DIY, 2025

8) Urusan Ketransmigrasian

a. Kondisi Umum

Urusan transmigrasi merupakan salah satu implementasi dari Program Prioritas Nasional 2 (PN 2), yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, serta Prioritas Nasional 6 (PN 6), yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. Sedangkan pada pembangunan DIY program transmigrasi menukung prioritas pembangunan yang pertama yaitu penurunan tingkat kemiskinan. Bagi Pemda DIY transmigrasi merupakan instrumen memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran, melalui program transmigrasi diharapkan muncul berbagai kesempatan kerja tidak hanya di sektor pertanian namun juga di berbagai sektor informal lainnya.

DIY sebagai daerah pengirim peserta transmigrasi telah berhasil memberangkatkan masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi selama tahun 2021-2025. Berikut data pemberangkatan tranmsmigran DIY Tahun 2021-2025.

Tabel 3.166. Jumlah Alokasi dan Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY Tahun 2021-2025

No	Tahun	Alokasi (KK)	Pemberangkatan (KK)
1	2021	10	10
2	2022	30	30
3	2023	20	20
4	2024	16	20
5	2025	20	15
		96	95

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

Berdasarkan data tersebut selama 5 tahun terakhir DIY telah memberangkatkan transmigran sejumlah 95 KK dari target alokasi 96 KK. Khusus tahun 2025 terdapat penurunan alokasi dari yang direncanakan semula 20 KK hanya diberangkatkan 15 KK. Hal ini dikarenakan adanya SK Dirjen PPK Transmigrasi Nomor 98 Tahun 2025 tertanggal 1 Agustus 2025 perihal perubahan alokasi penempatan transmigran tahun 2025 yang semula 20 KK menjad 15 KK sehingga terjadi perubahan pembagian alokasi ke kabupaten/kota di DIY. Alokasi calon transmigran DIY 15 KK tersebut dengan tujuan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah 12 KK dan Polewali Mandar Sulawesi Barat 3 KK.

Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2022–2027, Urusan transmigrasi mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat pada urusan transmigrasi dengan indikator persentase transmigran yang bertahan pada masa adaptasi dengan tiga strategi yang diupayakan yaitu meningkatkan kualitas calon transmigran, meningkatkan kuantitas alokasi penempatan, dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin untuk membuka usaha.

Tabel 3.167. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2024-2025 serta Capaian 2025 terhadap Akhir RPJMD 2022–2027

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-Rasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Reali-sasi	Realisasi (%)			
Indikator Kinerja tujuan									
1	Terwujudnya peningkatan produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/ tenaga kerja	57,08	57,51	59,66	103,74	61,19	62,45	95,53
Indikator Kinerja Sasaran									

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-Rasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Reali-sasi	Realisasi (%)			
1	Persentase transmigran yang bertahan pada masa adaptasi	%	100	90	100	111,11	90	90	111,11

**) Target Penyelarasan kinerjan Tahun 2025*
Sumber: Disnakertrans DIY, 2025

Capaian indikator Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi sebesar 100% orang atau 111,11% dari target 90%. pada tahun 2023 telah ditempatkan transmigran sejumlah 20 KK dan telah dilakukan evaluasi selama dua tahun sehingga diketahui masih tetap tinggal beradaptasi di lokasi transmigrasi. Hasil evaluasi penempatan transmigran pada tahun 2022 dan 2023 antara lain tidak ditemukan laporan adanya transmigran yang kembali, terpenuhinya hak-hak transmigran, diterimanya bantuan-bantuan kebutuhan hidup dan usaha membuat transmigran mampu beradaptasi, mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

Evaluasi terhadap penempatan transmigran di daerah tujuan penting dilakukan karena merupakan indikator keberhasilan program transmigrasi sejak dari seleksi calon transmigran, koordinasi penyiapan lahan dengan daerah tujuan dan koordinasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh transmigran selama beradaptasi di lokasi transmigrasi. Transmigran yang berhasil ditempatkan pada tahun 2024 sejumlah 20 KK dan tahun 2025 sejumlah 15 KK. Penempatan transmigran pada tahun 2024 dan 2025 ini akan dievaluasi selama masa adaptasi dan akan menjadi capaian kinerja pada tahun 2026 yang akan datang.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Bekal ketrampilan calon transmigran untuk beradaptasi di daerah tujuan masih terbatas
b) Alokasi penempatan transmigran yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat terbatas.
c) Adanya potensi permasalahan sengketa Lahan Usaha (LU) dan terbatasnya sarana prasarana di daerah tujuan.

(2) Solusi

a) Menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan bagi calon transmigran untuk meningkatkan ketrampilan agar mampu beradaptasi di daerah tujuan
b) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kuota peserta program transmigrasi.
c) Membangun kerja sama antar daerah dengan melibatkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator untuk meminimalisir permasalahan transmigrasi di daerah tujuan.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Sesuai RPJMD 2022–2027 urusan transmigrasi dilaksananakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan 2 subkegiatan. Pada Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp228.903.000,00 dan terealisasi sebesar Rp214.697.843,00 atau 93,79% dikarenakan adanya efisiensi belanja, sedangkan realisasi fisik terlaksana 100% sesuai tahapan ROPK yang direncanakan.

Penempatan transmigrasi tahun 2025 sebanyak 15 KK dari target 20 KK sehingga realisasi kinerja subkegiatan hanya mencapai 75%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi transmigran bagi pemda DIY berdasarkan SK Dirjen Nomor 98 Tahun 2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Tentang Perubahan Atas SK Dirjen Nomor 75 Tahun 2025 Tanggal 10 Juli 2025 Tentang Pembangunan dan Penempatan Transmigran Tahun 2025. Realisasi penempatan trans igran Tahun 2025 sebanyak 15 KK dengan perincian 12 KK atau 42 jiwa Ke Kab Poso Sulawesi Tengah dan 3 KK atau 9 jiwa Ke Kab Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Berikut tabel rincian capaian program dan subkegiatan Pada Tahun 2025

Tabel 3.168. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terwujudnya kesempatan kerja	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			
				Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	%	90	100
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	1
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
				Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Keluarga	20	15

Sumber: Disnakertrans DIY, 2025

3. PENUNJANG URUSAN

1) Perencanaan Pembangunan

a. Kondisi Umum

Pelaksanaan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu pilar pembangunan daerah di DIY. Perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam pelaksanaan urusan perencanaan adalah mengidentifikasi permasalahan pembangunan di DIY dan menyusun perencanaan yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pokok pembangunan. Hal ini tercermin dalam sasaran perangkat daerah Bapperida yang meliputi dua hal yaitu: 1) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dan 2) Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan, dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah. Target dan realisasi kinerja sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.169. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Targer Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan								
Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	%	98,11	90,74	98,33	108,36	91,07	94,44	118,98
Indikator Kinerja Sasaran								
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai	A (99,08)	A (99,09)	A (99,50)	100,41	A	A (99,11)	100
Persentase	%	99,21	96,03	99,22	103,32	90,48	96,83	114,19

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satu-an	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Targer Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Tar-get*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
ketercapaian sasaran perangkat daerah								

**) Target Penyelarasan kinerja Tahun 2025*
Sumber: Bapperida DIY, 2025

Realisasi kinerja tujuan pada tahun 2025 sebesar 98,33%, dengan target sebesar 90,74%, sehingga persentase ketercapaian sebesar 108,36%. Pada tahun 2025, Bapperida memperoleh kategori reformasi birokrasi A dengan nilai capaian 99,5, sedangkan untuk capaian sasaran utama sebesar 99,22% dengan persentase realisasi 103,32%. Angka 99,22% didapat dari perhitungan meta indikator di mana meta indikator sasaran adalah Jumlah Indikator sasaran PD tahun n yang tercapai dibagi Jumlah Indikator sasaran PD dalam RPJMD x 100%. Jumlah indikator sasaran PD yang tercapai pada tahun 2025 sebanyak 128 indikator dari total 129 indikator. Realisasi tersebut telah melampaui target pada tahun 2025 yaitu sebesar 96,03%. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran Bapperida didukung oleh koordinasi lintas sektor yang baik, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, konsistensi perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaporan, serta perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan secara kontinyu.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Perubahan kebijakan perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat, sehingga memerlukan waktu bagi daerah untuk menyesuaikan.
b) Penetapan target pembangunan yang tinggi dari pemerintah pusat yang bersifat *top down*.

(2) Solusi

a) Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, antar perangkat daerah dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
b) Mengoptimalkan potensi daerah yang ada untuk memenuhi target-target pembangunan.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025, Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui 3 Program dan 41 subkegiatan. Alokasi anggaran yang untuk melaksanakan 3 Program tersebut sebesar Rp20.989.332.428,00 dengan realisasi sebesar Rp19.431.590.171,00 atau 92,58%, dengan kinerja fisik tercapai 100%. Target dan realisasi subkegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.170. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
01.01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			
01.01.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3
01.01.02	Forum Perangkat Daerah	dokumen	1	1
01.01.03	Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	dokumen	1	1
01.01.04	Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024	dokumen	1	1
01.02	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**			
01.02.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD)	dokumen	4	4
01.02.01	DPA 2026	dokumen	1	1
01.02.02	DPA Perubahan Tahun 2025	dokumen	1	1
01.02.03	RKA 2026	dokumen	1	1
01.02.04	RKA Perubahan Tahun 2025	dokumen	1	1
01.03	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
01.03.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	22	22
01.03.01	Laporan Kinerja (LKjIP, Bahan LKPJ dan LPPD Perangkat Daerah Tahun 2024)	laporan	3	3
01.03.03	Laporan Monitoring dan Evaluasi Bapperida	laporan	19	19

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
01.04	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			
01.04.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD)	orang/bulan	115	115
01.04.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	115	115
01.04.02	Tambahan Penghasilan Pegawai	bulan	12	12
01.05	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah**			
01.05.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1
01.05.01	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1
01.06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah**			
01.06.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	2
01.06.01	Laporan keuangan Akhir Tahun (Gabungan)	laporan	1	1
01.06.02	Laporan keuangan Akhir Tahun (Audited)	laporan	1	1
01.07	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**			
01.07.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13	13
01.07.01	Laporan Keuangan Bulanan	laporan	12	12
01.07.02	Laporan Keuangan Semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya	laporan	1	1
01.08	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**			
01.08.00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	6
01.08.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah	bulan	12	12
01.09	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			
01.09.00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	13	13
01.09.01	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	12
01.09.02	Jurnal Perencanaan	dokumen	1	1
01.10	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			
01.10.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
01.10.02	Penyediaan Komponen Intstalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1	1
01.11	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			
01.11.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3
01.11.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	3	3
01.12	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
01.12.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	2
01.12.01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	2	2
01.13	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			
01.13.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2
01.13.01	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	paket	2	2
01.14	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**			
01.14.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	3
01.14.01	Penyediaan Bahan Bacaan	dokumen	3	3
01.15	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			
01.15.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4
01.15.01	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	1	1
01.15.02	Laporan Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Laporan	1	1
01.15.03	Laporan Forum Pelayanan Publik	Laporan	1	1
01.05.04	Laporan Penataan Arsip	Laporan	1	1
01.16	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**			
01.16.00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	1
01.16.01	Update Sistem Informasi Internal	aplikasi	1	1
01.17	**Pengadaan Mebel**			
01.17.00	Jumlah Paket Mebel yang DIsediakan	paket	1	1
01.17.01	Pengadaan Mebel	paket	1	1
01.18	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
01.18.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	7
01.18.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	7	7
01.19	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			
01.19.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	27	27
01.19.01	Pengadaan Sound System	unit	24	24
01.19.02	Pengadaan Alat Pendingin (AC)	unit	3	3
01.20	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			
01.20.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
01.20.01	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
01.21	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**			
01.21.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1
01.21.01	Penyediaan Jasa Langganan Telepon	bulan	12	12
01.21.02	Penyediaan Jasa Langganan Akun Zoom Meeting	bulan	12	12

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
01.22	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			
01.22.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1
01.22.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	12	12
01.23	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			
01.23.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	3
01.23.01	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Bapperida DIY	bulan	12	12
01.23.02	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Bapperida DIY	bulan	12	12
01.23.03	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan	bulan	12	12
01.24	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			
01.24.01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1
01.24.02	Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1
01.25	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**			
01.25.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	10
01.25.02	Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak/Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	10	10
01.26	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**			
01.26.00	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit	1	1
01.26.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Generator Set	unit	1	1
01.27	**Pemeliharaan Mebel**			
01.27.00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	24	24
01.27.01	Pemeliharaan/Perawatan Meubelair	unit	24	24
01.28	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
01.28.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	84	84
01.28.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	84	84
01.29	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			
01.29.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1
01.29.01	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Bapperida DIY	unit	1	1
01.30	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			
01.30.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	47	47
01.30.01	Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	unit	8	8

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
01.30.02	Pemeliharaan Air Conditioner (AC)	unit	39	39
2	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			
02.01	**Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya**			
02.01.00	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	2	2
02.01.01	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2026 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	dokumen	1	1
02.01.02	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2027 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	dokumen	1	1
02.02	**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi**			
02.02.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	4	4
02.02.01	RKPD	dokumen	1	1
02.02.02	RKPD Perubahan	dokumen	1	1
02.02.03	RPJMD 2022–2027	dokumen	1	1
02.02.04	RPJPD 2025-2045	dokumen	1	1
02.03	**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**			
02.03.00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (DPA SIPD)	Laporan	19	19
02.03.01	Evaluasi SAKIP Pemda DIY	kegiatan	1	1
02.03.02	Laporan Kinerja APBN (dekon/TP) triwulan IV/2024 dan Triwulan I-III/2025	dokumen	4	4
02.03.03	Evaluasi Renja OPD Semester II 2024 dan Semester I 2025	dokumen	2	2
02.03.04	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2024 dan TW I-III 2025	dokumen	4	4
02.03.05	Laporan Pelaksanaan DAK, Evaluasi Hasil RPJPD, Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan, Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY, Evaluasi Hasil RKPD DIY Semester II/2024 & Semester I/2025, Evaluasi hasil Dokumen RPJMD DIY	laporan	7	7
02.03.06	Updating Sengguh Tahun 2025	aplikasi	1	1
02.04	**Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**			
02.04.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	3	3
02.04.01	Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota DIY	Dokumen	1	1
02.04.02	Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Semester II 2024 dan Semester I 2025	Dokumen	2	2

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			
03.01	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**			
03.01.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	2
03.01.01	Bahan Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bidang Pemerintahan Tahun 2024 dan Tahun 2025	dokumen	1	1
03.01.02	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2026 dan 2027 Serta Perubahan Tahun 2025	dokumen	1	1
03.02	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**			
03.02.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	5	5
03.02.01	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2026 dan 2027, serta Perubahan RKPD Tahun 2025	dokumen	1	1
03.02.02	Dokumen monev Bidang Pembangunan Manusia tahun 2025 dan 2024	dokumen	1	1
03.02.03	Dokumen monev Bidang Pembangunan Manusia tahun 2025 dan 2024	dokumen	1	1
03.02.04	Dokumen Monev TPB/SDGs	dokumen	1	1
03.02.05	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	1	1
03.02.06	Dokumen CSR/TSLP	dokumen	1	1
03.03	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			
03.03.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (DPA SIPD)	dokumen	3	3
03.03.01	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2026 dan 2027, serta Perubahan RKPD Tahun 2025	dokumen	1	1
03.03.02	Dokumen Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program OPD mitra Bidang Perekonomian tahun 2024 dan tahun 2025	dokumen	1	1
03.03.03	Dokumen Monev RAD Pangan dan Gizi DIY Tahun 2024	dokumen	1	1
03.04	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
03.04.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (DPA SIPD)	dokumen	3	3
03.04.01	Bahan Penyusunan RKPD Tahun 2026 dan 2027, serta Perubahan RKPD Tahun 2025 bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	1	1
03.04.02	Evaluasi Capaian Program Tahun 2024 dan Monitoring Capaian Program Tahun 2025 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	1	1
03.04.03	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) DIY	dokumen	1	1

Sumber: Bapperida DIY, 2025

2) Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan

a. Kondisi Umum

DIY memegang status otonomi khusus yang berakar pada sejarah pembentukan NKRI, sebagaimana dikukuhkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini ditegaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan keistimewan DIY bertujuan untuk 1) mewujudkan pemerintah yang demokratis, 2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, 3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4) menciptakan pemerintahan yang baik, dan 5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Adapun wewenang khusus DIY mencakup Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Selaras dengan itu, perencanaan pembangunan urusan keistimewaan diintegrasikan secara strategis untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan DIY 2022–2027

melalui sasaran yang terukur dan berorientasi pada hasil nyata.

Pada tahun 2025, DIY mendapatkan alokasi anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp1.200.000.000.000,00. Pengelolaan dana Keistimewaan dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Januari 2025, Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengatur adanya efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025. Alokasi Transfer ke Daerah yang salah satunya adalah Dana Keistimewaan mengalami penyesuaian/ pengurangan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sehingga pagu alokasi Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

Merujuk pada Perdais Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Paniradya Kaistimewan bertugas menyusun kebijakan dan merencanakan urusan keistimewaan guna mendukung Gubernur. Dengan Tujuan Strategis “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan”, instansi menetapkan langkah-langkah pencapaian melalui sasaran strategis sebagai berikut:

(1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan;
(2) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

Berikut disampaikan capaian kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan di DIY Tahun 2025 sebagai berikut,

Tabel 3.171. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)*	Target Akhir Penyelarasan	Realisasi 2025 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target *)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan								
Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	%	90,95	90,40	92,86	102,72	89,40	91,45	103,87
Indikator Kinerja Sasaran								
Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	%	99,53	96,06	99,01	103,07	90,40	97,00	109,52
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	predikat	A (93,99)	A (94,00)	A (96,46)	102,62	A (93,37)	A (94,02)	103,31

**) Target Penyelarasan*
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

(1) Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan

Indikator “Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan” digunakan untuk mengukur Tujuan Strategis "Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan”. Meta indikator yang digunakan yaitu rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan; Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan; dan Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan dengan bobot 60:35:5. Perhitungan Indikator “Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.172. Pengukuran Indikator Tujuan Strategis Paniradya Kaistimewan 2025

Sub-Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir (Nilai x Bobot)
a. Rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan	98,70	60%	59,22
b. Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan	82,95	35%	29,03
c. Skor indeks kepuasan Paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan	92,17	5%	4,61
Total Nilai			**92,86**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan sebesar 98,70; Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan sebesar 82,95; serta Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan sebesar 92,17. Setelah dilakukan pembobotan, maka indikator "Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan" terealisasi sebesar 92,86 atau dengan capaian 102,72% dari target yang ditetapkan sebesar 90,40%.

a) Data rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan diolah dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program-program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh OPD DIY/Kabupaten/Kota, Kemantren/Kapanewon pelaksana dana keistimewaan, dan BKK Kalurahan. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.173. Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2025

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Tahap III/Akhir (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1	Tata Cara	-	-	-	-
2	Kelembagaan Pemerintah Daerah	90.423.087.041	87.392.578.479,25	96,65	99,04

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Tahap III/Akhir (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
3	Kebudayaan	624.949.813.899	618.758.358.062,98	99,01	99,84
4	Pertanahan	50.729.575.746	47.501.544.929,22	93,64	95,04
5	Tata Ruang	233.897.523.314	227.553.618.898,89	97,29	98,78
	TOTAL	1.000.000.000.000	981.206.100.370,34	98,12	99,28
	RERATA			98,70	

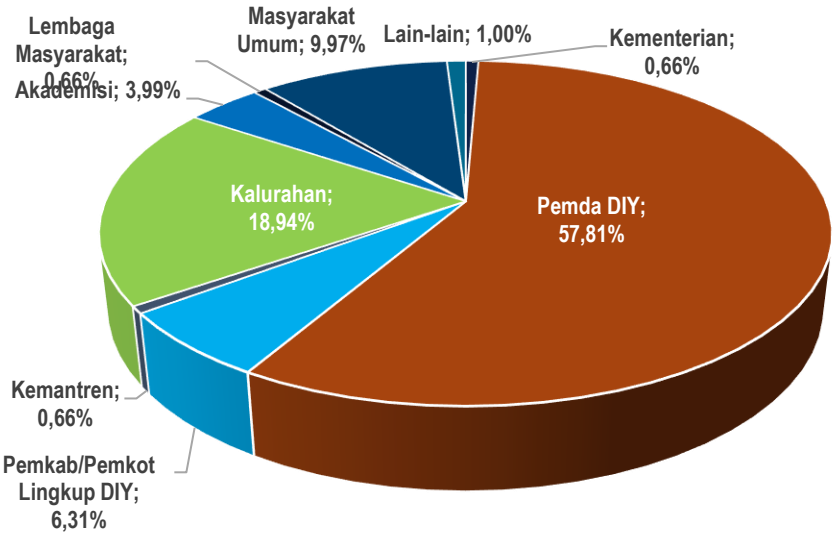
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

Pada tahun 2025, rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan sebesar 98,70%. Angka capaian diperoleh dari rerata realisasi keuangan program Keistimewaan Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 98,12% dan realisasi fisik program Keistimewaan Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 99,28%.

b) Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan pada tahun 2025 diukur melalui Kuesioner Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Keistimewaan yang disebar kepada *stakeholder* terkait serta masyarakat umum. Kuesioner mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan baik yang disampaikan secara *offline* maupun *online* yang diperoleh melalui berbagai media komunikasi. Adapun variabel dalam kuesioner antara lain:

(a) Kemudahan akses informasi;
(b) Kecepatan respon petugas dalam memberikan informasi;
(c) Sikap petugas dalam memberikan informasi;
(d) Kompetensi petugas dalam memberikan informasi;
(e) Kualitas materi yang disampaikan.

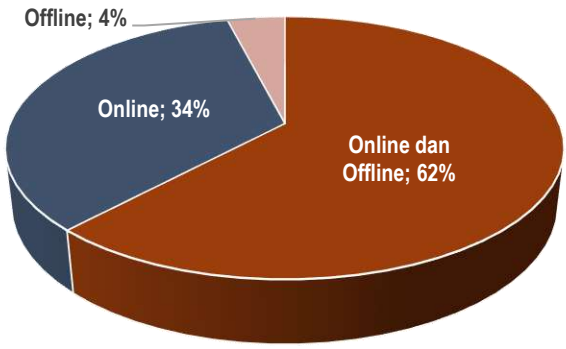
Jumlah responden pada kuesioner tersebut sebanyak 301 responden yang terdiri dari 2 responden Kementerian, 174 responden Pemda DIY, 19 responden Pemkab/Pemkot di lingkup DIY, 2 responden Kemantren, 57 responden Kalurahan, 12 responden Akademisi, 2 responden Lembaga Masyarakat, 30 responden Masyarakat Umum, dan 3 responden Lain-lain. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan asal lembaga/instansi:



Gambar 3.67. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Lembaga/Instansi

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

Dari keseluruhan responden, tercatat sebanyak 102 responden atau sebesar 33,89% mengakses informasi keistimewaan secara *online*, 11 responden atau sebesar 3,65% mengakses informasi keistimewaan secara *offline*, dan 188 atau sebesar 62,46% mengakses informasi keistimewaan secara *online* dan *offline*. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan media informasi yang diakses:



Gambar 3.68. Jumlah Responden Berdasarkan Media Informasi yang Diakses

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

Perhitungan kuesioner terbagi berdasarkan media informasi yang diakses yaitu kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online*, kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *offline*, dan kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online* dan *offline. S*elanjutnya Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan merupakan nilai rerata dari ketiga sub-bagian tersebut.

Rentang nilai yang dipergunakan dalam perhitungan model persentase antara lain:

a) 0 - 25%, Kriteria TIDAK PUAS
b) 26 - 50%, Kriteria CUKUP PUAS
c) 51 - 75%, Kriteria PUAS
d) 76 - 100%, Kriteria SANGAT PUAS

Berikut pengukuran Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan pada tahun 2025:

Tabel 3.174. Pengukuran Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Keistimewaan Tahun 2025

Sub-Bagian	Hasil Penilaian (%)	Rata-Rata Nilai (%)
a. Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online*	81,18	82,95
b. Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *offline*	85,91	
c. Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online* dan *offline*	81,76	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

Berdasarkan pada tabel di atas, Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media online sebesar 81,18%, Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *offline* sebesar 85,91%, dan Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online* dan *offline* sebesar 81,76%. Sehingga Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Keistimewaan Tahun 2024 sebesar 82,95%, dengan kriteria SANGAT PUAS.

c) Pengumpulan data untuk menghitung “Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan” melalui pemberian kuesioner kepada Parampara Praja yang berjumlah 6 (enam) anggota. Indikator yang diukur dalam memfasilitasi Parampara Praja antara lain:

   (a) Kepuasan terhadap Dukungan Asisten Tenaga Ahli Parampara Praja, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisis yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota Parampara Praja dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur;
   (b) Kepuasan terhadap Dukungan Paniradya Kaistimewan DIY, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY kepada anggota Parampara

Praja dalam hal penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, penyediaan materi-materi referensi, hingga memfasilitasi dan mengakomodasi perjalanan dinas bagi Parampara Praja;

(c) Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan;

(d) Kepercayaan terhadap Pelayanan Paniradya Kaistimewan DIY, yaitu persepsi kepercayaan anggota Parampara Praja terhadap pelayanan yang diberikan Paniradya Kaistimewan DIY dan kemampuan menjaga kerahasian.

Hasil penghitungan sub indikator di atas diperoleh melalui:

Tabel 3.175. Pengukuran skor indeks kepuasan Parampara Praja

Sub-Indikator	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Kepuasan Dukungan Asisten Tenaga Ahli Parampara Praja	92,33	92,17
b. Kepuasan dukungan sekertariat	92,33	
c. Kepuasan Sarana Prasarana	91,33	
a. Kepercayaan terhadap pelayanan	92,67	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

Pada tahun 2025, skor indeks kepuasan Parampara Praja sebesar 92,17% yang merupakan rerata dari skor masing-masing sub indikator.

(2) Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik

Sasaran Strategis “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan” diukur menggunakan Indikator “Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik”

Hasil capaian diperoleh melalui rumus perhitungan (Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik/ jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan) dikali 100%. Lembaga pengampu keistimewaan dikatakan memiliki capaian kinerja yang baik jika capaian fisik sama dengan atau lebih besar dari 90%.

Pada tahun 2025, lembaga pengampu keistimewaan sebanyak 203 OPD, yang terdiri 40 OPD DIY, 20 OPD dan 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul, 19 OPD dan 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, 22 OPD dan 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, 13 OPD dan 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman, dan 11 OPD dan 14 Kemantren di Kota Yogyakarta. Rincian realisasi fisik Lembaga pengampu keistimewaan disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.176. Realisasi Fisik Lembaga Pengampu Keistimewaan Tahun 2025

No.	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
	Pemda DIY	
1	Biro Organisasi Setda DIY	100
2	Badan Kepegawaian Daerah DIY	100
3	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	99,71
4	Biro Hukum Setda DIY	100
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	100
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	99,73
7	Dinas Sosial DIY	100
8	Paniradya Kaistimewan DIY	100
9	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna DIY - Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	100
10	Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	100
11	Dinas Kebudayaan DIY	99,91
12	Taman Budaya Yogyakarta DIY	100
13	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	100
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	100
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	100

No.	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
16	Badan Penghubung Daerah DIY	100
17	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	100
18	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	100
19	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda DIY	100
20	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	100
21	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	100
22	Dinas Kesehatan DIY	100
23	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	100
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	100
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	100
26	Dinas Pariwisata DIY	100
27	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	99,99
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	100
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	100
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	100
31	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	100
32	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	100
33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	100
34	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	100
35	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	99,74
36	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	100
37	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	100
38	Dinas Perhubungan DIY	100
39	RS Grhasia	98,02
40	Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	100
	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL	
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	100
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	100
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	100
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	100
5	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	100
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	100
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	100
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100
9	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	100
10	Puskesmas Banguntapan III	100
11	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	100
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	100
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	100

No.	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
14	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul	100
15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	100
16	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	100
17	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	100
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100
19	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	87,00
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	100
21	Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul	100
22	Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul	100
23	Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul	100
24	Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul	100
25	Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul	100
26	Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul	100
27	Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul	100
28	Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul	100
29	Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul	100
30	Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul	100
31	Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	100
32	Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	100
33	Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul	100
34	Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul	100
35	Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul	100
36	Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul	100
37	Kapenawon Sewon Kabupaten Bantul	100
	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	100
2	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
5	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul	100
6	Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gunungkidul	100
7	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul	100
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	100
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul	100
10	Dinas Kesehatan (Puskesmas Semanu II)	100
11	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	100
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	100
13	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	100
14	Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul	100
15	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	100
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul	100

No.	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
17	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	93,59
18	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	100
19	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	100
20	Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul	100
21	Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul	100
22	Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul	100
23	Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul	100
24	Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul	100
25	Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul	100
26	Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul	100
27	Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul	100
28	Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul	100
29	Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul	100
30	Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul	100
31	Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul	100
32	Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul	100
33	Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul	100
34	Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul	100
35	Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	100
36	Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul	100
37	Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul	100
	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO	
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	100
2	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo	100
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo	100
5	Puskesmas Girimulyo I Kabupaten Kulon Progo	100
6	Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo	100
7	Puskesmas Sentolo II Kabupaten Kulon Progo	100
8	Puskesmas Temon I Kabupaten Kulon Progo	100
9	Puskesmas Temon II Kabupaten Kulon Progo	100
10	Dinas Komunikasi dan Informasi	100
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	100
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo	100
13	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	100
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	100
15	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo	100
16	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	100
17	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	96,00
18	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	100

No.	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
19	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	100
20	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	92,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	100
22	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	100
23	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	100
24	Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo	100
25	Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo	100
26	Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo	100
27	Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo	100
28	Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo	100
29	Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo	100
30	Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo	100
31	Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo	100
32	Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo	100
33	Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo	100
34	Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo	100
35	Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	100
	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN	
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	100
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman	100
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	100
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	100
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	100
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman	100
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100
8	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	100
9	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	100
10	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	100
11	Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman	100
12	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	91,59
13	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	100
14	Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman	100
15	Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman	100
16	Kapanewon Depok Kabupaten Sleman	100
17	Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman	100
18	Kapanewon Godean Kabupaten Sleman	100
19	Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman	100
20	Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman	100
21	Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman	100
22	Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman	100
23	Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman	100
24	Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman	100

No.	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
25	Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman	100
26	Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman	100
27	Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman	100
28	Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman	100
29	Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman	100
30	Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	100
	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	
1	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	100
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	100
3	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	100
4	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	100
5	UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	100
6	UPT Taman Budaya Yogyakarta	100
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100
8	Dinas Pertanian Pangan	100
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	100
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	57,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta	100
12	Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta	100
13	Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta	100
14	Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta	100
15	Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta	100
16	Kemantren Jetis Kota Yogyakarta	100
17	Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	100
18	Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	100
19	Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta	100
20	Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta	100
21	Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta	100
22	Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta	100
23	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	100
24	Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	100
25	Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

Berdasaran tabel di atas, terdapat 2 perangkat daerah yang capaian fisiknya tidak mencapai 90% yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, dengan realisasi fisik sebesar 87,00% dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

(DPUPKP) Kota Yogyakarta dengan realisasi fisik sebesar 57,00%.

Berdasarkan data tersebut, maka indikator "Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan" tercapai sebesar 99,01% atau sebesar 103,07% dari target sebesar 96,06%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.177. Pengukuran Indikator "Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik"

Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	Jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan	Perhitungan
(1)	(2)	(3= 1/2*100)
201	203	99,01%

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2026

(3) Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indikator "Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah" digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis "Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah".

Pemda DIY melalui Biro Organisasi Setda DIY melaksanakan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025. Terdapat 2 betuk Reformasi Birokrasi (RB) yang dinilai yaitu RB General dan RB Tematik. Ruang lingkup RB General antara lain: 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Diukur dengan Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan; 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Diukur dengan Suvei Penilaian Integritas, *Employer Branding*, Indeks BerAKHLAK, dan SKM. Selanjutnya RB Tematik merupakan RB yang memberikan dukungan terhadap percepatan penyelesaian masalah pada tata kelola

pemerintah dalam beberapa tema utama yang menjadi fokus perhatian bersama antara lain: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Realisasi Investasi; 3) Transformasi Digital - Fokus Stunting; 4) Pengendalian Inflasi; 5) Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pada tahun 2025, evaluasi Reformasi Birokrasi *Paniradya Kaistimewan* memperoleh nilai 96,46 atau berpredikat A.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Publikasi mengenai capaian pembangunan keistimewaan DIY dinilai belum maksimal, di tengah tingginya ekspektasi masyarakat agar Dana Keistimewaan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan strategis di daerah;
b) Munculnya aspirasi mengenai perlunya penguatan bukti kemanfaatan program Dana Keistimewaan agar sejalan dengan penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prioritas.

(2) Solusi

a) Telah menempuh berbagai cara untuk menyebarluaskan informasi pemanfaatan Dana Keistimewaan, mulai dari kampanye melalui media daring dan luring hingga kewajiban pencantuman logo dana keistimewaan pada setiap aktivitas terkait. Sebagai langkah inovatif, telah diluncurkan sistem informasi KASIL yang menyajikan data capaian secara visual, baik dalam format spasial maupun tabular yang interaktif;
b) Evaluasi dampak diterapkan untuk meninjau konsekuensi nyata terhadap berbagai sektor, guna memahami efektivitas suatu program. Hasil evaluasi

ini tidak hanya mengidentifikasi keberhasilan dan kendala, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dan perencanaan yang lebih akurat.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp25.254.519.465,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 2 Program, 13 kegiatan, dan 32 subkegiatan. Capaian keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp8.827.455.682 atau sebesar 94,30%, serta capaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya, capaian keuangan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar Rp15.566.826.646 atau 97,95%, serta capaian fisik sebesar 100%. Secara keseluruhan, pada tahun 2025 capaian keuangan Paniradya Kaistimewan sebesar Rp24.394.282.328 atau 96,59% dan capaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.189. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realis-asi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	PANIRADYA KAISTIMEWAN	1. Menyusun kebijakan umum urusan keistimewaan; 2. Meningkatkan penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan/subkegiatan urusan keistimewaan 3. Meningkatkan pelayanan Parampara Praja;	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**persen**	**100**	**100**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	6
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Meningkatkan hubungan dengan semua pemangku kepentingan urusan keistimewaan	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	19	19
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persen	**100**	**100**
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50	50
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	14	14
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**persen**	**100**	**100**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**persen**	**100**	**100**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	16
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	55	55
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	Dokumen	6	6
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Laporan	4	4
				Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen	10	10
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan	5	5
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	**persen**	**100**	**100**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realis-asi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen	10	10
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan	9	9
				Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	13	13
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan	8	8
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	**persen**	**100**	**100**
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	21	21
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	persen	**100**	**100**
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan	22	22
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	persen	**100**	**100**
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	unit	2	2
				Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	persen	**100**	**100**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	3
				Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	persen	**100**	**100**
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Dokumen	4	4

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2026

3) Administrasi Keuangan Daerah

a. Kondisi Umum

Dalam membantu Gubernur melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan keuangan, BPKA DIY mendukung dalam menciptakan *good governance* dalam rangkaian proses pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan aset daerah secara tertib dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY diarahkan untuk mendukung dan memastikan keselarasan antara pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan tujuan pembangunan DIY sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan tata kelola keuangan dan aset, BPKA DIY berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dukungan BPKA DIY terhadap capaian pembangunan daerah diwujudkan melalui pencapaian sasaran perangkat daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan berorientasi pada hasil, sehingga berkontribusi langsung

terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja keuangan daerah. Hal ini tercermin dalam sasaran Perangkat Daerah BPKA DIY yang meliputi tiga hal yaitu: 1) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan 3) Optimalisasi aset Pemda DIY dengan indikator Optimalisasi Barang Milik Daerah. Target dan realisasi kinerja sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.178. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Keuangan Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target *)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan								
Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Sasaran								
Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (94,89)	A (95)	A (95,50)	100,53	A	A 95,5	100
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Rupiah	16.042.037 .288	14.213.383 .619	14.924.078 .018	105	10.312.409 .475	14.795.584 .771	144,71

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: BPKA DIY, 2025

Pada tahun 2025 realisasi kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan” tercapai sebesar 100%. Keberhasilan kinerja tersebut

didukung oleh pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY. Pada tahun 2025, BPKA telah menyelesaikan seluruh proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2026 dengan telah ditetapkannya Peraturan Derah DIY No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD DIY Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD DIY TA 2025, serta Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD DIY TA 2026 dan Peraturan Gubernur DIY No.56 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD DIY TA 2026. Selain itu telah dilakukan evaluasi terhadap APBD Kabupaten/Kota meliputi Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024, Perubahan APBD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2026 serta pembinaan terhadap BUMD, BLUD dan BUKP di DIY.

Sebagai wujud dukungan terhadap indikator sasaran Pemda DIY yaitu WTP, BPKA melakukan koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi dengan seluruh OPD Pemda DIY dalam menyusun Laporan Keuangan Pemda DIY (LKPD DIY) Tahun 2024. Hasil dari upaya yang telah dilakukan bersama tersebut, Pemda DIY dapat mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY TA 2024 untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah seluruh proses akuntansi dan pelaporan selesai dilaksanakan.

Capaian kinerja sasaran “Optimalisasi aset Pemda DIY” dengan indikator sasaran ”Optimalisasi Aset Pengelola

Barang Milik Daerah" pada tahun 2025 telah melampaui target. Realisasi optimalisasi aset Pemda DIY tercapai sebesar Rp14.924.078.018 atau 105% dari target sebesar Rp14.213.383.619,00 Dengan demikian optimaliasi aset yang dimiliki Pemda telah memberikan kontribusi terdahap pendapatan asli daerah dengan rincian realisasi sebagai berikut:

(1) Retribusi rumah dinas dan tanah bangunan sebesar: Rp531.753.883
(2) Penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp2.719.973.024
(3) Sewa tanah dan bangunan sebesar: Rp4.665.266.000
(4) Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD (Mall dan Hotel Malioboro) sebesar Rp7.007.085.111,00

Hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Derah, BPKA memperoleh kategori A dengan nilai 91,66. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran BPKA didukung oleh koordinasi lintas sektor yang baik, konsistensi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan optimalisasi pendapatan dan aset daerah serta menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. BPKA DIY senantiasa berinovasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Berbagai inovasi aplikasi telah dikembangkan dan diimplementasikan, baik yang bersifat internal Pemda DIY (dimanfaatkan oleh OPD Pemda DIY) maupun terintegrasi dengan sistem lainnya/nasional.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran agar semakin selaras dengan prioritas pembangunan

daerah serta peningkatan kualitas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

b) Optimalisasi pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah, masih menghadapi keterbatasan dalam perluasan basis pajak dan retribusi daerah, kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi secara terpadu.

c) Pengelolaan aset daerah masih menghadapi kendala dalam penataan administrasi, pemutakhiran data aset, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai tambah dan mendukung pendapatan asli daerah.

(2) Solusi

a) Pemda DIY terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penguatan sinergi antarperangkat daerah, penerapan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

b) Dilakukan upaya optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital.

c) Pemda DIY melaksanakan penataan dan pengamanan aset daerah melalui inventarisasi dan pemutakhiran data aset secara berkala, penguatan pengelolaan administrasi aset, serta optimalisasi pemanfaatan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Penyelenggaraan Urusan Keuangan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 program dan 63 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.031.569.863.711,00 dan telah terealisasi sebesar Rp959.682.940.258,00 atau 93,03%, sedangkan kinerja fisik terealisasi 100%. Target dan realisasi subkegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.179. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
1.1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	6
	Berita Acara Forum OPD	dokumen	1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026	dokumen	1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Perjanjian Kinerja	dokume	1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen ROPK	dokumen	1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025	dokumen	1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Renstra	dokumen	1	1
1.2	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**			
	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	dokumen	2	2
	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD berupa Dokumen DPA SKPD Tahun 2026	dokumen	1	1
	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD berupa Dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2025	dokumen	1	1
1.3	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	7
	Dokumen LKjIP	dokumen	1	1
	Dokumen LPPD	dokumen	1	1
	LKPJ	dokumen	1	1
	Laporan timbal balik monev triwulan I - IV	dokumen	4	4
1.4	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	240	240
1.5	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12
1.6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1
1.7	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	laporan	1	1
1.8	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**			
	umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	12
1.9	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	12
1.10	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
1.11	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			
	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	4
1.12	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan	paket	1	1
1.13	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1
1.14	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	3
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2
1.15	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12
1.16	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12000	12000
1.17	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1
1.18	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	39	39

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.19	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1
1.20	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12
1.21	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berupa sewa pengharum ruangan	laporan	2	2
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berupa sewa mesin fotocopy	laporan	1	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berupa sewa tanaman hias	laporan	1	1
1.22	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12
1.23	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1
1.24	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	17	17
1.25	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	85	85
1.26	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket	1	1
1.27	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	4
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			
2.1	**Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**			
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	4	4
	Jumlah Dokumen KUA yang Disusun	dokumen	2	2
	Jumlah Dokumen PPAS yang Disusun	dokumen	2	2
2.2	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	4	4

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang Disusun	dokumen	2	2
	Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	2	2
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD			
	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	dokumen	31	31
2.3	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	2
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	dokumen	1	1
	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	1	1
2.4	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD**			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	6	6
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	dokumen	1	1
	Jumlah Peraturan Daerah tentang P Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	5	5
2.5	**Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran**			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	3	3
	Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan	dokumen	1	1
	Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah	dokumen	1	1
	Peraturan Gubernur tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri	dokumen	1	1
2.6	**Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota**			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	laporan	5	5
	Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kkota Yogyakarta	laporan	1	1
	Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Bantul	laporan	1	1
	Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Kulonprogo	laporan	1	1
	Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Gunung Kidul	laporan	1	1
	Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Sleman	laporan	1	1
2.7	**Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota**			
	JumlahLaporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan	laporan	5	5

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
	Evaluasi Raperda dan Reperkada tentang Perubahan APBD Kota Yogyakarta	laporan	1	1
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul	laporan	1	1
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kulonprogo	laporan	1	1
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kulonprogo	laporan	1	1
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman	laporan	1	1
2.8	**Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota**			
	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	laporan	5	5
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	laporan	1	1
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul	laporan	1	1
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulonprogo	laporan	1	1
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Kidul	laporan	1	1
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sleman	laporan	1	1
2.9	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah**			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	laporan	2	2
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi	dokumen	1	1

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Tugas Pembantuan	dokumen	1	1
2.10	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**			
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan AliranK as, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	laporan	2	2
	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas	laporan	1	1
	Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	laporan	1	1
2.11	**Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait**			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	dokumen	8000	8000
2.12	**Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran**			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	12	12
2.13	**Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	laporan	3	3
	Laporan Keuangan UnAudited 2024	laporan	1	1
	Laporan Keuangan Audited 2024	laporan	1	1
	Laporan Keuangan UnAudited 2025	laporan	1	1
2.14	**Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi**			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	dokumen	2	2
	Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	1
	Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	1
2.15	**Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Dokumen Tanggapan/TindakLanjut terhadap LHPBPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	1
2.16	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah**			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Kerugian Daerah	dokumen	1	1
2.17	**Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**			
	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen	1	1
2.18	**Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi**			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporandan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	orang	120	120
2.19	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi**			
	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	lembaga	27	27
2.20	**Analisis Investasi Pemerintah Daerah**			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	laporan	6	6
	Dokumen RKAT BUKP	laporan	1	1
	Dokumen Pengesahan Laporan Tahunan BUKP	laporan	1	1
	Dokumen Penetapan Pembagian Laba Bersih BUKP	laporan	1	1
	Dokumen Seleksi Calon Anggota Direksi 1 BUMD (PDAB 2-3 Direksi)	laporan	1	1
	Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan BUKP	laporan	1	1
	Kajian Teknis tentang evaluasi kinerja, kesehatan BUKP dan keberlangsungan usaha BUKP	laporan	1	1
2.21	**Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan**			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	5	5
2.22	**Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	1	1
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Propinsi	laporan	1	1
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			
3.1	**Penyusunan Standar Harga**			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen	1	1
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2
3.2	**Penatausahaan Barang Milik Daerah**			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1
3.3	**Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	2	2
3.4	**Pengamanan Barang Milik Daerah**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	3	3
3.5	**Penilaian Barang Milik Daerah**			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	3	3
3.6	**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa pemimdahtanganan	dokumen	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Dokumen Pemusnahan BMD	dokumen	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Dokumen Penghapusan BMD	dokumen	1	1
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2
	DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2026	dokumen	1	1
	DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2025 Perubahan	dokumen	1	1
4.2	**Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**			
	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	5
	Laporan Dana Keistimewaan	laporan	1	1
	Laporan DID	laporan	1	1
	Laporan DAK Fisik	laporan	1	1
	Laporan DAK Non Fisik	laporan	1	1
	Laporan DBH	laporan	1	1
4.3	**Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1
4.5	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	12
4.6	**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12
4.7	**Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Laporan	12	12
4.8	**Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah**			
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	2
	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester 1	laporan	1	1
	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester 2	laporan	1	1

Sumber: BPKA DIY, 2025

4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Kepegawaian

(1) Kondisi Umum

Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pilar strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hal ini dikarenakan ASN dari semua tingkatan memberikan kontribusi besar dalam menentukan kualitas pembangunan, efektivitas pelayanan dan keberhasilan kebijakan pengelolaannya. Pemda DIY terus melakukan penguatan manajemen aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkesinambungan serta sebagai perwujudan atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pemda DIY melaksanakan prinsip sistem merit dalam pengelolaan ASN dengan menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, serta pengembangan karier ASN. Pemda DIY secara konsisten memastikan bahwa seluruh proses manajemen ASN dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, guna mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan netral.

Pemda DIY telah merumuskan perencanaan kebutuhan ASN secara terukur dan berbasis analisis jabatan serta analisis beban kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi dan peningkatan pelayanan publik. Pengadaan ASN, PNS maupun PPPK, diselenggarakan dengan tetap melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tahun 2025, Pemda DIY menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada CPNS formasi tahun 2024. Selain itu, Pemda DIY telah berhasil melakukan pengangkatan seluruh formasi PPPK baik Tahap I maupun Tahap II.

Pengembangan kompetensi ASN menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemda DIY mendorong agar setiap ASN mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengembangan kompetensi diri. Pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur DIY tentang Penetapan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi RPK) Pemda DIY Tahun 2025-2026. Selain itu, Pemda DIY menyelenggarakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal, dengan pemberian beasiswa ijin belajar S2 dan S3 serta pemberian layanan ijin belajar bagi ASN yang melanjutkan pendidikan secara mandiri maupun beasiswa dari luar Pemda DIY. Pendidikan dan pelatihan terus didorong dalam rangka peningkatan kapasitas teknis dan manajerial aparatur.

Pemda DIY melalui BKD DIY menyelenggarakan pengukuran dan pengujian (Assessment Center) sumber daya manusia aparatur. Pengukuran dan pengujian kompetensi ini untuk menjamin *“the right*

person on the right place". Assessment Center bertujuan menilai kompetensi dan potensi ASN secara komprehensif sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan manajemen talenta berbasis sistem merit.

Manajemen talenta merupakan revolusi dalam pengelolaan sumber daya aparatur di lingkungan Pemda DIY. Sejalan dengan rekomendasi yang telah didapatkan, Pemda DIY telah menerapkan manajemen talenta dalam penempatan JPT Pratama di lingkungan Pemda DIY. Penerapan manajemen talenta diperkuat dengan adanya aplikasi Si Maca Ageng, sebuah aplikasi yang memuat *database* profil talent yang akurat dan relevan untuk setiap ASN di Pemda DIY. Dengan data tersebut Pemda DIY dapat mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik yang dimiliki.

Pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Pemda DIY menjadi peranan penting guna menjamin terciptanya keselarasan kinerja antara kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Kinerja pegawai dijabarkan kedalam rencana kinerja seluruh pegawai bentuk SKP. SKP ini memuat dan memperjelas peran, tugas, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Umpan balik evaluasi kinerja pegawai tertuang dalam Dialog Kinerja Individu (DIARINDU), yaitu dialog kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai di bawahnya secara efektif dan berkala sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja.

ASN Memayu menjadi sistem kepegawaian terus dilakukan pengembangan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh ASN di Pemda DIY. Data pegawai yang terintegrasi, terbaru, dan valid ditujukan

untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam pengelolaan ASN.

Pengelolaan kinerja ASN berdasar pada sistem merit ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berorientasi pada hasil kerja dan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 3.180. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2027)

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2022–2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
				Target *)	Realisasi	Persentase			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Profesionalitas ASN (Skor n-1)	Nilai	85,13	80	83,61	104,51	71	85	98,36%
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN	%	80,39	80	83,34	104,18	77,63	85	98,05%
2	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (96,69)	A (96,7)	A (97,53)	100,86	A (96,7)	A (96,74)	100

**) Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: BKD DIY, 2025

Nilai yang tercantum dalam realisasi indikator tujuan Indeks Profesionalitas ASN merupakan hasil penilaian tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh BKN RI. Pada tahun 2025, capaian kinerja tujuan yaitu sebesar 83,61, melebihi target tahunan sebesar 104,51%. Capaian ini didukung oleh adanya komitmen Pemda DIY dalam peningkatan kapasitas ASN di lingkungan Pemda dengan melaksanakan *Corporate University*, penyelenggaraan beasiswa S2 dan S3, peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait kesempatan bekerjasama, dan *updating* data di sistem kepegawaian.

Sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY yang pertama yaitu meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan persentase kualitas manajemen SDM pada tahun 2025 tercapai 83,34% atau sekitar 104,18% dari target. Sasaran ini didukung dari beberapa indikator. Meta indikator dari sasaran ini yaitu rata-rata persentase pemenuhan ASN sesuai formasi ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data ASN ditambah persentase pemenuhan kompetensi ASN ditambah persentase pengisian jabatan sesuai kualifikasi ditambah persentase kompetensi ASN yang terpetakan ditambah persentase penilaian capaian kinerja ASN ditambah Persentase penyelesaian SK kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa Pemda DIY pada tahun 2025 telah melaksanakan manajemen ASN dengan baik, melampaui target tahun 2025 serta capaian tahun 2024.

Sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY kedua yaitu Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Kategori RB Perangkat Daerah, realisasi capaian sebesar 100,86% dengan nilai kategori A. Pada tahun 2025, Badan Kepegawaian Daerah DIY mendapatkan nilai 97,53 dengan kategori A dan predikat Memuaskan, capaian pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang mendapatkan nilai 96,69.

Keberhasilan pencapaian kinerja kedua sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY didukung oleh komitmen pimpinan dan *stakeholder* untuk menyelenggarakan manajemen ASN secara profesional dan berkelanjutan.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Alokasi dan distribusi ASN secara kuantitas dan kualitas masih belum seimbang dan merata;
(b) Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN dan capaian Indeks Profesionalitas ASN (level Baik);
(c) Dinamika Perubahan Regulasi Kepegawaian;

b) Solusi

(a) Melaksanakan redistribusi ASN dengan memperhatikan kualifikasi jabatan dan ketersediaan SDM;
(b) Implementasi *Corporate University* yang di dukung teknologi informasi sebagai media pengembangan kompetensi ASN;
(c) Responsif/adaptif terhadap perubahan regulasi kepegawaian yang sangat cepat, menyusun regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat jika diperlukan;
(d) Penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun 2025 telah mengadakan pengangkatan CPNS kepada sejumlah 318 orang. Seleksi PPPK Tahap II telah dilaksanakan dan memperoleh kelulusan sejumlah 180 orang. Pengangkatan PPPK Tahap I dan Tahap II berhasil dilakukan dengan total PPPK yang diangkat sejumlah 2.541 orang serta PPPK paruh waktu sejumlah 2 orang.

Selama tahun 2025 telah dilakukan mutasi/rotasi pegawai sejumlah 2.595 orang. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan seleksi serta pelantikan dan pengambilan sumpah JPT Madya Sekretaris Daerah DIY. Telah dilaksanakan pengangkatan ASN ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 58 orang, Jabatan Administrator sebanyak 258 orang, Jabatan Pengawas sebanyak 682 orang, dan Kepala Sekolah 125 orang. Pemda DIY juga telah melaksanakan seleksi mutasi masuk dengan hasil kelulusan sejumlah 41 orang.

Periodisasi kenaikan pangkat tahun 2025 masih menggunakan PP No 4 tahun 2024 dan SE Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Periodesasi Kenaikan Pangkat PNS. Kedua aturan ini menjadi dasar perubahan periode kenaikan pangkat, yang sebelumnya kenaikan pangkat 1 tahun terbagi menjadi dua yaitu April dan Oktober, mulai tahun 2024 berubah menjadi enam periode yaitu bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember. Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan selama tahun 2025 sejumlah 874 SK.

Penyerahan SK pensiun terdapat 2 periode yaitu periode Juli-Desember 2025 yang diserahkan pada bulan Juni 2025, dan periode Januari-Juni 2026 yang diserahkan pada bulan Desember 2025. Total SK pensiun yang diserahkan selama tahun 2025 sebanyak 621 SK.

Pemda DIY memberikan beasiswa S2 kepada 15 orang PNS dan beasiswa S3 kepada 3 orang PNS. Layanan ijin belajar mandiri maupun beasiswa luar Pemda DIY telah diberikan kepada sejumlah 152 orang.

Pengukuran dan pengujian PNS telah diselenggarakan dengan capaian dalam DIY sejumlah 672 orang penilaian kompetensi dan 79 orang penilaian potensi.

Penilaian kompetensi dan potensi luar DIY sejumlah 69 orang.

Pada triwulan II Tahun 2025, telah diterapkan aplikasi e-kinerja dari BKN RI untuk mengukur kinerja pegawai. Penyusunan SKP pada tahun 2025 diberlakukan penyusunan SKP dengan 2 aplikasi yaitu e-kinerja BKN dan Si-Informan.

Pemberian penghargaan bagi pegawai berupa pengiriman pegawai berprestasi dalam ajang PORNAS XVII KORPRI yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan. Jumlah pengiriman atlit sebanyak 12 orang yang terbagi dalam 6 cabang olahraga.

Jumlah anggaran Badan Kepegawaian Daerah DIY melalui APBD sejumlah Rp25.255.406.590,00. Pengalokasian anggaran tersebut terbagi dalam 3 program, 12 kegiatan, dan 45 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2025 sebanyak Rp23.454.166.371,00 atau 92,87%. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena adanya sisa lelang dalam pengadaan interior dan mebel serta adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu capaian fisik sebesar 100%. Berikut disajikan tabel capaian kinerja program dan subkegiatan tahun 2025:

Tabel 3.181. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Kepegawaian Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**			
			Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	Persen	80	86.5
			Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY (DPA SIPD)	Dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Fitur Layanan Kepegawaian Aplikasi ASN Memayu	Aplikasi	1	1
			Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan			
			Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan (DPA SIPD)	Orang	630	630
			Jumlah Pegawai Calon Pensiun yang terbekali Keistimewaan DIY	Orang	600	600
			Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY	Orang	30	30
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	86.5	92.37
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD)	Dokumen	5	5
			Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Dokumen ROPK Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Dokumen Renstra (Reviu) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	4	4
			Dokumen RKA Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Dokumen DPA Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD)	Laporan	3	3
			Bahan LPPD dan Bahan LKPJ	Dokumen	2	2
			Dokumen LKjIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD)	Orang/Bulan	97	97

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD)	Laporan	18	18
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD)	Laporan	2	2
			Tersedianya kebutuhan ATK dan Kertas Cover	Laporan	1	1
			Terpenuhinya pengelolaan BMD	Laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	1	1
			Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Alat Listrik Kantor	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	5	5
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paket	1	1
			Tersedianya Kertas dan Cover	Paket	1	1
			Tersedianya Bahan Cetakan	Paket	1	1
			Tersedianya Bahan Komputer	Paket	1	1
			Tersedianya Alat Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	6	6

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersedianya data kebutuhan bahan-bahan kimia	Paket	1	1
			Tersedianya data kebutuhan alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	Paket	1	1
			Tersedianya data kebutuhan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Paket	1	1
			Tersedianya data kebutuhan Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvernir/Cendera Mata	Paket	1	1
			Tersedianya data kebutuhan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Paket	1	1
			Tersedianya data kebutuhan belanja makanan dan minuman rapat	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	2	2
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paket	1	1
			Tersedianya Bahan Cetakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD)	Dokumen	4	4
			Tersedianya surat kabar atau majalah	Dokumen	4	4
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD)	Laporan	2	2
			Tersedianya data kebutuhan makanan dan minuman rapat	Laporan	1	1
			Tersedianya data kebutuhan Perjalanan Dinas Biasa	Laporan	1	1
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (DPA SIPD)	Unit	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	67	67
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	Laporan	1	1
			Tersedianya Kertas dan Cover	Laporan	1	1
			Tersedianya Bahan Cetak	Laporan	1	1
			Tersedianya Benda Pos	Laporan	1	1
			Tersedianya Perlengkapan Dinas	Laporan	1	1
			Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Laporan	1	1
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Laporan	1	1
			Tersedianya Paket/Pengiriman	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD)	Laporan	3	3
			Terlaksananya Pembayaran Langganan Air	Laporan	1	1
			Terlaksananya Pembayaran Tagihan Listrik	Laporan	1	1
			Terlaksananya Pembayaran tagihan Telepon, zoom dan izin frekuensi	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Laporan	12	12
			Terlaksananya Pengelolaan Keamanan Kantor	Laporan	12	12
			Terlaksananya Pengelolaan Kebersihan Kantor	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD)	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD)	unit	11	11
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	227	227
			Pemeliharaan Genset	unit	2	2
			Pemeliharaan Lift	unit	1	1
			Pemeliharaan Mesin Ketik	unit	8	8
			Pemeliharaan CCTV	unit	10	10
			Pemeliharaan AC	unit	55	55
			Pemeliharaan Sound System	unit	10	10
			Pemeliharaan PC	unit	50	50
			Pemeliharaan LCD	unit	1	1
			Pemeliharaan Tabung Pemadam	unit	15	15
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA/SIPD)	Unit	1	1
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi	Persen	63.61	77.38
			Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN	Persen	94.99	95.03
			Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN	Persen	50	85.78
			Persentase Keterisian Jabatan	Persen	83.33	92.17
			Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN	Persen	91	99.4
			Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan	Persen	26.18	38.11
			Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS	Persen	86	95.54
			Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	Persen	84.9	88.85
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (DPA SIPD)	Dokumen	2	2
			Formasi Pegawai	Dokumen	1	1
			Laporan/Kajian proyeksi Kebutuhan Pegawai	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (DPA SIPD)	Dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Pelaksanaan Seleksi CPNS	Dokumen	1	1
			Laporan Pelaksanaan Seleksi PPPK	Dokumen	1	1
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (DPA SIPD)	Dokumen	618	621
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (DPA SIPD)	Dokumen	4	4
			Pemeliharaan database aplikasi kepegawaian (Presensi, SI-Informan)	Aplikasi	2	2
			Pemeliharaan Mesin Presensi Elektronik	Unit	50	50
			FGD Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN	Kegiatan	1	1
			Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Instansi	37	37
			Pengelolaan Data Kepegawaian			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (DPA SIPD)	Dokumen	2	2
			Fasilitasi Penetapan Kartu Identitas (Karis/Karsu)	Dokumen	1	1
			Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Mutasi ASN			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (DPA SIPD)	Dokumen	200	2.636
			SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Pelaksana	Dokumen	175	2.595
			SK Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS	Dokumen	25	41
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (DPA SIPD)	Laporan	2	2
			Laporan Kenaikan Pangkat Pemda DIY dan Kab/Kota Periode Februari, April, Juni 2024	Laporan	1	1
			Laporan Kenaikan Pangkat Pemda DIY dan Kab/Kota	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Periode Agustus, Oktober , Desember 2024			
			Pengelolaan Promosi ASN			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	Dokumen	1	1
			Pengangkatan Pengisian Jabatan Administrator(esl III) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Assessment Center			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (DPA SIPD)	Dokumen	6	6
			Bimbingan Konseling Pribadi bagi SDM	Dokumen	1	1
			Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Bagi Luar DIY	Dokumen	1	1
			Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Dalam DIY	Dokumen	1	1
			Perjanjian Kerja Sama Penilaian Potensi dan Kompetensi	Dokumen	1	1
			Forum Konsultasi Publik Mitra Kerja Sama Penilaian Kompetensi Pegawai Tahun 2024	Dokumen	1	1
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balai PKP melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	1	1
			Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Fasilitasi Ijin Dinas Luar Negeri	Dokumen	12	35
			Ujian Dinas bagi ASN	Kegiatan	2	2
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (DPA SIPD)	Dokumen	2	2
			Beasiswa APBD Pendidikan Tugas Belajar / Ijin Belajar Program S1 / D4	Orang	43	45
			Beasiswa APBD Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Program S2&S3	Orang	18	18
			Fasilitasi surat ijin/keterangan belajar mandiri dan tugas belajar beasiswa APBN bagi ASN	Orang	100	152
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (DPA SIPD)	Orang	5	62
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (DPA SIPD)	Orang	115	318
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (DPA SIPD)	Dokumen	4	4
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	4
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (DPA SIPD)	Orang	12	20
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (DPA SIPD)	Orang	460	409
			Pembinaan Disiplin ASN			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (DPA SIPD)	Orang	545	693
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	545	693
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	1

Sumber: BKD DIY, 2025

b. Pendidikan dan Pelatihan

(1) Kondisi Umum

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrument strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan (*good governance*). Melalui penyelenggaraan pelatihan yang

berkualitas, adaptif, dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi, Pemda DIY mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penguatan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural sesuai dengan standar jabatan, serta pengembangan pembelajaran berbasis smart learning untuk memperluas akses dan efektivitas pengembangan kapasitas aparatur. Dengan pengembangan kompetensi ASN yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan reformasi birokrasi, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan PANCAMULIA Masyarakat Jogja.

Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas, seperti pelatihan manajerial, seminar, lokakarya, kursus dan sebagainya. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti *coaching*, *mentoring*, dan *e-learning*.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang KelembagaanPemda DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan fungsi antara lain

perumusan kebijakan dan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosial kultural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas” dan sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan berbasis *smart learning*”, maka kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dapat dilihat pada tabel target dan realisasi kinerja urusan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 3.182. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023-2024 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2022–2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027
			Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas								
Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	%	93,45	91,50	83,01	90,72	92,5	95	89,74
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan berbasis smart learning								
Persentase Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun	Persen	82.53	82	82.61	100.74	18	84	458,94
Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah								
Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (96,13)	A (96,14)	A (96,85)	100.74	A (92)	A (96,33)	105,27

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Bandiklat DIY, 2026

Indikator kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY berupa persentase Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pelajaran dalam

1 tahun pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target 82% sesuai hasil penyelarasan kinerja perangkat daerah berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Realisasi capaian indikator kinerja tersebut mencapai 82,61%, sehingga target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. Capaian realisasi tersebut sesuai dengan perhitungan meta indikator Jumlah ASN Pemda DIY yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun sebanyak 10.359 orang dibagi Jumlah ASN Pemda DIY sebanyak 12.540 orang dikali 100%. Terdapat peningkatan capaian indikator kinerja dari tahun 2024 yang sebelumnya sebesar 82,53% meningkat pada tahun 2025 menjadi sebesar 82,61%. Peningkatan realisasi tersebut dipengaruhi oleh komitmen reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia yang mendorong ASN untuk secara aktif meningkatkan kompetensi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatnya pemanfaatan pembelajaran berbasis smart learning melalui *Learning Management System* (LMS) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang memungkinkan perluasan akses pelatihan bagi ASN secara lebih fleksibel dan efisien.

Pada sasaran kedua yaitu Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Kategori RB Perangkat Daerah, realisasi capaian sebesar 100,74%. Pada tahun 2025, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY mendapatkan nilai Indeks RB 96,85 dengan kategori A dan predikat Memuaskan, capaian pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang mendapatkan nilai Indeks RB 96,13 dengan kategori A dan predikat Memuaskan.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Dalam rangka mendukung terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, penyelenggaraan pelatihan Aparatur Sipil Negara di DIY masih menghadapi sejumlah tantangan. Penyelenggaraan pelatihan berbasis *smart learning* belum sepenuhnya optimal dan merata, baik dari aspek kesiapan sistem pembelajaran digital, ketersediaan modul dan bahan ajar yang baku, maupun kapasitas tenaga pengajar dan widyaiswara dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Selain itu, tuntutan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia yang semakin kompleks memerlukan peningkatan kualitas pelatihan yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) di seluruh tingkatan.

b) Solusi

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengembangan kompetensi ASN, Pemda DIY melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY secara berkelanjutan mengembangkan penyelenggaraan pelatihan berbasis *smart learning* yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut didukung melalui penguatan kapasitas widyaiswara dan tenaga pengajar, standarisasi modul dan bahan ajar, serta pemanfaatan tenaga profesional di bidang kediklatan. Penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional dioptimalkan melalui koordinasi dengan

Kementerian Dalam Negeri dan pengembangan kurikulum jabatan fungsional, penguatan integritas ASN dalam bentuk pelatihan mandiri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *Learning Management System* (LMS) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai *pilot project* dan pelatihan antikorupsi bagi ASN. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di DIY.

(3) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

Melalui APBD pada tahun anggaran 2025, Badan Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 92 angkatan yang terdiri dari:

a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebanyak 85 angkatan, yaitu:

   (a) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II sebanyak 1 angkatan
   (b) Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 angkatan
   (c) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 3 angkatan
   (d) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 angkatan
   (e) Orientasi PPPK sebanyak 63 angkatan

b) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan

Urusan Pemerintahan Umum yaitu Diklat Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 1 angkatan

c) Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan sebanyak 6 angkatan yaitu:

   (a) Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan (IWAK) sebanyak 1 angkatan
   (b) Diklat Internalisasi Keistimewaan Bagi Eselon III sebanyak 1 angkatan
   (c) Diklat Internalisasi Keistimewaan Bagi Eselon IV sebanyak 1 angkatan
   (d) Diklat Internalisasi Keistimewaan Bagi Pelaksana sebanyak 1 angkatan
   (e) Pelatihan Sosiokultural sebanyak 1 angkatan
   (f) Pelatihan Teknis Pengelola Arsip Istimewa sebanyak 1 angkatan

Pada tahun 2025, Badan Pendidikan dan Pelatihan mengelola anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp25.049.267.955,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp24.848.697.955,00 dan belanja modal sebesar Rp200.570.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 3 program, 11 kegiatan dan 32 subkegiatan. Realisasi anggaran belanja pada tahun 2025 mencapai 87,77% dengan serapan anggaran sebesar Rp21.986.369.228,00 dari total anggaran yang tersedia.

Belum optimalnya tingkat serapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, tanpa menurunkan kualitas output dan capaian kinerja.

Sementara itu, realisasi fisik kegiatan mencapai 99,87%, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan akibat adanya penyesuaian jumlah peserta pelatihan, dimana sebagian peserta tidak dapat mengikuti kegiatan pelatihan sehingga target output belum terealisasi secara penuh.

Berikut disajikan tabel jumlah anggaran belanja langsung melalui program dan kegiatan tahun 2025 :

Tabel 3.183. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas 2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan 3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**			
				Peningkatan Budaya Pemerintahan			
				Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	**%**	**100**	**98.95**
				1 Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan: 188 Orang dari 190 Orang	Orang	190	188
2	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas 2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan 3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 5 Dokumen dari 5 Dokumen	Dokumen	5	5
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Dokumen	4	4
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 3 Laporan dari 3 Laporan	Dokumen	3	3
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 76 Orang/Bulan dari 76 Orang/Bulan	Orang/ Bulan	76	76
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Dokumen	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 1 Laporan dari 1 Laporan	Laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 14 Laporan dari 14 Laporan	Laporan	14	14
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 2 Laporan dari 2 Laporan	Laporan	2	2
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Dokumen	2	2
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan: 20 Orang dari 20 Orang	Orang	20	20
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 1 Paket dari 1 Paket	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 3 Paket dari 3 Paket	Paket	3	3
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 10 Paket dari 10 Paket	Paket	10	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 1 Paket dari 1 Paket	Paket	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 47 Laporan dari 12 Laporan	Laporan	12	47
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**%**	**100**	**100**
				1 1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 14 unit dari 14 unit	Unit	14	14
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 12 Laporan dari 12 Laporan	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan dari 12 Laporan	Laporan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 12 Laporan dari 12 Laporan	Laporan	12	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya: 1 Unit dari 1 Unit	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 12 Unit dari 12 Unit	Unit	12	12
				Pemeliharaan Mebel	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Mebel yang Dipelihara: 33 Unit dari 33 Unit	Unit	33	33
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi: 1 Unit dari 1 Unit	Unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 333 Unit dari 333 Unit	Unit	333	333
3	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas 2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan 3. Mengembangkan	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			
				Pengembangan Kompetensi Teknis			
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan	Dokumen	5	5

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun: 5 Dokumen dari 5 Dokumen			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi: 30 Orang dari 30 Orang	Orang	30	30
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional: 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Dokumen	4	4
				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar: 1 Laporan dari 1 Laporan	Laporan	1	1
				Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	**%**	**100**	**100**
				1 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga: 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Dokumen	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Reali-sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	**%**	**100**	**99.71**
				1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan: 3425 Orang dari 3435 Orang	Orang	3435	3425

Sumber: Bandiklat DIY, 2026

5) Sekretariat Daerah

a. Tata Pemerintahan

(1) Kondisi Umum

Dalam rangka menjalankan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemda DIY menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penyampaian LPPD dimaksud berlandaskan pada Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, LPPD DIY Tahun 2024 telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Penyampaian

laporan dimaksud dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/100.1.7/751/BR.I Tanggal 19 Maret 2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2024. Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2024 telah diumumkan dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui media cetak dan media daring.

Berdasarkan hasil evaluasi atas LPPD DIY Tahun 2024, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan peningkatan capaian secara nasional yaitu perolehan peringkat DIY yang naik dari peringkat kelima menjadi peringkat ketiga. Hasil evaluasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023. Dalam keputusan dimaksud, DIY memperoleh skor kinerja sebesar 3,6645 dengan kategori kinerja Tinggi, serta menempati peringkat ke-3 dari 33 provinsi yang dievaluasi.



Gambar 3.69. Penerimaan Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Sejalan dengan penyampaian LPPD yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif kepada Pemerintah Pusat, Pemda DIY juga berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk akuntabilitas politik dan administratif atas pelaksanaan pemerintahan daerah.

LKPJ Gubernur disusun untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi media evaluasi bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Secara garis besar, LKPJ Gubernur DIY tahun 2024 menggambarkan hasil pelaksanaan rencana pembangunan, sebagaimana termuat dalam RKPD DIY tahun 2024 serta APBD DIY tahun 2024, yang merupakan tahun ke-dua pelaksanaan RPJMD DIY periode 2022–2027. Ruang lingkup yang kami laporkan dalam dokumen LKPJ Gubernur DIY tahun 2024 ini, merujuk pada Permendagri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan beberapa penyesuaian sesuai kebijakan daerah.

Penghantaran LKPJ DIY tahun 2024 oleh Gubernur DIY dituangkan dalam Berita Acara Antara Pemda DIY Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor B/100.1.7/4237/DPRD tanggal 27 Maret 2025. Dalam laporan tersebut disampaikan realisasi pendapatan daerah tercapai 101.93% dari target, atau sebesar

Rp6.025.070.171.261,08 dari target sebesar Rp5.911.030.364.311,00. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp5.680.495.088.297,12 dari total anggaran belanja yang ditetapkan sesuai APBD tahun 2024 sebesar Rp6.001.565.896.865,00. Secara umum, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik dan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD DIY periode 2022–2027.

Sejalan dengan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, salah satu aspek penting yang menjadi fokus evaluasi adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemda DIY menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta peraturan teknis SPM dari kementerian terkait melalui penetapan kebijakan daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023–2027 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai upaya penguatan implementasi, pada Tahun 2025 Pemda DIY telah menetapkan target pencapaian SPM untuk Tahun 2025 dan Tahun 2026. Selain itu, Pemda DIY secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, serta pelaporan penerapan SPM pada

enam bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.

Laporan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2024 telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Gubernur DIY Nomor B/100.1.7/850/SET tanggal 20 Februari 2025. Pada Tahun 2025, Pemda DIY juga telah melaksanakan pelaporan SPM secara triwulanan melalui Aplikasi e-SPM Bina Pembangunan Daerah serta melakukan pemutakhiran data SPM.

Dalam rangka penguatan kelembagaan, pada Tahun 2025 dilakukan pembaruan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di DIY yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 84/TIM/2025 tanggal 16 Juni 2025 dan ditindaklanjuti dengan SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor B/600.4.24.2/1386/BR.1 Tanggal 23 Juni 2025 tentang Penunjukan Nama-Nama Personalia Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di DIY dan diubah dengan SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Penunjukan Nama-Nama Personalia Tim Penerapan SPM di DIY.

Pada acara SPM Awards yang diselenggarakan di Jakarta pada 23 Mei 2025 DIY berhasil meraih prestasi membanggakan atas penerapan SPM Tahun 2024. Dalam ajang tersebut, DIY masuk dalam kategori 10 Provinsi Terbaik tingkat nasional dan berhasil menempati peringkat ke-5 Regional Jawa dengan nilai 98,66 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan dasar kepada masyarakat.



Gambar 3.70. Penerimaan SPM Award 2025

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Tabel 3.184. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2022–2027 serta Capaian 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target *)	Realisasi	Realisasi (%)			
Indikator Kinerja tujuan									
1	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	%	259,52	100	100	100	100	100	100
2	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A	A (95.88)	A (95.9)	100,02	A (95.9)	A (95.9)	100

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 merupakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. di DIY, Pemilihan Serentak Tahun 2024 hanya dilaksanakan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatur bahwa pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui mekanisme penetapan oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di DIY dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota, meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.185. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Hasil Pemilihan Tahun 2024

No	Kab/Kota	Nama Bupati/ Walikota	Nama Wakil Bupati / Wakil Walikota	Dasar Hukum
1	Kabupaten Kulon Progo	Dr. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc. MM	Ambar Purwoko	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025
2	Kabupaten Bantul	H. Abdul Halim Muslih	H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M.	
3	Kabupaten Gunungkidul	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E.	Joko Parwoto, S.E., M.M.	
4	Kabupaten Sleman	H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si.	Danang Maharsa, S.E.	
5	Kota Yogyakarta	dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)	Wawan Harmawan, S.E., M.M	

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dilantik serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta sebagaimana

tercantum dalam Surat Keterangan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1643/SJ tanggal 11 Maret 2025.



Gambar 3.71. Pelantikan Kepala Daerah di Halaman Istana Merdeka Jakarta

Sumber:Kementerian Sekretariat Negara RI, 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut diumumkan oleh dalam rapat paripurna dan diusulkan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur. Menindaklanjuti ketentuan tersebut Gubernur DIY menyampaikan permohonan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 melalui Surat Gubernur DIY Nomor B/100.1.4.2/60/GUB tanggal 17 Januari 2025 Hal Penetapan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di DIY.

Tabel 3.186. Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 Yang Ditetapkan Pemberhentiannya

No	Kab/ Kota	Nama Bupati/Walikota	Nama Wakil Bupati/Wakil Walikota	Dasar Hukum
1	Kabupaten Bantul	H. Abdul Halim Muslih	Joko B. Purnomo	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-222 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020
2	Kabupaten Gunungkidul	Sunaryanta	Heri Susanto, S.Kom, M.Si	
3	Kabupaten Sleman	Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo	Danang Maharsa, S.E.	

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Selain Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020, di DIY terdapat 2 Penjabat Kepala Daerah yang melaksanakan tugas sejak Mei Tahun 2024 yaitu Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo serta Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Hasil Pemilihan Tahun 2024, pada 20 Februari 2025 maka berakhir pula masa jabatan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta.

Tabel 3.187. Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota Yang Ditetapkan Pemberhentiannya

No.	Kab./Kota	Nama	Jabatan	Dasar Hukum
1.	Kabupaten Kulon Progo	Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A.	Penjabat Bupati Kulon Progo	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-224 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Walikota tanggal 28 Januari 2025
2.	Kota Yogyakarta	Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A.	Penjabat Walikota Yogyakarta	

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Ketentuan Pasal 144 ayat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri. Berikut Anggota DPRD DIY yang diberhentikan dan calon pengganti :

Tabel 3.188. Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY Tahun 2025

No	DPRD	Nama	Partai	Pengganti
1	DIY	Agus Sumaryanto, ST (Meninggal Dunia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-2273 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, tanggal 16 Mei 2025	Partai Golongan Karya	Listiana Lestari, S.H: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-2274 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, tanggal 16 Mei 2025

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi jo Pasal 194 ayat (4) dan 195 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa Gubernur meresmikan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD, bahwa paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota DPRD antarwaktu kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima. Pada tahun 2025 Gubernur telah meresmikan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD DIY sebagai berikut:

Tabel 3.189. Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	DPRD Kabupaten/Kota	Nama	Partai	Pengganti
1	Kabupaten Bantul	Sukardiyono, S.H. (Meninggal Dunia): Keputusan Gubernur DIY Nomor: 423 Tahun 2025 tentang Peresmian	Partai Kebangkitan Bangsa	Bambang Gunawan: Keputusan Gubernur DIY Nomor 425 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan

No	DPRD Kabupaten/Kota	Nama	Partai	Pengganti
		Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2024-2029, tanggal 10 Desember 2025		Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 12 Desember 2025

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan SPM dan belum adanya keselarasan kebijakan penerapan SPM baik di Ditjen Bina Bangda maupun Kementerian/Lembaga Teknis terkait;
(b) Terdapat dinamika pelaksanaan pelantikan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota terpilih hasil Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak oleh Presiden di Jakarta dengan mempertimbangkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2024.

b) Solusi

(a) Penyelarasan kebijakan SPM di tingkat Pusat maupun Daerah terkait penerapan SPM.
(b) Berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se DIY dalam rangka pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat 3 program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 24 sub program yang dijalankan. Total anggaran dari enam program tersebut sebesar Rp1.878.772.000,00 dan terserap sebesar 95,70% atau Rp1.797.904.968,00 dengan capaian fisik 100%. Pada tahun 2025 target dan sasaran Biro Tata Pemerintahan menggunakan acuan dokumen RPJMD 2022–2027. Berikut ini Target dan Realisasi Kinerja Biro Tata Pemerintahan dengan target akhir RPJMD tahun 2027:

Tabel 3.190. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**			
			1.1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			1.1.1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	3	3
			Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan	Dokumen	1	1
			Laporan Sinkronisasi garis batas daerah perbatasan DIY	Dokumen	1	1
			Laporan Pengukuran Pilar Geodetik Batas DIY-Jateng	Dokumen	1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
			2.1. Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permudeuman			
			2.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Real-isasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Doku-men	1	1
			Peringatan Hari Bersejarah (Peringatan Hari Jadi DIY)	Doku-men	1	1
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	**3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			3.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku-men	5	5
			Rencana Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2026	Doku-men	1	1
			Rencana Kinerja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2025	Doku-men	1	1
			Tersusunnya Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)	Doku-men	1	1
			Tersusunnya Perjanjian Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2025	Doku-men	1	1
			Tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Tahun 2022–2027	Doku-men	1	1
			3.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku-men	4	4
			Rencana Kerja dan Anggaran 2025	Doku-men	1	1
			Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 2024	Doku-men	1	1
			Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025	Doku-men	1	1
			Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024	Doku-men	1	1
			3.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3
			Dokumen Kinerja Instansi pemerintah	Doku-men	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Real-isasi
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Doku-men	1	1
			Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Doku-men	1	1
			3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			3.2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku-men	12	12
			Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)	Doku-men	12	12
			3.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			3.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14
			Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	12	12
			Laporan Keuangan Semester	Laporan	2	2
			3.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			3.3.1.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
			Laporan Aset SKPD	Laporan	1	1
			Laporan Persediaan SKPD	Laporan	1	1
			3.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			3.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Real-isasi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1
			3.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5
			Bahan Kimia - Pembersih Tangan	Paket	1	1
			Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Paket	1	1
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Paket	1	1
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Paket	1	1
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Paket	1	1
			3.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - peralatan Kebersihan bahan pembersih	Paket	1	1
			3.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Paket	1	1
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Paket	1	1
			3.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doku-men	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Real-isasi
			Bahan bacaan lokal	Doku-men	1	1
			Bahan bacaan nasional	Doku-men	1	1
			3.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi setiap bulan	Laporan	12	12
			3.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			3.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1
			3.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			3.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Biro Roda 4	Unit	1	1
			3.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD)	Unit	10	10
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	3	3
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	7	7
			3.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	42	42

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Real-isasi
			Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - LCD Proyektor	Unit	2	2
			Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Air Conditioner)	Unit	16	16
			Personal Komputer (Komputer/Notebook/Laptop)	Unit	16	16
			Personal Komputer (Printer)	Unit	8	8
			4. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
			4.1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
			4.1.1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Doku-men	3	3
			Laporan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024	Doku-men	1	1
			Laporan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Tahun 2024	Doku-men	1	1
			Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kab/Kota	Doku-men	1	1
			4.1.2. Fasilitasi Penataan Wilayah			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Doku-men	2	2
			Laporan penyelarasan pembangunan di wilayah perbatasan	Doku-men	2	2
			4.2. Pelaksanaan Otonomi Daerah			
			4.2.1. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	3	3
			Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Laporan	1	1
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan	1	1
			Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	1	1
			4.3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
			4.3.1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Real-isasi
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Doku-men	2	2
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Doku-men	1	1
			Kontribusi Asosiasi APPSI dan MPU	Doku-men	1	1

Sumber: Biro Tapem, 2026

b. Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum

(1) Kondisi Umum

Pemda DIY dalam mendukung pembangunan daerah diwujudkan melalui kontribusi dalam pencapaian visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Kontribusi tersebut tercermin salah satu tujuan yaitu "Terwujudnya layanan hukum yang berkualitas" dengan sasaran kinerja "Meningkatnya produk hukum daerah serta bantuan dan layanan hukum yang berkualitas." Dimana dalam mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Pemda DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang hukum untuk meningkatkan persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Target dan realiasi kinerja Penunjang Urusan Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum pada Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.191. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satu-an	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Tar-get*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja tujuan									
1	Persentase layanan hukum yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	96,64-99,68	99,20	100	-	97,04-99,72	-
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	A (90,13)	A (90,15)	A (90,91)	100,84	A	A (91,00)	100
2	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2026

Pada kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan terdapat pelaksanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa, Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur. Peraturan perundang-undangan dan produk hukum tersebut dibentuk secara implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi perlu pengaturan tahapan proses penyusunan produk hukum sesuai urutan masuk dan skala prioritas perencanaan hukum.

Berdasarkan Keputusan DPRD DIY Nomor 43/K/DPRD/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakian Rakyat Daerah DIY Nomor 92/K/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa DIY Tahun 2025 menetapkan sebanyak 13 (Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Prioritas Tahun 2025 dan 3 Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa kumulatif terbuka Tahun 2025.

Tabel 3.192. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh Pemda DIY pada Tahun 2025

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda	13 Rancangan Peraturan Daerah	1. Raperda tentang Pelabuhan Perikanan	1. Telah ditetapkan pada tanggal 1 September 2025 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
		2. Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	2. Telah ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2025 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
		3. Raperda tentang Pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia	3. Telah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2025 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, Dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi
		4. Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	4. Telah ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2025 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		5. Raperda tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah di DIY	5. Hasil Fasilitiasi Kementerian Dalam Negeri sudah turun menunggu tindak lanjut rapat pansus DPRPDIY
		6. Raperda tentang Penyelengaraan Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan	6. Nomor register dari Kementerian Dalam Negeri sudah terbit dan menunggu Proses Pengundangan
		7. Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	7. Hasil Fasilitiasi Kementerian Dalam Negeri sudah turun menunggu tindak lanjut rapat pansus DPRPDIY
		8. Raperda tentang Rencana Induk Transportasi	8. Nomor register dari Kementerian Dalam Negeri sudah terbit dan menunggu Proses Pengundangan
		9. Raperda tentang Penyelenggaraan Riset, Invensi dan Inovasi Daerah	9. Telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2025 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Riset, Invensi dan Inovasi Daerah
		10. Raperda tentang Provinsi Layak Anak	10. Telah ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2025 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Provinsi Layak Anak.
		11. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah DIY Tahun 2025-2045	11. Nomor register dari Kementerian Dalam Negeri sudah terbit dan menunggu Proses Pengundangan
		12. Raperda tentang Pokok-Pokok Kepegawaian DIY	12. Hasil Fasilitiasi Kementerian Dalam Negeri sudah turun menunggu tindak lanjut rapat pansus DPRPDIY
		13. Raperda tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	13. Nomor register dari Kementerian Dalam Negeri sudah terbit dan menunggu Proses Pengundangan

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2026

Pada tahun 2025, Pemda DIY telah menyusun sebanyak 40 Peraturan Gubernur dan 414 Keputusan Gubernur. Selain menyusun Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan Gubernur, Pemda DIY juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan produk hukum dan produk hukum Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan memberikan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi pada produk hukum Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 60 produk hukum dengan capaian realisasi 100%.

Dalam rangka tindaklanjut kewenangan penyebarluasan informasi serta produk hukum daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum dan Digitalisasi Produk Hukum sebagai berikut: 1) Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemda DIY. 2) Mengunggah 460 produk hukum ke dalam website JDIH berupa 6 Peraturan Daerah, 40 Peraturan Gubernur, dan 414 Keputusan Gubernur.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemda DIY tidak luput dari risiko adanya keberatan dari masyarakat yang memungkinkan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri. Demikian juga tidak menutup kemungkinan Pemda DIY menjadi penggugat apabila kepentingannya telah dirugikan pihak lain. Berdasarkan Pasal 65 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya menyatakan bahwa, *"Gubernur mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk*

mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda DIY, disebutkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY mempunyai fungsi salah satunya fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Tabel 3.193. Rekapitulasi Jumlah Penanganan Perkara TA 2025

Perkara	Tk. I	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Perdata	2	-	-	-
Tata Usaha Negara	0	-	-	-

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2026

a) Perkara Nomor 595/Pdt.G/2024/PN JKT PST gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian antara Kartika & Rouly Law Firm selaku kuasa hukum dari PT Tim Inisiasi Maestro (IGNI) sebagai Penggugat I, CV Jogja Prima Solusi (JPS) sebagai Penggugat II, CV Extra Ordinary Network *(X-ONE'S Catering Service)* sebagai Penggugat III. Gugatan perkara ini sehubungan dengan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke XIII Tahun 2022 di DIY pada tanggal 17 Juni sampai 19 Juni 2022.
b) Perkara Nomor 1292/PDT/2025/PT DKI, Upaya banding dari Perkara Nomor 595/Pdt.G/2024/PN JKT PST gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian antara Kartika & Rouly Law Firm selaku kuasa hukum dari PT Tim Inisiasi Maestro (IGNI) sebagai Pemohon Banding I semula

Penggugat I, CV Jogja Prima Solusi (JPS) sebagai Pemohon Banding II semula Penggugat II, CV Extra Ordinary Network (X-ONE'S Catering Service) sebagai Pemohon Banding III semula Penggugat III. Upaya banding ini upaya hukum dari para Pemohon banding yang tidak terima terhadap putusan pengadilan tingkat I yang merupakan sehubungan dengan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke XIII Tahun 2022 di DIY pada tanggal 17 Juni sampai 19 Juni 2022.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025 yang merupakan Landasan Kebijakan Nasional yang memuat sasaran strategis untuk melaksanakan dan mempercepat kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya hak-hak kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tercermin melalui penyampaian laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) kepada Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) setiap 4 bulan sekali pada bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025. Pemda DIY telah melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah seluruh *stakeholders* terkait maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang menjadi tolok ukur komitmen penyelenggaraan pembangunan HAM baik di Pusat maupun di Daerah dan merupakan upaya konkrit Pemerintah dalam pengarusutamaan HAM di Seluruh

bidang Pembangunan baik infrastruktur, perekonomian dan bidang pembangunan lainnyayang merupakan sebuah upaya unutk memajukan bangsa dan senantiasa diorientasikan kepada penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara secara komperhensif baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dimana penilaian capaian Aksi RANHAM pada Tahun 2025.

Selain itu juga dilakukan pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3), dalam hal terdapat 100% daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang memperoleh penghargaan, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada gubernur sebagai pembina kabupaten/kota peduli HAM. Sedangkan 5 Kabupaten/Kota juga menerima penghargaan di Daerah masing-masing dimana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakata sebagai salah satu Provinsi yang telah berhasil melaksanakan pembinaan, dan pengembangan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Wilayah dan seluruh Kabupaten/Kota memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Terkait dengan pemberian apresiasi pelaksanaan HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia mengumumkan bahwa penyerahan Penghargaan RANHAM Tahun 2025 pada acara Peringatan Hari HAM Internasional ditiadakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Negara beberapa waktu belakangan ini. Kebijakan ini diambil dengan memperhatikan perlunya keselarasan dengan kepentingan nasional saat ini serta sensitivitas terhadap situasi dan kondisi rakyat di beberapa daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasisi Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda DIY melaksanakan ketugasannya selaku koordinator ataupun sebagai pembina bagi OPD terkait baik Kabupaten/Kota di DIY dalam menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dimana kegiatan atau rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini Biro Hukum Setda DIY bekerja sama dengan Lembaga Ombudsman DIY untuk pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan memberikan dan melakukan sistem informasi Publik kepada masyarakat umum baik pihak dari pemerintah, swasta/ pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik antara pihak dengan bantuan berupa Ajudikasi dan mediasi melalui mediator yang dibentuk oleh Lembaga Ombudsman DIY. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik yang berpedoman pada prinsip HAM, mewujudkan Unit Kerja yang memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan dan penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Masih terdapat tumpang tindih pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kuatnya ego sektoral antarpemangku kebijakan.
(b) Rancangan produk hukum dari Perangkat Daerah Pengampu perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundangan yang terkait;
(c) Proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dipengaruhi oleh tingginya jumlah produk hukum yang harus diharmonisasikan. Sementara itu, proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri juga membutuhkan waktu yang relatif panjang akibat banyaknya rancangan produk hukum yang berada dalam antrean fasilitasi.
(d) Proses penelusuran dan penghimpunan data pendukung yang diperlukan guna melengkapi alat bukti secara komprehensif, sehingga dapat memenuhi standar pembuktian dalam proses persidangan.
(e) Tingginya jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang diajukan untuk difasilitasi secara bersamaan menyebabkan tidak tercapainya target waktu sebagaimana tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada)

b) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas.

(a) Koordinasi dan sinergi yang berkesinambungan antara Perangkat Daerah pengampu dan pihak terkait menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.
(b) Kelengkapan serta keterpaduan data dan dokumen yang disampaikan oleh instansi terkait merupakan unsur krusial dalam menunjang efektivitas penyelesaian sengketa.
(c) Kapasitas sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam penyusunan produk hukum daerah serta penanganan permasalahan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan fungsi hukum daerah

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum pada tahun 2025 dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.335.951.220,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 program, 12 kegiatan dan 32 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp3.251.465.682,00 atau 97,47 %, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.194. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BIRO HUKUM	1. Menyelaraskan program legislasi daerah peraturan daerah dan program legislasi daerah peraturan gubernur dengan arah pembangunan daerah melalui penguatan pada aspek pembinaan hukum daerah dalam fungsi perencanaan hukum dan evaluasi keberlakuan produk hukum daerah 2. Menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah 3. Melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah secara tepat waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi 4. Memanfaatkan analisis kebijakan dalam perumusan dan penyusunan produk hukum daerah 5. Mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundangundangan dan analis hukum dalam diklat fungsional tersebut guna meningkatkan kompetensi;	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**			
				Indikator Kinerja: Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100
				KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN			
				SUBKEGIATAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA TINDAKLANJUT PELAKSANAAN KEWENANGAN KEISTIMEWAAN			
				Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	Dokumen	30	33
				SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN			
				Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	10	10
2	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)	BIRO HUKUM		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**			
				Indikator Kinerja: Persentase capaian bantuan hukum terkait Penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	Persen	100	100
				KEGIATAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN			
				SUBKEGIATAN PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN PENGGUNAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN			
				Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	1	1
				SUBKEGIATAN PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN TANAH DESA			
				Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	1	1
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM		**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**			
				Indikator Kinerja: Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			6. Peningkatan dan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat rentan; 7. Menggunakan teknologi informasi dalam layanan informasi produk hukum; 8. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia; 9. Mendukung pelaksanaan keistimewaan urusan kelembagaan melalui pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota; 10. Mendukung pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan melalui penyelesaian perkara litigasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.	perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum			
				KEGIATAN PENYUSUNAN PERUNDANG - UNDANGAN			
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN			
				Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	28	57
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN			
				Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	50	433
				SUBKEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA			
				Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	78	460
				SUBKEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA			
				Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	62	62
				KEGIATAN BANTUAN HUKUM			
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH			
				Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	1	1
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM			
				Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	100	104
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
				SUBKEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN OPD			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	14	14
				KEGIATAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4
				KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1
				KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2
				SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
				KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENGADAAN MEBEL			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	10
				SUBKEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	30
				SUBKEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
				KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
				SUBKEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
				KEGIATAN PEMELIRAHAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
				SUBKEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN JABATAN			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
				SUBKEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN OPERASIONAL			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	6	6

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
				SUBKEGIATAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	39
				SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2026

c. Fasilitasi Perekonomian dan SDA

(1) Kondisi Umum

Pada tahun 2025, pembangunan ekonomi di DIY diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator makroekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sektor unggulan seperti pariwisata berbasis budaya, ekonomi kreatif, UMKM, pertanian bernilai tambah, serta pendidikan dan jasa dikembangkan secara terpadu guna menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Pelibatan masyarakat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi DIY pada tahun 2025. Masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku, bukan sekadar penerima manfaat. Penguatan kapasitas UMKM, koperasi, dan kelompok usaha masyarakat dilakukan melalui pendampingan, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan jejaring pemasaran. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan

program terus diperkuat agar kebijakan ekonomi yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan dan potensi lokal setiap wilayah.

di sisi lain, peran sektor swasta semakin dioptimalkan sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi dengan dunia usaha dikembangkan melalui skema investasi yang berkelanjutan, kemitraan usaha, serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (*CSR)* yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong inovasi, serta mempercepat transformasi ekonomi DIY menuju perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Secara umum prioritas daerah DIY sesuai dengan Tema Pembangunan DIY Tahun 2025 “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” meliputi penurunan tingkat kemiskinan; pengembangan kehidupan ekonomi yang layak; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yogyakarta; penurunan ketimpangan antarkelompok sosial maupun antarwilayah; penguatan *good-governance* pada berbagai tingkatan; serta menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram. Untuk itu, Pemda DIY berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu ekonomi yang dihadapi daerah. Isu-isu yang dihadapi DIY dalam fasilitasi perekonomian dan sumber daya alam antara lain kemiskinan, ketimpangan antarwilayah,

pengangguran, degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan, kerentanan terhadap bencana alam serta isu sektoral lainnya. Isu-isu yang muncul tersebut memberikan pengaruh dan menentukan keberlanjutan pembangunan DIY sehingga dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2025, perekonomian DIY menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tahunan mencapai 5,49 persen pada Triwulan IV 2025 dan tren yang relatif stabil sejak awal tahun. Tetapi beberapa sektor utama penopang perekonomian dan sumber daya alam DIY masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi kinerja serta keberlanjutan pembangunan daerah, antara lain mencakup ketergantungan yang tinggi pada sektor tertentu, seperti industri pengolahan dan pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi eksternal; ketidakmerataan manfaat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari indikator kemiskinan; fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada sektor jasa lokal; serta tantangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya dalam konteks pertanian, ketersediaan air, dan ruang hidup yang mendukung aktivitas ekonomi. Permasalahan ini perlu menjadi fokus kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi DIY dan memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif serta berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk mengatasi permasalahan sektor-sektor utama pendukung perekonomian dan SDA di DIY pada tahun 2025, Pemda DIY melaksanakan upaya terpadu melalui diversifikasi ekonomi berbasis pengembangan industri kreatif, perdagangan, dan UMKM berbasis digital; peningkatan produktivitas serta nilai tambah sektor pertanian melalui teknologi dan penguatan rantai pasok;

pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; serta program pemberdayaan masyarakat guna menurunkan kemiskinan dan memperluas pemerataan kesejahteraan. di sisi lingkungan, Pemda DIY memperkuat pengelolaan sumber daya air, rehabilitasi lahan kritis, pengembangan ruang terbuka hijau, dan sistem pengelolaan sampah terpadu. Seluruh upaya tersebut didukung dengan data BPS sebagai dasar perencanaan dan monitoring, serta dilaksanakan melalui sinergi antarperangkat daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sebagai alternatif dan solusi pembangunan pada tahun 2025, DIY menerapkan pendekatan ekonomi hijau untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Penerapan ekonomi hijau diarahkan pada pengembangan aktivitas ekonomi yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, rendah emisi, dan berorientasi pada keberlanjutan guna menjaga daya dukung lingkungan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi. Melalui penerapan ekonomi hijau, pembangunan DIY pada tahun 2025 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pemda DIY memegang peranan penting dalam menangani berbagai isu dan permasalahan sektor-sektor utama pendukung perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui kebijakan yang terarah dan berbasis data, Pemda DIY berperan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara inklusif, berdaya saing, dan merata sekaligus

menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Intervensi kebijakan diperlukan untuk memperkuat sektor unggulan, meningkatkan produktivitas UMKM dan tenaga kerja, mengurangi ketimpangan wilayah, serta mengendalikan tekanan terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, kebijakan pemerintah menjadi instrumen kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan, sekaligus mendorong pembangunan DIY yang berkelanjutan pada tahun 2025.

Tabel 3.195. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan								
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Sasaran								
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan	%	100	100	100	100	100	100	100

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2025

Capaian kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perekonomian dan SDA tahun 2025 mencapai 100%. Pencapaian ini didukung oleh 4 dokumen kebijakan yang telah ditindaklanjuti, yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah; Rekomendasi

Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah; Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah; dan Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu output kebijakan yang dihasilkan dalam fasilitasi Perekonomian dan SDA. Salah satu upaya terkait pengendalian inflasi dilakukan melalui inisiasi Tim TPID DIY. Memasuki tahun 2025, kondisi inflasi DIY secara umum berada dalam tren yang relatif terkendali dan sejalan dengan sasaran nasional. Capaian ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pengendalian inflasi pada tahun-tahun sebelumnya yang ditopang oleh sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Pemda DIY, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPID DIY. Upaya pengendalian inflasi di DIY dilaksanakan secara konsisten melalui penguatan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Sejalan dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Pemda DIY bersama TPID DIY pada tahun 2025 terus mendorong pengendalian inflasi dari sisi pasokan melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan lokal, serta pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat. Program-program seperti Operasi Pasar, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah, Optimalisasi Kios Segoro Amarto, Penguatan Warung Mrantasi, serta berbagai gerakan sosial masyarakat terus diakselerasi agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Berdasarkan rilis BPS, inflasi DIY pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,65% (*m-to-m*), lebih tinggi dibanding dengan bulan Desember 2024 yang sebesar 0,46% (*m-to-m*). Inflasi kumulatif DIY sepanjang tahun 2025 mencapai 3,11% (*y-o-y*). Secara umum, perkembangan inflasi DIY selama tahun 2025 (*m-to-m*) menunjukkan pola fluktuasi yang terkelola dengan baik dan cenderung stabil dengan dinamika harga yang didominasi oleh faktor musiman serta komoditas pangan strategis. Tren ini mencerminkan meningkatnya efektivitas kebijakan pengendalian inflasi daerah, di mana TPID DIY berhasil meredam lonjakan harga musiman dan menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan. Pola inflasi yang terkendali memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas perekonomian daerah, sekaligus menjadi indikator keberhasilan koordinasi dan intervensi TPID DIY sepanjang tahun. Secara tahunan (*y-o-y*) perkembangan inflasi DIY pada 2025 menunjukkan pengendalian yang semakin solid dan adaptif, seiring konsistensi kebijakan TPID DIY serta sinergi dengan program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada awal tahun, inflasi sempat berada pada level rendah dan sempat mengalami deflasi yang mencerminkan keberhasilan stabilisasi pasokan dan harga pangan pasca akhir tahun.

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah menjadi output kedua dari fasilitasi Perekonomian dan SDA. Pencapaian output ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor, antara lain melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY dan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS). Optimalisasi peran TPAKD DIY dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui sinergi program kerja yang lebih luas dengan melibatkan lintas perangkat daerah

serta sektor di luar dan dalam lingkup Pemda DIY. Beberapa program kerja TPAKD Tahun 2025 antara lain Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) melalui Kredit Pembangunan Ekonomi Daerah BPD DIY; Peningkatan Layanan *website* Kredit Usaha Rakyat (KUR) JOGJA; Lomba Ekosistem Kelompok/Komunitas Petani Perempuan; Program Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung & Wirausaha (SimPel, Literasi, IKNB); Program Percepatan Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Keuangan; Program Pemanfaatan Produk/Layanan Pasar Modal, dan Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Inklusif di Wilayah Perdesaan.

Program kerja TPAKD DIY Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan serta penguatan ekonomi masyarakat. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal, serta kemampuan mengambil keputusan keuangan yang tepat dan bertanggung jawab. Hal ini mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha produktif, mengurangi ketergantungan pada praktik keuangan ilegal dan rentenir, serta meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan. Selain itu, literasi keuangan berkontribusi pada pembentukan perilaku keuangan yang sehat, seperti kebiasan menabung, berinvestasi secara legal, dan pengelolaan risiko melalui produk asuransi. Dari sisi inklusi keuangan, perluasan akses layanan keuangan ke wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat rentan mendukung pemerataan pembangunan ekonomi

daerah. Dengan semakin terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif.

TPAKD DIY terus berupaya mendampingi pemberdayaan UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain melalui kemudahan layanan keuangan digital dan pemasaran daring di DIY. Dalam konteks digitalisasi layanan pembiayaan, *website* KUR Jogja (kur.jogjaprov.go.id) menjadi salah satu saluran pendaftaran dan pengajuan KUR yang mempermudah pelaku UMKM di DIY untuk mengakses pembiayaan secara daring dengan proses yang lebih sederhana, fleksibel, dan cepat. Platform ini menyediakan informasi lengkap, simulasi cicilan, serta layanan pendaftaran yang bisa diakses kapan saja tanpa biaya, sehingga memperluas inklusi keuangan dan mendukung percepatan penyaluran KUR di tingkat lokal.

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan layanan ini dilaksanakan oleh Pemda DIY, OJK DIY, dan 13 lembaga Jasa Keuangan di DIY yaitu BPD DIY, BRI, BNI, BCA, BTN, Bank Mandiri, BSI, Bank Papua, Bank Jateng, Bukopin, dan Bank Sinarmas. Website KUR Jogja mendapatkan respon positif dari masyarakat, terlihat dari pemanfaatan pengajuan KUR yang mencapai Rp27 M oleh 290 debitur pada periode awal Penyaluran Tahun 2024. Untuk pemanfaatan Website KUR Jogja tahun 2025, terdapat 97 pengajuan yang mana 16 diantaranya disetujui dengan plafon pencairan mencapai Rp9,8 M; 7 (tujuh) pengajuan ditolak; dan 74 pengajuan masih dalam proses verifikasi.

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah diarahkan pada fasilitasi perekonomian dan SDA yang mencakup bidang ketenagakerjaan, penanaman

modal dan perizinan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kebijakan terkait desa mandiri budaya. Pada tahun 2025, Pemda DIY terus memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan sumber daya daerah melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, percepatan perizinan dan penanaman modal, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Selain itu, program Desa Mandiri Budaya turut mendorong kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga secara keseluruhan kebijakan tersebut memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, dan daya saing wilayah DIY secara berkelanjutan.

Pemda DIY melaksanakan Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) Desa/Kalurahan; tahun 2021 ditetapkan 8 (delapan) Desa/Kalurahan; tahun 2022 ditetapkan 7 (tujuh) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya; tahun 2023 ditetapkan 7 (tujuh) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya; dan tahun 2024 ditetapkan 8 (delapan) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Untuk tahun 2025, dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 229 Tahun 2025 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang menetapkan 5 desa/kalurahan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2025. Program ini memberikan manfaat utama berupa penguatan pelestarian dan identitas budaya lokal yang dikelola oleh masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi berbasis budaya, dukungan pendanaan dari pemerintah, serta penguatan partisipasi dan kemandirian desa dalam pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian menjadi output terakhir dalam fasilitasi perekonomian dan SDA. Bentuk komitmen Pemda DIY dalam penerapan Ekonomi Hijau adalah disusunnya Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ekonomi Hijau. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2024, Ekonomi Hijau dimaknai sebagai ekonomi rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.

Pemda DIY memperkuat kebijakan perlindungan terhadap sumber daya yang menopang perekonomian melalui pengembangan kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi dengan fokus pada keberlanjutan dan pemanfaatan SDA secara bijak. Hal ini tercermin dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau 2025 - 2029 yang menjadi dasar strategis bagi pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Penyusunan Peraturan Gubernur ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari sisi potensi, DIY memiliki banyak potensi dari berbagai sektor yang mampu mendukung tercapainya Indeks Ekonomi Hijau. Namun demikian, masih diperlukan berbagai upaya nyata, kerja sama dari berbagai pihak, dan perangkat peraturan untuk mewujudkan penerapan Ekonomi Hijau di DIY. Peraturan Gubernur terkait Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau di DIY harus diimbangi dengan

keseriusan berbagai pihak untuk saling bekerja sama guna mewujudkan peningkatan Indeks Ekonomi Hijau. Melalui upaya tersebut, kebijakan perlindungan SDA di DIY diarahkan untuk lebih terpadu, berbasis data, dan responsif terhadap tantangan lingkungan serta perekonomian lokal, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Secara umum, DIY sering menghadapi tantangan inflasi pada kelompok *Volatile Foods* (bahan pangan bergejolak). Berdasarkan data BPS per Desember 2025, inflasi DIY secara tahun ke tahun (*y-o-y*) terutama didorong oleh komoditas beras (0,15%), cabai rawit (0,13%), cabai merah (0,13%), dan daging ayam ras (0,09%), serta komoditas emas yang menjadi pendorong utama inflasi dengan nilai 0,87%. Permasalahan inflasi pada kelompok *volatile foods* disebabkan beberapa faktor, seperti anomali cuaca dan perubahan iklim, struktur pasar serta rantai distribusi yang panjang dan lonjakan permintaan musiman akibat status DIY sebagai daerah tujuan wisata. Selain itu, program MBG juga memberikan permasalahan tersendiri bagi pengendalian inflasi dengan meningkatnya permintaan sehingga mendorong kenaikan harga.

(b) Pembangunan ekonomi wilayah menghadapi tantangan berupa keterbatasan koordinasi antar OPD serta instansi terkait lainnya, pemanfaatan data dan teknologi yang belum

optimal dalam pengambilan keputusan dan sinkronisasi pelaksanaan program atau kegiatan antarinstansi, serta belum meratanya ketersediaan jaringan internet di wilayah DIY sehingga sulit untuk mengimplementasikan program kerja terkait.

(a) Pengembangan ekonomi daerah masih menghadapi tantangan berupa perlunya penguatan integrasi program antarperangkat daerah serta belum meratanya pemahaman internal terhadap sektor unggulan lokal dan potensi inovasi ekonomi kreatif sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya tepat sasaran dan berorientasi pada prioritas. Selain itu, keterbatasan ketersediaan data sebagai dasar dalam penyusunan masterplan Desa/Kalurahan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan oleh Pemda DIY.

(b) Perlindungan sumber daya yang menopang perekonomian masih menghadapi tantangan, yaitu koordinasi internal antarOPD dalam perlindungan SDA yang belum optimal, sehingga kebijakan perlindungan SDA sering terfragmentasi antarsektor (lingkungan, pertanian, kehutanan) dampaknya menjadi kurang maksimal. Selain itu, kebijakan ekonomi belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan daya dukung SDA.

b) Solusi

(a) Pemda DIY memperkuat pengendalian inflasi melalui kunci strategis 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dari sisi keterjangkauan harga, upaya dapat dilakukan

melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah yang tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Penguatan kualitas dan ketersediaan data neraca pangan; evaluasi realisasi kerja sama antardaerah; penguatan peran BUMD melalui kemitraan strategis dengan pelaku usaha sebagai *offtaker*; serta optimalisasi kerja sama sebagai sumber pasokan hortikultura dapat memperkuat ketersediaan pasokan. Kelancaran distribusi dapat diperkuat dengan fasilitasi ongkos kirim dan ongkos angkut distribusi komoditas. Selain itu, digitalisasi rantai pasok dan pemetaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan pemantauan produksi dan menghitung kebutuhan pangan Program MBG dengan memanfaatkan Geoportal DIY. Dari sisi komunikasi efektif, perlu diperkuat edukasi mengenai belanja bijak dan kampanye kepada masyarakat agar tidak melakukan *panic buying* melalui program Mrantasi.

(b) Pemda DIY perlu memperkuat kapasitas internal OPD dan instansi terkait lainnya melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan perencanaan, analisis data, dan manajemen program, serta pengembangan infrastruktur internal, seperti sistem informasi terpadu dan peningkatan jaringan internet.

(c) Pemda DIY perlu memperkuat integrasi program antar OPD melalui koordinasi rutin dan penyusunan rencana kerja lintas sektor yang selaras dengan prioritas ekonomi daerah.

Peningkatan kapasitas internal dalam memahami sektor unggulan lokal dan potensi inovasi ekonomi kreatif juga penting melalui pelatihan, workshop, dan *sharing knowledge* antar OPD. Selain itu, penguatan sistem data dan informasi menjadi prioritas, termasuk pemutakhiran data untuk penyusunan masterplan Desa/Kalurahan yang akan dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2025, sehingga perumusan kebijakan dapat lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan ekonomi.

(d) Pemda DIY perlu memperkuat koordinasi internal antar OPD melalui forum lintas sektor dan integrasi perencanaan kebijakan, sehingga perlindungan SDA tidak terfragmentasi dan lebih terpadu. Peningkatan kapasitas SDM dalam memahami keterkaitan antara ekonomi, lingkungan, pertanian, dan kehutanan penting untuk memastikan kebijakan ekonomi memperhitungkan keberlanjutan dan daya dukung SDA. Selain itu, pengembangan sistem informasi terpadu mengenai kondisi dan pemanfaatan SDA dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sehingga perlindungan sumber daya perekonomian dapat terlaksana secara lebih efektif dan berdampak maksimal.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA dilaksanakan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp1.650.491.750,00 dengan pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program, 10 kegiatan, dan 24 subkegiatan. Lebih

lanjut, mengikuti kebijakan, anggaran urusan fasilitasi perekonomian dan SDA mengalami beberapa kali perubahan yang berdampak pada besaran anggaran yang diperoleh dan berdampak pada pengalokasian anggaran di setiap program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan pertama (APBD Pergeseran) pada Maret 2025, anggaran fasilitasi perekonomian dan SDA berkurang menjadi Rp1.484.351.650,00 dengan pengalokasian pada 3 program, 10 kegiatan, dan 24 subkegiatan. Perubahan kedua (APBD Perubahan), pada September 2025, anggaran berubah menjadi Rp1.458.334.150,00 dengan pengalokasian pada 3 program, 10 kegiatan, dan 24 subkegiatan.

Tabel 3.196. Rincian Anggaran Urusan Fasilitasi Perekonomian dan SDA Tahun 2025

No.	Program	Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp755.393.500,00	Rp714.296.400,00	Rp646.436.400,00
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp639.350.500,00	Rp548.885.500,00	Rp546.628.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp255.747.750,00	Rp221.169.750,00	Rp265.569.750,00
Total Anggaran		Rp1.650.491.750,00	Rp1.484.351.650,00	Rp1.458.334.150,00

Sumber: Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2025

Secara keseluruhan, Kinerja urusan fasilitasi Perekonomian dan SDA Setda DIY pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik. Secara fisik, pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami deviasi, dengan realisasi sebesar 100% dari target yang telah diterapkan. Namun, terdapat deviasi pada kinerja keuangan sebesar 0,77%, dari target 100% terealisasi 99,23%. Deviasi keuangan disebabkan sisa belanja karena adanya selisih harga antara SHBJ dengan harga pasar.

Tabel 3.197. Capaian Kinerja Program dan subkegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Perekonomian dan SDA Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1. Merumuskan arah kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam hayati berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
				Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	**Desa**	**35**	**35**
				Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya	Dokumen	1	1
				Penetapan Desa Mandiri Budaya Tahun 2023	Dokumen	1	1
				Pemantauan keberlanjutan Desa Mandiri Budaya	Dokumen	1	1
				Penyusunan Masterplan Kalurahan	Dokumen	5	5
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1. Merumuskan arah kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam hayati berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	**3**	**3**
				Renja	Dokumen	1	1
				Renja Perubahan	Dokumen	1	1
				ROPK	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
				DPA Tahun 2026	Dokumen	1	1
				DPPA Tahun 2025	Dokumen	1	1
				RKA Perubahan Tahun 2025	Dokumen	1	1
				RKA Tahun 2026	Dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Konsep/Bahan LKPJ	Laporan	1	1
				Konsep/Bahan LPPD	Laporan	1	1
				Laporan LKJiP	Laporan	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Dokumen**	**1**	**1**
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan**	**1**	**1**
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)	Laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Laporan**	**3**	**3**
				Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	1	1
				Laporan Keuangan Triwulanan	Laporan	1	1
				Laporan Keuangan Semester	Laporan	1	1
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Laporan**	**1**	**1**
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Paket**	**1**	**1**
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Paket**	**26**	**26**
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	26	26
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Paket**	**23**	**23**
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	23	23
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Paket**	**2**	**2**
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Dokumen**	**1**	**1**
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	**Laporan**	**1**	**1**
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Laporan**	**1**	**1**
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Laporan**	**1**	**1**
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Unit**	**1**	**1**
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Unit**	**5**	**5**
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	24
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	4	4
				Rekomendasi Bahan Kebijakan Ketenagakerjaan Daerah	Dokumen	1	1
				Rekomendasi Bahan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan	Dokumen	1	1
				Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	1	1
				Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen	1	1
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	2
				Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Dokumen	1	1
				Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Dokumen	1	1
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	**Dokumen**	**2**	**2**
				Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan	Dokumen	1	1
				Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian	Dokumen	1	1

Sumber: Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2025

d. Fasilitasi Kesra

(1) Kondisi Umum

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan dan responsif terhadap isu strategis daerah, kegiatan penyiapan bahan kebijakan pada bidang bina mental, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar telah dilaksanakan secara terintegrasi. Pada Tahun 2025, kegiatan tersebut menghasilkan sebanyak 14 naskah bahan kebijakan, yang sebagian besar telah ditetapkan dan ditindaklanjuti menjadi produk hukum serta dokumen kebijakan daerah, yang terdiri dari :

a) SK Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2025;
b) SE Nomor B/100.3.4/971/SET tentang Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1446 H/ 2025M di Lingkungan Instansi Pemerintah di DIY.
c) SK Gubernur DIY Nomor 116/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2018 Tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemda DIY;
d) *Policy Note* Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan;
e) Ingub DIY Nomor B/100.3.4/2130/BR.8 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kesehatan, Kebugaran, dan Keterampilan Non teknis bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di DIY;
f) *Policy Brief*: Urgensi Penguatan Sistem Kesehatan Mental Terintegrasi di DIY Menuju Layanan Berkelanjutan dan Responsif;
g) SK Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY;

h) SK Gubernur DIY Nomor 92/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY;
i) Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan.
j) Rancangan Pergub DIY tentang Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan;
k) Rancangan Pergub DIY tentang Pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
l) SE Gubernur DIY Nomor 3310 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan dan Anak di DIY;
m) SE Gubernur DIY tentang Penguatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di DIY;
n) *Policy Note* Seni tradisi DIY: Arah Pemeliharaan dan Pengembangan.



Gambar 3.72. Beberapa Dokumen Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2025

Pencapaian target sasaran merupakan hasil dari pelaksanaan fasilitasi keagamaan yang dijalankan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui empat kegiatan utama, yaitu:

a) Pembinaan Mental Keagamaan bagi Lima Agama, yang meliputi :
   (a) Islam, melalui penyelenggaraan kegiatan pengajian dalam rangka peringatan Nuzulul Qur'an, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Hari Santri;
   (b) Katolik, melalui peringatan Hari Raya Natal dan Paskah;
   (c) Kristen, melalui peringatan Hari Raya Natal dan Paskah;
   (d) Buddha, melalui peringatan Hari Raya Waisak; dan
   (e) Hindu, melalui peringatan Hari Raya Nyepi.
b) Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah, meliputi layanan bagi Petugas Haji Daerah yang mencakup proses seleksi, pembekalan, pengiriman, serta monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi kegiatan pamitan dan mangayubagyo jemaah haji, termasuk penghantaran dan penjemputan jemaah haji pada embarkasi.
c) Fasilitasi Festival Keagamaan, yang mencakup penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Tingkat Daerah, pelatihan rutin dan kegiatan eksebisi, serta pengiriman kafilah STQH Tingkat Nasional; penyelenggaraan Pesparani Daerah di DIY; serta pelaksanaan pelatihan bagi kontingen Pesparawi Nasional Tahun 2026.
d) Fasilitasi Peribadatan dan Hibah Kelembagaan Keagamaan, kepada delapan lembaga/organisasi keagamaan, yaitu MUI DIY, BAZNAS DIY, PW NU DIY, PW Muhammadiyah DIY, PGI DIY, Kevikepan,

PHDI DIY, dan WALUBI DIY, yang disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan serta sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pesantren.





Gambar 3.73. Festival Keagamaan STQ Daerah dan Nasional





Gambar 3.74. Festival Keagamaan Pesparani Daerah dan Pelatihan Pesparawi Nasional




Gambar 3.75. Perayaan Nyepi dan Perayaan Waisak Paskah




Gambar 3.76. Perayaan Paskah dan Perayaan Natal



Gambar 3.77. Perayaan Maulid Nabi dan Nuzulul Quran



Gambar 3.78. Perayaan Hari Santri

Berdasarkan penjelasan tersebut, persentase capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 diperoleh dari komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan. Terdapat 14 dokumen naskah bahan kebijakan dari target 13 dokumen atau sebesar 107,69%, serta terlaksananya fasilitasi keagamaan sebesar 100%. Sehingga perhitungan capaian adalah (107,69%+100%)/2 = 103,84%. Adapun target tahun 2025 adalah 80%, maka realisasi tahun 2025 sebesar 129,8%.

Tabel 3.198. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Meta Indikator	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2022–2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan	Komposit rumusan bahan	%	160	80	103,85	129,81	100	103,85

No	Indikator Kinerja Sasaran	Meta Indikator	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2022–2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
	evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan							

Sumber: Biro Kesra Setda DIY, 2025

Tabel 3.199. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2022–2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) (%)
				Target *)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	%	42,85	60	63,64	106,07	100	100	63,64
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	%	160	80	103,85	129,81	100	100	103,85%

**) Target Penyelarasan kinerja Tahun 2025*
Sumber: Biro Kesra Setda DIY, 2026

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, Pemda DIY dihadapkan pada dinamika kebijakan Pemerintah Pusat yang terus

berkembang dan memerlukan penyesuaian yang cepat serta tepat di tingkat daerah. di sisi lain, sinergi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam menangani isu-isu strategis kesejahteraan rakyat masih perlu diperkuat agar berbagai program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

b) Solusi

(a) Untuk merespons kondisi tersebut, Pemda DIY menempuh langkah penguatan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, mitra kerja, maupun stakeholder terkait, sehingga setiap perubahan kebijakan dapat diantisipasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan selaras.

(b) Selain itu, Pemda DIY terus mendorong peningkatan kolaborasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah, sebagai upaya bersama dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025

Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan tercapai 92,41% atau Rp5.398.371.022 dari Rp5.841.840.000 pagu yang dianggarkan. Terdapat deviasi keuangan sebesar 3%, yang diantaranya disebabkan oleh selisih sisa biaya pada Belanja

Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disebabkan perbedaan harga beli lebih rendah daripada Standar Harga berlaku. Hal ini juga berlaku pada pemeliharaan kendaraan dinas baik jabatan maupun operasional dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah karena anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.

Tabel 3.200. Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Fisik (%)	
						(Rp)	(%)	Target	Reali -sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Sekretariat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.294.041.000	1.238.154.266	95,68	100	100
			1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.294.041.000	1.238.154.266	95,68	100	100
			1.1.1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1.294.041.000	1.238.154.266	95,68	100	100
			2	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.208.534.500	3.901.590.648	92,71	100	100
			2.1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	3.387.567.000	3.098.752.644	91,47	100	100
			2.1.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	225.000	225.000	100	100	100
			2.1.2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.387.342.000	3.098.527.644	91,47	100	100
			2.2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	423.034.650	409.105.309	96,71	100	100
			2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	161.769.450	161.183.268	99,64	100	100
			2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	261.265.200	247.922.041	94,89	100	100
			2.3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	397.932.850	393.732.695	98,94	100	100
			2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,	397.932.850	393.732.695	98,94	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Fisik (%)	
						(Rp)	(%)	Target	Reali -sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Kebudayaan, dan Pariwisata					
			3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	339.264.500	258.626.108	76,23	100	100
			3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.666.600	7.125.213	92,94	100	100
			3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.459.000	4.078.518	91,47	100	100
			3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.385.600	1.295.998	93,53	100	100
			3.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.822.000	1.750.697	96,09	100	100
			3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.738.000	10.313.200	87,86	100	100
			3.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.623.000	6.121.500	92,43	100	100
			3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.713.000	2.565.000	94,54	100	100
			3.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.402.000	1.626.700	67,72	100	100
			3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.865.000	10.459.000	96,26	100	100
			3.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.865.000	10.459.000	96,26	100	100
			3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.900.900	101.055.857	74,91	100	100
			3.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.872.000	2.847.000	99,13	100	100
			3.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.636.900	9.767.798	83,94	100	100
			3.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.000	1.840.900	79,49	100	100
			3.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.090.000	12.467.091	82,62	100	100
			3.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000	1.480.000	83,9	100	100
			3.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.222.000	72.653.068	71,78	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Fisik (%)	
						(Rp)	(%)	Target	Reali -sasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			3.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.900.000	7.369.838	82,81	100	100
			3.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100	100	100
			3.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.900.000	2.369.838	60,77	100	100
			3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.194.000	122.303.000	74,04	100	100
			3.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.592.000	33.017.500	95,45	100	100
			3.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.054.000	60.147.500	62,62	100	100
			3.6.3	Pemeliharaan Mebel	2.340.000	2.260.000	96,58	100	100
			3.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.448.000	16.078.000	82,67	100	100
			3.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.760.000	10.800.000	84,64	100	100
			Total Belanja		**5.841.840.000**	**5.398.371.022**	**92,41**	**100**	**100**

Sumber: Biro Kesra Setda DIY, 2025

e. Kelembagaan dan Tata Laksana

(1) Kondisi Umum

Pada tahun 2025, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi dalam upaya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan dan kepuasan penerima pelayanan atau masyarakat sangatlah dinamis. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi oleh Pemda Daerah DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a) Reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan seluruh pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi reformasi birokrasi dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road map* tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan arah perubahan dalam delapan area perubahan yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Selanjutnya koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi.

b) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan di Pemda DIY telah dilaksanakan pengangkatan jabatan administrasi ke dalam beberapa jabatan fungsional termasuk analis kebijakan pada beberapa OPD. Sehubungan dengan hal tersebut biro organisasi mendapat tugas tambahan baru sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemda DIY. Untuk melaksanakan tugas baru tersebut, Biro Organisasi dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memfasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis kebijakan, dalam kondisi tanpa anggaran dan instansi pembina yang kurang responsif dengan kesulitan yang dihadapi oleh daerah. Disisi lain regulasi yang mengatur SDM aparatur sangat dinamis, dimana baru saja memproses tindak lanjut aturan, sudah terbit aturan lain.

Tabel 3.201. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2023-2027 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD (2027) (%)
				Target *)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja tujuan Terwujudnya Kelembagaan Pemda DIY yang Istimewa dengan memperhatikan Bentuk dan Susunan Pemerintahan Asli									
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi	%	100	94	100	106.4	100	100	100
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah									
1	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A-(….)	A (….)	A (….)	100	A (….)	A (….)	100
Terwujudnya Kelembagaan listmewa yang Agile									
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Kategori 'Sangat Baik' (A)	%	100	100	100	100	100	100	100

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2025

Capaian indikator kinerja Kategori RB Perangkat Daerah pada Tahun 2024 sesuai dengan LHE RB 2024 memperoleh nilai rata-rata 93,42 dengan kategori "A". Hasil evaluasi tahun 2024 "tidak dapat diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Capaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Kategori "Sangat Baik" (A) terealisasi sebesar 100% dari target 94,6% atau dengan persentase capaian sebesar 105,7.

Seluruh Perangkat Daerah di Pemda DIY telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Memuaskan.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah sebagai institusi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*) melalui penguatan kelembagaan istimewa Pemda DIY, permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY antara lain sebagai berikut:

(a) Penataan Kelembagaan dan Analis Jabatan
   (i) Untuk mendukung Visi Misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022–2027, perlu dilakukan evaluasi untuk mendesain bentuk Kelembagaan dan tata Kelola kelembagaan Pemda DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   (ii) Penerapan Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
   (iii) Adanya dinamika kebijakan pusat terkait simplifikasi regulasi yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi tugas

fungsi dan tata kerja perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyederhanakan peraturan guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan percepatan pelayanan publik.

(iv) Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota masih memerlukan fasilitasi/pendampingan sesuai asas-asas pembentukan perangkat daerah;

(v) Optimalisasi penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang kelembagaan masih memerlukan fasilitasi intensif terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi. Perbedaan pemahaman terkait tata cara pengelolaan dana keistimewaan, beragam persepsi dalam memaknai keistimewaan urusan kelembagaan serta belum adanya *Road Map* pelaksanaan urusan kelembagaan;

(vi) Adanya ketugasan baru sebagai unit pembina jabatan fungsional analis kebijakan memerlukan *support* tambahan pendanaan maupun tambahan personil yang akan mengawal proses fasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis kebijakan;

(vii) Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat di era industri 4.0 saat ini mengharuskan setiap ASN untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

(viii) Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah melakukan empat kali perubahan regulasi yang mengatur terkait nomenklatur jabatan pelaksana di Instansi Pemerintah. Terdapat perubahan nomenklatur jabatan pelaksana yang wajib disesuaikan dengan batas maksimal 15 Juli 2026.

(ix) Kenaikan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dikarenakan adanya afirmasi terhadap adanya pengangkatan PPPK dan afirmasi terhadap adanya pengisian pejabat pelaksana yang tidak sesuai syarat jabatan. Hal ini mengakibatkan tingkat keterisian formasi di Pemda DIY menjadi semakin rendah, sehingga jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana perlu disesuaikan kembali melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai tupoksi masing-masing OPD

(x) Adanya Mandat penataan dan simplifikasi jabatan pelaksana oleh Kementerian PANRB yang harus direspon oleh Pemda DIY melalui pelaksanaan tiga tahapan yaitu *mapping* nomenklatur jabatan pelaksana yang akan di konversi ke dalam 3 klasifikasi jabatan pelaksana, melakukan penyusunan peta jabatan, dan penyusunan evaluasi jabatan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pemda DIY

(b) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Pemda DIY masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain: perlunya penguatan peran perangkat daerah koordinator RB tematik agar fungsi koordinasi tidak sekadar menjadi proses administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak strategi bersama yang diakui seluruh OPD pendukung; belum adanya pemetaan teknis kontribusi masing-masing perangkat daerah terhadap dampak pembangunan yang dapat dirumuskan menjadi indikator kinerja; pembangunan Zona Integritas yang belum merata di seluruh unit kerja strategis; serta implementasi RB yang masih lebih berfokus pada perbaikan tata kelola internal dan belum sepenuhnya berkontribusi nyata terhadap hasil pembangunan.

(c) Pengembangan Ketatalaksanaan
   (i) penerapan mekanisme kerja dan sistem kerja yang *agile* belum dapat diterapkan secara optimal sehingga belum mampu merespon tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks;
   (ii) kompleksitas individu dengan perbedaan persepsi terhadap prosedur kerja menimbulkan kurang optimalnya penerapan SOP Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman kerja pada perangkat daerah;

(iii) regulasi mengenai peta proses bisnis belum dapat direspon dengan optimal, baik dalam hal penyusunan maupun pelaksanaannya;
(iv) dinamika ketentuan pemerintah pusat yang menuntut daerah untuk dapat menyesuaikan secara cepat dengan jangka waktu tertentu, sedangkan tindak lanjut ketentuan sebelumnya baru pada tahapan mulai berjalan dan belum dapat diterapkan secara menyeluruh;
(v) pelaksanaan tata naskah dinas merupakan sarana yang efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, namun penerapannya belum optimal sampai ke seluruh aspek penciptaan arsip.

b) Solusi

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda DIY perlu memperkuat Forum Komunikasi Lintas OPD melalui mekanisme joint planning di bawah pengawasan Bappeda DIY guna mencegah duplikasi program dan memastikan keselarasan anggaran pada tujuan tematik yang sama, mengoptimalkan forum koordinasi strategis agar perangkat daerah koordinator dan OPD mitra dapat menyinkronkan program sejak tahap perencanaan, meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui pembinaan unit layanan dan penyusunan metodologi survei mandiri, mengoptimalkan capaian indikator evaluasi RB dengan memperbaiki kualitas kebijakan,

mempercepat digitalisasi, serta meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan SPI, serta memberikan apresiasi atas capaian kolaboratif guna mendorong inovasi dan kerja sama tim yang lebih solid di antara perangkat daerah.

Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya terkait keterbukaan informasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, dan Standar Pelayanan perlu direviu secara berkelanjutan melalui monitoring dan pendampingan untuk memenuhi tuntutan masyarakat; Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan publik untuk masyarakat rentan perlu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan minimal penyediaan sarana prasarana tersebut.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.324.723.150 (Pagu Belanja Perubahan Penjabaran). Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 2 program dan 23 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp1.260.332.190 atau 95,14%, dengan pencapaian fisik sebesar 99,5%.

Tabel 3.202. Capaian Kinerja Program dan subkegiatan Penunjang Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	URUSAN UMUM	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			pemerintah daerah				
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
				Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
				Persentase penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a.Tersusunnya PK Biro Organisasi Tahun 2025	Dokumen	1	1
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	b.Tersusunnya Renja Biro Organisasi Tahun 2025	Dokumen	1	1
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	c.Tersusunnya Renja Perubahan Biro Organisasi	Dokumen	1	1
				d.Tersusunnya ROPK Biro Organisasi Tahun 2025	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				a.Tersusunnya DPA Biro	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Organisasi Tahun 2026			
				b.Tersusunnya DPPA Biro Organisasi Tahun 2025	Dokumen	1	1
				c.Tersusunnya RKA Biro Organisasi	Dokumen	1	1
				d.Tersusunnya Perubahan RKA Biro Organisasi	Dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				a.Tersusunnya Dokumen LKjIP Biro Organisasi	Dokumen	1	1
				b.Tersusunnya Dokumen LPPD Biro Organisasi	Dokumen	1	1
				c.Tersusunnya Dokumen LKPJ Biro Organisasi	Dokumen	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Organisasi	Dokumen	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	18	18

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	4
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	2
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terselenggaranya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tersedianya dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	1
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
				Tersedianya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	33
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	7	7

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	25	25
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**			
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	42	43.68
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	**Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah**			
				Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
				Rapergub Pedoman Kelembagaan Kabupaten/ Kota	Rapergub	1	1
				Rapergub Lembaga Non Struktural	Dokumen	1	1
				Rapergub SOTK Perangkat Daerah/ UPT	Rapergub	7	7
				Monitoring dan Evaluasi SOP Perangkat Daerah, UPT, SMA, dan SMK	Dokumen	1	1
				Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Monitoring dan Evaluasi Tata Naskah Dinas	Dokumen	1	1
				Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota			
				Rekomendasi Penataan Kelambagaan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1
				Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan			
				Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen	1	1
				Dokumen Pengelolaan Tenaga Alih Daya	Dokumen	1	1
				Rapergub Standar Kompetensi Jabatan	Rapergub	1	1
				Rapergub Kelas Jabatan	Rapergub	1	1
				Monitoring Kebijakan Analisis Jabatan Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1
				Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan			
				Rekapitulasi Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025	Dokumen	2	2
				Rekapitulasi Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2026	Dokumen	1	1
				Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Keistimewaan Tahun 2026 Urusan Kelembagaan			
				Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Dokumen	1	1
				Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			
				Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Implementasi Budaya Pemerintahan Berkategori Baik	Perangkat Daerah	38	38
				Pemenang Kompetisi Budaya Pemerintahan	Kelompok	15	15
				Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
				Berita Acara Penyerahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	1
				Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi	15	15
				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai PEKPPP minimal B	Unit Pelayanan Publik	50	50
				Laporan Evaluasi SP dan FKP	Dokumen	1	1
				Laporan SKM	Dokumen	1	1
				Laporan Pembinaan Inovasi	Dokumen	1	1
				Laporan Keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				BKK Inovasi Kabupaten	Kalurahan	19	19

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2025

f. Fasilitasi Administrasi Pembangunan

(1) Kondisi Umum

Biro PIWP2 telah melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan. Melalui sasaran meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur).

Tabel 3.203. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2024–2025 serta capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD (2027)

Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target *)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan Terwujudnya rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)								
Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (Bidang Infrastruktur)	%	166,64	60	70	116,67	100	100	70
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)								
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung Program Pemda (Bidang Infrastruktur)	%	166,64	60%	70%	116,67%	100%	100%	70%
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah								

Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	A (93,4)	A (93,48)	A (91,96)	98,37	A	A (93,50)	100

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2025

Capaian tujuan Terwujudnya rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur), dengan indikator Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (Bidang Infrastruktur) tercapai dengan target di tahun 2025 yaitu 60% adalah sebesar 70%. Dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 116,67% (terlampaui).

Capaian terhadap indikator Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung Program Pemda (Bidang Infrastruktur) pada tahun 2025 mencapai 70% dari target yang ditetapkan sebesar 60% atau dengan persentase capaian sebesar 116,67%. Angka tersebut diperoleh dari 7 kebijakan pendukung Program Pemda yang telah dihasilkan sampai akhir tahun 2025 dibagi dengan total kebijakan yang akan dihasilkan di akhir periode (10 kebijakan).

7 kebijakan pendukung Program pemda yang telah dihasilkan sampai akhir tahun 2025 yaitu:

a) Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan pada Daerah Aliran Sungai Progo di

Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 November 2023 (2023),

b) Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penguatan Kebijakan dan Strategi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tanggal 29 Februari 2024 (2023),
c) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027 (2023),
d) Instruksi Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Optimalisasi Pengendalian Kegiatan usaha Pertambangan di DIY (2024),
e) SE Gubernur Nomor 900.1.13.5/9336 tentang Optimalisasi Pinjaman Daerah dalam rangka Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah.
f) Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 171.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional Jogja tanggal 7 Mei 2025, dan
g) SE Gub tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di DIY (Draft SE dalam proses diajukan ke Gubernur).

Sedangkan Program Pemda yang didukung oleh bahan kebijakan yang dihasilkan/dikeluarkan yaitu :

a) Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur dengan bahan kebijakannya yang telah dihasilkan:

(a) Kajian Pembiayaan Pembangunan daerah melalui skema Penugasan BUMD dan TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) (2023).

(b) Laporan Monev Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2023)
(c) Kajian Pembiayaan Pembangunan Melalui Skema Pinjaman Daerah (2024)
(d) Laporan Monev Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah (2024)
(e) Laporan Monev penugasan BUMD dan TJSLP/CSR (2024)
(f) Laporan Monev Pelaksanaan TJSLP (2025)
(g) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah Sektor Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika - Terkait Tarif Angkutan Sewa Khusus (2025)

b) Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan bahan kebijakannya yang telah dihasilkan :

(a) Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (*Roadmap* Sanitasi 2023-2027) (2023)
(b) Laporan Monev Kebijakan terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan (2023)
(c) Laporan Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (2023)
(d) Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan - Kajian Penanganan Indeks Kualitas Air (2024)
(e) Laporan Monev Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur di DIY (2024)
(f) Kajian Perlindungan Ekosistem Esensial Karst di DIY (2025)

(g) Kajian Monev Kebijakan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di DIY
(h) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah sektor ESDM - Terkait konservasi Air Tanah (2025)

c) Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang

(a) Kajian Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Bentang Alam Karst di DIY (2024)
(b) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Pola Ruang Berkelanjutan (2024)
(c) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang (2024)
(d) Laporan Perencanaan Program Kegiatan Urusan Tata Ruang (2025)

d) Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda

(a) Proposal Pengusulan *Geopark* Jogja sebagai *Geopark* Nasional (2023)
(b) Penetapan Rencana Induk Geopark Jogja Tahun 2023-2032 melalui SK Gubernur Nomor 40/KEP/2023 tentang Penetapan Rencana Induk Geopark Jogja Tahun 2023-2032 tanggal 2 Februari 2023 (2023)
(c) Laporan Pelaksanaan Verifikasi *Geopark* Jogja sebagai *Geopark* Nasional (2024)
(d) Modul Dasar Pengurangan Risiko Bencana pada *Geosite* Kawasan *Geopark* DIY (2024)

e) Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

(a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Distribusi Air Minum di DIY (2025)
(b) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah sektor ESDM - Terkait Konservasi Air Tanah (2025)

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Implementasi kebijakan membutuhkan keselarasan, kesinambungan, komitmen dan konsistensi OPD terkait dalam pelaksanaan Kebijakan yang telah dikeluarkan agar dapat terlaksana secara berkelanjutan dan efektif.

b) Solusi

Mengoptimalkan pengawasan melalui instrumen monitoring dan evaluasi guna mendapatkan umpan balik yang komprehensif. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pemberian reward and punishment, penyusunan MoU, serta Nota Kesepakatan demi menjamin kualitas dan keberlanjutan kebijakan.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp2.662.498.900. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 Program, 11 Kegiatan dan 22 Subkegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung terealisasi sebesar Rp2.532.447.785,00 atau 95,12%, dengan pencapaian fisik sebesar 99,46%.

Indikator kinerja Terwujudnya rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur), merupakan hasil dari pelaksanaan program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut.

a) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan mengampu 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rincian capaian kinerja program dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.204. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TATA RUANG	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Penguatan Pilar Konservasi, Penguatan Pilar Edukasi, Penguatan Pilar Pengembangan Perekonomian Masyarakat, dan Penguatan Pilar Sarana Pelaksanaan Geopark Jogja. 2. Kajian Monev Kebijakan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di DIY	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			
				Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang			
				1. Penguatan Pilar Konservasi	dokumen	1	1
				2. Penguatan Pilar Edukasi	dokumen	1	1
				3. Penguatan Pilar Pengembangan Perekonomian Masyarakat	dokumen	1	1
				4. Penguatan Pilar Sarana Pelaksanaan	dokumen	1	1
				Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang			
				1. Kajian Monev Kebijakan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di DIY	dokumen	1	1
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Renstra 2022–2027	dokumen	1	1
				Tersusunnya Renja Perubahan Th 2025	dokumen	1	1
				Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2026	dokumen	1	1
				Tersusunnya ROPK	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya RKA Tahun 2026	dokumen	1	1
				Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2025	dokumen	1	1
				Tersusunnya DPA Tahun 2026	dokumen	1	1
				Tersusunnya RKA-P Tahun 2025	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Tahun 2024	laporan	1	1
				Tersusunnya LKjIP Tahun 2024	laporan	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan	bulan	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	laporan	1	1
				Tersedianya Laporan keuangan tahunan audited	laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Semester	laporan	2	2
				Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan	laporan	4	4
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	bulan	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya Alat Tulis Kantor	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	paket	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Terlaksananya Barang cetakan dan Penggandaan/Fotokopi	paket	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	laporan	4	4
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Tersedianya Benda Pos/Materai	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat)	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	unit	6	4
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan gedung kantor	jenis	12	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	jenis	3	3
			1. Dokumen Laporan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan (PMU TP5)	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**			
				Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	50	83,33
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			
				Dokumen Laporan Monev Pelaksanaan TJSLP	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			2. Kajian Perlindungan Ekosistem Esensial Karst di DIY 3. Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan) 4. Dokumen Laporan Monev Pelaksanaan TJSLP 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Distribusi Air Minum di DIY 6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah sektor ESDM 7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah Sektor Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Distribusi Air Minum di DIY	laporan	1	1
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah sektor ESDM	laporan	1	1
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah Sektor Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	laporan	1	1
				Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kab/Kota Tahun 2025	laporan	1	1
				Laporan evaluasi Hasil Program Pemda	laporan	1	1
				Penyerahan DIPA APBN Tahun 2025	laporan	1	1
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			
				Dokumen Laporan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan	dokumen	1	1
				Kajian Perlindungan Ekosistem Esensial Karst di DIY	dokumen	1	1
				Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan)	dokumen	1	1

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2025

g. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Kondisi Umum

Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah memiliki tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa. Untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut, Biro Pengadaan Barang/Jasa memiliki Indikator Kinerja Tujuan "Tercapainya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan" serta Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

Tabel 3.205. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator Kinerja Tujuan Tercapainya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan								
Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan dan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3	%	N/A	96,50	96,62	100,12	96,54	96,54	100,08
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Jasa								
Persentase kualitas pengadaan barang/jasa dan persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	N/A	72,52	77,35	106,60	78,74	78,74	98,23

Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah								
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	A (92,61)	A (92,66)	100,03	N/A	A (92,71)	N/A

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda DIY, 2025

Capaian tujuan Tercapainya kualitas pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan dengan target di tahun 2025 yaitu 96,50% terealisasi sebesar 77,02%. Dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 79,82% .

Capaian terhadap sasaran Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Jasa yaitu 72,52% terealisasi sebesar 77,35%. Dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 106,6%. Perhitungannya nilai tersebut didapat dari 90% Persentase kualitas Pengadaan Barang Jasa (PBJ 50% + LPSE 20% + Pembinaan dan Advokasi 30%) + 10% Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang Jasa dengan kategori baik. di tahun 2025 targetnya adalah 69,49% sedangkan realisasinya adalah 66,77%. Dan capaian sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah A, target indikator RB Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah 92,61 dengan nilai realisasi 92,66 sehingga mencapai target.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Kendala perencanaan pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan(RUP) terkait data RUP yang tidak sesuai dari segi rencana waktu pemilihan penyedia dan pemanfaatan barang/jasa.
(b) Kendala penyusunan dokumen persiapan pemilihan barang/jasa berupa dokumen spesifikasi teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri, dan dokumen lainnya yang belum mempertimbangkan aspek penggunaan produk dalam negeri dan atau pengadaan berkelanjutan.
(c) Kendala sistem katalog elektronik versi 5 yang kemudian di update dengan katalog versi 6, yang memiliki proses bisnis yang sangat berbeda dari versi sebelumnya. Proses bisnis yang dimaksud dari segi proses pemilihan penyedia sampai dengan proses pembayaran.
(d) Kendala pemenuhan formasi jabatan pengelola pengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan, dikarenakan terdapat ASN yang mengundurkan diri.

b) Solusi

(a) Melakukan optimalisasi fungsi pengelola pengadaan barang/jasa, salah satunya terkait pendampingan pengisian RUP dan pendampingan proses pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah.
(b) Melakukan koordinasi berkala dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

(LKPP), sosialisasi kepada perangkat daerah, *coaching/clearing clinic*, dan diskusi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait.

(c) Melakukan optimalisasi potensi perpindahan antar jabatan (dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional pengelolaan pengadaan) di Biro Pengadaan Barang/Jasa.

(d) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yang membidangi urusan kepegawaian untuk dapat mendukung keterisian formasi kepegawian pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Biro pengadaan Barang/Jasa melaksanakan program dan kegiatan penunjang urusan sekretariat daerah dengan alokasi anggaran Rp1.944.969.700,00 dan Kegiatan melalui dana keistimewaan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp98.890.00,00 melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 Program, 12 Kegiatan dan 22 Subkegiatan.. Keseluruhan pagu anggaran yang ada pada Biro Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2025 adalah Rp2.043.859.700,00. Secara keseluruhan belanja terealisasi sebesar Rp1.994.378.385,00 atau 97,58%, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Indikator kinerja Tercapainya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan, merupakan hasil dari pelaksanaan program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut.

a) ***Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan mengampu 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dengan subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya.

b) ***Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa***

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa, mengampu tiga kegiatan yaitu: Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.

Melalui Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebanyak 75 paket pengadaan OPD Pemda DIY yang dilimpahkan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa telah diselesaikan dengan baik melalui mekanisme tender, seleksi, maupun pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Pada tahun 2025 juga telah dilakukan sosialisasi serta pendampingan kepada OPD Pemda DIY untuk dapat melakukan melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan.

Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui pembinaan pelaku pengadaan (PA/ KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan atau Pelaku Usaha/Penyedia), serta dilakukan pemenuhan unsur kematangan level strategis pada UKPBJ.

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dilaksanakan melalui pelayanan kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Jenis layanan pada kegiatan ini antara lain pendaftaran akun pelaku pengadaan, pelayanan keluhan penggunaan sistem, tata cara penggunaan sistem, dan lain-lain.

Rincian capaian kinerja program dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.206. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	1	1
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Renstra 2022–2027	dokumen	1	1
				Tersusunnya Renja Perubahan Th 2025	dokumen	1	1
				Tersusunnya Renja Biro PBJ Th 2026	dokumen	1	1
				Tersusunnya ROPK	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya RKA Tahun 2026	dokumen	1	1
				Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2025	dokumen	1	1
				Tersusunnya DPA Tahun 2026	dokumen	1	1
				Tersusunnya RKA-P Tahun 2025	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro Pengadaan Barang/Jasa	laporan	1	1
				Tersusunnya LPPD	laporan	1	1
				Tersusunnya LKjIP	laporan	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan	bulan	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	laporan	1	1
				Tersedianya Laporan keuangan tahunan audited	laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Semester	laporan	2	2
				Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan	laporan	4	4
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	bulan	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya pelaporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	paket	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Barang certakan dan Penggandaan/Fotokopi	paket	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	laporan	4	4
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	31	31
				Penyediaan Jasa Surat menyurat			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat)	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	unit	1	1
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	8	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Unit	16	3
				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
				Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa & IKM	%	72,52	77,35
				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			
				Tersedianya laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	laporan	2	2
				Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik			
				Tersedianya laporan pengelolaan Sistem	laporan	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan Secara elektronik			
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			
				Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3

Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda DIY, 2025

h. Fasilitasi Umum dan Protokol

(1) Kondisi Umum

Pemda DIY melaksanakan fungsi fasilitasi umum dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Daerah DIY melalui Biro Umum dan Protokol. Pelaksanaan fasilitasi tersebut mencakup pemberian layanan kepada pimpinan dalam rangka penerimaan kunjungan tamu serta dukungan keprotokolan pada pelaksanaan kegiatan pimpinan, baik berupa pertemuan, rapat, maupun upacara resmi.

Sepanjang tahun 2025, Pemda DIY telah memfasilitasi berbagai kunjungan, meliputi 13 kali kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden, 466 kali kunjungan Menteri/Kementerian serta DPR RI dan DPD RI, 195 kali kunjungan Kepala Daerah, DPRD Provinsi, dan instansi daerah lainnya, 104 kali kunjungan tamu luar negeri, serta 591 kali kunjungan dari universitas, perguruan tinggi, dan tamu lainnya.

Tabel 3.207. Rata-rata Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Biro Umum dan Protokol Setda DIY tahun 2025

No	Jenis Layanan	Satuan	Indeks Kepuasan Masyarakat Th 2025
1	Layanan Keprotokolan	%	95,69
2	Layanan Kerumahtanggaan	%	94,36

Sumber: Biro Umum dan Protokol Setda DIY, 2025

Fungsi fasilitasi yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Protokol, selain kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga mencakup fasilitasi persuratan, fasilitasi keprotokolan, serta fasilitasi kerumahtanggaan. Fasilitasi persuratan dilaksanakan melalui pengelolaan administrasi surat menyurat pimpinan, baik surat masuk maupun surat keluar. Selanjutnya, fasilitasi keprotokolan meliputi penyusunan dan pelaksanaan tata acara/upacara serta pengaturan protokoler pada kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan. Adapun fasilitasi kerumahtanggaan dilaksanakan melalui penyiapan sarana dan prasarana kegiatan, termasuk penataan lokasi acara serta penyiapan dan penyajian jamuan.

Pada Tahun 2025, kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah pada Fasilitasi Umum dan Protokol menunjukkan realisasi yang melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya disajikan tabel target dan realisasi kinerja Tahun 2024 serta capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2022–2027.

Tabel 3.208. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum dan Protokol Tahun 2025 serta Capaian 2025 Terhadap RPJMD

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyelarasan 2027	Capaian s.d 2025 Thd Target RPJMD 2027 (%)
				Target*)	Reali--Sasi	% Reali-Sasi			
1.	Nilai Rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah dan nilai reformasi birokrasi	%	91,64	91,64	93,98	102,55	87,63	92,71	107,25
.									
1	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	A (88,44)	A (88,45)	A (91,88)	103,88	A	A (88,47)	104,4

**)Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Biro Umum dan Protokol Setda DIY, 2025

Berdasarkan data pada tabel, capaian pelayanan pimpinan yang diukur melalui indikator nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan, serta nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai capaian kinerja tercatat sebesar 93,98, dengan tingkat realisasi mencapai 102,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar 91,64.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, kinerja pelayanan pimpinan pada Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah DIY mengalami peningkatan sebesar 2,34 poin. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan, khususnya pada aspek keprotokolan dan kerumahtanggaan, sehingga pelayanan kepada pimpinan semakin optimal.

Selanjutnya, hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 ditetapkan dengan kategori A(91,88) dan terealisasi sesuai dengan target kategori A(88,45), yang menunjukkan kinerja perangkat daerah berada pada tingkat memuaskan dan mencapai 103,88 persen.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan kepada pimpinan dan tamu dinilai belum sepenuhnya memadai serta belum sepenuhnya menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.
(b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan keprotokolan masih belum optimal sehingga belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.

b) Solusi

(a) Melaksanakan inventarisasi secara sistematis terhadap kebutuhan penggantian, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan tamu serta pimpinan guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.
(b) Bagian Protokol telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, yang disesuaikan dengan kapasitas dan alokasi anggaran yang tersedia.

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah pada fungsi Fasilitasi Umum dan Protokol mengelola sebanyak 2 program dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp16.652.306.990,00, dengan realisasi anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp15.174.976.465,00 atau sebesar 91,13%. Sementara itu, capaian kinerja fisik terealisasi secara optimal sebesar 100%. Adapun rincian capaian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.209. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum dan Protokol Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			
			Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	**%**	100	100
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			
			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	1	1
2.	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	88,45	92,2
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13	13
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			1.Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	13
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	21	21
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara DIbayarkan Pajaknya	Unit	14	14
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	57	57
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
			1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	1
			Fasilitasi Keprotokolan			
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			
			1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	25	25
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
			1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	12
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			
			1. Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	12	12

Sumber: Biro Umum dan Protokol Setda DIY, 2025

i. Fasilitasi Pemerintahan

(1) Kondisi Umum

Salah satu sasaran Badan Penghubung Daerah (Banhubda) DIY yaitu meningkatnya kualitas layanan penghubung. Layanan Badan Penghubung Daerah DIY berupa layanan penginapan Griya Jogja dan Wisma Jogja, layanan kendaraan tamu dan pimpinan, layanan protokol pimpinan, layanan silaturahmi diaspora Yogyakarta di Jakarta, layanan pameran, layanan pawai budaya, layanan penggunaan pendopo Anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), layanan diklat seni budaya daerah, layanan pentas seni budaya daerah, dan layanan Festival Seni Budaya Daerah.

Pada Tahun 2025, Banhubda DIY bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengikuit Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran 2025 yang berlangsung selama 25 hari, mulai dari tanggal 19 Juni 2025 hingga 13 Juli 2025. Sebanyak 20 UMKM unggulan dari Yogyakarta turut serta memamerkan produk-produk khas daerah yang meliputi kerajinan bambu, kerajinan dari serat enceng gondok, batik, lurik, perak, aneka makanan olahan, hingga jamu dalam kemasan modern. Pada pameran ini, Banhubda DIY mendapatkan Penghargaan sebagai Stand Terbaik Nomor 3 Kategori Pemda/BUMN yang diselenggarakan oleh Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada *tenant* yang sudah menunjukkan karyanya melaui *booth-booth* di Jakarta Fair.

Pada hari Jumat, 10 Oktober 2025, Banhubda DIY, bekerja sama dengan FORKAPPSI dan Indonesia TIC, menghadirkan kuliner Nusantara di panggung *Colours of Culture Festival* (CoCF) 2025. Bertempat di Taman Fatahillah, Kota Tua Jakarta, Banhubda DIY membagikan 250 porsi Gudeg Jogja kepada pengunjung festival. Inisiatif ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan upaya memperkenalkan warisan kuliner Yogyakarta dalam festival budaya nasional.

Banhubda DIY kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan seni tradisional melalui penampilan Tari "*Mangarit Kendali Roto*" pada ajang CoCF 2025, menghadirkan harmoni budaya dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu panggung megah bertema "Melodi Nusantara." Kehadiran tari diklat Anjungan DIY menjadi salah satu sorotan utama festival yang memadukan unsur tradisi dan modernitas dalam bingkai ke-*bhinneka*-an.

Banhubda DIY bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Kulon Progo mengadakan Pesona Budaya Nusantara pada tanggal 13 September 2025 Pukul 19.00 WIB s/d Selesai di Anjungan DIY TMII. “Pesona Budaya Nusantara” merupakan agenda reguler tahunan. Pada tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo ini mengusung tema: “Kumandange Bumi Jawa Binangun Kertaraharja” dalam rangka memperkenalkan kekayaan budaya, produk unggulan, serta mempertegas identitas khas Kulon Progo dalam panggung kebudayaan Nusantara. Rangkaian acara berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB dengan agenda pembukaan pameran produk unggulan Kulon Progo di halaman depan Anjungan DIY.

Banhubda DIY membina kelompok diaspora Yogyakarta di Jabodetabek. Kelompok ini dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Nomor 061/2979 Tanggal 9 September 2022. Pada Tahun 2025, Banhubda DIY bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG) mengadakan Bazar Ramadhan Pameran UMKM Diaspora Yogyakarta yang berlokasi di Lantai G Poins Mall, Lebak Bulus. Pameran UMKM menghadirkan bermacam produk seperti makanan, aneka kerajinan dan aneka batik. Pameran ini berlangsung pada tanggal 7 – 23 Maret 2025.

Seluruh kegiatan Banhubda DIY Tahun 2025 dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Mitra kerja sama dalam penyelenggaraan *event* seni budaya antara lain: Forkappsi, PT. Angkasa Pura II, Pemerintah Kota Serang, Ikatan Keluarga Gunung Kidul, Badan Koordinasi Paguyuban Keluarga Kulon Progo, Paguyuban Warga Kota Yogyakarta, Paguyuban Keluarga Bantul, Warga Bantul Manunggal, Paguyuban

Sleman Manunggal Sembada, Kulon Progo di Jakarta, dan Paguyuban Warga Jogja Istimewa, Praja Jogja, Sanggar Tari Surya Kirana, serta Sanggar Karawitan Trah HB.

Tabel 3.210. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2024–2025 serta Capaian 2025

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap Akhir RPJMD (2027) (%)
			Target*)	Realisasi	% Realisasi			
Indikator kinerja tujuan								
Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain.	%	92,51	92,7	93,42	100,77	89	92,70	104,97
Indikator kinerja sasaran								
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	Angka Indeks	92,83	92,83	94,47	101,76	89	92,83	106,15
Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A (88,43)	A (88,55)	A (89,23)	100,77	A	A (90,55)	100

**)Target Penyelarasan kinerja Tahun 2025*
Sumber: Banhubda, 2026

Indikator kinerja tujuan/sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung diukur dari Jumlah seluruh IKM layanan yang diberikan dibagi jumlah jenis layanan yang diberikan. Pada tahun 2025, Banhubda DIY memperoleh 93,42 angka indeks yang melampaui target yang ditetapkan yaitu 92,7 angka indeks.

Ketercapaian indikator tersebut disebabkan adanya koordinasi dan kerjasama dengan Forkappsi, Diaspora Yogyakarta di Jakarta, dan berbagai pemangku kepentingan terkait yang semakin intens.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(a) Kualitas pengelolaan kegiatan kesenian perlu ditingkatkan agar kualitas pelaksanaan kegiatan lebih meningkat menuju Badan Penghubung Daerah DIY sebagai pusat seni budaya Yogyakarta di Jakarta.

(b) Kurang optimalnya pelayanan pimpinan karena keterbatasan personil protokol

b) Solusi

(a) Optimalisasi pengelolaan kegiatan kesenian dengan:

(i) Bekerjasama dengan kementerian yang strategis dalam pelaksanaan pentas seni bersama agar Banhubda DIY dapat dikenal lebih luas.

(ii) Bekerjasama dengan berbagai entitas penyelenggara diklat kesenian dalam penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan dan berkelanjutan.

(iii) Pembuatan *short movie* atau *mini clip* yang bersumber dari kegiatan seni yang sudah dilaksanakan dan menampilkannya di media sosial serta menggunakannya sebagai alat peraga sosialisasi kegiatan Banhubda DIY baik di TMII maupun tempat lain yang lebih luas.

(b) Mengajukan permohonan penambahan tenaga protokol melalui instansi terkait

(3) Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.618.461.827,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program, 11 kegiatan dan 26 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp10.723.427.331,00 atau 92,3%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan subkegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.211. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan / Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi
1	**KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)**	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**	**PROGRAM PENYELENG-GARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah**			
			Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**			
			Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	5	5
			Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif**			
			Subkegiatan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	unit	2	2
			Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Terlaksananya dukungan penyelenggaran Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**			
			Subkegiatan Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	laporan	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan / Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi
2	**SEKRETARIAT DAERAH**	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY**			
			Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	**Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya**			
			Subkegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	laporan	5	5
			Subkegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	laporan	2	2
3	**URUSAN UMUM**	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan**			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan / Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	40
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan / Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler**			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan / Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	25	25

Sumber: Bahubda DIY, 2025

6) Pengawasan

a. Kondisi Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat DIY. Inspektorat DIY menjadi unsur strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui penerapan sistem pengendalian intern dan pengawasan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan fungsi pengawasan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 529 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025 (PKPT 2025), yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025. Selain pengawasan umum, Inspektorat DIY juga melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu, pengawasan kinerja, serta menjalankan fungsi pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, baik pengawasan umum maupun teknis, terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam mengawal pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah, kinerja pengawasan Pemda DIY diukur melalui indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Indikator tersebut mencakup hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY. Pencapaian sasaran ini didukung melalui berbagai kegiatan pengawasan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi, serta pendampingan dan asistensi, sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun objek pemeriksaan baik di Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY

Pada Tahun 2025, BPK RI Perwakilan DIY menerbitkan 8 (delapan) laporan hasil pemeriksaan dan/atau pemantauan yang diterima oleh Pemda DIY. Adapun LHP yang terbit yaitu:

a) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pada Pemda DIY Nomor 23/LHP/XVIII.YOG/12/2024 tgl.20 Desember 2024;
b) Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2024 pada Pemda DIY di Yogyakarta Nomor 10/LHPt/XVIII.YOG/07/2024 tgl.01 Juli 2024;
c) Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2024 pada Pemda DIY di Yogyakarta Nomor 24/LHPt/XVIII.YOG/12/2024 tgl.31 Desember 2024;

d) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBS Tahun Anggaran 2024 Pada Pemda DIY di Yogyakarta Nomor 1/LHP/XVIII.YOG/03/2025 tgl.21 Maret 2025;
e) Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2024 pada Pemda DIY di Yogyakarta berdasar lampiran Surat Kepala BPK Perwakilan DIY Nomor 45/S/XVIII.YOG/3/2025 tgl.21 Maret 2025;
f) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2024 di Yogyakarta Nomor 7A-B/LHP/XVIII.YOG/04/2024 tgl.14 April 2025;
g) Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2025 pada Pemda DIY di Yogyakarta Nomor 13/LHPt/XVIII.YOG/07/2025 tgl.14 Juli 2025;
h) Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2025 pada Pemda DIY di Yogyakarta berdasar lampiran Surat Kepala BPK Perwakilan DIY Nomor 185/S/XVIII.YOG/9/2025 tgl.30 September 2025;

Atas hasil pemeriksaan yang telah diterima di Tahun 2025 tersebut, Pemda DIY telah menindaklanjuti secara keseluruhan rekomendasi yang diberikan dengan hasil rekap tindak lanjut dari Inspektorat yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.212. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2025 pada Pemda DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	69		
Temuan	659	94.823.611.631	

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
Rekomendasi	1344	83.795.478.719	
Tindak Lanjut			
Sesuai	1.245	75.599.301.889	92,64%
Belum Sesuai	98	8.108.242.467	7,29%
Belum Tindak Lanjut	0	0	0,00%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	1	87.934.363	0,07%

Sumber: Inspektorat DIY, 2025 (data diolah)

Sampai dengan 31 Desember 2025 belum ada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2025 yang diterbitkan BPK RI. Risalah terakhir yang diterbitkan BPK RI adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025, sehingga masih belum ada data capaian terbaru di 2025 berdasar BPK RI.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut (SIPTL) yang digunakan BPK belum dapat mengakomodasi penambahan bukti tindak lanjut sebelum bukti tindak lanjut yang dikirim sebelumnya selesai di BPK Pusat dan mendapatkan status; 2) Jadwal Koordinasi Tindak Lanjut yang diberikan BPK masih terbatas setahun 2 kali; 3) Temuan dan rekomendasi yang berupa kebijakan/ peraturan membutuhkan waktu penyusunan dan melibatkan pihak eksternal sehingga tindak lanjut harus menunggu hasil kebijakan/peraturan tersebut; 4) Terdapat Rekomendasi berupa penyelesaian kerugian oleh penyedia barang/jasa dan/atau non ASN di mana belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur terkait dengan mekanisme tuntutan ganti ruginya.

(2) Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri)

Pada Tahun 2025, Itjen Kemendagri menerbitkan 2 laporan hasil pemeriksaan yang diterima oleh Pemda DIY. Adapun LHP yang terbit yaitu:

a) Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2025 Nomor 700.1.2.1/243/IJ tertanggal 2 Oktober 2025;
b) Laporan Pengawasan Tematik Pelayanan Publik pada Pemerintahan Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 700.1.2.1/55/IJ tertanggal 10 Februari 2025.

di Tahun 2025, Itjen Kemendagri juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2024 Nomor 700.1.2.1/277/IJ tertanggal 20 September 2024 dan Laporan Pengawasan Tematik Pelayanan Publik pada Pemerintahan Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 700.1.2.1/55/IJ tertanggal 10 Februari 2025.

Untuk tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri di Tahun Anggaran 2024 dan sebelumnya Pemda DIY telah selesai menindaklanjuti rekomendasi (100%) sedangkan untuk Laporan Pengawasan Tematik Pelayanan Publik pada Pemerintahan Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 700.1.2.1/55/IJ tertanggal 10 Februari 2025 tidak terdapat rekomendasi untuk Pemda DIY (Provinsi).

Sehingga untuk Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Itjen Kemendagri 2025 ditampilkan dalam rincian penyelesaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.213. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Itjen kemendagri Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2025 pada Pemda DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
Temuan	9	0	
Rekomendasi	25	0	
Tindak Lanjut			
Sesuai	25	0	100%
Belum Sesuai	0	0	0%
Belum Tindak Lanjut	0	0	0%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	0	0	0%

Sumber: Inspektorat DIY, 2025 (data diolah)

Secara teknis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri di tahun 2025 tidak mengalami kendala. Untuk tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700.1.2.1/243/IJ tertanggal 2 Oktober 2025 dan diterima Pemda DIY tanggal 25 November 2025 terdapat 3 temuan, 13 rekomendasi oleh perangkat daerah masih dalam proses penyelesaian 60 hari tindak lanjut setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Penyampaian dokumen tindak lanjut kepada Itjen Kemendagri bisa dilakukan setiap saat melalui aplikasi SIWASIAT.

(3) Pemeriksaan Inspektorat DIY

Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler (operasional, mandatori dan kinerja) sebanyak 162 laporan. Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada objek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD, UPTD, SMAN/SMKN, Inspektorat Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Sementara pada Pemda Kabupaten/Kota se-DIY dilaksanakan Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai Bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota.

Adapun rincian hasil pemeriksaan reguler dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

Tabel 3.214. Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	162		
Temuan	331	887.510.895	
Rekomendasi	757	878.272.895	
Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan			
Sesuai	697	853.350.356	92,08%
Dalam Proses Tindak Lanjut	6	24.922.539	0,79%
Belum Tindak Lanjut	54	-	7,13%

Sumber: simhp.jogjaprov.go.id, 2025 (data diolah)

Selain pemeriksaan reguler, pada tahun 2025 Inspektorat DIY telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya dengan 308 SPT dan 535 Laporan Hasil Pengawasan, meliputi: 1) Evaluasi AKIP SKPD, 2) Reviu KUA PPAS & Perubahan KUA PPAS, 3) Pendampingan Manajemen Risiko dan/atau SPIP Terintegrasi, 4) Pemeriksaan *Cash Opname Stock Opname*, 5) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, 6) Reviu RKA & Perubahan RKA, 7) Reviu DAK, 8) Reviu DAU, 9) Pemeriksaan PKKN, 10) Monitoring BKK Lumbung Mataraman, 11) Reviu HPS, 12) Pengawasan Dana Keistimewaan dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, sampai pelaporan, 13) Pengawasan Pengadaan seleksi ASN dan Belanja Pegawai PPPK, 14) Reviu LK Pemda, 15) Pengawasan atas Tindak Lanjut Dumas, Pendalaman Temuan/Dugaan dan Tindak Lanjut Rekomendasi, 16) Reviu LPPD Pemda, 17) EPPD/EKPPD Kabupaten/Kota, 18) Pengawasan Ombudsman, 19) Probity Audit, 20) Audit SPBE, 21) Reviu RKPD, 22) Reviu Kecukupan Anggaran & SDM, 23) Pengawasan BOS/BOSP, 24) Monev Efisien APBD, 25) Reviu SHBJ, 26) Reviu Pengadaan Barang, 27) Reviu Makan Minum,

28) Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta 29) Reviu Perubahan KUA PPAS Pemda.

Hasil perhitungan sub indikator di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel 3.215. Pengukuran Capaian Sasaran

Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Capaian %	Persentase Capaian
Rekomendasi BPK RI: 1344	= 1245	92,52	100,57
Rekomendasi Itjen Kemendagri: 25	= 25		
Rekomendasi Inspektorat DIY: 757	= 697		

Sumber: Inspektorat DIY, 2025 (data diolah)

Kinerja Tujuan dan Sasaran Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.216. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Target Penyelarasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target *)	Realisasi	% Realisasi*			
Indikator Kinerja Tujuan								
Indeks integritas Nasional (Pemerintah Provinsi DIY)	Indeks	74,60	74,60-81,37	79,41	100	74	75,44-83,04	107,31
Indikator Kinerja Sasaran								
1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	91,69	92	92,52	100,57	93	93	99,48
2. Nilai Kapabilitas APIP	Skor	Level 3 (3,47)	Level 3 (3,48)	Level 3 (3,47)	99,71	Level 3	Level 3 (3,68)	100
3. Kategori RB Perangkat Daerah (Kategori)	Kategori	AA (96,24)	A (96,24)	A (98.17)	102,01	A	A (96,34)	100

**) Target Penyelarasan Kinerja Tahun 2025*
Sumber: Inspektorat DIY, 2025

Pada Tujuan Kinerja “Tercapainya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah” dengan indikator “Indeks Integritas Nasional Pemerintah Provinsi DIY” pada tahun 2025 tercapai sebesar 79,41 dengan persentase realisasi sebesar 100%. Selanjutnya capaian target indikator tahun 2025 terhadap target tahun 2027 berdasarkan RPJMD yaitu sebesar 107,31%.

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 3 sasaran strategis yakni Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal, Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi *quality assurance* dan *consulting*, Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

Pada Sasaran Kinerja “Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal” dengan indikator “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan” pada tahun 2025 tercapai sebesar 92,52% dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 100,57%. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 91,69% terdapat kenaikan sebesar 0,83%. Selanjutnya capaian target indikator tahun 2025 terhadap target tahun 2027 berdasarkan RPJMD yaitu sebesar 99,48%.

Keberhasilan kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal” ini didukung oleh kegiatan pengawasan berkala yang mencakup pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan umum serta monitoring tindak lanjut pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke objek pemeriksaan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di OPD/unit kerja yang diperiksa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Tindak lanjut dan status atas setiap

rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan intern/ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat DIY.

Pada sasaran "Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi *quality assurance* dan *consulting*" dengan indikator "Nilai Kapabilitas APIP" masih berdasar data penilaian 2024 tercapai nilai sebesar 3,47 dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 99.71%. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Inspektorat DIY oleh BPKP Nomor PE.09.03./LHP-226/PW12/6/2024. Rincian skor yaitu :

a) Peran dan Layanan APIP , dengan skor 1,400;
b) Pengelolaan SDM, dengan skor 0,630;
c) Praktik Profesional, dengan skor 0,540;
d) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dengan skor 0,240;
e) Budaya dan Hubungan Organisasi , dengan skor 0,220;
f) Struktur Tata Kelola, dengan skor 0,440

Pada capaian sasaran ini, pendampingan dan asistensi dilakukan dalam segala aspek pelaksanaan ketugasan di OPD Pemda DIY sebagai salah satu bentuk hubungan kemitraan antara auditor dengan *auditee*. Dengan menginformasikan hasil pengawasan dan kebijakan pengawasan diharapkan agar pihak- pihak terkait menyadari pentingnya fungsi pengawasan guna terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja lain dalam melakukan kegiatan pengawasan sehingga Inspektorat DIY dapat mencapai sasaran Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting.

Selain fungsi *quality assurance* yang diwujudkan dalam audit, evaluasi, reviu maupun monev, ketercapaian kinerja didukung oleh berjalannya fungsi *consulting* dan peran Inspektorat DIY sebagai mitra bagi Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya dengan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui diskusi dan *sharing* dengan semangat pendampingan kepada OPD untuk mengawal tujuan pembangunan Pemda DIY; komitmen dan integritas personil Inspektorat DIY untuk mau dan mampu meningkatkan kinerja dan kemampuan sesuai dengan regulasi terkini; serta koordinasi intensif dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal Pemda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan pencapaian tujuan kinerja Inspektorat maupun Pemda DIY.

Pada sasaran kinerja "Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah" dengan indikator kinerja sasaran Kategori RB Perangkat Daerah, Inspektorat DIY memperoleh nilai 98,17 dengan kategori A. Dengan demikian maka persentase 102,01 % (terlampaui). Keberhasilan kinerja tersebut terdapat dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Transisi Pemerintahan memerlukan penyesuaian arah kebijakan sesuai dengan fokus pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga memerlukan penyesuaian arah kebijakan pengawasan untuk dapat mengawal kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan;

b) Struktur Inspektur Pembantu Khusus yang diharapkan dapat memperkuat APIP dalam ketugasan pengawasan investigasi dan ketugasan *Mandatory* dari Kementerian/Lembaga belum dapat direalisasikan karena membawa konsekuensi pada kebutuhan penambahan SDM yang tidak dapat serta merta dipenuhi.
c) APIP di daerah belum dapat memperoleh kebijakan pengawasan secara utuh dan tepat waktu dari Kementerian/Lembaga yang terkait, sehingga menyebabkan program kerja pengawasan APIP di daerah terbit lebih dulu dan berakibat belum dapat sepenuhnya selaras dengan rencana pembinaan dan pengawasan dari Kementerian/ lembaga;

(2) Solusi

a) Komunikasi lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan baik itu yang mengampu perencanaan pembangunan penganggaran, sampai dengan pengawasan untuk mengetahui arah kebijakan pengawasan yang diperlukan;
b) Menyesuaikan regulasi yang terkait tugas dan fungsi Inspektorat agar dapat tetap mengakomodasi ketugasan ketugasan investigasi dan ketugasan mandatory lainnya serta meningkatkan kapasitas SDM APIP untuk dapat menangani ketugasan investigasi dan ketugasan mandatory lainnya tersebut agar tetap dapat dilaksanakan dengan baik, serta melakukan kajian terkait pembentukan Inspektorat pembantu khusus berdasarkan kondisi yang ada;
c) Berpartisipasi dalam berbagai rapat koordinasi yang diselenggarakan APIP K/L pusat serta mendorong Kementerian dalam Negeri untuk dapat melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern K/L

terkait rencana pembinaan dan pengawasan yang telah disusun untuk meminimalkan pemeriksaan bertumpuk pada obyek pemeriksaan yang sama untuk hal yang sama.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2024

Anggaran Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2025 sebesar Rp28.143.885.298,00 yang terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 41 subkegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp26.273.427.909,00 atau 93,35%, serta realisasi fisik sebesar 100% sesuai target.

Tabel 3.217. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	1. Pengiriman Personil untuk mengikuti diklat, PPM, Studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik; 2. Meningkatkan ketersediaan sarpras pendukung operasional pengawasan; 3. Meningkatkan kualitas system informasi dan pemanfaatan TIK	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	%	87	92,33
				Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
				Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD Tahun 2026	Dokumen	2	2
				Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Perubahan DPA SKPD Tahun 2025	Dokumen	2	2
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	106	107
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	223	223
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (5 paket tempat sampah, 1 paket sabun cair, 2 paket tissue, 2 paket hand sanitizer, 1 paket keset, 1 paket wastafel)	Paket	2	2
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	43	43

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	86	86
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
				Persentase Pengawasan yang sesuai PKPT Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana	%	100	106,34
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	16
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
				Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	137	137
				Jumlah Laporan cash opname dan stock opname OPD	Laporan	37	37
				Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemda dengan resiko tinggi	Laporan	16	16
				Reviu Laporan Kinerja			
				Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Laporan	112	112
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja OPD	Laporan	37	37
				Jumlah laporan Pendampingan penyusunan manajemen resiko OPD	Laporan	37	37
				Jumlah laporan Reviu dokumen perencanaan Pemda	Laporan	1	1
				Jumlah laporan Reviu RKA OPD sebelum penetapan APBD	Laporan	37	37
				Reviu Laporan Keuangan			
				Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	Laporan	38	38
				Jumlah Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan	37	37
				Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY	Laporan	1	1
				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	21	21
				Jumlah Laporan EKPPD Kabupaten/Kota	Laporan	5	5
				Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota	Laporan	16	16
			Melaksanakan pendampingan manajemen risiko; Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit	**Kerjasama Pengawasan Internal**			
				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	1
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			kerja dalam melakukan pengawasan ;	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	2
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	112	112
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
				Persentase Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi, Whistle Blowing System dan Benturan Kepentingan	%	100	100
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitiasi Pengawasan			
				Perumusan Keijakan Teknis di Bidang Pengawasan			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	37	37
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	37	37
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	4
				Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah laporan Rencana aksi pemberantasan korupsi	Laporan	1	1
				Jumlah laporan Tindaklanjut kerjasama APIP dan APH	Laporan	1	1
				Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi saberpungli	Laporan	2	2
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	37	37

Sumber: inspektorat DIY, 2025

7) Penelitian dan Pengembangan

a. Kondisi Umum

Sejak dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, fungsi kelitbangan di Indonesia tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh berbagai K/L namun dilaksanakan terpusat di bawah naungan BRIN. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan fungsi dan manfaat hasil-hasil kelitbangan. Pembentukan BRIN kemudian ditindaklanjuti dengan amanat pembentukan lembaga sejenis di daerah yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDa). Dalam hal ini, BRIDa diharapkan dapat menjadi koordinator penyelenggaraan kegiatan kelitbangan di daerah guna menjawab berbagai permasalahan di daerah melalui kegiatan-kegiatan kelitbangan. Pada tahun 2024 melalui Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Bapperida merupakan nomenklatur badan hasil dari integrasi BRIDa ke Bappeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan baik di Pusat maupun daerah semakin membuka peluang besar bagi para peneliti untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang dijalankan yang hasilnya dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dukungan entitas peneliti di DIY sangat beragam, yang terdiri dari ASN Jabatan Fungsional Peneliti, Dunia Akademisi,

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian. Keberagaman entitas peneliti yang ada di DIY memerlukan koordinasi yang baik dan terus menerus. Dengan koordinasi yang baik diharapkan terwujud sinergitas entitas peneliti di DIY dan akan menghasilkan produk penelitian yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna.

Bapperida DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik. Dalam Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan beberapa ketugasan antara lain: penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan, serta inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan di DIY. Ketugasan tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data serta analisis dalam perencanaan pembangunan daerah. Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 direpresentasikan dengan Program Penelitian dan Pengembangan dengan indikator program “Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah”.

Tabel 3.218. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 serta Capaian 2025

Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2025 terhadap Akhir RPJMD (2027) (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	%	81,37	75	81,02	115,74	85	95,32

Sumber: Bapperida DIY, 2025

Indikator Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung Pembangunan daerah dihitung berdasarkan meta indikator yang telah ditetapkan, yaitu jumlah hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan Pembangunan daerah dibagi jumlah hasil kelitbangan yang terseleksi dikalikan 100%. Secara spesifik, yang dimaksud hasil kelitbangan disini adalah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh setiap kegiatan kelitbangan untuk menyelesaikan tantangan permasalahan pemerintah daerah. Selain melaksanakan penelitian secara mandiri, juga dilaksanakan penjaringan sejumlah kajian/penelitian yang mencakup berbagai sektor dan dilakukan oleh berbagai entitas penelitian dan pengembangan di DIY. Dari berbagai hasil penelitian yang dikumpulkan tersebut telah diperoleh rekomendasi-rekomendasi dari beberapa penelitian yang kontekstual dengan isu-isu pembangunan dan dapat dijadikan bahan rumusan perencanaan pembangunan di DIY. Pada tahun 2025 terdapat 333 rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 411 rekomendasi yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan. Capaian lain ialah tersedianya 49 inovasi dari 80 inovasi terkumpul yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional.

Sebagai upaya agar hasil kelitbangan selaras dengan dokumen perencanaan, maka penyusunan rencana kegiatan kelitbangan perlu memedomani Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang telah disusun. Pemda DIY juga telah menyusun RIK DIY 2022–2027 sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan kelitbangan oleh seluruh perangkat daerah. Selain itu perlu dilakukan koordinasi terus-menerus dengan para pemangku kepentingan sejak dari penyusunan perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Jumlah dan bidang kepakaran SDM fungsional peneliti di Pemda DIY masih sangat terbatas untuk dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan;
b) Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan sektoral belum sepenuhnya mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan, sehingga belum semua hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi perencanaan pembangunan daerah;
c) Hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan belum dapat ditindaklanjuti sepenuhnya sebagai bahan rumusan kebijakan, baik terkait dengan kebijakan pemerintah maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d) Koordinasi antar entitas penelitian dan pengembangan belum berjalan optimal.

(2) Solusi

a) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lebih banyak entitas penelitian dan pengembangan di DIY melalui jejaring penelitian dan pengembangan untuk bersinergi dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di DIY;
b) Mengoptimalkan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;

c) Menggunakan dokumen inventarisasi dan rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan pendukung perumusan kebijakan;
d) Mengintensifkan koordinasi antar entitas penelitian dan pengembangan melalui rapat-rapat koordinasi dan kunjungan lapangan.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Alokasi anggaran sebesar Rp202.462.900,00 pada tahun 2025 pada Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pembangunan Daerah dengan Program Penelitian dan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 97%.

Tabel 3.219. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	Persen	75	81,02
			Presentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional	Persen	60	61,25
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Bidang Sosial dan Kependudukan			
			Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	dokumen	1	1
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
			Terlaksananya Pengembangan Inovasi Teknologi	%	100	100
			Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	5	5
			Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2024	dokumen	1	1
			Rekomendasi Hasil Penelitian Tahun 2024	dokumen	1	1
			Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan 2024	dokumen	1	1
			Publikasi Prosiding Ilmiah	dokumen	1	1
			Fasilitasi Pengukuran IPKD dan IGA	dokumen	1	1

Sumber: BPPSD DIY, 2025

8) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

a. Kondisi Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY. DPRD DIY memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam kerangka keistimewaan Yogyakarta.

Secara kelembagaan DPRD DIY menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan secara sinergis bersama dengan Pemda DIY untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, visi pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPRD DIY didukung oleh Sekretariat DPRD DIY sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY. Adapun kedudukan Sekretariat DPRD DIY diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 sebagai berikut:

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD DIY antara lain:

(1) Terfasilitasinya kinerja DPRD;
(2) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY.

Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja DPRD DIY agar pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY mengacu pada dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun yang menjabarkan tentang isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua bagi Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan anggaran tahun jamak berupa Pembangunan Gedung DPRD DIY yang ditargertkan akan selesai pada tahun 2026. Pembangunan Gedung DPRD DIY bertujuan menyediakan sarana kerja yang representatif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta menyediakan ruang pelayanan publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat, ramah gender serta inklusif agar semua pihak dapat memperoleh pelayanan dan berpartisipasi secara setara. Sebagaimana prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang mewajibkan seluruh pembangunan fisik agar memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui, dan kelompok rentan.

Tabel 3.220. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Sekretaris DPRD Tahun 2024–2025 serta Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD DIY 2022–2027

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satu-an	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2022–2027	Target Penyela-rasan 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Tar-get *)	Reali-sasi	% Reali-sasi			
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	111,82	93	93,99	101,05	86	95	109,29
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	121,52	97	102,06	105,22	97	98	105,22
2	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Kategori (Nilai)	A (88,76)	A (88,76)	A (89,74)	101,10	A	A (89,50)	100,27

**) Target penyelarasan kinerja Tahun 2025*
Sumber: Sekretariat DPRD DIY, 2025

Pada tahun 2025 untuk sasaran pertama dengan indikator Kinerja Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 105,22%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian lebih kecil dari realisasi tahun 2024 yang mana terjadi akibat adanya penyelarasan perubahan targer kinerja OPD oleh Pemda.

Realisasi sasaran kedua dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY yang merupakan hasil penilaian tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah DIY yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025 diperolehan nilai sebesar 89,74 atau dengan Kategori A. Hasil ini menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 88,76 dapat tercapai yang mana secara prosentase mencapai 101,10%.

Keberhasilan pencapaian target pada kategori Reformasi Birokrasi didukung dengan telah dibentuknya tim agen perubahan Sekretariat DPRD DIY sebagai tindak lanjut atas adanyak Keputusan Gubernur DIY Nomor 146/KEP/2023 tentang Agen Perubahan Pemda DIY.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

a) Pelaksanaan Pengadaan Gedung Kantor DPRD DIY pada tahun kedua baru mencapai target fisik 48,81% dari target fisik 55% (target sesuai kontrak fisik tahun jamak) atau baru tercapai 88,75% untuk target 2025. Karena pencapaian target fisik 55% menjadi persyaratan pembayaran termin II maka hal ini menyebabkan belum bisa dilaksanakannya pembayaran termin II pada tahun 2025, selain itu juga belum diatur dalam sistem dan prosedur terkait batas waktu setiap tahun anggaran untuk kontrak tahun jamak.
b) Adapun terkait pelaksanaan Medical Check Up DPRD, ada sepuluh (10) Anggota DPRD yang tidak berkenan melaksanakan *Medical Check Up*.

(2) Solusi

a) Akan dilakukan perubahan MoU Tahun Jamak Pembangunan Gedung DPRD DIY antara Gubernur DIY dan DPRD DIY pada tahap pembahasan Perubahan KUP dan PPAS APBD DIY Tahun Anggaran 2026.
b) Terkait dengan pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD akan dilakukan peningkatan komunikasi secara aktif baik kepada Pimpinan dan Anggota DPRD maupun pihak Rumah Sakit terkait.

c. Capaian Program dan Subkegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD DIY melaksanakan 2 Program dan 17 kegiatan yang terinci ke dalam 55 subkegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp329.345.097.773,00 dan terealisasi sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp228.481.153.926,00 atau 69,37%.

Perbandingan target anggaran dengan realisasi anggaran tahun 2025 terdapat deviasi sebesar 30,63%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa factor sebagai berikut:

(1) Efisiensi dari belanja bahan pakai habis yang berasal dari penggunaan market place seperti mbiz market.
(2) Kebijakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk gaji ke-13 sebesar 80%.
(3) Pelaksanaan uji kompetensi secara daring oleh beberapa ASN sehingga terdapat efisiensi belanja perjalan dinas.
(4) Pembayaran termin II tahun jamak Pembangunan Gedung DPRD belum bisa dilakukan karena target fisik belum mencapai 55% sebagaimana syarat dalam kontrak.
(5) Efisiensi belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, bahan bakar minyak, pemeliharaan kendaraan dinas dan jabatan, pemeliharaan peralatan kantor dan alat berat menyesuaikan kebutuhan.
(6) Efisiensi belanja hidangan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang menyesuaikan agenda DPRD serta tamu DPRD menyesuaikan jumlah tamu yang dating.
(7) Efisiensi belanja perjalanan dinas dari sisa adcost komponen tiket dan hotel serta perubahan tujuan lokasi kunjungan kerja Panitia Khusus dan kunjungan kerja Komisional ke daerah dengan standar harga satuan yang lebih rendah.

(8) Efisiensi belanja honorarium narasumber pembahas yang berasal dari ASN Pemda DIY atau Kabupaten/Kota di DIY.

Berikut disampaikan rincian capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah.

Tabel 3.221. Capaian Kinerja Program dan Subkegiatan Urusan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
1.1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
1.1.2	Review Renstra 2022 - 2027	Dokumen	1	1
1.1.3	Renja Murni 2026	Dokumen	1	1
1.1.4	Renja Perubahan 2025	Dokumen	1	1
1.1.5	Perjanjian Kinerja 2025	Dokumen	1	1
1.1.6	ROPK 2025	Dokumen	1	1
1.2	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**			
1.2.1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	4	4
1.2.2	RKA 2026	Dokumen	1	1
1.2.3	DPA 2026	Dokumen	1	1
1.2.4	RKA Perubahan 2025	Dokumen	1	1
1.2.5	DPPA 2025	Dokumen	1	1
1.3	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
1.3.1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5
1.3.2	LKJiP	Laporan	1	1
1.3.3	LPPD	Laporan	1	1
1.3.4	LKPJ	Laporan	1	1
1.3.5	Laporan Tahunan	Laporan	1	1
1.3.6	Tindak Lanjut LHP (Inpektorat, BPK, dan Irjen)	Laporan	1	1
1.4	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			
1.4.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	80	80
1.5	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**			
1.5.1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
1.6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			
1.6.1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
1.7	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**			
1.7.1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	13

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.7.2	Laporan Bulanan (Rincian Obyek, Laporan SPJ Fungsional, LPJ, Pajak, BKU, SPP/SPM, Bukti Transfer, Daftar Gaji, Buku Bank)	Laporan	12	12
1.7.3	Laporan Semesteran	Laporan	1	1
1.8	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**			
1.8.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	14	14
1.8.2	Laporan Rekonsiliasi Aset Triwulanan	Laporan	4	4
1.8.3	Buku Inventaris	Laporan	1	1
1.8.4	Laporan Barang Pengguna Bulanan	Laporan	1	1
1.8.5	RKBMD	Laporan	1	1
1.8.6	RKBMD Perubahan	Laporan	1	1
1.8.7	Laporan Persediaan Semesteran	Laporan	2	2
1.8.8	Rekonsilitasi Persediaan	Laporan	4	4
1.9	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			
1.9.1	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	16	16
1.9.2	Laporan Bulanan	Dokumen	12	12
1.9.3	LHKASN, dan LHKPN	Dokumen	2	2
1.9.4	Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat (April dan Oktober)	Dokumen	2	2
1.10	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**			
1.10.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	51	51
1.11	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			
1.11.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
1.12	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			
1.12.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
1.12.2	Kesekretariatan	Paket	1	1
1.12.3	Penausahaan BMD	Paket	1	1
1.12.4	Penatausahaan Keuangan	Paket	1	1
1.12.5	Penyusun Program	Paket	1	1
1.13	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**			
1.13.1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5
1.13.2	Perawatan Buku/Perpustakaan	Paket	1	1
1.13.3	Bahan Pembersih	Paket	1	1
1.13.4	Pengharum Ruang Kerja	Paket	1	1
1.13.5	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Paket	1	1
1.13.6	Penghias RUang Kerja	Paket	1	1
1.14	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			
1.14.1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5
1.14.2	Kesekretariatan	Paket	1	1
1.14.3	Administrasi Persuratan DPRD DIY	Paket	1	1
1.14.4	Penatausahaan Keuangan	Paket	1	1
1.14.5	Kearsipan	Paket	1	1
1.14.6	Kepegawaian	Paket	1	1
1.15	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.15.1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24
1.15.2	Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
1.15.3	Laporan Rapat Koordinasi	Laporan	12	12
1.16	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
1.16.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	92	92
1.16.2	Baterai Recharge	Unit	7	7
1.16.3	Peralatan Studio Audio (Battery Charger TOA BC-920)	Unit	1	1
1.16.4	Peralatan Studio Audio (Central Unit With Recording TOA TS-820RC)	Unit	1	1
1.16.5	Peralatan Studio Audio (Chairman Unit TOA TS-821)	Unit	1	1
1.16.6	Peralatan Studio Audio (Delegate Unit TOA TS-822)	Unit	13	13
1.16.7	Peralatan Studio Audio (Transmitter Receiver TOA TS-905)	Unit	2	2
1.16.8	STABILIZER	Unit	1	1
1.16.9	Lensa Tamron	Unit	1	1
1.16.10	Tablet Windows	Unit	1	1
1.16.11	Pad/Tablet	Unit	55	55
1.16.12	Eksternal Hardisk	Unit	1	1
1.16.13	Hardisk NAS	Unit	1	1
1.16.14	Komputer	unit	7	7
1.17	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			
1.17.1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
1.18	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**			
1.18.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	46	46
1.18.2	Jasa Telekomunikasi (Telepon, SMS Gateway, dan Vodeo Conference)	Laporan	22	22
1.18.3	Penyediaan Jasa Air Bersih	Laporan	12	12
1.18.4	Penyediaan Jasa Penerangan Kantor	Laporan	12	12
1.19	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			
1.19.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanlor yang Disediakan	Laporan	84	84
1.19.2	Laporan Bulanan (Keamanan)	Laporan	12	12
1.19.3	Laporan Bulanan (kebersihan gedung)	Laporan	12	12
1.19.4	Laporan Bulanan (kebersihan taman)	Laporan	12	12
1.19.5	Laporan Bulanan (pengamanan objek vital)	Laporan	12	12
1.19.6	Laporan Bulanan (Pramuladi)	Laporan	12	12
1.19.7	Laporan Bulanan (Tenaga Supir)	Laporan	12	12
1.19.8	Laporan Bulanan (Kearsipan)	Laporan	12	12
1.20	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			
1.20.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
1.21	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**			
1.21.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26
1.21.2	Mobil Operasional	Unit	6	6
1.21.3	Kendaraan roda dua Caraka	Unit	2	2

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.21.4	Kendaraan roda dua Operasional	Unit	6	6
1.21.5	Kendaraan roda empat Operasional Umum Kel.II/AKD	Unit	7	7
1.21.6	Kendaraan roda empat Operasional Umum Kel.III/Setwan	Unit	5	5
1.22	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			
1.22.1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	278	278
1.22.2	Accu Genset	Unit	3	3
1.22.3	Genset	Unit	1	1
1.22.4	pompa air	Unit	6	6
1.22.5	Batery server	Unit	5	5
1.22.6	Mesin Fotocopy	Unit	2	2
1.22.7	Isi freon Ac	Unit	45	45
1.22.8	AC Cassete	Unit	11	11
1.22.9	AC sentral	Unit	9	9
1.22.10	AC Split	Unit	45	45
1.22.11	Kulkas	Unit	15	15
1.22.12	Sound System dan wireless	Unit	30	30
1.22.13	Kamera/Handycam	Unit	6	6
1.22.14	faximile	Unit	1	1
1.22.15	Komputer/Notebook/Laptop	Unit	65	65
1.22.16	Printer	Unit	25	25
1.22.17	LCD	Unit	9	9
1.23	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			
1.23.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3
1.24	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**			
1.24.1	Jumlah Anggola DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang/bulan	55	55
1.25	**Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD**			
1.25.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	330	330
1.26	**Pelaksanaan Medical Check Up DPRD**			
1.26.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	55	45
1.27	**Fasilitasi Fraksi DPRD**			
1.27.1	Jumlah Laporan Hasii Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	266	273
1.27.2	Laporan Pemandangan Umum Fraksi	Laporan	84	91
1.27.3	Laporan Pemandangan Akhir Fraksi	Laporan	84	84
1.27.4	Laporan Rekomendasi Fraksi	Laporan	98	98
1.28	**Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**			
1.28.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	40	40
1.28.2	Laporan Rapat Paripurna Istimewa	Laporan	9	9
1.28.3	Laporan Rapat Paripurna	Laporan	5	5
1.28.4	Laporan Bulanan Rapat Pimpinan/Gabungan/Konsultasi	Laporan	12	12
1.28.5	Laporan Pembinaan Mental Spiritual	Laporan	2	2
1.28.6	Laporan Bulanan Kunjungan Tamu	Laporan	12	12
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			
2.1	**Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**			
2.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	9	12

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2.1.2	Keputusan DPRD tentang Propemperda (Murni dan Perubahan)	Dokumen	2	2
2.1.3	Rekomendasi hasil pengkajian kelayakan raperda non APBD yang dibahas pansus	Dokumen	7	10
2.2	**Pembahasan Rancangan Perda**			
2.2.1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	10	10
2.3	**Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan**			
2.3.1	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	6	6
2.4	**Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik**			
2.4.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	135	160
2.4.2	draf rakepwan/raperwan/rakepim	Dokumen	130	155
2.4.3	draft raperda/raperdais/inisiatif	Dokumen	5	5
2.5	**Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah**			
2.5.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	orang	42225	42225
2.6	**Pembahasan KUA dan PPAS**			
2.6.1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	2
2.6.2	KUA	Dokumen	1	1
2.6.3	PPAS	Dokumen	1	1
2.7	**Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**			
2.7.1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	2	2
2.7.2	KUA PERUBAHAN	Dokumen	1	1
2.7.3	PPAS PERUBAHAN	Dokumen	1	1
2.8	**Pembahasan APBD**			
2.8.1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1
2.9	**Pembahasan Perubahan APBD**			
2.9.1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1	1
2.10	**Pembahasan Laporan Semester**			
2.10.1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	1
2.11	**Pembahasan Pertanggungjawaban APBD**			
2.11.1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1
2.12	**Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**			
2.12.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	6	6
2.12.2	Laporan Pengawasan Tri Wulanan	Laporan	4	4
2.12.3	Laporan Pansus LKPJ	Laporan	1	1
2.12.4	Laporan Pansus	Laporan	1	1
2.13	**Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur**			
2.13.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	6	6
2.13.2	Laporan Pengawasan Tri Wulanan	Laporan	4	4
2.13.3	Laporan Pansus	Laporan	2	2
2.14	**Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat**			
2.14.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	5	5

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2.14.2	Laporan Pengawasan Tri Wulanan	Laporan	4	4
2.14.3	Laporan Pansus	Laporan	1	1
2.15	**Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian**			
2.15.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	6	6
2.15.2	Laporan Pengawasan Tri Wulanan	Laporan	4	4
2.15.3	Laporan Pansus	Laporan	2	2
2.16	**Pendalaman Tugas DPRD**			
2.16.1	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	7	7
2.17	**Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**			
2.17.1	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	36	36
2.18	**Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi**			
2.18.1	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	7	7
2.19	**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**			
2.19.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	36	36
2.19.2	Laporan Bulanan Forum Publik	Dokumen	12	12
2.19.3	Laporan Bulanan Forum Wartawan	Dokumen	12	12
2.19.4	Laporan Bulanan Publikasi DPRD	Dokumen	12	12
2.20	**Publikasi dan Dokumentasi DPRD**			
2.20.1	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	2	2
2.20.2	Sosialisasi PerUndang-Undangan	Dokumen	1	1
2.20.3	Dokumentasi Produk Hukum	Dokumen	1	1
2.21	**Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**			
2.21.1	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1
2.22	**Pelaksanaan Reses**			
2.22.1	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3
2.23	**Pengawasan Kode Etik DPRD**			
2.23.1	Laporan Badan Kehormatan setiap masa sidang (3 masa sidang)	Laporan	3	3
2.24	**Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**			
2.24.1	Jumlah Dokumen Hasjl Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	32	32
2.24.2	Laporan Koordinasi/ Kunjungan Kerja Komisional	Dokumen	12	12
2.24.3	Laporan Kaukus Perempuan Parlemen Menghadiri Undangan	Dokumen	1	1
2.24.4	Laporan Seminar Kaukus Perempuan Parlemen	Dokumen	19	19
2.24.5	Laporan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri	Dokumen	0	0
2.25	**Penyusunan Laporan Kinerja DPRD**			
2.25.1	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1
2.26	**Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah**			
2.26.1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	14	14
2.26.2	Jadwal Bulanan Kegiatan DPRD	Dokumen	12	12
2.26.3	Keputusan Program Kerja (Murni dan Perubahan)	Dokumen	2	2
2.27	**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**			
2.27.1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	13	13
2.27.2	Kegiatan pimpinan dalam 1 tahun	Dokumen	12	12

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2.27.3	Dokumen terkait hasil survey kepuasan tamu DPRD yang terlayani	Dokumen	1	1

Sumber: Sekretariat DPRD DIY, 2025

F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pada tahun 2025, Pemda DIY menetapkan beberapa kebijakan strategis sebagai upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di DIY.

Tabel 3.222. Kebijakan Strategis Pemda DIY

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pengendalian Inflasi Daerah secara Terpadu dan Terkoordinasi dengan Melibatkan Perangkat Daerah Terkait.	Keputusan Gubernur DIY Nomor 132/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah DIY tahun 2025-2027.	Dalam rangka menciptakan strategi pencapaian laju inflasi yang sesuai dengan sasaran dan mengacu pada prinsip 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif).
2.	Pengendalian Inflasi Melalui Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H.	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor B/500/1831/BR.3 Tahun 2025 tentang Pengendalian Inflasi Melalui Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah.	Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan serta upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah.
3.	Pengendalian Inflasi Daerah pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor B/500/1039/BR.3 Tahun 2025 tentang Pengendalian Inflasi Daerah pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.	Sebagai upaya menjaga stabilitas inflasi tahun 2025 serta menjaga stabilitas harga dan pasokan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.
4.	Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2025.	Keputusan Gubernur DIY Nomor 229 Tahun 2025 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2025.	Penetapan daftar Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagai tindak lanjut atas target Rencana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2022–2027.
5.	Kebijakan Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 18/SEKDA/II/2025 tentang Penetapan Mekanisme dan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya	Penetapan mekanisme dan kriteria penilaian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas penilaian calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, sehingga pemeringkatan sebagai salah satu pertimbangan penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.
6.	Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Kalangan Pelajar	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor B/500.3.4.4/2199/BR. 3 TAHUN 2025 tentang Optimalisasi Akses Keuangan dan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) di DIY dalam Rangka Hari Indonesia Menabung 2025	Optimalisasi akses keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di kalangan pelajar dengan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
7.	Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2025-2029	Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2025-2029	Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dalam program dan kegiatan pembangunan daerah
8.	Pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram	SK Gubernur Nomor 449 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram	Untuk memastikan kepatuhan harga eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram oleh penyalur dan subpenyalur, perlu disusun pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mengenai penetapan, pembinaan dan pengawasan Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
9.	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan)	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang ESDM pada Subbidang Energi Baru Terbarukan. 4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Energi Terbarukan. 5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2050.	a. Tersedianya data pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan di DIY. b. Identifikasi regulasi maupun kebijakan terkait pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. c. Identifikasi faktor yang menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal. d. Identifikasi upaya dan strategi yang telah dilakukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. e. Merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
10.	Kajian Perlindungan Ekosistem Esensial Karst di DIY	1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst; 2. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial. 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3045 K/40/MEM/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu; 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik	a. Melakukan inventarisasi dan analisis terhadap wilayah ekosistem karst berdasarkan kriteria Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), sebagai dasar penataan fungsi ekosistem serta jasa lingkungan hidup secara terpadu; b. Menetapkan Batas Delineasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst berdasarkan fungsi ekologis dan jasa lingkungan hidup; dan c. Menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan ekosistem esensial karst di DIY, yang mencakup pengelolaan dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Indonesia Nomor 1456/20/MEM/2000 tentang Pengelolaan Kawasan Karst; 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1659/40/MEM/2004 tentang Keberadaan dan Sebaran Karst di Kawasan Gunung Sewu;	pemanfaatan jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan berbasis risiko bencana
11.	Penguatan Pilar Edukasi Geopark, Penguatan Pilar Konservasi Geopark, Penguatan Pilar Pengembangan Perekonomian Masyarakat Geopark, dan Penguatan Pilar Sarana Pelaksanaan Geopark.	1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) 3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi 4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi. 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tujuan Utama Kebijakan Strategis ini adalah: Mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan (Konservasi), pencerdasan bangsa (Edukasi), dan kesejahteraan rakyat (Ekonomi) yang didukung oleh manajemen yang profesional (Sarana Pelaksanaan), sejalan dengan visi DIY dalam pelestarian warisan budaya dan alam. 1. Pilar Konservasi Geopark Tujuan Utama: Melindungi dan Melestarikan Warisan Bumi, yang dilakukan dengan cara : a. Melestarikan Keragaman Geologi: Menjaga keutuhan warisan geologi (geoheritage), keragaman hayati (biodiversity), dan warisan budaya (cultural heritage) dari kerusakan. b. Keberlanjutan Ekosistem: Memastikan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan Geopark tidak mengganggu keseimbangan alam dan fungsi ekologis. c. Pemulihan: Melakukan upaya rehabilitasi pada situs-situs yang mengalami degradasi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			agar nilai ilmiah dan estetikasnya tetap terjaga. 2. Pilar Edukasi Geopark Tujuan Utama: Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat, yang dilakukan dengan : a. Transformasi Ilmu Pengetahuan: Menyebarluaskan pengetahuan geologi dan lingkungan kepada masyarakat luas serta institusi pendidikan. b. Penelitian Berkelanjutan: Menjadikan kawasan Geopark sebagai laboratorium alam untuk penelitian ilmiah nasional maupun internasional. c. Kesadaran Lingkungan: Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat (lokal maupun wisatawan) terhadap kelestarian bumi. 3. Pilar Pengembangan Perekonomian Masyarakat Tujuan Utama: Meningkatkan Kesejahteraan melalui Ekonomi Berkelanjutan, yang dilakukan dengan : a. Pemberdayaan Lokal: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan jasa wisata (Geowisata) dan produk turunan (Geoproduk). b. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha yang berbasis pada potensi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			lokal tanpa merusak lingkungan. c. Peningkatan Nilai Tambah: Memaksimalkan potensi produk ekonomi kreatif lokal sehingga memiliki daya saing global. 4. Pilar Sarana Pelaksanaan Geopark (Tata Kelola) Tujuan Utama: Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan. a. Sinergi Kelembagaan: Menguatkan koordinasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha (konsep pentahelix). b. Penyediaan Infrastruktur: Membangun sarana dan prasarana yang mendukung fungsi konservasi dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. c. Standardisasi Layanan: Menjamin pelayanan yang bermutu bagi pengunjung serta memastikan efektivitas pemantauan dan evaluasi pengelolaan Geopark.
12.	Kajian Monev Kebijakan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di DIY	1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat; 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Reklamasi Tahap Operasi Produksi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertambangan di DIY; b. Melakukan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) di bidang pertambangan berdasarkan nilai manfaat dari hasil pengusahaan pertambangan dengan peningkatan nilai tambah daerah di DIY; dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan; 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; 4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023–2043; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Pemanfaataan Tanah Kalurahan;	c. Melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan pertambangan berdasarkan asas manfaat, keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan serta berbasis risiko bencana di DIY.
13.	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yaitu berupa Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/00.3.1/199 SET tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025	a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, beserta turunannya. b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pasa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa salah satunya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Tercapainya indeks tata Kelola pengadaan barang/jasa minimal baik.
14.	Penyusunan Perdais DIY tentang Kelembagaan Pemda DIY	Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemda DIY	Perubahan Ruang lingkup yang diatur dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2024, yaitu : a. Kelembagaan Pemerintah Daerah; b. Penugasan urusan Keistimewaan;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			c. Nomenklatur lokal; d. Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah; dan e. Hubungan kerja urusan Keistimewaan.
15.	Penyusunan Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais DIY No 1 Tahun 2024	a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024	Perubahan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut : a. Tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022–2027, untuk mengawal Misi 1 dalam Peraturan Daerah tersebut yang menyebutkan ”Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan”, sehingga perlu didukung Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengawal keberhasilan dan ketercapaian misi tersebut. b. Secara umum, terdapat penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah dan UPT c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata	Sesuai amanat Perpres No 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Permendagri No 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Berdasarkan regulasi Pusat, bahwa Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan urusan pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan pelaksana urusan pemerintahan seharusnya diwadahi dalam dinas daerah. e. Biro Pengadaan Barang/Jasa : 1) Bahwa rekomendasi MCP KPK mulai Tahun 2024 semua pengadaan barang dan jasa dipusatkan pada unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dalam hal ini berbentuk Biro. 2) Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018, bahwa Biro Pengadaan Barang/Jasa mengampu Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Energi Sumber Daya mineral r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas *Kebudayaan (Kundha Kabudayan)* u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset	f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY : 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi BPBD disesuaikan. 2) Sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB), menambahkan tugas dan fungsi pada Bidang Penanganan Darurat terkait fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan. g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY : 1) Sesuai amanat PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76. 2) Dalam P. 01/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP, RKTP disusun oleh instansi provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sehingga ditambahkan tugas dan fungsi baru terkait Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi. 3) Dalam rangka pengendalian pemegang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			izin PBPHH Dinas LHK provinsi harus melakukan penggunaan berkala sesuai dengan Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sehingga ditambahkan tugas dan fungsi baru terkait enyelenggaraan Fasilitasi pembinaan dan pengawasan PBPHH. h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY : Sesuai SKB Menteri Desa dan Menteri PPPA No. 329 dan 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, perlu ditambahkan tugas dan fungsi terkait fasilitasi desa/kalurahan/ kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. i. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY : Sesuai Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu penyesuaian tugas dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			fungsi pada Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
		Tindak lanjut Pada Tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut: a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.	1. Penugasan urusan keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan: a. urusan kelembagaan pemerintah daerah; b. urusan kebudayaan; c. urusan pertanahan; dan d. urusan tata ruang. 2. Nomenklatur lokal dan penyelarasan tugas fungsi urusan keistimewaan 3. Pengaturan kelembagaan pada Kapanewon/ Kemantren dan Pemerintah Kalurahan
		b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Perubahan Nomenklatur UPT (Rekomendasi Surat Kemendagri No 100.2.2.6/5720/OTDA tgl 21 Oktober 2025) : a. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menjadi menjadi Balai Pemberdayaan Pertanian dan Agribisnis b. Balai Proteksi Tanaman Pertanian menjadi Balai

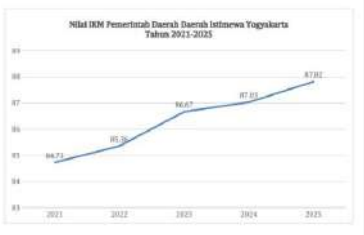
No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Perlindungan Tanaman Pertanian 2. Perubahan Struktur 2 seksi menjadi 1 seksi pada Balai Pemberdayaan Pertanian dan Agribisnis dan Balai Perlindungan Tanaman Pertanian

--

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
REKOMENDASI UMUM				
1.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi yang tinggi terhadap capaian predikat Wajar Tanpa Pengacualian untuk yang kelima belas kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Prestasi ini tentu merupakan buah kerja keras dari Gubernur dan seluruh jajaran Eksekutif dalam mengelola keuangan (APBD) DIY khususnya tahun 2024.	a. Menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas adanya ketidaksesuaian penyaluran hibah dan dana bergulir, serta penggunaan dana bergulir untuk operasional BUKP, maka DPRD DIY mendorong Gubernur untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengambil kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Pemetaan potensi pelanggaran Perda/Perkada dan kemampuan untuk antisipasi, membuat program strategis penanganannya secara terukur dan berkesinambungan Membuat data base Potensi masyarakat dalam penegakan Perda/Perkada dan data base pelaku pelanggaran Perda/Perkada. Program Perventif melalui gerakan budaya tertib di masyarakat yang melibatkan Pemkot/Pemkab setempat	a. Terkait temuan ketidaksesuaian penyaluran dana bergulir, hal tersebut merupakan langkah mitigasi risiko darurat untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah gejolak sosial (rush) akibat tuntutan penarikan simpanan yang tinggi. Saat ini, Pemerintah Daerah sedang melaksanakan evaluasi terhadap keberlangsungan BUKP. b. Menyusun peta risiko pelanggaran Perda/Perkada secara komprehensif berbasis wilayah dan jenis pelanggaran sebagai dasar penyusunan program strategis yang terukur, terarah, dan berkesinambungan. c. Membangun dan mengembangkan database terintegrasi mengenai: • Potensi partisipasi masyarakat dalam penegakan Perda/Perkada; • Data pelaku pelanggaran dan pola pelanggaran; • Evaluasi efektivitas penindakan dan pembinaan. d. Memperkuat program preventif melalui Gerakan Budaya Tertib, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal dalam bentuk: • Sosialisasi terpadu; • Kampanye sadar hukum;	a. Proses evaluasi dan penataan BUKP sudah berjalan. b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi pelanggaran Perda/Perkada di wilayah DIY sebagai dasar penyusunan program penanganan yang lebih strategis. c. Menginisiasi penyusunan sistem pendataan potensi masyarakat dan pelaku pelanggaran Perda/Perkada untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		berupa penguatan program kegiatan yang ada di masyarakat.	• Penguatan peran Satlinmas dan Jaga Warga; • Integrasi program pembinaan yang telah berjalan di masyarakat.	
		b. Pemerintah DIY perlu melakukan perbaikan terhadap BUKP baik dari aspek regulasi, aspek manajerial dan meningkatkan pelayanan yang berintegritas dan akuntabel.	e. Pemda DIY akan melakukan perbaikan terhadap BUKP dengan menyesuaikan regulasi (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dan perubahan badan hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	
2.	Atas prestasi Pemerintah Daerah DIY dengan meraih peringkat ketiga nasional untuk kategori Pemerintah Provinsi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, DPRD DIY memberikan apresiasi yang tinggi. Demikian pula dengan 81 penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah DIY selama kurun tahun 2024, DPRD DIY memberikan apresiasi yang tinggi, mengingat hal tersebut tidak mudah untuk diraih tanpa kerja keras Gubernur dan jajaran OPD. Teriring harapan, semoga pada waktu-waktu	-	Terima kasih, atas apresiasinya, semoga menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih juga kepada DPRD DIY atas kebersamaan dan sinerginya selama ini sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga dapat meraih prestasi dan penghargaan atas kinerja Pemda DIY selama tahun 2024	Penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi dalam waktu-waktu yang akan datang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk kepentingan masyarakat.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	yang akan datang, prestasi tersebut dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.			
3.	Keunikan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY dimana Indek Reformasi Birokrasi mendapat nilai A, penilaian SAKIP dari Kemenpan RB mendapatkan predikat AA, serta memperoleh 81 penghargaan pada tahun 2024, namun pada sisi lain terdapat 3 indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Pemda DIY tahun 2024 yang tidak tercapai, 3 indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY 2024 tidak tercapai, ada 7 indikator Kinerja Program Pemda DIY tahun 2024 tidak tercapai serta 5 indikator Kinerja Program Pemda DIY tahun 2024 masih menunggu rilis.	Sebagai Upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan reformasi birokrasi dan hasil kerja Pemerintah DIY, maka DPRD DIY mendorong Pemerintah DIY untuk melakukan audit sosial/pengukuran akuntabilitas sosial dengan melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat atas program Pembangunan Pemerintah DIY dan kinerja birokrasi DIY. Pengukuran ini menjadi bagian dari upaya untuk terus menjaga orientasi pelayanan kepada masyarakat, bukan perjuangan mendapatkan penilaian Pemerintah Pusat saja.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan mekanisme evaluasi pelayanan publik yang secara nasional diatur melalui kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY. Dengan demikian, rekomendasi DPRD DIY sejalan dengan praktik yang sudah berjalan, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas implementasi SKM sebagai instrumen akuntabilitas sosial dan evaluasi kinerja birokrasi daerah. Dalam implementasinya, SKM di Pemda DIY telah digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada unit layanan pemerintah daerah (meliputi unsur: (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan pengaduan, dan (9) sarana prasarana). Hasil SKM selama ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pimpinan perangkat daerah dalam melakukan perbaikan layanan serta menjadi bagian dari indikator keberhasilan reformasi birokrasi.	Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), masyarakat mendapatkan kesempatan untuk dapat menilai pelayanan yang mereka terima secara langsung. Unit penyelenggara pelayanan juga mendapatkan umpan balik secara langsung mengenai unsur pelayanan yang memiliki nilai rendah di atara unsur pelayanan lainnya, untuk dapat segera diperbaiki. 
4.	Terdapat penurunan tingkat kemiskinan di DIY dari 11,04%	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan di berbagai	a. Pemda DIY telah berupaya mengkosolidasikan dan mengkoordinasikan upaya lintas sektor	Upaya penurunan Angka/tingkat kemiskinan DIY, melalui Sinergitas program,

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	tahun2023 menjadi 10,40% tahun 2024. Meskipun demikian target tingkatkemiskinan 2024 adalah 10,16 atau terdapat realisasi capaian sebesar97,64%. Terhadap capaian ini DPRD DIY memberikan rekomendasikepada Gubernur untuk untuk lebih optimal dalam upayapengurangan angka kemiskinan di DIY. Tanggungjawab penguranganangka kemiskinan merupakan kerja lintas sektor.	tingkatan, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa, untuk melaksanakankebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara efektif. Oleh karena itu, Gubernur perlu untuk mengkonsolidasikan kinerja Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Koperasi dan UKM, dan lain-lain.	dengan dukungan OPD di DIY melalui lokus penanggulangan kemiskinan pada 15 kapanewon dan 3 kemantren di DIY Tahun 2023-2027. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin adalah memprioritaskan lokasi/wilayah penanggulangan kemiskinan dengan mengangkat potensi sumber daya alam dan manusia serta kelembagaan yang ada dilokasi tersebut. Upaya penentuan lokus ini juga digunakan dalam rangka mengurangi ketimpangan wilayah dan tingkat pendapatan masyarakat sehingga terwujud pemertaan pembangunan dan keadilan sosial. Dalam upaya penyelarasan program, OPD DIY dan Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya diharapkan untuk menjadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan program kegiatan terutama penanggulangan kemiskinan. Lokus kapanewon tersebut disampaikan pada SE WAGUB DIY No 400.9.14/6076 tanggal 12 September 2024 tentang Penyampaian Lokus Kapanewon Dan Kemantren Penanggulangan Kemiskinan b. di sisi lain Pemerintah Daerah DIY juga telah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai salah satu upaya menanggulangi kemiskinan.Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2022 sampai dengan tahun	Pemenuhan layanan dasar dari berbagai sektor pada masyarakat miskin, ketimpangan wilayah, meminimalkan kantong-kantong kemiskinan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			2025.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan melibatkan Bapperida DIY sebagai koordinator serta berbagai Perangkat Daerah pelaksana, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Perangkat Daerah lainnya. Salah satu hasil/dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan di tahun 2025, tercermin dari penurunan angka kemiskinan di DIY. Pada September 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 10,08%, turun 0,15 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 10,23%(berdasar data rilis BPS 5 februari 2026).	
5.		Dalam Urusan Keistimewaan Gubernur DIY didorong untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :		
		pertama, mendorong agar pelaksanaan *Grand Design* Keistimewaan DIY Tahun 2022–2042 dilakukan dengan lebih tajam dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat yang memberikan	*a.* *Grand Desain* serta RPJMD baik di DIY maupun Kabupaten/Kota menjadi acuam dalam usulan perencanaan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat. *b.* Koordinasi dengan lembaga tingkat Kabupaten yang bertugas mengampu urusan keistimewaan	a. Pelaksanaan *Grand Design* Keistimewaan DIY Tahun 2022–2042 dilakukan dengan lebih tajam dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat yang memberikan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat.	dilakukan secara rutin baik dilakukan melalui koordinasi langsung melalui rapat, maupun kunjungan langsung monitoring progres ke lokasi. Selain koordinasi juga pengampu pelaksana urusan Keistimewaan baik di DIY maupun kabupaten/Kota juga diwajibkan melaporkan progres melalui aplikasi KENES pada setiap bulannya dan dilakukan konfirmasi klarifikasi dan verifikasi setiap triwulan maupun setiap tahapannya.	b. Intensitas koordinasi dengan lembaga di tingkat kabupaten yang bertugas mengampu urusan Keistimewaan agar capaian maksimal dan juga monitoring secara berkala.
		Kedua, meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga di tingkat kabupaten yang bertugas mengampu urusan keistimewaan agar capaian maksimal dan juga monitoring secara berkala. Selaras dengan mandat Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 bahwa Pemda DIY bertugas melakukan monitoring pelaksanaan urusan keistimewaan.		
6.	Pertumbuhan ekonomi DIY mengalami trend penurunan sejak tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi DIY pasca pandemi *Covid*-19 belum menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,1-5,6% terealisasi sebesar 5,03%.	DPRD DIY mengingatkan kepada Gubernur dan jajaran OPD terkait untuk mencermati dan mengantisipasi pengaruh dari faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa langkah yang bisa diambil sebagai kebijakan antara lain :		
		pertama, peningkatan produktivitas pertanian dengan mendukung inovasi, teknologi, dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani.	1. Mengoptimalkan program perlindungan dan pemberdayaan petani berbasis komoditas strategis (padi, kedelai, kacang-kacangan, umbi) melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. 2. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) pada lahan *eksisting* melalui pendampingan teknis budidaya adaptif perubahan iklim.	1. Penurunan produksi komoditas pertanian akibat perubahan iklim dan serangan OPT. 2. Rendahnya kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) DIY.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			3. Menguatkan pertanian terintegrasi dengan pengendalian OPT dan penggunaan benih unggul spesifik lokasi. 4. Memfasilitasi kemitraan petani pangan dengan BULOG, BUMD pangan, koperasi, atau *offtaker* lokal untuk kepastian harga dan pendapatan. 5. Mengembangkan sistem mitigasi dan perlindungan usaha tani pangan melalui kalender tanam adaptif iklim dan optimalisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). 6. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Petani *Milenial* sebagai wadah aspirasi dan regenerasi petani.	3. Menurunnya jumlah unit usaha dan angkatan kerja di sektor pertanian, serta dominasi petani berusia di atas 40 tahun. 4. Ketidakpastian harga dan rantai pemasaran yang belum optimal. 5. Risiko gagal panen dan kematian ternak akibat cuaca, OPT, dan penyakit.
		Kedua, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah, serta menarik investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.	DINAS KOPERASI DAN UKM DIY: DPMPTSP DIY: Guna memacu kembali tren pertumbuhan ekonomi DIY *pasca*-pandemi, DPMPTSP DIY telah melakukan pemetaan potensi investasi berbasis modalitas wilayah menggunakan Analisis Tipologi Klassen, yang mendistribusikan spesialisasi komoditi unggulan di tiap Kabupaten/Kota sebagai panduan presisi bagi investor. Strategi ini diperkuat dengan Analisis *Input-Output (I-O)* untuk mengidentifikasi sektor 'mesin penggerak' di Kuadran I—seperti industri makanan-minuman, industri kayu dan barang anyaman, industri kertas dan percetakan, industri kimia-farmasi, ketenagalistrikan, serta konstruksi—yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi melalui keterkaitan ke belakang dan ke depan yang kuat. Sebagai langkah konkret untuk mengalihkan konsentrasi investasi dari sektor tersier ke sektor industri, DPMPTSP DIY melakukan	DINAS KOPERASI DAN UKM DIY: DPMPTSP DIY: Upaya tindak lanjut ini difokuskan pada pergeseran pola pikir perencanaan investasi yang sebelumnya bersifat *one size fits all* menjadi perencanaan berbasis modalitas wilayah melalui penyediaan peta potensi investasi sebagai panduan strategis bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun IPRO yang lebih berkualitas. Langkah ini sekaligus mengintervensi rendahnya kepatuhan serta pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap sistem perizinan berbasis risiko (OSS RBA) dan tata cara pelaporan LKPM guna memitigasi risiko sanksi administratif yang menghambat skala usaha untuk berkembang. Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk menjawab tantangan rendahnya nilai tambah komoditas lokal

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI), penguatan kerjasama internasional (Sister Province) melalui hilirisasi komoditas seperti pengembangan jamur di Kulon Progo senilai Rp452 juta, serta penyusunan dokumen IPRO konkret seperti Agrowisata Pantai Baron yang telah menarik komitmen investasi Rp4,5 Miliar. Seluruh upaya ini didukung dengan percepatan legalitas formal (NIB) bagi UMKM agar mampu naik kelas ke skala industri, serta pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang pada tahun 2025 telah menjangkau 180 pelaku usaha dan diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 870 pelaku usaha pada tahun 2026 guna menjamin kepastian serta kepatuhan investasi di DIY.	dalam rantai pasok industri global, serta memfasilitasi ketersediaan proyek investasi yang "siap jual" (siap tawarkan) melalui penyelesaian kendala teknis ketersediaan lahan yang sering terhambat oleh kompleksitas regulasi pertanahan di daerah.
7.		Mendorong Gubernur DIY untuk secara sungguh-sungguh menjadikan ketahanan pangan di DIY sebagai prioritas urusan pangan dengan mengentaskan 2 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang dan Kalurahan Tegalrejom Kapanewon Gedangsari yang masuk klasifikasi rawan pangan dan meningkatkan cadangan pangan di DIY yang tidak hanya bertumpun pada beras.	1. Koordinasi dan sinergi lintas OPD telah dilakukan untuk pengentasan 2 kalurahan rawan pangan di Gunungkidul, dengan fokus pada optimalisasi Lumbung Mataraman, distribusi pangan, dan peningkatan cadangan pangan masyarakat. 2. Diversifikasi cadangan pangan non-beras sedang dikembangkan melalui inventarisasi potensi lokal dan usulan reviu regulasi, meskipun cadangan pemerintah masih didominasi beras akibat keterbatasan sarana penyimpanan. 3. Peningkatan produksi dan konsumsi pangan B2SA dilakukan melalui pelatihan pengolahan pangan lokal, fasilitasi alat olahan, serta sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan menu beragam dan bergizi. 4. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan digalakkan dengan berbagai metode tanam	1. Pengentasan dua kalurahan rawan pangan di Gunungkidul (Girimulyo dan Tegalrejo) dan peningkatan statusnya menjadi agak rentan pada 2025. 2. Diversifikasi cadangan pangan non-beras melalui inventarisasi komoditas lokal dan penyusunan telaah reviu regulasi. 3. Peningkatan pola konsumsi pangan beragam dan bergizi (B2SA) yang masih rendah, terutama untuk umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. 4. Pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan ketahanan harga melalui optimalisasi lahan pekarangan dan antisipasi kelangkaan komoditas tertentu.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			sederhana (*polibag*, hidroponik, dll.) untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan tambahan pendapatan masyarakat. 5. Implementasi program prioritas menggunakan Dana Keistimewaan, meliputi pengembangan Lumbung Mataraman, pendampingan BKK Desa Mandiri Pangan, peningkatan cadangan pangan masyarakat, dan sosialisasi produk pangan lokal.	5. Penguatan sistem pendanaan, mutu, dan keamanan pangan melalui Dana Keistimewaan serta peningkatan standar kehalalan dan keamanan pangan.
8.		Pemerintah Daerah DIY diharapkan mencari terobosan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkatkan diluar Retribusi dan Pajak Daerah dengan memanfaatkan aset dan Barang Milik Daerah dengan target ada kenaikan prosentase PAD DIY dari 41,19% pada APBD tahun 2024, bisa meningkat menjadi 50% pada tahun 2025, 2026.	Upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi BMD terus dilakukan Pemda DIY dengan berpedoman pada peraturan perundangan pengelolaan BMD dan melakukan penguatan internal maupun ekternal. Penguatan internal terus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan optimalisasi BMD dan penilaian BMD, membangun sistem informasi BMD yang akuntabel dan mudah digunakan, identifikasi BMD idle secara berkala dan melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada OPD pengguna BMD agar dapat melakukan optimalisasi BMD yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi OPD. Secara eksternal Pemda DIY melakukan penguatan melalui kajian penilaian potensi dan High Best Use BMD Idle. Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak ketiga (perorangan dan atau badan usaha) untuk bekerja sama melakukan pemanfaatan aset melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan pengelolaan BMD seperti SEWA. Penjajakan minat pasar terhadap BMD idle strategis yang berpotensi memberikan sumbangan PAD. Bersinergi dengan Kementerian Keuangan (KPKNL) maupun Lembaga Manajemen Aset Negara dalam mencari terobosan	Koordinasi dan inventarisasi BMD sedang dilakukan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			terbosan pemanfaatan barang milik daerah, contoh melalui pemanfaatan laman: lelang.go.id.	
9.		Pengawasan pembangunan untuk menekan laju alih fungsi lahan di DIY, dengan terus mempedomani Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043.	1. Sinkronisasi dan Penguatan Data. DPKP menyediakan basis data dan analisis teknis lahan pertanian eksisting, mengawal pemutakhiran data spasial (SIG) serta menyusun peta kerawanan alih fungsi lahan untuk mendukung sinkronisasi kebijakan dan proses perizinan tata ruang. 2. Pendampingan Teknis Penetapan LP2B: OPD mengawal penyusunan peta usulan LP2B secara partisipatif di tingkat kabupaten/kota dengan menyediakan data pendukung (produksi, kesesuaian lahan, irigasi) dan memberikan pendampingan teknis untuk integrasi LP2B ke dalam RTRW dan RDTR.	1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor yang belum optimal, serta penyediaan data spasial lahan pertanian yang terus diperbarui untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2. Tersusunnya Perda RTRW Kabupaten yang telah memuat Kawasan LP2B, dan segera dilanjutkan dengan penyusunan RDTR Kabupaten untuk implementasi yang lebih operasional.
10.	Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan secara komprehensif dan bersifat multisektoral. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2023 sebesar	Terhadap capaian ini DPRD DIY memberikan catatan secara khusus terhadap Dinas Kebudayaan DIY dan OPD terkait lainnya yang tidak mampu mewujudkan target dimaksud. DPRD DIY mendorong Gubernur memberikan perhatian serius kepada Dinas Kebudayaan DIY dan OPD terkait memperhatikan kinerja pada aspek : Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi	Memperluas ruang interaksi ekonomi-budaya melalui kegiatan seperti 'Pasar Kangen' & pemberdayaan UMKM lokal di kawasan strategis seperti Sumbu Filosofi ➢ Penguatan Desa Budaya untuk menjadikan kalurahan sebagai ujung tombak pelestarian budaya & pemberdayaan masyarakat ➢ Menerapkan instrumen *Heritage Impact Assessment (HIA) & Heritage Urban Landscape (HUL)* sebagai panduan pembangunan adaptif bagi masyarakat & insvestor di kawasan cagar budaya	➢ Rendahnya dimensi ekonomi budaya ➢ Lemahnya partisipasi publik ➢ Hambatan penyelarasan standar konservasi dengan aktivitas ekonomi ➢ Kesenjangan literasi budaya

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	66,52, maka capaian tahun 2024 sebesar 67,90 sepertinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun capaian tahun 2024 tersebut jauh dari target sebesar 74,78	Budaya, Budaya Literasi dan Gender.	➢ Melakukan digitalisasi naskah kuno dan arsip video seni budaya secara *masif* agar dapat diakses oleh publik melalui *platform virtual* ➢ Melaksanakan pembinaan berkelanjutan bagi generasi muda melalui program *Art for Children (AFC)* di berbagai unit Taman Budaya se-DIY	
11.	Capaian Indeks Williamson pada tahun 2024 sebesar 0,459 masih jauh dari target tahun 2024 sebesar 0,441, dan bahkan lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 0,456.	DPRD DIY mengingatkan kepada Gubernur DIY dan Jajaran Eksekutif agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan Pembangunan, khususnya intervensi kebijakan ke Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul sebagai upaya pemerataan pembangunan di DIY. Sisi lain, DPRD DIY memandang perlu menyampaikan kepada Gubernur untuk terus membangun sinergi dengan Bupati Kulon Progo, Bupati Bantul dan Bupati Gunungkidul agar intervensi kebijakan tersebut efektif.	1. Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2025 berupaya untuk memperkuat kebijakan dengan tujuan memperkecil ketimpangan wilayah dengan sasaran meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju yang dinilai dengan melihat indikator sasaran kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY. Pelaksanaan kebijakan ini difokuskan pada wilayah yang belum maju yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Pada level program, Pemda DIY melaksanakan Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur yang dinilai dengan 2 (dua) indikator yaitu persentase penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Kab./Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo). 2. Sebagai bentuk langkah Pemda DIY untuk memperkecil ketimpangan wilayah adalah dengan adanya Pengembangan Kawasan Selatan. Prioritas Pembangunan DIY untuk	1. Masih tingginya ketimpangan pembangunan antarwilayah di DIY yang tercermin dari capaian Indeks Williamson, khususnya kesenjangan antara wilayah selatan DIY (Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Gunungkidul) dengan wilayah utara (Kota Yogyakarta dan Sleman) sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. 2. Melalui intervensi pembangunan yang terarah, baik dalam bentuk penguatan infrastruktur pendukung kawasan selatan, fasilitasi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, maupun sinergi program pengentasan kemiskinan dan reformasi kalurahan, Pemerintah DIY mampu mengatasi sejumlah permasalahan mendasar tersebut. Intervensi yang lebih cermat dan terintegrasi melalui forum rakortekbang, rakordal, serta koordinasi tematik lintas kabupaten telah meningkatkan konsistensi perencanaan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Pengembangan Kawasan Selatan antara lain Pembangunan Jalan Temon-Borobudur, Pembangungan SPAM Regional Kamijoro, Kartamantul, Bener, Pengembangan Kawasan Pantai Samas-Parangtritis, Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY, Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh, Pengembangan *Jogjakarta Agro park (JAP),* dan Pengembangan Kawasan *Aerotropolis* di Kulon Progo, serta dengan melaksanakan Program Prioritas Lainnya yaitu Pembangunan Jalan Prambanan-Gading, dan Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto. Pengembangan Kawasan Selatan DIY diharapkan dapat menjadi langkah tepat dan secara signifikan memberikan pengaruh positif pada berkurangnya ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi baru, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, dan pengoptimalan potensi sumber daya. Sumber anggaran dalam pelaksanaan Prioritas Pembangunan DIY ini adalah dari APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, APBN, Dana Keistimewaan, Investasi Swasta dan BUMN/BUMD. 3. Penyusunan perencanaan pembangunan, khususnya intervensi kebijakan ke Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul akan terus dilakukan seiring dengan komitmen visi misi RPJMD untuk melakukan pemberdayaan kawasan selatan. Perlunya untuk lebih cermat dalam intevensi tersebut, selain karena	dan pengendalian pembangunan, mengurangi duplikasi program, serta memperkuat fokus pada sektor-sektor berdaya ungkit tinggi. Dampaknya tercermin pada terjaganya laju pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten, meningkatnya aktivitas ekonomi kawasan pesisir selatan, serta mulai menguatnya kontribusi kawasan belum maju terhadap PDRB DIY. Dengan demikian, intervensi Pemerintah DIY tidak hanya menjawab persoalan kesenjangan wilayah, tetapi juga memperkuat fondasi transformasi ekonomi kawasan selatan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			terbatasnya fiskal daerah namun juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten juga akan terus dilakukan, baik melalui forum-forum reguler antara lain rakortekbang dan rakordal, juga melalui sinergi yang lebih tematik misalnya terkait koordinasi kemiskinan dan reformasi kalurahan. 4. Intervensi terhadap 3 Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir selatan tersebut mutlak dilakukan oleh Pemerintah DIY sejalan dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pembangunan Jangka Menengah DIY yang salah satunya adalah Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY. Indikator Kinerja Utama tersebut diinternalisasi ke dalam Program Pemerintah Daerah dengan indikator yang digunakan antara lain Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, GK, KP)	
12.	Beberapa permasalahan masih menyelimuti dunia Pendidikan di DIY. Masih terdapat kasus anak putus sekolah. Capaian Angka Putus Sekolah penduduk usia 16-18 tahun di DIY masih melampaui	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY perlu untuk bekerja keras agar di DIY tidak terjadi lagi anak putus sekolah.	1. Berdasarkan hasil pendataan anak putus sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab anak tidak sekolah adalah rendahnya motivasi belajar, yang dalam pendataan teridentifikasi sebagai alasan “malas sekolah”, selain faktor pendukung lainnya seperti kondisi psikososial, lingkungan	Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY telah melakukan penyaluran beasiswa Retrieval guna menekan angka putus sekolah yang diakibatkan oleh kendala ekonomi. Mengingat persoalan putus sekolah tidak hanya berakar dari permasalahan ekonomi, dilakukan pula pendekatan kepada para

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	targetyang ditetapkan. Capaian Angka Putus Sekolah pada tahun 2024 adalah sebesar 0,28% melebihi dari target sebesar 0,20%.		keluarga, dan keterbatasan dukungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan aspek pembiayaan pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek non-akademik dan psikologis. 2. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah dan terus melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka penanganan anak putus sekolah. Upaya tersebut diawali dengan pendataan anak putus sekolah secara berkelanjutan dengan melibatkan satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa/Kalurahan. Pendataan ini dilakukan dengan tujuan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada serta pemetaan alasan anak putus sekolah, sehingga intervensi penanganan dapat optimal. 3. Selanjutnya, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY juga telah menyediakan dan menyalurkan program bantuan pendidikan/beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan, sebagai upaya pencegahan putus sekolah sekaligus mendorong keberlanjutan akses pendidikan. Selain aspek pembiayaan, Dinas juga melaksanakan pendampingan non-akademik, termasuk pendampingan psikologis dan sosial, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia	anak putus sekolah untuk tetap melanjutkan pendidikan, salah satunya pada jalur pendidikan nonformal, misalnya Paket C. Dengan demikian anak-anak yang putus sekolah tetap memiliki alternatif sistem pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harapan pembelajaran di jenjang pendidikan menengah tetap dapat dituntaskan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Daerah (KPAID) DIY, khususnya bagi anak yang mengalami kerentanan psikososial, kekerasan, atau permasalahan keluarga.	
13.	Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukan angka prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun mencapai 31,80% (Nasional 30,80%), dan prevalensi diabetes di DIY pada semua kelompok umur mencapai 2,90% (Nasional 1,70%). Disamping itu juga berdasar data survei kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 angka stunting masih cukup tinggi. Angka prevalensi stunting di DIY mencapai 18,00% dibanding target RPJMD sebesar 14,00%. Demikian pula dengan angka penderita gangguan kejiwaan, di DIY menunjukkan angka prosentase kategori tertinggi secara nasional. Prevalensi depresi berdasarkan SKI 2023 mencapai 1,5%-2% (Indonesia pada 1%-1,5%).	Terhadap capaian tersebut, DPRD DIY meminta kepada Gubernur DIY mengevaluasi secara sungguh-sungguh kinerja Dinas Kesehatan DIY dalam menjalankan program-programnya.	a. Akan mengintensifkan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan melalui mekanisme desk timbal balik setiap triwulan serta monev lapangan. b. Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY secara umum dengan mengendalikan penyakit menular melalui perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillans berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin. c. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melaui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung stunting seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat, serta melalui penguatan pelayanan kesehatan anak terpadu.	Pencegahan dan Penanggulangan PTM

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			d. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat.	
14.		Pemda DIY perlu memberikan perhatian serius terhadap program pembangunan ekonomi masyarakat sehingga memiliki dampak yang konkrit bagi kesejahteraan masyarakat mengingat Capaian Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai mayoritas merupakan indikator di sektor ekonomi antara lain angka pertumbuhan ekonomi, angka ketimpangan wilayah, *Inclusive Growth Index (IGI)* dan indikator lainnya.	a. Sejalan dengan RKPD tahun berjalan dan tahun berikutnya, Pemda DIY telah menempatkan pembangunan ekonomi sebagai salah satu prioritas daerah melalui penguatan perencanaan pembangunan ekonomi yang terintegrasi, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan, pengembangan sektor unggulan daerah, serta upaya pengurangan ketimpangan wilayah. Program-program tersebut telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan dinamika kondisi ekonomi regional maupun nasional yang turut memengaruhi kinerja perekonomian daerah. b. Pemda DIY juga telah melakukan berbagai langkah pengendalian dan penyesuaian kebijakan, antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, penguatan monitoring dan evaluasi program, serta pengendalian inflasi daerah guna menjaga daya beli masyarakat. Ke depan, Pemda DIY akan terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan program prioritas agar capaian indikator kinerja sektor ekonomi dapat ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. c. Menindaklanjuti atas rekomendasi DPRD DIY terkait perlunya perhatian terhadap	Permasalahan ketimpangan wilayah dan pemerataan pendapatan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			pembangunan masyarakat, khususnya pada Indikator Kinerja Utama sektor ekonomi (pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan Inclusive Growth Index), Pemda DIY berkomitmen memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui : 1). Penguatan intervensi program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi pemberdayaan UMKM dan wirausaha baru melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan perluasan pasar, peningkatan nilai tambah produk unggulan, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, serta dukungan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan daerah; 2). Melakukan rasionalisasi dan reorientasi belanja daerah untuk meningkatkan proporsi belanja produktif yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3). Memperkuat pendekatan kewilayahan melalui optimalisasi program berbasis kalurahan dan kawasan prioritas; 4). Melalukan sinergi dengan Pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperluas akses pembiayaan usaha produktif	
15.		Pemda DIY perlu meningkatkan Kualitas Partisipasi Publik dalam setiap tahapan pembangunan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan	Upaya meningkatkan partisipasi publik, khususnya kelompok rentan akan terus dilakukan. Diantaranya dengan melibatkan kelompok rentan dalam Musrenbang dan berbagagai Forum Konsultasi	Peningkatan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembangunan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		dan Pengawasan dan membuka lebar akses masyarakat khususnya kelompok rentan sehingga tujuan Pembangunan Inklusif dapat tercapai.	Publik dan Forum Perangkat Daerah. Dalam berbagai kesempatan tersebut, dibuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk memberikan masukan terhadap proses pembangunan yang akan dilaksanakan	
16.		Pemda DIY perlu melakukan terobosan pembiayaan pembangunan Infrastuktur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya semakin meningkat ditengah situasi anggaran daerah dalam APBD yang terbatas. Kerja Sama Pemerintah, Swasta, dan Dunia Usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan daerah.	Sepakat bahwa Pemda DIYperlu melakukan terobosan terkait pembiayaan pembangunan yang tetap akuntabel dan sesuai regulasi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Terobosan dilakukan dengan tujuan memperluas sumber pembiayaan infrastruktur, meningkatkan partisipasi swasta dan dunia usaha, menjamin keberlanjutan fiskal daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya yang bisa dilakukan adalah Optimalisasi KPBU untuk proyek padat modal dan opsi untuk pembiayaan dengan utang. tetapi upaya tersebut diperlukan kajian dan readiness criteria yang kuat sehingga tidak bisa langsung dilaksankaan dalam periode jangka pendek	Pembiayaan pembangunan Infrastuktur yang semakin meningkat di tengah situasi anggaran daerah dalam APBD yang terbatas.
a.		Pemda DIY perlu menjadikan Perbaikan Sistem Transportasi Publik sebagai salah satu Prioritas Pembangunan daerah untuk menyelesaikan masalah kepadatan lalu lintas sebelum menjadi permasalahan yang sulit diurai kedepannya. integrasi antar moda transportasi, peningkatan layanan transportasi publik yang	Pemda DIY telah melakukan, antara lain: **a. Optimalisasi Layanan Angkutan Massal** Dinas Perhubungan DIY telah mengambil langkah strategis dalam melakukan tindak lanjut pelayanan eks koridor Teman Bus melalui skema integrasi ke dalam sistem layanan Trans Jogja. Hal ini dilakukan guna menjaga kesinambungan layanan transportasi publik yang andal bagi masyarakat.	**a. Penyediaan Layanan pada Koridor Strategis**: Mengatasi kekosongan layanan angkutan umum pada trayek pasca-operasional *Buy The Service (BTS)* dengan melakukan pengalihan pengelolaan dan pelayanan melalui sistem Trans Jogja. Langkah ini diambil untuk menjamin kontinuitas aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat di koridor terdampak.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		nyaman-aman-murah, perbaikan dan peningkatan infrastruktur dan membaiknya budaya masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dalam beraktifitas menjadi kunci berkurangnya kepadatan lalulintas di pusat Kota dan sekitarnya serta wilayah lain yang merupakan jalan arah menuju destinasi wisata.	**b. Akselerasi Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan** Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses, telah diimplementasikan berbagai inovasi strategis, yang meliputi: 1) Integrasi Sistem Pembayaran: Perluasan fungsi kartu pelajar sebagai alat pembayaran nontunai yang terintegrasi. 2) Penataan Jaringan Trayek: Pelaksanaan rerouting trayek angkutan umum guna efektivitas jangkauan layanan. 3) Modernisasi Teknologi Informasi: Pemutakhiran fitur sistem operasional Trans Jogja serta penggunaan aplikasi *Jogja Travel Pass (JTP)* sebagai *platform* integrasi pembelian tiket berbasis digital. **c. Sinergitas Antarwilayah dan Kewilayahan** Mendorong penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan layanan angkutan umum yang saling terkoneksi (*feeder*) dan terintegrasi dengan jaringan utama Trans Jogja, guna mewujudkan ekosistem transportasi makro yang komprehensif.	**b. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Layanan:** Menjawab tantangan terkait fluktuasi waktu tunggu (*headway)* armada yang belum konsisten serta kendala pada aspek kemudahan transaksi pembayaran. Pemerintah Daerah terus melakukan penyempurnaan sistem informasi dan digitalisasi pembayaran guna meningkatkan kepuasan serta kepercayaan pengguna jasa transportasi. **c. Sinkronisasi Kebutuhan Transportasi Antar-Wilayah**: Merespons tingginya aspirasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan layanan angkutan umum yang saling terkoneksi. Hal ini diakomodasi melalui koordinasi lintas wilayah guna mewujudkan integrasi layanan moda transportasi yang kohesif antara pusat kegiatan provinsi dengan wilayah penyangga.
d.		Pemda DIY harus menuntaskan akses masyarakat terhadap rumah layak huni hingga 100% mengingat Rumah yang Layak atau Papan adalah salah satu kebutuhan Pokok selalin Sandang dan Pangan.	Secara berkala telah dilakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/ kota dan Balai P3KP Jawa III terkait upaya penanganan RTLH di tahun berjalan. Rapat koordinasi dilaksankan oleh Kementerian PKP melalui Balai P3KP Jawa III untuk sinkronisasi penanganan. Selain itu Pemda DIY berupaya membuat sistem informasi perumahan sebagai wadah untuk sinkronisasi data dan data *base* RTLH.	Penanganan RTLH yang dilaksanakan di DIY dari berbagai sumber pembiayaan sudah dikoordinasikan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari terjadinya penanganan yang tumpang tindih.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		integrasi penanganan dan pendataan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta menjadi keharusan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan dilaksanakan berbasis Rumah Tangga miskin diseluruh Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.		
e.		Terhadap Program-Program Strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD DIY memberikan dorongan kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah :		
		a. Tidak semua Program strategis bisa berjalan sesuai harapan, oleh karena itu hendaknuya disiapkan program antisipasi bila terjadi kemandegan *program (exit strategy)*. Alat ukur program strategis hendaknya tidak sekedar kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaannya namun sejauh mana dampak ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang bisa diraih.	a. Antisipasi apabila terjadi kemandegan program strategis dilakukan melalui telaah/reviu ulang terhadap program yang dimaksud. Telaah/reviu diharapkan memberikan rekomendasi apa penyebab kemandegan berikut solusi yang mungkin dilakukan. Sepakat untuk memastikan program strategis memberikan dampak sesuai dengan esensinya, misalnya terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan. peningkatan tata kelola, dsb. b. Program strategis adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam	a. Strategi pengembangan operasional program strategis dilakukan melalui perkuatan koordinasi antar-OPD, optimalisasi belanja yang lebih produktif, penguatan intervensi berbasis data terpadu kesejahteraan sosial, serta peningkatan kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. b. Penerapan strategi ini menunjukkan kecenderungan yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi DIY tetap terjaga pada kisaran yang stabil dan berada pada tren pertumbuhan yang resilien, didorong oleh penguatan sektor

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		b. Pembangunan program strategis juga membutuhkan partisipasi warga oleh karena itu edukasi dan penguatan masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan program strategis tersebut. Penguatan SDM menjadi kunci agar program strategis bisa berjalan dengan baik dan tercipta kolaborasi antar *stake holder* yang berujung pada optimalnya goalPerlu alat ukur untuk mengukurdampak kinerja program yang akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja program. c. Perlu data tunggal yang saling terintegrasi antar OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dalam pelaksanaan program tidak saling tumpang tindih tapi saling melengkapi. Perlu peningkatan kerjasama program dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersinergi satu sama lain dalam satu kesatuan langkah. d. Dalam pemanfaatan dana keistimewaan perlu	dokumen perencanaan jangka menengah. Dalam setiap pelaksanaan program strategis yang dikerjakan oleh OPD, selalu mendasarkan pada evaluasi kinerja dari program strategis tersebut yang telah dilaksanakan termasuk didalamnya kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi. c. Strategi pengembangan terhadap operasional program strategis apabila terdapat kendala dan hambatan, dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan ketercapaian target tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk diantaranya target penurunan kemiskinan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. d. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat akan terus dilakukan agar pelaksanaan program strategis dapat berjalan baik dan berkelanjutan. Adapun pada tahun 2026, telah dilakukan reviu terhadap perangkat penilaian kinerja sub kegiatan instansi, dengan mempertimbangkan aspek evaluasi dampak sebagai salah satu komponen penilaiannya. e. Keterlibatan masyarakat dan stake holder terkait untuk pembangunan program strategis sudah telah dilaksanakan mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan pada H-1 tahun pelaksanaan. f. Pendekatan partisipatif ini dilaksanakan secara sistematis melalui forum perencanaan pembangunan berjenjang (musrenbang), konsultasi publik dokumen perencanaan seperti RKPD dan perubahan RKPD, forum	pariwisata, pendidikan, dan jasa lainnya. c. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan secara bertahap, meskipun masih berada di atas rata-rata nasional, yang mengindikasikan bahwa intervensi pengurangan kemiskinan mulai memberikan dampak, namun tetap memerlukan penguatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. d. Secara keseluruhan, pelaksanaan program strategis berikut exit strategi yang digunakan, yang mendasarkan pada hasil evaluasi, telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. e. Melalui penguatan keterlibatan masyarakat sejak tahap penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi program, Pemerintah DIY mengatasi permasalahan sinergisitas antara pemerintah daerah, kalurahan/desa, komunitas, dan pelaku usaha dalam pelaksanaan program strategis tersebut dengan memastikan bahwa prioritas pembangunan lebih berbasis kebutuhan aktual wilayah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong kolaborasi multipihak.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		perencanaann yang matang dengan mendasarkan pada keterbukaan, kesesuaian antara tujuan dengan jenis program dalam sebuah rencana aksi daerah yang terukur dalam jangka panjang. Peraturan Gubernur yang selama ini menjadi dasar hukum bagi perencanaan/penyusunan program keistimewaan, perlu untuk terus dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan kekinian.	perangkat daerah, serta mekanisme penajaman program berbasis kewilayahan dan tematik. g. Dalam proses tersebut, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan dilibatkan untuk memberikan masukan substantif terhadap prioritas pembangunan, indikator kinerja, serta lokasi dan sasaran intervensi program strategis. h. Hasil partisipasi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip perencanaan partisipatif dan transparan. i. Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah DIY menindaklanjuti hasil perencanaan partisipatif dengan mendorong model pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui pola pemberdayaan, padat karya, kemitraan dengan kalurahan/desa, kelompok masyarakat, koperasi, serta pelaku UMKM, termasuk dalam skema hibah, bantuan keuangan khusus, dan fasilitasi teknis.	f. Pendekatan ini juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas program strategis, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah DIY. g. Perencanaann yang matang dengan mendasarkan pada keterbukaan, kesesuaian antara tujuan dengan jenis program dalam sebuah rencana aksi daerah yang terukur dalam jangka panjang
			j. Upaya untuk integrasi perencanaan/pelaksanaan program dilakukan melalui rakortekbang, maupun dalam bentuk koordinasi teknis antar pengampu sehingga peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terpetakan sejak awal. Inisiasi data tunggal sebagai pemandu intervensi, salah	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			satunya yang dilakukan pada tahun 2025-2026 terkait data kemiskinan.	
			k. Saat ini sejak 2025 baik DIY maupun Kabupaten/Kota untuk urusan keistimewaan sudah diselaraskan melalui dokumen perencanaan diantaranya RPJMD DIY, RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan indikatornya sehingga harapan ke depan akan lebih mudah dalam melihat ketercapaian sesuai indikator yang telah dicantumkan serta peran dukungan dari masing - masing pelaksana urusan keistimewaan terhadap tujuan pembangunan di DIY.	
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				
A. URUSAN PEMERINTAHAN				
1. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	Maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak terdaftar atau tidak membayar cukai menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara dan menurunnya pendapatan negara selain itu, peredaran minuman beralkohol ilegal atau tidak berizin yang dapat menyebabkan peredarannya menjadi tidak terkendali sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. DIY yang memiliki keragaman sosial dan budaya tinggi,	a. Program Penegakan melalui peningkatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi secara berkala dan terukur untuk menertibkan dan mengantisipasi permasalahan tersebut diatas. b. Pemetaan potensi pelanggaran Perda/Perkada dan kemampuan untuk antisipasi, membuat program strategis penanganannya secara terukur dan berkesinambungan c. Membuat data base Potensi masyarakat dalam penegakan Perda/Perkada dan data base	a. Badan Kesbangpol DIY tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan operasi penegakan Perda/ Perkada. Namun demikian, telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan SATPOL PP DIY. b. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD DIY terkait penguatan program penegakan, Satpol PP DIY melaksanakan Operasi Yustisi dan Non Yustisi secara berkala, terukur, dan berbasis pemetaan risiko. Operasi ini difokuskan pada penertiban peredaran rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, penambangan liar, serta pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa. Pelaksanaan operasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, antara lain dengan Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah	a. Badan Kesbangpol DIY tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan operasi penegakan Perda/ Perkada. Namun demikian, telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan SATPOL PP DIY. b. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, selama tahun 2025 Satpol PP DIY melakukan : - Operasi dan patroli pengendalian tibumtranmas di wilayah DIY, pengamanan unjuk rasa, penertiban aset Pemda DIY - Penegakan Perda dan Perkada terutama gelandangan pengemis,

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	termasuk kedatangan penduduk non tetap, berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang bisa berujung pada konflik. Ketidakcocokan antar-kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang sosial-budaya bisa memicu kerusuhan atau gangguan ketertiban, pelanggaran terkait pemanfaatan tanah kas desa. Penambangan liar yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada daerah aliran sungai.	pelaku pelanggaran Perda/Perkada. d. Program Perventif melalui gerakan budaya tertib di masyarakat yang melibatkan Pemkot/Pemkab setempat berupa penguatan program kegiatan yang ada di masyarakat	Kabupaten/Kota, serta perangkat kalurahan. Operasi yustisi diarahkan pada penindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan operasi non yustisi dioptimalkan melalui pembinaan, peringatan tertulis, dan edukasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penegakan Perda/Perkada dapat berjalan efektif, proporsional, serta memberikan efek jera sekaligus perlindungan bagi masyarakat. c. Sebagai upaya antisipatif, Satpol PP DIY melakukan pemetaan potensi pelanggaran Perda/Perkada secara komprehensif dan berkelanjutan melalui kegiatan deteksi dini dan pengumpulan informasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh informasi yang akurat terkait potensi pelanggaran Perda/Perkada. Data yang sudah dikumpulkan kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan tindakan yang strategis dalam penanganan pelanggaran Perda/Perkada d. Dalam rangka memperkuat sistem penegakan Perda/Perkada, Satpol PP DIY menyusun dan mengembangkan database potensi masyarakat yang dapat dilibatkan dalam upaya penegakan, seperti anggota Satlinmas, anggota Satlinmas Rescue Istimewa, Kelompok Jagawarga dan kelompok masyarakat lainnya yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penggunaan teknologi informasi seperti SIMLINMAS, radio	miras ilegal, dan air tanah sebanyak 18 kali (gabungan operasi yustisi dan non yustisi), dengan jumlah pelanggar sebanyak 105 pelanggar. - Melakukan penertiban Tanah Kas Desa dengan mekanisme Non Yustisi sebanyak 300 kali, serta operasi yustisi sebanyak 100 kali, dengan jumlah pelanggar sebanyak 100 pelanggar. - Melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat akan gangguan trantibumas, yang disampaikan melalui hotline, WA maupun medsos sebanyak 190 aduan. - Pemberantasan cukai rokok ilegal sebanyak 59 kali operasi, dengan jumlah pelanggaran sebanyak 139 pelanggaran. c. Kegiatan deteksi dini dan pengumpulan informasi digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi penegakan Perda/Perkada. Sebagai contoh dalam melakukan operasi yustisi penanganan pelanggaran Tanah Desa selalu didahului dengan kegiatan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memastikan keakuratan lokasinya, bidang tanah, pemanfaatan lahan, dan status tanah itu sendiri. Dari data tersebut kemudian dipetakan lokasi mana saja yang kemudian diduga terjadi

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			HT dan WA grup memudahkan dalam koordinasi, mempercepat respon ketika terdapat laporan/kejadian dan memudahkan dalam pelaporan. e. Sebagai upaya jangka panjang, Satpol PP DIY melaksanakan program preventif melalui Sosialisasi Trantibum dengan melibatkan Pemerintah Kelurahan/Kalurahan, tokoh masyarakat, Kelompok Jagawarga, Satlinmas dan Kader Masyarakat. Pendekatan budaya dan kearifan lokal diutamakan dalam membangun kesadaran hukum, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Edukasi mengenai dampak negatif rokok ilegal, minuman beralkohol ilegal, konflik sosial, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan liar akan terus disosialisasikan secara persuasif dan berkelanjutan.	pelanggaran pemanfaatan tanah desa sehingga tindak lanjut yang dilakukan oleh Satpol PP bisa tepat dan efektif. d. Satpol PP DIY selalu mendorong keaktifan kelompok potensi masyarakat seperti Satlinmas dan Kelompok Jagawarga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, terutama yang berpotensi adanya gangguan trantibum, dan juga aktif melaporkan kegiatannya dalam kanal-kanal yang sudah dikoordinasikan oleh Satpol PP DIY baik itu melalui SIMLINMAS maupun WA grup. a. Sepanjang tahun 2025, Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan kinerja yang kuat melalui pendekatan preventif dan edukatif. Hal ini tercermin dari pelaksanaan 100 kali sosialisasi ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), serta masing-masing 3 kali sosialisasi Perda dan sosialisasi cukai. e. Intensitas sosialisasi trantibum menegaskan komitmen Satpol PP DIY dalam mencegah gangguan ketertiban sejak dini dengan membangun kesadaran masyarakat. Sementara itu, sosialisasi Perda dan cukai memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta mendukung pengendalian peredaran rokok ilegal dan minuman beralkohol

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
				tanpa izin. Kegiatan sosialisasi tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP DIY tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan edukasi sebagai upaya menjaga ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
2	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**			
	Capaian kinerja terwujudnya kebebasan dalam kehidupan demokrasi di DIY yang berkualitas pada tahun 2024 terealisasi sebesar 77,76 dari target 74,33 atau setara dengan 104,61%. Capaian nilai *Inclusive Growth Index (IGI)* sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak seluruhnya dapat dikontrol (di luar kendali) Pemda DIY. Masih adanya potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum, terkait Pemilu dan Pilkada 2024.	a. Optimalisasi peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) dalam membangun kerukunan, toleransi, demokrasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegaramelalui Deteksi dini dan cegah dini potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan program kegiatan yang berkesinambungan. b. Optimalisasi Kampung Pancasila dan *Srawung* kampung untuk bergotong royong aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila. c. Bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menjadikanwawasan kebangsaan dan Pancasila.	a. Sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan fasilitasi forum-forum kemitraan yang mendukung kondusivitas wilayah DIY (FKDM, FKUB, FPK), Badan Kesbangpol senantiasa melibatkan forum-forum tersebut dalam berbagai program kerja Badan, utamanya yang berkaitan dengan deteksi dini dan cegah dini potensi instabilitas kemanan dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, forum-forum tersebut akan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan oleh Pemda DIY terkait upaya cipta kondusif wilayah DIY. b. Upaya optimalisasi meningkatkan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Badan Kesbangpol DIY melalui kegiatan Sinau Pancasila dan Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pada tahun 2025, upaya tersebut juga ditambah dengan pelaksanaan pembinaan Paskibraka yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap bela	a. Melibatkan forum-forum (FKDM, FPK dan FKUB) tersebut dalam berbagai program kerja Badan. Dalam pelaksnaannya, forum kemitraan tersebut juga menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan perumusan kebijakan. Selain itu, Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol DIY juga memberikan fasilitasi kegiatan kepada forum kemitraan tersebut. b. Pelaksanaan *Sinau* Pancasila tahun 2025 adalah sebanyak 78 kali yang dilakukan di seluruh kapanewon/kemantren di wilayah DIY. Sementara itu, Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika dilakukan sebanyak 35 kali dengan sasaran peserta dari golongan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum. c. Sesuai mandat peraturan tersebut, Badan Kesbangpol DIY telah menyelenggarakan kegiatan Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran peserta kegiatan yang meliputi masyarakat, ormas, orpol dan ormas kepemudaan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		d. Meningkatkan koordinasi Forkompimda dalam berbagai bentuk kegiatan baik kegiatan formal maupun non formal.	negara dan rasa cinta tanah air. Adapun target pelaksanaan *Sinau* Pancasila tahun 2025 adalah sebanyak 78 kali yang dilakukan di seluruh kapanewon/kemantren di wilayah DIY. Sementara itu, Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika dilakukan sebanyak 35 kali dengan sasaran peserta dari golongan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum. c. Perda DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang kemudian ditindaklanjuti melalui Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi salah satu acuan/dasar dalam perumusan rencana kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Sesuai mandat peraturan tersebut, Badan Kesbangpol DIY telah menyelenggarakan kegiatan Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran peserta kegiatan yang meliputi masyarakat, ormas, orpol dan ormas kepemudaan. d. Pembentukan Forkopimda merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, koordinasi Forkopimda di wilayah DIY telah terlaksana satu	d. Pelaksanaan Forkopimda DIY telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat jelas Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan jelang Natal dan Tahun Baru 2026. Koordinasi juga kerap dilakukan apabila terdapat gejolak yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah DIY.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			kali, dalam rangka menjaga stabilitas di seluruh lini menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Adapun rapat koordinasi selanjutnya akan dilaksanakan pada akhir tahun, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang turut melibatkan Forkopimda guna mengoptimalkan upaya cipta kondusif di wilayah.	
3	**Urusan Penanggulangan Bencana**			
	Selama tahun 2024, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada lima tahun terakhir periode tersebut, tiga kejadian terbanyak adalah bencana alam kebakaran, tanah longsor, dan gempa. Berdasarkan data yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) DIY, pada tahun 2024 terdapat data kejadian sebanyak1.418 terjadi di wilayah DIY baik bencana alam maupun non alam. Perlunya penambahan pemasangan *Sensor Early Warning System*Tanah Longsor pada Kawasan Rawan Bencana yang ada di DIY. Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak	a. Membuat Peraturan Daerah DIY tentang Rencana IndukPenanggulangan Bencana DIY. b. Membuat data base SDM pelaksana dan relawan bencana se-DIY dan mengklasifikasikannya agar memudahkan dalam pembinaan lebih lanjut. c. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan relawan yang bertugas dalam menangani kebencanaan baik di tingkat Kampung/Dusun, Desa, Kemantren/ Kapanewon d. Pentingnya pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat maka program tersebut perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas program dan	1. Pada Tahun 2025 sudah melakukan Pembentukan Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana DIY yang di inisiasi oleh DPRD DIY 2. Koordinasi dilaksanakan dengan pemerintah kabupaten/kota disertai pengklasifikasian berdasarkan keahlian guna mempermudah pelaksanaan pembinaan lanjutan. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik pelaksana maupun relawan, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan pada tingkat Kampung/Dusun, Kalurahan/Kelurahan, hingga Kemantren/Kapanewon melalui Program Kalurahan Tangguh Bencana. 4. Peningkatan kegiatan dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi kebencanaan serta penguatan implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana.	BPBD DIY: 1. Peraturan Gubernur mengenai Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2022–2027 telah ditetapkan dan diterbitkan. 2. Koordinasi telah dilaksanakan dengan pemerintah kabupaten/kota terkait Penanggulangan Bencana dengan melibatkan unsur Akademisi. 3. BPBD DIY sudah membentuk 332 Kaltana dari 438 kalurahan yang ada di DIY 4. BPBD DIY telah melaksanakan pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar senantiasa siap dan siaga, sekaligus merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target pengurangan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selama ini apabila ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani.Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka pengurangan risiko bencana diperlukan peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana).	sasarannya baik di tingkat masyarakat maupun sekolah.		risiko bencana, dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dasar, serta kesadaran dan kewaspadaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bertahap dan berkelanjutan
4	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**			
	Capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan dihitung dari persentase perekaman KTP-el, persentase kepemilikan KIA,persentase kepemilikan Akta Kelahiran, serta persentase penerbitan akta kematian berdasarkan peristiwa kematian yang	a. Aktif jemput bola untuk IKKD dan melakukan publikasi dan edukasi secara terukur berkelanjutan. b. Membuat program kegiatan tentang ISO 27001 tentang standar keamanan informasi	1. Capaian Dokumen Kependudukan per 2 Juli 2025 : KTP-el : 99.7% (2,890,975 / 2,899,725) Akta Kelahiran : 99,48% (866,006 / 870,518) Akta Kematian : 100% KIA : 89.78% (733,411 / 816,911) Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) per 7 Juli 2025 : 11.07% (319,917 / 2,890,769)	1. Capaian IKD semakin meningkat walaupun belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kegaitan jemput bola dan semacamnya akan rutin dilakukan. Sosialisasi dan implementasi penggunaan IKD juga akan semakin ditingkatkan baik di tingkat provinsi maupun Kab/Kota. Progress ini sudah cukup baik mengingat persentase 11%

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	dilaporkan. Keempat elemen tersebut dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya. Realisasi 96.89 % dengan rincian: 99,52% wajib KTP-el telah direkam; 88.65% anak usia 0-16 tahun telah memiliki KIA; 99,41% anak usia 0-18 tahun telah memiliki akta kelahiran; serta 100% pelaporan peristiwa kematian telah diterbitkan akta kematiannya Masih rendahnya minat masyarakat untuk secara mandiri mengaktivasi IKD ke Dinas Dukcapil karena implementasinya yang belum dapat dirasakan di berbagai lembaga pelayanan publik. Masih sedikitnya ketertarikan lembaga pemberi insentif KIA untuk mengadakan PKS karena penawaran imbal balik yang kurang menguntungkan bisnisnya sehingga beberapa memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan kerja sama pasca penerapan *database* kependudukan secara terpusat,Dinas Dukcapil di daerah sudah tidak menyimpan data BNBA penduduk namun masih ada		2. Beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD): a. Mendorong jemput bola Dukcapil Kab/Kota ke Kalurahan/Kelurahan dan instansi/lembaga tingkat Kab/Kota. Jika kekurangan alat dan personil, Dinas PMK Dukcapil juga dapat membantu jika dibutuhkan. b. Dinas PMK Dukcapil pada tahun 2025 telah meningkatkan jemput bola sosialisasi dan aktivasi IKD ke OPD tingkat DIY dan instansi/lembaga vertikal di DIY dengan harapan agar layanan di OPD/instansi/lembaga dapat menerapkan IKD sebagai salah satu bukti identitas diri seseorang. c. Dinas PMK Dukcapil ikut serta dalam event yang mengumpulkan banyak orang yang dilaksanakan oleh Kemendagri, Kabupaten/Kota, OPD di DIY, maupun Kalurahan/Kelurahan. d. Saat ini layanan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di seluruh DIY, RS Paru Respira, RSJ Grhasia, BPJS Kesehatan, dan Bank BPD DIY telah menerima IKD sebagai salah satu bukti identitas diri seseorang untuk layanannya. Hal ini menjadi salah satu bentuk sosialisasi IKD ke masyarakat dan menjadi nilai tambah dari IKD. e. Publikasi IKD melalui media sosial, media cetak, dan sosialisasi secara langsung terus ditingkatkan.	sudah masuk dalam 5 besar persentase kepemilikan IKD tingkat provinsi se Indonesia. 2. Sosialisasi pentingnya penerapan ISO27001 ke instansi pengguna data kependudukan telah dilakukan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	beberapa instansi yang mengajukan permohonan. Sertifikasi ISO masih menjadi kendala dalam pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan karena dijadikan sebagai persyaratan sehingga beberapa perangkat daerah belum bersedia untuk mengajukan permohonan kerja sama pemanfaatan data ditambah dengan tahapan proses verifikasi di lingkungan Ditjen Dukcapil yang semakin panjang menambah waktu persetujuan pemberian hak akses sekian lama.Sertifikasi ISO masih menjadi kendala dalam pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan karena dijadikan sebagai persyaratan sehingga beberapa perangkat daerah belum bersedia untuk mengajukan permohonan kerja sama pemanfaatan data ditambah dengan tahapan proses verifikasi di lingkungan Ditjen Dukcapil yang semakin panjang menambah waktu persetujuan pemberian hak akses sekian lama.		3. Beberapa kegiatan berkaitan dengan ISO27001 : a. Dinas PMK Dukcapil DIY sudah mendapatkan ISO 27001 dari Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk akses SIAK berbasis VPN dan jaringan tertutup. b. Selalu dilakukan sosialisasi pentingnya penerapan ISO27001 kepada OPD/instansi/lembaga baik tingkat provinsi maupun Kab/Kota yang memanfaatkan data kependudukan. c. Kedepannya akan dilakukan bimbingan teknis atau semacamnya kepada Dukcapil Kab/Kota dan OPD pengguna data kependudukan	
5	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat. Komitmen yang kurang dari pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengelolaan BUMKal sehingga menghambat kemajuan BUMKal.	a. Perlu adanya payung hukum tentang BUMKAL yang mengatur dan mengklasifikasikan BUMKAL agar ke depan menjadi lokomotif ekonomi desa yang profesional dan terkemuka. b. Penguatan kapasitas SDM organsasi kemasyaakatan di tingkat Kalurahan/Kelurahan seperti LPMK, PKK, Karang Taruna, PSM dalam satu visi, satu aksi dalam penanggulangan kemiskinan. c. Membuat rencana aksi penanggulangan kemiskinan Kalurahan/Kelurahan yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dan Pemda DIY. d. Setiap Kalurahan/Kelurahan hendaknya memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang berupa *Master Plan* Kalurahan/Kelurahan yang mengacu RPJMD dan RPJPD DIY d. Perlu adanya dukungan terhadap profil desa yang terintegrasi dengan e. teknologi informasi yang datanya selalu *update*.	a. DP3AP2 DIY telah melaksanakan program KEP Desa Prima, program ini menyasar pada Perempuan kelompok rentan yang ada di Kelurahan dan Kalurahan. Program ini berfokus bukan hanya pemberdayaan Ekonomi namun juga pemberdayaan sosial dan politik perempuan. Perempuan Kelompok Rentan adalah perempuan marginal dengan kondisi antara lain : 1) Perempuan miskin 2) Perempuan kepala keluarga 3) Perempuan ex PMI (Pekerja Migran Indonesia) 4) Perempuan peyintas kekerasan 5) Perempuan dengan anggota keluarga : punya penyakit menahun dan ABH b. Pada tahun 2025 sudah berkembang menjadi 174 Kep Desa Prima 1) Bentuk pemberdayaan sosial politik: a) Pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan b) Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan c) Peningkatan pengasuhan anak 2) Bentuk pemberdayaan ekonomi a) Bantuan permodalan; b) Pelatihan teknis; c) Bantuan sarana produksi (peralatan, rumah produksi, *showroom*, kios) 3) Bantuan pemasaran (pameran, bazar, gelar potensi) c. Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2024	a. Pemberdayaan ekonomi 1) Penciptaan lapangan usaha 2) Pembukaan lapangan kerja 3) Peningkatan penghasilan b. Pemberdayaan sosial politik 1) Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan 2) Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 3) Peningkatan ketahanan keluarga c. Data rumah tangga miskin (KK) tersedia di setiap Kalurahan. Bahkan penurunan rumah tangga miskin menjadi indikator sasaran Reformasi Pemberdayaan Masyarakat. d. RPJM Kalurahan disusun berdasarkan profil potensi serta mengacu pada RPJMD Kabupaten dan RPJMD DIY. Pengusulan proposal program dan kegiatan Keistimewaan (Reformasi Kalurahan) disamping berdasarkan hasil *asesmen* juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. e. Dilakukan revitalisasi Pokja profil-profil Desa/KAlurahan baik pada tingkat Kalurahan, Kementren/Kepanewon maupun Pemerintah Daerah Kabupaten, Pokja profil-profil Desa/Kelurahan sudah melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi *prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id*

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan, telah ditetapkan rencana aksi penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan. Mulai dari tingkat Kalurahan, KApanewon/Kabupaten dan Pemerintah Daerah DIY. Setidaknya terdapat 5 (lima) kegiatan yang dilakukan : 1) Identifikasi data kemiskinan di Kalurahan; 2) Penyusunan rencana aksi/*roadmap* penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan; 3) Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; 4) Pemanfaatan tanah kalurahan untuk pemberdayaan masyarakat; dan d. Monev pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. e. Profil Desa yang dimutakirkan setiap tahun melalui *https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id* dan pemutakhiran menu data pada Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL). Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya pengelolaan data sebagai dasar pengambilan dan perumusan kebijakan kalurahan. Rincian kegiatan dalam rangka pengutan data profil kalurahan meliputi monitoring keterisian menu data pada prodeskel dan SINKAL.	
6	**Urusan Komunikasi dan Informatika**			
	Pemda DIY telah memanfaatkan berbagai kanal media sosial seperti *WhatsApp, Instagram*	a. *Pilot Project* Nasional Provinsi Cerdas: Memanfaatkan penunjukan DIY sebagai *Pilot Project* Nasional untuk	a. Sudah ditindaklanjuti dengan menyusun Pergub DIY nomor 32 tahun 2024 tentang Rencana Induk Jogja Smart province tahun 2024-2028. di dalam rencana induk tersebut memuat beragam	a. Penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan provinsi melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	(@kominfodiy), Twitter (@kominfodiy), YouTube (Kominfo DIY), dan Facebook fanspage (Kominfo DIY), serta portal ppid.jogjaprov.go.id sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Selain itu, Pemda DIY juga mengembangkan aplikasi mobile "Jogja Istimewa" yang menyediakan informasi lengkap mengenai berbagai aspek kehidupan di Yogyakarta, mulai dari budaya, wisata, layanan publik, kuliner, transportasi, hingga berbagai acara dan kegiatan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pembayaran tiket elektronik untuk Museum Sonobudoyo, yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memiliki fitur pemantauan kondisi obyek wisata secara langsung melalui kamera pengawas yang dapat diakses melalui "*https://mam.jogjaprov.go.id/*" atau aplikasi "Jogja Istimewa" Penunjukan DIY sebagai *Pilot Project* Nasional	mempercepat implementasi ekosistem provinsi cerdas melalui perencanaan dan koordinasi yang Baik. b. Program *Jogja Smart Province* hendaknya dapat menyatukan/mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di DIY yang dikelola oleh OPD. c. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi seperti *Integrated Development Management Center (IDMC)* untuk mempermudah akses data lintas OPD dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat serta meningkatkan peran PPID Utama dalam menyediakan, mengelola, dan melayani permintaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. c. Perlu dibentuk tim/unit kerja yang memantau dan menindaklanjuti setiap opini dan berita *HOAX* yang beredar dimasyarakat agar segera ada jawaban/solusi.	rencana aksi dari enam dimensi *smart province (smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart environment, dan smart society).* Dalam pelaksanaanya juga melibatkan dari kabupaten/Kota di wilayah DIY dalam bentuk program kolaborasi. Evaluasi juga dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui progres capaian dan kendala yang dihadapi b. Dalam *masterplan* JSP fase 2 telah disusun rencana pengintegrasian aplikasi yang dimiliki oleh Pemda DIY secara bertahap. Yang telah dilakukan: 1) Pengembangan portal layanan terpadu *jogjaprov.go.id* yang secara bertahap akan menyatukan seluruh layanan berbasis elektronik yang dimiliki oleh Pemda DIY. 2) Pengembangan datawarehouse dan *executive information system* yang mengintergrasikan seluruh informasi. Telah dibangun *Jogja Center* sebagai sistem informasi *exekutif* yang terintegrasi sebagai bahan pertimbanagn pimpinan dalam pengambilan keputusan. 3) Pergub arsitektur TIK Pemda DIY c. Pengembangan aplikasi peladen untuk mengintensifkan monitoring rekomendasi TIK dan penggunaan datacenter. Dilakukan pembangunan aplikasi PELADEN sebagai merupakan wadah semua layanan yang dalam mengajukan rekomendasi dan permohonan layanan TIK	antar wilayah. Sebagai contoh peningkatan literasi digital, integrasi data, portal layanan terpadu, dll b. Terlalu banyaknya jumlah aplikasi yang dikelola yang menyebabkan tingginya resource yang harus disediakan. Selain itu juga menyebabkan kesusahkan mayarakat dalam mengakses dikarenakan banyaknya aplikasi, maka dilakukan pengintegrasian aplikasi yang dimiliki oleh Pemda DIY secara bertahap c. Beragam data pemerintah yang banyak namun belum terintegrasi sehingga sulit untuk dimanfaatkan secara komprehensif maka dilakukan dilakukan pemutakhiran data yang ada. d. Melalui berbagai media yang dimiliki oleh Pemda DIY dilakukan klarifikasi berbagai berita *HOAX* dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* yang terkait

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 557/2584, membutuhkan konsistensi dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi serta layanan publik. Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi membutuhkan pendampingan bagi seluruh PPID Pembantu untuk memastikan penyediaan informasi publik yang berkualitas sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Masih terdapat kekurangan dalam integrasi antar-sistem informasi dan aplikasi yang digunakan oleh OPD, sehingga data sulit diakses secara terpusat oleh karena itu Dibutuhkan kolaborasi antar-OPD, akademisi, dan pegiat keterbukaan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Inovasi Layanan Informasi Publik memerlukan Kolaborasi antar-OPD terkait inovasi layanan informasi publik perlu ditingkatkan, termasuk strategi implementasi dan		d. Telah dibuat *aplikasi idmc.jogjaprov.go.id* yang memuat beragam jenis data yang dikelola oleh pemda DIY. Setiap tahun juga telah dilakukan pemutakhiran data sesuai dengan ketersediaan data yang ada. e. Secara berkala Diskominfo DIY melakukan klarifikasi berita *HOAX* yang beredar di masyarakat, dengan mengunggah informasi yang salah di saluran informasi yang dimiliki (media sosial dan *videotron*) kemudian disandingkan dengan berita yang terferifikasi kebenarannya. - Diskominfo DIY Secara berkala melakukan peningkatan literasi digital kepada masyarakat, baik pelajar, komunitas maupun masyarakat secara umum, tema yang diangkat pada tahun politik in adalah literasi digital kepemiluan agar masyarakat terhindar dari paparan berita bohong, ujaran kebencian dan hasutan yang dapat mengganggu stabilitas menjelang pelaksanaan pemilu. - Diskominfo DIY berkolaborasi dengan komunitas media sosial DIY dan pegiat anti *HOAX* (*mafindo*) untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan menengkal *HOAX* yang beredar di masyarakat. Diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca, menulis atau saat menyampaikan kembali informasi. Masyarakat yang semakin meningkat kemampuan literasinya akan tidak mudah	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	keberlanjutan layanan berbasis digital serta belum optimalnya pemutakhiran informasi publik, baik dalam portal maupun aplikasi layanan. Masih terbatasnya kapasitas kompetensi SDM dan Infrastruktur Teknologi yang belum sepenuhnya merata, dengan beberapa titik jaringan internet pemerintah yang belum terhubung.		terpapar berita hoax karena dapat menajamkan nalar, memperbaiki sudut pandang dan baik dalam berkomunikasi. - Diskominfo DIY melakukan sosialisasi terkait kanal aduan remi pemerintah (SP4N Lapor dan e-Lapor DIY) kepada masyarakat, pelajar-mahasiswa dan kaum difabel, agar aduan dari masyarakat langsung mendapatkan jawaban dan penyelesaian oleh pihak yang berwenang dan tidak hanya menjadi kasak-kusuk di media sosial. - Dilakukan Rakor dan Bimtek bagi admin penghubung (personil pengelola aduan di OPD) untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam pengelolaan informasi yang masuk kepada pemerintah melalui kanal aduan resmi. - Dilakukan kemitraan dengan Media Massa yang sudah tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). AMSI merupakan asosiasi media yang membangun ekosistem media siber Indonesia yang sehat, berkualitas, jurnalisme yang patuh pada kode etik, dan tunduk pada kepentingan umum. Kemitraan ini untuk mereduksi penyebaran dan reduplikasi berita hoax yang sering mengatasnamakan media siber yang diamplifikasi secara masif melalui media sosial. - Bekerjasama dengan *Influencer/Key Opinion Leader (KOL)* dalam rangka	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			mensosialisasikan (*membuzzer*) konten positif, untuk mereduksi konten-konten negatif yang beredar di masyarakat.	
7	**Kepegawaian Daerah**			
	Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang ASN pada 20 Oktober 2023 mendorong percepatan Transformasi Manajemen ASN yang lebih agile dan adaptif. Terdapat 7 (tujuh) point utama yang dituangkan dalam Undang-Undang ini yaitu transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang dibuat lebih fleksibel dan kompetitif, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Masih belum berimbangnya kebutuhan ASN dan rekrutmen ASN yang disetujui kemenpan-	a. Melaksanakan redistribusi ASN dengan memperhatikan kualifikasi jabatan dan ketersediaan SDM dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengembangan kompetensi ASN yang didukung dengan infrastruktur yang memadai; b. Responsif/adaptif terhadap perubahan regulasi kepegawaian yang sangat cepat, menyusun regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat jika diperlukan. c. Perlu meningkatan kualitas SDM tenaga teknis dan pemberian THR, jaminan kesehatan dan Jamkesos (kecelakaan kerja,Kematian,Tuinjangan Hari Tua, Pensiun) pada semua penyedia jasa perorangan yang berfungsi sebagai konsiltan perorangan, tenaga teknis perorangan di	a. Pemda DIY akan melaksanakan redistribusi ASN dengan pendekatan manajemen talenta sesuai prinsip-prinsip meritokrasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan ketersediaan SDM ASN dengan kebutuhan jabatan, serta memastikan penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi akan diperkuat untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN berbasis corporate university melalui pelatihan berbasis digital dan membangun infrastruktur yang memadai. b. BKD DIY aktif dalam penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Raperda Pokok-Pokok Kepegawaian dengan OPD/Kementerian/Lembaga terkait yaitu Biro Organisasi, Bapperida, Biro Hukum, Kanreg 1 BKN Yogyakarta, Lembaga Ombudsman DIY, serta Kanwil Kementerian Hukum DIY. c. BKD DIY telah mengadakan Penataan Non ASN dari PPPK DIY menjadi PPPK ASN dan memberikan hak-haknya sebagai ASN yang akan selesai di bulan September 2025. Pengelolaan Tenaga Alih Daya dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan Barang Dan Jasa, pemenuhan hak-haknya dikelola oleh perangkat daerah.	a. Telah dilakukan mutasi dan promosi pegawai dilingkungan pemda DIY. Awal Januari Tahun 2025 Gubernur DIY telah mengukuhkan, melantik, sekaligus mengambil sumpah jabatan bagi 771 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Pelantikan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama dilakukan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sementara, pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Kepala Sekolah dilakukan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X. pegawai. Dan saat ini masih berlangsungnya seleksi terbuka untuk JPT Madya. b. Pada bulan April tahun 2025 telah dilaksanakan Pengangakatan sebanyak 365 CPNS. Dan di tahun 2025 ini Pemda DIY berhasil menyelesaikan penataan pegawai non ASN/tenaga honorer 100% melalui pengangkatan PPPK dengan rincian, PPPK tahap I sejumlah 2361 pegawai, PPPK Tahap II sejumlah 180 pegawai dan PPPK paruh waktu sebanya 2 pegawai.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	RB berdampak pada kurangnya ASN, terlebih pada setiap tahun jumlah ASN yang memasuki pensiun selalu lebih besar daripada jumlah ASN baru (rekrutmen). Untuk antisipasi tersebut diangkat tenaga teknis sesuai kebutuhan yang bisa mendukung program pemerintah daerah.	lingkungan Pemda DIY, hal ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.		c. Seleksi terbuka pemilihan JPT Madya telah selesai dilaksanakan dan telah dilantik Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama NI Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T
8	**Urusan Pendidikan dan Pelatihan**			
	Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yaitu "Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas" dan sasaran "Meningkatnya 2024 penyelenggaraan pelatihan berbasis *smart learning*". Peningkatan kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara melalui pelatihan, pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar, serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar/Widyaiswara.	a. Pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara berjenjang. Tujuan penjenjangan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan promosi jabatan juga punya tujuan lain yaitu para ASN mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang selalu berkembang.	a. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan fungsi antara lain perumusan kebijakan dan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosial kultural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). b. Dalam upaya menjamin mutu dan meningkatkan kualitas Lembaga penyelenggaraan pelatihan, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY meraih penghargaan sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi Kategori Bintang 1 (satu) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun periode 2022-2027 dan mendapatkan Akreditasi B untuk Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II (PKN); Akreditasi A untuk Program Pelatihan	a. Dalam upaya mewujudkan tujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, yakni "Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas", serta sasaran strategis berupa "Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan berbasis smart learning pada tahun 2024", terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara pelatihan, baik dari sisi kompetensi teknis, pedagogis, maupun adaptasi terhadap teknologi pembelajaran modern. Selain itu, belum optimalnya jenjang pendidikan dan pelatihan bagi ASN telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar berupa Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK dilanjutkan dengan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Kepemimpinan Administrator (PKA); Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP); dan Pelatihan Dasar CPNS. c. Untuk mendorong pelatihan berbasis smart learning, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah menyusun kurikulum dengan metode pembelajaran jarak jauh melalui https://lms-diklat.jogjaprov.go.id serta telah dilaksanakan desk dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tentang usulan formasi jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP). d. Sebagai bentuk peningkatan kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara, tenaga pengajar/Widyaiswara dan tenaga penyelenggara pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah mengikuti Diklat TOT (*Training of Trainers)* dan Diklat TOF *(Training of Facilitator).*	Eselon IV, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk Eselon III, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II (PKN) untuk Eselon II. b. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan LAN sebagai berikut: 1) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan; 2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. c. Sedangkan untuk Pelatihan Teknis Fungsional telah diselenggarakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Dasar/Level 1, Pelatihan Pengadaan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
				Barang/Jasa Type C, dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Type B. d. Begitu pun dengan penyelenggaraan Pelatihan Internalisasi Keistimewaan juga dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pelaksana/JF Jenjang Pertama kebawah, Eselon IV/JF Jenjang Muda, dan Eselon III/JF Jenjang Madya. e. Penjenjangan pelatihan juga mendukung proses pengembangan karier dan promosi jabatan, sehingga menciptakan ASN yang profesional, kompeten, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam birokrasi modern.
9	**Urusan Persandian**			
	Persandian berperan penting dalam melindungi, mengamankan, dan menjamin keaslian dokumen atau berita pemerintah, terutama di era digital. Modernisasi pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e government)* mencakup berbagai aspek, seperti administrasi perkantoran (*e-office),* perencanaan *(e-planning),* keuangan (*ebudgeting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Namun,	a. Pengembangan kompetensi personil saat ini dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun bimtek yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun dengan pelatihan internal. b. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan siber yang berkaitan dengan perlindungan dan privasi data terutama data pribadi di dunia maya.	a. Peningkatan kapasitas SDM bidang persandian di DIY secara konsisten dilakukan Dinas Kominfo DIY melalui beberapa kegiatan antara lain pengiriman personil persandian untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh BSSN sebagai pelaksana bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian. Selain itu Pemda DIY menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Forum Komunikasi Siber dan Sandi untuk melakukan pertukaran data, informasi, dan teknologi. b. Telah dilakukan sosialisasi dan bimtek kepada OPD terkait dengan standart keamanan	a. Meningkatkan kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi. b. Bahwa dengan telah diterapkannya tandar ISO 27001:2013 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara konsisten dan berkesinambungan terhadap seluruh prosedur kegiatan Pengelolaan Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat kondisi terkait

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	penggunaan teknologi informasi juga menghadirkan risiko seperti penyadapan, peretasan, dan ancaman lainnya, sehingga pengelolaan persandian menjadi sangat vital. Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi saat ini mengharuskan peningkatan kemampuan personel dalam menguasai teknologi untuk mengantisipasi potensi celah keamanan yang mungkin muncul. Pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan informasi masih belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak. Seiring dengan kemajuan teknologi, pengamanan informasi memerlukan peningkatan sarana dan prasarana guna mengoptimalkan perlindungan terhadap teknologi informasi.	c. Melakukan optimalisasi perangkat yang ada dan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang bersif.	informasi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan bimtek tersebut dapat meminimalisir terhadap serangan keamanan informasi. c. Telah melakukan optimalisasi perangkat yang ada melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah. Sebagai contoh peningkatan literasi digital, integrasi data, portal layanan terpadu, dll	Kurangnya *Security Awareness* dari para pemangku kepentingan dan pelaksana di lapangan sehingga menimbulkan celah kerawanan pada informasi yang ada di Pemerintah Daerah, maka dilakukan kegiatan berupa sosialisasi terkait keamanan informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah. c. Penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan provinsi melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah. Sebagai contoh peningkatan literasi digital, integrasi data, portal layanan terpadu, dll
B	**PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**			
1	**Urusan Kerjasama**			
	a. Kerjasama dengan Pusat			
	Pada tahun 2024 Pemda DIY telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa Nota Kesepakatan sebanyak 17 (tujuh belas)	a. Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh	a. Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DIY dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk naskah kerja sama yang sudah habis jangka waktunya telah	a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan untuk mereview kemanfaatan kerja sama yang dilakukan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	naskah sinergi yang meliputi 8 (delapan) bidang yaitu bidang pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, trantibumlinmas, komunikasi &informatika, sosial, koperasi & UMKM dan lingkungan hidup & kehutanan. Adapun tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah disepakati telah diterbitkan naskah rencana kerja sebanyak 14 (empat belas) naskahyang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Trantibumlinmas, Sumber Daya Manusia, Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Tata Ruang/Pertanahan.	pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kerja sama yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan.	diperbaharui. Sedangkan naskah yang masih berlaku telah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Secara Umum hasil pemantauan dan evaluasi atas kerja sama yang dilakukan adalah berjalan dengan baik.	
	b. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah			
	Kerja Sama Antar-Daerah yang telah dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2024 yaitu 5 (lima) Kesepakatan Bersama dan 7 (tujuh) Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Anggota Fordasi	b. Pemerintah daerah perlu penambahan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi bagi perangkat daerah di Kabupaten/kota dan DIY.	b. Sosialisasi untuk peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah baik di tingkat DIY/Kabupaten/Kota selama ini dilakukan ketika Biro Tata Pemerintahan menyelenggarakan rapat fasilitasi naskah kerja sama. Biro Tata Pemerintahan menyampaikan sosialisasi terkait regulasi yang mendasari pelaksanaan kerja sama.	b. Peningkatan kapasitas SDM DIY/Kabupaten/Kota telah dilaksanakan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	(Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya). Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah DaerahKabupaten Subang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
	c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga			
	Pada tahun 2024 Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 16 (enam belas) Kesepakatan Bersama dan 6 (enam) Perjanjian Kerja Sama. Dan pada tahun 2024 Pemda DIY telah menerbitkan perjanjian kerja sama dengan	a. Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kerja sama yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan.	a. Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DIY dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk naskah kerja sama yang sudah habis jangka waktunya telah diperbaharui. Sedangkan naskah yang masih berlaku telah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Secara Umum hasil pemantauan dan evaluasi atas kerja sama yang dilakukan adalah berjalan dengan baik.	a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan untuk mereview kemanfaatan kerja sama yang dilakukan. b. Peningkatan kapasitas SDM DIY/Kabupaten/Kota telah dilaksanakan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	pihak ketiga/swasta sebanyak 6 (enam) naskah kerja sama.	b. Pemerintah daerah perlu penambahan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi bagi perangkat daerah di Kabupaten/kota dan DIY. c. Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah baik di tingkat DIY/Kabupaten/kota sehingga perlu alokasi tambahan penganggaran c. untuk melaksanakan sosialisasi.	b. Sosialisasi untuk peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah baik di tingkat DIY/Kabupaten/Kota selama ini dilakukan ketika Biro Tata Pemerintahan menyelenggarakan rapat fasilitasi naskah kerja sama. Biro Tata Pemerintahan menyampaikan sosialisasi terkait regulasi yang mendasari pelaksanaan kerja sama. c. Pada hari Rabu,tanggal 17 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran telah dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi kerjasama bidang pariwisata antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul dengan pendampingan dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Objek dan ruang lingkung kerjasama ini meliputi 2 aspek yaitu pengembangan kepariwisataan kawasan selatan DIY dan pengembangan destinasi, kelembagaan, usaha pariwisata, pemasaran dan ekonomi kreatif. d. Pada setiap kegiatan fasilitasi kerja sama daerah yang dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang melibatkan OPD baik dari Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota selalu disampaikan regulasi kerja sama daerah yang digunakan mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 sampai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023.	
2	**Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Rapat koordinasi Forkopimda diakselerasi melalui pelaksanaan program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial guna mewujudkan situasi kondusif wilayah DIY Jelang Idul Fitri 2024, Deklarasi Pemilu Damai 2024, dan Natal 2024. Rapat koordinasi Kominda juga diselenggarakan sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan stabilitas wilayah. Forkopimda merupakan sebuah forum komunikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Pembentukan forkopimda diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 dan dibentuk setiap satu tahun sekali. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antar-unsur forkopimda, mengingat belum rutinnya penyelenggaraan rapat koordinasi Forkopimda,	Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, danketentraman hendaknya dilakukan setiap tahun dan pencapaian kesepakatan agenda program dan kegiatan, khususnya beberapatindakan untuk pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.	- Peningkatan koordinasi di bidang keamanan, ketertiban, dan ketentraman telah dilaksanakan secara rutin dalam rangka pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui optimalisasi FKDM, Raker tim Penanganan Konflik Sosial, serta *Update* Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik yang dikoordinasikan secara langsung oleh Badan Kesbangpol DIY. - Optimalisasi aplikasi *Sidasiscam* (sistem informasi update data potensi konflik berbasis kecamatan) yang berfungsi untuk menyampaikan update data potensi konflik di wilayah DIY secara real time untuk menjadi bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan yang cepat, efektif dan tepat sasaran.	Adanya rekomendasi yang di terbitkan oleh forum-forum kemitraan dan beberapa kelompok kerja yang berkolaborasi dengan Badan Kesbangpol DIY, seperti FPK, FKUB, FKDM, Tim Kerja Penanganan Konflik Sosial, Tim Kerja Penanganan Orang Asing, Tim Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dll.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	sehingga informasi aktual mengenai masalah-masalah di daerah kurang cepat dalam menemukan penyelesaiannya.			
3	**Pembinaan Batas Daerah**			
	a. Penetapan batas wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri No 19 Tahun 2006. Kegiatan yang dilakukan adalah memelihara batas-batas kawasan, memperjelas batas kawasan, dan kerjasama daerah antar kawasan. b. Perhatian pemerintah daerah DI. Yogyakarta untuk membangun kawasan desa dalam wilayah perbatasan dengan propinsi lainnya, harus menjadi perhatian khusus. Kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur pembangunan banyak ada di kawasan perbatasan. Tentu saja prioritas pembangunan desa kawasan	a. Tata batas kesepakatan antar daerah penting diupayakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan tata batas daerah, khususnya untuk pemerintahan desa yang berbatasan dan kepentingan penduduknya. Pemerintah daerah perlu mempertegas batas daerah dan mengimplementasikannya pada peta geospasial desa untuk kepentingan pemerintah desa yang berbatasan. b. Belum terpenuhinya fasilitas dasar dan infrastruktur yang memadahi di daerah perbatasan	**a. Tindak Lanjut Batas Daerah:** Dalam proses dilaksanakan penegasan batas daerah berupa pendetailan garis batas daerah DIY yang terdiri dari 14 segmen atau penggalan batas yakni 7 (tujuh) segmen batas daerah antar provinsi dan 7 (tujuh) segmen batas daerah antar kabupaten/kota. Kegiatan pendetailan garis batas dalam skala peta geospasial yang lebih besar (1: 5.000) telah dilaksanakan mulai tahun 2019 dan masih berlanjut sampai dengan ditargetkan keseluruhan segmen selesai pada tahun 2027. Hasil dari pendetailan garis batas menjadi materi usulan revisi Permendagri yang menetapkan batas Daerah DIY antara lain: Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah; Permendagri Nomor 70 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo; Permendagri Nomor 71 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul; Permendagri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman; Permendagri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman; Permendagri Nomor 61 Tahun 2009 tentang Garis Batas daerah Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman; Permendagri Nomor 15	**a. Permasalahan yang diselesaikan Batas Daerah:** Penegasan garis batas berupa pendetailan garis batas dengan skala peta geospasial yang besar merupakan jawaban atas permasalahan penarikan batas daerah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Penarikan garis batas DIY saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan skala lampiran peta yang berbeda-beda yaitu 1:40.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:18.000. Dengan skala peta yang kurang memadai tersebut, batas wilayah antar daerah bisa jadi tidak pasti atau tumpang tindih. Apabila tidak diantispasi secara serius bisa berdampak pada: perselisihan atau konflik antara pemerintah daerah, masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya; pengelolaan administrasi pemerintahan, seperti perizinan, pendataan penduduk, dan pelayanan publik bisa terganggu karena ketidakjelasan batas wilayah; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam atau lahan menjadi tidak optimal dan rawan disalahgunakan,

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	perbatasan menjadi penting, khususnya untuk menyongsong rencana pembangunan jangka panjang hingga 2038 yang melakukan konsolidasi sumberdaya kawasan pedesaan. c. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2025 telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelarasan Pembangunan Wilayah		Tahun 2012 tentang Garis Batas Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul; dan Permendagri 83 Tahun 2013 tentang Garis Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman. Dalam mendukung pendetailan garis batas daerah DIY yang akurat dan presisi, dilaksanakan penandaan secara geodetik titik koordinat posisi pilar batas pada masing-masing segmen. **b. Tindak Lanjut Batas Kalurahan/Kelurahan:** Telah terlembaga berbagai kegiatan rutin pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegasan Kalurahan/Kelurahan oleh kabupaten/kota antara lain: - Sosialisasi menghadirkan pejabat Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka penyelarasan kebijakan pusat serta penyamaan persepsi setiap tahapan penegasan batas Kalurahan/Kelurahan yang dimulai dari pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas secara *kartometris* dan/atau *terestis*, pemasangan dan pengukuran pilar batas, penyusunan data geospasial dan pembuatan peta batas, verifikasi teknis BIG, penyusunan Raperpub/Raperwal, verifikasi yuridis Kemendagri, harmonisasi Kemenkumham, dan pengesahan Perbup/Perwal; - Asistensi teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi teknis	karena batas wilayah yang tidak jelas bisa membuat klaim hak atas sumber daya menjadi ambigu; perencanaan pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, akan sulit dilakukan secara efektif tanpa kejelasan batas wilayah; serta potensi munculnya masalah hukum akibat sengketa lahan atau wilayah yang tidak terperinci, baik di tingkat pemerintahan maupun di antara masyarakat. **b. Permasalahan yang diselesaikan Batas Kalurahan/Kelurahan:** Dampak dukungan kegiatan berhasil mengakselerasi penyelesaian batas Kalurahan/Kelurahan oleh kabupaten/kota: - Kabupaten Kulon Progo telah menyelesaikan penegasan batas sebanyak 32 dari 87 Kalurahan dan 1 dari 1 Kelurahan, dengan 19 batas Kalurahan/Kelurahan telah terverifikasi secara teknis; - Kabupaten Bantul telah menyelesaikan 10 dari 88 batas Kalurahan, dengan 10 batas Kalurahan tersebut telah terverifikasi secara teknis dan yuridis, serta sudah disahkan melalui Peraturan Bupati;

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2045 adalah sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengoordinasian dan penyelarasan kegiatan pembangunan wilayah perbatasan di DIY.		pelaksana penegasan batas Kalurahan/Kelurahan di kabupaten/kota; - Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan atau sesuai kebutuhan; - Supervisi berupa pendampingan langsung pelaksanaan penegasan batas Kalurahan/Kelurahan oleh kabupaten/kota; - Fasilitasi verifikasi teknis dan yuridis hasil penegasan batas Kalurahan/Kelurahan di BIG dan Kemendagri. Verifikasi teknis penting untuk memastikan kualitas dan keandalan data geospasial, serta kesesuaiannya dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara verifikasi yuridis harus ditempuh untuk memastikan rancangan peraturan bupati tentang peta batas Kalurahan mencakup informasi yang lengkap dan komprehensif serta sesuai dengan ketentuan Permendagri 45/2016; dan - Penyampaian laporan capaian penegasan batas Kalurahan kepada Menteri Dalam Negeri secara periodik setiap semester I dan II. c. Sedang dikembangkan Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) yang dikembangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Melalui aplikasi SIPR, batas wilayah setiap Kalurahan dapat diketahui titik lokasinya secara akurat. Sehingga menjadi	- Kabupaten Gunungkidul telah menyelesaikan 80 dari 144 batas Kalurahan, dengan 54 batas Kalurahan telah terverifikasi secara teknis; - Kabupaten Sleman telah menyelesaikan 80 dari 86 batas Kalurahan, dengan 61 batas Kalurahan telah lolos verifikasi teknis dan yuridis; dan - Kota Yogyakarta telah menyelesaikan seluruh batas Kelurahan yang berjumlah 45 Kelurahan, dengan 27 Kelurahan sudah telah terverifikasi secara teknis. c. Setiap Kalurahan telah menetapkan batas wilayahnya masih-masing, Batas wilayah setiap Kalurahan juga diinput melalui SINKAL d. Belum tercapainya kesepakatan batas daerah untuk beberapa kapanewon pada provinsi DIY dan Jawa Tengah, yang masih diusahakan tercapainya kesepakatan melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah, sesuai dengan Permendagri mengenai penetapan batas wilayah DIY dan Jawa Tengah. e. Belum tercapainya kesepakatan batas daerah untuk beberapa kapanewon pada provinsi DIY dan Jawa Tengah, yang masih diusahakan tercapainya

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			data dukung dalam pengambilan kebijakan Kalurahan ; d. Pemda DIY melalui Biro Tapem sudah melakukan koordinasi terkait dengan wilayah perbatasan baik secara fisik penanda batas maupun koordinasi pembangunannya terutama dengan wilayah-wilayah yang berbatasan antar provinsi yang meliputi 18 kapanewon. Koordinasi tersebut memunculkan identifikasi sub-sub urusan yang memang perlu ditindaklanjuti dalam kebijakan, contoh urusan sarpras seperti pembangunan jalan yang dikoordinasikan pembangunannya antara DIY dan Jateng melalui masing-masing kabupaten. Koordinasi tersebut sudah berdasarkan pada Permendagri, sehingga sudah berbagi peran antar masing-masing pemerintahan. adapun, beberapa segmen perbatasan yang belum terselesaikan seperti perbatasan Temon dengan Purworejo sedang dalam proses pembahasan dan kesepakatan. e. Saat ini Pemda DIY melalui Biro Tapem sedang melakukan survei wilayah untuk pembangunan penanda perbatasan di pintu-pintu gerbang antar provinsi.	kesepakatan melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah, sesuai dengan Permendagri mengenai penetapan batas wilayah DIY dan Jawa Tengah.
4	**Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan**			
	1) Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) DIY; 2) Palang Merah Indonesia (PMI) DIY;	a. Munculnya tantangan peningkatan kasus ODHA pada difabel, orang dengan gangguan jiwa, ibu rumah	1. Beberapa upaya dalam menyikapi meningkatnya kasus ODHA pada penyandang *difable*, gangguan jiwa, dan ibu rumah tangga antara lain :	1. Kasus ODHA pada *difabel*, Orang dengan Gangguan Jiwa, dan Ibu Rumah Tangga. Penguatan sektor kesehatan yang didukung oleh lintas sektor non

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	3) Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) DIY; 4) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY; 5) Komisi Informasi DIY; 6) Layanan Bus Trans Jogja	tangga perlu disikapi dengan bijakmdan langkah taktis oleh KPAD DIY agar mampu menekan lajumpenularan dan penambahan ODHA di DIY. Oleh karena itu perlu program peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi warga/kelompok masyarakat. b. Konsep Mitigasi Bencana Berbasis masyarakat yang terukur yang,dimiliki oleh Palang Merah Indonesia seyogyanya menjadi acuan dalam pendidikan kebencanaan berbasis sekolah maupun masyarakat guna membangun masyarakat tanggap dan tangguh bencana. c. Dengan semakin rumitnya transportasi di DIY dan guna meningkatkan layanan transportasi maka diperlukan Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang khusus bergerak dibidang transportasi dan perlu adanya kajian yang komprehensip agar layanan umum menjadi lebih efektif dan efisien.	a. Upaya penemuan kasus melalui tes HIV baik secara statis maupun mobile pada populasi kunci dan populasi berisiko tinggi, kegiatan notifikasi; b. Upaya pengobatan melalui pengembangan /perluasan layanan yang mampu melakukan tes dan pengobatan, memastikan ketersediaan ARV pasangan dan penyediaan logistik tes; c. Percepatan layanan pemeriksaan *Viral Load HIV* sebagai evaluasi pengobatan bagi ODHIV melalui penguatan jejaring layanan dan penambahan laboratorium pemeriksa VL; d. Pencegahan HIV pada populasi berisiko melalui program *Pre Exposure Profilaksis*; e. Program Puskesmas *Extra Hour* yang dapat memberikan pelayanan di luar jam layanan; f. Sosialisasi HIV AIDS di masyarakat dan universitas; g. Jejaring kerjasama dengan LSM; h. Peningkatan pengetahuan petugas melalui orientasi atau pun mentoring klinis i. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan penanggulangan HIV AIDS melalui Penguatan jejaring dengan PMI dalam Pencegahan Infeksi Penyakit Melalui Transfusi Darah serta Penguatan Jejaring dengan swasta melalui Program *Public Privat Community Partnership Kasus ODHA* pada *difabel*, Orang dengan Gangguan Jiwa, dan Ibu Rumah Tangga	kesehatan melalui dalam peraturan terkait GERMAS dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit, serta upaya kolaborasi lintas sektor lainnya baik dengan sektor pendidikan termasuk perguruan tinggi dan tempat kerja serta bebasis kalurahan/kelurahan. 2. Literasi melalui berbagai media terutama penyiaran untuk mitigasi ODHA terhadap *difabel*, ODGJ dan IRT lebih dimasksimalkan sehingga efektif dan efisien penyampai komunikasi, sosialisasi dan kampanye mitigasi ODHA pada kelompok rentan tersebut. 3. Dengan memastikan keterbukaan informasi dari pemerintah maupun lembaga kesehatan mengenai data epidemiologi, program pencegahan, dan layanan terkait HIV/AIDS, masyarakat dapat memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil langkah pencegahan yang tepat. 4. BPBD DIY sudah membentuk 333 Sekolah Aman Bencana (SPAB) di seluruh DIY

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY memiliki tanggung jawab moral untuk menekan laju ODHA pada *difabel*, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) maupun ibu rumah tangga (IRT) melalui mitigasi yang tepat. Salah satu langkah yang ingin ditempuh melalui sosialisasi *masif* ke masyarakat dengan sarana media penyiaran. Hal tersebut mengingat KPID DIY memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada lembaga penyiaran. Sehingga pemanfaatan penyiaran untuk mitigasi ODHA terhadap *difabel*, ODGJ dan IRT bisa efektif dan efisien. Misalnya saja dengan produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan lainnya. Daya jangkau penyiaran yang mampu menembus lapisan masyarakat hingga tataran paling bawah sangat efektif sebagai sarana penyampai komunikasi, sosialisasi dan kampanye mitigasi ODHA pada kelompok rentan tersebut. 3. Komisi Informasi berperan dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi terkait HIV/AIDS, termasuk pencegahan, pengobatan, dan stigma yang terkait. Penyebaran informasi yang benar dapat membantu mengurangi ketidak-pahaman dan kesalahpahaman tentang HIV/AIDS. Komisi Informasi dapat mendorong Badan Publik dan lembaga terkait untuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan data dan kebijakan. Secara	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			umum, peran utama Komisi Informasi adalah memastikan transparansi dan akses informasi yang benar, yang dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencegahan peningkatan kasus HIV/AIDS di masyarakat. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY bersama Palang Merah Indonesia (PMI) DIY telah melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan satuan pendidikan terhadap bencana. Bentuk kegiatan kolaboratif yang dilaksanakan meliputi pembentukan dan pelatihan Tim Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, BPBD berperan dalam pemberian edukasi mengenai mitigasi bencana, sedangkan PMI melaksanakan pelatihan keterampilan pertolongan pertama *(First Aid)*. 5. Pengelolaan transportasi di DIY saat ini sudah dilakukan oleh salah satu BUMD DIY, yaitu PT. Anindya Mitra Internasional berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja dan SK Gubernur nomor 527/KEP/2024 tentang Penugasan Pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja kepada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional	
C	**PROGRAM STRATEGIS**			
1	***Jogja Smart Province***			
	Pada tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian	a. Memperluas akses infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan.	a. Pemerintah Daerah DIY terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah, termasuk kawasan selatan yang	a. Terfasilitasinya wilayah pantai selatan menggunakan layanan fiber optik, kantor instansi Pemda DIY terlayanai internet terutama kantor SAR Istimewa dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Komunikasi dan Digital) meluncurkan program "Gerakan Menuju Provinsi Cerdas (*Smart Province)"* bersama berbagai kementerian terkait. Program ini bertujuan untuk mendukung penyusunan masterplan provinsi cerdas guna mengintegrasikan sumber daya secara inovatif dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus utama program ini adalah pada enam dimensi: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Provinsi DIY* dan Jawa Barat dipilih berdasarkan kesiapan *egovernment*, kemampuan finansial daerah, dan komitmen kepala daerah terhadap implementasi *Smart Province*. Pada tahun 2024, pelaksanaan program "Gerakan Menuju Provinsi Cerdas (*Smart Province)*" telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya di dua provinsi percontohan, yaitu DIY dan Jawa Barat. Penyusunan masterplan	b. Literasi Digital menyelenggarakan program pelatihan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman teknologi. c. Penyusunan *master plan* JSP fase 2 dengan konsep JSP 2.0: Harmonisasi Manusia dan Teknologi. Dengan didasari Nota Kesepakatan antara Dirjen Aptika Kementerian Kominfo RI dengan Pemda DIY Nomor 557/2584 yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2024, dilakukan kerjasama terkait Implementasi Gerakan Menuju Provinsi Cerdas serta penandatangan dukungan pelaksanaan JSP dari pemerintah kabupaten dan Kota se DIY yang melibatkan Kota-Kab yang memunculkan harapan berbeda.	mencakup Kawasan pantai selatan Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo. Kawasan pantai selatan memiliki peran strategis sebagai kawasan pertumbuhan baru, terutama dalam sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan *backbone fiber optik* pantai selatan sebagai *bacbone* konektivitas digital guna mendukung layanan internet instansi Pemda DIY, menyediakan akses *Wi-Fi* gratis di objek wisata, memperkuat jaringan intra pemerintah, dan mendorong optimalisasi internet oleh Pemkab serta percepatan pemerataan akses internet di wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh layanan ISP. Telah dilakukan pembangunan layanan internet dan *free Wi-Fi* untuk instansi Pemda DIY yang berada di wilayah selatan, menyediakan fasilitasi *free WIFI* obyek wisata untuk mendukung percepatan keuangan dan promosi wisata digital, free wifi UMKM serta berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan koneksi internet. Dinas Kominfo DIY telah memfasilitasi *WIFI* Gratis sebanyak 789 lokasi yang menjangkau semua kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Terfasilitasi jaringan internet 438 kantor kalurahan/kelurahan yaitu dengan cara bekerjasama dengan Diskominfo kab/kota dan menghimbau dari kantor kalurahan untuk jaringan internet dapat diturunkan dan digunakan sampai ke pedukuhan.	adanya jalur alternatif (*backup*) untuk jaringan intra pemerintah yang dapat meminimalisir risiko gangguan layanan pemerintahan saat terjadi kerusakan jalur utama serta terfasilitasinya 438 kantor kalurahan/kelurahan dengan jaringan internet. b. Melalui kegiatan peningkatan literasi digital diharapan pemahaman teknologi masyarakat semakin luas, menjadi lebih sadar dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif, aman, dan efektif. Banyaknya pelatihan dan ketersediaan materi pembelajaran dan pelatihan digital secara langsung maupun *daring*, dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap teknologi, inovasi digital dan cerdas dalam menyikapi berbagai informasi. Khusus *pelatihan e-Business* yang menyasar UMKM, dapat meningkatkan kemampuan SDM/pelaku UMKM dalam memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui *marketplace, e-commerce* dan alat bantu transaksi digital. c. Dalam pelaksanaan rencana induk JSP selalu melibatkan kabupaten/Kota di wilayah DIY dan dilakukan evaluasi secara rutin setiap tahun

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	provinsi cerdas yang mencakup enam dimensi utama telah selesai dengan melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga sektor swasta. Proses ini menghasilkan rencana strategis yang komprehensif dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing provinsi.		b. Dinas Kominfo DIY secara berkala melakukan peningkatan literasi digital kepada masyarakat, baik pelajar, komunitas maupun masyarakat secara umum terkait dengan pemahaman teknologi. Pelatihan yang telah dilakukan antara lain: - Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kepada Masyarakat (GESI/*Difabel*, pelajar/mahasiswa) : Pemerintah Daerah DIY dalam pengelolaan Penanganan pengaduan Publik masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain kurangnya sosialisasi terkait SP4N-Lapor/ E-Lapor sehingga masyarakat lebih banyak menyampaikan aduan melalui media sosial selain itu penggunaan aplikasi SP4N-Lapor/E-lapor belum banyak diketahui oleh masyarakat - Literasi Digital Jogja Bermedsos : Banyaknya berita-berita *hoax* di DIY diperlukan adanya literasi Digital Jogja Bermedsos kepada masyarakat agar terhindar dari berita bohong dan dapat memanfaatkan media sosial dengan hal yang positif - Pelatihan Pembuatan Konten : Pemanfaatan media sosial yang baik dinilai dapat memberikan peluang ekonomi bagi penggunanya. Salah satu upaya dalam memanfaatkan media sosial adalah untuk memasarkan bisnis dan memperluas jaringan ke konsumen. Strategi pemasaran melalui media sosial menjadi salah satu	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			strategi yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan, terutama pelaku bisnis. Peluang ekonomi dalam penggunaan media sosial terutama cara dalam pembuatan konten dalam stategi marketing melalui media sosial menjadi tema pelatihan yang sangat baik bagi masyarakat, terutama generasi muda pegiat media sosial. c. Pelatihan *e-Business* : Pelatihan *e bussines* dapat memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM, mengembangkan produknya dengan sumber pengetahuan yang lebih luas dan dapat mengurangi angka kemiskinan di DIY. d. Menyusun Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Induk *Jogja Smart province* tahun 2024-2028. di dalam rencana induk tersebut memuat beragam rencana aksi dari enam dimensi *smart province (smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart environment, dan smart society)*. Dalam pelaksanaanya juga melibatkan dari kabupaten/Kota di wilayah DIY dalam bentuk program kolaborasi. Evaluasi juga dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui progres capaian dan kendala yang dihadapi.	
2	**Reformasi Birokrasi**			
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak 2023 dilaksanakan melalui double track berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023	a. Penerapan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk merespon	a. Pemerintah Daerah DIY terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain dengan menyusun rencana aksi tindaklanjut tahun 2025 untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi hasil	a. Perlunya pelaksanaan reformasi birokrasi hingga sampai pada wilayah pemerintahan terkecil yaitu kalurahan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan dua jalur (*double track)* dimaksudkan agar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah kategori A (A- dengan catatan) dengan nilai 88,15 atau Capaian Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target tujuan RPJMD Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah berupaya dan berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta memberikan dampak	penyederhanaan birokrasi. b. Mendorong pelaksanaan Reformasi BirokrasiTematik (Tematik Pengentasan kemiskinan, Tematik Investasi, Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Tematik Prioritas Presiden) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder-stakeholder* terkait serta perlu dirumuskan langkah- langkah inovatif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui upaya pembinaan unit layanan. c. Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi yang tidak d. sekedar perbaikan tata kelola pemerintahan namun mampu berkontribusi pada hasil pembangunan. e.	evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2024. b. Pemda DIY pasca penyederhanaan birokrasi telah menyesuaikan sistem kerja baru untuk lebih mengoptimalkan kinerja individu demi teruwujudnya kinerja instansi perangkat daerah yang memungkinkan untuk terciptanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pemda DIY yang terukur dan akuntabel. c. Pembangunan Zona Integritas, dengan mendorong Unit Kerja yang belum melaksanakan Pencanangan Zona Integritas untuk Segera Melaksanakan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas. d. Pemerintah Daerah DIY terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan meningkatkan kualitas koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder-stakeholder* terkait. Pemerintah Daerah DIY di tahun 2025 telah melaksanakan Rapat Kerja Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah DIY sebagai upaya penguatan koordinasi dan komitmen bersama dari Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah DIY. Dari rapat kerja tim tersebut telah disepakati beberapa beberapa hal dan langkah-langkah strategis terutama untuk menindaklanjuti perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik di tahun 2025. e. Pemda DIY sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik, seperti pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh lintas OPD yang dikoordinasikan oleh Bapperida DIY (bidang sosbud) sebagai salah satu upaya untuk	b. Pencegahan Korupsi. c. Perlunya pelaksanaan reformasi birokrasi hingga sampai pada wilayah pemerintahan terkecil yaitu kalurahan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. e. Perbaikan Tata Kelola dan Pengendalian Internal Unit Kerja. f. Perubahan Budaya Kerja g. Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	nyata pada pencapaian program pembangunan.		memberikan ungkitan nyata pada sektor pemberdayaan masyarakat yang ultimate goal nya adalah meminimalisir angka kemiskinan terutama di pedesaan. Bahkan secara intens Pemda DIY telah meluncurkan kegiatan utama pengentasan kemiskinan tersebut dalam Reformasi Kalurahan yang menyasar secara serentak pada 392 kalurahan. f. Mendorong Unit Kerja Yang Telah Melaksanakan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk Diajukan Dalam Penialain Kepada Tim KemenPANRB. g. Pemerintah Daerah DIY di tahun 2025 telah berupaya meningkatkan kualitas pembinaan kepada Unit Kerja dengan telah melakukan penguatan koordinasi dan peran dari Perangkat Daerah Koordinator 6 Area Perubahan Zona Integritas, serta melakukan pendampingan berkala dan intensif terhadap Unit-Unit Kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK maupun WBBM. h. Melaksanakan Pendampingan Terhadap Unit Kerja yang Sedang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. i. Pemerintah Daerah DIY di tahun 2025 telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi yang berkontribusi pada hasil pembangunan dengan menindaklanjuti arah kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2025. Adapun tindaklanjut yang telah dilakukan antara lain :	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			1) Melakukan reviu dan pembaharuan terhadap susunan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah DIY terutama untuk mengakomodir perubahan kebijakan dan tema prioritas/strategis pada Reformasi Birokrasi Tematik. 2) Menyusun Rencana Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi Tahun 2025 dengan fokus sebagai penguatan dan tindak lanjut atas catatan serta rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024. 3) Menyusun Rencana Aksi 3 RB Tematik baru di tahun 2025 yaitu Mendorong Hilirisasi, Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. j. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Seluruh Unit Kerja.	
3	**Penataan Kawasan Sumbu Filosofi**			
	Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan axis yang menghubungkan Panggung Krapyak – Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat – Tugu Pal Putih, dan dibatasi garis sungai di sebelah timur (Sungai Code) dan barat (Sungai Winongo) Kraton, Jalan Lingkar Selatan di selatan, dan Jalan RW	Dinas Perhubungan DIY memfasilitasi restrukturisasi kelembagaan pengemudi becak kayuh dari model operasi individual menjadi koperasi. Transformasi ini bertujuan untuk mempermudah distribusi hibah becak kayuh bertenaga alternatif (listrik) secara bertahap. Selain itu hingga tahun 2024 Dinas Perhubungan DIY telah menghibahkan sebanyak 90 unit	a. Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan bersama Dinas Koperasi telah membentuk 3 Koperasi sebagai salah satu upaya untuk menjalankan program hibah kepada pengemudi becak, telah diberikan sebanyak 40 unit kepada 3 koperasi dan 50 unit kepada forum pemerhati kendaraan transportasi tradisional pada tahun 2024. di tahun 2025 belum dapat teralisasi kembali untuk hibah becak dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan instruksi presiden. Tahun 2026 dianggarkan kurang lebih 40 unit melalui dana Keistimewaan.	Permasalahan yang sebelumnya menjadi perhatian bersama berhasil diselesaikan melalui forum lalu lintas, di mana berbagai pihak terkait seperti dinas perhubungan, kepolisian, dan unsur masyarakat duduk bersama untuk mencari solusi. Dalam forum tersebut, sejumlah isu penting seperti pengaturan arus lalu lintas, penambahan rambu, serta penertiban parkir liar dibahas secara komprehensif dan menghasilkan kesepakatan yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Pendekatan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Monginsidi di utara. Sumbu Filosofi mengusung konsep daur kehidupan manusia dari lahir, dewasa dan kembali kepada sang pencipta, dilambangkan dengan 144 atribut-atribut di sepanjang Sumbu Filosofi. Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki nilai *Outstanding Universal Value (OUV)* kriteria (ii) dan kriteria (iii). Kriteria (ii) yaitu "Untuk menunjukkan pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting, dalam rentang waktu tertentu atau dalam wilayah budaya dunia, pada perkembangan arsitektur atau teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau desain lanskap", sedangkan kriteria (iii) yaitu"Untuk memberikan kesaksian yang unik atau setidaknya luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradaban yang hidup atau yang telah menghilang".	becak kayuh bertenaga alternatif (Listrik) yang diberikan kepada 3 (tiga) koperasi.		kolaboratif ini membuktikan bahwa forum lalu lintas mampu menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan persoalan transportasi secara partisipatif dan berkelanjutan.
		a. Forum lalu lintas perlu diperkuat sebagai wadah koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pengendalian lalu lintas. Hal ini penting mengingat kawasan sumbu filosofi merupakan kawasan strategis yang bersifat lintas sektoral serta memiliki berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penertiban parkir liar harus diselesaikan secara bersama-sama antara Kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, serta pemangku kepentingan lainnya.	b. Terkait dengan Kegiatan Forum Lalu Lintas Dinas Perhubungan DIY, di tahun 2024 telah dilaksananakan di beberapa lokasi, antara lain : 1) Terlaksananya rapat Forum LLAJ MRLL di Kawasan Patuk-Mangunan-Imogiri di bulan April 2024; 2) Terlaksananya rapat Forum Forum LLAJ Penerapan MRLL Sistem Satu Arah Khiusus Bus Besar Rite Imogiri - Mangunan - Terong - Patuk di bulan Mei 2024; 3) Terlaksananya rapat Forum LLAJ tentang evaluasi penerapan SSA di Kawasan Patuk - Mangunan - Imogiri di bulan Juni 2024 4) Terlaksananya rapat Forum LLAJ tentang evaluasi penutupan *separator* dan *median* di *Ring Road* DIY di bulan Juni 2024 5) Terlaksananya *Trial* Manajemen Lalu Lintas pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sentolo - Brosot, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta" di bulan Juni 2024 6) Terlaksananya rapat forum perizinan pertashop di bulan Juli 2024 7) Terlaksananya rapat forum penutupan *sepataror ring road* utara di bulan Juli 2024	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		b. Penataan sumbu filosofi hendaknya tidak menelantarkan hak-hak masyarakat yang mengais rejeki maupun tinggal di kawasan tersebut. c. Penataan parkir di kawasan Malioboro baik parkir mobil, motor,andong, bentor dan titik penurunan penumpang bagi pengguna jasa transportasi *online* agar tidak menimbulkan kemacetan. d. Perluasan atau penambahan kapasitas parkir di tempat parkir yang telah tersedia secara vertikal. e. Segmentasi perdagangan di kawasan sumbu filosofi agar antara PKL dan pengusaha tidak berdagang dengan barang dalam satu kualitas.	8) Terlaksananya rapat forum rencana Pemasangan Perlengkapan Jalan Nanggulan - Tegalsari di bulan September 2024 9) Terlaksananya rapat Forum Lalu Lintas terkait Simpang Denggung (SCH) dan Simpang 4 Mirota Godean di bulan Oktober 2024 10) Terlaksananya rapat Forum rencana implementasi sistem MRLL dengan bantuan *Artificial Intelligence dan Big Data Analytics* di bulan Oktober 2024 11) Terlaksananya rapat forum LLAJ Simpang Denggung dan Simpang Mirota Godean di bulan November 2024 12) Terlaksananya rapat forum LLAJ Simpang 4 depan Puskesmas Ngemplak 2 di bulan Desember 2024 c. Relokasi PKL Malioboro ke Teras Malioboro dilaksanakan antara Pemkot Yogyakarta dengan Pemda DIY salah satunya berdasar SE GUBERNUR DIY NO. 3/SE/I/2022 Tentang Penataan Kawasan Khsus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Margo Mulyo. Seluruh Pedagang Kaki Lima yang direlokasi ke Teras Malioboro mendapatkan memiliki kepastian usaha dengan diterbitkan Nomor Induk Berusaha serta fasilitas berupa lapak, listrik, air, air limbah, promosi dan pemasaran, pelatihan dan pendampingan seperti peningkatan kapasitas tenant, digital marketing dan sebagainya. d. Pengusaha merujuk pada kawasan toko di sepanjang Malioboro yang selama ini produk-produk jualannya sama persis dengan PKL di	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Teras Malioboro. Untuk pengusaha tersebut kewenangannya ada di Pemerintah Kota Yogyakarta dan sudah kita koordinasikan sejak tahun lalu. e. Untuk *tenant* Teras Malioboro yang berada di Teras Malioboro sejak 2022 sampai 2025 sudah diberikan pendampingan, promosi serta pemasaran dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas *Tenant*. Mulai tahun 2024 juga kita tingkatkan dengan Bisnis Matching yaitu mempertemukan UKM binaan Dinas Koperasi&UKM DIY dengan para Tenant Teras Malioboro. Output kegiatan ini untuk menambah variasi produk serta kualitas produk yang dijual di Teras Malioboro. Mulai tahun 2026 juga ada inkubasi bisnis bagi *tenant* Teras Malioboro untuk mengakselerasi usaha *tenant* Teras Malioboro salah satunya dengan skema hadiah berupa bantuan modal.	
4	**Pembangunan Taman Budaya Se DIY**			
	Taman Budaya berfungsi sebagai ruang ekspresi bagi pelaku budaya untuk berkumpul, berdiskusi, bertukar informasi, serta mempresentasikan karya. Keberadaannya melengkapi upaya penyediaan ruang budaya secara berjenjang, dari Balai Budaya di tingkat kalurahanhingga Taman Budaya di tingkat kabupaten/kota. Dengan	a. Belum menjadi lembaga struktural yang profesional dan melengkapi sarana prasarana pendukung sesuai perencanaannya. b. Optimalisasi taman budaya dapat dilakukan melalui kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk mengembangkan layanan serta meningkatan program kegiatan.	1. Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ▪ Mengoordinasikan pemanfaatan seluruh gedung dan venue di Taman Budaya se-DIY (TBY, TBKP, TBEG) sebagai ruang ekspresi yang representatif bagi seniman, pelajar, dan masyarakat umum. ▪ Mengoptimalkan fungsi Auditorium, *Exhibition Hall, dan Amphiteater* di TBKP untuk berbagai pentas seni tradisi, teater, hingga pameran. ▪ Mendorong pemanfaatan kawasan TBEG pasca peresmian Mei 2025 sebagai pusat	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	adanya Taman Budaya yang representatif, diharapkan aktivitas kebudayaan semakin meningkat, berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan kebudayaan, serta mendorong kemajuan pembangunan kebudayaan di DIY. Beberapa taman budaya masih dalam proses pembangunan atau memiliki keterbatasan dalam fasilitas dan program yang menarik bagi masyarakat serta Kekurangan tenaga kerja dalam operasional dan pengelolaan taman budaya menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pelayanan dan pengembangan program.	c. Penguatan manajemen SDM dan tata kelola operasional dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur yang jelas dalam pengelolaan taman budaya.	aktivitas budaya dan ruang publik strategis di wilayah selatan Yogyakarta dengan total lebih dari 200 event terlaksana. 2. Proses fasilitasi untuk pengembangan taman budaya dan operasional taman budaya. 3. Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Fisik ▪ Melaksanakan rehabilitasi gedung *Concert Hall TBY* yang berfokus pada perbaikan atap, plafon, sistem elektrikal, serta pembaruan sistem AC guna meningkatkan standar pelayanan publik. ▪ Melakukan penambahan daya listrik secara signifikan di kawasan TBY untuk memastikan seluruh kegiatan pertunjukan dapat didukung oleh listrik PLN secara mandiri. ▪ Menjalankan program pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana yang memiliki intensitas penggunaan tinggi, termasuk sistem drainase, instalasi air, dan fasilitas kebersihan di seluruh unit Taman Budaya. 4. Pengembangan layanan Taman Budaya sudah dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti penggunaan tempat untuk event-event.Taman Budaya digunakan sebagai wadah kegiatan untuk menggelar berbagai pertunjukan dan pagelaran seni dan budaya, sekaligus sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat. 5. Penguatan Manajemen Kelembagaan dan SDM	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			▪ Menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit pengelola Taman Budaya Embung Giwangan untuk meningkatkan fleksibilitas dan profesionalisme pelayanan. ▪ Menyusun dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemanfaatan venue dan sistem koordinasi penjadwalan kegiatan guna menghindari tumpang tindih penggunaan ruang. ▪ Melakukan penguatan manajemen internal melalui optimalisasi pembagian tugas tenaga pengelola untuk mengimbangi peningkatan pesat intensitas kunjungan dan jumlah event. 6. Penguatan Manajemen Kelembagaan dan SDM ▪ Menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit pengelola Taman Budaya Embung Giwangan untuk meningkatkan fleksibilitas dan profesionalisme pelayanan. ▪ Menyusun dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemanfaatan venue dan sistem koordinasi penjadwalan kegiatan guna menghindari tumpang tindih penggunaan ruang. ▪ Melakukan penguatan manajemen internal melalui optimalisasi pembagian tugas tenaga pengelola untuk mengimbangi peningkatan pesat intensitas kunjungan dan jumlah event. 7. Perluasan Jangkauan Publik dan Literasi Budaya ▪ Meningkatkan publikasi kegiatan melalui kanal digital kekinian, seperti *Podcast,*	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Instagram, TikTok, dan optimasi *website* untuk menjangkau generasi muda. ▪ Menyelenggarakan program bimbingan seni berkelanjutan seperti *Art for Children (AFC)* di berbagai wilayah (Yogyakarta dan Kulon Progo) sebagai upaya regenerasi pelaku seni sejak dini. ▪ Memfasilitasi ruang dialog melalui sarasehan seni budaya lintas disiplin untuk menyerap aspirasi seniman dalam pengembangan program Taman Budaya ke depan. ▪ Melakukan digitalisasi arsip koleksi dokumentasi seni budaya dari format analog ke digital guna melestarikan aset pengetahuan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. 8. Penguatan Manajemen SDM dan tata kelola sudah diatur melalui Peraturan Bupati/ Walikota di masing-masing Kabupaten/Kota: ▪ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul ▪ Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) ▪ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Taman Budaya Pada Dinas Kebudayaan.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			9. Taman Budaya yang masih dalam proses pembangunan (Bantul dan Sleman) pada tahun 2026 sudah dialokasikan untuk pembangunannya.	
5	**Penanganan Sampah**			
	Target pengelolaan sampah nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.123 Tahun 2018 ttg Kebijakan dan Strategi DIY dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan target penanganan sampah sebesar 70% dan pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja pengurangan sampah di DIY pada tahun 2023 sebesar 19,84 % dari	a. Memprioritaskan pembangunan tempat pengolahan sampah modern yang mendukung dan menyelesaikan permasalahan tata Kelola sampah di DIY. b. Penguatan kapasitas SDM masyarakat baik secara personal di rumah tangga maupun di kelembagaan seperti Bank Sampah. c. Membangun infrastruktur pemilahan sampah dari rumah tangga hingga tempat pengolahan.	a. *Progress* pembangunan tempat pengolahan sampah modern di DIY menunjukkan pergeseran fundamental dari model pengelolaan berbasis pembuangan menjadi berbasis pengolahan. - Bantul 1) TPST Argodadi: RDF 2) TPST Modalan: Pirolisis *3) ITF Niten: ITF Non Incinerator* 4) Saat ini juga telah dibangun rintisan tempat pembuatan bata dari bahan baku sampah plastik yang sudah terpilah *(Recycle Plastic Faba/RPF)* di Kalurahan Bawuran - Sleman 1) TPS 3R Bakti Bumi Turi: RDF 2) TPST Tamanmartani: RDF 3) Transfer Depo Panasan: RDF 4) TPST Sendangsari: RDF 5) Transfer Depo Kragilan: RDF 6) TPST Donokerto: RDF - Yogyakarta 1) UPS Karangmiri: RDF 2) UPS Giwangan: RDF, *Incinerator* 3) UPS Kranon: RDF 4) UPS Nitikan: RDF 5) UPS Sitimulyo 1: RDF, *Incinerator* 6) UPS Sitimulyo 2 : *Incinerator*	Berdasarkan Monev Jakstrada yang diselenggarakan tahun 2025, jumlah timbulan sampah DIY pada tahun 2024 sebesar 708,359.03 ton/tahun dibandingkan potensi timbulan sampah sebesar 831.475 ton/tahun. Capaian kinerja pengurangan sampah di DIY sebesar 19,24 % dari target 28%. Sedangkan capaian penanganan sampah sebesar 22,42% dari target 71%. Persentase sampah yang terkelola sebesar 41,66% sementara persentase sampah yang tidak terkelola 58,34%. Secara umum pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penutupan TPA Regional Piyungan dan perubahan sistem perhitungan capaian kinerja pengelolaan sampah pada aplikasi SIPSN diantaranya tidak diakuinya lagi angka pembatasan sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah, tidak diberlakukan lagi pengelolaan sampah melalui TPA dengan sistem *open dumping,incenerator* dan sampah langsung dari sumber.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	target 27%. Sedangkan capaian penanganan sampah sebesar 30,88% dari target 72%. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup memiliki tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan jakstrada; melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Menteri. Kondisi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mengalami kondisi darurat pasca ditutupnya TPA Regional Piyungan karena sudah melebihi kapasitas. Berdasarkan Surat Gubernur DIY Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota seDIY, pada tahun 2024 pengelolaan sampah		- Kesiapan Pembangunan PSEL di Wilayah Yogyakarta Raya Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL), pemerintah daerah di wilayah DIY telah melakukan finalisasi kesiapan untuk mengikuti PSEL, meliputi kesiapan lahan, kuota bahan baku, dukungan anggaran, dan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesiapan Pemda kepada Menteri LH/Kepala BPLH. b. Sampai dengan Bulan Desember 2025 telah dilakukan pengembangan kapasitas SDM pengelolaan sampah sebanyak 50 entitas antara lain dari unsur PHRI, GIPI, JPSM, Asosiasi Pedagang Ritel & Toko Modern, Forkom Bank Sampah, Pokdarwis, Perusahaan Swasta, SPBU, PT Angkasa Pura, Fasilitator Penyuluh Persampahan DLH Kab/Kota, dll. Selain itu juga telah dicanangkan KKN Tematik Kolaboratif-Implementatif Pengelolaan Sampah dengan 14 PT yang sudah menjalin MoU dengan Pemda DIY. Fokus utama dari KKN tersebut adalah untuk memberikan edukasi pengelolaan sampah di tingkat hulu. Data dan informasi terkait KKN Tematik tersebut dapat diakses pada *https://dev-sikertas.jogjaprov.go.id/*	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	didesentralisasikan kepada Kabupaten dan Kota se-DIY. Namun demikian, Pemerintah Daerah DIY tidak serta merta 45 melepaskan pengelolaan sampah ke Kabupaten/Kota akan tetapi masih tetap mendampingi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan desentralisasi pengelolaan sampah.		c. Penambahan fasilitas/infrastruktur pengelolaan sampah yang dioperasikan/ditingkatkan pada 2025 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). antara lain sebagai berikut: - Bantul 1) ITF Niten 2) TPST Modalan Banguntapan 3) TPST Bantul Timur (Bawuran-Paneltech) 4) TPST Bantul Barat (Sedayu-Argodadi) 5) TPS3R Sokowaten 6) TPS3R Tamanan 7) Rumah Pilah Sampah (RPS) Modalan - Sleman 1) TPST Tamanmartani Kalasan Sleman 2) TPST Sendangsari Minggir 3) TPST Sleman Tengah-1 (Donokerto) 4) TPST Sleman Tengah-2 5) TPST Pringwulung Condongcatur - Kota Yogyakarta 1) TPS 3R Nitikan-1 2) TPS 3R Kranon 3) TPS 3R Karangmiri 4) Incenerator Giwangan 5) UPS 1 Sitimulyo mekanik 6) UPS 1 Sitimulyo termal 7) UPS 2 Sitimulyo termal 8) Incenerator Piyungan 9) ITF bawuran 10) ITF Pandowoharjo	
6.	**Penanggulangan Kemiskinan**			
	Penanggulangan kemiskinan salah satunya dilakukan Dinas	a. Optimalisasi jangkauan dan ketepatan sasaran program	a. Membangun Integrasi Data Kemiskinan yang didukung oleh OPD DIY dan Pemerintah	a. Data kemiskinan yang belum terintegrasi secara operasional sebagai

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Sosial DIY melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan dalam balai. Pelayanan dalam balai ini diberikan kepada pemerlu pelayanan sosial yang memerlukan pelayanan dalam balai, meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, eks psikotik, gelandangan pengemis dan wanita rawan sosial ekonomi. Pelayanan dalam balai dilakukan pada 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (Balai) Dinas Sosial DIY yaitu Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, dan Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha. Pelayanan yang diberikan meliputi penyediaan permakanan; penyediaan sandang; penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti;	melalui ketepatan data daerah yang terintegrasi data pusat. b. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam membuat inovasi program penangukangan kemiskinan. c. Optimalisasi CSR dalam penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan *penta holix.*	Daerah Kabupaten/Kota dengan satu wadah bersama dan di integrasikan dengan DTSEN. b. Terkait optimalisasi jangkauan dan ketepatan sasaran program melalui ketepatan data daerah yang terintegrasi data pusat. 1) Dinas Sosial DIY melakukan Pengembangan Aplikasi Manunggal Raharja (Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja). Sistem ini bekerja mulai dari data yang diperoleh dan verifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota Pemerintah Daerah DIY. Data tersebut selanjutnya diproses untuk dilakukan pemeringkatan Kemiskinan Daerah bersama BPS menggunakan *Proxy Means Testing (PMT)* yaitu metode untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin atau rentan miskin dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga yang dianggap berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan. Metode ini digunakan untuk menyasar program bantuan sosial kepada kelompok yang paling membutuhkan. 2) Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS secara periodik setiap tahun, mendeseminasikan hasil ke OPD terkait dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun secara internal di lingkungan Dinas Sosial DIY. 3) Mengacu kebijakan terbaru tentang Data Terpadu, perubahan dari DTKS ke DTSEN	intervensi program, *Inclusion dan Exclusion Error* pada data BNBA sasaran Program. b. Meminimalisasi ketidaktepatan sasaran program karena data tidak valid dan tidak terintegrasi. c. Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan. Inovasi dan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan yang belum berkelanjutan. d. Kesadaran akan Keterlibatan dan koordinasi lintas sektor dan inovasi program dalam penanggulangan kemiskinan. e. Keterbatasan anggaran dan jangkauan program penanggulangan kemiskinan. f. Sinergi lintas sektor pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat miskin (termasuk akses legalitas dan pasar) dan optimalisasi kerja sama lintas *stakeholder*

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pemberian pelayanan penelusuran keluarga; pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses; pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari; pemulangan ke daerah asal; penyediaan alat bantu; fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan /atau identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang merupakan kewenangan provinsi. Penanganan kemiskinan juga dilakukan dengan mengelola data kemiskinan daerah. Sistem pengolahan data telah diinisiasi oleh Dinas Sosial DIY sebagai upaya untuk melakukan penyandingan data sehingga diperoleh data penerima bantuan sosial yang tepat. Mulai tahun 2024 Manunggal Raharja telah		4) Melakukan koordinasi berkala dan update informasi dengan Pemerintah pusat terkait pekembangan Data Terpadu. 5) Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait dengan data. Dinas Sosial Kabupaten Kota sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan validasi data. c. Optimalisasi peran dan fungsi TKPKD yang ada di seluruh OPD DIY dan Kabupaten/Kota dalam mengawal program penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kapaitas TKPKD dalam pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan. Penyusunan Agenda Kerja TKPKD DIY yang terjadwal berkelanjutan. d. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam membuat inovasi program penanggulangan kemiskinan, yaitu terlibat dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan yang memuat kelompok program pemberdayaan sosial masyarakat meliputi: 1) Program pemberdayaan usaha mikro masyarakat miskin berbasis kelompok melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan, Pengembangan dan Lestari Budaya. Saat ini Dinas Sosial masih memantau perkembangan 10 KUBE Lestari Budaya yang dibentuk Tahun 2024 dan membentuk 5 KUBE Lestari Budaya pada tahun 2025. Anggota Kelompok usaha bersama memperoleh pendampingan, bimbingan teknis terkait pengembangan	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	menghasilkan sumber data alternatif sasaran program penanganan kemiskinan daerah. Berasal dari data usulan dan atau hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan Kabupaten/Kota kemudian dilengkapi dengan data variabel kesejahteraan sebagai bahan perhitungan pemeringkatan kesejahteraan. Outputnya berupa data berbasis individu dan keluarga lengkap dengan label status kemiskinannya yang dinamakan DTKS Daerah serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial DIY. Dana Keistimewaan DIY juga berperan dalam penanganan kemiskinan. Dana Keistimewaan melalui Urusan Kebudayaan pada dinas sosial digunakan untuk intervensi pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya sejak tahun 2021. Berbeda dari program KUBE pada umumnya, karena memiliki tujuan mempertahankan budaya lokal		usaha, pemasaran, dan manajemen kelompok. Para pendamping memperoleh pembekalan melalui bimbingan teknis. 2) Program pemberdayaan usaha mikro masyarakat miskin berbasis individu melalui UEP BKK PKH Graduasi. Bantuan stimulan UEP ini terakhir diberikan pada tahun 2022 dengan jumlah penerima manfaat 825 KPM. Sampai saat ini Dinas Sosial masih melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan usaha dan kondisi kesejahteraan penerima manfaat. 3) Mengkoordinasikannya pada forum lintas sektor. e. Optimalisasi Kontribusi Non Pemerintah dengan dukungan CSR di DIY sesuai amanat Perda dan Pergub , hal ini dilakukan dalam rangka ketugasan TKPKD DIY untuk fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan. f. Optimalisasi CSR dalam penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan penta helix, yaitu: 1) Bekerja sama dengan berbagai narasumber dari lintas OPD antara lain Dinas Koperasi dan UKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam memberikan materi pelatihan bimbingan teknis baik untuk penerima manfaat Kelompok Usaha Besama maupun pendamping. Selain sebagai narasumber, Dinas Sosial bekerja sama dalam fasilitasi dalam legalitas usaha	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	di DIY, sasaran KUBE Lestari Budaya harus memiliki jenis usaha yang mengandung unsur budaya lokal di DIY, misal usaha membatik, usaha produksi jamu, dan lain-lain. Pada tahun 2024 menyasar sebanyak 10 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 telah disasar sebanyak 45 kelompok atau sebanyak 450 orang Pada tahun 2024 Dinas Sosial mulai melaksanakan desain baru program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang bersifat berkelanjutan (seumur hidup) dan kolaboratif antara *charity* (bantuan sosial) dan *economic empowerment* (pemberdayaan ekonomi). Sumber utama sasaran berasal dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan *Ekstrem* (P3KE) hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Selanjutnya, secara rutin dilakukan pemadanan dengan DTKS maupun DTKS Daerah, untuk		KPM dan akses pemasaran melalui market hub. 2) Akses pendanaan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya melalui Dana Keistimewaan yang difasilitasi Paniradya Kaistimewan. 3) Kerja sama dengan Komunitas atau organisasi yang bergerak dalam kewirausahaan sepertu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) DIY, Komunitas Orang Hebat Indonesia (KOHI), Rumah Aku (Pusat pengembangan UMKM di Yogyakarta yang menyediakan layanan dan program pelatihan Gratis). Bentuk kerja sama dalam pengembangan kapasitas usaha. 4) Menjajaki kerja sama antara Dinas Sosial DIY dan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pusekra) UGM dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan di DIY. 5) Kerjasama Dinas Sosial DIY dengan Kitabisa.com melalui Program *Teach4Hope*, menyelenggarakan program beasiswa pelatihan kerja *"Teach4Hope* – Kelas Kewirausahaan (Wirausaha Naik Kelas)". Program ini ditujukan untuk penerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pelatihan berdurasi dua minggu ini mengusung empat tema utama: Pengelolaan Keuangan, Desain Produk & *Branding*, *Social Media Marketing*, dan	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	memastikan penerima sesuai kriteria (miskin, masuk DTKS dan bukan penerima PKH maupun Sembako). Pelaksanaan penyaluran JSLU yang dilakukan setiap bulan menjadi *best practice* evaluasi perbaikan data sasaran baik secara administratif (data kependudukan) maupun secara kualitatif (ketepatan sasaran). Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia Seumur Hidup diberikan kepada 8000 penerima setiap bulannya dengan besar bantuan Rp 300.000,00 per-orang per-bulan.		Legalitas Usaha. Angkatan pertama Tahun 2025 sejumlah 13 orang Anggota PKH dan 2 orang perwakilan KUBE. Lima orang peserta terbaik memperoleh stimulan usaha sebesar Rp. 2,5 juta per orang. 6) Diseminasi informasi melalui kerja sama dengan tim media untuk memberikan informasi sekaligus edukasi pada masyarkat.	
7	**Reformasi Kalurahan**			
	Visi dan misi Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 menjadikan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh DIY dalam lima tahun ke depan. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan yang memiliki kedekatan langsung	a. Optimalisasi Koordinasi dan konsolidasi secara berkala dan terus menerus pada Tim/Pokja untuk pembagian ketugasan secara teknis serta pengawalan progress. Serta koordinasi dan kerjasama dari level DIY, kabupaten, dan kalurahan untuk mempersiapkan profil dari seluruh kalurahan di DIY berdasarkan indikator Reformasi Kalurahan (RBKal dan RPMKal), juga dalam	a. Upaya Diseminasi telah dilakukan pada pendekatan Reformasi Birokrasi Kalurahan melalui: 1) Pendampingan persiapan pelaksanaan assemen tahunan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 18-21 Februari 2025 terhadap Kepala Jawatan Praja dari 64 Kapanewon di DIY; 2) Fasilitasi, Koordinasi, dan pemantauan penerapan pelaksanaan Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan melalui beberapa aktivitas, antara lain: - Monitoring tindaklanjut Kendala penerapan rencana aksi Kabupaten terkait	a. Permasalahan yang diselesaikan pada pendekatan reformasi birokrasi kalurahan: 1) 64 Kapanewon telah melakukan *assesmen* pada 392 Kalurahan di wilayahnya masing-masing 2) Telah diundangkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modalsekaligus model bagi upaya untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang dihadapi di wilayah DIY. Entitas Kalurahan akan menjadi fokus dan lokus bagi upaya-upaya peningkatan``kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Oleh sebab itu, Reformasi Kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Fokus Reformasi Birokrasi Kalurahan yaitu mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang berorientasi kinerja, dan menciptakan budaya pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional. Terdapat 16 kegiatan utama dari RB Kalurahan, seperti: pengembangan SAKIP kalurahan, penguatan	rangka memaksimalkan kegiatan memaksimalkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Selain itu juga optimalisasi profil model pendanaan baik di level DIY, kabupaten, dan kalurahan dalam mendukung indikator. b. Percepatan penyusunan Juknis dengan menintensifkan pertemuan internal Pokja serta antar Pokja. c. Tim Pemda DIY serta Kabupaten melakukan pemantauan sekligus diseminasi secara terus menerus ke Kapanewon dan Kalurahan. d. Memastikan dokumen perencanaan untuk ketepatan aktivitas serta penganggaran yang disusun pada kedua lini. e. Pemutakhiran Data dan Informasi SINKAL melalui Forum Komunikasi pada berbagai level. f. Menguatkan fungsi jabatan yang ada di Kalurahan dengan internalisasi tugas fungsi, baik yang ada dalam peraturan terkait struktir organisasi dan tata kerjanya maupun tugas	'Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kalurahan' di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo pada tanggal 6 Februari melibatkan DPMK Kabupaten, Biro Organisasi, Inspektorat, Bapperida DIY, Inspektorat DIY - Fasilitasi dan Koordinasi Pokja Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 11 Februari,12 Maret dan 28 April 2025 terkait penyelarasan pemahaman terhadap indikator sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan b. Forum Komunikasi (Forkom) Reformasi Kalurahan di DIY dilakukan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti rincian kegiatan dan rencana aksi. Dalam Forum Komunikasi dilaporkan *progres* pelaksanaan Kelompok Kerja Refomasi Birokrasi Kalurahan dan Kelompok Kerja Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Forkom ini juga melibatkan Tim Reformasi Kalurahan di tingkat Kabupaten/Kapanewon. Inti dari Forkom tersebut adalah memantau ketercapaian indikator masing-masing sasaran yang akan disampakan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulanan. c. Paniradya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di DIY, Kabupaten terus melakukan pemantauan, penilaian, diseminasi, edukasi terhadap	3) Telah diterbitkan Pedoman penilaian indikator sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan melalui Surat Pemda DIY Nomor B/400.10.3/2010/D19 perihal: Dukungan Pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Telah disampaikan Surat kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/400.10.2/666/SET tentang Penyampaian Hasil Konsultansi sebagai balasan surat Pemkab Gunungkidul Nomor B/100.3/40/2025 Perihal Permohonan Konsultansi dan Arahan tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kalurahan. b. Sinkal yang dulu hanya berisi reformasi birokrasi, sekarang sudah ada reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan *Assesment* terhadap rencana aksi reformasi kalurahan di kalurahan menjadi lebih terkendali dengan baik c. Progres sasaran indikator pada masing-masing Pokja (Reformasi Birokrasi dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat dapat terpantau dan dilaporkan setiap triwulan. d. Kalurahan kalurahan mengalami peningkatan kapasitas dalam mengelola dana Keistimewaan, perencanaan dan pengendalian pembangunan kalurahan,

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	digitalisasi kalurahan, penguatan pengelolaan keuangan kalurahan, serta penguatan penugasan urusan keistimewaan di kalurahan. Sementara fokus RPM Kalurahan adalah mendorong peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Terdapat 5 (lima) kegiatan utama dalam RPMKal, yakni: penguatan kegiatan penanganan *stunting*; penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian (melalui BUMKal); dan penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 fokus pada 5 Kegiatan Utama, yakni Pengembangan SAKIP Pemerintah Kalurahan, PelaksanaanPelayanan Publik Prima, Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat	fungsi yang ada di Tim Reformasi Kalurahan g.	pelaksanaan Reformasi Kalurahan dan BKK Reformasi Kalurahan serta tata kelola dana keistimewaan di kalurahan. Paniradya dengan dana keistimewaan memfasilitasi Perangkat daerah yang mengampu Kalurahan, bagaimana operasional program dan kegiatan penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan. d. Juknis Reformasi Kalurahan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2024 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Sedangkan Juknis Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan untuk Reformasi Kalurahan telah ditetapkan dengan Keputusan Sekda DIY. e. Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah DIY bersama Tim Reformasi Kalurahan Kabupaten akan berupaya melakukan monitoring dan evaluasi berbasis *Kapanewon*. Media ini juga diharapkan menjadi model pertanggungjawaban kinerja Kapanewon dalam menjalankan *Assesmen* Reformasi Kalurahan. f. Konsolidasi dan koordinasi dengan lintas penyelenggara terus dilakukan agar nilai-nilai keistimewaan, tata kelola dana keistimewaan apat berjalan lancar sesuai kaidah g. Dokumen perencanaan untuk ketepatan aktivitas serta penganggaran yang disusun pada RB Kalurahan dan RPM Kalurahan dilakukan secara berjenjang. Mulai dari Kapanewon yang melakukan assesmen dan Kabupaten yang menilai kesesuaian.	banyak yang sudah *familiar* dengan mekanisme pengusulan program dan kegiatan bkk dana keistimewaan, aplikasi aplikasi pendataan, perencanaan, pengendalian termasuk aplikasi kendali istimewa. e. Tim Reformasi Kalurahan baik di tingkat Kalurahan dan Kabupaten memiliki pedoman dalam melaksankan rencana aksi berdasarkan kondisi dan hasil *assemen*. f. Mengingatkan kembali akan peran vital *Panewu* dalam Reformasi Kalurahan yaitu sebagai akselerator, pendamping dan penghubung pelaksanaan Reformasi Kalurahan di wilayahnya g. Kalurahan-kalurahan meningkat pemahaman tentang reformasi birokrasi dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. h. Pengusulan program didasarkan pada hasil assesmen dan kondisi yang dihadapi Kalurahan. Usulan program juga dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. i. Telah dibentuk Forum Admin dan Keputusan Admin SINKAL di tingkat Kalurahan sebagai media untuk pemantau dan evaluasi. j. *Carik* sebagai bagian dalam Tim Reformasi Kalurahan proaktif dalam melakukan rencana aksi dan memantau capaiannya.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	dan Bamuskal, Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan serta Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan 49 Sementara itu Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan pada perbaikan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan utama yang ada dalam RPM Kalurahan, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY telah melakukan beberapa tahapan meliputi: asesmen awal, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi (didalamnya termasuk		Perencanaan yang disusun tetap mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2024 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Dimana RB Kalurahan meliputi 16 (enam belas) kegiatan utama dan 5 (lima) kegiatan utama pada RPM Kalurahan. h. Paniradya terus memastikan konsep yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terkait reformasi kalurahan dapat lebih tepat dan mengena untuk kelompok sasaran kalurahan baik reformasi tata kelola dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat kalurahan i. Pemutakhiran Data dan Informasi SINKAL melalui Forum Komunikasi yang akan dilaksanakan pada triwulan ketiga. Melalui forum komunikasi, ditargetkan keterisian menu data pada SINKAL berkategori baik yaitu mencapai lebih dari 75%. j. Paniradya juga terus memastikan agar operasional SINKAL dapat fungsional dan terintegrasi dengan papan penanda Keistimewaan k. Bersama Dinas PMK Kabupaten dalam berbagai forum selalu menguatkan fungsi jabatan yang ada di Kalurahan baik dengan Lurah, *Carik, Pangripta, Ulu-ulu* dan *Jagabaya*) terkait pelaksanaan rencana aksi Reformasi Kalurahan pada level Kalurahan. Dalam momen Lomba Desa Tingkat DIY beberapa waktu yang lalu, selalu dilakukan monitoring terkait dokumen pendukung kebijakan yang	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	asesmen tahunan dan pengukuran sasaran), dan penyusunan rencana aksi tindak lanjut. Tahapan tersebut adalah tahapan yang berupa siklus, di mana rencana aksi tindak lanjut menjadi rencana aksi tahun berikutnya dan akan berjalan kembali siklusnya.		dilimpahkan oleh Pemda DIY ke Kalurahan (Reformasi Kalurahan) l. Paniradya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY secara kontinyu dan periodik melakukan Penguatan Tim Reformasi Kalurahan antar jenjang wilayah, termasuk penguatan kapanewon dan kemantren dalam pendampingan terhadap kalurahan/kelurahan agar reformasi kalurahan berjalan lancar dan optimal. m. Program strategis merupakan program yang aktivitasnya merujuk pada tercapainya tujuan pembangunan sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Evaluasi keberhasilan program strategis dilaksanakan setiap tahun, dengan perbaikan dilaksanakan pada tahun anggaran pembangunan berikutnya. Antisipasi dilakukan melalui akselerasi terhadap program strategis yang tidak berjalan sesuai rencana dengan melihat capaian target yang telah ditetapkan. Akselerasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan program strategis tahun berikutnya. n. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja program strategis adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dengan melibatkan banyak sektor terkait sesuai dengan kewenangan. Hal ini karena program strategis merupakan kumpulan aktifitas dari beberapa pihak terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			mengukur kinerja program strategis telah dilakukan evaluasi dampak (evaluasi mikro), untuk mengetahui program/kegiatan yang tepat sasaran sehingga dapat diketahui dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program strategis tersebut. Kegiatan evaluasi tersebut telah dilakukan sejak Tahun 2023. o. Setiap pelaksanaan Program Strategis memiliki payung hukum dengan didukung kajian ilmiah. Selain itu juga telah dilakukan edukasi maupun sosialisasi dan penguatan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program strategis tersebut, sebagai contoh adanya desentralisasi sampah, masyarakat telah diedukasi dalam pemilhan sampah secara mandiri. p. Penguatan SDM secara berkelanjutan telah dilakukan untuk mengawal program strategis mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Tenaga ahli dari perguruan tinggi juga dilibatkan untuk melakukan *knowledge sharing* serta masukan teknokratik dalam pelaksanaan program strategis. Alat ukur monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak kinerja program yang akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja program, antara lain dengan menggunakan *Balance Score Card (BSC)* yang sudah melekat dalam sistem operasional "Sengguh" yakni Sistem Evaluasi dan Monitoring Program/Kegiatan yang ada di Pemda DIY dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari suatu program/kegiatan serta	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			antisipasi yang harus dilakukan untuk tahapan pada tahun pembangunan berikutnya. q. Pemda DIY telah menggunakan prinsip satu data dalam pelaksanaan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi monitoring saat melakukan berbagai intervensi kebijakan, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga telah dilakukan sinkronisasi program/kegiatan antar pihak/*stakeholder* terkait sehingga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih program/kegiatan yang ada di Perangkat Daerah. Penerapan satu data dan sinkronisasi program/kegiatan juga dilakukan dengan pihak Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. r. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, sinkronisasi dengan dengan Pemkab/Pemkot melalui semangat *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani* mutlak dilakukan dan telah diterapkan. Mulai dari proses perencanaan, selalu melibatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan pihak Kabupaten/Kota. Mulai dari tema pembangunan Kabupaten/Kota menjadi sub tema dan terkait dengan tema Pembangunan di DIY dan mendukung tema pembangunan nasional, sehingga fokus penanganan pembangunan menjadi sama dan saling mendukung satu sama lain. s. Telah disusun rencana aksi terkait penanggulangan kemiskinan baik berupa	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Rencana Aksi Tahunan (RAT) maupun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) DIY 2022-2027 sebagai salah satu perencanaan strategis yang diharmonisasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah DIY dalam RPJMD 2022-2027. Didalam rencana aksi tersebut terdapat indikator yang terukur dengan jelas setiap tahun yang tertuang dalam dokumen perencanaan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan. t. Terdapat dokumen perencanaan pemanfaatan dana keistimewaan melalui *Grand Desain* Keistimewaan, sehingga pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan lebih terbuka, sesuai dengan tujuan, jenis program capaian kinerja yang diharapkan dalam perencanaan jangka panjang. u. DIY telah menyusun RPKD DIY Tahun 2023-2027 dengan penentuan program prioritas dan target pencapaian indikator dalam rentang waktu tersebut dilengkapi dengan beberapa analisis : Analisis keterkaitan masalah *Theory Of Change(TOC)/Logika Program, Casual Attribution*, Penentuan Lokasi Prioritas dan Matriks Prioritas Program, Dokumen RPKD tersebut dijabarkan dalam kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2026.	
		Rekomendasi kepada Gubernur DIY terrkait dengan Program Strategis		

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		a. Tidak semua Program strategis bisa berjalan sesuai harapan oleh karena itu hendaknuya disiapkan program antisipasi bila terjadi kemandegan program (*exit strategi)* b. Alat ukur program strategis hendaknya tidak sekedar kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaannya namun sejauh mana dampak ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang bisa diraih. c. Untuk pembangunan program strategis juga membutuhkan partisipasi warga oleh karena itu edukasi dan penguatan masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan program strategis tersebut. b. Keberlangsungan program strategis memerlukan pendanaan yang besar dan berkesinambungan olerh karena itu seyogyanya ada payung hukum pada setiap tahapan sehingga jelas hak dan kewajibannya. c. Penguatan SDM menjadi kunci agar program strategis	a. Program strategis merupakan kumpulan aktivitas yang dilakukan oleh beberapa sektor terkait sehingga keberhasilan program strategis dapat berjalan sesuai harapan dengan adanya Penguatan Lintas Sektor, Lintas Aktor, dan Lintas Daerah melalui akselarasi pelaksanaan pembangunan terhadap program startegis berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring. b. Dengan menggunakan alat ukur kinerja berupa monitoring dan evaluasi secara komprehensif antar sektor/pihak, maka akan dapat diperoleh dampak dan manfaat dari program strategis tersebut khususnya dampak dan manfaat ekonomi maupun pengentasan kemiskinan yang bisa diraih. Disamping itu dengan alat ukur tersebut akan dapat diatasi permasalahan terkait besaran kontribusi masing-masing sektor dalam pelaksanaan program strategis. c. Dengan adanya payung hukum untuk keberlangsungan program strategis pada setiap tahapan serta adanya partisipasi dari warga/masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan program strategis akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan/implementasi dari program strategis tersebut serta keberlanjutannya. d. Dengan adanya Penguatan SDM, maka pelaksanaan program strategis dapat berjalan dengan baik dan tercipta kolaborasi antar *stake holder* terkait yang berujung pada optimalnya pencapaian goal. Terlebih lagi program strategis adalah program yang dalam pelaksanaannya melibatkan keterlibatan antar sektor. Dengan adanya alat ukur untuk mengukur dampak kinerja program strategis, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja program dan juga akselerasi yang harus dilakukan sebagai antisipasi dalam tahapan pembangunan pada tahun berikutnya. e. Dengan adanya data tunggal yang saling terintegrasi antar OPD maka pelaksanaan program/kegiatan tidak saling tumpang tindih tapi saling melengkapi. f. Dengan adanya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah Pusat, pemerintah DIY dan pemerintah Kabupaten/Kota maka pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terfokus dan saling terkait/mendukung sesuai dengan kewenangannya. g. Dengan adanya Rencana Aksi Daerah dalam penanggulangan kemiskinan menjadikan pelaksanaan penanganan kemiskinan menjadi lebih terukur dan fokus serta tepat sasaran. h. Dalam pemanfaatan Dana Keistimewaan sesuai dengan *Grand Desain* Keistimewaan menjadi pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh dana keistimewaan menjadi lebih terbuka, lebih tertata, lebih fokus dan mempunyai tujuan serta sasaran yang lebih terukur sesuai dengan yang diharapkan. i. Belum adanya dasar atau dokumen induk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan DIY.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		bisa berjalan dengan baik dan tercipta kolaborasi antar *stake holder* yang berujungh pada optimalnya goalPerlu alat ukur untuk mengukur dampak kinerja program yang akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja program. d. Perlu data tunggal yang saling terintegrasi antar OPD sehingga dalam pelaksanaan program tidak saling tumpang tindih tapi saling melengkapi e. Perlu peningkatan kerjasama program dengan Pemkab/Pemkot yang bersinergi satu sama lain dalam satu kesatuan Langkah. f. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan Pemkab/Pemkot semangat *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani* sangat relevan untuk diterapkan. h. Dalam penanganan kemiskinan perlu dibuat Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang terukur.		

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		i. Dalam pemanfaatan dana keistimewaan perlu keterbukaan, kesesuaian antara tujuan dengan jenis program dalam sebuah rencana aksi daerah yang terukur dalam jangka panjang.		
D	**PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN**			
1	**Urusan Kelembagaan**			
	Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli, sebagaimana amanat UU No. 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2). Kelembagaan Pemda DIY diatur berdasarkan Perdais No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah. Serta Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2019 menjadi landasan penyesuaian nomenklatur dengan nilai– nilai kebudayaan hingga tingkat kabupaten/ kota dengan	a. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga di tingkat kabupaten yang bertugas mengampu urusan keistimewaan agar capaian maksimal dan juga monitoring secara berkala. Selaras dengan mandat Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 bahwa Pemda DIY bertugas melakukan monitoring pelaksanaan urusan keistimewaan. b. Selaras dengan adanya Perda DIY No 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dan Pergub DIY No 65 Tahun 2024, hendaknya Pemda DIY menjadikan Dinas	a. Paniradya terus meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga lembaga yang terkait atau mitra-mitra pengampu semua urusan untuk memastikan penerapan keistimewaan di smeua jenjang dapat berjalan optimal dan berdampak kepada masyarakat b. Dinas PMKKPS DIY bersama Dinas PMK Kabupaten melakukan koordinasi terkait pelaksanaan urusan keistimewaan (Reformasi Kalurahan) untuk memastikan ketercapaian sasaran indikator dan pelaksanaan rencana aksi. Sebagai upaya penguatan data dan informasi Kalurahan, DPMKKPS berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Komisi Informasi Daerah DIY dan Dinas Kominfo Kabupaten untuk mengawal keterbukaan informasi publik Kalurahan sesuai Surat Gubernur kepada Bupati se-DIY, Nomor B/400.10.8/1951/D19 tanggal 8 Mei 2025. c. DPMKKPS DIY berkoordinasi dengan Biro Kesra Setda DIY untuk mempersiapkan rumusan bahan kebijakan berupa Rapergub sebagai tindak lanjut Perda DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang	a. Kelurahan-kelurahan mulai mendapat dukungan anggaran danais sesuai kaidah tata kelola keuangan dan ada yang melalui OPD baik DIY maupun kabupaten/kota Peningkatan kapasitas kalurahan dalam merancang program dan kegiatan Keistimewaan. b. Kalurahan telah melakukan input dan persiapan dokumen keterbukaan informasi publik Kalurahan. Termasuk didalamnya melakukan reviu ketugasan Pejabat Penatausahaan Informasi Daerah (PPID). c. Koordinasi awal terkait kebijakan, bantuan teknis, bantuan keuangan, pendampingan dan monev terkait pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. d. Kelurahan-kelurahan mulai mendapat dukungan anggaran danais sesuai kaidah tata kelola keuangan dan ada yang melalui OPD baik DIY maupun kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	prinsip keselarasan, keserasian dan keterpaduan antar lembaga. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan, Pemda DIY sejak 2021 telah mendidtribusikan langsung BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan. Namun BKK Dana Keistimewaan diberikan kepada Pemerintahan Kalurahan yang memiliki atribut tertentu.	Pemberdayaan asyarakat, Kalurahan,Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang bertugas sekaligus bertanggung jawab atas program dan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan/ Kalurahan guna memeratakan pembangunan Kelurahan/ Kalurahan di DIY agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara Kelurahan/ Kalurahan yang memiliki atribut tertentu dan yang belum memiliki atribut, tidak terkecuali yang menggunakan Dana Keistimewaan. c. *Grand design* dan target seluruh Kelurahan dan Kalurahan memiliki atribut Mandiri Budaya, misal pada akhir jabatan tahun 2027 seluruh Kelurahan dan Kalurahan memiliki atribut Mandiri Budaya. d. Pemda harus mensinergikan dan mengintegrasikan *platform* digital Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak	Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Pengaturan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan salah satunya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah kalurahan dan kelurahan. d. Paniradya terus bekerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang bertugas sekaligus bertanggung jawab atas program dan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan/ Kalurahan memastikan kalurahan kalurahan dapat menerima BKK dana Keistimewaan secara merata melalui BKK Reformasi Kalurahan dan memastikan sinergitas pembiayaan pembangunan. e. Proses untuk menjadi kalurahan mandiri budaya membutuhkan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh regulasi pembentukan desa mandiri budaya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya serta melalui proses akreditasi sehingga untuk mencapai seluruh kalurahan atau kelurahan membutuhkan waktu bertahap, pada akhir masa jabatan 2027 target 45 kalurahan. f. Target seluruh Kalurahan berstatus Desa Mandiri pada Tahun 2027 sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Untuk mencapai target ini, Dinas PMKKPS bersama Dinas PMK KAbupaten, Bappeda dan Tenaga Ahli Pemberdayaan	kalurahan dalam merancang program dan kegiatan Keistimewaan. e. Rekapitulasi Indeks Desa Tahun 2025 telah dilakukan. Saat ini menunggu penetapan dari Kementerian Desa dan PDT. Penambahan Desa Mandiri Budaya juga sedang dalam proses penilaian akhir. Sedangkan Desa Swasembada dilihat dari pemutakhiran Profil Desa/Kelurahan. f. Kolaborasi dan koordinasi Perangkat Daerah DIY dalam penyediaan data dan informasi Kalurahan. g. penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan provinsi melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah. Sebagai contoh melalui integrasi aplikasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat.	Masyarakat mengawal dan memonitoring pelaksanaan pemutakhiran Indeks Desa. Sedangkan untuk Desa Mandiri Budaya (DMB) bersama Biro Administrasi Perekonomian dan SDA serta Tim Monitoring DMB, memastikan ketercapaian sesuai dengan target 35 (2024) dan 40 (2025), 45 (2026 dan 2027). g. Koordinasi koordinasi terus dilakukan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan platform digital agar tidak membingungkan masyarakat. h. Saat ini sedang dibangun arsitektur Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) sebagai *platform* bagi pakai data dengan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo DIY. Hal ini sebagai upaya mengintegrasikan beberapa platform yang dimiliki dan digunakan oleh Kalurahan. i. (Kominfo) Pemda DIY telah memasukkan rencana integrasi layanan digital dengan kabupaten kota se DIY dalam masterplan JSP fase 2 dengan Pergub DIY nomor 32 tahun 2024 tentang Rencana Induk Jogja Smart province tahun 2024-2028. Melalui integrasi aplikasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Disetiap tahunnya juga akan ditetapkan *Quickwin JSP* yang berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan isu strategis lintas wilayah.	
2	**Urusan Kebudayaan**			
	Sebagai urusan dengan alokasi anggaran yang terbesar, Urusan Kebudayaan	a. Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1. Kolaborasi dengan pemerintah kalurahan telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pemberdayaan dan pembinaan	1. Optimalisasi integrasi pengelolaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan agar sepenuhnya mengacu pada *Grand*

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	memiliki jumlah program dan kegiatan serta jumlah SKPD pengampu terbanyak, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain menjadi urusan keistimewaan, Urusan Kebudayaan juga merupakan urusan wajib pemerintahan DIY. Dinas Kebudayaan DIY selaku SKPD yang mendapat tugas secara langsung dari Gubernur untuk menjalankan kewenangan keistimewaan sebagaimana dijelaskan dalam UU Keistimewaan DIY, maka harus mengacu pada Pergub DIY No 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan DIY Tahun 2022 - 2042 dalam mengelola dana keistimewaan tersebut. Selain itu, diperlukan juga alat untuk mengukur tingkat capaian kinerja Dana Keistimewaan DIY agar tujuan pengalokasian Dana Keistimewaan DIY dapat dinilai sehingga dapat mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY guna perbaikan di masa mendatang. Urusan kebudayaan, diarahkan	harus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh Kalurahan di DIY untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menerjemahkan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan berdasar pada Pergub DIY No 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan DIY Tahun 2022 – 2042. b. Pemerataan pelibatan Kalurahan di DIY untuk mensukseskan agenda Kebudayaan. c. Mengawal Kalurahan/Kelurahan untuk menjadi Desa Mandiri Budaya dan atau Desa dengan predikat yang lain. d. Memaksimalkan taman budaya untuk mensosialisasikan kebudayaan DIY. e. Optimalisasi pembangunan SDM tidak hanya pada pelaku seni, namun juga masyarakat desa.	terhadap pemerintah kalurahan dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilaksanakan melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang melibatkan pemerintah kalurahan maupun melalui pelaksanaan pengembangan desa budaya, rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya. Kolaborasi akan lebih ditingkatkan lagi dengan adanya Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi kalurahan. Karena dalam diktum menimbangnya, pengembangan kebudayaan masyarakat kalurahan menjadi salah satu instrumen pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan. 2. DPMKKPS DIY dan Dinas Kebudayaan DIY berkoordinasi dalam mempersiapkan Petunjuk Teknis BKK Dais kepada Pemerintah Kalurahan untuk Reformasi Kalurahan, salah satunya berkaitan dengan Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan dengan sasaran masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY memiliki peran penting dalam bidang kebudayaan, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa. Tindak lanjut yang bisa dilakukan meliputi pembinaan, pengembangan, dan pelindungan potensi budaya desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan. Dinas PMKKPS DIY bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kalurahan membina kalurahan agar dapat	*Design* Keistimewaan DIY Tahun 2022–2042. 2. Melalui BKK Reformasi Kalurahan, Kalurahan dapat melakukan pendataan profil kebudayaan di wilayahnya masing-masing. 3. Peningkatan pelibatan kalurahan dalam implementasi kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. 4. Penguatan peran Taman Budaya sebagai media sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebudayaan DIY. 5. Penguatan kapasitas SDM kebudayaan yang belum merata, baik pada pelaku budaya maupun masyarakat kalurahan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	melalui kebijakan antara lain meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan kebudayaan. Perlindungan kebudayaan, sebagai upaya memberikan kejelasan status hukum, dengan tindak penyelamatan, pengamanan, perawatan untuk melindungi dari kerusakan, kepunahan semua cagar budaya dan Pengembangan budaya, sebagai upaya memberikan makna dan fungsi terhadap objek kebudayaan serta memberikan edukasi dalam rangka menumbuhkembangkan kreatifitas kebudayaan kontemporer yang berpijak pada akar budaya adiluhung.		mempertahankan dan mengembangkan potensi budayanya. 3. Pemerataan pelibatan kalurahan dalam pelaksanaan agenda budaya dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan desa budaya, rintisan desa mandiri budaya dan desa mandiri budaya. Kalurahan diberikan ruang untuk menunjukkan potensi budayanya dalam agenda pentas selasa wagen, pentas bandara, dan gelat potensi. Selain itu, dalam tahapan menuju desa budaya, maka kalurahan tersebut harus sudah menjadi desa rintisan desa budaya yang pembinaannya ada di kabupaten/kota. Dalam proses pembinaannya, pemerintah kabupaten dan kota juga melibatkan desa rintisan tersebut dalam agenda budaya di kabupaten/kota. 4. Pembinaan kalurahan untuk menuju desa mandiri budaya dilaksanakan secara kolaboratif oleh OPD terkait (Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, DP3AP2, Dinas Koperasi UKM) dengan OPD leading sector yaitu Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda DIY. Masing-masing OPD pengampu akan melaksanakan pembinaan terhadap desa rintisan yang menjadi binaannya. 5. Terdapat beberapa Produk Hukum yang berkaitan pemanfaatan dana keistimewaan oleh kalurahan, yaitu a. Pergub Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			b. Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.100 Tahun 2020 ttg Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan c. Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan Berdasarkan dengan peraturan-peraturan tersebut, maka pada prinsipnya kalurahan dapat mengakses dana keistimewaan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung keistimewaan DIY. Akan dilaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota tyang sudah memiliki Taman Budaya untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan Taman Budaya masing-masing. 6. Implementasi Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi kalurahan, yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi reformasi kalurahan menjadi dasar untuk peningkatan SDM bagi masyarakat Desa.	
3	**Urusan Pertanahan**			
	Urusan pertanahan merupakan salah satu urusan yang pendanaannya menggunakan skema keistimewaan. Kewenangan DIY Dalam hal urusan pertanahan sesiai dengan Perdais DIY No. 1	a. Selaras amanat UU Nomor 13 Tahun 2012, maka Pemda DIY haruslah melakukan penataan tentang Pertanahan—Tanah Kasultanan dan Tahan Kadipaten— di DIY guna	a. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pemda DIY telah menyusun beberapa regulasi, antara lain : 1) Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan	Terwujudnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana amanat dari Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) Kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah kadipaten; (b) Pengadaan sarana dan prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; (d) Penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; (e) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) Kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pemda DIY telah melaksanan Urusan Pertanahan untuk menfasilitasi penatausahaan,	memberikan sumbangsih maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat DIY. b. Memaksimalkan sosialisasi tentang Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten agar Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum dimanfaatkan dapat digunakan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. c. Maksimalisasi pemanfaatan lahan (tanah dan bangunan) yang dimiliki oleh Pemda DIY. d. Membuat *roadmap* pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. e. Segera melakukan koordinasi lintas sektor terkait hutan khusus DIY agar dapat meningkatkan nilai manfaat hutan khusus tersebut. f. Melakukan perubahan peraturan daerah/istimewa, terutama Perdais Nomor 1	2) Pergub DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 3) Pergub DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4) Pada tahun 2023 Dispertaru DIY juga telah menyusun Kajian kaitannya dengan penyelesaian permasalahan pertanahan di DIY yang didalamnya terdapat roadmap penyelesaian permasalahan pertanahan di DIY berdasarkan jangka waktu, yaitu identifikasi, pendek, menengah dan panjang. b. Setiap tahun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY selalu rutin melakukan sosialisasi dengan sasaran terhadap pamong dan masyarakat di tingkat kalurahan yang termasuk subyek penerima manfaat tanah kalurahan. c. Terkait dengan lahan atau tanah yang dimiliki Pemda DIY akan di koordinasikan lebih lanjut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sesuai dengan tugas dan kewenangan terhadap pengelolaan aset. d. *Roadmap* pengelolan dan pemanfaata tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah tercantum juga dalam *Grand Desain* Keistimewaan DIY dalam Pergub DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042. Disamping itu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY juga sudah	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan pembentukan regulasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, namun masih terdapat ketidakselarasan penyebutan dalam produk hukum daerah, diantaranya Desa, Kelurahan dan Kalurahan, misalnya dalam Perdais No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didalamnya masih menggunakan kata Desa.	Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, khususnya terkait kata Desa agar selaras dengan kelembagaan di DIY yang menggunakan Kelurahan dan Kalurahan.	membuat roadmap penyelesaian permasalahan pertanahan di DIY. e. Terkait dengan koordinasi pengelolaan kawasan hutan secara pararel sudah dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Karaton Yogyakarta. f. Terkait dengan usulan revisi Perdais Nomor 1 Tahun 2017 akan dilaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* terkait	
4	**Urusan Tata Ruang**			
	Urusan Tata Ruang, merupakan kebijakan tata ruang, khususnya terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten termasuk satuan-satuan lainnya yang memiliki nilai strategis (sumbu Imajiner, sumbu Filosofi dan satuan ruang lainnya). Diharapkan	a. Pemda DIY dalam melakukan urusan tata ruang, sedapat mungkin memberikan tatanan baru, dimana ruang yang ada itu dapat memberikan ruang ekspresi bagi nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Agar identitas Keistimewaan Yogyakarta benar-benar	a. Terkait dengan pengelolaan tata ruang yang berkaitan dengan keistimewaan DIY telah diatur dalam Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043. Regulasi ini diatur dengan tujuan untuk mewujudkan SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten sebagai kesatuan ruang yang harmonis dengan	Secara umum permasalahan yang diselesaikan adalah menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang maupun tercapainya target kesesuaian pemanfaatan ruang (amanat dari RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dalam sasaran Pemda DIY). Dengan terwujudnya kesesuaian ini maka sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam RTRW DIY yaitu

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	dengan Penataan Tata Ruang yang berpijak pada nilai-nilai strategis tersebut, memberikan nilai tambah dan makna bagi pengembangan dan pengisian hakekat Keistimewaan DIY yang memiliki kedalaman makna dan jangkauan cita-cita luhur. Bahwa Keistimewaan DIY itu, mengandung makna: ada nilai-nilai yang membedakan secara substansial dan signifikan terhadap daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, yang bertumpu pada Keutamaan Budaya Adiluhung. Maka oleh karena itu, Urusan tata ruang harus mengkaitkan dengan keberadaan nilai-nilai tersebut yang diakui sebagai ciri khas Keistimewaan DIY. Fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang meliputi, (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang dan (2) Kebijakan pengembangan pola ruang diharapkan dapat memberikan dampak maksimal untuk peningkatan kesehteraan masyarakat	terbaca oleh masyarakat DIY maupun dari luar DIY. Selain itu penting dilakukan pengendalian dalam hal pemanfaatan tata ruang di DIY. b. Pemda DIY hendaknya melibatkan anak – anak muda dalam memanfaatkan ruang yang memiliki nilai keistimewaan. c. Penyelenggaraan penataan ruang hendaknya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. c. Memperhatikan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, serta memperhatikan Ruang Terbuka Hijau.	mengedepankan pada pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam upaya untuk pengendalian pemanfaatan juga sudah dilakukan melalui penilaian perwujudan Strategi Pengembangan Wilayah SRS dengan tujuan : 1) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; 2) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang; 3) Pengendalian implikasi wilayah 4) Perumusan kesimpulan dan rekomendasi. b. Dalam upaya untuk pelibatan anak-anak muda dalam pemanfaatan ruang pada tahun 2023 s.d 2024 telah dilaksanakan melalui perancangan *visua signage* dan lomba *desian visual signage* pada kawasan Satuan Ruang Strategis; c. Dalam mewujudkan penataan ruang yang harmonis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY secara berkelanjutan juga melaksanakan penilaian perwujudan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY yang merupakan representasi untuk upaya pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) yang bertujuan untuk mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dinas terkait dan juga masyarakat. d. Upaya untuk mempertahankan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan	mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	DIY. Berdasarkan Perda DIY No.10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, tujuan penataan ruang adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pada keselarasan ruang darat, laut, dan udara, nilai keistimewaan DIY ketangguhan bencana dan harmonisasi lingkungan. Selain itu, Perda DIY No 10 Th 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 mengamanatkan mengembangkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas total wilayah, yang terdiri atas RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) Perbaikan.		dilaksanakan melalui penilaian perwujudan pemanfaatan ruang dan melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait dengan arti pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	
II	**BIDANG PEREKONOMIAN**			
A	**URUSAN PEREKONOMIAN**			
1	**Urusan Pangan**			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Hampir semua indikator capaian kinerja urusan pangan sudah tercapai, hanya satu sub indikator sasaran kinerja yang belum tercapai, yaitu indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan parameter penilaian terhadap keseimbangan dan keanekaragaman pangan didasarkan pada konsumsi pangan utama. Capaian PPH DIY tahun 2024 sebesar 95,7 dari target 96,30 sehingga realisasi sebesar 99,34%. Walaupun skor PPH tahun 2024 di atas angka rata-rata nasional sebesar 93,48 namun target PPH di DIY belum tercapai seperti yang diharapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian PPH tahun 2023, capaian indikator PPH tahun 2024 sebesar 95,7 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 96,3, sehingga mengalami penurunan sebesar	a. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi dengan OPD urusan pangan DIY dengan OPD terkait di Gunungkidul dalam pengentasan 2 (dua) Kalurahan di Gunungkidul yang berada dalam kategori desa rawan pangan. b. Menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas program urusan pangan, karena cadangan pangan di DIY tahun 2024 bertumpu pada beras. c. Mendiversifikasi dan meningkatkan cadangan pangan yang tidak hanya bertumpu pada beras. d. Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui sosialisasi, edukasi, promosi dan kampanye terus menerus, berkesinambungan dengan target dan sasaran yang jelas dan terukur karena produksi umbi-umbian, kacang-	a. Koordinasi dan kolaborasi terkait pengentasan 2 Kalurahan di Gunungkidul yang berada dalam kategori desa rawan pangan telah dilaksanakan, baik antara OPD pengampu urusan pangan di DIY dengan Kabupaten maupun dengan OPD lain yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY telah menyelaraskan program ketahanan pangan yang diselenggarakan selama tahun 2025 dengan berbagai program lainnya. Kolaborasi ini berfokus pada pemanfaatan potensi lokal melalui optimalisasi Lumbung Mataraman, penguatan distribusi dan akses pangan, serta peningkatan cadangan pangan di masyarakat. Sinergi ini bertujuan agar 2 Kalurahan tersebut dapat terlepas dari kategori rawan pangan melalui intervensi program dan pendampingan secara berkelanjutan. b. DPMKKPS DIY melakukan pembinaan dan monev berkaitan dengan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan di kalurahan sesuai dengan ketentuan dari Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Monev ini melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) DIY dan Kabupaten se-DIY. c. Melalui optimalisasi Dana Keistimewaan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kualitas pangan yang baik, telah terbentuk 16 kalurahan berpredikat Lumbung Mataraman	a. Mengentaskan kalurahan Girimulyo, Panggang dari kerawanan pangan dan menaikkan status kalurahan Tegalrejo, Gedangsari menjadi kalurahan agak rentan pada tahun 2025. b. Pelaporan Dana Desa dilakukan secara berkelanjutan /kontinyu melalui Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. Dengan pelaporan secara berjenjang, akan diketahi jumlah pagu dana desa dan penggunaan berdasarkan program dan kegiatan prioritas. c. Lumbung mataraman yang sudah terfasilitasi sebanyak 16 desa. d. Inventarisasi potensi komoditas non beras sebagai cadangan pangan sudah mulai dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan untuk analisis lebih lanjut. e. Sudah disusun telaah untuk usulan reviu Pergub pengelolaan cadangan pangan, antara lain terkait dengan diversifikasi pangan pokok yang dapat digunakan sebagai cadangan pangan. f. Menghasilkan komoditas pertanian yang beragam dengan nilai jual yang lebih tinggi, sehingga bermanfaat sebagai cadangan pangan dan peningkatan pendapatan petani. g. Hal yang perlu menjadi perhatian: 1) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	0,64%. Hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas konsumsi pangan di DIY tahun 2024 belum beragam dan seimbang karena terdapat beberapa golongan pangan yang mengalami penurunan yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan dan gula serta terjadinya penurunan daya beli masyarakat, kurangnya minat konsumsi, serta masih terbatasnya penyediaan bahan pangan tertentu di masyarakat. Masih terdapat 2 (dua) kalurahan di Gunungkidul masuk dalam kategori desa rawan pangan, yaitu Kalurahan Girimulyo, Panggang dan Kalurahan Tegalrejo Gedangsari. Hal tersebut disebabkan karena akses pangan yang relatif sulit karena tingginya angka kemiskinan di dua kalurahan tersebut. Sehingga program pengentasan Desa Rawan Pangan di dua kalurahan di Gunungkidul tersebut perlu menjadi prioritas program dari urusan pangan. Berbicara pangan, salah satu hal yang penting adalah	kacangan, gula masih di bawah angka ideal. e. Evaluasi dan monitoring pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun pedesaan/kalurahan untuk pemenuhan gizi keluarga. f. Optimalisasi Dana Keistimewaan dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kualitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta Halal.	yang mengadopsi Sistem Pertanian Terintegrasi (IFS) yang diharapkan mampu menjadi lumbung-lumbung pangan di tingkat kalurahan dengan menyediakan diversifikasi pangan yang beragam sesuai karakter budaya lokal. Harapannya Lumbung Mataraman tidak hanya menjadi ikon saja, melainkan dapat diduplikasi oleh masyarakat DIY untuk mewujudkan ketahanan pangan mulai dari tingkat rumah tangga. d. Cadangan pangan yang ada di DIY untuk komoditas pangan pokok/utama di tingkat masyarakat (produsen/petani dan distributor), baik yang berupa produk maupun yang masih dalam bentuk lumbung hidup sudah cukup beragam, hanya cadangan pangan yang dikuasai pemerintah saja yang masih terbatas pada 1 komoditas, yaitu beras karena keterbatasan sumber daya serta sarana prasarana pergudangan dan penyimpanan. Data cadangan pangan pokok sudah dikumpulkan dan dikelola oleh DPKP DIY walaupun belum bisa mengakomodir secara keseluruhan. e. Cadangan pangan di masyarakat sudah cukup beragam, namun cadangan pangan pemerintah masih bertumpu pada beras. Dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah dari komoditas non beras, DPKP DIY telah menelaah untuk mengusulkan reviu atas payung hukum pengelolaan cadangan pangan dengan menambahkan jenis cadangan pangan	usaha tentang pangan B2SA yang masih perlu ditingkatkan. 2) Produksi dan konsumsi kelompok pangan tertentu (umbi-umbian, kacang-kacangan, gula) yang masih di bawah angka ideal. 3) Keterbatasan kapasitas pengolahan pangan lokal di KWT dan pelaku usaha. 4) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. 5) Antisipasi kenaikan harga dan kelangkaan pangan (contoh sayuran: cabai). h. Dalam rangka optimalisasi: 1) Dukungan pendanaan khusus yang terarah (Dana Keistimewaan) untuk mendukung program ketahanan pangan yang komprehensif. 2) Penjaminan mutu, keamanan, dan kehalalan pangan yang masih perlu ditingkatkan. 3) Pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan untuk mendukung peningkatan produksi pangan. i. Pelaporan Dana Desa dilakukan secara berkelanjutan /kontinyu melalui Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. Dengan pelaporan secara berjenjang, akan diketahi jumlah pagu dana desa dan penggunaan berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	bagaimana kondisi cadangan pangan di suatu wilayah. Cadangan pangan di DIY masih bertumpu pada beras sehingga cadangan pangan di DIY belum beragam. stok pangan DIY hanya terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan bertumpu pada cadangan beras premium. Sementara cadangan pangan DIY tahun 2023 lebih bervariasi karena terdapat cadangan kedelai dan beras. Sehingga kondisi cadangan pangan di DIY masih belum beragam.		selain beras, hal ini memerlukan dukungan anggaran yang memadai. f. Upaya peningkatan diversifikasi ketersediaan pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi (hulu) dan pengembangan pengolahan produk antara lain melalui pelatihan olahan pangan lokal dan fasilitasi alat olahan untuk KWT dan pelaku usaha pangan lokal (hilir). Sedangkan diverisifikasi konsumsi dilaksanakan melalui promosi konsumsi pangan B2SA, antara lain dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan menu B2SA untuk PKK dan KWT. Dari tahun ke tahun jumlah dan lokasi sasaran kegiatan dialokasikan cukup banyak untuk mencapai target peningkatan konsumsi beberapa golongan pangan yang belum mencapai angka ideal. g. Fasilitasi kegiatan optimalisasi pemanfaatan Tanah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kegiatan Pertanian dengan komoditas pertanian bernilai tinggi disertai dengan pembinaan dan bimbingan secara teknis oleh DPKP DIY. h. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan untuk mendekatkan akses pangan, mengurangi pengeluaran rumah tangga, dan sebagai salah satu sumber pangan dan gizi keluarga dengan melakukan pola tanam dan pola panen harian, mingguan, dan bulanan sesuai dengan karakteristik komoditas dan wilayah, serta kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan melalui berbagai alternatif media yang tidak memerlukan lahan	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			luas, misal *polybag*, galon bekas air mineral, hidroponik, vertikultur, dll. Selain itu untuk menambah protein hewani dari ikan lele, bisa menggunakan bis beton. Pemantauan terhadap kegiatan ini telah dilakukan secara berkala. Hasilnya, kegiatan ini selain *menjadi* lumbung hidup untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. i. Penerapan strategi: 1) **Penerapan Pola B2SA**: Mendorong konsumsi pangan yang tidak hanya bergantung pada beras, tetapi mencakup nutrisi lengkap dari berbagai sumber (karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral) sesuai proporsi "Isi Piringku". 2) **Peningkatan Skor PPH melalui Diversifikasi Pangan Lokal**: Memaksimalkan potensi sumber daya lokal DIY untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, sekaligus meningkatkan ekonomi perdesaan. 3) **Sosialisasi dan Edukasi Kualitas Keamanan Pangan dan aspek Halal**: Memastikan pangan bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi, serta memenuhi standar sesuai regulasi melalui kampanye masif mengenai pentingnya pangan bergizi dan aman secara berkelanjutan serta mengintegrasikan jaminan kehalalan dalam rantai pasok	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			pangan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan konsumsi bagi masyarakat. j. **Optimalisasi Pemanfaatan Lahan**: mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif misal mengintegrasikan pertanian dan peternakan di lahan pekarangan, hingga Tanah Kas Desa (TKD) untuk diversifikasi pangan guna memenuhi kebutuhan pangan/menciptakan ketahanan pangan tingkat keluarga dan desa secara mandiri. Bentuk tindak lanjut tersebut sudah diimplementasikan melalui Optimalisasi Dana Keistimewaan dalam mendukung penyelenggaraan urusan pangan DIY di tahun 2025 melalui beberapa kegiatan: 1) Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian 2) BKK Desa Mandiri Pangan Lumbung Mataraman beserta dengan monev dan pendampingannya 3) Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat k. Sosialisasi Produk Pangan Lokal Paniradya Kaistimewan melalui urusan pertanahan pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran kepada 40 Kalurahan yang melaksanakan BKK Tertib Administrasi Pertanahan dalam bentuk optimalisasi Tanah Kalurahan untuk kegiatan pertanian Hortikultura hingga peternakan Kambing, dengan rincian: - Kabupaten Gunungkidul, 18 Kalurahan - Kabupaten Sleman, 15 Kalurahan - Kabupaten Kulon Progo, 4 Kalurahan,	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			- Kabupaten Bantul, 3 Kalurahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2025 mencapai 1278 KPM	
2	**Urusan Pertanian**			
	Adanya perubahan iklim yang menyebabkan tantangan di sektor pertanian perubahan pola tanam, Penyebaran hama dan penyakit tanaman (OPT) yang merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Terjadi penurunan produksi tanaman pangan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, yaitu Padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar. Untuk produksi tanamanan holtikultura yang mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan 2023, yaitu Durian, Salak, Semangka, Melon, Kencur dan Anglonema. Untuk sektor peternakan, terjadi penurunan populasi ternak pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, yaitu Babi, Kambing dan ayam ras pedaging. Untuk semua komoditas perkebunan tahun 2024 mengalami penurunan	1. Meningkatkan kesejahteraan petani di DIY dengan optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No. 11/2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan program-program yang berkesinambungan, terukur dan jelas target dan sasarannya, sehingga petani DIY sejahtera. 2. Adanya insentif generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Program-program pemberdayaan petani milineal perlu dirancang dengan memperhatian target dan sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan dengan sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholder* lain. 3. Perlunya optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan kabupaten terkait dengan pelaksanaan perda	1. Mengoptimalkan program perlindungan dan pemberdayaan petani berbasis komoditas pangan strategis (padi, kedelai, kacang-kacangan, dan umbi) melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani; Meningkatkan indeks pertanaman (IP) pada lahan eksisting melalui pendampingan teknis budidaya adaptif perubahan iklim; Menguatkan pertanian terintegrasi dengan pengendalian OPT dan penggunaan benih unggul spesifik lokasi; Melakukan fasilitasi kemitraan petani pangan dengan BULOG, BUMD pangan, koperasi, atau offtaker lokal untuk memperbaiki kepastian harga dan pendapatan petani. 2. Fasilitasi program pengembangan desa mandiri pangan dalam bentuk lumbung mataraman. Lumbung mataraman sudah mencakup *integrated farming system* (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dsb). 3. Sesuai Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani yang menekankan regenerasi sumber daya manusia pertanian, UPTD BPSDMP DIY memprioritaskan keterlibatan pemuda dan pemudi tani di sektor hulu hingga hilir berbagai komoditas. Oleh karena itu, pada tahun 2025 disusun perencanaan Program Forum Komunikasi Petani Milenial yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026	1. Upaya peningkatan Produktivitas dan kesejahteraan petani yang masih rendah. 2. Upaya antisipasi penanganan Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam dan produksi. 3. Upaya penanganan Serangan OPT yang mengurangi hasil panen. 4. Upaya menangani Rantai pemasaran yang belum optimal, menyebabkan ketidakpastian harga. 5. Perencanaan RTT sudah mempertimbangkan perubahan iklim. 6. Forum Komunikasi Petani Milenial dibentuk sebagai wadah komunikasi bagi petani muda untuk menyampaikan aspirasi, minat, dan usulan kegiatan usaha pertanian yang selama ini belum terakomodasi secara optimal, sehingga gagasan dan harapan mereka dapat disampaikan secara terstruktur kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Lumbung mataraman yang sudah terfasilitasi sebanyak 16 desa. 8. Meningkatnya kesejahteraan petani di kalurahan melalui pelibatan petani milenial dan masyarakat miskin pada kegiatan pertanian.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	dibandingkan tahun 2023. Tantangan urusan pertanian lainnya adalah masalah alih fungsi lahan. Permasalahan alih fungsi lahan pertanian masih harus menjadi perhatian. Menurut BPS DIY tahun 2023, unit usaha di sektor pertanian di DIY selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada Sensus tahun 2013 terdapat 584.802 unit usaha pertanian yang kemudian turun menjadi 31.705 unit pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 26,18% dalam kurun waktu 10 tahun. Menurut Data Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2018 di wilayah Kulonprogo telah terjadi alih fungsi lahan seluas 696,89 hektare, Gunungkidul pada tahun 2014 terjadi alih fungsi lahan sebesar 220,2 hektare dan 2019 seluas 97,22 hektare. Sementara untuk alih fungsi lahan di wilayah Sleman, paling masif dan besar terjadi pada tahun 2022 seluas 264,40 hektare untuk	tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam menekan laju alih fungsi lahan di DIY. 4. Pemda DIY dan pemerintah kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), seperti dimandatkan oleh Perda DIY No. 6/2021 tentang perubahan Perda DIY No. 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan turan-aturan turunannya untuk mendukung implementasi di lapangan, serta mendorong kabupaten untuk menetapkan perda PLP2B. 5. Pemda DIY perlu melakukan mitigasi terhadap gagal panen dan kematian ternak yang disebabkan karena faktor cuaca, OPT maupun virus dan bakteri. 6. Optimalisasi kartu asuransi petani untuk membantu petani yang mengalami gagal panen baik pertanian pangan, holtikultura, perkebunan maupun peternakan. 7. Perlunya diatur tata kelola pupuk bersubsidi bagi petani	melalui APBD, dengan sasaran pemuda-pemudi tani dan petani berpengalaman guna memperkuat komunikasi lintas generasi dalam usaha pertanian, sekaligus memberikan apresiasi kepada petani milenial inspiratif melalui mekanisme seleksi di tingkat kabupaten/kota. 4. Kawasan LP2B sudah dimasukkan dalam Perda RTRW Kabupaten. OPD menyediakan basis data dan analisis teknis lahan pertanian pangan eksisting sebagai bahan sinkronisasi kebijakan lintas sektor; mengawal pemutakhiran data spasial lahan sawah dan lahan pangan non-sawah berbasis SIG bekerja sama dengan kabupaten/kota; serta mengawal penyusunan peta kerawanan alih fungsi lahan pertanian pangan sebagai bahan rekomendasi teknis dalam proses perizinan tata ruang. 5. Kawasan LP2B sudah dimasukkan dalam Perda RTRW Kabupaten. OPD mengawal penyusunan peta usulan LP2B secara teknis dan partisipatif di tingkat kabupaten/kota dengan menyediakan data produksi, kesesuaian lahan, dan irigasi sebagai dasar penetapan LP2B; serta melakukan pendampingan teknis kepada kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen pendukung LP2B dan integrasinya ke dalam RTRW dan RDTR. 6. Penguatan sistem mitigasi dan perlindungan usaha tani pangan melalui pengembangan kalender tanam adaptif iklim berbasis prakiraan cuaca dan data historis serangan OPT dan	9. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor yang belum optimal dalam perlindungan lahan. 10. Data spasial lahan pertanian yang perlu terus diperbarui. 11. Mempertahankan tanah kalurahan dari alih fungsi lahan menjadi selain untuk kegiatan pertanian. 12. Telah disusun Perda RTRW Kabupaten, perlu segera menyusun RDTR Kabupaten. 13. Risiko gagal panen dan kematian ternak akibat cuaca, OPT, dan penyakit. 14. Perlu sistem peringatan dini dan kalender tanam adaptif iklim. 15. Perencanaan RTT sudah mempertimbangkan perubahan iklim. 16. Dais sudah mengakomodir peningkatan jaringan irigasi tersier dan Pembangunan Sumur Air Baku. 17. Tingkat partisipasi asuransi pertanian yang masih rendah. 18. Terkait pupuk bersubsidi: - Tata kelola pupuk bersubsidi yang belum efektif (pendataan, penyaluran, pengawasan). - Kesenjangan informasi antara regulator, distributor, dan petani; - Mekanisme updating data penerima yang perlu dipercepat dan diperluas.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	pembangunan jalan tol dan perumahan. Dari angka tersebut, alih fungsi lahan pertanian di DIY rata-rata per tahunnya sebesar 150-200 hektare dan dikhawatirkan pada tahun 2040-2050 DIY akan mengalami krisis lahan pertanian yang tentunya akan mengancam ketahanan pangan di DIY. Terjadi penurunan Angkatan Kerja Sektor Pertanian. Pada tahun 2023 jumlah penduduk DIY yang bekerja di sektor pertanian sebesar 420,457 orang (17,94%) mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 406.067 orang (17,11%) atau penurunan sebesar 14.390 orang (3,4%) dibandingkan tahun 2023. angkatan kerja sektor pertanian didominasi oleh angkatan kerja di atas 40 tahun dengan pendiidkan yang rendah. Hal tersebut disebabkan sektor pertanian tidak menarik bagi generasi muda karena penghasilan kecil, menyempitnya lahan pertanian di DIY, urbanisasi dan pergeseran angkatan kerja	baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif dan efisien. 8. Adanya pengembangan pupuk organik sebagai alternatif penyediaan pupuk bagi petani yang lebih efektif dan efisien kelola 9. Optimalisasi bantuan alat pertanian dan benih kepada petani. 10. Pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses dan distribusi pertanian. 11. Perlu ada data yang riil untuk mengetahui kinerja urusan pertanian terkait data produksi pertanian baik pangan, holtikultura, perkebunan maupun peternakan karena data yang tersaji masih bersifat sementara maupun sangat sementara. 12. Perlunya pemanfaatan dana keistimewaan dalam urusan pertanian termasuk pengembangan irigasi dan embung	peningkatan kapasitas petani dan POPT dalam deteksi dini dan pengendalian OPT terpadu. Optimalisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan memperluas cakupan peserta melalui sosialisasi aktif, pendampingan pendaftaran, dan integrasi dengan program bantuan sarana produksi. 7. Terkait perubahan pola tanam akibat perubahan iklim, pemda DIY melalui dinas PUPESDM DIY dan Komisi Irigasi DIY merencanakan , menyusun, Rencana Tata Tanam Daerah Irigasi Teknis Kewenangan Pemda DIY dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai dari Dinas PU dan Pertanian Kab/Kota, hingga usulan-usulan dari masyarakat petani melalui P3A. Dalam perencanaan RTT , perhitungan ketersediaan sudah berkoordinasi dengan pengampu Wilayah Sungai di DIY yaitu BBWS Serayu Opak yang sudah mempertimbangan perubahan iklim. 8. Optimalisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan memperluas cakupan peserta melalui sosialisasi aktif, pendampingan pendaftaran, dan integrasi dengan program bantuan sarana produksi. 9. Tata kelola pupuk bersubsidi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, OPD melakukan koordinasi dengan pemangku	19. Pemanfaatan alat mesin pertanian dapat dioptimalkan baik oleh kelompok tani penerima maupun kelompok tani disekitarnya. 20. Pembagian kewenangan dan anggaran dilakukan dalam upaya mendukung program swasembada pangan 21. Data yang masih sementara, untuk itu perlu dilakukan pembahasan dan verifikasi dengan Kabupaten secara berkala sehingga akan mendapatkan data yang akurat sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. 22. Rehabilitasi irigasi tersier dapat dilaksanakan menggunakan anggaran danais 23. Perencanaan RTT sudah mempertimbangkan perubahan iklim. 24. Lumbung mataraman yang sudah terfasilitasi sebanyak 16 desa. 25. Meningkatnya kesejahteraan petani di kalurahan melalui pelibatan petani milenial dan masyarakat miskin pada kegiatan pertanian. 26. Mempertahankan tanah kalurahan dari alih fungsi lahan menjadi selain untuk kegiatan pertanian. 27. Dais sudah mengakomodir peningkatan jaringan irigasi tersier dan Pembangunan Sumur Air Baku.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	dari pertanian ke indutsri atau jasa. Pengadaan pupuk bersubsidi masih menemui banyak permasalahan di tingkat petani. Carut marut dalam tata kelola pupuk bersubsidi, pengawasan proses pendataan penerima pupuk bersubsidi, proses penyaluran pupuk bersubsidi masih menjadi permasalahan yang berdampak kepada petani dalam mengakses pupuk bersubsidi. Nilai Tukar Petani (NTP) DIY juga menjadi tantangan bagi urusan pertanian di DIY. Nilai Tukar Petani adalah indikator terhadap kesejahteraan petani. Semakin tinggi angka NTP semakin sejahtera petani. Menurut data BPS tahun 2024, Nilai Tukar Petani DIY tahun 2024 sebesar 104,87%, walaupaun sudah mencapai lebih dari 100% namun angka tersebut berada dibawah NTP nasional sebesar 119,92%, bahkan NTP DIY terendah se Pulau Jawa.		kepentingan pupuk bersubsidi, meliputi Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, produsen pupuk bersubsidi, PUD (Pelaku Usaha Distribusi), PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah), penyuluh pertanian, serta petani pengguna pupuk bersubsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 10. Penyusunan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tentang alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian yang ditindaklanjuti dengan penyusunan surat keputusan kepala dinas yang membidangi pertanian di tingkat kabupaten/kota, sebagai dasar untuk penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, pelaku usaha distributor dan PPTS hingga ke petani pengguna segera setelah alokasi tingkat provinsi ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. 11. Pendampingan dalam proses *updating* penerima pupuk bersubsidi. Petani yang belum diusulkan sebagai penerima pupuk bersubsidi bisa ditambahkan pada periode *updating* ini. Pada tahun ini updating dilaksanakan sebanyak 3 kali. 12. Menyampaikan data petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi selama 3 tahun kepada penyuluh pertanian untuk bahan pertimbangan pendaftaran pengajuan penerima pupuk bersubsidi pada tahun berikutnya. 13. Melakukan koordinasi dan pemantauan pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian yang diterima kelompok tani agar berdampak terhadap peningkatan produksi.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			14. Pembangunan jalan usaha tani bersama dengan kabupaten telah dikoordinasikan dengan desa untuk pembangunan jalan usaha tani melalui dana desa, supaya pembangunan jalan usaha tani tidak berdampak terhadap alih fungsi lahan pertanian. 15. Data produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan memerlukan proses pembahasan dan verifikasi secara berkala bersama pemerintah kabupaten. Penyajian data yang bersifat riil dan final memerlukan koordinasi lintas wilayah, mengingat data dari kabupaten seringkali mengalami pembaruan sebelum ditetapkan secara resmi. Upaya perbaikan sistem pendataan dan peningkatan koordinasi terus dilakukan untuk menjamin akurasi dan keterandalan data sebagai dasar evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan pertanian. 16. Dinas PUPSDM DIY membangun RJIT melalui Dana Keistimewaan, berdasarkan Perda DIY Nomor 07 tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, urusan irigasi dan embung menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. 17. Sesuai amanat Perda No 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, sistem irigasi merupakan salah satu perwujudan Keistimewaan DIY, objek kebudayaan, dan bagian dari kewenangan Pemda untuk memenuhi pelayanan air yang ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan serta	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			kesejahteraan masyarakat petani. Pemda DIY melalui alokasi Dana Keistimewaan telah melaksanakan beragam intervensi pada aktivitas peningkatan saluran/jaringan irigasi tersier maupun intervensi terhadap pembangunan/pemeliharaan embung. 18. Fasilitasi kegiatan optimalisasi pemanfaatan Tanah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kegiatan Pertanian disertai dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Berdasarkan data yang dihimpun, luasan lahan Tanah Kalurahan yang dioptimalisasi untuk kegiatan pertanian dan/atau peternakan pada tahun 2025 yang tersebar pada 40 Kalurahan dengan luas 727.939 m2 atau 72,79 hektar. 19. pelaksanaan peningkatan jaringan irigasi terutama di tersier sudah dilaksanakan melalui Dais melalui sukegiatan Lumbung Mataraman Pembangunan Sumur Air Baku untuk pertanian beberapa sudah dilakukan di TA 2025 melalui sub kegiatan Lumbung Mataraman.	
3	**Urusan Kelautan dan Perikanan**			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Belum optimalnya pemanfaatan potensi laut di DIY karena adanya kesenjangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. terjadi kesenjangan produksi ikan tangkap dan budidaya selama tahun 2020–2024, yaitu kisaran produksi ikan tangkap tahun 2020-2024 belum mencapai 10% (5-7%) terhadap produksi ikan budidaya. Produksi perikanan budidaya tahun 2024 sebesar 97.494,74 ton meningkat 26,74 ton (0,02%) dari target yang ditentukan sebesar 97.468 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 7.319,03 ton, naik 210,03 ton (2,9%) dari target yang ditentukan sebesar 7.109 ton. Sehingga produksi perikanan budidaya masih mendominasi total produksi perikanan di DIY yaitu sebesar 92% sedangkan produksi perikanan tangkap sebesar 8%. Tantangan urusan Kalautan dan Perikanan di DIY adalah konsumsi makan ikan di DIY tahun 2024 terendah se	a. Perlu adanya data *base* nelayan DIY. b. Perlu adanya insentif bagi nelayan DIY untuk meningkatkan jumlah nelayan DIY. c. Optimalisasi program kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARI) dengan melibatkan banyak stakeholder untuk meningkatkan konsumsi makan ikan di DIY secara jelas, terukur dan tepat sasaran. d. Membuat peta jalan penyelesaikan Tanjung Adikarto yang masih mangkrak. e. Pembangunan revitalisasi infrastruktur dan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing untuk mempermudah akses. f. Perlunya pelatihan bagi nelayan untuk menjadi nelayan yang modern, pelatihan pembuatan pakan ikan dengan bahan lokal lebih dioptimalkan. g. Optimalisasi pelaksanaan Penyediaan bibit ikan yang bagus oleh OPD terkait.	a. Data base nelayan saat ini dapat diakses pada aplikasi satu data kusuka milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain nelayan, juga terdapat data base pembudidaya ikan, pelaku usaha pengolahan, pemasaran, dan petambak garam. b. Insentif yang telah dilakukan oleh pemda DIY antara lain penyediaan sarana penangkapan ikan melalui hibah alat penangkapan ikan, hibah kapal sekoci serta pelatihan magang PMT dan Sekoci. Selain itu, nelayan juga mendapatkan fasilitas BBM Bersubsidi berdasarkan hasil rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. c. Program Gemarikan terdiri dari 2 aktivitas yaitu Kampanye Gemarikan dan Festival Suka Ikan di Sekolah. Aktivitas tersebut melibatkan berbagai macam *stakeholder* antara lain Akademisi, Praktisi Pengolahan, Praktisi SPPG, Sekolah, dan Forikan DIY. d. *Road map* penyelesaian Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto sedang ada pembahasan kerjasama dengan Kadin DIY dan Fakultas Teknik UGM untuk disusun *Feasebility Study* Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta. e. Telah dianggarkan melalui anggaran dana keistimewaan terkait penyempurnaan lantai dermaga PPP Gesing yang dapat memudahkan nelayan untuk mendaratkan hasil produksi ikan tangkapan. f. Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi:	a. Aplikasi satu data kusuka dapat diakses pada *laman https://portaldata.kkp.go.id/* Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan yang sudah terdaftar kusuka sebanyak 1.603 pelaku usaha. b. Jumlah desa yang sudah terfasilitasi sebanyak 10 desa dalam bentuk BKK Desa Maritim. Selain itu sejumlah 34 kalurahan yang memiliki batas wilayah yang menempel pada garis pantai sudah terfasilitasi dalam bentuk pelatihan, hibah barang dan alat perikanan tangkap. c. Insentif yang telah diterima oleh nelayan DIY antara lain 1) Hibah alat penangkapan ikan 2) Hibah alat penangkapan ikan dan mesin 3) Hibah kapal motor perikanan 4) Fasilitasi BBM Bersubsidi 5) Pelatihan/bimtek kenelayanan (magang, alat penangkap ikan, *basic safety training,* dll). d. Yang telah dilaksanakan adalah aktivitas Kampanye Gemarikan sebanyak 290 angkatan di 5 kabupaten/kota e. Saat ini masih berproses untuk pembentukan tim dari Kadin DIY dan Fakultas Teknis UGM f. Penyempurnaan lantai dermaga PPP Gesing memudahkan nelayan untuk

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Indonesia, yaitu sebesar 35,83 kg/kapita/tahun, sedangkan angka nasional sebesar 56,48 kg/kapita/tahun (Data BPS, 2024). Padahal program GEMARI yang menjadi salah satu program kegiatan unggulan urusan Kelautan dan Perikanan cukup masif dilakukan, namun belum mampu meningkatkan posisi DIY sebagai provinsi dengan konsumsi makan ikan yang terendah di di Indonesia.	h. Kemudahaan akses bahan bakar bersubsidi bagi nelayan. i. Optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No. 6/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam agar kesejahteraan nelayan terjamin. j. Penggunaan dana keistimewaan untuk urusan perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan nelayan dan kelautan di DIY.	1) Pelatihan penggunaan alat penangkapan ikan 2) Pelatihan *basic safety training* 3) Pelatihan perawatan dan perbaikan motor tempel 4) Fasilitasi pendaftaran buku kapal perikanan 5) Gerai Perizinan Usaha Perikanan Tangkap 6) Magang kapal motor 10-20 GT g. Pelatihan Pakan Mandiri telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY meskipun kandungan protein dari pakan mandiri belum mampu bersaing dengan pakan pabrikan. Pakan mandiri saat ini sifatnya untuk mengurangi kebutuhan pakan pabrikan. h. Pemda DIY melalui UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya memiliki 7 unit kerja antara lain: 1) Unit Kerja Budidaya Air Tawar Cangkringan: komoditas ikan nila nilasa dan ikan mas najawa 2) Unit Kerja Budidaya Air Tawar Wonocatur: komoditas ikan nila lele dan ikan nila nilasa 3) Unit Kerja Budidaya Air Tawar Sendangsari: komoditas ikan gurami dan ikan nila nilasa 4) Unit Kerja Budidaya Air Tawar Bejiharjo: komoditas ikan tawes jois, ikan nila nilasa, ikan lele, dan ikan gurami 5) Unit Kerja Budidaya Air Payau Samas: komditas udang galah, udang vaname dan ikan nila salin 6) Unit Kerja Budidaya Air Payau Congot: komoditas udang vaname dan ikan nila salin	mendaratkan hasil produksi ikan tangkapan. g. Kegiatan pelatihan dilaksanakan menggunakan anggaran dana keistimewaan dan APBD DIY. h. Pelatihan pakan mandiri telah dilaksanakan pada tahun 2023. Pelatihan pakan mandiri telah dilaksanakan dan memfasilitasi praktek di kelompok yang telah melaksanakan program pakan mandiri. Selain itu akses untuk informasi bahan baku dan formulasi pakan mandiri telah disampaikan. i. Sertifikat masih berlaku sampai dengan tahun 2029. j. Jumlah nelayan yang telah mengakses BBM bersubsidi sebanyak 195 nelayan dan terdapat 2 subpenyalur yang ada di PPP Sadeng k. Fasilitasi program pengembangan desa maritim dalam bentuk budaya bahari. l. Terus dilakukan sosialisasi terhadap Perda DIY Nomor 6 tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Selain itu dengan disahkan Pergub DIY Nomor 6 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			7) Unit Kerja Budidaya Air Laut Sundak: komoditas ikan bandeng, ikan nila salin dan udang vaname. Seluruh unit kerja telah terserifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan i. Nelayan DIY telah memiliki akses bahan bakar bersubsidi atas rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten. j. Saat ini telah disahkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. Pergub tersebut merupakan turunan dari Perda DIY Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. k. Beragam aktivitas perikanan dan kelautan telah terfasilitasi dengan baik melalui alokasi Dana Keistimewaan dalam mewujudkan pengembangan Budaya Bahari di DIY. Mulai dari aktivitas optimalisasi budidaya perikanan di daratan hingga optimalisasi keberlanjutan budaya maritim di kawasan pesisir selatan DIY. l. Melalui anggaran dana keistimewaan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melaksanakan beberapa aktivitas:	Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam semakin memudahkan pemberian penghargaan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan. m. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui anggaran dana keistimewaan seperti pembangunan PPP Gesing, pelatihan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, penyediaan sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan dan budidaya ikan lokal, serta pengembangan kalurahan maritim. n. Jumlah desa yang sudah terfasilitasi sebanyak 10 desa dalam bentuk BKK Desa Maritim. Selain itu sejumlah 34 kalurahan yang memiliki batas wilayah yang menempel pada garis pantai sudah terfasilitasi dalam bentuk pelatihan, hibah barang dan alat perikanan tangkap.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			1) Pembangunan PPP Gesing 2) Pelatihan bagi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 3) Penyediaan sarana dan prasarana budidaya, tangkap, pengolahan, dan garam melalui hibah 4) Pengembangan BKK Kalurahan Maritim 5) Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan budidaya ikan lokal m. Fasilitasi program pengembangan desa maritim dalam bentuk budaya bahari.	
4	**Urusan Kehutanan**			
	Kinerja urusan kehutanan tahun 2024 telah mencapai target yang diharapkan. Pembangunan kehutanan di DIY sendiri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari, dimana salah satu upayanya dilakukan melalui program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Dengan	a. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan hutan yang berperspektif lingkungan. b. Perlunya pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelembagaan hutan rakyat, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan. c. Penambahan lahan tutupan vegetasi di DIY. d. Perlunya pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengelolaan hutan lestari.	a. Hutan konservasi di DIY memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Salah satu hutan konservasi yang pengelolannya ada di Pemda DIY adalah Taman Hutan Raya Bunder (Tahura Bunder). Kawasan pelestarian alam ini untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami maupun buatan, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. di DIY, terdapat Tahura Bunder seluas 771,32 hektare. Dalam pengelolaannya, tidak terdapat pengurangan luasan hutan konservasi sejak kawasan ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor SK,351/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa aktivitas di hutan konservasi antara lain :	a. Dengan dipertahankannya luas hutan konservasi, maka keberadaan Tahura Bunder sebagai kawasan hutan konservasi menyelesaikan permasalahan terkait: 1. penyediaan habitat alami bagi flora dan fauna, termasuk spesies langka dan endemik; 2. Daerah resapan air, mencegah banjir, dan menjaga ketersediaan air tanah khususnya di sekitar Sungai Oyo dan karst Gunungkidul; 3. Penyerapan karbon dan efek pemanasan global, b. Laboratorium alam/pusat penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan, c. Pelestarian nilai budaya dan keterkaitan sejarah antara Alas Bunder dan Keraton Yogyakarta, dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	perhutanan sosial, masyarakat dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi secara legal untuk meningkatkan esejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Namun apabila dilihat dari indeks kualitas lahan (IKLH), realisasi IKLH 2024 sebesar 68,44 melebihi dari target yang ditentukan sebesar 63,29. Namun, komponen indeks kualitas lahan di DIY tahun 2024 belum memenuhi target yang tentukan, yaitu sebesar 51,13 sementara target yang ditentukan sebesar 51,44 sehingga capaiannya sebesar 99,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka tutupan vegetasi di DIY masih dalam kategori sedang dan belum sesuai dari target yang diharapkan sebesar 51,44.		- Operasi kegiatan pengamanan kawasan Tahura Provinsi seluas 771,32 - Pembersihan lahan bawah tegakan 2 ha - Pembuatan sekat bakar 2 ha - Pemeliharaan tegakan rawan bencana sebanyak 10 pohon - Pembinaan dan pendampingan peran masyarakat dalam pengelolaan Tahura ke 5 desa Keberadaan hutan konservasi di DIY diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain: Ekologis: Menjaga keseimbangan ekosistem, sumber air, dan mencegah erosi. Sosial: Menjadi sumber pendidikan dan penelitian bagi masyarakat dan akademisi. Ekonomi: Beberapa kawasan dimanfaatkan untuk ekowisata, memberikan pendapatan bagi masyarakat setempat. Budaya: Beberapa hutan konservasi memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat lokal. b. Pendampingan kepada KTH terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melalui Penyuluh Kehutanan. Selain oleh penyuluh kehutanan, pendampingan juga dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). PKSM adalah individu dari masyarakat yang secara sukarela berperan dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. Mereka biasanya merupakan pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan, dengan	d. pendapatan masyarakat sekitar hutan yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan dan ekowisata e. Masyarakat sekitar hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) umumnya menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan. Namun, keterbatasan akses dan keterampilan dalam mengelola hasil hutan sering kali menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendampingan KTH mendukung penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan khususnya bagi masyarakat sekitar hutan. Pasca pendampingan, KTH menjadi lebih berdaya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memastikan kelestarian ekosistem hutan secara berkelanjutan. Model ini bukan hanya solusi ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga pendekatan berbasis lingkungan sebagai penerapan pembangunan berkelanjutan f. Terpenuhinya sarpras di area tahura; g. Membantu sosialisasi dan edukasi terkait konservasi dan pemanfaatan hutan rakyat. h. Persoalan yang diselesaikan adalah menurunnya lahan kritis di DIY sampai dengan tahun 2024 sebesar 4,48%

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			kesadaran sendiri, mau dan mampu menjadi penyuluh bagi masyarakat lainnya. Beberapa pendampingan kepada KTH sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut : - Bimtek dan pembinaan tata kelola lembaga dan usaha KTH kepada 10 KTH - Peningkatan kelas KTH sebanyak 10 KTH - Fasilitasi pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api sebanyak 1 angkatan - Fasiitasi pembentukan dan pembinaan masyarakat mitra polhut sebanyak 1 angkatan c. Indeks Kualitas Lahan Urusan kehutanan berperan penting dalam upaya pemenuhan target Indeks Kualitas Lahan di DIY karena berkontribusi dalam penambahan tutupan vegetasi. Penambahan tutupan vegetasi salah satunya dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Berikut beberapa kegiatan RHL sepanjang tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 378 ha dengan perincian sebagai berikut : Kegiatan RHL dengan sumber pembiayaan dari APBD sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan penghijauan lingkungan seluas 1 ha yang berlokasi di Dusun Berbah, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 60 batang dengan jenis jambu air sebanyak 50 batang dan kelengkeng 10 batang.	dari target luas lahan kritis yang perlu diintervensi sd Tahun 2027 sebesar 35.902,62 ha. i. Kontribusi dana keistimewaan dalam pengelolaan hutan lestari turut menyelesaikan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Hutan Konservasi Alas Bunder yang dikelola Balai Tahura Bunder antara lain yaitu penyediaan Desain Tapak Tahura Bunder, pengendalian populasi tanaman invasif yaitu bambu dan kayu putih di kawasan Hutan Tahura Bunder, penambahan koleksi tanaman Tahura Bunder, penandaan tanda batas dalam kawasan Tahura Bunder dan pembangunan kandang rusa koleksi Tahura Bunder pasca relokasi. Selain itu juga dengan adanya edukasi melalui sosialisasi KTH, Pemda DIY dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, spesifik dan aplikatif kepada Kelompok Tani Hutan pengelola hutan rakyat dalam pengamanan dan perlindungan hutan serta antisipasi terhadap perubahan iklim. Dana Keistimewaan juga berkontribusi dalam upaya penurunan lahan kritis di kawasan bekas tambang lereng Merapi yang kondisinya sangat memprihatinkan sehingga bapak Gubernur DIY *bertitah: Ingsun kagungan kersa : Gunung bali gunung,*

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			2) Kegiatan pelestraian mata air seluas 5 ha yang berlokasi di Mata Air Ngepring, Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Jenis tanamannya adalah aren (425 batang), Ficus SP (230 batang), gayam (300 batang), kemiri (170 batang), duwet (400 batang), petai (400 batang), dan sirsak (75 batang). 3) Pembangunan gully plug sebanyak 5 unit yang berlokasi di : - KTH Margo Tani, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul (1 unit) - KTHR Tani Rejo, Seloharjo, Pundong, Bantul (2 unit) - KTH Sumber Rejeki, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul (1 unit) - KTH Umbul Makmur, Sumberharjo, Prambanan, Sleman (1 unit) 4) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) melalui dana APBD sebanyak 2 unit dengan total luasan yang direhabilitasi sebesar 200 ha. Lokasi KBR dimaksud adalah : - KTH Sedyo Nurut, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul - KTH Wana Lestari, Bleberan, Playen, Gunungkidul d. Kegiatan RHL yang bersumber Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang adalah : - Realisasi penanaman di Satuan Ruang Strategis pada tahun 2024 seluas 10 ha di Satuan Ruang Strategis Merapi tepatnya di Padukuhan Karang Kendal dan Gunung Wulung Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman	*kuwi opo sing bisa tak andhareke marang sliramu kabeh, muga-muga bisa kelaksanan*

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			e. Selain kegiatan yang bersumberdana dari APBD, kegiatan RHL juga didukung oleh APBN dengan perincian sebagai berikut : Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di 2 lokasi yaitu : - KTH Sido Maju, Widoro Giripurwo Purwosari Gunungkidul (sengon : 25.000 btg, alpukat: 10.000 btg) dengan luas tanam 75 ha; - KTH Marsudi Raharjo, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul (Sengon : 30.000 btg, petai : 5.000 btg) dengan luas tanam 72 ha f. Indeks Kualitas Lahan Urusan kehutanan berperan penting dalam upaya pemenuhan target Indeks Kualitas Lahan di DIY karena berkontribusi dalam penambahan tutupan vegetasi. Penambahan tutupan vegetasi salah satunya dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Berikut beberapa kegiatan RHL sepanjang tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 378 ha dengan perincian sebagai berikut : Kegiatan RHL dengan sumber pembiayaan dari APBD sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan penghijauan lingkungan seluas 1 ha yang berlokasi di Dusun Berbah, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 60 batang dengan jenis jambu air sebanyak 50 batang dan kelengkeng 10 batang. 2) Kegiatan pelestraian mata air seluas 5 ha yang berlokasi di Mata Air Ngepring, Kemiri,	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Purwobinangun, Pakem, Sleman. Jenis tanamannya adalah aren (425 batang), Ficus SP (230 batang), gayam (300 batang), kemiri (170 batang), duwet (400 batang), petai (400 batang), dan sirsak (75 batang). 3) Pembangunan gully plug sebanyak 5 unit yang berlokasi di : - KTH Margo Tani, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul (1 unit) - KTHR Tani Rejo, Seloharjo, Pundong, Bantul (2 unit) - KTH Sumber Rejeki, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul (1 unit) - KTH Umbul Makmur, Sumberharjo, Prambanan, Sleman (1 unit) g. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) melalui dana APBD sebanyak 2 unit dengan total luasan yang direhabilitasi sebesar 200 ha. Lokasi KBR dimaksud adalah : - KTH Sedyo Nurut, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul - KTH Wana Lestari, Bleberan, Playen, Gunungkidul h. Kegiatan RHL yang bersumber Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang adalah : - Realisasi penanaman di Satuan Ruang Strategis pada tahun 2024 seluas 10 ha di Satuan Ruang Strategis Merapi tepatnya di Padukuhan Karang Kendal dan Gunung Wulung Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			i. Selain kegiatan yang bersumberdana dari APBD, kegiatan RHL juga didukung oleh APBN dengan perincian sebagai berikut : Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di 2 lokasi yaitu : - KTH Sido Maju, Widoro Giripurwo Purwosari Gunungkidul (sengon : 25.000 btg, alpukat: 10.000 btg) dengan luas tanam 75 ha; - KTH Marsudi Raharjo, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul (Sengon : 30.000 btg, petai : 5.000 btg) dengan luas tanam 72 ha k. Dalam upaya pemanfaatan hutan secara lestari, Pemda DIY juga menggunakan alokasi anggaran dari Dana Keistimewaan. Pada tahun 2025, melalui Subkegiatan Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram, Pemda DIY berfokus pada pengembangan tanaman filosofis. Selain itu juga dilakukan penanaman di Satuan Ruang Strategis pada tahun 2024 seluas 10 ha di Satuan Ruang Strategis Merapi tepatnya di Padukuhan Karang Kendal dan Gunung Wulung Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman. Pada tahun-tahun selanjutnya direncanakan terdapat aktivitas penanaman untuk menambah luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis (SRS) di DIY melalui anggaran dana keistimewaan urusan tata ruang.	
5	**Urusan Koperasi dan UMKM**			
	a. Jumlah koperasi aktif tahun 2024 sebanyak 1672	a. Peningkatkan program pembinaan dan pendampingan aspek kelembagaan, usaha	a. Dilaksanakan klinik koperasi untuk memberikan layanan konsultasi, aduan, pembinaan dan pendampingan koperasi berdasarkan 6 aspek	a. Ada peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT karen terlaksananya

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	menurun dibanding tahun 2023 sebanyak 1.734. b. Jumlah target koperasi modern tercapai, jumlah UMKM berkembang usahanya tercapai, jumlah wirausaha baru tercapai, jumlah UMKM berkembang tercapai. c. Rasio jumlah wirausaha dengan penduduk DIY belum terapai.	koperasi, keuangan, permodalan dan manajemen koperasi. b. Peningkatan Akses pembiayaan koperasi melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Bukan Bank (LKBB). c. Fasilitasi hibah melalui pasar komunitas seperti tahun 2021. d. Pembinaan Koperasi dan UMKM melalui enam aspek: sumber daya manusia, produksi, pemasaran,kelembagaan, keuangan dan pemasaran *online* harus terus dilakukan. e. Pemberian modal hibah pada koperasi perlu ditingkatkan. f. Pengembangan aplikasi sibakul untuk Koperasi dan UMKM. g. Perlu Progam menumbuhkan wirausaha baru dengan jumlah 100orang per Kalurahan Katergori Miskin dan menjangkau merata di DIY.	yang ada di SI Bakul (Produksi, Pemasaran, Digital, MArketing, Kelembagaan, Keuangan, SDM) yang dibutuhkan oleh koperasi. b. Dilaksanakan pendampingan ke kopersai untuk mempermudah akses pembiayaan dari perbankan dan non perbankan. Pendampingan yang dilakukan antara lain pelatihan, ;literasi keuangan, penyusunan businnes plan, peningkatankinerja koperasi melalui *score training*. c. Untuk saat ni difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM. d. Melalui beberapa program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UMKM. e. Difokuskan pada peningkatan kepasitas koperasi. f. Tetap dilaksanakan pengembangan aplikasi SIBakul Jogja untuk Koperasi dan UMKM untuk dilakukan *update* sesuai dengan kebutuhan. g. Akan ditindaklanjuti sesuai dengan prioritas ketersediaan anggaran.	RAT menunjukan bahwa koperasi tersebut dijalankan dengan baik. b. Koperasi telah melaksanakan pembukuan dfengan benar dan adanya peningkatan jumlah koperasi yang mengakses LPDB. c. Sudah dijalankan kemitraan antar koperasi, baik kemitraan pasar dansedangkan dikembangkan kemitraan sebagai kakak asuh-adik asuh untuk KDKMP. d. Koperasi lebh proaktif untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. e. Kemandirian koperasi ditingkatkan dengan kemitraan dan dorongan untuk memanfaatkan akses pembiayaan. f. Koperasi dapat mengetahui kondisi koperasinya sehingga mendapatkan acuan melalui fitur Klinik Koperasi dalam Sibakul Jogja untuk pengambangan koperasinya.
6	**Urusan Penanaman Modal**			
	a. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih menduduki peringkat teratas dalam realisasi investasi di DIY.	a. Pemda DIY harus melakukan penumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo.	a. Penumbuhan kegiatan ekonomi: 1) Pada Tahun 2025telah dilakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kulon Progo yang telah menginisiasi adanya kegiatan inventarisasi tanah yang dapat disewa atau dibeli oleh	a. Iklim penanaman modal yang belum ideal berupa minimnya data tekait informasi ketersediaan lahan untuk investasi di DIY.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	b. Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo cukup rendah realisasi investasi yang diperoleh. c. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal tahun 2024 tercapai 115 %.	b. Pemda DIY harus melakuan kajian potensi investasi pada Sektor primer dan penumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja di DIY. c. Pemda DIY harus menigkatkan Program pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	calon investor agar dapat direplikasi kepada kabupaten lain yang belum memiliki kegiatan ini. Inventarisasi tanah ini dapat digunakan sebagai alternatif sebelum adanya kegiatan *land banking* untuk investasi di DIY. 2) Perlunya untuk mulai mendesain tahapan penyusunan IPRO dengan sequence sebagai sebagai berikut : a) *Concept Sounding,* b) *Pengerjaan kajian,* c) *Market Sounding.* Dengan diberlakukannya tiga tahapan ini diharapkan kajian IPRO memiliki kemanfaatan yang lebih mengerucut pada target market tertentu. 3) Perlu adanya bagian di dalam IPRO yang membahas *point of engagement* agar orang yang membaca IPRO memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam pengurusan izin berdasarkan data-data yang ada. 4) Inisiasi penyusunan *Importance Performance Analysis* di Sistem informasi Sepeda Panda untuk dapat mengetahui landscape iklim penanaman modal secara umum yang ada di DIY. Mana saja variabel-variabel yang kritis dan butuh di-*upgrade* dan mana saja variabel yang performanya sudah berlebih. Dari sini diharapkan adanya *guidance* terkait prioritas program kerja Dinas maupun OPD lainnya yang bersinggungan dengan sektor investasi.	b. Menghilangkan hambatan investasi di sisi persyaratan dasar yaitu lingkungan (AMDAL) yang pengurusannya mahal dan membutuhkan waktu tidak sebentar. c. Memperlancar transportasi bahan maupun produk industri d. Menghilangkan hambatan investasi di sisi persyaratan dasar terkait KKPR. e. Pelaporan LKPM (Program/Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PM)
	f.		b. Kajian potensi investasi:	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			1) DIY sudah memiliki banyak portofolio IPRO di Gungung Kidul dan Kulon Progo, sehingga permasalahannya bukan pada kajian yang kurang untuk isu investasi di kedua kabupaten ini. 2) Hal penting yang dibutuhkan oleh Gunung Kidul adalah adanya Dokumen AMDAL Kawasan untuk menjembatani isu konservasi dan isu investasi di Gunung Kidul yang banyak terkendala luasan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 3) untuk optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Gunung Kidul diperlukan pembangunan akses jalan yang bagus dan layak dari jalan besar ke Kawasan Peruntukan Industri. 4) Untuk Kulon Pogo, diperlukan percepatan trase tol ke arah YIA juga sangat penting untuk menambah daya tarik kawasan Kulon Progo. 5) Secara keseluruhan di 3 Kabupaten diperlukan Percepatan RDTR dengan memperhatikan Usaha/Industri yang sudah ada/*Eksisting*.	
			c. DPMPTSP DIY telah banyak melakukan Bimbingan Teknis LKPM dan Klinik LKPM kepada pelaku usaha dengan harapan adanya pelaporan LKPM yang semakin tertib akan berbanding lurus dengan capaian realisasi investasi. Selain itu, kami juga terus melakukan optimalisasi terkait kegiatan	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko agar mampu menggali infiormasi terkait potensi pelaporan kegiatan PM yang belum dilakukan dan bernilai cukup signifikan. Menginisiasi pengawasan daring khusus untuk menyisir pelaku usaha yang gap antara realisasi dan rencana investasinya masih sangat tinggi.	
7	**Urusan Pariwisata**			
	a. Tercapai indikator Kinerja Urusan Pariwisata. b. Rata-rata tinggal wisatawan, lama tinggal, belanja wisatawan belum tercapai target kinerja sasaran.	a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wancanegara setiap tahun meningkat 15-20%. b. Pemanfatan Bandara YIA bagi dunia pariwisata di DIY. c. Pemda DIY melakukan program kegiatan yang bisa meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan di DIY. d. Promosi ke negara wisatawan wancanegara untuk DIY ditingkatkan.	a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara setiap tahun meningkat 15-20%. 1) Pemanfaatan promosi digital terintegrasi menggunakan *website* resmi pariwisata DIY maupun media sosial secara intensif dan pembuatan vidio promosi pariwisata secara tematik. 2) Sinergi dengan *stakeholder* pariwisata untuk pembuatan paket wisata dan penyelenggaran event pariwisata berskala nasional maupun internasional. 3) Pengembangan dan difersifikasi destinasi dengan fokus pada kawasan yang belum tergarap optimal seperti di kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. 4) Peningkatan daya tarik wisata alternatif seperti wisata berbasis alam, desa/kampung wisata, *wellness tourism*, wisata konservasi (misal pelepasan tukik), dan *medical tourism* (integrasi antara layanan rumah sakit	a. Pada periode yang sama (Januari-Mei) dibandingkan tahun lalu, untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara 2025 mengalami penurunan. Namun Dispar DIY berupaya menekan penurunan tersebut dengan melaksanakan beberapa aksi tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. b. Pemanfatan Bandara YIA bagi dunia pariwisata di DIY sudah diimplementasikan dalam program kegiatan Dispar DIY sebagai salah satu bentuk upaya promosi pariwisata. c. Pemda DIY, khususnya Dispar DIY melakukan program kegiatan yang bisa meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan di DIY, adanya event wisata malam hari, event musik nasional, event *sport tourism* sebagai beberapa upayanya. d. Promosi ke negara wisatawan wancanegara untuk DIY, melalui EATOF, promosi secara *online* dengan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			bersertifikat *health tourism* dengan layanan *hospitality* dari industri pariwisata) 5) Kolaborasi dan sinergi dengan mitra pariwisata *(penta helix)* antara lain melalui pengemasan event yang terintegrasi dengan paket wisata maupun penginapan 6) Kerja sama dengan provinsi lain maupun kerja sama pariwisata internasional melalui forum *EATOF (East Asia Inter Regional Tourism Federation)*.	menggunakan beberapa bahasa asing di media informasi Dispar DIY.
			b. Pemanfatan Bandara YIA bagi dunia pariwisata di DIY. 1) Adanya *Tourist Information Center (TIC)* di terminal kedatangan YIA yang merupakan pusat informasi pariwisata DIY, sebagai referensi bagi wisatawan yang berkunjung ke DIY dalam memutuskan aktivitas mereka selama di DIY. Hal ini terutama ditujukan kepada wisatawan yang berkunjung secara mandiri *(individual guess)*, tidak melalui travel agent. 2) Adanya atraksi wisata budaya di bandara YIA *(pentas cokekan)*, khususnya untuk *weekend* sebagai daya tarik wisata budaya DIY 3) *Locus* bandara berada di perbatasan DIY-Jateng, maka destinasi wisata di DIY perlu disiapkan agar menjadi pilihan utama wisatawan yang datang melalui bandara YIA ini, mengingat Jawa Tengah menjadi pesaing.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			c. Pemda DIY melakukan program kegiatan yang bisa meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan di DIY. 1. Kolaborasi event berbasis komunitas dan kalender wisata. Menambah event diluar musim liburan dan *high season* untuk tetap dapat menarik minat wisatawan dan mendorong lama tinggal serta belanja lebih banyak. 2. Pendekatan *Travel Bubble* antar destinasi di DIY. Mengintegrasikan kawasan destinasi antar kabupaten/kota agar wisatawan terdorong untuk berpindah-pindah, namun tetap dalam wilayah DIY.	
			d. Promosi ke negara wisatawan wancanegara untuk DIY ditingkatkan. 1. Mengajukan kegiatan promosi pariwasata luar negeri ke negara potensial wisatawan DIY seperti *Malaysia (MATTA FAIR), Singapore (NATAS Singapore), Thailand (TITF) dan forum business to business (Jogja Internasional Travel Mart)*. 2. Menjalankan kerja sama internasional di bidang pariwisata melalui forum kerja sama *EATOF (East Asia Inter Regional Tourism Federation)*. 3. Promosi pariwisata menggunakan bahasa asing melalui *website visiting* jogja (Bahasa Inggris, Korea, Jepang).	DINAS PARIWISATA DIY:
B	**KONDISI EKONOMI DAERAH**			
1	**Sektor Unggulan**			
a.	**Sektor Industri Pengolahan**			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	1) Kontribusi utama PDRB DIY sebesar 11,86% tahun 2024, tumbuh 3,63% nilai sebesar Rp.11.929,58 milyar. 2) Terdiri industri makananan dan minuman, industri tekstil,pakaian jadi,industri barang logam, komputer, barang elektronik, optic dan peralatan listrik **Permasalahan:** - Barang baku industri pengolahan tidak semua dari DIY. - Terkait pemasaran keluar negeri dipenngaruhi faktor eksterna luar negeri.	a. Pemerintah Daerah memberikan dukungan kebijakan pada sektor industri Pengolahan berupa faslitasi kemudahan agar bahan baku mudah didapat pelaku ekonomi di sektor Industri Pengolahan. b. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi tumbunya pasar baru di luar negeri yang memudahkan hasil industri DIY bisa masuk ke negara lain.	a. Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah DIY melalui Disperindag merencanakan dan akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan dukungan dan fasilitas untuk memudahkan pelaku ekonomi di sektor Industri Pengolahan dalam memperoleh bahan baku. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan kajian akses bahan baku industri pengolahan dan forum *group discussion (FGD*) atau Temu Mitra antara pelaku industri DIY dengan penyedia bahan baku. b. Pemerintah Daerah DIY melalui Disperindag telah memberikan fasilitasi untuk pengembangan pasar baru di luar negeri, sehingga hasil industri DIY dapat lebih mudah masuk ke pasar internasional pada tahun 2025 ini. Fasilitas yang diberikan meliputi pendampingan dan bantuan agar pelaku industri dapat menjadi anggota di *marketplace* internasional. Melalui *marketplace* ini, diharapkan pelaku industri/eksportir di DIY dapat menjangkau pasar baru di luar negeri. Selain itu, Pemda DIY juga memfasilitasi keikutsertaan pelaku industri dalam pameran berskala ekspor, seperti *Innacraft* dan JIFFINA. Selanjutnya, Pemda DIY juga akan memfasilitasi pelaku industri DIY untuk mengikuti pameran *Trade Expo Indonesia (TEI)* yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2025.	a. Barang baku industri pengolahan tidak semua dari DIY. b. Terkait pemasaran keluar negeri dipenngaruhi faktor eksternal luar negeri.
b	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**			
	1) PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum DIY mencapai Rp.	a. Pemerintah Daerah DIY di mohon memberikan program kegiatan untuk menarik	1. Dinas Pariwisata DIY pada tahun 2025 telah menyelenggarakan event wisata Keroncong Plesiran 2025, berlokasi di Desa Wisata Tinalah,	DINAS PARIWISATA DIY: a. Pemerintah Daerah Istimiwa Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata DIY

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	12.102.177 (Juta rupiah) tertinggi dari tahun 2019-2023. 2) Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2024 sebesar 103.042 orang menurun dibanding tahun 2023 sebanyak 105.486 orang. Terbanyak dari Malaysia dan Singapura. 3) Wisatawan Nusantara yang berkunjun di DIY tahun 2024 sebesar 38.030.739. DIY masih jadi tujuan kunjungan wisatan nusantra,. Kabupaten Sleman menjadi tujuan yang paling banyak dikunjung **Permasalahan**: - Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul jumlah kunjugan wisatawannya masih terendah di DIY. - Fasilitas hotel dan akomodasi tidak semua merata di kabupaten di DIY.	wisatawan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. b. Pemerintah Daerah DIY diharapkan memberikan dukungan anggaran dan infrastruktur untuk mendukung obyek wisata di wilayah selatan DIY.	di bulan Mei, dan Lomba Seni Suara Burung Perkutut Piala Paku Alam di Kompleks Pasar Hewan Terpadu Pengasih, Kulon Progo, pada bulan Mei. Pada Bulan September 2025 juga direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan event wisata Festival Jelaja Menoreh. 2. Infrastruktur pendukung aksesibilitas pariwisata (jalan dan PJU) dilakukan oleh pemda DIY sesuai dengan kewenangannya. Pemda DIY melakukan kegiatan di kawasan Selatan melalui dana keistimewaan khususnya pada SRS kawasan Pantai Selatan. 3. DInas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2025 ini menyusun Raperda Ripparda DIY (sebagai dukungan infrastruktur non fisik) 4. Salah satu dukungan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung obyek wisata di wilayah selatan DIY yaitu aksesibilitas kawasan selatan. Pemda DIY bekerja sama dengan pemerintah pusat melakukan pembangunan ruas jalan Prambanan - Gading menghubungkan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul, serta mengintegrasikan jaringan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA, dan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).	melaksanakan event kepariwisataan pada tahun 2025 di Kabupaten Kulon Progo. b. Dispar DIY memberikan dukungan infrastruktur non fisik. c. Aksesibilitas di wilayah Selatan yaitu JJLS dilakukan bersama antara pemda DIY (pengadaan lahan) dengan pemerintah pusat (pembangunan konstruksi)
2	**Pertumbuhan Ekonomi**			
	1) PDRB DIY menurut Lapangan Usaha tahun	a. Pemerintah Daerah DIY harus mengantisipasi kebijakan	a. Pemda DIY berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah ditengah kebijakan efisiensi nasional, dengan	a. Telah dilakukan pergeseran anggaran dan alokasi belanja di prioritaskan untuk aktivitas-aktivitas yang strategis.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	2024 semua tumbuh positif. 2) Tertinggi lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,67%, Lapangan Usaha Kontruksi 8,44%.	efisiensi pada tahun 2025 ini yang akan berakibat turunnya pertumbuhan PDRB DIY sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi DIY. b. Sektor yang turun dibandingkan tahun 2023, dicari faktor penyebabnya dan diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. c. Proyek Strategis Nasional di DIY harus tetap berjalan pada tahun 2025. Pemerintah Daerah DIY harus memastikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan pengusaha DIY harus dilibatkan dalam proyek strategis di DIY.	mengedepankan kualitas perencanaan, efektivitas belanja daerah, serta optimalisasi potensi dan sumberdaya lokal melalui penguatan pemantauan dan analisis kinerja perekonomian daerah sebagai dasar perumusan kebijakan. Upaya tersebut diarahkan untuk mengendalikan penurunan kinerja sektor-sektor ekonomi melalui penajaman intervensi pembangunan dan penguatan sinergi lintas perangkat daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di hDIY melalui koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Pemda DIY juga mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas belanja daerah agar lebih selektif, produktif, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan PDRB, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi lokal, dengan memastikan keterlibatan sumber daya manusia lokal, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan partisipasi aktif pelaku usaha lokal dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di DIY. b. Untuk mengantisipasi kebijakan efisiensi pada tahun 2025 dan menjaga pertumbuhan ekonomi DIY: 1) Optimalisasi PAD melalui pengembangan sektor potensial seperti pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan industri olahan pertanian.	b. Menjaga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga ditengah Kebijakan Efisiensi melalui optimalisasi PAD dengan pengembangan sektor potensial, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif dan peningkatan investasi. c. Infrastruktur untuk mendukung obyek wisata di wilayah selatan DIY berupa pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan selatan DIY. d. Telah dibentuk TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) yang beranggotakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Melalui TKDV ini diharapkan bisa diwujudkan *Link n Match* antara Kebutuhan Tenaga kerja Dunia Usaha dan Dunia Industri

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			2) Mendorong investasi swasta melalui penyederhanaan perizinan; Mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan usaha untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. 3) Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif melalui memperluas akses permodalan; Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan akses ke sumber permodalan, baik melalui bank daerah maupun skema pembiayaan lainnya.	
			c. Salah satu sektor yang mengalami pelambatan adalah sektor industri pengolahan. Hal ini banyak dipengaruhi kondisi eksternal DIY dan luar negeri yang mengalami ketegangan ekonomi dan politik. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan pasar-pasar strategis lainnya yang potensial. Selain itu diupayakan untuk dapat mendorong konsumsi dalam negeri agar perekonomian tetap terjaga karena adanya aktivitas di dalam negeri. d. Sektor-sektor yang turun dan penyebabnya antara lain: 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Fluktuasi harga komoditas, dampak iklim (misalnya *El Nino/La Nina*), atau perubahan pola tanam 2) Industri Pengolahan: Daya saing produk, harga bahan baku, permintaan pasar, atau persaingan impor 3) Pariwisata: Penurunan jumlah wisatawan mancanegara pasca-pandemi dan	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			ketidakpastian global, Kurangnya inovasi digital dan promosi wisata baru Kebijakan Pemerintah DIY untuk mengantisipasi PRDB yang mengalami penurunan misalnya dengan memberikan stimulus dan insentif seperti; Sektor Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Promosi lebih gencar, penyelenggaraan event berskala besar, kemudahan perizinan untuk atraksi baru, atau insentif bagi investor di bidang pariwisata berkelanjutan, Sektor UMKM: Fasilitasi akses modal (KUR), pelatihan digitalisasi dan pemasaran online, pendampingan peningkatan kualitas produk, dan kemudahan izin usaha, Sektor Industri Pengolahan: Insentif fiskal atau non-fiskal untuk industri yang menggunakan bahan baku lokal, atau yang berorientasi ekspor	
			e. Pemda DIY mendorong agar sumber daya lokal agar dapat dapat terserap di kegiatan industri atau lokal yang ada di DIY melalui aktivitas kemitraan, kerjasama, Temu Bisnis dan sebagainya f. Proyek Strategis Nasional di DIY tetap berjalan pada tahun 2025. Pelaksanaan proyek strategis nasional memperhatikan dukungan Sumber Daya Manusia, ketersediaan Sumber Daya Alam dan melibatkan pengusaha DIY dalam proyek strategis di DIY.	
3	**Inflasi Daerah**			
	1) Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat pada Desember 2024 DIY mengalami inflasi 0,46%	a. Agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY untuk menjaga stabilitas harga dan	1. Pelaksanaan gelar pangan murah, operasi pasar, dan sidak pasar dengan total pelaksanaan sebanyak 85 kali di sejumlah titik	BIRO PEREKONOMIAN dan SDA DIY: Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi tantangan inflasi yang dipicu oleh fluktuasi harga bahan pangan, gangguan pasokan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	secara bulanan *(month-to-month/mtm)*. Sementara secara tahunan (*year-on-year/yoy) dan secara tahun kalender (year-to-date/ytd)* terjadi inflasi sebesar 1,28%. 2) Berdasarkan kelompok pengeluaran tercatat kelompok makanan minuman, dan tembakau memiliki andil inflasi terbesar pada Desember 2024 mencapai 0,36%. Kedua adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,04%. Ketiga transportasi dengan andil 0,03%.	pasokan barang di masyarakat. b. TPID DIY agar menjaga inflasi di DIY terkendali di semua kabupaten dan kota di DIY. c. Kegiatan Antara lain Operasi Pasar, Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah agar terus dilakukan Pemda DIY.	strategis yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. 2. Pelaksanaan HLM TPID se-DIY Semester 1 2025 sebagai bagian dari K4 (Komunikasi Efektif) yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di DIY. 3. Melakukan komunikasi dan diskusi secara intensif dengan para petani, pedagang dan pelaku usaha terkait serta masyarakat untuk menjaga dan mengelola ekspektasi, baik dari sisi kepastian produksi, distribusi hingga pola konsumsi melalui inisiasi program inovasi Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi *(MRANTASI)* dan *MRANTASI Goes to School*. 4. Terus mendorong optimalisasi peran kios *Segoro Amarto* sebagai *price reference store* di DIY. Saat ini, terdapat 4 kios *Segoro Amarto* yang berada di pasar pantauan DIY, dan akan bertambah 1 kios lagi pada tahun 2025. 5. Inisiasi *GEMATI* (Gerakan Membeli Sayuran Petani) oleh TPID Kab. Sleman dalam menyerap produksi sayuran yang melimpah dengan melibatkan peran ASN. Selain itu terdapat *social movement* masyarakat terkait keseimbangan harga, seperti gerakan masjid Nurul Ashri sebagai *aggregator*.	akibat cuaca ekstrem, serta keterbatasan distribusi dari sentra produksi ke pasar. Kenaikan harga komoditas strategis seperti beras, cabai, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Selain itu, tingginya ketergantungan DIY pada pasokan luar daerah menyebabkan kerentanan harga saat terjadi gangguan logistik atau produksi nasional. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Daerah DIY bersama TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) menjalankan berbagai langkah, seperti memperkuat cadangan pangan, menjaga kelancaran distribusi, serta menggelar operasi pasar dan pasar murah di titik-titik yang diperlukan.
			6. Memperkuat komitmen dan optimalisasi KAD, baik Intra maupun Antar Provinsi. Saat ini, telah dilakukan KAD cabai antara Pemkab Sleman dengan Pemkot Jambi. Selain itu juga sedang dilakukan penjajagan KAD antara Kab. Sleman dengan Kab. Bima dan Kab. Kulon Progo dengan Kota Palembang. Dari intra provinsi,	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			telah dilakukan KAD antara Gunung Kidul dengan Kulon Progo dan Bantul.	
			7. Pengembangan *Geographic Information System (GIS)* sebagai *geoportal* dalam optimalisasi monitoring produksi dan penggunaan lahan Lumbung Mataraman. Upaya ini juga menjadi bentuk nyata digitalisasi data pangan sebagai *early warning system* dalam pengendalian inflasi DIY.	
			8. Mendukung upaya pembentukan sistem logistik daerah yang rencananya akan diinisiasi oleh PT. Taru Martani (BUMD DIY) dalam rangka mendukung kelancaran distribusi komoditas DIY.	
			9. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara rutin di masing-masing kota/kabupaten di DIY.	
			10. Pelaksanaan komunikasi efektif melalui berbagai media *(talkshow, podcast)*	
4	**Kebijakan Pendapatan APBD DIY**			
	1) Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 tercapai sebesar Rp.2.481.506.565.559,08 atau 105,42%. 2) PAD tahun 2024 terdri Pajak Daerah (86,94%), Retribusi Daerah (3,20%), HasilPengelolaan KekayaanDaerah Yang sah (4,87%) dan Lain-lain PAD yang sah (4,98%).	a. Pemerintah Daerah agar meningkatkan capaian Pajak dan Retribusi yang belum tercapai 100% dari targetnya. b. Usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan maksimal sehingga bisa meningkatkan pendapata dari Lain-Lain	a. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pajak dan retribusi daerah: 1) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan; 2) Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan opsen pajak daerah; 3) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak	1. Realisasi pajak dan retribusi daerah pada TA 2025 dapat melampaui target 2. Berkurangnya ketergantungan akan pendapatan transfer pemerintah pusat. 3. Peningkatan Pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	3) Pajak Rokok dan Pajak Alat Berat belum tercapai 100%. 4) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah baru tercapai 88,68%. 5) Retribusi Perizinan Tertentu baru tercapai 51,57%. 6) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) baru tercapai 51,57%. 7) Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah dari PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2024 tidak dicantumkan dalam Buku LKPJ.	Pendapatan Asli Daerah yang Sah. c. Turunnya Pendapatan Dana Keistimewaan (DAIS) agar dilakukan upaya agar tahun ini dan kedepan bisa kembali diatas Rp. 1, 3 triliun. d. Usaha untuk meningkatkan Prosentase PAD terhadap APBD DIY dengan target pada tahun 2025 sebesar 45%. e. DIY harus belajar dari Provinsi lain agar PAD prosentasenya semakin besar seperti: 1. Jawa Barat dengan rasio PAD tertinggi 79,6% 2. DKI Jakarta dengan rasio PAD tertinggi 73,6% 3. Banten dengan rasio PAD tertinggi 73,5% 4. Bali dengan rasio PAD tertinggi 68,3% 5. Jawa Tengah dengan rasio PAD tertinggi 67% 6. Jawa Timur dengan rasio PAD tertinggi 66,1% (Sumber Data dari DJPK Kemenkeu)	dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 4) Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital *(QRIS, EDC, Mobile Banking),ecommerce, e-wallet, website* dan jaringan minimarket; 5) Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak, dan Operasi Bersama, 6) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; b. Upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi BMD terus dilakukan Pemda DIY dengan berpedoman pada peraturan perundangan pengelolaan BMD dan melakukan penguatan internal maupun ekternal. Penguatan internal terus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan optimalisasi BMD dan penilaian BMD, membangun sistem informasi BMD yang akuntabel dan mudah digunakan, identifikasi *BMD idle* secara berkala dan melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada OPD pengguna BMD agar dapat melakukan optimalisasi BMD yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi OPD. Secara eksternal Pemda DIY melakukan penguatan melalui kajian penilaian potensi dan *High Best Use BMD Idle*. Menjalin komunikasi	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			dengan pihak-pihak ketiga (perorangan dan atau badan usaha) untuk bekerja sama melakukan pemanfaatan aset melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan pengelolaan BMD seperti SEWA. Penjajakan minat pasar terhadap BMD *idle* strategis yang berpotensi memberikan sumbangan PAD. Bersinergi dengan Kementerian Keuangan (KPKNL) maupun Lembaga Manajemen Aset Negara dalam mencari terobosan terobosan pemanfaatan barang milik daerah, contoh melalui pemanfaatan laman: *lelang.go.id*.	
			c. Pemerintah Daerah DIY bersama dengan Pemerintah Pusat telah melakukan Pembahasan Penilaian Kelayakan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2026, dalam pembahasan usulan awal tersebut disepakati Usulan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.1.500.000.000.000. Proses selanjutnya menunggu penetapan pagu indikatif [-] Pada APBN 2026 telah ditetapkan pagu dana Keistimewaan sebesar RP1.000.000.000.000,00	
			d. Usaha untuk meningkatkan Prosentase PAD terhadap APBD DIY dengan target pada tahun 2025 sebesar 45%. Usaha untuk meningkatkan Prosentase PAD terhadap APBD: 1) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan; 2) Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan opsen pajak daerah; 3) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 4) Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital *(QRIS, EDC, Mobile Banking),ecommerce, e-wallet, website* dan jaringan minimarket; 5) Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak, dan Operasi Bersama, 6) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; 7) Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; dan	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			8) Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.	
			e. Akan kami tindak lanjuti dengan mempelajari cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di daerah tersebut	
5	**Pengelolaan Aset Yang Dipisahkan**			
a	**Kinerja BUMD PT Bank BPD DIY**			
	1) Sampai tahun 2024 modal Pemda DIY pada PT BPD DIY Rp.1.581.175.000.000,00 2) Laba Deviden tahun 2024 Rp. 111.028.716.629,00	a. Kenaikan Deviden PT BPD DIY dipertahankan setiap tahun naiknya Rp. 12 milyar seperti tahun 2024 dari tahun 2023. b. PT BPD DIY harus mendukung Program pengentasan kemiskinan di DIY. c. Peningkatan Layanan baik BPD konvensional dan Syariah yang bisa menjangkau seluruh masyarakat di DIY, agar PT BPD DIY menjadi bank terbesar di DIY. d. PT BPD DIY harus ikut mencetak wirausaha baru di DIY.	a. Bank BPD DIY akan terus berupaya meningkatkan penerimaan dividen kepada pemerintah daerah, melalui optimalisasi bisnis dan kinerja sehingga pencapaian laba Bank dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. b. Bank BPD DIY turut mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor produktif, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), di mana per 31 Desember 2024 sebesar 60% dari kredit produktif Bank BPD DIY disalurkan kepada sektor UMKM. Salah satu produk kredit yang mendukung pengentasan kemiskinan yaitu Kredit PEDE (Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah) yang merupakan kredit murah dari Bank BPD DIY, di mana hingga 31 Desember 2024 Bank BPD DIY berhasil menyalurkan Kredit PEDE sebesar Rp41,83 miliar kepada 4.239 debitur.	Pada Tahun Anggaran 2025, PT Bank BPD DIY menyetorkan bagian laba kepada Pemda DIY sebesar Rp121.074.128.133,00 meningkat sebesar Rp10.045.411.504,00 atau 9,05% dibandingkan dengan dividen yang disetor tahun anggaran 2024.
			c. Bank BPD DIY terus berupaya meningkatkan layanan keuangan kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi produk digital maupun melalui pengembangan jaringan layanan yang dapat menjangkau seluruh wilayah DIY. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan *market share* DPK	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			dan Kredit Bank BPD DIY terhadap perbankan DIY, dari masing-masing sebesar 14,44% dan 17,41% di tahun 2023 menjadi sebesar 14,62% dan 17,58% di tahun 2024.	
			d. Bank BPD DIY secara berkelanjutan menyelenggarakan program/kegiatan guna mendorong terciptanya wirausaha baru di DIY, antara lain melalui program pelatihan dan bimbingan teknis bagi wirausaha muda dan pelaku UMKM, serta optimalisasi Agen Bank BPD DIY di tingkat kalurahan dan padukuhan guna menumbuhkan potensi lokal dan mendorong perekonomian desa.	
b	**PT. Anindya Mitra Internasional**			
	1) Modal Pemda DIY sampai tahun 2024 sebesar Rp. 31.144.910.000,00 2) Laba Deviden tahun 2023, 2024 dibandingkan tahun 2022 menurun. 3) Pada tahun 2023 PT AMI mengembalikan Dana Subsidi Rp4,228.414.466,57 dari Rekomendasi BPK RI.	a. Belum optimalnya Deviden PT AMI dari sektor usaha; Unit Percetakan, Unit Pertambangan, Unit Pariwisata, Unit Realty, Unit Air Minum dan Unit Trasnportasi harus dijelasakan secara detail. b. Perlu usaha peningkatkan kinerja PT AMI pada tahun yang sedang berjalan ini. b. Penggunaan Belanja Subsidi layanan Trans Jogya harus dijelaskan dalam buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur pada tahun yang akan datang	a. PT AMI terus berupaya meningkatkan penerimaan dividen kepada pemerintah daerah, melalui peningkatan kinerja unit bisnis : - Berdasarkan data s.d. Triwulan III Tahun 2025, Unit Percetakan masih dalam kondisi rugi dengan rugi sebesar (Rp56.566.590,00) namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan rugi s.d. triwulan III tahun 2024 sebesar (Rp74.267.952). Kendala yang dihadapi unit bisnis ini adalah mesin cetak PT AMI sudah tidak dapat digunakan. Unit Percetakan PT AMI berupaya untuk bekerjasama dengan beberapa partner dalam upaya peningkatan pendapatan jasa cetak. Unit Percetakan PT AMI juga merencanakan untuk membangun kemitraan dengan percetakan lain yang sudah memiliki izin untuk *security printing* agar kedepan bisa melaksanakan pekerjaan percetakan untuk	a. Dividen PT AMI yang diterima Pemda DIY pada tahun 2025 sebesar Rp2.719.068.430,- naik sebesar 217,18% dibanding tahun 2024, Target Dividen yang akan diterima Pemda DIY pada tahun 2026 sebesar Rp3.133.741.721,- serta Target Dividen PT AMI atas kinerja tahun buku 2026 yang akan disetorkan kepada Pemda DIY pada tahun 2027 sebesar Rp4.386.258.203,- b. Kinerja PT AMI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat dari kenaikan laba, yaitu Rp1.567.000.000,- (2022), Rp1.665.000.000,- (2023), Rp6.398.000.000,- (2024) dan Rp7.374.000.000,- (Prog 2025).

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		menyangkut jumlah armada Trans Jogya, jumlah layanan jalur dan jumlah pemakai Trasn Jogya, mohon laporan tersebut bisa dalam laporan PT AMI atau dalam Urusan Dinas Perhubungan.	dokumen-dokumen yang bersifat rahasia seperti dokumen perbankan. - Berdasarkan data s.d. Triwulan III Tahun 2025 Unit Pertambangan telah dapat menghasilkan laba, kondisi tersebut lebih baik dari kondisi rugi yang terjadi s.d. Triwulan III pada tahun 2024. PT AMI berupaya meningkatkan penjualan batu kapur dan berupaya melakukan negosiasi harga dengan mitra - PT AMI berupaya meningkatkan pendapatan pada unit Pariwisata. Berdasarkan data s.d. Triwulan III Tahun 2025 laba Unit Pariwisata sebesar Rp218.399.362,- laba tersebut lebih besar dari laba s.d. Triwulan III pada tahun 2024 sebesar Rp134.605.426,- - Berdasarkan data s.d. Triwulan III Tahun 2025 laba Unit Realty sebesar Rp8.782.431.337,- laba tersebut lebih besar dari laba s.d. Triwulan III pada tahun 2024 sebesar Rp2.420.697.992,- PT AMI berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki - Unit Air Minum PT AMI terus berupaya meningkatkan pelanggan air di kawasa kali urang. Berdasarkan data s.d. Triwulan III Tahun 2025 laba Unit Air Minum sebesar Rp272.159.056,- laba tersebut lebih besar dari laba s.d. Triwulan III pada tahun 2024 sebesar Rp250.267.836,- - Berdasarkan data s.d. Triwulan III Tahun 2025 laba Unit Transportasi sebesar Rp767.642.465,- laba tersebut lebih besar	c. Tersedianya data/laporan pelaksanaan operasional angkutan perkotaan trans jogja.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			dari laba s.d. Triwulan III pada tahun 2024 sebesar (Rp595.040.765,-). PT AMI terus berupaya memperbaiki layanan dengan cara membuat SOP, memanfaatkan AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan, dan pemenuhan SPM unit transportasi	
			b. sesuai Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja, PT AMI berkewajiban membuat laporan pelaksanaan operasional angkutan perkotaan trans jogja kepada Gubernur DIY melalui Dinas Perhubungan DIY;	
c	**PT. Taru Martani**			
	1) Usaha PT Tarumartani; usaha cerutu dan tembakau, usaha kafe dan restoran, Penggudangan cadangan pangan beras. 2) Laba deviden tahun 2024 menurun karena kenaikan tarif cukai tembakau dan permasalahan manajemen.	a. Perbaikan manajemen PT Taru Martani dan perencanaan bisnis yang baik pada tahun 2025 harus dilakukan oleh direksi. b. Pasar internasional harus dicari negara baru antisipasi kebijakan kenaikan tarif Amerika Serikat. c. Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan pengawasan pada PT Tarumartani.	a. PT Taru Martani telah membuat rencana bisnis tahun 2024-2029 dan ditetapkan dalam RUPS tahun 2025. b. Dilakukan evaluasi kinerja setiap triwulan oleh BPKA DIY untuk meningkatkan pengawasan terhadap BUMD khususnya PT Taru Martani. c. PT Taru Martani berupaya untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dengan cara pemenuhan kompetensi SDM terkait, penyusunan infrastruktur pedoman tata kelola perusahaan yang baik, penyusunan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis dan pemenuhan semua fungsi perusahaan hingga penyusunan dan pengkinian PSO (Prosedur Standar Operasional) di semua Divisi.	a. PT Taru Martani mendapatkan laba Rp9.401.000.000,- per YTD September 2025 dan telah melampaui target yang ditetapkan di RKAP 2025 sebesar 136%. b. PT Taru Martani membangun sistem untuk implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik diantaranya pemenuhan kompetensi SDM, penyesuaian struktur organisasi, pemenuhan infrastruktur *GCG (Good corporate Governance)*, aktivasi fungsi pengendalian internal.
d	**Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)**			
	1) Jumlah unit BUKP 75 unit berkedudukan di Kapanewon se DIY, modal sebesar Rp.	a. Pengawasan Pemda DIY pada BUKP harus ditingkatkan, masing-masing unit harus ada petugas pengawas yang jelas	BPKA DIY: BPKA telah menyusun *road map* penyelesaian permasalahan BUKP dan telah dituangkan dalam dokumen RPJM Tahun 2022-2027 dengan tahapan:	BPKA DIY: a. Kelembagaan yang dibentuk telah sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Lembaga Jasa Keuangan dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)	*by name.*	a. Tahun 2022 penyusunan Kajian Roadmap Transformasi Kelembagaan BUKP b. Tahun 2023 penyusunan Kajian Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha atas Perubahan Badan Hukum Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) menjadi Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) c. Menyampaikan surat permohonan ijin kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan Transformasi BUKP menjadi PT. LKM BUKP. d. Tahun 2024 penyusunan Naskah Akademik Pembentukan PT. LKM BUKP Gunungkidul (Perseroda) e. Tahun 2025 mengusulkan Raperda Transformasi BUKP di Wilayah Kabupaten Gunungkidul menjadi PT. LKM BUKP Gunungkidul (Perseroda) f. Tahun 2025 menyusun Kajian Analisis Investasi atas Penyertaan Modal pada PT. LKM BUKP (Perseroda) di 4 Kabupaten. g. Tahun 2026 menyusun Kajian Likuidasi pada BUKP di Wilayah Kota Yogayakarta h. Tahun 2026 menyusun Naskah Akademik Pembentukan PT. LKM BUKP Bantul (Perseroda) i. Tahun 2026 mengusulkan Raperda Transformasi BUKP di Wilayah Kabupaten Bantul menjadi PT. LKM BUKP Bantul (Perseroda) j. Tahun 2027 menyusun Naskah Akademik Pembentukan PT. LKM BUKP Kulon Progo (Perseroda) dan PT. LKM BUKP Sleman (Perseroda)	struktur organisasi yang jelas dengan organ RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sehingga Satuan Pengendalian Internal untuk melakukan pengawasan secara melekat.
	2) Kinerja hasil deviden BUKP cukup bagus.	b. Pengawasan OJK dan Pemda DIY sebelum dan setelah Bentuk Hukum yang jelas harus dilakukan.		BPKA DIY: b. Digitalisasi layanan dapat dilakukan dengan membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dengan layanan online sehingga dapat meminimalisir ternjadinya penyimpangan di kantor cabang dan pembantu.
	3) Terdapat kasus dana nasabah BUKP yang tidak bisa diambil pada Unit Kapanewon Wates dan Galur di Kulon Progo pada tahun 2025.	c. Perbaikan Satuan Pengawas Internal BUKP yang handal yang mampu mendeteksi penyimpangan		BPKA DIY: c. Kerugian BUKP dapat dipulihkan dengan Upaya pengembalian aset dari Pengelola BUKP yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.
	4) Terdapat laporan Pencatatan dana nasabah kepetugas BUKP masih ditemukan catatan tangan belum dilengkapi print out buku nasabah yang berbasis computer.	d. Digitalisasi layanan nasabah yang berbasis pada Sistem Infomasi layanan BUKP yang berbasis online/komputerisasi.		BPKA DIY: d. Sanksi pidana diberikan atas terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kerugian BUKP maupun nasabah.
		e. Pemetaan kondisi 75 BUKP DIY dan potensi penyimpangan harus dilakukan BUKP.		
		f. Penyelesain kasus penyimpangan BUKP agar dana nasabah		

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
		bisa dikembalikan , pegawai yang menyimpang mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	k. Tahun 2027 mengusulkan Raperda Transformasi BUKP di Wilayah Kabupaten Kulon Progo menjadi PT. LKM BUKP Kulon Progo (Perseroda) dan Raperda Transformasi BUKP di Wilayah Kabupaten Sleman menjadi PT. LKM BUKP Sleman (Perseroda). l. Peningkatan pengawasan oleh Pembina BUKP dengan meningkatkan koordinasi antara Pembina Tingkat I, Pembina Tingkat II dan Pembina Teknis dhi. Bank BPD DIY. Pengawasan dilakukan sejak penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, pelaksanaan proses bisnis dan pelaporan Keuangan. Teknis pengawasan dilakukan dengan mereview dokumen perencanaan, melakukan pemeriksaan *on the spot* ke kantor BUKP dan melakukan pemeriksaan apakah SOP yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan aturan atau tidak. Memberikan *reward* dan *punishment* dengan indikator pengukuran kinerja rata-rata, tidak hanya kinerja akhir tahun saja. Selain itu sejak Tahun 2022 Laporan Keuangan BUKP diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *independent*.	
e	**Perumda Air Bersih Tirtatama**			
	a. Modal Pemda DIY sampai tahun 2024 uang Rp. 12.500.000.000,00 dan barang/asset Rp. 163.896.691.000,00 b. Subsidi Pemda DIY Tahun 2024 Rp, 5.341.600.000,00.	a. Peninjauan kembali rencana usaha dan Perda Pendirian jika tidak bisa menghasilkan laba dalam 3 tahun kedepan dan perubahan bentuk menjadi Unit Balai Layanan Umum Pemda DIY atau	a. PDAB Tirtatama belum menghasilkan laba karena masih terkendala pada SPAM Regional Kebon Agung yang belum bisa beroperasi dengan maksimal dan penggunaan tarif lama yang sudah tidak relevan. Pompa SPAM Regional Kebon Agung sudah bermasalah sejak pertama kali dilimpahkan ke PDAB Tirtatama, saat ini hanya ada 1 pompa yang dapat bekerja.	a. Telah dilakukan kajian penyesuaian tarif dan hasil kajian diusulkan untuk pembuatan pergub dan kepgub di tahun 2026. b. Telah dilakukan modifikasi pompa dan penggantian mesin intake di SPAM Regional Kebon Agung, saat ini 1

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	c. Perumda Air Bersih Tirtatama belum menghasilkan laba sampai tahun 2024.	bentuk lain yang buka Perumda. b. Pengawasan pada belanja Subsidi Pemda DIY pada Perumda ini harus dilakukan dengan jelas dan teliti.	Telah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki dan memodifikasi pompa agar dapat bekerja dengan optimal kembali. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, tarif saat ini (Rp2.250) dirasa sudah tidak dapat digunakan lagi karena jauh dari harga pokok produksi (Rp3.500). Telah diusulkan skema kenaikan tarif pada tahun 2026 (Rp2.750), 2027 (Rp3.500) dan 2029 (3.500).	pompa sudah dapat digunakan dengan optimal
			c. Apabila kondisi SPAM Regional Kebon Agung sudah dapat digunakan secara optimal dan kenaikan tarif di tahun 2026 dapat terlaksana, PDAB Tirtatama menargetkan tahun 2027 telah dapat menghasilkan laba Rp508.159.187,-	
f	**Rasio Penumbuhan Wirausaha**			
	1. Target Indikator Rasio Kewirausahaan tidak tercapai. 2. Pada tahun 2024 ketercapaian peningkatan/penambahan jumlah wirausaha baru terealisasi 563 orang dari target yang ditetapkan 550 orang, atau dengan persentase 102,36%. Pendukung Ketercapaian Sasaran a) Penumbuhan ekosistem Wirausaha Baru Multi Sektor b) Pengembangan Desa Preneur c) Saka Wirausaha	a. Sasaran Penumbuhan ekosistem Wirausaha baru multi sektor menyasar kalurahan yang jumlah wirausaha yang jumlahnya kecil. b. Penumbuhan Desa *Preneur* dengan program dan anggaran yang jelas. b. Data wirausaha per kalurahan mohon dibuat datanya untuk pemetaan dan tindaklanjut progam. c. Program Saka Wirausaha mohon data per kabupaten dan kota, data tingkat keberhasilannya menjadi wirausaha baru.	a. Pemda DIY telah melaksanakan program pengembangan Desa Preneur sebagai salah satu strategi utama pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wilayah. Program Desa Preneur diarahkan untuk menggeliatkan dinamika kewirausahaan di tingkat kalurahan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal serta kearifan lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. Melalui pendekatan ini, kalurahan yang sebelumnya memiliki jumlah wirausaha terbatas didorong untuk menumbuhkan unit-unit usaha baru yang dikelola secara kolektif maupun individu, dengan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. b. Menindaklanjuti rekomendasi DPR terkait penumbuhan Desa Preneur yang didukung oleh program dan penganggaran yang jelas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pengembangan	a. Program Desa Preneur ini dirancang untuk menumbuhkan dan memperkuat ekosistem kewirausahaan di tingkat kalurahan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan usaha, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing wilayah. Program ini juga menjadi solusi strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi desa sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah DIY secara inklusif dan berkelanjutan. b. Melalui pemanfaatan Dana Keistimewaan (DAIS) dengan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Pemda DIY menjawab kebutuhan akan intervensi yang terencana, terukur, dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	d) Promosi Produk wirausaha e) Bantuan *free* ongkir melalui *Markethub Sibakul*	d. Peningkatan anggaran dan jangkauan *free* ongkir *Markethub Sibakul*.	Desa Preneur yang bersumber dari Dana Keistimewaan (DAIS) secara terencana, terukur, dan akuntabel. Pengembangan Desa Preneur dilaksanakan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kalurahan yang telah memenuhi kriteria dan dinilai layak untuk dikembangkan sebagai Desa Preneur. Skema ini memastikan bahwa dukungan anggaran diberikan secara tepat sasaran kepada kalurahan yang memiliki potensi kewirausahaan lokal dan kesiapan kelembagaan. c. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD DIY terkait penyediaan data wirausaha per kalurahan, Pemda DIY mencatat bahwa hingga saat ini data yang tersedia secara terstruktur masih terbatas pada data wirausaha pada kalurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa Preneur. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya Pemda DIY akan mengupayakan penyusunan dan pengembangan pendataan wirausaha per kalurahan secara lebih komprehensif sebagai dasar pemetaan potensi dan perencanaan program penumbuhan kewirausahaan yang lebih tepat sasaran. Jumlah data peserta Inkubasi SAKA Wirausaha per Kabupaten/Kota meliputi: - Kab. Bantul : 1 orang - Kab. Gunungkidul : 20 orang - Kab. Sleman : 14 orang - Kab. Kulon Progo : 7 orang - Kota Yogyakarta : 16 orang	tepat sasaran, sehingga pengembangan Desa Preneur tidak bersifat sporadis, tetapi memiliki kepastian pendanaan, kejelasan sasaran, serta mampu mendorong tumbuhnya wirausaha lokal secara berkelanjutan di tingkat kalurahan. c. Sementara ini data pemetaan wirausaha dapat diakses melalui aplikasi sibakul jogja yang menampilkan katalog produk UMKM Desa Preneur. d. Belum adanya pembinaan dan pendampingan secara intensif dan terstruktur bagi calon wirausaha muda terutama di usia sekolah menengah dan perguruan tinggi, sehingga melalui SAKA Wirausaha dilakukan pembinaan kepada calon wirausaha yang dimulai sejak pembentukan ide bisnis hingga tata cara pengelolaan usaha mulai dari aspek produksi, SDM, pemasaran dan keuangan. e. Belum meratanya pemanfaatan fasilitas promosi dan distribusi oleh pelaku UMKM serta masih terbatasnya kapasitas sebagian anggota dalam mengakses layanan tersebut. Dengan penerapan seleksi penerima manfaat yang lebih tepat sasaran serta pendampingan yang lebih intensif terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, program free ongkir diharapkan dapat menjangkau UMKM

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Data tersebut disapatkan dari data peserta saka wirausaha yang berhasil menerima modal pembinaan. Secara keseluruhan, program SAKA Wirausaha DIY telah berhasil menciptakan dampak positif, terutama di Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Namun, tantangan utama masih terletak pada konsistensi, fokus, dan kemampuan mengelola usaha di tengah kesibukan lain. Ke depan, pendampingan yang lebih terstruktur, pelatihan manajemen usaha, serta penguatan jejaring antar-tenant dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kesuksesan berkelanjutan bagi wirausaha muda di seluruh DIY. d. *Free* ongkir market hub Sibakul perlu dilanjutkan dengan catatan lebih selektif terhadap penerima manfaatnya (UMKM) agar lebih merata dan pendampingan lebih intensif bagi anggota markethub agar yang belum memanfaatkan free ongkir bs memanfaatkannya	secara lebih merata, meningkatkan partisipasi anggota Markethub, serta memperkuat akses pasar UMKM secara berkelanjutan.
III	**BIDANG INFRASTRUKTUR**			
A	**Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**			
	1. Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran semuanya terapai dan meningkat dibandingkan capaian tahun 2023. 2. Pada Tahun 2024, total panjang jalan baru yang terbangun adalah 1,2 km Sehingga pada akhir tahun 2024, total panjang yang	a. Pemda DIY harus melakukan inovasi dalam menyediakan pembiayaan Pembangunan Jalan maupun Pemeliharaan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat terus terjadi peningkatan volume lalu lintas yang menambah beban jalan dalam situasi APBD yang terbatas.	a. Pemda DIY telah mengusulkan penanganan jalan Provinsi melalui Inpres Jalan Daerah. Usulan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat di tahun 2025 adalah penanganan Jalan Prambanan gayamharjo segmen a2 dan a3 sepanjang 1,93 km dan Jalan Wonosari - Karangmojo sepanjang 1,5 km. Saat ini DInas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY tengah berproses untuk pengenaan retribusi terhadap pemanfaatan bagian - bagian jalan	a. Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah sudah mendapatkan anggaran penanganan dari Pemerintah Pusat, yaitu melalui program Inpres Jalan Daerah. b. Pengurangan dampak negatif kerusakan jalan dengan pemasangan rambu peringatan jalan karena masyarakat pengguna jalan akan lebih awas akibat banyaknya rambu

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	terbangun adalah 1.014,13 km. 3. Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 96.41% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.978.357 jiwa dari jumlah penduduk total sebesar 3.743.365 jiwa. 4. Tahun 2024 jumlah Penyediaan Infrastruktur Air Baku tercapai 99,22% dari dari target 85,94%, dengan rincian terdapat 127 infrastruktur Sumber Daya Air yang terdiri dari: Irigasi, *Embung*, maupun Sumur Bor terbangun. 5. Akses sanitasi layak di DIY pada tahun 2024 telah meningkat menjadi 98,11% dengan pencapaian akses sanitasi aman di 21,22%. Namun hal ini belum mampu memenuhi harapan DPRD yang menyampaikan rekomendasi agar tahun 2024 sudah dapat	b. Pemda DIY harus memiliki program "Reaksi Cepat" transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dalam pemeliharaan jalan Provinsi yang mengalami kerusakan sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi masyarakat pengguna jalan. Pemda DIY harus menuntaskan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak hingga 100% di tahun 2024. c. Pemda DIY perlu melakukan perbaikan dan pemerliharan terhadap *system drainase* yang menjadi kewenangan Provinsi mengingat masih adanya genangan jalan terutama di saat musim penghujan. d. Pemda DIY harus mampu menuntaskan akses masyarkat terhadap sanitasi yang layak hingga 100% pada tahun 2025. e. Perda DIY nomor 13 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi harus segera direvisi mengngat sudah tidak relevan dengan regulasi Penyelenggaraan Konstruksi secara nasional dan 97 harus diarahkan pada peningkatan	(saat ini menunggu pengesahan revisi Pergub Tarif Retribusi 2026). b. Reaksi cepat terkait penanganan jalan telah dilaksanakan Pemda DIY melalui Bidang Bina marga pada jalan provinsi yang mengalami kerusakan, yaitu memperbanyak pemasangan rambu peringatan adanya kerusakan jalan pada lokasi tersebut, disusul dengan identifikasi kerusakan kemudian penanganan sesuai jenis kerusakan. Apabila terjadi kelongsoran di jalan provinsi, Bidang Bina Marga berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar penanganan darurat dapat terlaksana terlebih dahulu. c. Saat ini Pemda DIY melaksanakn Operasi dan Pemeliharan Drainase Perkotaan di 2 Sistem yaitu Sistem di MM UGM dan Sistem di Ngestiharjo. Sedangkan Untuk Sistem drainase di kawasan perkotaan Yogyakarta sudah dikoordinasikan melalui Sekber Kartamantul dikarenakan kewenangan terkait drainase sendiri masih terbagi-bagi sesuai kepemilikan aset. d. Dalam rangka peningkatan akses sanitasi, Pemerintah Daerah DIY bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), baik skala setempat maupun skala terpusat. Pada tahun 2025, capaian akses sanitasi di DIY mencapai 98,55%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 98,11%. Peningkatan akses sanitasi tersebut tetap	peringatan, misalnya rambu pelan-pelan terdapat kerusakan jalan. c. Pemda DIY sudah menjalankan perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase sesuai kewenangan dan penanganan genangan di kawasan Perkotaan Yogyakarta dilaksanakan melalui Sekber Kartamantul. d. Tercapainya target dari sasaran pemda DIY terkait peningkatan akses sanitasi layak DIY. e. Terwujudnya dan tercapaianya target dari sasaran Pemda DIY terkait dengan terwujudan kesesuaian pembinaan jasa konstruksi yang baik. f. Terwujudnya dan tercapaianya target dari sasaran Pemda DIY terkait dengan terwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang salah satunya melalui pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik. g. Terwujudnya dan tercapaianya target dari sasaran Pemda DIY terkait dengan terwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang salah satunya melalui pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik. h. Terwujudnya program satu data satu peta dan satu kebijakan yang salah satunya melalui integrasi data pertanahan dan tata ruang melalui platform geospasial serta bisa diakses langsung oleh publik.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	menuntaskan 100% akses sanitasi layak. 6. Telah diberikan layanan pelatihan tenaga ahli kepada 200 orang dan jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi hingga akhir tahun 2024 juga sebanyak 80 orang. 7. Dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi sektor dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	partisipasi masyarakat dan adatif terhadap Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Konstruksi. f. Pemda DIY perlu merumuskan strategi pengendalian pemanfaatan ruang dengan didahului pemetaaan permasalahan yang didukung data dan informasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang sehingga pengendalian pemanfaatan tata ruang bisa berjalan secara efektif. g. Pemda DIY peru melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemangku Kepentingan Pertanahan dan Tata Ruang untuk mengintegrasikan data dan informasi pertanahan dan tata Ruang DIY.	menjadi salah satu prioritas yang terus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemda DIY. Namun demikian, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah menyebabkan peningkatan capaian akses sanitasi belum dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan air minum yang berkualitas dan sanitasi yang layak. e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan arah kebijakan yang jelas terhadap reformasi penyelenggaraan jasa konstruksi, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan akibat belum sepenuhnya lengkap dan stabilnya Peraturan Pemerintah (PP) turunan, khususnya yang mengatur secara rinci mekanisme teknis, pembagian kewenangan, serta integrasi sistem penyelenggaraan konstruksi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga perlu waktu untuk menunggu hingga PP tersebut terbit guna merevisi Perda DIY Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi. f. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang sudah dilakukan oleh pemda DIY dengan menetapkan: 1) Pergub DIY Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif; 2) Pergub DIY Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai	i. Terwujudnya program satu data satu peta dan satu kebijakan yang salah satunya melalui integrasi data pertanahan dan tata ruang melalui *platform geospasial* serta bisa diakses langsung oleh publik.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			regulasi tersebut sebagai acuan dalam upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Selain hal tersebut secara rutin setiap tahun juga dilaksanakan kegiatan: - Penilaian perwujudan RTRW DIY - Identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang merupakan implementasi dari kegiatan audit tata ruang. Harapannya dengan ditetapakannya regulasi dan dilaksanakan kegiatan-kegiatan pendukungnya tersebut dapat meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya untuk perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum di RPJM DIY Tahun 2022-2027 dalam indikator Sasaran Pemda DIY. g. Saat ini Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY telah menginisiasi untuk integrasi pertanahan dan tata ruang. Hal ini selaras dan sejalan dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Integrasi Pertananahan dan Tata Ruang berbasis sistem informasi. Melalui kanal *web geoportal.jogjaprov.go.id* saat ini telah bisa diakses oleh publik terkait dengan informasi pertanahan maupun tata ruang secara bersamaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan juga peningkatan layanan langsung kepada masyarakat.	
B	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	1. Presentasi masyarakat yang menempati rumah layak huni sebesar 95,97% yang berarti masih terdapat masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. 2. Penanganan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan yang akurat dan valid sehingga berdampak pada tumpang tindih data/tumpang tindih penanganan. 3. Pengembangan hunian vertikal di perkotaan terkendala tingginya harga lahan dan belum adanya regulasi berupa mekanisme dan insentif dalam upaya pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat miskin. 4. Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan	a. Pemda DIY harus segera melakukan integrasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat terutama terkait masalah sinkronisasi data Rumah Tidak Layak Huni di wilayah DIY. b. Integrasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni tersebut didukung dengan *integrase system* informasi pendataan terpadu yang tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota. c. Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni hendaknya diterimakan kepada masyarakat miskin berbasis keluarga/rumah tangga miskin di seluruh wilayah DIY. d. Pemda DIY Perlu melakukan integrasi dengan Pemerintah Kab/Kota untuk penanganan permukiman di kawasan kumuh. e. Perlu dilakukan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman sebagai pendorong sektor pariwisata	DINAS PUPESDM DIY: a. Secara berkala telah dilakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/ kota dan Balai P3KP Jawa III terkait upaya penanganan RTLH di tahun berjalan. Rapat koordinasi dilaksankan oleh Kementerian PKP melalui Balai P3KP Jawa III untuk sinkronisasi penanganan. Selain itu Pemda DIY berupaya membuat sistem informasi perumahan sebagai wadah untuk sinkronisasi data dan data *base* RTLH. b. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni telah dilaksanakan berdasarkan kriteria calon penerima bantuan yang termasuk masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dan/atau telah terdaftar DTKS. c. Melalui Dana Kesitimewaan telah dilakukan BKK Arsitektur Khas Yogyakarta(RTLH) yaitu pembangunan baru rumah layak huni dengan gaya khas tradisional Jawa yang dilaksanakan oleh Kalurahan melalui transfer dana dari BPKA DIY. Dinas PUPESDM DIY sebagai salah satu OPD pendamping yang bertugas mengawal jalannya pelaksanaan pekerjaan oleh kaluahan. Kegiatan ini berupaya untuk menangani rumah tidak layak huni dan melestarikan budaya serta diharapkan mampu membangkitkan sektor pariwisata. d. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan integrasi penanganan kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka menentukan prioritas penanganan, urutan yang perlu ditangani, beserta sumber pendanaan.	DINAS PUPESDM DIY: a. Koordinasi telah dilakukan dengan Balai P3KP Jawa III dan Kabupaten/Kota untuk mengkompilasi penanganan RTLH yang dilaksanakan di DIY dari berbagai sumber pembiayaan. b. Dinas PUPESDM DIY telah mendampingi kalurahan penerima BKK Arsitektur Khas Yogyakarta (RTLH) sejumlah 94 kalurahan dengan total rumah sejumlah 280 unit. c. PadaTahun 2025, kawasan kumuh di Terbah Kulon Progo merupakan kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY seluas 10,51 Hektar. Menurut profil kawasan kumuh, indikator kawasan kumuh yang paling tinggi adalah penangan drainase. Sedangkan kondisi saat ini, saluran drainase utama merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dan kondisinya tidak memungkinkan jika digunakan. Sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi. 5. Pelaksananaan Perda DIY No. 1 tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta belum optimal sehingga bangunan perumahan dan pemukiman masyarakat belum kuat mencerminkan keistimewaan DIY.	dengan merealisasikan regulasi arsitektur bangunan bercirikhas Keistimewaan DIY serta konsep-konsep perumahan dan pemukiman lainnya yang dapat memenuhi aspek budaya dan pariwisata. Salah satunya dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para pelaku jasa konstruksi perumahan		
C	**Urusan Lingkungan Hidup**			
	1. Realisasi nilai IKLH pada tahun 2024 adalah sebesar 68,44 sehingga masuk ke dalam rentang angka 50 ≤ IKLH < 70 atau kategori Sedang/Cukup Baik. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada tahun 2024 untuk indikator IKLH sudah tercapai dan memenuhi targert yang ditetapkan yaitu diangka 63,29 serta mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang	a. Pemda DIY perlu meningkatkan program untuk menurunkan pencemaran sungai agar Indeks Kualitas Air (IKA) Semakin membaik dan masuk pada kategori sedang atau bahkan baik dengan menjalin kerja sama lintas sektor masyarakat pemerhati sungai, swasta, Perguruan Tinggi, dan LSM serta mengedepankan aspek partisipasi masyarakat khususnya di sekitar Aliran Sungai.	a. Pemda DIY memandang peningkatan kualitas air sungai sebagai agenda penting, mengingat capaian Indeks Kualitas Air (IKA) masih dipengaruhi oleh tekanan aktivitas masyarakat terutama yang menghasilkan limbah domestik serta perubahan tata guna lahan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, penguatan pengendalian pencemaran sungai dilakukan secara lebih terintegrasi agar kualitas air dapat meningkat. Untuk itu, maka: - Pemda DIY mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pelibatan masyarakat pemerhati sungai, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sinergi ini diarahkan pada penguatan edukasi dan perubahan perilaku, penerapan teknologi	a. Pencemaran sungai bukan sekadar masalah lingkungan hidup, melainkan masalah tata kelola perkotaan dan permukiman. OPD Teknis Lingkungan Hidup (DLHK DIY) selama ini hanya sebagai pemantau kualitas, tetapi pengurangan beban pencemar justru menjadi tanggung jawab sektor - sektor lain (perindustrian, perdagangan, pemukiman, dll). Pemerintah kalurahan selaku pemangku wilayah terkecil dilibatkan karena akar pencemaran sungai berada pada ruang kewenangan dan pengaruh sosial yang paling dekat, Institusi pendidikan perlu dillibatkan untuk menganalisis data dan pola

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	pada tahun 2023 mencapai angka 66,29. 2. Walaupun angka IKLH masuk kategori sedang dan melebihi dengan target yang direncanakan namun masih terdapat permasalahan serius terkait Penanganan Sampah yang walaupun saat ini ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota namun masih menyisakan permasalahan terutama penanganan sampah di TPST Piyungan. 3. Dari 4 Komponen yang ada dalam IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) kesemuanya pada kategori sedang dan baik kecuali Indeks Kualitas Air (IKA) yang masih masuk kategori kurang. walaupun angka IKA mencapai angka 42,94 melebihi target yang ditetapkan. 4. Indikator sasaran pertama yaitu Persentase ketaatan	b. Pemda DIY harus segera menuntaskan sisa timbulan sampah di TPST Piyungan paska desentralisasi Pengelolaan sampah ke Kabupaten/Kota. c. Pemda DIY tetap perlu memberi dukungan kebijakan dan anggaran terhadap program pengelolaan sampah yang ditangani oleh Kabupaten/Kota. d. Pemda DIY Perlu meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan program sosialisasi Perda DIY No. Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan peningkatan kapasitas masyrakat dalam mengelola sampah secara mandiri	pengolahan limbah yang lebih tepat guna, serta pengawasan partisipatif terhadap potensi pembuangan limbah ke badan air. Pada Bulan Juni 2025, telah dilaksanakan Rakor Pengendalian Pencemaran Air Sungai dengan melibatkan universitas/akademisi untuk membuka peluang kerja sama lintas sektor dalam pengendalian pencemaran air sungai. - Penyelenggaraan Kajian Pemetaan Penanganan Sungai Tercemar. Kegiatan ini memiliki titik fokus pada sumber-sumber pencemar *non point source*. Sumber pencemar tersebut meliputi air larian di perkotaan, pertanian, hutan dan pertambangan juga air limbah rumah tangga. Rencana kegiatan diawali dengan identifikasi sumber pencemar non point source seperti: saluran drainase, IPAL Komunal, pipa-pipa yang masuk ke sungai dan kegiatan ternak di sungai. Tahapan kegiatan meliputi: Koordinasi dengan kelurahan yang berada di kanan kiri Sungai Code, Sungai Gajahwong dan Sungai Winongo di sejumlah 21 kelurahan - Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 11 (sebelas) sungai yang melewati Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sungai Bedog, Kuning, Winongo, Gajahwong, Oyo, Tambakbayan, Code, Opak, Belik, Konteng, dan Bulus. Periode pemantauan pada tahun 2025 sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Februari	pencemaran untuk kemudian diharapkan dapat merekomendasikan intervensi yang paling efektif. Karena itu, pelibatan lintas sektor bukan pelengkap kebijakan melainkan syarat agar peningkatan Indeks Kualitas Air sungai bisa terwujud. b. Penutupan TPA bukan berarti berhentinya proses, melainkan memasuki fase reaktor biologis tertutup yang masih menghasilkan gas metan, lindi serta resiko lainnya seperti *amblesan* tanah dan vektor penyakit. Sisa timbulan sampah harus ditata dan perlu rehabilitasi lahan agar menimalisir dampak pencemaran dan risiko bencana lingkungan. c. Pada kondisi darurat sesuai syarat dan ketentuan, TPA Piyungan melayani evakuasi sampah dari kabupaten/kota. Pencatatan dan pengendalian sampah masuk terukur, terutama terkait dengan jumlah *tonase* sampah, menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kerja sama, perencanaan pengelolaan persampahan regional, serta pengendalian dampak lingkungan di kawasan TPA Regional Piyungan. d. Permasalahan yang diselesaikan dari sosialisasi dan pembinaan adalah: - Beban TPA tinggi karena penghasil sampah besar DIY (sektor perhotelan, makan minum, ritel)

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi. Indikator tersebut diperoleh dari Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan yang dilakukan di tahun 2023. Untuk tahun 2023, capaian kinerjanya sebesar 27,7%. Jika dibandingkan dengan angka tahun lalu, pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan capaian kinerja karena jumlah perusahaan yang tidak taat semakin menurun. 5. Realisasi Indeks Pencemaran Sungai Periode I,II, dan III masing-masing sebesar 5,99, 5,28, dan 5,20 sehingga Indeks pencemaran sungai pada tahun 2024 berada di angka 5,49 (Kategori Tercemar Sedang)		dan Pertengahan bulan Agustus hingga awal bulan September. - Pembinaan/Sosialisasi Penanganan Sungai Tercemar. IPAL yang menjadi sasaran pembinaan: IPAL Kanggotan, IPAL Bondalem, IPAL Bibis, IPAL Maju Makmur Wirokerten, IPAL Manding Serut, IPAL Wonokromo 2, IPAL Guyub Rukun, IPAL Tamanan Lestari Makmur. b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan merupakan fasilitas pengelolaan persampahan regional yang dalam perkembangannya telah memasuki tahapan pasca operasional aktif. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPA yang telah mencapai batas kapasitas atau tidak lagi memenuhi persyaratan teknis wajib dilakukan penutupan secara bertahap dan disertai dengan upaya pengelolaan lingkungan pasca penutupan. Apabila kondisi *overload* pada zona transisi tidak segera ditangani, maka terdapat risiko meningkatnya dampak lingkungan, gangguan keselamatan operasional, serta ketidaksesuaian dengan ketentuan pengelolaan pasca penutupan TPA sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sampah oleh	belum menjalankan kewajiban pengurangan sesuai Perda. - Fasilitator di tingkat kabupaten/kota belum dapat menerjemahkan perda menjadi prosedur pembinaan - Integrasi pengelolaan sampah komunitas (JPSM) ke sistem pengelolaan sampah daerah

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			kabupaten/kota, beberapa masih mengajukan permohonan evakuasi sampah ke Pemda DIY dan TPA Regional Piyungan masih digunakan untuk menampung evakuasi sampah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penataan zona transisi di TPA Regional Piyungan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kewajiban pengelolaan kawasan pasca penutupan TPA, pengendalian dampak lingkungan, serta penataan kembali fungsi dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 658/11898 pengelolaan sampah didesentralisasikan kepada kabupaten kota sehingga kewenangan pengelolaan sampah berada di kabupaten kota sedangkan pemda DIY hanya berwenang memfasilitasi dan koordinasi. Seiring dengan kondisi keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah di kabupaten/kota, terdapat situasi tertentu dimana Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta mengalami kendala dalam pengolahan sampah di wilayahnya masing-masing. Dalam kondisi tersebut, TPA Regional Piyungan masih menerima sampah berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah daerah asal sebagai bentuk kerja sama penanganan sampah regional. Penerimaan sampah ini bersifat insidentil, terbatas, dan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis serta daya dukung TPA Regional Piyungan. Pelaksanaan kerja sama penanganan sampah secara	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			insidentil tersebut memerlukan pencatatan dan pengendalian yang terukur, terutama terkait dengan jumlah tonase sampah yang ditangani sebagai indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Data tonase sampah yang ditangani menjadi penting sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kerja sama, perencanaan pengelolaan persampahan regional, serta pengendalian dampak lingkungan di kawasan TPA Regional Piyungan. d. Pemda DIY pada tahun 2025 menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai berikut: - Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri: Fasilitator/penyuluh pengelolaan sampah di kabupaten/kota dan JPSM - Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri: Produsen/pelaku usaha di bidang jasa makanan dan minuman, manufaktur dan ritel	
D	**Urusan Perhubungan**			
	1. Realisasi Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran urusan Perhubungan Tahun 2024 tidak tercapai. 2. Kepadatan lalu lintas, terutama di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan jalan-jalan dari dan menuju	a. Pemerintah DIY agar melakukan terobosan dan inovasi terkait aspek budaya transportasi masyarakat sehingga dapat beralih ke transportasi publik dalam mobilitas keseharian dan mobilitas ke tempat-tempat wisata di DIY.	Telah dilakukan beberapa hal diantaranya: 1. *Rerouting* trayek 2. Pemberlakukan kartu tarif khusus untuk pelajar, lansia dan *difabel*; 3. Pelaksanaan sosialisasi angkutan umum; 4. Pembaharuan aplikasi Trans Jogja; dan 5. Penerapan denda pelanggaran operasional.	1. Angkutan perkotaan Trans Jogja telah menjangkau kawasan-kawasan strategis seperti kawasan kerja, pendidikan, wisata dan kawasan lainnya di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta; 2. Telah memberikan kemudahan bagi pelajar, lansia dan penyandang disabilitas dengan tarif khusus;

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	kota serta jalan menuju destinasi wisata yang disebabkan antara lain karena adanya Peningkatan signifikan dalam kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi, minimnya layanan angkutan umum dan terbatasnya penambahan ruas jalan belum optimalnya layanan transportasi massal dari Bus Trans Jogja. 3. Belum terintegrasinya seluruh moda transportasi yang menjangkau kawasan kerja, pendidikan, wisata dan kawasan lainnya serta beradaptasi dengan perkembangan jaman seperti adanya moda transportasi *online*.	b. Perlu adanya system transportasi yang terintegrasi antar moda transportasi yang menjangkau kawasan kerja, pendidikan, wisata dan kawasan lainnya serta beradaptasi dengan perkembangan jaman seperti adanya moda transportasi *online*. c. Pemda DIY harus memastikan adanya peningkatan kinerja Pelayanan transportasi umum yaitu Bus Trans Jogja untuk memberikan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, murah dan menjangkau kawasan-kawasan strategis seperti kawasan kerja, pendidikan, wisata dan kawasan lainnya.		3. Peningkatan jumlah penumpang yang signifikan sebesar 20,7% pada tahun 2025 terhadap jumlah penumpang di tahun 2024.
E	**Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**			
	1. Capaian Akses rumah tangga teraliri listrik pada tahun 2024 tidak ada perubahan dibandingkan tahun 2023 dan belum tuntas 100% masih di angka 99,99%. Data ini berulang sejak tahun 2020.	a. Pemda DIY harus segera menuntaskan 100% rumah tangga yang berakses listrik sehingga terdapat progress kinerja di urusan energy dan sumber daya mineral. b. Pemda DIY perlu Mengintensifkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan	a. Berdasarkan publikasi data PT. PLN (Persero) dan Kementerian ESDM, bahwa capaian rasio elektrifikasi total DIY pada akhir tahun 2024 sebesar 99,99 %. Berdasarkan data tersebut menunjukkan masih ada sebagian kecil (0,01%) rumah tangga di DIY yang belum menikmati aliran listrik yang secara umum disebabkan oleh beberapa alasan tertentu di antaranya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan	a. Hal yang paling penting dan mendasar dalam penyelesaian pemerataan akses listrik di DIY adalah ketersediaan dan terbangunnya sistem pendataan yang akurat, terverifikasi serta lengkap. Telah dilakukan upaya sinergi lintas *stakeholder* terkait untuk bersama-sama secara bertahap membangun sistem database yang baik. *Database* yang akurat dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	2. Meskipun potensi energi terbarukan yang dimiliki DIY sangat terbatas, namun sejak tahun 2020 tren pemanfaatan energi terbarukan di DIY terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2020 capaian porsi Energi Baru Terbarkan dalam bauran energi primer DIY sebesar 6,08%, tahun 2023 sebesar 6,91% dan diperkirakan mencapai lebih dari 7% di tahun 2024. 3. Luasan izin pengusahaan pertambangan pada tahun 2024 seluas 3.966,68 hektar sedangkan luasan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang seluas 42.944 hektar sehingga capaian persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,23%. 4. Izin usaha pertambangan sampai dengan TW IV Tahun 2024 terdiri dari 37 IUP OP, 35 IPR, 58 IUP	pengendalian pengusahaan pertambangan disertai penindakan hukum bagi kegiatan Penambangan tidak berizin (PETI) dengan berkoordinasi lebih intens dengan Aparat Penegak Hukum (APH).	orang/rumah tangga yang secara sadar menolak adanya akses listrik (penganut kepercayaan/tradisi tertentu, manula, kondisi ekonomi tertentu, rumah belum siap dan kenyamanan/keinginan pribadi). Dari hasil pendataan yang dilakukan tahun 2024, terdapat 26 rumah tangga yang sama sekali belum berlistrik. Dari informasi tersebut, secara bertahap dilakukan pencermatan, upaya pendekatan di lapangan dan tindak lanjut pemberian akses listrik, dan pada triwulan 1 tahun 2025, jumlah tersebut telah menurun menjadi 20 rumah tangga. Adapun permasalahan lain yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah masih terdapat lebih dari 4.600 rumah tangga yang telah menikmati akses listrik namun masih dengan cara menyalur/*bhendeng/ganthol/*non PLN, yang tentunya tidak sesuai dengan kaidah K2 dan beresiko tinggi terjadinya kecelakaan ketenagalistrikan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan : 1) penyusunan database terpadu kondisi akses listrik rumah tangga dengan melibatkan lintas stakeholder baik OPD DIY, OPD Kabupaten/Kota, Kalurahan, dan BUMN; 2) pencanangan gerakan URUPKE untuk mendorong partisipasi sektor	lengkap tersebut menjadi modal penting penentuan strategi pemerataan akses listrik. Adapun aksi tindak lanjut dari pemanfaatan *database* tersebut adalah sebagai dasar sasaran pengajuan CSR (terealisasi 35 unit) dan pengajuan program Bantuan Pasang Baru Listrik APBN Kementerian ESDM. Selain itu, *database* tersebut menjadi bahan perencanaan bagi PT PLN dalam melakukan program perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan listrik bagi masyarakat. Hal lain yang telah dilakukan adalah melakukan pendekatan ke Rumah Tangga belum berlistrik dengan kondisi khusus, hasilnya 2 rumah tangga yang menolak akses listrik, bersedia diberikan akses penerangan menggunakan PLTS. b. Dengan masifnya pengawasan dan pengendalian serta pemberian surat Himbauan bagi kegiatan PETI untuk menghentikan kegiatannya dan mengurus perizinan dan penindakan hukum oleh APH, berdasarkan hasil Inventarisasi kegiatan PETI pada Triwulan II tahun 2025 kegiatan PETI yang masih beroperasi berjumlah 6 PETI, jumlah tersebut jauh berkurang dari hasil inventarisasi PETI pada awal tahun 2025 yaitu sejumlah 36 kegiatan PETI. Selain penindakan terhadap PETI, Pemda DIY juga memfasilitasi permohonan Izin

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Eksplorasi, 7 IUPK, dan 4 SIPB.nPengawasan aspek teknis yang dilakukan oleh Inspektur Tambang pada tahun 2024 terdiri dari 41 IPR, 29 IUP Eksplorasi, 14 IUP OP, 2 SIPB.		swasta/BUMN/BUMD dalam realisasi CSR mendukung pemerataan akses listrik; 3) koordinasi dan kerja sama dengan PLN untuk menjamin kuantitas dan kualitas pasokan listrik untuk masyarakat DIY. b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan agar kegiatan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik. Kaidah pertambangan yang baik terdiri aspek tata kelola yang dilakukan oleh Dinas PUPESDM DIY dan aspek teknik pertambangan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang. Selain dilakukan oleh Dinas PUPESDM DIY dan Inspektur Tambang, pengawasan juga dilakukan oleh Instansi penerbit izin dan instansi penerbit rekomendasi. Dari hasil pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pertambangan, sampai dengan Bulan Mei 2025 Dinas PUPESDM DIY telah memberikan Surat Peringatan 1 pada 6 pemegang Izin Pertambangan Rakyat, dan berlanjut pada Surat peringatan 2 pada 3 pemegang Izin Pertambangan Rakyat. Selain dilakukan oleh unsur pengawas, unsur penerbit izin dan unsur penerbit rekomendasi, Gubernur telah membentuk Tim Terpadu pengawasan dan pengendalian kegiatan Pertambangan melalui Keputusan Gubernur Nomor 42/TIM/2025 untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan secara terintegrasi agar semua unsur baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan	Pertambangan Rakyat. Pemda DIY berkomitmen untuk mempercepat pemrosesan permohonan IPR, namun pemohon IPR di wilayah sungai belum mengajukan permohonan IPR dikarenakan penolakan terhadap rekomendasi penggunaan alat manual untuk kegiatan IPR sesuai regulasi instansi teknis yang berwenang pada pengelolaan sungai, sehingga tahun 2025 baru diterbitkan 1 IPR di Kabupaten Gunungkidul.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			Pemerintah Kabupaten serta Aparat Penegak Hukum dapat bersinergi dan menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan pertambangan secara komprehensif. Selain melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pertambangan berizin, Tim Terpadu juga melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pertambangan yang tidak berizin (PETI). Kewenangan penindakan hukum terhadap PETI berada di aparat penegak hukum, namun Pemerintah Daerah DIY tetap melaksanakan kegiatan Inventarisasi terhadap PETI. Selain diinventarisasi, penanggungjawab PETI juga diberikan surat himbauan untuk menghentikan kegiatannya dan mengurus perizinan. Surat Himbauan tersebut juga disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan langkah selanjutnya yaitu penindakan hukum. Sepanjang Tahun 2025 telah dilakukan 4 penindakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan 3 lokasi berada di Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo dan 1 lokasi berada di Kabupaten Bantul.	
F	**Urusan Perencanaan Pembangunan**			
	1. Perencanaan Pembangunan secara normative sudah berjalan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan sehingga yang perlu ditingkatkan adalah kualitas perencanaan	a. Arah pembangunan nasional dan di DIY sekarang bergeser kesatuan wilayah terkecil yaitu Desa melalui Anggaran Dana Desa serta Bantuan Keuangan Khusus. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	a. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,	a. Dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan sampai dengan Pemerintah Pusat ini maka pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terfokus dan saling terkait/mendukung sesuai dengan kewenangannya.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	pembangunan sehingga semakin mendekati program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas sangat tergantung dengan kapasitas perencana pembangunan terutama pada level basis di tingkat RT, RW, dan Kelurahan sehingga mampu merencanakan program dan kegiatan yang dapat sesuai dengan kebutuhan dan mencapai tujuan pembangunan. 3. DPRD bersama Pemerintah DIY telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan yang salah satu materi muatannya terkait dengan Perencanaan Pembangunan	sampai dengan tingkat Kalurahan/Kelurahan dan bahkan sampai tingkat Dusun/RW/RT. b. Perlunya peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan secara partisipatif bagi pemangku kepentingan di tingkat basis yaitu Dusun/Kampung/RW/RT agar dapat secara optimal mampu membaca peta permasalahan rakyat yang sesungguhnya. c. Segera diterbitkan Peraturan Gubernur terkait Pelaksanaan Perda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan yang salah satu materi muatannya terkait dengan Perencanaan Pembangunan.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dilaksanakan mulai dari unsur terkecil yakni musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten/Kota, musrenbang Provinsi sampai dengan musrenbang Nasional di Pemerintah Pusat. Sinkronisasi dan koordinasi program/kegiatan pembangunan diselaraskan pada masing-masing forum tersebut untuk selanjutnya diajukan ke forum yang lebih tinggi. b. Kemampuan perencanaan pembangunan dari tingkat basis telah dioptimalkan secara partisipasif melalui pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan menghasilkan Daftar Prioritas Desa menurut Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan ini selanjutnya disampaikan/diajukan untuk dibahasa dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kecamatan merupakan kewenanganan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pemerintah DIY telah melibatkan partisipasi masyarakat didalam proses	b. Dengan adanya materi Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan maka pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Penanganannyapun juga akan sesuai dengan kewenangannya. c. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan maka pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			perencanaan pembangunan sesuai dengan amanah Permendagri dimaksud. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari proses Musrenbang dengan mengundang kelompok masyarakat dari beberapa komunitas untuk terlibat dalam usulan program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di DIY tidak hanya sebatas dalam forum resmi tetapi juga menyebar luaskan tautan saran/masukan terkait permasalahan dan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sebagai bagian dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).	
IV	**BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**			
A	**Urusan Pendidikan**			
	Berdasarkan data BPS tahun 2024 penduduk di DIY berjumlah 3.743.365 dari jumlah tersebut, untuk kategori usia sekolah (7-12 tahun) sebanyak 8,17 %, usia sekolah 13-15 sebanyak 4,44%, usia sekolah 16-18 tahun sebanayak 4,43%. Data pada tahun 2024 penduduk di DIY usia sekolah sebanayak 634.562 siswa atau sebanyak 17,01% jumlah penduduk.	a. Evaluasi secara terus menerus terhadap distribusi guru dilaksanakan dengan melakukan penataan secara rutin setiap semester sekali untuk memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY harus melakukan evaluasi secara terus menerus.	DISDIKPORA DIY: a. Evaluasi telah dilakukan oleh Dinas Dikpora DIY dengan mengoptimalkan peran Balai Pendidikan Menengah Kab./Kota dan pengawas guna menjamin pemerataan kebutuhan guru di sekolah. Evaluasi terhadap distribusi guru salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan subkegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus melalui pendataan jam mengajar masing-masing guru.	DISDIKPORA DIY: a. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilakukan evaluasi berkala dan pemantauan rutin pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan harapan dapat mengoptimalkan pemerataan beban mengajar guru di sekolah. Dengan demikian para guru memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan atau meningkatkan keaktifan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah.
	Sementara 10,36% penduduk usia sekolah tidak ada	b. Pemda DIY memperjuangkan untuk pengangkatan formasi	b. Pemda DIY tetap akan mengupayakan pemenuhan kekurangan guru melalui	b. Pengangkatan guru pada periode 2024 dan 2025 diharapkan dapat turut

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	keterangan. Masih ada 69.383 anak yang belum diketahui status pendidikannya. Capaian tingkat partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun di DIY tahun 2024 sebesar 90,36%. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 18–18 tahun dihitung berdasarkan perbandingan jumlah anak sekolah pada usia jenjang Pendidikan menengah anak dengan jumlah anak pada kelompok usia 16–18 tahun di DIY. Berdasarkan capaian APS tersebut, terdapat penurunan sebesar 0,81% dibandingkan dengan capaian APS di DIY tahun 2023 sebesar 91,17%. Capaian tingkat partisipasi penduduk usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus Pendidikan di tahun 2024 mencapai 75,34% dari target 51,33%. Pencapaian target ini dipengaruhi oleh terlaksananya advokasi Pendidikan khusus sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya Pendidikan bagi anak anak berkebutuhan khusus. Peningkatan kompetensi guru	guru pada penerimaan CASN setiap tahunnya.	mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait pengangkatan guru.	mengatasi permasalahan kurangnya guru di sekolah, khususnya yang memiliki latar belakang kejuruan maupun pendidikan luar biasa.
		c. Bantuan secara terukur kepada anak putus sekolah untuk dapat kembali mengenyam pendidikan menengah di DIY. d. Penguatan pendekatan pendampingan berbasis keluarga, karena latar belakang sosial masing-masing anak putus sekolah berbeda satu dengan yang lain.	c. Bantuan telah disalurkan oleh Pemda DIY melalui beasiswa Retrieval yang dikhususkan bagi anak-anak putus sekolah atau rentan putus sekolah jenjang pendidikan menengah. d. Pendampingan berbasis keluarga akan diupayakan bagi para anak putus sekolah agar mau kembali melanjutkan pendidikan hingga menuntaskan jenjang pendidikan menengah.	c. Sampai dengan akhir tahun 2025, beasiswa *Retrieval* diharapkan mampu memberikan dukungan pembiayaan seperti biaya pendidikan di sekolah swasta/lembaga nonformal, seragam, transportasi, uang saku, dan biaya praktik industri apabila siswa memilih untuk menuntaskan pendidikan di SMK..
		e. Kebijakan pembebasan penggunaan dana BOS, bagi siswa di SMA dan SMK. f. Meningkatkan jumlah beasiswa bagi warga DIY kurang mampu di sekolah dan yang kuliah di Perguruan Tinggi. g. Perbaikan menegemen penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang berkeadilan. h. Fasilitasi dana pendidikan meliputi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya serta	e. Penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 sehingga seluruh rangkaian penganggaran, pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban wajib disesuaikan dengan Peraturan tersebut. f. Pada tahun 2025 telah disalurkan sejumlah beasiswa bagi siswa jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus, maupun pendidikan tinggi. Bagi siswa jenjang pendidikan menengah terdapat Beasiswa Kartu Cerdas dan Beasiswa *Retrieval*. Bagi siswa jenjang pendidikan khusus terdapat beasiswa Pendidikan Khusus dan Beasiswa Inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler. Pada jenjang pendidikan tinggi	l. Pendampingan atau pendekatan personal merupakan salah satu alternatif guna menekan peningkatan angka putus sekolah di DIY. Tentunya hal ini membutuhkan kerjasama banyak pihak guna menumbuhkan keinginan anak untuk menuntaskan Pendidikan. m. Dana BOSP akan dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam pengelolaan operasional sekolah sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Sepanjang tahun 2025 sekolah telah berupaya memenuhi ketentuan Permendikdasmen 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. n. Pemberian beasiswa bagi para siswa jenjang pendidikan menengah, khusus,

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	pendidikan luar biasa dan pengkayaan materi keterampilan dalam kurikulum sekolah, serta pemberian advokasi kepada Masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus menjadi prioritas Pemda DIY. Dilihat dari parameter Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), pemerataan akses pendidikan di DIY masih perlu terus di tingkatkan terutama untuk jenjang sekolah menengah atas. Capaian APK untuk jenjang pendidikan menengah menunjukan angka fluktuatif dengan rata-rata APK 92,88. Beberapa permasalahan masih menyelimuti dunia Pendidikan di DIY. Masih terdapat kasus anak putus sekolah. Capaian Angka Putus Sekolah penduduk usia 16-18 tahun di DIY masih melampaui target yang ditetapkan. Capaian Angka Putus Sekolah adalah sebesar 0,28% melebihi dari target 0,20%. Selain itu di DIY masih terdapat kekurangan	meningkatkan kualitas tenaga pendidik. i. Meningkatkan cakupan akses pendidikan peserta didik dengan sasaran wajib belajar 12 tahun. j. Pemerintah DIY harus lebih meningkatkan Program Pendidikan Inklusi dimana perlu langkah penegakkan kebijakan bahwa Sekolah Umum harus menjadi Sekolah Inklusi sebagai wujud keberpihakan pada kaum disabilitas. k. Perlunya penguatan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya di semua jenjang pendidikan di DIY. l.	akan disalurkan Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa. g. Manajemen penerimaan murid baru di tahun 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan telah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat serta lembaga terkait guna mengoptimalkan layanan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat DIY. h. Sesuai petunjuk teknis, pemanfaatan bantuan operasional pendidikan yang disalurkan oleh Pemda DIY kepada satuan pendidikan jenjang menengah dan khusus salah satunya adalah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya dan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui fasilitasi pelatihan dan komunitas belajar. i. Aksesibilitas merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan pendidikan di DIY. Peningkatan aksesibilitas pendidikan terus diupayakan Pemda DIY melalui penyaluran beasiswa dan bantuan operasional ke sekolah. j. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru telah diatur bahwa SMA/SMK memiliki kuota maksimal 2 murid penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajarnya. Ketentuan ini diharapkan juga didukung dengan pemenuhan fasilitas bagi siswa penyandang *disabilitas*. k. Implementasi nilai-nilai luhur budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurikulum pendidikan di DIY telah diawali oleh Pemerintah	inklusi, maupun jenjang pendidikan tinggi diharapkan mampu meringankan beban pendidikan yang harus ditanggung dan meningkatkan kesempatan bagi para siswa menuntaskan pendidikan. o. Peraturan yang menjadi dasar Sistem Penerimaan Murid Baru yang dipergunakan di DIY telah diupayakan seoptimal mungkin untuk memberikan layanan penerimaan murid baru yang terbaik bagi para calon murid baru. p. Masih kurangnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan berbasis budaya serta peningkatan kualitas tenaga pendidik diharapkan mampu diatasi salah satunya melalui dukungan bantuan operasional pendidikan dari Pemda DIY. q. Diharapkan melalui penyaluran bantuan operasional ke sekolah dan bantuan pendidikan, semakin berkurang jumlah penduduk DIY usia sekolah yang tidak menuntaskan pendidikan karena terhambat secara ekonomi. r. Melalui ketentuan yang telah diatur dalam penerimaan murid baru, diharapkan sistem penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik dari kelompok rentan, untuk

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	jabatan fungsional guru, mendasarkan pada kebutuhan riil di lapangan. Banyak terjadi pengangkatan guru atas permintaan komite sekolah dan pengaruh yang kuat dari Komite Sekolah terhadap kurikulum pendidikan. Dalam beberapa kasus di lapangan yang terjadi, masih ada ijazah siswa yang ditahan sekolah terutama karena belum melunasi pembayaran sekolah terutama di sekolah SMK/SMA. Untuk mencapai target tersebut Pemda DIY telah berupaya menekan angka putus sekolah dijenjang Pendidikan menengah melalui penyaluran bea siswa. Anak putus sekolah memiliki berbagai alasan sosial dan psikologis yang menjadi penyebab kurangnya minat untuk menuntaskan Pendidikan dijenjang sekolah menengah, jadi penyebabnya bukan hanya dari faktor ekonomi saja. Selain itu perlu diperhatikan kebutuhan dan permasalahan		Daerah DIY melalui penyusunan dan penerapan panduan Pendidikan Khas *Kejogjaan* oleh kalangan pakar akademis (perguruan tinggi), budayawan, ahli pendidikan religi, dan kalangan institusional (Dewan Pendidikan Kota dan Kabupaten di DIY). Panduan ini diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan Khas Kejogjaan berusaha membentuk moralitas siswa menjadi pribadi yang memiliki keutamaan hidup *(jalma utama)* melalui pengembangan aspek kecerdasan spiritual yang sudah lama hidup, tumbuh, dan berkembang dalam wujud kearifan lokal masyarakat Yogyakarta. Peserta didik tidak hanya dibekali ilmu, pengetahuan, maupun ketrampilan teknis, melainkan ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat mendasar supaya menjadi pribadi yang baik. Pengetahuan yang dikembangkan bukan hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi sekaligus mengembangkan kebaikan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai motor penggerak pembentukan peradaban yang luhur.	s. memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan belajar yang sama dan tanpa diskriminasi. Pendidikan Khas *Kejogjaan* diharapkan mampu memberikan contoh bagi implementasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran sehingga mampu membentuk pribadi yang memiliki karakter baik sekaligus terampil dalam keilmuannya.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	peningkatan kualitas urusan pendidikan di DIY sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pendidikan; 2. Penngkatan kapasitas Tenaga kependidikan; 3. Sarana dan prasarana pendidikan; 4. Sekolah ramah anak; 5. Pendidikan berbasis budaya; 6. Pemantapan budaya adilihung; 7. Antisipasi nilai-nilai budaya asing; 8. Masih ada ijazah siswa yang masih ditahan sekolah terutama karena belum melunasi pembayaran sekolah terutama di sekolah SMK/SMA; 9. Pemda DIY mulai menganggarkan dukungan bidang Pendidikan bersumber dari dana keistimewaan.			
B	**Urusan Kesehatan**			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Menurut data dari Survey Kesehatan Indonesia (SKI) masih tingginya nilai prevalensi Penyakit Tidak menular (PTM) dan gangguan jiwa di DIY. Hasil survey SKI tahun 2023 menunjukan angka prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun mencapai 31,80% (Nasional 30,80%) dan prevalensi diabetis di DIY pada semua kelompok umur mencapai 2,90% (Nasional 1,70%). Disamping itu juga berdasar data SKI tahun 2023 angka *stunting* masih cukup tinggi. Angka prevalensi *stunting* di DIY mencapai 18,00% dibanding target RPJMD sebesar 14,00%. Indek keluarga sehat dapat meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024 angka indek keluaga sehat mencapai 0,39% dibanding target tahun 2024 sebesar 0,36 %. Namun demikian terkait dengan parameter AKI, Angka kematian bayi, angka kematian balita serta KEP (gizi buruk). Sulitnya menekan kasus kematian ibu, bayi dan balita	a. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara terus menerus,khususnya peningkatan kampanye hidup sehat melalui GERMAS maupun program lainnya. Dinas Kesehatan DIY perlu untuk terus menggencarkan kampanye hidup sehat dengan metode pendekatan yang kreatif dan kekinian (memanfaatkan teknologi IT/sosial media)	a. Penguatan layanan primer untuk meningkatkan implementasi promotif preventif selain dengan kampanye hidup sehat untuk peningkatan literasi kesehatan juga dengan pemasifan deteksi dini sebagaimana diatur pula dalam peraturan terkait GERMAS dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit. Deteksi dini juga dikuatkan dengan kebijakan Cek Kesehatan Gratis, juga yang selama ini telah terimplementasikan seperti Posbindu Satriya, serta pelibatan lintas sektor seperti kampus-kampus di DIY untuk penguatan edukasi dan deteksi dini.	
		b. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dan permasalahan gizi kurang atau KEP pada balita dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) harus lebih terukur mengingat kematian bayi masih cukup tinggi.	b. *Prevalensi stunting* DIY tahun 2024 sebesar 17,4%, berada di bawah nasional sebesar 19,8%. DIY berada di urutan ke-10 *prevalensi stunting* terendah dari 38 provinsi SKI, 2024). Prevalensi stunting DIY tahun 2024 turun dibanding tahun 2023 sebesar 18% (SKI 2023). Pemerintah melalui Bappenas telah melakukan revisi target stunting baik nasional maupun daerah. Target nasional 2025 pada awalnya adalah sebesar 13,5% dan selanjutnya dilakukan revisi target menjadi 18,8%. (Berdasarkan Surat Bappenas Nomor: B-	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	dari tahun ke tahun disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai dan terlambat mendapatkan pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil. Sehingga bentuk intervensi kebijakan mengenai permasalahan ini perlu ditekankan. Akses pada sarana pelayanan kesehatan yang terstandar dan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata sehingga dapat mencegah dari kematian perlu	c. Optimalisasi *ante natal care (ANC)* sebanyak minimal 6 kali, pemberian suplemen ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas Kesehatan, harus menjadi prioritas dalam pengurangan angka kematian ibu. Dinas Kesehatan DIY memastikan semua layanan di Puskesmas telah tersedia dengan baik.	08318/D.05/PP.06.02/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemutakhiran Target *Prevalensi Stunting* Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045). Sedangkan target bagi DIY yang ditetapkan secara nasional adalah 16,1% pada tahun 2025. Menurut WHO, *prevalensi stunting* di suatu wilayah/negara sudah di bawah 20%, maka dianggap telah mencapai target yang ditetapkan WHO, dan bukan merupakan permasalahan. Namun demikian, DIY tetap berupaya menurunkan prevalensi *stunting* karena hal ini berkaitan dengan kualitas generasi berikutnya. Upaya yang dilakukan dilakukan secara *konvergen* berupa intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor non kesehatan).	
	diperhatikan. Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan antara lain prosentase angka penderita gangguan jiwa di DIY tertinggi secara nasional. Selain itu juga masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM). Hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Prevalensi Hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun 2023 DIY mencapai 31,8% (Indonesia pada 30,8%), Prevalensi Diabetes berdasar diagnosis dokter pada semua	d. Mengoptimalkan sistem edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, pengetahuan dasar kesehatan. e. Khusus untuk *stunting* perlu meningkatkan intensitas sosialisasi pada kelompok muda dan subsidi pangan. f. Perlu diperhatikan tumbuh kembang dan imunisasi anak serta pemberian tambahan makanan pada balita. g. Mendorong Gubernur dan Pemerintah DIY untuk segera melakukan akselerasi	c. Jumlah kematian ibu setiap tahunnya di DIY dalam 10 tahun terakhir sudah mengalami pergeseran penurunan. Periode hingga tahun 2014, jumlah kematian ibu berkisar lebih dari 40 kasus. Pada periode 2014-2019, jumlah kasus berkisar 30-39 kasus. Jumlah kasus kematian ibu mengalami peningkatan pada tahun 2019 - 2022 disebabkan karena masa pandemi. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2024 berada pada kisaran 20-29 kasus per tahun. Kasus kematian bayi dalam setahun juga mengalami hal yang sama. Periode hingga tahun 2014, jumlah kasus kematian bayi berkisar lebih dari 400 kasus, sedangkan sejak tahun 2014 hingga saat ini sudah bergeser menjadi 250-350 kasus per tahun.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	kelompok usia mencapai 2,9% (Indonesia pada 1,7%). Prevalensi Depresi berdasarkan SKI 2023 mencapai 1,5%-2% (Indonesia pada 1%-1,5%). (Sumber: SKI 2023). Permasalahan yang lain adalah keterbatasan tenaga kesehatan khususnya dokter dan tenaga medis di daerah terpencil di perbatasan DIY dan Jawa Tengah. Angka stunting masih cukup tinggi di DIY. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dan RPJMD DIY 2022-2027 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Sisi lain di DIY, masih terdapat angka kematian Ibu dan Bayi yang belum mampu ditekan sampai dengan batas angka terendah. Angka kematian Ibu masih cukup fluktuatif sementara untuk kematian masih cukup tinggi. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan	pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai bagian dari kampanye pola hidup sehat (GERMAS).	Namun secara angka, kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) dapat dikatakan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan jumlah kelahiran hidup di DIY dari tahun ke tahun semakin menurun, dari sekitar 44.000 pada tahun 2010, menjadi sekitar 32.000 pada tahun 2024. Target RPJMN tahun 2029 nasional adalah AKI 77 dan AKB 11,9. Sedangkan target SDGs tahun 2030 adalah AKI 70 dan AKB 12. DIY sudah mencapai target nasional tersebut. Berdasar data Longform Sensus Penduduk 2020, AKI DIY berada pada urutan nomer 2 terendah nasional, yaitu sebesar 58, sedangkan nasional 189. AKB DIY juga berada di urutan nomer 2 terendah nasional yaitu sebesar 10,9 sedangkan nasional 16,85. Upaya dilakukan dengan berbagai upaya dan perbaikan terus menerus di antaranya melalui regulasi. Regulasi di DIY yang telah dikeluarkan untuk menurunkan AKI dan AKB adalah Pergub DIY No. 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No 59 Tahu 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. Selain itu pada tahun 2024 juga telah diterbitkan Keputusan Gubernur No. 283/KEP/2021 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR). Dalam mengatasi masalah kekurangan tenaga medis di daerah perbatasan telah dilakukan yaitu dengan menambah tenaga kesehatan khususnya dokter dan medis di daerah terpencil di perbatasan DIY dan Jawa Tengah melalui	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	anak masih perlu ditingkatkan dan perlunya pendampingan keluarga sehat.		Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dalam mengatasi masalah kekurangan tenaga medis di daerah beberapa strategi yang dikembangkan untuk pemenuhan tenaga melalui : - Untuk pemenuhan dokter melalui integrasi sistem pengajuan wahana program dokter internship - Untuk pemenuhan dokter spesialis melalui Forum Komunikasi dan Mediasi Pemenuhan Dokter Spesialis yang beranggotakan organisasi profesi, Dinas Kesehatan, dan asosiasi RS. - Untuk pemenuhan tenaga kesehatan melalui integrasi program magan Mahasiswa dan Lulusan Baru di Puskesmas daerah perbatasan - Koordinasi dan advokasi dengan Kabupaten/Kota	
			d. Gerakan masyarakat untuk hidup sehat terus digalakkan dengan berbagai cara oleh berbagai sektor dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Germas Yogyakarta Sehat Lestari. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya melalui : Peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat, Peningkatan aktifitas fisik, Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, Peningkatan kualitas lingkungan. Beberapa aksi nyata yang telah dilakukan adalah : 1) Penyebaran Informasi Efektif : Kampanye Media Sosial, Infografis dan Video Edukasi	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			2) Edukasi PHBS di 5 tatanan (Rumah Tangga, Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Tempat Umum, Tempat Kerja) 3) Bimtek dan Keterlibatan Masyarakat : Bimtek kader posyandu ILP, menjalin mitra kesehatan potensial 4) Mengaktifkan Forum Komunikasi Germas 5) Menggerakan kembali peningkatan aktifitas fisik melalui senam peregangan setiap pukul 10.00 WIB dan 14.00 WIB 6) Mengoptimalkan ada menu buah pada snack disetiap pertemuan 7) Kampanye Germas pada beberapa event kesehatan : *car free day*, HKN, lomba/kompetisi. e. Edukasi tentang pola hidup sehat di tahun 2025 bagi para peserta didik salah satunya telah didukung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pencanangan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.	
			f. Sosialisasi *stunting* terus dilakukan melalui berbagai media dengan berbagai segmen sasaran termasuk pasangan muda. Edukasi bagi calon pasangan muda juga didukung dengan adanya MoU Kemenag dengan BKKBN tentang Kursus Calon Pengantin dan Pendampingan Calon Pengantin. Pemberian Makanan Tambahan diberikan bagi Ibu hamil yang kekurangan energi kronis.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			g. Pemantauan pertumbuhan balita dilaksanakan melalui Gerakan Penimbangan dan intervensi Serentak, dilaksanakan pada bulan Juni 2024 dengan sasaran balita, ibu hamil dan calon pengantin. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini sekaligus intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi. memberikan edukasi pencegahan stunting serta meningkatkan cakupan kunjungan sasaran ke Posyandu, juga sekaligus untuk pemantauan tumbuh kembang balita serta pemeriksaan kesehatan anak terpadu.	
			h. Secara umum kegiatan peningkatan kebugaran jasmani dilakukan oleh puskesmas dan kabupaten kota melalui kegiatan pembinaan kelompok olahraga masyarakat, sekolah, instansi pemerintah dan melakukan pengukuran kebugaran jasmani (Pekerja, anak sekolah, jamaah haji). i. Yang sudah dilakukan Dinkes DIY: 1) *Workshop* Kesehatan Olahraga dengan peserta dinkes kabko dan puskesmas (peningkatan kapasitas petugas) 2) Pertemuan koordinasi kesehatan olahraga anak sekolah dengan peserta OPD terkait dan sekolah (koordinasi dan advokasi) 3) Penyusupedoman kebugaran jasmani anak sekolah 4) Penggalangan komitmen kebugaran jasmani anak sekolah 5) Pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah	
C	**Urusan Sosial**			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	Urusan Sosial dalam pembagian kewenangannya merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus ditangani bersama terkait hak dan pelayanan dasar bidang sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PPKS merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Permasalahan sosial tersebut membutuhkan penanganan yang sinergi dalam lintas	a. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan sosial masyarakat khususnya sarana pemakaman umum guna mengantisipasi kebutuhan TPU yang semakin meningkat. Sehingga biaya pemakaman dapat ditekan serendah mungkin. b. Peningkatan layanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama bagi warga miskin, gepeng dan PMKS lainnya serta melakukan pengawasan PMKS terutama *Gepeng*. Satpol PP DIY harus tegas melakukan penindakan terhadap penyandang masalah sosial di ruang-ruang publik. Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, perlu semakin dikuatkan. c. Perbaikan data jumlah penduduk miskin untuk menghilangkan adanya data penduduk miskin yang tidak tepat sasaran (inklusi/ekslusi). d. Pemerintah DIY harus meningkatkan perhatian	a. Terkait fasilitasi pemakaman PPKS terlantar, dilakukan pemakaman oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing asal rujukan PPKS *Gepeng*, maupun kerjasama dengan Swasta yang melaksanakan urusan pemakaman jenazah terlantar (HAVARA). b. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan lanjut usia (salah satunya pelayanan kesehatan) lanjut usia telah ada beberapa upaya, antara lain : 1) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia 2) Semuan kabupaten/kota telah berproses menyusun Perda Kabupaten dan Perwal (ada yang sudah jadi, ada yang masih berproses sampai Biro Hukum DIY tahun 2025) terkait kesejahteraan lanjut usia 3) 100% puskesmas telah menyelenggarakan puskesmas ramah lansia 4) 100% puskesmas telah menyelenggarakan posyandu lansia 5) 100% puskesmas telah menyelenggarakan Perawatan Jangka Panjang 6) 29 Rumah Sakit telah menyelenggarakan pelayanan *geriatri* terpadu c. Tahun 2025 Dinkes DIY: 1) Mencetak 7500 Buku Kesehatan Lanjut Usia; 2) Mencetak formulir Perawatab Jangka Panjang bagi petugas Kesehatan; 3) Melakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan lanjut usia.	a. Jenazah terlantar dapat segera dikebumikan dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat. b. Layanan kepada lansia. c. Gangguan ketertiban karena Gepeng dan orang yang hidup dijalanan dapat diminimalisir karena dilakukan Penjangkauan/Penertiban dan dilakukan *assesment* serta dilakukan reunikasi dan pemulangan atau rujukan ke Balai Kementerian Sosial atau Balai Pelayanan Sosial di daerah asal klien. d. Tidak ada masyarakat yang merasa terabaikan, karena pengaduan segera ditindaklanjuti sampai dengan verifikasi dan validasi data kemiskinan. e. Hak masyarakat miskin atas bantuan hukum terpenuhi. f. Dengan adanya Bansos JSLU yang menyasar pada lanjut usia maka *Aging population* bukan menjadi ancaman melainkan menjadi potensi penggerak ekonomi karena lansia yang ada merupakan lansia bedaya sejahtera. Selain itu dengan penanganan lintas sektor maka peran serta masyarakat menjadi lebih besar, serta ikut menggerakan roda ekonomi lokal. g. Permasalahan spesifik yaitu terkait ketepatan sasaran penerima Bansos JSLU telah diselesaikan dengan dilaksanakannya verifikasi dan validasi penerima JSLU, setiap bulan sebelum

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	sektor. Solusi penanganan permasalahan sosial bukan hanya terhadap PPKS secara langsung, tetapi juga mendorong berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Terkait pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar tersebut telah diatur dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja pemerlu pelayanan kinerja soial (PPKS) dalam memperoleh pemenuhan dasar, perlindungan jaminan sosial, serta potensi sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang merupakan tujuan mencapai target dari 28,10% tercapai 38,96% atau mecapai 138,64%. Struktur penduduk tua, tahun 2024 DIY	kepada kelompok rentan pembangunan terutama kaum disabilitas dan miskin. e. Propinsi DIY telah memasuki struktur penduduk tua (aging population) sehingga perlu penanganan yang terpadu lintas sektor. f. Penguatan program pemberian bantuan sosial berupa Jaminan Sosial Lanjut Usia Seumur Hidup (JSLUSH) yang diberikan pada 8.000 orang lanjut usia, sehingga jumlah masyarakat yang terjangkau semakin banyak. Dinas Sosial DIY perlu untuk terus mengembangkan program ini. g. Peningkatan layanan konseling lansia baik di Posyandu Lansia maupun Puskesmas. Dinas Kesehatan DIY perlu untuk memastikan semua layanan bagi lansia tercukupi dengan baik. h. Mendorong Pemerintah DIY untuk mendirikan Sekolah Lansia untuk memberikan ruang aktualisasi diri serta untuk memberikan wadah silaturrahim warga lanjut usia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	d. Penanganan *Gepeng* sudah dilaksanakan rehabilitasi sosial awal atau *assessmen* dan berkolaborasi dengan lintas sektor (Satpol PP DIY/Kab/Kota, Kepolisian, dll) untuk penertiban dan pelanggaran ketertiban umum. Hingga TW 2 sudah dilaksanakan layanan rehabilitasi sosial awal di RPS *Camp Assessment* sebanyak 238 orang Gelandangan Pengemis, dan dilakukan terminasi (Rujukan ke Balai Rehabsos, pemulangan ke daerah asal, fasilitasi penjemputan oleh keluarga dan layanan pemakaman) sebanyak 70 orang. Koordinasi terus dilakukan dengan instansi perujuk, APH, maupun dengan instansi tujuan terminasi (Balai Rehabsos, Dinas Sosial Kab/Kota tujuan, Pemerintah Desa maupun keluarga) untuk menjamin agar PPKS tidak kembali melakukan aktivitas menggelandang atau mengemis. e. Dinas Sosial DIY tidak memiliki kewenangan dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, sebab kewenangan tersebut merupakan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. Untuk itu Dinas Sosial DIY melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota jika terdapat pengaduan terkait dengan data kemiskinan yang memerlukan verifikasi validasi maupun perbaikan data. Dinas Sosial DIY memaksimalkan penggunaan aplikasi Manunggal Raharja untuk pemadanan dan mengetahui peringkat kemiskinan daerah. f. Perhatian terhadap kelompok rentan dalam hal hukum, diwujudkan dalam keterlibatan aktif Dinas Sosial DIY dalam mengawal penyusunan	penyaluran dilaksanakan, verval dilaksanakan oleh pendamping Bansos JSU. h. Deteksi dini tingkat kesehatan lansia. i. Lansia tidak lagi merasa menjadi orang yang sudah tidak berguna, melainkan tetap dapat berkarya dan berdaya sehingga menjadi lebih sehat.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	telah menjadi Daerah dengan proporsi lanjut usia terbesar yaitu 16.28%. Angka ini menunjukkan bahwa DIY akan memiliki jumlah warga senior yang cukup banyak. Permasalahan lanjut usia miskin terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan hidup layak		Peraturan Gubernur tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentah sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. g. Penanganan terpadu lintas sektor juga dilakukan pada penyaluran Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia, yaitu pelibatan Bank BPD DIY dalam penyediaan sistem pembuatan Virtual *Account* untuk penyaluran Bansos JSLU, kemudian Dinsos DIY juga mengajak masyarakat /UMKM untuk menjadi penyedia bahan makanan (sebagai Warung Lanjut Usia Yogyakarta) dalam pelaksanaan Bansos JSLU. Dinsos DIY juga membina kemitraan dengan Komisi Daerah Lanjut Usia dalam perumusan kebijakan dan advokasi program kelanjutusiaan. h. Sebagai komitmen Pemerntah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem, Bansos Jamian Sosial Lanjut Usia (JSLU) bagi 8000 lansia di DIY dilaksanakan mulai tahun 2024 dan 2025 ini. dan untuk tahun 2026 telah masuk dalam perencanaan anggaran. i. Posyandu lansia telah dilaksanakan dengan pengampu Dinas Kesehatan. j. Wadah silaturrahmi bagi lanjut usia dikembangkan di Grha Lansia Wreda Mulya dan LKS Guyub dengan konsep memfasilitasi kegiatan/ aktivitas untuk aktualisasi diri bagi lanjut usia potensial. Sangat diperlukan kopntribusi dari Pemda DIY untuk memperluas pembentukan Grha Lansia.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
D	**Urusan Pemuda dan Olah Raga**			
	Pembangunan kepemudaan meliputi pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, serta pelaksanaan kegiatan guna mengatasi perilaku negatif pemuda. Salah satu upaya Pemda DIY memaksimalkan peran pemuda, dengan memberikan dukungan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan pemuda, khususnya yang mengacu pada pengentasan kemiskinan dan pembentukan karakter pemuda. Pada tahun 2024 KONI DIY fokus melaksanakan kegiatan terkait d antara lain Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda), Pra-PON, dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA). Namun demikian, pembinaan calon atlet DIY (atlet muda) masih terkendala kurang lengkapnya sarana prasarana dalam pelatihan. Selanjutnya terkait bidang olahraga, dukungan pembinaan untuk para atlet pelajar melalui berbagai kejuaraan olahraga masih terus dilakukan Pemda di	a. Dukungan Pemerintah Daerah DIY untuk membangun fasilitas- fasilitas publik sebagai ruang ekspresi dan kreativitas pemuda diseluruh DIY. Fasilitas publik ini harus bersifat komprehensif dan paripurna dalam memenuhi kebutuhan pemuda.	DINS DIKPORA DIY: a. Pemerintah Daerah DIY dalam kaitannya dengan penyediaan fasilitas-fasilitas publik sebagai ruang ekspresi dan kreativitas pemuda di seluruh DIY telah berupaya mengoptimalkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai fasilitas publik sekaligus ruang ekspresi dan kreativitas peserta didik melalui perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana di sekolah.	DINS DIKPORA DIY: a. Penyediaan sekolah dan lembaga pendidikan sebagai fasilitas publik untuk ruang ekspresi dan kreativitas pemuda telah diupayakan agar mampu menampung gagasan-gagasan pemuda, khususnya bagi pengembangan diri mereka.
		b. KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlet dan pelatih. Antara lain dengan menaikkan bonus bagi atlet yang berprestasi. Sudah banyak atlet dan pelatih DIY yang pindah daerah karena tawaran bonus yang lebih besar dan menjanjikan pekerjaan tetap.	b. Kesejahteraan atlet dan pelatih merupakan salah satu faktor yang diutamakan dalam pengelolaan anggaran KONI DIY yang berasal dari hibah Gubernur DIY. Pada tahun 2025, KONI DIY menganggarkan uang saku bagi para atlet yang akan mengikuti Puslatnas maupun kejuaraan di level nasional dan internasional. Pemda DIY juga turut mengupayakan adanya pemberian penghargaan prestasi bagi para atlet dan pelatih apabila berhasil meraih kejuaraan pada berbagai kejuaraan multievent baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.	b. Kesejahteraan atlet dan pelatih di DIY diharapkan dapat didukung melalui penyaluran hibah Gubernur kepada KONI DIY, terutama pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih yang telah mewakili DIY dan berprestasi baik di ajang regional, nasional, maupun internasional.
		c. Dalam event meraih prestasi olahraga cukup menggembirakan hasilnya untuk itu perlu pembinaan berkelanjutan dalam pembinaan prestasi baik tingkat regional maupun nasional. Namun demikian DIY perlu untuk mempersipkan rancangan pembinaan olahraga yang	c. Pemda DIY, terutama melalui KONI DIY telah mengupayakan pembinaan olahraga berprestasi berkelanjutan tidak hanya pada cabang-cabang olahraga yang sering dipertandingkan namun juga menggali bakat pada cabang-cabang olahraga lain dan mengupayakan dukungan pendanaan untuk sarana prasarana serta fasilitasi kompetisi yang dibutuhkan. d. Pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan telah dilaksanakan melalui Pembinaan Atlet Berbakat yang merupakan seleksi dan	c. Melalui dukungan untuk pembinaan olahraga prestasi di berbagai cabang olahraga, diharapkan DIY mampu memunculkan atlet-atlet berprestasi tidak hanya di kancah regional namun juga nasional dan internasional. d. Pembinaan atlet merupakan salah satu upaya yang memerlukan dukungan fasilitas serta sarana prasarana yang memadai mengingat pembinaan harus dilakukan dalam jangka waktu lama dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	tahun 2024 sudah berjalan dengan rutin dan terprogram dengan Dikpora maupun KONI sesuai tujuan pengembangan olahraga pelajar di DIY. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda di DIY tahun 2024 tercapai sebesar 66,15%. Secara umum capaian untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda di DIY tahun 2024 tercapai sebesar 66,15%. Capaian ini telah melampuai target tahun 2024 dan target akhir RPJMD sebesar 65,67%. Peningkatan keterampilan bagi para lulusan jenjang pendidikan menengah masih diperlukan untuk bisa bersaing memasuki dunia kerja, terutama dengan para lulusan perguruan tinggi.	sesuai dengan agenda besar KONI Pusat dalam pembinaan olahraga prestasi. PON 2024 hanya akan mempertandingkan olahraga yang berorientasi pada Olimpiade. e. DPRD DIY mendorong Pemerintah DIY melalui Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dipadukan dengan Desain Besar Olahraga Daerah melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027.	pembinaan bagi para atlet usia sekolah sehingga bisa didapatkan para atlet dengan talenta terbaik untuk berkompetisi di tingkat regional maupun nasional.	berkesinambungan demi memunculkan talenta-talenta olahraga terbaik DIY.
E	**Urusan Kebudayaan**			
	Sejalan dengan Visi DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat	a. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012, khususnya di bidang Kebudayaan, perlu pengawalan khusus, mengingat arti penting nilai-nilai Budaya, sebagai ruh dan basis Undang-Undang	1. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarata khususnya urusan Kebudayaan telah dituangkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan beserta peraturan turunannya. Urusan	1. Optimalisasi pelestarian, reaktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya sebagai landasan pembangunan kesejahteraan masyarakat. 2. Pendidikan Khas *Kejogjaan* diharapkan mampu memberikan contoh bagi implementasi nilai-nilai budaya dalam

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	yang Maju, Mandiri dan Sejahtera", maka urusan kebudayaan menjadi salah satu tumpuan dalam mewujudkannya. Dengan demikian keberhasilan kinerja urusan kebudayaan cukup strategis untuk menentukan keberhasilan pencapaian visi tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, memberikan Keistimewaan kepada DIY salah satunya adalah tentang Kebudayaan, kewenangan kebudayaan tersebut, meliputi kewenangan mengatur dan mengurus pelestarian, pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa, Yogyakarta khususnya. Kewenangan urusan kebudayaan tersebut didasarkan bahwa Yogyakarta – Kesultanan dan Pakualaman –memiliki budaya yang khas, merupakan pilar dari kebudayaan Jawa pada umumnya. Dalam konteks ini Kebudayaan, dimanifestasikan dalam wujud nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat-istiadat, benda, seni dan tradisi	Keistimewaan dan sekaligus Ikon Daerah Istimewa Yogyakarta,sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. b. Peningkatan fasilitasi pemeliharaan dan riset budaya, dalam konteks pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai artepak budaya Adiluhung harus terus didukung dan galakan. c. Perumusan, pemantapan dan sosialisasi simbol-simbol budaya, sebagai inti Budaya, dan identitas Keistimewaan DIY, menjadi keniscayaan untuk segera diwujudkan. d. Perlu sosialisasi definisi kebudayaan yang sangat luas pada masyarakat. Budaya bukan hanya tercermin dari produk kesenian	kebudayaan juga telah diatur dalam beberapa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, diantaranya RPJMD DIY, *Grand Design* Keistimewaan dan RPJPD. Urusan kebudayaan telah dimasukkan sebagai salah satu program strategis di Pemda DIY khususnya terkait dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Akan dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar *stakeholder* baik DIY maupun kabupaten/kota untuk mengoptimalkan implementasi keistimewaan khususnya urusan kebudayaan. 2. Implementasi nilai-nilai luhur budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurikulum pendidikan di DIY telah diawali oleh Pemerintah Daerah DIY melalui penyusunan dan penerapan panduan Pendidikan Khas Kejogjaan oleh kalangan pakar akademis (perguruan tinggi), budayawan, ahli pendidikan religi, dan kalangan institusional (Dewan Pendidikan Kota dan Kabupaten di DIY). Panduan ini diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan Khas Kejogjaan berusaha membentuk moralitas siswa menjadi pribadi yang memiliki keutamaan hidup (jalma utama) melalui pengembangan aspek kecerdasan spiritual yang sudah lama hidup, tumbuh, dan berkembang dalam wujud kearifan lokal masyarakat Yogyakarta. Peserta didik tidak hanya dibekali ilmu, pengetahuan, maupun ketrampilan teknis, melainkan ditanamkan nilai-nilai dan norma-	pembelajaran sehingga mampu membentuk pribadi yang memiliki karakter baik sekaligus terampil dalam keilmuannya. 3. Meningkatnya ancaman terhadap kelestarian warisan budaya benda akibat dinamika pembangunan wilayah dan perkotaan. 4. Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset kesejahteraan dan daya tarik pariwisata. 5. Pendidikan Khas *Kejogjaan* diharapkan mampu memberikan contoh bagi implementasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran sehingga mampu membentuk pribadi yang memiliki karakter baik sekaligus terampil dalam keilmuannya.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	luhur memiliki akar kuat dalam masyarakat Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses wacana yang intens. Belum optimalnya upaya pelestarian yang meliputi penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya (budaya, adat, dan tradisi) yang menjadi *spirit Renaisans* Yogyakarta. Peninggalan warisan budaya benda semakin terancana kelestariannya karena dinamika perkotaan; Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap asset budaya fisik maupun non-fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa; Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset, untuk menarik kunjungan wisata belum optimal; Kelembagaan pengelolaan kawasan budaya dan organisasi penggerak dan penggiat seni budaya, juga belum dinamika yang lebih dan optimal. Indeks Pembangunan Kebudayaan belum mencapai target yang dicanangkan. Terkait capaian hasil kinerja Urusan Kebudayaan diukurberdasarkan empat	semata-mata, namun lebih dari itu, nilai-nilai budaya adiluhung yang ada di DIY dan masih relevan untuk dikembangkan, maka harus mampu mengakar dan memandu perilaku dalam kehidupan sehari-hari. e. Implementasi nilai-nilai budaya Yogyakarta perlu digiatkan baik melalui jalur Pendidikan dalam bentuk sekolah berbasis nilai budaya maupun melalui saran kebudayaan lainnya. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya sudah memberikan pedoman dan panduan penanaman nilai-nilai kepada siswa sekolah.	norma yang bersifat mendasar supaya menjadi pribadi yang baik. Pengetahuan yang dikembangkan bukan hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi sekaligus mengembangkan kebaikan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai motor penggerak pembentukan peradaban yang luhur. 3. Akan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang relevan berupa peningkatan even budaya, peningkatan sarana dan prasarana budaya dan peningkatan sumberdaya budaya. 4. Sesuai dengan tahapan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan maka inventarisasi dan dokumentasi obyek kebudayaan akan dilaksanakan secara lebih optimal. 5. Akan dilaksanakan sosialisasi kebudayaan melalui berbagai media khususnya melalui media sosial milik Dinas Kebudayaan. 6. Implementasi Nilai-nilai Budaya sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui program Pendidikan Khas *Kejogjaan* untuk semua jenjang pendidikan. Akan dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk sinkronisasi program dan kegiatan. 7. Implementasi nilai-nilai luhur budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurikulum pendidikan di DIY telah diawali oleh Pemerintah Daerah DIY melalui penyusunan dan penerapan panduan Pendidikan Khas Kejogjaan oleh kalangan pakar akademis (perguruan tinggi), budayawan, ahli pendidikan religi, dan kalangan institusional (Dewan Pendidikan Kota dan Kabupaten di DIY).	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	indikator capaian sasaran yakni : a. Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan. b. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum. c. Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya. Dan d. Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya Dari empat capaian kinerja urusan kebudayaan diatas rata rata meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023. Sebagai contoh jumlah Lembaga pengembangan seni kebudayaan meningkat 275 lembaga meningkat menjadi 385 lembaga di tahun 2024. Disamping itu juga terjadi peningkatan event budaya baik ditingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.		Panduan ini diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan Khas *Kejogjaan* berusaha membentuk moralitas siswa menjadi pribadi yang memiliki keutamaan hidup (*jalma* utama) melalui pengembangan aspek kecerdasan spiritual yang sudah lama hidup, tumbuh, dan berkembang dalam wujud kearifan lokal masyarakat Yogyakarta. Peserta didik tidak hanya dibekali ilmu, pengetahuan, maupun ketrampilan teknis, melainkan ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat mendasar supaya menjadi pribadi yang baik. Pengetahuan yang dikembangkan bukan hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi sekaligus mengembangkan kebaikan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai motor penggerak pembentukan peradaban yang luhur.	
F	**Urusan Perpustakaan**			
	Dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia	a. Kurang optimalnya kunjungan fisik pengunjung di bidang	DPAD DIY:	DPAD DIY:

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007. Perpustakaan sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, memiliki andil dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemda DIY melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY mengampu Urusan Perpustakaan memiliki sasaran strategis meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan. Indikator ini diukur dengan indikator persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan.	perpustakaan. Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, jumlah ideal kunjungan ke perpustakaan umum tiap hari adalah 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Dari data website Dataku DIY jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2024 sebanyak 2.226.792 orang dengan jumlah yang harus dilayani 3.759.500 orang. Jika dikonversi secara harian maka jumlah kunjungan ke perpustakaan setiap hari rata-rata 0,18% masih lebih rendah dari kondisi ideal yang diharapkan.	a. Pada Tahun 2025, DPAD DIY memberikan layanan bagi para pemustaka untuk meningkatkan jumlah kunjungan melalui: 1. Layanan di Grhatama Pustaka (GTP) buka dari hari senin-sabtu. 2. Layanan Bioskop 6D 3. Layanan *Co-working space* 4. Layanan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) 5. *Jogja Library Center (JLC)* Malioboro 6. Rumah Belanjar Modern (RBM) di Sewon, Bantul 7. Layanan Pojok Baca 8. Layanan Paket Buku 9. Layanan Perpustakaan Keliling Ada pula kunjungan virtual melalui *website Jogja Library for All, Website Center of Excellence (COE),* aplikasi *iJogja* dan Media sosial. Selain itu, beberapa layanan juga dilakukan penyesuaian seperti menambah jam buka Layanan *Co-Working Space* di Grhatama Pustaka (GTP) dari senin-minggu hingga pukul 22.00.	Dibukanya kembali layanan *Jogja Library Center (JLC)* Malioboro dan Rumah Belajar Modern (RBM) di Sewon, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan. 2 layanan tersebut buka secara rutin dari hari senin-jumat yang mana sebelumnya layanan tersebut tutup di tahun 2024. Penambahan jam buka juga telah dilakukan di beberapa layanan yang ada di GTP, seperti layanan RBRA dan *co-working space* yang dibuka dari hari senin-minggu, yang mana *co-working space* buka hingga pukul 22.00. Adanya 4 film terbaru di Bioskop 6D juga diharapkan dapat membantu menambah kunjungan ke perpustakaan. Selain itu, terdapat penambahan buku cetak maupun elektronik di tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
		b. Pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY perlu untuk terus dilakukan antara lain dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bacaan yang lebih aplikatif dengan era kekinian.	DPAD DIY: b. Pemenuhan bahan pustaka baik Buku Fisik dan Buku Digital berupa *e-book* telah rutin ditambah setiap tahunnya. Pembelian bahan pustaka dilakukan melalui penjaringan aspirasi para pemustaka sehingga diharapkan buku yang disediakan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tahun 2025 DPAD DIY sudah menganggarkan pengadaan buku berupa buku elektronik *(e-book)* sebanyak 414 Eksemplar dan	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			buku tercetak sebanyak 470 Eksemplar dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku bagi pemustaka. Buku *elektronik (e-book)* dapat diakses melalui aplikasi *iJogja.*	
		c. Sarana dan prasarana berbasis Teknologi informasi komunikasi perlu dikembangkan dan Indikator kinerja tujuan pada layanan perpustakaan dan kearsipan mencapai tujuan yang ditargetkan, realisasinya mencapai 44,14% dari target 22% melebihi target akhir renstra 2027 sebesar 25%.	DPAD DIY: c. Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Komunikasi sudah dikembangkan dengan melakukan *upgrade* aplikasi-aplikasi yang digunakan, baik untuk layanan perpustakaan ataupun layanan kearsipan. Pada layanan perpustakaan aplikasi yang dilakukan upgrade adalah *si Yokca* dan Sepatu *Jolifa*, sedangkan untuk layanan kearsipan adalah JIKN/SIKN,Media Akses, Diorama, Kinarya dan Srikandi.	
G	**Urusan Tenaga Kerja**			
	Kondisi ketenagakerjaan pada kurun waktu tiga tahun terakhir di DIY menunjukkan angka Penduduk usia kerja dan Angkatan kerja meningkat. Pertambahan jumlah penduduk serta harapan hidup yang tinggi di DIY memberikan pengaruh pada kondisi ketenagakerjaan tersebut, sementara penduduk bekerja juga mengalami peningktan dengan terciptanya kesempatan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi. Indikator kinerja peningkatan	a. Peningkatan Tingkat Kesempatan Kerja di DIY harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga angka pengganguran terbuka di DIY bisa ditekan secara terus menerus. b. Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi angkatan kerja baru c. Pembinaan bagi pekerja kontrak di perusahaan harus dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.	**1. Peningkatan tingkat kesempatan kerja di sektor formal:** a. Peningkatan kesempatan kerja sektor formal melalui: 1) Kolaborasi dengan dunia industri melalui forum komunikasi penempatan dalam rangka membangun kerja sama dalam hal peluang kerja dan peningkatan kompetensi SDM untuk optimalisasi penempatan tenaga kerja; 2) Penyebarluasan informasi pasar kerja melalui aplikasi SIAP Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, website dan media sosial resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;	1. Meningkatkan kesempatan kerja; 2. Mengurangi angka pengangguran; 3. Meningkatkan hubungan industiral yang harmonis; 4. Meniciptakan iklim usaha yang kondusif baik kesejahteraan pekerja maupun keberlanjutan perusahaan; 5. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	produktivitas kerja tahun 2024 target 54,93 % realisasi 57,08% (105,53%). Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja indikatornya melampaui target yang ditetapkan, angkanya dari target 67% tercapai 87%. Capaian indikator prosentae lulusan pelatihaan yang ditempatkan merupakan keberhasilan sasaran meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja. Indicator lulusan pelatihan yang ditempatkan tercapai sesuai target sebanyak 75%, peserta peltihan sebanayak 2.219 orang yang terserap Angkatan kerja sebanayak 1.667 orang. Kompetensi pencari kerja terutama dalam hal penguasaan keterampilan teknis masih kurang memadai serta belum memiliki karakter	d. Pengawasan terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang ada di DIY. e. Perlu penerapan peningkatan perlindungan norma keselamatan kerja (K3).	3) Pelatihan berbasis kompetensi untuk menyiapkan SDM yang kompeten dalam memasuki pasar kerja industri; 4) Pelayanan ketenagakerjaan di tingkat kalurahan melalui aplikasi Peladi Makarti untuk mendorong pelindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja; 5) Penyuluhan dan bimbingan jabatan untuk mengetahui minat dan bakat pencari kerja dalam rangka persiapan memasuki pasar kerja industri. 6) Pelaksanaan Sertifikasi Uji kompetensi bagi pencari kerja, dan 7) Program pemagangan dalam negeri dan ke luar negeri melalui kerjadama *G to G* dengan Pemerintah Jepang b. Peningkatan kesempatan kerja di sektor informal: Pembentukan wirausaha baru melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), *Mobile Training Unit (MTU*) dan pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru dalam rangka penciptaan kesempatan kerja baru	
	kerja yang mantap sesuai dengan tuntutan duia kerja. Demikian juga ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan Angkatan kerja terutama pada tingkat Pendidikan menengah dan tinggi. Permasalahan		**2. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi angkatan kerja baru dilaksanakan dengan bersinergi dengan program Magang yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan:** Realisasi peserta Program Magang Nasional pada Tahun 2025 telah mencapai 102.696 orang dari total 724.880	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	lainnya adalah kurang memadainya penerapan perlindungan norma kerja dan norma keselamatan kerja (K3).		pelamar pada batch pertama hingga ketiga. Capaian ini melampaui target awal 100.000 peserta dan menjadi dasar pemerintah melanjutkan Program Paket Ekonomi pada 2026. Program pemagangan bagi angkatan kerja baru yang dicanangkan sebagai upaya strategis untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui program ini, lulusan baru diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung , di dunia industri sesuai dengan bidang yang diminatinya. Pemagangan tidak hanya membantu peserta mengasah keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap kerja, disiplin, dan etos profesional yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu, program ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri sehingga kesenjangan antara teori dan praktik dapat diminimalkan. Dengan adanya program pemagangan, diharapkan angkatan kerja baru menjadi lebih siap, kompeten, dan mampu bersaing di pasar kerja. Program Magang Kemnaker 2025 menawarkan kesempatan bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata dan meningkatkan keterampilan profesional mereka.	
			3. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans DIY terhadap pembinaan bagi pekerja kontrak di perusahaan, yaitu: a. Pembinaan ke Perusahaan terkait persyaratan kerja dan hubungan kerja yang	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			didalamnya termasuk kontrak kerja, upah dan waktu kerja b. Deteksi dini ke Perusahaan rawan perselisihan c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi angkatan kerja d. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja kontrak di Perusahaan terkait dengan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT.)	
			4. Pengawasan terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta a. Pengawasan terhadap kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui : 1) Pengawasan dan pemeriksaan rutin dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan minimal 5-7 perusahaan tiap bulan tiap pengawas 2) Pengawasan khusus dikarenakan pengaduan dan dugaan pelanggaran kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan 3) Pengawasan dan Pemeriksaan Terpadu dg BPJS Ketenagakerjaan b. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan atau Badan usaha dengan sasaran: 1) Perusahaan /Badan Usaha yg belum ikut mendaftarkan kepesertaan sama sekali 2) Perusahaan /Badan Usaha yg hanya mendaftarkan sebagian pekerja nya	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			3) Perusahaan /Badan Usaha yg melaporkan gajinya tdk sesuai gaji riil 4) Perusahaan /Badan Usaha yg tidak mengikuti atau hanya sebagian program manfaat sesuai ketentuan c. Untuk optimalisasi kepesertaan pengawasan dan pemeriksaan akan di intensifkan ke peserta Bukan Penerima Upah khususnya Badan Usaha kategori mikro dan kecil karena yang paling banyak di DIY	
			5. Penerapan peningkatan perlindungan norma keselamatan kerja (K3), dilaksanakan dengan beberapa aktifitas yaitu: 1) Pelatihan Hiperkes bagi Dokter, Paramedis, dan Teknisi Perusahaan. Pelatihan dimaksudkan sebagai usaha peningkatan kompetensi dan pemahaman dasar kepada peserta sehingga diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan kompetensi dasar terkait pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Kompetensi atau keahlian dalam melaksanakan tugas merupakan upaya meminimaliisir kesalahan yang dapat berdampak pada kecelakaan kerja. Pelatihan ini juga memotivasi kesadaran tentang pentingnya K3 pada lingkungan kerja disertai pelayanan sertifikasi pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			2) Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Norma Kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan hubungan industrial di lingkungan perusahaan yang harmonis dengan meminimalisir keslahan dan kecelakaan kerja. 3) Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Norma Kerja di Perusahaan. Pengawasan dilakukan pada sarana prasarana dan lingkungan kerja yang memenuhi standar keamanan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.	
H	**Urusan Transmigrasi**			
	Program transmigrasi menjadi kewenangan Pemeritah Pusat sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi yang diberikan pemerintah dan memberangkatkan transmigran melalui Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP). Pemda DIY dalam kurun waktu 2015- 2019 telah memberangkatkan sebanyak 314 KK. Pada tahun 2019 Pemda DIY mendapat alokasi 50 KK dari pemerintah dan sudah diberangkatkan ke daerah tujuan. Sebenarnya	a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Transmigrasi) untuk mendapatkan alokasi/quota calon transmigran yang lebih banyak. b. Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta transmigrasi secara terpadu. c. Perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan akuntabel dalam persiapan transmigrasi, baik semenjak dari daerah asal maupun sampai di daerah tujuan d. Fasilitasi sarana dan prasarana transmigran asal DIY semenjak	1. Kebijakan yang telah diupayakan Disnakertrans DIY sebagai berikut: a. Mengupayakan penambahan alokasi/kuota melalui program luncuran dengan sharing anggaran bersama APBD Kabupaten/Kota. Sharing penganggaran meliputi: angkutan transmigran dan barang bawaannya, pelatihan calon transmigran dan bantuan perbekalan. b. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi dan Daerah tujuan penempatan dalam rangka mendapatkan alokasi penempatan transmigran. 2. Disnakertrans DIY telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan transmigrasi, berkolaborasi	1. Mendapatkan alokasi/kuota calon transmigran yang lebih banyak serta diperoleh informasi dan kebijakan program transmigrasi yang terkini. 2. Keterpaduan penyiapan dan pengelolaan calon peserta transmigrasi baik dengan kabupaten/kota di DIY sebagai pengirim maupun dengan Kementerian Transmigrasi serta Pemerintah Daerah tujuan transmigrasi. 3. Calon transmigran memahami maksud, tujuan, persyaaratan, hak-hak dan kewajiban apabila mengikuti program transmigrasi 4. Terjalin komunikasi dan diperoleh informasi tentang perkembangan dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
	masih banyak yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi dalam rangka merubah nasib dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga. Namun karena jumlah alokasi dari pemerintah terbatas tergantung kemampuan pemerintah dalam menyiapkan lahan lokasi transmigrasi akan ditempatkan. Selain menyediakan lahan, perlu dikembangkan produk/komoditas unggulan beserta pasarnya untuk menjamin keberlangsungan usaha para transmigran. Indikator kinerja sasaran urusan transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi sebanyak 100 orang dari target 90, tercapai sejumlah 111,11%.	masa persiapan sampai dengan penempatan. e. Pemerintah DIY perlu untuk terus membangun komunikasi dengan seluruh warga transmigrasi asal DIY secera periodik sebagai bagian dari tanggungjawab moral untuk memberikan semangat kepada peserta transmigrasi.	dengan Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dalam hal: a. Sosialisasi Program Transmigrasi kepada masyarakat; b. Penyiapan calon transmigran berupa pendaftaran dan seleksi transmigran yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi teknis. c. Pelatihan calon transmigran dengan materi pertanian, peternakan, perikanan dan kewirausahaan. d. Pemberian bantuan perbekalan e. Pembekalan akhir calon transmigran f. Pemberangkatan calon transmigran ke daerah tujuan 3. Disnakertrans DIY telah melaksanakan: a. Sosialisasi/Forum KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat dan tokoh masyarakat. b. Pengelolaan Transmigrasi meliputi: 1) Rintisan/Penjajakan kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi untuk mengetahui secara langsung kondisi calon lokasi transmigrasi; 2) Komitmen bersama dengan daerah tujuan transmigrasi dilakukan dengan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penempatan transmigran. 3) Monitoring dan evaluasi penempatan transmigran DIY di daerah tujuan	kondisi para transmigran di daerah tujuan transmigrasi.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			4. Disnakertrans DIY telah melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana transmigran asal DIY antara lain sebagai berikut: a. Pelatihan calon transmigran selama 7 (tujuh) hari pelaksanaan bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. Bantuan perbekalan alat sandang; c. Penampungan calon transmigran dan keluarganya sebelum diberangkatkan; d. Pembekalan akhir transmigran; e. Pemeriksaan kesehatan calon transmigran dan keluarganya f. Angkutan transmigran dengan moda pesawat udara; g. Bantuan pengiriman barang bawaan transmigran. Sedangkan bantuan uang modal kerja bagi calon transmigran diberikan sesuai dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian. 5. Komunikasi dengan seluruh warga transmigrasi asal DIY telah dilaksanakan sebagai bagian dari tanggungjawab moral untuk memberikan semangat kepada peserta transmigrasi. Bentuk komunikasi yang telah dilaksanakan yaitu melalui monitoring dan evaluasi. Dalam proses monitoring dan evaluasi tentu terjadi kominikasi dan *feed back* untuk memperoleh data-data dan informasi perkembangan para transmigran sejak ditempatkan. data dan informasi yang diperoleh	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang Diselesaikan
			dalam proses monitoring dan evaluasi antara lain: 1) Meninjau apakah para transmigran mampu beradaptasi di lokasi transmigrasi, 2) Memonitor apakah para transmigran terpenuhinya hak-hak sebagai transmigran sesuai ketentuan, 3) Memonitor apakah bantuan-bantuan kebutuhan hidupsudah diterima dan rintisan usaha sesuai kompetensinya sudah dijalankan 4) Mengevaluasi apakah para transmigran mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya. Evaluasi terhadap penempatan transmigran di daerah tujuan penting dilakukan karena merupakan indikator keberhasilan program transmigrasi sejak dari seleksi calon transmigran, koordinasi penyiapan lahan dengan daerah tujuan dan koordinasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh transmigran selama beradaptasi di lokasi transmigrasi. Transmigran yang berhasil ditempatkan pada tahun 2024 sejumlah 20 KK dan tahun 2025 sejumlah 15 KK. Penempatan transmigran pada tahun 2024 dan 2025 ini akan dievaluasi selama masa adaptasi dan akan menjadi capaian kinerja pada tahun 2026 yang akan datang.	



LKPJ Gubernur DIY 2025

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

BAB IV

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pelaksanaan Tugas Pembantuan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sesuai dengan regulasi tersebut, penganggaran program dan kegiatan yang diberikan melalui mekanisme Tugas Pembantuan harus memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah serta kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan supaya alokasi Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pada Tahun 2025 Pemda DIY melaksanakan Tugas Pembantuan dengan alokasi sebesar Rp15.888.092.000,00 atau turun 62,83% dibandingkan dengan alokasi tahun lalu sebesar Rp42.750.092.543,00. Namun kinerja keuangan berhasil direalisasikan sebesar Rp14.191.302.394,00 atau 89,73% dengan penyebab sampai dengan akhir pelaksanaan anggaran masih terdapat blokir meski relatif kecil. Sedangkan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 98,75%. Capaian fisik terkendala salah satunya yaitu capaian vaksin PMK yang masih rendah karena adanya penolakan dari masyarakat terutama di wilayah kabupaten Gunungkidul.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;

C. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pemda DIY sampai dengan akhir tahun 2025, menerima beberapa Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 5 Kementerian, yaitu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Ketenagakerjaan
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
5. Kementerian Perdagangan.

D. OPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY

1) Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tugas Pembantuan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan Bidang Bina Marga. Tugas pembantuan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase TA. 2025 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (SKPD TP-OP) Dinas PUPESDM DIY dengan kode Satker 694078. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di wilayah administratif Pemda DIY terdapat dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang luas areanya lebih dari 3.000 ha yang menjadi objek Tugas Pembantuan, yaitu Jaringan Irigasi Van der Wijck (luas 5.159 ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha).

Sedangkan tugas pembantuan bidang Bina Marga TA 2025 dilaksanakan oleh satker Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi D.I.Yogyakarta dengan

kode satker 693751, meliputi kegiatan preservasi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 27,20 km, preservasi pemeliharaan rutin jalan (padat karya) sepanjang 7 km, preservasi jembatan sepanjang 106.50 m, preservasi rutin jembatan (padat karya) sepanjang 208,70 m, melalui Perjanjian Kinerja TA. 2025 untuk SKPD Dinas PUPESDM DIY.

Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2025

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5.586.728.000,00	5.304.852.000,00
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	5.133.897.000,00	5.093.478.805,00
Jumlah		**10.720.625.000,00**	**10.398.330.805,00**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

2) Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas PUPESDM DIY, dilakukan melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan Bidang Bina Marga meliputi:

a. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:

a) *Monitoring* Evaluasi dan Pelaporan
M*onev* dan Pelaporan Kegiatan Satker yaitu kegiatan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan serta pelaporan progres fisik dan keuangan baik secara elektronik melalui aplikasi berbasis *web* maupun secara manual sebagai monitoring dan evaluasi (monev) oleh Kementerian PUPR dan instansii terkait lainnya.

b) Operasi Rutin
(1) Operasi D.I. Karangtalun (Van Der Wijck) seluas 5.152 ha.
(2) Operasi D.I. Kalibawang seluas 7.159 ha.

c) Pemeliharaan Berkala.
   (1) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Primer D.I. Karangtalun (Van Der Wijck) sepanjang 0,21 km.
   (2) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Karangtalun (Van Der Wijck) sepanjang 11,93 km
   (3) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Primer D.I. Kalibawang sepanjang 0,20km.
   (4) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Kalibawang sepanjang 11,60km

d) Pemeliharaan Rutin.
   (1) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Karangtalun (Van Der Wijck) sepanjang 2 km.
   (2) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Karangtalun (Van Der Wijck) sepanjang 43,41 km
   (3) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Kalibawang sepanjang 2,40 km.
   (4) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Kalibawang sepanjang 173,85 km

e) Penyusunan.
   Penyusunan Pelaporan Sistem manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) D.I. Karangtalun (Van Der Wijck) di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul serta D.I. Kalibawang di wilayah Kabupaten Kulonprogo 1 Laporan.

f) Layanan Perkantoran.
   Operasional Satker yaitu kegiatan yang hanya untuk pembayaran honorarium Pejabat Perbendaharaan internal satker setiap bulannya selama 1 (satu) tahun anggaran.

b. Bidang Bina Marga, meliputi:

a) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di

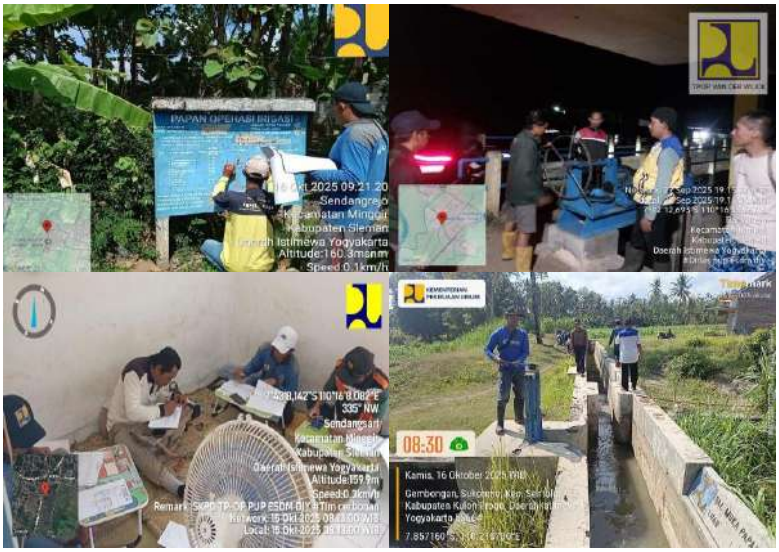
lingkungan OPD Dinas PUPESDM Program Penyelenggaraan Jalan (TP) DIY;

b) Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas PUPESDM Program Penyelenggaraan Jalan (TP) DIY dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

3) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY

a. Pengelolaan Sumber Daya Air

Tujuan utama kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air adalah untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air adalah melaksanakan tata kelola internal melalui administrasi umum dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.



Gambar 4.1. Operasi Jaringan Irigasi

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025



Gambar 4.2. Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025



Gambar 4.3. Pemeliharaan Berkala

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Besaran anggaran tugas pembantuan dari Direktorat Bina OP Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp5.586.728.000,00 dengan perincian untuk Kegiatan *Monitoring*, Evaluasi dan Pelaporan Rp250.000.000,00 terealisasi Rp86.039.000,00 atau 34,42%, Kegiatan Operasi Rutin Rp2.963.110.000,00 terealisasi Rp2.963.110.000,00 atau 100%, untuk Pemeliharaan Berkala sebesar Rp886.841.000,00 terealisasi sebesar Rp886.841.000,00 atau 100% untuk Pemeliharaan Rutin Rp1.402.152.000,00 terealisasi Rp1.294.237.000,00 atau 92,30% untuk Penyusunan Rp15.289.000,00 terealisasi sebesar Rp7.345.000,00 atau 48,04% dan sedangkan untuk kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp69.336.000,00 yang terealisasi sebesar Rp67.280.000,00 atau 97,03% sehingga total keseluruhan realisasi anggaran di Satker Dinas PUP ESDM DIY pada tahun 2025 adalah sebesar Rp5.304.852.000,00 atau 94,95% yang kesemua anggaran kegiatan tersebut dialokasikan pada DIPA APBN (Rupiah Murni) Satuan Kerja TPOP Dinas PUPESDM DIY

Tahun Anggaran 2025, sedangkan rincian realisasi pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Output/ Komponen/ Sub-Komponen/ Akun		Jumlah	Realisasi Total	Sisa Pagu	Keuangan %	Fisik %	Blokir
694078	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY	5.586.728.000	5.304.852.000	281.876.000	94,95	100	265.289.000
145.03.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	5.517.392.000	5.237.572.000	279.820.000	94,93	100	265.289.000
7695	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	5.517.392.000	5.237.572.000	279.820.000	94,93	100	265.289.000
7695. CDR	OM prasarana Jaringan Sumber Daya Air	5.517.392.000	5.237.572.000	279.820.000	94,93	100	265.289.000
7695. CDR .001	Irigasi yang dioperasi dan dipelihara (irigasi permukaan, rawa, dan tambak)	5.517.392.000	5.237.572.000	279.820.000	94,93	100	265.289.000
196	*Monitoring, evaluasi dan pelaporan*	*250.000.000*	*86.039.000*	*163.961.000*	*34,42*	*100*	*149.480.000*
A	Monev dan Pelaporan Kegiatan Satker	250.000.000	86.039.000	163.961.000	34,42	100	149.480.000
071	*Operasi Rutin*	*2.963.110.000*	*2.963.110.000*	-	*100*	*100*	-
A	Operasi Rutin DI. Karangtalun (Van Der Wijck)	1.037.913.000	1.037.913.000	-	100	100	-
B	Operasi Rutin DI. Kalibawang	1.925.197.000	1.925.197.000	-	100	100	-
094	*Pemeliharaan Berkala*	*886.841.000*	*886.841.000*	-	*100*	*100*	-
A	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Primer DI. Karangtalun (Van Der Wijck)	25.920.000	25.920.000	-	100	100	-

Program/ Komponen/ Akun	Kegiatan/ Output/ Sub-Komponen/	Jumlah	Realisasi Total	Sisa Pagu	Keuangan %	Fisik %	Blokir
B	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder DI. Karangtalun (Van Der Wijck)	410.035.000	410.035.000	-	100	100	-
C	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Primer DI. Kalibawang	45.000.000	45.000.000	-	100	100	-
D	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder DI. Kalibawang	405.886.000	405.886.000	-	100	100	-
095	*Pemeliharaan Rutin*	*1.402.152.000*	*1.294.237.000*	*107.915.000*	*92,30*	*100*	*107.865.000*
A	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer DI. Karangtalun (Van Der Wijck)	116.520.000	93.120.000	23.400.000	79,92	100	23.400.000
B	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder DI. Karangtalun (Van Der Wijck)	606.992.000	587.494.600	19.497.400	96,79	100	19.450.000
C	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer DI. Kalibawang	103.920.000	93.120.000	10.800.000	89,61	100	10.800.000
D	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder DI. Kalibawang	574.720.000	520.502.400	54.217.600	90,57	100	54.215.000
122	*Penyusunan*	*15.289.000*	*7.345.000*	*7.944.000*	*48,04*	*100*	*7.944.000*
A	Pelaporan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) DI. Karangtalun dan DI. Kalibawang	15.289.000	7.345.000	7.944.000	48,04	100	7.944.000
145.03.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	69.336.000	67.280.000	2.056.000	97,03	100	-
7755	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	69.336.000	67.280.000	2.056.000	97,03	100	-
7755.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	69.336.000	67.280.000	2.056.000	97,03	100	-
7755.EBA.994	Layanan Perkantoran	69.336.000	67.280.000	2.056.000	97,03	100	-

Program/ Komponen/ Akun	Kegiatan/ Output/ Sub-Komponen/	Jumlah	Realisasi Total	Sisa Pagu	Keuangan %	Fisik %	Blokir
002	*Operasional dan Pemeliharaan Kantor*	*69.336.000*	*67.280.000*	*2.056.000*	*97,03*	*100*	-
A	Honor Operasional Satker	69.336.000	67.280.000	2.056.000	97,03	100	-

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

b. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Tabel 4.3. Lokasi Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2025

No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Tempel - Pakem	11.2	km
2	Jalan Pakem - Prambanan	16.0	km
TOTAL		**27.2**	**km**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Tabel 4.4. Lokasi Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) di DIY Tahun 2025

No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Tempel - Pakem	2.6	km
2	Jalan Pakem - Prambanan	4.4	km
TOTAL		**7,0**	**km**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Tabel 4.5. Lokasi Kegiatan Preservasi Jembatan di DIY Tahun 2025

No.	Nama Jembatan	Panjang		Penanganan
1	Pulowatu	31,0	M	Rehabilitasi Jembatan
2	Kendal	15,5	M	Pemel Berkala Jembatan
3	Keringan	11,0	M	Pemel Berkala Jembatan
4	Srewel	8,0	M	Pemel Berkala Jembatan
5	Tepus	8,0	M	Pemel Berkala Jembatan
6	Kaliasin	8,0	M	Pemel Berkala Jembatan
7	Cangkring	7,9	M	Pemel Berkala Jembatan
8	Pokoh	17,1	M	Pemel Berkala Jembatan
JUMLAH		**106,5**	**M**	

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Tabel 4.6. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2025

No.	Nama Jembatan	Panjang		Penanganan
1	Ngentak 1	9.1	M	Pemel Rutin
2	Ngentak 2	8,6	M	Pemel Rutin
3	Turi	16,0	M	Pemel Rutin
4	Karang Gawang 1	16,1	M	Pemel Rutin
5	Pules 1	11,0	M	Pemel Rutin

No.	Nama Jembatan	Panjang		Penanganan
6	Pules 2	21,5	M	Pemel Rutin
7	Baratan	13,0	M	Pemel Rutin
8	Klanduan	16,1	M	Pemel Rutin
9	Klanduan Ii	16,0	M	Pemel Rutin
10	Giyan	16,3	M	Pemel Rutin
11	Soko	8,0	M	Pemel Rutin
12	Opak	41,7	M	Pemel Rutin
13	Pakem Gede	6,7	M	Pemel Rutin
14	Pakem	8,6	M	Pemel Rutin
Jumlah		**208,7**	**M**	

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Tabel 4.7. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Paket	Sasaran	Pagu	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
			Total *)	Rp*)	%	%
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY (693751)		**5.133.897.000,00**	**5.093.478.805,00**	**99,21%**	**100%**
	(GA) Program Infrastruktur Konektivitas		**5.042.731.000,00**	**5.002.385.687,00**	**99,20%**	**100%**
	(GA.7696) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		**5.042.731.000,00**	**5.002.385.687,00**	**99,20%**	**100%**
	7696.CBR Dukungan Teknis	1 Dokumen	**104.097.000,00**	**87.154.099,00**	**83,72%**	**100%**
1	**Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan**		**104.097.000,00**	**87.154.099,00**	**83,72%**	**100%**
	Monitoring dan Evaluasi		**85.985.000,00**	**75.425.599,00**	**87,72%**	**100%**
	Manajemen Pengendalian		**18.112.000,00**	**11.728.500,00**	**64,76%**	**100%**
	7696.CDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	34,2 km	**3.186.299.000,00**	**3.165.972.988,00**	**99,36%**	**100%**
2	**Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan**	27,20 km	**2.872.799.000,00**	**2.854.719.288,00**	**99,37%**	**100%**
	Pemeliharaan Rutin Kondisi	20,8 km	1.322.399.000,00	1.320.721.842,00	99,87%	100%
	Penunjangan/Holding	6,4 km	1.550.400.000,00	1.533.997.446,00	98,94%	100%
3	**Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)**	7,0 km	313.500.000,00	311.253.700,00	99,28%	**100%**
	Pemeliharaan Rutin	7,0 km	313.500.000,00	311.253.700,00	99,28%	**100%**
	7696.CDF OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	315,2 M	**1.752.335.000,000**	**1.749.258.600,00**	**99,82%**	**100%**
4	Preservasi Jembatan	106,5 N	1.595.810.000,00	**1.595.808.600,00**	**100%**	**100%**
	Rehabiltasi Jembatan	31, 0 M	874.100.000,00	874.099.542,00	100%	100%
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	75,5 M	721.710.000,00	721.709.058,00	100%	100%
5	**Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)**	**208,7 M**	**156.525.000,00**	**153.450.000,00**	**98,04%**	**100%**
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	208,7 M	156.525.000,00	153.450.000,00	98,04%	100%
	(145.04.WA) Program Dukungan Manajemen		**91.166.000,00**	**91.093.118,00**	**99,92%**	**100%**
	(7756) Dukungan Manejemen Ditjen Bina Marga	2 Layanan	91.166.000,00	91.093.118,00	99,92%	100%
6	**(EBA 962) Layanan Umum**	1 Layanan	**11.037.000,00**	**10.986.900,00**	**99,55%**	**100%**

No	Program/Kegiatan/ Paket	Sasaran	Pagu	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
			Total *)	Rp*)	%	%
	Pengelolaan Perbendaharaan		11.037.000,00	10.986.900,00	99,55%	100%
7	**(EBA 994) Layanan Perkantoran**	1 Layanan	**80.129.000,00**	**80.106.218,00**	**99,97%**	**100%**
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		80.129.000,00	80.106.218,00	99,97%	100%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Tabel 4.8. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2025

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (m)	Jalan		Jembatan (m)	
	Efektif (km)	Fungsional (km)		Efektif (km)	Fungsional (km)		
Cakupan TP	-	34,2	315,2	-	34,2	315,2	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUPESDM DIY Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.9. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi		%
1	Meningkatnya Kapasitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja *Output*					
		Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	27,20	km	27,20	km	100
		Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	7,0	km	7,0	km	100
		Preservasi Jembatan	106,5	m	106,5	m	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	208,7	m	208,7	m	100
		Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	27,20	km	27,20	km	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Bidang Bina Marga Dinas PUPESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp5.133.897.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar sebesar Rp5.093.478.805,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp40.418.195,00 dan rata-rata persentase realisasi

anggaran tahun 2025 sebesar 100%. Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas pembantuan penyelenggaraan bidang jalan pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.



0% 50% 100%

Gambar 4.4. Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Jalan Tempel - Pakem(Sleman)

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025



0% 50% 100%

Gambar 4.5. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Pulowatu

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025



0% 50% 100%

Gambar 4.6. Pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan (Padat Karya)

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

4) Permasalahan dan Kendala

a. Permasalahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu:

(1) Alokasi air ke lahan persawahan mengalami gangguan karena konflik kepentingan dalam penggunaan air antara petani ikan dan petani padi, khususnya pada Jaringan Irigasi Van der Wijck.
(2) Masih ditemukan pelanggaran pemanfaatan sempadan saluran dan bangunan liar di atas infrastruktur saluran.

b. Permasalahan Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan yaitu:

- Tidak ada permasalahan

5) Saran dan Tindak Lanjut

a. Untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan:

(1) Penguatan kompetensi dan pembekalan kepada petugas Operasi dan Pemeliharaan untuk meminimalisir dan menangani kendala sosial terkait konflik pemakaian air.
(2) Meningkatkan koordinasi dengan BBWS Serayu Opak untuk penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sempadan saluran dan bangunan liar di atas saluran selaku pemegang kewenanganan.

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian salah satunya melalui dana APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian. Program dan kegiatan tersebut dialokaskan melalui 3 Satuan Kerja (Satker) yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2025

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.03.4.049087/2025	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	206.735.000
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.06.4.049090/2025	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	746.938.000
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.08.4.049094/2025	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1.538.000.000

Sumber: DPKP DIY, 2026

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

1) Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049087/Tanaman Pangan)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**36.000.000**	**35.996.000**	**99.99**	**100**
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	36.000.000	35.996.000	99,99	100
Program Dukungan Manajemen	**170.735.000**	**170.582.000**	**99,91**	**100**
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	170.735.000	170.582.000	99,91	100

Sumber: DPKP DIY, 2026

2) Satker Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049090/ Peternakan dan Kesehatan Hewan)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	618,270,000	476,092,500	**77,00**	**77**
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	618,270,000	476,092,500	77,00	77
Program Dukungan Manajemen	**128,668,000**	84,563,952	**65,72**	**100**
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	**128,668,000**	84,563,952	65,72	100

Sumber: DPKP DIY, 2026

3) Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049094/Sarana dan Sarana Pertanian)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**938.000.000,00**	**937.091.675,00**	**99,90**	**100**
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	135.000.000,00	134.995.175,00	99,99	100
Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	803.000.000,00	802.096.500,00	99,89	100
Program Dukungan Manajemen	**600.000.000,00**	**594.943.755,00**	**99,16**	**100**
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	600.000.000,00	594.943.755,00	99,16	100

Sumber: DPKP DIY, 2026

4) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(1) Keterbatasan ketersediaan air irigasi, terutama pada musim kemarau, yang menyebabkan rendahnya realisasi luas tanam padi di wilayah sawah tadah hujan dan wilayah dengan jaringan irigasi terbatas.

(2) Adanya blokir anggaran yang di buka secara bertahap dan per 31 Desember 2025 masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp43.353.000.

(3) Capaian fisik layanan kesehatan hewan berupa vaksinasi PMK yang hanya tercapai sebesar 75,37% sehingga capaian keuangan pembayaran insentif operasional vaksinasi tidak optimal dan Adanya penurunan besaran biaya operasional petugas vaksinasi PMK pada tahun 2022 s/d 2024 sebesar Rp25.000 per dosis menjadi Rp5.000 per dosis pada tahun 2025 dan secara tidak langsung berdampak pada operasional pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

(4) Belum semua kelompok tani membentuk Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) sehingga pengelolaan dan pemanfaatan alsintan belum optimal

b. Solusi

(1) Optimalisasi dan pemanfaatan sarana prasarana irigasi, termasuk irigasi teknis, pompanisasi, dan irigasi perpipaan, serta pengaturan jadwal tanam berbasis ketersediaan air.
(2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga berbagai kendala dan permasalahan dapat diantisipasi dan diselesaikan.
(3) Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan para *stakeholder* terkait dalam pengendalian dan penanggulangan PMK, khususnya untuk mendukung penambahan sumber daya manusia dalam pelaksanaan vaksinasi PMK.
(4) Kelompok tani penerima bantuan diwajibkan membentuk UPJA serta melaporkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian minimal satu kali dalam satu tahun.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan melalui sumber dana APBN dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program dan kegiatan tersebut dialokasikan melalui 1 (satu) Satuan Kerja (Satker) yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.11. Rekapitulasi Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2025

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	DIPA-152.03.4.694554/2025 tanggal 3 Juli 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY	1.930.462.000

Sumber: Disnakertrans DIY, 2025

Adapun rincian pelaksanaan pada satuan kerja adalah sebagai berikut:

1) Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (694554/Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Transmigrasi	1.930.462.000	1.489.048.707	77,13	78,43
Kegiatan Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	1.930.462.000	1.489.048.707	77,13	78,43
Kegiatan Layanan Perkantoran	1.930.462.000	1.489.048.707	77,13	78,43

Sumber: Disnakertrans DIY, 2025

2) Permasalahan dan Solusi

a. Pemasalahan:

(1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui transmigrasi dimana dalam keluarga masih memegang Budaya Jawa "mangan ora mangan kumpul"
(2) Belum ada kepala keluarga perempuan yang berminat bertransmigrasi dan masih rendahnya kualitas/skill ketrampilan calon transmigran.
(3) Terbatasnya alokasi penempatan transmigran yang diberikan oleh pemerintah pusat.
(4) Pemberangkatan di pertengahan Bulan Desember karena SPP dari Kementerian terbit di bulan Desember berdasarkan STP dari daerah tujuan baru, sehingga persiapan pemberangkatan dilaksanakan dalam waktu yang samgat terbatas.

b. Solusi:

(1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat adanya program transmigrasi sebagai salah satu kesempatan kerja di sektor informal

(2) Penyelenggaraan pelatihan pembekalan bagi calon transmigran disesuaikan dengan kebutuhan ketrampilan kerja sesuai potensi pada daerah tujuan transmigrasi.
(3) Persiapan pemberangkatan dilaksanakan secara intensif melalui koordinasi dengan kementerian dan kabupaten/kota se-DIY dan daerah tujuan.
(4) Berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2025, agar petunjuk teknis Tugas Pembantuan (TP) terbit lebih awal dan lebih fleksibel dalam melakukan penyesuaian.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan urusan kelautan dan perikanan di DIY. Salah satu bentuk dukungan yang diperoleh berasal dari APBN melalui Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Program dan kegiatan tersebut dialokasikan melalui dua Satuan Kerja (Satker), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12. Rekapitulasi Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2025

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SP DIPA-032.06.4.691011/2025	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DI Yogyakarta (6910111)	138.282.000
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SP DIPA-032.03.4.049097/2025	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DI Yogyakarta (049097)	4.800.000,00

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

1) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (6910111)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**98.000,000**	**-**	**-**	**-**
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	98.000.000	**-**	**-**	**-**
Program Dukungan Manajemen	**40.282,000**	**-**	**-**	**-**
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	40.282.000	**-**	**-**	**-**

2) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (049097)

Kegiatan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Dukungan Manajemen	**4.800.000**	**4.800.000**	**100**	**100**
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	4.800.000	4.800.000	100	100

Sumber: DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2025

3) Permasalahan dan Solusi

a. Pemasalahan

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selaku penerima DIPA tugas pembantuan pada tahun 2025 hanya mendapatkan Dukungan Manajemen sebesar Rp4.800.000,00 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi belanja dari Pemerintah Pusat, sehingga anggaran tidak dapat dicairkan.

b. Solusi

Pembinaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan dukungan sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Keitimewaan urusan kebudayaan dan tata ruang.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah serta meningkatkan pengembangan perdagangan. Salah satu bentuk dukungan yang diperoleh berasal dari APBN melalui Tugas Pembantuan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Program dan kegiatan tersebut dialokasikan melalui dua Satuan Kerja (Satker), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13. Rekapitulasi Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2025

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Perindustrian	SP DIPA- 019.05.4. 690746/2025	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	441.005.000
2	Kementerian Perdagangan	SP DIPA- 090.02.4. 691120/2025	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	122.671.000

Sumber: DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2025

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

1) Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (690746)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**386.971.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	386.971.000	**-**	**-**	**-**	**-**
Program Dukungan Manajemen	**54.034.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	54.034.000	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2025

2) Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (691120)

Kegiatan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Perdagangan Dalam Negeri	**122.671.000**	**-**	**-**	**-**
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	122.671.000	-	-	-

Sumber: DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2025

3) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selaku penerima DIPA tugas pembantuan pada tahun 2025 tidak dapat melaksanakan Program kegiatan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi belanja dari Pemerintah Pusat, sehingga anggaran tidak dapat dicairkan.

b. Solusi

Pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan dilaksanakan dengan dukungan sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Keistimewaan, dan Dana Alokasi Khusus.



LKPJ Gubernur DIY 2025

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

BAB V

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

Fokus pembangunan DIY untuk kurun waktu 2022–2027 diarahkan pada pencapaian Pancamulia Masyarakat Jogja, yang diupayakan melalui langkah reformasi kalurahan, penguatan kawasan selatan, serta eskalasi budaya inovasi dan penggunaan teknologi informasi. Visi besar tersebut dijabarkan ke dalam empat misi utama, yakni: 1) Meningkatkan kualitas hidup kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan; 2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat; 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi Informasi; 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. Selama ini, pelaksanaan Urusan Keistimewaan memegang peranan signifikan dalam pembangunan DIY, di mana kelima tujuan keistimewaan terbukti selaras dengan pencapaian visi daerah tersebut. Berlandaskan pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, tujuan dari pengaturan keistimewaan mencakup: Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; Kedua, Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; Ketiga, Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keempat, Menciptakan pemerintahan yang baik; dan Kelima, Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp1.200.000.000.000,00. Pengelolaan dana Keistimewaan dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 22 Januari 2025, Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengatur adanya efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025. Alokasi Transfer ke Daerah yang salah satunya adalah Dana Keistimewaan mengalami penyesuaian/ pengurangan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sehingga pagu alokasi Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan pada urusan keistimewaan tahun 2025. Berikut anggaran dan realisasi keuangan program/kegiatan tahun 2025 pada tiap urusan:

Tabel 5.1. Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2025 Menurut Urusan

No	Urusan	Jumlah			Realisasi			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rp)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1.	Tata Cara	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kelembagaan Pemerintah Daerah	2	15	34	90.423.087 .041,00	87.392.578 .479,25	96,65	99,04
3.	Kebudayaan	1	10	51	624.949.813 .899,00	618.758.358 .062,98	99,01	99,84
4.	Pertanahan	1	3	9	50.729.575 .746,00	47.501.544 .929,22	93,64	95,04
5..	Tata Ruang	1	4	20	233.897.523 .314,00	227.553.618 .898,89	97,29	98,78
Total		5	32	114	1.000.000.000 .000,00	981.206.100 .370,34	98,12	99,28

Sumber: Paniradya Kaistimewan 2026

A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Kondisi Umum

Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY seperti yang telah diamanatkan pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Ketentuan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditindaklanjuti dengan Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Kewenangan keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dijawantahkan setiap 5 tahun sekali menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2022-2027 telah dilangsungkan pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2025 tidak diselenggarakan program dan kegiatan pada Urusan Tata Cara.

B. URUSAN KELEMBAGAAN

1. Kondisi Umum

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan salah satu bentuk kewenangan istimewa dalam mengelola pengorganisasian guna mencapai efektivitas serta efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Pelaksanaan urusan ini berpijak pada prinsip-prinsip tanggung jawab (responsibilitas), akuntabilitas, keterbukaan (transparansi), dan keterlibatan masyarakat (partisipasi), dengan tetap mengacu pada bentuk serta tata laksana pemerintahan asli Yogyakarta. Berdasarkan mandat dari Peraturan Gubernur Nomor

13 Tahun 2022 mengenai Penugasan Urusan Keistimewaan, ruang lingkup kewenangan kelembagaan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah mencakup beberapa hal antara lain, 1) perumusan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, eselon atau jabatan, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Daerah; perumusan kebijakan urusan kelembagaan; pengelolaan sumber daya manusia; peningkatan budaya pemerintahan; penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan kelembagaan.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Urusan kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan oleh 10 OPD Pemda DIY, 42 OPD Pemkab/Pemkot serta 78 Kapanewon/Kemantren. Urusan kelembagaan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp90.423.087.041,00. Realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp87.392.578.479,25 atau sebesar 96,65% terhadap target satu tahun. Sedangkan persentase realisasi fisik sebesar 99,04% terhadap target satu tahun.

Tabel 5.2. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kelembagaan TA 2025

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	83.723.087.041,00	87.392.578.479,25	96,65	99,04
	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	**25.218.340.941**	**24.666.717.705**	**97,81**	**100**
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	109.899.000	108.011.275	98,28	100
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	109.899.000	108.011.275	98,28	100
1.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	109.899.000	108.011.275	98,28	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
1.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	109.899.000	108.011.275	98,28	100
2	DINAS SOSIAL	1.010.880.674	1.005.280.680	99,45	100
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.010.880.674	1.005.280.680	99,45	100
2.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	1.010.880.674	1.005.280.680	99,45	100
2.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1.010.880.674	1.005.280.680	99,45	100
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.275.634.317	5.178.949.695	98,17	100
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	5.275.634.317	5.178.949.695	98,17	100
3.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	5.275.634.317	5.178.949.695	98,17	100
3.1.1.1	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	5.275.634.317	5.178.949.695	98,17	100
4	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	100.088.000	100.088.000	100,00	100
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100.088.000	100.088.000	100,00	100
4.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	100.088.000	100.088.000	100,00	100
4.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.088.000	100.088.000	100,00	100
5	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	114.898.000	114.614.000	99,75	100
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	114.898.000	114.614.000	99,75	100
5.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	114.898.000	114.614.000	99,75	100
5.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	114.898.000	114.614.000	99,75	100
6	BIRO HUKUM	289.314.000	289.305.168	100,00	100
6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN	289.314.000	289.305.168	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
6.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	289.314.000	289.305.168	100,00	100
6.1.1.1	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	159.857.000	159.848.168	99,99	100
6.1.1.2	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	129.457.000	129.457.000	100,00	100
7	BIRO ORGANISASI	989.036.600	957.730.990	96,83	100
7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	989.036.600	957.730.990	96,83	100
7.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	369.753.600	364.064.652	98,46	100
7.1.1.1	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	162.543.600	159.967.080	98,41	100
7.1.1.2	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	19.063.000	18.825.592	98,75	100
7.1.1.3	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	106.280.000	104.858.980	98,66	100
7.1.1.4	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	81.867.000	80.413.000	98,22	100
7.1.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	619.283.000	593.666.338	95,86	100
7.1.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	619.283.000	593.666.338	95,86	100
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	604.886.200	581.571.441	96,15	100
8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	604.886.200	581.571.441	96,15	100
8.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	604.886.200	581.571.441	96,15	100
8.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	108.665.000	108.660.296	100,00	100
8.1.1.2	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	496.221.200	472.911.145	95,30	100
9	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	830.709.650	766.504.068	92,27	100
9.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN	830.709.650	766.504.068	92,27	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
9.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	830.709.650	766.504.068	92,27	100
9.1.1.1	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	830.709.650	766.504.068	92,27	100
10	PANIRADYA KAISTIMEWAN	15.892.994.500	15.564.662.388	97,93	100
10.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	15.892.994.500	15.564.662.388	97,93	100
10.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	714.673.000	697.320.433	97,57	100
10.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	391.011.000	383.186.303	98,00	100
10.1.1.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	323.662.000	314.134.130	97,06	100
10.1.2	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.057.355.000	1.039.123.502	98,28	100
10.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	581.631.000	573.422.408	98,59	100
10.1.2.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	475.724.000	465.701.094	97,89	100
10.1.3	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	3.955.269.000	3.852.757.308	97,41	100
10.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	1.044.061.100	1.021.415.306	97,83	100
10.1.3.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	693.858.100	674.211.622	97,17	100
10.1.3.3	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1.518.453.200	1.484.211.270	97,74	100
10.1.3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	698.896.600	672.919.110	96,28	100
10.1.4	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	2.309.809.500	2.211.447.481	95,74	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
10.1.4.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.235.786.500	1.145.242.169	92,67	100
10.1.4.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.074.023.000	1.066.205.312	99,27	100
10.1.5	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	306.025.000	302.332.512	98,79	100
10.1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	306.025.000	302.332.512	98,79	100
10.1.6	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	670.226.000	670.061.762	99,98	100
10.1.6.1	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	670.226.000	670.061.762	99,98	100
10.1.7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	6.879.637.000	6.791.619.390	98,72	100
10.1.7.1	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	6.879.637.000	6.791.619.390	98,72	100
	Kabupaten Bantul	**7.104.203.700**	**6.348.138.256**	**89,36**	**100**
1	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BANTUL	165.334.000	160.376.156	97,00	100
1.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	165.334.000	160.376.156	97,00	100
1.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	56.884.000	56.365.500	99,09	100
1.1.1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	56.884.000	56.365.500	99,09	100
1.1.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	108.450.000	104.010.656	95,91	100
1.1.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	108.450.000	104.010.656	95,91	100
2	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANTUL	79.846.000	79.846.000	100,00	100
2.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	79.846.000	79.846.000	100,00	100
2.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	79.846.000	79.846.000	100,00	100
2.1.1.1	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	33.685.000	33.685.000	100,00	100
2.1.1.2	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	46.161.000	46.161.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL	69.500.000	69.450.000	99,93	100
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	69.500.000	69.450.000	99,93	100
3.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	69.500.000	69.450.000	99,93	100
3.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	69.500.000	69.450.000	99,93	100
4	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BANTUL	121.383.000	121.383.000	100,00	100
4.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	121.383.000	121.383.000	100,00	100
4.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	121.383.000	121.383.000	100,00	100
4.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	121.383.000	121.383.000	100,00	100
5	KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL	83.553.400	83.553.400	100,00	100
5.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	83.553.400	83.553.400	100,00	100
5.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	83.553.400	83.553.400	100,00	100
5.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	83.553.400	83.553.400	100,00	100
6	KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL	95.735.100	95.735.100	100,00	100
6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	95.735.100	95.735.100	100,00	100
6.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	95.735.100	95.735.100	100,00	100
6.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di	95.735.100	95.735.100	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				
7	KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL	96.495.100	96.495.100	100,00	100
7.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	96.495.100	96.495.100	100,00	100
7.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	96.495.100	96.495.100	100,00	100
7.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	96.495.100	96.495.100	100,00	100
8	KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL	96.055.100	96.055.100	100,00	100
8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	96.055.100	96.055.100	100,00	100
8.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	96.055.100	96.055.100	100,00	100
8.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	96.055.100	96.055.100	100,00	100
9	KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL	100.135.100	100.135.000	100,00	100
9.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100.135.100	100.135.000	100,00	100
9.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	100.135.100	100.135.000	100,00	100
9.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	100.135.100	100.135.000	100,00	100
10	KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL	115.437.100	115.437.100	100,00	100
10.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	115.437.100	115.437.100	100,00	100
10.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	115.437.100	115.437.100	100,00	100
10.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di	115.437.100	115.437.100	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				
11	KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL	95.735.400	94.850.600	99,08	100
11.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	95.735.400	94.850.600	99,08	100
11.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	95.735.400	94.850.600	99,08	100
11.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	95.735.400	94.850.600	99,08	100
12	KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL	132.979.400	132.979.400	100,00	100
12.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	132.979.400	132.979.400	100,00	100
12.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	132.979.400	132.979.400	100,00	100
12.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	132.979.400	132.979.400	100,00	100
13	KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL	119.837.400	119.837.400	100,00	100
13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	119.837.400	119.837.400	100,00	100
13.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	119.837.400	119.837.400	100,00	100
13.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	119.837.400	119.837.400	100,00	100
14	KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL	39.500.000	39.500.000	100,00	100
14.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	39.500.000	39.500.000	100,00	100
14.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	39.500.000	39.500.000	100,00	100
14.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di	39.500.000	39.500.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				
15	KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL	103.255.400	103.255.200	100,00	100
15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	103.255.400	103.255.200	100,00	100
15.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	103.255.400	103.255.200	100,00	100
15.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	103.255.400	103.255.200	100,00	100
16	KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL	188.325.400	187.825.400	99,73	100
16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	188.325.400	187.825.400	99,73	100
16.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	188.325.400	187.825.400	99,73	100
16.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	188.325.400	187.825.400	99,73	100
17	KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL	114.037.400	114.037.400	100,00	100
17.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	114.037.400	114.037.400	100,00	100
17.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	114.037.400	114.037.400	100,00	100
17.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	114.037.400	114.037.400	100,00	100
18	KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL	113.717.400	113.717.400	100,00	100
18.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	113.717.400	113.717.400	100,00	100
18.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	113.717.400	113.717.400	100,00	100
18.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di	113.717.400	113.717.400	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				
19	KEPENAWON SEWON KABUPATEN BANTUL	167.663.400	167.663.400	100,00	100
19.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	167.663.400	167.663.400	100,00	100
19.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	167.663.400	167.663.400	100,00	100
19.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	167.663.400	167.663.400	100,00	100
20	KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL	170.343.400	169.722.400	99,64	100
20.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	170.343.400	169.722.400	99,64	100
20.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	170.343.400	169.722.400	99,64	100
20.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	170.343.400	169.722.400	99,64	100
21	KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL	113.077.400	113.077.400	100,00	100
21.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	113.077.400	113.077.400	100,00	100
21.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	113.077.400	113.077.400	100,00	100
21.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	113.077.400	113.077.400	100,00	100
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL	162.223.700	162.223.700	100,00	100
22.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	162.223.700	162.223.700	100,00	100
22.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	162.223.700	162.223.700	100,00	100
22.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	162.223.700	162.223.700	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
23	DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL	3.547.141.100	2.808.629.800	79,18	100
23.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3.547.141.100	2.808.629.800	79,18	100
23.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	3.547.141.100	2.808.629.800	79,18	100
23.1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	3.547.141.100	2.808.629.800	79,18	100
24	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III KABUPATEN BANTUL	279.300.000	273.075.400	97,77	100
24.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	279.300.000	273.075.400	97,77	100
24.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	279.300.000	273.075.400	97,77	100
24.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	279.300.000	273.075.400	97,77	100
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	449.893.000	447.097.400	99,38	100
25.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	449.893.000	447.097.400	99,38	100
25.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	269.600.000	266.885.000	98,99	100
25.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	269.600.000	266.885.000	98,99	100
25.1.2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	180.293.000	180.212.400	99,96	100
25.1.2.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	113.485.000	113.480.000	100,00	100
25.1.2.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	66.808.000	66.732.400	99,89	100
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL	156.500.000	154.980.000	99,03	100
26.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	156.500.000	154.980.000	99,03	100
26.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	156.500.000	154.980.000	99,03	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
26.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	156.500.000	154.980.000	99,03	100
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANTUL	127.200.000	127.200.000	100,00	100
27.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	127.200.000	127.200.000	100,00	100
27.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	127.200.000	127.200.000	100,00	100
27.1.1.1	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	127.200.000	127.200.000	100,00	100
	Kabupaten Sleman	**2.240.282.700**	**2.206.883.824**	**98,51**	**100**
1	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SLEMAN	100.607.700	98.126.952	97,53	100
1.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100.607.700	98.126.952	97,53	100
1.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	57.822.500	55.898.129	96,67	100
1.1.1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	57.822.500	55.898.129	96,67	100
1.1.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	42.785.200	42.228.823	98,70	100
1.1.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	42.785.200	42.228.823	98,70	100
2	KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN	34.800.000	34.724.025	99,78	100
2.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	34.800.000	34.724.025	99,78	100
2.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	34.800.000	34.724.025	99,78	100
2.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	34.800.000	34.724.025	99,78	100
3	KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN	33.500.000	33.444.825	99,84	100
3.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.500.000	33.444.825	99,84	100
3.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	33.500.000	33.444.825	99,84	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
3.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.500.000	33.444.825	99,84	100
4	KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN	38.125.000	37.990.075	99,65	100
4.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	38.125.000	37.990.075	99,65	100
4.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	38.125.000	37.990.075	99,65	100
4.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	38.125.000	37.990.075	99,65	100
5	KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN	33.890.000	32.808.875	96,81	100
5.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.890.000	32.808.875	96,81	100
5.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	33.890.000	32.808.875	96,81	100
5.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.890.000	32.808.875	96,81	100
6	KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN	32.350.000	30.761.650	95,09	100
6.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	32.350.000	30.761.650	95,09	100
6.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	32.350.000	30.761.650	95,09	100
6.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	32.350.000	30.761.650	95,09	100
7	KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN	25.780.000	24.774.924	96,10	100
7.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	25.780.000	24.774.924	96,10	100
7.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	25.780.000	24.774.924	96,10	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
7.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	25.780.000	24.774.924	96,10	100
8	KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN	30.750.000	30.726.399	99,92	100
8.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	30.750.000	30.726.399	99,92	100
8.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	30.750.000	30.726.399	99,92	100
8.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	30.750.000	30.726.399	99,92	100
9	KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN	33.000.000	32.265.200	97,77	100
9.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.000.000	32.265.200	97,77	100
9.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	33.000.000	32.265.200	97,77	100
9.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.000.000	32.265.200	97,77	100
10	KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN	31.300.000	31.189.670	99,65	100
10.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	31.300.000	31.189.670	99,65	100
10.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	31.300.000	31.189.670	99,65	100
10.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	31.300.000	31.189.670	99,65	100
11	KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN	33.500.000	33.261.862	99,29	100
11.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.500.000	33.261.862	99,29	100
11.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	33.500.000	33.261.862	99,29	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
11.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.500.000	33.261.862	99,29	100
12	KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN	36.250.000	36.110.500	99,62	100
12.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	36.250.000	36.110.500	99,62	100
12.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	36.250.000	36.110.500	99,62	100
12.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	36.250.000	36.110.500	99,62	100
13	KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN	33.250.000	32.926.175	99,03	100
13.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.250.000	32.926.175	99,03	100
13.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	33.250.000	32.926.175	99,03	100
13.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.250.000	32.926.175	99,03	100
14	KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN	35.500.000	35.023.000	98,66	100
14.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	35.500.000	35.023.000	98,66	100
14.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	35.500.000	35.023.000	98,66	100
14.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	35.500.000	35.023.000	98,66	100
15	KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN	39.500.000	39.500.000	100,00	100
15.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	39.500.000	39.500.000	100,00	100
15.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	39.500.000	39.500.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
15.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	39.500.000	39.500.000	100,00	100
16	KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN	33.500.000	33.034.226	98,61	100
16.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.500.000	33.034.226	98,61	100
16.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	33.500.000	33.034.226	98,61	100
16.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.500.000	33.034.226	98,61	100
17	KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN	36.800.000	36.747.951	99,86	100
17.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	36.800.000	36.747.951	99,86	100
17.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	36.800.000	36.747.951	99,86	100
17.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	36.800.000	36.747.951	99,86	100
18	KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN	31.875.000	31.661.600	99,33	100
18.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	31.875.000	31.661.600	99,33	100
18.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	31.875.000	31.661.600	99,33	100
18.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	31.875.000	31.661.600	99,33	100
19	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN	530.506.000	525.253.931	99,01	100
19.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	530.506.000	525.253.931	99,01	100
19.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	530.506.000	525.253.931	99,01	100
19.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	530.506.000	525.253.931	99,01	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEBUPATEN SLEMAN	100.000.000	98.480.875	98,48	100
20.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100.000.000	98.480.875	98,48	100
20.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	100.000.000	98.480.875	98,48	100
20.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	100.000.000	98.480.875	98,48	100
21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN	73.516.000	72.628.170	98,79	100
21.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	73.516.000	72.628.170	98,79	100
21.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	73.516.000	72.628.170	98,79	100
21.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	73.516.000	72.628.170	98,79	100
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN KABUPATEN SLEMAN	156.000.000	155.527.334	99,70	100
22.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	156.000.000	155.527.334	99,70	100
22.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	156.000.000	155.527.334	99,70	100
22.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	156.000.000	155.527.334	99,70	100
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN	541.357.000	538.093.819	99,40	100
23.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	541.357.000	538.093.819	99,40	100
23.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	333.090.000	331.069.150	99,39	100
23.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	333.090.000	331.069.150	99,39	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
23.1.2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	208.267.000	207.024.669	99,40	100
23.1.2.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	157.046.000	155.883.919	99,26	100
23.1.2.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	51.221.000	51.140.750	99,84	100
24	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN	164.626.000	151.821.786	92,22	100
24.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	164.626.000	151.821.786	92,22	100
24.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	164.626.000	151.821.786	92,22	100
24.1.1.1	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	164.626.000	151.821.786	92,22	100
	Kabupaten Kulon Progo	**6.132.851.100**	**5.924.307.566**	**96,60**	**100**
1	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KULON PROGO	91.040.000	80.511.110	88,43	100
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	91.040.000	80.511.110	88,43	100
1.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	78.790.000	68.261.110	86,64	100
1.1.1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	78.790.000	68.261.110	86,64	100
1.1.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	12.250.000	12.250.000	100,00	100
1.1.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	12.250.000	12.250.000	100,00	100
2	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO	20.487.300	19.754.846	96,42	100
2.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	20.487.300	19.754.846	96,42	100
2.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	20.487.300	19.754.846	96,42	100
2.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	20.487.300	19.754.846	96,42	100
3	KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO	23.040.000	23.018.240	99,91	100
3.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	23.040.000	23.018.240	99,91	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
3.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	23.040.000	23.018.240	99,91	100
3.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	23.040.000	23.018.240	99,91	100
4	KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO	22.415.000	21.889.306	97,65	100
4.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	22.415.000	21.889.306	97,65	100
4.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	22.415.000	21.889.306	97,65	100
4.1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	22.415.000	21.889.306	97,65	100
5	KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO	17.790.000	17.790.000	100,00	100
5.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	17.790.000	17.790.000	100,00	100
5.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	17.790.000	17.790.000	100,00	100
5.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	17.790.000	17.790.000	100,00	100
6	KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO	18.225.000	17.835.731	97,86	100
6.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	18.225.000	17.835.731	97,86	100
6.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	18.225.000	17.835.731	97,86	100
6.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	18.225.000	17.835.731	97,86	100
7	KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO	22.095.000	21.667.100	98,06	100
7.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	22.095.000	21.667.100	98,06	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
7.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	22.095.000	21.667.100	98,06	100
7.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	22.095.000	21.667.100	98,06	100
8	KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO	20.184.600	20.094.287	99,55	100
8.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	20.184.600	20.094.287	99,55	100
8.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	20.184.600	20.094.287	99,55	100
8.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	20.184.600	20.094.287	99,55	100
9	KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO	15.660.800	15.585.300	99,52	100
9.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	15.660.800	15.585.300	99,52	100
9.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	15.660.800	15.585.300	99,52	100
9.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	15.660.800	15.585.300	99,52	100
10	KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO	22.093.100	22.066.854	99,88	100
10.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	22.093.100	22.066.854	99,88	100
10.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	22.093.100	22.066.854	99,88	100
10.1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	22.093.100	22.066.854	99,88	100
11	KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO	21.050.000	21.050.000	100,00	100
11.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	21.050.000	21.050.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
11.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	21.050.000	21.050.000	100,00	100
11.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	21.050.000	21.050.000	100,00	100
12	KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO	21.524.000	21.479.814	99,79	100
12.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	21.524.000	21.479.814	99,79	100
12.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	21.524.000	21.479.814	99,79	100
12.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	21.524.000	21.479.814	99,79	100
13	KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO	22.200.000	21.873.444	98,53	100
13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	22.200.000	21.873.444	98,53	100
13.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	22.200.000	21.873.444	98,53	100
13.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	22.200.000	21.873.444	98,53	100
14	KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	120.165.000	119.206.409	99,20	100
14.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	120.165.000	119.206.409	99,20	100
14.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	120.165.000	119.206.409	99,20	100
14.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	120.165.000	119.206.409	99,20	100
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KULON PROGO	79.507.400	78.592.292	98,85	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	79.507.400	78.592.292	98,85	100
15.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	79.507.400	78.592.292	98,85	100
15.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	79.507.400	78.592.292	98,85	100
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO	3.850.635.900	3.699.823.086	96,08	100
16.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3.850.635.900	3.699.823.086	96,08	100
16.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	3.850.635.900	3.699.823.086	96,08	100
16.1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	3.850.635.900	3.699.823.086	96,08	100
17	PUSKESMAS SENTOLO I KABUPATEN KULON PROGO	478.564.500	477.518.389	99,78	100
17.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	478.564.500	477.518.389	99,78	100
17.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	478.564.500	477.518.389	99,78	100
17.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	478.564.500	477.518.389	99,78	100
18	PUSKESMAS SENTOLO II KABUPATEN KULON PROGO	239.280.000	234.744.722	98,10	100
18.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	239.280.000	234.744.722	98,10	100
18.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	239.280.000	234.744.722	98,10	100
18.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	239.280.000	234.744.722	98,10	100
19	PUSKESMAS TEMON I KABUPATEN KULON PROGO	119.575.800	113.270.319	94,73	100
19.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	119.575.800	113.270.319	94,73	100
19.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	119.575.800	113.270.319	94,73	100
19.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	119.575.800	113.270.319	94,73	100
20	PUSKESMAS TEMON II KABUPATEN KULON PROGO	132.563.800	124.729.013	94,09	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
20.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	132.563.800	124.729.013	94,09	100
20.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	132.563.800	124.729.013	94,09	100
20.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	132.563.800	124.729.013	94,09	100
21	PUSKESMAS GIRIMULYO I KABUPATEN KULON PROGO	99.967.000	90.534.500	90,56	100
21.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	99.967.000	90.534.500	90,56	100
21.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	99.967.000	90.534.500	90,56	100
21.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	99.967.000	90.534.500	90,56	100
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KULON PROGO	238.010.400	236.605.802	99,41	100
22.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	238.010.400	236.605.802	99,41	100
22.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	238.010.400	236.605.802	99,41	100
22.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	238.010.400	236.605.802	99,41	100
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	247.398.500	242.456.005	98,00	100
23.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	247.398.500	242.456.005	98,00	100
23.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	130.730.100	130.529.944	99,85	100
23.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	130.730.100	130.529.944	99,85	100
23.1.2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	116.668.400	111.926.061	95,94	100
23.1.2.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	76.459.000	72.713.781	95,10	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
23.1.2.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	40.209.400	39.212.280	97,52	100
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KULON PROGO	189.378.000	182.210.997	96,22	100
24.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	189.378.000	182.210.997	96,22	100
24.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	189.378.000	182.210.997	96,22	100
24.1.1.1	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	189.378.000	182.210.997	96,22	100
	Kabupaten Gunungkidul	**2.360.846.100**	**2.337.758.005**	**99,02**	**100**
1	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	235.885.000	233.613.838	99,04	100
1.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	235.885.000	233.613.838	99,04	100
1.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	84.126.000	83.021.890	98,69	100
1.1.1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	84.126.000	83.021.890	98,69	100
1.1.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	115.735.000	114.612.948	99,03	100
1.1.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	115.735.000	114.612.948	99,03	100
1.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	36.024.000	35.979.000	99,88	100
1.1.3.1	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	36.024.000	35.979.000	99,88	100
2	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	17.355.000	17.355.000	100,00	100
2.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	17.355.000	17.355.000	100,00	100
2.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	17.355.000	17.355.000	100,00	100
2.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	17.355.000	17.355.000	100,00	100
3	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2.999.000	2.998.967	100,00	100
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	2.999.000	2.998.967	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
3.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	2.999.000	2.998.967	100,00	100
3.1.1.1	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	2.999.000	2.998.967	100,00	100
4	KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	33.890.000	33.890.000	100,00	100
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	33.890.000	33.890.000	100,00	100
4.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	33.890.000	33.890.000	100,00	100
4.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.890.000	33.890.000	100,00	100
5	KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL	29.350.000	29.350.000	100,00	100
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	29.350.000	29.350.000	100,00	100
5.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	29.350.000	29.350.000	100,00	100
5.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	29.350.000	29.350.000	100,00	100
6	KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	32.700.000	32.700.000	100,00	100
6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	32.700.000	32.700.000	100,00	100
6.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	32.700.000	32.700.000	100,00	100
6.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	32.700.000	32.700.000	100,00	100
7	KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	33.000.000	33.000.000	100,00	100
7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	33.000.000	33.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
7.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	33.000.000	33.000.000	100,00	100
7.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.000.000	33.000.000	100,00	100
8	KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	28.460.000	28.459.560	100,00	100
8.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	28.460.000	28.459.560	100,00	100
8.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	28.460.000	28.459.560	100,00	100
8.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	28.460.000	28.459.560	100,00	100
9	KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	33.660.000	33.657.976	99,99	100
9.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	33.660.000	33.657.976	99,99	100
9.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	33.660.000	33.657.976	99,99	100
9.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.660.000	33.657.976	99,99	100
10	KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL	27.930.000	27.929.466	100,00	100
10.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	27.930.000	27.929.466	100,00	100
10.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	27.930.000	27.929.466	100,00	100
10.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	27.930.000	27.929.466	100,00	100
11	KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL	31.690.000	31.661.847	99,91	100
11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	31.690.000	31.661.847	99,91	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
11.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	31.690.000	31.661.847	99,91	100
11.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	31.690.000	31.661.847	99,91	100
12	KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.140.000	30.140.000	100,00	100
12.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	30.140.000	30.140.000	100,00	100
12.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	30.140.000	30.140.000	100,00	100
12.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	30.140.000	30.140.000	100,00	100
13	KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	35.690.000	35.629.355	99,83	100
13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.690.000	35.629.355	99,83	100
13.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.690.000	35.629.355	99,83	100
13.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	35.690.000	35.629.355	99,83	100
14	KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL	32.570.000	32.570.000	100,00	100
14.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	32.570.000	32.570.000	100,00	100
14.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	32.570.000	32.570.000	100,00	100
14.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	32.570.000	32.570.000	100,00	100
15	KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	38.610.000	38.610.000	100,00	100
15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	38.610.000	38.610.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
15.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	38.610.000	38.610.000	100,00	100
15.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	38.610.000	38.610.000	100,00	100
16	KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	32.900.000	32.130.000	97,66	100
16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	32.900.000	32.130.000	97,66	100
16.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	32.900.000	32.130.000	97,66	100
16.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	32.900.000	32.130.000	97,66	100
17	KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	29.560.000	29.526.359	99,89	100
17.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	29.560.000	29.526.359	99,89	100
17.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	29.560.000	29.526.359	99,89	100
17.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	29.560.000	29.526.359	99,89	100
18	KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	29.425.000	26.509.980	90,09	100
18.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	29.425.000	26.509.980	90,09	100
18.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	29.425.000	26.509.980	90,09	100
18.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	29.425.000	26.509.980	90,09	100
19	KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL	33.650.000	33.650.000	100,00	100
19.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	33.650.000	33.650.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
19.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	33.650.000	33.650.000	100,00	100
19.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	33.650.000	33.650.000	100,00	100
20	KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	29.930.000	29.930.000	100,00	100
20.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	29.930.000	29.930.000	100,00	100
20.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	29.930.000	29.930.000	100,00	100
20.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	29.930.000	29.930.000	100,00	100
21	KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	29.010.000	29.010.000	100,00	100
21.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	29.010.000	29.010.000	100,00	100
21.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	29.010.000	29.010.000	100,00	100
21.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	29.010.000	29.010.000	100,00	100
22	PUSKESMAS SEMANU II KABUPATEN GUNUNGKIDUL	370.940.000	370.503.447	99,88	100
22.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	370.940.000	370.503.447	99,88	100
22.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	370.940.000	370.503.447	99,88	100
22.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	370.940.000	370.503.447	99,88	100
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	173.349.600	169.496.334	97,78	100
23.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	173.349.600	169.496.334	97,78	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
23.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	173.349.600	169.496.334	97,78	100
23.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	173.349.600	169.496.334	97,78	100
24	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	149.595.000	149.453.720	99,91	100
24.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	149.595.000	149.453.720	99,91	100
24.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	149.595.000	149.453.720	99,91	100
24.1.1.1	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	149.595.000	149.453.720	99,91	100
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	656.829.500	644.280.160	98,09	100
25.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	656.829.500	644.280.160	98,09	100
25.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	332.347.500	325.681.335	97,99	100
25.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	332.347.500	325.681.335	97,99	100
25.1.2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan	324.482.000	318.598.825	98,19	100
25.1.2.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	184.150.000	180.387.545	97,96	100
25.1.2.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	140.332.000	138.211.280	98,49	100
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	102.665.000	102.658.409	99,99	100
26.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	102.665.000	102.658.409	99,99	100
26.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	102.665.000	102.658.409	99,99	100
26.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	102.665.000	102.658.409	99,99	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	37.733.000	37.716.752	99,96	100
27.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	37.733.000	37.716.752	99,96	100
27.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	37.733.000	37.716.752	99,96	100
27.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	37.733.000	37.716.752	99,96	100
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	41.330.000	41.326.835	99,99	100
28.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	41.330.000	41.326.835	99,99	100
28.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan	41.330.000	41.326.835	99,99	100
28.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	41.330.000	41.326.835	99,99	100
	Kota Yogyakarta	**5.266.562.500**	**5.256.993.000**	**99,82**	**100**
1	BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA	289.104.000	289.104.000	100,00	100
1.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	289.104.000	289.104.000	100,00	100
1.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	269.690.000	269.690.000	100,00	100
1.1.1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	269.690.000	269.690.000	100,00	100
1.1.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	19.414.000	19.414.000	100,00	100
1.1.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	19.414.000	19.414.000	100,00	100
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA	123.164.500	123.014.500	99,88	100
2.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	123.164.500	123.014.500	99,88	100
2.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	123.164.500	123.014.500	99,88	100
2.1.1.1	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	123.164.500	123.014.500	99,88	100
3	KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA	410.000.000	410.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
3.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	410.000.000	410.000.000	100,00	100
3.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	410.000.000	410.000.000	100,00	100
3.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	410.000.000	410.000.000	100,00	100
4	KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA	310.000.000	309.250.000	99,76	100
4.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	310.000.000	309.250.000	99,76	100
4.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	310.000.000	309.250.000	99,76	100
4.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	310.000.000	309.250.000	99,76	100
5	KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA	498.144.000	498.144.000	100,00	100
5.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	498.144.000	498.144.000	100,00	100
5.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	498.144.000	498.144.000	100,00	100
5.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	498.144.000	498.144.000	100,00	100
6	KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA	310.000.000	310.000.000	100,00	100
6.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
6.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
6.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
7	KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA	210.000.000	210.000.000	100,00	100
7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	210.000.000	210.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
7.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	210.000.000	210.000.000	100,00	100
7.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	210.000.000	210.000.000	100,00	100
8	KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA	210.000.000	210.000.000	100,00	100
8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	210.000.000	210.000.000	100,00	100
8.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	210.000.000	210.000.000	100,00	100
8.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	210.000.000	210.000.000	100,00	100
9	KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA	310.000.000	309.997.000	100,00	100
9.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	310.000.000	309.997.000	100,00	100
9.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	310.000.000	309.997.000	100,00	100
9.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	310.000.000	309.997.000	100,00	100
10	KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA	310.000.000	310.000.000	100,00	100
10.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	310.000.000	310.000.000	100,00	100
10.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
10.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
11	KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA	310.000.000	310.000.000	100,00	100
11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	310.000.000	310.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
11.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
11.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
12	KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA	197.520.000	197.520.000	100,00	100
12.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	197.520.000	197.520.000	100,00	100
12.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	197.520.000	197.520.000	100,00	100
12.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	197.520.000	197.520.000	100,00	100
13	KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA	210.000.000	210.000.000	100,00	100
13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	210.000.000	210.000.000	100,00	100
13.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	210.000.000	210.000.000	100,00	100
13.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	210.000.000	210.000.000	100,00	100
14	KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA	310.000.000	310.000.000	100,00	100
14.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	310.000.000	310.000.000	100,00	100
14.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
14.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	310.000.000	310.000.000	100,00	100
15	KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA	710.000.000	710.000.000	100,00	100
15.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	710.000.000	710.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3 (%)
			Rp	%	
15.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	710.000.000	710.000.000	100,00	100
15.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	710.000.000	710.000.000	100,00	100
16	KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA	310.000.000	309.969.500	99,99	100
16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	310.000.000	309.969.500	99,99	100
16.1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	310.000.000	309.969.500	99,99	100
16.1.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	310.000.000	309.969.500	99,99	100
17	DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA	238.630.000	229.994.000	96,38	100
17.1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	238.630.000	229.994.000	96,38	100
17.1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	238.630.000	229.994.000	96,38	100
17.1.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	238.630.000	229.994.000	96,38	100
Jumlah		**48.323.087.041**	**46.740.798.356**	**96,73**	**100**
Pemerintah Kalurahan/Kelurahan		**42.100.000.000,00**	**40.651.780.123,25**	**95,56**	**97,93**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2026

Pada urusan kelembagaan di tahun 2025 ini terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas yaitu:

1. Inovasi Pelayanan Publik;
2. Database Sosial Ekonomi;
3. Reformasi Kalurahan; dan
4. Diklat-Diklat Keistimewaan.

Secara detail, keempat prioritas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Inovasi Pelayanan Publik

Pada urusan kelembagaan tahun anggaran 2025 terdapat kegiatan pendampingan inovasi pelayanan publik sebagai

perwujudan Budaya Pemerintahan SATRIYA. Pendampingan inovasi pelayanan publik dilakukan terhadap 18 inovasi yang terdiri dari 5 inovasi di provinsi dan 13 inovasi di kabupaten/kota.

a. Mini Teater Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara–Dinas Sosial DIY

Pembangunan Mini Teater di TMPN Kusumanegara menampilkan film-film kepahlawanan yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat khususnya generasi muda. di tahun 2025 tercatat sebanyak 15.407 orang yang melakukan kunjungan. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang terus berlanjut dalam mengenang jasa para pahlawan di TMPN Kusumanegara.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pengembangan sarana edukasi dan layanan publik di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kusumanegara yang memanfaatkan media audiovisual sebagai wahana pembelajaran sejarah dan penanaman nilai-nilai kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.010.880.674,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.005.280.680,00 atau sebesar 99,45% dan realisasi fisik sampai dengan akhir tahun 2025 sudah mencapai 100%.

Adapun pengerjaan fasilitas pendukung Mini Teater TMPN Kusumanegara tahun 2025 terdiri dari:

a. Pekerjaan Rehab Gedung Fasilitas Penunjang Mini Teater TMPN Kusumanegara
b. Peralatan penunjang Mini Teater berupa peralatan audio, amplifier, kursi susun dll.
c. Pembuatan Film Pendek Dokumenter Brigjen. TNI. ANM. Katamso dan Kol. ANM. Sugiono.

Dengan dilaksanakannya pengembangan sarana edukasi dan layanan publik di TMPN Kusumanegara memberikan dampak yang positif diantaranya yaitu meningkatnya jumlah kunjungan di tahun 2025, menambah daya tarik masyarakat khususnya generasi muda terkait jiwa patrotisme dengan mengenang jasa para pahlawan melalui beberapa fasilitas Mini Teater di TMPN Kusumanegara.



Gambar 5.1. Rehab Gedung TMPN Kusumanegara



Gambar 5.2. Peralatan Penunjang Mini Teater TMPN Kusumanegara

b. SIKELING (Servis Keliling)–Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG–Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Melalui UPT Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) melaksanakan SIKELING (*Service* Keliling) untuk membantu para pelaku IKM khususnya bagi mereka yang membutuhkan peningkatan efisiensi maupun peningkatan produktivitas. Lokasi pelayanan SIKELING diprioritaskan di lokasi yang jauh dari jangkauan BPTTG terutama di wilayah Kapanewon yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di sentra IKM maupun Kantor Pemerintahan yang ada di daerah misalnya kantor Kalurahan dan/atau kantor Kapanewon/Kemantren. Harapannya dengan adanya layanan SIKELING dapat

meningkatkan produktivitas IKM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku IKM dan mampu berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Pelayanan SIKELING tidak hanya dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan, akan tetapi petugas juga bersedia mengunjungi IKM jika dirasa diperlukan. Kegiatan ini merupakan wujud Imlementasi budaya SATRIYA, terlihat dari penentuan lokasi yang memprioritaskan daerah pelosok dan belum terjangkau oleh masyarakat secara profesional. Selain itu SIKELING yang juga berfokus pada pembinaan dan inovasi Alat Tepat Guna bagi IKM merupakan budaya inovatif dari ahli profesional.

Tujuan yang ingin dicapai SIKELING tidak hanya terbatas dalam mempermudah akses pelayanan kepada IKM juga memfungsikan alat tepat guna milik pelaku IKM sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar. Alokasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp100.088.000,00 dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun sebesar Rp100.088.000,00 atau sebesar 100% dengan capaian fisik sudah mencapai 100%. Berikut foto kegiatan dalam layanan SiKeling. Inovasi ini telah terlaksana sebanyak 21 kali dari target 16 kali layanan dan 7 kali layanan diluar jadwal (berdasarkan permintaan IKM).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 diantaranya:

(1) Layanan servis keliling berdasarkan permintaan dari IKM di luar jadwal yang sudah ditentukan;
(2) Layanan servis keliling pada kelompok Difabel;
(3) Layanan servis keliling pada kelompok binaan OPD yakni Kelompok Tani yang berfokus pada pengolahan pasca panen, serta berkolaborasi dengan dunia pendidikan yaitu FTP UGM untuk melakukan servis dan layanan konsultasi teknis modifikasi alat tepat guna yaitu autoclave yang ada di laboratorium FTP UGM;

(4) Selan itu menjalin kolaborasi dengan koperasi UPI Minabahari 45 dalam mengoptimalkan penggunaan *autoclave* yang berada di rumah produksi olahan ikan yang berlokasi di Pantai Depok Bantul.

Dengan adanya layanan SIKELING memberikan dampak positif bagi OPD pengampu maupun IKM/Masyarakat. Bagi OPD pengampu semakin dikenalnya BPTTG dan layanan yang diberikan hal ini menjadi penting karena menjadi dorongan bagi OPD di dalam mengembangkan Teknologi tepat guna yang nantinya bisa memberi manfaat yang lebih untuk masyarakat. Sedangkan dampak untuk IKM/Masyarakat antara lain memperoleh layanan perbengkelan dan servis ATG yang sebelumnya sulit diakses karena terkendala jarak menjadi lebih mudah diakses, mendapatkan informasi dan pengetahuan baru seputar teknologi tepat guna yang dibutuhkan terkait proses produksi yang dibutuhkan oleh pelaku IKM.



Gambar 5.3. Layanan SiKeling Untuk Pelaku IKM



Gambar 5.4. Kolaborasi dengan UGM dan Koperasi UPI Minabahari terkait Pengotimalan *Autoclave*

c. SIBUKIN (Sistem Informasi Buku Induk)–Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP)–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

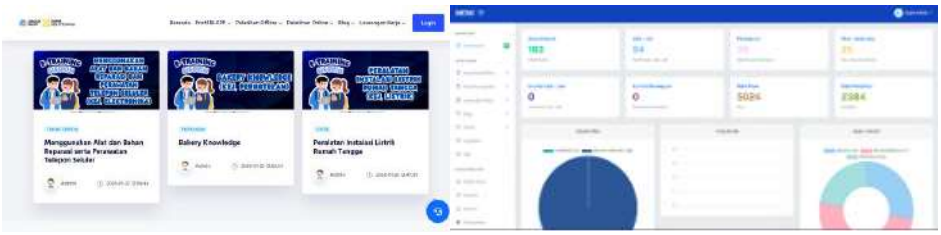
Sistem Informasi Buku Induk (SiBUKIN) berfokus pada pengembangan *Learning Management System (LMS)* yang memungkinkan masyarakat mengikuti pelatihan daring dan memperoleh sertifikat, disertai dengan pembuatan video pelatihan serta kegiatan sosialisasi kepada pihak termasuk FKLPD. Pada tahun 2025 untuk kegiatan SIBUKIN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp114.808.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp114.614.000,00 atau sebesar 99,75% dari total pagu yang ada. Sedangkan realisasi fisik hingga akhir tahun 2025 sudah mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 berupa pelatihan–pelatihan yakni pelatihan *online / e-Training* untuk meningkatkan keterampilan serta informasi lowongan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Adapun dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

(1) Meningkatkan *skill* bagi peserta pelatihan;
(2) Mempermudah peserta/masyarakat dalam mencari informasi lowongan pekerjaan yang terintegrasi; dan
(3) Bagi Perusahaan yang mencari tenaga kerja menjadi mudah ditemukan oleh pencari kerja yang kompeten melalui SIBUKIN.

Diharapkan dengan adanya web SIBUKIN dapat memudahkan masyarakat ataupun pegawai BLKPP DIY dalam melakukan pendaftaran yang transparan, adil, dan dapat diakses kapanpun di manapun. Serta memberikan dampak yang luas oleh banyak kalangan, baik masyarakat umum, peserta pelatihan, alumni BLKPP DIY, juga kalangan *stakeholders*. Situs web SIBUKIN juga diharapkan dapat meningkatkan keterserapan alumni BLKPP DIY di dunia

kerja. Meninjau manfaat dari situs web SIBUKIN tersebut, maka perlu adanya peningkatan dan pengoptimalan dari situs web tersebut secara berkala oleh pihak yang terkait, agar SIBUKIN dapat terus beroperasi secara maksimal dan bergerak mengikuti perkembangan terlebih di era digital saat ini.



Gambar 5.5. Tampilan *Website* SIBUKIN



Gambar 5.6. Pelatihan *e-Training Batch* 1–4 Tahun Anggaran 2025

d. Showroom SLBN Pembina GAPURA (Gerakan Aktif Produktif Unggul Relasi Asli)–SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Dikpora DIY mengembangkan SLBN Pembina sebagai inovasi daerah melalui pembangunan showroom dan fasilitas pembelajaran kriya membatik, kayu dan tata boga. Upaya ini mendukung kemandirian dan kreativitas siswa berbasis potensi budaya lokal. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran adalah Datangi Lima Menit (DALAMI), yaitu presentasi karya peserta didik dan alumni berkebutuhan khusus yang dipamerkan di *showroom* SLBN Pembina Yogyakarta. Pembuatan karya yang dipamerkan di *showroom* berupa berbagai souvenir, kain batik, dan makanan khas. *Showroom* SLBN Pembina

Yogyakarta yang disebut sebagai *Showroom Gerakan Aktif Produktif Unggul Relasi Asli* (GAPURA) merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk menjual hasil produksi para penyandang disabilitas baik dari kalangan siswa SLBN Pembinan Yogyakarta, SLB se-DIY, maupun forum Disabilitas.

Pada tahun 2025 SLBN Pembina mendapat Pagu anggaran sebesar Rp109.899.000,00 dengan realisasi anggaran Rp108.011.275,00 atau sebesar 98,28% dan realisasi fisik sudah mencapai 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian, keterampilan vokasional, dan jiawa kewirausahaan siswa melalui pengalaman berkarya dan berinteraksi dengan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 antara lain:

(1) Pembelian dan penyediaan bahan baku pembuatan produk karya siswa
(2) Penyediaan prasarana *showroom* seperti *container box,* meja dan kursi
(3) Pembuatan video profil *showroom* dan brosur untuk publikasi

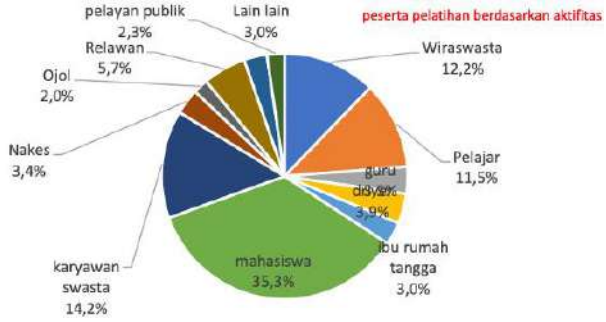


Gambar 5.7. Ruang *Showroom* SLB Negeri Pembina Yogyakarta

e. PENTAMARTO (Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Bagi Masyarakat Ngayogyakarto) dan Penyediaan AED di Area Publik di Lokasi Strategis Kota Yogyakarta–Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pada tahun 2024, inovasi Pentamarto telah berhasil melatih lebih dari 240 peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, mahasiswa, karyawan, dan relawan. Selain itu, sebanyak 3 unit AED telah dipasang di lokasi strategis di sepanjang ruas jalan malioboro. Tujuan Kegiatan Pentamarto adalah meningkatkan angka harapan hidup korban henti jantung yang terjadi diluar rumah sakit dengan meningkatkan tanggap darurat masyarakat di bidang kegawatdaruratan henti jantung melalui pelatihan bantuan hidup dasar, dan penyediaan AED di tempat umum. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup pada korban henti jantung, tetapi juga untuk membangun komunitas yang lebih siap dan tanggap terhadap keadaan darurat kesehatan yang memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi.

Pada tahun 2025, kegiatan ini berfokus pada pelatihan dan penyediaan AED (*Automated Eksternal Defibrillator)* di ruang Publik terutama di Kawasan Filosofis yang telah dipasang di lokasi strategis yaitu di Teras Malioboro dan Taman Pintar. Tahun 2025 PENTAMARTO dianggarkan sebesar Rp238.630.000,00 sampai dengan akhir tahun keuangan sudah terserap dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Sepanjang tahun 2025 kegiatan Pentamarto telah memberikan pelatihan pertolongan kegawatdaruratan bagi masyarakat sebanyak 600 orang dari berbagai kalangan seperti tergambar pada diagram di bawah ini:



Gambar 5.8. Proporsi Peserta Pelatihan Pentamarto

Selama periode 2023 sampai dengan 2025, PSC 119 Yogyakarta *Emergency Service* telah melakukan puluhan kali pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan penggunaan AED, dengan jumlah peserta yang telah dilatih dari 1000 orang. Kegiatan ini juga berhasil menjangkau banyak kangan terutama generasi muda yang peduli akan pentingnya pertolongan pertama pada kegawatdaruratan.



Gambar 5.9. Kegiatan Pelatihan Pertolongan Kegawatdaruratan Henti Jantung

Selama tahun 2025 ini penyediaan AED di area publik yang menjadi bagian dari inovasi PENTAMARTO bertambah di dua titik yang menjadi bagian sumbu filosofis yaitu: di Teras Maliboro II (Ketandan) dan Taman Pintar.



Gambar 5.10. Pemasangan AED di Lokasi Taman Pintar dan Teras Malioboro II

Kegiatan Pelatihan PENTAMARTO memiliki dampak yang sangat besar dalam meningkatkan *survival rate* atau tingkat bertahan hidup bagi korban yang mengalami henti jantung, dampaknya antara lain:

(1) Respon Cepat dan Efletif.

Pelatihan pertolongan pertama kegawatdaruratan bantuan hidup dasar memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masayarakat umum untuk memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tepat kepada korban henti jantung. Bantuan hidup dasar yang dilakukan segera setelah korban mengalami henti jantung dapat mempertahankan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya, sehingga meningkatkan kemungkinan hidup korban sebelum tim bantuan medis tiba di lokasi.

(2) Peningkatan kesadaran akan manfaat AED.

AED yang tersedia di tempat umum memungkinkan penolong yang tidak terlatih secara medis untuk dapat melakukan tindakan yang defibrilasi dengan panduan yang jelas dari alat AED itu sendiri. Pemberian defibrilasi dalam waktu singkat setelah henti jantung dapat sangat meningkatkan peluang bertahan hidup, terutama karena banyak henti jantung disebabkan oleh aritmia fibrilasi ventrikel yang dapat diatasi dengan defibrilasi.

(3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.

Pelatihan bantuan hidup dasar dan ketersediaan AED di tempat umum tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai penolong pertama untuk memberikan pertolongan bantuan hidup dasar, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya respons pertolongan cepat oleh saksi mata di Lokasi kejadian dalam keadaan darurat medis. hal ini dapat mengubah perilaku masyarakat dalam merespon kejadian kegawatdaruratan.

f. GELAS BERLIAN SINURI (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri)–UPT Puskesmas Semanu II Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten di DIY yang sejak tahun 2001 hingga tahun 2016 terjadi 458 kasus bunuh diri. Jika dirata-rata setiap tahun ada 33 jiwa yang melayang akibat bunuh diri. Melalui Puskesmas Semanu II yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 Kalurahan dengan 48 padukuhan, dari tahun 2010-2018 terdapat 12 kasus bunuh diri yang didominasi oleh Lanjut Usia (³ 60 tahun) dengan beragam penyebab yang diantaranya adalah kesepian, penyakit menahun yang diderita serta kurangnya dukungan dan pendampingan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Berawal dari kondisi tersebut tercetuslah Inovasi Gelas Berlian Sinuri (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri) sebagai langkah dalam upaya preventif untuk menekan angka bunuh diri pada penduduk usia lanjut yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan agar tetap berjalan Inovasi Gelas Berlian Sinuri mendapat Pagu Anggara sebesar Rp370.940.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp370.503.447,00 atau sebesar 99,88% dengan capaian fisik sudah mencapai

100%. Adapun kegiatan dalam Inovasi Gelas Berlian Sinuri pada tahun 2025 antara lain:

(1) Senam Lansia
(2) Kajian keagamaan
(3) Terapi Kesehatan Mental Lansia
(4) Skrining Lansia Terpadu
(5) Pengadaan Sarpras Kesehatan Lansia



Gambar 5.11. Kegiatan Penduduk Usia Lanjut dalam Gelas Berlian Sinuri

Dampak dari dilakukannya kegiatan Inovasi Gelas Berlian Sinuri antara lain:

(1) Lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Semanu II mendapat pelayanan dan pendampingan secara langsung baik dalam hal Kesehatan fisik, mental, spiritual dan kegiatan pemberdayaan;
(2) Meningkatnya rasa kepedulian masayarakat terhadap lansia yang ada di wilayahnya;
(3) Adanya kegiatan pemberdayaan bagi lansia seperti budidaya lele, tanaman toga, budidaya ikan dalam ember dan pembuatan jamu meningkatkan aktifitas bagi lansia sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya serta hasil dari pemberdayaan terebut dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi.

g. LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka)–Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Lajang Cakap adalah inovasi layanan jemput bola bagi anak sekolah dimana merupakan pengembangan layanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul pada tahun anggaran 2025 Kabupaten Gunungkidul mengelola alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Inovasi LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka) sekolah-sekolah mulai dari KB/TPA, SPS/PAUD, TK/RA, dan SD/MI untuk menarik pemustaka baik dari pelajar maupun masyarakat. Inovasi ini diwujudkan melalui fasilitasi dan pendampingan kedatangan anak sekolah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp102.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp102.658.409,00 atau sebesar 99,99% dengan capaian fisik sudah mencapai 100%. Pada tahun 2025 layanan inovasi LAJANG CAKAP memberikan layanan kepada sekolah–sekolah yang belum terlayani, hal ini dikarenakan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Gunungkidul sangat banyak. Sampai akhir tahun 2025 sekolah yang sudah terlayani Lajang Cakap sebanyak 143 sekolah dari target 143 sekolah.



Gambar 5.12. Pelaksanaan Kegiatan Layanan Lajang Cakap bagi Siswa/Siswi Tahun 2025

Dampak yang diperoleh dari layanan Lajang Cakap antara lain:

(1) Dengan adanya layanan Lajang Cakap dapat menambah jumlah pemustaka;
(2) Kebutuhan masyarakat khususnya pelajar terhadap jasa pelayanan transportasi yang aman, dan nyaman serta efisien jadi terpenuhi;
(3) Pihak sekolah menjadi lebih mudah untuk berkunjung ke perpustakaan terutama untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah pinggiran yang lokasinya sulit dijangkau.

h. SI PERI MANIS KAPANEWON (Sistem Perizinan yang Mendekat dan Terintegrasi Secara Elektronik Sampai Kapanewon)–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo

Si Peri Manis Kapanewon hadir dalam upaya mengintegrasikan dan mendekatkan pelayanan perizinan sampai dengan Kapanewon ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Si Peri Manis berfokus dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kelembagaan Asli Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan. Selain mengintegrasikan dan mendekatkan pelayanan di seluruh Kapanewon dan Kalurahan juga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan seluruh perangkat Kapanewon/Kalurahan dan masyarakat khususnya terhadap prosedur pelayanan perizinan Berusaha berbasis risiko dan PBG. Harapannya kesadaran masyarakat terhadap legalitas usaha dan standar kegiatan usaha serta strandarisasi teknis bangunan gedung akan teru meningkat .

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi sosialisasi dan pelayanan perizinan berusaha untuk 150 pelaku usaha, Pembuatan Video Panduan Inovasi Si Peri

Manis Kapanewon, serta pelayanan publik Si Peri Manis Kapanewon di 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2025 SI PERI MANIS Kapanewon mengelola anggaran sebesar Rp79.507.400,00 dengan realisasi sebesar Rp78.592.292,00 atau sebesar 98,85% dan untuk capaian fisik sampai dengan akhir tahun sudah mencapai 100%.



Gambar 5.13. Sosialisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Adapun Dampak dari pelaksanaan Inovasi SI PERI MANIS Kapanewon antara lain:

(1) Mendekatkan dan mengintegrasikan layanan pada public yaitu dengan memberikan layanan sampai dengan 12 kecamatan;
(2) Memudahkan dan mempercepat proses layanan perizinan sesuai dengan proses bisnis yang jelas, transparan dan akuntabel yang sudah ditetapkan dengan Standar Pelayanan;
(3) Memudahkan kegiatan pemantauan dan pengawasan proses perizinan, yakni dengan adanya data dan informasi perizinan yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk keperluan pemantau dan pengawasan;
(4) Efisiensi dan efektifitas layanan perizinan. Layanan yang *paperless* meningkatkan efisiensi penggunaan kertas dalam semua dokumen perizinan;
(5) Memudahkan sistem dokumentasi pelaporan dan layanan informasi, dengan tersedianya database yang terintegrasi dalam sistem; dan

(6) Meningkatnya kepercayaan publik terhadap transparansi dan akutabilitas pelayanan publik pemerintag daerah.

i. Halo Bangga (Hamemayu Aplikasi Layanan Online Puskesmas Banguntapan III)–Puskesmas Banguntapan III Kabupaten Bantul

Pengembangan Rekam Medis Elektronik pada inovasi pelayanan Publik DGS Kesehatan ”HALO BANGGA” di tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap dari bulan Januari sampai dengan Desember di Puskesmas Banguntapan III dengan mengedepankan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat dalam mendapatkan layanan Kesehatan secara preventif maupun rehabilitatif. Dimana diketahui inovasi Halo Bangga sudah dimulai sejak tahun 2023, untuk pelaksanaan tahun 2025 diantaranya terkait pemenuhan kelengkapan fasilitas Rekam Medis Elektronik yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya serta pengembangan aplikasi Halo Bangga dengan fitur-fitur yang lebih lengkap dan mengakomodir kebutuhan masyarakat selaku pengguna layanan.

Pada tahun 2025 untuk inovasi pelayanan publik HALO BANGGA pada kinerja fisiknya sudah mencapai 100% dengan pagu sebesar Rp279.300.000,00 dengan capaian keuangan sebesar Rp273.075.400,00 atau sebesar 97,77%. Dengan dilakukannya pengembangan Halo Bangga dalam hal ini memberikan dampak positif diantaranya:

(1) Peningkatan kepuasan pasien karena proses layanan menjadi lebih cepat, jelas, dan transparan;
(2) Peningkatan derajat keterjangkauan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan gawai untuk mengakses layanan publik; dan
(3) Kontribusi pada citra dan kinerja Puskesmas Banguntapan III sebagai unti layanan publik yang

inovatif dan adaptif terhadap teknologi, dibuktikan dengan peghargaan inovasi tingkat kabupaten.

j. GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Inovasi GAMPIL merupakan pengembangan dari Inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan Perizinan Keliling yang terbit dalam Satu Hari atau PAKET SARI dengan pemohon izin difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dengan lokasi Paket Sari yaitu berupa layanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dalam satu hari. Dari latar belakang tersebut kemudian berganti menjadi Inovasi Gampil.

Inovasi GAMPIL ini diluncurkan bertujuan untuk membantu masyarakat Pelaku Usaha khususnya yang kurang menguasai teknologi informasi untuk memiliki Izin Usaha (NIB). Dengan diberikan Pendampingan dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), pemilik usaha secara hukum sudah mendapat perlindungan oleh Pemerintah, serta dapat menjadi sarana untuk mengakses tambahan modal yang diharapkan dapat semakin mengembangkan usahanya. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB bagi Pelaku Usaha melalui program GAMPIL dilaksanakan di 20 Kalurahan yang tersebar di 11 Kapanewon yakni:

(1) Kapanewon Dlingo ada di Kalurahan Muntuk, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Terong, Kalurahan Jatimulyo;
(2) Kapanewon Imogiri ada di Kalurahan Selopamioro;
(3) Kapanewon Pleret ada di Kalurahan Wonolelo;
(4) Kapanewon Kretek ada di Kalurahan Tirtomulyo;
(5) Kapanewon Bambanglipuro ada di Kalurahan Sumbermulyo, Kalurahan Mulyodadi dan Kalurahan Sidomulyo;
(6) Kapanewon Sewon ada di Kalurahan Panggungharjo;

(7) Kapanewom Kasihan ada di Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Bangunjiwo;
(8) Kapenewon Sedayu ada di Kalurahan Argorejo dan Kalurahan Argosari;
(9) Kapanewon Srandakan ada di Kalurahan Poncosari;
(10) Kapanewon Banguntapan ada di Kalurahan Potorono; dan
(11) Kapanewon Jetis ada di Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Patalan, dan Kalurahan Trimulyo.

Pada tahun 2025 untuk kegiatan inovasi GAMPIL dilihat dari capaian kinerja fisik sudah mencapai 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp162.223.700,00 dan sampai dengan akhir tahun sudah terealisasi sebesar Rp162.223.700,00 atau sebesar 100%. Untuk kegiatan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM selama 20 kali kegiatan pada tahun 2025 telah menerbitkan sebanyak 800 NIB dari target 800 pelaku UMKM. Adapun penerima manfaat utama dari kegiatan Gampil antara lain Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh wilayah Kabupaten Bantul; dan pelaku usaha di wilayah di daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan informasi.



Gambar 5.14. Fasilitasi Pendamping Pembuatan NIB Bagi Pelaku Usaha Program Inovasi GAMPIL

Adapun dampak dari kegiatan GAMPIL antara lain:

(1) Peningakatan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat

GAMPIL secara langsung mendorong pertembuhan ekonomi lokal dengan memberikan legalitas (NIB) kepada ribuan UMKM. Legalisasi ini membuka akses UMKM terhadap model usaha, program bantuan pemerintah, dan pasar yang lebih luas, yang merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Bantul.

(2) Pemerataan Akses Pelayanan Publik

Melalui metode “jemput bola” di wilayah pedesaan, GAMPIL mendemonstrasikan prinsip pelayanan yang adil dan merata, memastikan bahwa masyarakat di daerah pinggiran juga mendapatkan hak yang sama dalam mengakses layanan pemerintah.

(3) Penguatan Kemandirian Lokal

Program ini membantu pelaku usaha menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan memiliki izin resmi. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan DIY yang menekankan pada kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Secara keseluruhan, GAMPIL tidak hanya menyelesaikan masalah teknis perizinan, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai keistimewaan dalam bentuk pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan pro-rakyat, sehingga efektif dalam mencapai tujuan Dana Keistimewaan.

k. ASN MEMAYU–Badan Kepegawaian Daerah DIY

Seiring perkembangan teknologi informasi dan tuntutan reformasi birokrasi, sistem pengelolaan kepegawaian yang masih bersifat parsial, manual, atau belum terintegrasi secara optimal berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti disparitas data, keterlambatan pemutakhiran informasi, duplikasi data, serta keterbatasan

dalam menghambat efektivitas manajemen ASN, khususnya dalam aspek perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier, penilaian kinerja, serta pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Tahun 2025 dilakukan pengembangan terhadap Aplikasi ASN Memayu sebagai *core* Kepegawaian Pemda DIY. Pengembangan aplikasi ASN Memayu Pemda DIY merupakan upaya strategis untuk menjawab tantangan tersebut melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kebutuhan penggunaan. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi pusat data kepegawaian yang valid dan terstandarisasi, sekaligus mendukung integrasi dengan sistem nasional maupun aplikasi pendukung lainnya, seperti sistem perencanaan, penganggaran, dan layanan kepegawaian.

Pada Tahun 2025 inovasi ASN Memayu mendapat pagu anggaran sebesar Rp108.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp108.665.000,00 atau sebesar 100% serta capaian fisik sampai akhir tahun sudah mencapai 100%.



Gambar 5.15. *Screenshot* Tampilan Fitur Aplikasi ASN Memayu

Dampak dari kegiatan inovasi pengembangan aplikasi ASN Memayu yakni dengan adanya aplikasi ini sistem pengelolaan kepegawaian sudah teritegrasi dengan data pegawai dan aplikasi lainnya, meminimalkan permasalahan seperti disparitas data, keterlambatan pemutakhiran informasi, dan efisien dalam kebutuhan pencarian data sehingga pada saat dibutuhkan bisa dengan cepat di dapatkan di satu aplikasi.

I. Digital Literacy Center (DLC) Corner–Dinas Pepustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sleman

Inovasi *Digital Literacy Center* atau disingkat DLC merupakan Anjungan Perpustakaan Daerah merupakan pengembangan layanan literasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Sleman. Terdapat di 20 titik di Kabupaten Sleman. Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.639.484,00 atau sebesar 98,64% serta capaian fisik sampai dengan akhir tahun sudah mencapai 100%. Dengan adanya pengembangan layanan literasi ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait bacaan serta mampu mendorong minat baca masyarakat untuk menjadikan hal ini sebagai bentuk dari budaya.



Gambar 5.16. Penerimaan DLC di Beberapa Komunitas Baca di Kabupaten Sleman



Gambar 5.17. Tampilan *Website* DLC di Kabupaten Sleman.

Dengan dilakukannya kegiatan ini memberikan dampak terhadap minat masyarakat dalam meningkatkan minat baca dengan mengunjungi website DLC atau Pojok Lietarasi Digital dan dapat memberikan manfaat yang positif untuk menambah khasanah literasi di kalangan generasi muda dan masyarakat DIY pada umumnya.

m. MATA HATI (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa)–Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Tahun 2025 untuk inovasi Mata Hati fokus di penyediaan HRV (*Heart Rate* Variability) dan kegiatan pendampingan Psikologi bagi Anak Sekolah dan orangtua telah dilaksanakan di 25 Sekolah di wilayah Kabupaten Sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan psikologi bagi anak sekolah dan orang tua untuk mendukung kesehatan mental, tumbuh kembang anak serta memperkuat peran keluarga dalam menghadapi permasalahan psikososial secara berkelanjutan. Penerima manfaat pada kegiatan antara lain siswa, orangtua, dan guru yang ada dimasing-masing sekolah tersebut. HRV*(Heart Rate Variability) Analyzer* merupakan pengembangan layanan kesehatan di Kabupaten Sleman yang difokuskan pada skrining kesehatan jiwa melalui pemanfaatan teknologi pengukuran variabilitas denyut jantung sebagai indikator kondisi psikologis seseorang. Adapun penerima manfaat dalam penyediaan alat HRV ini adalah masyarakat sebagai

sarana deteksi dan intervensi awal guna menunjang pelayanan kesehatan jiwa.

Pada tahun 2025 untuk kegiatan inovasi MATA HATI dianggarkan sebesar Rp530.506.000,00 dengan realisasi keuangan sampai akhir 2025 Rp525.253.931,00 atau sudah mencapai sebesar 99,01% dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Dari penyediaan alat HRV dan kegiatan pendampingan psikologi bagi anak sekolah memberikan dampak yang positif bagi layanan kesehatan publik khususnya kesehatan jiwa di kalangan anak sekolah maupun masyarakat, selain itu dapat sebagai pencegahan awal terhadap kesehatan jiwa.



Gambar 5.18. Kegiatan Pendampingan Psikologi di Sekolah-Sekolah di Wilayah Kab.Sleman

n. Posbindu Disabilitas "SENTOSA" (Semua Penyandang Disabilitas Mendapatkan Pelayanan Terpadu, Holistik, Sehat, dan Aman)–UPT Puskesmas Sentolo I, Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun anggaran 2025 kegiatan Posbindu Sentosa dilakukan bersama di empat Kelompok Disabiltas Kalurahan (KDK) yaitu di KDK Santika Kaliagung, KDK Bersinar Sukereno, KDK Padimas Banguncipto, dan KDK Sakti Sentolo. Adapun jenis kegiatannya yaitu:

(1) Pelatihan Kader untuk empat Kalurahan di wilayah Kerja Puskesmas Sentolo dengan jumlah peserta 129 orang;
(2) Pengembangan Kapasitas KDK Kalurahan Sentolo dengan jumlah peserta 30 orang;

(3) Pengembangan Kapasitas KDK Kalurahan Banguncipto dengan jumlah peserta 30 orang;
(4) Pelatihan Ayam ternak Buras KDK Banguncipto dan KDK Sentolo dengan jumlah peserta 20 orang;
(5) Pelatihan Pembuatan Emping Melinjo Kalurahan Banguncipto dengan jumlah peserta 10 orang;
(6) Bantuan bibit ayam Buras bagi penyandang disabilitas Kalurahan Banguncipto dan Kalurahan Sentolo;
(7) Bantuan kambing bagi penyandang disabilitas Kalurahan Sukoreno;
(8) Penyediaan Alat Kesehatan Fisioterapi;
(9) Penyediaan makan tambahan yang mengandung protein hewani;
(10) Penambahan kelengkapan bangunan Dapur Mucuna Chip Posbindu Disabilitas Kalurahan Kaliagung.

Sampai dengan akhir tahun 2025 capaian pada kinerja fisik sudah mencapai 100% dengan serapan keuangan sebesar 99,78% atau sebesar Rp477.518.389,00 dari pagu sebesar Rp478.564.500,00. Keberhasilan kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Posbindu Sentosa ini telah menghasilkan nilai manfaat yang sangat baik bagi keluarga Disabilitas sehingga mendapat respon positif, serta meningkatnya rasa kepedulian terhadap keluarga Disabilitas bagi Kader Puskesmas Sentolo I yang terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan Posbindu Sentosa. Dengan adanya kegiatan Posbindu Sentosa dapat mengontrol dan menjaga Kesehatan secara optimal terhadap Keluarga Disabilitas.




Gambar 5.19. Penambahan kelengkapan Dapur Mucuna Chip Posbindu di Kalurahan Kaliagung



Gambar 5.20. Bantuan Kambing dan Kandang bagi Penyandang Disabilitas di Kalurahan Sukoreno

o. Posbindu Disabilitas ”CAHAYA DIFA”–UPT Puskesmas Sentolo II, Kabupaten Kulon Progo

Posbindu Cahaya DIFA berfokus pada pemberdayaan disabiltas di bidang ekonomi dan industri kecil. Pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp239.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp234.744.722,00 atau sebesar 98,10%. Sampai dengan akhir tahun pelaksanaan fisik sudah mencapai 100%. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Inovasi Posbindu Disabilitas Cahaya Difa antara lain:

(1) Pelatihan bagi Kader Kesehatan Posbindu Disabilitas dengan jumlah peserta 100 orang
(2) Pelayanan kesehatan bagi anggota disabilitas
(3) Pelatihan bagi penyandang disabilitas yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembuatan keripik tempe sagu dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang

(4) Pelatihan ternak ayam kampung dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang

Kegiatan pengembangan inovasi Posbindu Disabilitas Cahaya Difa telah memberikan dampak yang positif dan memberikan manfaat bagi penyandang Disabilitas, serta meningkatnya rasa kepedulian terhadap penyandang disabilitas, baik kader yang terlibat maupun seluruh pihak terkait. Dengan adanya beberapa bentuk pelatihan bagi penyandang disabilitas merupakan wujud kemandirian sehingga membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih berdaya.



Gambar 5.21. Pelatihan Pembuatan Kripik Tempe Sagu bagi Penyandang Disabilitas di Kalurahan Tuksono

p. Posbindu Disabilitas "ESTU MANDIRI"–Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo–Puskesmas Girimulyo I

Berdasarkan data di Kapanewon Girimulyo saat ini tercatat ada 267 penyandang Disabilitas yang tersebar di 4 Kalurahan yaitu 87 orang di Kalurahan Giripurwo, 83 orang di Kalurahan Pendoworejo, 49 orang di Kalurahan Jatimulyo, serta 48 orang di Kalurahan Purwosari. Puskesmas Girimulyo memiliki wilayah kerja antara lain Kalurahan Giripurwo dan Kalurahan Pendoworejo sehingga jumlah sasaran penyandang Disabilitas adalah 170 orang. Puskesmas Girimulyo I dibentuk pada tahun 2024 dengan kegiatan berada di Wisma Kleco. Kegiatan tersebut diikuti oleh 5 pendamping dengan tempat yang mempertimbangkan

kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menjangkau lokasi. Berkaca dari kondisi di atas pengembangan Inovasi Posbindu Estu Mandiri bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan penyandang disabilitas dalam mengatasi masalah kesehatan bagi penyandang disabilitas sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp99.967.000 dengan realisasi sebesar Rp90.534.500,00 atau sebesar 90,56% serta capaian fisik sampai dengan akhir tahun sudah mencapai 100%. Adapun kegiatan yang telah terlaksana di Tahun 2025 antara lain:

(1) Kegiatan Kelompok Posbindu Disabilitas Estu Mandiri sebanyak 4 kali;
(2) Pelatihan Kader pendamping Posbindu Estu Mandiri sebanyak 1 kali;
(3) Pelatihan Budidaya Lele Kolam terpal sebanyak 1 kali;
(4) Pelatihan Budidaya Jamur Tiram sebanyak 1 kali;
(5) Pertemuan evaluasi budidaya Lele kolam terpal sebanyak 1 kali; dan
(6) Pertemuan evaluasi Budidaya Jamur Tiram sebanyak 1 kali.



Gambar 5.22. Kegiatan-Kegiatan yang Dilaksanakan di Posbindu Estu Mandiri

Dampak adanya kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Posbindu Estu Mandiri antara lain memberikan manfaat nyata baik bagi penyandang disabiltas, keluarga, masyarakat, maupun pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian anggota kelompok disabiltas melalui pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Selain itu kegiatan Posbindu mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat keterlibatan lintas sektor dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga tercipta sinergi antara Puskesmas, pemerintah kalurahan, kader, keluarga, dan unsur terkait lainnya. Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi kesehatan, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Posbindu Estu Mandiri juga berperan penting dalam menjaga dan miningkatkan kesehatan fisik dan mental penyandang disabilitas di wilayah Kalurahan

Giripurwo sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif.

q. Posbindu Disabilitas "SINERGI BERDAYA"–Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo–Puskesmas Temon I

Inovasi Posbindu Sinergi Berdaya bermula dari ditemukannya penyandang disabilitas melalui kunjungan rumah dalam program Indonesiaa Sehat melalui pendekatan Keluarga (PIS-PK). Berdasarkan data Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) tahun 2019 < 30% penyandang disabilitas yang mengakses pelayanan kesehatan. Puskesmas telah menyediakan sarana pelayanan yang ramah disabilitas, namun faktor transportasi, pembiayaan dan perawatan khusus menjadi kendala penyandang disabilitas mengakses pelayanan kesehatan umum. Tujuan inovasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan penyandang disabilitas untuk mengatasi masalah kesehatan pada penyandang disabilitas sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal, penyandang disabilitas di wilayah kerja Puskesmas Temon I diharapkan dapat pelayanan terpadu dan holistik, memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas, serta disabilitas dapat mengembangkan potensi mereka, meningkatkan kepercayaan diri, dan berkontribusi lebih besar dalam masyarakat melalui pemberdayaan.

Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp119.575.800,00 dengan realisasi sebesar Rp113.298.719,00 atau sebesar 94,75% serta capaian fisik sampai dengan akhir tahun sudah mencapai 100%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2025 antara lain:

(1) Pemeriksaan kesehatan di 8 Kalurahan;
(2) Pelatihan Kader Kesehatan Disabilitas sebanyak 32 orang Kader; serta

(3) Pelatihan Budidaya Lele dan Penggerakan Bank Sampah.

Pengembangan kegiatan Posbindu Disabilitas Temon I dilakukanan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan penyandang Disabilitas melalui deteksi dini faktor penyakit tidak menular (PTM) dan pemantauan kesehatan secara berkala yang asksesibel dan ramah Disabilitas, memberdayakan penyandang Disabilitas melalui peningkatan keterampilan kewirausahaan di bidang budidaya lele dan pengelolaan bank sampah sebagai upaya kemandirian ekonomi dan pelestarian lingkungan.



Gambar 5.23. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pelatihan Kader



Gambar 5.24. Budidaya Lele dan Pengelolaan Bank Sampah

Dampak dari kegiatan Posbindu Disabilitas Sinergi Berdaya menghasilkan manfaat yang positif hal ini terutama bagi keluarga penyandang disabilitas sehingga mendapat respon positif, serta meningkatnya rasa kepedulian terhadap keluarga penyandang disabilitas. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian anggota kelompok disabiltas melalui pelayanan kesehatan yang

berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

r. Posbindu Disabilitas "CERIA"–Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo–Puskesmas Temon II

Melalui Dana Keistimewaan dalam rangka peningkatan pemenuhan hak disabilitas, serta meningkatkan derajat kesehatan baik fisik maupun mental bagi penyandang disabilitas dibentuklah Inovasi Posbindu Ceria. Tujuan Posbindu Ceria juga ingin meningkatkan kemandirian dan produktifitas bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan pengembangan inovasi pembuatan Batik Ceria.

Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp132.563.800,00 dengan realisasi sebesar Rp124.845.452,00 atau sebesar 94,18% serta capaian fisik sampai dengan akhir tahun sudah mencapai 100%. Sampai dengan akhir tahun 2025, kegiatan yang sudah terlaksana diantaranya terlaksananya pelayanan Kesehatan untuk para difabel, dan terlaksananya pelatihan membatik untuk para difabel dan keluarga pendamping.



Gambar 5.25. Kegiatan Pemeriksaaan Kesehatan dan Pelatihan Membatik

Dampak dari kegiatan Posbindu Disabilitas Ceria memberikan manfaat yang positif terutama bagi penyandang Disabilitas karena selain meningkatkan kualitas hidup dengan adanya pelayanan kesehatan serta meningkatkan kemandirian ekonomi bagi kelompok penyandang disabilitas dengan pelatihan pelatihan yang menambah keterampilan.

2) Database Sosial Ekonomi

Pada tahun 2025 Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik (SIPEDET CANTIK) dilaksanakan di 2 kabupaten yaitu di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan pendataan di 2025 setiap kabupaten memiliki target dan realisasi yang berbeda seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Rekapitulasi Pencacahan SIPEDET CANTIK DIY TA 2025

Tahun	Kabupaten	Target	Realisasi	%
2025	Bantul	321.040	259.861	80,94
2025	Kulon Progo	149.845	142.508	95,10
Jumlah		**440.984**	**402.369**	

Sumber: SIPEDET, Data Per 23 Desember 2025

a. SIPEDET CANTIK–Dinas Sosial Kabupaten Bantul

SIPEDET CANTIK merupakan program pendataan sosial ekonomi, melalui OPD Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Tujuan dilakukannya pendataan karena minimnya basis data terkait data sosial ekonomi masyarakat berbasis keluarga yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya di tingkat kalurahan. Pendataan ini kemudian dilakukan di 16 kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul.

Persebaran jumlah Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) disesuaikan dengan banyaknya penduduk yang ditinggal di wilayah setempat. rata-rata PPL akan mendata 150 hingga 200 Keluarga. Sedangkan PML akan melakukan pemeriksaan data pada hasil kerja pendataan yang berasal dari 6 PPL. Hasil pendataan sosial ekonomi di 16 kapanewon pada tahun 2025 mencakup empat kelompok indikator utama, yaitu indikator perumahan, indikator program dan layanan, indikator sosial ekonomi dan indikator kesejahteraan.

Pelaksanaan SIPEDET CANTIK di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 mencapai pendataan 80,94%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 79,60%. Sampai dengan akhir tahun 2025 juga berhasil menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat hingga level rumah tangga secara akurat dan terstruktur sehingga hasilnya lebih valid dan terintegrasi untuk mendukung perumusan kebijakan sosial serta penyusunan program Pembangunan yang berbasis bukti.



Gambar 5.26. Rapat Koordinasi dan Sosialisaasi SIPEDET CANTIK



Gambar 5.27. Sticker Pendataan SIPEDET CANTIK dan Pendukung Pendataan

b. SIPEDET CANTIK–Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

SIPEDET CANTIK merupakan program pendataan sosial ekonomi, melalui OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2025 telah melaksanakan pendataan Full Population di 10 Kapanewon, dengan capaian 142.508 Kepala Keluarga (KK) dari total 149.845 KK atau sebesar 95,10%.

3) Reformasi Kalurahan

Sebagai perwujudan visi Gubernur DIY yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, dengan melaksanakaan misi pertama dan ketiga yaitu Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan – Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya, penguatan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun 2023 tentang Refomasi Kalurahan.

Reformasi Kalurahan mendukung sasaran Pembangunan DIY tahun 2022-2027 yang meliputi: a) semakin kecilnya tingkat kemiskinan; b) penghidupan ekonomi yang layak; c) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan; dan d) Meningkatnya *Good Governance*. Tujuan Reformasi Kalurahan adalah terwujudnya kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya. Sasaran pelaksanaan Reformasi Kalurahan terdiri atas:

a. Terciptanya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja;
b. Terciptanya budaya pemerintahan dengan pamong kalurahan yang profesional; dan
c. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Tabel 5.3. Target Indikator Reformasi Kalurahan Tahun 2023-2027

Tujuan	Indikator	Baseline (2022)	Target				
			2023	2024	2025	2026	2027
Terwujudnya kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah Desa Mandiri	184	256	291	326	361	392
	Jumlah Desa Mandiri Budaya	25	30	35	40	45	45

Tujuan	Indikator	Baseline (2022)	Target				
			2023	2024	2025	2026	2027
yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakat	Jumlah Desa Swasembada	37	44	51	58	65	72

Reformasi Kalurahan kemudian diterjemahkan dalam dua pendekatan yakni: (1) Reformasi Birokrasi Kalurahan dan (2) Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Indikator Reformasi Kalurahan yaitu Jumlah Desa Mandiri; Jumlah Desa Mandiri Budaya; dan Jumlah Desa Swasembada.

Terdapat 16 kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan, yakni:

a. Penguatan pengelolaan data dan informasi kalurahan;
b. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan;
c. Penguatan digitalisasi kalurahan;
d. Penguatan pengelolaan keuangan kalurahan;
e. Penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan;
f. Penguatan pengelolaan aset kalurahan;
g. Penguatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
h. Penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinas Pemerintah Kalurahan;
i. Penguatan pengendalian gratifikasi;
j. Penguatan pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
k. Penguatan regulatif pemerintahan kalurahan;
l. Pengisian pamong kalurahan yang transparan, objectif, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
m. Penguatan Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan;
n. Penerapan budaya pemerintahan;
o. Pelaksanaan pelayanan publik prima; dan
p. Pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kalurahan.

Sementara itu, Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan pada transformasi keadaan atau hasil yang ingin dicapai di kalurahan, yaitu masyarakat kalurahan yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Terdapat 5 (lima) kegiatan utama Refomasi Pemberdayaan Masyarakat, yang mencakup:

a. Penguatan kegiatan penanganan stunting;
b. Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan;
c. Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan;
d. Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; dan
e. Penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.

Sebagai bagian dari pendanaan pelaksanaan Reformasi Kalurahan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Dana Kesitimewaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan. Bantuan ini merupakan bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan yang dimaksudkan sebagai pendanaan pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BKK Reformasi Kalurahan tahun 2025 telah sampai pada pengisian rencana aksi di 392 Kalurahan se-DIY sesuai dengan hasil asessmen awal dan pelaksanaan kegiatan utama. Tahun 2025 BKK Reformasi Kalurahan memiliki pagu anggaran sebesar

Rp39.100.000.000,00 dan telah tersalurkan kepada 391 kalurahan.



Gambar 5.28. Forum Komunikasi Reformasi Kalurahan Tingkat DIY



Gambar 5.29. Monev BKK Reformasi Kalurahan TA 2025

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Dalam pelaksanaan BKK Reformasi Kalurahan terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1) Terdapat urgensi untuk mengoptimalkan koordinasi internal antar perangkat kalurahan (khususnya antar pamong pengampu teknis kegiatan utama Reformasi Kalurahan) guna meningkatkan capaian fisik dan keuangan BKK Reformasi Kalurahan 2025 serta meminimalisasi ketidaksesuaian substansi kegiatan dengan petunjuk teknis, dan keterlambatan pengajuan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan 2025

2) Substansi dari usulan kegiatan BKK Reformasi Kalurahan dinilai belum mampu secara komprehensif mengakomodasi kebutuhan faktual kalurahan maupun rekomendasi hasil asesmen

2) Solusi

1) Meningkatkan koordinasi dengan semua kalurahan, Dinas PMK Kabupaten se-DIY dan dengan TAPD DIY terkait pengawalan terhadap proses pelaksanaan anggaran BKK DAIS REFKAL kedepannya.

2) Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan pada tahun 2026-2027 diharapkan dapat diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan maupun mendayagunakan potensi kalurahan untuk mengungkit pencapaian tujuan pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

C. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum

Kewenangan istimewa di urusan kebudayaan memegang peranan krusial dalam mengakselerasi visi pembangunan daerah, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Kebudayaan diposisikan sebagai pilar integral dalam seluruh sektor pembangunan, mulai dari ketahanan pangan dan ekonomi hingga implementasi nilai-nilai filosofis. Selaras dengan Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, tata kelola urusan ini difokuskan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi, program kegiatan urusan kebudayaan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengatasi isu-isu strategis di DIY melalui pendekatan yang komprehensif hingga ke akar persoalan.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Urusan kebudayaan terdiri dari 1 program, 10 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 624.949.813.899,00. Adapun pengampu urusan Kebudayaan sebanyak diampu 27 OPD Pemda DIY, 30 OPD Pemkab/Pemkot, 64 kapanewon, 14 kemantren, serta seluruh kalurahan di DIY. Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap Akhir pada urusan kebudayaan sebesar 99,84% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp 618.758.358.062,98 (setara 99,01% terhadap target satu tahun). Rincian realisasi keuangan dan fisik dijbarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kebudayaan TA 2025

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	624.949.813.899	618.758.358.062,98	99,01	99,84
	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	**441.936.341.446**	**437.939.218.959**	**99,10**	**99,92**
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	36.918.736.800	36.468.957.944	98,78	99,73
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	36.918.736.800	36.468.957.944	98,78	99,73
1.1.1	Pendidikan Berbasis Budaya	36.918.736.800	36.468.957.944	98,78	99,73
1.1.1.1	Pembinaan Muatan Lokal	33.146.725.800	32.913.714.950	99,30	100
1.1.1.2	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	1.302.500.000	1.289.167.762	98,98	100
1.1.1.3	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	2.469.511.000	2.266.075.232	91,76	95,92
2	DINAS KESEHATAN	101.379.400	101.379.400	100,00	100
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	101.379.400	101.379.400	100,00	100
2.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	101.379.400	101.379.400	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
2.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	101.379.400	101.379.400	100,00	100
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	10.334.502.650	10.330.468.457	99,96	100
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	10.334.502.650	10.330.468.457	99,96	100
3.1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4.662.290.000	4.661.818.937	99,99	100
3.1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.662.290.000	4.661.818.937	99,99	100
3.1.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.672.212.650	5.668.649.520	99,94	100
3.1.2.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	5.672.212.650	5.668.649.520	99,94	100
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.491.917.800	10.436.914.298	99,48	100
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	10.491.917.800	10.436.914.298	99,48	100
4.1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	203.800.000	194.875.000	95,62	100
4.1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	203.800.000	194.875.000	95,62	100
4.1.2	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	10.288.117.800	10.242.039.298	99,55	100
4.1.2.1	Pembinaan Jagawarga	2.613.437.600	2.578.738.362	98,67	100
4.1.2.2	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	7.674.680.200	7.663.300.936	99,85	100
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	469.445.700	464.126.300	98,87	100
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	469.445.700	464.126.300	98,87	100
5.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	469.445.700	464.126.300	98,87	100
5.1.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	469.445.700	464.126.300	98,87	100
6	DINAS SOSIAL	2.672.528.150	2.585.530.756	96,74	100
6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.672.528.150	2.585.530.756	96,74	100
6.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.672.528.150	2.585.530.756	96,74	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
6.1.1.1	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	2.672.528.150	2.585.530.756	96,74	100
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.276.973.800	2.175.401.862	95,54	100
7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.276.973.800	2.175.401.862	95,54	100
7.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.276.973.800	2.175.401.862	95,54	100
7.1.1.1	Pengembangan Ekonomi Perempuan	1.790.476.700	1.706.098.901	95,29	100
7.1.1.2	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	486.497.100	469.302.961	96,47	100
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	154.624.050	152.316.805	98,51	100
8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	154.624.050	152.316.805	98,51	100
8.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	126.320.250	125.019.890	98,97	100
8.1.1.1	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	126.320.250	125.019.890	98,97	100
8.1.2	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	28.303.800	27.296.915	96,44	100
8.1.2.1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	28.303.800	27.296.915	96,44	100
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.172.399.025	24.100.302.912	99,70	100
9.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.172.399.025	24.100.302.912	99,70	100
9.1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	23.678.785.025	23.619.298.897	99,75	100
9.1.1.1	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	23.678.785.025	23.619.298.897	99,75	100
9.1.2	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	493.614.000	481.004.015	97,45	100
9.1.2.1	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	493.614.000	481.004.015	97,45	100
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	36.714.985.963	35.482.631.355	96,64	100
10.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN	36.714.985.963	35.482.631.355	96,64	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
10.1.1	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	14.920.346.314	14.126.330.997	94,68	100
10.1.1.1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	14.920.346.314	14.126.330.997	94,68	100
10.1.2	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.540.868.615	1.473.818.673	95,65	100
10.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.540.868.615	1.473.818.673	95,65	100
10.1.3	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	11.973.664.548	11.800.515.793	98,55	100
10.1.3.1	Pengembangan Industri Kreatif	11.973.664.548	11.800.515.793	98,55	100
10.1.4	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	8.280.106.486	8.081.965.892	97,61	100
10.1.4.1	Pengembangan Kewirausahaan Desa	8.280.106.486	8.081.965.892	97,61	100
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	412.058.574	409.196.524	99,31	100
11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	412.058.574	409.196.524	99,31	100
11.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	412.058.574	409.196.524	99,31	100
11.1.1.1	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	412.058.574	409.196.524	99,31	100
12	DINAS KEBUDAYAAN	259.577.687.928	258.724.369.575	99,67	99,91
12.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	259.577.687.928	258.724.369.575	99,67	99,91
12.1.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	5.258.407.150	5.196.121.215	98,82	100
12.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1.026.631.600	1.010.551.051	98,43	100
12.1.1.2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	3.035.195.300	3.019.899.467	99,50	100
12.1.1.3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1.196.580.250	1.165.670.697	97,42	100
12.1.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	14.846.827.600	14.632.358.815	98,56	100
12.1.2.1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	7.614.277.200	7.444.316.024	97,77	100
12.1.2.2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.597.819.500	5.567.789.367	99,46	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
12.1.2.3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.634.730.900	1.620.253.424	99,11	100
12.1.3	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	2.493.501.428	2.446.726.011	98,12	100
12.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	665.961.700	627.715.224	94,26	100
12.1.3.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1.827.539.728	1.819.010.787	99,53	100
12.1.4	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	1.977.387.850	1.840.772.581	93,09	100
12.1.4.1	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	233.866.250	220.708.266	94,37	100
12.1.4.2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	201.387.100	193.159.321	95,91	100
12.1.4.3	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	1.542.134.500	1.426.904.994	92,53	100
12.1.5	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	235.001.563.900	234.608.390.953	99,83	99,90
12.1.5.1	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	8.516.934.000	8.342.836.303	97,96	97,22
12.1.5.2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	3.114.213.000	3.065.200.126	98,43	100
12.1.5.3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	392.152.400	392.152.400	100,00	100
12.1.5.4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	1.577.089.800	1.559.789.948	98,90	100
12.1.5.5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	3.681.285.000	3.631.148.000	98,64	100
12.1.5.6	Gelar Budaya Yogyakarta	3.287.697.500	3.243.380.952	98,65	100
12.1.5.7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1.000.595.000	996.295.089	99,57	100
12.1.5.8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	307.793.000	297.077.050	96,52	100
12.1.5.9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	658.372.000	643.115.372	97,68	100
12.1.5.10	Selendang Sutera	136.118.000	128.310.000	94,26	100
12.1.5.11	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	8.036.438.200	8.035.370.589	99,99	100
12.1.5.12	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	203.179.000.000	203.179.000.000	100,00	100
12.1.5.13	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.113.876.000	1.094.715.124	98,28	100
13	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	5.338.472.197	5.260.598.247	98,54	100
13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	5.338.472.197	5.260.598.247	98,54	100
13.1.1	Penguatan Museum Sonobudoyo	5.338.472.197	5.260.598.247	98,54	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
13.1.1.1	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	2.513.499.800	2.445.340.823	97,29	100
13.1.1.2	Pengembangan Museum Sonobudoyo	2.824.972.397	2.815.257.424	99,66	100
14	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	14.946.655.250	14.709.385.116	98,41	100
14.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	14.946.655.250	14.709.385.116	98,41	100
14.1.1	Pengelolaan Taman Budaya	14.946.655.250	14.709.385.116	98,41	100
14.1.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	14.946.655.250	14.709.385.116	98,41	100
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	3.200.445.510	3.186.214.999	99,56	100
15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.200.445.510	3.186.214.999	99,56	100
15.1.1	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	3.200.445.510	3.186.214.999	99,56	100
15.1.1.1	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	1.658.901.034	1.649.368.428	99,43	100
15.1.1.2	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1.541.544.476	1.536.846.571	99,70	100
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.217.230.700	2.167.016.626	97,74	100
16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.217.230.700	2.167.016.626	97,74	100
16.1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	154.945.000	154.743.990	99,87	100
16.1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	154.945.000	154.743.990	99,87	100
16.1.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	2.062.285.700	2.012.272.636	97,57	100
16.1.2.1	Pengembangan Budaya Bahari	2.062.285.700	2.012.272.636	97,57	100
17	DINAS PARIWISATA	10.116.625.050	9.947.736.417	98,33	100
17.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	10.116.625.050	9.947.736.417	98,33	100
17.1.1	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	387.368.600	386.691.585	99,83	100
17.1.1.1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	387.368.600	386.691.585	99,83	100
17.1.2	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	400.299.750	381.419.596	95,28	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
17.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	400.299.750	381.419.596	95,28	100
17.1.3	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	8.159.348.550	8.099.362.473	99,26	100
17.1.3.1	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	8.081.082.100	8.021.115.823	99,26	100
17.1.3.2	Pengembangan Industri Kreatif	78.266.450	78.246.650	99,97	100
17.1.4	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.169.608.150	1.080.262.763	92,36	100
17.1.4.1	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1.169.608.150	1.080.262.763	92,36	100
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.901.831.000	1.842.271.614	96,87	100
18.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.901.831.000	1.842.271.614	96,87	100
18.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.901.831.000	1.842.271.614	96,87	100
18.1.1.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	1.901.831.000	1.842.271.614	96,87	100
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.289.423.000	7.095.659.542	97,34	100
19.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	7.289.423.000	7.095.659.542	97,34	100
19.1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	425.000.000	393.757.404	92,65	100
19.1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	425.000.000	393.757.404	92,65	100
19.1.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	6.864.423.000	6.701.902.138	97,63	100
19.1.2.1	Pengembangan Industri Kreatif	6.864.423.000	6.701.902.138	97,63	100
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.892.267.400	3.855.046.361	99,04	100
20.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.892.267.400	3.855.046.361	99,04	100
20.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.892.267.400	3.855.046.361	99,04	100
20.1.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.422.877.400	2.398.049.731	98,98	100
20.1.1.2	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	1.469.390.000	1.456.996.630	99,16	100
21	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	692.462.400	679.022.710	98,06	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
21.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	692.462.400	679.022.710	98,06	100
21.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	692.462.400	679.022.710	98,06	100
21.1.1.1	Pengembangan Kewirausahaan Desa	692.462.400	679.022.710	98,06	100
22	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.294.041.000	1.274.277.094	98,47	100
22.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.294.041.000	1.274.277.094	98,47	100
22.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.294.041.000	1.274.277.094	98,47	100
22.1.1.1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1.294.041.000	1.274.277.094	98,47	100
23	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	646.436.400	645.080.400	99,79	100
23.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	646.436.400	645.080.400	99,79	100
23.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	646.436.400	645.080.400	99,79	100
23.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	646.436.400	645.080.400	99,79	100
24	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	98.890.000	93.349.286	94,40	100
24.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	98.890.000	93.349.286	94,40	100
24.1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	98.890.000	93.349.286	94,40	100
24.1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	98.890.000	93.349.286	94,40	100
25	BIRO TATA PEMERINTAHAN	470.442.000	461.815.658	98,17	100
25.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	470.442.000	461.815.658	98,17	100
25.1.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	470.442.000	461.815.658	98,17	100
25.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	470.442.000	461.815.658	98,17	100
26	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	3.516.758.699	3.499.263.693	99,50	100
26.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN	3.516.758.699	3.499.263.693	99,50	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
26.1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	326.256.299	326.211.034	99,99	100
26.1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	326.256.299	326.211.034	99,99	100
26.1.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	807.295.850	805.297.650	99,75	100
26.1.2.1	Pengembangan Industri Kreatif	807.295.850	805.297.650	99,75	100
26.1.3	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.383.206.550	2.367.755.009	99,35	100
26.1.3.1	Gelar Seni Budaya Daerah	2.383.206.550	2.367.755.009	99,35	100
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.017.121.000	1.790.885.008	88,78	100
27.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.017.121.000	1.790.885.008	88,78	100
27.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.017.121.000	1.790.885.008	88,78	100
27.1.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.017.121.000	1.790.885.008	88,78	100
	Kabupaten Bantul	**16.696.700.550**	**16.230.919.051**	**97,21**	**100**
1	KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2	KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3	KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
4	KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5	KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
6	KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
6.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
6.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
7	KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
7.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
7.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
7.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
8	KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
8.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
8.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
8.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9	KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
9.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10	KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11	KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12	KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13	KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
14	KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
14.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
14.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
14.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
15	KEPENAWON SEWON KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
15.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
15.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
15.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
16	KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
16.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
16.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
17	KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
17.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
17.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
17.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL	396.500.000	390.325.750	98,44	100
18.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	396.500.000	390.325.750	98,44	100
18.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	396.500.000	390.325.750	98,44	100
18.1.1.1	Pengembangan Budaya Bahari	396.500.000	390.325.750	98,44	100
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL	4.902.472.200	4.862.301.278	99,18	100
19.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.902.472.200	4.862.301.278	99,18	100
19.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4.902.472.200	4.862.301.278	99,18	100
19.1.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	4.902.472.200	4.862.301.278	99,18	100
20	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL	9.072.114.600	8.658.748.760	95,44	100
20.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	9.072.114.600	8.658.748.760	95,44	100
20.1.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	1.460.800.200	1.455.782.000	99,66	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
20.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	352.825.000	350.309.050	99,29	100
20.1.1.2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	741.931.000	741.301.000	99,92	100
20.1.1.3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	366.044.200	364.171.950	99,49	100
20.1.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.049.018.700	1.047.351.700	99,84	100
20.1.2.1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	486.279.700	485.529.700	99,85	100
20.1.2.2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	415.389.000	415.389.000	100,00	100
20.1.2.3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	147.350.000	146.433.000	99,38	100
20.1.3	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	6.562.295.700	6.155.615.060	93,80	100
20.1.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	180.107.000	169.207.000	93,95	100
20.1.3.2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	515.976.700	475.850.840	92,22	100
20.1.3.3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	280.153.500	269.660.700	96,25	100
20.1.3.4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	260.192.900	234.725.000	90,21	100
20.1.3.5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	380.033.900	233.495.000	61,44	100
20.1.3.6	Gelar Budaya Jogja	1.669.395.000	1.572.130.720	94,17	100
20.1.3.7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	78.000.000	77.973.300	99,97	100
20.1.3.8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	32.543.000	32.101.500	98,64	100
20.1.3.9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	339.459.700	313.032.000	92,21	100
20.1.3.10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.098.739.000	2.059.772.000	98,14	100
20.1.3.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	727.695.000	717.667.000	98,62	100
21	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL	399.516.250	399.516.250	100,00	100
21.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	399.516.250	399.516.250	100,00	100
21.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	399.516.250	399.516.250	100,00	100
21.1.1.1	Pengembangan Industri Kreatif	399.516.250	399.516.250	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL	170.000.000	169.743.363	99,85	100
22.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	170.000.000	169.743.363	99,85	100
22.1.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	170.000.000	169.743.363	99,85	100
22.1.1.1	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	170.000.000	169.743.363	99,85	100
23	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL	905.899.000	902.181.335	99,59	100
23.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	905.899.000	902.181.335	99,59	100
23.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	905.899.000	902.181.335	99,59	100
23.1.1.1	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	905.899.000	902.181.335	99,59	100
24	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL	240.898.500	240.126.315	99,68	100
24.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	240.898.500	240.126.315	99,68	100
24.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	240.898.500	240.126.315	99,68	100
24.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	240.898.500	240.126.315	99,68	100
25	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL	99.300.000	97.976.000	98,67	100
25.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	99.300.000	97.976.000	98,67	100
25.1.1	Pendidikan Berbasis Budaya	99.300.000	97.976.000	98,67	100
25.1.1.1	Pembinaan Muatan Lokal	99.300.000	97.976.000	98,67	100
	Kabupaten Sleman	**14.338.834.335**	**14.311.616.456**	**99,81**	**100**
1	KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
2	KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.999.750	100,00	100
2.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.999.750	100,00	100
2.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.750	100,00	100
2.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.750	100,00	100
3	KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.483.000	98,28	100
3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.483.000	98,28	100
3.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.483.000	98,28	100
3.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.483.000	98,28	100
4	KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.909.650	99,70	100
4.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.909.650	99,70	100
4.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.909.650	99,70	100
4.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.909.650	99,70	100
5	KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.839.500	99,47	100
5.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.839.500	99,47	100
5.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.839.500	99,47	100
5.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.839.500	99,47	100
6	KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.962.016	99,87	100
6.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.962.016	99,87	100
6.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.962.016	99,87	100
6.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.962.016	99,87	100
7	KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.999.996	100,00	100
7.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.999.996	100,00	100
7.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.996	100,00	100
7.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.996	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
8	KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.399.900	98,00	100
8.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.399.900	98,00	100
8.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.399.900	98,00	100
8.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.399.900	98,00	100
9	KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.977.225	99,92	100
9.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.977.225	99,92	100
9.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.977.225	99,92	100
9.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.977.225	99,92	100
10	KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.956.300	99,85	100
10.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.956.300	99,85	100
10.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.956.300	99,85	100
10.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.956.300	99,85	100
11	KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.962.750	99,88	100
11.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.962.750	99,88	100
11.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.962.750	99,88	100
11.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.962.750	99,88	100
12	KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.832.000	99,44	100
12.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.832.000	99,44	100
12.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.832.000	99,44	100
12.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.832.000	99,44	100
13	KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.933.700	99,78	100
13.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.933.700	99,78	100
13.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.933.700	99,78	100
13.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.933.700	99,78	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
14	KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.999.925	100,00	100
14.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.999.925	100,00	100
14.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.925	100,00	100
14.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.925	100,00	100
15	KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.976.225	99,92	100
15.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.976.225	99,92	100
15.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.976.225	99,92	100
15.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.976.225	99,92	100
16	KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.999.975	100,00	100
16.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.999.975	100,00	100
16.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.975	100,00	100
16.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.975	100,00	100
17	KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN	30.000.000	29.908.950	99,70	100
17.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.908.950	99,70	100
17.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.908.950	99,70	100
17.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.908.950	99,70	100
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN	6.050.720.000	6.049.491.000	99,98	100
18.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	6.050.720.000	6.049.491.000	99,98	100
18.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	6.050.720.000	6.049.491.000	99,98	100
18.1.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	6.050.720.000	6.049.491.000	99,98	100
19	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN	100.000.000	99.727.490	99,73	100
19.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000	99.727.490	99,73	100
19.1.1	Pendidikan Berbasis Budaya	100.000.000	99.727.490	99,73	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
19.1.1.1	Pembinaan Muatan Lokal	100.000.000	99.727.490	99,73	100
20	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN	7.250.640.410	7.226.920.366	99,67	100
20.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	7.250.640.410	7.226.920.366	99,67	100
20.1.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	792.638.200	790.894.449	99,78	100
20.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	219.994.050	219.359.885	99,71	100
20.1.1.2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	354.284.350	353.585.750	99,80	100
20.1.1.3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	218.359.800	217.948.814	99,81	100
20.1.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	590.850.010	588.059.698	99,53	100
20.1.2.1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	515.850.010	513.450.382	99,53	100
20.1.2.2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	75.000.000	74.609.316	99,48	100
20.1.3	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	313.703.700	310.431.796	98,96	100
20.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	313.703.700	310.431.796	98,96	100
20.1.4	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	5.553.448.500	5.537.534.423	99,71	100
20.1.4.1	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	125.748.925	123.525.260	98,23	100
20.1.4.2	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	334.138.000	332.463.350	99,50	100
20.1.4.3	Penghargaan Seniman dan Budayawan	170.727.500	169.257.000	99,14	100
20.1.4.4	Festival Kebudayaan Yogyakarta	449.853.000	444.677.977	98,85	100
20.1.4.5	Gelar Budaya Jogja	286.783.725	286.504.910	99,90	100
20.1.4.6	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	75.300.000	75.170.055	99,83	100
20.1.4.7	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	32.855.300	32.778.198	99,77	100
20.1.4.8	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	461.466.750	458.160.610	99,28	100
20.1.4.9	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.496.186.125	2.495.146.345	99,96	100
20.1.4.10	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.120.389.175	1.119.850.718	99,95	100
21	DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN	427.473.925	427.336.738	99,97	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
21.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	427.473.925	427.336.738	99,97	100
21.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi budaya	427.473.925	427.336.738	99,97	100
21.1.1.1	Pengembangan Industri Kreatif	427.473.925	427.336.738	99,97	100
	Kabupaten Kulon Progo	**34.850.298.294**	**34.137.940.702**	**97,96**	**98,07**
1	KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.620.877	98,74	100
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.620.877	98,74	100
1.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.620.877	98,74	100
1.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.620.877	98,74	100
2	KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.956.612	99,86	100
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.956.612	99,86	100
2.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.956.612	99,86	100
2.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.956.612	99,86	100
3	KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4	KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.996.523	99,99	100
4.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.996.523	99,99	100
4.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.996.523	99,99	100
4.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.996.523	99,99	100
5	KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.836.000	99,45	100
5.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.836.000	99,45	100
5.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.836.000	99,45	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
5.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.836.000	99,45	100
6	KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.996.158	99,99	100
6.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.996.158	99,99	100
6.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.996.158	99,99	100
6.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.996.158	99,99	100
7	KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.816.050	99,39	100
7.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.816.050	99,39	100
7.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.816.050	99,39	100
7.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.816.050	99,39	100
8	KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.968.380	99,89	100
8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.968.380	99,89	100
8.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.968.380	99,89	100
8.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.968.380	99,89	100
9	KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10	KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.983.999	99,95	100
10.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.983.999	99,95	100
10.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.983.999	99,95	100
10.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.983.999	99,95	100
11	KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.882.543	99,61	100
11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.882.543	99,61	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
11.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.882.543	99,61	100
11.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.882.543	99,61	100
12	KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	30.000.000	29.976.339	99,92	100
12.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.976.339	99,92	100
12.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.976.339	99,92	100
12.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.976.339	99,92	100
13	DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO	374.524.700	361.853.132	96,62	100
13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	374.524.700	361.853.132	96,62	100
13.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	374.524.700	361.853.132	96,62	100
13.1.1.1	Pengembangan Industri Kreatif	374.524.700	361.853.132	96,62	100
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO	859.350.405	858.829.748	99,94	100
14.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	859.350.405	858.829.748	99,94	100
14.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	859.350.405	858.829.748	99,94	100
14.1.1.1	Pengembangan Budaya Bahari	859.350.405	858.829.748	99,94	100
15	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO	1.657.668.610	1.563.754.668	94,33	100
15.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.657.668.610	1.563.754.668	94,33	100
15.1.1	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	236.910.658	232.316.253	98,06	100
15.1.1.1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	236.910.658	232.316.253	98,06	100
15.1.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.420.757.952	1.331.438.415	93,71	100
15.1.2.1	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	1.420.757.952	1.331.438.415	93,71	100
16	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO	14.361.078.100	14.262.293.807	99,31	100
16.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	14.361.078.100	14.262.293.807	99,31	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
16.1.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	1.168.136.400	1.165.079.955	99,74	100
16.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	217.536.000	217.416.636	99,95	100
16.1.1.2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	748.775.400	746.134.959	99,65	100
16.1.1.3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	201.825.000	201.528.360	99,85	100
16.1.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	367.851.500	367.401.377	99,88	100
16.1.2.1	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	367.851.500	367.401.377	99,88	100
16.1.3	Pengelolaan Taman Budaya	2.329.801.000	2.286.954.727	98,16	100
16.1.3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	2.329.801.000	2.286.954.727	98,16	100
16.1.4	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	318.439.800	311.677.313	97,88	100
16.1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	318.439.800	311.677.313	97,88	100
16.1.5	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	10.176.849.400	10.131.180.435	99,55	100
16.1.5.1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	650.199.500	650.084.881	99,98	100
16.1.5.2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	589.344.000	586.885.997	99,58	100
16.1.5.3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	750.000.000	737.772.203	98,37	100
16.1.5.4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	300.000.000	299.979.636	99,99	100
16.1.5.5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	449.879.200	449.696.754	99,96	100
16.1.5.6	Gelar Budaya Jogja	1.960.229.500	1.949.271.110	99,44	100
16.1.5.7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	130.057.500	128.063.952	98,47	100
16.1.5.8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	464.497.000	458.200.171	98,64	100
16.1.5.9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	970.606.200	967.432.961	99,67	100
16.1.5.10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	3.296.159.000	3.287.981.661	99,75	100
16.1.5.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	615.877.500	615.811.109	99,99	100
17	DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO	16.815.451.679	16.328.718.129	97,11	96
17.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	16.815.451.679	16.328.718.129	97,11	96

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
17.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	6.131.180.979	5.688.991.929	92,79	89,03
17.1.1.1	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	6.131.180.979	5.688.991.929	92,79	89,03
17.1.2	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	10.684.270.700	10.639.726.200	99,58	100
17.1.2.1	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	2.126.760.000	2.122.274.680	99,79	100
17.1.2.2	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1.099.500.000	1.097.710.900	99,84	100
17.1.2.3	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	7.458.010.700	7.419.740.620	99,49	100
18	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO	206.270.000	188.033.205	91,16	100
18.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	206.270.000	188.033.205	91,16	100
18.1.1	Pendidikan Berbasis Budaya	206.270.000	188.033.205	91,16	100
18.1.1.1	Pembinaan Muatan Lokal	206.270.000	188.033.205	91,16	100
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO	215.954.800	215.424.532	99,75	100
19.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	215.954.800	215.424.532	99,75	100
19.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	215.954.800	215.424.532	99,75	100
19.1.1.1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	215.954.800	215.424.532	99,75	100
	Kabupaten Gunungkidul	16.000.502.074	15.799.473.086	98,74	100
1	KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
1.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2	KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
2.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3	KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4	KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5	KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
6	KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	29.999.605	100,00	100
6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.999.605	100,00	100
6.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.605	100,00	100
6.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.605	100,00	100
7	KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	29.999.869	100,00	100
7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.999.869	100,00	100
7.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.869	100,00	100
7.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.869	100,00	100
8	KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	29.999.844	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.999.844	100,00	100
8.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.844	100,00	100
8.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.844	100,00	100
9	KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10	KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	29.999.856	100,00	100
10.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.999.856	100,00	100
10.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.856	100,00	100
10.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.856	100,00	100
11	KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12	KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13	KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	29.999.855	100,00	100
13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.999.855	100,00	100
13.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.855	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
13.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.855	100,00	100
14	KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	29.981.092	99,94	100
14.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.981.092	99,94	100
14.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.981.092	99,94	100
14.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.981.092	99,94	100
15	KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	29.999.998	100,00	100
15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.999.998	100,00	100
15.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.999.998	100,00	100
15.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.998	100,00	100
16	KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
16.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
16.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
17	KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
17.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
17.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
17.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
18	KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	30.000.000	30.000.000	100,00	100
18.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
18.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
18.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL	97.265.000	91.713.104	94,29	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
19.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	97.265.000	91.713.104	94,29	100
19.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	97.265.000	91.713.104	94,29	100
19.1.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	97.265.000	91.713.104	94,29	100
20	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	192.740.000	192.513.294	99,88	100
20.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	192.740.000	192.513.294	99,88	100
20.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	192.740.000	192.513.294	99,88	100
20.1.1.1	Pengembangan Industri Kreatif	192.740.000	192.513.294	99,88	100
21	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	94.095.100	94.039.874	99,94	100
21.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	94.095.100	94.039.874	99,94	100
21.1.1	Pendidikan Berbasis Budaya	94.095.100	94.039.874	99,94	100
21.1.1.1	Pembinaan Muatan Lokal	94.095.100	94.039.874	99,94	100
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	400.000.000	390.072.713	97,52	100
22.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	400.000.000	390.072.713	97,52	100
22.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	400.000.000	390.072.713	97,52	100
22.1.1.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	400.000.000	390.072.713	97,52	100
23	DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	1.182.240.000	1.181.308.288	99,92	100
23.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.182.240.000	1.181.308.288	99,92	100
23.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.182.240.000	1.181.308.288	99,92	100
23.1.1.1	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	899.000.000	898.999.925	100,00	100
23.1.1.2	Pengembangan Industri Kreatif	283.240.000	282.308.363	99,67	100
24	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	13.494.161.974	13.309.845.694	98,63	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
24.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	13.494.161.974	13.309.845.694	98,63	100
24.1.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	1.040.746.100	1.029.332.987	98,90	100
24.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	168.163.500	167.978.772	99,89	100
24.1.1.2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	605.694.600	594.471.461	98,15	100
24.1.1.3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	266.888.000	266.882.754	100,00	100
24.1.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	583.076.000	582.953.590	99,98	100
24.1.2.1	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	583.076.000	582.953.590	99,98	100
24.1.3	Pengelolaan Taman Budaya	2.915.521.800	2.766.266.855	94,88	100
24.1.3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	2.915.521.800	2.766.266.855	94,88	100
24.1.4	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	8.954.818.074	8.931.292.262	99,74	100
24.1.4.1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	495.762.500	495.388.295	99,92	100
24.1.4.2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	244.050.000	243.975.018	99,97	100
24.1.4.3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	305.405.000	300.825.734	98,50	100
24.1.4.4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	291.850.000	291.805.425	99,98	100
24.1.4.5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	443.890.000	443.784.813	99,98	100
24.1.4.6	Gelar Budaya Jogja	3.303.315.000	3.289.967.708	99,60	100
24.1.4.7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	78.610.000	77.909.726	99,11	100
24.1.4.8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	156.972.000	154.697.333	98,55	100
24.1.4.9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1.442.806.000	1.440.948.233	99,87	100
24.1.4.10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	485.352.574	485.309.491	99,99	100
24.1.4.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.706.805.000	1.706.680.486	99,99	100
	Kota Yogyakarta	**32.993.261.600**	**32.742.315.693**	**99,24**	**100**
1	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA YOGYAKARTA	15.587.440.000	15.579.522.616	99,95	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	15.587.440.000	15.579.522.616	99,95	100
1.1.1	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	9.090.440.000	9.087.484.081	99,97	100
1.1.1.1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	9.090.440.000	9.087.484.081	99,97	100
1.1.2	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	6.497.000.000	6.492.038.535	99,92	100
1.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	6.497.000.000	6.492.038.535	99,92	100
2	KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
2.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3	KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4	KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
4.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5	KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
5.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
6	KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
6.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
6.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
6.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
7	KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
7.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
7.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
8	KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
8.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
8.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
8.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9	KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
9.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10	KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
10.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11	KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
11.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12	KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
12.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
12.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13	KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
13.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
14	KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
14.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
14.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
14.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
15	KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA	30.000.000	30.000.000	100,00	100
15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100,00	100
15.1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100,00	100
15.1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	100,00	100
16	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA KOTA YOGYAKARTA	1.100.000.000	1.063.999.109	96,73	100
16.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.100.000.000	1.063.999.109	96,73	100
16.1.1	Pengelolaan Taman Budaya	1.100.000.000	1.063.999.109	96,73	100
16.1.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	1.100.000.000	1.063.999.109	96,73	100
17	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA	99.813.600	97.788.640	97,97	100
17.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	99.813.600	97.788.640	97,97	100
17.1.1	Pendidikan Berbasis Budaya	99.813.600	97.788.640	97,97	100
17.1.1.1	Pembinaan Muatan Lokal	99.813.600	97.788.640	97,97	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
18	DINAS PERTANIAN DAN PANAN KOTA YOGYAKARTA	300.000.000	288.600.000	96,20	100
18.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	300.000.000	288.600.000	96,20	100
18.1.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	300.000.000	288.600.000	96,20	100
18.1.1.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	300.000.000	288.600.000	96,20	100
19	DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA	15.486.008.000	15.292.405.328	98,75	100
19.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	15.486.008.000	15.292.405.328	98,75	100
19.1.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	2.382.082.000	2.370.110.344	99,50	100
19.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	897.382.000	890.851.114	99,27	100
19.1.1.2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	984.700.000	983.197.986	99,85	100
19.1.1.3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	500.000.000	496.061.244	99,21	100
19.1.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.511.622.000	2.453.418.525	97,68	100
19.1.2.1	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.511.622.000	2.453.418.525	97,68	100
19.1.3	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	10.592.304.000	10.468.876.459	98,83	100
19.1.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.000.000.000	994.389.997	99,44	100
19.1.3.2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	390.400.000	388.310.000	99,46	100
19.1.3.3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	272.500.000	221.070.000	81,13	100
19.1.3.4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	350.000.000	345.959.990	98,85	100
19.1.3.5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	498.000.000	493.143.991	99,02	100
19.1.3.6	Gelar Budaya Jogja	4.511.025.000	4.469.763.038	99,09	100
19.1.3.7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	446.000.000	441.613.496	99,02	100
19.1.3.8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	474.400.000	470.749.500	99,23	100
19.1.3.9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1.099.979.000	1.099.894.647	99,99	100
19.1.3.10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	1.550.000.000	1.543.981.800	99,61	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
Jumlah		**556.815.938.299**	**551.161.483.947**	**98,98**	**99,86**
	Pemerintah Kalurahan/Kelurahan	**68.133.875.600**	**67.596.874.116**	**99,21**	**99,99**

Sumber : Paniradya Kaistimewan, 2026

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan antara lain:

1) Jogja Heritage Track (JHT)

Penetapan Yogyakarta sebagai warisan dunia bertujuan untuk melestarikan nilai luhur yang dapat diwariskan kepada Masyarakat Yogyakarta, bangsa Indonesia dan dunia. Yogyakarta memenuhi kriteria Warisan Budaya Dunia (*World Hertiage*) yang ditetapkan oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Yogyakarta memiliki kekhasan serta keistimewaan dalam penataan kota yang didasari sumbu filosofi Keraton Yogyakarta, yakni Tugu Golong Gilig/Pal Putih–Keraton–Panggung Krapyak. Untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia dan menguatkannya sebagai salah satu warisan budaya dunia yang diakui UNESCO, perlu dilaksanakan beberapa kegiatan berupa sosialisasi untuk memperkenalkan kawasan sumbu filosofi tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu kegiatan sosialisasi tersebut berupa penyelenggaraan *Jogja Heritage Track* (JHT) berupa fasilitasi bus *Jogja Heritage Track* yang bisa digunakan seluruh masyarakat untuk mengenal lebih dekat tentang Sumbu Filosofi.

Dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp582.870.000,00, telah terealisasi fisik 100% atau sebanyak 1.330 *trip* dengan enam jenis rute antara lain sebagai berikut:

a. Sangkaning Paraning Dumadi

Rute ini memiliki makna perjalanan siklus hidup manusia berdasarkan konsepsi Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan

berarti asal-usul, Paraning yaitu arah tujuan, dan Dumadi dapat diartikan penciptaan (kehidupan). Rute ini mengantarkan peserta berkeliling mengunjungi Tugu Jogja–Jl Margo Utomo–Jl. Malioboro–Selanjutnya menuju *stop point* Mueseum Sonobudoyo. Setelah itu menyusuri kembali melewati Benteng Baluwarti Kraton yaitu Jokteng Lor–Jokteng Kulon–Krapyak dan melewati Plengkung Nirbaya.

b. Paraning Dumadi

Rute ini memiliki arti tentang perjalanan arah tujuan kehdupan manusia. Rutenya Paraning Dumadi mengajak peserta untuk berkelling menyusuri Tugu Jogja–Jl. Margo Utomo–Jl. Malioboro–*Stop poin*t di Museum Sonobudoyo dilanjutkan melewati Pathuk dan berakhir di *Meeting Point*.

c. Sangkaning Dumadi

Rute ini memiliki makna asal penciptaan kehidupan. Dimulai dari *Meeting Point*–Jokteng Lor–Jokteng Kulon–*Stop Point* Panggung Krapyak–Plengung Nirbaya–Jokteng Kulon–Wirobrajan–*Meeting Point*.

d. Colonial Heritage

Rute ini mengenai peninggalan warisan budaya benda di Yogyakarta, melalui cerita dari peninggalan bangunan kolonial tersebut. Dimulai dari *Meeting Point*–Pasar Kranggan–Tugu Jogja–Stasiun Tugu–Jl. Malioboro–*Stop Point* di Teras Malioboro 1–Gereja Katolik FX Kidul Loji–Sayidan–Bintaran–Gereja Katolik Santo Yusuf–Museum Sasmitaloka–Stasiun Lempuyangan–Kotabaru–dan berakhir di *Meeting Point*.

e. The Legacy

Rute ini menjelaskan sebagian kecil *Legacy* Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa kita temukan hingga saat in. Dimulai dari warisan budaya di Kraton Surakarta, Kraton

Yogyakarta, Kadipaten Mangunegaran dan Kadipaten Pakualaman. *Trip* rute ini dimulai dari *Meeting Point*–Jokteng Lor–Jokteng Kulon–Plengkung Nirbaya–Jokteng Wetan–Jokteng Lor Wetan (Tanjung Anom), *Stop Point* di Mueseum Sonobudoyo–berakhir di *Meeting Point*.

Jogja Culinary

Rute ini menjelaskan berbagai cerita mengenai kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimulai dari kuliner kersanan dalem, kuliner lokal, dan kuliner akulturasi. Rute dimulai dari *Meeting point*–SMKN 2 Yogyakarta–Tugu Yogyakarta–*Stop Point* Teras Malioboro 1–Wijilan–Jl. Mataram–Masjid Syuhada–Tugu–Berakhir di *Meeting Point*.

Adapun jadwal *Trip Bus Jogja Heritage Track* adalah di hari Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dalam satu hari dibagi menjadi 3 *Trip* dengan 1 *Trip* sebanyak 2 Bus.



Gambar 5.30. Trip Pelayanan *Jogja Heritage Track*

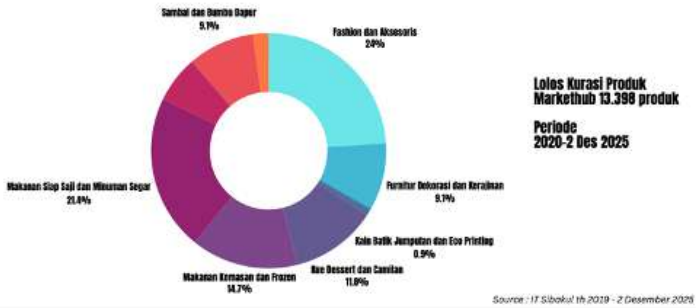
Dampak dari pelayanan *Jogja Heritage Track* yaitu meningkatkan pemahaman budaya dan sejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta secara mendlam bagi wisatawa, memberikan pengalaman wisata yang praktis dan terpadu dengan pemandu (*educator)*, serta diharapkan mendorong pertumbuhan pariwisata DIY dengan mengenalkan nilai wairsan dunian UNESCO secara lebih luas. Wisatawan merasa terpuaskan dengan informasi edukatif dan rute ikonik, sementara tujuan pelestarian warisan budaya juga tercapai melalui program ini.

2) SiBakul Jogja

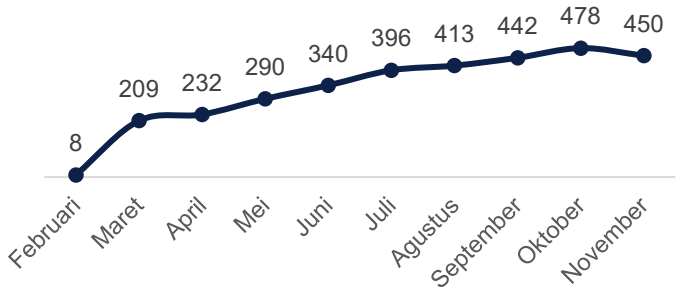
SiBakul Jogja merupakan akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UKM DIY. Program ini merupakan bentuk digitalisasi model pembinaan sirkular dari Dinas Koperasi dan UKM bagi pelaku Koperasi dan UMKM di DIY. Kegiatan yang disajikan meliputi Pendataan dan Klastering, Penumbuhan Koperasi dan UKM, Pelatihan, Pembinaan, Fasilitasi, Konsultasi dan Pendampingan. SiBakul Jogja juga menyediakan layanan yang ditujukan oleh UKM yang sudah menjadi mitra SiBakul untuk mendukung terkait pemasaran *online* dengan fasilitas bebas biaya pengiriman. SiBakul *Markethub Free* Ongkir adalah program untuk membantu UMKM Jogja dengan memfasilitasi promosi gratis ongkos kirim, terutama melalui ekspedisi mitra seperti Grab dan Jogjakita, bertujuan mendorong UMKM *Go Digital*, meningkatkan penjualan, dan memudahkan pembeli mendapatkan produk lokal dengan lebih hemat.

Program ini merupakan inovasi pemasaran daring yang relevan di era digital, membantu UMKM berkembang di platform *e-commerce* dengan dukungan dan sistem yang terintegrasi. Adapun ketentuan *Markethub* SiBakul Jogja tahun 2025 antara lain:

a. Isi Paket kiriman adalah produk yang lolos kurasi
b. Jumlah belanja Rp50.000,-
c. Maksimal subsidi Rp40.000,-
d. Upload bukti transfer. Bukti transfer tidak kurang dari H-7
e. Nominal pada bukti sesuai dengan angka yang dituliskan pada saat mengisi form layanan



Gambar 5.31. Persentase Jenis Produk UMKM SiBakul Lolos Kurasi Markethub 2025



Gambar 5.32. Jumlah UMKM yang Memanfaatkan Program *Markethub Free* Ongkir Tahun 2025

Bebas ongkir UMKM sampai dengan akhir tahun 2025 sudah mengcover sebanyak 81.325 kiriman atau setara dengan Rp2.327.158.348,00 dari target 60.300 kiriman dan total omzet UMKM sebesar Rp19.564.270.861,00, artinya untuk capaian fisiknya sudah melebihi dari yang ditargetkan. Adapun dampak positif dengan adanya bebas ongkir bagi UMKM antara lain:

a. Peningkatan Penjualan dan Daya Saing

Fasilitasi gratis ongkir menghilangkan hambatan biaya kirim yang seringkali dikeluhkan konsumen, terutama untuk pengiriman jarak jauh atau produk dengan margin kecil. Hal ini secara langsung meningkatkan volume transaski dan daya saing produk UMKM dibandingkan produk dari luar daerah.

b. Perluasaan jangkauan pasar

Layanan ini mencakup pengiriman domestic hingga internasional, memungkinkan UMKM menjangkau pembeli di luar wilayah geografis mereka tanpa membebani pelanggan dengan biaya logistik yang tinggi.

c. Inkubasi dan Digitalisasi Bisnis

SiBakul berfungsi sebagai incubator bisnis digital. melalui fitur *markethub* bebas ongkir, pelaku UMKM dilatih untuk terbiasa dengan ekosistem *e-commerce*, mulai dari manajemen stok hingga proses pengiriman daring.

d. Pendampingan Usaha dan Evaluasi

UMKM yang tergabung dalam skema bebas ongkir tidak hanya mendapatkan subsidi logistik, tetapi juga mendapatkan pendampingan gratis dan akses data yang memudahkan pelaku usaha melakukan rekapitulasi penjualan secara digital.

e. Dampak ekonomi lokal yang inklusif

Program ini juga memberikan dampak sosial–ekonomi yang lebih luas, seperti:

(1) Pemberdayaan Mitra Logistik Lokal: Bekerja sama dengan penyedia jasa kurir lokal, termasuk inisiatif seperti Difabike (ojek difabel) sebagai mitra pengiriman.
(2) Penguatan ekonomi "*bakulan*": Menghidupkan kembali perputaran uang di tingkat pedagang kecil di Yogyakarta melalui pemanfaatan Dais.

3) Pemberian Beasiswa Kartu Cerdas, Beasiswa Retrieval, dan Beasiswa Inklusi

Pendidikan berbasis budaya dimaknai sebagai pendidikan tentang budaya, pendidikan melalui pembudayaan, serta pendidikan dalam lingkungan budaya yang menempatkan

budaya tidak hanya sebagai muatan pembelajaran, tetapi juga sebagai metode dan konteks dalam pengelolaan pendidikan. Nilai-nilai budaya diharapkan dapat mewarnai dan memperkuat seluruh aspek pendidikan mulai dari *input*, proses, hingga *output* dan *outcome* pendidikan, termasuk dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pendukung pendidikan. Sehubungan dengan belum optimalnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai budaya oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sekaligus berpotensi memengaruhi keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu maka pengelolaan beasiswa pendidikan menengah, seperti Beasiswa Kartu Cerdas, Beasiswa Retrieval, dan Beasiswa Inklusi, menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan berbasis budaya di DIY. Pengelolaan beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pembiayaan pendidikan, tetapi juga sebagai instrument strategis untuk memastikan peserta didik tetap dapat mengikuti proses pendidikan secara utuh dan berkesinambungan secara optimal.

a. Beasiswa Kartu Cerdas

(1) Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMA

Tujuan dari pemberian beasiswa ini adalah untuk membantu menjamin keberlangsungan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan tanpa terkendala masalah biaya. Beasiswa ini diperuntukkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas. Penyaluran beasiswa Kartu Cerdas SMA tahun 2025 melalui 2 Tahap. Tahap I dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dan Tahap II dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 dengan sasaran sebanyak 5.200 peserta didik. Setiap peserta didik menerima bantuan beasiswa sebesar Rp1.500.000,00. Total anggaran yang disalurkan untuk beasiswa Kartu Cerdas jenjang SMA tahun 2025 adalah sebesar Rp7.800.000.000,00.

Penyaluran bantuan dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan biaya personal pendidikan peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Dengan adanya program Beasiswa Pendidikan Menengah dapat memberikan manfaat/dampak dalam kemudahan akses dan layanan pendidikan menengah bagi seserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Melalui program ini, peserta didik memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan tanpa terkendala keterbatasan biaya. Selain daripada itu, program beasiswa ini memberikan dampak yang positif dalam pengembangan potensi dan prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik.



Gambar 5.33. Sosialisasi dan Penyerahan Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMA

(2) Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMK

Tujuan beasiswa Kartu Cerdas jenjang SMK memiliki peruntukan yang sama dengan SMA. Kartu cerdas sebagai instrument kebijakan untuk mendukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah sekaligus menekan angka putus sekolah. Beasiswa Kartu Cerdas juga memiliki keterkaitan langsung dengan

Upaya pengentasan kemiskinan daerah, dimana pendidikan diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sasaran pemberian bantuan beasiswa jenjang SMK tahun 2025 total sebanyak 10.000 siswa yang tersebar di 5 Kabupaten /Kota di DIY. Setiap peserta didik menerima bantuan sebesar Rp1.500.000,00 per orang siswa. Total dana yang disalurkan untuk Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMK Tahun 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00.



Gambar 5.34. Kegaitan Sosialisasi dan Kartu Cerdas Jenjang SMK

Melalui program ini, peserta didik memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan tanpa terkendala keterbatasan biaya. Selain daripada itu, program beasiswa ini memberikan dampak yang positif dalam pengembangan potensi dan prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik.

b. Beasiswa Retrieval

Beasiswa Retrieval adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda DIY yang ditujukan bagi peserta didik jenjang pendidikan menengah yang sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, kemudian kembali mengikuti pendidikan formal. Program ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik agar dapat kembali mengikuti proses pembelajaran secara optimal tanpa

terkendala permasalahan biaya. Beasiswa Retrieval diberikan sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan biaya personal pendidikan dan biaya pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses kembali bersekolah. Pelaksanaan Beasiswa Retrieval dilakukan melalui mekanisme pendataan, verifikai, penetapan, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya Pemda DIY dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan menengah.

(1) Beasiswa Retrieval Jenjang SMA

Penyaluran Beasiswa Retrieval Jenjang SMA tahun 2025 dilakukan melalui dua Tahap. Tahap I dilaksanakan di bulan April dan Tahap II dilaksanakan di bulan Desember dengan sasaran sebanyak 100 peserta didik. Setiap peserta didik menerima bantuan beasiswa sebesar Rp3.000.000,00 dengan total anggaran yang disalurkan sebesar Rp300.000.000. Penyaluran bantuan dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan biaya personal pendidikan peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.



Gambar 5.35. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Beasiswa Retrieval SMA

Dampak dari adanya program beasiswa retrieval jenjang SMA ini, peserta didik memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan tanpa

terkendala keterbatasan biaya. Selain itu, dampak positif lainnya yakni dalam pengembangan potensi dan prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik. Dengan terpenuhinya kebutuhan biaya personal pendidikan, peserta didik diharapkan dapat lebih fokus dalam belajar, meningkatkan motivasi, serta mengembangkan bakat dan kemampuan secara optimal.

(2) Beasiswa Retrieval Jenjang SMK

Penyaluran Beasiswa Retrieval Jenjang SMK tahun 2025 dengan sasaran sebanyak 125 peserta didik. Setiap peserta didik menerima bantuan beasiswa sebesar Rp3.000.000,00 dengan total anggaran yang disalurkan sebesar Rp375.000.000. Penyaluran bantuan dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan biaya personal pendidikan peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.



Gambar 5.36. Kegiatan Sosialisasi Retrieval dan Pendataan Beasiswa Retrieval SMK

Dampak dari dari adanya program beasiswa retrieval jenjang SMK ini, peserta didik memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan tanpa terkendala keterbatasan biaya. Selain itu, dampak positif lainnya yakni dalam pengembangan potensi dan prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik. Dengan terpenuhinya kebutuhan biaya

personal pendidikan, peserta didik diharapkan dapat lebih fokus dalam belajar, meningkatkan motivasi, serta mengembangkan bakat dan kemampuan secara optimal.

(3) Beasiswa Inklusi

Dalam implementasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibangun kesadaran bersama seluruh pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya OPD yang secara teknis membidangi pendidikan untuk menyelanggarakan pendidikan yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus dan non diskriminasi. Salah satu bentuk pendidikan tersebut adalah dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada masing-masing sekolah umum, sehingga diharapkan sekolah tidak ada alasan untuk menolak calon siswa berkebutuhan khusus untuk menolak calon siswa berkebutuhan khusus untuk dapat masuk di sekolah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Pemda DIY melalui Dais memberikan Beasiswa Inklusi yang diampu oleh OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan maksud memberikan bantuan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di wilayah DIY.

Adapun tujuan dari program pemberian Beasiswa Inklusi antara lain:

a) Penyaluran, pemerataan dan pemanfaatan beasiswa inklusi ini diharapkan bisa tepat sasaran bagi penyandang disabilitas; dan
b) Mewujudkan sinergitas langkah antara Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dalam melakukan

penyaluran, pemanfaatan beasiswa dan pengawasan bantuan.

Sasaran penerima Beasiswa Inklusi adalah siswa ABK yang berada di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di sekolah inklusi di wilayah DIY dengan total penerima beasiswa sebanyak 765 siswa, dengan rincian 467 siswa SD, 231 siswa SMP, dan 84 siswa SMA. Sampai dengan tahun 2025 sudah terealisasi sebesar Rp470.000.000,00 atau sebesar 100% dengan capaian fisik 100% yaitu tersalurkan pada 467 siswa. Dampak atau manfaat dengan adanya bantuan beasiswa Inklusi ini terpenuhinya kebutuhan personal peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi di wilayah DIY.



Gambar 5.37. Penyerahan Bantuan Beasiswa Inklusi pada Siswa SD

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Realisasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan yaitu Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta tidak mencapai target maksimal akibat adanya ketidaksamaan jumlah calon mahasiswa yang dinyatakan lolos dengan jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang pada tahap penerimaan mahasiswa baru; Pencapaian target pelaksanaan proyek revitalisasi lanjutan Amphitheater Kiskenda mengalami kendala signifikansi akibat hambatan prosedural dalam penerbitan

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh Kantor ATR/BPN Kulon Progo, yang memerlukan proses pengukuran ulang serta penerbitan sertifikat baru sehingga tidak dapat terakomodasi dalam sisa waktu periode anggaran yang tersedia.

2) Solusi

Identifikasi Kendala bagi perbaikan perencanaan mendatang dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan sumber daya, masalah teknis, atau perubahan yang terjadi.

D. URUSAN PERTANAHAN

1. Kondisi Umum

Kewenangan istimewa di bidang pertanahan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan serta pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan mandat Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, ruang lingkup urusan ini meliputi penatausahaan, pengelolaan, perizinan tanah desa, hingga fasilitasi sistem informasi pertanahan. Melalui penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang sistematis, Pemerintah Daerah berupaya memperkuat kepastian hukum dan tata kelola pertanahan yang akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam melestarikan nilai-nilai keistimewaan DIY melalui pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tepat guna.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pertanahan terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 9 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp 50.729.575.746,00. Urusan

Pertanahan diampu oleh 5 OPD Pemda DIY dan 8 OPD Pemkab/Pemkot, dan 40 Kalurahan pengampu BKK Pertanahan. Persentase realisasi fisik urusan pertanahan sampai dengan tahap akhir telah mencapai 95,04% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar Rp 47.501.544.929,22 atau sebesar 93,64%. Rincian realisasi keuangan dan fisik dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2025

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	**50.729.575.746**	**47.501.544.930**	**93,64%**	**95,04%**
	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	**11.377.123.100**	**11.287.006.439**	**99,21**	**99,68%**
1	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**	**10.558.519.200**	**10.481.805.238**	**99,27**	**99,65**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	10.558.519.200	10.481.805.238	99,27	100
1.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipatenn*	*8.725.225.300*	*8.672.545.222*	*99,40*	*100*
1.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	912.826.900	899.216.582	98,51	100
1.1.1.2	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	27.114.000	27.114.000	100,00	100
1.1.1.3	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	438.364.000	416.068.605	94,91	100
1.1.1.4	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	97.695.100	86.169.106	88,20	100
1.1.1.5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	133.873.500	129.171.779	96,49	100
1.1.1.6	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	7.115.351.800	7.114.805.150	99,99	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
1.1.2	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*1.802.843.900*	*1.778.810.016*	*98,67*	*100*
1.1.2.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.429.917.800	1.420.904.116	99,37	100
1.1.2.2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	372.926.100	357.905.900	95,97	100
1.1.3	*Sarana dan Prasarana Keistimewaan*	*30.450.000*	*30.450.000*	*100,00*	*100*
1.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	30.450.000	30.450.000	100,00	100
2	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**284.997.000**	**284.977.000**	**99,99**	**100**
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	284.997.000	284.977.000	99,99	100
2.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*284.997.000*	*284.977.000*	*99,99*	*100*
2.1.1.1	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	284.997.000	284.977.000	99,99	100
3	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**124.245.000**	**124.244.300**	**100,00**	**100**
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	124.245.000	124.244.300	100,00	100
3.1.1	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*124.245.000*	*124.244.300*	*100,00*	*100*
3.1.1.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	124.245.000	124.244.300	100,00	100
4	**BIRO TATA PEMERINTAHAN**	**311.624.600**	**301.573.702**	**96,77**	**100**
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN	311.624.600	301.573.702	96,77	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				
4.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*311.624.600*	*301.573.702*	*96,77*	*100*
4.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	311.624.600	301.573.702	96,77	100
5	**BIRO HUKUM**	**97.737.300**	**94.406.199**	**96,59**	**100**
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	97.737.300	94.406.199	96,59	100
5.1.1	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*97.737.300*	*94.406.199*	*96,59*	*100*
5.1.1.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	30.526.300	30.011.564	98,31	100
5.1.1.2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	67.211.000	64.394.635	95,81	100
	Kabupaten Bantul	**7.700.317.000**	**6.607.980.776**	**85,81**	**87,15**
1	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL**	**7.461.034.000**	**6.370.844.260**	**85,39**	**86,74**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	7.461.034.000	6.370.844.260	85,39	86,74
1.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*5.787.384.000*	*4.925.476.880*	*85,11*	*82,91*
1.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.646.224.000	4.784.316.880	84,73	82,48
1.1.1.2	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	141.160.000	141.160.000	100,00	100
1.1.2	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*1.650.650.000*	*1.422.945.380*	*86,21*	*100*
1.1.2.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin	194.150.000	194.150.000	100,00	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
	Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				
1.1.2.2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.456.500.000	1.228.795.380	84,37	100
1.1.3	*Sarana dan Prasarana Keistimewaan*	*23.000.000*	*22.422.000*	*97,49*	*100*
1.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	23.000.000	22.422.000	97,49	100
2	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL**	**239.283.000**	**237.136.516**	**99,10**	**100**
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	239.283.000	237.136.516	99,10	100
2.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*239.283.000*	*237.136.516*	*99,10*	*100*
2.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	239.283.000	237.136.516	99,10	100
	Kabupaten Sleman	**6.155.412.400**	**5.579.245.525**	**90,64**	**91,59**
1	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN**	**6.155.412.400**	**5.579.245.525**	**90,64**	**91,59**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	6.155.412.400	5.579.245.525	90,64	91,59
1.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*4.714.873.100*	*4.159.283.265*	*88,22*	*89,02*
1.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.616.763.400	4.070.184.380	88,16	88,79
1.1.1.2	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	98.109.700	89.098.885	90,82	100
1.1.2	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*1.418.464.800*	*1.398.780.160*	*98,61*	*100*

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
1.1.2.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	143.464.800	130.983.380	91,30	100
1.1.2.2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.275.000.000	1.267.796.780	99,44	100
1.1.3	*Sarana dan Prasarana Keistimewaan*	*22.074.500*	*21.182.100*	*95,96*	*100*
1.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	22.074.500	21.182.100	95,96	100
	Kabupaten Kulon Progo	**2.244.497.700**	**2.073.325.446**	**92,37**	**91,9**
1	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO**	**2.066.668.300**	**1.897.889.846**	**91,83**	**91,2**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	2.066.668.300	1.897.889.846	91,83	91,2
1.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*918.700.100*	*758.516.779*	*82,56*	*80,2*
1.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	852.995.800	693.451.105	81,30	78,68
1.1.1.2	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	65.704.300	65.065.674	99,03	100
1.1.2	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*1.124.118.200*	*1.115.962.567*	*99,27*	*100*
1.1.2.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	87.187.100	86.688.878	99,43	100
1.1.2.2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.036.931.100	1.029.273.689	99,26	100
1.1.3	*Sarana dan Prasarana Keistimewaan*	*23.850.000*	*23.410.500*	*98,16*	*100*
1.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	23.850.000	23.410.500	98,16	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
	Keistimewaan Urusan Pertanahan				
2	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KULON PROGO**	**177.829.400**	**175.435.600**	**98,65**	**100**
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	177.829.400	175.435.600	98,65	100
2.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*177.829.400*	*175.435.600*	*98,65*	*100*
2.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	177.829.400	175.435.600	98,65	100
	Kabupaten Gunungkidul	**4.670.207.796**	**4.155.436.221**	**88,98**	**93,81**
1	**BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**	**395.046.406**	**395.046.406**	**100,00**	**100**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	395.046.406	395.046.406	100,00	100
1.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*395.046.406*	*395.046.406*	*100,00*	*100*
1.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	395.046.406	395.046.406	100,00	100
2	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**	**4.275.161.390**	**3.760.389.815**	**87,96**	**93,24**
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	4.275.161.390	3.760.389.815	87,96	93,24
2.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*3.203.926.800*	*2.703.222.419*	*84,37*	*90,98*
2.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.950.796.000	2.450.582.273	83,05	90,21

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
2.1.1.2	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	253.130.800	252.640.146	99,81	100
2.1.2	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*1.051.784.440*	*1.037.717.246*	*98,66*	*100*
2.1.2.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	116.077.000	115.961.636	99,90	100
2.1.2.2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	935.707.440	921.755.610	98,51	100
2.1.3	*Sarana dan Prasarana Keistimewaan*	*19.450.150*	*19.450.150*	*100,00*	*100*
2.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	19.450.150	19.450.150	100,00	100
	Kota Yogyakarta	**571.608.450**	**514.992.375**	**90,10**	**100**
1	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA**	**571.608.450**	**514.992.375**	**90,10**	**100**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	571.608.450	514.992.375	90,10	100
1.1.1	*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*413.237.200*	*373.134.175*	*90,30*	*100*
1.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	333.025.000	299.173.125	89,84	100
1.1.1.2	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	80.212.200	73.961.050	92,21	100
1.1.2	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*139.852.250*	*124.358.200*	*88,92*	*100*
1.1.2.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	90.255.000	79.717.600	88,32	100
1.1.2.2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah	49.597.250	44.640.600	90,01	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik
			Rp	%	s.d. Tahap 3
	Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				
1.1.3	*Sarana dan Prasarana Keistimewaan*	*18.519.000*	*17.500.000*	*94,50*	*100*
1.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	18.519.000	17.500.000	94,50	100
Jumlah		**32.719.166.446**	**30.217.986.782**	**92,36**	**93,96**
Pemerintah Kalurahan/Kelurahan		**18.010.409.300**	**17.283.558.148**	**95,96**	**97,23**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2026

Pada urusan Pertanahan di tahun 2025 ini terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas yaitu:

1) Penatausahaan Pertanahan

Kegiatan Penatusahaan Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten merupakan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Berikut capaian panatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di masing-masing perangkat daerah antara lain:

a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY merupakan koordinator urusan Keistimewaan Pertanahan, kegiatan pada DPTR DIY merupakan koordinasi terkait pelaksanaan penatausahaan di kabupaten/kota. Pada tahun 2025, sudah menyelesaikan dokumen evaluasi pendaftaran tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai target sebanyak 4 dokumen. Kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta dukungan sarana dan prasarana percepatan pendaftaran tanah terealisasi sepenuhnya sesuai rencana dengan masing-masing target dan realisasi yaitu 10.000 bidang dan 4.044 bidang. Dokumen Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah tercapai sesuai rencana yakni target dan realisasi sebesar 500 keputusan.

b. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Biro Tata Pemerintahan melaksanakan fungsi strategis dalam penataan batas wilayah. Seluruh kegiatan berupa sinkronisasi garis batas daerah, pembinaan dan pengawasan penetapan batas kalurahan/kelurahan, serta pengukuran pilar geodetik batas DIY–Jawa Tengah terealisasi 100% dengan capaian masing-masing indikator yaitu laporan sinkronisasi garis batas daerah DIY target 1 laporan terealisasi 1 laporan, laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan/kelurahan target 1 laporan terealisasi 1 laporan serta pengukuran pilar geodetik batas DIY–Jateng terealisasi 1 segmen sehingga mendukung kepastian batas administratif wilayah.

c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

DPTR Kota Yogyakarta berhasil merealisasikan seluruh target kegiatan, meliputi pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dari target 50 bidang terealisasi 50 bidang serta identifikasi potensi tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta dari target 100 bidang terealisasi 100 bidang. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penatausahaan pertanahan di wilayah perkotaan.

d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

DPTR Kabupaten Bantul melaksanakan penatausahaan pertanahan melalui kegiatan pengukuran, pematokan, verifikasi, dan pendaftaran tanah. Kegiatan pematokan dan verifikasi tanah kalurahan belum bersertipikat terealisasi 100% meliputi pembuatan patok sebanyak 10.000 patok, pemasangan patok bidang tanah desa sebanyak 1.250 bidang, dan penyusunan sket bidang tanah dari sebanyak 1.250 bidang serta verifikasi tanah kalurahan belum bersertipikat sebanyak 1.250 bidang.

e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

DPTR Kabupaten Kulon Progo merealisasikan kegiatan identifikasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai target yaitu terealisasi 3 dokumen.

f. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul

DPTR Kabupaten Gunungkidul menunjukkan capaian tinggi pada kegiatan teknis lapangan, terutama pematokan batas bidang tanah kalurahan dan verifikasi tanah desa belum bersertipikat yang terealisasi 100%. Pembuatan dan pemasangan patok batas bidang tanah kalurahan target dan realisasi sebesar 6.000 patok serta verifikasi tanah desa belum bersertipikat target dan realisasi sebesar 1.000 bidang.

g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman

DPTR Kabupaten Sleman berhasil merealisasikan kegiatan verifikasi tanah kalurahan belum bersertipikat, penegasan batas desa, serta pendaftaran ukur peta bidang tanah sesuai target. Verifikasi tanah kalurahan yang belum bersertipikat target dan realisasi sebesar 1.200 bidang, penegasan batas

desa target dan realisasi yaitu 6 kalurahan serta pendaftaran ukur peta bidang tanah kalurahan target dan realisasi sebesar 941 bidang.

Berdasarkan pelaksanaan subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat daerah secara umum menunjukkan capaian yang baik dan berjalan sesuai arah kebijakan keistimewaan pertanahan. Peran koordinatif DPTR DIY telah berjalan efektif dalam mendorong keterpaduan pelaksanaan penatausahaan di kabupaten/kota, yang tercermin dari tercapainya target dokumen evaluasi, inventarisasi tanah, dukungan percepatan pendaftaran, serta capaian optimal pada kegiatan identifikasi dan pematokan di sebagian besar wilayah.

Kegiatan penataan batas wilayah yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berhasil direalisasikan sepenuhnya dan memberikan kontribusi strategis terhadap kepastian batas administratif sebagai prasyarat utama tertib administrasi pertanahan. di sisi lain, pelaksanaan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan variasi capaian, di mana wilayah perkotaan dan daerah dengan kesiapan data lapangan yang baik mampu memenuhi target, sedangkan beberapa daerah masih menghadapi kendala administratif dan teknis dalam proses pendaftaran dan sertipikasi tanah.

Secara keseluruhan, subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten TA 2025 telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tertib administrasi dan kepastian hukum tanah keistimewaan di DIY. Kegiatan yang belum sepenuhnya mencapai target akan menjadi fokus tindak lanjut pada tahun anggaran berikutnya melalui penguatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, percepatan penyesuaian data fisik dan yuridis, serta optimalisasi dukungan kebijakan keistimewaan guna mendorong pemerataan capaian penatausahaan di seluruh wilayah DIY.





Gambar 5.38. Foto kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan Kegiatan Sinkronisasi Kesepakatan Batas Wilayah DIY–Jawa Tengah

2) BKK Kalurahan Urusan Pertanahan

Kegiatan BKK Kalurahan Urusan Pertanahan Tahun 2025 merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan pertanahan di tingkat kalurahan sebagai bagian dari implementasi Keistimewaan DIY. Program tersebut merupakan fasilitasi kepada pemerintah Kalurahan untuk memberdayakan masyarakat yang masih tergolong miskin di kalurahan tersebut. Pada tahun 2025, program ini dilaksanakan di total 40 kalurahan yang tersebar di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman. Dari total 40 BKK Kalurahan Pertanahan, terdapat 3 BKK Kalurahan Pertanahan yang akan dibahas pada sub Bab ini antara lain:

a. BKK Kalurahan Melikan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan BKK Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan di Kalurahan Melikan pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan melalui pengembangan sektor peternakan dan pertanian terpadu. Kegiatan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2025 dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp498.873.493,00 atau mencapai 99,77%. Seluruh tahapan

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai 100%.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan dan pertanian yang meliputi pengadaan ternak kambing, penyediaan bibit kelapa dan tanaman indigofera, pembangunan dua unit gazebo, penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), pembangunan empat unit kandang *breeding* kambing, satu unit kandang pakan, satu unit kandang domba, perkerasan jalan masuk kawasan peternakan, pembangunan pagar pengaman (pagar Anoa), serta pemasangan papan nama kegiatan. Selain itu, kegiatan juga dilengkapi dengan sarana pendukung berupa tandon air berkapasitas 5.500 liter, instalasi air bersih dan listrik 900VA, serta fasilitas keamanan kawasan peternakan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini berhasil membentuk aset produktif berupa sarana peternakan kambing dan domba, dengan total ternak kambing Jawa sebanyak 60 ekor dan domba sebanyak 15 ekor, serta sarana produksi pendukung lainnya. Program ini juga menghasilkan output ekonomi berupa pendapatan dari hasil peternakan dan pertanian dengan total nilai sebesar Rp10.800.000,00, yang berasal dari penjualan kambing, domba, pupuk organik padat (KOHE), dan hasil olahan limbah peternakan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa BKK Dana Keistimewaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia infrastruktur, tetapi juga mampu mendorong peningkatan nilai ekonomi tanah kas kalurahan serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset keistimewaan secara berkelanjutan.



Gambar 5.39. Pengadaan Sarana dan Prasarana Ternak Kambing

b. BKK Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan BKK Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan di Kalurahan Pacarejo pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan untuk mendukung tertib administrasi pertanahan sekaligus optimalisasi pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan melalui pembangunan sarana pertanian modern. Kegiatan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2025 dengan anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dapat terealisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembersihan dan penataan lahan, pembangunan dua unit *greenhouse*, serta pelaksanaan budidaya melon. Pembangunan *greenhouse* telah mengubah pola pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang sebelumnya hanya memberikan kontribusi berupa sewa lahan yang relatif terbatas, menjadi aset produktif yang memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi kalurahan dan masyarakat. Selama proses pembangunan, kegiatan ini telah memberdayakan 20 orang tenaga kerja masyarakat setempat, sementara pengelolaan *greenhouse* melibatkan 15 orang dengan koordinator tiga pemuda petani milenial sebagai motor penggerak kegiatan.

Dari sisi dampak ekonomi, pengelolaan *greenhouse* mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan secara signifikan. Kalurahan memperoleh kontribusi sebesar 40% dari hasil pengelolaan *greenhouse* dalam setiap kali panen. Dengan

estimasi produksi satu unit *greenhouse* menghasilkan sekitar 1.000 buah melon dengan berat rata-rata 2 kilogram dan harga Rp25.000,00 per kilogram, maka potensi pendapatan kotor mencapai Rp50.000.000,00 per siklus panen sekitar 70 hari. Pendapatan yang diterima kalurahan selanjutnya dialokasikan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan penanganan *stunting*, sehingga keberadaan BKK Dana Keistimewaan memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial yang berkelanjutan.



Gambar 5.40. Sarana dan Prasarana Pertanian *Greenhouse* Budidaya Melon

c. BKK Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman

Kegiatan BKK Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan di Kalurahan Harjobinangun pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan untuk mendukung tertib administrasi pertanahan sekaligus optimalisasi pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan melalui Kegiatan peningkatan produksi pertanian Budidaya Tanaman Cabai. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Desember 2025 dengan anggaran sebesar Rp198.058.000,00 dan realisasi anggaran mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembersihan dan penataan lahan untuk ditanam bibit cabai. Selama proses penataan lahan hingga penanaman bibit cabai, melibatkan petani setempat. meskipun dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala terkait cuaca dikarenakan curah hujan

yang cukup tinggi yang berpotensi timbulnya penyakit jamur atau patek pada tanaman cabai, akan tetapi kendala tersebut dapat teratasi dengan dilakukannya penyemprotan anti jamur pada tanaman cabai sehingga pada jelang akhir tahun berhasil panen. Lokasi penanaman berada di Ngampel, Blembem Lor dan Nglingi.



Gambar 5.41. Penanaman Bibit Cabai dan Hasil Panen Cabai di Kalurahan Harjobinangun

2. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Realisasi sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di sejumlah kabupaten belum mencapai target maksimal akibat kendala teknis dalam alih media sertifikat Hak Pakai dari sistem analog ke elektronik, serta hambatan teknis berupa migrasi aplikasi pengadaan yang menghambat serapan anggaran untuk kegiatan pembuatan dan pemasangan patok batas bidang tanah desa. Secara komprehensif, tidak maksimalnya ketercapaian pelaksanaan sub kegiatan ini dipicu oleh keterlambatan penerbitan Surat Perintah Setor (SPS), kompleksitas validasi spasial pada sistem elektronik, proses pencermatan hasil ukur oleh Kantor Pertanahan, serta keterbatasan durasi pemberkasan akibat terbitnya peta bidang tanah di akhir tahun anggaran. Fenomena tersebut mengonfirmasi bahwa efektivitas penatausahaan tanah tidak hanya bertumpu pada kinerja implementasi di daerah, namun sangat bergantung terhadap kesiapan data, sinkronisasi sistem digital, dan intensitas koordinasi antar instansi.

2) Solusi

Memperhatikan penjadwalan kegiatan sejak awal perencanaan termasuk keterkaitan dengan pihak lain dalam hal ini Kantor Pertanahan, sehingga target dapat tercapai.

E. URUSAN TATA RUANG

1. Kondisi Umum

Kewenangan urusan keistimewaan dalam Urusan Tata Ruang memiliki cakupan yang berfokus pada proses pengelolaan serta pendayagunaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Landasan dari pengaturan tata ruang atas tanah-tanah tersebut adalah untuk memajukan kebudayaan, mengakomodasi kepentingan sosial, serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan penataan ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten juga diorientasikan demi menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan serta menciptakan keselarasan yang harmonis dengan berbagai Satuan Ruang lainnya.

2. Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Tata Ruang terdiri dari 1 program, 4 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp 233.897.523.314,00. Urusan Tata Ruang diampu oleh 13 OPD Pemda DIY dan 14 OPD Pemkab/Pemkot, dan 11 Kalurahan pengampu BKK Kalurahan Kawasan Terpadu. Persentase realisasi fisik Urusan Tata Ruang sampai dengan tahap akhir telah mencapai 98,78% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar Rp227.553.618.898,89 atau sebesar 97,29%. Rincian realisasi keuangan dan fisik dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	**233.897.523.314,00**	**227.559.140.166,89**	**97,29**	**98,78**
	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	**194.584.135.875**	**190.437.512.463**	**97,87**	**99,52**
1	**RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA**	**46.472.371.950**	**43.246.692.109**	**93,06**	**98,02**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	46.472.371.950	43.246.692.109	93,06	98,02
1.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*34.280.243.900*	*34.059.958.513*	*99,36*	*100*
1.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	34.280.243.900	34.059.958.513	99,36	100
1.1.2	*Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang*	*12.192.128.050*	*9.186.733.596*	*75,35*	*92,46*
1.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	12.192.128.050	9.186.733.596	75,35	92,46
2	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**	**121.081.760.978**	**120.565.424.536**	**99,57**	**99,99**
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	121.081.760.978	120.565.424.536	99,57	99,99
2.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*121.081.760.978*	*120.565.424.536*	*99,57*	*99,99*
2.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.173.988.000	1.114.470.663	94,93	100
2.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	200.000.000	122.858.100	61,43	95
2.1.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	8.842.167.500	8.684.592.337	98,22	100
2.1.1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	36.482.986.006	36.263.724.599	99,4	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
2.1.1.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	74.327.619.472	74.324.860.232	100	100
2.1.1.6	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	55.000.000	54.918.605	99,85	100
3	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**	**3.467.384.500**	**3.413.240.527**	**98,44**	**100**
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	3.467.384.500	3.413.240.527	98,44	100
3.1.1	*Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipatenn*	*2.769.978.500*	*2.732.447.513*	*98,65*	*100*
3.1.1.1	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	431.233.200	424.687.535	98,48	100
3.1.1.2	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.415.374.300	1.391.581.631	98,32	100
3.1.1.3	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	923.371.000	916.178.347	99,22	100
3.1.2	*Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis*	*697.406.000*	*680.793.014*	*97,62*	*100*
3.1.2.1	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	697.406.000	680.793.014	97,62	100
4	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**	**170.000.000**	**167.971.000**	**98,81**	**100**
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	170.000.000	167.971.000	98,81	100
4.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipatenn*	*170.000.000*	*167.971.000*	*98,81*	*100*
4.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	170.000.000	167.971.000	98,81	100
5	**DINAS PERHUBUNGAN**	**18.758.593.797**	**18.509.059.773**	**98,67**	**100**
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	18.758.593.797	18.509.059.773	98,67	100
5.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipatenn*	*18.758.593.797*	*18.509.059.773*	*98,67*	*100*
5.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	15.099.321.347	14.851.303.869	98,36	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
5.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	734.266.600	734.034.649	99,97	100
5.1.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	441.653.500	441.288.439	99,92	100
5.1.1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	294.871.050	294.856.997	100	100
5.1.1.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	718.740.000	718.740.000	100	100
5.1.1.6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	294.841.100	294.816.052	99,99	100
5.1.1.7	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	294.931.150	294.558.106	99,87	100
5.1.1.8	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	294.931.200	294.560.876	99,87	100
5.1.1.9	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	441.653.450	441.516.385	99,97	100
5.1.1.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	143.384.400	143.384.400	100	100
6	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**385.392.000**	**372.806.368**	**96,73**	**100**
6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	385.392.000	372.806.368	96,73	100
6.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*385.392.000*	*372.806.368*	*96,73*	*100*
6.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	385.392.000	372.806.368	96,73	100
7	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**330.498.100**	**327.166.730**	**98,99**	**100**
7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	330.498.100	327.166.730	98,99	100
7.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*330.498.100*	*327.166.730*	*98,99*	*100*
7.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	330.498.100	327.166.730	98,99	100
8	**DINAS PARIWISATA**	**589.456.750**	**585.115.305**	**99,26**	**100**
8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN	589.456.750	585.115.305	99,26	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
8.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*589.456.750*	*585.115.305*	*99,26*	*100*
8.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	589.456.750	585.115.305	99,26	100
9	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**609.595.000**	**602.174.386**	**98,78**	**100**
9.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	609.595.000	602.174.386	98,78	100
9.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*609.595.000*	*602.174.386*	*98,78*	*100*
9.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	449.614.000	448.468.066	99,75	100
9.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	159.981.000	153.706.320	96,08	100
10	**BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN**	**557.184.000**	**531.188.562**	**95,33**	**100**
10.1	Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	557.184.000	531.188.562	95,33	100
10.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*557.184.000*	*531.188.562*	*95,33*	*100*
10.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	285.562.000	275.519.973	96,48	100
10.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	271.622.000	255.668.589	94,13	100
11	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**1.184.927.800**	**1.144.980.412**	**96,63**	**100**
11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.184.927.800	1.144.980.412	96,63	100
11.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*1.184.927.800*	*1.144.980.412*	*96,63*	*100*

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
11.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	224.543.000	217.385.212	96,81	100
11.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	960.384.800	927.595.200	96,59	100
12	**BIRO UMUM DAN PROTOKOL**	**200.000.000**	**198.114.234**	**99,06**	**100**
12.1	Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	200.000.000	198.114.234	99,06	100
12.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*200.000.000*	*198.114.234*	*99,06*	*100*
12.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000	198.114.234	99,06	100
13	**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**	**776.971.000**	**773.578.521**	**99,56**	**100**
13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	776.971.000	773.578.521	99,56	100
13.1.1	*Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*679.371.000*	*676.093.371*	*99,52*	*100*
13.1.1.1	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	679.371.000	676.093.371	99,52	100
13.1.2	*Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis*	*97.600.000*	*97.485.150*	*99,88*	*100*
13.1.2.1	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	97.600.000	97.485.150	99,88	100
	Kabupaten Bantul	**870.607.500**	**870.557.503**	**99,99**	**100**
1	**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL**	**720.000.000**	**720.000.000**	**100**	**100**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	720.000.000	720.000.000	100	100
1.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*720.000.000*	*720.000.000*	*100*	*100*
1.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	230.400.000	230.400.000	100	100
1.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan	144.000.000	144.000.000	100	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri				
1.1.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai SamasParangtritis	201.600.000	201.600.000	100	100
1.1.1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	144.000.000	144.000.000	100	100
2	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL**	**150.607.500**	**150.557.503**	**99,97**	**100**
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	150.607.500	150.557.503	99,97	100
2.1.1	*Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis*	*150.607.500*	*150.557.503*	*99,97*	*100*
2.1.1.1	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	150.607.500	150.557.503	99,97	100
	Kabupaten Sleman	**732.385.628**	**729.279.992**	**99,58**	**100**
1	**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SLEMAN**	**732.385.628**	**729.279.992**	**99,58**	**100**
1.1	Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	732.385.628	729.279.992	99,58	100
1.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*732.385.628*	*729.279.992*	*99,58*	*100*
1.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	732.385.628	729.279.992	99,58	100
	Kabupaten Kulon Progo	**12.459.499.637**	**12.427.784.544**	**99,75**	**99,94**
1	**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO**	**618.091.721**	**617.888.799**	**99,97**	**100**
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	618.091.721	617.888.799	99,97	100
1.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*618.091.721*	*617.888.799*	*99,97*	*100*
1.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	123.504.570	123.425.628	99,94	100
1.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	494.587.151	494.463.171	99,97	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
2	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO**	**300.121.000**	**294.407.838**	**98,1**	**97,5**
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	300.121.000	294.407.838	98,1	97,5
2.1.1	*Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*300.121.000*	*294.407.838*	*98,1*	*97,5*
2.1.1.1	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	300.121.000	294.407.838	98,1	97,5
3	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO**	**1.792.065.272**	**1.766.367.423**	**98,57**	**100**
3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.792.065.272	1.766.367.423	98,57	100
3.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*1.792.065.272*	*1.766.367.423*	*98,57*	*100*
3.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.792.065.272	1.766.367.423	98,57	100
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO**	**9.749.221.644**	**9.749.120.484**	**100**	**100**
4.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	9.749.221.644	9.749.120.484	100	100
4.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*9.749.221.644*	*9.749.120.484*	*100*	*100*
4.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	7.069.197.000	7.069.118.153	100	100
4.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	2.680.024.644	2.680.002.331	100	100
	Kabupaten Gunungkidul	**7.932.152.924**	**7.813.415.383**	**98,5**	**99,69**
1	**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**	**673.207.800**	**673.146.276**	**99,99**	**100**
1.1	Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	673.207.800	673.146.276	99,99	100
1.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*673.207.800*	*673.146.276*	*99,99*	*100*

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
1.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	673.207.800	673.146.276	99,99	100
2	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**	**4.133.523.824**	**4.068.754.509**	**98,43**	**100**
2.1	Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	4.133.523.824	4.068.754.509	98,43	100
2.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*4.133.523.824*	*4.068.754.509*	*98,43*	*100*
2.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	4.133.523.824	4.068.754.509	98,43	100
3	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**	**999.288.800**	**976.184.388**	**97,69**	**100**
3.1	Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	999.288.800	976.184.388	97,69	100
3.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*999.288.800*	*976.184.388*	*97,69*	*100*
3.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	999.288.800	976.184.388	97,69	100
4	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**	**619.811.000**	**593.926.598**	**95,82**	**96**
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	619.811.000	593.926.598	95,82	96
4.1.1	*Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*619.811.000*	*593.926.598*	*95,82*	*96*
4.1.1.1	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	619.811.000	593.926.598	95,82	96
5	**DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**	**1.506.321.500**	**1.501.403.612**	**99,67**	**100**
5.1	Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.506.321.500	1.501.403.612	99,67	100
5.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*1.506.321.500*	*1.501.403.612*	*99,67*	*100*
5.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	232.689.900	232.689.900	100	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Tahap 3 SP2D		Realisasi Kinerja Fisik s.d. Tahap 3
			Rp	%	
5.1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.273.631.600	1.268.713.712	99,61	100
	Kota Yogyakarta	**4.597.800.000**	**2.649.780.038**	**57,63**	**59,08**
1	**DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA**	**222.000.000**	**220.016.880**	**99,11**	**100**
1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	222.000.000	220.016.880	99,11	100
1.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*222.000.000*	*220.016.880*	*99,11*	*100*
1.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	222.000.000	220.016.880	99,11	100
2	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA**	**4.375.800.000**	**2.429.763.158**	**55,53**	**57**
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4.375.800.000	2.429.763.158	55,53	57
2.1.1	*Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*4.375.800.000*	*2.429.763.158*	*55,53*	*57*
2.1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	4.375.800.000	2.429.763.158	55,53	57
	Pemerintah Kalurahan/Kelurahan	12.720.941.750,00	12.630.810.243,89	99,29	100,00
Jumlah		**233.897.523.314,00**	**227.559.140.166,89**	**97,29**	**98,78**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2026

Pada urusan Tata Ruang di tahun 2025 ini terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas yaitu:

1) Aksesibilitas

a. Peningkatan Jalan dan Jembatan Tegalsari–Klepu

Peningkatan jalan Tegalsari-Klepu merupakan subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh ditargetkan sepanjang 4 km. Sampai dengan akhir tahun 2025 pekerjaan jalan dan jembatan sudah selesai

100% pada tanggal 12 Desember 2025, dan sudah diserahterimakan. Selain itu, terdapat sisa lelang pekerjaan fisik sebesar Rp117.627.042,00. Kegiatan berada wilayah di kalurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 5.42. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari–Klepu, Kulon Progo.

b. Pembangunan Jalan Ruas Jalan Prambanan–Gayamharjo (Segmen B4 dan B5)

Pembangunan jalan Prambanan–Gayamharjo merupakan proyek strategis yang bertujuan meningkatkan konektivitas antara Kabupaten Sleman dan Gunungkidul. Pada 2025, pekerjaan pembangunan lanjutan yaitu sepanjang 0,95 km. Sampai dengan akhir tahun 2025, Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ruas Prambanan–Gayamharjo Segmen B4 dan B5 sudah selesai 100% dan terdapat sisa lelang sebesar Rp34.000,00.

Dampak maupun manfaat terbangunnya jalan Prambanan–Gayamharjo yaitu meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga mampu mengubah kesenjangan antarwilayah dengan mengurangi kesenjangan baik dari sisi ekonomi maupun kesenjangan sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini berada di wilayah kalurahan Watugajah, Kecamatan Gedang Sari , Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 5.43. Pembangunan Jalan Prambanan–Gayamharjo segmen (B4 & B5)

c. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tegalsari–Kebonharjo

Ruas Jalan Tegalsari–Kebonharjo (Prangkokan Kebonharjo) merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo dengan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh. Ruas Prengkokan–Kebonharjo (SK Bupati 87/C/2024) awal mulanya merupakan bagian dari ruas Tegalsari-Kebonharjo (SK Bupati 408/A/2017). Selain untuk meningkatkan konektivitas antardesa, jalan ini juga sangat penting untuk menunjang kegiatan pariwisata yang ada di wilayah ini seperti *"Glimpang- Glamping" Kampung Pramuka*. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. Penanganan dilakukan secara penuh sepanjang 1.433 meter, dengan pelebaran badan jalan dari lebar eksisting sekitar 3 meter menjadi 5 meter dan penambahan bahu jalan kanan dan kiri 1 meter. Partisipasi warga terlihat melalui keterlibatan dalam pekerjaan pasangan batu yang menyerap hingga 300 orang tenaga lokal dari dua Kalurahan, serta kerelaan warga yang menyediakan tanahnya dengan total seluas 5.704,08 m^2 untuk pembangunan tanpa meminta ganti rugi.

Sampai dengan akhir tahun 2025, capaian fisik sudah mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan serta realisasi keuangan sudah mencapai 100% dari total Pagu sebesar Rp5.082.000.000,00. Kegiatan ini berada di wilayah

Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo dan Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 5.44. Peningkatan Ruas Jalan Tegalsari–Kebonharjo

2) Pelayanan Publik

a. Pembangunan Gedung Psikiatri Terpadu, Gedung Rehabilitasi Medik dan Gedung Farmasi Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia DIY melakukan proses pengembangan layanan secara terus menerus. Proses pengembangan layanan tersebut disusun secara terstruktur dan dalam periodisasi yang jelas. Rencana pengembahan RSJ Grhasia periode 2022–2042 akan berfokus pada penguatan fungsi RSJ Grhasia sebagai rumah sakit khusus jiwa kelas A. Fungsi pelayanan di bidang psikiatri yang dikembangkan ini tentunya juga membutuhkan fungsi pelayanan di bidang spesialis lain baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pengembangan fungsi pelayanan di bidang psikiatri. Pengembangan layanan spesialis lain yang akan dikembangkan pada periode ini adalah pelayanan Penyakit Dalam, Pelayanan Kesehatan Anak dan Tumbuh Kembang, Pelayanan Neurologi, Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Kandungan, Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin, serta Pelayanan Anestesi.

Pada tahun 2025 RSJ Grhasia DIY berfokus pada Pembangunan Gedung sebagai pendukung sarana prasarana Rumah Sakit yakni, Pembangunan Gedung Psikiatri Terpadu, Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medik dan Pembangunan Gedung Farmasi. Sampai dengan akhir tahun 2025 untuk Pembangunan ketiga Gedung secara capaian fisik sudah 100% dengan Pagu Rp34.280.243.900,00. Adapun dampak atau manfaat dengan terbangunnya Gedung Psikiatri Terpadu, Gedung Rehabilitasi Medik, dan Gedung Farmasi yakni peningkatan dalam pelayanan terhadap pasien-pasien serta memperluas pelayanan kesehatan sehingga pengembangan fungsi pelayanan dapat tercapai.



Gambar 5.45. Pembangunan Gedung Psikiatri Terpadu, Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medik dan Pembangunan Gedung Farmasi.

b. Pemindahan Lahan Parkir Abu Bakar Ali (ABA) ke Tempat Khusus Parkir (TKP) Ketandan

Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pembangunan Tempat Khusus Parkir (TKP) di Kawasan Ketandan, Kota Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan insiatif strategis pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan fasilitas publik sekaligus memenuhi kebutuhan parkir di kawasan yang memiliki kepadatan aktivitas ekonomi dan budaya tinggi. Kawasan TKP Ketandan memiliki nilai sensitivitas tinggi terhadap warisan budaya dengan berbagai alasan, antara lain: lokasi merupakan pusat kawasan

pecinan historis Yogyakarta yang kaya Warisan Budaya Tak Benda dan bangunan bergaya Tionghoa–Jawa yang tergolong Cagar Budaya; berada di Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang telah diakui sebagai Warisan Budaya oleh UNESCO. TKP Ketandan merupakan bangunan yang didirikan dengan memanfaatkan bongkaran bangunan TKP Abu Bakar Ali (ABA). Pembangunan TKP Ketandan ini merupakan bagian dari rencana penataan ruang kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagai kawasan pedestrian serta sebgai bagian dari pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan terutama dalam penyediaan tempat parkir ketandan.

TKP Ketandan juga dikoneksikan ke Pasar Beringharjo. Rencana pembangunan TKP Ketandan dilakukan dalam 2 Tahap yakni Pembongkaran TKP ABA dan Pembangunan TKP Ketandan. Tapak TKP ABA direncanakan akan difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau.



Gambar 5.46. Lokasi Pembangunan TKP Ketandan

Lokasi pembangunan TKP ABA seluas 8.740 m^2 dengan kapasitas eksisting 2.600 SRPRoda Dua dan 40 SRPRoda Empat (Bus). Lokasi tempat pembangunan TKP Ketandan merupakan Lahan Kosong yang berlantai *conblok* serta sebagian ditumbuhi rumput. Sebelumnya Lahan ini merupakan tempat bangunan Kampus UPN “Veteran” Yogyakarta yang kemudian roboh pascagempa bumi 27 Mei 2006. Lokasi ini berada pada lahan yang disewa dari UPN

seluas 4.280 m^2 dan pada tanah *Sultan Ground* seluas 379 m^2 (total luas lahan 4.659 m^2).

Luas total lingkup pekerjaan (pembangunan tahap I, kapasitas 535 SRPkendaraan roda dua dan 87 SRPkendaraan roda empat). Bangunan parkir 3 lantai terdiri dari:

(1) Lantai 1 di khususkan untuk parkir roda empat
(2) Lantai 2 untuk kendaraan roda empat dan roda dua
(3) Lantai 3 untuk kendaraan roda dua

Sampai dengan akhir tahun 2025 pembangunan TKP Ketandan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.519.565.000,00 telah selesai 100% dan sudah melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 17 Desember 2025. Dampak dengan dibangunnya TKP Ketandan yakni mendukung program Malioboro *Full Pedestrian*, membatasi parkir liar, meningkatkan kapasitas jalan di sekitar Kawasan Malioboro.



Gambar 5.47. Tempat Parkir Khusus (TKP) Ketandan

3) Prioritas Nasional Terkait Dengan Dokumen Tata Ruang

a. Pendampingan Percepatan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Terintegrasi OSS–Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di DIY yaitu sebanyak 22 RDTR, terdiri dari 1 RDTR di Kota Yogyakarta, 4 RDTR di Kabupaten Sleman, 6 RDTR di Kulon Progo, 4 RDTR di Kabupaten Bantul, dan 7 RDTR di Kabupaten Gunungkidul.

Status RDTR di DIY saat awal pendampingan tahun 2025, dari 22 RDTR di DIY sebanyak 9 RDTR sudah ditetapkan dan terintegrasi sistem OSS, 2 RDTR sudah ditetapkan namun belum terintegrasi sistem OSS, 11 RDTR masih dalam proses pemenuhan kelengkapan persetujuan substansi (persub). RDTR yang sudah ditetapkan dan terintegrasi sistem OSS meliputi RDTR Kawasan Sleman Timur, RDTR Siung wediombo, RDTR Kota Yogyakarta, RDTR Kawasan Sleman Barat, RDTR Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, RDTR Kawasan Sleman Tengah, dan RDTR Pantai Selatan Kabupaten Bantul, RDTR Bantul Barat, dan RDTR Bantul Timur. RDTR yang sudah ditetapkan namun belum terintegrasi sistem OSS yaitu RDTR Perkotaan Wates dan RDTR Pantai Selatan Bagian Timur. Selain itu, RDTR yang masih dalam proses pemenuhan kelengkapan persyaratan meliputi RDTR Kawasan Sleman Utara, RDTR Perkotaan Wonosari, RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah, RDTR Pantai Selatan Bagian Barat, RDTR Baturagung Timur, RDTR Baturagung Barat, RDTR Sekitar Zona Otoritas Kawasan Pariwisata Borobudur, RDTR Kulon Progo Utara, RDTR Kulon Progo Tengah dan RDTR Kulon Progo Selatan.



Gambar 5.48. Status RDTR di DIY Awal Pendampingan 2025

Sumber: Tim Pendampingan RDTR, 2025

RDTR menuju terintegrai OSS meliputi RDTR perkotaan Wates dan RDTR Pantai Selatan bagian timur. Status RDTR menuju terintegrasi OSS di akhir pendampingan tahun 2025 berdasarkan persentase progres yaitu RDTR Perkotaan

Wates telah mencapai 100% sedangkan RDTR Pantai Selatan Bagian Timur mencapai 91%. Hal ini karena RDTR Perkotaan Wates berhasil melalui proses tahapan pengintegrasian OSS sampai dengan terintegrasi OSS pada bulan Agustus 2025.

Prioritas pendampingan RDTR Kabupaten tahun 2025 dibagai menjadi dua yaitu RDTR menuju integrasi OSS dan RDTR menuju penetapan. RDTR menuju integrasi OSS terdiri dari RDTR Perkotaan Wates dan RDTR Pantai Selatan Bagian Timur, sedangkan RDTR menuju penetapan terdiri dari RDTR sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur, RDTR Kulon Progo Tengah, RDTR Kawasan Sleman Utara, RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah, RDTR Panatai Selatan Bagian Barat, RDTR Baturanggung Barat, dan RDTR Perkotaan Bantul. Berdasarkan kegiaatan pendampingan RDTR Kabupaten tahun 2025, didapatkan hasil sebagai berikut:

(1) RDTR Kabupaten Kulon Progo

RDTR Perkotaan Wates ditargetkan hingga terintegrasi OSS dan telah tercapai pada Bulan Agustus 2025. RDTR sekitar zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dan RDTR Kulon Progo Tengah ditargetkan hingga Persetujuan Substansi. RDTR sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dan RDTR Kulon Progo Tengah telah mengikuti kegiatan Klinik Pendampingan RDTR ke-1 yang diselenggarakan oleh Pemda DIY tahun 2025 dan asistensi dengan Kementerian ATR/BPN sebanyak lima kali. Kedua RDTR tersebut telah melaksanakan pembahasan lintas sektor tanggal 12 November 2025 dan telah mengirimkan revisi pascalintas sektor untuk memperoleh Surat Persetujuan Substansi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

(2) RDTR Kabupaten Sleman

RDTR Kawasan Sleman Utara ditargetkan hingga Persetujuan Substansi. RDTR Kawasan Sleman Utara telah mengikuti kegiatan Klinik Pendampingan RDTR Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemda DIY pada tahun 2025 sebanyak dua kali dan asistensi dengan Kementerian ATR/BPN sebanyak empat kali. Saat ini, RDTR Kawasan Sleman Utara dalam proses merevisi hasil asistensi terakhir dengan Kementerian ATR/BPN sehingga target Persetujuan Substansi yang ditetapkan di awal tahun 2025 saat ini belum tercapai.

(3) RDTR Kabupaten Gunungkidul

a) RDTR Pantai Selatan Bagian Timur ditargetkan hingga integrasi OSS. RDTR Pantai Selatan Bagian Timur telah melakukan serangkaian proses integrasi OSS. Saat ini proses integrasi OSS sampai pada tahap uji terbit KKKPR dan telah bersurat ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Proses selanjutnya yaitu menunggu pemberitahuan RDTR Pantai Selatan Bagian Timur telah terintegrasi ke dalam sistem OSS dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Target RDTR Pantai Selatan Bagian Timur untuk dapat terintegrasi OSS di tahun 2025 hampir tercapai.

b) RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah ditargetkan hingga Persetujuan Substansi. RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah telah mengikuti kegiatan Klinik Pendampingan RDTR Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemda DIY pada tahun 2025 sebanyak satu kali dan asistensi dengan Kementerian ATR/BPN sebanyak satu kali. Saat ini RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah dalam proses merevisi hasil asistensi terakhir dengan Kementerian ATR/BPN sehingga target Persetujuan

Substansi yang ditetapkan di awal tahun 2025 belum tercapai.

c) RDTR Pantai Selatan Bagian Barat ditargetkan hingga Pembahasan Lintas Sektor. RDTR Pantai Selatan Bagian Barat telah mengikuti kegiatan Klinik Pendampingan RDTR Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemda DIY pada tahun 2025 sebanyak dua kali. Saat ini RDTR Pantai Selatan Bagian Barat telah mengirimkan hasil revisi Klinik Pendampingan RDTR Kabupaten ke-2 dengan Kementerian ATR/BPN sehingga target Persetujuan Substansi yang ditetapkan di awal tahun 2025 belum tercapai.

d) RDTR Baturagung Barat ditargetkan hingga Persetujuan Substansi RDTR Baturagung Barat telah mengikuti kegiatan Klinik Pendampingan RDTR Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemda DIY pada tahun 2025 sebanyak dua kali. Terdapat kendala yang dialami RDTR Baturagung Barat dalam melengkapi Berita Acara berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Saat ini RDTR Baturagung Barat telah mengirimkan hasil revisi Klinik Pendampingan RDTR Kabupaten ke-2 dengan Kementerian ATR/BPN sehingga target Persetujuan Substansi yang ditetapkan di awal tahun 2025 belum tercapai.

4) BKK Kalurahan Kawasan Terpadu

BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada Urusan Tata Ruang berada di 11 Kalurahan. Adapun capaian kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh dengan pagu sebesar Rp2.058.941.750,00 dan telah terealisasi sebesar 100% baik keuangan maupun fisik. Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pengadaan alat berupa (*audio system, lighting*, genset, alat musik gamelan, alat musik band, tenda UMKM dan alat *event* lainnya), serta pelaksanaan *event* Pasar Tiban. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo.



Gambar 5.49. *Event* Pasar Tiban



Gambar 5.50. Alat-Alat Gamelan dan Genset

b. Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh dengan pagu sebesar Rp802.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar 100% baik

keuangan maupun fisik. Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pemadatan jalan usaha tani, perataan dan pembersihan lokasi, pematangan lahan, pembuatan talud pengaman kawasan, pembangunan sarana penunjang pengairan, pembuatan bangunan budidaya samiya, pembuatan kandang untuk budidaya ternak domba, dan pengadaan ternak. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kab. Kulon Progo.



Gambar 5.51. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Hargorejo

c. Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh dengan pagu sebesar Rp1.400.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.399.249.947,00 atau sebesar 99,94%. Sampai akhir tahun 2025 capaian fisik sudah 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Budidaya Vanili, Pembangunan Edukasi Agrowisata Vanili, Pengadaan Bibit Kopi Robusta BP 42 & BP 358, Pembangunan Rumah Produksi Kopi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo.



Gambar 5.52. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Pagerharjo

d. Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi dengan pagu sebesar Rp1.250.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.249.870.000,00 atau sebesar 99,9%. Sampai akhir tahun 2025 capaian fisik sudah 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Pembangungan Lapangan *Jogging Track* dengan detail pekerjaan yaitu Pematangan Lahan, Pemindahan Saluran Irigasi, Jogging Track, Lapangan dan Drainase, Talud Penahan Tanah, serta pembangunan sarpras dan ruang ganti. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kab. Kulon Sleman.



Gambar 5.53. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Lumbungrejo

e. Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang

Strategis Pantai Selatan dengan pagu sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp198.809.325,00 atau sebesar 99,58%. Sampai akhir tahun 2025 capaian fisik sudah 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Penyusunan *Masterplan* dan Penyusunan *Detail Engineering design* (DED) pekerjaan jalan kawasan Manjung. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul.



Gambar 5.54. *Masterplan* dan *Detail Engineering design* (DED) Pekerjaan Jalan Kawasan Manjung

f. Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu Wotawati pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu dengan pagu sebesar Rp3.640.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.625.565.405,89 atau 99,60%. Sampai akhir tahun 2025 capaian fisik sudah 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni reviu DED Fasad dan DED Fasum Kampung Wotawati, Pekerjaan Fasad Bangunan PAUD, Pekerjaan Bangunan TIC, Pekerjaan Pagar Pendopo dan Kawasan, Pekerjaan Toilet, Pekerjaan Gazebo, Pekerjaan *Signage* dan Rambu, Pekerjaan Saluran Drainase dan Perkerasan Jalan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul.



Gambar 5.55. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Pucung

g. Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan–Candi Ijo dengan pagu sebesar Rp520.000.000,00. Sampai akhir tahun 2025 capaian fisik dan keuangan tercapai 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Penataan Lansekap dan Perkerasan, Pembangunan Mushola dan Pembangunan Gapura. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman.



Gambar 5.56. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Sambirejo

h. Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas–Parangtritis dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar

Rp971.780.750,00 atau sebesar 97,18%. Sampai akhir tahun 2025 capaian fisik sudah 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Pembangunan Rumah Limasan, dan Perkerasan Parkiran Depan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kab. Bantul.

i. Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri dengan pagu sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp895.720.000,00 atau sebesar 99,52%. Sampai akhir tahun 2025 capaian fisik sudah 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Pembangunan Gapura Pagar Pembatas *Sport Center*, Pembangunan *Foodcourt*, dan Perkerasan Taman dan Drainase. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul.



Gambar 5.57. Kegiatan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu di Kalurahan Sumberagung

j. Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan–Candi Ijo dengan pagu sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp248.472.500,00 atau sebesar 99,39%. Sampai

akhir tahun 2025 capaian fisik sudah 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni *Master Plan Rest Area* Raden Ronggo, Uji Tanah dan Geolistrik dan tersusunnya dokumen *DED Rest Area* Raden Ronggo. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman.

k. Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan ini masuk dalam BKK Kalurahan Kawasan Terpadu pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu di Imogiri dengan pagu sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp682.966.861,00 atau sebesar 97,57%. Sampai akhir tahun 2025 capaian fisik sudah 100%, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Pembangunan Taman Lalu Lintas, Pembangunan Gazebo, Pembangunan Pagar Pengaman dan Pembangunan Lampu Penerangan (PJU) di Wilayah Taman Wisata Embung Bembem Kalurahan Giriasih. Manfaat kegiatan ini antara lain:

(1) Terwujudnya peningkatan kualitas pendukung wisata khususnya wisata edukasi bagi masyarakat.
(2) Meningkatnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan sarpras wisata edukasi.
(3) Pengembangan sarpras wisata dapat mendorong daya tarik pengunjung.



Gambar 5.58. Sarana Prasarana Pendukung Wisata Embung Bembem

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Realisasi sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di sejumlah kabupaten belum mencapai target maksimal akibat kendala teknis dalam alih media sertifikat Hak Pakai dari sistem analog ke elektronik, serta hambatan teknis berupa migrasi aplikasi pengadaan yang menghambat serapan anggaran untuk kegiatan pembuatan dan pemasangan patok batas bidang tanah desa. Secara komprehensif, tidak maksimalnya ketercapaian pelaksanaan sub kegiatan ini dipicu oleh keterlambatan penerbitan Surat Perintah Setor (SPS), kompleksitas validasi spasial pada sistem elektronik, proses pencermatan hasil ukur oleh Kantor Pertanahan, serta keterbatasan durasi pemberkasan akibat terbitnya peta bidang tanah di akhir tahun anggaran. Fenomena tersebut mengonfirmasi bahwa efektivitas penatausahaan tanah tidak hanya bertumpu pada kinerja implementasi di daerah, namun sangat bergantung terhadap kesiapan data, sinkronisasi sistem digital, dan intensitas koordinasi antar instansi.

2) Solusi

Memperhatikan penjadwalan kegiatan sejak awal perencanaan termasuk keterkaitan dengan pihak lain dalam hal ini Kantor Pertanahan, sehingga target dapat tercapai.



LKPJ Gubernur DIY 2025

Program Strategis DIY

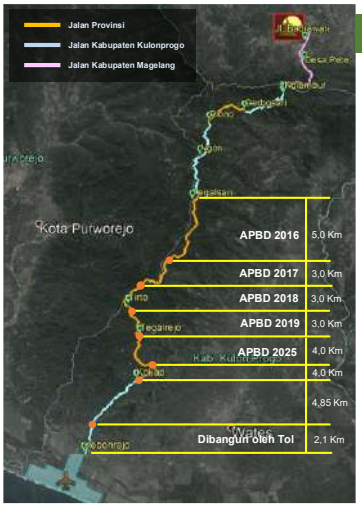
Program Strategis DIY

A. PEMBANGUNAN JALAN TEMON- KABUPATEN KULON PROGO BOROBUDUR

1. Kondisi Umum

Rencana pengembangan Jalan Temon–Borobudur merupakan bagian dari penguatan jaringan jalan di DIY yang menghubungkan Bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Pembangunan ruas jalan ini diarahkan untuk mendukung pengembangan Kawasan Kulon Progo Utara serta meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal di Kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh, yang termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Kabupaten Kulon Progo, dengan proporsi keluarga miskin mencapai lebih dari 65%

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2025



USULAN TAHAPAN PENANGANAN

NO	NAMA RUAS	PANJANG (m)	STATUS JALAN	PENANGANAN		
				JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
1	KEBONREJO - KOKAP	6.950	Jalan Kabupaten	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED	-
2	KOKAP - TEGALREJO	5.450	Jalan Provinsi	Peningkatan Jalan Eksisting	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED
3	TEGALREJO - TIRTO	2.925	Jalan Provinsi	Peningkatan Jalan Eksisting	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED
4	TIRTO - TEGALSARI	11.975	Jalan Provinsi	Peningkatan Jalan Eksisting	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED
5	TEGALSARI - NGORI	4.500	Jalan Kabupaten	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED	-
6	NGORI - PLONO	3.475	Jalan Kabupaten	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED	-
7	PLONO - GERBOSARI	3.275	Jalan Provinsi	Peningkatan Jalan Eksisting	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED
8	GERBOSARI - NGLAMBUR	5.400	Jalan Kabupaten	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED	-
9	NGLAMBUR - JL. BADRAWATI	7.512	Jalan Kabupaten Magelang	Pembebasan Tanah Sesuai DED	Pembangunan Jalan Sesuai DED	-
	TOTAL PANJANG	51.462				

Sampai tahun 2025, Pemda DIY telah memiliki FS dan DED Pembangunan Jalan Bedah Menoreh yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Panjang jalan total yang direncanakan sepanjang 51,46 KM, terdiri dari pemanfaatan trase yang sudah ada sepanjang 23,63 KM berstatus Jalan Provinsi, sepanjang 20,3 KM berstatus Jalan Kabupaten dan sepanjang 7,5 KM merupakan trase/jalan baru. Penanganan Jangka pendek, berupa peningkatan kondisi eksisting pada jalan Tegalsari-Klepu telah dilakukan secara bertahap oleh Pemda DIY sejak tahun 2018. Pada tahun anggaran 2025 dilakukan penanganan menggunakan Dana Keistimewaan (Dais) DIY sepanjang 4 km.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Hasil dari Perencanaan/DED memerlukan pengadaan lahan dengan luasan yang cukup signifikan dan pembiayaan konstruksi yang cukup tinggi akibat perlunya penanganan teknis terkait kondisi geografi dan geologi pada lokasi trase rencana.

2) Solusi

1. Dilaksanakannya penanganan jangka pendek dengan peningkatan kondisi eksisting Jalan dan Jembatan Provinsi.
2. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten Kulon Progo terkait alternatif pembiayaan.

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan

Dokumentasi Peningkatan Jalan Tegalsari-Klepu Tahun Anggaran 2025



Gambar 6.1. Foto Dokumentasi 0% (kiri) dan 100% (kanan) pada sta 0+500



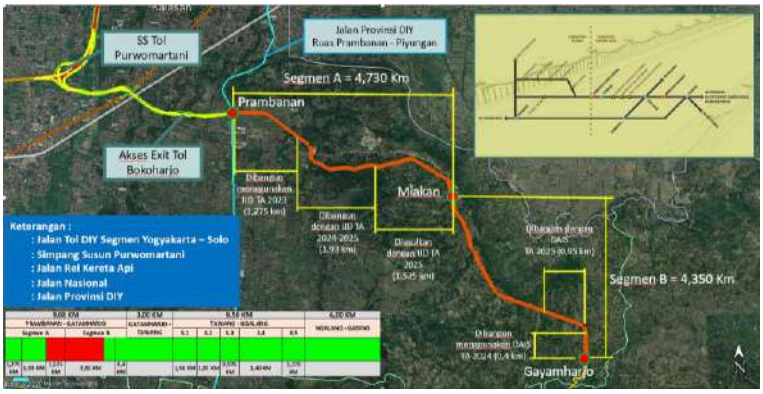
Gambar 6.2. Foto Dokumentasi 0% (kiri) dan 100% (kanan) pada sta 1+400

B. PEMBANGUNAN JALAN PRAMBANAN- GADING

1. Kondisi Umum

Koridor Ruas Prambanan–Gayamharjo–Tawang–Ngalang–Gading merupakan bagian dari rencana pengembangan jaringan jalan strategis yang diproyeksikan sebagai jalur alternatif Jalan Nasional Simpang Piyungan–Simpang Patuk–Simpang Gading serta terhubung langsung dengan rencana Jalan Tol Solo–Yogyakarta melalui Exit Tol Bokoharjo. Koridor ini berfungsi menghubungkan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul, mengintegrasikan jaringan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) melalui Koridor Prambanan–Gading–Saptosari, serta mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prambanan–Kalasan dan sekitarnya.

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2025



Gambar 6.3. Rencana Program Pembangunan Ruas Prambanan–Gayamharjo

Koridor Prambanan–Gading terbagi ke dalam empat segmen yaitu segmen Prambanan–Gayamharjo, Gayamharjo-Tawang, Tawang-Ngalang, dan Ngalang-Gading dengan total panjang 27,58 km. Sampai dengan akhir Tahun 2025, masih terdapat satu segmen yang dalam tahap pelaksanaan pembangunan, yaitu Ruas Prambanan–Gayamharjo dengan panjang 9,08 km. Pemda DIY telah dan sedang melaksanakan pembangunan melalui pendanaan Dais sepanjang 1,45 km, sedangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan melalui Program Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah Tahun 2023, 2024 sepanjang 3,205 km. Sisa panjang ruas yang belum tertangani sepanjang 4,525 km telah diusulkan penanganannya melalui Program Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah Tahun 2025.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan masih terkendala oleh keterbatasan ketersediaan lahan penyimpanan material serta lokasi pembuangan (*disposal area*).

2) **Solusi**

Membangun koordinasi kewilayahan dengan pemerintah setempat dalam penyediaan dan pengelolaan lokasi pembuangan (*disposal area*) material galian.

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan

Dokumentasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Prambanan–Gayamharjo Segmen B4 dan B5 sepanjang 0,95 km tahun anggaran 2025.



Gambar 6.4. Foto Dokumentasi 100% pada 8+025 (kiri) dan 8+400 (kanan)



Gambar 6.5. Dokumentasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Prambanan–Gading yang telah dilakukan sampai tahun 2025.

C. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TPA REGIONAL PIYUNGAN

1. Kondisi Umum

Pengelolaan sampah di DIY saat ini dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur DIY tanggal 19 Oktober 2023. Dalam perkembangannya, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dimana wilayah Yogyakarta Raya (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul) ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas nasional.

2. Progres Sampai Dengan Tahun 2025

Dalam rangka penanganan aliran air hujan (runoff) dari kawasan TPA Piyungan seluas ±5,7 hektare yang mengalir ke area persawahan milik warga, serta sebagai dasar perencanaan pemanfaatan lahan dimaksud, Dinas PUP-ESDM DIY melaksanakan kegiatan penanganan runoff TPA Piyungan dan Kajian Pemanfaatan Lahan TPA Piyungan pada tahun 2025.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Aliran air hujan di kawasan TPA Piyungan 5,7 ha mengalir menuju ke area persawahan milik warga dan berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman

2) Solusi

Penanganan *runoff* TPA Piyungan yang dilakukan oleh Dinas PUP ESDM DIY tahun 2025

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.6. Pekerjaan Penanganan Runoff TPA Piyungan

D. PENATAAN KAWASAN KARATON

1. Kondisi Umum

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagai titik awal sejarah pertumbuhan kota Yogyakarta, merupakan aset sejarah dan budaya warisan kerajaan Mataram Islam yang kaya akan berbagai khazanah budaya. Kawasan bersejarah ini merupakan pilar utama pembentuk citra positif yogyakarta sebagai kota Budaya.

Kawasan ini bukan sekadar kompleks istana ,melainkan mahakarya tata ruang yang sarat akan simbolisme kehidupan manusia. Sebagai Jantung DIY, kawasan ini merupakan perwujudan dari konsep Sumbu Filosofis yang kini telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO.

Karaton Yogyakarta dikelilingi oleh Beteng Cepuri (beteng dalam yang langsung melingkupi Kedhaton) dan Beteng Baluwarti (beteng luar yang melingkupi Karaton dan beberapa pemukiman abdi dalem serta komunitas lainnya). Kawasan di dalam beteng ini dikenal sebagai “Jeron Beteng”. di empat sudutnya terdapat Pojok Beteng (Jokteng)

dan lima gerbang utamanya disebut Plengkung (Seperti Plengkung Gading dan Plengkung Wijilan) sebagai akses masuk utama.

Sebagai pusat dari Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, kawasan ini mengemban mandat strategis untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Penataan Kawasan Karaton Ngayogyakarta dilakukan bukan semata - mata untuk mempercantik kota melainkan untuk memulihkan struktur asli benteng. Hal ini bertujuan agar generasi mendatang dapat menyaksikan fisik Pertahanan Karaton Ngayogyakarta secara utuh,sekaligus memastikan nilai - nilai filosofis di dalamnya tetap terjaga.

Sebagai wujud komitmen dalam menjaga kelestarian aset sejarah,khususnya kawasan Karaton Ngayogyakarta, Pemda DIY pada tahun 2025 telah mengupayakan pengembalian kemegahan struktur asli beteng Karaton Ngayogyakarta melalui rekonstruksi Beteng Margi Hinggil. Fokus utama penataan di tahun 2025 adalah mewujudkan keseimbangan antara pelestarian nilai adiluhung (kultural) dengan fungsionalitas kawasan sebagai pusat aktivitas kemasyarakatan. Penataan ini bertujuan untuk mengembalikan atmosfer historis kawasan sekaligus memperkuat citra Yogyakarta sebagai kota budaya yang tertata dan ramah bagi publik. Penataan ini difokuskan pada titik-titik krusial guna memulihkan fasad pertahanan bersejarah, yang meliputi:

1) **Sektor Barat dan Selatan** : Pembangunan difokuskan pada segmen 4 -5 (Pojok Beteng Nagan hingga Plengkung Tamansari) serta Segmen 6 (Pojok beteng Ngabean hingga Plengkung Ngasem).
2) **Optimalisasi Kawasan** : Bersamaan dengan rekonstruksi beteng, dilakukan pula perbaikan drainase (gorong - gorong) yang ambrol serta pelebaran area terbuka hijau di Taman Pojok Beteng Ngabean untung meningkatkan Kenyamanan Kawasan.

3) **Sektor Timur dan Tengah** : Pekerjaan berlanjut pada segmen 7 (Plengkung Ngasem menuju area belakang BPR Mataram) serta Segmen 8 yang membentang dari Plengkung Wijilan hingga area belakang Ruang Storage Museum Sonobudoyo Unit 2.

Disamping itu, guna menjaga keutuhan situs warisan dunia dan mitigasi risiko bencana telah diselesaikan pelestarian Tahap I berupa Pengamanan dan Perkuatan lereng Bukit Merak di kompleks Makam Para Raja di Imogiri seluas 8.627 meter persegi. di dalam area Jeron beteng sendiri, rehabilitasi Bangsal Kasatriyan dilakukan untuk menjaga nilai artistik sesuai pakem arsitektur aslinya.

Melengkapi penataan fisik tersebut, Pemda DIY juga memperkuat aspek non-fisik melalui alokasi Dais. Dukungan ini mencakup fasilitasi upacara adat, pengembangan SDM Abdi Dalem, Fasilitasi Arsip dan Perpustakaan Karaton, Fasilitasi Museum serta pemeliharaan Ringgit dan Gamelan, guna memastikan napas budaya tetap hidup di tengah modernitas.

2. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

a. Degradasi Fisik Sejarah : Memudarnya struktur asli beteng pertahanan akibat usia dan perubahan tata ruang kota
b. Kerusakan Infrastruktur : kerusakan sistem drainase dan terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH) yang menurunkan daya dukung lingkungan kawasan.
c. Ancaman Bencana : risiko longsor pada lereng Bukit Merak yang mengancam stabilitas dan keamanan situs sakral kompleks Makam Para Raja di Imogiri.
d. Risiko Kepunahan budaya : Tantangan dalam menjaga eksistensi tradisi, arsip sejarah dan artefak pusaka ditengah arus modernisasi.

2) **Solusi:**

a. Restorasi Marwah : Melakukan rekonstruksi fisik untuk mengembalikan fasad pertahanan asli Karaton sebagai ikon sejarah Yogyakarta

b. Revitalisasi Kawasan : Optimalisasi drainase dan perluasan area terbuka hijau guna meningkatkan kenyamanan publik sekaligus mempercantik estetika kawasan budaya.

c. Mitigasi Bencana : Pengamanan dan perkuatan struktur lereng bukit sebagai langkah konkret perlindungan situs warisan dunia.

d. Transformasi dan Regenerasi Budaya : Menghidupkan kembali upacara adat, melakukan pemeliharaan aset secara fisik maupun digital, serta memastikan transfer pengetahuan generasi muda.

3. Dokumentasi



Gambar 6.7. Rehabilitasi Beteng Margahinggil



Gambar 6.8. Rehabilitasi beteng Margahinggil



Gambar 6.9. Penguatan Lereng Bukit Merak



Gambar 6.10. Penguatan Lereng Bukit Merak



Gambar 6.11. Peningkatan SDM Abdi Dalem

E. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI

1. Kondisi Umum

Yogyakarta kini mengemban amanah sebagai pemilik situs warisan dunia setelah UNESCO menetapkan *"The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks"* pada September 2023. Penetapan dilakukan pada Sidang Warisan Dunia *"Extended 45th session of the World Heritage Committee"* di Riyadh, Arab Saudi, pada 24 September 2023. Sumbu Filosofi ini bukan sekadar garis imajiner, melainkan sebuah poros kehidupan yang membentang dari Panggung Krapyak–Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat–Tugu Pal Putih, dan dibatasi garis sungai di sebelah timur (Sungai Code) dan barat (Sungai Winongo) Kraton, Jalan Lingkar Selatan di selatan, dan Jalan RW Monginsidi di utara. Sumbu Filosofi mengusung konsep daur kehidupan manusia dari lahir, dewasa dan kembali kepada sang pencipta, dilambangkan dengan 144 atribut-atribut di sepanjang Sumbu Filosofi. di samping itu Sumbu Filosofi Yogyakarta juga merupakan manifestasi tata kota yang merepresentasikan pemikiran filosofis Jawa tentang kehidupan manusia dalam bentuk fisik, terutama siklus kehidupan (*Sangkan Paraning Dumadi*), kehidupan harmonis yang ideal (*Hamemayu Hayuning Bawana*), hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (*Manunggaling Kawula Gusti*), serta dunia mikrokosmik dan makrokosmik.

Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki nilai *Outstanding Universal Value* (OUV) kriteria (ii) dan kriteria (iii). Kriteria (ii) yaitu "Untuk menunjukkan pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting, dalam rentang waktu tertentu atau dalam wilayah budaya dunia, pada perkembangan arsitektur atau teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau desain lanskap", sedangkan kriteria (iii) yaitu "Untuk memberikan kesaksian yang unik atau setidaknya luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradaban yang hidup atau yang telah menghilang".

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2025

1) Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Sumbu Filosofi, progres sampai dengan tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

a. Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) Jogja Planning Gallery

Jogja Planning Gallery direncanakan dibangun di Jalan Malioboro No. 54–56, Kota Yogyakarta, pada lokasi eksisting Gedung DPRD DIY, sebagai ruang pamer perjalanan kehidupan Yogyakarta yang menampilkan filosofi, sejarah, tata ruang, dan visi masa depan. Proses perencanaan dimulai melalui Sayembara Pradesain tahun 2022, dilanjutkan penyusunan DED serta dokumen AMDAL dan ANDALALIN pada 2023, dan materi teknis konten pada 2024. Berada di Kawasan Malioboro yang termasuk Zona Cagar Budaya dan Zona Penyangga Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, pembangunan ini memerlukan penyusunan *Heritage Impact Assessment* (HIA)/Analisis Dampak Warisan Budaya (ADWB) tahun 2025 guna menilai potensi dampak, menjaga *Outstanding Universal Value* (OUV), serta memastikan pelestarian kawasan secara berkelanjutan.



Gambar 6.12. Forum Konsultasi Publik dan Dokumen Heritage Impact Assessment (HIA) Jogja Planning Gallery

b. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Pembangunan Jogja Planning Gallery

Pembangunan *Jogja Planning Gallery* (JPG) merupakan program strategis Pemda DIY sebagai pusat informasi dan edukasi sejarah, kebijakan, serta perencanaan pembangunan wilayah Yogyakarta berbasis tata ruang berkelanjutan dan nilai budaya lokal. Kegiatan ini telah dinyatakan layak lingkungan berdasarkan keputusan DPMPTSP Kota Yogyakarta dan sesuai ketentuan UU 32 Tahun 2009 serta PP 22 Tahun 2021, sehingga pemrakarsa wajib melaksanakan dan melaporkan RKL–RPL secara berkala. Pemda DIY sebagai pemrakarsa berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan setiap enam bulan guna memastikan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan berjalan efektif, khususnya seiring perubahan kondisi lahan yang kini telah kosong. Pelaporan ini menjadi wujud akuntabilitas pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan budaya, dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan Yogyakarta.



Gambar 6.13. Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Pembangunan Jogja Planning Gallery

c. Pengelolaan Toilet Titik Nol

Seiring meningkatnya kunjungan di kawasan Malioboro, Toilet Titik Nol di Jalan Senopati (Taman Parkir Senopati)

berperan sebagai fasilitas umum penting. Dibangun Pemda DIY pada tahun 2017 dengan konsep modern, toilet bawah tanah ini menyediakan fasilitas lengkap bagi pengunjung dan dikelola oleh 10 petugas kebersihan. Toilet beroperasi pukul 08.00–22.00, dengan jam operasional 24 jam pada periode tertentu, serta melayani 541.911 pengunjung sepanjang tahun 2025 dengan rata-rata 1.485 pengunjung per hari.



Gambar 6.14. Gambar Pengelolaan Toilet Titik Nol

2) Bidang Perhubungan/Transportasi

Pada aspek Penataan Transportasi di Kawasan Sumbu Filosofi, progres sampai dengan tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

a. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis

Pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada Kawasan Strategis Sumbu Filosofi dilaksanakan melalui sinergi dua pendekatan utama, yakni implementasi kebijakan semi pedestrian dan penguatan penegakan hukum lalu lintas. Penerapan skema semi pedestrian di koridor Malioboro menjadi langkah krusial dalam mendukung penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO. Upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut diarahkan untuk menjamin aspek keselamatan, kelancaran, serta kenyamanan pengguna jalan, sekaligus menginternalisasi budaya berlalu lintas yang tertib di kawasan inti kebudayaan.

Sejalan dengan komitmen mewujudkan kawasan rendah emisi (*Low Emission Zone*), Pemda telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis yang meliputi penataan manajemen arus kendaraan, pengaturan moda transportasi tradisional, serta optimalisasi pengelolaan Tempat Khusus Parkir (TKP). Lebih lanjut, integrasi angkutan umum ramah lingkungan terus diupayakan guna menciptakan ekosistem transportasi yang berkelanjutan di sepanjang Sumbu Filosofi. Adapun rincian teknis mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diimplementasikan pada kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

b. Penerapan Semi Pedestrian di Jalan Malioboro.

Kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui perwujudan Semi Pedestrian Malioboro yang telah diinisiasi sejak tahun 2020 dan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga Tahun 2025 menunjukkan komitmen keberlanjutan dari Pemda. Pada tahun berjalan, implementasi kebijakan ini difokuskan pada pengawasan, pengaturan, dan penjagaan lalu lintas secara statis di ruas Jalan Malioboro hingga Jalan Margo Mulyo. Secara simultan, dilakukan pula pengaturan dan penertiban lalu lintas secara dinamis (*mobile*) pada poros utama Tugu Pal Putih–Malioboro–Kraton–Panggung Krapyak beserta jaringan jalan penyangganya. Operasionalisasi kebijakan ini didukung penuh oleh pengerahan 89 personel "Jogo Margo" yang bertugas sepanjang tahun 2025. Penugasan personel tersebut merupakan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator output jumlah petugas pengendali lalu lintas di kawasan strategis, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan indikator *outcome* berupa terciptanya ketertiban dan kepatuhan pengguna jalan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan kinerja operasional, petugas Jogo Margo mencatat sebanyak 2.017 kasus pelanggaran lalu lintas selama tahun 2025, yang meliputi

pelanggaran parkir, pelanggaran rambu/marka, serta tindakan melawan arus. Akumulasi data pelanggaran ini tidak hanya berfungsi sebagai parameter pengawasan di lapangan, namun juga menjadi instrumen evaluasi strategis guna mengukur efektivitas pengendalian lalu lintas. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai basis data primer dalam perumusan kebijakan dan perbaikan perencanaan transportasi pada periode mendatang untuk memastikan keberlanjutan Sumbu Filosofi sebagai kawasan yang tertib dan berwawasan lingkungan.

c. Penegakan hukum lalu lintas di Kawasan Strategis.

Sebagai upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kawasan Strategis Sumbu Filosofi, Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan DIY telah melaksanakan 50 kali kegiatan penegakan hukum lalu lintas sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini berfungsi memperkuat tugas personel Jogo Margo dalam pengawasan harian, sekaligus memenuhi indikator output jumlah kegiatan penegakan hukum guna mencapai outcome berupa meningkatnya kepatuhan hukum pengguna jalan. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi lintas instansi yang melibatkan Polresta Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Satpol PP DIY, serta Polsek Danurejan, Gondomanan, Gondokusuman, dan Gedongtengen. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan cakupan pengawasan yang menyeluruh, mengingat koridor Malioboro melintasi empat wilayah hukum kepolisian sektor.

Dalam operasionalnya, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui pemberian sanksi tilang sesuai wewenang masing-masing penyidik. PPNS Dinas Perhubungan DIY melakukan penindakan khusus bagi kendaraan angkutan barang dan orang yang masuk kategori wajib uji, sementara pelanggaran kendaraan pribadi ditangani oleh Penyidik POLRI. Seluruh rangkaian penegakan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan

mandat UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, UU No. 20 Tahun 2025 (Pembaruan KUHAP), PP No. 80 Tahun 2012, serta SE Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2016 untuk memastikan legalitas dan efektivitas pengendalian di lapangan.

d. Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis

Dalam upaya mereduksi parkir di badan jalan (*on-street parking*) dan menciptakan kawasan Sumbu Filosofi yang ramah pejalan kaki, Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan DIY berfokus pada optimalisasi TKP Beskalan dan TKP Ketandan sebagai kantong parkir utama yang terintegrasi. Kedua fasilitas tempat khusus parkir tersebut dikelola dengan sistem berbasis APMS (*Advance Parking Management System*). Dimana sistem tersebut berjalan pada sistem manajemen *modern* berbasis digital yakni *manless* dan *cashless* seperti menggunakan metode pembayaran uang elektronik dan QRIS.

Pada tahun 2025, TKP Beskalan memiliki kapasitas 19 SRP mobil dan 383 SRP motor, sementara TKP Ketandan menyediakan 87 SRP mobil serta 535 SRP motor. Guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pemda secara konsisten melaksanakan pemeliharaan prasarana serta menyiagakan tenaga keamanan dan kebersihan sepanjang tahun untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir.

Selaras dengan komitmen pelestarian Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO, pada tahun 2025 telah dilakukan transformasi strategis berupa pengalihan fungsi TKP Abu Bakar Ali menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Proses pembongkaran fasilitas eksisting tersebut dilaksanakan secara terukur pada bulan Juni hingga Agustus 2025 dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja dan pengendalian dampak lalu lintas. Sebagai kompensasi

atas pengalihan fungsi tersebut, Pemda melakukan pembangunan konstruksi fisik TKP Ketandan Tahap 1 dari bulan April hingga Desember 2025. Pembangunan ini mencakup penyediaan sarana pendukung yang lebih representatif guna memastikan kesinambungan pelayanan parkir yang tertib dan aman bagi aktivitas masyarakat di kawasan inti Malioboro.

e. Penyediaan dan Pengaturan Moda Transportasi Tradisional di Kawasan Strategis

Dalam rangka mendukung penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia sekaligus mewujudkan Kawasan Rendah Emisi (*Low Emission Zone*), Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan DIY secara konsisten melakukan penguatan peran moda transportasi tradisional. Becak kayuh dan andong dioptimalkan bukan sekadar sebagai sarana mobilitas, melainkan sebagai identitas budaya yang selaras dengan nilai pelestarian kawasan bersejarah. Sebagai langkah konkret, telah dilaksanakan pengujian teknis kelaikan jalan bagi becak kayuh berpenguat tenaga listrik serta pengawasan operasional terhadap 90 unit becak kayuh bertenaga alternatif listrik yang telah dihibahkan pada tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut dilakukan guna menjamin aspek keselamatan, ketertiban wilayah operasi, dan kepatuhan terhadap standar teknis di lapangan.

Guna mendorong aspek kolaborasi dan sinergi kemitraan dalam pemenuhan infrastruktur maka dilakukan akselerasi kolaborasi lintas sektor melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan bantuan pemerintah pusat. Hingga tahun 2025, total becak listrik yang beroperasional di wilayah DIY telah mencapai 347 unit. Jumlah tersebut mencakup bantuan dari Universitas Ahmad Dahlan sebanyak 7 unit, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebanyak 50 unit, serta dukungan signifikan dari Presiden Republik Indonesia melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI

dengan pemberian becak listrik bagi masyarakat sebanyak 200 unit. Sinergi multipihak ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi tradisional yang lebih efisien dan modern tanpa meninggalkan akar budaya lokal.

Selain itu, guna memperkuat ekosistem transportasi tersebut, Pemda secara aktif melaksanakan kampanye penggunaan moda transportasi tradisional yang melibatkan para pengemudi sebagai duta pelestarian budaya. Melalui berbagai rangkaian kegiatan ini, kesadaran masyarakat dan wisatawan akan pentingnya transportasi ramah lingkungan terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, pengaturan dan penguatan moda transportasi tradisional ini diproyeksikan mampu menekan emisi kendaraan bermotor di kawasan inti, memperkuat citra Yogyakarta di tingkat internasional, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pelaku transportasi tradisional secara berkelanjutan.

f. Perwujudan Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis

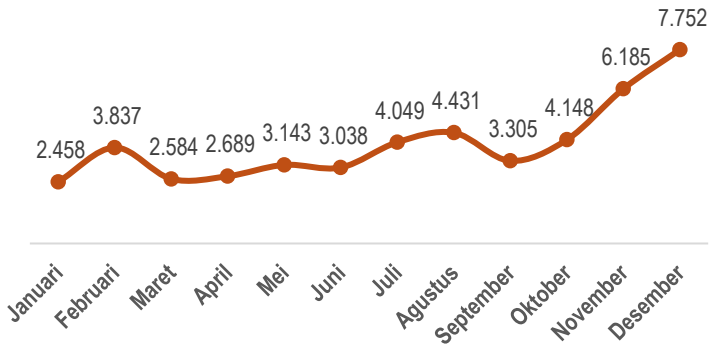
Pengembangan angkutan umum ramah lingkungan merupakan langkah strategis Pemda DIY dalam merespons tantangan global terkait perubahan iklim serta penurunan kualitas udara perkotaan. Mengingat sektor transportasi, khususnya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, diidentifikasi sebagai kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan polusi udara, maka transisi menuju moda transportasi yang berkelanjutan menjadi prioritas kebijakan. Upaya ini diarahkan untuk mereduksi dampak lingkungan melalui penggunaan teknologi transportasi yang lebih bersih dan efisien guna menjamin kelestarian ekosistem perkotaan di masa depan.

Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan DIY telah melakukan uji coba operasional Bus Listrik dengan berbagai skenario rute untuk memperoleh rute atau trayek dengan tingkat

pelayanan yang optimal. Adapun skenario perubahan trayek (*rerouting*) yang terbagi dalam tiga periode operasional sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(1) Periode I (Januari–April): Dioperasionalkan Trayek 1 dengan panjang lintasan 22 km pada pukul 08.00–16.00 WIB. Jalur ini berfungsi sebagai penghubung utama dari Bandara Adisutjipto melalui koridor pusat kota (Malioboro, RS. Bethesda, dan Jenderal Sudirman) menuju kawasan Kridosono, dan kembali ke titik awal. Fokus trayek ini adalah memperkuat aksesibilitas area perkantoran dan pendidikan dengan kawasan perbelanjaan Malioboro.
(2) Periode II (Mei–Agustus): Dioperasionalkan Trayek 2 sepanjang 12 km dengan pergeseran waktu layanan pada pukul 12.30–20.30 WIB. Trayek ini dirancang sebagai jalur lingkar tengah yang menjangkau titik krusial seperti Jalan Abu Bakar Ali, Malioboro, Titik Nol km, hingga Tugu Jogja. Penyesuaian jam operasional ini bertujuan untuk mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan pada waktu sore hingga malam hari.
(3) Periode III (September–Desember): Dioperasionalkan Trayek 3 dengan jarak tempuh 14 km pada pukul 08.00–16.00 WIB. Jalur ini menghubungkan simpul transportasi Terminal Jombor melalui poros utama Jalan Magelang menuju kawasan inti Sumbu Filosofi (Malioboro dan Titik Nol). Skema ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah utara dengan pusat kota guna menjamin kelancaran arus penumpang pada akhir tahun.

Sepanjang tahun 2025, implementasi uji coba operasional bus listrik menunjukkan tren pertumbuhan volume penumpang yang signifikan. Berdasarkan data akumulasi hingga bulan Desember 2025, total pemanfaatan layanan mencapai 47.697 penumpang dengan jumlah penumpang per bulan yang disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 6.15. Jumlah Penumpang Bus Listrik Tahun 2025

3. Bidang Kebudayaan

Hingga akhir tahun anggaran 2025, seluruh program pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi telah terlaksana dengan baik. Pencapaian ini terbagi ke dalam empat tolok ukur kinerja utama:

1) Konsultasi dan Studi Pengelolaan: Telah dilaksanakannya koordinasi strategis antara Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis dengan Kementerian Kebudayaan dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) yang meliputi pembahasan rencana penyusunan kajian *Roadmap* Implementasi Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi pada Bulan Mei 2025, serta serangkaian koordinasi teknis pengelolaan berkelanjutan pada bulan September dan November 2025.
2) Pengelolaan Warisan Budaya Dunia: Pemerintah telah memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui Pelatihan *Heritage Impact Assessment* (HIA) bagi tenaga ahli, serta Pelatihan *Historic Urban Landscape* (HUL) bagi aparat pemerintahan tingkat kelurahan di kawasan Sumbu Filosofi. Selain itu, aspek partisipasi publik diperkuat melalui pembentukan Kelompok Kerja Teknis Pengelola sebagai instrumen pelibatan masyarakat secara langsung.

   Pembentukan Kelompok Kerja Teknis memastikan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai filosofis,

tetapi juga sebagai subjek utama yang merasakan manfaat ekonomi dari status Warisan Dunia UNESCO. Melalui wadah ini, keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam:

a. Pengelolaan *Event* Tematik: Partisipasi aktif dalam penyelenggaraan *Jogja World Heritage Festival* dan berbagai *event* tematik lainnya yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan UMKM lokal di sepanjang Sumbu Filosofi.
b. Penggerak Pembangunan Berkelanjutan: Menjadikan warisan budaya sebagai aset ekonomi yang dikelola langsung oleh komunitas, sehingga tercipta ekosistem pariwisata berbasis budaya yang memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi warga setempat.

3) Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia: Disusunnya Dokumen Kajian *Roadmap* Implementasi Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi yang merupakan upaya sinkronisasi rencana-rencana pengelolaan di kawasan Sumbu Filosofi. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen integrasi kebijakan lintas sektor guna menjamin sinkronisasi rencana pembangunan dan pelestarian di kawasan tersebut.
4) Publikasi Warisan Budaya Dunia: Upaya diseminasi informasi dan peningkatan *awareness* masyarakat dilaksanakan melalui pengelolaan media sosial, penyelenggaraan *Jogja World Heritage Festival*, Peringatan Hari Warisan Dunia, serta 5 kali penyelenggaraan *event* tematik yang berlokasi di sepanjang Sumbu Filosofi.

4. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Diperlukan penambahan lahan untuk pengembangan JPG.
b. Masifnya pertumbuhan populasi Becak Motor (Bentor) memberikan tekanan terhadap eksistensi becak kayuh di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Hal ini tercermin dari adanya pergeseran preferensi pengguna jasa yang

mengakibatkan penurunan pendapatan dan volume operasional moda transportasi tradisional;

c. Masih ditemukannya praktik parkir liar di kawasan strategis menjadi tantangan dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Aktivitas tersebut terpantau mengokupasi ruang publik yang tidak diperuntukkan bagi parkir, khususnya pada sirip-sirip Jalan penyangga Malioboro serta area Ketandan, yang seharusnya steril dari parkir on-street;
d. Pada November 2025, dilakukan evaluasi kebijakan Semi Pedestrian Area dengan memperpanjang waktu operasional dari pukul 18.00–21.00 WIB menjadi pukul 17.00–22.00 WIB. Namun, perubahan ini memicu banyak keluhan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada meningkatnya pelanggaran arus masuk kendaraan melalui jalan-jalan sirip di sekitar Malioboro. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih luas agar perubahan kebijakan dapat dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat.
e. Terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian dengan dinamika perkotaan dan koordinasi pengelolaan di Kawasan Sumbu Filosofi.

2) Solusi

a. Pengadaan lahan untuk pengembangan JPG dilaksanakan di Tahun 2026.
b. Meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan dalam rangka pengembangan infrastruktur pendukung transportasi ramah lingkungan, seperti becak kayuh bertenaga alternatif (listrik) dan bus listrik. Serta melakukan evaluasi berkelanjutan secara mandiri terhadap operasional becak kayuh bertenaga alternatif terus dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan standar kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jasa. Sehingga secara bertahap minat pengguna jasa akan bergeser dari semula menggunakan becak motor (bentor) berpindah menjadi menggunakan becak kayuh bertenaga alternatif (Listrik);

c. Penguatan Forum Lalu Lintas sebagai wadah sinergi antarinstansi guna mengatasi kompleksitas permasalahan di Kawasan Sumbu Filosofi. Mengingat kawasan ini memiliki kepentingan lintas sektoral, penanganan parkir liar harus dilaksanakan secara terpadu melalui kerja sama antara Kepolisian, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan instansi terkait lainnya. Melalui koordinasi yang solid, diharapkan pengawasan dan penertiban di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan konsisten;
d. Perlu penyediaan dan pemasangan pagar penutup jalan yang bersifat semi-permanen pada akses masuk Jalan Malioboro. Langkah fisik ini diintegrasikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor yang diwadahi dalam Forum LLAJ. Serta perlu perluasan jangkauan edukasi public melalui, sosialisasi intensif yang dilakukan melalui optimalisasi media elektronik, media sosial, dan platform podcast guna memastikan pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap berbagai kebijakan transportasi di Kawasan Sumbu Filosofi.
e. Pemda DIY melakukan penguatan payung kebijakan melalui upaya sinkronisasi rencana pengelolaan. Selain itu, pendekatan partisipatif melalui Kelompok Kerja Teknis dan pelatihan *Historic Urban Landscape* (HUL) terus digencarkan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek yang aktif menjaga nilai filosofis kawasan di tengah arus modernisasi. Penerapan *Heritage Impact Assessment* (HIA) dan *Historic Urban Landscape* (HUL) di tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol, tetapi sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Melalui pendampingan dari tenaga ahli, masyarakat lokal dan pelaku usaha di kawasan Sumbu Filosofi kini memiliki panduan konkret untuk:

    (1) Pembangunan Adaptif: Melakukan renovasi atau pengembangan usaha yang tetap selaras dengan

standar *Outstanding Universal Values* (OUV), sehingga aktivitas ekonomi produktif tetap berjalan tanpa merusak integritas warisan budaya.

(2) Mitigasi Dampak: Memberikan kepastian bagi investor lokal dan warga mengenai batas-batas pengembangan fisik yang diizinkan, sehingga mengurangi hambatan administratif dalam berusaha di kawasan cagar budaya.

5. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.16. Koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan RI



Gambar 6.17. Koordinasi dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO



Gambar 6.18. Pelatihan HUL



Gambar 6.19. Pelatihan HIA



Gambar 6.20. Jogja World Heritage Festival 2025



Gambar 6.21. Peringatan Hari Warisan Dunia 2025



Gambar 6.22. Event Selasa Wagen 2025



Gambar 6.23. Pengelolaan Media Sosial 2025

F. PENATAAN KAWASAN PURO PAKUALAMAN

1. Kondisi Umum

Kadipaten Pakualaman, yang berdiri sejak tahun 1812, bukan sekadar entitas sejarah melainkan pilar penting kebudayaan di Indonesia. Sebagai daerah swapraja yang telah berusia lebih dari 210 tahun, Pakualaman menjadi episentrum pelestarian karya budaya mulai dari arsitektur vernakular, manuskrip kuno, hingga upacara adat yang masih relevan dengan kehidupan modern.

Sesuai dengan *Sabda Dalĕm* K.G.P.A.A. Paku Alam X pada 7 Januari 2016, penataan kawasan ini merupakan manifestasi dari kewajiban pengemban kebudayaan Mataram. di tengah arus perubahan zaman yang sangat cepat, penataan kawasan Puro Pakualaman bertujuan untuk:

1) Menjaga Integritas Tradisi: Memastikan aset *tangible* (bangunan/fisik) dan *intangible* (adat) tetap terjaga di tengah modernisasi.
2) Inovasi dan Pembaruan: Melakukan sinkronisasi antara pelestarian nilai lama dengan kebutuhan fasilitas publik masa kini.
3) Penyatuan Ruang Budaya dan Masyarakat: Memperkuat jati diri bangsa melalui kearifan lokal yang terwujud dalam penataan lingkungan yang asri dan sarat makna filosofis.

2. Progres Penataan dan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Tahun 2025

Pelaksanaan program penataan dan pelestarian di Kadipaten Pakualaman hingga tahun 2025 difokuskan pada optimalisasi penggunaan dana hibah untuk memperkuat identitas keistimewaan DIY. Secara umum, progres kinerja terbagi ke dalam dua pilar strategis yaitu:

1) Kegiatan Rutin Utama, yaitu upacara adat, dan kegiatan budaya yang berfokus pada aktualisasi nilai budaya.
2) Kegiatan Rutin Pendukung yaitu berbagai kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rutin Utama yang berfokus pada manajerial aset dan operasional istana.

Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) Kegiatan Rutin Utama

a. Hadĕging Kadipaten Pakualaman

Peringatan ke-219 tahun (Jawa) pada 13 Desember 2024 dan peringatan Masehi pada 22 Juni 2025 telah dilaksanakan baik secara tatap muka maupun *virtual*.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan *Hadĕging Kadipaten Pakualaman,* antara lain :

(1) Ziarah ke makam K.G.P.A.A. Paku Alam I–IX, di Hastana Kuthagedhe dan Giriganda.
(2) Wilujengan/Tasyakuran
(3) Sayembara Macapat “Paku Alam *Cup* XIII”
(4) Sayembara Cengkok Macapat
(5) Lomba Literasi Aksara Jawa
(6) Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Budaya
(7) Lomba Tari Klasik Gagrag Pakualaman
(8) Lomba Mewarnai Motif Batik, Motif Tokoh Pewayangan dan Motif dengan tema tertentu.

(9) Lomba *Grandprix* Lukis Pelajar “Paku Alam *Cup* VIII”
(10) Sayembara Jemparingan Mataraman
(11) Lomba Dolanan Anak
(12) Pacuan Kuda
(13) Kegiatan Darma Mulyarja Dalam Rangka Peringatan *Hadĕging Kadipaten Pakualaman*
(14) Resepsi dengan menampilkan berbagai kesenian Jawa dari peserta lomba maupun Abdi dalem.

b. Tingalan Wiyosan Dalĕm

Upacara adat hari kelahiran K.G.P.A.A. Paku Alam X yang jatuh pada Selasa Pahing, 18 Januari 2025 (18 Rejeb Jimakir 1958), dirangkaikan dengan wisuda kalenggahan bagi sentana dan abdi dalem yang berdedikasi.

c. Pembuatan Kue Apem

Kue apem dalam tradisi Jawa merupakan simbol ampunan. Prosesi pembuatan kue apem, disebut juga “*Ngapĕm*” dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun yaitu pada penyelenggaran *Tingalan Wiyosan Dalem* S.D.K.G.P.A.A. Paku Alam X di Bulan Rejeb dan pada acara “*nyadran*” di Bulan Ruwah .

d. Kuthamara

Kuthamara ‘memberi sesajian di makam leluhur, dari raja’, adalah upacara adat yang dilaksanakan di setiap bulan Ruwah menurut perhitungan kalender Jawa. Pada kesempatan itu K.G.P.A.A. Paku Alam X mengutus sejumlah sentana dan abdi dalem mengirim doa disertai kelengkapan sesaji ke makam leluhur, di Imogiri, Kuthagedhe, Giriganda, Sonyaragi, Trayu, Janturan, Wonosari, Gunungketur, dan lain-lain.

e. Garebeg Syawal

Upacara adat Garebeg Syawal ini diadakan dalam rangka Hari Raya Idhul Fitri dimana acara ini merupakan prosesi sebagai symbol Hajad Dalem (sedekah) dan kedermawanan Sultan kepada rakyatnya. Seperti tahun sebelumnya, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan satu buah Gunungan untuk Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya diperebutkan masyarakat. Setelah panampining Pareden Hajad Dalem Gunungan berakhir, dilanjutkan dengan pisowanan/ *ngabĕkten* sebagai bentuk bakti kepada K.G.P.A.A. Paku Alam X. Pada tahun 2025, Garebeg Syawal bertepatan pada tanggal 31 Maret 2025 atau 1 Syawal 1445 H.

f. Garebeg Besar

Upacara adat Garebeg Besar dilaksanakan bertepatan dengan Hari Raya Idul adha, setiap tanggal 10 Besar berdasarkan penanggalan kalender Jawa. Pada tahun 2025, Garebeg Besar bertepatan pada tanggal 7 Juni 2025. Peringatan Hari Idul Adha di Pura Pakualaman ditandai dengan acara *nampi parĕden* ‘menerima gunungan’ dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

g. Malam 1 Sura

Kegiatan ritual pada malam 1 Sura (1 Sura 1959 atau 27 Juni 2025) atau malam tahun baru Jawa dilakukan antara lain sebagai sarana untuk berintrospeksi diri atas segala yang telah dilakukan selama satu tahun berlalu, dan sekaligus memohon kemurahan Tuhan agar di tahun mendatang selalu dalam berkah-Nya. Pada malam tersebut, dilaksanakan ritual *tapa mbisu mubĕng wĕngkon Pakualaman* yakni berjalan kaki berarakan tanpa berucap (membisu), mengelilingi wilayah Pakualaman.

h. Labuhan

Hajad-dalĕm Labuhan dilaksanakan setiap tanggal 10 Sura, antara lain melabuh sejumlah *palawija* dan *ubarampe* yang lain yang dibawa dalam prosesi *parĕden* ke Pantai Glagah. Labuhan ini dilakukan antara lain sebagai wujud syukur K.G.P.A.A. Paku Alam X atas kemurahan dan berkah kasih Tuhan. Pada tahun 2025, ritual Labuhan 10 Sura 1959 bertepatan dengan tanggal 6 Juli 2025.

i. Siraman atau Jamasan Pusaka

Upacara adat *Jamasan* pusaka dilaksanakan setiap tahun sekali, yakni pada hari selasa kliwon atau jum'at kliwon di bulan Sura. Acara adat membersihkan pusaka dengan suatu tujuan tertentu, dilakukan dalam acara ritual rutin setiap bulan sura. Tujuan kegiatan ini antara lain untuk merawat benda-benda pusaka milik Kadipaten Pakualaman agar segenap pusaka terjaga dengan baik.

j. Garebeg Mulud

Upacara adat Garebeg Mulud ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W., yang menurut penanggalan kalender Jawa jatuh pada tanggal 12 Mulud atau pada tahun 2025 bertepatan pada tanggal 5 September 2025.

k. Kegiatan budaya bertepatan dengan *Wiyosan Sĕlapanan* K.G.P.A.A. Paku Alam X

Wiyosan Sĕlapanan K.G.P.A.A. Paku Alam X adalah Sabtu Kliwon. Diawali dengan kegiatan dzikir atau do'a bersama yang dilakukan oleh para abdi dalem suranggama , lalu pada malam Sabtu Kliwon diadakan "Diskusi Budaya" bagi khalayak umum; dan "sarasehan budaya" bagi abdi dalem. Selain itu, dikumandangkan *uyon-uyon* "Mulya Raras" di Bangsal Sewatama yang disiarkan langsung oleh media

elektronik. Pada hari Sabtu Kliwon, diadakan upacara Pergantian Prajurit dan *dwaja* 'bendera' di sekitar regol dan lomba *Jĕmparingan Mataraman* tingkat regional di Kestalan.

l. Gladhen Macapat

Pelatihan macapat "*Gladhen Macapat*" merupakan wahana belajar melantunkan tembang macapat bagi para abdi dalem. Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali dengan harapan agar para abdi dalem mengenal dan mencintai budaya sendiri.

m. Gladhen Bĕksa

Gladhen bĕksa 'pelatihan tari' diselenggarakan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis di Pura Pakualaman.

n. Pawiyatan Abdi Dalĕm

Pawiyatan abdi dalem adalah serangkaian kegiatan berupa upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi abdi dalem Pura Pakualaman. *Pawiyatan* ini diadakan minimal dua kali dalam setahun, dengan materi antara lain:

(1) Sejarah Kadipaten Pakualaman
(2) Tata Kelola Kadipaten Pakualaman
(3) Tata cara berpakaian adat Jawa
(4) *Unggah-ungguh* Bahasa Jawa
(5) Tata krama/etika
(6) Membaca dan menulis aksara Jawa
(7) Mengenal filosofi Jawa
(8) Pawiyatan lain yang mendukung pengembangan dan pelestarian budaya.

o. Pawiyatan-Pawiyatan di Kadipaten Pakualaman :

(1) Pawiyatan Sinden
(2) Pawiyatan Bahasa Asing (Bahasa Inggris);
(3) Pawiyatan Membatik
(4) Pawiyatan Peningkatan Kualitas SDM
(5) Pawiyatan Jemparingan
(6) Pawiyatan lain yang mendukung dan mencerdaskan warga DIY

p. Pemberdayaan Perpustakaan "Widyapustaka" Pura Pakualaman

Sebagai upaya mewujudkan *sabda dalem* Paku Alam X sebagai pengemban kebudayaan, kegiatan pelatihan, dan pengalihbahasaan naskah-naskah milik Pakualaman yang disimpan di Widyapustaka perlu dilakukan. Abdi dalem yang bertugas di Widyapustaka adalah SDM yang berkompeten dalam bidang bahasa dan sastra Jawa. Kegiatan yang dilakukan meliputi: alih aksara, penerjemahan, penyaduran, dan mengungkapkan kembali isi naskah kuna ke wahana buku cetak agar dapat dibaca oleh khalayak umum.

q. Kegiatan Virtual Budaya

Kegiatan Virtual Budaya ini bertujuan untuk melestarikan kegiatan budaya yang dilakukan secara virtual atau daring. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Kadipaten Pakualaman kepada masyarakat umum.

r. Peringatan Hari Keistimewaan DIY

Tanggal 31 Agustus tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan di Yogyakarta. Oleh karena itu, setiap tanggal 31 Agustus ditetapkan atau diperingati sebagai hari Keistimewaan DIY. Sebagai salah satu lembaga budaya dan dalam rangka mensyukuri undang-undang

keistimewaan, Kadipaten Pakualaman menggelar potensi masyarakat melalui gelar kesenian rakyat, gelar potensi ekonomi dan lain sebagainya.

2) Kegiatan Rutin Pendukung

Kegiatan pendukung difokuskan pada pemeliharaan aset dan operasional harian guna menunjang kelancaran kegiatan utama, yang terdiri dari:

a. Kapanitran (Kegiatan Operasional dan kesekretariatan):

Penyelenggaraan administrasi, rapat-rapat kawedanan, termasuk di dalamnya kegiatan Dharma Mulyarja untuk berbagi kebajikan dan menyejahterakan abdi dalem serta masyarakat.

b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Asset Budaya serta Pengadaan Fasilitas Kadipaten Pakualaman:

Pelaksanaan perawatan aset budaya baik benda (*tangible*) maupun budaya tak benda (*intangible*), serta pengadaan fasilitas pendukung di lingkungan Kadipaten Pakualaman.

c. Pengelola Warisan Budaya Kadipaten Pakualaman:

Pelaksanaan tugas pengamanan lingkungan, penjagaan aset bangunan, serta pengawalan teknis pada setiap upacara adat dan kegiatan rutin maupun insidental.

d. Pemeliharaan Bangunan-Bangunan Asset Kadipaten Pakualaman :

Perawatan rutin terhadap bangunan Istana (Pura Pakualaman), nDalem Pangeran, Pesanggrahan, makam-makam, serta bangunan sekolah (TK dan SD) di bawah naungan Kadipaten Pakualaman.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Degradasi Bangunan Cagar Budaya: Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan akibat faktor usia dan cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.
b. Kesenjangan Literasi Generasi Muda: Kurangnya minat generasi muda terhadap naskah kuno yang masih menggunakan aksara Jawa.
c. Keterbatasan Kapasitas Kawasan: Saat acara besar (seperti Garebeg atau Malam 1 Sura), area sekitar Pura mengalami kepadatan arus lalu lintas dan parkir.

2) Solusi

a. Melakukan audit struktur secara berkala dan menggunakan material restorasi yang sesuai dengan standar arkeologi namun memiliki daya tahan lebih tinggi.
b. Menggencarkan Kegiatan Virtual Budaya dan lomba-lomba kreatif (mewarnai batik, komik tokoh (mewarnai batik, komik tokoh wayang) untuk mendekatkan budaya dengan platform digital.
c. Koordinasi lintas instansi dengan Dinas Perhubungan untuk rekayasa lalu lintas dan optimalisasi lahan di sekitar kawasan sebagai kantong parkir sementara.

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.24. Tingalan Wiyosan Dalem Tumbuk Ageng



Gambar 6.25. Garebeg Syawal



Gambar 6.26. Labuhan



Gambar 6.27. Garebeg Mulud



Gambar 6.28. Hadeging Kadipaten Pakualaman Tahun Jawa

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan tahun 2025 menunjukkan sinergi yang kuat antara pemeliharaan tradisi leluhur (*tradition*) dan tuntutan inovasi masa kini (*innovation*). Penataan kawasan dan pelestarian budaya ini tidak hanya berperan dalam menjaga artefak sejarah, tetapi juga berhasil mendayagunakan kearifan lokal sebagai instrumen pembangunan karakter dan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat luas di DIY.

G. PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA

1. Kondisi Umum

Dari sisi Kepariwisataan, Kawasan Malioboro merupakan salah satu ikon utama pariwisata DIY yang memiliki nilai historis, budaya, dan ekonomi yang sangat tinggi. Sebagai pusat aktivitas wisata, perdagangan, dan seni budaya, Malioboro menjadi magnet bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Keberadaan pedestrian yang representatif, sentra UMKM, pertunjukan seni jalanan, serta kedekatannya dengan destinasi strategis seperti Keraton Yogyakarta, Benteng Vredeburg, dan Titik Nol Kilometer menjadikan Malioboro sebagai wajah utama pariwisata Yogyakarta.

Namun demikian, dinamika industri pariwisata yang semakin kompetitif menuntut adanya inovasi berkelanjutan dalam pengembangan daya tarik destinasi. Pola perjalanan wisatawan saat ini tidak hanya berorientasi pada kunjungan destinasi, tetapi juga pada pengalaman (*experience-based tourism*). Oleh karena itu, penyelenggaraan event pariwisata menjadi salah satu strategi efektif untuk menciptakan atraksi tambahan, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta meningkatkan belanja wisata.

Event pariwisata di kawasan Malioboro diharapkan mampu menghadirkan pengalaman tematik yang mengangkat kearifan lokal, seni budaya, kuliner, dan produk kreatif daerah. Selin berfungsi sebagai daya tarik baru, kegiatan ini juga menjadi ruang promosi bagi

pelaku UMKM, seniman lokal, serta komunitas kreatif, sehingga berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, penyelenggaraan event secara terencana dan berkelanjutan dapat berkontribusi dalam pemerataan kunjungan wisata sepanjang tahun (calendar of events), mengurangi ketergantungan pada musim liburan, serta memperkuat positioning Malioboro sebagai destinasi urban tourism berbasis budaya. Dengan mempertimbangkan potensi besar Malioboro serta kebutuhan akan inovasi atraksi wisata, maka penyelenggaraan event pariwisata menjadi langkah strategis untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperkuat citra destinasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi Pengambangan Kawasan Perkotaan, Pengembangan kawasan perkotaan di DIY diarahkan melalui penguatan aksesibilitas jaringan jalan sebagai fondasi utama pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Jaringan jalan berperan strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta memperkuat keterpaduan pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Pemda DIY menempatkan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan sebagai kebijakan prioritas untuk memperluas keterhubungan kawasan perkotaan dengan wilayah pinggiran dan kawasan berkembang.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas di wilayah perkotaan, Pemda memandang perlu penyediaan akses jalan menerus bagi kendaraan berat dan angkutan barang yang tidak berkepentingan langsung dengan kawasan perkotaan. Pengembangan koridor jalan alternatif dan jalur lingkar diarahkan untuk mengalihkan lalu lintas lintas wilayah dari pusat kota, guna menjaga kelancaran lalu lintas, meningkatkan keselamatan, serta mengurangi beban dan kerusakan jaringan jalan perkotaan.

Kebijakan penguatan aksesibilitas dan pengaturan pergerakan kendaraan berat tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem

transportasi perkotaan yang tertib, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di DIY. Namun, penguatan konektivitas jalan tersebut harus diimbangi dengan keandalan infrastruktur pendukung lingkungan, salah satunya melalui pengelolaan drainase yang terintegrasi di kawasan-kawasan perkotaan. Terkait hal tersebut, dilaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan pada sistem drainase MM UGM dan wilayah Ngestiharjo, sebagai upaya menjaga fungsi saluran agar tetap optimal dalam mengalirkan limpasan air permukaan serta mengurangi potensi genangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan sedimen, pengangkatan sampah, dan pemeliharaan rutin saluran secara swakelola.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Sekretariat Bersama Kartamantul, mengingat sistem drainase yang ditangani berada pada wilayah kewenangan lintas Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, sehingga diperlukan sinergi antarPemda untuk menjamin keterpaduan pengelolaan jaringan drainase. Dalam pelaksanaannya, sistem drainase permukaan tersebut memiliki keterkaitan dan tumpang tindih fungsi dengan jaringan irigasi, sehingga pengaturan operasi dan pemeliharaan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu fungsi irigasi, khususnya pada musim tanam dan masa distribusi air pertanian.

Sebagai dasar perencanaan dan pengendalian kegiatan, pengelolaan drainase permukaan ini telah mengacu pada Roadmap Drainase yang disusun pada tahun 2022, sehingga pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana pengembangan sistem drainase di wilayah tersebut.

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2025

1) Kepariwisataan

Event wisata yang dilakukan di tahun 2025 yang berlokasi di sepanjang jalan Malioboro, yaitu:

a. Pekan Budaya Tionghoa - Kegiatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta XX tahun 2025 diselenggarakan setiap hari selama 7 (tujuh) hari, mulai hari Kamis, 6 Februari sampai dengan Kamis 12 Februari 2025 mulai pukul 17.00 s.d 22.00 WIB dengan lokasi kegiatan berada di sepanjang Kawasan Kampoeng Ketandan, Jl. Ketandan Kulon, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DIY dan di sepanjang Jl.Malioboro sampai dengan Titik Nol Kilometer Yogyakarta khusus untuk acara Malioboro Imlek Carnival dan Opening Ceremony atau upacara pembukaan kegiatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2025.
b. Bergodo Jogo Malioboro - Kegiatan Bergodo Jogo Malioboro dilaksanakan setiap hari Sabtu & Minggu sore mulai pukul 16.00–21.00, dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025 di sepanjang Kawasan Malioboro Yogyakarta. Penyelenggaraan kegiatan Bergodo Jogo Malioboro dijadwalkan sepanjang tahun untuk mengantisipasi rendahnya kunjungan wisatawan pada low season, dan untuk lebih mendongkrak kunjungan wisatawan pada peak season pada masa liburan.
c. *Jogja Fashion Carnival* - Pawai Kemerdekaan Jogja Fashion Carnival 2025 dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025 dimulai pukul 13.00- 15.00 WIB di jalan Malioboro dengan mengusung tema “Swarna Mahardika” yang bermakna semangat bangsa yang tidak hanya bebas, tetapi juga bersinar dengan jati diri dan kebudayaan yang luhur. Hal ini terkait erat dengan kebanggaan kita dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.

2) Kawasan Perkotaan

Pengembangan Kawasan perkotaan Yogyakarta, progres sampai dengan tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

a. Pembangunan *Jogjakarta Outer RingRoad* (JORR)

Pemda DIY menginisiasi Pembangunan *Jogjakarta Outer RingRoad* (JORR) sebagai akses jalan menerus bagi kendaraan berat dan angkutan barang yang tidak berkepentingan langsung dengan kawasan perkotaan DIY, selain itu Pemda DIY melakukan penanganan terhadap kondisi Jalan Provinsi yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan wilayah pinggiran dan kawasan berkembang.



No	Nama Ruas Jalan	PANJANG	FS	DED	LARAP	AMDAL	Tersambung	Belum Tersambung	Keterangan
1.	Sentolo – Minggir	16,459 KM	2014	-	-	2019	16,459 KM		JORR SISI UTARA
2.	Minggir - Tempel	14,217 KM	2014	-	-	2019	14,217 KM		JORR SISI UTARA
3.	Tempel - Prambanan	35,257 KM	2014	-	-	2019	35,257 KM		JORR SISI UTARA
4.	Sentolo – Imogiri	22,00 KM	2016	-	-	2019	16,15 KM	5,85 KM	JORR SISI SELATAN
5.	Imogiri - Piyungan	16,325 KM	2016	-	-	2019	3,55 KM	12,775 KM	JORR SISI SELATAN
6.	Piyungan - Kalasan	9,155 KM	2016	-	-	2019	7,375 KM	1,78 KM	JORR SISI SELATAN

Gambar 6.29. Ruas Jalan JORR

Pembangunan JORR melintasi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan akibat terbukanya akses tol di Yogyakarta. Dengan terbangunnya JORR, akan mengurangi kepadatan lallu intas di perkotaan, memperlancar arus lalu intas antarkota, merangsang pertumbuhan pusat-pusat aktivitas baru dan menyediakan

jalur cepat bagi transportasi menerus yang tidak berkepentingan masuk ke Kota Yogyakarta. Pada Tahun 2025, telah dilakukan penyusunan DED Segmen Piyungan–Kalasan oleh Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Segmen Minggir–Tempel oleh Pemda DIY.

b. Penanganan Jalan Provinsi

Pada Tahun 2025, Terdapat penanganan Jalan Provinsi yaitu Peningkatan Jalan ruas Yogyakarta–Demakijo1 sepanjang 4,5 km, Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta–Pulowatu sepanjang 2 km, dan Rehabilitasi Jalan Yogyakarta–Pakem sepanjang 1 km. Jalan Provinsi tersebut diatas merupakan aksesibilitas dari perkotaan DIY ke wilayah dengan wilayah pinggiran dan kawasan berkembang.

c. Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan

Dalam upaya pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta dilaksanakan operasi dan pemelihaan drainase perkotaan di kawasan MM UGM dan wilayah Ngestiharjo. Kegiatan ini meliputi pembersihan sedimen, pengangkatan sampah, serta pemeliharaan rutin saluran drainase untuk menjaga kapasitas dan fungsi aliran air permukaan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan genangan. Luasan genangan yang berhasil ditangani mencapai 7,4 ha, melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,29 ha. Dengan capaian tersebut, permasalahan genangan pada kawasan sasaran dapat ditangani secara optimal dan berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan ke Malioboro masih cenderung terkonsentrasi pada musim liburan tertentu, sementara pada hari biasa atau low season terjadi penurunan aktivitas wisata yang berdampak pada pendapatan pelaku usaha lokal.
2) Keterbatasan atraksi tematik dan pengalaman wisata. Persepsi bahwa Malioboro hanya sebagai kawasan belanja dan jalan-jalan, sehingga lama tinggal relatif singkat dan belum memberikan pengalaman wisata yang mendalam.
3) Persaingan antardestinasi wisata yang semakin ketat. Munculnya destinasi baru di DIY dan daerah lain menuntut Malioboro untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan menarik bagi wisatawan.
4) Belum optimalnya promosi produk UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Banyak pelaku UMKM dan komunitas kreatif belum mendapatkan ruang promosi yang berkelanjutan dan terkurasi di kawasan Malioboro.
5) Kurangnya aktivitas terjadwal yang mampu menggerakkan kunjungan rutin. Belum adanya agenda event yang konsisten menyebabkan Malioboro belum sepenuhnya berfungsi sebagai pusat kegiatan wisata berbasis kalender event**.**
6) Tercemarinya jaringan drainase di kawasan MM UGM oleh limbah rumah tangga serta limbah dari warung kuliner yang berada di sepanjang saluran, sehingga berpotensi menurunkan kapasitas dan fungsi drainase.
7) Kerawanan pelanggaran sempadan jaringan drainase di kawasan Ngestiharjo, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengembangan permukiman, yang dapat menghambat kegiatan operasi dan pemeliharaan.
8) Belum optimalnya koordinasi penanganan genangan baru, karena belum ada pembagian kewenangan penyelenggaraan sistem jaringan drainase perkotaan di wilayah Yogyakarta yang melibatkan Pemerintah Pusat,

Pemda DIY, serta Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

9) Terdapat kebutuhan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dengan luasan yang cukup signifikan dan pembiayaan konstruksi yang cukup tinggi.
10) Terdapat Kondisi Jalan Provinsi DIY yang mempunyai kondisinya masih belum mantap.

b. Solusi

1) Meningkatkan kunjungan wisata di luar musim liburan. Event pariwisata yang terjadwal secara berkala dapat menjadi magnet kunjungan pada periode low season, sehingga menciptakan arus wisata yang lebih merata sepanjang tahun.
2) Menciptakan pengalaman wisata berbasis budaya dan kreativitas. Melalui event seni, budaya, kuliner, dan ekonomi kreatif, wisatawan memperoleh pengalaman tematik yang lebih kaya, mendorong peningkatan lama tinggal dan belanja wisata.
3) Memperkuat daya saing Malioboro sebagai destinasi unggulan. Event menjadi sarana branding destinasi yang efektif, memperkuat citra Malioboro sebagai pusat urban tourism berbasis budaya dan kreativitas.
4) Memberikan ruang promosi bagi UMKM dan komunitas lokal. Kegiatan event membuka peluang pemasaran langsung bagi pelaku UMKM, seniman, dan komunitas kreatif, sekaligus memperluas jejaring usaha.
5) Mendorong kolaborasi multipihak. Event pariwisata menjadi wadah sinergi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas, dan swasta dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
6) Menghidupkan kawasan melalui calendar of events. Dengan penyusunan kalender event tahunan, Malioboro dapat menjadi kawasan aktif sepanjang tahun, bukan hanya ramai pada momen tertentu.

7) Dilakukan penanganan melalui peningkatan frekuensi operasi dan pemeliharaan saluran, disertai koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kalurahan, serta pengelola kawasan untuk pengendalian pembuangan limbah ke saluran drainase.
8) Dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah yang membidangi penataan ruang dan pengawasan bangunan, guna mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar sempadan jaringan drainase. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan bersama dan penertiban secara bertahap, sehingga kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan drainase dapat dilaksanakan tanpa hambatan.
9) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran dan pemetaan lokasi genangan secara berkala sebagai dasar penyesuaian target kinerja dan penentuan prioritas penanganan.
10) Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait alternatif pembiayaan pembangunan jalan.
11) Penanganan kondisi eksisting Jalan Provinsi melalui berbagai sumber penganggaran.

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.30. Pekan Budaya Tionghoa 2025



Gambar 6.31. Bapak Gubernur dalam kegiatan Pekan Budaya Tionghoa 2025



Gambar 6.32. Bergodo Jogo Malioboro



Gambar 6.33. Paskribaka Jogja Fashion Carnival 2025



Gambar 6.34. Color Of Indonesia by Rumah Quinsa Jogja Fashion Carnival 2025

Dokumentasi Peningkatan Jalan Demakljo - Kebonagung 1 sepanjang 4 km tahun anggaran 2025



Gambar 6.35. Foto Dokumentasi 0% (kiri) dan 100% (kanan) pada sta 2+800

Dokumentasi Rehabilitasi Jalan Yogyakarta - Pakem sepanjang 1 km tahun anggaran 2025



Gambar 6.36. Foto Dokumentasi 100% pada sta 0+750 (kiri) dan 0+900 (kanan)

Dokumentasi Rehabilitasi Jalan Yogyakarta - Pulowatu sepanjang 2 km tahun anggaran 2025



Gambar 6.37. Foto Dokumentasi 100% pada sta 0+350 (kiri) dan 0+500 (kanan)

Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM



0% 50% 100%

Pemeliharaan Saluran Drainase di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul



0% 50% 100%

H. PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI SELATAN DIY

1. Kondisi Umum

Ditinjau dari Pengembangan Jaringan Jalan, pengembangan jaringan Jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) diarahkan untuk mendukung pemerataan aksesibilitas sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, khususnya di kawasan selatan DIY. JJLS merupakan tulang punggung (*backbone*) sistem transportasi di sisi selatan DIY yang berfungsi menghubungkan Bandara YIA dengan kawasan-kawasan pariwisata di sepanjang Pantai Selatan DIY.

Selain isu aksesibilitas antarwilayah, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan isu nyata yang terjadi secara global, nasional, hingga daerah, termasuk di DIY. Peningkatan emisi GRK menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem seperti hujan tidak menentu, kekeringan, serta banjir dan longsor. Kondisi ini berdampak langsung pada lingkungan, ketahanan sosial-ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Sebagai wilayah dengan karakter geografis yang beragam, DIY memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap perubahan iklim. Sektor pertanian, sumber daya air, energi, dan pariwisata termasuk yang paling terdampak. Khusus pada kawasan pesisir selatan, perubahan pola iklim dan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu aktivitas wisata yang menjadi penggerak ekonomi lokal.

Penguatan sektor energi melalui penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan menjadi bagian penting dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satunya adalah bagaimana melakukan transisi energi dari energi fosil untuk beralih/diimbangi dengan penggunaan energi bersih dari energi terbarukan.

Wilayah DIY merupakan wilayah terkecil kedua di Pulau Jawa, hal tersebut berimbas pada potensi energi terbarukan DIY yang juga sangat terbatas. Kawasan Pantai Selatan DIY menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan energi terbarukan

yang dapat dimanfaatkan. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLTH) Pantai Baru milik Pemda DIY di kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul mencerminkan upaya transisi energi sekaligus dukungan terhadap pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal. Pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya meningkatkan keandalan pasokan listrik di kawasan pesisir, tetapi juga mendukung operasional fasilitas wisata dan UMKM secara lebih ramah lingkungan, sehingga memperkuat ketahanan pariwisata DIY di tengah tantangan perubahan iklim.

Ditinjau dari penataan ruang. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten secara rinci telah tercantum terkait dengan arahan pengembangan pada kawasan SRS termasuk kawasan di sekitar pantai selatan. Ditinjau dari pengembangan wilayah pesisir, Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY merupakan salah satu prioritas pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan wilayah pesisir melalui pengembangan desa maritim. Upaya ini dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Maritim yang didanai dari Dais dan telah berlangsung secara konsisten sejak tahun 2021 hingga tahun 2025.

Pelaksanaan BKK Desa Maritim diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat pesisir dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki kalurahan, khususnya potensi yang berkaitan erat dengan karakter, tradisi, dan budaya maritim. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan sosial dan budaya masyarakat pesisir sebagai bagian dari identitas keistimewaan DIY.

Melalui BKK Desa Maritim, berbagai kegiatan pengembangan dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir, penguatan kelembagaan desa, serta

pengembangan usaha berbasis potensi kelautan dan perikanan lokal. Kegiatan tersebut antara lain berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir, pengembangan produk perikanan berbasis kearifan lokal, penguatan peran kelompok usaha dan kelompok masyarakat pesisir, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana pendukung aktivitas kelautan dan perikanan skala kalaurahan.

Selain aspek ekonomi, BKK Desa Maritim juga diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya maritim yang hidup di masyarakat pesisir Pantai Selatan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan yang mendorong pelestarian tradisi kelautan, penguatan identitas desa pesisir, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik dan produktif, tetapi juga memperkuat karakter dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat pesisir.

Pemanfaatan Dais dalam pelaksanaan BKK Desa Maritim menjadi instrumen penting dalam mendukung kewenangan keistimewaan DIY, khususnya dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya serta tata kehidupan masyarakat berbasis maritim. Selama periode 2021–2025, program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong tumbuhnya kalurahan-kalurahan pesisir yang lebih berdaya, mandiri, dan memiliki daya saing, sekaligus memperkuat peran Pantai Selatan sebagai kawasan strategis pembangunan berbasis kelautan dan perikanan.

Ke depan, pengembangan desa maritim melalui BKK diharapkan dapat terus diperkuat dan disinergikan dengan program lintas sektor lainnya, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY secara menyeluruh.

Ditinjau dari sisi Kepariwisataan, Kawasan Pantai Parangtritis–Parangkusumo merupakan salah satu destinasi unggulan DIY yang memiliki daya tarik alam dan nilai budaya yang khas. Selain panorama pantai selatan yang ikonik, kawasan ini juga lekat dengan tradisi spiritual dan budaya Keraton Yogyakarta, seperti ritual Labuhan serta berbagai kearifan lokal yang menjadi identitas kawasan. Kombinasi antara wisata alam, budaya, dan sejarah menjadikan Parangtritis–Parangkusumo sebagai destinasi strategis dalam pengembangan pariwisata DIY.

Namun demikian, pola kunjungan wisatawan ke kawasan ini masih bersifat musiman dan cenderung terkonsentrasi pada akhir pekan serta musim liburan. Pada hari biasa dan periode low season, aktivitas wisata relatif menurun, yang berdampak pada pendapatan pelaku usaha lokal, UMKM, serta tingkat pemanfaatan fasilitas pariwisata yang belum optimal. Selain itu, persepsi wisatawan yang masih melihat kawasan ini sebagai destinasi singgah (one day trip) menyebabkan lama tinggal dan belanja wisata belum berkembang secara maksimal.

Seiring dengan perubahan tren pariwisata yang semakin mengarah pada wisata berbasis pengalaman (experience-based tourism), diperlukan inovasi atraksi yang mampu memberikan nilai tambah bagi wisatawan. Penyelenggaraan event pariwisata menjadi salah satu strategi efektif untuk memperkaya daya tarik destinasi, menciptakan pengalaman tematik, sekaligus meningkatkan frekuensi kunjungan. Event yang mengangkat potensi alam, budaya pesisir, seni tradisi, kuliner lokal, serta produk ekonomi kreatif diharapkan mampu memperkuat citra Parangtritis–Parangkusumo sebagai kawasan wisata terpadu.

Selain sebagai magnet kunjungan, event pariwisata juga berperan sebagai media promosi bagi UMKM dan komunitas lokal, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta mendorong perputaran ekonomi kawasan. Dengan konsep yang terencana dan berkelanjutan, event dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan, meningkatkan

belanja wisata, serta menciptakan pemerataan kunjungan sepanjang tahun melalui penyusunan kalender event.

Berdasarkan potensi kawasan dan tantangan pengembangan pariwisata tersebut, penyelenggaraan event pariwisata di Pantai Parangtritis–Parangkusumo menjadi langkah strategis untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperkuat identitas destinasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi Lingkungan Hidup, Kawasan Pantai Selatan DIY diarahkan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi baru berbasis pariwisata alam, jasa lingkungan, perikanan, serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan. Kawasan ini mencakup wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul yang selama ini memiliki keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur dasar, serta kerentanan ekologis tinggi berupa kawasan karst, sempadan pantai, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

1) Pengembangan Jaringan Jalan



Gambar 6.38. Jaringan Jalan JJLS

Panjang total JJLS di wilayah DIY adalah 116,07 km, membentang dari wilayah barat DIY di Congot, Kabupaten Kulon Progo, hingga wilayah timur DIY di Duwet, Kabupaten Gunungkidul. Sampai dengan Tahun 2025, masih terdapat satu titik ruas yang belum tersambung, yaitu Ruas Kretek–Girijati yang

masih dalam tahap proses pembangunan sepanjang 5,35 km, sisa segmen berada pada pembangunan jembatan. Selain itu, masih terdapat sisa segmen tambahan yang belum terbangun sepanjang 980 meter jalan penghubung dari jembatan ke ruas jalan eksisting pada Ruas Kretek–Girijati, serta usulan pelebaran jalan berupa penambahan lajur sepanjang 1,87 km pada Ruas Samas–Kretek.

Pada sisi pengadaan tanah pembangunan JJLS, untuk kebutuhan pembangunan 2 (dua) lajur telah terselesaikan dan terbebaskan 100 persen pada seluruh segmen. Namun demikian, untuk rencana pengembangan JJLS menjadi 4 (empat) lajur, hingga saat ini masih terdapat beberapa segmen yang belum sepenuhnya tuntas dalam proses pembebasan lahan, yaitu pada segmen Girijati–Legundi, Legundi–Planjan, serta Congot–Ngremang.

Selain capaian di sektor infrastruktur jalan, keberhasilan pembangunan juga mencakup pengelolaan sarana prasarana energi terbarukan di Kawasan pantai selatan. Hal ini terwujud melalui PLTH Pantai Baru yang hingga akhir tahun 2025 masih terus beroperasi memberikan dukungan suplai listrik secara gratis kepada 49 warung kuliner dan 99 titik penerangan jalan di kawasan wisata Pantai Baru. Upaya pemeliharaan juga secara bertahap terus dilakukan untuk menjaga kinerja PLTH Pantai Baru tetap optimal.



Gambar 6.39. Dokumentasi Pemeliharaan PLTH Pantai Baru



Gambar 6.40. Dokumentasi PLTH Pantai Baru dan pemanfaatan listriknya untuk PJU

Selain sebagai pembangkit listrik energi terbarukan yang telah membantu menyediakan pasokan listrik di kawasan wisata tersebut, PLTH Pantai Baru juga menjadi sarana wisata edukasi minat khusus. Data kunjungan edukasi masyarakat ke PLTH Pantai Baru sampai dengan Desember 2025 adalah sejumlah 911 orang, sedangkan untuk pendampingan PKL dan penelitian di lokasi PLTH masing-masing sejumlah 16 orang (PKL) dan 5 orang (penelitian). Data tersebut menunjukan bahwa keberadaan PLTH Pantai Baru dapat memberikan dampak positif yang cukup signifikan, tidak hanya penyuplai energi namun juga menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat.

Secara umum, meskipun potensi energi terbarukan di DIY relatif terbatas, pemanfaatannya menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020. Hal tersebut tercermin dari peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer DIY, yaitu sebesar 6,08 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 6,91 persen pada tahun 2023, dan mencapai 7,65 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025, porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer diperkirakan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pendukung.

2) Penataan Ruang

Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY setiap tahun melakukan penilaian perwujudan terhadap pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS), antara lain:

a. SRS Pantai Selatan Gunungkidul

(1) Struktur Ruang

SRS Pantai Selatan Gunungkidul merupakan SRS yang terletak pada Kabupaten Gunungkidul, dengan delineasi di sepanjang pantai selatan. SRS ini mempunyai 63 arahan indikasi program SPW SRS, dengan keterwujudan program pada tahun 2025 sebanyak 26 program, menurun dibandingkan tahun 2024 dengan program terlaksana sebanyak 32 program, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1. Nilai Perwujudan SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	INDIKATOR	Arahan	Realisasi	Nilai Perwujudan
I.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	63	26	41,27%
A.	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENGEMBANGAN KECAMATAN	13	6	46,15%
B.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA	50	20	40,00%
1.	Perwujudan Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan	4	0	0%
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	6	3	50,00%
3.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	3	0	0%
4.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	12	6	50,00%
5.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	2	1	50,00%
6.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum	8	4	50,00%
7.	Perwujudan Sistem Persampahan	6	2	33,33%
8.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah	1	0	0%
9.	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase	5	1	20,00%
10.	Perwujudan Sistem Penyediaan Prasarana Mitigasi Bencana	3	3	100%

Dalam penilaian perwujudan struktur ruang terdapat sub program kegiatan dengan nilai 100%, dengan artian terwujud, karena melebihi standar keterwujudan di atas 85%, yaitu pada program Perwujudan Sistem Penyediaan Prasarana Mitigasi Bencana, dengan 3 kegiatan diantarnya, Pemasangan Early Warning System (EWS), Penetapan jalur evakuasi bencana, dan Penyediaan ruang evakuasi bencana, dengan konsentrasi lokasi pada Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul, kawasan JJLS, dan beberapa kelurahan tercantum, dan BNPB, BPBD DIY, BPBD Kabupaten Gunungkidul sebagai instansi pengampu.

Terdapat juga sub program dengan nilai 0,00% atau belum terlaksana sama sekali, diantaranya, Perwujudan Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan (4 kegiatan), Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi (3 kegiatan), dan Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (1 kegiatan).

(2) Keterwujudan Pola Ruang

SRS Pantai Selatan Gunungkidul memiliki rata-rata nilai keterwujudan yang tinggi, yaitu 96,68% pada Kawasan Lindung dan 96,31% pada Kawasan Budidaya. Pada Kawasan Lindung, Sebagian besar zona memiliki nilai keterwujudan >90% antara lain Sempadan Mata Air, Sempadan Waduk/Telaga/Embung, Pemakaman, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Kawasan Cagar Alam Geologi. Sedangkan zona Taman Kelurahan memiliki nilai keterwujudan kurang dari 85% dan dikategorikan “Belum Terwujud”. Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2025 eksisting, sekitar 4,03 ha pada rencana zona Taman Kelurahan saat ini masih berupa bangunan. Sama halnya dengan Taman Kelurahan, zona-zona pada Kawasan Lindung

belum mencacpai nilai keterwujudan 100% karena terdapat tutupan lahan berupa bangunan.

Sementara pada Kawasan Budidaya pun Sebagian besar zona telah memiliki nilai keterwujudan lebih dari 85% antara lain Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Pariwisata. Sedangkan zona dengan kategori Belum Terwujud antara lain Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Perumahan, serta Kawasan Perdagangan dan Jasa. Adapun persentase perwujudan pola ruang antara lain:

Tabel 6.2. Persentase Pola Ruang

SRS Pansela Gunungkidul	Total Luas (ha)	Realisasi (ha)	Tidak Mendukung (ha)	Nilai Keterwujudan
Kawasan Lindung	1.239,16	1.197,96	41,20	96,68
Badan Air	28,43	28,4	0,00	100%
Sempadan Mata Air	322,54	312,6	9,99	96,90%
Sempadan Waduk/ telaga/ Embung	303,69	278,7	24,97	91,78
Taman Kelurahan	12,77	8,9	3,86	69,78
Pemakaman	12,62	12,0	0,58	95,37
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	401,80	400,6	1,18	99,71
Kawasan Cagar Alam Geologi	157,32	156,7	0,63	99,60
Kawasan Budidaya	36.691,00	35.338,44	1.352,56	96,31
Badan Jalan	71,47	71,5	0	100,00%
Hutan Produksi tetap	1.180,91	1.146,0	34,89	97,05%
Kawasan Tanaman Pangan	28.476,66	28.115,4	361,22	98,73%
Kawasan Hortikultura	1.168,24	1.150,4	17,80	94,48%
Kawasan Perkebunan	2.956,84	2.935,1	21,70	99,27
Kawasan Perikanan Tangkap	68,99	57,6	11,40	83,48
Kawasan Pariwisata	262,38	262,4	0,00	100,00%
Kawasan Perumahan	2.426,92	1.541,0	885,88	63,50%
Kawasan Perdagangan dan Jasa	78,59	58,9	19,68	74,96%
Total	37.930,16	36.536,40	1.393,76	96,33%

b. SRS Pantai Samas-Prangtritis

(1) Struktur Ruang

SRS Pantai Samas Pantai Parangtritis terletak di kabupaten Bantul, mempunyai 60 arahan indikasi program, dengan 23 program telah terlaksana atau terwujud pada tahun ini, sedangkan 37 sisanya belum terwujud. Hasil perhitungan penilaian perwujudan memperoleh nilai 36,02%, mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 28,33%, dengan selisih kenaikan 7,69%, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 6.3. Hasil PenilaianPerwujudan

INDIKATOR		Arahan	Realisasi	Nilai Perwujudan
	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	60	21,61	36,02%
A.1	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA	9	1,00	11,11%
A.2	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA	51	20,61	40,41%
A.2.1	Perwujudan Sistem Sarana dan Prasarana Lingkungan	4	0,00	0,00%
A.2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	4	3,00	75,00%
A.2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	5	1,00	20,00%
A.2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	8	1,00	12,50%
A.2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	5	2,00	40,00%
A.2.6	Perwujudan Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum	4	4,00	100,00%
A.2.7	Perwujudan Sistem Persampahan	7	5,11	73,00%
A.2.8	Sistem Pengelolaan Air Limbah	3	0,00	0,00%
A.2.9	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase	6	0,00	0,00%
A.2.10	Perwujudan Sistem Penyediaan Prasarana Lainnya	5	4,50	90,00%

Terdapat dua sub program terlaksana dan terwujud dengan nilai rata-rata 100%, diantaranya Perwujudan Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum dan Perwujudan Sistem Penyediaan Prasarana Lainnya. Empat kegiatan yang terdapat Perwujudan Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum adalah Pengoptimalan jaringan distribusi air

minum, Penambahan Jaringan Perpipaan PDAM, Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi, dan Pemeliharaan jaringan transmisi air baku, fokus dengan lokasi pada seluruh Kawasan SRS Pantai Samas Parangtritis dan beberapa kalurahan di dalamnya, serta DPUP-ESDM DIY, PDAM sebagai instansi pengampu.

Terdapat penilaian 0,00% atau belum terwujud sama sekali terdapat pada Perwujudan Sistem Sarana dan Prasarana Lingkungan (4 kegiatan), Sistem Pengelolaan Air Limbah (3 kegiatan) dan Perwujudan Sistem Jaringan Drainase (6 kegiatan).

(2) Keterwujudan Pola Ruang

Nilai keterwujudan SRS Pantai Samas–Parangtritis, untuk kawasan lindung maupun budidaya memperoleh nilai sudah mencapai diatas ambang batas nilai keterwujudan sebesar 85% atau dengan kata lain terwujud. Skor pemanfaatan keterwujudan pola ruang pada kawasan lindung memperoleh nilai 90,73% dengan realisasi luasan 708,19ha, dengan nilai 100% pada beberapa rencana pola ruang, diantaranya: Badan Air, Ekosistem Mangrove, Taman Kecamatan dan Pemakaman. Nilai terendah terdapat pada pola sempadan mata air 11,46%, dengan total luasan 25,12 ha namun realisasinya hanya 2,9 ha.

Kawasan Budidaya memperoleh peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 94,25% dengan realisasi luasan 5.258,99ha, dari yang tahun sebelumnya belum terwujud menjadi terwujud dengan nilai tinggi, dengan peroleh skor tertinggi 100% terdapat pada rencana pola ruang kawasan pertahanan dan keamanan,. Presentase pemanfaatan pola ruang terendah terdapat pada rencana pola kawasan perdagangan dan jasa sebesar 53,11%. Luasan total

terbesar terwujud berada pada kawasan perumahan sebesar 2190,87 ha, dengan nilai realisasi 2039, 1 ha, dan skor keterwujudan pola ruang yang tinggi sebesar 93,07%.

Namun masih ada kawasan yang tidak mendukung dari hasil analisis keterwujudan pada SRS ini, atau tidak sesuai pada kawasan lindung dengan prosentase 9,27% dengan luasan 72,34ha. Kemudian pada kawasan budidaya 5,75% dengan luasan 320,63ha. Adapun persentase perwujudan pola ruang antara lain:

Tabel 6.4. Persentase Perwujudan Pola Ruang

SRS Pansela Gunungkidul	Total Luas (ha)	Realisasi (ha)	Tidak Mendukung (ha)	Nilai Keterwujudan
Kawasan Lindung	**780,54**	**708,19**	**72,34**	**90,73%**
Badan Air	155,26	155,3	0	100%
Sempadan Mata Air	25,12	2,9	22,24	11,46%
Sempadan Sungai	170,55	150	20,55	87,95%
Kawasan Cagar Alam Geologi	144,97	144	0,97	99,33%
Ekosistem Mangrove	14,4	14,4	0	100,00%
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	127,73	106,3	21,41	83,24%
Rimba Kota	287,19	280,4	6,78	97,64%
Taman Kecamatan	0,83	0,8	0	100,00%
Taman Kelurahan	2,19	1,8	0,4	81,86%
Pemakaman	7,55	7,5	0	100,00%
Kawasan Budidaya	**5.579,62**	**5.258,99**	**320,63**	**94,25%**
Badan Jalan	20,76	20,8	0	100,00%
Kawasan Tanaman Pangan	2.136,85	2.135,40	1,49	99,93%
Kawasan Perikanan Tangkap	30,95	18,3	12,61	59,25%
Kawasan Pariwisata	888,41	872	16,46	98,15%
Kawasan Perumahan	2.190,87	2.039,10	151,76	93,07%
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	44,9	30,9	13,96	68,92%
Kawasan Perdagangan dan Jasa	265,23	140,9	124,36	53,11%
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,65	1,6	0	100,00%
Total	**6.515,42**	**6.122,40**	**393**	**93,97%**

c. SRS Pantai Selatan Kulon Progo

(1) Struktur Ruang

SRS Pantai Selatan (Pansela) Kulon Progo, merupakan SRS yang terletak di kabupaten Kulon Progo, dengan letak SRS di sepanjang Pantai Kulon Progo. SRS ini mempunyai 71 arahan indikasi program SPW SRS, dengan hanya 9 program terlaksana pada tahun 2025, dan menurun daripada tahun 2024 dengan 19 program terlaksana, selisih 10 program. Penilaian perwujudan ruang pada SRS Pansela KP pada tahun 2025, memperoleh nilai sebesar 15,96%, dengan perbandingan pada tahun 2024 sebesar 26,76%, menurun sekitar 10,8%, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 6.5. Penilaian Perwujudan Ruang SRS Pansela Kulon Progo

INDIKATOR		Arahan	Reali-sasi	Nilai Perwujudan
	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN	**71**	**11,33**	**15,96%**
1	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA	10	1,33	13,30%
2	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA	61	10,00	16,39%
2.1	Program Perwujudan Sarana dan Prasarana Lingkungan	5	1,00	20,00%
2.2	Program Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	7	1,00	14,29%
2.3	Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	2	2,00	100,00%
2.4	Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	15	1,00	6,67%
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	6	1,00	16,67%
2.6	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum	6	1,00	16,67%
2.7	Program Perwujudan Sistem Persampahan	8	0,00	0,00%
2.8	Program Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah	3	0,00	0,00%
2.9	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase	6	0,00	0,00%
2.10	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	3	3,00	100,00%

Penilaian perwujudan Pansela KP tahun 2025 mengalami penurunan dikarenakan terdapat tiga sub program yang tidak terlaksana sama sekali di tahun 2025, atau dengan nilai

0,00%, diantaranya, Program Perwujudan Sistem Persampahan dengan 8 program, Program Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah dengan 3 program, dan Perwujudan Sistem Jaringan Drainase dengan 6 program.

Program Perwujudan Sistem Persampahan dengan 8 program, terdiri dari Pengembangan bank sampah, Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat dalam penerapan sistem 3R, Pengembangan sistem 3R di kawasan–kawasan wisata, Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo, Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer, Pembangunan TPS 3R, Pengembangan sarana pengangkutan sampah, dan Pembangunan TPS, dengan DPUPKP Kab. Kulon Progo, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo sebagai OPD pengampu, belum terwujud pada tahun 2025. Hanya kegiatan Pengembangan bank sampah dan Pengembangan sarana pengangkutan sampah, yang pernah terlaksana pada tahun 2024.

Program Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, dengan 3 kegiatan, diantaranya Penanganan air limbah domestik pariwisata melalui sistem pengumpulan dan pengangkutan, Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dan Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah Non Domestik, dengan DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo sebagai OPD Pengampu, belum terlaksana pada tahun 2025.

Perwujudan Sistem Jaringan Drainase, dengan 6 program kegiatan yang terdiri dari Normalisasi Jaringan Drainase Primer, Perbaikan Jaringan Drainase Sekunder, Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier, Pengembangan jaringan drainase baru, Rehabilitasi jaringan drainase pada daerah rawan genangan dan Pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase berupa

sumur resapan dan biopori, dengan Kementerian LHK, DPUP- ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Kulon Progo, DPUP KP Kab. Kulon Progo, BBWS0 sebagai OPD Pengampu, belum terlaksana juga dari tahun 2024-2025.

(2) Keterwujudan Pola Ruang

Kawasan Lindung SRS Pantai Selatan Kulon Progo memperoleh rata-rata nilai keterwujudan 81,76% atau dengan luasan realisasi 379,16ha. Sebagian besar zona pada Kawasan Lindung masih termasuk dalam kategori Belum Terwujud yaitu Sempadan Sungai, Sempadan Danau/Waduk, Pemakaman, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Kawasan Ekosistem Mangrove. Sementara zona Taman Kota dan Taman Kelurahan sudah berada pada kategori Terwujud dengan masing-masing nilai keterwujudan sebesar 100%. Beberapa penggunaan lahan seperti adanya permukiman dan tambak merupakan pemanfaatan yang dapat mengganggu fungsi ruang pada Kawasan Lindung tersebut.

Sedangkan Kawasan Budidaya pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo memperoleh rata-rata nilai keterwujudan pada tahun 2025 ini sebesar 95,01% atau luasan realisasi 5.678,57ha. Sebagian besar Pola Ruang seperti Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan. Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan Keamanan telah memperoleh nilai keterwujudan di atas 85% dan dapat diketagorikan Terwujud. Sementara hanya Kawasan Perdagangan dan Jasa yang memperoleh nilai keterwujudan di bawah 85% sehingga dikategorikan Belum Terwujud. Adapun persentase perwujudan pola ruang sebagai berikut:

Tabel 6.6. Persentase Perwujudan Pola Ruang SRS Pansela Kulon Progo

SRS Pansela Gunungkidul	Total Luas (ha)	Realisasi (ha)	Tidak Mendukung (ha)	Nilai Keterwujudan
Kawasan Lindung	**463,75**	**379,16**	**84,59**	**81,76%**
Badan Air	249,3	249,3	0	100%
Sempadan Sungai	137,58	95,3	42,29	69,26%
Sempadan Danau/Waduk	1,75		1,75	0,00%
Taman Kota	0,29	0,3	0	100%
Taman Kelurahan	2,8	2,8	0	100%
Pemakaman	2,76	1,9	0,89	67,90%
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	66,43	27,4	39,04	41,23%
Kawasan Ekosistem Mangrove	2,85	2,2	0,62	78,22%
Kawasan Budidaya	**5.977,11**	**5.678,57**	**298,55**	**95,01%**
Badan Jalan	47,52	47,5	0	100,00%
Kawasan Perkebunan Rakyat	13,87	13,9	0	100,00%
Kawasan Tanaman Pangan	1549,07	1528,1	20,95	98,65%
Kawasan Hortikultura	1.679,33	1.585,60	93,73	94,42%
Kawasan Perikanan Tangkap	66,56	60,5	6,07	90,88%
Kawasan Pariwisata	136,5	122,1	14,45	89,42%
Kawasan Perumahan	1.816,36	1.709,40	106,99	94,11%
Kawasan Perdagangan dan Jasa	101,07	57,9	43,12	57,33%
Kawasan Transportasi	562,7	549,5	13,24	97,65%
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	4,14	4,1	0	100,00%
Total	6.440,86	6.057,70	383,1	**94,05%**

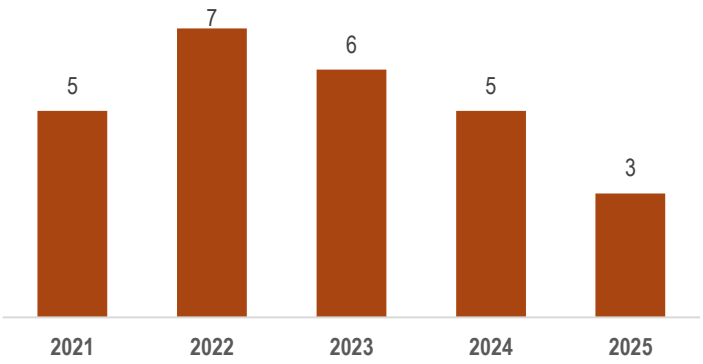
3) Pengembangan Desa Maritim

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Maritim merupakan salah satu program prioritas Pemda DIY dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, penguatan perekonomian masyarakat, serta pengembangan kawasan pesisir secara berkelanjutan, khususnya di Kawasan Pantai Selatan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah pesisir berbasis potensi lokal dan karakter budaya maritim, dengan pendanaan yang bersumber dari Dais.

Pelaksanaan BKK Desa Maritim diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan berbagai subsektor kelautan dan perikanan. Fokus pengembangan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat pesisir, serta penguatan dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan laut. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi agar potensi sumber daya pesisir dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Selain berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai tambah sektor perikanan, BKK Desa Maritim juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pembangunan. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian dalam mengelola usaha kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat kelembagaan desa pesisir sebagai basis pengembangan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, BKK Desa Maritim dirancang sebagai instrumen pembangunan kawasan pesisir yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan sasaran utama peningkatan perekonomian Kawasan Pantai Selatan, program ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya desa-desa maritim yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah DIY. Berikut adalah sebaran Kalurahan penerima BKK dari tahun 2021-2025:



Gambar 6.41. Sebaran Kalurahan Penerima BKK Kalurahan Maritim Tahun 2021–2025

Pelaksanaan BKK Desa Maritim di Kawasan Pantai Selatan DIY dilaksanakan secara bertahap dan berorientasi pada penguatan kualitas intervensi. Sejak tahun 2021 hingga 2025, penetapan lokasi BKK Desa Maritim menunjukkan dinamika yang mencerminkan strategi pembinaan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan potensi unggulan desa pesisir serta peningkatan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Pada tahun 2021, BKK Desa Maritim dilaksanakan di lima kalurahan, yaitu Tileng, Ngestirejo, Kemadang, Gadingsari, dan Bugel. Pada tahap awal pelaksanaan program ini, difokuskan pada penguatan dasar kapasitas masyarakat pesisir, pengenalan konsep desa maritim, serta pengembangan potensi kelautan dan perikanan berbasis karakteristik masing-masing wilayah.

Selanjutnya pada tahun 2022, pelaksanaan BKK Desa Maritim diperluas dan menjangkau tujuh kalurahan, yaitu Tileng, Ngestirejo, Kemadang, Girikarto, Tirtohargo, Srigading, dan Gadingsari. Perluasan lokasi ini mencerminkan fase penguatan dan replikasi praktik baik (*best practices*) dari desa-desa awal, sekaligus memperluas dampak program ke wilayah pesisir lainnya di Kawasan Pantai Selatan.

Pada tahun 2023, fokus program mulai diarahkan pada penguatan desa-desa dengan potensi unggulan yang lebih spesifik. BKK Desa Maritim dilaksanakan di enam kalurahan, yaitu Girikarto, Parangtritis, Tirtohargo, Srigading, Banaran, dan Karangwuni. Pada tahap ini, intervensi BKK tidak hanya difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi juga pada pengembangan komoditas unggulan serta penguatan kegiatan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan yang memiliki prospek keberlanjutan.

Pada tahun 2024, lokasi BKK Desa Maritim ditetapkan pada lima kalurahan, yaitu Sidoharjo, Tirtohargo, Poncosari, Banaran, dan Girikarto. Pengurangan ini adalah penyempitan sasaran secara selektif, dengan tujuan untuk memperdalam intervensi, meningkatkan kualitas output program, serta memastikan bahwa desa-desa sasaran mampu menjadi model pengembangan desa maritim yang mandiri dan berdaya saing.

Pada tahun 2025, BKK Desa Maritim difokuskan pada tiga kalurahan, yaitu Sidoharjo, Poncosari, dan Girikarto. Penurunan jumlah kalurahan penerima tidak menunjukkan penurunan kinerja program, melainkan merupakan bentuk penajaman fokus kebijakan agar pendampingan dan alokasi sumber daya dapat diarahkan secara lebih optimal pada desa-desa prioritas yang telah menunjukkan capaian dan potensi pengembangan signifikan.

Salah satu contoh keberhasilan program BKK Desa Maritim adalah pengembangan budidaya ikan lele di Kalurahan Poncosari melalui inovasi “Lele Gacor”. Inovasi ini berhasil meningkatkan produktivitas budidaya, efisiensi usaha, serta pendapatan masyarakat, hingga akhirnya mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan mengantarkan DIY meraih prestasi Nasional sebagai Juara III dalam Indonesia’s SDGs *Action Award* (SAA) 2025. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan fokus dan prioritas dalam pelaksanaan BKK Desa Maritim mampu menghasilkan dampak nyata dan

berkelanjutan bagi pengembangan perekonomian masyarakat pesisir.

Dengan demikian, pelaksanaan BKK Desa Maritim di Kawasan Pantai Selatan DIY selama periode 2021–2025 menunjukkan pergeseran strategi dari perluasan cakupan menuju pendalaman kualitas intervensi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat desa-desa maritim unggulan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kawasan pesisir selatan secara berkelanjutan.

4) Kepariwisataan

Event wisata yang dilakukan di tahun 2025 yang berlokasi di lokasi Pantai Parangtritis-Parangkusumo, yaitu: Festival Layang-layang Internasional - Penyelenggaraan Festival Layang-Layang Internasional ini dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu tanggal 26-27 Juli 2025 di Pantai Parangkusumo, Kretek, Bantul.

5) Lingkungan Hidup

Terkait dengan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kawasan Pesisir kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain adalah:

a. Penyusunan rencana kegiatan perlindungan KEE Lahan Basah di DIY untuk KEE Lahan Basah Mangrove Baros, KEE Lahan Basah Mangrove Jangkaran, dan KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik untuk periode tahun 2026.
b. Konservasi vegetasi penahan abrasi. Konservasi Lahan Pantai melalui Penanaman Vegetasi Pantai di KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik seluas 5 ha. Kegiatan pokok berupa penanaman dengan jenis tanaman yang mempunyai karakter tahan paparan sinar matahari dan lahan porous, dengan tujuan untuk mengkonservasi kawasan pantai sehingga terbangun ekosistem hutan pantai yang mampu memitigasi ancaman abrasi, erosi, infiltrasi, tsunami,

dan arus angin dan ombak yang dapat mengganggu kawasan di belakangnya. Spesies yang ditanam antara lain jenis Cemara Udang (*Casuarina* sp.), Biduri (*Calotropis* sp.), Ketapang (*Terminalia* sp.), Keben (*Barringtonia* sp.), Nyamplung (*Calophyllum* sp.), Siwalan (*Borassus* sp.), dan Waru Laut (*Thespesia* sp.).

Terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kawasan pesisir, utamanya berfokus pada pertumbuhan destinasi wisata pantai, usaha kuliner, *homestay*, dan jasa wisata di Wilayah Selatan berimplikasi langsung terhadap peningkatan timbulan sampah, limbah domestik, dan tekanan terhadap ekosistem pantai serta karst. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan:

a. Pembinaan dan pengawasan ketaatan lingkungan usaha sektor pariwisata (UKL-UPL, SPPL, dan persetujuan lingkungan)
b. Pemantauan kualitas air laut tahun 2025 dilaksanakan pada dua periode di sejumlah lokasi pantai di wilayah DIY, meliputi Pantai Cangkring, Kuwaru, Bugel, Glagah, Parangtritis, Ngedan, Baron, Krakal, dan Jogan. Parameter yang diamati mencakup Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Minyak dan Lemak, Amonia Total, serta Ortofosfat. Data pemantauan kualitas air laut kemudian dihitung dan dianalisis menjadi data Indeks Kualitas Air Laut yang merupakan salah satu komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Belum selesainya pembayaran ganti rugi untuk rencana pengembangan JJLS menjadi 4 (empat) lajur.

b. Kondisi PLTH Pantai Baru belum ditata secara lebih baik agar dapat lebih aman, nyaman dan menarik banyak pengunjung.
c. Energi terbarukan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, yang disebabkan sebagian besar komponen dan teknologinya masih impor, sedangkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
d. Kondisi alam Pantai Selatan DIY dengan laju korosi yang sangat tinggi mempengaruhi performa pembangkit.
e. Perbedaan tingkat kesiapan masyarakat dan kelembagaan kalurahan dalam mengelola kegiatan kelautan dan perikanan.
f. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pesisir agar mampu mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan.
g. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang masih memerlukan penguatan pada aspek nilai tambah dan hilirisasi.
h. Dinamika kondisi lingkungan pesisir dan perairan yang memerlukan pengelolaan adaptif dan berkelanjutan.
i. Perlunya penguatan koordinasi dan sinkronisasi program lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan pesisir.
j. Fluktuasi kunjungan wisatawan yang tinggi. Kunjungan wisatawan ke kawasan Parangtritis masih sangat bergantung pada akhir pekan dan musim liburan. Pada hari biasa dan periode low season terjadi penurunan signifikan jumlah pengunjung yang berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha lokal.
k. Kawasan masih dipersepsikan sebagai destinasi singgah (*one day trip*). Sebagian besar wisatawan datang tanpa menginap, sehingga lama tinggal dan belanja wisata relatif rendah serta belum memberikan dampak ekonomi optimal bagi masyarakat sekitar.

l. Terbatasnya atraksi wisata tematik dan terjadwal.Aktivitas wisata di Parangtritis masih didominasi oleh kunjungan pantai tanpa variasi pengalaman, sehingga belum mampu menciptakan daya tarik berulang (*repeat visit*).
m. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal. Produk kuliner, kerajinan, dan seni lokal belum terkurasi dan terpromosikan secara konsisten kepada wisatawan, sehingga potensi ekonomi kreatif pesisir belum berkembang maksimal.
n. Kurangnya branding kawasan sebagai destinasi wisata terpadu. Parangtritis belum sepenuhnya memiliki positioning yang kuat sebagai kawasan wisata berbasis alam dan budaya pesisir yang berkelanjutan.
o. Rendahnya tingkat hunian akomodasi di sekitar kawasan pada periode tertentu. Penginapan dan homestay di sekitar Parangtritis masih mengalami okupansi rendah pada hari kerja, sehingga rantai ekonomi pariwisata belum berjalan optimal.
p. Ketidakpastian hukum dan administratif dalam pelaksanaan fasilitasi serta penetapan kawasan konservasi di daerah:
    (1) Terjadi kekosongan regulasi teknis akibat dicabutnya Perdirjen KSDAE KLHK No. P.01/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, sementara ketentuan pengganti belum ditetapkan
    (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990) masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi, sehingga peraturan turunan belum dapat disusun, khususnya terkait penetapan nomenklatur *area preservasi* sebagai rujukan kawasan bernilai ekosistem penting/Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).
q. Pertumbuhan pesat aktivitas wisata pesisir di kawasan selatan belum diikuti penyediaan infrastruktur persampahan, sanitasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan peningkatan timbulan sampah dan limbah domestik yang

mencemari lingkungan serta menurunkan kualitas ekosistem pantai. Apabila berlanjut, hal ini berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan, kualitas destinasi wisata, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

2) Solusi

a. Penyelesaian pembayaran ganti rugi rencana pengembangan JJLS menjadi 4 (empat) lajur secara bertahap. Segmen Garongan–Congot akan dilaksanakan melalui proses ulang pengadaan tanah dari awal. Proses dimulai dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.
b. Diperlukan penataan kawasan PLTH Pantai Baru yang disinergikan dengan fungsi kegiatan wisata dan pertanian lahan pantai, serta penambahan infrastruktur pendukung lainnya.
c. Dengan tertatanya kawasan PLTH Pantai Baru, dapat meningkatkan pendapatan melalui retribusi sehingga dapat membantu meringankan beban biaya operasional pembangkit.
d. Rekayasa teknik terhadap material peralatan pembangkit, guna memperpanjang usia operasional pembangkit.
e. Penajaman lokasi sasaran BKK Desa Maritim pada kalurahan yang memiliki kesiapan dan potensi unggulan untuk dikembangkan secara lebih fokus.
f. Peningkatan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
g. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal melalui pengolahan hasil perikanan dan diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
h. Penerapan prinsip pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konservasi.

i. Penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemda, pemerintah kalurahan, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.
j. Menstimulasi kunjungan di luar musim liburan. Event yang dilaksanakan secara berkala dapat menjadi pemicu kunjungan pada periode sepi wisata, sehingga menciptakan arus pengunjung yang lebih merata sepanjang tahun.
k. Menciptakan pengalaman wisata berbasis pesisir dan budaya lokal. Melalui event seni budaya, festival pantai, sport tourism, dan kuliner khas pesisir, wisatawan mendapatkan pengalaman tematik yang mendorong peningkatan lama tinggal dan belanja wisata.
l. Mendorong repeat visit dan memperkuat daya tarik kawasan. Event yang dikemas secara kreatif dan berkelanjutan mampu menciptakan ketertarikan wisatawan untuk kembali berkunjung.
m. Memberikan ruang promosi bagi UMKM dan komunitas lokal. Event menjadi wadah pemasaran produk lokal sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata.
n. Memperkuat branding Parangtritis sebagai destinasi wisata terpadu. Event berfungsi sebagai media promosi kawasan, memperkuat citra Parangtritis sebagai destinasi pantai berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif.
o. Meningkatkan tingkat hunian akomodasi melalui paket wisata terpadu. Kolaborasi event dengan pengelola homestay dan hotel melalui paket menginap, city tour pantai, dan tiket event dapat mendorong wisatawan untuk bermalam.
p. Membangun kolaborasi multipihak. Event pariwisata menjadi ruang sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, UMKM, komunitas, dan swasta dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan
q. Pemda DIY memfasilitasi pengelolaan kawasan bernilai ekologi penting melalui perlindungan keanekaragaman

hayati, jasa lingkungan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sambil menunggu penetapan pemerintah pusat

r. Pemda DIY berupaya melakukan pengendalian dampak pertumbuhan wisata pesisir melalui penguatan infrastruktur persampahan dan sanitasi kawasan, pengaturan pemanfaatan ruang berbasis daya dukung lingkungan, pengawasan perizinan berusaha, serta pelibatan masyarakat dan pelaku usaha wisata dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem pesisir

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan

Dokumentasi pelaksanaan pembangunan jalan Kretek–Girijati Tahun anggaran 2025



Gambar 6.42. Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan JJLS s.d. Tahun 2025



Gambar 6.43. Foto 100% Pembangunan Segmen Planjan–Tepus



Gambar 6.44. Foto 100% pembangunan Jembatan Kretek 2 (Kiri) dan Jembatan Pandansimo (Kanan)



Gambar 6.45. Layang-layang Kategori Train dalam Kegiatan Festival Layang-layang Internasional 2025

I. PENGEMBANGAN KAWASAN PERBUKITAN MENOREH

1. Kondisi Umum

Kawasan Perbukitan Menoreh merupakan salah satu kawasan strategis pengembangan pariwisata DIY yang memiliki kekayaan bentang alam, keanekaragaman hayati, serta potensi budaya pedesaan yang autentik. Lanskap perbukitan, hutan rakyat, persawahan terasering, hingga desa-desa wisata dengan kearifan lokal yang masih terjaga menjadikan Menoreh memiliki karakter unik sebagai destinasi wisata berbasis alam dan perdesaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren pariwisata menunjukkan pergeseran minat wisatawan ke arah wisata berbasis pengalaman (*experience-based tourism*), wisata alam terbuka, serta wisata minat khusus seperti trekking, gowes, *camping, agro-tourism*, dan wisata budaya desa. Kawasan Menoreh memiliki potensi besar untuk

menjawab kebutuhan tersebut, namun hingga saat ini tingkat kunjungan wisatawan masih relatif terbatas dan belum merata, serta belum sepenuhnya terintegrasi dalam jaringan destinasi unggulan DIY.

Selain itu, pola kunjungan yang masih sporadis serta minimnya atraksi terjadwal menyebabkan kawasan Menoreh belum memiliki daya tarik berulang yang kuat. Banyak wisatawan masih memandang kawasan ini sebagai destinasi alternatif atau singgah, sehingga lama tinggal dan belanja wisata belum berkembang optimal. di sisi lain, potensi desa wisata, UMKM lokal, serta komunitas kreatif pedesaan belum sepenuhnya mendapatkan ruang promosi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan arah pembangunan pariwisata yang menekankan pada keberlanjutan, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan event pariwisata di kawasan Perbukitan Menoreh menjadi salah satu strategi untuk memperkuat positioning kawasan sebagai destinasi wisata minat khusus berbasis pedesaan. Event yang mengangkat tema alam, budaya desa, kuliner lokal, serta aktivitas outdoor diharapkan mampu menciptakan pengalaman wisata yang autentik sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan.

Melalui event pariwisata yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, perpanjangan lama tinggal, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain sebagai media promosi kawasan, event juga berfungsi sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, desa wisata, UMKM, komunitas lokal, dan pelaku industri pariwisata dalam membangun ekosistem pariwisata pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan potensi alam dan sosial budaya yang dimiliki, penyelenggaraan event pariwisata di kawasan Perbukitan Menoreh menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, memperkuat pengembangan wisata minat khusus pedesaan, serta mendukung pemerataan pembangunan pariwisata di DIY.

Ditinjau dari Potensi wisata Agro. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di DIY yang pengembangannya memerlukan dukungan sinergis dari berbagai sektor lain, termasuk subsektor perkebunan, khususnya dalam konteks pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh sebagai destinasi wisata berbasis alam dan agro. Subsektor perkebunan memiliki potensi strategis dalam menyediakan lanskap agroekowisata yang khas, sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan melalui penyediaan produk segar maupun olahan hasil perkebunan yang berkembang di DIY sebagai buah tangan dan cenderamata khas daerah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar dan berkembangnya inovasi teknologi, teknologi perbenihan tanaman kelapa khususnya kelapa kopyor sebagai komoditas perkebunan eksotis bernilai ekonomi tinggi terus mengalami kemajuan melalui pemuliaan varietas unggul dan penerapan teknologi kultur jaringan yang mampu menghasilkan benih bermutu dengan tingkat kopyor yang tinggi. Sejalan dengan arah pengembangan kawasan Perbukitan Menoreh sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis pariwisata dan pertanian berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis dan terarah untuk mengembangkan sumber benih kelapa kopyor melalui metode vegetatif maupun seleksi tanaman induk berkualitas, salah satunya melalui pembentukan kebun induk yang ditanami pohon-pohon kelapa kopyor terpilih dengan sifat unggul dan stabil, sehingga dapat berfungsi sebagai sumber entres yang andal dan berkelanjutan bagi pengembangan agribisnis kelapa kopyor, peningkatan pendapatan masyarakat lokal, serta penguatan integrasi antara sektor perkebunan dan pariwisata di DIY.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

1) Kepariwisataan

Event wisata yang dilakukan di tahun 2025 yang berlokasi di Kawasan Perbukitan Menoreh, yaitu: Jelajah Ruang Menoreh - Kegiatan Jelajah Ruang Menoreh yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2025 yang terdiri dari rangkaian

kegiatan Jelajah Ruang Menoreh Geo Heritage Fun Run & Walk, Jelajah Ruang Menoreh Geo Heritage Talkshow - Pemanfaatan Geo Heritage dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan dan juga Jelajah Ruang Menoreh–Geo Heritage Harmony Festival di Lapangan Boro, Desa Wisata Banjarasri, Kulon Progo dapat.

2) Agro Wisata

Sampai dengan tahun 2025, pengembangan sumber benih kelapa kopyor unggul di DIY telah dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi antara pengelolaan kebun induk dan penguatan kapasitas teknologi perbenihan. Sebanyak 200 batang benih calon induk kelapa kopyor telah ditanam di Kebun Unit Tambak, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, yang dikelola sebagai kebun induk untuk menjamin ketersediaan sumber benih berkualitas. Guna memastikan keberhasilan pertumbuhan dan keberlanjutan fungsi kebun tersebut, dilakukan pemeliharaan secara intensif melalui pemantauan rutin dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dilaksanakan setiap hari, dengan tujuan menjaga kesehatan tanaman, mencegah serangan hama dan penyakit sejak dini, serta memastikan tanaman calon induk tumbuh dan berkembang optimal sesuai standar teknis budidaya dan persyaratan sertifikasi benih. Sejalan dengan itu, pada tahun yang sama juga dilaksanakan kegiatan magang tenaga teknis Laboratorium Kultur Jaringan ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Bogor milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sebagai upaya peningkatan kapasitas keilmuan dan keterampilan teknis dalam menghasilkan benih kelapa unggul yang seragam, berkualitas, dan berdaya saing melalui penerapan teknik kultur embrio. Kegiatan ini mencakup tahapan pengumpulan dan seleksi eksplan embrio kelapa kopyor dari buah terpilih, sterilisasi dan inisiasi kultur pada media buatan dalam kondisi aseptik, pemeliharaan dan multiplikasi kultur di ruang kultur dengan pengaturan media dan lingkungan yang terkendali, aklimatisasi tanaman hasil kultur dari laboratorium ke rumah kaca, serta

pencatatan dan dokumentasi seluruh proses produksi secara sistematis sebagai dasar evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan dan Kebun Unit Wonocatur, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagai bagian dari upaya strategis dalam mendukung penyediaan benih kelapa kopyor unggul yang berkelanjutan dan tersertifikasi di wilayah DIY dan sekitarnya.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Tingkat kunjungan wisatawan masih relatif rendah dan belum merata. Kawasan Perbukitan Menoreh belum menjadi pilihan utama wisatawan DIY. Kunjungan masih sporadis dan terkonsentrasi pada spot tertentu, sementara banyak desa berpotensi belum tersentuh arus wisata.
b. Belum kuatnya positioning Menoreh sebagai destinasi wisata minat khusus pedesaan. Potensi trekking, gowes, *agro-tourism, camping*, dan wisata budaya desa belum dikemas secara terpadu, sehingga Menoreh masih dipersepsikan sebagai destinasi alternatif.
c. Minimnya atraksi terjadwal yang mampu mendorong *repeat visit*. Ketiadaan agenda event rutin menyebabkan daya tarik kawasan belum berkelanjutan dan wisatawan tidak memiliki alasan kuat untuk kembali berkunjung.
d. Lama tinggal dan belanja wisata masih rendah. Sebagian besar wisatawan melakukan kunjungan singkat tanpa menginap, sehingga dampak ekonomi terhadap desa wisata, homestay, dan UMKM belum optimal.
e. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM dan komunitas desa. Produk lokal, kuliner tradisional, dan aktivitas budaya belum terkurasi dan terpromosikan secara konsisten dalam satu wadah yang terintegrasi.

f. Keterbatasan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara desa wisata, pelaku usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan pariwisata masih belum terbangun secara sistematis.

2) Solusi

a. Meningkatkan kunjungan wisata melalui event tematik berbasis alam dan desa. Event seperti festival desa, *adventure week, eco-tourism fair*, dan *agro-cultural festival* dapat menjadi magnet kunjungan sekaligus memperluas sebaran wisatawan ke berbagai desa di Menoreh.
b. Memperkuat branding Menoreh sebagai destinasi wisata minat khusus pedesaan. Event berfungsi sebagai media promosi kawasan untuk membangun citra Menoreh sebagai destinasi alam dan desa yang autentik, berkelanjutan, dan berbasis pengalaman.
c. Mendorong *repeat visit* melalui kalender event berkelanjutan. Penyusunan *calendar of events* tahunan memberikan kepastian atraksi wisata dan menciptakan ketertarikan wisatawan untuk kembali berkunjung.
d. Meningkatkan lama tinggal dan okupansi *homestay* desa. Integrasi event dengan paket menginap, *village experience*, dan aktivitas *outdoor* mendorong wisatawan untuk bermalam dan memperpanjang masa tinggal.
e. Memberdayakan UMKM dan komunitas lokal sebagai pelaku utama. Event menjadi ruang pemasaran produk desa, kuliner lokal, kerajinan, serta pertunjukan budaya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung.
f. Membangun kolaborasi multipihak berbasis kawasan. Event menjadi wadah sinergi pemerintah, desa wisata, UMKM, komunitas, akademisi, dan swasta dalam membangun ekosistem pariwisata pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan

4. Foto-Foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.46. Pengecekan Irigasi Tetes di Sekitar Benih Kelapa Kopyor



Gambar 6.47. Pembuatan Pestisida Alami



Gambar 6.48. Penyemprotan Pestisida Alami



Gambar 6.49. Pemindahan embrio kelapa kopyor yang dilakukan oleh tenaga teknis laboratorium



Gambar 6.50. Pengamatan Embrio Kelapa Kopyor pada Bulan Desember 2025



Gambar 6.51. Talkshow Jelajah Ruang Menoreh 2025



Gambar 6.52. Jelajah Ruang Menoreh Geo Heritage Fun Run & Walk 2025


Gambar 6.53. Geo Heritage Harmony Festival di Jelajah Ruang Menoreh 2025

J. PENGEMBANGAN KAWASAN AEROTROPOLIS DI KULON PROGO

1. Kondisi Umum

Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (BIY) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang memiliki peran strategis bagi pengembangan ekonomi wilayah di DIY terutama di Kabupaten Kulon Progo. Pemda harus bisa menangkap segala peluang dan manfaat ekonomi dari keberadaan BIY. Potensi pengembangan wilayah di sekitar Kawasan BIY mendorong munculnya konsep pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, Pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kulon Progo ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor: 353/KEP/2021. D alam rangka mendorong perwujudan Kawasan Aerotropolis, Pemda DIY menjalin Kerjasama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada tahun 2022/ 2023. JICA memberikan 5 (lima) rekomendasi Program Prioritas dalam rangka mewujudkan Kawasan Aerotropolis yaitu melalui pengembangan: 1) *Airfront-MICE*, 2) *Smart Agriculture*, 3) *Smart Tourism* (*Mountain Side* dan *Ocean Side*), 4) *Science-Techno City* dan 5) *Futuristic Town*. Kolaborasi multipihak dan lintas sektor sangat diperlukan dalam pelaksanaan 5 (lima) program prioritas tersebut dalam rangka mewujudkan Kawasan Aerotropolis di Kulon Progo.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

Implementasi pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana indikatif yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Adapun progress implementasi pengembangan Kawasan Aerotropolis sebagai berikut:

a. Peningkatan Investasi

Pada tahun 2025 telah disusun Kajian Peta Potensi Investasi Agrowisata di Pucanggading, Hargomulyo, Kokap. Kajian ini merupakan kajian *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang sudah menyajikan proyeksi desain pembangunan secara mendetail dengan komitmen lahan yang ditawarkan *clear and clean*. Pengembangan agrowisata di Kalurahan Hargomulyo ini merupakan proyeksi investasi yang ditawarkan sejalan dengan konsep pengembangan *Smart Tourism–Mountain Side* di Kawasan Aerotropolis. Selain itu, pengusulan Embarkasi/ Debarkasi Haji DIY di Kabupaten Kulon Progo dengan konsep Hotel Haji telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Bandar Udara Internasional Yogyakarta sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi DIY dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji. Advokasi pengusulan konsep Hotel Haji ini merupakan upaya optimalisasi keberadaan BIY dan hotel–hotel disekitar BIY. Melalui konsep Hotel Haji ini, calon jamaah haji akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan standar pelayanan kualitas hotel. Selain itu, bangkitan ekonomi akan terjadi baik di dalam Hotel Haji itu sendiri maupun dikawasan sekitarnya dan akan membawa dampak peningkatan ekonomi bagi daerah terutama bagi Kabupaten Kulon Progo.

b. Pengembangan Airfront-MICE

Kawasan *Airfront*-MICE merupakan Kawasan yang berada tepat di depan BIY yang diproyeksikan sebagai pusat aktivitas MICE. Rencana pengembangan Kawasan *Airfront*-MICE bertampalan dengan rencana Trase Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo seksi Yogyakarta–Kulon Progo terutama pada trase *Exit/Entry* Tol Temon. Dalam rangka optimalisasi kawasan tersebut maka

Pemda DIY bersama dengan Pemkab Kulon Progo telah melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan PT Jogjasolo Marga Makmur dengan mengusulkan perluasan atas trase tol tersebut. Harapannya melalui pengusulan ini Kawasan *Airfront*-MICE dapat berkembang secara optimal sebagai pusat aktivitas MICE yang didukung dengan kemudahan aksesibilitas Kawasan salah satunya melalui jalan tol.

c. Pengembangan *Smart Agriculture*

Pengembangan *Smart Agriculture* di Kawasan Aerotropolis merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif di Kawasan Aerotropolis yang diarahkan pada praktik budidaya dan usaha pertanian yang lebih efisien dan modern dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi digital. Pada tahun 2025 telah dibangun 2 (dua) unit *Greenhouse* untuk komoditas tanaman melon di Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates. Pembangunan *greenhouse* ini merupakan salah satu upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pertanaman terutama untuk komoditas melon yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, Pemkab Kulon Progo juga menjalin kerjasama dengan Sekolah Vokasi UGM untuk meningkatkan produktivitas komoditas melon melalui Program Fabrikasi Fasilitas *Smart–Agri* Tepat Guna Skala Petani (FASTAN) di Kelompok Tani Gisik Pranaji di Kapanewon Panjatan. Inovasi yang dikembangkan dalam program ini adalah penggunaan sistem irigasi terintegrasi berbasis *Dosing Machine-Air Quality Monitoring System* (DM-AQMS). di dalam program ini Pemkab Kulon Progo memberikan dana padanan berupa sarana produksi pertanian (saprodi) meliputi pupuk, benih melon dan berbagai media tanam.



Gambar 6.54. Pengembangan *Smart Agriculture* di Kawasan Aerotropolis

Sebagai tambahan, dalam rangka pengenalan otomatisasi alat mesin pertanian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memberikan hibah traktor dengan *remote control* di Unit Pelayanan Jasa Alsintan ((UPJA) Gapoktan Ngesti Raharjo, Kapanewon Wates. Melalui traktor *remote control* ini semakin memudahkan petani dalam melakukan penyiapan lahan. Hal ini dapat menarik minat para petani muda (petani milenial) untuk semakin terlibat dalam sektor pertanian karena adanya introduksi teknologi yang menjadikan pekerjaan lebih ringan dan efisien.

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan sawah Surjan sebagai entitas khas Agro-Aerotropolis, maka di tahun 2025 dilakukan pengembangan budidaya bawang merah di sawah Surjan. Komoditas bawang merah merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan Kulon Progo.

d. Pengembangan *Smart Tourism*

Pengembangan *Smart Tourism* merupakan upaya pengembangan potensi destinasi wisata yang ada dikawasan Aerotropolis yang dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi informasi digital. Pentahapan pelaksanaan pengembangan *smart tourism* di tahun pertama RPJMD Kabupaten Kulon Progo fokus untuk mendorong pengembangan daya tarik wisata alam yang diharmonisasikan dengan daya tarik budaya lokal. Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam maka telah dibangun

beberapa penanda (*signage*) di Laguna Pantai Glagah, Pantai Trisik dan Puncak Widosari serta rehabilitasi Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Glagah. Selain itu, dalam rangka memperluas pengembangan ekosistem digital di sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapatkan hibah CSR dari Bank Indonesia wilayah D.I.Yogyakarta melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) Bank Indonesia. Adapun hibah yang diberikan meliputi *wireless clip-on mic*, *mirrorless camera*, *smart phone*, laptop dan printer yang akan dimanfaatkan untuk optimalisasi promosi pariwisata melalui dunia digital.



Gambar 6.55. Pembangunan penanda (signage) di destinasi wisata Pantai Glagah dan Pantai Trisik (*Smart Tourism–Ocean Side*)

e. Pengembangan *Science-Techno* City

Pengembangan *Science-Techno City* merupakan upaya mengoptimalkan keberadaan berbagai Perguruan Tinggi di Kabupaten Kulon Progo yang dalam jangka panjangnya memberikan kontribusi bagi pengembangan Penelitian dan Pendidikan di Kawasan Aerotropolis. Dalam tahapan pelaksanaan pengembangan *Science-Techno City* di tahun pertama RPJMD Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung Terwujudnya Pengembangan *Science-Techno City* di kawasan Aerotropolis. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dibangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jogoyudan sebagai salah satu penyediaan aksesibilitas di Kota Wates

dimana dalam konsep pengembangan *Science-Techno City* juga diproyeksikan terbentuknya *Transit Oriented Development Area* di Pusat Kota Wates (terutama Kawasan Pusat Kota Wates–Stasiun Wates–Terminal Wates) dan JPO ini menjadi salah satu bagian didalam pengembangan TOD nantinya. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang dan PT KAI DAOP 6 membahas terkait rencana penataan Stasiun Wates dengan penambahan pintu Exit/ Entry di sisi Utara. Hal ini dilakukan dalam rangka penataan kota Wates yang lebih baik serta penataan aksesibilitas menuju konsep TOD di pusat Kota Wates.

f. Pengembangan Futuristic Town

Pengembangan *Futuristic Town* merupakan program jangka panjang dimana Kawasan sekitar Aerotropolis diproyeksikan berkembang sebagai kota modern yang bersih, ramah lingkungan dan energi melalui penerapan ekonomi sirkular. Dalam tahapan pelaksanaan di tahun pertama RPJMD Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung Terwujudnya Pengembangan *Futuristic Town* di kawasan Aerotropolis. Adapun beberapa Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksankan meliputi Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan untuk mendukung penataan Kawasan permukiman yang lebih baik.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan Kawasan Aerotropolis antara lain:

a. Masih rendahnya pertumbuhan investasi di Kawasan Aerotropolis sehingga belum bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi multipihak dan lintas sektor dalam mendorong perwujudan Kawasan Aerotropolis

2) Solusi

a. Meningkatkan promosi investasi melalui penyelenggaraan forum investasi daerah, penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) serta menciptakan iklim investasi yang menarik minat para investor.
b. Mendorong dan meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi multipihak lintas sektor untuk mewujudkan Kawasan Aerotropolis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

K. PENGEMBANGAN KAWASAN STASIUN TUGU

1. Kondisi Umum

Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta merupakan bagian dari upaya penataan kawasan strategis perkotaan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan transportasi, kenyamanan pengguna, serta citra kota sebagai pusat budaya dan pariwisata. Sebagai simpul transportasi utama dan gerbang kedatangan wisatawan, Kawasan Stasiun Tugu memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi wajah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pengembangan kawasan ini perlu dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, lingkungan, dan keberlanjutan.

Sebagai langkah strategis dalam pengembangan Kawasan Stasiun Tugu, Pemda melakukan pembongkaran Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Pengembangan ruang terbuka hijau tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan kawasan melalui

penyediaan ruang resapan air, peneduh alami, dan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengguna stasiun. Keberadaan ruang terbuka hijau juga berperan dalam memperkuat karakter kawasan stasiun yang ramah lingkungan serta mendukung kenyamanan pejalan kaki.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

Sebagai wujud dukungan terhadap penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO, pada tahun 2025, fungsi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali akan diubah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana guna menjamin kesinambungan pelayanan parkir serta meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat dan kawasan sekitar.

Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali yang merupakan fasilitas parkir di kawasan sekitar stasiun dinilai tidak lagi sejalan dengan arah penataan kawasan yang berorientasi pada transportasi publik, pejalan kaki, dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan lahan sebagai bangunan parkir di pusat kota berkontribusi terhadap kepadatan kendaraan bermotor, menurunnya kualitas visual kawasan, serta terbatasnya ruang terbuka publik. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya penataan ulang fungsi ruang di sekitar Stasiun Tugu. Pembongkaran Tempat Khusus Abu Bakar Ali dilaksanakan mulai awal Bulan Juni 2025 hingga akhir Bulan Agustus 2025. Kegiatan pembongkaran ini dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja, ketertiban lingkungan, serta pengendalian dampak lalu lintas dan sosial di sekitar lokasi.

Seiring dengan perubahan fungsi lahan tersebut, kegiatan perparkiran yang sebelumnya terpusat di tempat tersebut kemudian direlokasi sementara ke lokasi eks Menara Kopi Kotabaru. Relokasi sementara ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan fasilitas parkir tetap terpenuhi tanpa membebani kawasan inti Stasiun Tugu. Lokasi eks Menara Kopi Kotabaru direncanakan sebagai kantong parkir sementara yang berada di luar kawasan inti, sehingga dapat

mengurangi intensitas kendaraan bermotor di sekitar stasiun dan mendukung kelancaran lalu lintas. Relokasi kegiatan perparkiran tersebut juga mendukung integrasi sistem transportasi dan pergerakan pejalan kaki. Dengan penataan akses yang memadai, pengguna parkir di lokasi eks Menara Kopi Kotabaru dapat melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Tugu dan kawasan sekitarnya melalui jalur pejalan kaki maupun moda transportasi pendukung lainnya. Selain itu, penataan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas para juru parkir dan pihak terkait agar sistem perparkiran dapat berjalan secara tertib, aman, dan terorganisir.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Para pedagang maupun juru parkir yang sebelumnya beraktivitas di lokasi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali mengajukan keberatan dan melakukan penolakan terhadap rencana lokasi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali yang akan dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau, sehingga proses relokasi dan pembongkaran terhambat dan tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan.

2) Solusi

Dilakukannya koordinasi dan juga mediasi baik dari Pemda DIY hingga Pemkot Yogyakarta kepada seluruh pedagang dan juru parkir yang berada di lokasi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali dan mencarikan solusi yang tepat dalam proses relokasi seluruh kegiatan yang sebelumnya berada di tempat tersebut. Sehingga tercapailah kesepakatan untuk merelokasi sementara seluruh pedagang dan juru parkir ke Lahan eks Menara Kopi di Kotabaru.

4. Foto Pelaksanaan



Gambar 6.56. Pembongkaran Kios dan Bangunan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali



Gambar 6.57. Kondisi lahan eks Menara Kopi di Kotabaru sebagai lokasi relokasi sementara

L. JOGJA SMART PROVINCE

1. Kondisi Umum

Jogja Smart Province (JSP) didefinisikan sebagai upaya sebuah provinsi dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan daerah melalui inovasi terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inisiasi JSP telah dimulai sejak tahun 2006 melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*),

yang kemudian berkembang menjadi *Masterplan Jogja Smart Province* 1.0 pada tahun 2018 dengan fokus pada nilai keistimewaan DIY.

Memasuki tahun 2023, Pemda DIY bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengembangkan Masterplan *Jogja Smart Province* 2.0 (2024-2028) yang mengusung tema besar "Harmonisasi Manusia dan Teknologi". Visi utama dari JSP 2.0 ini adalah mewujudkan Pancamulia melalui harmonisasi masyarakat dan teknologi yang inovatif, berbudaya, serta berkarakter sesuai nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.

Secara regulasi, JSP didukung oleh Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Jogja Smart Province 2024 - 2028. Kebijakan ini selaras dengan agenda nasional seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres nomor 95 tahun 2018 dan Visi Indonesia Digital 2045 yang menargetkan transformasi digital inklusif dan berkelanjutan.

JSP 2.0 membagi ruang lingkup pembangunannya ke dalam enam dimensi utama:

1) *Smart Governance*: Fokus pada tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
2) *Smart Branding*: Fokus pada daya saing ekonomi, pariwisata, dan budaya.
3) *Smart Environment*: Fokus pada pengelolaan lingkungan, sampah, dan energi.
4) *Smart Living*: Fokus pada transportasi, kesehatan, dan harmoni tata ruang.
5) *Smart Society*: Fokus pada interaksi masyarakat dan ekosistem pendidikan.
6) *Smart Economy*: Fokus pada industri, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan JSP juga mengadopsi konsep Data Driven Government, di mana pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan didasarkan pada analisis data yang akurat guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Hal ini didukung oleh infrastruktur seperti

Jogja Center yang berfungsi sebagai platform analitik data untuk mendukung manajemen pembangunan daerah

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

Hingga tahun 2025, pelaksanaan JSP telah melalui siklus pemantauan dan evaluasi yang intensif untuk mengukur capaian dari setiap dimensi. Secara keseluruhan, berikut adalah capaian progres yang dihasilkan:

1) Dimensi *Smart Governance* Pemda DIY berhasil mencatatkan Indeks Evaluasi Mandiri SPBE tahun 2025 sebesar 4,97 dari skala 5. Dalam aspek transparansi, telah diluncurkan aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) yang terintegrasi untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Selain itu, sebanyak 40 layanan publik kini telah terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemda (SPLP) dan disajikan dalam portal layanan publik terintegrasi jogjaprov.go.id.
2) Dimensi *Smart Branding* dan *Smart Economy* dalam upaya memperkuat ekonomi lokal, platform SiBakul Jogja telah membantu memasarkan 12.493 produk UMKM per November 2025. Program ini juga memberikan subsidi ongkos kirim (Free Ongkir) dengan total nilai mencapai Rp2,18 miliar untuk lebih dari 76 ribu transaksi. di sektor pariwisata, kampanye Visiting Jogja terus diperkuat melalui media digital, sementara Geopark Jogja telah resmi ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada Mei 2025 melalui keputusan Menteri ESDM.
3) Dimensi *Smart Environment* Program Jogja Hijau telah diimplementasikan di tingkat kalurahan, seperti di Sendangtirto (Sleman) dan Gerbosari (Kulon Progo) dengan fokus pada konservasi air dan energi terbarukan. Selain itu, telah dibangun Gugus Tugas Energi Daerah berdasarkan SK Gubernur No. 174/2025 untuk mengawal pemanfaatan energi bersih di gedung-gedung pemerintah.

4) Dimensi *Smart Living dan Society* pada sektor kesehatan mencatat progres melalui layanan PSC 119 DIY (Sangga Ratu) yang menangani 690 kasus kegawatdaruratan medis. di sektor transportasi, uji coba bus listrik telah dilaksanakan di kawasan sumbu filosofi dengan layanan gratis selama masa uji coba. Untuk dimensi sosial, aplikasi Sidak Tradisi dikembangkan untuk mempertemukan siswa lulusan SMK dengan dunia industri, melibatkan 207 sekolah di seluruh DIY.
5) Kolaborasi Kewilayahan melalui monitoring pada tahun 2025 juga menunjukkan kolaborasi erat dengan kabupaten/kota. Sebagai contoh, Kabupaten Sleman telah mengintegrasikan Satu Data mereka dengan sistem nasional, sementara Kota Yogyakarta telah mendigitalisasi layanan melalui platform JSS (Jogja Smart Service)

3. Permasalahan dan Solusi

Analogi untuk Memahami JSP: Membangun Jogja Smart Province mirip dengan memimpin sebuah Gamelan. Teknologi adalah instrumennya, namun keindahan nada (Pancamulia) hanya bisa tercapai jika setiap pemain (provinsi dan kabupaten/kota) memukul instrumennya dalam irama yang sama (Data Driven). Jika setiap pemain bermain sendiri-sendiri tanpa koordinasi (fragmentasi aplikasi), maka yang dihasilkan hanyalah kebisingan, bukan sebuah harmoni pembangunan yang selaras.

1) Permasalahan

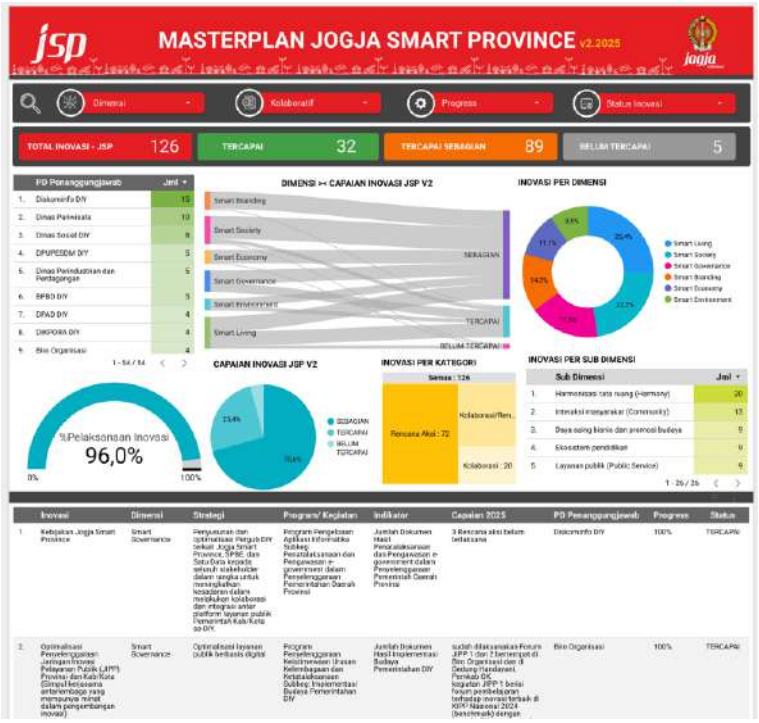
a. Ketimpangan infrastruktur digital antardaerah. Meskipun cakupan jaringan internet Pemda DIY telah mencapai seluruh kalurahan, namun demikian kapasitas infrastrukturnya masih berbeda beda.
b. Akses Data Pusat yang Terbatas: Pemda mengalami kesulitan dalam menarik data dari aplikasi milik pemerintah pusat, seperti data lowongan kerja di SIAP Kerja atau hasil penilaian *assessment center* yang masih bersifat fisik dan manual.

c. Keterbatasan Wewenang Infrastruktur: Beberapa infrastruktur vital, seperti alat pemantau kualitas air (ONLIMO), merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki kendali terbatas dan hanya bisa memberikan rekomendasi lokasi.
d. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan program.
e. Kesenjangan Kapasitas SDM dan Teknologi: Perlunya peningkatan literasi digital bagi aparatur maupun masyarakat agar mampu mengadopsi teknologi terbaru seperti AI dan mengelola sistem informasi yang semakin kompleks secara mandiri.

2) Solusi

a. Memperluas akses infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan.
b. Melakukan finalisasi desk evaluasi untuk merancang integrasi antarinstansi guna memastikan intervensi kebijakan lebih tepat sasaran, serta menerapkan arsitektur microservices pada aplikasi seperti SINKAL untuk mempermudah agregasi data kependudukan.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan data antara tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota guna meminimalisir proses manual.
d. Memperkuat skema berbagi peran (*sharing roles*) dan dukungan anggaran melalui pemanfaatan Dais guna mendukung pembangunan infrastruktur cerdas di daerah yang memiliki keterbatasan fiskal serta melakukan optimalisasi Pendanaan melalui pendanaan alternatif seperti CSR, APBD, dan *Public-Private Partnership* (PPP).
e. Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas secara masif seperti melalui Government Transformations Academy (GTA) dan pelatihan digital marketing bagi komunitas untuk memperkecil kesenjangan literasi teknologi.

4. Foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.58. Tampilan Dashboard Masterplan Jogja Smart Province

M. PENGEMBANGAN JOGJAKARTA AGRO PARK (JAP)

1. Kondisi Umum

Jogja Agro Park (JAP) merupakan kawasan pertanian terpadu yang dikembangkan sebagai wahana edukasi, inovasi, dan diseminasi teknologi pertanian dengan mengintegrasikan fungsi agribisnis dan agrowisata, serta ditetapkan sebagai salah satu program prioritas Pemda DIY berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 mengenai Program Prioritas Pembangunan. Kehadiran JAP mencerminkan pendekatan pembangunan pertanian yang holistik dan berkelanjutan dalam merespons dinamika serta tantangan struktural sektor pertanian, khususnya tingginya laju alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan nonpertanian dan lemahnya

regenerasi petani akibat dominasi petani gurem serta petani berusia lanjut. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tercatat Luas Baku Sawah (LBS) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 156 hektare dibandingkan tahun 2024, dengan LBS parsial seluas 66.871 hektare. Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 mencatat bahwa petani gurem mencapai 373.366 orang atau 89,64% dari total petani dan petani berusia di atas 55 tahun berjumlah 240.339 orang atau 57,6%. Dalam konteks tersebut, JAP diharapkan berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan pertanian terpadu yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian secara produktif dan berwawasan lingkungan melalui integrasi kegiatan budidaya, pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran yang didukung oleh inkubator agribisnis, sehingga tidak hanya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kewirausahaan petani, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan, memperkuat daya saing sektor pertanian daerah, serta menumbuhkan minat dan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan pertanian yang inovatif dan berkelanjutan.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

Kegiatan di JAP tahun 2025 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya tanpa pengadaan fasilitas baru, guna memperkuat fungsi JAP sebagai wahana edukasi, percontohan, promosi, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Fasilitas yang tersedia dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya hortikultura, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan Agromarket sebagai sarana promosi dan pemasaran produk pertanian melalui kemitraan dengan kelompok tani dalam rangka mendorong agribisnis lokal.

Selain itu, JAP mengoptimalkan fasilitas untuk kegiatan agroeduwisata, pelatihan, dan percontohan teknologi pertanian bagi petani, penyuluh, dan masyarakat umum. Rumah Bibit dimanfaatkan

sebagai media *display* benih dan bibit hasil produksi JAP, sementara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) difungsikan sebagai sarana edukasi energi terbarukan yang terintegrasi dengan penerapan konsep *smart farming*, seperti pengendalian pengairan jarak jauh berbasis teknologi. Sarana *outbond* dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan edukasi dan pembentukan karakter, sedangkan sarana pendukung lainnya, termasuk mushola, toilet, dan area parkir, berada dalam kondisi terawat dan berfungsi dengan baik untuk menunjang seluruh aktivitas di kawasan JAP.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Jogja Agro Park belum berfungsi sebagai lembaga struktural yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan, sehingga belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan pertanian daerah.
b. Optimalisasi pendapatan melalui pemanfaatan aset JAP belum didukung oleh kerangka regulasi yang memadai, khususnya terkait penetapan tarif layanan dan retribusi, sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah.
c. Masih terbatasnya standarisasi teknis, serta belum optimalnya sistem evaluasi, pemantauan, dan pengendalian kinerja, yang berdampak pada belum seragamnya kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan JAP.

2) Solusi

a. Pengelolaan Jogja Agro Park perlu melibatkan unit kerja sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing, serta menjalin kemitraan dengan pihak professional.
b. Diperlukan pengusulan penyesuaian tarif dan retribusi secara berkala agar selaras dengan dinamika pasar, disertai dengan penguatan dukungan pendanaan melalui APBD

maupun pengembangan skema pembiayaan alternatif yang sah dan berkelanjutan.

c. Penyusunan pedoman teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan JAP perlu segera dilakukan, disertai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menjamin konsistensi mutu layanan, efektivitas operasional, dan pencapaian target kinerja.

4. Foto Hasil Pelaksanaan


Agromarket


Lahan Parkir


Joglo


Toilet umum


Mushola


Area Outbond


Lahan Sawah


Lahan Hortikultura


Budidaya Biofarmaka


Kolam Ikan Nila


Greenhouse tanaman hias


Hidroponik



Greenhouse tanaman buah



Greenhouse tanaman buah



PLTS



Kandang Ayam Petelur KUB



Kandang sapi



Kandang Kambing

Gambar 6.59. Foto-Foto Sarana dan Prasarana

N. REFORMASI BIROKRASI

1. Kondisi Umum

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah, tetapi juga menjadi bagian integral dari visi Reformasi Birokrasi yang kompetitif dan berkelas dunia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024..

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan dua jalur (*double track*) dimaksudkan agar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi dengan dua jalur (double track) tersebut yaitu:

1) Reformasi Birokrasi General yang merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hulu;
2) Reformasi Birokrasi Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hilir atau target pembangunan nasional dan daerah. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) sehingga dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) Tematik Pembangunan yang dirumuskan dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu: Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi, Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting).

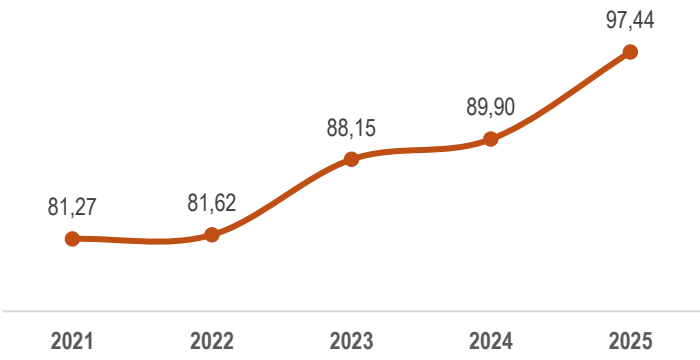
Selanjutnya, untuk memberikan kepastian arah kebijakan pelaksanaan RB di tahun 2025 selama proses penetapan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 maka diterbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025. Melalui kedua kebijakan tersebut, diharapkan akselerasi Reformasi Birokrasi tetap

dapat dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan dan berdampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing global.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan ukuran resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia untuk kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah. Indeks ini mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, sekaligus menegaskan terbangunnya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional yang diarahkan untuk menjawab isu Tata Kelola Pemerintahan yang berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional. Selain sebagai tolok ukur, Indeks ini juga menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah.

Mekanisme dan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 masih mengacu pada mekanisme dan intrumen evaluasi yang digunakan pada evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024. Selain itu penilaian atas indikator evaluasi RB dapat menggunakan nilai terbaru yang dievaluasi di tahun 2025 atau dapat menggunakan nilai tahun sebelumnya. Hal tersebut mengingat pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi secara nasional di tahun 2025 mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.



Gambar 6.60. Indeks RB Pemda DIY Tahun 2021-2025

Sumber: Kementerian PAN RB RI dan Biro Organisasi Setda DIY 2026 (data diolah)
*(Keterangan : *data 27 februari 2026 hasil penilaian RB sementara tahun 2025)*

Dari gambar tersebut terlihat bahwa Pemda DIY terus menunjukkan peningkatan nilai Indeks RB dari tahun ke tahun. Adapun untuk Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025, hingga laporan ini disusun, Kementerian PAN dan RB RI belum merilis hasil final/akhir evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025, sehingga data Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 menggunakan hasil sementara evaluasi terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2025 yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB RI melalui Portal RB Nasional (portalrb.id) pada tanggal 27 Februari 2026. Nilai Indeks RB Pemda DIY pada tahun 2025 sebesar 97,44 (kategori A-), dan telah melampaui target di tahun tersebut yaitu sebesar 83,78 (kategori A) (capaian sebesar 116,30%). Nilai tersebut menunjukkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan di lingkungan Pemda DIY.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda DIY pada tahun 2025, antara lain :

1) Penguatan Tim/Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah yang

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan guna memastikan koordinasi, sinergi, dan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Penyusunan Rencana Aksi RB Pemda DIY yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 479 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemda DIY tersebut meliputi :
   a. Rencana Aksi RB General
   b. Rencana Aksi RB Tematik :
   c. Pengentasan Kemiskinan
   d. Peningkatan Investasi
   e. Hilirisasi
   f. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
   g. Ketahanan Pangan Nasional
   h. Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan
3) Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah tahun 2025 yang menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal serta untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan tingkat Unit Kerja. Instrumen dan mekanisme Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025 telah mengacu dan mempertimbangkan beberapa ketentuan dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025. Instrumen dan mekanisme evaluasi tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 358 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. Berdasarkan Hasil Akhir Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025, dari 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah, terdapat 4 (empat) Perangkat Daerah (10,53%) dengan kategori AA dan 34 (tiga puluh empat)

(89,47%) Perangkat Daerah dengan kategori A. Terdapat peningkatan nilai rata-rata indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dari tahun 2024 yaitu 93,62 menjadi 96,09 pada tahun 2025.

4) Mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dengan pembangunan dan pengusulan Zona Integritas di Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Adapun sampai dengan tahun 2025 perkembangan Unit Kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut :

Tabel 6.7. Unit Kerja Predikat WBK/WBBM di Pemerintah Daerah DIY

No	Unit Kerja	Predikat WBK	Predikat WBBM
1	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	2016	2021
2	Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta	2017	-
3	Balai Pelatihan Kesehatan	2020	2024
4	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	2020	2023
5	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	2020	-
6	Badan Kepegawaian Daerah DIY	2021	-
7	Balai Layanan Perpustakaan	2021	2025
8	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	2021	-
9	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	2021	-
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	2024	
11	Dinas Sosial DIY	2025	
12	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2025	

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, Februari 2026

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Perangkat Daerah yang menjadi koordinator RB Tematik baru sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, belum secara optimal dalam menjalankan fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Masih terdapat Unit Kerja yang belum menunjukkan komitmen untuk mengakselerasi Reformasi Birokrasi dengan pembangunan dan pengusulan Zona Integritas

2) Solusi

a. Melakukan pendampingan dan asistensi secara berkala serta berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang menjadi koordinator RB Tematik agar dapat mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sehingga dapat memberikan dampak terhadap capaian pembangunan.
b. Mendorong dan melakukan pembinaan kepada Unit Kerja agar lebih berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas

O. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY

1. Kondisi Umum

Ekosistem kebudayaan di DIY ditopang oleh tiga unsur utama: sarana prasarana budaya, agenda budaya, dan sumber daya manusia atau talenta budaya. Ketiga unsur ini saling mendukung untuk mendorong kemajuan kebudayaan sebagai identitas dan kekuatan pembangunan daerah.

Taman Budaya memiliki fungsi strategis sebagai ruang ekspresi bagi pelaku budaya untuk berkumpul, berdiskusi, bertukar informasi, serta mempresentasikan karya-karya kreatif mereka. Keberadaannya melengkapi penyediaan ruang budaya secara berjenjang di DIY, mulai dari Balai Budaya di tingkat kalurahan hingga Taman Budaya di tingkat kabupaten/kota. Melalui ketersediaan sarana yang representatif, diharapkan aktivitas kebudayaan semakin meningkat, memperkokoh pelestarian budaya, serta menggerakkan roda ekonomi berbasis kreativitas.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

1) Taman Budaya Yogyakarta (TBY)

Taman Budaya Yogyakarta (TBY) pada tahun 2025 memantapkan posisinya sebagai pusat pengembangan kebudayaan melalui serangkaian pembaruan sarana dan optimalisasi program edukasi. Salah satu pencapaian fisik yang paling krusial adalah pelaksanaan rehabilitasi gedung *Concert Hall* yang mencakup perbaikan menyeluruh pada material atap, plafon, hingga sistem mekanikal elektrikal seperti instalasi listrik dan pembaruan sistem AC guna meningkatkan kenyamanan standar pelayanan publik. Selain itu, TBY melakukan langkah strategis dengan menambah daya listrik sebesar 2 x 197.000 VA agar seluruh aktivitas pertunjukan dapat sepenuhnya didukung oleh listrik PLN, sehingga meminimalisir ketergantungan pada genset dan meningkatkan efisiensi energi.

Dari sisi aktivasi seni, TBY berhasil menyelenggarakan pameran Nandur Srawung #12 bertema "Eling" yang menarik minat 9.064 pengunjung melalui penyajian instalasi interaktif yang menyoroti isu kesehatan jiwa. Keberlanjutan ekonomi budaya juga ditunjukkan melalui kesuksesan Pasar Kangen TBY yang melibatkan 218 tenant UMKM kuliner dan kerajinan tradisional, menjadikannya ruang interaksi lintas generasi yang masif. Dalam aspek literasi, TBY melakukan inovasi melalui digitalisasi 15 judul arsip video VHS ke format MP4 serta penerbitan buku "Dokumentasi Tari Klasik Gaya Yogyakarta" yang dilengkapi teknologi Kode QR untuk memudahkan akses riset bagi masyarakat luas.

2) Taman Budaya Gunungkidul (TBG)

Taman Budaya Gunungkidul (TBG) yang telah beroperasi secara penuh sejak tahun 2021 terus berupaya menjaga kualitas layanannya sebagai pusat ekspresi di wilayah timur DIY. Pada tahun 2025, TBG mencapai target realisasi fisik sebesar 100%

pada seluruh program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Keberhasilan ini ditandai dengan terlaksananya berbagai pergelaran seni sepanjang tahun, pentas seni khusus anak, hingga gelar seni kolosal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Meskipun menunjukkan performa program yang stabil, TBG mulai menghadapi tantangan terkait umur ekonomis bangunan. Untuk menjaga kelayakan sarana, pengelola secara rutin melaksanakan pemeliharaan intensif pada gedung, area taman, serta komponen mekanis panggung seperti sistem hidrolik dan alat pendingin yang memerlukan perhatian khusus akibat intensitas penggunaan yang tinggi. Seluruh kegiatan ini tetap berpijak pada upaya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pemberlakuan tarif retribusi pemanfaatan kekayaan daerah yang proporsional.

3) Taman Budaya Kulon Progo (TBKP)

Taman Budaya Kulon Progo (TBKP) yang berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare mencatatkan performa pemanfaatan yang sangat impresif sepanjang tahun 2025. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Kundha Kabudayan Kulon Progo, TBKP berhasil menyelenggarakan total 118 acara yang memanfaatkan fasilitas Pendopo, Auditorium , dan Exhibition Hall. Keberhasilan ini berdampak langsung pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp320.000.000,00, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp285.600.000,00 atau mencapai 112,04%.

Aktivitas kebudayaan di TBKP didominasi oleh penyelenggaraan 12 kali pentas seni tradisi dari berbagai kapanewon, pentas teater "Warsini Warsinah" dan "Salah Tampa", hingga pentas kethoprak "Bodronoyo" yang dapat disaksikan masyarakat secara gratis. Upaya regenerasi seniman muda diwadahi melalui program *Art for Children* (AFC) "Laskar Pareanom dan Pohon Terakhir" yang melibatkan 50 anak melalui 24 kali sesi pelatihan seni karawitan,

tari, dan teater. Hingga Desember 2025, TBKP telah dikunjungi oleh 71.895 orang, membuktikan fungsinya sebagai ruang publik yang hidup dan mandiri bagi masyarakat di wilayah barat Yogyakarta.

4) Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG - Kota Yogyakarta)

Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG) telah mencapai tonggak sejarah penting di tahun 2025 dengan diresmikannya kawasan tersebut secara formal pada tanggal 23 Mei 2025 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Memiliki luasan 3,49 hektare, TBEG mengusung konsep integrasi antara pelestarian budaya dengan konservasi lingkungan, di mana keberadaan embung berfungsi sebagai penampung air sekaligus ruang terbuka hijau publik. Desain bangunannya yang berarsitektur Indische sengaja dirancang agar selaras dengan atmosfer kawasan Cagar Budaya Kotagede.

Pasca peresmian, intensitas kegiatan di TBEG meningkat pesat dengan terlaksananya lebih dari 200 event yang mencakup seni pertunjukan, festival budaya, hingga kegiatan edukasi seperti Kompetisi *Dance* Pelajar dan Pameran Tosan Aji. Pengelolaan TBEG dilakukan secara profesional di bawah UPT Pengelolaan Taman Budaya dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam peningkatan layanan masyarakat. TBEG kini tidak hanya menjadi pusat budaya baru, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Kota Yogyakarta.

5) Taman Budaya Sleman (TBS) dan Taman Budaya Bantul (TBB)

Berbeda dengan wilayah lainnya, progres pembangunan Taman Budaya di Kabupaten Sleman dan Bantul selama tahun 2025 masih berfokus pada penguatan landasan administratif dan koordinasi teknis guna persiapan konstruksi fisik lanjutan.

a. Kabupaten Sleman: Setelah melewati tahapan pembebasan lahan dan penyelesaian dokumen AMDAL pada periode sebelumnya, tahun 2025 difokuskan pada sinkronisasi perencanaan teknis antar-instansi guna memastikan kesiapan lahan sebelum memasuki tahap pembangunan fisik tahap II.
b. Kabupaten Bantul: Progres utama di tahun 2025 meliputi finalisasi aspek legalitas lahan melalui skema tukar guling tanah kas desa Kalurahan Sendangsari, serta penyesuaian detail perencanaan (Ulasan DED) sesuai rekomendasi Dewan Warisan Budaya DIY guna menjamin kesesuaian arsitektur dengan nilai-nilai lokal.
c. Perkembangan paling signifikan bagi kedua kabupaten ini adalah keberhasilan Pemda dalam mendapatkan persetujuan usulan perencanaan dan sinkronisasi anggaran untuk melanjutkan pembangunan fisik secara masif menggunakan alokasi Dais pada tahun anggaran 2026. Capaian ini menjadi jawaban atas kendala keterbatasan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya dan memberikan kepastian keberlanjutan penyediaan ruang budaya bagi masyarakat di Sleman dan Bantul.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Penurunan Kualitas Fasilitas: Beberapa bangunan mulai mengalami kerusakan pada atap, instalasi pendingin, serta sistem hidrolik panggung akibat faktor umur ekonomis dan intensitas penggunaan yang tinggi.
b. Kesenjangan Kunjungan: Tingkat kunjungan masyarakat umum, khususnya generasi muda, masih relatif rendah di luar jadwal acara besar atau festival tertentu.
c. Tantangan Manajemen: Peningkatan jumlah event di kawasan terbuka seperti TBEG menimbulkan tantangan

dalam pengelolaan kebersihan, ketertiban, serta koordinasi jadwal agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan venue.

2) Solusi

a. Pemeliharaan Terpadu: Melakukan rehabilitasi fisik secara bertahap (seperti pada *Concert Hall* TBY) dan penguatan sistem perawatan rutin untuk menjaga standar pelayanan publik.
b. Digitalisasi dan Promosi: Mengoptimalkan media sosial (Tiktok, Instagram, Podcast) sebagai sarana promosi aktif untuk menarik minat generasi muda serta melakukan digitalisasi arsip budaya sebagai aset literasi.
c. Penguatan Tata Kelola: Menyusun dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan venue serta sistem koordinasi jadwal yang lebih tertata demi kenyamanan pengguna.

4. Foto-Foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.61. Jogja Culture Show Setiap Jumat dan Sabtu di Taman Budaya Embung Giwangan



Gambar 6.62. Agenda Budaya Taman Budaya Kulon Progo

P. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Kondisi Umum

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor. Upaya ini diarahkan tidak hanya untuk menurunkan persentase penduduk miskin, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Dalam pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Istimewa Yogyakarta. TKPK berperan memastikan keterpaduan antarintervensi melalui

penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Melalui fungsi koordinatif tersebut, TKPK memfasilitasi sinkronisasi sasaran, lokasi, dan kelompok penerima manfaat, mendorong pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar intervensi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan oleh perangkat daerah. Dengan mekanisme ini, pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan di DIY diharapkan lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

Dari aspek Sosial, Pemda DIY melakukan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa jenis pelayanan, yaitu penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan dalam balai dan penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran Bantuan Sosial.

Pelayanan dalam balai ini diberikan kepada pemerlu pelayanan sosial yang memerlukan pelayanan dalam balai, meliputi penyandang disabilitas termasuk Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), anak terlantartermasuk balita terlantardan anak bermasalah sosial lainnya, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan wanita rawan sosial ekonomi. Pelayanan dalam balai dilakukan pada 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (Balai) Dinas Sosial DIY yaitu Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, dan Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha. Pelayanan dalan balai juga dilakukan melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Pengasramaan SLB. Pelayanan yang diberikan meliputi penyediaan permakanan; penyediaan sandang; penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti; pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pemberian pelayanan penelusuran keluarga; pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses; pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari; pemulangan ke daerah asal; penyediaan alat bantu; fasilitasi pembuatan nomor induk

kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan /atau identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang merupakan kewenangan provinsi. Pelayanan dalam balai sepanjang tahun 2025 telah diberikan kepada 1.399 orang.

Penanganan kemiskinan melalui penyaluran Bantuan Sosial Bantuan Sosial (Bansos) yang telah dilakukan pada tahun 2025 sebesar Rp29.414.900.000,00 yang terdiri dari Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas terlantar, Bantuan sosial anak terlantar, Bantuan Sosial lanjut usia terlantar, dan Bantuan Sosial Buruh Pabrik Rokok. Bantuan sosial tersebut diberikan kepada 11.742 orang.

Dais DIY berperan dalam penanganan kemiskinan melalui intervensi pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya sejak tahun 2021. KUBE Lestari Budaya dengan sasaran masyarakat miskin yang memiliki jenis usaha yang mengandung unsur budaya lokal di DIY, misal usaha membatik, usaha produksi jamu, dan lain-lain. Pada tahun 2025 menyasar sebanyak 5 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 telah disasar sebanyak 50 kelompok atau sebanyak 500 orang. Disamping itu, Dinas Sosial DIY juga bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kitabisa.com melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang memiliki embrio usaha melalui pelatihan dan pendampingan usaha, dengan total penerima manfaat sebanyak 15 orang.

Penanganan kemiskinan juga dilakukan dengan mendukung pelaksanaan program Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Sosial DIY dan Dinas terkait lainnya melakukan sosialisasi, rekruitmmen dan seleksi siswa serta melakukan tes kesehatan bagi siswa Sekolah Rakyat.

Penanganan kemiskinan tersebut tidak lepas dari pemafaatan data yang akurat dan mutakhir, oleh karena itu Pemeritah Daerah DIY mengelola data kemiskinan daerah. Sistem pengolahan data telah

diinisiasi oleh Dinas Sosial DIY sebagai upaya untuk melakukan penyandingan data sehingga diperoleh data pensasaran yang tepat. Manunggal Raharja merupakan sistem yang telah dikembangkan dan telah menghasilkan sumber data alternatif sasaran program penanganan kemiskinan daerah yang diolah dari data usulan dan atau hasil verifikasi dan validasi Data Kemiskinan dari masing-masing kabupaten/kota. Outputnya berupa data kemiskinan yang berbasis individu dan keluarga lengkap dengan label status kemiskinannya yang dinamakan Data Kemiskinan Daerah serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial DIY. Dalam Manunggal Raharja terdapat data by name By Addres (BNBA) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), data Kemiskinan daerah dalam satuan Kepala Keluarga (KK) dan satuan Jiwa serta data intervensi pelayanan kesejahteraan sosial. Keberadaan Manunggal Raharja adalah melengkapi dan memperkaya keberadaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sebagai dasar untuk penanganan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan penanganan PPKS.

Dari aspek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Pemerintah Daerah DIY mendorong pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wilayah melalui pengembangan kewirausahaan desa. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan mengoptimalkan potensi lokal, kearifan budaya, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing kalurahan. Dalam konteks tersebut, Program Desa Preneur menjadi salah satu instrumen penting untuk menumbuhkan wirausaha baru, memperkuat usaha yang sudah ada, serta menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif di tingkat desa.

Dinas Koperasi dan UKM DIY di tahun 2025 ini berperan aktif dalam mendukung program tersebut melalui pelaksanaan pelatihan Desa Preneur yang difokuskan pada lokus kapanewonan miskin, yaitu Kalurahan Kelor (Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul), Kalurahan Sidoharjo (Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul), Kalurahan Ngargosari (Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon

Progo), dan Kalurahan Sambirejo (Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman). Keempat kalurahan tersebut memiliki karakteristik wilayah dan potensi ekonomi lokal yang beragam, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas pelaku usaha, rendahnya nilai tambah produk, serta akses pasar yang belum optimal.

Melalui pelatihan Desa Preneur, masyarakat di lokus kemiskinan diarahkan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir kewirausahaan yang lebih adaptif dan berdaya saing. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya bertujuan mencetak pelaku usaha baru, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi desa, mendorong kolaborasi antarpelaku usaha, serta meningkatkan keberlanjutan usaha berbasis potensi lokal. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan di wilayah DIY.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

Perjalanan penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu dekade terakhir (2015–2025) menunjukkan dinamika yang resilien dengan tren penurunan yang signifikan secara keseluruhan. Mengawali periode pada Maret 2015 dengan angka cukup tinggi sebesar 14,91%, DIY berhasil melakukan intervensi yang konsisten hingga mencapai titik terendah prapandemi di angka 11,44% pada September 2019. Meskipun progres ini sempat terinterupsi oleh pandemi COVID-19 yang memicu lonjakan angka kemiskinan hingga menyentuh level 12,80% pada periode 2020-2021, fase pemulihan ekonomi pasca pandemi terbukti berjalan efektif. Sejak Maret 2022, angka kemiskinan terus menunjukkan tren kontraksi berkelanjutan hingga akhirnya mencatatkan rekor terendah dalam sepuluh tahun terakhir pada Maret 2025, yakni sebesar 10,23%.

Pencapaian penurunan total sebesar 4,68 poin persentase ini mencerminkan keberhasilan integrasi program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial di daerah. Dengan laju penurunan sebesar 0,60 poin persentase dalam satu tahun terakhir (Maret 2024 ke Maret 2025), DIY kini berada pada posisi strategis untuk menembus target satu digit (di bawah 10%). Momentum positif ini perlu dijaga melalui penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin terhadap guncangan eksternal, guna memastikan capaian di tahun 2025 ini menjadi fondasi bagi pengentasan kemiskinan yang lebih optimal di masa mendatang.

Pelaksanaan intervensi Penanggulangan Kemiskinan di DIY tersebar pada 4 kelompok program. Pengelompokan bentuk aktivitas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kelompok Program adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kelompok program ini mencakup aktivitas yang bertujuan melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Bentuk aktivitasnya meliputi pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; penyediaan permakanan, sandang, dan tempat penampungan bagi kelompok rentan, pengungsi, dan PMKS; fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga; penanganan khusus bagi kelompok rentan; pelayanan dukungan psikososial; pemulasaraan; pemeliharaan taman makam pahlawan; serta penumbuhan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Aktivitas ini berperan sebagai bantalan sosial untuk menekan dampak kemiskinan dan kerentanan sosial.

b. Rehabilitasi Sosial

Kelompok program rehabilitasi sosial diarahkan pada pemulihan keberfungsian sosial individu dan keluarga miskin serta kelompok rentan. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi sosial

dasar bagi anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PMKS lainnya melalui layanan panti dan nonpanti; penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial, aktivitas hidup sehari-hari, dan keterampilan dasar; pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga; pemulangan ke daerah asal; pengangkatan anak; pengasuhan dan akses layanan pengasuhan keluarga pengganti; serta fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan sebagai bagian dari pemulihan sosial.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok program ini berfokus pada penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat miskin melalui peningkatan modal manusia dan sosial. Bentuk aktivitasnya mencakup pengembangan kewirausahaan desa; peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan kelembagaan sosial; pembinaan dan pengembangan desa budaya; pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat; koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat lintas sektor; serta dukungan kerja sama pembangunan transmigrasi dan mobilitas penduduk. Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi masyarakat.

d. Pemenuhan Akses terhadap Sumber Daya

Kelompok program pemenuhan akses terhadap sumber daya mencakup aktivitas yang menjamin akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan infrastruktur pendukung kehidupan. Aktivitas tersebut meliputi peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui rehabilitasi sarana prasarana sekolah, penyelenggaraan proses pembelajaran, pengelolaan Dana BOS, beasiswa, penyediaan biaya personal dan perlengkapan peserta didik; peningkatan layanan kesehatan dasar, gizi masyarakat, kesehatan jiwa, serta penanganan KLB

dan bencana; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung; pengelolaan dan optimalisasi SPAM dan SPALD; pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok; serta fasilitasi administrasi kependudukan untuk memastikan akses terhadap layanan publik.

Pada aspek pelaksanaan anggaran berdasarkan rekap perhitungan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan sampai dengan Triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dan merata pada empat kelompok program. Secara keseluruhan, pelaksanaan mencakup 36 program, 47 kegiatan, dan 173 subkegiatan, dengan total anggaran perubahan Triwulan IV sebesar Rp547.853.291.082,00 dan realisasi Rp526.695.088.566,atau mencapai 96,1 persen. Terdapat sedikit deviasi capaian karena penyesuaian belanja terhadap harga yang berlaku, efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan dan penyesuaian terhadap sasaran penerima.

Tabel 6.8. Rekapitulasi Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan dan Realisasi Anggaran Triwulan IV 2025

Kelompok Program	Prog -ram	Kegi -atan	Sub -kegiatan	Anggaran Perubahan TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian TW IV
A. Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	15	36	439.869 .671.537	421.079 .720.860	95,70
B. Rehabilitasi Sosial	7	11	105	46.375 .364.500	45.809 .537.875	98,80
C. Pemberdayaan Masyarakat	13	15	19	19.843 .428.700	19.115 .870.980	96,30
D. Pemenuhan Akses Terhadap Sumber Daya	5	6	13	41.764 .826.345	40.689 .958.851	97,40
Total	**36**	**47**	**173**	**547.853 .291.082**	**526.695 .088.566**	**96,10**

Sumber: Laporan Sebermas TKPK DIY 2025, diolah

Capaian dalam rangka penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Bidang sosial antara lain melaksanakan desain baru program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang bersifat berkelanjutan (seumur hidup) dan kolaboratif antara *charity* (bantuan sosial) dan *economic empowerment* (pemberdayaan ekonomi). Kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia

dilakukan dengan memanfaatkan sistem perbankan yang dikembangkan oleh Bank Pembangunan Daerah DIY (BPD DIY) yaitu *Dasboard Virtual Account* (VA). Pada awalnya, Sumber utama sasaran JSLU berasal dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pada Perkembangan berikutnya menggunakan DTSEN dan data Manunggal Raharja serta data hasil Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/kota. Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia Seumur Hidup diberikan sebesar Rp 300.000,00 per-orang per-bulan. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyaluran pada 9.885 orang lanjut usia.

Tabel 6.9. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Yang Dilakukan OPD DIY Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

No	Nama OPD	Prog-ram	Kegia-tan	Sub-kegia-tan	Anggaran/ Pagu (Rp)*	Reali-sasi (Rp)	Reali-sasi (%)
1	Dinas Sosial DIY	8	12	46	43.353.127.176	42.096.191.554	97.10
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) DIY	1	1	11	1.620.815.600	1.607.204.245	99.16
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) DIY	1	1	11	842.626.500	825.682.469	97.99
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) DIY	1	2	23	3.142.597.750	3.113.765.875	99.08
15	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY	1	1	8	1.865.183.000	1.725.032.866	92.49
6	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) DIY	1	1	13	1.416.769.000	1.380.946.480	97.47
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) DIY	1	1	9	3.042.639.000	3.016.848.482	99.15

Sumber: Dinas Sosial DIY, Sengguh 2025

Pada Bidang Koperasi dan UKM. Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM pada Tahun 2025 telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Pelatihan Desa Preneur yang difokuskan pada empat kalurahan miskin, yaitu Kalurahan Kelor (Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul), Kalurahan Sidoharjo (Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul), Kalurahan Ngargosari (Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo), dan Kalurahan Sambirejo (Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman).

Sebagai bagian dari progres pelaksanaan, pada tahun 2025 telah diselenggarakan pelatihan Desa Preneur di 4 Kalurahan miskin. Kegiatan pelatihan ini melibatkan pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat lokal dengan fokus pada penguatan kapasitas kewirausahaan, pengelolaan usaha, pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan perluasan akses pasar. Pelatihan juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Desa Preneur sebagai penggerak ekonomi lokal di tingkat kalurahan.

Pelaksanaan pelatihan Desa Preneur tersebut menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun ekosistem kewirausahaan di lokus kemiskinan, sekaligus sebagai fondasi bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Meskipun angka kemiskinan per Maret 2025 berada pada 10,23%, terdapat perlambatan alami (metode diminishing return) saat mendekati angka satu digit. Kelompok masyarakat yang tersisa seringkali merupakan kemiskinan ekstrem atau struktural yang lebih sulit diintervensi
b. Keterbatasan lapangan kerja formal dan rendahnya daya serap tenaga kerja membuat banyak penduduk miskin bergantung pada sektor informal atau upah di bawah kebutuhan dasar.
c. Rendahnya kapasitas pelaku usaha mikro pelaku usaha mikro di wilayah lokus kemiskinan masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, khususnya terkait pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, penentuan harga pokok produksi, serta perencanaan pengembangan usaha.

d. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal. Potensi sumber daya lokal yang dimiliki masing-masing kalurahan belum sepenuhnya diolah menjadi produk unggulan bernilai tambah. Produk yang dihasilkan umumnya masih berskala kecil, dengan kualitas, kemasan, dan branding yang belum memenuhi standar pasar yang lebih luas.
e. Terbatasnya akses pasar dan pemanfaatan teknologi digital pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum mampu memanfaatkan media sosial dan platform pemasaran daring secara optimal, sehingga jangkauan pemasaran produk masih terbatas pada pasar lokal dan belum mampu menembus pasar regional maupun nasional.
f. Lemahnya kelembagaan ekonomi desa Kelembagaan Desa Preneur sebagai wadah kolaborasi dan penggerak ekonomi lokal belum sepenuhnya berjalan optimal. Koordinasi antarpelaku usaha, pengurus desa, dan pemangku kepentingan lainnya masih perlu diperkuat agar tercipta ekosistem kewirausahaan desa yang berkelanjutan.

2) Solusi

a. Penguatan kebijakan berbasis individu dan wilayah melalui pemutakhiran data terpadu, penajaman sasaran pada rumah tangga miskin ekstrem, serta integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Pendekatan ini perlu didukung oleh kolaborasi lintas sektor, penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dan desa, serta inovasi skema pembiayaan dan kemitraan dunia usaha agar intervensi tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi mampu memutus rantai kemiskinan struktural secara lebih efektif.
b. Mendorong UMKM dan ekonomi lokal melalui dukungan modal, pemasaran, dan akses pasar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat serta Pemerintah perlu menarik

investasi dan menciptakan pekerjaan formal melalui kebijakan insentif dan pengembangan sektor produktif.

c. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro. Hal ini untuk mengatasi rendahnya kapasitas pelaku usaha mikro, dilakukan penguatan kompetensi kewirausahaan melalui pelatihan Desa Preneur yang terstruktur dan berkelanjutan. Materi pelatihan difokuskan pada pengelolaan usaha, pencatatan keuangan sederhana, perhitungan harga pokok produksi, serta penyusunan rencana pengembangan usaha. Selain pelatihan klasikal, dilakukan pula pendampingan praktis agar pelaku usaha mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara langsung dalam operasional usahanya, sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha.

d. Optimalisasi Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Potensi Lokal. Hal ini sebagai solusi atas belum optimalnya pengembangan produk unggulan, Program Desa Preneur diarahkan pada pemetaan potensi ekonomi lokal di masing-masing kalurahan dan penguatan kapasitas pelaku usaha dalam mengolah potensi tersebut menjadi produk bernilai tambah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi varian, serta penguatan desain kemasan dan branding agar produk memiliki identitas yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, produk UMKM desa tidak hanya mampu memenuhi pasar lokal, tetapi juga memiliki daya saing untuk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas.

e. Perluasan Akses Pasar dan Pemanfaatan Teknologi Digital. Hal ini untuk menjawab keterbatasan akses pasar dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital, dilakukan penguatan literasi digital bagi pelaku usaha melalui pelatihan pemasaran digital, pembuatan konten promosi, serta pemanfaatan media sosial dan platform pemasaran daring. Pelaku usaha juga difasilitasi untuk bergabung dalam ekosistem pemasaran digital daerah, termasuk pemanfaatan platform SiBakul Jogja sebagai sarana perluasan pasar dan

promosi produk. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan volume penjualan, serta membuka akses pasar regional dan nasional.

f. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa. Hal ini untuk mengatasi lemahnya kelembagaan ekonomi desa, Program Desa Preneur mendorong pembentukan dan penguatan kepengurusan Desa Preneur sebagai wadah kolaborasi antarpelaku usaha dan pemangku kepentingan di tingkat kalurahan. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengurus, penataan tata kelola organisasi, serta penyusunan rencana kerja bersama yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan desa. Dengan kelembagaan yang kuat dan koordinasi yang efektif, Desa Preneur diharapkan mampu menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Foto-Foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.63. Program Lele Gacor Sebagai Instrumen Strategis Dalam Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat



Gambar 6.64. Pelaksanaan Penyaluran Bansos JSLU di Kalurahan Karangsewu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo



Gambar 6.65. Pelatihan Desa Preneur di Kalurahan Sidoharjo



Gambar 6.66. Presentasi Kepengurusan Desa Preneur di Ngargosari Kapanewon Samigaluh



Gambar 6.67. Pemaparan Konsep Produk Unggulan

Q. REFORMASI KALURAHAN

1. Kondisi Umum

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks DIY, kalurahan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus sebagai ruang utama interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kinerja kalurahan menjadi salah satu fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Reformasi Kalurahan merupakan kebijakan strategis Pemda DIY yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan

penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, antara lain masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, belum meratanya kualitas pelayanan publik, serta perlunya penguatan peran kalurahan dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi Kalurahan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada dua pilar utama, yaitu Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Pada tahap awal pelaksanaannya, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan daerah. Peran kapanewon dalam melakukan asistensi dan pendampingan kepada kalurahan masih perlu dioptimalkan, sementara pelaksanaan reformasi cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya pengukuran kinerja yang komprehensif, seperti pengukuran AKIP Kalurahan, kualitas belanja, serta survei kepuasan masyarakat secara masif, menyebabkan pencapaian kinerja kalurahan belum dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan.

Seiring dengan dinamika kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemda DIY melakukan penguatan kebijakan Reformasi Kalurahan melalui penyusunan regulasi, pedoman teknis, serta pembentukan Tim Reformasi Kalurahan dari tingkat provinsi hingga kalurahan. Reformasi Kalurahan juga diperkuat melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari BKK Dais Reformasi Kalurahan, yang dialokasikan secara merata ke seluruh kalurahan sebagai bentuk komitmen Pemda dalam mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Telah terjadi peningkatan kinerja pemerintahan kalurahan yang tercermin dari capaian indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), peningkatan kualitas belanja, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik. Upaya ini diperkuat dengan penetapan peraturan bupati terkait standar pelayanan dan sistem akuntabilitas kinerja kalurahan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh perangkat daerah dan inspektorat.

Pada aspek Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, pelaksanaan reformasi telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah kalurahan yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan, menurunnya jumlah penduduk miskin dan angka stunting, serta meningkatnya jumlah kalurahan yang memiliki BUMKal dengan kategori maju. Selain itu, capaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada aspek ekonomi dan lingkungan, menunjukkan tren positif sebagai hasil dari intervensi kebijakan dan program Reformasi Kalurahan yang lebih terarah.

Dukungan pendanaan melalui BKK Dais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 secara umum telah terealisasi dengan baik, baik dari sisi penyaluran maupun pemanfaatannya. Namun demikian, hasil monitoring menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan, antara lain potensi pengembalian sisa penggunaan anggaran dengan nominal yang cukup besar, keterbatasan pemahaman terhadap juknis pelaksanaan kegiatan, serta perlunya peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan di tingkat kalurahan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka perbaikan tata kelola dan peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Kalurahan pada periode berikutnya.

Hasil asesmen tahunan terhadap kegiatan utama Reformasi Kalurahan menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara bertahap, baik pada pendekatan Reformasi Birokrasi maupun Reformasi Pemberdayaan. Meskipun secara umum capaian berada pada kategori baik, hasil asesmen juga mengindikasikan adanya variasi capaian antarkabupaten/kota yang perlu mendapatkan perhatian khusus melalui strategi pendampingan dan penguatan kapasitas yang lebih terfokus.

Berdasarkan capaian kinerja, hasil monitoring, serta asesmen pelaksanaan Reformasi Kalurahan hingga Triwulan IV Tahun 2025, Pemda DIY memandang perlu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai instrumen evaluasi dan dasar perumusan kebijakan serta rencana tindak lanjut Reformasi Kalurahan Tahun 2026–2027. Diharapkan, melalui pelaksanaan Reformasi Kalurahan yang berkelanjutan, kalurahan di DIY dapat semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

1) Capaian Kinerja Reformasi Kalurahan

Tabel 6.10. Capaian Kinerja Reformasi Kalurahan Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Persentase
Terwujudnya Kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya	Jumlah Desa Mandiri	326	384	117,79%
	Jumlah Desa Mandiri Budaya	40	45	112,50%
	Jumlah Desa Swasembada	58	86	148,27%

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Reformasi Kalurahan, pelaksanaan program Reformasi Kalurahan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif dan melampaui target pada sebagian besar indikator utama.

a. Jumlah Kalurahan Mandiri

a) Target: 326 kalurahan
b) Capaian: 384 kalurahan
c) Persentase capaian: 117,79%

Capaian ini menunjukkan bahwa target peningkatan kemandirian kalurahan telah terlampaui secara signifikan.

Seluruh kabupaten menunjukkan kontribusi nyata, dengan dominasi status mandiri dan tidak terdapat lagi kalurahan dengan status sangat tertinggal maupun tertinggal. Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi Reformasi Kalurahan telah berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pemerintahan dan pembangunan di tingkat kalurahan.

b. Jumlah Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (DMB)

a) Target: 40 kalurahan
b) Capaian: 45 kalurahan
c) Persentase capaian: 112,50%

Capaian Desa Mandiri Budaya menunjukkan konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun. Data historis 2020–2025 memperlihatkan bahwa pembinaan dan fasilitasi kebudayaan berbasis kalurahan berjalan berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Hal ini memperkuat karakteristik keistimewaan DIY dalam pembangunan berbasis budaya.

c. Jumlah Desa/Kalurahan Swasembada

a) Target: 58 kalurahan
b) Capaian: 86 kalurahan
c) Persentase capaian: 148,27%

Capaian ini merupakan yang tertinggi secara persentase, menunjukkan percepatan kemajuan desa yang sangat signifikan. Tabel rinci menunjukkan bahwa kategori swakarya dan swasembada mendominasi, menandakan peningkatan daya dukung ekonomi dan sosial kalurahan secara nyata.

Tabel 6.11. Rincian Desa/Kalurahan Mandiri

Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Status Desa/Kalurahan					Jumlah
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Bekembang	Maju	Mandiri	
3410	Kulon Progo				4	83	**87**
3402	Bantul					75	**75**
3403	Gunungkidul				4	140	**144**
3404	Sleman					86	**86**
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**8**	**384**	**392**

Sumber : Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, tanggal 27 Agustus 2025

Tabel 6.12. Rincian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (DMB)

Kabupaten	Tahun						Jumlah DMB
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Kulon Progo	2	5	0	1	1	0	9
Bantul	1	1	3	2	3	2	12
Gunungkidul	2	2	2	3	2	3	14
Sleman	5	0	2	1	2	0	10
Jumlah	**10**	**8**	**7**	**7**	**8**	**5**	**45**

Sumber : Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2025 (diolah)

Tabel 6.13. Rincian Desa/Kalurahan Swasembada

Kab/Kota	Jml Desa/Kel	Sudah Update/Kategori					Belum Update	
		Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jml	%	Jml	%
Kulon Progo	88	44	25	5	74	84,09	14	15,91
Bantul	75	4	47	16	67	89,33	8	10,67
Gunungkidul	144	1	76	63	140	97,22	4	2,78
Sleman	87	7	32	2	41	47,67	45	52,33
Kota Yogyakarta	45	3	42	0	45	100	0	0
Jumlah	**438**	**59**	**222**	**86**	**367**	**83,79**	**71**	**16,21**

Sumber : https://s.id/CapaianProdeskel2024

Tabel 6.14. Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Kalurahan

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Persentase
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Efektif, Kolaboratif, dan Berorientasi Kinerja	Jumlah Pemerintah kalurahan dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat Baik	30	30	**100**
	Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan hasil evaluasi kualitas belanja dengan kategori Baik	30	30	**100**

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Persentase
Terciptanya Budaya Pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional	Jumlah pemerintah kalurahan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja pelayanan Baik	30	179	**596,66**

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Kalurahan, progress tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik.

d. AKIP Kalurahan Predikat Baik

a) Target: 30 kalurahan
b) Capaian: 30 kalurahan
c) Persentase capaian: 100%

Seluruh target berhasil dicapai. Ini menandakan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di kalurahan mulai terbangun secara sistematis.

e. Kualitas Belanja Kalurahan Kategori Baik

a) Target: 30 kalurahan
b) Capaian: 30 kalurahan
c) Persentase capaian: 100%

Capaian ini menunjukkan bahwa belanja kalurahan semakin tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a) Target: 30 kalurahan
b) Capaian: 179 kalurahan
c) Persentase capaian: 596,66%

Capaian yang jauh melampaui target ini menunjukkan meluasnya implementasi survei kepuasan masyarakat serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kalurahan secara signifikan.

Tabel 6.15. Rincian Kinerja RB Kalurahan

Kabupaten	Kabupaten				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Jumlah
Kalurahan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat Baik	3	23	0	4	**30**
Kalurahan dengan Hasil evaluasi kualitas belanja dengan kategori Baik	0	20	0	10	**30**
Kalurahan dengan Indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja pelayanan Baik	87	56	2	34	**179**

2) Capaian Reformasi Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Kalurahan

Tabel 6.16. Capaian Reformasi Pemberdayaan masyarakat Kalurahan Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan	Jumlah Pemerintah Kalurahan yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Kalurahannya	301	252	83,72
	Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan penduduk miskin	188	261	138,83
	Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan anak stunting	204	214	104,90
	Jumlah Kalurahan yang memiliki BUM Kalurahan dengan kategori Maju	55	78	141,82
	Kalurahan yang memiliki nilai aspek Ekonomi IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan nilai antara 0,8111 sd 1,0000	210	173	82,38
	Kalurahan yang memiliki nilai aspek Lingkungan IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan kategori 1 (satu) dengan nilai 0,7778 - 1,0000	329	369	112,16

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja RPM Kalurahan, progress program tahun 2025 menunjukkan hasil cukup berimbang antara capaian tinggi dan capaian yang masih perlu ditingkatkan.

a. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan

a) Target: 301 kalurahan
b) Capaian: 160 kalurahan
c) Persentase: 53,16%

Indikator ini belum mencapai target, menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi sumber pendapatan kalurahan masih perlu ditingkatkan.

b. Penurunan Penduduk Miskin

a) Target: 188 kalurahan
b) Capaian: 230 kalurahan
c) Persentase: 122,34%

Program Reformasi Kalurahan terbukti efektif dalam mendukung penurunan angka kemiskinan di tingkat kalurahan.

c. Penurunan Stunting

a) Target: 204 kalurahan
b) Capaian: 214 kalurahan
c) Persentase: 104,90%

Indikator ini menunjukkan keberhasilan sinergi program pemberdayaan, kesehatan, dan sosial.

d. BUMKal Kategori Maju

a) Target: 55 kalurahan
b) Capaian: 78 kalurahan
c) Persentase: 141,82%

Data pemeringkatan BUMKal memperlihatkan peningkatan signifikan kategori berkembang dan maju, meskipun masih terdapat 4 kalurahan yang belum memiliki BUMKal.

e. Indikator IDM (Ekonomi dan Lingkungan)

a) Aspek ekonomi: 125,71% (melampaui target)
b) Aspek lingkungan: 82,97% (belum mencapai target)

Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi berkembang lebih cepat dibandingkan aspek lingkungan, sehingga diperlukan perhatian khusus pada isu lingkungan hidup.

Tabel 6.17. Rincian Kinerja RPM Kalurahan

Kabupaten	Kabupaten				
	Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Jumlah
Kalurahan yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Kalurahannya	58	47	93	58	252
Kalurahan yang mengalami penurunan penduduk miskin	0	31	144	88	261
Kalurahan yang mengalami penurunan anak stunting	46	29	75	64	214
Kalurahan yang memiliki BUM Kalurahan dengan kategori Maju	36	13	15	14	78
Kalurahan yang memiliki nilai aspek Ekonomi IDM dengan kategori Kelas 1 (satu)	35	58	42	38	173
Kalurahan yang memiliki nilai aspek Lingkungan IDM dengan kategori Kelas 1 (satu	77	72	139	81	369

Tabel 6.18. Pemeringkatan BUMKal Tahun 2025

Kabupaten	Jumlah Kelurahan	Pemeringkatan BUMKal				Jumlah BUMKal Sudah Upload Pemeringkatan	Jumlah BUMKal Belum Upload Pemeringkatan	Jumlah Kalurahan Belum Memiliki BUMKal
		Perintis	Pemula	Berkembang	Maju			
Kulon Progo	87	2	6	40	36	884	3	0
Bantul	75	11	5	31	13	60	15	0
Gunungkidul	144	2	26	101	15	144	0	0
Sleman	86	27	3	13	14	57	25	4
Jumlah	**392**	**42**	**40**	**185**	**78**	**345**	**43**	**4**

f. Kalurahan yang belum memiliki BUMKal :

a) Caturtunggal, Depok, Sleman
b) Tambakrejo, Tempel, Sleman
c) Ambarketawang, Gamping, Sleman
d) Madurejo, Prambanan, Sleman

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan Reformasi Kalurahan pada Tahun Anggaran 2025, yang merupakan tahun ke-3 berjalan sejak dicanangkan melalui *Kick-Off Meeting* Reformasi Kalurahan, telah menunjukkan progres signifikan dalam menginisiasi perbaikan tata kelola pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat di DIY. Namun, evaluasi mendalam di lapangan menunjukkan adanya

sejumlah hambatan struktural maupun kultural yang perlu mendapat perhatian serius.

Tantangan pada tahun 2025 bergeser dari isu "sosialisasi dan pelembagaan awal" (pada 2023-2024) menjadi isu "sustainabilitas, efektivitas anggaran terbatas, dan integrasi sistem". Berikut adalah uraian komprehensif mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi:

a. Keterbatasan SDM Kelembagaan

   (1) Keterbatasan jumlah maupun kapasitas SDM kelembagaan Reformasi Kalurahan di Kapanewon dan kabupaten yang bertugas melakukan asesmen dan pendampingan kepada kalurahan.
   (2) Efektivitas *sharing knowledge* antarlembaga/tim pengampu Reformasi Kalurahan di tingkat DIY, kabupaten, maupun kalurahan masih perlu ditingkatkan agar sinergi dan akselerasi reformasi bisa berjalan optimal.

b. Keterbatasan alokasi anggaran

   (1) Keterbatasan pagu anggaran mengakibatkan banyak kebutuhan RBKal maupun RPMKal di lapangan yang belum dapat terfasilitasi dengan baik. Dengan pagu anggaran BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per Kalurahan, tantangan utama yang dihadapi adalah dilema alokasi dengan outcome/dampak yang dihasilkan.
   (2) Dukungan fasilitasi anggaran untuk Reformasi Birokrasi Kalurahan (RBKal) dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal) di tingkat kabupaten belum berimbang.
   (3) Sistemastisasi kolaborasi anggaran untuk mendukung Reformasi Kalurahan belum optimal. Data dan informasi terkait kolaborasi anggaran antara BKK Dais untuk

Reformasi Kalurahan dengan sumber pendanaan lain (misalnya dana desa) belum dapat didokumentasikan secara optimal.

c. Kendala dalam Pengelolaan BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan

(1) Perencanaan dan Penganggaran BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan
(2) usulan kegiatan seharusnya mengacu pada rencana aksi yang disusun berdasarkan hasil asesmen Reformasi Kalurahan. Namun demikian, seringkali ditemukan usulan proposal yang tidak in line dengan rencana aksi.
(3) banyak ditemukan usulan kegiatan dalam proposal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam petunjuk teknis. Persepsi yang berbeda oleh kalurahan maupun supra kalurahan dalam menerjemahkan petunjuk teknis menjadi salah satu kendala dalam penyusunan proposal.
(4) ketidaksinkronan yang tidak segera diperbaiki pada proses pencairan, mengakibatkan kalurahan di kemudian hari harus mengusulkan perubahan RAB secara berjenjang ke tingkat DIY setelah anggaran tersebut dicairkan agar sesuai dengan ketentuan di dalam juknis.

d. Penatausahaan BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan

(1) Keterlambatan perbaikan berkas usulan pencairan oleh kalurahan pasca verifikasi awal oleh BPKA DIY mengakibatkan terlambatnya penyaluran dana ke kalurahan.
(2) Keterlambatan verifikasi di level supra-kalurahan juga berdampak langsung pada keterlambatan penyaluran dana.

(3) Belum adanya alat bantu di tingkat DIY yang secara sistematis dapat memantau secara real time proses pencairan dana oleh kalurahan. Paniradya Kaistimewan maupun Dinas PMK Dukcapil DIY harus secara rutin meminta informasi ke BPKA DIY.
(4) Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Kab. Sleman tidak dilakukan pencairan BKK Dais Reformasi Kalurahan, karena terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban BKK Jaga Warga Tahun 2023

e. Penggunaan BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan

(1) Masih ditemukan kecenderungan di sebagian Kalurahan untuk membagi BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan ke dalam banyak kegiatan berskala kecil. Pola "bagi rata" ini mengakibatkan dana kehilangan daya ungkit (leverage) strategisnya. Program berjalan, namun tidak menghasilkan dampak sosial atau perubahan layanan yang signifikan dan berkelanjutan.
(2) koordinasi di internal kalurahan masih perlu ditingkatkan (khususnya antarpamong pengampu teknis kegiatan utama RKal) dalam rangka penyerapan anggaran
(3) Penyerapan BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan pada sebagian kalurahan kurang optimal dan harus dilakukan pengembalian ke kas daerah DIY.

f. Pelaporan dan pertanggungjawaban BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan

(1) Sebagian besar kalurahan belum melakukan pelaporan melalui aplikasi KENES
(2) Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan pada sebagian kalurahan

g. Pemanfaatan Sistem Informasi Kalurahan

Penggunaan SINKal sebagai alat bantu asesmen, implementasi, dan monitoring-evaluasi Reformasi Kalurahan belum optimal. Proses perubahan arsitektur SINKal dari monolitik menjadi microservice, pengembangan menu dan fitur SINKal, serta penyesuaian user interface untuk publik maupun admin mengakibatkan SINKal tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung Reformasi Kalurahan selama beberapa bulan. Selanjutnya pembaruan-pembaruan tersebut juga membutuhkan waktu untuk uji coba dan perbaikan. Namun demikian, pada Triwulan IV SINKal sudah dapat diakses oleh publik dan dipergunakan sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi Reformasi Kalurahan.

h. Koordinasi kelembagaan Reformasi Kalurahan

(1) Koordinasi antara perangkat daerah leading sector dan perangkat daerah pendukung di tingkat DIY dan kabupaten masih belum berjalan efektif. Adanya perbedaan leading sector di tingkat DIY dan kabupaten pada beberapa kegiatan utama RPMKal seringkali menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan program, sehingga tujuan reformasi tidak tercapai secara maksimal.
(2) Payung kebijakan untuk Tim Reformasi Kalurahan tingkat kabupaten belum dilengkapi by name personel dan bentuk ketugasan perangkat daerah, sehingga menghambat proses koordinasi, monitoring dan evaluasi.

i. Dukungan Regulasi dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan

Pelaksanaan Reformasi Kalurahan, khususnya RBKal terlebih dahulu membutuhkan tindak lanjut berupa regulasi di tingkat kabupaten sebelum dapat diimplementasikan.

(1) Untuk mendorong AKIP yang baik, sampai akhir tahun 2025 telah terbit 3 Peraturan Bupati di 3 Kabupaten yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo tentang SAKIP Kal yang masing-masing ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Lurah. Namun demikian, proses penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Gunungkidul masih dalam tahap finalisasi.
(2) Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul telah diterbitkan sebagai upaya mendorong Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik

2) Solusi

a. Penguatan kolaborasi, termasuk sharing knowledge antarlembaga/tim pengampu Reformasi Kalurahan di tingkat DIY, kabupaten, maupun kalurahan
b. Kalurahan memprioritaskan usulan BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan dengan kegiatan utama sesuai permasalahan dan potensi masing-masing, sehingga hasilnya lebih optimal dan berdampak.
c. Pendampingan penyusunan rencana aksi Reformasi Kalurahan dan pengelolaan BKK Dais Reformasi Kalurahan oleh supra kalurahan
d. Pencermatan Juknis secara bersama agar pemanfaatan BKK Dais Reformasi Kalurahan sesuai ketentuan, karena dalam setiap kegiatan utama terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan
e. Koordinasi persiapan penyaluran BKK Dais dengan mengundang perangkat daerah DIY, Dinas PMK kabupaten, kapanewon, dan pemerintah kalurahan.
f. Percepatan perbaikan berkas usulan pencairan BKK Dais oleh kalurahan pasca verifikasi berkas oleh BPKA DIY agar penyaluran dana tidak terlalu mundur

g. Monitoring penggunaan BKK Dais untuk Reformasi Kalurahan untuk optimalisasi pemanfaatan dana dan persiapan penyusunan pelaporan penggunaan BKK Dais
h. Percepatan pemanfaatan SINKal sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi Reformasi Kalurahan. khususnya Reformasi Birokrasi Kalurahan
i. Optimalisasi pelaksanaan Forum Komunikasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan yang melibatkan kelembagaan Reformasi Kalurahan di DIY dan kabupaten.

4. Foto-Foto Hasil Pelaksanaan



Tabel 6.19. Sosialisasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan



Tabel 6.20. Sosialisasi Reformasi Kalurahan



Tabel 6.21. Forum Komunikasi Pemutakhiran Data Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2025



Tabel 6.22. Asistensi Indeks Desa DIY yang Berstatus Maju

R. PEMBINAAN KAWASAN PERBATASAN

1. Kondisi Umum

Wilayah perbatasan merupakan lokus yang diperhatikan Pemda DIY dalam menciptakan kesetaraan pembangunan sekaligus mendorong terjadinya akselerasi pembangunan di kawasan tersebut. Pembangunan berbasis kawasan yang menginterkoneksikan program kegiatan sektoral menjadi pijakan dalam mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang kesejahteraan masyarakat DIY. Sebagai tindak lanjut mandat Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY,

Pemda DIY melaksanakan berbagai program kegiatan dengan lokus di wilayah perbatasan, utamanya program kegiatan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

1) Urusan Pendidikan

Penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah merupakan salah satu tujuan pembangunan pendidikan. Pengukuran ketercapaian tujuan ini pada jenjang pendidikan menengah dan khusus dapat dilihat antara lain melalui upaya pengurangan angka putus sekolah, dukungan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana prasarana, serta dukungan untuk terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Pemerataan akses pendidikan juga wajib menjangkau wilayah perbatasan. Ketercapaian pemerataan akses pendidikan di wilayah perbatasan DIY dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.23. Capaian SPM Pendidikan di Wilayah Perbatasan DIY Tahun 2025

No	Program	Kegiatan		Subkegiatan		Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
								Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
1	Program SPM Pendidikan Menengah	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/ Paket C/MA/ MAK)	1	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Peserta didik	12	26	9	21	31	18	15	10	25	7	21	25	54	42	48	70	42	25
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik	194	94	119	160	124	198	100	347	288	113	145	141	199	288	213	264	214	132
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas	5	2	2	3	3	7	4	9	4	5	8	7	2	5	4	7	3	2

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
						Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
		belajar Peserta Didik (SMA/SMK/ Paket C/MA/ MAK)	sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut																				
			2 Fasilitasi pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2 Terselenggaranya pelatihan/ seminar/ lokakarya	Kegiatan	5	2	2	3	3	7	4	9	4	5	8	7	2	5	4	7	3	2
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/ Paket C/MA/ MAK)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6	1 Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
						Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
			(enam) bulan																				
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2 Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3 Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan	4 Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan		Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
							Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
			kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran																					
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/ Paket C)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan	92	78	75	70	34	107	37	43	125	34	155	53	109	79	45	60	36	55

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
						Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
			dalam 1 (satu) tahun																				
			2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Pendidik dan tenaga kependidikan	92	78	75	70	34	107	37	43	125	34	155	53	109	79	45	60	36	55
			3 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	3 Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Program	Kegiatan		Subkegiatan		Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
								Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
		Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	1	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	1	Tersedianya Data	Lulusan	250	96	73	120	56	334	59	262	352	24	269	293	334	544	124	292	95	108
		Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	1	Kemitraan terfasilitasi	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Program SPM Pendidikan Khusus	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	1	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang	1	Tersedianya Data	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Pesertadidik	5	14	5	6	16	11	7	5	4	3	12	18	15	9	14	5	5	2

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
						Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Ngawen	Semin	Ponjong	Rongkop	Giriubo
			disabilitas yang tidak bersekolah																				
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2 Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik	N/A	27	N/A	N/A	52	130	49	138	0	35	83	74	N/A	44	61	61	77	N/A
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus	1 Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1 Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas	N/A	1	N/A	N/A	1	2	1	2	1	1	2	1	N/A	1	1	1	1	N/A

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
						Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
			2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2 Terselenggaranya pelatihan/ seminar /lokakarya	Kegiatan	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1 Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1	2 Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana	Kegiatan	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan		Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
							Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
			(satu) kali dalam 1 (satu) tahun		dan prasarana																			
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik,	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
						Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
			agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran																				
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1 Tersediannya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan	N/A	7	N/A	N/A	11	16	8	31	8	9	12	10	N/A	11	8	10	8	N/A
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga	2 Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan	N/A	7	N/A	N/A	11	16	8	31	8	9	12	10	N/A	11	8	10	8	N/A

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kabupaten Kulon Progo					Kabupaten Sleman							Kabupaten Gunungkidul					
						Temon	Kokap	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	Tempel	Turi	Pakem	Cangkringan	Ngemplak	Kalasan	Prambanan	Gedangsari	Nglipar	Semin	Ponjong	Rongkop	Girisubo
			kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan																				
			3 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	3 Penempatan	Kegiatan	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A

Secara umum, upaya pemenuhan pelayanan minimal jenjang pendidikan menengah di tahun 2025 bagi penduduk usia sekolah yang berada di wilayah perbatasan telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari adanya pemerataan partisipasi anak usia sekolah yang didukung dengan pendataan anak putus sekolah serta pemberian bantuan pendidikan guna menekan angka putus sekolah. penyediaan sarana prasarana pendidikan di wilayah perbatasan juga telah mendapatkan pemeriksaan kondisi dan pemeliharaan rutin setiap tahunnya dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pemerataan pendidik juga telah dilaksanakan sampai ke wilayah perbatasan didukung dengan penguatan kompetensi pendidik. Penurunan penyerapan lulusan SMK di beberapa wilayah perbatasan dibandingkan dengan tahun sebelumnya patut mendapatkan perhatian, khususnya terkait kelengkapan pendataan lulusan serta kesiapan para lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja. Peningkatan kualitas lulusan SMK diperlukan sebagai langkah awal para lulusan SMK yang akan melanjutkan pendidikan, berwirausaha, maupun memasuki dunia industri.

Optimalisasi layanan pendidikan khusus untuk wilayah perbatasan di Kapanewon Temon, Girimulyo, Samigaluh, Gedangsari, dan Girisubo masih terkendala karena belum tersedianya satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah tersebut. Meski demikian, pendataan anak-anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah tetap dilaksanakan di wilayah tersebut melalui kolaborasi dengan SLB terdekat dan pamong setempat. Penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada para siswa SLB di wilayah perbatasan juga telah dilaksanakan guna menjamin partisipasi pendidikan. Sarana prasarana pendidikan khusus di wilayah perbatasan juga telah mendapatkan pemeriksaan kondisi dan pemeliharaan rutin setiap tahunnya dengan mempertimbangkan skala prioritas. Distribusi pendidik juga telah dilakukan hingga wilayah perbatasan walaupun adanya keterbatasan jumlah dan sebaran SLB negeri.

Fasilitasi pelatihan dan peningkatan kompetensi juga terus diupayakan bagi para pendidik di SLB wilayah perbatasan, khususnya untuk memastikan seluruh pendidik mampu menerapkan sistem manajemen kelas yang inklusif sehingga setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

2) Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah perbatasan merupakan salah satu fokus strategis Pemda DIY dalam rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Wilayah perbatasan memiliki karakteristik khusus yang memerlukan penanganan terpadu lintas sektor dan lintas wilayah, mengingat adanya keterkaitan erat antara kondisi geografis, dinamika kependudukan, serta pola pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan antardaerah. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan sebagaimana tercantum pada Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan bahwa Pemda telah berupaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang relatif memadai, baik melalui rumah sakit maupun puskesmas beserta puskesmas pembantu. Fasilitas tersebut menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan rujukan awal bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan.

Tabel 6.24. Daftar Rumah Sakit di Wilayah Perbatasan

No.	Kab./Kapanewon	Nama Rumah Sakit
	Kab Kulon Progo	
1	Temon	Rumah Sakit Rizki Amalia
2	Kalibawang	Rumah Sakit Santo Yusuf
	Kab Sleman	

No.	Kab./Kapanewon	Nama Rumah Sakit
1	Prambanan	RSUD Prambanan
		Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Prambanan
2	Kalasan	Rumah Sakit Islam PDAI
		Rumah Sakit Panti Rini
3	Ngemplak	Rumah Sakit Mitra Paramedika
4	Pakem	Rumah Sakit Grhasia
		Rumah Sakit Panti Nugroho

Tabel 6.25. Daftar Fasyankes di Wilayah Perbatasan

No.	Kabupaten/Kapanewon	Nama Puskesmas	Jumlah Pustu
	Kabupaten Kulon Progo		
1	Temon	Puskesmas Temon I	5
		Puskesmas Temon II	
2	Kokap	Puskesmas Kokap I	7
		Puskesmas Kokap II	
3	Girimulyo	Puskesmas Girimulyo I	3
		Puskesmas Girimulyo II	
4	Kalibawang	Puskesmas Kalibawang	6
5	Samigaluh	Puskesmas Samigaluh I	6
		Puskesmas Samigaluh II	
	Kabupaten Gunungkidul		
6	Rongkop	UPT Puskesmas Rongkop	5
7	Girisubo	Puskesmas Girisubo	6
8	Ponjong	Puskesmas Ponjong I	9
		Puskesmas Ponjong II	
9	Gedangsari	Puskesmas Gedangsari I	5
		Puskesmas Gedangsari II	
10	Ngawen	Puskesmas Ngawen I	5
		Puskesmas Ngawen II	
11	Semin	UPT Pusesmas Semin I	7
		Puskesmas Semin II	
	Kabupaten Sleman		
12	Prambanan	Puskesmas Prambanan	5
13	Kalasan	Puskesmas Kalasan	3
14	Ngemplak	Puskesmas Ngemplak I	2
		Puskesmas Ngemplak II	2
15	Tempel	Puskesmas Tempel I	2
		Puskesmas Tempel II	4
16	Turi	Puskesmas Turi	3
17	Pakem	Puskesmas Pakem	4
18	Cangkringan	Puskesmas Cangkringan	4
Jumlah		**28 Puskesmas**	**93 Pustu**

Pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan DIY masih menghadapi tantangan terkait ketimpangan sebaran fasilitas dan kapasitas layanan, khususnya pada kapanewon dengan wilayah luas dan kondisi geografis sulit dijangkau. Keterbatasan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, serta tenaga kesehatan tertentu—terutama dokter spesialis dan tenaga terampil—berpotensi menimbulkan kesenjangan akses dan mutu pelayanan, sehingga belum sepenuhnya mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal dan penguatan layanan rujukan.

Untuk menjamin pemerataan dan kesinambungan pelayanan, Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas puskesmas perbatasan, serta pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui kebijakan afirmatif. Selain itu, pengembangan jejaring rujukan terintegrasi lintas kabupaten dan lintas provinsi, penyelarasan sistem informasi, harmonisasi pembiayaan JKN, serta pemanfaatan teknologi informasi kesehatan menjadi strategi utama guna memastikan pelayanan kesehatan yang cepat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Tabel 6.26. Daftar Penyakit Berpotensi KLB di Puskesmas Wilayah Perbatasan Tahun 2025 Berdasarkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

No	Puskesmas	Penyakit																			
		Diare Akut	Malaria Konfirmasi	Suspek Dengue	Pneumonia	Diare Berdarah/ Disentri	Suspek Demam Tifoid	Sindrom Jaundice Akut	Suspek Chikungunya	Suspek Campak	Kasus Observasi Difteri	Suspek Pertusis	Acute Flacid Paralysis (AFP)	Gigitan Hewan Penular Rabies	Suspek Antrax	Suspek Leptospirosis	Suspek Meningitis/ Encephalitis	Suspek Tetanus	ILI (Penyakit Serupa Influenza)	Suspek HFMD	ISPA	Covid-19
1	Temon I	300		39	21		78			3				2		1			8		2149	
2	Temon II	190		13	2	1	107			4				1						5	2068	
3	Kokap I	359		81	14	28	74			14				10						63	3663	
4	Kokap II	167	1	137	4	13	52	2		3				9		1				28	1836	
5	Girimulyo I	22		3		2	9			1				1						6	185	
6	Girimulyo II	8		1	1		1			1				1						1	75	
7	Kalibawang	633		132	21	54	25			13				21		3	1		14	31	5911	
8	Samigaluh I	448		25	102	44	53		1	23			1	7		2				85	3412	
9	Samigaluh II	320		32	18	1	2			8				3		1			8	82	3226	
10	Rongkop	197		30	45		14		10	3				5	7	1			1	2	989	
11	Girisubo		10				5															
12	Ponjong I	700		257	11		187	2	1	13			2	10					4	48	1610	
13	Ponjong II	212		28	7	1	7							5					3		499	
14	Gedangsari I	367		4	12		21		6					4					1	39	2952	
15	Gedangsari II	329		3		2				3						1					2911	
16	Ngawen I	257		19	22	1				8		7		1			1			30	2249	
17	Ngawen II	8		2																	2	
18	Semin I	510	1	9	18		83	4		2						1				16	4089	
19	Semin II	8		36			39														84	
20	Prambanan	282		100	16	11	32		3	6			1	1		11				1	3716	
21	Kalasan	730		148	4	16	20			16		1	2	46		9				20		
22	Ngemplak I	602		82	53	38	97	2		28	1	1	1	1		15				31	4158	
23	Ngemplak II	402		71	52	7	51	1		12	1	1		3		8		1	29	50	2588	
24	Tempel I	743		18	5	3	141			15		1	2	6					4	46	5785	

No	Puskesmas	Penyakit																				
		Diare Akut	Malaria Konfirmasi	Suspek Dengue	Pneumonia	Diare Berdarah/ Disentri	Suspek Demam Tifoid	Sindrom Jaundice Akut	Suspek Chikungunya	Suspek Campak	Kasus Observasi Difteri	Suspek Pertusis	Acute Flacid Paralysis (AFP)	Gigitan Hewan Penular Rabies	Suspek Antrax	Suspek Leptospirosis	Suspek Meningitis/ Encephalitis	Suspek Tetanus	ILI (Penyakit Serupa Influenza)	Suspek HFMD	ISPA	Covid-19
25	Tempel II	500		82			413			3						15				16		
26	Turi	428	2	24	6		16			6	1		1	1		5			6	14		1
27	Pakem	314		51	75	9	92			10	1			2		11			22	7	3332	
28	Cangkringan	405		32	2		99			17			1			3		1				

Pada Tahun 2025, di wilayah DIY tidak tercatat adanya krisis kesehatan yang diakibatkan oleh bencana maupun potensi bencana. Namun demikian, mengingat masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, Pemda tetap melaksanakan upaya pra-krisis secara berkesinambungan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat hingga tingkat kalurahan di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, tidak ditemukan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tingkat provinsi di wilayah DIY. Meskipun demikian, terdapat beberapa jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB tingkat provinsi sehingga memerlukan kewaspadaan serta penanganan khusus dari Pemda.

Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan di wilayah perbatasan, Pemda DIY melakukan penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan kapasitas puskesmas perbatasan, baik dari aspek penyediaan sarana dan prasarana, ketersediaan obat dan alat kesehatan, maupun pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. di samping itu, Pemda mendorong penguatan pelayanan promotif dan preventif, antara lain melalui peningkatan cakupan imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular sebagai bagian dari indikator SPM bidang kesehatan.

Untuk mengantisipasi tingginya mobilitas penduduk antarwilayah, Pemda DIY juga memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas kabupaten/kota serta lintas provinsi, khususnya dalam pengembangan sistem rujukan dan pelayanan kegawatdaruratan. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan dan penguatan pendataan terpadu terus dikembangkan guna meningkatkan akurasi pengukuran capaian indikator SPM, termasuk bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan. Melalui berbagai upaya tersebut, Pemda DIY berkomitmen untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata,

bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di wilayah perbatasan DIY.

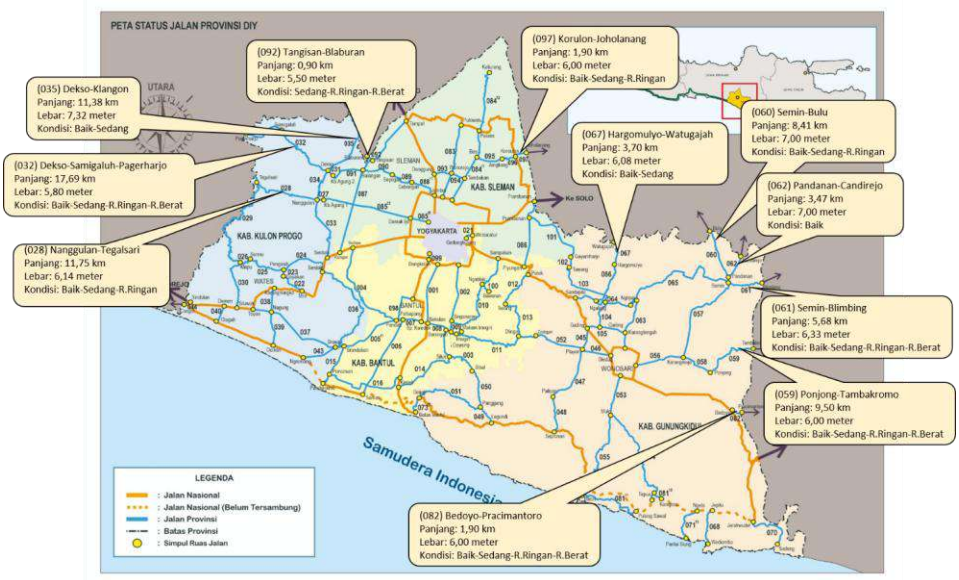
3) Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur jalan merupakan pondasi utama dalam mendorong pengembangan wilayah perbatasan di DIY. Wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, seperti di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman, memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di kawasan perbatasan menjadi prasyarat penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6.27. Penanganan Ruas Jalan di Wilayah Perbatasan pada tahun 2025

Ruas Jalan	Lokasi Wilayah Perbatasan	Penanganan
Prambanan - Gayamharjo	Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman	Pembangunan Jalan Baru sepanjang 2,98 km
Tegalsari - Klepu	Kalurahan Hargotirto, Jatimulyo, Purwosari Kapanewon Kokap, Girimulyo Kabupaten Kulon Progo	Peningkatan Jalan sepanjang 4 km
Klangon - Tempel	Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman	Peningkatan sepanjang 1 km dan Rehabilitasi sepanjang 0,65 KM
Hargomulyo - Watugajah	Kalurahan Watugajah Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul	Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Provinsi (Penanganan longsor Jalan Hargomulyo - Watugajah)

Adapun untuk kondisi eksisting ruas jalan di wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut:



Gambar 6.68. Kondisi Jalan Provinsi di DIY di wilayah perbatasan

Tabel 6.28. Kondisi Jalan Eksisting di Wilayah Perbatasan DIY Tahun 2025

Nama Ruas Jalan	Volume		Kondisi Jalan	Lokasi Perbatasan	
	Panjang (km)	Lebar (m)		DIY	Prov. JATENG
Nanggulan - Tegalsari	11,75	6,14	Baik (57,87%) - Sedang (27,66%) - Rusak Ringan (14,47)	Kap. Girimulyo (Kulon Progo)	Kec. Kaligesing (Purworejo)
Dekso - Samigaluh - Pagerharjo	17,69	5,80	Baik (26%) - Sedang (46,86%) - Rusak Ringan (23,74%) - Rusak Berat (3,39%)	Kap. Samigaluh (Kulon Progo)	Kec. Loano (Purworejo)
Dekso - Klangon	11,38	7,32	Baik (95,61%) - Sedang (4,39%)	Kap. Kalibawang (Kulon Progo)	Kec. Ngluwar (Magelang)
Tangisan - Blaburan	0,90	5,50	Sedang (22,22%) - Rusak Ringan (66,67%) - Rusak Berat (11,11%)	Kap. Tempel (Sleman)	Kec. Ngluwar (Magelang)
Korulon - Joholanang	1,90	6,00	Baik (10,53%) - Sedang (36,84%) - Rusak Ringan (52,63%)	Kap. Ngemplak (Sleman)	Kec. Manisrenggo (Klaten)
Hargomulyo - Watugajah	3,70	6,08	Baik (91,89%) - Sedang (8,11%)	Kap. Gedang Sari (Gunungkidul)	Kec. Gantiwarno (Klaten)
Semin - Bulu	8,41	7,00	Baik (46,37%) - Sedang (32,22%) - Rusak Ringan (21,40%)	Kap. Ngawen (Gunungkidul)	Kec. Cawas (Klaten)
Pandanan - Candirejo	3,47	7,00	Baik (100%)	Kap. Semin (Gunungkidul)	Kec. Weru (Sukoharjo)

Nama Ruas Jalan	Volume		Kondisi Jalan	Lokasi Perbatasan	
	Panjang (km)	Lebar (m)		DIY	Prov. JATENG
Semin - Blimbing	5,68	6,33	Baik (40,14%) - Sedang (21,13%) - Rusak Ringan (36,97%) - Rusak Berat (1,76%)	Kap. Semin (Gunungkidul)	Kec. Manyaran (Wonogiri)
Ponjong-Tambakromo	9,50	6,00	Baik (25,26%) - Sedang (36,84%) - Rusak Ringan (35,79%) - Rusak Berat (2,11%)	Kap. Ponjong (Gunungkidul)	Kec. Erokomo (Wonogiri)
Bedoyo-Pracimantoro	1,90	6,00	Baik(26,32%) - Sedang (21,05%) - Rusak Ringan (47,37%) - Rusak Berat (5,26%)	Kap. Ponjong (Gunungkidul)	Kec. Pracimantoro (Wonogiri)

4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan DIY difokuskan pada pemberdayaan dan perlindungan masyarakat melalui penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah perbatasan.

Pelatihan Desa Preneur merupakan salah satu kegiatan strategis Pemda DIY dalam menumbuhkan dan memperkuat ekosistem kewirausahaan berbasis potensi lokal di kalurahan perbatasan. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan kelembagaan Desa Preneur melalui penguatan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pengembangan produk unggulan berbahan baku lokal, branding dan kemasan produk, serta pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran daring. Melalui pelatihan ini, pelaku usaha desa didorong untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya penumbuhan wirausaha baru dan pengembangan desa mandiri di kalurahan perbatasan. Sejumlah kalurahan perbatasan yang menjadi binaan pada tahun 2025 antara lain Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Banjaroyo, Kalurahan Melikan, Kalurahan Kelor, dan Kalurahan Argomulyo.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Masih adanya anak putus sekolah, baik pada jenjang menengah maupun jenjang pendidikan khusus, yang ditemukan di wilayah-wilayah perbatasan di DIY.
b. Penyakit menular maupun penyakit tidak menular serta potensi bencana dan kejadian luar biasa masih menjadi permasalahan urusan kesehatan di wilayah perbatasan DIY.
c. Belum optimalnya fasilitas kesehatan baik dalam hal jarak yang jauh maupun sarana dan prasarana medis yang belum optimal. Selain itu masih belum meratanya SDM Kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan daerah perbatasan.
d. Adanya retakan bidang Longsor pada dinding penahan tanah Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah di Kapanewon Gedangsari yang ditakutkan akan berubah menjadi longsoran yang dapat memakan badan jalan.
e. Ruas Jalan eksisting yang menghubungkan Marangan - Nglengkong - Losari - Gayamharjo di Kapanewon Prambanan memiliki alinyemen vertikal dan horizontal yang cukup ekstrim sehingga berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.
f. Kondisi Jalan Provinsi DIY, terutama Jalan Provinsi di wilayah perbatasan yang belum semua dalam kondisi mantap.

2) Solusi

a. Pemberian bantuan atau beasiswa serta menyediakan akses pendidikan nonformal setara pendidikan menengah bagi anak-anak putus sekolah agar tetap dapat menuntaskan pendidikan. Khusus anak berkebutuhan khusus, diperlukan pendampingan intensif melalui kolaborasi dengan pendidik SLB terdekat dan dukungan keluarga untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, dan psikologis.

b. Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Strategi yang diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yakni: a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.
c. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan sarana prasarana dan SDM kesehatan antara lain: dukungan untuk mendapatkan penganggaran melalui dana alokasi khusus untuk rehab puskesmas dan puskesmas pembantu, sarana prasarana, serta pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif serta dengan optimalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
d. Telah dilakukan pembangunan Bangunan pelengkap berupa perkuatan lereng dengan konstruksi *bore pile*, pada jalan ruas Hargomulyo - Watugajah.
e. Pada Tahun 2025,telah dilakukan pembangunan jalan dan jembatan Prambanan - Gayamharjo sepanjang 1,05 km dengan Dais dan 1,93 dengan sumber dana IJD dan akan dilanjutkan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
f. Pada tahun 2025, dilakukan penanganan jalan provinsi di wilayah perbatasan, untuk meningkatkan kondisi eksisting yang ada, khususnya pada jalan Tegalsari - Klepu dan Klangon–Tempel

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.69. Pembangunan Ruang Praktik Siswa di SMKN 1 Kokap melalui Program Revitalisasi SMK 2025



Gambar 6.70. Pemeriksaan Masyarakat lintas batas Kulonprogo Purworejo - Puskesmas Kokap II



Gambar 6.71. Survei Jentik Malaria - Puskesmas Kokap II



Gambar 6.72. Penanganan Ruas Jalan Prambanan - Gayamharjo



Gambar 6.73. Penanganan Ruas Jalan Prambanan - Gayamharjo



Gambar 6.74. Penanganan Ruas Jalan Hargamulyo - Watugajah



Gambar 6.75. Penanganan Ruas Jalan Hargamulyo - Watugajah



Gambar 6.76. Peningkatan Jalan Klangon - Tempel

S. LAPORAN PENGARUS UTAMAAN GENDER (PUG)

1. Kondisi Umum

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan daerah. Pelaksanaan PUG di daerah berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. di DIY, pelaksanaan PUG diatur pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan PUG difokuskan pada penguatan kelembagaan, penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyediaan data terpilah gender. Kelembagaan PUG telah terbentuk melalui Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Penggerak, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA), serta Inspektorat Daerah DIY. Selain itu, telah ditetapkan Gender Focal Point pada seluruh perangkat daerah. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) menunjukkan perkembangan yang positif melalui integrasi Analisis Gender dan Gender Action Budget (GAB) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2025, penerapan ARG dilakukan secara penuh melalui sistem penandaan (tagging) pada aplikasi pengendalian kinerja “SENGGUH”, sehingga memudahkan proses penghitungan dan pemantauan ARG secara terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY.

Dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemda DIY secara berkelanjutan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, serta *coaching* bagi aparatur Pemda guna meningkatkan pemahaman dan implementasi PUG dan ARG, sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan personel akibat mutasi. Tingkat keterlibatan organisasi perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan telah mencapai 75 persen, namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kemitraan yang lebih inklusif.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

Aspek	Indikator	Capaian 2025	Keterangan
Kelembagaan	Jumlah perangkat daerah dengan Gender Focal Point aktif	37 dari 37 OPD	Implementasi GAB dan peningkatan kualitas
Anggaran Responsif Gender	Persentase program dengan Analisis Gender (GAB)	66,84%	Sesuai target Surat Edaran Sekretaris Daerah
Data dan Monitoring	OPD dengan data terpilah gender lengkap	20 OPD	Penguatan data terpilah melalui DATAKU Bapperida
Kapasitas SDM	ASN terlatih PUG dan ARG	65%	Persentase dari SDM perencana, pelaksana, dan pengawas
Partisipasi	Keterlibatan organisasi perempuan dalam program pembangunan	75%	Perlu perluasan dan penguatan kemitraan

Hingga tahun 2025, seluruh perangkat daerah pada Pemda DIY telah dilengkapi dengan Gender Focal Point (GFP) aktif. *Gender Focal Point* ini berperan aktif dalam Implementasi GAB dan peningkatan kualitas di masing-masing perangkat daerah.

Sebagai penggerak pengarusutamaan gender, *Gender Focal Point* pada perangkat daerah berupaya untuk menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, serta kontribusi perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, serta kontribusi perempuan

dan laki-laki secara adil dan setara. ARG tidak dimaksudkan untuk memisahkan anggaran berdasarkan gender, melainkan memastikan bahwa kebijakan dan program Pemda memberikan manfaat yang setara serta mendukung terwujudnya keadilan gender dan keadilan sosial. Tujuan utama penerapan ARG antara lain meningkatkan keadilan gender dalam distribusi sumber daya publik, memastikan kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh gender, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta memperkuat akuntabilitas Pemda terhadap komitmen kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

ARG diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria, yaitu: (1) Anggaran Target Gender, yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender dan memberdayakan kelompok yang mengalami ketimpangan; (2) Anggaran Pelembagaan Gender, yang difokuskan pada penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan PUG; serta (3) Anggaran Responsif Gender, yaitu program dan kegiatan reguler yang telah disesuaikan berdasarkan analisis gender atau ditandai melalui *Gender Action Budget*.

Penghitungan ARG pada Pemda DIY dilakukan berbasis aplikasi sistem pengendalian kinerja “SENGGUH” yang dikelola oleh Bapperida melalui mekanisme penandaan (tagging). Sistem ini memudahkan proses kompilasi dan pemantauan ARG secara menyeluruh pada seluruh anggaran Pemda. Adapun total Anggaran Responsif Gender Tahun 2025 Rp1.654.031.325.193 yang dari total pagu Rp 2.474.479.729.137. Sehingga persentase ARG sebesar 66,84% yang terbagi dalam bidang politik sebesar Rp225.360.416.706, bidang hukum sebesar Rp13.602.473.800, bidang sosial sebesar Rp1.061.842.762.510, bidang ekonomi sebesar Rp169.377.045.814 dan bidang lainnya sebesar Rp183.848.626.363. Capaian ARG ini menunjukkan komitmen kuat Pemda DIY dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan daerah.

di sisi lain, ketersediaan data terpilah gender yang akurat dan mutakhir menjadi elemen penting dalam penyusunan program dan anggaran yang lebih responsif gender, tepat sasaran, dan berkeadilan. Dengan data tersebut, intervensi pembangunan dapat dirancang berdasarkan bukti, sehingga mampu menjawab permasalahan nyata di lapangan serta mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan. Dari total 37 perangkat daerah, 20 perangkat daerah telah menerapkan data terpilah gender lengkap.

Lebih lanjut, kapasitas sumber daya manusia (SDM) memegang peran kunci dalam keberhasilan pengarusutamaan gender di seluruh tahapan pembangunan. SDM yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender akan mampu mengintegrasikan perspektif gender secara konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program. Secara keseluruhan, 65% ASN terlatih PUG dan ARG. Personel-personel ini terdiri dari SDM perencana, pelaksana, dan pengawas yang ada pada berbagai perangkat daerah.

Terakhir, dalam hal partisipasi, keterlibatan organisasi perempuan dalam program pembangunan merupakan elemen strategis untuk memastikan kebijakan dan intervensi yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman perempuan di masyarakat. Organisasi perempuan memiliki pengetahuan kontekstual, kedekatan dengan komunitas, serta kapasitas advokasi yang kuat, sehingga mampu menjembatani aspirasi perempuan dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.

Di DIY, keterlibatan organisasi perempuan dalam program pembangunan relatif sudah berpartisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif organisasi perempuan, program pembangunan dapat dirancang secara lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat representasi perempuan, tetapi juga mendorong akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan

program. Dengan demikian, organisasi perempuan berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan gender dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.



Gambar 6.77. Rapat Koordinasi POKJA PUG dipimpin oleh Wakil Gubernur DIY

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG antara lain;

a. Belum optimalnya fungsi *Gender Focal Point* (GFP) pada sebagian perangkat daerah.
b. Keterbatasan ketersediaan dan integrasi data terpilah gender.

2) Solusi

a. Pemda DIY melakukan penguatan kelembagaan PUG terutama GFP melalui penyusunan rencana kerja, peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan,
b. Mengoptimalkan sistem data terpadu untuk terpilah gender guna mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Melalui aplikasi sistem data terpadu DATAKU, data pilah akan dioptimalkan tersedia pada seluruh perangkat daerah.

c. Pemanfaatan data pilah sebagai dasar melakukan analisa gender yang melihat faktor kesenjangan yang terjadi dan menjadi bahan pengambilan kebijakan

T. PENANGANAN SAMPAH

1. Kondisi Umum

Tahun pelaporan merupakan periode krusial bagi DIY dalam mereformasi sistem pengelolaan sampah. Seiring dengan kebijakan pembatasan hingga penutupan permanen TPST Piyungan, Pemda DIY telah melakukan langkah progresif dengan menggeser tanggung jawab utama pengelolaan dari hilir kembali ke hulu (sumber sampah) melalui kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sampah.

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

Pemda DIY melalui sinergi antara DLHK DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota (khususnya wilayah Kartamantul: Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) telah mencapai beberapa indikator kunci:

a. Reduksi Sampah di Sumber: Terjadi peningkatan signifikan dalam persentase pemilahan sampah di tingkat rumah tangga melalui penguatan Bank Sampah dan gerakan "Mbah Dirjo" serta gerakan serupa di kabupaten lainnya.
b. Optimalisasi Infrastruktur Regional: Pemanfaatan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di beberapa titik strategis sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan yang diserap oleh industri (seperti pabrik semen).

Penyediaan Lahan dan Fasilitas: Pemerintah Provinsi telah memfasilitasi penyediaan lahan melalui tanah Kasultanan (Sultan Ground) untuk pembangunan TPST di tingkat kapanewon/kalurahan guna memastikan sampah selesai di tingkat lokal.

Tabel 6.29. Data dan Statistik Pengelolaan (Simulasi)

Indikator Pengelolaan Sampah	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pengurangan Sampah (Hulu)	25,00	27,50	110,00
Penanganan Sampah (Sistemik)	75,00	72,00	96,00
Total Sampah Terkelola	**100,00**	**99,50**	**99,50**

1) Inovasi dan Langkah Strategis

Dalam menghadapi tantangan kedaruratan sampah, Pemerintah DIY telah menempuh langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*):

a. Penerapan Ekonomi Sirkular: Mendorong ekosistem industri daur ulang sehingga sampah plastik dan kertas memiliki nilai ekonomi yang kembali ke masyarakat.
b. Kerjasama Lintas Sektor: Membangun kemitraan dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik skala besar.
c. Penegakan Hukum (Law Enforcement): Sosialisasi dan pengawasan ketat terhadap pembuangan sampah liar guna menjaga estetika dan kesehatan lingkungan sesuai Perda yang berlaku.

2) Tantangan dan Keberlanjutan

Tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan perilaku masyarakat secara massal dan penyesuaian infrastruktur pengolahan sampah mandiri di tingkat Kabupaten/Kota yang membutuhkan investasi besar.

3) Tindak lanjut yang akan dilakukan:

a. Akselerasi pembangunan TPST mandiri yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.
b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola sampah di tingkat desa/kalurahan.
c. Integrasi sistem informasi pengelolaan sampah berbasis digital untuk memantau volume sampah secara *real-time*.

4) Dukungan Anggaran dan Pembangunan Infrastruktur TPST

Dalam rangka mempercepat transisi menuju pengelolaan sampah mandiri, Pemerintah Provinsi DIY telah mengalokasikan dukungan anggaran yang signifikan, baik melalui skema APBD reguler maupun penggunaan Dais. Hal ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur pengolahan sampah di tingkat Kabupaten/Kota siap menampung beban pasca-penutupan TPST Regional Piyungan.

Tabel 6.30. Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah (Simulasi)

Peruntukan Anggaran	Sumber Dana	Alokasi (Miliar Rp)	Status Capaian
Pembangunan TPST 3R & RDF	APBD/Dana Keistimewaan	75,5	100% Konstruksi
Pengadaan Sarana & Prasarana (Truk, Alat Pencacah)	APBD	22,3	Terdistribusi
Sosialisasi & Pemberdayaan Bank Sampah	Dana Keis	8,7	450 Kelompok
Biaya Operasional & Pemeliharaan (O&M)	APBD	15,4	Berjalan
Total Investasi Strategis		**121,9**	

5) Sebaran Pembangunan Infrastruktur Strategis

Pemerintah DIY secara aktif memfasilitasi pembangunan titik-titik pengolahan sampah baru dengan teknologi yang bervariasi:

a. Pembangunan TPST di Kabupaten Sleman (Misal: Tamanmartani & Minggir): Menggunakan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen.
b. Pembangunan TPST di Kabupaten Bantul (Misal: Dingkikan & Modalan): Difokuskan pada pengolahan sampah organik skala besar dan pemilahan anorganik untuk mendukung ekonomi sirkular.
c. Optimalisasi Pengolahan di Kota Yogyakarta: Melalui penguatan alat pengolah sampah (briket) dan penyediaan depo-depo transit yang lebih tertata untuk mengurangi tumpukan sampah di jalanan umum.

6) Catatan Penting dalam LKPJ:

Penggunaan Dais dalam sektor lingkungan hidup ini menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai keistimewaan DIY juga diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat (*Hamemayu Hayuning Bawana*)

7) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Alokasi anggaran tahun ini tidak hanya bersifat belanja modal (fisik), tetapi juga mencakup efisiensi biaya angkut. Dengan adanya pengolahan di tingkat lokal, biaya transportasi sampah (ritase) yang sebelumnya sangat tinggi menuju Piyungan dapat direduksi secara bertahap, dan dialihkan untuk penguatan operasional teknologi pengolahan sampah di masing-masing wilayah.

8) Kesimpulan

Realisasi anggaran yang mencapai 98,5% (simulasi) pada sektor persampahan ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah DIY dalam menyelesaikan isu lingkungan secara fundamental. Sinergi pendanaan antara APBD Provinsi, Dais, dan bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota telah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas wilayah selama masa transisi pengelolaan sampah..



LKPJ Gubernur DIY 2025

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

BAB VII

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

A. KERJA SAMA ANTARDAERAH

Pelaksanaan kerja sama daerah bertujuan untuk membangun jejaring yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan serta memberikan manfaat bagi daerah yang bekerja sama. Pelaksanaan kerja sama daerah di DIY berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, serta Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama. Dalam pelaksanaannya, Pemda DIY senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, serta kepastian hukum.

Pada Tahun 2025, Pemda DIY telah menerbitkan sebanyak 16 (enam belas) Naskah Kerja Sama/Nota Kesepahaman (MoU), yang terdiri atas 6 (enam) naskah sinergi dengan Pemerintah Pusat, 1 (satu) naskah kerja sama dengan pemerintah daerah lain, dan 9 (sembilan) naskah kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antardaerah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal, mendorong pengembangan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya, serta mengurangi disparitas antarwilayah.

Kerja sama daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan bersama. Sampai dengan Tahun 2025, tercatat

sebanyak 118 (seratus delapan belas) naskah kerja sama masih berstatus aktif. Selain itu, terdapat 1 (satu) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan yang diterbitkan pada Tahun 2016 dan masih digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian kerja sama dan rencana kerja. Jumlah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan terbanyak yang masih aktif tercatat pada Tahun 2024, yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen. Data jumlah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Tahun 2016–2025 yang masih berlaku disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1. Data Jumlah Naskah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Yang Masih Berlaku 2016-2025

No.	Jenis	Tahun	Jumlah
1	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2016	1
2	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2017	2
3	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2019	3
4	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2020	8
5	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2021	18
6	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2022	15
7	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2023	17
8	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2024	38
9	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2025	16
JUMLAH			**118**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

1. Kerja Sama Antardaerah

Kerja Sama Antardaerah yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY pada Tahun 2025 meliputi 1 (satu) Kesepakatan Bersama dan 11 (sebelas) Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama dimaksud dilaksanakan antara Gubernur DIY dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

Tabel 7.2. Daftar Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2025

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemda DIY tentang Pembangunan Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	100.3.7.1/05/KSB-A/TAPEM.OTDA/2025 dan B/100.3.7.1/1194/BR.1	26 Mei 2025	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

Tabel 7.3. Daftar Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2025

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB	B/100.3.7.1/31/SET; 01/PRJ.KP/HKM/2025; 02/PK/Bt/2025; 01/PKS/KSDD/WAJIB/2024; 02/PK.KDH/C/2025; 4/PKS.YK/TMT.01/JAN/2025	03 Januari 2025	5 tahun
2	Adendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/539 Dan 120.13/005/2024 Tentang Pengelolaan Batas Daerah Antara DIY Dengan Provinsi Jawa Tengah	B/100.3.7.1/929/SET dan 100.3.7.1/008/2025	24 Februari 2025	4 tahun
3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat	B/00.4.7.2/1716/D20; 2/PKS.YK/WDS.05/MAR/2025; 23/PK/Bt/2025; 11/PRJ.KP/HKM/2025; 08/PK/KSDD/WAJIB/2025; 58/PK.KDH/D/2025	18 Maret 2025	5 tahun
4	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul,	B/100.3.7.1/929/BR.1; 30/PK/Bt/2025;	21 April 2025	5 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
	Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat Skala Regional	61/PK.KDH/A/2025; 3/PKS.YK/WND.11/APR/2025		
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Kompensasi Dampak Negatif Pasca Penutupan TPA Regional Piyungan	B/100.3.7.1/1265/BR.1; 34/PK/Bt/2025; 72/PK.KDH/A/2025; 2/PKS.YK/WND.11/JUN/2025	05 Juni 2025	5 tahun
6	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular di Wilayah DIY Dan Provinsi Jawa Tengah	B/400.7.9.1/1849/D13 dan 400.7.8/14864/2025	07 Agustus 2025	5 tahun
7	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemda DIY tentang Pembangunan, Penempatan, Dan Pengembangan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah	500.18.4/2764/Bid.PKTP3 dan T/500.18/10587/D7	09 September 2025	5 tahun
8	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan, Dan Pengembangan Transmigrasi di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat	000.472/18.IX/2025 dan T/500.18/10589/D7	09 September 2025	5 tahun
9	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pemajuan Kebudayaan	B/400.6/34932/D17 dan 3390/KB.05.03	24 September 2025	2 tahun
10	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Pendidikan Menengah Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul	65/PK/Bt/2025 dan B/500.13/34637/D14	10 November 2025	5 tahun
11	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan	T/100.3.7.1/2680/BR.1; 72/PK/Bt/2025;	28 November 2025	5 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
	Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Penyiapan Pembangunan Dan Operasional Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kawasan Yogyakarta Raya	176/PK.KDH/A/2025; 3/PKS.YK/WND.11/NOP/2025		

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, Pemda DIY telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah lain, yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2025, kerja sama antardaerah tersebut dilaksanakan dalam berbagai bidang, meliputi statistik, pertanahan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), lingkungan hidup, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, serta transmigrasi.

Sejalan dengan upaya penguatan kerja sama antardaerah tersebut, Pemda DIY juga berperan aktif dalam forum Mitra Praja Utama (MPU). Pada tahun 2025, Pemda DIY mengikuti Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Daerah (FKD) Mitra Praja Utama ke-XXV yang diselenggarakan pada tanggal 16–17 Juni 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kolaborasi antara 10 provinsi di wilayah barat–tengah Indonesia. Dalam rapat kerja tersebut, dibahas enam prioritas kerja sama, yaitu 6 (enam) sebagai berikut :

1) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3) Optimalisasi Pariwisata Prioritas;
4) Ketahanan Pangan;

5) Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; dan
6) Sinergitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Oktober 2025 bertempat di Provinsi Bali. Kegiatan tersebut merupakan forum koordinasi antarprovinsi anggota FKD-MPU yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kesinambungan pelaksanaan kerja sama daerah dalam mendukung pembangunan lintas wilayah.

Agenda utama Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU Tahun 2025 meliputi penandatanganan Kesepakatan Bersama antargubernur serta pemasangan totem MPU sebagai simbol komitmen kerja sama antardaerah. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi lintas provinsi dalam penanganan permasalahan strategis yang melampaui batas administrasi daerah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan keamanan, guna mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan rapat gabungan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan program dan kegiatan kerja sama antarprovinsi agar lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan, sekaligus merumuskan rencana aksi bersama untuk periode Tahun 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam berbagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) FKD-MPU. Pelaksanaan rapat gabungan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan program dan kegiatan kerja sama antarprovinsi agar lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan, sekaligus untuk merumuskan rencana aksi bersama periode Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam berbagai PKS FKD-MPU.

Agenda rapat gabungan difokuskan pada pembahasan dan pendalaman substansi rencana aksi kerja sama FKD-MPU, yang meliputi bidang ketahanan pangan, penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), pengembangan pariwisata, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil pembahasan rapat untuk setiap bidang adalah sebagai berikut :

1) Bidang Ketahanan Pangan

Dalam bidang ketahanan pangan, disepakati perlunya penguatan kerja sama lintas provinsi guna menjaga stabilitas pasokan, ketersediaan, dan harga komoditas pangan strategis. Kesepakatan tersebut meliputi pengembangan sistem informasi ketahanan pangan terintegrasi antarprovinsi, pelaksanaan operasi pasar secara terkoordinasi, serta promosi bersama produk dan olahan pangan unggulan daerah. Selain itu, rapat mendorong pembentukan dan penguatan BUMD Pangan sebagai instrumen pendukung ketahanan pangan regional. Seluruh kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Rencana Aksi Ketahanan Pangan FKD-MPU tanggal 20 Oktober 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

2) Bidang Penanggulangan Bencana

Pada bidang penanggulangan bencana, disepakati penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan antarprovinsi. Kesepakatan tersebut meliputi penyusunan rencana kontinjensi bersama, penguatan mekanisme berbagi data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi, serta pelaksanaan latihan bersama penanggulangan bencana lintas provinsi. Selain itu, disepakati mekanisme dukungan bantuan logistik, relawan, serta sarana dan prasarana tanggap darurat sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak.

3) **Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas)**

Rencana aksi pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mencakup kegiatan penegakan peraturan daerah, pengawasan peredaran makanan, minuman, dan obat-obatan ilegal, penanganan isu lingkungan hidup, serta penguatan koordinasi dan kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja lintas provinsi. Pelaksanaan rencana aksi ini diharapkan dapat mewujudkan kondisi ketertiban umum yang kondusif dan meningkatkan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

4) **Bidang Pariwisata**

Dalam bidang pariwisata, rapat gabungan FKD-MPU menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan dialog kebijakan lintas daerah guna mendorong pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kesepakatan meliputi pelaksanaan forum diskusi lintas perangkat daerah, identifikasi isu strategis pengembangan pariwisata antarprovinsi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan terpadu. Hasil pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian terkait sebagai bahan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

5) **Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pada bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, rapat menyepakati pelaksanaan program peningkatan kompetensi aparatur dan pelaku usaha pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Program tersebut meliputi pelatihan teknis, studi tiru antarprovinsi, evaluasi dan penyusunan kurikulum peningkatan kapasitas, serta pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM yang melibatkan seluruh provinsi anggota FKD-MPU. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung keberhasilan kerja sama daerah.

Selain MPU, pada tahun 2025, Pemda DIY turut berpartisipasi dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), salah satunya melalui penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025 di Jakarta. Pemda DIY diwakili oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X. Munas VII APPSI mengusung tema *"Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif"* dan menjadi forum strategis bagi pemerintah provinsi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan berintegritas.

Selanjutnya, pada bulan November 2025 dilaksanakan Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Masa Bakti 2025–2029 yang bertempat di Gedung Kemenko 1 Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dikukuhkan sebagai Ketua Umum APPSI Periode 2025–2029. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk legitimasi dan penguatan peran APPSI dalam mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ke depan, APPSI akan memfokuskan program kerja pada pembahasan isu-isu strategis melalui diskusi tematik lintas sektor, antara lain sektor perikanan, pertambangan, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada isu efisiensi fiskal, penguatan ekonomi daerah, serta percepatan transformasi digital sebagai upaya peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025, Pemda DIY telah melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta yang dituangkan dalam 9 (sembilan) Kesepakatan Bersama dan 12 (dua belas) Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.4. Daftar Kesepakatan Bersama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2025

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Yayasan World Wildlife Fund Indonesia tentang Kolaborasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di DIY	B/100.3.7.1/572/BR.1 dan 355/WWF-ID/LGL-MOU/III/FY25/2025	05 Maret 2025	5 tahun
2	Kesepakatan Bersama antara Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Ekonomi Inklusif di DIY	001/MOU/SEK/BPD-DIY/V/2025 dan B/100.3.7.1/1182/BR.1	22 Mei 2025	5 tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas PGRI Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	B/100.3.7.1/1388/BR.1 dan A.108/MoU/KUI-UPY/VI/2025	24 Juni 2025	5 tahun
4	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Akademi Seni Rupa dan Desain MSD Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	B/100.3.7.1/1424/BR.1 dan 041-001/ASRD/AK/V/2025	30 Juni 2025	5 tahun
5	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Universitas Telkom tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	T/100.3.7.1/1438/BR.1 dan 140/SAM3/KST/2025	30 Juni 2025	5 tahun
6	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	B/100.3.7.1/1512/BR.1 dan 016/STSRDVISI.E6/VII/ 2025	07 Juli 2025	5 tahun
7	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Yayasan Plan International Indonesia tentang Kerja Sama Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Kebencanaan di DIY	T/100.3.7.1/1972/BR.1 dan 007/Partnership/FY26/YPII/CO/VII/2025	27 Agustus 2025	5 tahun
8	Kesepakatan Bersama antara PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pengembangan Dan Pemberdayaan Potensi Sumber Daya DIY	MOU.YIA.GMY.5/HK.04/2025 dan T/100.3.7.1/2320/BR.1	21 Oktober 2025	5 tahun
9	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta tentang Kerja Sama	114/STIE YKPN/KETUA/XI/2025 dan	27 November 2025	5 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	T/100.3.7.1/2662/BR.1		

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

Pada tahun 2025 Pemda DIY telah menerbitkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 12 (dua belas) naskah kerja sama dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.5. Daftar Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2025

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT. Wana Subur Lestari tentang Kegiatan Restorasi Kawasan Hutan di DIY	B/00.4.7.2/305/D5 dan SPN.0004/WSL-DIRUT/Legal-X/2024	13 Januari 2025	3 tahun
2	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Yayasan ICLEI – Local Governments For Sustainability Indonesia tentang Pengembangan Program Pengendalian Perubahan Iklim di DIY	B/100.3.7/0151/D8/M dan 16/PKS/ ICLEI-IO/I/2025	15 Januari 2025	3 tahun
3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Yayasan ICLEI – Local Governments For Sustainability Indonesia tentang Pengembangan Program Pengendalian Perubahan Iklim di DIY	B/500.11.24/205/D9 dan 17/PKS/ ICLEI-IO/I/2025	15 Januari 2025	3 tahun
4	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Akademi Seni Rupa Dan Desain MSD Yogyakarta tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di DIY	B/400.14.4.7/5305/D1 dan 042-001/ASRD/Ak/V/2025	09 Mei 2025	5 tahun
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di DIY	B/400.14.4.7/5305/D1 dan 024.i/STSRD.VISI.E9/VIII/2025	09 Agustus 2025	5 tahun
6	Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 119/04212/2023 dan Nomor UGM/PKS/049/2023 tentang Layanan Jasa Perbankan Dalam Mendukung	500.3/6511/D2 dan UGM/PKS/049/2023	15 Agustus 2025	3 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Digitalisasi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah			
7	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Pengembangan Dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All di DIY	B/00.4.7.2/7651/D15 dan 116/PKS/ Perp-UAJY/9/2025	11 September 2025	5 tahun
8	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Univeritas Respati Yogyakarta tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di DIY	B/100.3.7.1/2587/B5 dan 2534/ FIKES/DN/IX/2025	15 September 2025	5 tahun
9	Perjanjian Kerja Sama antara PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Peningkatan Layanan Informasi Pariwisata Dan Kegiatan Kesenian di Bandar Udara Internasional Yogyakarta	PJJ.YIA.GMY.155/HK.04/2025 dan B/500.13/7633/D1	14 November 2025	2 tahun
10	Perjanjian Kerja Sama antara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemda DIY tentang Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat	0954A/KHP/PHG/PK/ Jumadilawal.XI/DAL-1959.2025 dan B/500.6/21730/D4	21 November 2025	5 tahun
11	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat di DIY	B/400.3.8.10/10077/D2 dan 021/STIE IEU/ MoA/XII/2025	11 Desember 2025	5 tahun
12	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengkajian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di DIY	B/100.3.7/1509/D12 dan 115/ STIE YKPN/XII/2025	15 Desember 2025	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

Adapun bidang yang dikerjasamakan yaitu:

1) Pendidikan;
2) Pembangunan Daerah;
3) Komunikasi dan Informatika;
4) Koperasi dan UMKM;
5) Lingkungan Hidup;
6) Kehutanan;
7) Pariwisata; dan
8) Pertanian.

3. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Pada Tahun 2025, Pemda DIY telah melaksanakan sinergi dengan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam 6 (enam) Nota Kesepakatan. Sinergi tersebut mencakup 8 (delapan) bidang, yaitu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), pangan, sosial, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6. Sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2025

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
1	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	B/100.3.7.1/523/BR.1 dan NK/11/II/KA/HK/2025/BNNP Tanggal 28 Februari 2025	5 tahun
2	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Universitas Andalas tentang Sinergi Pengembangan Sumber Daya di DIY Melalui Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	B/100.3.7.1/626/BR.1 dan B/32/UN16.R/HK.10.00/2025 Tanggal 10 Maret 2025	5 tahun
3	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi DIY tentang Penyelesaian Masalah Hukum Perdata, Tata Usaha Negara, Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan	T/100.3.7.1/2012/BR.1 dan B-12/M.4/Gs/09/2025 Tanggal 01 September 2025	5 tahun

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
	Keadilan Restoratif, Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Sinergi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan di DIY	T/100.3.7.1/2795/BR.1 dan 22/KPPU/NK/XII/2025 Tanggal 15 Desember 2025	5 tahun
5	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Pemenuhan Gizi Nasional di Wilayah DIY	T/100.3.7.1/2834/BR.1 dan 52/NK.01/12/2025 Tanggal 18 Desember 2025	5 tahun
6	Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Tinggi DIY dengan Pemda DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Sinergi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana	B-7137/M.4/12/2025; T/100.3.7.1/2841/BR.1; 4/NK.YK/TMT.13/DES/2025; 07/NK/Bt/2025; 10/NK.KP/2025; 29/NK/SINERGI/LPNK/2025 dan 180/PK.KDH/A/2025 Tanggal 18 Desember 2025	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

Adapun tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah disepakati telah diterbitkan naskah rencana kerja sebanyak 17 (tujuh belas) naskah yang meliputi bidang koperasi &UKM, pendidikan, sosial, trantibumlinmas, tenaga kerja, pekerjaan umum & penataan ruang, komunikasi & informatika, kelautan & perikanan, dan kesehatan. Sedangkan Pihak yang melakukan kerja sama sebagai berikut :

1) Badan Standardisasi Nasional;
2) Universitas Sebelas Maret;
3) Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY;
4) Kepolisian Daerah DIY;
5) BPJS Ketenagakerjaan;
6) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
8) Universitas Gadjah Mada; dan
9) Universitas Negeri Yogyakarta.

Berikut daftar rencana kerja sebagai tindak lanjut sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.7. Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2025

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Rencana Kerja antara Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional dengan Pemda DIY tentang Layanan Terpadu Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah DIY	005/BSN/PKS/III/2025 dan B/500.3/2511/D2	26 Maret 2025	5 tahun
2	Rencana Kerja antara Pemda DIY dan Universitas Sebelas Maret tentang Sinergi Pengembangan Sumber Daya Bidang Kehutanan Melalui Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi	B/500.4/3833/D5 dan 479/UN.27/HK.07/ HK 07.00/2025	02 Mei 2025	5 tahun
3	Rencana Kerja antara Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dengan Pemda DIY tentang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Wilayah DIY	PKS/045/VI/KA/ HK/2025/BNNP dan B/100.3.7.1/3445/D20	12 Juni 2025	5 tahun
4	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah DIY dan Pemda DIY tentang Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa di Luar Tindak Pidana Ringan	I/VII/2025 dan B/00.4.7.2/4025/D20	07 Juli 2025	5 tahun
5	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Sektor Kepariwisataan di DIY	B/500.15/4563/D1 dan PER/82/072025	15 Juli 2025	5 tahun
6	Rencana Kerja antara Pemda DIY dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Penyediaan Data dan Informasi Tematik Bidang Tanah untuk Mewujudkan Tertib Pertanahan dan Tata Ruang di DIY	B/500.17./9294/D10 dan 3/SKB-34.IP.03/VII/2025; 002/SKB-1001.51.HM.01/VII/2025	17 Juli 2025	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
7	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Penanggulangan Bencana di DIY	B/100.3.7.1/2049/B5 dan B-3280/Un.02/DSH/ HK/HK.07/07/2025	29 Juli 2025	5 tahun
8	Rencana Kerja antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Sumber Daya	B-1628/UN.02/DA/ KS.00.1/09/2025 dan B/00.1.4.1/2209/D13	10 September 2025	4 tahun
9	Rencana Kerja antara Pemda DIY dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada tentang Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	B/00.4.7.2/20/D6 dan 2602/UN1/ FKH/TU/HK4/2025	15 September 2025	5 tahun
10	Rencana Kerja antara Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dan Pemda DIY tentang Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	4864/UN1/FBI/KSA/ HK.08.00/2025 dan B/00.4.7.2/21/D6	18 September 2025	5 tahun
11	Rencana Kerja antara Pemda DIY dan Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Bagi Peserta Program Tugas Belajar/Izin Belajar Pemda DIY	B/800.1.4.1/4612/B3 dan 4477/UN1/DITMAWA /KM/KM/2025	15 Oktober 2025	5 tahun
12	Rencana Kerja antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pemda DIY tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan di DIY	KS.01.01.10A.10.25.04 dan B/500.3/8669/D2	28 Oktober 2025	5 tahun
13	Rencana Kerja antara Pemda DIY dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	T/100.3.7.1/2604/BR.1 dan B/906/UN34.14/ HK.01.01/2025	21 November 2025	3 tahun
14	Rencana Kerja antara Universitas Negeri Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Dharma	B/876.2/UN34.13/ HK.01.01/2025 dan B/00.4.7.2/25/D6	09 Desember 2025	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			
15	Rencana Kerja antara Universitas Negeri Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi	T/282.1/UN34.18/ HK.01.01/2025 dan B/400.3.8.12/3994/D3	10 Desember 2025	5 tahun
16	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah DIY dengan Pemda DIY tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas, Fungsi di Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RK/2/XII/2025 dan B/500.13/8156/D1	10 Desember 2025	3 tahun
17	Rencana Kerja antara Universitas Negeri Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi	T/250.1/UN34.18/ HK.01.01/2025 dan T/400.3.15/11341/D8/M	22 Desember 2025	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

4. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah antara lain masih terdapat ketidakseimbangan komitmen antara perangkat daerah dengan mitra kerja, dimana sebagian pihak menunjukkan tingkat partisipasi yang aktif, sementara sebagian lainnya masih pasif.
b. Masih terbatasnya pemahaman perangkat daerah baik di tingkat Pemda DIY maupun kabupaten/kota terhadap ketentuan dan tata cara pelaksanaan kerja sama, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan dokumentasi naskah kerja sama yang belum terintegrasi.
c. Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata dalam mendukung pelaksanaan kerja sama daerah

2) Solusi

a. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, Pemda DIY melakukan peningkatan kuantitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah.

b. Pemerintah daerah mendorong penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada perangkat daerah di tingkat DIY dan kabupaten/kota.
c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkala guna mendukung efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama daerah.

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

DIY dikenal sebagai daerah dengan tingkat keberagaman masyarakat yang tinggi. Perannya sebagai kota pelajar, kota budaya, kota wisata, dan kota seniman menjadikan DIY sebagai tujuan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, suku, dan agama, baik untuk berkunjung maupun menetap. Keberagaman tersebut membentuk karakter sosial DIY yang terbuka, toleran, dan dinamis, sekaligus menuntut pengelolaan yang berkelanjutan agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan kondusif. Stabilitas sosial dan keamanan yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga citra DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata.

Sepanjang Tahun 2025, dinamika sosial di DIY ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Sejumlah aksi penyampaian pendapat di muka umum mengangkat isu-isu kebijakan publik, antara lain penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR/DPRD, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, serta aspirasi terkait kesejahteraan masyarakat. Aksi-aksi tersebut umumnya dilaksanakan di kawasan strategis pemerintahan dan ruang publik, sehingga pada waktu tertentu berdampak pada kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

Pada umumnya, pelaksanaan aksi demonstrasi berlangsung secara tertib dan damai. Namun demikian, dinamika massa, intensitas penyampaian aspirasi, serta cepatnya arus informasi melalui media sosial berpotensi memicu eskalasi apabila tidak dikelola secara tepat. Kondisi tersebut menuntut peran aktif pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat tetap terlindungi, sekaligus menjaga ketertiban umum dan rasa aman masyarakat.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Pemda DIY bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepanjang Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai langkah penanganan secara terkoordinasi. Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan dan deteksi dini terhadap rencana aksi, penguatan koordinasi lintas instansi, penyiapan pola pengamanan terpadu, pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi aksi, serta pendekatan dialogis dan persuasif kepada perwakilan massa aksi. Selain itu, komunikasi publik juga diperkuat untuk memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang dan mencegah penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aksi penyampaian pendapat di muka umum di DIY sepanjang Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara relatif kondusif berkat sinergi dan soliditas antarunsur Forkopimda. Meski demikian, dinamika sosial yang terus berkembang menuntut adanya evaluasi dan penguatan koordinasi secara berkelanjutan agar stabilitas wilayah tetap terjaga.

Berangkat dari kondisi tersebut, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kondusivitas wilayah DIY, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum ini dilaksanakan sebagai amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di DIY.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda DIY dibiayai dengan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 *c.q.* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Nomor: DPPA/A.4/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 11 November 2025 pada program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2. Tim Terpadu / Kelompok Kerja

DIY kerap diposisikan sebagai miniatur Indonesia karena tingkat kemajemukan masyarakatnya yang tinggi. Keberagaman etnik, suku, budaya, agama, dan bahasa merupakan realitas sosial yang secara nyata mewarnai kehidupan bermasyarakat di DIY. Kondisi tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai ruang perjumpaan berbagai identitas dan kepentingan sosial yang berinteraksi secara intensif, sekaligus membentuk karakter masyarakat yang terbuka dan dinamis.

Dalam perspektif akademis, kemajemukan merupakan modal sosial yang penting bagi penguatan kohesi sosial dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Interaksi lintas identitas berpotensi melahirkan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, serta kerja sama sosial yang konstruktif. Namun demikian, perbedaan latar belakang dan sistem nilai juga berpotensi kerawanan apabila tidak dikelola secara tepat. Perbedaan orientasi dan praktik keagamaan, termasuk dinamika antara kelompok yang bersifat puritan dan kelompok yang lebih sinkretis, pada situasi tertentu dapat mempertegas batas-batas sosial dan memicu ketegangan di ruang publik. Apabila ketegangan tersebut tidak diantisipasi sejak dini, maka risiko terjadinya konflik sosial dan fragmentasi masyarakat menjadi semakin besar.

Pengelolaan kemajemukan dalam masyarakat majemuk seperti DIY menuntut pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Secara teoritis, stabilitas sosial hanya dapat terjaga apabila terdapat mekanisme deteksi dini, ruang dialog yang inklusif, serta sistem koordinasi yang efektif antarpemangku kepentingan. Pendekatan preventif dan kolaboratif menjadi krusial untuk mencegah eskalasi

konflik, sekaligus memastikan bahwa perbedaan dapat dikelola sebagai kekuatan sosial, bukan sebagai sumber perpecahan.

Dalam konteks tersebut, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membentuk dan mengoptimalkan Kelompok/Tim Kerja sebagai instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Kelompok/Tim Kerja ini berperan dalam memfasilitasi komunikasi antaraktor, melakukan pemantauan dan analisis potensi kerawanan sosial, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara terpadu. Secara konseptual, keberadaan Kelompok/Tim Kerja ini merupakan wujud penerapan prinsip manajemen konflik dan penguatan ketahanan sosial daerah, yang menempatkan stabilitas, toleransi, dan kohesi sosial sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di DIY. Pembentukan Kelompok Kerja/Tim Terpadu untuk dapat mengoptimalisasi koordinasi lintas sektor di wilayah DIY. Beberapa Kelompok/Tim Kerja antara lain sebagai berikut.

1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS)
2) Tim Terpadu Penanganan Orang Asing (POA)
3) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
4) Kelompok Kerja Ketahanan Ekonomi
5) Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
6) Kelompok Kerja Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik
7) Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
9) Tim Pemantauan Dan Pengolah Data/Informasi Strategis

3. Permasalahan dan Solusi

1) Forkopimda

a. Permasalahan

Peningkatan frekuensi aksi penyampaian pendapat di muka umum dan dinamika isu kebijakan strategis memerlukan

pengambilan keputusan lintas sektor secara cepat dan terkoordinasi. Kondisi ini menuntut kesamaan persepsi dan respons terpadu antarunsur Forkopimda agar stabilitas wilayah tetap terjaga.

b. Solusi

Pemda DIY bersama unsur Forkopimda meningkatkan intensitas rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi, merumuskan kebijakan strategis, dan menentukan langkah terpadu dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan wilayah.

2) Kelompok/Tim Kerja

a. Permasalahan

Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja/Tim Kerja/Tim Terpadu melibatkan banyak instansi teknis dengan tugas dan kewenangan yang berbeda, sehingga memerlukan mekanisme koordinasi operasional yang lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Solusi

Mengoordinasikan pelaksanaan rapat teknis, forum lintas sektor guna memastikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja/Tim Kerja/Tim Terpadu berjalan efektif dan selaras.

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

1. Gambaran Umum

DIY secara geografis berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, utara, dan timur, serta berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Penegasan batas wilayah menjadi elemen penting dalam menentukan ruang administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan kawasan. Batas daerah antara DIY dan Provinsi Jawa Tengah telah

diatur secara formal melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang garis batas kedua provinsi, yang dipetakan dalam peta batas wilayah berskala 1:100.000. Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antarkabupaten/kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan skala lampiran peta yang berbeda-beda yaitu 1:40.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:18.000. Namun, seiring perkembangan waktu, skala peta tersebut dinilai kurang detail untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi dan pendetailan garis batas guna menghindari potensi sengketa wilayah maupun hambatan lain dalam pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan, penataan ruang, pembangunan, dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Sebagai langkah untuk mendukung kebijakan nasional melalui program Satu Peta Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Pemda DIY secara aktif telah melakukan sinkronisasi dan pendetailan garis batas daerah luar dengan Provinsi Jawa Tengah maupun batas antarkabupaten/kota di DIY. Dengan topografi yang beragam, meliputi kawasan dataran rendah, sungai hingga pegunungan, serta garis pantai yang luas, perbatasan daerah DIY memiliki karakteristik yang kompleks. Oleh karena itu, proses sinkronisasi dan pendetailan penarikan garis batas daerah dilakukan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan serta mempertimbangkan keterpenuhan ketentuan teknis dan yuridis.

Tabel 7.8. Capaian Pendetailan Garis Batas Daerah DIY – Jateng Tahun 2025

No	Segmen Batas		Keterangan
	DIY	Jateng	
1.	Kab. Kulon Progo	Kab. Purworejo	Tahapan pengesahan revisi Permendagri
2.	Kab. Sleman	Kab. Klaten	Tahapan pengesahan revisi Permendagri
3.	Kab. Gunungkidul	Kab. Klaten	Tahapan pengesahan revisi Permendagri

No	Segmen Batas		Keterangan
	DIY	Jateng	
4.	Kab. Gunungkidul	Kab. Sukoharjo	Pembahasan di Kemendagri untuk 1 lokasi yang belum disepakati
5.	Kab. Gunungkidul	Kab. Wonogiri	Tahapan pengesahan revisi Permendagri
6.	Kab. Kulon Progo	Kab. Magelang	Masih terdapat 3 lokasi yang belum disepakati
7.	Kab. Sleman	Kab. Magelang	Masih terdapat 12 lokasi yang belum disepakati

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2026

2. Program Kegiatan

Pada tahun 2025 Urusan Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan melalui 2 (dua) Program Kegiatan, yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah menghasilkan keluaran berupa Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan keluaran berupa Laporan Pembinaan serta Pengawasan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan/Kapanewon/Kemantren, dan Laporan Sinkronisasi Batas Daerah DIY.

1) Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2025 telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY Tahun 2026–2027 adalah sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam

pengoordinasian dan penyelarasan kegiatan pembangunan wilayah perbatasan di DIY. Secara khusus tujuan dari penyusunan dokumen rencana aksi sebagai berikut:

a. Menyamakan pemahaman dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah perbatasan di DIY;
b. Membaurkan dan/atau menggabungkan program kerja dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan; dan
c. Mengoptimalkan kinerja Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY.

2) Pembinaan dan Pengawasan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan;

Penegasan batas Kalurahan/Kelurahan menjadi salah satu kegiatan strategis untuk memastikan terciptanya administrasi yang tertib dan akurat. Melalui penegasan batas Kalurahan/Kelurahan yang jelas, diharapkan tidak hanya tercipta kepastian hukum, tetapi juga dapat menghindari terjadinya sengketa wilayah antarKalurahan/Kelurahan yang dapat menghambat pembangunan dan berdampak pada stabilitas sosial di masyarakat.

Penegasan batas Kalurahan/Kelurahan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian, termasuk penelitian dokumen administratif, verifikasi lapangan, serta pertemuan antara pihak-pihak yang memiliki wilayah berbatasan. Kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak terkait dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap batas wilayah yang disepakati dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut capaian sampai tahun 2025:

Tabel 7.9. Penegasan batas Kalurahan/Kelurahan Tahun 2025

Kab/ Kota	Jumlah Kal/Kel	Selesai Penegasan	Proses Verifikasi Teknis	Lolos Verifikasi Teknis	Proses Verifikasi Yuridis	Lolos Verifikasi Yuridis	Perkada
Kulon Progo	88	34	0	34	0	33	23
Bantul	75	32	0	32	0	32	10
Gunungkidul	144	80	0	80	26	54	0
Sleman	86	86	17	61	0	61	61
Kota Yogyakarta	45	45	0	27	-	-	27
Total	**438**	**277**	**17**	**234**	**26**	**180**	**121**

3) Laporan Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY

Batas daerah merupakan kumpulan titik koordinat geografis berdasarkan sistem georeferensi nasional yang membentuk garis batas wilayah administrasi antardaerah. Penegasan batas dilakukan dengan menentukan titik-titik koordinat melalui metode kartometrik atau survei lapangan, yang kemudian dituangkan dalam peta batas beserta daftar koordinatnya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, proses ini melibatkan Tim Penegasan Batas Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penegasan batas daerah penting untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pada tahun 2025, Biro Tata Pemerintahan melakukan sinkronisasi dan pendetailan garis batas DIY - Jawa Tengah pada segmen batas daerah Kabupaten Sleman - Kabupaten Magelang dan segmen batas daerah Kabupaten Bantul – Kota Yogyakarta.

a. Pada segmen batas Kabupaten Sleman - Kabupaten Magelang, proses sinkronisasi dan pendetailan yang sudah dilaksanakan masih menyisakan 12 (dua belas) area yang belum disepakati, yakni area yang berada di sekitar aliran Sungai Krasak.

b. Sedangkan pada segmen batas Kabupaten Bantul - Kota Yogyakarta masih menyisakan 28 (dua puluh delapan) area yang sebagian besar berkaitan dengan ruas jalan.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam rangka sinkronisasi dan pendetailan garis batas daerah adalah sebagai berikut:

- Perbedaan Dasar Penarikan Batas

  Daerah yang berbatasan sering menggunakan dasar penarikan batas yang berbeda, seperti peta lama, dokumen hukum, atau kondisi eksisting. Perbedaan acuan ini menimbulkan banyak area sengketa karena perubahan penampang geografis dari waktu ke waktu.

- Kualitas dan Ketersediaan Data yang Terbatas

  Data geospasial, peta historis, dan dokumen legal sering tidak lengkap atau berbeda tingkat akurasinya. Kondisi ini menyulitkan proses sinkronisasi dan pembuktian teknis.

- Kendala Komunikasi AntarAktor

  Penegasan batas daerah sering terhambat oleh belum terbangunnya komunikasi yang efektif antaraktor kunci TPBD masing-masing daerah. Perbedaan persepsi, kepentingan, dan pendekatan penyelesaian yang tidak dinegosiasikan secara terbuka menyebabkan proses menjadi lambat dan berlarut-larut.

- Kepentingan Politik dan Administratif

  Penegasan batas sering berkaitan dengan kepentingan fiskal, aset, dan kewenangan pelayanan publik. Kepentingan tersebut memengaruhi sikap daerah dalam mempertahankan klaim wilayahnya.

- Konflik Penguasaan dan Status Tanah

  di wilayah sengketa sering terdapat tanah yang telah dikuasai atau dimanfaatkan masyarakat tanpa dokumen kepemilikan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan resistensi sosial saat batas ditetapkan.

- Proses yang Berlarut-larut dan Status Quo

  Tidak adanya tenggat waktu yang tegas dan komitmen bersama menyebabkan pembahasan berulang tanpa keputusan. Akibatnya, kondisi batas wilayah dibiarkan tidak pasti dalam jangka panjang.

- Kegamangan Aktor Kunci dalam Pengambilan Keputusan

  Aktor kunci sering ragu mengambil keputusan karena khawatir terhadap implikasi hukum, politik, dan sosial dari penetapan batas. Keraguan ini mendorong sikap menunda atau membiarkan tanpa penyelesaian, sehingga proses penegasan batas tidak kunjung mencapai kepastian.

2) Solusi

Beberapa hal yang diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan:

a. Standarisasi penarikan batas perlu dilakukan dengan menyepakati hierarki acuan hukum dan teknis yang direkonstruksi menggunakan data geospasial terkini dan bukti historis terverifikasi.
b. Keterbatasan data diatasi melalui integrasi multi-sumber geospasial yang divalidasi bersama serta pemanfaatan teknologi pemetaan modern
c. Melakukan pendekatan informal yang kerap kali lebih efektif karena mampu membuka ruang dialog yang lebih cair, fleksibel, dan adaptif, sehingga sering menjadi prasyarat lahirnya kesepakatan formal dalam penegasan batas daerah.

d. Pengaruh kepentingan politik diminimalkan dengan memisahkan proses teknis dari kepentingan politik serta menerapkan skema penyelesaian yang saling menguntungkan antardaerah.
e. Memisahkan penetapan garis batas wilayah dari penyelesaian kepemilikan atas tanah dan melibatkan pihak-pihak terdampak dalam konsultasi serta mekanisme legalisasi bertahap.
f. Proses yang berkepanjangan diakhiri dengan penetapan tenggat waktu yang tegas dan mekanisme keputusan final oleh otoritas yang berwenang.
g. Keraguan pengambil keputusan diatasi melalui penguatan perlindungan hukum, dukungan kelembagaan, dan pengambilan keputusan kolektif dalam kerangka Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD).

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Gambaran Umum

Penanggulangan bencana merupakan rangkaian tindakan terencana yang bertujuan untuk menekan tingkat risiko bencana, menangani kondisi darurat, serta memulihkan keadaan masyarakat setelah terjadinya bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana menuntut adanya koordinasi yang terpadu antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Secara konseptual, penanggulangan bencana adalah proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang dikembangkan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen klasik, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Proses ini melibatkan beragam organisasi yang bekerja sama dalam tiga tahap utama penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pascabencana.

Adapun komponen utama dalam penanggulangan bencana mencakup sistem peringatan dini yang memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat, seperti sirene tsunami, aplikasi peringatan bencana, serta sensor kegempaan. Selain itu, aspek kelembagaan menjadi elemen penting melalui peran lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Partisipasi masyarakat juga memiliki peran strategis, khususnya dalam kegiatan mitigasi dan respons darurat, antara lain melalui pengembangan desa tangguh bencana. Komponen lainnya adalah pendidikan dan pelatihan kebencanaan, yang dilaksanakan melalui kurikulum sekolah, kampanye peningkatan kesadaran, serta pelatihan mitigasi bagi masyarakat.

Penanggulangan bencana yang berjalan secara efektif memerlukan sinergi, koordinasi, dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait. Upaya ini diarahkan untuk melindungi keselamatan jiwa, mengurangi kerugian material, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Potensi Bencana

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Tahun 2023–2027, DIY telah mengidentifikasi sebanyak 14 (empat belas) jenis potensi bencana yang ditetapkan melalui kajian atas riwayat kejadian bencana di wilayah tersebut. Jenis potensi bencana dimaksud meliputi banjir, banjir bandang, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kekeringan, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, likuefaksi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, serta konflik sosial.

1) Banjir

Potensi terjadinya bencana banjir masih ditemukan di beberapa wilayah, khususnya pada periode musim hujan dengan intensitas

curah hujan yang tinggi. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kejadian banjir di wilayah DIY, dengan jumlah kejadian tertinggi terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu sebanyak 9 kejadian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terjadinya cuaca ekstrem di wilayah Kabupaten Sleman yang menyebabkan peningkatan curah hujan secara signifikan, sehingga memicu terjadinya banjir di sejumlah lokasi.

2) Epidemi dan Wabah Penyakit

Epidemi dan wabah penyakit merupakan kondisi terjadinya penyebaran penyakit menular secara cepat yang menyerang sejumlah besar penduduk dalam wilayah tertentu. Apabila penyebaran penyakit tersebut meluas hingga melampaui batas negara atau benua, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai pandemi. Salah satu contoh pandemi yang pernah terjadi secara global adalah wabah Covid-19. Berdasarkan data tahun 2025, tidak tercatat adanya kejadian bencana epidemi maupun wabah penyakit di wilayah DIY.

3) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pada tahun 2007 tercatat pernah terjadi bencana gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah Kabupaten Bantul yang mengakibatkan kerusakan ringan pada sebanyak 59 unit rumah. Selain kejadian tersebut, bencana dengan skala ringan juga tercatat pernah terjadi beberapa kali pada periode lainnya. Namun demikian, pada tahun 2025 tidak tercatat adanya kejadian gelombang ekstrem di wilayah DIY.

4) Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam kerak bumi. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 19 kejadian gempa bumi yang dirasakan di wilayah DIY, dengan frekuensi

kejadian tertinggi terjadi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

5) Tsunami

Selama tahun 2025 tidak tercatat adanya kejadian tsunami di wilayah DIY. Namun demikian, berdasarkan catatan historis, wilayah pesisir selatan Pulau Jawa pernah mengalami kejadian tsunami dengan tinggi gelombang berkisar antara 3 hingga 10 meter. Saat ini, kondisi hutan mangrove sebagai benteng alami terhadap ancaman tsunami, khususnya di sepanjang pesisir Kabupaten Bantul, telah mengalami degradasi dan tidak lagi tersedia. Kawasan cagar alam yang tersisa berupa gumuk pasir dan laguna dangkalan memiliki fungsi perlindungan yang sangat terbatas, terutama hanya melindungi area atau permukiman di sisi tertentu.

Wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo memiliki karakteristik pantai yang terbuka, sehingga tingkat risiko terdampak tsunami relatif tinggi. Sebagai upaya mitigasi, telah dilakukan pengembangan zona hijau secara vegetatif berupa *green belt* melalui penanaman cemara pantai dengan jarak sekitar 200 meter dari garis pantai. Sementara itu, di Kabupaten Gunungkidul, pesatnya perkembangan aktivitas wisata pantai menuntut peningkatan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya tsunami.

6) Kegagalan Teknologi

Salah satu fasilitas reaktor nuklir yang berada di wilayah DIY adalah Reaktor Kartini yang dikelola oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Selain potensi kegagalan teknologi yang bersumber dari kecelakaan transportasi, wilayah DIY juga memiliki potensi risiko kegagalan teknologi yang berasal dari operasional reaktor nuklir. Namun demikian, selama tahun 2025 tidak tercatat adanya kejadian kegagalan teknologi di wilayah DIY.

7) Kekeringan

Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang tinggi akibat curah hujan yang relatif rendah serta kondisi tanah karst yang memiliki keterbatasan dalam menampung dan menyimpan air. Dalam kondisi tersebut, sumber air utama yang tersedia bagi masyarakat berasal dari sungai bawah tanah. Sementara itu, kejadian kekeringan di kabupaten lain di wilayah DIY umumnya disebabkan oleh rendahnya kemampuan permukaan tanah dalam menyerap air hujan, yang dipicu oleh berkurangnya vegetasi penutup serta dominasi lapisan kedap air di permukaan tanah. Kondisi ini diperparah oleh pemanfaatan air tanah yang berlebihan dan tidak terkendali. Selama tahun 2025, tidak tercatat adanya kejadian bencana kekeringan di wilayah DIY.

8) Letusan Gunung Api

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia, dengan periode letusan yang relatif singkat, yaitu berkisar antara 3 hingga 7 tahun. Aliran lahar hasil aktivitas Gunung Merapi berpotensi memasuki wilayah Kabupaten Sleman. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi berlangsung secara kontinu, yang ditandai dengan kejadian guguran kubah lava hampir setiap hari. Selain itu, secara geologis Gunung Merapi terletak pada zona pertemuan dua sesar transversal yang membentang di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Namun demikian, hingga tahun 2025 tercatat adanya 3 kejadian letusan Gunung Merapi.

9) Cuaca ekstrim

Bencana alam akibat cuaca ekstrem berupa angin kencang tercatat beberapa kali terjadi di wilayah DIY, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Fenomena ini umumnya disebabkan oleh adanya siklon tropis maupun perubahan musim yang cepat. Sepanjang tahun 2025,

tercatat sebanyak 198 kejadian angin kencang di wilayah DIY, dengan frekuensi tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta.

10) Tanah Longsor

Bencana tanah longsor berisiko tinggi terjadi pada daerah perbukitan dan lereng dengan kemiringan yang curam. di wilayah DIY, titik-titik rawan tanah longsor umumnya berada di sepanjang dinding sungai dan kawasan Pegunungan Menoreh, sehingga potensi bencana ini meningkat signifikan selama musim penghujan. Selain itu, kejadian tanah longsor juga dapat terjadi di kabupaten lain yang memiliki lereng dengan kontur ekstrem serta curah hujan tinggi. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 765 kejadian tanah longsor di wilayah DIY, dengan frekuensi tertinggi terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

11) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa terbakarnya vegetasi di area hutan maupun lahan, yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem serta pencemaran udara. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 24 kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah DIY, dengan frekuensi tertinggi terjadi di Kabupaten Bantul.

12) Konflik Sosial

Keanekaragaman masyarakat di DIY yang sangat tinggi berpotensi menimbulkan berbagai bentuk konflik sosial. Bentuk konflik yang mungkin muncul mencakup konflik bernuansa agama, antarsuku, antargolongan, antarpengikut partai politik, maupun konflik antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan sebagian masyarakat. Konflik sosial tersebut cenderung terjadi di kawasan yang memiliki konsentrasi tinggi mahasiswa atau komunitas tertentu, dan menjadi salah satu aspek prioritas dalam penanganan risiko bencana sosial di wilayah DIY.

13) Banjir Bandang

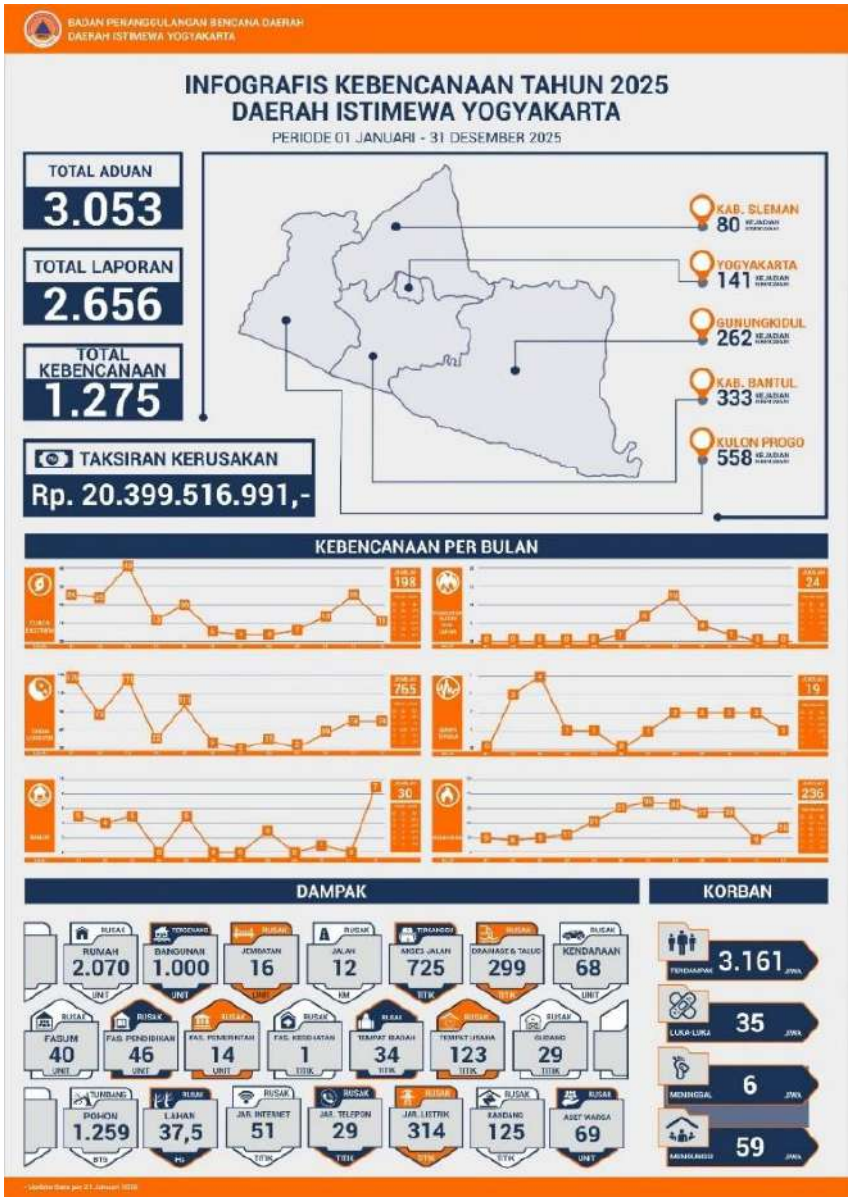
Banjir bandang merupakan aliran air deras yang muncul secara tiba-tiba di daerah aliran sungai, yang seringkali membawa material berupa lumpur, batu, dan sedimen lainnya. Berdasarkan catatan tahun 2025, belum tercatat adanya kejadian banjir bandang di wilayah DIY

14) Likuifaksi

Likuifaksi merupakan fenomena di mana tanah kehilangan kekuatan dan kekakuannya akibat getaran gempa bumi, sehingga bangunan atau struktur yang berdiri di atasnya berpotensi mengalami penurunan, amblas, atau kemiringan. Berdasarkan data tahun 2025, tidak tercatat adanya kejadian likuifaksi di wilayah DIY.

2. Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2025

Berdasarkan data yang diterima oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) DIY, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.275 kejadian bencana alam di wilayah ini. Selama lima tahun terakhir, jenis bencana alam yang paling sering terjadi adalah kebakaran, tanah longsor, serta cuaca ekstrem.



Gambar 7.1. Infografis Kebencanaan Tahun 2025

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2026(data diolah)

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Dalam rangka pengurangan risiko bencana, diperlukan strategi yang mencakup pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana).
b. Kebijakan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini (*Early Warning System*/EWS) belum sepenuhnya diterapkan atau terakomodir.
c. Saat ini belum tersedia kebijakan atau SOP yang mengatur mekanisme pendataan bantuan bagi korban bencana.
d. Diperlukan integrasi sistem data dan informasi manajemen kebencanaan antara berbagai pihak dan lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanggulangan bencana.

2) Solusi

a. Diusulkan perubahan terhadap Kajian Bencana Wilayah DIY Tahun 2022–2026 dengan penambahan analisis hingga tingkat Kapanewon/Kemantren. Penyempurnaan kajian risiko bencana yang mencakup wilayah lebih rinci hingga tingkat Kapanewon/Kemantren dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai lokasi rawan bencana, sehingga upaya mitigasi dapat direncanakan dan dilaksanakan secara lebih terfokus dan efektif.
b. Perlu dilakukan penyusunan SOP Pelatihan dan Pendidikan Penanggulangan Bencana melalui koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdiklat BNPB). Penyusunan SOP ini untuk memastikan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, dan selaras dengan standar nasional, sehingga

mampu meningkatkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat serta aparatur terkait.

c. Perlu disusun dan ditetapkan SOP terkait pengorganisasian, pemasangan, serta pengujian EWS. Penyusunan SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa EWS dapat berfungsi secara optimal dan dilakukan pengujian secara berkala, sehingga mampu memberikan peringatan yang cepat, tepat, dan efektif kepada masyarakat dalam menghadapi potensi terjadinya bencana.

d. Perlu disusun dan ditetapkan kebijakan atau SOP mengenai mekanisme pendataan bantuan bagi korban bencana. Penyusunan SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pendataan, dan verifikasi data korban bencana dapat dilakukan secara sistematis dan terstandar, sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Gambaran Umum

DIY merupakan wilayah dengan karakter masyarakat yang sangat beragam dan memiliki tingkat heterogenitas sosial yang tinggi. Kondisi tersebut terbentuk seiring dengan peran DIY sebagai pusat pendidikan, destinasi pariwisata, dan pusat kebudayaan, yang menjadikannya magnet bagi penduduk dari berbagai daerah untuk datang dan menetap, baik dalam rangka menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, maupun membangun kehidupan. Dinamika tersebut menjadikan DIY sebagai wilayah dengan kompleksitas sosial yang tinggi.

Keberagaman masyarakat yang tidak dikelola secara tepat berpotensi memunculkan gesekan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka dan kerusuhan, sehingga berdampak pada

terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dijaga dan dikendalikan secara berkelanjutan. Apabila suatu daerah dinilai tidak mampu menciptakan rasa aman dan tertib, maka aktivitas ekonomi akan mengalami perlambatan, iklim investasi menjadi tidak kondusif, serta stabilitas sosial, budaya, dan politik berisiko terganggu.

Kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tenteram merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan di DIY. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, seluruh aktivitas kehidupan masyarakat harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan regulasi daerah menjadi instrumen penting dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pemda DIY melalui Satuan Polisi Pamong Praja DIY melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui tindakan penertiban, baik yang bersifat yustisial maupun non-yustisial, terhadap warga masyarakat, aparatur, maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran. Sepanjang tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja DIY telah melaksanakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada melalui operasi yustisial dan non-yustisial dengan total penanganan sebanyak 110 kasus.

Penertiban non-yustisial merupakan bentuk tindakan administratif dan persuasif yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga serta memulihkan ketenteraman dan ketertiban umum atas pelanggaran Perda dan/atau Perkada tanpa melalui proses peradilan. Sementara itu, operasi yustisial merupakan rangkaian tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur pidana, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Upaya pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu desa atau kalurahan. Upaya tersebut tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta Kelompok Jaga Warga yang berada di wilayah DIY. Kelompok Jaga Warga merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah kalurahan atau kelurahan atas prakarsa masyarakat di tingkat padukuhan, rukun warga, atau kampung, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Rincian mengenai keberadaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kelompok Jaga Warga di wilayah DIY disajikan sebagai berikut.:

1) Jumlah desa/kalurahan yg telah memiliki Satlinmas aktif: 243, dari total keseluruhan jumlah desa/kalurahan se-DIY yakni 438 desa/kalurahan, dapat disimpulkan persentase satlinmas yang aktif adalah 62,78 %
2) Jumlah anggota Satlinmas di Wilayah DIY, yakni sebanyak 27.651 orang dengan rincian sebagai berikut:
    a. Kota Yogyakarta: 4.327 orang
    b. Gunungkidul: 6.062 orang
    c. Kulon Progo: 3.807 orang
    d. Bantul: 6.570 orang
    e. Sleman: 7.205 orang
3) Jumlah desa/kalurahan yg telah memiliki Jagawarga aktif: 359, dari total keseluruhan jumlah desa/kalurahan se-DIY yakni 438 desa/kalurahan;
4) Jumlah kelompok Jaga Warga di Wilayah DIY, yakni sebanyak 4.677 kelompok dari total padukuhan se-DIY yakni 4.677padukuhan dengan jumlah anggota keseluruhan sejumlah 106.192 orang, dengan rincian sebagai berikut:
    a. Kota Yogyakarta: 2.449 orang
    b. Gunungkidul: 35.725 orang

c. Kulon Progo: 16.817 orang
d. Bantul: 23.325 orang
e. Sleman: 27.876 orang

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah Kelompok Jaga Warga di tingkat padukuhan/kampung/ RW yang sudah terbentuk pada Tahun 2025 telah mencapai 81,96% se-DIY.

2. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan di daerah perbatasan dalam bidang cukai dengan maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai dan peredaran minuman beralkohol yang dianggap sudah tidak terkendali.

a. Daerah rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta gejolak sosial karena heterogenitas masyarakat DIY yang mayoritas bukan penduduk tetap.
b. Pelanggaran terkait pemanfaatan tanah kas desa.
c. Penambangan liar yang ada di wilayah DIY terutama pada daerah aliran sungai, pegunungan dan wilayah perbatasan.

2) Solusi

Peningkatan Pengawasan dengan memperkuat patroli di daerah perbatasan

a. Menyelenggarakan forum komunikasi dengan Lembaga dan Instansi terkait.
b. Melakukan penertiban dan pengawasan terhadap Tanah kas desa yang digunakan oleh Masyarakat, dengan memastikan izin sudah dimiliki oleh para pengguna tanah kas desa.
c. Memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat.

F. TUGAS – TUGAS UMUM PEMERINTAH LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

1. Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY)

1) Narasi Umum

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, Pemda DIY telah melakukan upaya untuk memenuhi indikator demokratisasi dengan membentuk lembaga daerah dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahannya yaitu melalui LO DIY. Fungsi pengawasan ini dilakukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh aparatur pemerintahan maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publiknya di DIY. Sebagai Lembaga Daerah Non Struktural, ketugasan LO DIY berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY.

Pembentukan LO DIY sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, *"Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".* Sebagai daerah otonom yang memerintah, mengatur, dan mengurus diri sendiri, pemerintahan daerah berhak membuat peraturan tingkat daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

LO DIY diharapkan melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan badan usaha. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, LO DIY bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan atau dugaan pelanggaran etika usaha oleh badan usaha. Namun demikian, LO DIY juga melaksanakan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. LO DIY juga membangun kolaborasi dan/atau kerja sama dengan

berbagai lembaga, baik aparatur pemerintah maupun badan usaha sehingga mendukung upaya pencegahan maladministrasi.

Keanggotaan LO DIY masa jabatan tahun 2024-2028 ditetapkan melalui SK Gubernur DIY Nomor 25/Kep/2024 tentang Penetapan Anggota LO DIY Masa Jabatan Tahun 2024-2028. LO DIY berjumlah 7 orang yang bersifat kolektif kolegial. Adapun pengangkatan anggota LO DIY ditetapkan dari hasil seleksi calon anggota LO DIY yang memenuhi persyaratan dan proses seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Gubernur DIY.

Untuk mendukung optimalisai kinerja, LO DIY dilengkapi dengan beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tertuang dalam dasar hukumnya. Bidang-bidang tersebut adalah Bidang Pelayanan Laporan, Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan, Bidang Pengawasan Badan Usaha, Bidang Sosialisasi Kerja sama dan Penguatan Jaringan, Bidang Pengembangan Kelembagaan serta Bidang Monitoring dan Evaluasi. Bidang Pelayanan Laporan merupakan bidang yang betugas menerima konsultasi serta mengelola laporan dari masyarakat, baik laporan secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan laporan meliputi pengadministrasian, klarifikasi, koordinasi, investigasi, mediasi, konsultasi ahli, penerbitan produk akhir. Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan mempunyai fungsi untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran pelayanan publik khususnya di bidang Pemerintahan dan melakukan pengawasan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan persamaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bidang Pengawasan Badan Usaha bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik, berkualitas, profesional, dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan persamaan sehingga terwujud penyelenggaraan usaha yang baik dan bersih serta praktik dunia usaha yang profesional dan beretika. Bidang Pengembangan

Kelembagaan yakni melakukan pengembangan, baik pengembangan yang menyangkut kelembagaan maupun pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi LO DIY dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan serta penyelenggaraan usaha swasta melalui pelayanan permohonan bidang akademis. Bidang Sosialisasi Kerja Sama Dan Penguatan Jaringan merupakan bidang yang melakukan sosialisasi, kerja sama, dan penguatan jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder)* untuk mencegah mal-administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyimpangan tata kelola usaha swasta. Bidang Monitoring dan Evaluasi merupakan bidang yang melakukan monitoring dan evaluasi internal maupun eksternal terhadap tugas, pokok dan fungsi LO DIY dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika berkelanjutan.

Pada tahun 2025 LO DIY telah menerbitkan 104 produk akhir yang terdiri dari 60 Rekomendasi dan 44 Laporan Penyelesaian Kasus. Sepanjang tahun 2025, LO DIY telah menerima 294 konsultasi dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan dan praktik badan usaha. Jumlah penerimaan aduan dan konsultasi di LO DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.10. Penerimaan Laporan Dan Konsultasi di LO DIY.

No	Nama Bidang	Laporan	Konsultasi
1	Aparatur Pemerintahan	64	119
2	Badan Usaha	97	167
3	Lainnya		8
Total		**161**	**294**

Sumber: LO DIY, 2025

Jumlah konsultasi berdasarkan wilayah dapat diklasifikasikan sebagai berikut, sebanyak 90 konsultasi (36,12%) dari Kota Yogyakarta, 93 konsultasi (31,49%) dari Kabupaten Sleman, 85 konsultasi (21,11%) dari Kabupaten Bantul, 7 konsultasi (2,81%)

dari Kabupaten Kulon Progo, 11 konsultasi (2,34%) dari Kabupaten Gunungkidul dan sebanyak 8 konsultasi (5,14%) lainnya (konsultasi yang bukan kewenangan LO DIY). Sebagai catatan bahwa jumlah konsultasi dalam suatu wilayah tidak selalu menggambarkan kondisi pelayanan publik sehingga diperlukan pencermatan lebih dalam untuk mengambil kesimpulan.

Komposisi konsultasi yang diterima oleh LO DIY pada Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan apabila diklasifikasikan berdasarkan 5 sektor tertinggi yaitu lingkungan 47 konsultasi (39,5%), pendidikan 21 konsultasi (17,65%), pertanahan 14 konsultasi (11,76%), kepegawaian 9 konsultasi (7,56%), kesejahteraan 7 konsultasi (5,88%). Kasus yang banyak dikonsultasikan pada Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan antara lain mengenai dampak pencemaran lingkungan, pendanaan pendidikan, pelayanan administrasi pertanahan maupun pemblokiran sertipikat, status kepegawaian yang belum jelas, dan belum cairnya bantuan sosial dari pemerintah.

Sedangkan komposisi konsultasi yang diterima oleh LO DIY pada Bidang Pengawasan Badan Usaha apabila diklasifikasikan berdasarkan 5 sektor tertinggi yaitu Perdagangan 52 konsultasi (31%), keuangan 45 konsultasi (27%), properti 18 konsultasi (11%), pendidikan 17 konsultasi (10%), ketenagakerjaan 16 konsultasi (10%). Kasus yang banyak dikonsultasikan pada Bidang Pengawasan Badan Usaha antara lain peredaran minuman beralkohol yang tidak berizin, permasalahan pembiayaan oleh lembaga keuangan, keterlambatan dalam pembangunan perumahan, pendanaan pendidikan, tidak diberikannya hak pekerja.

Dari sejumlah konsultasi yang diterima oleh LO DIY yang kemudian dapat ditindaklanjuti sebagai laporan sebanyak 161 laporan. Apabila diklasifikasikan berdasarkan 5 sektor tertingginya yaitu perdagangan 49 laporan (30,43%), lingkungan 39 laporan (24,22 %), properti 14 laporan (8,7%), pendidikan 14

laporan (8,7%), keuangan 14 laporan (8,7%). Kasus yang banyak ditindaklanjuti sebagai laporan antara lain peredaran minuman beralkohol yang tidak berizin, pencemaran lingkungan, keterlambatan dalam pembangunan perumahan, pendanaan pendidikan dan permasalahan pembiayaan oleh lembaga keuangan.

Sementara itu, komposisi laporan berdasarkan wilayah adalah sebanyak 50 laporan (31,06%) dari Kota Yogyakarta, 44 laporan (27,33%) dari Kabupaten Sleman, 54 laporan (33,54%) dari Kabupaten Bantul, 5 laporan (3,11%) dari Kabupaten Kulon Progo dan 8 laporan (4,97%) dari Kabupaten Gunungkidul. Sebagai catatan bahwa jumlah laporan dalam suatu wilayah tidak selalu menggambarkan kondisi pelayanan publik sehingga diperlukan pencermatan lebih dalam untuk mengambil kesimpulan.

2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pelayanan publik pada bidang pemerintahan dan badan usaha di DIY

a. Perdagangan

(1) Permasalahan

Praktik usaha yang menjual minuman beralkohol yang tidak berizin, tata kelola penjualan BBM yang tidak sesuai, perlakuan diskriminatif terhadap penyewa tenant.

(2) Solusi

Telah dilakukan pembahasan secara mendalam baik oleh penanggungjawab dan pengampu laporan maupun dalam forum bersama rapat kasus. Melakukan investigasi, klarifikasi, mediasi serta berkoordinasi dengan OPD maupun instansi terkait lainnya untuk menyusun regulasi dan kebijakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan. Segala proses tindak lanjut yang dirumuskan dengan melibatkan para pihak adalah upaya yang dilakukan LO DIY untuk mendapatkan penyelesaian laporan yang tuntas sehingga diharapkan tidak muncul lagi persoalan serupa di masa mendatang.

b. Lingkungan

(1) Permasalahan

Dugaan pencemaran lingkungan;

(2) Solusi

Dalam upaya tindak lanjut penanganan laporan, LO DIY melakukan investigasi, klarifikasi, observasi lapangan dan koordinasi dengan OPD serta pihak-pihak terkait. LO DIY juga melakukan kajian dan pencermatan terhadap produk aturan sesuai substansi laporan. Dari hasil tindak lanjut, pencermatan dan kajian ini kemudian diterbitkan rekomendasi kepada para pihak termasuk OPD terkait agar menyusun kebijakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

c. Properti

(1) Permasalahan

Keterlambatan pembangunan perumahan, pembatalan jual beli kaveling tanah, pembangunan rumah tidak sesuai dengan site plan.

(2) Solusi

Melakukan tindak lanjut berupa klarifikasi, investigasi dan koordinasi dengan pengembang ataupun instansi terkait, kemudian dilakukan mediasi para pihak agar dapat diperoleh alternatif penyelesaian masalah secara layak.

d. Keuangan

(1) Permasalahan

Tata kelola gadai emas di pegadaian, transparansi penggunaan kartu kredit, pencairan dana nasabah, permohonan keringanan pelunasan kredit, proses lelang yang tidak transparan.

(2) Solusi

Sebagai upaya tindak lanjut penanganan aduan LO DIY melakukan klarifikasi, investigasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta mengundang para pihak untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan kemudian dilakukan mediasi untuk mendapatkan penyelesaian masalah.

e. Pendidikan

(1) Permasalahan

Pendanaan pendidikan, pengadaan seragam, pelayanan pembelajaran yang tidak sesuai, siswa dikeluarkan dari sekolah, penyalahgunaan kewenangan jabatan kepala sekolah, ketidakjelasan status mahasiswa, pemberian sanksi yang tidak transparan.

(2) Solusi

Dalam upaya melakukan tindak lanjut aduan LO DIY melakukan klarifikasi dan koordinasi serta memberikan rekomendasi kepada para pihak, sebagai saran perbaikan untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik pada masa mendatang, serta memberikan rekomendasi kepada OPD terkait agar menyusun kebijakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

3) Rekomendasi

Berkenaan dengan permasalahan dan solusi tersebut telah direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mendorong aparatur pemerintah daerah untuk patuh terhadap Standar Pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta mendorong badan usaha agar dalam melakukan praktik usaha berpedoman pada tata kelola usaha beretika dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Mendorong Penyelenggara Pelayanan Publik untuk melakukan sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati dan mencermati produk-produk pelayanan publik sebelum dilakukannya penandatangan akta jual beli yang diselenggarakan oleh badan usaha. Demikian juga untuk dilakukan sosialisasi intensif oleh institusi yang berkepentingan kepada masyarakat, atas diterbitkannya kebijakan baru atau perubahan kebijakan sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan maupun penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri;
c. Pembenahan dan pengembangan manajemen pelayanan publik dengan menerapkan New Public Management (Derhandt and Derhandt, 2000) oleh aparatur pemerintah daerah maupun badan usaha yang inklusif terhadap semua warga negara tanpa terkecuali sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) serta tata kelola perusahaan yang profesional, transparan dan akuntabel (*good corporate governance*)
d. Manajemen pelayanan publik perlu konsisten dan terus menerus membuka ruang partisipasi warga dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga perumusan

kebijakan akan berbasis data, semakin inklusif dan tepat sasaran;

e. Mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan layanan publik untuk selalu berkolaborasi melalui kemitraan dengan pendekatan manajemen kolaboratif multi sektor (pentahelix) yang meliputi akademisi, semua golongan masyarakat, sektor swasta, media dan segenap komponen pemerintah itu sendiri;

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

1) Narasi Umum

Olahraga merupakan salah satu instrumen yang mampu mewujudkan kehidupan individu dan kolektif yang berkualitas. Pembangunan olahraga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, membentuk nilai-nilai moral dan akhlak mulia, menguatkan sikap sportivitas dan kedisiplinan, serta meningkatkan prestasi.

Peningkatan prestasi olahraga di daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pengurus daerah cabang olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia DIY (KONI DIY) sebagai pengurus daerah cabang olahraga di DIY memiliki misi untuk meningkatkan sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan, memperkuat infrastruktur dan fasilitas olahraga, meningkatkan daya saing atlet di tingkat nasional dan internasional, membangun kemitraan dan kolaborasi dalam pembinaan olahraga, serta menanamkan nilai-nilai sportivitas dan budaya lokal dalam olahraga. Beberapa kegiatan KONI DIY di tahun 2025 adalah fasilitasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVII, penyelenggaraan Puslatda Pra PON 2028, fasilitasi para atlet guna mengikuti kejuaraan tingkat nasional maupun internasional, fasilitasi sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejurnas, serta fasilitasi bagi para atlet yang mengikuti Pelatnas.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah, Pemda DIY pada tahun 2025 memberikan bantuan hibah kepada KONI DIY sebesar Rp14.545.000.000,00 yang telah disalurkan seluruhnya pada bulan Juli 2025. KONI DIY merupakan organisasi keolahragaan yang berfungsi sebagai mitra strategis Pemda DIY dalam pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi olahraga, khususnya melalui pembinaan cabang olahraga prestasi dan atlet daerah. Bantuan hibah tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan prestasi olahraga di DIY sesuai dengan kebijakan dan arah pembangunan olahraga daerah.

2) Permasalahan dan Solusi

KONI DIY masih menghadapi beberapa kendala dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, antara lain:

a. Perlunya pembinaan berkelanjutan bagi para calon dan atlet DIY guna meningkatkan prestasi olahraga DIY
b. KONI DIY belum dapat memenuhi secara maksimal sarana prasarana yang digunakan dalam pembinaan dan pelatihan atlet

Upaya yang dilakukan KONI DIY guna mengatasi permasalahan yang dihadapi:

a. Dalam melaksanakan pembinaan prestasi olahraga, KONI DIY menempuh pembinaan melalui jalur sekolah maupun jalur masyarakat. Melalui jalur sekolah, para atlet diikutsertakan dalam Pembinaan Atlet Berbakat dan Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional. Melalui jalur masyarakat, KONI DIY bekerjasama dengan Pengurus Daerah Cabang Olahraga, Pengurus Kabupaten/Kota Cabang Olahraga, dan Sentra Pembinaan. Diharapkan melalui kedua jalur ini, pembinaan atlet dapat berjalan maksimal dan menghasilkan para atlet berprestasi.

b. KONI DIY berupaya secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana latihan dan pembinaan. Guna mendukung penyelenggaraan pembinaan, KONI DIY juga berkoordinasi dengan Pengurus Daerah Cabang Olahraga, Pengurus Kabupaten/Kota Cabang Olahraga, dan Sentra Pembinaan dalam pemenuhan sarana olahraga.



Gambar 7.2. Pertandingan Bulutangkis Putri pada PORDA XVII

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

1) Narasi Umum

Gerakan Pramuka memiliki tujuan membina dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yakni membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Kwartir Gerakan Pramuka DIY (Kwarda DIY) dalam upaya mewujudkan visi "Terwujudnya Pramuka Istimewa sebagai Generasi Unggul" pada tahun 2025 melaksanakan beberapa kegiatan seperti penguatan dan pengembangan database keanggotaan, Lomba Pramuka, fasilitasi Pramuka Berkebutuhan Khusus, penguatan kelembagaan dalam Gerakan Pramuka, Raimuna Daerah, bimbingan teknis Pramuka Istimewa dan Pramuka Garuda, penguatan kapasitas anggota pramuka,

Karang Pamitran, bimbingan teknis Gugus Depan ramah lingkungan, Pitaran Pelatih, Peringatan Hari Pramuka, serta karya bakti pada hari libur nasional. Pada tahun 2025 Pemda DIY memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kwarda DIY melalui hibah yang bersumber dari APBD sebesar Rp1.500.000.000,00 dan telah disalurkan seluruhnya pada bulan Maret 2025.

2) Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala yang dihadapi Kwarda DIY dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan Gerakan Pramuka antara lain:

a. Minimnya kualitas dan kuantitas pembina Pramuka yang kompeten karena satuan pendidikan kesulitan menyediakan pembina Pramuka yang telah memiliki sertifikasi
b. Penurunan minat dan partisipasi peserta didik terhadap kegiatan Pramuka di tengah arus digitalisasi dan perubahan gaya belajar generasi muda

Upaya yang dilakukan Kwarda DIY dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Menyusun standar kompetensi dan alat ukur yang dibutuhkan bagi pengukuran kompetensi anggota dewasa guna menentukan kelayakan sebagai pembina Pramuka. Penyusunan ini akan diikuti dengan penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan mulai dari tingkat Gugus Depan, Kwartir, hingga Kwarda. Penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kompetensi dimaksudkan untuk memperbanyak anggota dewasa calon pembina yang memiliki Surat Hak Bina (SHB) dan lulus dari kursus Mahir Tingkat Dasar maupun Lanjut. Kwarda DIY juga memfasilitasi penyelenggaraan Pitaran Pelatih dan Karang Pamitran yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi para pembina Pramuka.

b. Penurunan minat dan partisipasi peserta didik terhadap kegiatan Pramuka salah satunya bersumber dari metode pembelajaran Pramuka yang dirasa kurang relevan dengan era digital saat ini. Dengan demikian, Kwarda DIY berupaya untuk menggabungkan tradisi kegiatan alam terbuka dengan literasi digital guna mengatasi isu-isu yang sedang marak di masyarakat, salah satunya melalui Bimbingan Teknis dan Implementasi *Ticket To Life* dengan harapan para anggota Pramuka dapat berperan aktif pada perbaikan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu di DIY.



Gambar 7.3. Pesta Siaga 2025 di Bumi Perkemahan Babarsari

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

1) Narasi Umum

Pasca terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, penyelenggaraan demokrasi di DIY memasuki fase konsolidasi politik dan kelembagaan. Pada periode ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY memfokuskan perannya pada konsolidasi penyelenggaraan pemilu, evaluasi pelaksanaan seluruh tahapan, serta penguatan tata kelola kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas.

Pasca selesainya seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KPU DIY melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap aspek perencanaan, teknis penyelenggaraan, manajemen

logistik, pemutakhiran data pemilih, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam perumusan perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, sekaligus menjaga kesinambungan kualitas demokrasi di DIY.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di DIY berlangsung dalam situasi yang relatif kondusif. Seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh kesiapan teknis penyelenggara di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kondisi ini mencerminkan kapasitas kelembagaan KPU DIY dalam mengelola tahapan pemilu yang kompleks dan beririsan.

Selain aspek teknis, KPU DIY juga menaruh perhatian pada penguatan partisipasi pemilih dan pendidikan pemilih pasca pemilu. Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi modal penting dalam menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, terutama bagi pemilih pemula, kelompok perempuan, dan penyandang disabilitas.

di tengah perkembangan teknologi informasi, KPU DIY turut melakukan refleksi terhadap pemanfaatan sistem informasi kepemiluan dan tata kelola data pemilih. Penguatan keandalan sistem, transparansi informasi, serta akurasi data menjadi bagian dari agenda pembenahan pasca pemilu guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan.

Pada akhir periode pelaporan, KPU DIY terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Pemda DIY, khususnya melalui fasilitasi dan dukungan kelembagaan dalam rangka pemantauan perkembangan politik daerah pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sinergi ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung keberlanjutan penyelenggaraan demokrasi lokal di DIY.

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

(1) Adanya kebijakan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan berdampak pada keterbatasan dukungan anggaran kegiatan KPU DIY, sehingga pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan lintas sektor perlu disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan strategis.

(2) Pada fase pasca penyelenggaraan pemilu dan pilkada, terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, mengingat berakhirnya momentum kontestasi elektoral.

b. Solusi:

(1) KPU DIY melakukan evaluasi internal dan penguatan manajemen kelembagaan sebagai dasar perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu, termasuk penguatan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Penguatan program pendidikan pemilih dan sosialisasi demokrasi secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan pengalaman Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagai bahan pembelajaran publik.

(3) Peningkatan koordinasi dengan Pemda DIY melalui mekanisme pemantauan perkembangan politik daerah dan forum komunikasi kelembagaan, guna mendukung stabilitas politik serta kesiapan penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.

5. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)

1) Narasi Umum

Tahun 2025 menjadi periode transisi penting bagi penyelenggaraan demokrasi di DIY, khususnya pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Serentak Tahun 2024. Pada fase ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY memusatkan perhatian pada konsolidasi kelembagaan, evaluasi menyeluruh tahapan pengawasan, serta penguatan sistem pengawasan pemilu sebagai fondasi perbaikan tata kelola demokrasi ke depan.

Pasca seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 selesai, fokus utama Bawaslu DIY pada tahun 2025 diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan, penanganan pelanggaran serta evaluasi efektivitas pengawasan pemilu dan pilkada. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam rangka penguatan sistem pengawasan ke depan serta sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi Pemda DIY dan pemangku kepentingan lainnya.

Bawaslu DIY bersama Pemda DIY terus menjaga sinergi kelembagaan melalui koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, KPU DIY, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat sipil. Kolaborasi ini diwujudkan dalam forum-forum evaluasi pemilu, pemantauan stabilitas politik pasca kontestasi, serta penguatan pendidikan politik masyarakat guna menjaga kondusivitas sosial dan politik di DIY.

Dalam kerangka penguatan demokrasi pasca-pemilu, Bawaslu DIY juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, perempuan, dan kelompok disabilitas tetap menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan kesadaran berdemokrasi, tidak hanya pada masa tahapan pemilu tetapi juga dalam kehidupan politik sehari-hari. Selain itu, hasil pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menunjukkan bahwa potensi kerawanan pemilu di DIY dapat dikelola dengan relatif baik melalui langkah-langkah pencegahan dan koordinasi lintas sektor. Hal ini berkontribusi pada terjaganya stabilitas daerah dan legitimasi hasil pemilu, yang menjadi fondasi penting bagi jalannya pemerintahan daerah pada periode berikutnya.

Dengan demikian, pada tahun 2025 Bawaslu DIY tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas pasif, tetapi juga sebagai mitra strategis Pemda DIY dalam menjaga kualitas demokrasi lokal, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemilu, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

(1) Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, masih ditemukan sejumlah catatan evaluatif terkait pelanggaran administrasi pemilu, khususnya yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman regulasi secara berkelanjutan.
(2) Pada masa pasca-kontestasi, terdapat potensi penurunan partisipasi dan kewaspadaan publik terhadap isu-isu demokrasi, sehingga pengawasan partisipatif cenderung melemah apabila tidak diikuti dengan strategi keberlanjutan.

b. Solusi:

(1) Peningkatan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu DIY dan Pemda DIY, khususnya melalui Badan Kesbangpol DIY, untuk memastikan keterlibatan Bawaslu DIY secara optimal dalam pemantauan perkembangan politik daerah pasca pemilu dan pilkada.
(2) Pemanfaatan hasil evaluasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagai bahan rekomendasi kebijakan daerah, sehingga pengalaman empiris pengawasan pemilu dapat berkontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola demokrasi lokal di DIY.

(3) Penguatan strategi pengawasan partisipatif berkelanjutan melalui pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, dan pelibatan kelompok strategis (pemuda, perempuan, dan disabilitas), agar kesadaran pengawasan tidak hanya bersifat temporer pada masa pemilu.

6. Palang Merah Indonesia (PMI)

1) Narasi Umum

Palang Merah Indonesia (PMI) DIY merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dan kesehatan, antara lain melalui pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pertolongan pertama, serta pembinaan dan pengembangan relawan. PMI DIY menjadi mitra penting Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, khususnya pada kondisi darurat, bencana alam, dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi PMI di DIY berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang menetapkan PMI sebagai satu-satunya organisasi penyelenggara kepalangmerahan di Indonesia.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemda DIY menyalurkan dana hibah kepada PMI DIY sebesar Rp200.000.000,00 untuk mendukung kegiatan operasional dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen. Penyaluran hibah dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan DIY dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu serta perluasan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan, dan krisis kemanusiaan lainnya, sejalan dengan program Dinas Kesehatan DIY.

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(1) Ketersediaan darah masih terbatas, terutama untuk golongan darah tertentu serta pada kondisi darurat dan periode libur panjang;
(2) Partisipasi pendonor darah bersifat fluktuatif dan masih sangat bergantung pada pendonor rutin serta kegiatan donor massal;
(3) Ketersediaan sumber daya manusia (relawan) masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis di lapangan;
(4) Sarana dan prasarana belum memadai, termasuk keterbatasan armada, peralatan medis, dan logistik kebencanaan;
(5) Tingginya potensi bencana alam di wilayah DIY, seperti gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, dan banjir, menuntut tingkat kesiapsiagaan yang tinggi;
(6) Koordinasi lintas sektor dalam situasi darurat tertentu belum berjalan secara optimal;
(7) Keterbatasan pendanaan operasional, khususnya untuk kegiatan sosial, kebencanaan, dan pemeliharaan fasilitas.

b. Solusi

(1) Peningkatan promosi dan edukasi donor darah, melalui kampanye rutin, media sosial, dan kerja sama dengan sekolah, kampus, instansi, serta komunitas.
(2) Penguatan basis pendonor darah sukarela, termasuk pembinaan pendonor pemula agar menjadi pendonor rutin.
(3) Peningkatan kapasitas relawan, melalui pelatihan kebencanaan, pertolongan pertama, dan manajemen logistik.

(4) Penguatan sarana dan prasarana, melalui dukungan pemerintah daerah, kemitraan dengan swasta, dan penggalangan dana.
(5) Peningkatan kesiapsiagaan bencana, dengan pembentukan tim siaga, simulasi rutin, dan penempatan logistik di wilayah rawan.
(6) Penguatan koordinasi lintas sektor, dengan BPBD, Dinas Kesehatan, TNI/Polri, dan organisasi kemanusiaan lainnya.
(7) Optimalisasi dukungan anggaran, baik dari APBD, CSR, maupun partisipasi masyarakat.

7. Kinerja Tim Penggerak PKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Gerakan PKK bertujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri, serta mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesadaran hukum, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melaksanakan serta mengoordinasikan penyelenggaraan Gerakan PKK di wilayah Daerah.

Pada tahun 2025 berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TP-PKK DIY. Diantaranya berupa Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK DIY dan Pelantikan Pengurus Baru; *Monitoring* dan Evaluasi Pembinaan Karakter Keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (GELARI PELANGI), Penguatan

Ketahanan Keluarga yaitu Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, Nyaman (AKU HATINYA) PKK; Tertib Administrasi PKK; Workshop Pencegahan Dampak Negatif Penggunaan Gadget bagi Remaja, Gerakan Gemar Membaca Lomba Story Telling untuk Anak SLTP Sederajat; Sosialisasi Ketahanan Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Keluarga; Sosialisasi Peran TP PKK dalam penanganan kasus TBC; Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Stunting pada Wilayah Percontohan Kabupaten/Kota; Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Ketua TP PKK dalam Penyusunan Rencana Pembangunan; Kegiatan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana; Rapat Koordinasi dengan dengan Kabupaten/Kota; Gebyar Posyandu; Lomba Masak Kreasi Lahap Makan; Lomba Memasak MPASI; Pelatihan Digitalisasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K-PKK); serta RAKERNAS X PKK.

Kedepannya, penyelenggaraan berbagai kegiatan PKK diharapkan mampu melahirkan inovasi yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat DIY. Sejalan dengan hal tersebut, sinergi dan kerja sama lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY yang telah terbangun dengan baik diharapkan dapat terus dilanjutkan dan diperkuat secara berkesinambungan.

8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

1) Narasi Umum

Pada Tahun 2025, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menjamin terselenggaranya penyiaran yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab. Kegiatan KPID DIY dilaksanakan untuk memastikan frekuensi publik dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, serta untuk menjaga kualitas dan harmoni ekosistem penyiaran di DIY.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPID DIY tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan pengawasan, tetapi juga melakukan upaya edukatif dan partisipatif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan penyiaran. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan literasi media serta mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan isi siaran.

a. Capaian program dan kegiatan Tahun 2025

1) Peningkatan Literasi Penyiaran dan Partisipasi Publik

KPID DIY melaksanakan program KPID Goes to Campus di sejumlah perguruan tinggi di DIY. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa sebagai generasi muda terhadap regulasi penyiaran serta membentuk sikap kritis dalam mengonsumsi konten media siaran.

Selain itu, KPID DIY mengembangkan program komunikasi publik “Kanthi Yo” sebagai media penyampaian informasi dan regulasi penyiaran dengan pendekatan yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2) Apresiasi terhadap Lembaga Penyiaran

Pada Tahun 2025, KPID DIY menyelenggarakan Anugerah Penyiaran sebagai bentuk penghargaan kepada Lembaga Penyiaran yang konsisten menjaga kualitas isi siaran, mengedepankan nilai edukatif, serta mengangkat konten lokal dan budaya DIY.

b. Pengawasan dan Pemantauan Isi Siaran

KPID DIY melaksanakan pemantauan isi siaran televisi dan radio secara berkelanjutan dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan, KPID

DIY melibatkan mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi sebagai analis muda dalam kegiatan monitoring siaran.

Sepanjang Tahun 2025, KPID DIY memantau sejumlah 34 Stasiun TV dan 37 Stasiun radio serta telah melakukan penindakan berupa teguran tertulis terhadap Lembaga Penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya terkait konten yang tidak ramah anak, iklan kesehatan, dan muatan siaran yang tidak sesuai ketentuan.

c. Penanganan Aduan Masyarakat

KPID DIY menindaklanjuti aduan masyarakat melalui mekanisme klarifikasi dengan mengundang pimpinan atau perwakilan Lembaga Penyiaran. Klarifikasi dilakukan terhadap sejumlah aduan isi siaran televisi dan radio, termasuk terkait penayangan video klip, iklan pengobatan alternatif, serta iklan produk kesehatan, dengan berpedoman pada rekomendasi instansi teknis terkait.



Gambar 7.4. Penanganan Aduan dengan klarifikasi produk kesehatan

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025, KPID DIY menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

(1) Terjadinya pergeseran belanja iklan dari media penyiaran konvensional ke platform digital global yang belum sepenuhnya tunduk pada regulasi penyiaran nasional.
(2) Menurunnya minat generasi muda terhadap media penyiaran konvensional seiring meningkatnya konsumsi media berbasis digital dan media sosial.
(3) Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pemantauan isi siaran secara berkelanjutan selama 24 jam.
(4) Masih ditemukannya pelanggaran isi siaran, khususnya terkait iklan kesehatan dan konten yang kurang ramah anak.

b. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, KPID DIY telah dan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Mendorong akselerasi konvergensi media dengan mengimbau Lembaga Penyiaran di DIY untuk mengembangkan siaran lintas platform dan memperkuat kehadiran di media digital.
(2) Menguatkan pengembangan konten lokal berbasis budaya DIY sebagai keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh platform global.
(3) Mengoptimalkan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program magang mahasiswa untuk mendukung kegiatan pemantauan isi siaran.
(4) Meningkatkan intensitas edukasi dan literasi penyiaran kepada masyarakat serta Lembaga Penyiaran guna menekan potensi pelanggaran.
(5) Mendorong penguatan regulasi yang adaptif di tingkat pusat untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan antara media penyiaran konvensional dan platform digital.

9. Komisi informasi Daerah (KID)

1) Narasi Umum

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Daerah DIY (KID DIY) merupakan Komisi Informasi yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisioner KID DIY masa jabatan 2023–2027 merupakan Komisioner periode ke–4 (empat) yang dilantik oleh Gubernur DIY pada tanggal 30 November 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 385/KEP/2023 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Daerah DIY Masa Jabatan 2023–2027.

a. Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas pokok KID DIY adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Ajudikasi nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. KID DIY memiliki kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yaitu di wilayah DIY. Pada tahun 2025 KID DIY telah berhasil menyelesaikan 10 sengketa informasi publik yang masuk. Dari penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, dihasilkan 4 Putusan Sela, 4 Putusan Mediasi, dan 2 Penetapan Pencabutan Sengketa, dengan data sebagai berikut:

Tabel 7.11. Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2025

No	Register	Informasi Yang Diminta	Penyelesaian
1.	001/III/KIDDIY-PS/2025	Informasi Tindakan Pemerintah dan/atau dokumen keputusan TUN	Putusan Sela
2.	002/IV/KIDDIY-PS/2025	Informasi Dokumen Pertanahan	Putusan Sela
3.	003/V/KIDDIY-PS/2025	Informasi Tindakan Pemerintah dan/atau dokumen keputusan TUN	Putusan Sela
4.	004/V/KIDDIY-PS/2025	Informasi Dokumen Pertanahan	Penetaban Pencabutan Sengketa
5.	005/VI/KIDDIY-PS/2025	Informasi Dokumen Pertanahan	Putusan Mediasi
6.	006/VIII/KIDDIY-PS/2025	Informasi Tindakan Pemerintah dan/atau dokumen keputusan TUN	Putusan Sela
7	008/IX/KIDDIY-PS/2025	Informasi Tindakan Pemerintah dan/atau dokumen keputusan TUN	Penetaban Pencabutan Sengketa
8	009/IX/KIDDIY-PS/2025	Informasi Dokumen Pertanahan	Putusan Mediasi
9	011/XI/KIDDIY-PS/2025	Informasi Dokumen Pertanahan	Putusan Mediasi
10	012/X/KIDDIY-PS/2025.	Informasi Dokumen Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber: KID DIY, 2025

b. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuan tersebut memberikan mandat kepada Komisi Informasi Daerah (KID) DIY untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik pada Badan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pedoman teknis pelaksanaan, kegiatan Monev mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 dan PerKI Nomor 1 Tahun 2022. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 adalah untuk mendorong

percepatan serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di DIY.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan Monev bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi serta menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya sekaligus memberikan umpan balik dan solusi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan informasi publik, mengukur keberhasilan program dan kegiatan pelayanan informasi publik, memperoleh gambaran potensi pengembangan pelayanan informasi publik, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan informasi publik, serta mengetahui perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Pada Tahun Anggaran 2025, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan terhadap 534 Badan Publik di DIY. Pada tahun tersebut, KID DIY melaksanakan Monev keterbukaan informasi badan publik yang mencakup evaluasi terhadap implementasi seluruh kewajiban Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Metode pelaksanaan Monev terus dikembangkan dan disempurnakan guna menghasilkan hasil penilaian yang lebih terukur dan akurat. Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 juga dimaksudkan sebagai dasar pemeringkatan tingkat keterbukaan informasi Badan Publik di DIY.

Tahapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi pembentukan tim pelaksana, sosialisasi kepada Badan Publik, pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), uji website, serta uji akses layanan informasi publik. Dalam rangka mendukung proses pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik, Komisi Informasi Daerah DIY memfasilitasi pengelolaan portal e-Monev yang dapat diakses melalui alamat http://monev-kid.jogjaprov.go.id/. Adapun tabel berikut menyajikan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025.

Tabel 7.12. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah Badan Publik	Kualifikasi				
			Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY	5	5	0	0	0	0
2	Opd Pemda DIY	40	19	18	3	0	0
3	Opd Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY	155	23	75	53	4	0
4	Opd Kapanewon/ Kemantren Se-DIY	78	2	38	31	5	2
5	Kalurahan Se-DIY	196	4	17	67	38	70
6	Lembaga Yudikatif Se-DIY	11	2	6	1	2	0
7	Instansi Vertikal Se-DIY	18	3	5	9	1	0
8	Badan Non Struktural Se-DIY	13	9	2	1	1	0
9	Badan Usaha Milik Daerah Se-DIY	18	1	2	7	4	4
JUMLAH		**534**	**68**	**163**	**172**	**55**	**76**
Persentase			**12.73%**	**30.52%**	**32.21%**	**10.30%**	**14.23%**
			100%				

Sumber: KID DIY, 2025

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(1) Belum terpenuhinya ketersediaan SDM khusus yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan informasi publik, sehingga pelaksanaan layanan belum berjalan optimal sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Masih terdapat Badan Publik dengan capaian nilai SAQ yang rendah, menunjukkan belum terpenuhinya standar administratif layanan informasi publik secara menyeluruh.
(3) Pengelolaan website dan media sosial sebagai sarana layanan informasi publik belum dilakukan secara optimal, terencana, konsisten, dan berkelanjutan, serta belum sepenuhnya memperhatikan kebaruan informasi.
(4) Penyediaan layanan informasi publik yang ramah disabilitas, baik secara daring maupun luring, belum berfungsi secara optimal dan belum terpelihara secara berkelanjutan.
(5) Rendahnya tingkat kepedulian dan kesadaran Badan Publik terhadap permintaan informasi publik, yang ditunjukkan dengan tidak adanya respon atau pemberian informasi tanpa disertai alasan yang jelas.

b. Solusi

(1) Menetapkan dan menyediakan SDM khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab jelas dalam pengelolaan layanan informasi publik, serta memperkuat peran PPID dan PLID melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi.
(2) Mendorong PPID Utama dan pimpinan Badan Publik untuk menindaklanjuti hasil SAQ dengan melengkapi aspek administratif layanan informasi publik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

(3) Mengoptimalkan pengelolaan website dan media sosial sebagai kanal utama layanan informasi publik melalui perencanaan konten, pembaruan informasi secara berkala, serta pengelolaan yang konsisten dan berkelanjutan.
(4) Menyediakan dan memastikan keberfungsian layanan informasi publik yang ramah disabilitas, baik secara daring maupun luring, melalui penyediaan fitur aksesibilitas yang operasional dan pemeliharaan secara berkala.
(5) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Badan Publik terhadap kewajiban pelayanan permintaan informasi publik dengan memastikan respon yang tepat waktu, transparan, serta disertai alasan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Trans Jogja

1) Narasi Umum

Pemda DIY menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, khususnya pada sektor transportasi publik, melalui penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang telah diinisiasi sejak tahun 2008. Implementasi layanan ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme *Buy The Service* (BTS). Dalam skema ini, Pemerintah Daerah melakukan pembelian layanan berbasis kinerja (performance-based contract) kepada pihak operator, guna memastikan standar pelayanan minimal (SPM) tetap terjaga secara optimal.

Hingga tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah terus mengukuhkan komitmen berkelanjutan dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang inklusif. Hal ini dimaksudkan untuk menghadirkan moda transportasi publik yang Aksesibel yakni Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Andal yakni Menjamin kepastian waktu dan keamanan perjalanan; serta

Berkelanjutan yakni Mendukung reduksi emisi serta kemacetan di wilayah perkotaan Yogyakarta.

Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian layanan bagi masyarakat di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Fokus utama operasionalisasi moda ini bertumpu pada integritas cakupan layanan, kepastian rute (trayek), ketepatan jadwal operasional, serta penyediaan sarana pemberhentian permanen yang representatif.

Guna menjamin kualitas layanan, operasionalisasi Trans Jogja sepenuhnya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Hal ini diejawantahkan melalui mekanisme kontrak kinerja dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan DIY dengan PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) selaku operator, yang mencakup aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan kesetaraan.

Secara yuridis, akuntabilitas penyelenggaraan layanan ini didasarkan pada tata kelola yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja. Regulasi ini menjadi landasan operasional dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang tertib, efisien, dan berdaya saing di DIY.

2) Capaian Kinerja Tahun 2025

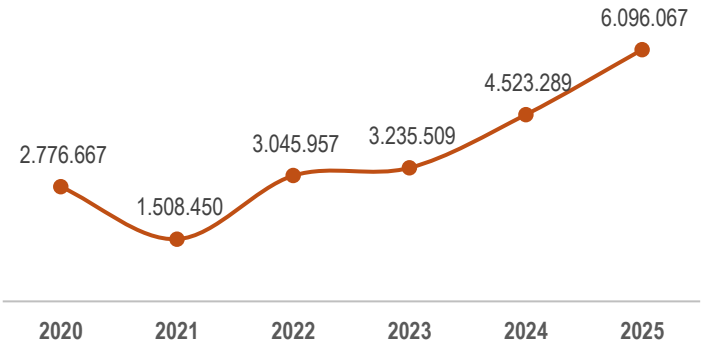
Pada tahun anggaran 2025, Pemda DIY melalui layanan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja telah mengoperasikan sebanyak 95 unit armada yang melayani 19 rute strategis. Secara akumulatif, jangkauan layanan transportasi publik ini telah mencakup 25 kapanewon/kemantren di seluruh Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Capaian ini merupakan wujud nyata perluasan aksesibilitas moda transportasi bagi masyarakat guna mendukung konektivitas wilayah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui Aplikasi Perhitungan Jumlah Penumpang, volume penumpang Trans Jogja pada tahun 2025 terealisasi sebanyak 6.096.067 penumpang. Capaian tersebut menunjukkan performa yang sangat positif karena berhasil mencapai 111,6% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 500.11.24/5281 Tahun 2025 (sebesar 5.459.000 penumpang). Melampauinya target kinerja ini merefleksikan tingginya kepercayaan dan animo masyarakat terhadap layanan angkutan umum yang diselenggarakan oleh Pemda DIY.

Jumlah penumpang Trans Jogja pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan sebesar 34,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini setara dengan peningkatan sebanyak 1.572.778 penumpang, dengan rata-rata okupansi harian mencapai 16.702 penumpang. Peningkatan data tersebut merefleksikan peningkatan efektivitas layanan serta optimalisasi tingkat pemanfaatan moda transportasi publik oleh masyarakat luas di DIY.

Pasca berakhirnya program stimulan Teman Bus dari Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2024, Pemda DIY mengambil langkah strategis melalui penyesuaian kebijakan operasional guna menjamin kesinambungan pelayanan (*service continuity*) angkutan umum perkotaan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan rute-rute eks Teman Bus ke dalam sistem jaringan layanan Trans Jogja.

Sebagai implikasi dari kebijakan integrasi tersebut, Pemerintah Daerah melakukan penambahan alokasi armada Trans Jogja sehingga pada tahun 2025 tercatat sebanyak 116 unit bus yang dioperasikan secara optimal. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat di KPY secara mandiri dan berkelanjutan.



Gambar 7.5. Jumlah Penumpang Trans Jogja 5 Tahun Terakhir

Sumber: Dishub DIY, 2025

Selain itu dalam upaya Akselerasi Transisi Transportasi Ramah Lingkungan, Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan DIY melaksanakan uji coba bus listrik pada tahun 2025 sebagai langkah rintisan menuju transportasi rendah emisi. Program ini diarahkan untuk melakukan kajian mendalam terhadap efisiensi energi dan aspek operasional sebelum diintegrasikan secara lebih luas ke dalam layanan Trans Jogja. Langkah ini merefleksikan komitmen daerah dalam merespons isu perubahan iklim melalui inovasi transportasi berkelanjutan.

3) Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

(1) Permasalahan utama operasional Trans Jogja terletak pada tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi di DIY yang mencapai 4% per tahun, yang memicu kemacetan di titik-titik strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Kondisi ini secara langsung menghambat kinerja armada karena Trans Jogja masih beroperasi di jalur umum (mixed traffic), sehingga efektivitas layanan dan ketepatan waktu menjadi sulit dioptimalkan;

(2) Keterbatasan jumlah armada pada sejumlah koridor mengakibatkan interval kedatangan kendaraan (*headway*) menjadi relatif panjang, sehingga

pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum tercapai secara optimal. Kondisi ini menjadi hambatan dalam meningkatkan daya tarik layanan, yang berisiko pada penurunan minat masyarakat untuk beralih menggunakan moda angkutan umum;

(3) Berakhirnya skema Program Teman Bus dari Kementerian Perhubungan RI pada akhir tahun 2024 menimbulkan tantangan pada kesinambungan layanan di beberapa rute layanan. Tanpa adanya intervensi lebih lanjut, hal ini berisiko menurunkan aksesibilitas warga terhadap angkutan perkotaan yang sebelumnya telah terlayani dengan baik

b. Solusi

(1) Penyelesaian problematika transportasi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta memerlukan orkestrasi kebijakan yang kohesif antara Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Fokus strategis diletakkan pada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui efektivitas manajemen ruang parkir dan penertiban badan jalan, yang diparalelkan dengan penguatan keandalan angkutan umum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan;

(2) Guna mewujudkan sistem transportasi yang lebih responsif, Pemda DIY terus melakukan modernisasi layanan melalui pengembangan fitur aplikasi digital dan penyediaan informasi *real-time* melalui *Public Transport Information System* (PTIS) di halte-halte utama. Upaya ini diintegrasikan dengan kebijakan *rerouting* dan evaluasi koridor secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap rute angkutan umum beroperasi dengan efisiensi maksimal dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara tepat waktu;

(3) Pemda DIY memastikan layanan angkutan umum tetap berjalan pada jalur-jalur eks Teman Bus dengan mengalihkan operasionalnya ke Trans Jogja. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan layanan angkutan perkotaan. Selain itu berbagai inovasi terus dikembangkan, antara lain pembaruan sistem dan fitur baru Trans Jogja yakni *Jogja Travel Pass* (JTP) sebagai sarana integrasi pembelian tiket. Selain itu, telah dilaksanakan *rerouting* trayek Trans Jogja pada jalur eks Teman Bus, yakni jalur 1A, 2A, dan 12, guna memastikan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.



LKPJ Gubernur DIY 2025

Penutup

BAB VIII

Penutup

Menindaklanjuti amanat regulasi baik UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 13 Tahun 2019, maupun Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, Pemda DIY telah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen Pemda DIY dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pembangunan daerah. Laporan ini telah memuat hasil kinerja pelaksanaan APBD DIY Tahun 2025, tahun ketiga RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Hasil kinerja telah tersaji dalam pembahasan mengenai kebijakan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan, keistimewaan DIY, program strategis DIY, dan tugas umum pemerintah. LKPJ ini disusun di samping dalam rangka memenuhi amanat regulasi, juga sebagai bahan evaluasi serta pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah DIY selama tahun 2025.

Dokumen LKPJ Gubernur DIY Tahun 2025 telah merepresentasikan refleksi, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Capaian pembangunan tersebut telah diukur melalui kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas dalam mencapai sasaran pemerintah daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025 memiliki kinerja fisik dan keuangan yang cukup optimal yang didukung dengan kolaborasi lintas sektor.

Pelaksanaan pembangunan DIY tahun 2025 memiliki tema ”Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” sesuai RKPD DIY Tahun 2025. Tema pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 6 prioritas pembangunan yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antarkelas sosial, antarwilayah)
5. Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Capaian Prioritas Pembangunan Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta, Penurunan ketimpangan (antarkelas sosial, antarwilayah) dan Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan tercapai sampai dengan akhir tahun 2025. Adapun kondisi yang masih perlu mendapat perhatian lebih bersama untuk ditingkatkan, adalah Penurunan tingkat kemiskinan dan penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram. Capaian realisasi dari indikator angka kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 10,08% dari angka capaian tersebut sebenarnya Pemda DIY sudah cukup berprestasi dalam kinerjanya dengan hasil yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2024) sebesar 11,40%, namun dibandingkan dengan target tahun 2025 (9,66%) masih kurang 0,42%. serta masih kurang 0,07% untuk bisa mencapai target tahun 2024 (5,1%). Sedangkan terkait dengan Penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram memang masih harus kita upayakan bersama oleh segenap pihak terkait, karena dari target Indeks Indikator *Crime Rate* (2025) sebesar 120,5 kondisi capaian DIY pada Tahun 2025, masih lebih tinggi yaitu pada angka 313.

Atas kondisi tersebut di atas, maka pada prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram perlu terus dioptimalkan pada tahun perencanaan berikutnya. Inovasi dan kolaborasi lintas sektor serta kewilayahan untuk dapat lebih dioptimalkan dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran daerah serta mengatasi keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Sebagai penutup, penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2025 ini merupakan laporan pelaksanaan, dan mohon menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya dalam periode RPJMD DIY 2022-2027.

Atas capaian tahun ketiga RPJMD DIY ini masih perlu ditingkatkan dan diberikan catatan kritis terhadap hambatan dan tantangan yang telah dihadapi serta solusinya. Capaian tersebut dapat menjadi mitigasi untuk mengoptimalkan prioritas pembangunan, tematik pembangunan, kolaborasi dan inovasi agar pencapaian sasaran daerah dapat tercapai lebih baik lagi.

Akhirnya, kinerja ini merupakan ikhtiar publik dalam upaya Pemda DIY untuk “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi,” yang telah tercantum dalam RPJMD DIY 2022-2027.

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Telp. 0274-562811 (Psw 1165, 1166)
Pos-el: rotapem@jogjaprov.go.id
Laman: www.birotapem.jogjaprov.go.id

2026